35.000 MW UNTUK INDONESIA

A 35,000 MW POWER PLANT PROGRAM FOR INDONESIA

PT PLN (Persero)
Electricity for a Better Life

LAPORAN TAHUNAN **2015** ANNUAL REPORT

35.000 MW UNTUK INDONESIA

A 35,000 MW POWER PLANT PROGRAM FOR INDONESIA

- Menerangi Seluruh Pelosok Negeri
- Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- Mensejahterakan Seluruh Anak Negeri

Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara, oleh karenanya, kini dan seterusnya PLN bertekad memastikan seluruh kawasan di tanah air mendapatkan pasokan listrik yang memadai.

- Illuminating all Remote Areas in Indonesia
- Supporting Economic Growth
- Enhancing The Welfare Of All Indonesian People

A sufficient electricity supply is one of the primary infrastructures that highly contributes to support the nation's economic growth, hence, starting from now and in the future, PLN has decided to ensure all Indonesian regions receiving sufficient electricity supply.

Tema ini kami pilih untuk menegaskan bahwa pembangunan ketenagalistrikan merupakan satu upaya besar, suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar berhasil dan pasti akan memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Manfaat yang mengiringi seluruh pelaksanaan program tersebut sangat luas, meliputi: pembangunan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan dan harkat masyarakat Indonesia.

Dilandasi komitmen kuat dari seluruh jajaran Perusahaan dan para pemangku kepentingan, keyakinan akan kemampuan seluruh insan perusahaan serta dengan dukungan pemerintah dan seluruh pihak terkait, PLN bertekad memenuhi kebutuhan tersebut secara memadai, mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan.

PLN bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu 5 tahun yang dimulai dari tahun 2015, bertekad mewujudkan ketersediaan listrik dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000 MW termasuk transmisi dan distribusi. Penambahan kapasitas daya tersebut merupakan program besar yang akan terwujud melalui kerja keras bersama dengan diiringi sinergi seluruh pihak dan seluruh kemampuan terbaik yang dimiliki. Program tersebut merupakan keniscayaan dan suatu keharusan bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, yakni kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kami meyakini, bahwa setiap energi listrik yang berhasil dipasok akan memberi secercah harapan bagi percepatan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Setiap kilo meter sirkuit (kms) dari jaringan transmisi dan distribusi akan membentangkan peluang kerja bagi putra-putri bangsa. Setiap putaran generator pembangkit akan menjadi cikal bakal percepatan roda pertumbuhan perekonomian menuju meningkatnya martabat bangsa Indonesia. Oleh karenanya, seluruh jajaran Perseroan bertekad bekerja keras dalam mensukseskan program “35.000 MW untuk Indonesia”.

We have chosen this theme to state that electricity development is one great effort which must be conducted persistently to achieve success and provide the greatest benefit to all shareholders in Indonesia. The benefits obtained from the implementation of this program are very wide, and include economic benefits as well as enhancement of welfare and dignity of all Indonesian people.

Based on a strong commitment of all Company levels and shareholders, conviction of all personnel’s capability, and support from the Government and all related parties, PLN is determined to sufficiently meet all needs in order to advance and equalize Indonesia’s position with other countries in the region.

PLN, together with all shareholders, for the next five-year period starting from 2015, is determined to supply electricity by adding 35,000 MW of capacity including the transmission and distribution. It is an immense program that can be achieved by working together, along with a synergy of all organization levels and parties, and the commitment of all personnel in giving their utmost. This program is an essential one, and becomes a requirement in the achievement of national development, which is the welfare of the Indonesian people.

We believe that, whenever we succeed in supplying electricity, it will give hope towards the acceleration of economic growth. Every kilometer of transmission and distribution lines will provide work opportunities to Indonesian people. Every rotation of a generator unit will be the forerunner to the acceleration of economic growth aimed at enhancing the dignity of Indonesian people. Hence, all Company levels have the determination to ensure the success of the “35,000 MW Power Plant Program for Indonesia”.

SASARAN
TARGET

MENERANGI SELURUH PELOSOK NEGERI

ILLUMINATING ALL REMOTE AREAS IN INDONESIA

1

97,4% masyarakat Indonesia pada tahun 2019 harus telah memperoleh sambungan listrik.

Hingga akhir tahun 2015 rasio elektrifikasi adalah 88,3%. Pada akhir tahun 2019 target rasio elektrifikasi adalah sebesar 97,4%.

In 2019, 97.4% of all Indonesian people will be connected to the electricity system.

Up to the end of 2015, the electrification ratio reached 88.3%. In the end of 2019, the electrification ratio target will be 97.4%.

RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019

97,4%

2019 ELECTRIFICATION RATIO WILL BE 97.4%

2

Seluruh kawasan desa terpencil di Indonesia pada tahun 2019 telah teraliri listrik.

All remote villages in Indonesia in 2019 will be electrified.

3

Seluruh pulau terluar yang merupakan garda terdepan negara kepulauan Indonesia pada tahun 2019 akan teraliri listrik.

All outermost islands which are the front line of Indonesian archipelago in 2019 will be electrified.

SASARAN
TARGET

MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

SUPPORTING ECONOMIC GROWTH

1

Kecukupan pasokan listrik harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 5-7% maka pertumbuhan pasokan listrik ditargetkan sebesar 7,5-10,5% per tahun.

Sufficient electricity supply must be the main driver of economic growth.

With a 5-7% annual target of economic growth, the electricity supply is targeted to grow at 7.5-10.5% per year.

Pertumbuhan Pasokan Listrik Ditargetkan

7,5-10,5%

THE TARGETED ELECTRICITY GROWTH 7.5-10.5% PER YEAR

2

Pelaksanaan pembangunan sarana ketenagalistrikan mampu mendorong kebangkitan industri manufaktur di dalam negeri.

Minimal TKDN 40% - sebagai sasaran untuk mendorong pertumbuhan industri ketenagalistrikan

The implementation of electricity infrastructure development can promote the resurgence of local manufacturing industries.

The TKDN (Domestic Component Level) is targeted at a minimum of 40%, to boost electricity industry growth.

3

Kecukupan infrastruktur listrik meningkatkan daya saing dan meningkatkan investasi asing dan domestik langsung.

Sufficient electricity infrastructure increases competitiveness as well as foreign and local direct investment.

SASARAN
TARGET

MENSEJAHTERAKAN SELURUH ANAK NEGERI

ENHANCING THE WELFARE OF ALL INDONESIAN PEOPLE

1

MENDORONG PENINGKATAN LAPANGAN KERJA

Realisasi pembangunan proyek 35.000 MW mampu menyerap tenaga kerja lokal langsung minimal 650.000 pekerja dan menyediakan kesempatan kerja tidak langsung hingga 3 juta orang pekerja.

ENCOURAGING THE INCREASE IN EMPLOYMENT

The realization of the 35,000 MW development project can engage local direct labor at a minimum of 650,000 persons and provide indirect employment to a reach of 3 million persons.

2

Ketersediaan dan kecukupan pasokan listrik yang merata untuk seluruh masyarakat Indonesia memberi peluang bagi seluruh anak negeri untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik.

Equal availability and sufficiency of electricity supply for all Indonesian people will provide opportunities to increase quality of life and develop a better future.

3

Pembangunan proyek 35.000MW yang tersebar di seluruh Indonesia, merefleksikan upaya pemerataan pembangunan dan mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

The 35,000 MW project is developed throughout Indonesia, indicating an effort to equalize the development and supporting the enhancement of all Indonesian people's welfare.

STRATEGI PENCAPAIAN
ACHIEVEMENT STRATEGY

1. Dengan berpedoman dan menerapkan butir-butir ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tertanggal 16 Januari 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) menegaskan dukungan Pemerintah Pusat kepada PLN dalam bentuk: penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Guided by and implementing clauses in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Num. 4 of 2016 dated 16 January 2016 on Acceleration of Electricity Infrastructure Development. The Government's supports of PT PLN are: assurance, acceleration of permits and non-permit issuances, provision of primary energy, spatial planning and land provision, settlement of obstacles and ongoing legal issues.

2. Menjalin koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sebagai penerapan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016.

Dalam rangka memitigasi seluruh aspek-aspek utama yang sebelumnya menjadi kendala realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

- Penyediaan Lahan: Mempercepat ketersediaan lahan dengan berpedoman pada dan menerapkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 terkait pembebasan lahan.
- Perizinan : Mempercepat dan menyederhanakan proses melalui pemanfaatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang dikoordinir oleh BKPM.

Establishing inter sectoral coordination and cooperation as an implementation of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Num. 4 of 2016.

The main aspects, which are the obstacles in implementing electricity infrastructure development and must be mitigated by the Company, are as follows:

- Land Provision: Accelerating the process of land provision under and based on the implementation of Law Num. 2 of 2012 on Land Acquisition.
- Permit: Accelerating and Simplifying the process of obtaining permission through the utilization of One Stop Service coordinated by the BKPM (Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia).

3. Percepatan Pengadaan dan Negosiasi Harga Pembelian Tenaga Listrik dari *Independent Power Producer* (IPP), melalui mekanisme Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dengan berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015.

Acceleration of Procurement & Power Purchase Negotiation with Independent Power Producers (IPP), Through the mechanism of Direct Selection and Appointment as mentioned on the Ministry of Energy and Mineral Regulation Num. 3 of 2015.

4. Perbaikan kualitas manajemen proyek melalui penerapan aplikasi *Project Management Office*.

Improvement of projects management quality through the implementation of Project Management Office Application.

5. Peningkatan kinerja organisasi melalui restrukturisasi organisasi dan perbaikan proses bisnis internal.

Organization performance improvement by restructuring the organization and improving internal business.

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTATION

2015
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM
2015 AS THE STARTING POINT OF PROGRAM IMPLEMENTATION

PLN telah mengidentifikasi, dan sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2015 - 2024, menetapkan pembangunan pembangkit listrik dengan total daya 42.940 MW dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar 7.412 MW yang sedang dalam tahap konstruksi dan merupakan kelanjutan *(carry over)* dari tahun sebelumnya. **Selanjutnya program ini disebut sebagai program 7.000 MW**.
b. Sebesar 35.528 MW yang sedang dalam proses perencanaan dan pengadaan. **Selanjutnya program ini disebut dengan program 35.000 MW yang merupakan misi utama perusahaan untuk mencukupi kebutuhan listrik Indonesia hingga tahun 2019**.

PLN has identified, in accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 0074.K/21/MEM/2015 on the Approval of the Electricity Power Supply Business Plan of PT PLN (Persero) in the Years 2015 to 2024, and has determined the development of power supplies with a total capacity of 42,940 MW. The details are as follows:

a. As many as 7,412 MW capacity is still in the construction phase and is a continuation of the previous years project. **Further this program is named as the 7,000 MW program**.
b. As many as 35,528 MW capacity is still in the planning and procurement process. **Further this program is called the 35,000 MW program, and has become the Company's primary mission to fulfill Indonesia's electricity needs until 2019**.

17.336 MW PPA/EPC

Ditandatangani
Signed

Pada tahun 2015, PLN telah menandatangani PPA dengan pengembang listrik swasta dengan total daya sebesar 14.454 MW dan kontrak EPC dengan total daya 2.883 MW.
Total capaian 17.336 MW

In 2015, PLN signed PPA with Independent Power Producer as 14,454 MW and EPC contracts as 2,883 MW. The total capacity signed was 17,336 MW.

Pada tahun 2015, sebagai tahun resmi dimulainya program, PLN telah mencatatkan berbagai kemajuan dan beberapa prestasi, mencakup:

- Menandatangani *Power Purchase Agreement* dengan pengembang listrik swasta dengan total daya 14.454 MW dan Kontrak EPC dengan total daya sebesar 2.883 MW sehingga total capaian proyek yang sudah PPA dan EPC sebesar 17.336 MW sebagai bagian dari realisasi Program 35.000 MW.
- Menyelesaikan program revaluasi aset Perseroan dalam rangka memperbaiki pemenuhan ketentuan pinjaman kreditur dan menambah kemampuan penggalangan dana.
- Menyelesaikan pembangunan pembangkit, dengan tambahan kapasitas daya sebesar 2.053 MW.
- Menambah jaringan transmisi sepanjang 1.773 kms.
- Menambah 72 gardu induk, dengan daya 6.179 MVA.
- Mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 12,37% menjadi senilai Rp217,35 triliun.
- Mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,58 triliun, naik 11,29% dari tahun sebelumnya.
- Membukukan Total Penghasilan Komprehensif tahun berjalan sebesar Rp658,32 triliun, naik 6.263% dari tahun sebelumnya.
- Mencatatkan kenaikan total ekuitas sebesar 353,2% menjadi sebesar Rp848,22 triliun.

In 2015, which was the official year of the program's commencement, PLN recorded various progress and achievements, as follows:

- Signing the Power Purchase Agreement (PPA) with several private electricity developers with a total capacity of 14,454 MW and the Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts with a total capacity of 2,883 MW, which makes 17,336 MW in total, coming from the projects' PPA and EPC which have been signed. This becomes part of the 35,000 MW program realization.
- Completing the Company's asset revaluation program for the sake of improving the compliance to creditor's loan requirements and enhancing the capability of fund raising.
- Completing the development of power plants, with an additional capacity of 2,053 MW.
- Adding the transmission network with a length of 1,773 kms.
- Adding 72 substations with 6,179 MVA capacity.
- The Company's 2015 operating income increased by 12.37%, amounting to Rp217.35 trillion.
- The Company's 2015 net profit was Rp15.58 trillion, increased by 11.29% from the previous year.
- Recorded Total Comprehensive Income for the year amounting to Rp658.32 trillion, increased by 6263% from the previous year.
- Recorded an 353.2% increase in total equity to Rp848.22 trillion.

DAFTAR ISI
CONTENTS

1 PROGRAM 35.000 MW UNTUK INDONESIA
A 35,000 MW POWER PLANT PROGRAM FOR INDONESIA

2 SASARAN TARGET

2 Menerangi Seluruh Pelosok Negeri
Illuminating all Remote Areas in Indonesia

4 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Supporting Economic Growth

6 Mensejahterakan Seluruh Anak Negeri
Enhancing the Welfare of all Indonesian People

8 STRATEGI PENCAPAIAN
ACHIEVEMENT STRATEGY

10 IMPLEMENTASI IMPLEMENTATION

16 IKHTISAR UTAMA HIGHLIGHTS

16 IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHT

18 IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHT

22 RANGKAIAN PERISTIWA PENTING 2015
2015 EVENT HIGHLIGHTS

29 PENGHARGAAN & SERTIFIKASI
AWARD & CERTIFICATION

32 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

34 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

36 Kondisi Usaha
Business Conditions

37 Penilaian Kinerja Direksi
Assessment of the Board of Directors' Performance

40 Tingkat Kesehatan
Company Soundness/Health Level

41 Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Penasehatan Kepada Direksi
Implementation of Supervisory and Advisory to the Board of Directors

42 Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report

43 Prospek Usaha Business Prospects

44 Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Changes to the Board of Commissioners

45 Penutup Closing

46 LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

48 Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW
35,000 MW Power Plant Development Program

50 Strategi dan Kebijakan Strategis yang Dijalankan
Implemented Strategy and Strategic Policies

52 Strategi Perbaikan Kinerja Operasional
Strategy for Operational Performance Improvements

54 Langkah -Langkah Strategis yang Dijalankan
Strategic Steps Taken

54 Kinerja Operasional Operational Performance

55 Aspek Pemasaran Marketing Aspect

59 Kinerja Keuangan Financial Performance

62 Kebijakan Tarif Tariff Policy

62 Menyiapkan SDM Cerdas dan Berintegritas untuk Masa Depan
Preparing Smart Human Resources With Integrity for the Future

63 Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Quality Improvement of Good Corporate Governance Implementation

64 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

66 Kendala-Kendala Challenges

67 Perubahan Komposisi Direksi
The Board of Directors Composition Change

67 Prospek dan Strategi 2016
2016 Prospect and Strategy

68 Penutup Closing

70 SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2015 PT PLN (PERSERO)
STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS CONCERNING RESPONSIBILITY UPON THE 2015 ANNUAL REPORT OF PT PLN (PERSERO)

73 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

74 Nama dan Alamat
Name and Address

75 Sekilas Tentang PLN
PLN in Brief

76 Tonggak Sejarah
Milestone

78 Bidang Usaha
Line of Business

80 Visi, Misi Moto dan Nilai-nilai Perusahaan
Vision, Mission, Motto and Values of The Company

82 Kepemilikan Saham
Shareholders Ownership

84 Struktur Group Usaha dan Entitas Anak Usaha
Business Structure and Subsidiary

86 Segmen Operasi Regional
Regional Operating Segments

90 Struktur Organisasi
Organizational Structure

92 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Supporting Institutions and Professions in Capital Market

95 Akses Informasi
Access to Information

99 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM

100 Arah Pengembangan Jangka Panjang
Long - Term Development Roadmap

117 Pengembangan Organisasi
Organizational Development

125 Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit
Development and Management of Generating Station

149 Pengembangan Sistem Transmisi dan Distribusi
Development of Transmission and Distribution System

156 Pendanaan Fundings

171 PENGELOLAAN OPERASIONAL
OPERATIONAL MANAGEMENT

164 Strategi Usaha di Tahun 2015
2015 Business Strategy

180 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Increasing Human Resources Competency

202 Pengembangan Teknologi Sistem Informasi
Information System Technology Development

214 Kerja Sama dengan Berbagai Pihak
Colaboration with Other Parties

227 PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

228 TINJAUAN EKONOMI DAN PROSPEK USAHA
ECONOMIC REVIEW AND BUSINESS PROSPECT

229 Tinjauan Ekonomi Economic Review

230 Prospek Usaha Business Prospect

233 Sekilas Transformasi Kinerja PLN
PLN's Performance Transformation Overview

235 Tinjauan Kinerja Operasional Menurut Segmen Usaha
Operational Performance Review Based on Business Segments

236 Kinerja Menurut Segmen Geografis
Performance Review Based On Regional Business Segments

236 Prioritas Program Kerja di Tahun 2015
2015 Priority Work Programs

238 Pemasaran Marketing

243 Produksi dan Pembelian Tenaga Listrik
Production and Purchase of Electricity

248 Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Cost of Production

254 Tarif Tenaga Listrik Electricity Tariff

258 Subsidi Listrik Electricity Subsidy

260 Susut Jaringan Network Losses

263 Tingkat Kinerja Perusahaan
Company Performance Level

264 TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

264 Pengantar Tinjauan Keuangan
Financial Review Introduction

308
Realisasi Belanja Modal
Capital Expenditure Realization

268 Tinjauan Keuangan
Financial Review

273 Ringkasan Kinerja Keuangan
Financial Performance Summary

273 Ikhtisar Posisi Keuangan Summary of Financial Position

274 Aset Assets

274 Aset Tidak Lancar Non Current Assets

275 Aset Tetap Property Plant and Equipment

277 Aset Lancar Current Assets

279 Piutang subsidi listrik Electricity Subsidy Receivables

282 Liabilitas Liabilities

283 Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities

283 Utang Sewa Pembiayaan Debt Finance Leases

285 Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities

287 Ekuitas Equity

288 Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy

289 Modal Kerja Bersih Net Working Capital

290 Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan
Analysis of The Company's Comprehensive Income Statement

291 Pendapatan Usaha Revenues

293 Beban Usaha Operating Expenses

297 Laba Usaha Sebelum Subsidi
Operating Income Before Subsidies

298 Laba (Rugi) Usaha Setelah Subsidi
Operating Profit (Loss) After Subsidies

299 Beban Lain-Lain Other Expenses

299 Laba Sebelum Selisih Kurs dan Pajak
Profit Before Foreign Exchange Discrepancies and Tax
301 Rugi Selisih Kurs - Bersih Foreign Exchange Losses – Net
301 Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax
301 Laba Tahun Berjalan Profit For The Current Year
301 Penghasilan Komprehensif Lain dan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Other Comprehensive Revenues and Total Comprehensive Revenue For The Current Year
301 Laba Bersih dan Laba Persaham Tahun Berjalan
Net Profit and Earnings per Share for the Current Year
302 EBITDA dan EBITDA Margin EBITDA and EBITDA Margin
302 Arus Kas Cash Flow
303 Kemampuan Membayar Hutang Ability to Pay Debts
304 Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios
306 Ikatan Material untuk Barang Modal
Material Commitment on Capital Goods
308 Realisasi Belanja Modal Capital Expenditure Realization
309 Realisasi Dibandingkan Target
Achievements Compared to Targets
309 Target-Target Kuantitatif pada Tahun Mendatang
Quantitative Targets For The Coming Year
310 Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan/Manajemen
Employee / Manager Share Ownership Program
310 Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Efek Lainnya
Use of Funds Raised from Bonds and Other Shares
311 Informasi Keuangan Lainnya
Other Financial Information
312 Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
312 Transaksi Lindung Nilai Hedging Transactions
313 Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies
316 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru
Adoption of New Financial Accounting Standards
317 Penyajian Kembali Restatement
319 Transaksi Benturan Kepentingan
Transactions with Conflict of Interest
319 Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi
Transactions with Related Parties
321 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
Subsequent Events
321 Perubahan Peraturan Changes In Regulations
323 Informasi Segmen Segment Information
324 Kinerja Anak Perusahaan Subsidiaries Performance
325 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

327 PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
328 LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE REPORT
328 Tujuan Objective
329 Komitmen Commitment
330 Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata Kelola
Guidelines, Structure and Mechanism of Governance

333
Implementasi Prinsip Dasar dan Praktek Terbaik GCG
Implementation of Basic Principles and Best Practice of GCG

332 Kebijakan Pengelolaan Perusahaan
General Policy of The Company
333 Implementasi Prinsip Dasar dan Praktek Terbaik GCG
Implementation of Basic Principles and Best Practice Of GCG
344 Penilaian Penerapan GCG GCG Application Assessment
350 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
356 Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Working Relationship Management of The Board of Commissioners and The Board of Directors
361 Dewan Komisaris Board of Commissioners
386 Direksi Board of Directors
408 Komite dan Laporan Komite Dewan Komisaris
Committees and Board of Commissioners ' Committee Reports
413 Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit
Brief Report on The Audit Committee's Activities
417 Komite Manajemen Risiko (KMR)
Risk Management Committee (RMC)
425 Kebijakan Suksesi Direksi
Board of Directors Succession Policy
426 Komite-Komite Direksi Board of Directors Committees
429 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
434 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO
RISK AND RISK MANAGEMENT
435 Tujuan Penerapan Manajemen Risiko
Risk Management Implementation Goals
436 Sistem Pengelolaan Risiko
Risk Management System
436 Struktur Manajemen Risiko dan Standar Proses Manajemen Risiko
Risk Management Structure and Risk Management Standard Process
437 Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
Evaluation of Risk Management System Effectiveness

438 Pelaksanaan *Enterprise Risk Management*
Implementation of Enterprise Risk Management

439 Profil Risiko yang Dihadapi Perusahaan 2015
2015 Corporate Risk Profile and Management

449 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Supervisory Unit (SPI)

449 Tugas Pokok Kepala Satuan Pengawasan Intern
Main Tasks of The Head of Internal Supervisory Unit

450 Struktur Kedudukan Organisasi Satuan Pengawasan Intern
Organization Structure of Internal Supervisory Unit

451 Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawas Intern
Activities of The Internal Supervisory Unit

453 Pemeriksaan Khusus Tahun 2015
Special Audit of 2015

454 Audit Teknologi Informasi Tahun 2015
2015 Information Technology Audit

454 Penugasan Khusus 2015
2015 Special Assignments

455 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
Follow-up of Supreme Audit Board RI Audit Findings

456 Akuntan Perseroan Public Accounting Firm (PAF)

457 Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
Internal Control and Audit System

458 *Whistleblowing System*

458 Tujuan Penerapan *Whistleblowing System*
Whistleblowing System Objectives

459 Mekanisme Penyampaian Pelaporan Reporting Mechanism

459 Pengelola Whistleblowing System
Management of The Whistle Blowing System

460 Pelaporan melalui *Whistleblowing* selama Tahun 2015 dan Tindakan yang Diambil
Management of Whistle Blowing Complaints During 2015 And Actions Taken

460 Perkara Hukum yang Melibatkan Perseroan
Litigations Involving The Company

468 Kode Etik/Pedoman Perilaku Code of Conduct

469 Penyebar Luasan Kode Etik/Pedoman Perilaku
Dissemination of the Code of Ethics / Code of Conduct

469 Pokok-Pokok Kode Etik / Pedoman Perilaku
Fundamentals of The Code Of Ethics / Code Of Conduct

472 Pedoman Perilaku Berlaku Bagi Seluruh Insan PLN
Code of Conduct Applied for All PLN Individuals

472 Sanksi Pelanggaran Kode Etik / Pedoman Perilaku
Sanctions for Violations of The Code of Ethics / Code of Conduct

473 Jumlah Pelaku Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan
Number of Offenders and Sanctions Taken

473 Budaya Perusahaan Company Culture

477 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

478 Maksud dan Tujuan Purpose and Objective

478 Visi dan Misi Kegiatan CSR PLN
PLN CSR Vision and Mission

479 Ruang Lingkup Kegiatan dan Sumber Dana Kegiatan CSR
Scope and Funding of CSR Activities

489
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety

481 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Dan Perubahan Iklim
Environmental, Electrical Safety (K2) and Climate Change Responsibility

489 Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety

498 Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social and Community Development

498 Kebijakan Policies

505 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan
Responsibility To Customers

511 BIODATA PERSEROAN
CORPORATE INFORMATION

512 Profil Dewan Komisaris
Profile of The Board of Commissioners

517 Profile Direksi
Profile of The Board of Directors

523 Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary and Corporate Secretary

524 Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Members

526 Anggota Komite Audit Audit Committee Members

528 Anggota Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Members

529 Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Supervisory Unit

530 Daftar Unit Bisnis dan Alamat
Address and Business Unit

537 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

723 REFERENSI KETENTUAN OJK
CROSS REFERENCE TO OJK RULE

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHT

Dalam Rp Miliar				In Rp billion
IKHTISAR POSISI KEUANGAN	**2015**	**2014*)**	**2013 *)**	**OVERVIEW OF FINANCIAL POSITION**
ASET TIDAK LANCAR	1.148.011	454.097	438.815	NON-CURRENT ASSETS
ASET LANCAR	79.345	85.424	84.837	CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	1.227.355	539.521	523.652	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PANJANG	262.132	266.818	261.853	NON-CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK	117.004	85.529	87.574	CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	379.136	352.348	349.427	TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS	848.219	187.174	174.225	TOTAL EQUITY
MODAL KERJA BERSIH	(37.660)	(105)	(2.737)	NET WORKING CAPITAL
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA	3.174	2.573	2.029	INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF				**OVERVIEW OF STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**
PENDAPATAN USAHA	217.347	193.418	160.639	REVENUES
Penjualan Tenaga Listrik	209.845	186.634	153.486	Sales of Electricity
Subsidi Listrik Pemerintah	56.553	99.303	101.208	Government's Electricity Subsidy
LABA USAHA	27.637	27.410	29.206	OPERATING INCOME
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(3.064)	18.948	(11.037)	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT / (BEBAN) PAJAK	18.649	(4.943)	2.624	TAX BENEFIT / (EXPENSE)
LABA BERSIH	15.585	14.004	(8.412)	NETT PROFIT
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada:				Total Income for The Year attributable to:
Pemilik Entitas Induk	15.569	13.989	(8.409)	Owners of The Company
Kepentingan Non Pengendali	16	15	(4)	Non Controlling Interest
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	658.318	10.350	(16.249)	INCOME FOR THE YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada:				Total Comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	658.302	10.335	(16.245)	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	16	15	(4)	Non Controlling Interest
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	337.017	302.807	(182.013)	BASIC EARNINGS PER SHARE (In Full Rupiah Amount)

RASIO-RASIO (DALAM PERSEN)				**RATIOS (IN PERCENTAGE)**
RASIO LIKUIDITAS	**2015**	**2014*)**	**2013 *)**	**LIQUIDITY RATIO**
Rasio Lancar	67,81	99,88	96,87	Current Ratio
Rasio Kas	20,27	31,82	29,26	Cash Ratio
RASIO SOLVABILITAS				**SOLVENCY RATIO**
DSCR *Without* ISAK	1,52	1,56	2,10	DSCR Without ISAK
CICR *Without* ISAK	3,00	3,10	3,40	CICR Without ISAK
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset	30,89	65,31	66,73	Debt to Asset Ratio
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas	44,70	188,25	200,56	Debt to Equity Ratio
RASIO PROFITABILITAS				**PROFITABILITY RATIO**
Margin Laba Kotor	13,17	14,69	10,50	Gross Profit Margin
Margin Laba Bersih	7,43	7,50	(3,20)	Net Profit Margin
RASIO RENTABILITAS				**RENTABILITY RATIO**
Rasio Laba Terhadap Ekuitas	1,84	7,48	(4,80)	Return on Equity (ROE)
Rasio Laba Terhadap Aset	1,27	2,60	(1,60)	Return on Assets (ROA)
RASIO OPERASIONAL				**OPERATIONAL RATIO**
Perputaran Piutang (Hari)	10,66	15,99	33,50	Accounts Receivable Turn Over (Day)
Perputaran Utang Usaha (Hari)	48,15	53,51	61,50	Collection Period (Day)
Perputaran Aset Tetap	0,27	0,14	1,70	Property, plant and equipment Turn Over (Times)
Perputaran Persediaan	1,37	0,92	1,15	Inventory Turn Over (Times)

Pertumbuhan Total Aset (Rp triliun)
The Growth of Total Assets (Rp trillion)

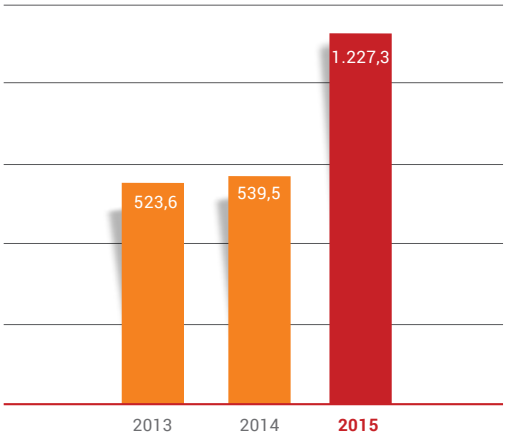

Pertumbuhan Aset Tetap (Rp triliun)
The Growth of Property, Plant and Equipment (Rp trillion)

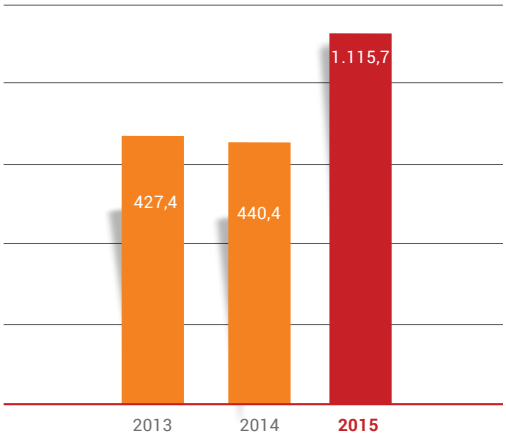

EBITDA (Rp triliun) & EBITDA Margin (%)
EBITDA (Rp trillion) & EBITDA Margin (%)

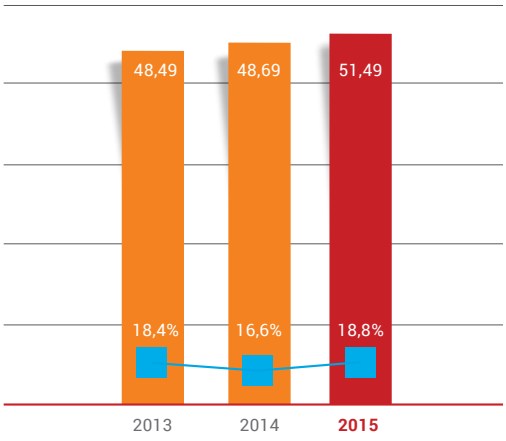

Pendapatan (Rp triliun)
Revenues (Rp trillion)

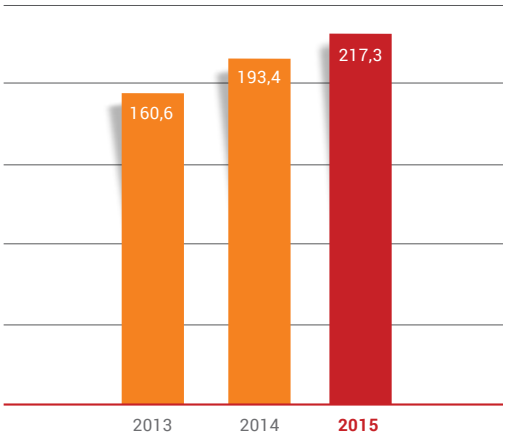

Penjualan Listrik (Rp triliun)
Sales of Electricity (Rp trillion)

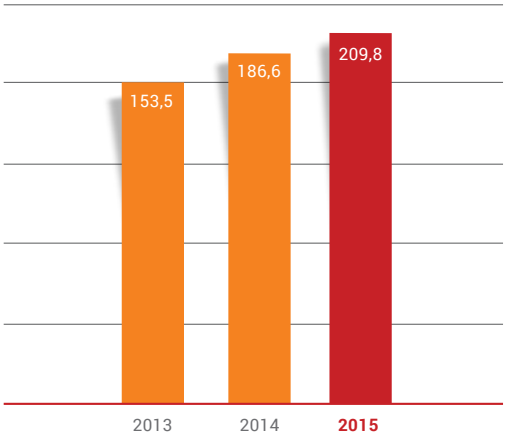

Laba Bersih (Rp triliun)
Net Profit (Rp trillion)

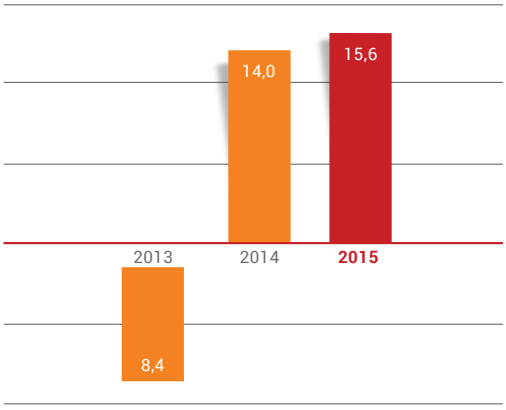

IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHT

Keterangan	Unit	2013	2014	2015	Description
Daya Terpasang*	MW	46.104	51.620	52.889	**Installed Capacity**
Penjualan	GWh	187.541	198.602	202.846	Sales
Produksi					**Production**
Produksi Sendiri	GWh	144.220	152.853	156.631	Own Production
Sewa Diesel	GWh	19.746	22.443	19.841	Diesel Rent
Pembelian	GWh	52.223	53.257	57.510	Purchases
Total Produksi	GWh	216.189	228.553	233.982	Total Production
Susut Jaringan	Persen Percentage	9,91%	9,71%	9,77%	Network Losses
Mutu					**QUALITY**
SAIDI	jam/pelanggan/ tahun hours/customer/ time	5,76	5,81	5,31	SAIDI
SAIFI	kali/pelanggan/ tahun times/customer/ year	7,26	5,58	5,97	SAIFI
Jumlah Pelanggan	Ribu pelanggan in thousands	53.996	57.493	61.167	**Number Of Customers**
Instalasi					**Installation**
Daya Tersambung	MVA	93.095	100.031	106.582	Installed Capacity
Panjang Transmisi	kms	39.395	39.910	41.683	Transmission Length
Kapasitas Gardu Induk	MVA	81.435	86.472	92.651	Substation Capacity
Jumlah Karyawan**	**Orang persons**	**47.833**	**48.068**	**47.594**	**Number of Employees**

*) Termasuk IPP dan Sewa Including IPP and Rent
**) Termasuk jumlah karyawan anak Perusahaan Including subsidiaries' employees

Daya Terpasang (MW)
Installed Capacity (MW)

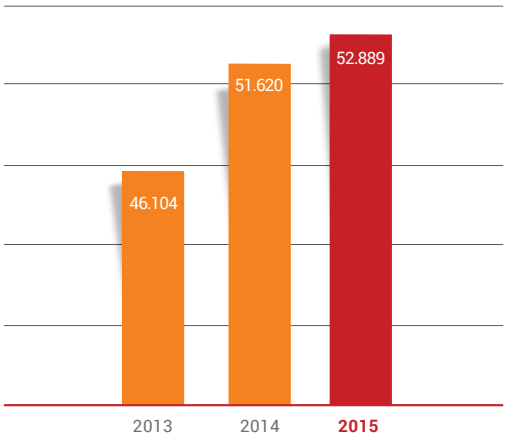

Penjualan (TWh)
Sales (TWh)

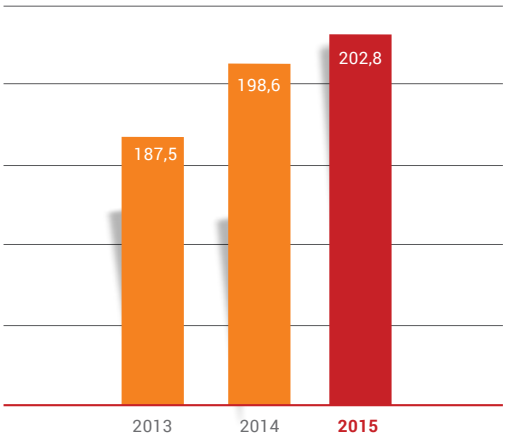

Total Produksi (TWh)
Total Production (TWh)

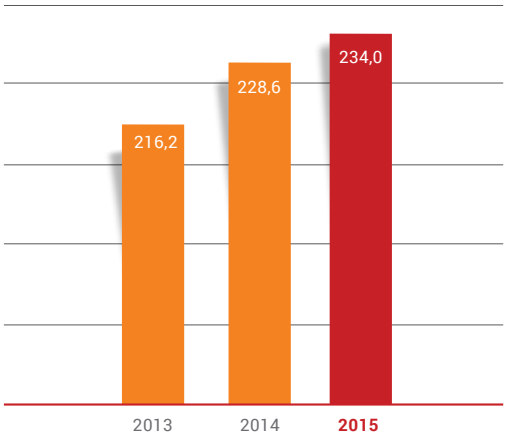

Susut Jaringan (%)
Network Losses (%)

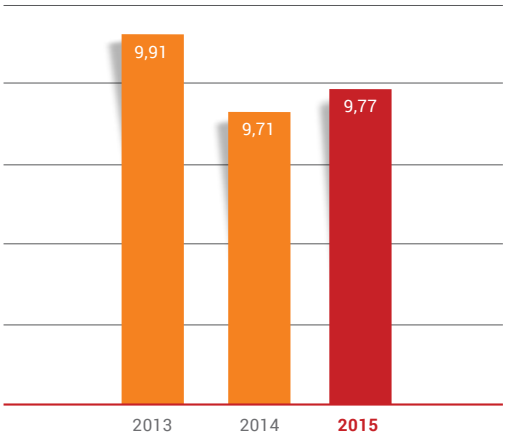

SAIDI (Jam/Pelanggan/Tahun)
SAIDI (Hours/Customer/ Year)

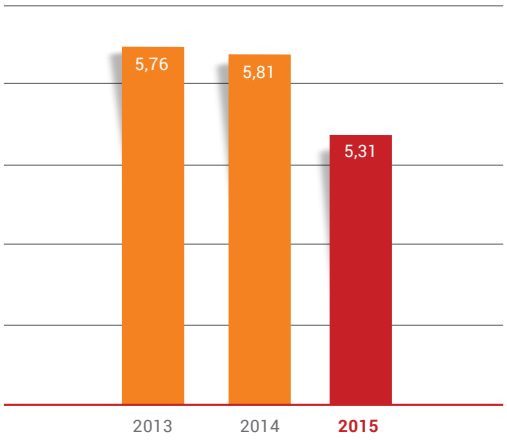

SAIFI (Kali/Pelanggan/Tahun)
SAIFI (Times/Customer/Year)

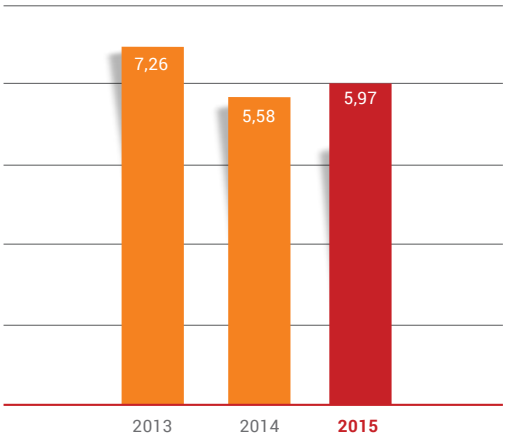

Daftar Efek Domestik yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo

List of Domestic Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

Kode Referensi Ref. Code		Plafon Plafond	Penandatanganan Pinjaman Loan Signing	Tenor (Tahun Years)	Jatuh Tempo Maturity Date	Fixed Rate/Fee Ijarah	Peringkat Rating	Lembaga Rating Rating Agency	Tempat *Listing* Listing Location
PLN VIII 2006 SERI A	IDR	1.335.100.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	10	21 Juni 2016 June 21, 2016	13,60%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN VIII 2006 SERI B	IDR	865.000.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	15	21 Juni 2021 June 21, 2021	13,75%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SYARIAH IJARAH I	IDR	200.000.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	10	21 Juni 2016 June 21, 2016	13,60%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN IX 2007 SERI A	IDR	1.500.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	10	10 Juli 2007 July 10, 2007	10,40%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN IX 2007 SERI B	IDR	1.200.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	15	10 Juli 2022 July 10, 2022	10,90%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SYARIAH IJARAH II	IDR	300.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	10	10 Juli 2017 July 10, 2017	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN XI 2010 SERI A	IDR	920.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	7	12 Januari 2017 January 12, 2017	11,95%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN XI 2010 SERI B	IDR	1.783.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	10	12 Januari 2020 January 12, 2020	12,55%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SUKUK IJARAH IV SERI A	IDR	130.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	7	12 Januari 2017 January 12, 2017	11,95%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN SUKUK IJARAH IV SERI B	IDR	167.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	10	12 Januari 2020 January 12, 2020	12,55%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN XII 2010 SERI B	IDR	1.855.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	12	8 Juli 2022 July 8, 2022	10,40%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SUKUK IJARAH V SERI B	IDR	340.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	12	8 Juli 2022 July 8, 2022	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A	IDR	182.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	7	5 Juli 2020 July 8, 2020	8,00%	idAAA	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B	IDR	697.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	10	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,25%	idAAA	Pefindo	IDX
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I	IDR	121.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	7	5 Juli 2020 July 8, 2020	8,00%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	593.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	5	10 Desember 2018 December 10, 2018	9,00%	idAAA	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	651.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	10	10 Desember 2023 December 10, 2023	9,60%	idAAA	Pefindo	IDX
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	321.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	5	10 Desember 2018 December 10, 2018	9,00%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	108.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	10	10 Desember 2023 December 10, 2023	9,60%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX

Daftar Efek Internasional yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo

List of International Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

Uraian Description	**Jangka Waktu** Time Frame	**Mata Uang** Currencies	**Nominal Obligasi** Value	**Jatuh Tempo** Maturity Date	**Kupon** Cuopon	**Peringkat** Rating			
						Standard & Poor's	*Moody's*	*Fitch Rating*	*Tempat Listing* Listing Location
GLOBAL BOND PLN I									
The "2016 Notes" - 16 Oktober 2006	10 Tahun Year	USD	550.000.000	17 Oktober October 2016	7,750%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL BOND PLN II									
The "2017 Notes" - 28 Juni 2007	10 Tahun Year	USD	500.000.000	28 Juni June 2017	7,250%	BB	Baa3	BBB-	SGX
The "2037 Notes" - 28 Desember 2007	30 Tahun Year	USD	500.000.000	29 Juni June 2037	7,875%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL BOND PLN III									
The "2019 Guaranteed Notes" - 07 Agustus 2009	10 Tahun Year	USD	750.000.000	07 Agustus August 2019	8,000%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL BOND PLN IV									
The "2020 Guaranteed Notes" - 06 Nopember 2010	10 Tahun Year	USD	1.250.000.000	20 Januari January 2020	7,750%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL MEDIUM TERM NOTE PROGRAM									
The "2021 Guaranteed Notes" - 22 Nopember 2011	10 Tahun Year	USD	1.000.000.000	22 November 2021	5,500%	BB	Baa3	BBB-	SGX
The "2042 Guaranteed Notes" - 24 Oktober 2012	30 Tahun Year	USD	1.000.000.000	24 Oktober October 2042	5,250%	BB	Baa3	BBB-	SGX
Total		**USD**	**5.550.000.000**						

RANGKAIAN PERISTIWA PENTING 2015

2015 EVENT HIGHLIGHT

9 JANUARI JANUARY 2015

PLN dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kupang

PT PLN (Persero) dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kupang dengan kapasitas 5 Mega Watt peak (MWp). Proyek PLTS Kupang berlokasi di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PLN and PT LEN Industry (Persero) signed the Power Purchase Agreement of the Kupang Solar Cell Power Plant

PT PLN (Persero) and PT LEN Industry (Persero) signed the Power Purchase Agreement (PPA) of Kupang Solar Cell Power Plant with a capacity of 5 Megawatt peak (MWp). Kupang Solar Cell Power Plant project is located at Oelpuah Village, Central Kupang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province.

11 FEBRUARI FEBRUARY 2015

PLN Jalin Kemitraan dengan Perusahaan Listrik Perancis

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menandatangani perjanjian program kemitraan dengan perusahaan listrik dari Perancis *Electricité de France* (EDF) dan *Agence Française de Développement* (AFD). Kemitraan antara PLN dan EDF ini untuk berbagi keahlian yang bertujuan untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia.

PLN Established Partnership with a French Electricity Company

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) signed a partnership program agreement with two French electricity companies, Electricité de France (EDF) and Agence Française de Développement (AFD). This partnership is aimed to share expertise in order to support the development of a solid electricity sector and production process resulting in low carbon emissions.

13 FEBRUARI FEBRUARY 2015

PLN Bekerja sama dengan Kejaksaan Tangani Masalah Hukum Perdata

PT PLN (Persero) bersama Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang akan diberikan oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

PLN Cooperated with the Attorney General to Settle Civil Law Issues

PT PLN (Persero) and the Attorney General signed an agreement to settle civil law and state administration issues.

This bilateral cooperation includes legal aids, considerations, and other actions which will be provided by the Attorney in order to recover and save PLN's money/property/assets and other issues of civil law and state administration sectors encountered by PLN.

4 MARET MARCH 2015

PT PLN (Persero) menerbitkan Laporan Keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, & Rekan.

PT PLN (Persero) published the Financial Statements for FY 2014, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, & Rekan.

5 MARET MARCH 2015

PLN menandatangani Kerjasama Hukum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Luar Sumatera dan Jawa - Bali.

PLN signed a Legal Cooperation with high court chiefs in charge of Regions Outside of Sumatra and Java - Bali.

9 MARET MARCH 2015

- Transmisi Listrik 150 kV Poso – Palu resmi beroperasi
- PLN memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera Utara dengan mengoperasikan fasilitas regasifikasi *Liquid Natural Gas* (LNG) Arun untuk menggantikan BBM di pembangkit Belawan.

- 150 kV Electricity Transmission System in Poso-Palu was officially operated.
- PLN strengthened the electricity system in North Sumatra by operating of Arun's Liquid Natural Gas (LNG) to shift oil in the Belawan power plant.

20 MARET MARCH 2015

PT PLN (Persero) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan dalam rangka penerimaan dan pengujian batubara.

PT PLN (Persero) with the Indonesian Armed Forces (TNI AD) signed a memorandum of understanding on the training and mentoring for the acceptance and testing of coal.

10 APRIL 2015

PT PLN (Persero) menandatangani Forex Line dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Penandatangan forex line ini merupakan titik awal pelaksanaan *hedging* bagi PLN.

PT PLN (Persero) signed a Forex Line with Bank Mandiri, Bank BNI, and Bank BRI. This forex line signing becomes PLN's starting point of hedging transactions.

4 MEI MAY 2015

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan "Program 35.000 MW Untuk Indonesia" di pantai Samas, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA), *letter of intent* (LoI), serta *groundbreaking* dari sejumlah proyek pembangkit, antara lain:

a. Penandatanganan PPA: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas (Yogyakarta) kapasitasnya 50 MW; PLTU Kendari-3 (Sulawesi Tenggara), kapasitas 2×50 MW; PLTA Malea (Sulawesi Selatan) kapasitas 2×45 MW; PLTU Jeneponto ekspansi (Sulawesi Selatan), kapasitas 2×125 MW.
b. Penandatanganan LoI untuk EPC (*Engineering Procurement and Construction*) PLTU Grati (Pasuruan, Jawa Timur), kapasitas 450 MW.
c. *Groundbreaking* : PLTA Jatigede (Sumedang, Jawa Barat), kapasitas 2×55 MW, PLTU Pangkalan Susu unit III dan IV (Sumatera Utara), kapasitasnya 2×220 MW; PLTU Takalar (Sulawesi Selatan), kapasitas 2×100 MW,
d. Penandatanganan PJBG (Perjanjian Jual-Beli Gas) setara 50 BBTUD.

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo launched "A 35,000 MW Program for Indonesia" in Samas Beach, Bantul Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta Province.

The launching was symbolized by the signing of Power Purchase Agreement (PPA), Letter of Intent (LoI), and the groundbreaking of several power plant projects, as follows:

a. Signing of PPAs, including the Samas Wind Power Plant (Yogyakarta) with 50 MW capacity; the Kendari-3 Steam Power Plant (Southeast Sulawesi) with 2×50 MW capacity; the Malea Hydro Power Plant (South Sulawesi) with 2×45 MW capacity; and the Jeneponto Steam Power Plant expansion (South Sulawesi) with 2×125 MW capacity.
b. Signing of LoI for EPC contract of the Grati Steam Power Plant (Pasuruan, East Java) with 450 MW capacity.
c. Groundbreaking of several projects such as the Jatigede Hydro Power Plant (Sumedang, West Java) with 2×55 MW capacity; the Pangkalan Susu Steam Power Plant unit III and IV (North Sumatera) with 2×220 MW capacity; and the Takalar Steam Power Plant (South Sulawesi) with 2×100 MW capacity.
d. Signing of Gas Purchase Agreement for 50 BBTUD.

9 JULI JULY 2015

PLTS Daruba bekerja secara hybrida bersama PLTD Daruba memperkuat kelistrikan di Pulau Morotai, mampu memproduksi listrik rata-rata sebesar 200 kWp. Lokasi Pulau Morotai yang sangat strategis karena berdekatan dan perbatasan dengan Negara Filipina, maka Pulau Morotai akan mendapat bantuan program dari pemerintah dalam rangka Program Kelistrikan Kawasan Pulau Terluar dan Perbatasan berupa penambahan mesin pembangkit dengan kapasitas sebesar 2 MW.

Daruba Solar Cell Power Plant and Daruba Diesel Power Plant collaborated through a hybrid system to strengthen the power grid in Morotai Island which can produce energy at 200 kWp on average. The location of Morotai Island is very strategic because it is adjacent to the Philippines. For this reason, the Government supports this island by adding a generator machine with 2 MW capacity, as part of the Electricity System in Outermost Islands and Border Areas program.

29 JUNI JUNE 2015

PLTA Kracak : Pembangkit Tertua Yang Dikelola PLN

Sebagai salah satu Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) tertua yang dikelola anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power, PLTA Kracak saat ini beroperasi dengan memasok listrik ke sistem interkoneksi Jawa Bali, termasuk beberapa kecamatan di Bogor hingga ke pelosok-pelosok kecamatan. Dibangun tahun 1826, hingga saat ini 3 unit PLTA Kracak mampu menghasilkan daya hingga 18,9 MW.

Kracak Hydro Power Plant: Oldest Power Plant Managed by PLN

As one of the oldest hydro power plants managed by a subsidiary of PLN, PT Indonesia Power, Kracak Hydro Power Plant is currently operating to supply electricity to the Java-Bali interconnected system, including a number of subdistricts in Bogor and to the more remote areas of the subdistricts. Built in 1826, currently the 3 units at Kracak Hydro Power Plant are able to produce up to 18.9 MW of electricity.

7 AGUSTUS AUGUST 2015

PLN melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai panas bumi bersama dengan 5 pihak, yaitu: Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Universitas Negeri Manado (Unima).

Dalam MoU yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun ini, masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati para pihak dalam rangka pengembangan sumber daya panas bumi di Sulawesi Utara.

PLN signed a Memorandum of Understanding (MoU) on geothermal energy along with five other parties, namely Pertamina Geothermal Energy (PGE), North Sulawesi Provincial Government, Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado and Universitas Negeri Manado (Unima).

Each party agreed to cooperate in the fields of education, research, community services and other fields agreed upon in order to develop geothermal resources in North Sulawesi under the MoU for the next three years.

19 AGUSTUS AUGUST 2015

PT PLN (Persero) menyepakati pembelian tenaga listrik dari pembangkit jenis Energi Baru dan Terbarukan/EBT dengan sejumlah Independent Power Producer/IPP dengan kapasitas total mencapai sebesar 622 MW. Hal ini menunjukkan kesungguhan PT PLN (Persero) dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.

Adapun pembangkit EBT yang disepakati pembelian tenaga listriknya, adalah:

1. PLTA Batang Toru kapasitas 510 MW di Sumatera Utara;
2. PLTA Hasang kapasitas 3 X 13 MW di Sumatera Utara;
3. PLTB Sidrap kapasitas 70 MW di Sulawesi Selatan;
4. PLTS Gorontalo kapasitas 2 Mega Watt peak (MWp);
5. PLTS Sumba Timur kapasitas 1 MWp di Nusa Tenggara Timur.

PT PLN (Persero) agreed to purchase electricity supply from New and Renewable Energy (EBT) power generators with a number of Independent Power Producers/ IPPs with a total capacity of 622 MW. This shows our serious dedication to support government policy to develop new and renewable energy.

The agreed purchase of renewable energy power generators are as follows:

- Batang Toru Hydro Power Plant with a capacity of 510 MW in North Sumatra;
- Hasang Hydro Power Plant with a capacity of 3 X 13 MW in North Sumatra;
- Sidrap Wind Power Plant with a capacity of 70 MW in North Sumatra;
- Gorontalo Solar Power Plant with a capacity of 2 MWp;
- East Sumba Solar Power Plant with a capacity of 1 MWp in East Nusa Tenggara.

28 AGUSTUS AUGUST 2015

Presiden Jokowi meresmikan *Construction Kick-off* Pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah 2 x 1.000 MW dan Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan.

Jokowi, President of Indonesia, inaugurated a Kick-off Construction of the Batang Steam Power Plant in Central Java with a capacity of 2 x 1,000 MW and Electrification Program in 50 locations in both outermost islands and borderline areas.

2 SEPTEMBER 2015

Menteri ESDM Sudirman Said dan Duta Besar Amerika Robert Blake, menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Power Working Group untuk mendukung Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.

Sudirman Said, the Minister of Energy and Mineral Resources, and Robert Blake, US Ambassador to Indonesia, signed a Memorandum of Understanding on Power Working Group to support the 35,000 MW Electrification Program.

4 SEPTEMBER 2015

Dukungan Penegak Hukum Bagi Proyek 35 Ribu MW

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, dengan tegas menyatakan akan mengawal PLN dalam mensukseskan Program 35.000 MW.

Luhut Binsar Panjaitan, Coordinating Minister for Political, Legal and Human Rights, Badrodin Haiti, National Police Chief, and HM Prasetyo, the Attorney General, firmly stated to oversee the progress and success of PLN 35,000 MW program.

15 SEPTEMBER 2015

Perusahaan Energi Qatar, Nebras Power, menandatangani *Head of Agreement* (HoA) dengan Anak Perusahaan PLN, PT PJB, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 500 MW. Penandatanganan yang diwakili oleh berlangsung di Qatar. Dalam acara tersebut hadir pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Direktur PLN Amin Subekti.

Nebras Power, a Qatari energy company, signed a Head of Agreement (HoA) with PLN Subsidiary Unit, PT PJB, to construct a 500 MW Fossil-fuel Power Plant. The signing of HoA took place in Qatar. President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo and PLN Director, Amin Subekti also attended the event.

7 OKTOBER OCTOBER 2015

PLN menggelar acara KNIFE 2015 *(Knowledge, Norm, Innovation, Festival and Exhibition)* dengan tema : Meningkatkan Semangat Berpikir Kreatif dan Inovatif untuk Mensukseskan Program 35.000 MW.

PLN held an event titled KNIFE 2015 (Knowledge, Norm, Innovation, Festival and Exhibition) with a theme: Enhancing Creative Thinking and Innovative Spirit to Ensure the Success of the 35,000 MW Program.

8 OKTOBER OCTOBER 2015

PLN Turut Menggairahkan Ekonomi Indonesia Melalui Paket Ekonomi Oktober 2015

Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi, diantaranya kebijakan insentif yang disiapkan PLN untuk ditawarkan kepada dunia industri, yaitu:

1. Penurunan tarif listrik yang konsisten;
2. Diskon tarif listrik pada penggunaan malam hari;
3. Penundaan pembayaran tagihan listrik.

PLN Enhanced the Indonesian Economy Through October 2015 Economic Package

The Government announced an economic policy package, including an incentives policy which is offered to the industry, namely:

1. Consistent decrease in electricity prices;
2. Night-time electricity usage discount;
3. Delayed payment of electricity bills.

23 OKTOBER OCTOBER 2015

PLN menandatangani kontrak perjanjian dengan Waskita Karya untuk membangun tol listrik Sumatera sepanjang 395 Kilometer.

PLN signed an agreement contract with Waskita Karya to build 395 kilometers of electricity transmission system across Sumatra.

27 OKTOBER OCTOBER 2015

Peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 Tahun 2015 mengambil tema : "Bersama Menerangi Nusantara".

PLN celebrated the 70th National Electricity Day 2015 with the theme: "Together Illuminating the Archipelago".

30 OKTOBER OCTOBER 2015

Pengangkatan Anggota Direksi Baru PLN

Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) telah menyerahkan surat keputusan yang mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi PT PLN (Persero):

1. Muhamad Ali
2. Djoko Rahardjo Abu Manan
3. Machnizon
4. Haryanto W.S.

Appointment of New Members to PLN Board of Directors

The Minister of State Owned Enterprises (SOEs) in the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT PLN (Persero) submitted a decree appointing the four directors below as new members of Board of Directors:

1. Muhamad Ali
2. Djoko Rahardjo Abu Manan
3. Machnizon
4. Haryanto W. S.

30 OKTOBER OCTOBER 2015

PT PLN (Persero) bersama PT Sumber Segara Primadaya (S2P) menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cilacap Ekspansi Fase II dengan kapasitas terpasang 1 x 1.000 Megawatt (MW). Penandatangan PPA dilakukan antara Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan Direktur Utama PT Sumber Segara Primadaya Mohamad Rasul di PLN Kantor Pusat, Jakarta.

PT PLN (Persero) with PT Sumber Segara Primadaya (S2P) signed a Power Purchase Agreement (PPA) for the Cilacap Steam Power Plant Expansion Phase II with an installed capacity of 1x1000 MW. The signing of the PPA was conducted by the President Director of PLN, Sofyan Basir, and the President Director of PT Sumber Segara Primadaya, Mohamad Rasul, at the PLN Head Office in Jakarta.

3 NOVEMBER 2015

Guna menjalankan program pembangunan proyek kelistrikan 35.000 MW, PLN menandatangani perjanjian kerjasama strategis bersama 5 (lima) BUMN yaitu PT Krakatau Steel (Persero), PT PAL (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bharata (Persero), dan PT PINDAD (Persero). Perjanjian Strategis ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna optimalisasi sumber daya produksi yang dimiliki.

In order to implement the 35,000 MW construction program, PLN signed a strategic cooperation agreement with five SOEs, namely PT Krakatau Steel (Persero), PT PAL (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bharata (Persero) and PT PINDAD (Persero). This Strategic Agreement was intended to enhance synergy between these State Owned Enterprises (SOEs) and optimize their resources.

12 NOVEMBER 2015

Sindikasi 7 bank dan BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi Pendanaan PLTU Riau 2 X 110 MW. Adapun 7 (tujuh) kreditur yang berkomitmen dalam Perjanjian Kredit Sindikasi adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Aceh, Bank Kalteng, Bank Riau Kepri, Bank Kalbar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kredit Sindikasi diperuntukkan bagi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pembangkit yang masuk dalam Fast Track Program (FTP) I ini dijamin oleh pemerintah.

Seven syndicated banks and State Owned Enterprises (SOEs) signed a syndicated loan agreement to fund Riau Steam Power Plant with a capacity of 2X110 MW under the coordination of the Ministry of Finance. The seven creditors in the Syndicated Loan Agreement are: Bank DKI, Bank Jateng, Bank Aceh, Bank Kalteng, Bank Riau Kepri, Bank Kalbar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). The syndicated loan was earmarked for the construction, development and management of the power plants, and is included in the Fast Track Programme (FTP) I which is guaranteed by the government.

4 DESEMBER DECEMBER 2015

PT PLN (Persero) memperoleh pinjaman langsung dari Asian Development Bank (ADB) untuk memperkuat Jaringan Transmisi & Distribusi Sumatera dengan jaminan Pemerintah.

PLN acquired direct loan from Asian Development Bank (ADB) with government guarantee to strengthen Sumatra transmission and distribution project.

8 DESEMBER DECEMBER 2015

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, melepas langsung keberangkatan Kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) "Karadeniz Powership Zeynep Sultan" berkapasitas 120 MW dari Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok menuju Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Program ini merupakan salah satu upaya PLN untuk memperkuat pasokan listrik di beberapa lokasi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan 150 kilo Volt (kV) Sulawesi Utara – Gorontalo (Sulutgo).

President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, was accompanied by President Director of PT PLN (Persero), Sofyan Basir in the authorization of a new Marine Vessel Power Plant (MVPP) namely "Karadeniz Powership Zeynep Sultan" with a capacity of 120 MW, which will travel from Tanjung Priok Port to Amurang, South Minahasa in North Sulawesi. This program is one of the many efforts in which PLN strives to strengthen power supplies in many locations throughout Indonesia. One of them is located in North Sulawesi and Gorontalo (Sulutgo) which is connected with the electrical wiring interconnection system with a capacity of 150 kV.

15 DESEMBER DECEMBER 2015

PT PLN (Persero) meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Pemerintah. Hal ini merupakan penghargaan terhadap konsistensi dan komitmen PLN dalam pengelolaan perusahaan yang terbuka dan transparan melalui implementasi Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

PLN menempati peringkat ketiga untuk kategori badan publik BUMN. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Istana Presiden RI.

PT PLN (Persero) received a Public Information Disclosure (KIP) award from the Government in appreciation of PLN's consistency and commitment to transparent management through the implementation of Law Num. 14 of 2008 on KIP.

PLN ranked third in the category of Public SOEs. The award was directly conferred by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, to the President Director of PLN, Sofyan Basir, at the Presidential Palace.

22 DESEMBER DECEMBER 2015

PLN berhasil menyelesaikan penandatanganan kontrak-kontrak perjanjian jual beli listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) dan kontrak pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dengan jumlah 17.336 MW yang terdiri dari PPA sebesar 14.454 MW dan kontrak EPC sebesar 2.883 MW.

PLN successfully completed contracts in Power Purchase Agreement/PPA and power plant development of the 35,000 MW program with a total of 17,336 MW. It consists of PPA as 14,454 MW and EPC contracts as 2,883 MW.

17 DESEMBER DECEMBER 2015

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menandatangani Perjanjian Kredit Investasi PLN dengan Sindikasi 6 Bank Dalam Negeri yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, Indonesia Exim Bank, dan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)

Perjanjian Kredit Investasi PLN bertujuan untuk mendanai kebutuhan pembiayaan perusahaan (corporate loan) untuk investasi.

President Director of PLN, Sofyan Basir, signed an Investment Loan Agreement for PLN with a syndication of six domestic banks, namely BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, Indonesia Exim Bank, and PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

This Investment Loan Agreement was intended to provide corporate loan to meet the financing needs for investment.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

AWARD & CERTIFICATION

INDONESIA GREEN AWARDS 2015

PENGHARGAAN

Pada tahun 2015, PLN menerima berbagai penghargaan baik secara langsung maupun melalui unit bisnis, anak usaha maupun pejabat strategis dari berbagai lembaga independen.

Penghargaan yang diperoleh mencakup:

AWARDS

In 2015, PLN received numerous awards, both directly and indirectly through business units, subsidiaries and key officials from various independent institutions.

Awards received include:

No.	Penghargaan Awards	Acara Event	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	• *Silver Winner* untuk kategori performa CSR dalam sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi PLN Silver Award Winner in the CECT CSR AWARD 2015 in CSR Performance category (Infrastructure, Utility and Transportation) • "Special Achievement" untuk kategori CSR Social Aspect of Society – Social Enterprise PLN "Special Achievement" Award in the category of CSR Social Aspect of Society – Social Enterprise	CECT CSR AWARD 2015	17 Maret March 2015	Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector (CECT) Trisakti University
2.	Atap Tanpa Sambungan Terpanjang The Longest Roof Without Connection	Penghargaan Nasional dan Dunia National and International Awards	26 Maret March 2015	Museum Rekor Indonesia (MURI) Guinness Book of Record
3.	• Pengembangan Keanekaragaman Hayati Biodiversity Development • Penyelamatan Sumber Daya Air Water Conservation • Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan New and Renewable Energy Development • The Best Indonesia Green Awards 2015	Indonesia Green Awards 2015	04 Juni June 2015	LA TOFI School of CSR
4.	• Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral 2015 2015 Dharma Karya Energy and Mineral Resources	Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 70 Mining and Energy Resources 70th Anniversary	29 September 2015	Menteri ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources
5.	• Peringkat ketiga untuk kategori BUMN Ranked third in the category of public State Owned Enterprises (SOEs)	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Public Information Disclosure	15 Desember December 2015	Pemerintah Government

SERTIFIKASI

Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan dan Pelayanan Pelanggan meliputi:

1. ISO 9001 tentang Pelayanan Pelanggan,
2. ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan,
3. SMK3,
4. Kelaikan Operasi,
5. Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan,
6. OHSAS untuk Keselamatan dan Kesehatan pegawai, dan
7. Sertifikasi dari Pihak Independen Lainnya.

Realisasi Kebijakan Sertifikasi tersebut membuat hampir seluruh Unit Bisnis (46 Unit Bisnis) dan Anak Usaha (10 anak usaha) telah memiliki sertifikasi standar dimaksud, dengan rekapitulasi sertifikasi untuk tahun 2015 sebagai berikut:

CERTIFICATION

Since 2004, PLN has intensively implemented a Power Plant and Customer Service Evaluation certification programs including:

1. ISO 9001 about on Customer Services
2. ISO 14001 about Management and Supervisory Environment,
3. SMK3,
4. Operation Eligibility Criteria,
5. Professional Certificate of Competency in Operation and Maintenance,
6. OHSAS (Occupational Safety and Health Administration), and
7. Other Third Party Certifications.

The realization of Certification Policy made almost all Business Units (46 Business Units) and Subsidiaries (10 Subsidiaries) with a recapitulation of the 2015 as follows:

Jenis Sertifikasi Certifications	**Keterangan** Descriptions	2014	2015
ISO 14001:2004	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	37	40
ISO 14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	2	2
ISO 9001 : 2000	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	3	0
ISO 9001 : 2008	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	100	161
ISO 31000		1	1
SNI 19-14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	2	2
OHSAS 16001 : 2007	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	1	1
SMK3 & Zero Accident	Sertifikat Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Management Certificate	119	139
ISO 28000:2007 /SNI ISO 28000 : 2009	Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan Supply Chain Security Management System	15	2
Sertifikat Pemeliharaan		5	
SLO	Sertifikat Laik Operasi Operational Adequacy Certificate	42	45
OHSAS 18001 : 2007	Sertifikasi Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Certificate	2	2
ISO / IEC 17021 : 2006	Sertifikasi Sistem Mutu Quality System Certificate	0	0
BSN 401-2000	Sertifikasi Produk Product Certificate	0	0
SNI/ISO /IEC 17201 :2008	Sertifikasi Manajemen Lingkungan Environmental Management Certificate	0	0
	Jumlah Total	**329**	**395**

listrik
pintar

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

hal. 33 - 71

Kami memandang program pembangunan Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia merupakan wujud pelaksanaan misi-misi PLN, yakni "Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat" dan "Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi".

We see that 35.000 MW Power Plant Development Program for Indonesia is a manifestation of the implementation of PLN's missions, which are: "Making electricity as a medium to improve quality of people's life" and "Ensuring electricity to be economic activity booster".

Hasan Bisri
Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Acting President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

"Pembangunan bangsa tidak akan pernah bisa memberi hasil optimal sepanjang infrastruktur dasar yang menjadi prasarat belum tersedia dengan memadai dan handal. Tenaga listrik adalah salah satu dari infrastruktur dasar yang harus tersedia. Tingkat kecukupan pasokan listrik dan keandalan sistim transmisi dan distribusi akan berperan sebagai pendukung utama peningkatan laju pertumbuhan perekonomian.

Oleh karenanya Dewan Komisaris memandang realisasi Program Pembangkit 35.000 MW harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dewan Komisaris siap mendukung dan membantu memastikan kesuksesan implementasi program tersebut, serta mengawasi dan memberi saran dan merekomendasikan jalan keluar bagi Direksi beserta jajarannya dalam mengatasi segala permasalahan yang mungkin menjadi kendala bagi kesuksesan pelaksanaan tugas dimaksud".

"National development cannot provide optimal results when the pre-requirement of basic infrastructure is neither adequate nor reliable. Electrical power is an essential pre-requirement for development. A sufficient supply of electricity and a reliable transmission and distribution system play a primary role in supporting increased economic growth.

For this reason, the Board of Commissioners believes that the 35,000 MW Power Plant Program must be supported by every component of the nation. The Board of Commissioners is ready to support and help ensure the implementation of this program, and to oversee, provide advice and recommend solutions to the Board of Directors and PLN's employees to manage any problem that may arise or become an obstacle to the successful implementation of this duty."

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Mengawali laporan ini, perkenankan kami, mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam sejahtera untuk kita semua karena atas karuniaNya PT PLN (Persero) berhasil melalui tahun 2015 yang penuh tantangan dengan menorehkan berbagai kinerja yang semakin memperkuat landasan dalam menjalankan tugas negara, mengembangkan usaha Perseroan demi mendukung pembangunan bangsa.

Respected Shareholders,

Opening this report, allow me, representing the Board of Commissioners, to render thanks to God Almighty and greet us all because, through the grace of God Almighty, PT PLN (Persero) has made its way through 2015, a year full of challenges, and achieved various milestones that reinforce its foundation to carry out its national duty, developing the Company's business to support national development.

KONDISI USAHA

Tahun 2015 bagi sebagian besar pelaku usaha dipandang sebagai tahun ujian, mengingat banyaknya kendala dan tantangan yang harus diatasi agar dapat membukukan kinerja yang paling tidak sama dengan tahun sebelumnya. Kenyataannya, pada tahun 2015 kondisi perekonomian global kembali tumbuh rendah, yang akhirnya membuat laju pertumbuhan perekonomian nasional menunjukan angka terendah selama 6 tahun terakhir.

Di tahun 2015, negara-negara maju di kawasan Eropa mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, demikian pula di kawasan Asia, negara-negara seperti China, Jepang dan India. Satu langkah yang memicu gejolak pasar uang global ditandai dengan naiknya nilai tukar Dollar AS terhadap semua mata uang dunia yang diperparah dengan adanya devaluasi mata uang China, sehingga tingkat ketidak pastian dalam konteks investasi di dalam suatu negara maupun antar negara menjadi tinggi dan akhirnya menurunkan realisasi investasi.

Dewan Komisaris menilai bahwa kondisi ekonomi global di tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa pelemahan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia memberi dampak nyata pada pendapatan nasional dari ekspor bahan-bahan primer pertambangan maupun perkebunan dan juga melemahnya nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya membuat dana investasi menjadi kurang ekonomis dan kegiatan produksi melambat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi nasional tertekan ditunjukkan dengan melemahnya tingkat pertumbuhan dari 5,02% menjadi sebesar 4,79%.

Indonesia di satu sisi, dikenal sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang memadai. Namun juga dikenal minim akan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan kurang baiknya iklim usaha dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks menyediakan ketersediaan infrastruktur tersebut, PT PLN (Persero) diharapkan menunjukkan kontribusi yang maksimal, mengingat ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai merupakan salah prasarat utama tumbuhnya investasi riil yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu data empiris menyebutkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi negara akan memerlukan dukungan pertumbuhan kapasitas daya listrik kurang lebih 1,5%.

Upaya PLN untuk menambah daya dengan membangun pembangkit baru, seringkali terkendala oleh pembebasan lahan dan izin yang berliku, menunjukan kurang kondusifnya kondisi usaha. Pelemahan nilai tukar rupiah juga pada

BUSINESS CONDITIONS

For most businesses, 2015 was seen as the year of tests, considering the many obstacles and challenges that had to be overcome to be able to record a performance at least equal to that of the previous year. In fact, in 2015, the global economy returned to low growth, which made national economic growth to achieve its lowest figure in the last six years.

In 2015, developed countries in Europe experienced a slowdown in economic growth, as did in Asia; countries like China, Japan and India. One occurrence that triggered turmoil in the global financial markets was the US dollar's rising exchange rate against all world currencies, which was exacerbated by the devaluation of the Chinese currency, thus making the level of investment uncertainty high both within and between countries and finally lowering investment realization.

The Board of Commissioners noted that global economic conditions in 2015 demonstrated that the weakening level of growth in the world economy had a real impact on national income from the export of primary mining and plantation goods and also weakened the rupiah exchange rate, which in turn caused investment funding to become less economical and slowed production. This depressed national economic growth, as shown by the rate falling from 5.02% to 4.79%.

Indonesia, on the other hand, is known as a country of abundant natural resources and sufficient human resources, it is also known to have minimal infrastructure and a less than favorable business climate compared with other countries in Southeast Asia.

In the context of providing infrastructure, PT PLN (Persero) is expected to show maximum contribution, given that the availability of an adequate electricity infrastructure is one of the main prerequisites to growth in real investment, which will support national economic growth. Empirical data say that every 1% of economic growth will require the support more or less 1.5% electrical power capacity growth.

PLN's attempts to increase power by building new plants are often hampered by complex problems with land acquisition and permits, demonstrating the unfavorable business conditions. The weakening of the rupiah also finally affects

akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan PLN, mengingat sebagian kewajibannya sebagian dalam mata uang asing. Selain itu, kebutuhan investasi juga semakin mahal, mengingat sebagian besar komponen pembangkit tenaga listrik masih harus di-impor. Hal tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi kemampuan PLN dalam berinvestasi membangun sarana ketenagalistrikan yang memadai.

Dewan Komisaris mengingatkan bahwa dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean yang akan membuat persaingan produk dan jasa di pasar domestik meningkat, maka PLN sudah semestinya memberikan andil dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia, melalui penyediaan tenaga listrik yang lebih ekonomis dan andal.

PLN's financial condition, given that most obligations are at least in part in foreign currency. Moreover, investment requirements are becoming more expensive since most power plant components have to be imported. This in turn also affects the ability of PLN to invest in building an adequate electrical power infrastructure.

The Board of Commissioners notes that the implementation of the ASEAN Economic Community will cause competition for products and services in the domestic market to increase, thus PLN should contribute to increasing the competitiveness of Indonesian products by supplying electricity that is more economical and reliable.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Saat ini, Pemerintah tengah berupaya keras memperbaiki iklim usaha dan juga memperbaiki ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk tenaga listrik.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah telah menetapkan program pembangunan strategis nasional yaitu "Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia" lima tahun kedepan yang dikukuhkan dalam dokumen "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019". Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan teknis pelaksanaan di tingkat Departemen Teknis maupun kebijakan strategis yang mendukung program tersebut.

PLN mendapat tugas untuk merealisasikan program pembangunan "Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia" dalam lima tahun kedepan, lengkap dengan infrastruktur transmisi dan distribusi, di luar tugas untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit yang tengah dalam masa konstruksi dengan kapasitas total 7.000 MW. Dengan mempertimbangkan keterbatasan PLN dalam menyediakan dana, maka PLN hanya akan membangun pembangkit berkapasitas total 10.681 MW dari total 35.000 MW tersebut, berikut seluruh infrastruktur transmisi – distribusi dan gardu induk yang diperlukan. Sisanya akan dibangun oleh pihak swasta dalam skema *Independent Power Producer* (IPP). PLN akan tetap terlibat dalam pengawasan realisasi pembangunan pembangkit berskema IPP tersebut, mengingat daya yang dihasilkan kelak akan menjadi bagian dari sistim kelistrikan nasional yang dikelola PLN melalui infrastruktur transmisi dan distribusi yang dibangun bersamaan.

Dewan Komisaris memandang Direksi telah mempersiapkan seluruh prasarana yang diperlukan bagi kesuksesan Program 35.000 MW tersebut dalam memastikan angka rasio elektrifikasi nasional meningkat menjadi 97,4% pada akhir tahun 2019 dari posisi 88,3% di akhir tahun 2015.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Currently, the Government is striving to improve the business climate and also improve the availability of basic infrastructure, including electricity power.

In this context, the Government has established a national strategic development program, namely "Generating 35,000 MW for Indonesia" in the coming five years, which is confirmed in the "National Medium Term Development Plan 2015-2019" document. The Government has also issued technical implementation regulations at the Technical Department level, as well as strategic policies that support these programs.

PLN has been tasked to realize the "Generating 35,000 MW for Indonesia" development program within the next five years, complete with the transmission and distribution infrastructure, in addition to its task of completing the ongoing construction with its total generating capacity of 7,000 MW. Taking into account PLN's funding limitations, PLN will only build plants with a total generating capacity of 10,681 MW out of the total 35,000 MW, in addition to the entire transmission-distribution infrastructure and necessary substations. The remainder will be built by the private sector in the Independent Power Producer (IPP) scheme. PLN will remain involved by supervising construction realization for the IPP scheme, since the power generated will become part of the national electricity grid managed by PLN through its transmission-distribution infrastructure that is being concurrently built.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has prepared all the necessary facilities for the success of the 35,000 MW program, which will ensure the national electrification ratio increases to 97.4% by the end of 2019, up from 88.3% at the end of 2015.

Oegroseno | Harry Susetyo Nugroho | Hasan Bisri | Aloysius Kiik Ro

Pada tahun 2015, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah berupaya mengatasi sulitnya kondisi usaha di tahun 2015 dalam melaksanakan Rencana Kerja dan anggaran (RKAP) Tahun 2015.

Kami mengapresiasi tercapainya beberapa target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti:

- Perbaikan bauran energi, yang membuat BPP turun.
- Penerapan kebijakan penyesuaian tarif tanpa menimbulkan gejolak yang berarti, sehingga PLN mampu mencatatkan kenaikan penjualan listrik sekaligus mengurangi jumlah subsidi yang disediakan Pemerintah.
- Penambahan jumlah pelanggan, yang membuat rasio elektrifikasi nasional, naik menjadi 88,3%.

In 2015, the Board of Commissioners had an opinion that the Board of Directors has worked to manage the difficult conditions of the year through the implementation of the 2015 Work and Budget Plan (RKAP).

We appreciate the achievement of several pre-determined performance indicator targets, including:

- Improvement of the energy mix, resulting in a falling cost of production.
- Smooth implementation of the tariff adjustments, allowing PLN to record increased sales of electricity while reducing the Government subsidy.
- Improvement of the number of customers, resulting the national electrification ratio to 88.3%.

Darmono Budiman Andin Hadiyanto Jarman

- EAF PLTU yang membuat PLN relatif terhindar dari risiko melakukan pamadaman bergilir dan menambah biaya pembelian listrik swasta.
- Laba bersih setelah pajak sebesar Rp15,58 triliun, sekalipun PLN harus membukukan rugi translasi dan kenaikan beban keuangan akibat pelemahan kurs rupiah.
- Selesainya program revaluasi aset properti PLN, yang membuat Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif setelah pajak yang substansial, mencapai Rp658,32 triliun, dan membuat struktur ekuitas membaik. Perbaikan struktur ekuitas membuat PLN memiliki kapabilitas lebih baik dalam menggalang dana untuk mendukung realisasi investasi pembangunan pembangkit maupun transmisi.

- Achieving a power plant EAF that supports PLN in preventing the risk of rolling blackouts and increasing purchases of privately produced power.
- Earning after tax of Rp15.58 trillion, while at the same time PLN had to book a translation loss and an increase in financial expenses due to the weakening of the rupiah exchange rate.
- Completing PLN's property asset revaluation program, which resulted in PLN recording substantial comprehensive revenue after tax of Rp658.32 trillion, thus improving the equity structure. By improving the equity structure, PLN has a better ability to raise funds that will support investment realization to build power plants and transmission.

Namun demikian, kami juga memberi catatan untuk diperbaiki atas tidak tercapainya beberapa target indikator kinerja, seperti:

- Penambahan kapasitas pembangkit (COD) yang membuat PLN harus menambah pengeluaran untuk membeli listrik swasta dalam rangka mengamankan pasokan daya.
- Indikator keandalan SAIFI dan SAIDI, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kemampuan PLN memenuhi kebutuhan listrik yang handal dan berkualitas. Hal ini akan memberi dampak larinya pelanggan industri dalam jangka panjang.
- Susut jaringan, yang membuat PLN kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah yang cukup besar.

Kami mendukung penuh upaya yang dilakukan Direksi untuk menjalin kerjasama dan saling pengertian dengan Lembaga Tinggi Negara di bidang penegakan hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di bidang pertahanan dan keamanan, guna memastikan kelancaran eksekusi tahapan program pembangunan proyek-proyek Pembangkit berjalan sesuai koridor hukum, dan menghindarkan pejabat pembuat komitmen di lapangan merasa ragu dan takut merealisasikan program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, Dewan Komisaris mendukung re-organisasi korporasi yang telah dilaksanakan Direksi guna mendukung akuntabilitas pengelolaan perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dewan Komisaris juga meminta agar Direksi lebih memberikan perhatian kepada pencapaian COD pembangkit, mengingat berbagai kendala yang pernah di alami telah direspon dengan cepat oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan teknis terkait.

Dewan Komisaris memandang raihan kinerja tersebut dapat tercapai karena kedisiplinan Direksi beserta jajaran dalam menerapkan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKAP 2015 diikuti dengan tekad untuk bekerja keras disertai dedikasi yang tinggi. Selain kejelian jajaran manajemen dalam memaksimalkan sumber daya PLN agar memberi hasil yang semakin optimal.

TINGKAT KESEHATAN

Tingkat Kesehatan Perusahaan diukur dengan menggunakan Keputusan Menteri BUMN No.100/MBU/2002 mendapatkan skor sebesar 60,80 masuk pada golongan perusahaan BUMN yang KURANG SEHAT kategori BBB dengan pencapaian

However, we also note improvements to be made where several performance indicator targets were not met, including:

- Additional generating capacity (COD) which makes PLN should increase cost of purchasing private power to safeguard the power supply.
- SAIFI and SAIDI reliability indicators, which influence customer's level of trust in PLN's ability to supply reliable, good quality electricity. This also has the long-term effect of industrial customers leaving PLN.
- Network losses, resulting in PLN losing quite substantial amounts of potential income.

We fully support the efforts made by the Board of Directors in cooperating with and fostering mutual understanding with High-level State law enforcement institutions, including the Corruption Eradication Committee and the defense and security apparatus, to ensure the smooth execution of the Power Generation development projects in compliance with legal requirements, and to prevent officials from making commitments in the field that are hesitant or that fear the realization of planned programs.

Furthermore, the Board of Commissioners supports the corporate re-organization that is being implemented by the Board of Directors to support accountability in the management of the company and to improve the company's performance.

The Board of Commissioners has also requested that the Board of Directors pays more attention to achieving power plant COD, given the many obstacles that have been experienced and received a quick response from the Government with its issuance of various policies related to technical matters.

The Board of Commissioners believes that these performance targets can be achieved because of the discipline demonstrated by the Board of Directors and PLN employees in implementing the priority programs set forth in the 2015 Work and Budget Plan and their determination to work hard and with dedication. In addition, PLN's management has shown foresight in maximizing company resources to give more optimal results.

COMPANY SOUNDNESS / HEALTH LEVEL

The Company's level of soundness is measured using SOE Ministerial Regulation Num. 100/MBU/2002, which resulted in a score of 60.80, falling in the UNHEALTHY, or BBB, category for a State-Owned Enterprise; individual scores

masing-masing aspek adalah Aspek Keuangan 21,50, Aspek Operasional 30,30 dan Aspek Administrasi 9,00.

KPI Manajemen PT PLN (PERSERO) tahun 2015 mendapatkan Skor 94,8 dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan 21,0, Efektivitas Produk dan Proses 17,2, Fokus Tenaga Kerja 16,7, Keuangan dan Pasar 23,0, dan Kepemimpinan dan Tata Kelola 16,9.

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENASEHATAN KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris tetap dengan konsisten akan melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan manajemen, mekanisme kepengurusan dan operasional Perseroan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan arahan kepada Direksi.

Dewan Komisaris mengamanatkan Direksi untuk terus memperkuat landasan dan menggali potensi dari seluruh sumber daya PLN yang dimiliki, termasuk kompetensi SDM yang tersedia, agar dapat secara optimal mendukung pelaksanaan tugas dan di sisi lain tetap mampu mencatatkan kinerja operasional yang semakin meningkat.

Selain itu terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek ketenagalistrikan, terlebih dalam kaitan Pembangkit 35.000 MW, Dewan Komisaris mengamanatkan peningkatan kualitas dan intensitas pengelolaan risiko. Skala proyek-proyek ketenagalistrikan yang masif dan menyebar di seluruh wilayah Nusantara, membuat implementasi manajemen risiko yang berkualitas menjadi penting dan bermakna strategis bagi kesuksesan pelaksanaan tugas besar tersebut. Selain risiko, Kami juga mengamanatkan adanya peningkatan intensitas pengawasan. Oleh karena besarnya skala usaha, Dewan Komisaris mendukung penerapan *Risk Based Audit* demi tercapainya peningkatan kualitas sekaligus efektifitas pengawasan.

Selanjutnya Dewan Komisaris secara konsisten akan melakukan pengawasan dan memberikan penasehatan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan atas berbagai tugas operasional yang dijalankan Direksi melalui pertemuan berkala maupun kunjungan langsung ke wilayah, anak perusahaan serta lokasi pembangunan proyek ketenagalistrikan.

Pengembangan *Human Capital* selanjutnya tidak hanya terfokus kepada peningkatan kompetensi saja, namun juga harus berfokus pada upaya mengubah cara pandang seluruh jajaran insan Perseroan, mengubah *mindset Human Capital* untuk lebih mengedepankan efisiensi pelaksanaan tugas dan kualitas kerja dengan mengedepankan nurani, integritas dan dedikasi disertai keyakinan bahwa dengan berkarya sebaik-baiknya di PLN, menyediakan daya

were 21.50 for Financial Aspects, 30.30 for Operational Aspects and 9.00 for Administrative Aspects.

Meanwhile, a score of 94.8 was achieved for KPIs set for the PT PLN (Persero) Management in 2015, with individual indicators of 21.0 in Customer Focus, 17.2 in Product and Process Effectiveness, 16.7 in Labor Focus, 23.0 in Finance and Market and 16.9 in Leadership and Governance.

IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY AND ADVISORY TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners remains consistent in performing its duty of oversight over management policies, management mechanisms and the operations of the Company as implemented by the Board of Directors and provides guidance to the Board of Directors.

The Board of Commissioners mandated that the Board of Directors continue to strengthen the foundation and explore the potential of all resources owned by PLN, including the competency of available human resources, in order to optimally support all duties while still being able to record improved operating performance.

Additionally, related to the implementation of electrification projects, specifically related to the 35,000 MW Power Plant Program, the Board of Commissioners mandated an increase in the quality and intensity of risk management. The massive scale of the electrification projects, which are spread throughout the archipelago, make high quality risk management implementation important and strategically significant for the successful execution of this large assignment. In addition, we also mandated an increased intensity in supervision. Due to the large scale of business, the Board of Commissioners supports the implementation of Risk Based Audit to achieve an increase in quality and supervision effectiveness.

Furthermore, the Board of Commissioners consistently supervises and provides advices on the implementation of the Work and Budget Plan and on a variety of operational tasks carried out by the Board of Directors through regular meetings and direct visits to the regions, the subsidiaries and electricity project construction sites.

The development of Human Capital, furthermore, must not only focus on improving competencies, but should also focus on efforts to change the way of thinking of every company employee, to change the Human Capital mindset to prioritize the efficient implementation of tasks and quality of work by promoting conscience, integrity and dedication, with the belief that by working as well as possible in PLN, providing adequate and reliable power,

listrik yang memadai dan handal, berarti telah turut serta membantu perjuangan meningkatkan harkat bangsa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Dewan Komisaris akan senantiasa berdialog dan memberikan rekomendasi serta jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi Direksi dalam merealisasikan program-program yang membutuhkan dukungan untuk pengambilan keputusan yang di luar kewenangan Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga akan senantiasa berdialog mencari jalan keluar terbaik bersama Pemerintah, manakala persoalan yang dihadapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan dan penasehatan dengan didukung oleh Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan penasehatan tersebut, selama kurun waktu tahun 2015 Dewan Komisaris telah mengadakan 55 kali rapat yang dihadiri secara kourum oleh Anggota Dewan Komisaris, termasuk rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi sejumlah 19 kali. Kemudian, untuk mendapatkan informasi pada kondisi terkini, Dewan Komisaris telah melakukan monitoring langsung ke unit-unit dengan melakukan kunjungan kerja lapangan sebanyak 9 kali, meliputi kunjungan kerja ke 40 Unit / Proyek dan Anak Perusahaan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasehat/teguran/arahan dan tanggapan tertulis/ persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun yang memerlukan persetujuan RUPS selama tahun 2015 sebanyak 90 kali (melalui 90 surat). Kemudian Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan / tanggapan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham / RUPS terkait kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan dan penasehatan tersebut, Dewan Komisaris juga secara berkala menilai kualitas rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite-komite Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit (KA), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR).

means each employee has participated in the struggle to enhance the dignity of the Indonesian nation in line with other developed countries.

The Board of Commissioners will continue its dialogue and provide recommendations, as well as solutions to the various problems faced by the Board of Directors in the realization of programs that require decision-making support beyond the authority of the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners will also maintain a dialogue with the Government to find the best solutions to issues that fall under the Government's authority.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

The Board of Commissioners implements its duties of supervision and counseling with the support of the Board of Commissioners' Committees and the Board of Commissioners' Secretary.

Each of these committees includes one or more members of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. Members of these Board of Commissioners' Committees are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

In the interest of carrying out its supervisory and advisory duties, in 2015, the Board of Commissioners held 55 meetings attended by a quorum of Members of the Board of Commissioners, including 19 board meetings attended by the Board of Directors. Further, to obtain information on current conditions, the Board of Commissioners conducted nine site visits to directly monitor units in the field, covering working visits to 40 Units / Projects and subsidiaries.

In addition, in 2015, the Board of Commissioners also provided advices / warnings / direction and written approval / feedback on proposals made by the Board of Directors that required the approval of the Board of Commissioners, as well as those requiring the approval of the GMS, 90 times (in 90 letters). The Board of Commissioners also submitted reports / feedback to the SOE Minister as Shareholder, or the GMS, in relation to the Board's obligations based on the Articles of Association.

As part of the implementation of its supervisory and counseling tasks, the Board of Commissioners also regularly assessed the quality of recommendations and input provided by the Board of Commissioners' Committees, comprising the Audit Committee, the Risk Management Committee and the Nomination & Remuneration Committee.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa seluruh komite tersebut telah berupaya menjalankan fungsinya dengan baik, efisien dan efektif.

Namun demikian, dengan kondisi terkini, dimana PLN mendapatkan tugas baru yang berat yakni merealisasikan Program Pembangkit 35.000 MW tepat waktu dan berkualitas, Dewan Komisaris memandang perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas seluruh anggota Komite Dewan Komisaris. Untuk itu kami mengamanatkan anggota Komite Dewan Komisaris, selain Anggota Komisaris, untuk mengikuti program pelatihan kompetensi yang tersedia, sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing.

PROSPEK USAHA

Sebagaimana disinggung sebelumnya, sampai akhir tahun 2015 rasio elektrifikasi Indonesia masih sebesar 88,3%, dengan tingkat konsumsi listrik perkapita yang juga rendah. Mengingat daya listrik adalah salah satu infrastruktur dasar yang diperlukan oleh seluruh masyarakat dan tentunya pelaku usaha maka, masih sangat terbuka terjadinya kenaikan permintaan tenaga listrik di masa mendatang. Terlebih lagi data yang ada menunjukan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama beberapa tahun ini berada disekitar 1,1% dan pada saatnya, kelak memerlukan listrik.

Seperti telah banyak disinggung, pertumbuhan ekonomi suatu negara berbanding lurus dengan pertumbuhan permintaan listrik, sehingga dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berkisar, 5-7% pertahun, maka dibutuhkan tambahan kapasitas daya listrik antara 7,5-10,5% dari kapasitas daya tahun terakhir. Oleh karenanya sangat jelas bahwa pembangunan ketenagalistrikan, yakni penambahan daya listrik adalah suatu keniscayaan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan di negara yang telah maju sekalipun, investasi di bidang ketenagalistrikan mampu mendorong dan menopang pertumbuhan ekonominya.

Dalam kaitan PLN dan kondisi ketenagalistrikan di Indonesia, Dewan Komisaris berpendapat sudah seharusnya Direksi beserta jajarannya semakin serius berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan, khususnya pelanggan industri. Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 telah mengisayaratkan bahwa PLN bukan lagi pemegang kuasa tunggal di bidang ketenagalistrikan, kalangan swasta yang memiliki dan mengelola kawasan industri dimungkinkan untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik lengkap dengan jaringan transmisi di kawasan tersebut.

Hal tersebut berarti, PLN menghadapi adanya potensi persaingan di masa mendatang, terutama di kawasan-kawasan industri dan kawasan *mixed*, komersial dan industri, padahal pendapatan penjualan listrik dari

The Board of Commissioners believes that all of these committees have attempted to carry out their functions properly, efficiently and effectively.

However, with current conditions, in which PLN has received a heavy new duty, namely realizing the 35,000 MW Generating Program in a timely manner and with high enough quality, the Board of Commissioners saw the need to improve the competency and quality of all members of the Board of Commissioners' committees. We therefore mandated that members of these committees, other than the Commissioners, take part in available competency training programs according to the requirements of each task.

BUSINESS PROSPECTS

As previously mentioned, as of the end of 2015, Indonesia's electrification ratio remained at 88.3%, with a per capita level of electricity consumption that was also low. Considering that electrical power is a basic requirement for everyone, in particular businesses, there is still great potential for rising demand for electricity in the future. Moreover, available data indicate that Indonesia's population growth rate over the past few years has been approximately 1.1%, all of whom will need electricity.

As has been widely noted, the economic growth of a country is directly proportional to growth in electricity demand, thus, with projected economic growth in the range of 5-7% annually, additional electrical power capacity will be between 7.5-10.5% of the previous year's capacity. Therefore it is very clear that electrical power development, namely the creation of additional electrical power, is a necessity for developing countries like Indonesia. Even in developed countries, investment in electrical power can encourage and sustain economic growth.

With regard to PLN and electrical power conditions in Indonesia, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors and every employee should be more serious in their efforts to improve the quality of service to meet customer expectations, especially those of industrial customers. Electricity Law Num. 30 of 2009 has signaled that PLN is no longer the sole provider of power generation, the private sector who own and manage industrial zones are permitted to build and operate a power plant, along with its transmission lines, for that area.

This means that PLN must deal with potential competition in the future, particularly in industrial zones and mixed commercial and industrial areas, while revenue from the

pelanggan industri telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh pendapatan penjualan listrik.

Untuk itu, PLN dituntut untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat, efisien, dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan. Dan oleh karenanya membutuhkan dukungan SDM yang memiliki kompetensi tinggi, berperilaku sesuai GCG dan CoC *(Code of Conduct)* dalam menjalankan usahanya.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Tugas pembangunan Pembangkit 35.000 MW yang harus segera dimulai dan kondisi usaha yang semakin penuh tantangan membuat Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham PT PLN (Persero) memandang perlu dilakukannya perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Utama. Perubahan dilakukan untuk memperkuat kualitas peran penasehatan, kualitas konsultasi dan pengawasan yang menjadi tugas utama Dewan Komisaris.

Pada bulan April 2015, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-53/MBU/04/2015 tertanggal 28 April 2015, Sdr. Zulkifli Zaini diberhentikan dengan hormat selaku Komisaris dan pada bulan September 2015, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-183/MBU/09/2015 tertanggal 25 September 2015 diangkat Sdr. Aloysius Kiik Ro sebagai Komisaris.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-223/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015, Sdr. Chandra Hamzah diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Sdr. Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komisaris Utama, serta secara bersamaan Sdr. S. Milton Pakpahan diberhentikan dengan hormat, dan menugaskan Sdr. Jarman untuk kembali mengemban tugas sebagai Komisaris. Pada tanggal 24 Mei 2016 melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-106/MBU/05/2016, Sdr. Kuntoro Mankusubroto diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Utama dan saya, Hasan Bisri, ditunjuk oleh Menteri BUMN selaku RUPS sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama. Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Chandra Hamzah, Sdr. Zulkilfi Zaini, Sdr. S Milton Pakpahan dan Sdr. Kuntoro Mangkusubroto atas sumbang saran dan buah pikiran yang telah disampaikan selama menjalankan tugas di Dewan Komisaris PT PLN (Persero).

Dengan demikian, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Plt. Komisaris Utama : Hasan Bisri
2. Komisaris Independen : Oegroseno
3. Komisaris Independen : Darmono
4. Komisaris : Harry Susetyo Nugroho
5. Komisaris : Jarman

sale of electricity to industrial customers contributes significantly to overall electricity sales revenue.

To that end, PLN is must have a healthy financial condition, be efficient, able to meet levels of reliability and service expected by customers, and therefore requires the support of human resources of high competence, who behave according to GCG and the CoC (Code of Conduct) when conducting business.

CHANGES TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duty of implementing the 35,000 MW Power Plant Program, which must start very soon, and the increasingly challenging business conditions have resulted in the Government of Indonesia, as shareholder of PT PLN (Persero), to require changes in the composition of the Board of Commissioners and to the President Commissioner. These changes have been made to strengthen the quality of the advisory, consultation and supervisory roles, which are the main duty of the Board of Commissioners.

In April 2015, according the SOE Ministerial Regulation, per the GMS, Num. SK-53/MBU/04/2015 dated 28 April 2015, Zulkifli Zaini was honorably discharged as Commissioner, while in September 2015, through SOE Ministerial Regulation, per the GMS, Num. SK-183/MBU/09/2015 dated 25 September 2015, Aloysius Kiik Ro was appointed Commissioner.

Furthermore, in accordance with SOE Ministerial Regulation, per the GMS, Num. SK-223/MBU/11/2015 dated 10 November 2015, Chandra Hamzah was honorably discharged and replaced by me, Kuntoro Mangkusubroto, as President Commissioner. On May 24, 2016 through the Minister of SOEs as General Meeting of Stakeholders Num. S -106/MBU/05/2016, Kuntoro Mankusubroto was dismissed with respect as President Commissioner and I was appointed by Minister of SOEs as General Shareholder Meeting as Acting President Commissioner. Likewise, at the same time, S. Milton Pakpahan was honorably discharged and Jarman was reappointed to carry out duties as a Commissioner. On behalf of the Board of Commissioners, I wish to thank Chandra Hamzah, Zulkilfi Zaini, S Milton Pakpahan and Kuntoro Mangkusubroto for all their advice and ideas submitted during their stints on the PT PLN (Persero) Board of Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners was as follows:

1. Act. President Commissioner : Hasan Bisri
2. Independent Commissioner : Oegroseno
3. Independent Commissioner : Darmono
4. Commissioner : Harry Susetyo Nugroho
5. Commissioner : Jarman

6. Komisaris : Andin Hadiyanto
7. Komisaris : Budiman
8. Komisaris : Hasan Bisri
9. Komisaris : Aloysius Kiik Ro

PENUTUP

Akhir kata, Kami, Dewan Komisaris, mengucapkan terima kasih kepada Direksi beserta seluruh jajarannya atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukan sehingga PLN mampu melalui kondisi usaha tahun 2015 yang semakin penuh tantangan dengan mencatatkan perbaikan kinerja operasional dan semakin kuatnya fondasi keuangan. Lebih dari itu telah meletakan dasar-dasar yang kuat untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan Program Pembangkit 35.000 MW.

Selanjutnya, Dewan Komisaris mengajak Direksi beserta jajarannya untuk kembali bekerja keras dan bersinergi untuk meningkatkan hasil-hasil yang telah diraih di tahun 2015 dan mendukung penuh implementasi rencana-rencana strategis termasuk dalam merealisasikan pembangunan fisik dari proyek-proyek ketenagalistrikan dalam Program 35.000 MW tersebut, yang pada akhirnya menjadikan PLN sebagai agen pembangunan yang berkualitas yang mampu mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan optimal.

Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas sumbang saran serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, dan khususnya kepada Pemerintah, yang telah memberi respon dengan cepat dan tepat terhadap kendala-kendala eksternal yang selama ini dihadapi Perseroan dalam menjalankan tugas pemenuhan kebutuhan listrik untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Maret 2016

6. Commissioner : Andin Hadiyanto
7. Commissioner : Budiman
8. Commissioner : Hasan Bisri
9. Commissioner : Aloysius Kiik Ro

CLOSING

Finally, we, the Board of Commissioners, would like to thank the Board of Directors and every employee for their dedication and hard work to help PLN work through the challenging business conditions of 2015 and record improved operational performance and strengthen our financial foundation. Further, this has provided the Company with a strong foundation to ensure the success of the 35.000 MW Power Plant Program.

Further, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors and all PLN's employees to continue the hard work and synergy to improve on 2015's achievements and fully support the implementation of strategic plans, including the physical development of the of electrical power projects in the 35,000 MW Program, which finally will make PLN a high quality agent of development able to support optimum economic growth.

We also cannot forget to thank all our stakeholders for their advice and support, in particular the Government, which has responded promptly and precisely to the external obstacles the Company has been facing to fulfill the electricity needs of every layer of Indonesian society.

Jakarta, March 2016

Atas nama Dewan Komisaris PT PLN (Persero)
On behalf of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)

PLT. KOMISARIS UTAMA
ACT. PRESIDENT COMMISSIONER

HASAN BISRI

Sofyan Basir
Direktur Utama President Director

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Oleh karenanya kami bertekad mempersiapkan, melaksanakan dan mensukseskan pembangungan ketenagalistrikan skala besar "PROGRAM PEMBANGKIT 35.000 MW" tersebut dengan seluruh kompetensi kami semata-mata untuk mendukung pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, sejajar dengan negara-negara maju di dunia.

Therefore, we are determined to prepare, implement and succeed in this large-scale "35,000 MW Power Plant Program" electrical power construction project with all our ability, solely to support national development that creates an Indonesian society that is fair and prosperous, in line with the developed countries of the world.

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2015 telah kita lalui bersama dan akan kita kenang sebagai salah satu tahun yang berat, karena berbagai tantangan yang mengiringi perjalanan seluruh pelaku usaha. Pelemahan pertumbuhan perekonomian nasional sebagai imbas dari masih belum kondusifnya kondisi perekonomian global yang berdampak pada berkurangnya pendapatan usaha, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang berdampak pada mahalnya berbagai komponen bahan baku dan barang modal, merupakan bentuk tantangan nyata yang harus diatasi seluruh pelaku usaha, termasuk PLN.

Distinguished Stakeholders,

We have traveled 2015 together and will remember it as a tough year for the challenges that accompanied all businesses along the journey. The weakening of national economic growth as a result of the still unfavorable global economic conditions led to a reduction in operating revenues, while the weakening of the rupiah against the dollar had an impact that was felt in the higher cost of various raw materials and capital goods, creating real challenges for all businesses to overcome, including PLN.

Tahun 2015 di sisi lain, menjadi tahun yang amat berkesan bagi kami, Direksi PLN, mengingat tahun ini adalah tahun pertama kami mulai mejalankan amanah untuk memimpin salah satu perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia, serta mengelola seluruh aset tersebut agar memberi kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional, setelah diangkat untuk menggantikan jajaran Direksi PLN sebelumnya pada akhir Desember tahun 2014 lalu.

Kami telah mengamati dengan seksama berbagai tantangan yang harus diatasi oleh PLN. Dari beragam tantangan yang kami identifikasi, seluruhnya mengerucut pada tiga tantangan pokok, yakni: mencari solusi untuk segera mengatasi masalah pemadaman listrik yang masih terjadi di berbagai tempat di Indonesia, meningkatkan efisiensi PLN terutama efisiensi biaya produksi listrik dan meningkatkan daya pasokan listrik nasional.

PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35.000 MW

Tahun 2015 kemudian juga ditandai dengan suatu penugasan yang kami pandang sebagai suatu kehormatan bagi Direksi beserta seluruh jajaran PLN, yakni program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW Untuk Indonesia, lengkap beserta sarana pendukung transmisi - distribusi sepanjang 47.329 kms dan Gardu Induk dengan kapasitas 118.617 MVA.

Dalam realisasinya, kelak yang akan dibangun bertambah dengan sejumlah pembangkit dengan kapasitas sebesar 7.000 MW dari proyek-proyek eksisting yang tengah dalam masa konstruksi, sehingga total pembangkit yang akan dibangun adalah sebesar 42.000 MW dengan perkiraan nilai pendanaan yang dibutuhkan adalah sebesar US$72,33 miliar.

Kami memandang tugas tersebut sebagai cara untuk mengatasi dua dari tiga tantangan utama PLN tersebut diatas. Sebaran area pembangunan pembangkit Program 35.000 MW yang terdapat di 210 lokasi di seluruh Indonesia kami yakini akan mampu mengatasi masalah pemadaman listrik tersebut. Sementara total kapasitas pembangkit yang secara keseluruhan mencapai 42.000 MW kami yakini akan mampu meningkatkan daya pasokan listrik nasional sesuai perkembangan permintaan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Sesuai dengan proyeksi kebutuhan listrik yang telah kami rangkumkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, pembangunan Pembangkit 35.000 MW tersebut adalah suatu keniscayaan, suatu kebutuhan yang harus disediakan agar Indonesia dapat berdiri sejajar dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh

On the other hand, 2015 was a very memorable year for us, the PLN Board of Directors. This was the first year for us to carry out the mandate to lead one of the companies with the largest assets in Indonesia and to manage all of these assets in such a way as to provide the optimum contribution to national development, after previously elected as PLN President Director in late December 2014

We have been closely observing many challenges that PLN must overcome. Out of the variety of things that we identified, all of them could be summarized as three main challenges, namely: finding a solution to immediately address the problem of power outages that still occur in many places in Indonesia, increasing PLN's efficiency especially the cost of production, and improving the national electricity supply.

35,000 MW POWER PLANT DEVELOPMENT PROGRAM

2015 was also marked with an honor task for us, the Board of Directors and everyone at PLN about the 35,000 MW Power Plant for Indonesia, along with all its supporting transmission and distribution facilities along 47,329 kilometers and the 118,617 MVA capacity in substations.

In reality, there will be an increasing number of power plants with a capacity of 7,000 MW from existing projects in the construction period, so the total power plant project will be 42,000 MW in new power plants with an estimation's funding value required of US$ 72.33 billion.

We see this task as a way of addressing two of PLN's three main challenges mentioned above. The power plants being constructed for the 35,000 MW program are distributed in 210 locations across Indonesia, which we believe will overcome the problem of power outages. Meanwhile, the total generating capacity of 42,000 MW, we believe that this can improve national electricity supply in 5 years ahead.

In accordance with the projected electricity demand that we summarized in the General Plan for the Provision of Electricity, the 35,000 MW power plant construction is a necessity, something that must be provided for Indonesia so the country can stand alongside with several countries in the Southeast Asian region that have already been

masyarakatnya, dengan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Indonesia hingga akhir tahun 2015, baru mencatatkan rasio elektrifikasi sebesar 88,3%, dan diakhir masa realisasi program tersebut akan mencapai 97,4%.

successful in meeting the electricity needs of their whole populations with 100 % electrification ratio. As of the end of 2015, Indonesia only recorded an electrification ratio of 88.3% and by the end of the program will have reached 97.4%.

Kami juga memandang realisasi pembangunan Program Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia tersebut juga akan mendukung pencapaian dua dari empat misi-misi PLN, yakni "Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat" dan "Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi". Perhitungan kami menunjukkan realisasi pembangunan berbagai ukuran pembangkit dan jaringan transmisi, distribusi serta Gardu Induk tersebut akan menyerap tidak kurang dari 650.000 tenaga kerja langsung dan menyediakan kesempatan kerja tidak langsung hingga 3 juta orang pekerja. Jumlah tersebut belum termasuk kesempatan kerja yang tercipta dari tersedianya pasokan listrik yang mampu mendukung kegiatan ekonomi di kawasan yang baru teraliri listrik dengan memadai di masa mendatang.

We also consider that the realization of the 35,000 MW power plant program for Indonesia will support the achievement of two of PLN's four mission statements: "Making electricity a medium to improve the quality of life" and "Striving to make electrical power a driving force for economic activity". Our calculations demonstrate that the construction of power plants of various sizes, their transmission and distribution networks, as well as substations, will absorb no less than 650,000 workers directly, while indirectly providing employment opportunities for 3 million workers. This does not include employment opportunities created by the future availability of electricity that can support economic activity in areas newly supplied with sufficient electricity.

Kami menyadari merealisasikan program tersebut bukanlah tugas yang mudah, namun kami meyakini kompetensi yang telah terakumulasi sampai dengan saat ini, ditambah dengan tekad dan niat baik seluruh jajaran akan membuat tugas tersebut dapat kami laksanakan dan selesaikan tepat waktu, berkualitas dan dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena keterbatasan dana yang dihadapi, kami mengajak dan mendukung penuh keputusan Pemerintah melibatkan pihak swasta dalam merealisasikan program pembangunan kelistrikan nasional skala besar tersebut.

We realize that this program is not an easy task, but we believe that the competencies we have accumulated up to this time, coupled with determination and good faith throughout the workforce, will mean that we can carry out the task and finish on time, with a justifiable quality and budget. Due to the budget constraints we face, we encourage and fully support the Government's decision to involve the private sector in the realization of this large-scale national development program.

Secara bertahap, namun pasti, kami akan merealisasikan pembangunan berbagai pembangkit berkapasitas total 10.681 MW dari total 35.000 MW tersebut, berikut seluruh infrastruktur transmisi – distribusi dan gardu induk yang diperlukan. Di saat bersamaan, kami akan mengawasi realisasi pembangunan pembangkit berskema *Independent Power Producer* (IPP) dengan kapasitas total 25.904 MW sebagai bagian dari Program 35.000 MW untuk Indonesia. Kami sangat berkepentingan untuk memastikan seluruh pembangkit yang dibangun dengan skema IPP tersebut selesai pada waktunya, dan dengan kualitas yang dapat diandalkan, mengingat seluruh daya yang dihasilkan akan menjadi bagian dari total daya listrik yang kami kelola untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Gradually, but surely, we will realize the construction of various power plants with a total capacity of 10,681 MW out of the total of 35,000 MW, in addition to the entire transmission - distribution infrastructure and substations that are needed. At the same time, we will oversee the realization of the Independent Power Producer (IPP) construction scheme with its total capacity of 25,904 MW as part of the 35,000 MW Power Plant Program for Indonesia. We are determined to ensure that all the power plants built under the IPP scheme are completed on time with reliable quality, bearing in mind that all the power generated will become part of the power that we manage to satisfy national development needs.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DIJALANKAN

Strategi Implementasi Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW

Kami menyadari adanya sikap skeptis dari berbagai pihak eksternal yang menyangsikan keberhasilan realisasi Program 35.000 MW, mengingat realisasi Program Percepatan 10.000 MW Tahap I mundur hingga 4 tahun lamanya dan belum selesai hingga saat ini. Juga realisasi Program Percepatan 10.000 MW Tahap 2 yang terkendala.

Namun justru dari pengalaman tersebut, kami mengambil hikmah dan mempelajari dengan seksama berbagai hambatan dan kendala utama yang membuat program-program tersebut tidak dapat selesai pada waktunya. Kemudian mempersiapkan berbagai program strategis untuk memastikan hambatan dan kendala utama tersebut dapat diatasi bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kami telah mengidentifikasi adanya 3 hambatan pokok yang bersifat strategis, 2 berada di luar kompetensi PLN, 1 berada dalam kompetensi PLN untuk memperbaikinya. Kedua hambatan eksternal adalah masalah perijinan dan pembebasan lahan. Satu hambatan internal adalah lemahnya manajemen pengawasan proyek.

Untuk mengatasi hambatan utama yang berada di luar kompetensi PLN, kami melakukan pembicaraan dan diskusi intensif dengan Pemerintah selaku pemegang saham. Dari berbagai proses diskusi dan kajian bersama, Pemerintah kemudian telah menetapkan berbagai aturan dan kebijakan teknis maupun strategis dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM maupun Peraturan Presiden dan kemudahan dalam pengurusan perijinan, meliputi:

1. Percepatan Proses Pembebasan Lahan untuk Proyek Umum, Menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah turunannya.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung.

IMPLEMENTED STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

Implementation Strategy for the 35,000 MW Power Plant Development Program

We are aware of the skepticism of various external parties who doubt the success realization of the 35,000 MW program, considering that Phase 1 of the 10,000 MW Acceleration Program has been delayed for four years and is still not complete. Also, Realization of Phase 2 of the 10,000 MW Acceleration Program faced obstacles.

However, it is precisely from this experience that we are learning, carefully studying the major obstacles and constraints that have caused these programs to fail to be completed on time. We are now able to prepare various strategic programs to ensure major obstacles and constraints can be addressed in collaboration with all stakeholders.

We have identified three strategically, principal obstacles, two of which are beyond PLN's abilities and one that PLN can address. The two external obstacles are the issue of permits and land acquisition. The internal obstacle is weak project monitoring management.

To address the principal obstacles outside PLN's control, we have held intensive discussions with the Government as our shareholder. The result of this discussion process and joint studies has been for the Government to mandate various rules and technical and strategic policies in the form of Regulations issued by the Energy and Mineral Resources Ministry and the President to facilitate the permit process. These are:

1. Acceleration of the Land Acquisition Process for Public Projects, using Law Num. 2 of 2012 on the Procurement of Land for Public Interests and the derivative of the Government Regulations.
2. Energy and Mineral Resources (ESDM) Ministerial Regulation Num. 1 of 2015 on Cooperation to Supply Electricity and the Joint Utilization of the Power Grid.
3. ESDM Ministerial Regulation Num. 3 of 2015 on the Procedure to Purchase Electrical Power and Standard Prices to Purchase Electrical Power from Mine Face Power Plants, Coal-fired Power Plants, Gas-turbine and Micro Gas-turbine Power Plants and Hydro Power Plants by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Through Direct Selection and Direct Appointment.

4. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
5. Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara.
6. Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas.
7. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
8. Proses Perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.

Kami menindaklanjuti terbitnya berbagai aturan implementasi teknis tersebut dengan menggalang kerjasama dan membuka komunikasi intensif dengan berbagai Lembaga Tinggi Negara dalam bidang penegakan hukum, seperti Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Agung, Komite Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, bahkan dengan TNI. Tujuannya adalah mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin masih dijumpai dalam merealisasikan pembangunan sarana ketenagalistrikan, khususnya dalam hal perijinan dan pembebasan lahan, sesuai dengan koridor ketentuan aturan perundangan yang berlaku. Dengan kerjasama intensif tersebut, kami meyakini tidak ada lagi keraguan pelaksana di lapangan dalam merealisasikan program-program pembangunan ketenagalistrikan.

Dalam rangka mengatasi kendala internal, yakni lemahnya manajemen pengawasan proyek, kami telah merealisasikan langkah strategis internal, yakni melakukan Restrukturisasi Organisasi Korporasi, dengan mengubah nomenklatur dan jabatan di tingkat Direktorat. Kami membagi tugas Direktur menjadi dua bagian besar, yakni pertama Direktur yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi korporasi, yakni: Direktur Keuangan, Direktur Perencanaan Strategis, Direktur *Human Capital Management* dan Direktur Pengadaan. Kedua, Direktur yang bertugas dan bertanggung-jawab terhadap bisnis PLN di tujuh Wilayah Regional. Para Direktur Bisnis Regional tersebut bertanggung jawab terhadap operasional dan pengelolaan bisnis PLN secara *end-to-end*, yakni mulai dari penyediaan tenaga listrik, pemasaran, penanganan keluhan pelanggan, administrasi penjualan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan di masing-masing Wilayah Regional.

4. ESDM Ministerial Regulation Num. 18 of 2015 on Minimum Space and Distance from High Voltage Power Lines, Extra High Voltage Power Lines and Direct Current High Voltage Power Lines to Distribute Electricity.
5. ESDM Ministerial Regulation Num. 19 of 2015 on the Purchase of Electrical Power from Hydro Power Plants with a Capacity of up to 10 MW (Ten Megawatts) by PT Perusahaan Listrik Negara.
6. ESDM Ministerial Regulation Num. 31 of 2015 on the Supply of Electrical Power to Buildings in Restricted Areas.
7. Presidential Regulation Num. 4 of 2016 on the Acceleration of Electrical Power Infrastructure Construction.
8. An Integrated One-Stop Service at BKPM for the Permit Process.

We have followed up the publication of these technical implementation rules by entering into cooperation and intensively opening communication with various State Agencies in the field of law enforcement, such as the High Court, the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission, the National Police and the Armed Forces. The goal is to find solutions together to overcome obstacles that may be found during the construction of these electrical power facilities, especially related to licensing and land acquisition, in accordance with the prevailing conditions for these regulations. With this intensive collaboration, we believe that there is no doubt in the field about the realization of these electrical power development programs.

To overcome the internal obstacle, i.e. poor project supervision management, we have taken strategic internal steps through a Corporate Organizational Restructuring, changing the nomenclature and positions at Directorate level. We have divided the Directors' tasks into two major sectors; Firstly, Directors in charge of and responsible for corporate functions, namely: Director of Finance, Director of Strategic Planning, Director of Human Capital Management and Director of Procurement; Secondly, the directors in charge of and responsible for PLN's business in the seven Operational Regions. These Regional Business Directors are responsible for the operation and management of PLN's business from end-to-end, ranging from electricity supply, marketing, customer-complaint handling, sales administration, development and electricity infrastructure maintenance of the electrical power infrastructure in each Operational Region.

Murtaqi Syamsuddin | Supangkat Iwan Santoso | Muhamad Ali | Sofyan Basir | Nicke Widyawati | Nasri Sebayang

Dengan demikian pengawasan proyek pembangunan ketenagalistrikan, termasuk realisasi Pembangkit 35.000 MW kini dan kedepan, diawasi oleh satu Direktorat yang bertanggung jawab dari awal pelaksanaan hingga masa produksi dan penjualan tenaga listrik yang dihasilkan.

Thus, the supervision of electricity development projects, including the realization of power plants to supply 35,000 MW, is now and in the future supervised by the Director who responsible from the project start until production and the sales of generated power.

STRATEGI PERBAIKAN KINERJA OPERASIONAL

Selain mempersiapkan dan memastikan kelancaran Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW, kami juga tetap memberi perhatian pada upaya peningkatan efisiensi operasional untuk memperbaiki kinerja operasional maupun kinerja keuangan sekaligus mengatasi kondisi usaha di tahun 2015. Kami menetapkan 10 (sepuluh)

STRATEGY FOR OPERATIONAL PERFORMANCE IMPROVEMENTS

In addition to preparing and ensuring the smooth running of the 35,000 MW Power Plant Development Program, We are still paying attention to increase operational efficiencies for improving operational and financial performance while overcoming the business condition in 2015. We determined 10 (ten) priority programs as a

Djoko R Abu Manan | Amin Subekti | Sarwono Sudarto | Amir Rosidin | Haryanto W.S. | Machnizon

program prioritas sebagai strategi untuk mensinergikan tuntutan mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan, dengan sumber daya Perusahaan yang terbatas. Ada pun sepuluh program tersebut: (1) mempertahankan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan; (2) mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal; (3) menjaga kecukupan pasokan listrik; (4) menjamin ketersediaan energi primer; (5) optimalisasi bauran energi; (6) meningkatkan efisiensi operasi; (7) meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi; (8) melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan

strategy to synergize the demands of excellent operating performance and serving customer growth within the Company's limited resources. These ten programs are: (1) maintaining the Company's financial health; (2) encouraging the completion of financial closing by the Independent Power Producers (IPP) and the on-time completion of construction; (3) maintaining a sufficient supply of electricity; (4) ensuring the availability of primary energy; (5) optimizing the energy mix; (6) increasing operational efficiency; (7) increasing the consolidation of business processes for service integrity and efficiency; (8) accelerating the licensing process and land acquisition process for the construction of electrical

lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan melalui pengelolaan *Service Level Agreement* (SLA) secara intensif; (9) melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM dan (10) sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG DIJALANKAN

Untuk memastikan capaian kinerja operasional, kami telah menjalankan langkah-langkah strategis, mencakup:

1. Mengatasi kendala utama yakni pembebasan lahan yang menghambat penyelesaian pembangunan ketenagalistrikan dengan menerapkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2012.
2. Melakukan amandemen kontrak dalam hal terjadi deviasi kontrak.
3. Melakukan penyelesaian permasalahan untuk kontraktor yang tidak mampu melalui langkah pengambilalihan pekerjaan.
4. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk IPP.
5. Penerapan program berkelanjutan *Operational Performance Improvement* (OPI).
6. Menerapkan program GOS *(Generation of Sales)* atau program membangkitkan upaya penjualan, termasuk pemberlakuan tarif Luar Waktu Beban Puncak.
7. Implementasi kebijakan tarif tenaga listrik baru sesuai ketentuan pemerintah.
8. Merintis upaya *hedging* terhadap kewajiban berdenominasi valas, sesuai ketentuan yang berlaku.

KINERJA OPERASIONAL

Dedikasi, kerja keras dan disiplin seluruh jajaran dalam melaksanakan beragam inisiatif strategis untuk mencapai target-target prioritas jangka pendek maupun jangka panjang memberikan capaian sebagai berikut.

Realisasi Persiapan dan Implementasi Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW

Beberapa aspek strategis yang telah berhasil direalisasikan untuk memastikan penyelesaian Program Pembangkit 35.000 MW yang tepat waktu, diantaranya mencakup:

1. Penandatanganan *Power Purchase Agreement* dengan pengembang listrik swasta dengan total daya 14.454 MW dan penandatanganan kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) dengan daya total sebesar 2.883 MW, sehingga total capaian proyek yang sudah PPA dan EPC sebesar 17.336 MW sebagai bagian dari realisasi Program 35.000 MW.

power projects through intensive service level agreement (SLA) management; (9) optimizing the organization and improving the quality of human resources, and (10) Subsidiary synergies to support the achievement of corporate strategic direction and business processes.

STRATEGIC STEPS TAKEN

To ensure operational performance is achieved, we have taken several strategic steps, including:

1. Handling the primary obstacle of land acquisition, which delays the completion of electrical power facilities, through the application of Law Num. 2 of 2012.
2. Amending contracts when there has been contract deviation.
3. Settling issues for contractors with problems by transferring work.
4. Encouraging financial closing by IPPs.
5. Implementing the Operational Performance Improvement (OPI) sustainability program.
6. Implementing the GOS (Generation of Sales) program, which strives to increase sales, including through the Off Peak tariff.
7. Implementing electrical power tariff policies in accordance with government regulations.
8. Implementing hedging for liabilities in foreign currencies, in accordance with applicable regulations.

OPERATIONAL PERFORMANCE

The dedication, hard work and discipline of everyone in carrying out these strategic initiatives to achieve both short and long-term priority targets have resulted in the following achievements.

Preparations and Implementation of the 35,000 MW Power Plant Development Program

Some of the strategic aspects that have been successfully realized to ensure the on-time completion of the 35,000 MW Power Plant Development Program include:

1. The signing of Power Purchase Agreements with private power developers for a total of 14,454 MW and the signing of an Engineering Procurement and Construction (EPC) agreement for 2,883 MW, totaling 17,336 MW of power through PPA and EPC as part of the 35,000 MW program.

2. Pembentukan 7 Direktorat Bisnis Regional, masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis *end-to-end* di masing-masing wilayah.
3. Penguatan Manajemen Pengawasan Proyek di bawah koordinasi Direktur Bisnis Regional dan Direktur Perencanaan Strategis.
4. Penyelesaian program revaluasi aset properti PLN untuk meningkatkan potensi penggalangan dana untuk membiayai proyek.
5. Kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dalam dan luar negeri.
6. Kerjasama dengan berbagai lembaga tinggi negara, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia.

2. The establishment of 7 Regional Business Directorates, each headed by a Director who is responsible for business processes end-to-end in each region.
3. Strengthening Project Supervision Management under the coordination of the Regional Business Director and Director of Strategic Planning.
4. Completion of PLN's property assets revaluation program to increase the potential to raise funds to finance projects.
5. Cooperation with various banking institutions at home and abroad.
6. Cooperation with various government agencies, such as the Attorney General, the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission, the National Police, the National Intelligence Agency and the Indonesian Military.

ASPEK PEMASARAN

Penjualan tenaga listrik tahun 2015 naik 2,1% menjadi 202.846 GWh, dengan rincian penjualan pada kelompok pelanggan rumah tangga naik 5,5%, kelompok pelanggan bisnis naik 1,9%, dan kelompok pelanggan lainnya naik 6,4%, namun terjadi penurunan penjualan pada kelompok pelanggan industri sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya.

Akibat turunnya penggunaan tenaga listrik oleh kelompok industri, kenaikan penjualan listrik tersebut berada di bawah tingkat pertumbuhan jumlah pelanggan yang bertambah 3,7 juta pelanggan atau naik 5,1% dari penambahan jumlah pelanggan tahun 2014, sehingga total pelanggan mencapai angka 61,2 juta pelanggan. Penambahan jumlah pelanggan tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi 88,3% naik dari posisi 84,3% di tahun 2014.

Menurunnya konsumsi kelompok industri juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penambahan daya tersambung di tahun 2015 yang turun 5,5% menjadi sebesar 6.552 MVA di bawah pertumbuhan tahun 2014 sebesar 6.936 MVA, sehingga total daya tersambung kini menjadi 106.582 MVA.

Adapun hasil realisasi usaha dibandingkan target dari aspek pemasaran adalah:

MARKETING ASPECT

Sale of electricity in 2015 rose 2.1% to 202,846 GWh, with a breakdown comprising a 5.5% rise in household customers, a 1.9% rose in business customers and a 6.4% rose in other customers, however, sales to industrial customers fell 2.8% year on year.

As a result of declining power use in the industrial sector, the rise in sales was below the level of customer growth, which saw an additional 3.7 million customers, or a rise of 5.1% from 2014's total customer growth; thus PLN now has 61.2 million customers. The increase in customer numbers resulted in the country's electrification ratio rising to 88.3%, from 84.3% in 2014.

The decreasing consumption of the industry sector also affected additional connected power growth in 2015, which fell by 5.5% to 6,552 MVA, below growth in 2014 of 6,936 MVA, thus current total connected power right now is 106,582 MVA.

Business realization compared to targets from a marketing aspect:

Keterangan	Satuan Units	Target Target	Realisasi Realization		Capaian Achievement		Description
		(a)	2014 (b)	2015(c)	(c) / (a)	(c) / (b)	
Penjualan tenaga listrik	GWh	210.204	198.602	202.845	96,5%	2,1%	Sales of electrical power
Penambahan pelanggan	Pelanggan Customer	3.595.031	3.497.026	3.674.746	102,2%	5,1%	Additional customers
Penambahan daya tersambung	MVA	6.376	6.936	6.552	102,8%	(5,5%)	Additional connected power

Dari tabel tersebut, tampak bahwa aspek pemasaran yang tidak mencapai target adalah volume penjualan tenaga listrik, sekalipun tetap naik dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya antara lain : (i) kondisi perekonomian global yang menurunkan permintaan produk-produk manufaktur nasional; (ii) penurunan permintaan membuat kegiatan industri berkurang dan mengurangi penggunaan listrik; (iii) adanya kecenderungan industri membangun pembangkit sendiri.

From the table above, it can be seen that from a marketing aspect, the electrical power sales target was not achieved, even though sales rose compared to the previous year. The reasons for this include: (i) global economic conditions resulting a reduced demand for domestically manufactured products; (ii) falling demand made industry activity decrease and reduced electricity usage; (iii) a tendency within the industrial sector to generate their own electricity.

Kami berupaya mengantisipasi penurunan permintaan listrik dari pelaku industri dengan meningkatkan kualitas layanan dan keandalan pasokan listrik, serta memberikan insentif berupa pemberian diskon tarif pada Luar Waktu Beban Puncak.

We attempted to pre-empt the fall in demand from the industrial sector by improving service quality and supply reliability, as well as providing incentives through discounted tariffs for Off Peak use.

Produksi dan Pembelian Tenaga Listrik

Kondisi perekonomian kurang kondusif tidak menghalangi upaya PLN untuk tetap menyeimbangkan peningkatan permintaan tenaga listrik dengan suplai tenaga listrik yang memadai. Hasilnya, produksi tenaga listrik mencapai 233.982 GWh, naik sebesar 2,4% dari produksi tahun sebelumnya, sebesar 228.555 GWh.

Electrical Power Production and Purchase

The less favorable economic conditions did not hinder PLN's efforts to balance the increase in demand for power with an adequate supply of electrical power. As a result, electricity power production reached 233,982 GWh, 2.4% increase from the previous year's production of 228,555 GWh.

Kami menerapkan strategi mengurangi penggunaan BBM, dan sebaliknya meningkatkan penggunaan sumber energi batubara, gas dan sumber energi terbarukan guna mendapatkan pola bauran energi yang memberi *benefit* optimal dalam rangka menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP).

We have implemented strategies to reduce the use of oil fuel, in the other hand increasing the use of coal, gas and renewable energy to obtain an energy mix that gives optimum benefits to reduce the Cost of Production (BPP).

Di tahun 2015, total produksi listrik dari pembangkit milik sendiri naik 2,5% mencapai 156.631 GWh. Sekalipun naik, hasil ini sebetulnya di bawah target yang ditetapkan, yakni sebesar 157.978 GWh seperti tercantum pada tabel berikut. Kekurangan ini kemudian disuplai oleh produksi listrik sewa dan IPP yang naik 2,2% menjadi sebesar 77.351 GWh, sehingga total produksi listrik nasional naik 2,4% menjadi 233.982 GWh, 0,4% di atas target produksi listrik yang ditetapkan.

In 2015, total electricity production from our own generation rose 2.5% to 156,631 GWh. Despite this increase, the result is below the targeted amount of 157,978 GWh, as seen in the following table. The deficiency was supplied by leased electricity production and IPPs, which rose 2.2% to 77,351 GWh, thus total national electricity production rose 2.4% to 233,982 GWh, 0.4% above the predetermined electricity production target.

Kurangnya pencapaian target produksi tenaga listrik PLN tersebut terutama disebabkan oleh terlambatnya COD beberapa pembangkit reguler yang seharusnya sudah selesai.

PLN's inability to achieve the production target was mainly caused by the delayed COD of some regular power plants that should have been completed.

Sekalipun lebih mengandalkan pasokan listrik berbahan bakar batubara dan gas alam, kami tetap berupaya mengintensifkan penggunaan sumber energi baru terbarukan dalam memproduksi daya listrik, baik melalui PLTP maupun penggunaan bahan nabati dan sumber daya bayu dan surya untuk wilayah-wilayah tertentu.

While relying mainly on coal and natural gas to produce electricity, we are intensifying the use of new and renewable energy sources for electricity generation through geothermal power plants, as well as bio energy sources and wind and solar power in certain areas.

Di tahun 2015, daya listrik dari pembangkit milik sendiri dengan sumber energi BBM berkurang 39,1% dari tahun sebelumnya, sebaliknya listrik dari pembangkit PLTU non-BBM bertambah sebagai hasil penyelesaian pembangunan beberapa pembangkit reguler maupun FTP-1. Bertambahnya pasokan listrik dari pembangkit batubara dan gas tersebut mampu mendukung upaya pengurangan konsumsi BBM.

Upaya meningkatkan kualitas bauran energi tersebut membuat PLN mampu menekan besaran BPP pada kisaran Rp1.300,49/kWh, turun 8,4% dari Rp1.419,68/kWh di tahun 2014. Kami berupaya memaksimalkan dampak penurunan energi primer (BBM dan batubara) untuk menurunkan BPP tersebut.

In 2015, electrical power that PLN generated using oil fuel fell by 39.1% year on year, while electricity from non-fuel oil power plants rose due to the completion of several regular power plants and those from Phase 1 of the 10,000 MW Program (FTP-1). The increase in electricity supply generated from coal and gas supported the reduction in oil fuel consumption.

Efforts to increase the quality of the energy mix have resulted in PLN being able to reduce the cost of production to approximately Rp1,300.49/kWh, a fall of 8,4% from Rp1,419.68/kWh in 2014. We are working to maximize the impact of a reduction in primary energy (oil and coal) to reduce the cost of production.

Pencapaian produksi listrik dibandingkan target adalah:

Electricity produced compared to targets:

Keterangan	Satuan Units	Target Target	Realisasi Realization		Capaian Achievement		Description
		(a)	2014 (b)	2015(c)	(c) / (a)	(c) / (b)	
Produksi Tenaga Listrik Sendiri	GWh	157.978	152.853	156.631	99,1%	2,5%	Own-generated electricity production
Produksi Tenaga Sewa dan IPP	Pelanggan Customer	75.049	75.701	77.351	103,1%	2,2%	Leased and IPP electricity production
Total Produksi Listrik	MVA	233.027	228.555	233.982	100,4%	2,4%	Total Electricity Production
Bauran Energi - BBM		8,52	11,37	8,22	96,5%	(27,7%)	Energy Mix – oil fuel

Kapasitas Terpasang dan Pemeliharaan

Di tahun 2015, PLN berhasil menyelesaikan pembangunan beberapa pembangkit milik sendiri (pembangkit program FTP-1 dan pembangkit reguler). Demikian juga dengan pembangunan beberapa pembangkit swasta dalam skema IPP. Sehingga total kapasitas terpasang seluruh pembangkit nasional naik 2,46% menjadi sebesar 52.889,22 MW dari 51.620,6 MW di tahun 2014.

Kapasitas pembangkit milik PLN sebesar 40.295,2 MW, naik 2,64% dari 39.257 MW di tahun sebelumnya, berkontribusi sebesar 76,19 % dari total pembangkit nasional di tahun 2015. Namun demikian penambahan kapasitas pembangkit listrik PLN tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan, sehingga kami harus meningkatkan jumlah pasokan listrik dari pembangkit sewa maupun swasta untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional di tahun 2015.

Kekurangan daya pasok listrik milik sendiri membuat PLN hanya merealisasikan pekerjaan pemeliharaan terhadap 721 pembangkit dari total 909 pembangkit dengan kapasitas 19.541 MW dari target pemeliharaan sebesar 24.437 MW. Langkah ini ditempuh agar pasokan listrik di beberapa daerah tertentu tetap terjaga, sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir karena kekurangan pasokan.

Installed Capacity and Maintenance

In 2015, PLN successfully completed the construction of several power plants it owns (FTP-1 program plants and regular plants). Likewise, the construction of several privately run power plants was completed under the IPP scheme. Thus, total installed capacity from all power plants nationwide was up 2.46% to 52,889.22 MW from 51,620.6 MW in 2014.

PLN's power generating capacity of 40,295.2 MW, up 2.64% from 39,257 MW in the previous year, accounted for 76.19% of total national generation in 2015. However, the additional electricity generation capacity was still below the target set, meaning we had to increase the supply from leased and privately run power plants to meet the electricity demand nationally in 2015.

This shortage of own-generated power resulted in PLN only realizing maintenance work on 721 of a total of 909 power plants, with a total capacity of 19,541 MW from a maintenance target of 24,437 MW. This step was taken to safeguard electricity supplies in certain areas and prevent rolling blackouts due to supply shortages.

Pemeliharaan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja pembangkit, sehingga pasokan listrik di masa mendatang semakin handal.

Inovasi

Kami terus berupaya merealisasikan program inovasi dengan membangun pembangkit listrik bersumberkan energi baru dan terbarukan, terutama untuk memasok listrik pada area terpencil menggunakan sumber energi yang bervariasi sesuai kondisi setempat, meliputi energi nabati, energi bayu, energi surya, dan energi mikro hidro. Kami juga terus berupaya mengintensifkan upaya pengembangan pusat pembangkit energi panas bumi di Indonesia dengan potensi terbesar di dunia. Dalam rangka menekan penggunaan BBM, kami juga semakin intens memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai sumber energi alternatif pembangkit *peaker*.

Pada daerah-daerah tertentu dengan dukungan infrastruktur kelistrikan masih terbatas dan dapat dipenuhi secara lebih efisien melalui laut, kami mulai memperkenalkan layanan listrik menggunakan pembangkit di atas kapal, *Marine Vessel Power Plant* (MVPP), seperti yang kami rintis di Amurang, Minahasa Selatan dengan menggunakan kapal MVPP "Karadeniz Powership Zeynep Sultan" berkapasitas 120 MW.

Kami juga semakin intensif menerapkan beberapa inovasi dengan dukungan teknologi informasi guna memonitor jalannya pembangunan proyek maupun mempercepat distribusi suku cadang, mencatat meter pelanggan, memastikan jadwal pemeliharaan dan sebagainya.

Layanan dan Keandalan

Upaya kami dalam meningkatkan kinerja keandalan jaringan transmisi dan distribusi di tahun 2015 masih menghadapi tantangan yang cukup berat, antara lain berupa pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi serta gardu induk. Kondisi tersebut membuat indeks lama gangguan SAIDI *(System Average Interruption Duration Index)* maupun indeks frekuensi gangguan SAIFI *(System Average Interruption Frequency Index)* belum memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan efisiensi jaringan, kami juga tetap mengintensifkan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemberantasan penyambungan listrik liar sebagai upaya menekan angka susut jaringan.

Maintenance is carried out to maintain power plant performance and create a more reliable electricity supply in the future.

Innovations

We continue to implement an innovation program by building power plants driven by new and renewable energy, in particular supplying electricity to remote areas using energy sources that vary according to local conditions, including bio energy, wind energy, solar energy and micro hydro energy. We also continue to intensify efforts to develop geothermal power plants in Indonesia, a country with the greatest geothermal potential in the world. In order to suppress the use of oil fuel, we are also increasingly intensifying use of Compressed Natural Gas (CNG) technology as an alternative energy source for peaker plants.

In certain areas where electricity infrastructure support is still limited and can be met more efficiently through the ocean, we have begun to introduce electricity services using an on board power plant, or Marine Vessel Power Plant (MVPP), such as we have pioneered in Amurang, South Minahasa using the "Karadeniz Powership Zeynep Sultan" MVPP with a capacity of 120 MW.

We have also intensified implementation of several innovations with the support of information technology to monitor project development and to accelerate the distribution of spare parts, to record customer meters, to ensure the maintenance schedule, and so on.

Service and Reliability

Our efforts to improve the transmission and distribution network reliability performance in 2015 still faced tough challenges, including land acquisition for the construction of transmission and distribution networks and substations. This has resulted in the old SAIDI (System Average Interruption Duration Index) and SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) targets not being met.

To improve network efficiency, we are also keep intensifying the Power Consumption Control (P2TL) program, street lighting control (PJU) program and eradicating illegal electricity connections in an effort to reduce network loss figures.

Perbandingan SAIDI / SAIFI dan susut jaringan adalah sebagai berikut:

SAIDI / SAIFI performance and network loss compared to targets were as follows:

Keterangan	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Realization 2014 (b)	2015(c)	Capaian Achievement (c) / (a)	(c) / (b)	Description
SAIDI	menit/pelanggan Minutes/customer	300,10	348,52	318,57	106,2%	(8,6%)	SAIDI
SAIFI	kali/pelanggan Times/customer	5,47	5,58	5,97	109,1%	7,0%	SAIFI
Susut Jaringan	%	9,23	9,71	9,77	105,9%	0,6%	Network Losses
- Susut Transmisi	%	2,18	2,37	2,33	106,9%	(1,7%)	- Transmission Losses
- Susut Distribusi	%	7,21	7,52	7,64	106,0%	1,6%	- Distribution Losses

Perbaikan Proses Bisnis

Kami terus mencatatkan perkembangan menggembirakan dalam merealisasikan program perbaikan proses bisnis berbasis dukungan IT dengan berlangsungnya implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk seluruh unit-unit PLN meliputi Distribusi, Wilayah, PLN Pembangkitan, PLN P3B, Unit Jasa Penunjang dan Proyek. Penyelesaian implementasi ERP secara total ini akan membuat operasional PLN semakin efisien.

Kami juga berhasil menyelesaikan program *Enterprise Asset Management* (EAM) Distribusi yang telah diterapkan di seluruh unit PLN Distribusi, disusul EAM Transmisi. Selanjutnya kami mulai merintis penerapan EAM Pembangkit di Sumatera.

Tahun 2015 juga ditandai dengan selesainya implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (SIP2A) di Kantor Pusat dan 60 Unit Bisnis/Anak Usaha. Operasional sistem ini memberi manfaat berupa Sistem Anggaran dan Akuntansi Konsolidasi yang terintegrasi dengan proses *planning, budgeting, controlling* dan *reporting* secara terpusat sehingga proses konsolidasi laporan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Improving Business Processes

We continue to record encouraging progress in the realization of the IT-supported business process improvement program with the ongoing implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) for all PLN units, including Distribution, Regional, PLN Power Generation, PLN Distribution and Load Regulation Centers (P3B), as well as supporting Service and Project Units. The total completion of ERP implementation will make PLN's operations more efficient.

We have also successfully completed the Distribution Enterprise Asset Management (EAM) program, which has been applied throughout PLN's Distribution units and will be followed by Transmission EAM. Next we will begin implementing Power Plant EAM in Sumatra.

2015 was also marked by the completion of the Planning and Budget Control Information System (SIP2A) implementation at Head Office and in 60 Business Units / Subsidiaries. The operational benefits of this system include a Budget and Consolidated Accounting System integrated with the processes of centralized planning, budgeting, controlling and reporting so that the consolidation process for financial statements runs effectively and efficiently.

KINERJA KEUANGAN

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut, terutama dalam menekan BPP dan meningkatkan kualitas bauran energi membuat kinerja keuangan PLN di tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Beberapa target kinerja keuangan berhasil memenuhi target yang ditetapkan, khususnya dalam menurunkan besaran subsidi yang diterima. Beberapa lainnya tidak memenuhi target, sekalipun tetap menunjukkan pertumbuhan, seperti pada penjualan tenaga listrik.

FINANCIAL PERFORMANCE

Various steps have been taken, particularly reducing the cost of production and improving the energy mix quality, that have resulted in PLN's financial performance in 2015 showing encouraging results. Some of the financial performance targets were successfully met, particularly in reducing the amount of subsidy received. Meanwhile, other targets were not met, although growth was demonstrated, such as in electricity sales.

Namun dengan mempertimbangkan penghasilan komprehensif dari realisasi laba hasil revaluasi aset, kami mencatatkan kinerja keuangan yang sangat membanggakan dengan catatan laba (penghasilan) komprehensif tahun berjalan naik 63x dari tahun sebelumnya mencapai Rp658,3 triliun. Ringkasan kinerja keuangan tersebut kami sajikan dalam tabel berikut.

Sebagai tambahan informasi, di tahun 2015, sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan baru dan revisi yakni PSAK No.1 (revisi 2013) Penyajian Laporan serta PSAK No.24 (revisi 2013) tentang imbalan kerja yang kami terapkan efektif sejak 1 Januari 2015, dan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik oleh manajemen. Kami menyajikan kembali beberapa catatan akun dalam laporan keuangan.

However, considering the comprehensive revenue in realized gains from asset revaluation, we recorded an impressive financial performance with recorded comprehensive profit (revenue) in the current year rising 63x on the previous year, reaching Rp658,3 trillion. The financial performance summary is presented in the following table.

As an additional information, in 2015, in accordance with provisions in the new Statement for Financial Accounting Standards and the revision of PSAK Num. 1 (revised 2013) on Statement Presentation and PSAK Num. 24 (revised 2013) regarding employee benefits, which we have applied effective 1 January 2015, and reassessment of the application of ISFAS 8 for power purchase agreement by management. We have restated some account notes in the financial statements.

Keterangan	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization		Capaian Achievement		Description
		(a)	2014 (b)	2015(c)	(c - a)/a	(c - b)/b	
Pendapatan Penjualan Listrik	Rp miliar Rp billion	228.713,26	186.634,48	209.844,54	(8,25%)	12,44%	Electricity Sales Revenue
Pendapatan Usaha	Rp miliar Rp billion	235.630,64	193.417,94	217.346,99	(17,91%)	12,37%	Electricity Revenue
Beban usaha	Rp miliar Rp billion	251.060,35	265.311,23	246.262,29	1,91%	(7,18)	Operating Expenses
Rugi Usaha sebelum Pendapatan Lain-lain	Rp miliar Rp billion	(15.429,71)	(71.893,30)	(28.915,30)	87,40%	(59,78%)	Operating Loss before Other Income
Subsidi	Rp miliar Rp billion	68.870,70	99.303,25	56.552,53	(17,89%)	(43,05%)	Subsidy
Laba Usaha	Rp miliar Rp billion	53.440,99	27.409,96	27.637,24	(48,28%)	0,83%	Operating Income
Laba Tahun Berjalan	Rp miliar Rp billion	5.352,35	14.004,08	15.585,24	191,18%	11,29%	Income for the year
Total Penghasilan Komprehensif tahun Berjalan	Rp miliar Rp billion	-	10.350,15	658.318,06	-	6.212,16%	Total Comprehensive Income for the Year Net Income

*Angka disajikan kembali
*Restated numbers

Nilai Pendapatan dan Laba Usaha

Nilai pendapatan penjualan tenaga listrik di tahun 2015 naik 12,44% menjadi Rp209,8 triliun dari Rp186,6 triliun di tahun 2014, terutama disebabkan oleh pertumbuhan energi listrik terjual 2,1% sebesar 202.846 GWh dan adanya penyesuaian tarif dasar listrik secara bertahap.

Harga jual rata-rata tarif listrik tersebut tetap masih berada di bawah BPP tahun 2015 yang sebesar Rp1.300,49/kWh, sehingga kami masih membutuhkan subsidi senilai Rp56,55 triliun, turun 43,05% dari nilai subsidi tahun sebelumnya, sebesar Rp99,3 triliun. Disamping itu, PLN memperoleh pendapatan jasa penyambungan dan pendapatan lain-lain,

Revenues and Operating Income

Revenues from the sale of electricity in 2015 rose 12.44% to Rp 209.8 trillion, up from Rp 186.6 trillion in 2014, in particular resulting from growth in electricity sales of 2.1%, or 202,846 GWh and a gradual adjustment of the basic electricity tariff.

The average selling price of the electricity tariff remained below cost of production at Rp1,300.49/kWh in 2015, meaning that PLN still required a subsidy of Rp56.55 trillion, 43.05% lower than the Rp99.3 trillion subsidy in the previous year. In addition, PLN obtained revenues from connection services and other revenues, thus total

sehingga total pendapatan mencapai Rp217,35 triliun, naik 12,37% dari nilai tahun sebelumnya, sebesar Rp193,42 triliun 7,76% di bawah target yang ditetapkan. Penyebabnya adalah kami menunda kenaikan tarif berkala. Sebagai wujud empati PLN terhadap kondisi ekonomi dan respon PLN terhadap turunnya harga energi (batubara dan BBM) yang membuat BPP juga turun.

revenues reached Rp217.35 trillion, improved 12.37% lower than Rp193.42 trillion in the previous year and 7.76% below target. The cause for this fall was a delay in the periodic tariff adjustment as a show of empathy by PLN for the economic conditions and PLN's response to falling energy prices (coal and oil), which also caused the cost of production to fall.

Upaya meningkatkan kualitas bauran energi yang dilakukan secara konsisten membuat volume penggunaan semakin BBM menurun, sehingga komponen biaya BBM turun 50,76% menjadi Rp35,98 triliun dari nilai sebesar Rp73,09 triliun di tahun 2014. Namun demikian, total biaya bahan bakar hanya turun 21,26% menjadi Rp120,58 triliun dari Rp153,14 triliun karena adanya penambahan kapasitas pembangkit. Kami tetap barupaya mengendalikan komponen-komponen biaya lain melalui inisiatif efisiensi operasional. Namun di saat bersamaan kami berupaya menyesuaikan *benefit* karyawan, sebagai bagian dari upaya kami memotivasi peningkatan kinerja individu dan team dalam rangka mensukseskan program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW. Total beban usaha lain di luar bahan bakar kemudian meningkat 11,81%. Sekalipun demikian kami mencatatkan laba usaha sebesar Rp27,6 triliun.

Efforts to improve the energy mix quality were consistent, resulting in a reduction in the use of oil fuel, thus the oil fuel component of cost fell 50.76% to Rp 35.98 trillion from Rp 73.09 trillion in 2014. However, total fuel costs only fell 21.26% to Rp 120.58 trillion from Rp 153.14 trillion due to an increase in power plant generation capacity. We continued to strive to control other component costs through operational efficiency initiatives. However, at the same time, we adjusted our employee benefits as part of our efforts to motivate for improvements in individual and team performance in the interests of successfully achieving the 35,000 MW Power Plant Program. Total other operating expenses, excluding fuel, rose 11.81%. Meanwhile, we recorded Operating Income of Rp27.6 trillion.

Melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 12,3% (kurs tengah akhir tahun 2015), membuat kami kembali harus membukukan kerugian selisih kurs pembukuan kewajiban sebesar Rp16,23 triliun, disamping harus membukukan beban keuangan sebesar Rp17,5 triliun. Pada periode tahun 2015 kami mendapatkan selisih manfaat pajak sebesar Rp18,65 triliun, sehingga secara keseluruhan kami mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp15,58 triliun. Nilai tersebut 11,3% lebih tinggi dari capaian tahun 2014 dan 191,2% di atas target yang ditetapkan.

The weakening of the rupiah against the US dollar by 12.3% (mid rate as of end 2015), meant that, once again, we had to record a foreign exchange loss as a Rp16.23 trillion expense, as well as recording a finance cost of Rp 17.5 trillion. During 2015, we had a tax benefit difference of Rp18.65 trillion, meaning that in overall, we recorded income for the year amounting to Rp15.58 trillion. This value is 11.3% higher than the achievements of 2014 and 191.2% above this year's set target.

Laba / Penghasilan Komprehensif

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, di tahun 2015 kami menyelesaikan proses revaluasi aset Perusahaan yang dilakukan oleh pihak independen, dengan hasil akhir membukukan nilai penghasilan komperehensif hasil revaluasi bersih, sebesar Rp653,4 triliun. Setelah ditambah keuntungan aktuaria Rp6,12 triliun dan beban pajak Rp16,9 triliun, kami membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp642,7 triliun.

Comprehensive Income / Revenue

As mentioned above, in 2015 we completed the Company's asset revaluation process, conducted by an independent party, with the end result of recording net revalued comprehensive revenue of Rp 653.4 trillion. After the addition of actuarial gains of Rp 6.12 trillion and tax Rp16.9 trillion, we recorded other comprehensive revenue of Rp 642.7 trillion.

Sehingga setelah ditambah laba tahun berjalan bersih, kami mencatatkan laba komprehensif total sebesar Rp658,3 triliun.

After the addition of net income for the current year, we recorded total comprehensive income of Rp658.3 trillion.

Seluruh realisasi hasil kinerja tahun 2015 membuat pencapaian penilaian tingkat kesehatan PLN di tahun 2015 mendapatkan nilai sebesar 60,8 dengan kategori BBB.

Performance realization in 2015 resulted in PLN's health level assessment for 2015 with a score of 60.8, categorized as BBB.

KEBIJAKAN TARIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik dan No. 19 Tahun 2014, maka ketentuan baru tarif tenaga listrik telah disesuaikan secara berkala. Dengan ketentuan tersebut, maka beberapa golongan tarif pelanggan akan disesuaikan secara berkala hingga mencapai tarif sesuai biaya keekonomian, yakni minimal sama dengan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP).

Implementasi ketentuan tersebut akan membuat PLN memiliki kemampuan finansial yang semakin baik guna mendukung realisasi pembangunan pembangkit dalam rangka menambah daya dan meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, selain mengurangi besaran subsidi listrik.

TARIFF POLICY

In accordance with the Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation Num. 09 of 2014 on Electricity Tariffs and Num. 19 of 2014, new provisions for electricity tariffs are adjusted periodically. With this provision, several customer tariffs are adjusted periodically to reach a tariff that is in line with economic costs, namely, no less than the the cost of production (BPP).

The implementation of this provision will improve PLN's financial ability to support power plant construction for increasing power and to increase the national electrification ratio, as well as to reduce the electricity subsidy.

MENYIAPKAN SDM CERDAS DAN BERINTEGRITAS UNTUK MASA DEPAN

Kami memandang pengelolaan SDM harus berorientasi jangka panjang, hingga 20 – 30 tahun mendatang, untuk memastikan masa depan institusi yang semakin baik berkelanjutan. Oleh karenanya, sejalan dengan implementasi program PLN Bersih yang telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya, kami memiliki orientasi untuk membangun SDM yang cerdas nuraninya, dalam artian memiliki kecerdasan tinggi namun senantiasa bertindak dengan mempertimbangkan hati nurani. Singkatnya, SDM yang memiliki etika, sopan santun, integritas dan moral baik.

Kami menargetkan untuk membentuk seluruh jajaran pegawai PLN menjadi insan profesional, bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, dan punya semangat serta etos kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan dimana dia bekerja. Kami meyakini upaya ini akan lebih cepat terealisir jika dilakukan melalui pendekatan *top-down*, yakni menjadikan setiap pemimpin unit sebagai *role model* yang harus mampu menunjukkan sikap-sikap profesional, berintegritas dan memiliki etos kerja baik sebagai panutan. Untuk itu kami bertekad semakin mengintensifkan realisasi program-program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, baik melalui *training* di dalam negeri maupun melalui pendalaman pendidikan di luar negeri. Kami bertekad mencetak banyak *champion*, calon pemimpin masa depan yang akan memegang estafet kepemimpinan perusahaan di masa mendatang.

Kami juga bertekad menginisiasi terjadinya *transfer* pengetahuan diantara seluruh jajaran melalui penerapan program *knowledge management* dalam proses bisnis. Selanjutnya sebagai bagian dari pengelolaan SDM yang berkualitas, kami bertekad menyempurnakan implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi

PREPARING SMART HUMAN RESOURCES WITH INTEGRITY FOR THE FUTURE

We believe that human resource management should be oriented towards the long-term, up to 20-30 years ahead to ensure the future of the institution with improved longevity. Therefore, in line with the implementation of PLN Bersih program, which was started a few years ago, our orientation is to establish human resources who are naturally smart in the sense of having a high level of intelligence but always acting with good conscience. In short, human resources who have ethics, courtesy, integrity and good morals.

Our target is for all PLN employees to be professionals, responsibly carrying out their mandate, and working with passion and good ethics for the progress of the company where they are employed. We believe these efforts will be realized more quickly if done with a top-down approach, in which every unit leader is a role model to demonstrate a professional attitude, integrity and a good work ethic. To achieve this, we are determined to intensify the realization of training programs to improve employee competency, either through training in the country or through further education abroad. We are determined to create a large quantity of champions, future leaders who will hold the company's leadership baton in the future.

We are also determined to initiate knowledge transfer between all ranks through the knowledge management program in business processes. Furthermore, as part of high quality human resource management, we are determined to refine implementation of Competency-based Human Resource Management (MSDM-BK) and

(MSDM-BK) dan menerapkan Program *Strengthening Alignment* pada Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dalam rangka penyelarasan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu.

Seluruh program-program tersebut kami integrasikan kedalam *Human Capital Management System* yang memiliki empat pilar utama, yakni i) Sistem Manajemen Kinerja, ii) Sistem Penghargaan/Remunerasi, iii) Sistem Hubungan Industrial, iv) Sistem Kompetensi.

Pada tahun 2015, sebagai bagian dari persiapan PLN dalam mendukung dan memastikan kesuksesan Program Pembangkit 35.000 MW, kami merealisasikan proses rekrutmen terhadap 4.603 orang calon pegawai baru dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SLTA sampai S-2. Selanjutnya kami juga merealisasikan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan dan menetapkan promosi kenaikan pangkat/jabatan pada tingkat Manajemen Atas sebanyak 43 orang, tingkat Manajemen Menengah sebanyak 97 orang dan tingkat Manajemen Dasar sebanyak 279 orang.

Sebagai bagian dari pengelolaan SDM yang bermartabat, kami bertekad menjalin hubungan yang semakin harmonis dengan seluruh pegawai dan berkomunikasi secara intensif dengan Serikat Pekerja PLN untuk menyelesaikan berbagai kesepakatan kerjasama untuk memastikan dicapainya hubungan industrial yang harmonis.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PLN kembali melakukan self assessment penerapan GCG untuk tahun 2015 sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara dan mendapatkan capaian score 86,46 dengan klasifikasi 'Sangat Baik'. Pelaksanaan *assessment* kami tindak lanjuti dengan pelaksanaan berbagai rekomendasi perbaikan kualitas penerapan praktek terbaik GCG.

Adapun berbagai program perbaikan kualitas penerapan GCG di tahun 2015 yang telah dan sedang kami laksanakan mencakup diantaranya:

1. Mengkaji butir-butir isi pedoman tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris berupa pedoman GCG dan *Board Manual*.
2. Menyelesaikan *draft* pedoman tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diperbaharui berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini dan telah dibahas dengan komite dewan komisaris.

apply a Strengthening Alignment Program to the Employee Performance Management System to bring Organization Performance and Individual Performance into alignment.

All these programs are integrated into our Human Capital Management System, which has four pillars, namely: i) Performance Management System, ii) Award / Remuneration System, iii) Industrial Relations System, and iv) Competency System.

In 2015, as part of PLN's preparations to support and ensure the success of the 35,000 MW Power Plant Program, we recruited 4,603 potential new employees with educational backgrounds from high school to Master degree. We also assessed the performance of PLN employees and promoted employees. Moving forward, we assessed the work performance of all employees and promoted 43 people to Upper Management, 97 to Middle Management and 279 to Basic Management.

As part of our dignified HR management, we strive to ensure harmonious relations with all our employees and communicate intensively with the PLN Labor Union to complete various mutual agreements to ensure the achievement of harmonious industrial relations.

QUALITY IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

To improve the quality of Good Corporate Governance implementation, PLN conducted a self-assessment of GCG implementation in 2015 in accordance with Letter from the Secretary to the SOE Minister Num.SK-16/S.MBU/2012 on Assessment and Evaluation Indicators / Parameters for the Application of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises and achieved a score of 86.46 and a classification of Very Good. The assessment was in follow up to various recommendations to improve the quality of GCG best practice implementation.

Several programs were established to improve the quality of GCG implementation in 2015, which have been or are being implemented, including:

1. Assessing points in the GCG Guidelines and the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Completing the draft guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners that have been renewed based on applicable legislation and current conditions, and that have been discussed with the Board of Commissioners' Committees.

3. Melanjutkan kerjasama dengan Transparansi Internasional Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan penyampaian penyelenggaraan bisnis PLN.
4. Melanjutkan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan.
5. Kampanye budaya integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional.
6. Kampanye PLN sebagai wilayah Bebas Korupsi dan Gratifikasi terhadap seluruh pemangku kepentingan.
7. Melanjutkan sosialisasi *Whistleblowing System* di seluruh jajaran PLN dan mitra kerja PLN.

Kami juga mulai merintis pelaksanaan pengawasan pembangunan pembangkit dan kegiatan operasional serta pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan menerapkan metode *risk based audit*. Metode ini kami harapkan akan menghindarkan PLN dari beragam risiko, melalui deteksi dini terhadap adanya masalah dalam mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan, hingga pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit secara efektif dan efisien.

Selain itu, Kami juga bertekad untuk terus meningkatkan kinerja Komite-Komite di tingkat Direksi dalam memberikan opini kedua sebagai bahan pembanding dan bahan pertimbangan atas pengambilan keputusan berbagai program, usulan maupun rencana strategis di bidang operasional pengelolaan Perusahaan yang menjadi kewenangan Direksi.

Kami memiliki 8 Komite di tingkat Direksi, dengan bidang tugas spesifik, sesuai kebutuhan operasional.

Kami menilai seluruh Komite di tingkat Direksi telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, melalui pemberian rekomendasi dan opini sebelum keputusan strategis di bidang operasional dilaksanakan. Namun demikian seiring dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan tugas terbaru, Direksi mengamanatkan seluruh jajaran di Komite terkait untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman akan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kami berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan secara menyeluruh guna mewujudkan misi perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, yakni: pelanggan, mitra

3. Continuing cooperation with Transparency International Indonesia to increase PLN's transparency in running its business.
4. Continuing cooperation with the Supreme Audit Agency (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK) to increase accountability and responsibility in the implementation of the company's operational and financial management.
5. Campaigning for a culture of integrity in conducting operational duties.
6. Campaigning for PLN to be a Corruption and Bribery Free Area to all stakeholders.
7. Continuing to promote the Whistle Blowing System to all PLN's employees and business partners.

We have also started to implement integrated oversight of power plant construction and operational activities, as well as risk management, by applying the risk-based audit method. We expect that this method will safeguard PLN from a variety of risks effectively and efficiently through early detection of issues, starting from the power plant planning stage, through construction, to operation and maintenance.

Furthermore, we are determined to continue improving the performance of the Director-level committees, which provide a second opinion as a comparison and for consideration when making decisions on various programs, proposals and strategic plans related to the management of the Company's operations under the Directors' authority.

We have 8 director-level committees, each with a specific task based on operational requirements.

It is our opinion that all the Director-level committees are capable of performing their duties well, providing recommendations and opinions before strategic operational decisions are made. However, with due consideration for the ever increasing severity of the challenges being faced related to new duties, the Board of Directors has mandated that all committee members improve their levels of competence and understanding in the fields for which they are responsible.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We are working to improve the implementation quality of the corporate social responsibility program as a whole to realize the company's mission while creating high quality growth and meeting the expectations of all stakeholders, namely: customers, business partners, the government,

kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya, media massa dan masyarakat sekitar, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Perbaikan kualitas pelaksanaan tersebut mengandung maksud pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak terbatas pada kegiatan pemberian bantuan semata, melainkan menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengembangan usaha jangka panjang Perseroan.

Menyusul realisasi berbagai program kelistrikan di seluruh wilayah Nusantara yang berpotensi menumbuhkembangkan kemampuan wirausaha skala mikro, kecil dan menengah, kami terus berupaya untuk mendukung dan mengintensifkan pembinaan melalui program bimbingan teknis.

Selain itu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 dan surat Kementerian BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 9 Juli 2015, tentang alokasi dan PKBL yang telah disediakan, kami merealisasikan 7 program Bina Lingkungan seperti termaktub dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut, yakni kegiatan di bidang bencana alam, pembangunan sarana/prasarana pendidikan, pendidikan dan pelatihan, sarana ibadah, peningkatan kesehatan, pelestarian alam serta pengentasan kemiskinan dan telah menyalurkan dana program sebesar Rp36,9 miliar. Sejalan dengan tekad PLN untuk meningkatkan kompetensi SDM

employees, non-governmental organizations, mass media and local communities, while maintaining environmental sustainability.

Improvements to the quality of implementation mean that the intent of corporate social responsibility (CSR) is not limited to relief operations, rather it will become one of the ways that the company supports its successful long-term development.

Following the realization that several electricity programs throughout the archipelago had the potential to cultivate micro, small and medium enterprise entrepreneurial skills, we have been continuously striving to support and intensify training through technical assistance programs.

In addition, with reference to SOE Ministerial Regulation Num. PER-09/MBU/07/2015, dated 3 July 2015 and SOE Ministry Letter Num. S-23/D2.MBU/08/2015, dated 9 July 2015, concerning allocations provided and the PKBL (Partnership and Community Stewardship Program), we have implemented seven Community Development programs as set out in the SOE Ministerial Regulation, namely related to natural disasters, the construction of education facilities / infrastructure, education and training, places of worship, health improvement, environmental conservation and poverty eradication, and have disbursed program funds amounting to Rp36.9 billion. In line with PLN's determination to improve the competence of

Indonesia, kami memprioritaskan penyaluran dana Program Bina Lingkungan dalam bentuk Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, hingga sebesar Rp15,9 miliar atau sekitar 43% dari total dana yang kami salurkan tersebut.

Indonesian human resources, we have prioritized funding distribution through the Community Development Program to education and training, amounting to Rp 15.9 billion, or about 43% of the total funds disbursed.

KENDALA-KENDALA

Upaya kami dalam merealisasikan dan menyelesaikan pembangunan pembangkit beserta sarana transmisi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat selama tahun 2015 masih menghadapi kendala klasik, yakni lamanya perizinan dan negosiasi pembebasan lahan. Kami berharap implementasi peraturan terbaru, Peraturan Presiden No.4 Tahun 2016, kelak akan dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.

Sementara untuk mendukung kelancaran pengoperasian pembangkit eksisting, kendala utama yang masih kami hadapi adalah kepastian, baik dari sisi volume maupun harga, energi primer yang dibutuhkan, baik gas, BBM maupun batubara. Bagi kami, ketepatan pasokan energi primer tersebut, terutama gas, merupakan suatu keharusan mutlak, mengingat kami tidak dapat menyimpan persediaan gas dalam jumlah besar untuk mendukung operasional pembangkit berbahan bakar gas. Kami berharap kedepan, ada suatu mekanisme penyediaan yang handal, yang membuat kebutuhan rutin bahan bakar primer untuk seluruh pembangkit di Indonesia terjamin. Sehingga pola pengadaan tambal sulam yang membuat biaya pengadaan listrik akhirnya tinggi, dapat dihindari.

Kendala lain yang masih harus kami hadapi, tentu saja adalah kecukupan pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha dan menjalankan kegiatan operasional. Keterbatasan keuangan PLN dalam mendukung kegiatan investasi pembangkit maupun jaringan transmisi/distribusi membuat rangkaian upaya peningkatan kapasitas daya dan penyaluran tenaga listrik kadang-kadang tidak berjalan selaras. Terakhir kendala eksternal belum dapat kami atasi adalah fluktuasi nilai tukar, yang membuat kewajiban keuangan kami tidak dapat diprediksi dengan tepat, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan PLN dalam menggalang dana.

CHALLENGES

In 2015, our efforts to realize and complete the construction of power plants as well as their transmission and distribution facilities to meet the continually increasing demand for electricity still met with the classic obstacles of slow permit issuance and land acquisition negotiations. We expect that the implementation of the new regulation, Presidential Regulation Num. 4 of 2016, will overcome these constraints.

Meanwhile, to support the smooth operation of existing power plants, the main obstacle that we still face is primary energy certainty, both in terms of volume and price, whether gas, oil fuel or coal. For us, a precise primary energy supply, especially gas, is an absolute necessity since we cannot store large amounts of gas to support the operation of gas-fired power plants. We hope that in the future there will be a mechanism to ensure reliable supplies that guarantee the routine needs for primary fuel for every power plant in Indonesia. This would enable us to avoid the current patchwork procurement pattern that finally makes electricity production expensive.

Another obstacle that we still face is, of course, adequate funding to support business development and operating activities. PLN's financial limitations do not go hand in hand with efforts to support investments in generation and the transmission / distribution network in our efforts to increase electricity capacity and distribution. The final external constraint that we cannot overcome is exchange rate fluctuations, which mean our financial obligations cannot be predicted exactly, which finally affects PLN's fundraising ability.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai dengan Surat Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. S-548/MBU/09/2015 tanggal 8 September 2015, dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, susunan dan nomenklatur Jabatan Direksi berubah, diikuti penambahan empat anggota Direksi baru sebagai berikut:

THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION CHANGE

In accordance with the SOE (State Owned Enterprise) Minister's Letter regarding the PLN GMS, Num. S-548/MBU/09/2015 dated 8 September 2015, and SOE Ministerial Regulation Num. SK-211/MBU/10/2015 dated 30 October 2015, the composition and nomenclature of the Directors' Positions have been changed, while a further four members have been appointed to the Board of Directors, as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tanggal Pengangkatan** Appointed Date
Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	24 Desember December 2014
Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	24 Desember December 2014
Nicke Widyawati	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	24 Desember December 2014
Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Director of Procurement	24 Desember December 2014
Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional - Sumatera Director of Regional Business - Sumatra	24 Desember December 2014
Murtaqi Syamsuddin	Direktur Bisnis Regional - Jawa Bagian Barat Director of Regional Business – West Java	8 Maret March 2013
Nasri Sebayang	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Director of Regional Business – Central Java	24 Desember December 2014
Amin Subekti	Direktur Bisnis Regional - Jawa Bagian Timur dan Bali Director of Regional Business – East Java and Bali	24 Desember December 2014
Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	30 Oktober October 2015
Djoko R. Abu Manan	Direktur Bisnis Regional - Kalimantan Director of Regional Business - Kalimantan	30 Oktober October 2015
Machnizon	Direktur Bisnis Regional - Sulawesi dan Nusa Tenggara Director of Regional Business - Sulawesi and Nusa Tenggara	30 Oktober October 2015
Haryanto W.S.	Direktur Bisnis Regional - Maluku dan Papua Director of Regional Business - Maluku and Papua	30 Oktober October 2015

Perubahan dan penambahan anggota Direksi merupakan bagian dari realisasi restrukturisasi organisasi PLN di tingkat Direktorat, untuk mengantisipasi peningkatan beban tugas dan pekerjaan sehubungan dengan dimulainya tahapan-tahapan realisasi program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia.

Penambahan anggota Direksi tersebut diyakini membuat pembagian beban kerja semakin lebih berimbang dan merata, mengingat anggota Direksi baru telah memiliki rekam jejak di bidang manajemen yang mumpuni.

Sebagaimana diketahui seluruh anggota Direksi Baru sebelumnya telah menjabat sebagai General Manager, dimana 3 orang merupakan pejabat dengan level GM di PLN, sementara 1 orang menjabat sebagai GM dari perusahaan besar dengan jumlah aset dan jumlah pegawai yang kurang lebih setara dengan PLN. Kami meyakini seluruh rekam jejak dan pengalaman kerja yang telah terakumulasi akan membuat pada anggota Direksi baru mampu menjalankan tugas dan memberi sumbangsih nyata di kemudian hari.

The changes and additions to the Board of Directors are part of the organizational restructuring at the PLN Directorate level for the anticipated increase in workload and work related to the commencement of the realization stage of the 35,000 MW Power Plant Development Program for Indonesia.

We believe that the addition of more Directors will result in a better balanced and equitable division of labor, bearing in mind that all the new directors have track records in their respective fields of management.

All of the new Directors have previously served as General Managers, three within PLN while one other held this role in a large company with a similar amount of assets and employees to PLN. We believe that their track records and the experience they have accumulated will ensure that these new Directors are able to carry out their duties and provide a genuine contribution to the company in the coming days.

PROSPEK DAN STRATEGI 2016

Dengan mempertimbangkan masih rendahnya rasio elektrifikasi, dan masih rendahnya konsumsi listrik per kapita, maka permintaan tenaga listrik Indonesia di masa mendatang akan terus meningkat. Target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,5% di tahun 2016 dan untuk selanjutnya meningkat antara 6-7% selama empat tahun

2016 PROSPECT AND STRATEGY

Taking into account the low electrification ratio and low per capita electricity consumption, future demand for electrical power in Indonesia will continue to rise. The economic growth target of 5.5% in 2016, rising further to between 6-7% over the next four years, will see the demand for

berikutnya, membuat kebutuhan listrik di tahun 2016 saja akan naik antara 8-10% dari kapasitas saat ini, atau berarti diperlukan tambahan daya sebesar 7.000 MW setiap tahunnya.

Tahun 2016 merupakan tahun awal dari realisasi seluruh persiapan pembangunan Pembangkit 35.000 MW yang telah diselesaikan di tahun 2015. Untuk memastikan keberhasilan implementasi rencana pengembangan tersebut, kami akan melanjutkan penerapan strategi yang telah dijalankan, namun disertai beberapa penyesuaian dengan prakondisi yang berlangsung di tahun 2016. Kami akan berusaha mengoptimalkan seluruh aturan perundangan baru di bidang ketenagalistrikan, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat agar penerapan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 berjalan optimal sesuai maksud dan tujuan dari penerbitan peraturan tersebut.

Kami meyakini, jika seluruh kendala eksternal klasik, yakni perizinan dan pembebasan lahan dapat diatasi dengan cepat, realisasi pembangunan seluruh pembangkit dalam Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia, akan berjalan dengan baik, tepat waktu dan berkualitas.

Oleh karenanya sebagai bagian dari pelaksanaan program pengembangan tersebut, kami akan mengacu pada pencapaian tujuan strategis untuk periode 2015-2019, dan menerapkan program prioritas yang bertumpu pada: pengembangan pembangkit baru 35.000 MW di luar yang sedang dalam masa konstruksi, penyelesaian seluruh pembangunan pembangkit FTP-I, menyelesaikan proses pembangunan Interkoneksi Jawa Sumatera dan memulai pembangunan pembangkit-pembangkit besar mulut tambang di Sumatera, mengintensifkan penggunaan sumber energi surya dan bayu di daerah terpencil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi, meningkatkan penggunaan pembangkit *Peaker* berteknologi *Compressed Natural Gas* (CNG), PLTGB dan Biomass, menggantikan PLTD BBM, peningkatan efisiensi penyaluran daya listrik dan meningkatkan kualitas bauran energi primer untuk mengelola BPP untuk mengurangi subsidi listrik.

PENUTUP

Tahun 2015 merupakan tahun yang berat bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk PLN. Keberhasilan PLN mencatatkan berbagai kemajuan di bidang operasional dan mempersiapkan landasan kuat bagi pelaksanaan tahap pembangunan Program Pembangkit 35.000 MW untuk mendukung pembangunan bangsa di masa mendatang merupakan prestasi yang layak diapresiasi.

electricity in 2016 alone increase by between 8-10% of current capacity, meaning the need for an additional 7,000 MW annually.

After the completion of all the preparations for the 35,000 MW generation project in 2015, realization of the project will start in 2016. To ensure successful implementation of the development plan, we will continue to apply the strategies that have been implemented, however, with some adjustments to the pre-conditions occurring in 2016. We will strive to optimize all the new legislation related to electricity, including establishing intensive communication with the Central Government so the implementation of Presidential Regulation Num. 4 of 2016 runs optimally and matches the intent and purpose of the regulation.

We believe, if all the classic external constraints, namely permits and land acquisition, can be quickly resolved, the construction of all the power plants in the Generating 35,000 MW for Indonesia Power Plant Development Program will go well, on time and high quality.

Therefore, as part of the development program implementation, we will refer to the achievement of strategic objectives for the 2015-2019 period and implement a priority program based on: the development of 35,000 MW of new power plants beyond those currently in the construction phase, completing the entire FTP-I construction, completing construction of the Java-Sumatra interconnection and beginning construction of large mine face power plants in Sumatra, intensifying the use of solar and wind energy in remote areas to increase the electrification ratio, developing new renewable energy sources and conserving energy, improving the use of compressed natural gas (CNG) technology for Peaker power plants, Coal Slurry Power Plant (PLTGB) and Biomass power plants, replacing diesel-fired power plants, increasing electrical power distribution efficiency and improving the quality of the primary energy mix to manage cost of production and reducing electricity subsidies.

CLOSING

2015 was a heavy year for all businesses, including PLN. The success of PLN in recording progress in several operational fields and preparing a strong foundation for the construction of the Generation of 35,000 MW for Indonesia Program to support future national development are achievements that should be appreciated.

Selanjutnya kami, memandang tahun 2016 sebagai Tahun Survival, tahun pembuktian yang menentukan keberhasilan implementasi seluruh rencana dan persiapan yang telah dengan susah payah kita upayakan di tahun 2015 lalu. Untuk itu, dalam rangka mengawali kerja besar bersama, mewakili Direksi, kami terlebih dahulu memberikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan loyalitasnya dalam berkarya dan bekerja untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan negara. Kemudian kami mengajak seluruh jajaran insan PLN untuk kembali bekerja keras dengan seluruh kompetensi yang dimiliki dan mengedepankan integritas untuk bersama-sama mengatasi setiap tantangan, mewujudkan program besar yang sangat dibutuhkan bagi kemajuan bangsa, sebagaimana telah ditunjukkan melalui raihan berbagai prestasi selama ini.

Looking ahead, we consider 2016 to be the Year of Survival, a year to prove the successful implementation of all the plans and preparations that we have been painstakingly striving for in 2015. Therefore, to commence this great work together, representing the Board of Directors, we would first like to recognize and greatly thank all of PLN's employees of every level for their dedication and loyalty, working to give the best service to the public and the country. We would also like to invite all of PLN's employees to do the hard work with all competencies and to prioritize integrity together overcoming all the challenges, realizing a large-scale program that is greatly needed for the country to progress, as has been demonstrated by the many achievements thus far.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan dan arahan dari Dewan Komisaris beserta seluruh jajarannya, sehingga seluruh program kerja PLN dapat terlaksana dengan baik. Kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami juga mengucapkan terimakasih atas sumbang saran perbaikan dan kerja sama yang terjalin dengan semakin baik, semakin menjunjung tinggi transparansi untuk memberi manfaat terbaik dalam merealisasikan seluruh kerjasama yang berkelanjutan.

We, of course, cannot forget to express our deepest gratitude for the support and direction provided by the Board of Commissioners and all their staff so that all PLN's work programs have been well implemented. To all our other stakeholders, we also express our thanks for the advised improvements and the improved cooperation, upholding higher levels of transparency to give the greatest benefit in achieving sustainable cooperation.

Menghadapi tahun 2016, kami, jajaran Direksi yang baru, bersama-sama dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai PLN bertekad mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai, mensukseskan Program 35.000 MW untuk mendukung pembangunan negeri, menjunjung tinggi praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

As we face 2016, we, the new Board of Directors, along with all the management and employees of PLN, are determined to develop a satisfactory electrical power infrastructure, ensure the success of the 35,000 MW Program to support national development, uphold Corporate Governance best practices, provide our customers with the best service and meet the expectations of all our stakeholders.

Atas nama Direksi PT PLN (Persero)
On behalf of the Board of Directors of PT PLN (Persero)

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

SOFYAN BASIR

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2015 PT PLN (PERSERO)

Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 67 dan Peraturan OJK (d/h Bapepam) No. X.K.6 sebagaimana disempurnakan dengan Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero), menyatakan telah menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015.

Laporan Tahunan Perseroan ini juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Hasan Bisri
Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Oegroseno
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Darmono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Jarman
Komisaris
Commissioner

Andin Hadiyanto
Komisaris
Commissioner

Hasan Bisri
Komisaris
Commissioner

Harry Susetyo Nugroho
Komisaris
Commissioner

Budiman
Komisaris
Commissioner

Aloysius Kiik Ro
Komisaris
Commissioner

STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS CONCERNING RESPONSIBILITY UPON THE 2015 ANNUAL REPORT OF PT PLN (PERSERO)

In accordance with Law Num. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 67, and the OJK (previously Bapepam) Regulation Num. X.K.6 as amended by the Copy of the Decree of the Chairman of BAPEPAM Num. Kep-431/BL/2012 on the Obligation to Submit an Annual Report for Publicly Listed Companies, hereby we, the Board of Commissioners and Directors of PT PLN (Persero), state our full approval and responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report for the fiscal year of 2015.

The Company's Annual Report also discloses the Company's Consolidated Financial Statements for the years ended 31 December 2015 and 2014.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Sofyan Basir
Direktur Utama
President Director

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Finance Director

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Pengadaan
Procurement Director

Nicke Widyawati
Direktur Perencanaan Korporat
Corporate Planning Director

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Human Capital Management Director

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Sumatra Regional Business Director

Nasri Sebayang
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Central Java Regional Business Director

Murtaqi Syamsuddin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
West Java Regional Business Director

Amin Subekti
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali
East Java & Bali Regional Business Director

Haryanto W.S.
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Maluku & Papua Regional Business Director

Djoko R. Abu Manan
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Kalimantan Regional Business Director

Machnizon
Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara
Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business Director

PJB

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

hal. 72 - 97

Mengedepankan pemerataan pembangunan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan menyesuaikan struktur organisasi dan segmen operasi agar dapat menyesuaikan tingkat perkembangan kebutuhan dan program pengembangan usaha dengan kinerja layanan dan keandalan jaringan yang merata, sejajar dengan korporasi sejenis kelas dunia.

Prioritizing the equitable development of electricity infrastructure to fulfill the demand for electricity across all levels of the population in Indonesia, by adjusting the organization structure to keep up with the development in demand and business development programs, with a strong service performance and reliable network, in line with other world-class companies.

NAMA & ALAMAT
NAME & ADDRESS

Nama Name	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Bidang Usaha Line of Business	Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa lain terkait kelistrikan Generation, distribution, transmission and other services related to electricity
Kepemilikan Ownership	100% Pemerintah Indonesia The Government of Indonesia 100%
Alamat Address	Kantor Pusat Head Office PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 Email: pln123@pln.co.id Website: www.pln.co.id. Alamat Kontak Contact Center Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Tel. +62 21 725 1234 ext 4000 Fax. +62 21 722 2328 Email: pln123@pln.co.id Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	1 Januari 1961, dengan nama Jawatan Listrik dan Gas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 1 January 1961, with the name of Jawatan Listrik dan Gas under the Ministry of Public Works and Energy.
Dasar Hukum Pendirian	1. Peraturan Pemerintah No. 1 s/d tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas, 2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara. 4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara. 5. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero). 1. Government Regulation Num. 1 until dated 27 October 1945, established as Jawatan Listrik dan Gas, 2. Government Regulation Num. 67 of 1961, changed to State Company (Perusahaan Negara), and called Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. 3. Government Regulation Num. 19 of 1965, established as Perusahaan Listrik Negara. 4. Government Regulation Num. 18 of 1972, dated 3 June 1972, affirmed as Perum Perusahaan Listrik Negara. 5. Act Num. 169, 30 July 1994 from Sutjipto, Notary, Perum PLN was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).
Modal Dasar Authorized Capital	Rp63 triliun trillion.
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp46,2 triliun trillion.

TOTAL TENAGA KERJA
TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES

2014	2015
48.068	**47.594**
Orang People	**Orang** People

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
PLN IN BRIEF

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia bermula sejak akhir abad ke-19, melalui pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri di beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan perkebunan teh. Hingga kemudian antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang.

The development of electricity in Indonesia started in late 19th century, through the Dutch Companies owned for individual needs specifically in the sugar mills and tea plantation. Between 1942 and 1945, the management of the companies was transferred to the Japanese.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di akhir tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

As Japan was defeated in World War II in the late 1945, the youth and the electricity workers formed a delegation called Electricity and Gas Laborers/Employees and together with the leaders of the National Committee of Indonesia (KNI), met President Soekarno to hand over the companies to the government of Republic of Indonesia.

Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti pembentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

On 27th of October 1945, President Soekarno established the Electricity and Gas Bureau, under the Public Works and Energy Department, which owned 157.5 MW capacity of power generator. On 1st of January 1961, the Electricity and Gas Bureau was renamed BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company), with its main business is in electricity supply, gas and kokas (a type of fuel derived from the remains of coal). On 1st of January 1965 BPU-PLN was disbaned and divided into two state-owned enterprises, “The State Electricity Company (PLN)” to manage electricity power and “The National Gas Company (PGN)” to manage gas.

Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

In 1972, based on in Government Regulation Num. 17, the of the State Electricity Company (PLN) was renamed General State- Owned Electricity acting as Authorized Agency for Electrical Power Business (PKUK). The duty was to provide electricity to fulfill the public needs. In 1994, the Government gave opportunities to the private sector to get involved in electricity supply business. Later, PLN become a Limited Company (PT) as well as PKUK in providing electricity for public use.

Seiring dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. PLN kini telah berkembang sebagai salah satu dari kelompok korporasi dengan aset terbesar di seluruh dunia. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2015 telah semakin berkembang menjadi 40.295,25 MW.

With the issuance of Law Num. 30 of 2009, PLN no longer acted as an authorized agency in the electrical power business (PKUK), but as the State Owned Enterprises (SOE) called PT PLN (Persero) where its main business to provide to supply electricity to meet public needs. PLN is burgeoning to be one of the highest assets Companies in the world. Total capacity of PT PLN’s power plants until the end of 2015 had grown to 40,295.25 MW.

TONGGAK SEJARAH
MILESTONE

Akhir Abad 19 End of XIX Century

Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang Pabrik Gula dan Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Dutch companies (sugar factories and tea plantations) constructed power plants for their own use.

1942-1945

Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil alih Jepang.

All of the electricity generating companies under Dutch rule were taken over by Japan.

27 Oktober October **1945**

Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Presiden Soekarno established Jawatan Listrik dan Gas under the command of the Department of Public Works and Energy.

1 Januari January **1961**

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas.

Jawatan Listrik dan Gas changed its name to BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) with its line of business being the generation of electricity, gas, and coking coal.

1 Januari January **1965**

BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

BPU-PLN was liquidated, followed by the establishment of two state companies, namely Perusahaan Listrik Negara (PLN) as the manager of the electricity sector and Perusahaan Gas Negara (PGN) as the manager of the gas sector.

1970

Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1970.

The Company's status was changed to Perusahaan Umum (Perum) in accordance with the Government Regulation Num. 30 of 1970.

1972

Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

PLN's status was changed to Perusahaan Umum Listrik Negara and acted as the Holder of the Authority to Conduct Electricity Business (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan—PKUK) with the mandate to provide electricity to the public.

1992

Tahun pertama mendapatkan dana investasi dari pasar modal domestik, melalui penerbitan Obligasi PLN I.

For the first time PLN obtained investment funds from the domestic capital market through the issuance of the PLN Bonds I.

1994

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta.

Legal status of PLN was changed into Limited Liability Company, in accordance with the Act Num. 169 dated 30 July 1994 from Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

2015

- PLN mendeklarasikan dimulainya pembangunan PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 35.000 MW dengan target penyelesaian 5 tahun ke depan.
- PLN mulai merealisasikan proyek pembangunan PLTU berteknologi ultra super critical dengan kapasitas 2.000 MW di Batang (Jawa Tengah) melalui skema *Public Private Partnership*.

- PLN declared the commencement of the construction of coal, gas, and geothermal steam power plants with a capacity of 35,000 MW with completed target in the next five years.
- PLN began to commence the construction of steam power plants with the ultra super critical technology, with a capacity of 2,000 MW in Batang (Central Java) through Public Private Partnership scheme.

2014

PLN menjadi salah satu dari kelompok perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500.

PLN became one of the companies with the largest revenues in the world, according to Fortune 500.

2013

PLN mengoperasikan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar pengganti BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak (*peaker*).

PLN operated Compressed Natural Gas (CNG) as a fuel substituting oil to meet the demand of its peaker power plant.

2011

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero).

The Government handed over the shares of an SOE, PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG), to PT PLN (Persero) on 5 August 2011 thus making BAG a subsidiary of PT PLN (Persero).

2010

Sesuai Peraturan Presiden No.4 Tahun 2010, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi dalam bentuk program percepatan tahap kedua (FTP II).

In accordance with the Presidential Regulation Num. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal Power Plants as a second phase fast track program (FTP II).

2009

Undang-undang No.30 Tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

The Law Num. 30 of 2009 was passed and PLN was no longer designated as PKUK but now operated as a State-Owned Entity (SOE) with the mandate to provide electricity to the public.

2006

Sesuai Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I).

In accordance with the Regulation of the President Num. 71 of 2006, PLN was mandated to build coal-fired Steam Power Plant with a capacity of 10,000 MW for the first phase (FTP I).

2005

PLN memulai program transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia.

PLN began its transformation program into a World-Class Electricity Supplier and Distributor.

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA

Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN adalah : Menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN, adalah:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
   - Pembangkitan tenaga listrik,
   - Penyaluran tenaga listrik,
   - Distribusi tenaga listrik,
   - Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik,
   - Pengembangan penyediaan tenaga listrik,
   - Penjualan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
   - Konsultansi ketenagalistrikan,
   - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan,
   - Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan,
   - Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan,
   - Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik,
   - Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
   - Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, ketenagalistrikan.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
   - Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik,
   - Jasa operasi dan pengaturan *(dispatcher)* pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik,
   - Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan,
   - Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan,
   - Usaha jasa ketenagalistrikan.

Lebih lanjut lagi, bidang usaha PLN mencakup juga:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
2. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.

BUSINESS ACTIVITIES

In accordance with Law Num. 30 of 2009 regarding Electricity and the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are: Providing electricity for the public interest.

The Company's lines of business

In accordance with Law Num. 30 of 2009 regarding Electricity and in the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are:

1. Provision of electrical power includes:
   - Generation of electricity,
   - Transmission of electricity,
   - Distribution of electricity,
   - Planning and constructing facilities to supply electrical power,
   - Development of electricity supply,
   - Sales of electricity.
2. Provision of services' business unit to support electricity services includes:
   - Electricity consultation,
   - Construction and installation of electrical power equipment,
   - Assessment and testing of electrical power equipment,
   - Operation and maintenance of electrical power equipment,
   - Laboratory of electrical power equipment and consumer testing,
   - Certification of electrical power equipment and consumer,
   - Certification of competence for electricity technician.
3. Other activities include:
   - Management and utilization of natural resources and other energy sources in the interests of electrical power,
   - Operating and dispatching services for generation, transmission, distribution and retail sales of electricity,
   - Building the industry of hardware, software and equipment related to industry of electricity power,
   - Cooperation with other parties and institutions related industry to electrical power in the fields of development, operations, telecommunications and other information related to electrical power,
   - Electricity services business.

PLN's business also focuses on other services related to electricity as follows:

1. Planning and development activities of electric power facilities (generation, transmission and distribution) and supporting activities of budgeting, business development, organization development and human resources.
2. Construction of electricity infrastructures, including construction of power generating facilities, transmission and substations (transformer facility station).

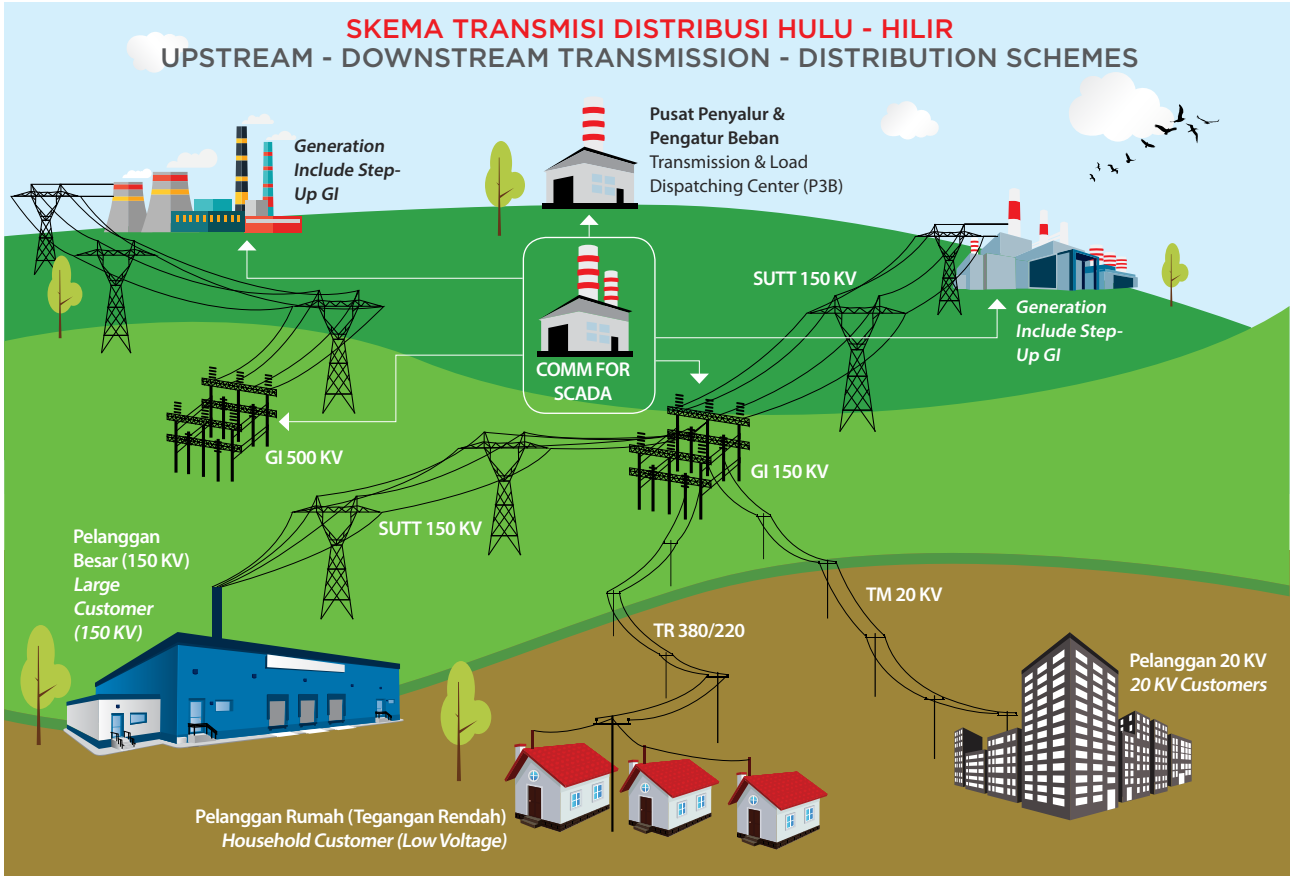

3. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta.
4. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.
   Produk dan jasa yang dihasilkan:
   a. Jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik,
   b. Jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan,
   c. Jasa konsultasi ketenagalistrikan,
   d. Jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan,
   e. Jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang),
   f. Jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 2 Unit Pusat Penyaluran, 16 Unit Induk Pembangunan dan 6 Unit Pusat / Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Utilization and commercialization activities of power plants, which consist of steam power plants, hydro power plants, gas turbine power plants, geothermal power plants, diesel power plants, solar cell power plants and wind power plants. PLN also purchases electrical power produced by private power plants and rents other public power plants to be utilized.
4. Research and development, activities and other related to electricity.
   Products and Services:
   a. Service provision and the provision of electricity,
   b. Equipment certification and electrical power installation,
   c. Electrical power consultation,
   d. Building, maintaining and installing equipment to produce electrical power,
   e. Electrical power development services (research and support),
   f. Other services related to electrical power.

The services mentioned above are conducted by PLN through its 15 Regional Units, 7 Distribution Units, 3 Generation Units, 3 Transmission Units, 2 Dispatcher Centre and Transmission Units, 16 Core Development Units and 6 Central/Service Units which spread across the entire region of Indonesia.

VISI, MISI, MOTO & NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION, MOTTO AND VALUES OF THE COMPANY

Visi

DIAKUI SEBAGAI PERUSAHAAN KELAS DUNIA YANG BERTUMBUH KEMBANG, UNGGUL DAN TERPERCAYA DENGAN BERTUMPU PADA POTENSI INSANI.

Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Keterangan:
Pernyataan visi dan misi telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2002 dan telah dideklarasikan pada saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2002.

Vision

TO BE ACKNOWLEDGED AS A GROWING, SUPERIOR AND TRUSTED WORLD-CLASS COMPANY, SUPPORTED BY ITS COMPETENT HUMAN RESOURCES.

Mission

1. Running an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction companies members and shareholders.
2. Making electricity as a medium to improve quality of life of the public.
3. Making every effort for electricity as an economic booster.
4. Operating an environmentally friendly business.

Note:
The statement of vision and mission has been approved by the Board of Directors and Commissioners in 2002 and declared on the National Electricity Day on October 27, 2002.

BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

Motto
Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Electricity For Better Life

- **SALING PERCAYA** Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.
- **INTEGRITAS** Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- **PEDULI** Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.
- **PEMBELAJAR** Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

- **MUTUAL TRUST** An atmosphere of mutual trust and openness between fellow members of the company based on a belief in integrity, good faith and competence from parties connected in the implementation of clean and ethical business practice.
- **INTEGRITY** The manifestation of an attitude shown by members of the company in which they consistently show honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility toward company management and use of corporate property short and long-term benefit, as well as a sense of responsibilities toward all stakeholders.
- **CARE** A reflection of the intention to protect and care for the worklife quality felt by company members and stakeholders growing together imbued with sensitivity toward problems faced by the Company and the desire to find the right solution.
- **LEARNING** The attitude of company members who always have the courage to question the system and practices of development, management and operations, as well as mastering cutting-edge science and technology for the renewal and sustainability of the Company.

KEPEMILIKAN SAHAM
SHAREHOLDERS OWNERSHIP

INDUK PERUSAHAAN
PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

HOLDING COMPANY
PT PLN (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) with the entire 100% of its shares owned by government of the Republic of Indonesia.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
PT PLN (Persero) hingga saat ini belum melakukan penawaran perdana saham (IPO), namun Perseroan telah menerbitkan beberapa seri obligasi korporasi, sukuk, dan obligasi global.

SHARE LISTING CHRONOLOGY
Until now PT PLN (Persero) has not conducted Initial Public Offering (IPO). However, the Company has issued some series of corporate bonds, sukuk and global bonds.

ENTITAS ANAK PERUSAHAAN DAN ASOSIASI
Daftar Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dan Kepemilikan Saham:

SUBSIDIARIES AND AFFILIATES
List of PT PLN (Persero) Subsidiaries and Shareholders:

Nama Perusahaan Company Name	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership	Status Operasional Operational Status
PT Indonesia Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
PT Indonesia Comnets Plus	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi Telecommunication Provider	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Penyedia Tenaga Listrik Electricity Utility	99,99%	Beroperasi Operating
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jasa Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi Engineering, Procurement and Construction	99,90%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Penyedia Tenaga Listrik Electricity Utility	99,97%	Beroperasi Operating
PT PLN Batubara	Perdagangan Batubara Coal Trading	99,99%	Beroperasi Operating
PT PLN Geothermal	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Tidak Beroperasi Not Operating
Majapahit Holding BV	Lembaga Keuangan Financial Institution	100%	Beroperasi Operating
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pelayaran Shipping	99,99%	Beroperasi Operating
PT Haleyora Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating

Daftar Asosiasi dan Ventura Bersama PT PLN (Persero) beserta Kepemilikan Saham.

Below are the associated entities and joint ventures of PT PLN (Persero) along with PLN's share ownership in these entities.

Nama Perusahaan Company Name	**Bidang Usaha** Line of Business	**Kepemilikan** Ownership		**Status Operasional** Operational Status
		Langsung Direct	**Tidak Langsung** Indirect	
Perusahaan Asosiasi Associated Entities				
PT Geo Dipa Energi (PT GDE)	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	8,19%		Beroperasi Operating
PT Mitra Energi Batam	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		30,00% / PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Sumber Segara Primadaya	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		49,00% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Dalle Energy Batam	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		20,00% / PTPLN Batam	Beroperasi Operating
PT Tanjung Kasam Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		10,00% / PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		45,00% / PT Haleyora Power	Beroperasi Operating
Ventura Bersama Joint Ventures				
PT Unelec Indonesia	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik Power Generation Support	32,35%		Beroperasi Operating
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		51,00% / PT IP	Beroperasi Operating
PT Bajradaya Sentranusa	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		38,54% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		37,25% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Operasi & Pemeliharaan Operations & Maintenance		49,00% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Perta Daya Gas	Transportasi dan penyimpanan LNG LNG Transport and Storage		35,00% / PT IP	Beroperasi Operating
PT Indo Pusaka Berau	Perdagangan Batubara Coal Trading		46,80% / PT IP	Beroperasi Operating
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Control Equipment and Power Distribution		49,00% / PT PLNE	Beroperasi Operating

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

BUSINESS STRUCTURE AND SUBSIDIARY

PLN mengusahakan produk dan jasanya melalui entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).

PLN seeks to provide its products and services through the business units, subsidiaries, associated company, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).

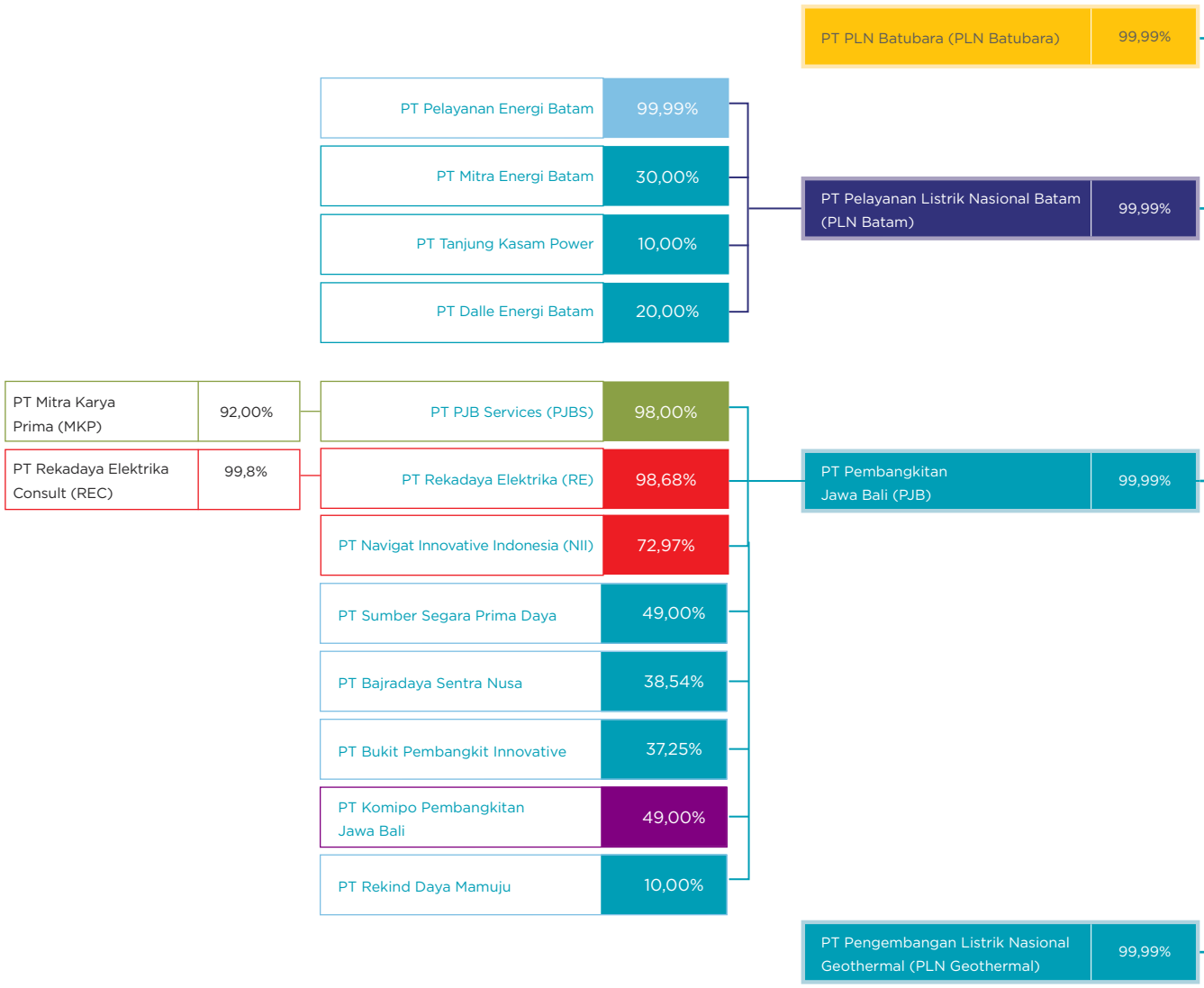

- Keuangan — Finance
- Pembangkit Listrik — Electricity Power Plant
- Listrik Terintegrasi — Integrated Electricity
- Angkutan Laut — Shipping
- Telekomunikasi — Telecommunication
- Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan — Electricity Engineering and Construction
- Transportasi dan Penyimpanan LNG — LNG Transportation and Storage
- Penunjang Penyedia Tenaga Listrik — Electrical Support
- Pembangkit Geothermal — Geothermal Power Plant
- Operasi dan Pemeliharaan — Operational & Maintenance
- Pembangunan Pipa Gas dan Energi lainnya — Construction of Gas Pipeline and Other Energy Services
- Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik — Electricity Controller and Distribution
- Pemeliharaan Pembangkit — Power Plant Maintenance
- Perdagangan Batubara — Coal Trading

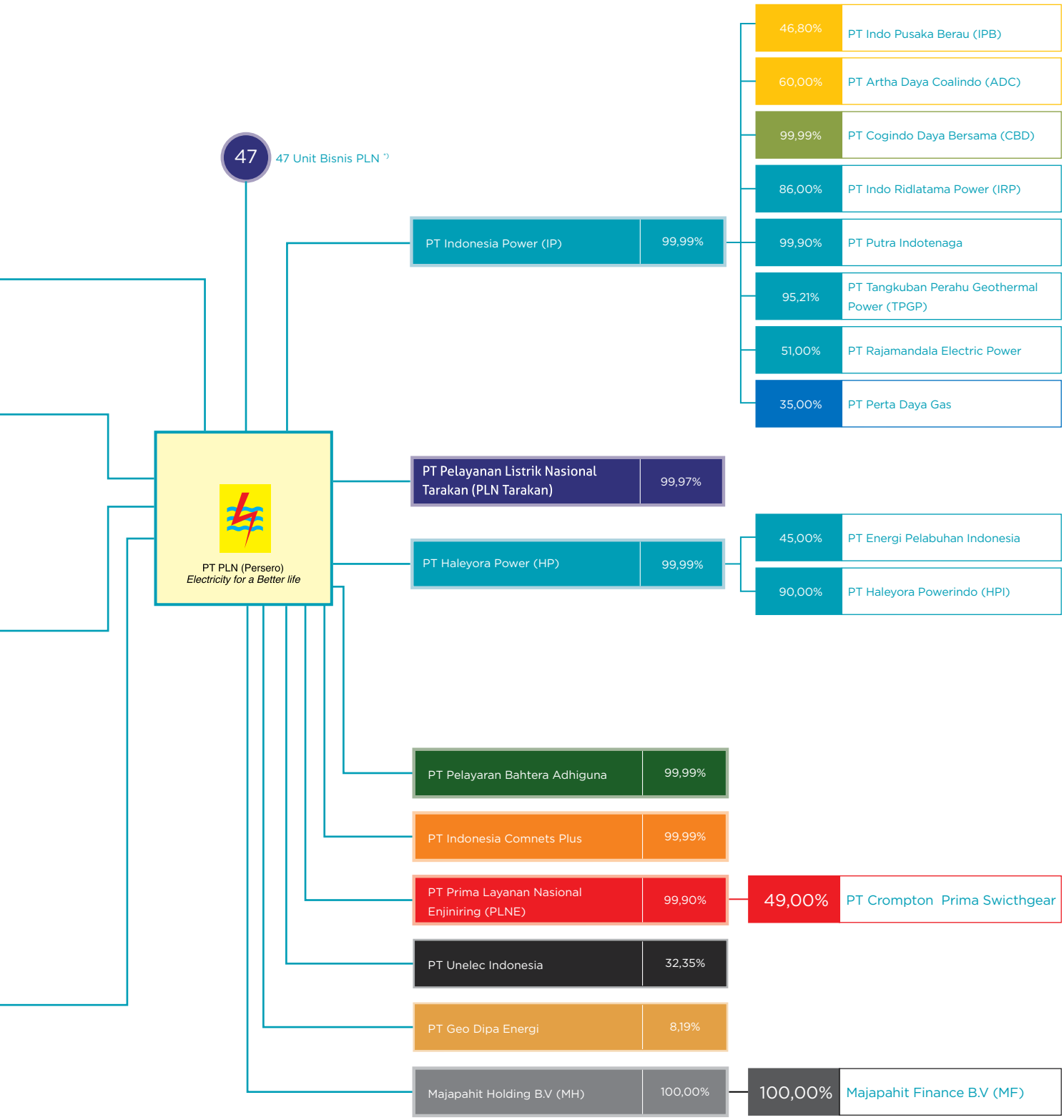

Catatan:
(*) "Unit bisnis" adalah Unit Operasional dari PLN yang menjalankan fungsi usaha tertentu. Daftar unit bisnis ini beserta bidang kegiatannya dapat dilihat pada Lampiran "Data Perusahaan" per 31 Desember 2015.

Note:
(*) "Business Unit" is defined as an Operational Unit of PLN that performs certain business functions. The list of business units and their lines of business are available on the Appendix titled "Corporate Data" as at 31 December 2015.

SEGMEN OPERASI REGIONAL
REGIONAL OPERATING SEGMENTS

Segmen operasi regional sampai dengan akhir Agustus 2015 terbagi atas 3 segmen yang terdiri atas Segmen Operasi Regional Sumatera, Segmen Operasi Regional Jawa Bali, dan Segmen Operasi Regional Indonesia Timur.

Pada laporan tahunan ini yang disajikan adalah berdasarkan 3 segmen operasi regional.

Segmentasi Operasi Regional, jumlah pelanggan, daya tersambung, energi terjual dan kapasitas daya terpasang yang dikelola untuk masing-masing wilayah operasional, adalah sebagai berikut:

Sumatera		Sumatra
Jumlah Pelanggan	12.129.363	Total Customers
Daya Tersambung	17.241 MVA	Connected Capacity
Energi Terjual	31,21 TWh	Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang*	9.778 MW	Installed Capacity*

Jawa - Bali		Java - Bali
Jumlah Pelanggan	39.469.948	Total Customers
Daya Tersambung	76.958 MVA	Connected Capacity
Energi Terjual	150,90 TWh	Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang*	36.892 MW	Installed Capacity*

* Termasuk pembangkit IPP dan pembangkit sewa
* Including IPP power plant & rent power plant

Regional operating segments until the end of August 2015 consist of three segments, namely Sumatra regional segment, Jawa Bali regional segment, and East Indonesia regional segment.

This annual report presents information based on the three regional operating segments.

Regional operating segments, number of customers, connected power, energy sold, and installed capacity managed by each of the operational areas are as follows:

Indonesia Timur		East Indonesia
Jumlah Pelanggan	9.568.669	Total Customers
Daya Tersambung	12.384 MVA	Connected Capacity
Energi Terjual	20,74 TWh	Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang*	6.219 MW	Installed Capacity*

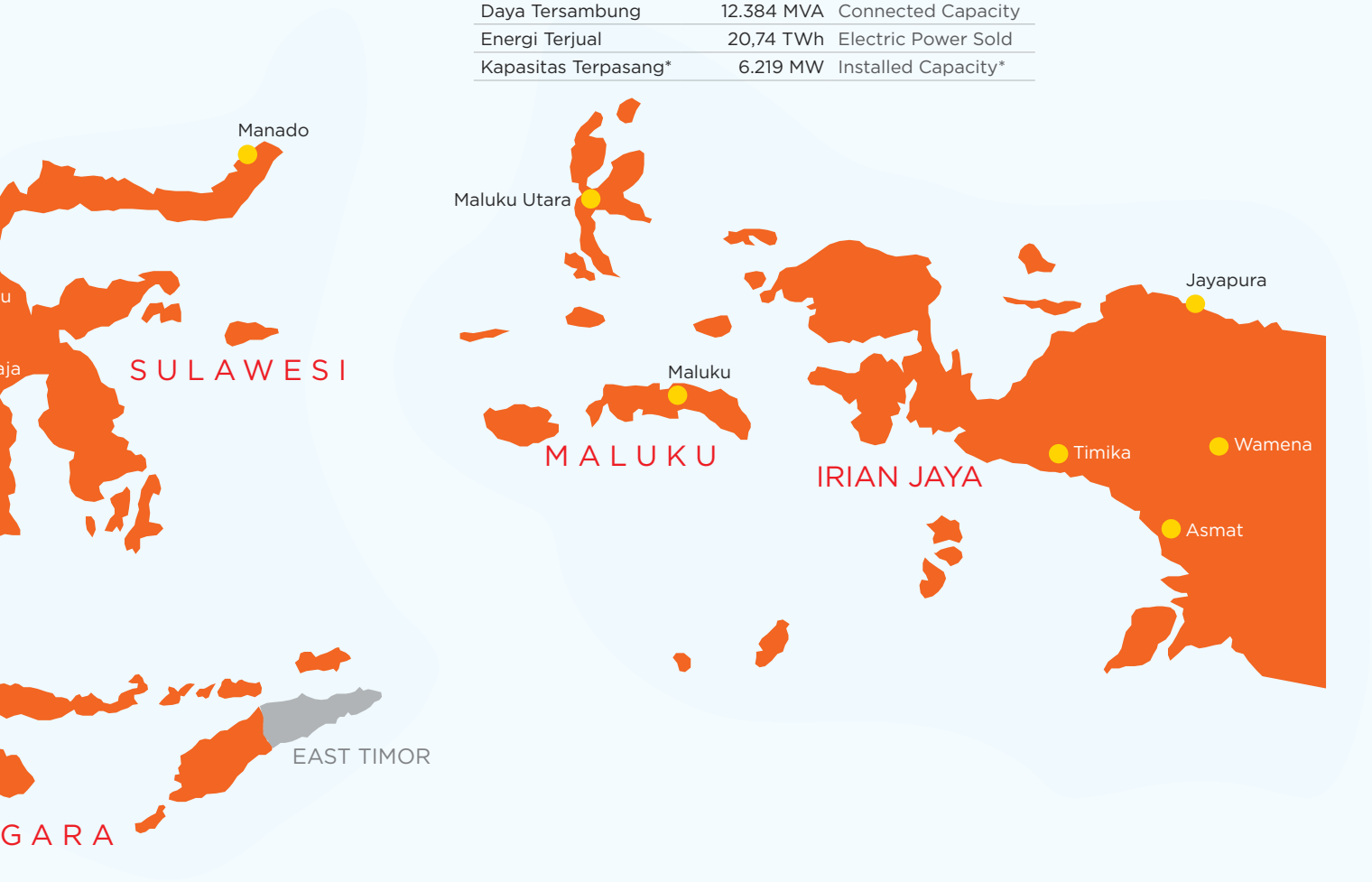

Untuk kepentingan perencanaan strategis mulai September 2015 PLN mulai membagi area operasi PLN dan entitas anak kedalam 7 segmen Operasi Regional menurut kondisi geografis, yakni: Operasi Regional Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

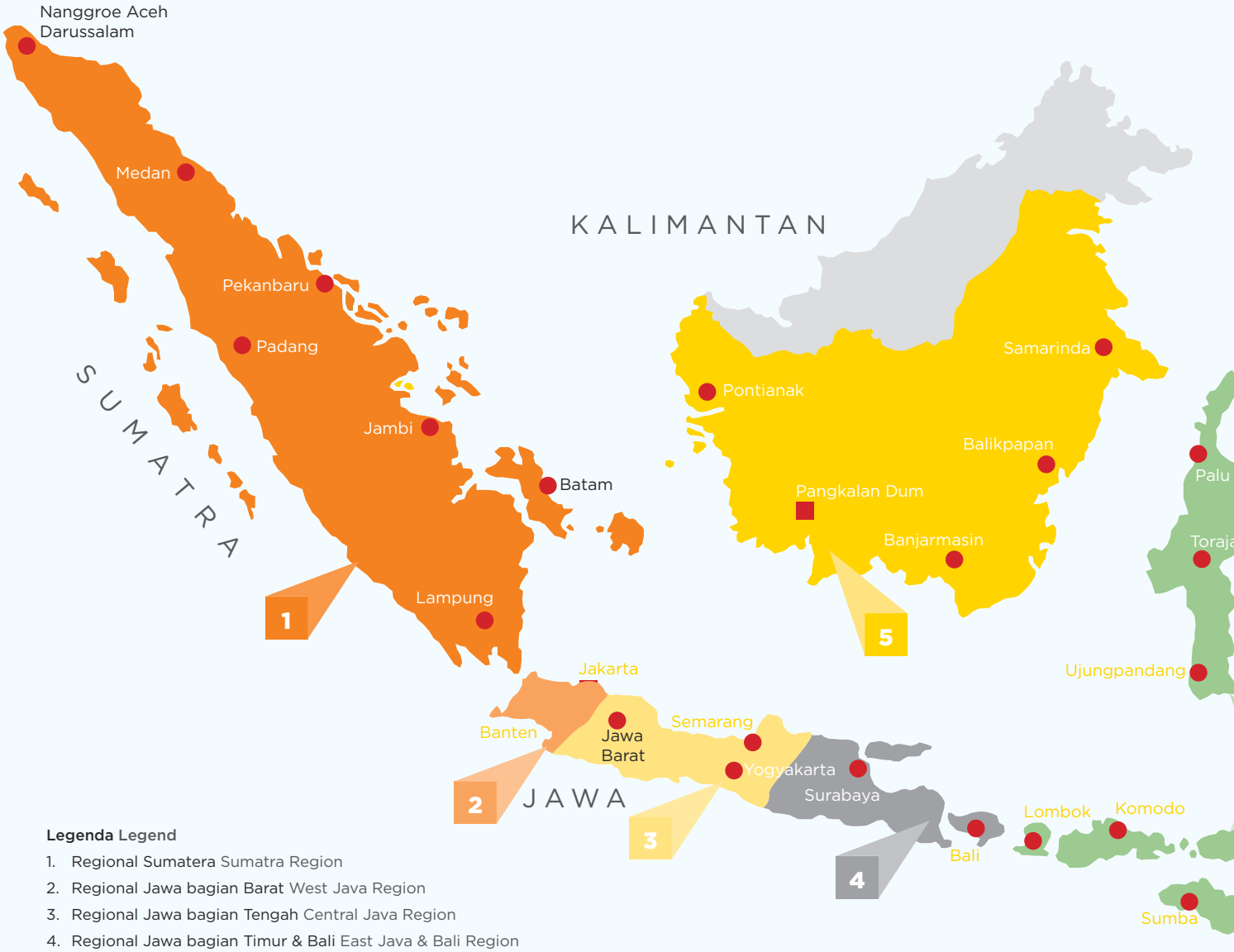

Legenda Legend

1. Regional Sumatera Sumatra Region
2. Regional Jawa bagian Barat West Java Region
3. Regional Jawa bagian Tengah Central Java Region
4. Regional Jawa bagian Timur & Bali East Java & Bali Region
5. Regional Kalimantan Kalimantan Region
6. Regional Sulawesi & Nusa tenggara Sulawesi & Nusa Tenggara Region
7. Regional Maluku dan Papua Maluku & Papua Region

For the strategic planning interest, on September 2015, PLN began to divide its operational area and subsidiaries into 7 regional operating segments based on the geographical situation, such as Sumatra, West Java, Central Java, East Java & Bali, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, and Maluku & Papua regional segment.

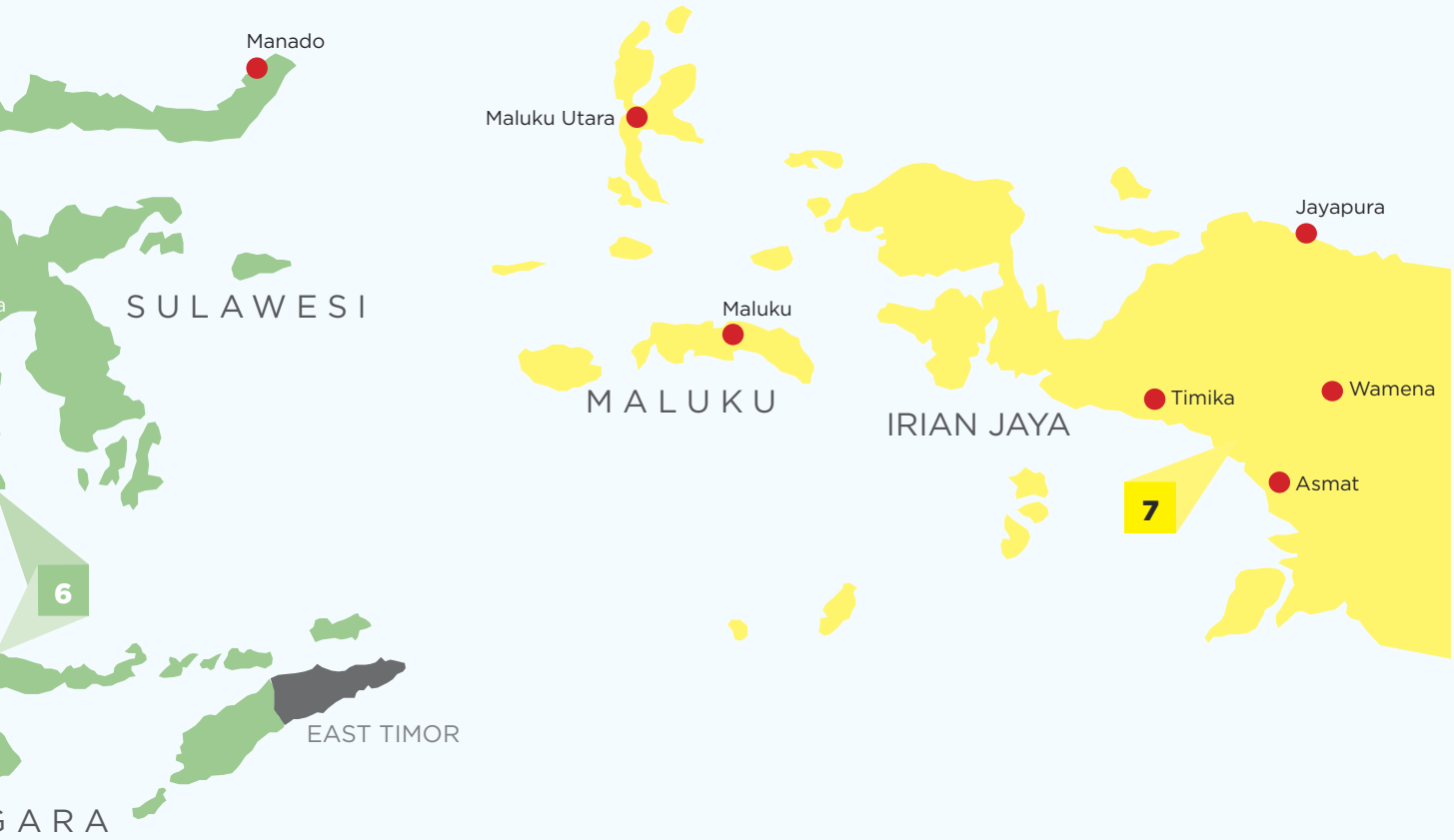

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

- Satuan Pengawasan Intern — Internal Supervisory Unit — ALI MUDIN
- Satuan Hukum Korporat — Head of Corporate Legal Services Unit — DEDENG HIDAYAT
- Satuan Pengendalian Kinerja Korporat — Corporate Performance Control Unit — ZULFARIDA FALUZY
- Sekretaris Perusahaan — Corporate Secretary — ADI SUPRIONO
- Satuan Komunikasi Korporat — Corporate Communication Unit — I MADE SUPRATEKA
- Satuan Pengadaan IPP — IPP Procurement Unit — HERNADI BUHRON
- Satuan Batubara — Coal Unit — HARLEN
- Satuan Gas & BBM — Fuel and Gas Unit — CHAIRANI RACHMATULLAH
- Pusat Pengatur Beban — Load Dispatching Center — E. HARYADI

Direktur Perencanaan Korporat — Corporate Planning Director — NICKE WIDYAWATI
- Divisi Perencanaan Sistem — System Planning Division — MUHAMMAD IKBAL NUR
- Divisi Perencanaan Korporat — Corporate Planning Division — DODDY BENYAMIN PANGARIBUAN
- Divisi Energi Baru & Terbarukan — New & Renewable Energy Division — SYAH DARWIN SIREGAR
- Divisi Enjiniring & Perencanaan Pengadaan — Engineering & Procurement Planning Division — MOCHAMAD PRAYUDIANTO
- Divisi Transaksi Tenaga Listrik & Kemitraan Bisnis — Electricity Power Transaction and Business Partnership Division — FAHMI EL AMRUZI D.
- Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan — Risk Management and Compliance Division — R. KRISNA SIMBAPUTRA
- Puslitbang — Center of Research & Development — ISHVANDONO YUNANI
- Pusenlis — Center of Engineering & Electricity — SOEDJARWO

Direktur Pengadaan — Procurement Director — SUPANGKAT, IWAN SANTOSO
- Divisi Perijinan & Pertanahan — Permit & Land Division — NOESITA INDRIANI
- Divisi Pengadaan Strategis — Strategic Procurement Division — AHMAD ROFIK
- Divisi *Supply Chain Management* — Supply Chain Management Division — SEPTA HAMID
- Divisi Administrasi Konstruksi — Construction Administration Division — ADI LUMAKSO
- Pusat Manajemen Konstruksi — Center of Construction Management — DIDIK MARDIYANTO
- Pusharlis — Human Capital Management System — EMAN PRIJIONO WASITO ADI
- Pusat Sertifikasi — Center of Certification — MIFTAHUL JANNAH

Direktur Human Capital Management — Human Capital Management Director — MUHAMAD ALI
- Divisi Pengembangan Organisasi — Organization Development Division — SRIYONO D. SISWOYO
- Divisi *Human Capital Management System* — Human Capital Management System Division — BAGUS SETIAWAN
- Divisi Pengembangan Talenta — Talent Development Division — OKTO RINALDI S.
- Divisi Umum — General Division — DANNI IRAWAN
- Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan & Lingk. — Occupational Health and Safety, Security, and Environment Division — HELMI NAJAMUDDIN
- Pusdiklat — Center of Education and Training — WISNOE SATRIJONO

Direktur Keuangan — Finance Director — SARWONO SUDARTO
- Divisi Keuangan — Financial Division — R. RAWAN INSANI
- Divisi Anggaran — Budgeting Division — GONG MATUA HASIBUAN
- Divisi Treasury — Treasury Division — ISKANDAR
- Divisi Akuntansi — Accounting Division — SULISTYO BIANTORO
- Divisi Niaga — Commerce Division — BENNY M MARBUN
- Divisi Sistem & Teknologi Informasi — System and Information Technology Division — AGUS SUTIAWAN

Direktur Bisnis Regional Sumatera — Sumatra Regional Business Director — AMIR ROSIDIN
- Divisi Pengembangan Regional Sumatera — Sumatra Regional Development Division — MUHAMMAD IKHSAN ASAAD
- Divisi Konstruksi Regional Sumatera — Sumatra Regional Construction Division — WILUYO KUSDWIHARTO
- Divisi Operasi Regional Sumatera — Sumatra Regional Operation Division — E. HARYADI
- UIP Pembangkitan Sumatera — Construction Unit of Sumatra Regional — HERU SRIWIDODO SARI
- UIP Regional Sumatera Bagian Utara — Construction Unit of North Sumatra Regional — JURLIAN SITANGGANG
- UIP Regional Sumatera Bagian Tengah — Construction Unit of Central Sumatra Regional — HENVRY SETIJABUDI
- Pembangkitan Sumatera Bagian Utara — North Sumatra Power Plant — SUGIYANTO
- Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan — South Sumatra Power Plant — M. AHSIN SIDQIN
- P3B Sumatera — NUR WAHYU DHINIANTO
- Wilayah NAD — NAD Region — BOB SARIL
- Wilayah Sumatera Utara — North Sumatera Region — AGUNG NUGRAHA
- Wilayah Riau & Kepulauan Riau — Riau & Riau Islands Region — FEBY JOKO P
- Wilayah Sumatera Barat — West Sumatera Region — SUPRIYADI
- Wilayah Sumsel, Jambi & Bengkulu — South Sumatera, Jambi & Bengkulu Region — BUDI PANGESTU
- Wilayah Bangka Belitung — Bangka Belitung Region — RUSTAMADJI

DIREKTUR UTAMA
BOARD OF DIRECTORS

Direktur Utama
President Director
SOFYAN BASIR

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
West Java Regional Business Director
MURTAQI SYAMSUDDIN

- **Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat** — West Java Regional Development Division — **SATRI FALANU**
- **Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Barat** — West Java Regional Construction Division — **SUAIB SAKARIAH**
- **Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat** — West Java Regional Operations Division — **NYOMAN S. ASTAWA**
- **UIP Interkoneksi Sumatera Java** — Construction Unit of Sumatra Java Interconnection — **RATNASARI SJAMSUDDIN**
- **UIP V Jawa Bagian Barat** — Construction Unit of West Java V — **ROBERT APRIANTO PURBA**
- **Transmisi Jawa Bagian Barat** — Transmission Unit of West Java — **TRINO ERWIN**
- **Distribusi Jakarta Raya** — Distribution Unit of Jakarta Raya — **SYAMSUL HUDA**
- **Distribusi Banten** — Banten Distributions — **SYOFVI FELIENTY**
- **Distribusi Lampung** — Distribution Unit of Lampung — **IRWANSYAH PUTRA**

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Central Java Regional Business Director
NASRI SEBAYANG

- **Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah** — Central Java Regional Development Division — **DYANANTO R**
- **Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Tengah** — Central Java Regional Construction Division — **SARONO**
- **Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah** — Central Java Regional Operations Division — **SULAIMAN DAUD**
- **UIP V Jawa Bagian Tengah I** — Construction Unit of V Central Java I — **ANANG YAHMADI**
- **UIP X Jawa Bagian Tengah II** — Construction Unit of X Central Java II — **AMIHWANUDDIN**
- **Pembangkitan Tanjung Jati B** — Tanjung Jati B Power Plant — **ARI BASUKI**
- **Transmisi Jawa Bagian Tengah** — Transmission Unit of Central Java — **EDWIN NUGRAHA PUTRA**
- **Distribusi Jawa Barat** — Distribution Unit of West Java — **IWAN PURWANA**
- **Distribusi Jawa Tengah** — Distribution Unit of Central Java — **DWI KUSNANTO**

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali
East Java & Bali Regional Business Director
AMIN SUBEKTI

- **Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Timur & Bali** — East Java & Bali Regional Development Division — **PARANAI SUHASFAN**
- **Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Timur & Bali** — East Java & Bali Regional Construction Division — **ADANG SUDRAJAT**
- **Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur & Bali** — East Java & Bali Regional Operations Division — **DANIEL SANGAP BANGUN**
- **UIP Jawa Bagian Tengah I** — Construction Unit of Central Java Regional I — **MAYARUDIN**
- **Plt. UIP Jawa Bagian Tengah II** — Act. Construction Unit of Central Java Regional II — **PUDJO SANTOSO**
- **Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali** — East Java and Bali Transmission — **WARSONO**
- **Distribusi Jawa Timur** — East Java Distribution — **YUGO RIYATMO**
- **Distribusi Bali** — Bali Distribution — **SANDIKA AFLIANTO**

Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Kalimantan Regional Business Director
DJOKO R. ABU MANAN

- **Divisi Pengembangan Regional Kalimantan** — Kalimantan Regional Development Division — **SUDIBYO**
- **Divisi Konstruksi Regional Kalimantan** — Kalimantan Regional Construction Division — **HARIYADI KRISMIYANTO**
- **Divisi Operasi Regional Kalimantan** — Kalimantan Regional Operations Division — **RULY FIRMANSYAH**
- **UIP Kalimantan Bagian Timur** — Construction Unit of East Kalimantan — -
- **UIP Kalimantan Bagian Tengah** — Construction Unit of Central Kalimantan — **R. DENDI KUSUMAWARDANA**
- **Wilayah Kalimantan Barat** — West Kalimantan Region — **AJI SUTRISNO**
- **Wilayah Kalimantan Barat** — West Kalimantan Region — **BIMA PUTRAJAYA**
- **Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah** — South & Central Kalimantan Region — **PURNOMO**
- **Wilayah Kalimantan Utara & Timur** — North & East Kalimantan Region — **PURNOMO**

Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara
Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Businesses Director
MACHNIZON

- **Divisi Pengembangan Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** — Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Development Division — **DEWA GEDE NGURAH AMBARA**
- **Divisi Konstruksi Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** — Sulawesi & Nusra Regional Construction Division — **HAKIM NAWAWI**
- **Divisi Operasi Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** — Sulawesi & Nusra Regional Operations Development Division — **MURSALIN**
- **UIP Nusa Tenggara** — Construction Unit of Nusa Tenggara — **OCTAVIANUS PADUDUNG**
- **UIP Sulawesi Utara** — Construction Unit of North Sulawesi — **EKO APRIANTO A**
- **UIP Sulawesi Selatan** — Construction Unit of South Sulawesi — **IDIAN**
- **Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo** — North Sulawesi & Gorontalo Region — **BARINGIN NABABAN**
- **Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara & Barat** — South, South East, and West Sulawesi Region — **WASITO ADI**
- **Wilayah Nusa Tenggara Barat** — West Nusa Tenggara Region — **KARYAWAN AJI**
- **Wilayah Nusa Tenggara Timur** — East Nusa Tenggara Region — **RICHARD SAFKAUR**

Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Maluku & Papua Regional Businesses Director
HARYANTO W.S.

- **Divisi Pengembangan Regional Maluku & Papua** — Maluku & Papua Regional Development Division — **HOT MATUA BAKARA**
- **Divisi Konstruksi Regional Maluku & Papua** — Maluku & Papua Regional Constructions Division — **TRI AGUS CAHYONO**
- **Divisi Operasi Regional Maluku & Papua** — Maluku & Papua Regional Operations Division — **IDA BAGUS ARI WARDANA**
- **UIP Papua** — Development Unit Papua — **HENRISON ADVENTIUS LUMBANRAJA**
- **Unit Induk Pembangunan Maluku** — Construction Unit of Maluku — **DIDIK SUDARMADI**
- **Wilayah Maluku & Maluku Utara** — Maluku & North Maluku Region — **INDRADI SETIAWAN**
- **Wilayah Papua & Papua Barat** — Papua & West Papua Region — **YOHANES SUKRISLISMONO**

UNIT

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN DI PASAR MODAL

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS IN CAPITAL MARKET

LEMBAGA PEMERINGKAT OBLIGASI

Perusahaan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk melakukan pemeringkatan terhadap obligasi dalam negeri PLN dan Moody's Investors Service, Fitch Rating dan Standar and Poor's Rating untuk pemeringkatan obligasi internasional PLN, dengan masing-masing alamat sebagai berikut:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City 17th floor
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp : (62-21) 7278 2380
Faks : (62-21) 7278 2370

Moody's Investor Service Hongkong Limited
24/F, One Pacifik Place, 88 Queesway
Hongkong
Tel : +852 3758 1300
Fax : +852 3758 1644

Fitch Ratings Ltd
30 North Colonnade
London E14 5GN
Tel : +44 20 3530 1000
Fak : +44 20 3530 1500

Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard
#23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

BURSA EFEK

Obligasi dalam negeri PLN tercatat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan obligasi luar negeri tercatat di The Singapore Exchange Limited, Singapura. Masing-masing perusahaan pencatat efek tersebut beralamat di:

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

The Singapore Exchange Limited
2 Shenton Way
#19-00 SGX Centre 1
Singapore 068804, Singapore
Telp : (65) 6236 8888
Faks : (65) 6535 6994

BONDS RATING AGENCY

The Company appointed PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) to conduct rating of PLN's domestic bonds and appointed Moody's Investors Service, Fitch Ratings and Standard and Poor's Rating to conduct rating of PLN's international bonds. Their addresses are provided below:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City 17th floor
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp : (62-21) 7278 2380
Faks : (62-21) 7278 2370

Moody's Investor Service Hongkong Limited
24/F, One Pacifik Place, 88 Queesway
Hongkong
Tel : +852 3758 1300
Fax : +852 3758 1644

Fitch Ratings Ltd
30 North Colonnade
London E14 5GN
Tel : +44 20 3530 1000
Fak : +44 20 3530 1500

Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard
#23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

STOCK EXCHANGE

PLN's domestic bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange, while PLN's international bonds are listed on The Singapore Exchange Limited, Singapore. These stock exchanges' addresses are provided below:

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

The Singapore Exchange Limited
2 Shenton Way
#19-00 SGX Centre 1
Singapore 068804, Singapore
Telp : (65) 6236 8888
Faks : (65) 6535 6994

WALI AMANAT

PT CIMB Niaga Tbk
Gedung Graha Niaga Lt 20
Jln Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

PT Bank Permata Tbk
Securities & Agency Operations
Permata Bank Tower 3 Bintaro Lantai 14
Jln M.H Thamrin Blok B 1 No. 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang 15224

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN Lt. 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta - 10130

AKUNTAN PERUSAHAAN

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PriceWaterhouseCoopers Indonesia)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940

NOTARIS

Lenny Janis, SH
Jln. Hang Lekir 9 No.1
Jakarta 12120

Aryanti Artisari, SH, M.Kn.
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend Sudirman Kav 60
Jakarta Selatan 12190

Ati Mulyati, SH. MKn
Cyber 2 Tower Lantai 22 E
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950

Yualita Widyadhari, SH., MKn.
TCC Batavia Tower One Lantai 9 Suite 9
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

WALI AMANAT/BOARD OF TRUSTEES

PT CIMB Niaga Tbk
Gedung Graha Niaga 20th floor
Jln Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

PT Bank Permata Tbk
Securities & Agency Operations
Permata Bank Tower 3 Bintaro 14th floor
Jln M.H Thamrin Blok B 1 Num. 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sector 7
Tangerang 15224

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN 18th floor
Jl. Gajah Mada Num. 1
Jakarta - 10130

AKUNTAN PERUSAHAAN/ACCOUNTANT

Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan (PriceWaterhouseCoopers Indonesia)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 Num. 6
Jakarta 12940

NOTARIES

Lenny Janis, SH
Jln. Hang Lekir 9 Num. 1
Jakarta 12120

Aryanti Artisari, SH, M.Kn.
Menara Sudirman 18th floor
Jl. Jend Sudirman Kav 60
Jakarta Selatan 12190

Ati Mulyati, SH. MKn
Cyber 2 Tower 22 E floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Num. 13
Jakarta Selatan 12950

Yualita Widyadhari, SH., MKn.
TCC Batavia Tower One 9th floor Suite 9
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

Imas Fatimah, SH.
Graha MIK Lantai 5
Taman Perkantoran Kuningan
Jl. Setiabudi Selatan Kav 16 - 17

Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.
Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta 12160

M. Nova Faisal, SH., M.Kn
Cyber 2 Tower Lantai 22
Jln. H.R Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta Selatan 12950

Zulkifli Harahap, SH.
Jln. R.S. Fatmawati No. 15L, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

KONSULTAN HUKUM
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office
Office 8 Lantai 15 Unit H-SCBD Lot 28
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Amanah
Gedung Victoria Lt 3
Jln. Sultan Hasanudin No. 47/51
Jakarta

A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners
Menara Jamsostek Lt 4
Suite TA 0402
Jln. Jend Gatot Subroto No.38
Jakarta

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt 21
Sudirman Central Business District
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Imas Fatimah, SH.
Graha MIK Lantai 5
Taman Perkantoran Kuningan
Jl. Setiabudi Selatan Kav 16 - 17

Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.
Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta 12160

M. Nova Faisal, SH., M.Kn
Cyber 2 Tower Lantai 22
Jln. H.R Rasuna Said Blok X-5 Num.13
Jakarta Selatan 12950

Zulkifli Harahap, SH.
Jln. R.S. Fatmawati Num. 15L, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

LEGAL CONSULTANTS
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office
Office 8 Lantai 15 Unit H-SCBD Lot 28
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Amanah
Gedung Victoria Lt 3
Jln Sultan Hasanudin Num. 47/51
Jakarta

A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners
Menara Jamsostek Lt 4
Suite TA 0402
Jln. Jend Gatot Subroto Num. 38
Jakarta

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt 21
Sudirman Central Business District
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

AKSES INFORMASI
ACCESS TO INFORMATION

Seluruh informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dapat diperoleh di:

Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax.+62 21 7221330
www.pln.co.id

Pada situs ini, PLN memberikan informasi yang mencakup aspek pelayanan pelanggan, info umum, info korporat dan hubungan investor.

MEDIA PUBLIKASI

1. Untuk Level Korporasi mencakup : Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, *Company Profile*, CSR, PLN Kita, majalah internal Fokus.
2. Untuk level Unit Bisnis mencakup : Yes,Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA dan CAHAYA.
3. Untuk menunjukkan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, Perseroan menyediakan fasilitas website mengenai upaya pemberantasan korupsi bekerjasama dengan TII (Transparansi Internasional Indonesia) yaitu: www.plnbersih.com.
4. Media Sosial, berupa twitter @pln_123, dan facebook: PLN123.

Informasi *Content Website* Perusahaan:
PLN memiliki website resmi www.pln.co.id, dengan konten utama:

1. Informasi pemegang saham,
2. Struktur *Group*,
3. Laporan Keuangan,
4. Laporan Keuangan Tahunan,
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi,
6. Informasi Korporasi Lain-Lain - dan layanan sebagaimana dapat dilihat melalui *sitemap* pada Website Korporasi.

All information about PT PLN (Persero) can be accessed at:

PT PLN (Persero) Corporate Secretary
Jl. Trunojoyo Blok M I Num. 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax.+62 21 7221330
www.pln.co.id

In this website, PLN provides information covering aspects of customer service, public and corporate information and investor relations.

MEDIA PUBLICATION

1. At corporate level covers: Annual Report, Sustainability Report, Company Profile, CSR, PLN Kita, internal magazine Fokus.
2. At the Business Unit level: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA and CAHAYA.
3. To show PLN's commitment in improving GCG best practices, the Company provided a website containing efforts of corruption eradication in cooperation with Transparency International Indonesia (TII): www.plnbersih.com.
4. Social media of Twitter account @pln_123 and Facebook page PLN123.

Information on the Company's website:
PLN's official website is www.pln.co.id, which contains primary information including:

1. Shareholder information,
2. Group structure,
3. Financial Statements,
4. Annual Financial Statement,
5. Profiles of the Board of Directors and Board of Commissioners,
6. Other Corporate Information and Services, as shown on the website's site map.

SITEMAP PLN PLN SITEMAP

BERANDA HOME

PELANGGAN CUSTOMERS

- Pelayanan Sosial
  - Golongan Tarif
    - Jenis Golongan Tarif
    - Permintaan Sambung Baru
    - Permintaan Tambah Daya
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif (TTL 2010)
    - Menghitung Tagihan Listrik
- Rumah Tangga
  - Golongan Tarif
    - Jenis Golongan Tarif
    - Permintaan Sambung Baru
    - Permintaan Tambah Daya
    - Ganti Nama
    - Balik Nama
    - Ubah Tarif
    - Pindah Meter
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif
  - Rekening
    - Perhitungan Rekening
    - Biaya dan Denda
    - Pemutusan Listrik
  - Pemadaman Listrik
    - Penyebab Listrik Padam
  - Hak & Kewajiban
    - Hak Pelanggan
    - Kewajiban Pelanggan
- Bisnis
  - Jenis Golongan Tarif
    - Defenisi Pelanggan Bisnis
    - Permintaan Sambung Baru
    - Permintaan Tambah Daya
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif (TTL 2010)
    - Menghitung Tagihan Listrik
- Industri
  - Jenis Golongan Tarif
    - Defenisi Pelanggan Industri
    - Permintaan Sambung Baru
    - Permintaan Tambah Daya
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif (TTL 2010)
    - Menghitung Tagihan Listrik
- Kantor Pemerintahan & PJU
  - Jenis Golongan Tarif
    - Definisi Kantor & PJU
    - Permintaan Sambung Baru
    - Permintaan Tambah Daya
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif (TTL 2010)
    - Menghitung Tagihan Listrik
- Traksi
  - Jenis Golongan Tarif
    - Definisi Pelanggan Traksi
    - Permintaan Layanan Traksi
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif (TTL 2010)
- Curah
  - Jenis Golongan Tarif
    - Definisi Pelanggan Curah
    - Permintaan Layanan Curah
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Golongan Tarif (TTL 2010)
- Layanan Khusus
  - Jenis Golongan Tarif
    - Definisi Layanan Khusus
    - Permintaan Layanan Khusus

- Social Services
  - Tariff Groups
    - Tariff Types
    - Request a New Connection
    - Request Additional Power
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups (TTL 2010)
    - Calculating Your Electricity Bill
- Residential
  - Tariff Groups
    - Tariff Types
    - Request a New Connection
    - Request Additional Power
    - Name Change
    - Transfer of Title
    - Change Tariff
    - Moving the Meter
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups
  - Billing
    - Calculating Bills
    - Charges and Penalties
    - Terminating a Connection
  - Blackouts
    - Reasons for Blackouts
  - Rights & Responsibilities
    - Customer Rights
    - Customer Responsibilities
- Business
  - Tariff Groups
    - Definition of a Business Customer
    - Request a New Connection
    - Request Additional Power
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups (TTL 2010)
    - Calculating Bills
- Industry
  - Tariff Groups
    - Definition of an Industrial Customer
    - Request a New Connection
    - Request Additional Power
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups (TTL 2010)
    - Calculating Bills
- Government Offices and Public Street Lighting
  - Tariff Groups
    - Definition of A Government Office & Public Street Lighting
    - Request a New Connection
    - Request Additional Power
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups (TTL 2010)
    - Calculating bills
- Traction
  - Tariff Groups
    - Definition of a Traction Customer
    - Request Traction Service
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups (TTL 2010)
- Bulk
  - Tariff Groups
    - Definition of Bulk Customer
    - Request Bulk Service
  - Electricity Tariff
    - Tariff Groups (TTL 2010)
- Special Services
  - Tariff Groups
    - Definition of Special Services
    - Request Special Services

- Tarif Tenaga Listrik
  - Golongan Tarif (TTL 2010)
- Listrik Prabayar
  - Listrik Prabayar
    - Apa Itu Listrik Prabayar
    - Keuntungan Listrik Prabayar
    - Apa Itu Isi Ulang Listrik
    - Dimana Beli Isi Ulang Listrik
    - Beli Listrik Isi Ulang
    - Beli Listrik Isi Ulang Di ATM
  - Meter Prabayar
    - Petunjuk Penggunaan Meter
    - Meter Prabayar Actaris
    - Meter Prabayar Landis Gyr
    - Meter Prabayar Star
    - Meter Prabayar Hexing
    - Meter Prabayar Itron
  - Tarif Tenaga Listrik
    - Tarif Prabayar (TTL 2010)
    - Biaya Pasang Baru
    - Biaya Perubahan Daya
  - Hak & Kewajiban
    - Hak Pelanggan
    - Kewajiban Pelanggan
  - Penghematan Listrik
    - Tips Menghemat Listrik
- Tarif Tenaga Listrik

- Electricity Tariff
  - Tariff Groups (TTL 2010)
- Pre-paid Electricity
  - Pre-paid Electricity
    - What is Pre-Paid Electricity
    - Benefits of Pre-Paid Electricity
    - What Does Pre-Paid Electricity Mean
    - Where to Buy Pre-Paid Electricity
    - Paying for Pre-Paid Electricity
    - Paying for Pre-Paid Electricity at An ATM
  - Pre-Pay Meters
    - How to Use A Pre-Paid Meter
    - Actaris Pre-Paid Meters
    - Landis Gyr Pre-Paid Meters
    - Star Pre-Paid Meters
    - Hexing Pre-Paid Meters
    - Itron Pre-Paid Meters
  - Electricity Tariff
    - Pre-paid Electricity Tariff (TTL 2010)
    - New Installation Cost
    - Change in power cost
  - Rights & Responsibilities
    - Customer Rights
    - Customer Responsibilities
  - Saving Electricity
    - Tips to Save Electricity
- Electricity Tariff

INVESTOR INVESTORS

- Laporan Keuangan
- Laporan Tahunan
- Statistik
- Presentasi
- RUPTL

- Financial Statements
- Annual Report
- Statistics
- Presentations
- Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL)

- Proyek 10.000 MW
- IPP
- PLTA Cisokan
- *Draft Energy Sales Contract*
- *Request For Meeting*

- 10.000 MW Project
- IPP
- Cisokan Hydro Power Plant
- Draft Energy Sales Contract
- Request A Meeting

MEDIA

- Siaran Pers
- Warta PLN
- Multimedia
- *Email Alert*

- Press Releases
- PLN News
- Multimedia
- Email Alert

- Artikel Fokus
- Istilah Kelistrikan

- Focus Articles
- Electricity Terms

SUPLIER SUPPLIERS

- Peluang Bisnis
- Syarat Menjadi Vendor
- Pengumuman
- Portal E-Proc

- Business opportunities
- Requirements for Vendors
- Announcements
- E-Procurement Portal

- Pendaftaran Vendor

- Vendor Registration

TENTANG KAMI ABOUT US

- Profil Perusahaan
- Struktur Perusahaan
- Struktur Manajemen
- Bisnis PLN

- Company Profile
- Company Structure
- Management Structure
- PLN's Business

- Inovasi dan Penghargaan
- CEO Note
- Anak Perusahaan
- PLN Peduli
- Peta

- Innovations and Awards
- CEO Notes
- Subsidiaries
- PLN Care
- Map

UNIT PLN PLN UNITS

POPULER POPULAR

- Produk & Layanan
- Hubungan Investor

- Products & Services
- Investor Relations

- Karier
- CSR
- Unit PLN

- Careers
- CSR
- PLN Units

4
GRESIK
WATER TANK

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM

hal. 98 - 169

Merealisasikan Program 35.000 MW sebagai salah satu jalan mewujudkan arah strategis perusahaan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan *market share* dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi.

Realizing the 35,000 MW program as one way to achieve the company's strategic direction as a financially healthy corporate entity that can invest to maintain market share and develop in accordance with the rules of the corporation.

ARAH PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

LONG - TERM DEVELOPMENT ROADMAP

Memastikan pencapaian aspirasi jangka panjang Perseroan menjadi salah satu perusahaan kelistrikan berkelas dunia dan dicintai pelanggan dengan mengenali kendala-kendala yang dihadapi, menetapkan serangkaian inisiatif strategis serta menjalankan program prioritas sesuai kondisi yang dihadapi dengan mengedapan pengelolaan yang berkualitas.

Ensuring the achievement of the Company's Long-Term Development Roadmap to be one of the world class electricity companies and loved by customers,
by recognizing obstacles, implementing a series of strategic, and implementing priority programs based on the current business situation with a priority on quality management.

LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka Pemerintah membuka peluang bagi BUMN di luar PLN seperti swasta, koperasi, bahkan LSM untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Menurut Undang-Undang tersebut, PLN tidak lagi sebagai perusahaan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), tetapi sebagai Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum.

Gambaran mengenai usaha kelistrikan sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, sebagai berikut:

BACKGROUND

Following the enactment of Law Num. 30 of 2009 about Electrification, the Indonesian Government allowed State-Owned Enterprises other than PLN, even private enterprises, cooperatives, and even NGOs to become involved in providing electricity for the public interest. Based on that law, PLN is no longer the only authorized company in electricity provision (PKUK), but as a permit holder in providing electricity (IUPTL).

An overview of the electricity industry before and after the enactment of Law Num. 30 of 2009 is as follows:

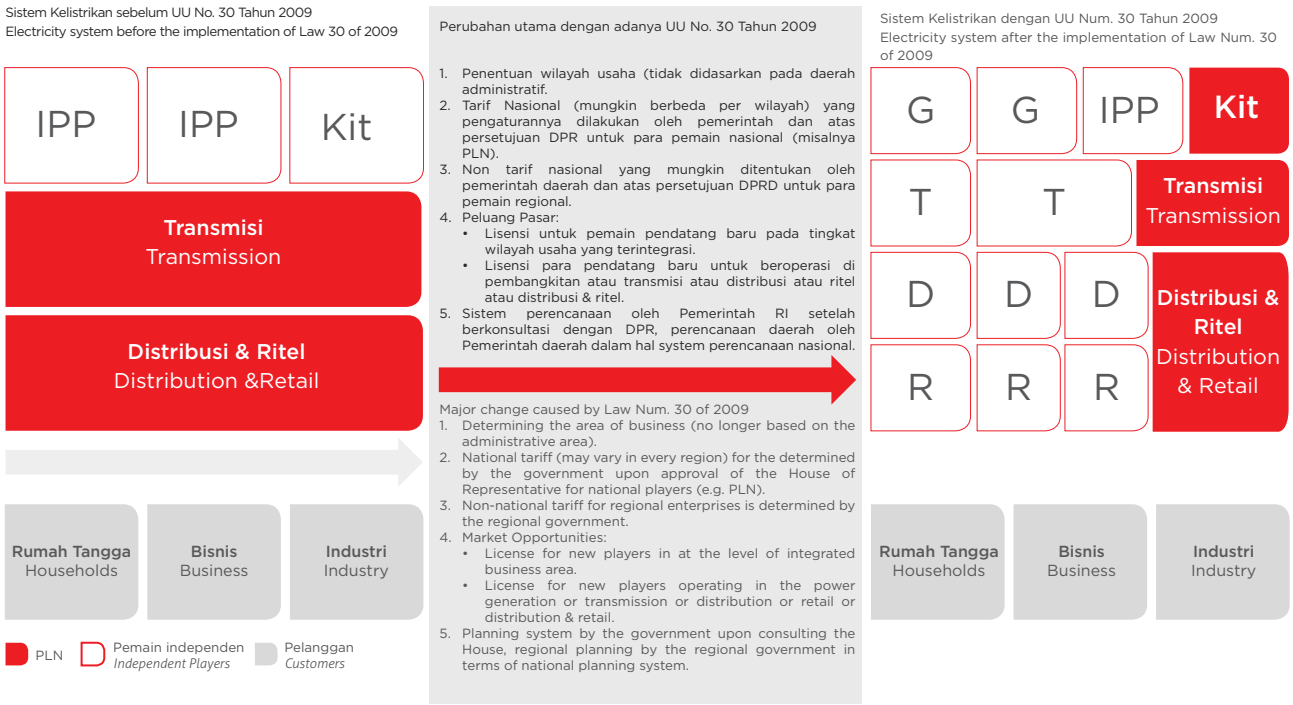

Sebagai tindak lanjut dan pedoman pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, maka pada tanggal 24 Januari 2012 telah terbit Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 (telah diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2014) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dimana harga sewa serta perjanjian kerjasama bisnis usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tergantung pada cakupan wilayah usaha.

As a follow up and guideline to the implementation of Law Num. 30 of 2009, on 24 January 2012 the Government Regulation Num. 14 of 2012 was issued (now revised as Government Regulation Num. 23 of 2014) on the Electrical Power Provision Business Activities, whereas the rent price and business agreement about the provision of electricity to the public will be regulated under the permission of the State Government and the Regional Government depending on the coverage area of the business.

ARAH STRATEGIS JANGKA PANJANG

PLN telah menyiapkan rencana strategis pengembangan usaha dalam jangka panjang, yaitu menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial, sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan *market share* dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Disamping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga harus efisien dan dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* (CoC) dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan misinya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah strategis perusahaan untuk 10 tahun mendatang dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa tumbuh *(growth)* pada periode 2015-2019, dan masa ekselen *(excellence)* pada periode 2020-2025.

LONG-TERM DEVELOPMENT ROADMAP

PLN has prepared a long-term strategic development business plan to establish a financially healthy corporate entity, so that it can invest in order to maintain and develop market share based on the corporate principal's. In addition, PLN should operate efficiently and can achieve reliable standard based on consumer expectation. These services should be supported by highly competent HR that have high competencies and attitudes based on Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct (CoC) in all business operations. Hence, the Company can deliver its mission as a contributor to the economic growth.

The ten-year roadmap is divided into two phases, which are the growth phase for the period of 2015-2019, and the excellence phase for the period of 2020-2025.

Penjelasan ringkas *Roadmap milestone*, rincian arah strategis dan Visi Perusahaan untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

Masa Tumbuh *(Growth)* 2015-2019

Masa tumbuh ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 50% perusahaan listrik terbaik di dunia. Pengembangan visi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah "Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani".

Perspektif capaian mencakup:

a. Keuangan dan Pasar
   - Keuangan sehat;
   - Dipercaya investor dan lembaga keuangan;
   - Subsidi + marjin wajar, pada kelompok pelanggan tertentu;
   - *Automatic tariff adjustment* dan sistem tarif baru diterapkan;
   - Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik makin menurun.

b. Produk dan layanan
   - Keandalan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) pada level baik.

c. Pelanggan
   - Kepuasan pelanggan pada level baik;
   - Komposisi pelanggan semakin baik.

d. SDM
   - Jumlah dan komposisi SDM baik;
   - Kompetensi SDM meningkat;
   - Knowledge Management berjalan baik.

e. Proses bisnis internal:
   - Krisis energi terpecahkan (kapasitas bertambah signifikan, mengimbangi permintaan);
   - Pasokan energi primer terjamin;
   - EAF pada level baik;
   - Prosentase produksi BBM menurun;
   - Susut jaringan pada level baik;
   - IT yang terintegrasi;
   - *Zero accident;*
   - Baku mutu lingkungan hidup sesuai standard KLH.

f. Leadership
   - *Good Corporate Governance* berjalan baik;
   - Menjadi *Emerging Industry Leader* dengan *score* Malcom Baldrige minimal 576 (tahun 2014) dan *Industry Leader* (tahun 2017).

Ukuran KPI Visi "Kelas Dunia" yang dijadikan rujukan adalah:

- *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU: Tahap awal 80% kemudian menjadi 88%;
- Susut Jaringan: Tahap awal 8,45% kemudian menjadi 8,18%;

The summary explanation of Roadmap Milestone, The Company's detail plans and vision from phase to phase is as follows:

Growth Phase (2015–2019)

The growth phase of PLN is marked by the effort to be one of the top 50% of electricity companies in the world. The vision enlargement to achieve that aim is "To be acknowledged as a growing, superior and trusted world-class company, supported by its competent human resources".

The perspectives of the goals include:

a. Financial and Market Share
   - Financial health;
   - Trusted by investors and financial institutions;
   - Fair subsidies and margins for specific groups of customers;
   - Implementation of automatic tariff adjustment program & new tariff system;
   - The diminishing pattern of cost of production.

b. Products and Services
   - Reliability System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) in the good level.

c. Customers
   - Customer satisfaction in the good level;
   - Better customer composition.

d. Human Resources
   - The total and composition of workforce in the good level;
   - Improvement of HR competency;
   - Well implemented Knowledge Management.

e. Internal Business Process
   - Solvable energy crisis (capacity is improves significantly off setting demand);
   - Assured primary energy supply;
   - Equivalent Availability Factor (EAF) in the "Good" level;
   - The diminishing percentage of fuel for electricity production;
   - The network losses in the good level;
   - Integrated IT;
   - Zero accident;
   - Environmental quality in accordance with the Ministry of Environment's standards.

f. Leadership
   - Well-implemented Good Corporate Governance;
   - Becoming an Emerging Industry Leader with a minimum Malcom Baldrige score of 576 (in 2014) and Industry Leader (in 2017).

The KPIs used as criteria for becoming "World Class" vision are:

- Equivalent Availability Factor (EAF) of Steam Power Plant: The early stage is 80%, then to be increased to 88%;
- Network Losses: The early stage is 8.45%, to be decreased to 8.18%;

- SAIDI: Tahap awal 295 menit/pelanggan/tahun kemudian, menjadi 82 menit/pelanggan/tahun;
- SAIFI: Tahap awal 5,0 kali/pelanggan/tahun kemudian, menjadi 1,4 kali/pelanggan/tahun.

Masa Ekselen *(Excellence)* 2020-2025

Masa Ekselen ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 35% perusahaan listrik terbaik di dunia pada tahap awal (2022), untuk kemudian menjadi 25% perusahaan listrik terbaik dunia diakhir periode (2025). Pengembangan visi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah "Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani" untuk tahap pertama. Selanjutnya pada tahap selanjutnya, visi berubah menjadi "Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman".

Perspektif capaian mencakup:

a. Keuangan dan Pasar
   - Keuangan sangat sehat;
   - Kemandirian bisnis dan finansial;
   - Subsidi sangat terbatas;
   - Tarif mencapai harga keekonomian;
   - Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang optimal karena proses efisiensi.

b. Produk dan layanan
   - Keandalan (SAIDI dan SAIFI) pada level sangat baik.

c. Pelanggan
   - Kepuasan pelanggan pada level sangat baik;
   - Komposisi pelanggan menguntungkan.

d. SDM
   - Struktur organisasi efektif (*vertical and horizontal alignment, adaptive, responsive*);
   - Kompetensi SDM yang baik;
   - Inovasi berjalan baik.

e. Proses bisnis internal
   - Pasokan energi primer terjamin;
   - EAF pada level sangat baik di Asia dan dunia;
   - Susut jaringan pada level sangat baik;
   - IT – *Based Organization;*
   - Teknologi ramah lingkungan dan penggunaan *renewable energy*.

f. Leadership
   - GCG berjalan sangat baik;
   - Menjadi *Benchmark Leader* (tahun 2020) berdasarkan kriteria *Malcolm Baldridge*.

Ukuran KPI Visi "Kelas Dunia" yang dijadikan rujukan adalah:

1. EAF PLTU: Lebih besar dari 88%;
2. Susut Jaringan: Lebih kecil dari 8,18%;
3. SAIDI: Lebih kecil dari 82 menit/pelanggan/tahun;
4. SAIFI: Lebih kecil dari 1,4 kali/pelanggan/tahun.

- SAIDI: The early stage is 295 minutes/customer/year, and to be decreased to 82 minutes/customer/year;
- SAIFI: At the early stage is 5.0 times/customer/year, and to be decreased to 1.4 times/customer/year.

Excellence Phase (2020–2025)

The excellence phase is market with PLN attempt to be one of the one of be the top 35% of the best electricity companies in the world (2022), and then becomes one of the top 25% of the best electricity companies in the world in the end of this period (2025). The goal during the first period of this phase is "To be acknowledged as a growing, superior and trusted world-class company, supported by its competent human resources". The second goal is "To become a world class company which is profitable, and loved by customers with environmentally friendly and save."

The KPIs are as follows:

a. Financial and Market Share
   - Very healthy financial condition;
   - Business and financial independence;
   - Highly-limited subsidies;
   - Tariff achieves an economical price;
   - Optimal Cost of Production because of process efficiency.

b. Products and Services
   - The reliability (SAIDI and SAIF) in the good level.

c. Customers
   - Customer satisfaction in the good level;
   - Customer composition is profitable;

d. Human Resources
   - Effective organizational structure (vertical and horizontal alignment, adaptive, responsive);
   - Good HR competency is;
   - Well implemented Innovation.

e. Internal Business Process
   - Assured supply of primary energy;
   - EAF in the very good level in Asia and the world;
   - Network losses in the best level;
   - IT-Based Organization;
   - Environmentally-friendly technology and the use of renewable energy.

f. Leadership
   - Excellent GCG;
   - The Company becomes a Benchmark Leader (2020) based on the Malcolm Baldrige criteria.

The KPIs used as criteria for becoming "World Class" are:

1. Equivalent Availability Factor (EAF) of Steam Power Plant: > 88%;
2. Network Losses: < 8.15%;
3. SAIDI: < 82minutes/customer/year;
4. SAIFI: < 1.4 times/customer/year.

STRATEGI UTAMA PERUSAHAAN

Dalam rangka mencapai tujuan strategis perusahaan, PLN telah menetapkan delapan strategi utama perusahaan; lima strategi berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua strategi sebagai *enabler*, dan satu strategi sebagai *ultimate result* dari strategi lainnya. Delapan strategi utama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Ekspansi Kapasitas dan Pembiayaan
   Tujuan strategis dimensi kapasitas dan pembiayaan adalah untuk optimalisasi ekspansi kapasitas berikut bauran bahan bakarnya dengan biaya terendah dan meningkatkan peluang untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan
2. Mengoptimalkan Biaya Energi Primer
   Strategi utama ini bertujuan untuk: (i) memastikan memperoleh harga energi primer terendah atau sesuai keekonomiannya tanpa mengabaikan kualitasnya, dan (ii) mengamankan kecukupan pasokan energi primer.
3. Melanjutkan *Operational Excellence*
   Tujuan strategis pada *operational excellence* adalah mendorong pelaksanaan operasional menuju pada tingkat layanan kelas dunia dengan memaksimalkan nilai tambah asset baik dari aspek efektivitas biaya, operasi & pemeliharaan, tingkat layanan dan ketersediaan kapasitas. Berdasarkan evaluasi kondisi saat ini, potensi nilai yang signifikan telah diidentifikasi dan diimplementasikan untuk masing-masing area dalam proses *Value Chain* - pembangkitan, transmisi dan distribusi.
4. Melanjutkan *Procurement and Construction Excellence*
   Tujuan dari *Procurement and Construction Excellence* adalah meminimalkan *Total Cost of Ownership* (TCO),

THE COMPANY'S PRIMARY STRATEGIES

In order to achieve the Company's strategic objectives, PLN has established eight strategic goals; five strategies related to the core business function two strategies as enabler, and one strategy as an ultimate result of other strategies. The eight primary strategies are as follows:

1. Optimizing the Capacity and Funding Expansion
   The strategic goal of capacity and funding dimension is to optimize capacity expansion as well as fuel mix at the lowest cost and to increase opportunities in order to obtain the needed fund sources.
2. Optimizing the Primary Energy Cost
   This primary strategy aims to: (i) ensure and obtain primary energy cost at the lowest level or based on the economical price without neglecting quality, and (ii) secure a sufficient supply of primary energy.
3. Maintaining Operational Excellence
   The strategic goal of operational excellence is to encourage operational implementation towards a world class service level by maximizing the value of added assets from an aspect of cost effectiveness, operation & maintenance, level of service, or available capacity. Based on the evaluation of current conditions, the potential of significant value has been identified and implemented in each area of the Value-Chain process, in power plant, transmission and distribution.
4. Maintaining Procurement and Construction Excellence
   The objectives of Procurement and Construction Excellence are to minimize the total cost of ownership

menurunkan dan mengoptimalkan biaya barang dan jasa serta memastikan pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu dan memenuhi kualitas. Pengadaan barang dan jasa akan dilakukan dengan pendekatan pengadaan dalam skala besar *(joint inventory and joint Procurement)* dan mengadopsi pendekatan TCO. Pelaksanaan konstruksi dilakukan melalui pengendalian dan supervisi yang didukung oleh SDM yang memadai dan kompeten serta berbasis teknologi informasi.

5. Melanjutkan *Commercial Excellence*
   Tujuan strategis dari *Commercial Excellence* adalah Mengembangkan pilihan-pilihan tingkat pelayanan untuk meningkatkan pendapatan.
6. Meningkatkan Manajemen *Stakeholders* dan *Regulatory*
   Tujuan strategis dari manajemen *stakeholders* dan *regulatory* ini adalah untuk bersama-sama membentuk industri kelistrikan nasional dengan fokus kepada pembentukan fungsi regulasi dan pengimplementasian undang-undang ketenagalistrikan.
7. Melanjutkan Budaya Kinerja Tinggi dan Kepemimpinan yang Kuat
   Tujuan dari strategi utama ini adalah: i) menjalankan visi korporat, ii) membangun budaya Kinerja Unggul, iii) mengembangkan generasi untuk masa depan, iv) mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* (ERM), v) kepemimpinan yang kuat dalam eksekusi.
8. Meningkatkan Pembentukan Citra yang Positif
   Inti pembentukan citra positif perusahaan dan mendapatkan kepercayaan pelanggan adalah terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Lima strategi utama pertama diharapkan akan memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan keberhasilan strategi *enabler* dan infrastruktur pendukung lainnya meskipun tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan PLN namun kesuksesannya akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan lima strategi utama.

PEMETAAN STRATEGI

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan "8 Strategi Utama" di atas, digunakan pendekatan 6 perspektif *results* Malcolm Baldrige, yang terdiri dari: Perspektif Produk dan Layanan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Keuangan dan Pasar, Perspektif Sumber Daya Manusia, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kepemimpinan, dengan rincian tujuan sebagai berikut:

1. Perspektif Produk dan Layanan (P)
   a. P1. Tenaga Listrik yang Andal dan Berkualitas
2. Perspektif Pelanggan (C)
   a. C1. Kepuasan Pelanggan
   b. C2. Penambahan Pelanggan Baru
   c. C3. Citra
3. Perspektif Keuangan dan Pasar (F)
   a. F1. Kesehatan Keuangan
   b. F2. BPP dan Tarif yang Optimal

(TCO), to reduce and to optimize goods and service costs and to assure on time and good quality of the construction implementation. The procurement of goods and services will be implemented through a large scale procurement approach (joint inventory and joint Procurement) and adopting the TCO approach. Construction execution throw control the and supervising by adequate human resources and base on information technology.

5. Maintaining Commercial Excellence
   The objective of Commercial Excellence is to develop service levels to increase income.
6. Improving Stakeholder and Regulatory Management
   The objective of Stakeholder and Regulatory Management is to make a national electricity industry together by focusing on the establishment of regulation functions and the implementation of new electricity laws.
7. Maintaining Strong Working Culture and Leadership
   Objectives from this main strategy are to (i) execute the corporate vision; (ii) build a superior performance; (iii) develop future generations; (iv) implement Enterprise Risk Management (ERM); (v) execute strong leadership.
8. Improving Positive Corporate Image
   The core of creating positive corporate image and obtaining customer trust is building a good relationship and communication between the Company and its stakeholders.

This first five strategies are expected to give measurable results and directly to affect the Company's financial performance, whilst the success of the enabler strategic initiatives and other supporting infrastructures although not directly affecting PLN's financial performance they will be important to assure the success of the five main strategic initiatives.

STRATEGY MAPPING

In order to measure the level of success of the "8 primary strategies" above, the six Malcolm Baldrige results perspectives are implemented, consisting of: Product and Service Perspective, Customer Perspective, Financial and Market Perspective, Human Resource Perspective, Internal Business Process Perspective and Leadership Perspective, with details as follows:

1. Product and Service Perspective (P)
   a. P1. Reliable and High-Quality Electrical Power
2. Customer Perspective (C)
   a. C1. Customer Satisfaction
   b. C2. Addition of New Customers
   c. C3. Image
3. Financial and Market Perspective (F)
   a. F1. Financial Health
   b. F2. Optimum Cost of Production and tariff

Struktur Organisasi Baru PLN, Menjamin Kesuksesan Konstruksi Pembangkit 35 GW.

New PLN Organizational Structure, Securing the Success of 35 GW Power Plant Construction Project.

c. F3. Efisiensi Operasi dan Investasi
d. F4. Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik

4. Perspektif Sumber Daya Manusia (S)
   a. S1. Kualitas dan Kuantitas SDM
   b. S2. Efektifitas Organisasi dan Sistem SDM

5. Perspektif Proses Bisnis Internal (B)
   a. B1. Bidang Energi Primer:
      i. B1.1. Ketersediaan Bahan Bakar
      ii. B1.2. Fuel Mix
   b. B2. Bidang Pembangkitan
      i. B2.1. Penambahan Kapasitas
      ii. B2.2. Kesiapan Pembangkit
   c. B3. Bidang Transmisi dan Distribusi
      i. B3.1. Efisiensi Operasi
      ii. B3.2. Penambahan Transmisi dan Distribusi yang Optimal dan Berbiaya Rendah
   d. B4. Sistem Pendukung:
      i. B4.1. Efisiensi Pengadaan dan Konstruksi
      ii. B4.2. Manajemen Stakeholder dan Regulasi
      iii. B4.3. Peningkatan Pemanfaatan IT dan Teknologi Ketenagalistrikan
      iv. B4.4. Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan

6. Perspektif Kepemimpinan (L)
   a. L1. Implementasi GCG dan Hukum
   b. L2. Implementasi ERM
   c. L3. Perbaikan Kinerja Proses dan Hasil

Di bawah ini adalah Peta Strategi *(Strategy Map)* Perusahaan untuk periode 2015-2019 berdasarkan 6 perspektif *results* Malcom Baldrige, yang menggambarkan tujuan strategis perusahaan yang ingin dicapai, indikator kinerja utama, sasaran perusahaan dan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan.

PROGRAM PRIORITAS

1. Minimnya Cadangan Energi Listrik
   Minimnya cadangan pasokan energi listrik adalah akibat dari:
   - Minimnya investasi pembangkitan akibat kondisi keuangan sebelum tahun 2009.
   - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan investasi untuk melayani pertumbuhan permintaan.

c. F3. Efficiency in Operation and Investment
d. F4. The Growth in Electricity Sales

4. Human Resources Perspective (S)
   a. S1. Human Resources Quality and Quantity
   b. S2. Organizational Effectiveness and Human Resource Management

5. Internal Business Process Perspective (B)
   a. B1. Primary Energy Sector
      i. B1.1 Fuel Availability
      ii. B1.2 Fuel Mix
   b. B2. Power Plant Sector
      i. B2.1 Addition of Capacity
      ii. B2.2 Power Plant Readiness
   c. B3. Transmission and Distribution Sector
      i. B3.1 Operational Efficiency
      ii. B3.2 Optimized and Low-Cost Additional Transmission and Distribution
   d. B4. Supporting System
      i. B4.1 Procurement and Construction Efficiency
      ii. B4.2 Stakeholder Management and Regulation
      iii. B4.3 Increasing IT Usage and Electrical Technology
      iv. B4.4 Environmental and Electrical Safety

6. Leadership Perspective (L)
   a. L1. GCG Implementation and Law
   b. L2. ERM Implementation
   c. L3. Improvement of Performance Process and Result

Below is the Company's Strategy Map for the 2015–2019 term based on the six Malcolm Baldrige results perspectives that illustrate the desired strategic goals of the company, the key performance indicators, the company's objective and the strategy to achieve the company's objective.

PRIORITY PROGRAM

1. The Shortfall in Electricity Supply,
   The shortfall in electricity supply is caused by:
   - The lack of investment in power plant due to difficult financial conditions prior to 2009.
   - The delay in completing investment works to serve growing demand.

PETA STRATEGI PLN TAHUN 2015-2019

NEW PLN ORGANIZATIONAL STRUCTURE SECURES THE SUCCESS OF 35 GW POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Perspektif Keuangan dan Pasar
Finance and Market Perspective

F1. Kesehatan Keuangan
Financial Health
ROA dari 2,8% (2015) menjadi 2,8% (2019)
ROA from 2,8% (2015) to 2,8% (2019)
Strategi Strategy: F1.1, F.1.2, B1.1.1. s.d. to B1.1.9.

F2. BPP Menurun dan Keekonomian Tarif
Decreasing cost of electricity supply and Economic Electricity Tariff
BPP Cost of Production Rp/kWh 1.350 (2015), 1.350 (2019);
Tarif Tarrif Rp/kWh 1.058 (2015), 1.484 (2019)
Strategi Strategy: B1.1.1 s.d. to B.1.1.9, F1.1, F1.2

F3. Efisiensi Operasi dan Investasi
Efficiency of Operations and Investment
Opex-non fuel Rp/kWh-241 (2015), 220 (2019);
Capex Juta million USD/MW-0,9 (2015), 0,8 (2019)
Strategi Strategy: F3.1, F3.2, F3.3.

F4. Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik
Sale of electric power (GWh) growth
10,2% (2015), 8,4% (2019)
Strategi Strategy: F4.1, C2.1.s.d. C2.3, B2.1.1 s.d. to B2.1.3, B3.2.1, B3.2.2

Perspektif Proses Bisnis Internal
Internal Business Process Perspective

Energi Primer
Primary Energy
B1.1. Ketersediaan Bahan Bakar Batubara
Coal Availability
55,8 Jton (2015), 65,7 Jton (2019), BBM 5,5 Jkl (2015), 1,8 Jkl (2019), Gas 476 BCF (2015), 602 BCF (2019)

Strategi Strategy: B1.1.1 s.d. to B1.1.9

B1.2. *Fuel Mix*
Produksi oleh BBM
Production by Fuel 10,9% (2015), 3,1% (2019).

Strategi Strategy: B2.1.1, B1.2.1, B1.2.2, B1.1.1 s.d to SB1.1.9

Pembangkitan Power Generation
B2.1. Penambahan Kapasitas Increasing Capacity
PLN – 2,3 GW (2015), 3,3 GW (2019); IPP – 1,5 GW(2015), 16,1 GW (2019)

Strategi Strategy: B2.1.1 s.d. to B2.1.6, B4.1.1, B4.1.2, B4.1.3, B4.1.4, B4.1.5

B2.2 Kesiapan Pembangkit
Generator Readiness
EAF- 80% (2015), 88% (2019)

Strategi Strategy: B2.2.1, B2.2.2, B2.2.3

Transmisi & Distribusi
Transmission and Distribution
B3.1. Efisiensi Operasi
Operations Efficiency
Susut: Jaringan Network Losses 8,45% (2015), 8,18% (2019);

Strategi Strategy: B3.1.1

B3.2. Penambahan Optimal dan Berbiaya Rendah
Optimal Additions and Low Cost
Project cost sesuai harga pasar yang kompetitif
Cost of projects in accordance with competitive market price

Strategi Strategy: B3.2.1, B3.2.2, B4.1.1, B4.1.2, B4.1.3, B4.1.4, B4.1.5

Sistem Pendukung
Supporting System
B4.1. Efisiensi *Supply Chain*, Pengadaan & Konstruksi
Supply *chain* Incl. Pengadaan *Excellence*; Konstruksi tepat waktu & memenuhi kualitas
Supply Chain Efficiency, Procurement & Construction Supply Chain including Procurement Exellence, On-time Construction & meeting the quality requirement.

Strategi Strategy: B4.1.1 s.d to B4.1.5

B4.2. Manajemen *Stakeholder* & Regulasi
Stakeholder Management & Regulation
Membentuk industri kelistrikan bersama-sama
Developing Electricity Industry Together

Strategi Strategy: B4.2.1 s.d. to B4.2.4

B4.3. Peningkatan Pemanfaatan IT & Teknologi Ketenagalistrikan
Increasing Utilization of IT & Electricity Technology

Strategi Strategy: B4.3.1 s.d to B4.3.3

B4.4 Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan
Electricity Environmental and Safety
Strategi Strategy: B4.4.1 s.d to B4.4.3

Perspektif Produk & Layanan
Products and Services Perspective

P1. Tenaga Listrik Yang Andal & Berkualitas
Electricity Reliability and Quality
SAIDI 295 menit minute/plg customer (2015), 82 menit minute/plg customer (2019), SAIFI 5,0 kali times/plg customer (2015), 1,4 kali times/plg customer (2019).

Strategi Strategy: P1.1 s.d. to P1.3, B2.1.1.

Perspektif Pelanggan
Customer Perspective

C1. Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction
Nilai Kepuasan pelanggan
Customer Satisfaction Score
90% (2015), 95% (2019)

Strategi Strategy: P1.1., s.d. to P1.3, B2.1.1, C1.1

C2. Penambahan Pelanggan Baru
Additional Customers
Penambahan jumlah pelanggan baru 3,6 juta
Addition of new Customers of (2015), 1,8 juta million (2019)

Strategi Strategy: C2.1 s.d to C2.3

C3. Citra Image
Tahun 2019, *Index* – 8,5 dari skala from the scale of 1-10 (*Image Index*)

Strategi Strategy: P1.1, C3.1, C3.2,C1.1.

Perspektif SDM
Human Resources Perspective

S1. Kualitas & Kuantitas SDM
Quality and Quantity of Human Resource
Produktivitas pegawai Employee productivity of 5.164 MWh/peg (2015), 6.181 MWh/peg (2019)
Strategi Strategy: S1.1 s.d to S1.4

S2. Efektifitas Organisasi & Sistem SDM
Human Resource Organization and System Effectiveness
HCR & OCR, masing-masing respectively 3,80 (2015), 4,80 (2019)
Strategi Strategy: S2.1 s.d to S2.6

Perspektif Kepemimpinan
Leadership Perspective

L1. Implementasi GOG & Hukum
GOG and Law Implementation
Skor GOG GOG Score 89(2015), 95(2019), Tindak lanjut temuan auditor Follow-up of Auditor Findings 100% (2015), 100% (2019)
Strategi Strategy: L1.1, L1.2

L2. Implementasi ERM ERM Implementation
Risk Maturity Level 3,5 (2015),menjadi becomes 4,0 (2019)
Strategi Strategy: L2.1, L2.2

L3. Perbaikan Kinerja Proses dan Hasil
Process and Result of Performance Improvement
Skore Score MB/KPKU – 585 (2015) menjadi becomes – 780 (2019)
Strategi Strategy: L3.1, L3.2.

- Turunnya kinerja peralatan sebagai akibat terbatasnya kegiatan pemeliharaan sehingga tidak mampu memenuhi tingkat mutu pelayanan.
- Meningkatnya permintaan energi listrik.

Situasi yang berlangsung saat ini tidak dapat ditangani sendiri oleh PLN, namun membutuhkan dukungan Pemerintah dan stakeholders lainnya.

Situasi infrastruktur sektor ketenagalistrikan saat ini belum memadai dikarenakan:

- Permintaan terus meningkat, sementara dana internal untuk mendukung investasi masih belum mencukupi.
- Banyak IPP yang dijadwal ulang bahkan dihentikan pelaksanaannya karena alasan ketidakmampuan pendanaan.
- Di sisi pembangkitan, meningkatnya permintaan energi listrik akan menimbulkan tekanan pada sisi transmisi dan distribusi.
- Banyaknya trafo-trafo yang sudah dibebani mendekati kapasitas maksimal dan kapasitas saluran transmisi dan distribusi yang tidak memenuhi kriteria keandalan.

PLN masih akan melakukan langkah-langkah terintegrasi untuk menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan dengan melakukan optimalisasi aset dan sumber-sumber lokal yang ada, seperti pembelian *excess power* dan pembelian listrik dari pembangkit milik swasta yang *idle*, revitalisasi pembangkit dan sewa genset, dan mencari sumber pasokan tenaga listrik lainnya antara lain *power wheeling* dan pengembangan model bisnis ketenagalistrikan lainnya.

2. Tingginya Penggunaan BBM
   Masih tingginya penggunaan BBM untuk mengoperasikan pembangkit menyebabkan biaya produksi listrik menjadi tinggi. Efisiensi akan sulit dilakukan mengingat harga bahan bakar minyak cenderung terus meningkat dan sangat tergantung kepada nilai dolar AS. Efisiensi penggunaan BBM dilakukan dengan mengkonversikan BBM ke batubara dan gas. Mundurnya target penyelesaian PLTU 10.000 MW tahap I yang menggunakan bahan bakar batubara dan tidak terpenuhinya kebutuhan pasokan gas menuntut PLN melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah menahun ini, namun tanpa dukungan Pemerintah masalah yang dihadapi PLN tidak akan bisa teratasi. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah adalah rencana implementasi PBR *(Performance Based Regulatory),* fluktuasi harga energi primer akan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

PLTS *centralized* yang *hybrid* dengan PLTD atau sepenuhnya dipasok dari *solar cell* dikembangkan untuk daerah dengan sistem kecil *(isolated),* jauh dari

- The decline of equipment performance as a result of inability to fulfill the standard quality of service provided.
- The increase on electricity demand.

These current cannot be overcome by PLN itself. PLN requires the cooperation and support from the Government and other stakeholders.

The condition of electricity sector infrastructure is inadequate due to:

- Rapid increase in electricity demands, while the internal funds to support the investment in power plants is insufficient.
- Some IPP projects were rescheduled and even stopped because of the difficulty in funding sources.
- On the plant's side, rapid increase in electricity demands puts additional pressure on the transmission and distribution side.
- Many transformers operated at near maximum capacity and at unreliable transmission and distribution capacity.

PLN will take integrated measures to balance supply and demand by performing optimization on assets and existing local resources, such as purchase of excess power and purchase of electricity from idle privately-owned plants, revitalizing plants and leasing power power plants, searching for sources of electrical supply, such as power wheeling, and developing other electrical business models.

2. High Fuel Consumption
   A consistent high fuel consumption to operate plants causes an increase in production costs. Efficiency will be difficult to achieve as the fuel price tends to increase, and is dependent on the US dollar. Efficiency of fuel usage will be reached by converting fuel into coal and gas. The delay of 1 10.000MW Steam Power Plant development phase which uses coal as fuel, and an insufficient supply of gas, encourage PLN to design breakthrough solutions to solve these years problems. Without Government support however, these problems cannot be overcome. One of the examples of Government support is the implementation of PBR (Performance Based Regulatory). The fluctuation of primary energy costs will then be the Government's responsibility.

Centralized Hybrid Solar Cell Power Plant with Diesel Power Plant, or ones supplied entirely by solar energy, were developed for regions with smaller systems (isolated).

sistem besar, dan tidak mempunyai sumber energi baru terbarukan setempat (air dan panas bumi).

Sebagai antisipasi tertundanya proyek IPP dan pengembangan geothermal diperlukan penyelesaian permasalahan yang memerlukan kebijakan terpadu melibatkan beberapa institusi Pemerintah terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, BAPPENAS, Pemerintah Daerah (pembiayaan lokal, hak atas tanah) dan para *Stakeholders* lainnya lender and IPP.

Dalam jangka pendek, akan dimulai konsep baru sistem *peaker*, yaitu menggantikan PLTD dan PLTG berbahan bakar minyak dengan PLTG-Gas Storage, PLTG-Mini LNG, PLTGB-Gas Batubara, dan PLTA *Pumped Storage*.

3. Rendahnya Rasio Elektrifikasi
   Penyediaan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi di propinsi tertinggal sangat penting karena ketersediaan listrik di suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat kemajuan suatu daerah. Kurangnya ketersediaan listrik dan rendahnya rasio elektrifikasi di suatu daerah akan menghambat kemajuan-kemajuan di bidang lainnya. Program kelistrikan pembangunan PLTD untuk pulau terluar dan wilayah perbatasan akan dibangun di 49 lokasi prioritas yang meliputi 12 lokasi di Sumatera, 13 lokasi di Kalimantan dan 24 lokasi di Indonesia Timur. Diperlukan percepatan proses antara lain penerbitan SKI, pelaksanaan pengadaan dan koordinasi dengan PLN Wilayah untuk menjamin ketepatan waktu *Commercial Operation Date* proyek pada tanggal 17 Agustus 2015.

4. Listrik Prabayar/Listrik Pintar
   Listrik Prabayar/Listrik Pintar merupakan layanan terbaru PLN untuk pelanggan dalam mengatur penggunaan energi listrik melalui meter elektronik prabayar dengan berbagai kelebihan, antara lain: pemakaian listrik lebih terkendali, tanpa ada sanksi pemutusan, tanpa dikenakan denda keterlambatan, tanpa uang jaminan pelanggan, tidak dikenakan biaya beban bulanan dan sebagainya. Inovasi yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan ini merupakan wujud penghargaan kepada pelanggan PLN.

5. Susut Jaringan
   Program penurunan susut jaringan akan terus dilaksanakan dengan memperbanyak trafo distribusi sisipan baru, mengurangi transfer energi dengan mempercepat *Commercial Operation Date* pembangkit baru, penggunaan trafo distribusi *low losses*, meningkatkan penertiban pemakaian listrik termasuk penerangan jalan umum (PJU) termasuk pemakaian listrik *billboard* ilegal, serta mendorong penggunaan listrik prabayar.

These are different from large systems, and do not have local renewable energy sources (water and geothermal).

As an anticipation to the delay of the IPP projects and the development of geothermal power, there needs to be a solution to the problem which requires guided policy involving related Government institutions, such as The Ministry of Finance, The Ministry of Energy and Mineral Resources, The Ministry of State-Owned Enterprises, BAPPENAS, Regional Government (local funding, land rights) and other Stakeholders lenders and IPP.

In the short term, a new system called peaker system will be started, to change oil-powered Diesel Power Plant and Gas Turbine Power Plant with Gas Turbine Power Plant - Gas Storage, Gas Turbine Power Plant-Mini LNG, Coal Slurry Power Plant and Pumped Storage Hydro Power Plant.

3. Low Electrification Ratio
   Electricity supply and an electrification ratio improvement in underdeveloped provinces are very important because of the availability of electricity in an area that is closely related to the progress of the area. The lack of electricity and low electrification ratio in an area will congest progress in other sectors. The electrification program of Diesel Power Plant development for the outer islands and their neighboring areas will be constructed in 49 priority locations. This includes 12 locations in Sumatera, 13 locations in Kalimantan, and 24 locations in Eastern Indonesia. There needs to be an acceleration of processes such as the SKI release, enabling of procurement and coordination with Regional PLN to ensure the punctuality of Commercial Operation Date project on 17 August 2015.

4. Prepaid Electricity/Smart Electricity
   Prepaid Electricity/Smart Electricity is the latest PLN's method to customers through a prepaid electronic meter. There are many advantages, such as easier management of electricity use, no termination sanctions, no penalty payment for delay, no customer deposit, no monthly charge, etc. This innovation focusing on customer comfort is part of PLN's appreciation for its customers.

5. Network Losses
   The program for network losses will continue to be implemented with an emphasis on insertion of new distribution transformers, reducing the transfer of energy by accelerating new Commercial Operation Date plants, using low losses distribution transformers, improving control of electricity consumption including street lighting (PJU) and illegal billboards, and encouraging the use of prepaid electricity.

6. Penelitian dan Pengembangan
   Dalam rangka memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik, PLN telah berkomitmen untuk memulai *Pilot Project* melalui kerjasama penelitian, pengembangan dan implementasi mobil listrik. Kegiatan ini dapat mendukung pengendalian subsidi BBM, memperbaiki ketahanan dan efisiensi energi serta menurunkan emisi karbon. Hal ini sesuai dengan salah satu misi PLN yaitu menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia
   Untuk memastikan kesinambungan regenerasi pemimpin perusahaan, Sistem Manajemen Talenta yang memfokuskan pada pengkaderan pemimpin-pemimpin diimplementasikan melalui serangkaian aktivitas pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk kader pemimpin yang menduduki posisi-posisi kunci organisasi.

8. Kesehatan Keuangan Perusahaan
   Kondisi keuangan PLN yang terpengaruh oleh efek krisis keuangan 1998 mengakibatkan kurangnya kemampuan investasi. Modal PLN telah menyusut akibat kerugian Rp15 Triliun dalam 5 tahun terakhir (sampai dengan 2008), namun sejak 2009 PLN telah mendapatkan margin *Public Service Obligation* (PSO) sebesar 5% (2009), 8% (2010 dan 2011) dan 7% (2012), sehingga secara laporan keuangan PLN telah mencetak laba. Tahun 2013, dengan margin 7%, PLN mengalami kerugian Rp29,6 Triliun akibat meningkatnya Beban Bunga dan Keuangan serta meningkatnya Rugi Selisih Kurs yang disebabkan depresiasi rupiah terhadap mata uang asing khususnya US Dollar. Selain itu, kas dari pelanggan dan subsidi pemerintah hanya mampu untuk menutupi pembayaran kepada pemasok (termasuk biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan lain lain), kompensasi karyawan, belanja modal dan beban bunga, sedangkan pembayaran pokok pinjaman yang sangat membebani kas PLN diatasi dengan menambah pinjaman lagi, sehingga *Debt to Equity Ratio* DER meningkat menjadi 257% pada tahun 2013. Dengan kondisi ini likuiditas yang ada hanya cukup untuk menutupi biaya operasional dan dana internal yang terbatas untuk kegiatan investasi.

   Dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi operasi, biaya non fuel / kWh jual diharapkan menurun rata – rata sebesar 1,1% per tahun. Sebagai perbandingan pada tahun 2011, biaya non fuel PLN adalah sebesar USD 2,1 sen /kWh. Angka ini relatif lebih tinggi daripada perusahaan listrik sejenis (TNB: USD 1,7 sen/kWh; ThaiPower: USD 1,3 sen/kWh ; EVN: USD 1,1 sen/kWh).

Dalam rangka mengatasi persoalan krusial tersebut Perseroan menetapkan berbagai prioritas sebagai berikut:

1. Mengembangkan pembangkit baru 35 GW di luar yang sedang konstruksi periode 2015-2019.

6. Research and Development
   To encourage the use of electric vehicles, PLN has committed to start a Pilot Project for cooperation in research, development, and implementation of electric vehicles. These activating supports the effort to control the fuel subsidy, to improve energy efficiency and to reduce carbon emissions. They are in accordance with one of PLN's goals, an environmentally electricity business.

7. Human Resources Development
   To ensure the continuity of company leader regeneration, a Talent Management System that focuses on leader regeneration will be implemented through a series of educational activities and training, especially for potential directors who will take over vital roles in the organization.

8. The Company's Financial Health
   PLN's financial condition is still affected by the 1998 financial crisis, which resulted in a lack of investing capability. PLN's capital has decreased due to accumulated losses amounting to Rp15 trillion in the last five years (up until 2008). However, since 2009 PLN has gained a Public Service Obligation (PSO) margin of 5% (2009), 8% (2010 and 2011) and 7% (2012), therefore, based on financial reports PLN has increased its profit. In 2013, with a 7% margin, PLN suffered a loss of Rp29.6 trillion, as the loan principal payment and interest increased as well as Rupiah weakened, which caused by rupiah depreciation against, the US dollar. Besides that, the customer cash flow and Government subsidies are only able to cover payments to suppliers (inclusive of fuel cost, maintenance and other items), staff compensation, capital purchases and interest rate load. Meanwhile, the payment of primary loans which heavily burdens PLN's cash is overcome by adding more loans, until Debt to Equity Ratio (DER) increased to 257% in 2013. With these conditions, the existing liquidity is sufficient to cover operational costs and limited internal costs for investment.

   In order to improve operational effectiveness and efficiency, the non-fuel/kWh selling cost is expected to decrease on average by 1.1% a year. In comparison to 2011, the non-fuel PLN cost was as big as USD 2.1 cent/kWh. This amount is relatively high compared to other similar electrical companies (TNB: USD 1.7 cent/kWh; ThaiPower: USD 1.3 cent/kWh ; EVN: USD 1.1 cent/kWh).

In order to overcome these problems, the Company has assigned priorities as follows:

1. Developing a new 35 GW power plant outside the ongoing construction during 2015–2019.

2. Menyelesaikan pembangunan pembangkit FTP 1 sehingga dapat secara signifikan mengurangi pemakaian BBM.
3. Melanjutkan pengembangan *solar cell* untuk kawasan terpencil dalam rangka mempercepat elektrifikasi.
4. Mengembangkan *Mobile Power Plant* untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik jangka pendek.
5. Mengembangkan EBT dan konservasi energi melalui partisipasi pelanggan.
6. Menyelesaikan proses tender dan pembangunan interkoneksi Jawa – Sumatera.
7. Menyelesaikan proses tender dan pembangunan pembangkit – pembangkit besar mulut tambang di Sumatera.
8. Mengembangkan pembangkit *Peaker* dengan memanfaatkan teknologi CNG, mini LNG, Biomass, dan Pembangkit *Thermal* Modular Pengganti Diesel (PTMPD) sebagai pengganti PLTD BBM.
9. Mengembangkan pembangkit PLTD BBM untuk daerah/ pulau terluar dan perbatasan.
10. Mempertahankan bebas pemadaman bergilir yang telah dimulai sejak pertengahan 2010 dan menurunkan angka SAIDI & SAIFI.
11. Melayani kebutuhan permintaan listrik yang tinggi termasuk melayani daftar tunggu, dan meningkatkan rasio elektrifikasi di propinsi tertinggal sesuai dengan ketersediaan pembangkit dan kemampuan pendanaan.
12. Melanjutkan program Listrik Prabayar/Listrik Pintar.
13. Menurunkan susut jaringan.
14. Memulai inisiatif pengembangan infrastruktur kendaraan listrik *(Charging Station).*
15. Mempersiapkan regenerasi pimpinan perusahaan.
16. Memperbaiki kemampuan meminjam *(Debt Capacity).*
17. Mendorong struktur dan kebijakan tarif yang mampu memberikan kas yang cukup untuk membangun instalasi ketenagalistrikan guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan tenaga listrik.
18. Menurunkan *non fuel cost.*

2. Finishing the construction of FTP 1 plant, so it can significantly reduce fuel usage.
3. Continuing solar cell development for rural areas in order to accelarate electrification.
4. Developing Mobile Power Plant to handle the lack of short-term electrical power supply.
5. Developing renewable energy and energy conservation through consumer participation.
6. Finishing the tender process and development of Java–Sumatra connection.
7. Completing tender process and big plant construction at the mine mouth in Sumatra.
8. Developing Peaker plant by utilizing CNG technology, mini LNG, Biomass and Thermal Modular Diesel Substitute Plant as a Diesel Power Plant fuel substitution.
9. Developing fuel Diesel Power Plant for outer areas/ islands and borders.
10. Maintaining scheduled and alternating black outs that have been active since mid-2010 and decreasing the number of SAIDI & SAIFI.
11. Serving the demand for high electricity supply including the waiting list and increasing the electrification ratio in traditional provinces, based on the availability of plant and funding ability.
12. Continuing prepaid electricity/smart electricity.
13. Decreasing network losses.
14. Commencing the infrastructure development of charging stations initiative.
15. Preparing regeneration of leaders.
16. Renovating debt capacity.
17. Encouraging the structure and tariff policy that is capable to provide enough cash to build electrical installations to fulfill the needs of electrical power growth.
18. Decreasing non-fuel costs.

ASPIRASI JANGKA PANJANG

Aspirasi jangka panjang perusahaan adalah menuju "Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman".

1. Kelas Dunia
   Pada fungsi-fungsi utamanya untuk menjadi perusahaan kelas dunia, PLN harus berada pada kelompok 35% *best performance* dunia dalam hal kinerja operasi pembangkitan, transmisi, dan distribusi pada akhir tahun 2022. Selanjutnya, peningkatan kinerja operasi ditargetkan mencapai 25% terbaik Dunia (25% *best performance dunia*) pada tahun 2025 berdasarkan *Global Competitiveness Index* dari *World Economic*

LONG-TERM ASPIRATION

The Company's long-term objective is to "transform the Company into a World Class company, which is profitable and trusted by its customers,with environmentally friendly and save."

1. World Class
   In all its main functions to become a world class company, PLN must stand among the top 35% of the world's best performing companies in terms of electricity generation, transmission and distribution by the end of 2022. With the improvement of operational performance, the target is to be among the top 25% of the world's best performing companies by 2025, based on the World Economic Forum's Global Competitiveness

Forum. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memperbaiki keandalan, efisiensi, dan produktivitas pegawai. Sedangkan pada fungsi pendukung seperti proses bisnis, PLN sebagai perusahaan kelas dunia harus menerapkan proses bisnis kelas dunia, antara lain dalam hal pengadaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan manajemen aset. Salah satu strategi untuk mencapai kelas dunia, PLN harus mampu mengambil manfaat dari besarnya skala ekonomi pengadaan dan penggunaan prinsip *Total Cost of Ownership* (TCO) untuk mendapatkan harga dan kualitas yang lebih baik. Begitu juga dalam hal manajemen aset, optimalisasi investasi, dan kemampuan mengeksekusi proyek-proyek skala besar.

2. Menguntungkan
   Selain menjadi perusahaan kelas dunia, PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam hal keuangan. Oleh karena itu diperlukan margin keuntungan *(Return On Asset)* yang dapat memastikan PLN untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan *Stakeholders*.

3. Ramah Lingkungan
   PLN harus ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang sehat, memanfaatkan *renewable* energi yang fokus pada pengembangan geothermal dan pemanfaatan energi air. Energi batubara tetap menjadi andalan utama PLN, namun ke depan diupayakan menggunakan teknologi pemanfaatan batubara yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Program *clean coal* yang akan dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi *coal upgrading* untuk mendapatkan batubara dengan kualitas yang lebih baik. Di samping itu PLN akan memulai inisiatif implementasi *smart grid* dan akan memperluas penerapannya apabila diperlukan.

4. Aman
   Pada akhirnya yang paling penting adalah faktor keamanan *(safety)*. PLN memiliki jumlah pegawai lebih dari 40.000 pegawai sehingga perusahaan harus memperhatikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dengan tidak terjadi kecelakaan kerja *(Zero accident)*, termasuk keamanan terhadap masyarakat sekitar aset operasional (lingkungan).

Dalam rangka mewujudkan aspirasi jangka panjang perusahaan perlu ditetapkan prioritas-prioritas kegiatan yang mampu mendukung pencapaian *roadmap* Visi perusahaan tahun 2025. Sesuai dengan pentahapan pencapaian Visi perusahaan, untuk tahap 2015-2019 ditetapkanlah prioritas jangka panjang sebagai berikut:

a. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009 dan PP No.14 Tahun 2012.
b. Mempertahankan kecukupan pasokan daya dan menciptakan sistem ketenagalistrikan yang efisien termasuk melibatkan partisipasi konsumen melalui *Demand Side Management*.
c. Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat.

Index. Among other efforts, this can be achieved by improving staff capability, efficiency and productivity. Meanwhile, in relation to supporting functions such as business process, as a world class company PLN must implement world class business processes, such as procurement, optimization of information technology and asset management. As one of the strategies to achieve world class status, PLN must take advantages from the economy scale and TCO principles to obtain a better price and better quality. Similarly, in addition to asset management, investment optimization, and capability to implement large-scale projects.

2. Profitable
   Beside to be a world class company, PLN needs to be, capable and independent financially. Therefore, there needs to be margins of Return on Asset which can ensure the company's growth and sustainability in line with the Stakeholders' demands.

3. Environmentally Friendly
   PLN must take responsibility to maintain a healthy environment, utilize renewable energy continuously, and focus on the development of geothermal and hydropower energy. Coal energy remains to be PLN's prime mainstay, but future efforts will concentrate on using cleaner coal technology which is more environmentally friendly. The clean coal program will be developed by utilizing upgraded coal technology, which obtains better quality coal. In addition to this, PLN will commence the implementation of its smart grid initiative, and will expand its application if necessary.

4. Safety
   Finally, safety is the most important factor. PLN has more than 40,000 employees, hence the Company must pay attention to safety and health (K3) of its employees to achieve zero accidents, as well as safety for the public who are in the vicinity of operational assets.

In order to achieve the long-term objectives, the Company has set priorities for actions that will support the achievement of the Company's 2025 vision roadmap. In accordance with the Company's phases of vision achievement, the long-term priorities for the 2015-2019 phase include:

a. Anticipation of the enactment of Law Num. 30 of 2009 and Government Regulation Num. 14 of 2012.
b. Maintaining adequate power supplies and creating an efficient electricity system, including inviting customers to participate in the efficiency program through Demand Side Management.
c. Maintaining a healthy financial condition.

d. Mempersiapkan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan termasuk organisasi, budaya, manajemen kinerja serta ketersediaan tenaga kerja.
e. Meningkatkan efisiensi internal perusahaan dalam rangka optimalisasi BPP dan antisipasi penerapan PBR.
f. Memastikan ketersediaan pasokan energi primer dalam rangka optimalisasi bauran energi.

TARGET JANGKA PANJANG

PLN juga telah menetapkan target jangka panjang seperti berikut, sepanjang tidak ada kondisi khusus yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan:

1. Menambah kapasitas 7-8 GW per tahun.
2. Mengoptimalkan bauran energi dengan target produksi oleh BBM menjadi maksimum 3% (tahun 2019), EBT minimum 9% pada tahun 2019.
3. Menurunkan susut jaringan menjadi 8,18%, SAIDI/SAIFI menjadi 82 menit/1,4 kali gangguan serta mengoptimalkan EAF menjadi 88% pada tahun 2019.
4. Mempertahankan BPP tetap pada Rp1.350/kWh sampai dengan tahun 2019 dan meningkatkan tarif rata-rata menjadi Rp1.484/kWh pada tahun 2019.
5. Mengendalikan OPEX *Non Fuel per* kWh jual menjadi Rp220/kWh pada tahun 2019.
6. Menjaga *Return On Assets* (ROA) tetap pada 2,8% sampai dengan tahun 2019.

d. Preparing the readiness of companies to cope with changes relating to organization, culture, performance management and labor availability.
e. Improving internal efficiency in order to optimize the cost of production.
f. Ensuring the availability of primary energy in order to optimize the mix of energy.

LONG-TERM TARGETS

PLN has set long-term targets as follows, assuming there are no special conditions or situations which may arise:

1. Increasing the capacity of power plants by 7–8 GW per year.
2. Optimizing the energy mix with fuel production target by a maximum of 3% (2019), and renewable energy to a minimum of 9% by 2019.
3. Decreasing network losses to 8.18%, SAIDI/SAIFI to 82 minutes/4.1 times the disturbance and optimizing EAF to 88% in 2019.
4. Decreasing Cost of Production from Rp1,350/ kWh in 2019 and increasing the average rate of Rp1,484/kWh in 2019.
5. Controlling OPEX Non-Fuel per kWh sold becomes Rp220/kWh in 2019.
6. Ensuring Return on Assets (ROA) remains at 2.8% until 2019.

PENGEMBANGAN ANAK USAHA

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis korporat tersebut, seluruh bisnis Anak Perusahaan diarahkan untuk mendukung proses bisnis PLN. Arah pengembangan bisnis Anak Perusahaan adalah spesifik untuk setiap Anak Perusahaan, namun tetap sejalan dan terintegrasi dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) korporat untuk menjamin sinergi antar Anak Perusahaan.

Sinergi diantara Anak-Anak Perusahaan dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh Anak Perusahaan tersebut, serta melakukan alih keahlian dan kapabilitas diantara Anak Perusahaan.

Arah pengembangan bisnis masing-masing Anak Perusahaan tahun 2015-2019 adalah:

1. PT Indonesia Power
   a. Menjadi *enabler* untuk pekerjaan *operation and maintenance (O&M)* pembangkit-pembangkit milik PLN maupun non PLN.
   b. Meningkatkan keandalan dan optimalisasi pemanfaatan pembangkit-pembangkit eksisting.
   c. Melakukan sinergi dengan Perseroan dan anak perusahaannya dalam hal pengadaan dan penyediaan energi primer, *operation and maintenance,* penelitian dan pengembangan teknologi *reverse* enjinering dan re-enjinering penyediaan komponen pembangkit.
2. PT PJB
   a. Menjadi *operating holding company (center of business development* baik untuk kegiatan strategi dan pengoperasian serta menjadi *energy company* untuk mengamankan ketersediaan bahan bakar pembangkit listrik).
   b. Mempersiapkan perusahaan menjadi *strategic holding company,* dimana semua pekerjaan operasional pengelolaan pembangkit diserahkan kepada *strategic business unit* (SBU) milik PT PJB.
3. PT PLN Batam
   a. Memastikan kecukupan pasokan daya dengan beroperasinya pembangkit PLTGU Tj Uncang Blok I dan Blok II.
   b. Bertambahnya sumber pasokan energi primer utama (gas).
   c. Beroperasinya *LNG Plant* dan *Storage.*
   d. Meningkatnya porsi kepemilikan pembangkit sendiri
   e. Melakukan efisiensi dengan membangun pembangkit PLTU Tanjung Kasam unit 3 dan 4.
   f. Meningkatkan pangsa pasar dengan penjualan tenaga listrik ke Bintan melalui interkoneksi transmisi Batam – Bintan.
   g. Beroperasinya transmisi 150 kV Muka Kuning – Baloi, Panaran – Rempang dan GI Rempang.
   h. Melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

SUBSIDIARIES DEVELOPMENT

In order to support the achievement of corporate strategic goals, all of the subsidiary companies are directed to support PLN's development business process. Business development of each direction subsidiary/affiliated company's business development is specific, but it must still be aligned and integrated with PLN's Long Term Plan (RJP) to assure synergy among the subsidiaries.

Business development direction of each, subsidiaries can be implemented by providing resources required by subsidiaries, and by transferring skills and capabilities between subsidiaries.

The objective of each subsidiary company for the period of 2015-2019 is as follows:

1. PT Indonesia Power
   a. Being an enabler to operate and maintain (O&M) the PLN-owned and non-PLN plants.
   b. Improving reliability and optimizing the utilization of existing plants.
   c. Creating synergy between the Holding and its subsidiaries in the procurement and supply of primary energy, operation and maintenance, research and development of reverse engineering technology and re-engineering of plant component procurement.
2. PT PJB
   a. Being operating holding company or the center of business development for both the strategic activities and operations as well as being an energy company to secure the availability of fuel for power plants.
   b. Preparing the Company to become a strategic holding company, where all the operational management is transferred to strategic business unit (SBU) of PT PJB.
3. PT PLN Batam:
   a. Ensuring the sufficient supply of electricity supported by the Tj Uncang Combined Cycle Power Plant Block I and Block II.
   b. The added resource of primary energy (gas)
   c. Ensuring the operation of LNG Plant and Storage operating.
   d. Increasing the power plant ownership.
   e. Ensuring efficiency by building the Tanjung Kasam Steam Power Plant unit 3 and 4.
   f. Increasing market stock by selling electricity power to Bintan through the interconnection of Batam–Bintan transmission.
   g. Operating the 150kV transmission of Muka Kuning–Baloi, Panaran–Rempang and GI Rempang.
   h. Implementing Initial Public Offering (IPO).

4. PT PLN Tarakan
   a. Melaksanakan efisiensi dengan cara menekan seluruh biaya operasional.
   b. Melakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik.
   c. Meningkatkan kerjasama dengan pemasok energi primer.
   d. Melaksanakan pembangunan PLTU skala kecil dan PLTU IPP.
5. PT Indonesia Comnets Plus
   a. Menjadi penyedia utama solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis jaringan yang terkemuka di Indonesia, dengan fokus pada solusi berbasis jaringan *(clear channel,* IPVPN, Metro-E, IPLC) dan tidak pada semua produk jaringan yang ada.
   b. Menggunakan aset strategis untuk mengembangkan layanan telekomunikasi.
6. PT PLN Enjiniring
   Memperbesar *business size* perusahaan dengan memasuki jenis usaha baru yang masih berada pada industri ketenagalistrikan.
7. PT PLN Geothermal
   Menjadi *supporting* pengembangan PLTP yang konsesinya sudah dimiliki oleh PLN Geothermal dan PT PLN (Persero), sehubungan dengan sudah adanya Geo Dipa Energi dan Pertamina Geothermal Energy milik Pemerintah.
8. PT PLN Batubara
   a. Meningkatkan penyediaan batubara untuk memenuhi kebutuhan PLTU milik PT PLN (Persero) dan anak perusahaan, melalui mekanisme *trading* maupun kerjasama operasi (KSO).
   b. Melanjutkan penguasaan tambang dalam bentuk pembelian deposit/cadangan batubara.
9. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
   a. Menjadi perusahaan yang dapat menunjang *security of supply of coal* untuk kebutuhan PLTU milik PLN, anak perusahaan dan *Independent Power Producer* (IPP).
   b. Menjadi perusahaan yang dapat melakukan transportasi laut bahan bakar gas untuk pembangkit milik PLN dan IPP.
10. PT Haleyora Power
    a. Menjadi perusahaan jasa layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik
    b. Menyediakan pasokan listrik untuk *committed buyers* dengan kualitas dan layanan premium secara *business to business.*

4. PT PLN Tarakan
   a. Implementing efficiency plan for all operational costs.
   b. Implementing tariff adjustment.
   c. Improving cooperation with vendors and suppliers of the primary energy.
   d. Developing small-scaled steam power plant and IPP (Independent Power Producer) steam power plant.
5. PT Indonesia Comnets Plus
   a. To be the main provider of network-based IT and communication solution, which is focused on network-based solutions (clear channel, IPVPN, Metro-E, IPLC), instead of all ordinary network products.
   b. Utilizing the strategic asset to develop telecommunication services.
6. PT PLN Enjiniring
   Increasing the Company's business size by entering a new type of business in the electricity industry.
7. PT PLN Geothermal
   Being a supporter of the development of Geothermal Power Plant owned by PLN Geothermal and PT PLN (Persero), in connection to the existing PT Geo Dipa Energi and state-owned PT Pertamina Geothermal Energy.
8. PT PLN Batubara
   a. Improving the supply of coal to fulfill the needs of steam power plant owned by PT PLN (Persero) and its subsidiaries, through trading mechanism and joint operation (KSO).
   b. Continuously taking control on coal mines by purchasing the coal deposits/reserves.
9. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
   a. Being a supporting company to ensure the security of coal supply for the steam power plant owned by PLN, subsidiaries and Independent Power Producer (IPP).
   b. Being a marine-transportation company that can transport sources for PLN and Independent Power Producer (IPP) Power Plants.
10. PT Haleyora Power
    a. Being operational and maintenance company for transmission and distribution.
    b. Providing electricity for committed buyers with premium quality and services by business to business.

ROADMAP TARGET JANGKA PANJANG 2015-2019

ROAD MAP OF LONG-TERM TARGETS 2015-2019

	Kondisi 2013 Conditions in 2013	Kondisi 2014 Conditions in 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Target Kriteria Criteria Target
KEUANGAN FINANCIAL								
BPP dan Tarif Cost of Production and Tariff	1.399 818,4	1.424 940	1.350 1.058	1.291 1.400	1.235 1.365	1.273 1.405	1.350 1.484	**Menurunkan BPP dan menaikkan Tarif (Rp/kWh)** Reducing Cost of Production and increase Tariff (Rp/kWh)
Opex Non Fuel Opex Non Fuel	218	211	241	234	229	224	220	**Efisiensi operasi dengan penurunkan OPEX non fuel per kWh jual (Rp/kWh)** Operational efficiency by reducing Opex non-fuel per kWh sold (Rp/kWh)
ROA	(4,96)	1,95	2,8	3,2	3,3	3,1	2,8	**Kesehatan keuangan perusahaan dengan peningkatan ROA (%)** The company's financial health with ROA increase (%)
Capex	35	30	60	130	184	174	97	**Memenuhi investasi sesuai kemampuan keuangan (Rp T)** Fulfilling investment in line with the Company's financial ability (Rp T)
OPERASIONAL OPERATIONAL								
Penambahan Pembangkit PLN dan IPP Addition of PLN & IPP Power Plants	2,4 0,3	1,9 0,2	2,31 1,47	2,85 1,36	3,28 3,11	2,73 6,51	3,25 16,07	**Memenuhi kebutuhan listrik sesuai kemampuan keuangan perusahaan (GW)** Meeting electricity demands in line with the Company's financial ability (GW)
Bauran Energi BBM & Energi Terbarukan Fuel Mix & Renewable Energy	12,4 12,3	11,4 11,4	10,9 8,1	9,3 7,6	6,9 7,1	4,1 7,0	3,1 8,6	**Bauran energi dari BBM berkurang, energi terbarukan bertambah (%)** Fuel mix from oil-based fuel decrease, renewable energy increase (%)
Susut Jaringan Network Losses	9,91	9,71	8,45	8,39	8,31	8,24	8,18	**Menurunkan susut jaringan (%)** Reducing network losses (%)
SAIDI	343	349	295	216	155	113	82	**Menurunkan SAIDI (menit/pelanggan/tahun)** Reducing SAIDI (minutes/customer/year)
SAIFI	7,3	5,6	5,0	4,0	3,1	2,2	1,4	**Menurunkan SAIFI (kali/pelanggan/tahun)** Reducing SAIFI (times/customer/year)
EAF PLTU	88	75	80	84	85	86	88	**Mengoptimalkan EAF (%)** Optimizing EAF (%)

PENGEMBANGAN ORGANISASI

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Mengembangkan struktur organisasi baru untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Proyek Program 35.000 MW dari mulai perencanaan hingga masa operasional, agar dihasilkan penyelesaian proyek yang berkualitas, efektif, efisien dan tepat waktu.

Developing a new organizational structure to increase accountability of the 35.000 project management starts from the planning and continues to the operational period. This aims to produce a high quality, effective, efficient and timely project completion.

Sejalan dengan tantangan bisnis yang semakin kompleks seperti penyelesaian proyek 35.000 MW, pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 97,4% pada tahun 2019, peningkatan pelayanan serta menyikapi implementasi regulasi Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, maka PLN telah menyusun *roadmap* organisasi yang bersifat efektif, akuntabel dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi PLN pada saat ini maupun di masa depan.

Dalam pengembangan organisasi PLN memperhatikan pembagian peran antara (i) fungsi strategis perusahaan yaitu fungsi yang dilakukan secara terpusat, dimodernisasi dan memberikan dampak efisiensi, serta (ii) fungsi bisnis yang bersifat operasional yang dapat dikelola terintegrasi regional untuk memberikan perbaikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

With the challenges of an increasingly complex business such as the completion of the 35,000 MW project, 97.4 % Indonesia's electrification ratio in 2019, service improvement and implementation of the the Electricity Law Num. 30 of 2009, PLN has prepared an effective and accountable organization roadmap which is capable of addressing issues and problems at the present moment and in the future.

In its organizational development, PLN pays close attention to divide roles between (i) a modernized corporate strategy function which is centrally performed and efficiently impact ful, and (ii) an operational business function which is managed regionally and integrally to deliver improved effectiveness and organization management accountability.

Pada tanggal 18 Agustus 2015 telah ditetapkan perubahan Struktur Organisasi PT PLN (Persero) sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Tujuan penataan organisasi adalah untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung kebutuhan bisnis masa mendatang, selaras dan sinergi antara fungsi korporat strategis dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

ROADMAP ORGANISASI TAHUN 2015-2019

Roadmap organisasi PLN ke depan harus selaras *(aligned)* dan saling mendukung *(synergy)* antara fungsi korporat strategis dan fungsi bisnis regional, sebagai berikut:

1. Fungsi korporat strategis, mengelola fungsi korporasi secara terpusat dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, standarisasi, investasi dan kendali korporasi menuju perusahaan yang sehat. Fungsi ini kedepan akan dilakukan secara terstandar dan terpusat (sentralisasi), dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta proses kerja yang standar, *best practices*, dan efektif dan efisien.

   Adapun fungsi korporat strategis meliputi fungsi:
   - Perencanaan korporat: mengelola perencanaan dan pengembangan korporasi keseluruhan.
   - Pengadaan korporat: mengelola investasi kapital korporat strategis (*capex*), trading energi korporat (*opex*), dan IPP.
   - Sumber Daya Manusia: mengelola pengembangan organisasi dan SDM korporat.
   - Keuangan: mengelola keuangan korporat dan niaga.
   - Fungsi pendukung korporat meliputi: pengawasan internal, hukum, manajemen risiko dan kepatuhan, teknologi informasi, dan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE).

2. Fungsi bisnis regional, mengelola perencanaan dan pengendalian konstruksi, operasi, pelayanan pelanggan dan keuangan regional mulai dari hulu sampai hilir dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan proyek 35.000 MW, meningkatkan kualitas operasi dan pelayanan pelanggan, meratakan beban organisasi, meningkatkan akuntabilitas konstruksi, operasi dan keuangan. Fungsi bisnis regional melakukan transaksi bisnis serta mengukur keberhasilan bisnis (konstruksi, operasi dan keuangan) di regionalnya, yang meliputi karakteristik:
   - Melaksanakan proses bisnis secara *end to end*, mulai dari fungsi perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasi dan pelayanan pelanggan di regionalnya.

On 18 August 2015, the Company implemented changes to the Organizational Structure of PT PLN (Persero) in accordance with the Board of Directors Regulation Num. 0015.P/DIR/2015 focusing on PT PLN (Persero) Organizational Performance Management and Work Procedure. The purposes of organization structuring are to strengthen the organization's performance and support future business requirements, in accordance with corporate strategy and end-to-end regional business functions. This will enable the management of electricity growth, and rapid and accountable decision-making from upstream to downstream.

ORGANIZATIONAL ROADMAP 2015–2019

The next PLN organizational roadmap must align with and mutually support the strategic corporate and regional business functions, as follows:

1. Corporate strategy functions: managing centralized corporate functions and aiming to improve their effectiveness, efficiency, standardization, investment and corporate control to enable a healthier company. In the future, this function will be standardized, centralized and modernized with the use of information technology in order to create effective, efficient and practical standard work processes.

   Corporate strategy functions include:
   - Corporate planning: managing plan and developing corporate as a whole.
   - Corporate procurement: managing strategic corporate venture capital (capex), corporate energy trading (OPEX), and Independent Power Producer.
   - Human Resources: managing corporate organizational development and human resources.
   - Finance: managing corporate finance and commerce.
   - Corporate support functions, including: internal audit, legal, risk management and compliance, information technology and health, work safety, security and environment (HSSE) controls.

2. Regional business functions: managing planning and controlling construction, operation, customer service and regional upstream-to-downstream finance, as well as aiming to accelerate 35,000 MW project development, improve operational quality and customer service, arrange organizational load, improve construction, and operational and financial accountability. Regional business functions perform business transactions, as well as measure the success of a business (construction, operation and finance) regionally, including the following characteristics:
   - Implementing end-to-end business processes, from regional planning, control, development, operation and customer service.

- Mengelola Unit PLN langsung di bawah komando bisnis regional yang dapat meningkatkan tanggung jawab operasi unit serta mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.
- Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan regional, serta mendorong terciptanya internal *benchmarking* dalam keberhasilan kinerja di antara bisnis regional.

Untuk mendukung keberhasilan proyek 35.000 MW, operasi dan pelayanan pelanggan, maka fungsi bisnis regional dibentuk dalam jumlah yang memadai dengan memperhatikan proses bisnis *end to end* dengan keluasan dan karakteristik wilayah, sehingga beban dapat terbagi merata dan dapat dikelola dengan baik.

PENCAPAIAN PROGRAM ORGANISASI

Adapun pencapaian perusahaan dalam menata organisasi PLN selama tahun 2015 adalah:

1. Penataan Organisasi PT PLN (Persero) secara Korporat dalam mengelola bisnis ketenagalistrikan, yaitu:
   - Telah terbit Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) tanggal 18 Agustus 2015.
   - Telah terbit Keputusan Direksi di Luar Rapat (Sirkuler) No. 139/DIR/2015 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero) tanggal 12 November 2015.
   - Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai PLN Kantor Pusat dan Unit tentang Organisasi Baru PT PLN (Persero).
   - Telah terbit Peraturan Direksi tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab & Tugas Pokok, dan Formasi Jabatan pada seluruh Direktorat/Divisi/Satuan/Sekper.
   - Penataan Organisasi P3B Jawa Bali sesuai Peraturan Direksi. No. 018 s.d 021.P/DIR/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

   Manfaat: Sinergi antara fungsi korporat dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

2. Penguatan organisasi proyek dalam mendukung pembangunan kelistrikan sesuai dengan:
   - Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tanggal 18 Agustus 2015 mengenai pembentukan 7 Divisi Konstruksi Regional, 1 Divisi Administrasi Konstruksi, 1 Divisi Perijinan dan Pertanahan.

- Managing PLN units directly under the regional business command to enhance the responsibility of operating units, as well as support decision-making more accurately and quickly.
- Improving regional finance performance and accountability, as well as encouraging internal benchmarking for creating successful performance among regional businesses.

In order to support the 35,000 MW project, as well as operational and customer service success, regional business functions are established sufficiently to look after end-to-end processes in regional areas and their specific characteristics. Therefore, the load can be distributed evenly and managed properly.

ACHIEVEMENTS OF THE ORGANIZATIONAL PROGRAM

During 2015, PLN has achieved the following matters related to organizational structure:

1. Corporate Organizational Structuring of PT PLN (Persero) to manage the electrical power business:
   - Issuance of Board of Directors Regulation Num. 0015.P/DIR/2015 on Organization and Work Administration in PT PLN (Persero) dated 18 August 2015.
   - Issuance of Board of Directors non-meeting Regulation (circular) Num. 139/DIR/2015 on Division of Duties and Authority And Positions of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) dated 12 November 2015.
   - Information dissemination to all PLN Head Office and Business Unit employees regarding the new Organization of PT PLN (Persero).
   - Issuance of Board of Directors Regulation on Organization Structure, Responsibilities & Principal Duties, and Position Formation across the entire Directorates / Divisions / Units / Corporate Secretary.
   - P3B Java Bali Organizational Structuring pursuant to Board of Directors Regulation Num. 018 to 021.P/DIR/2015 dated 31 August 2015.

   Benefits: End to end synergy between the corporate function and regional business functions, ability to manage electricity growth, quick decision making that is more accountable from upstream to downstream.

2. Strengthening project organization to support electricity development in accordance with:
   - Directors Regulation Num. 0015.P/DIR/2015 dated 18 August 2015 on the establishment of 7 Regional Construction Divisions, 1 Construction Administration Division, 1 Permit and Land Division.

- Peraturan Direksi No. 022.P/DIR/2015 dan
- No. 023.P/DIR/2015 tgl 31 Agustus 2015 mengenai Pembentukan Unit Induk Pembangunan (UIP) XV dan UIP XVI.
- Peraturan Direksi No. 024.P/DIR/2015 dan No. 025.P/DIR/2015 tgl. 31 Agustus 2015 mengenai Perubahan nama Unit Induk Jasa Manajemen Konstruksi menjadi Pusat Manajemen Konstruksi dan Unit Induk Jasa Sertifikasi menjadi Pusat Sertifikasi.
- Keputusan Direksi No. 0080.K/DIR/2015 tgl 13 April 2015 mengenai Penambahan 1 (satu) orang Manajer Senior Perijinan Ketenagalistrikan pada DIVPNK.
- Keputusan Direksi No. 0034.K/DIR/2015 dan No. 0035.K/DIR/2015 tgl. 4 Maret 2015 mengenai Pemindahan UPK 1 pada UIP VIII dari Pelabuhan Ratu ke Lontar dan UPK 5 pada UIP VIII dari Pacitan ke Pasuruan dalam rangka ekstensi pembangkit.

Manfaat: Untuk mendukung dan sinergi pembangunan kelistrikan supaya tepat waktu, biaya dan mutu.

3. Implementasi *Organization Management* (OM) Terpusat pada modul ERP-HR.
   Manfaat: Adanya kesesuaian Formasi Jabatan antara SK Direksi yang berlaku dan yang ada pada ERP, proses penerbitan SK Organisasi hingga *upload* OM lebih cepat, adanya standarisasi dalam penulisan sebutan jabatan dan profesi jabatan, dan penghematan jumlah dan biaya *user*.

4. Pengembangan dan penyempurnaan Direktori kompetensi dengan menambahkan kompetensi pada bidang konstruksi dan *audit intern*.

5. Penetapan Perencanaan Tenaga Kerja dan Pagu Rekrutmen Tahun 2015 secara Korporat untuk masing-masing Unit PLN.
   Manfaat: Diperoleh pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (kapasitas & kapabilitas) untuk mendukung strategi, kebijakan dan program kerja Perusahaan.

6. Implementasi Budaya Perusahaan dan *Code of Conduct* (CoC):
   Manfaat: Memastikan agar program Budaya Perusahaan & *Code of Conduct* terlaksana, terinternalisasi dan dapat berkesinambungan.

- Directors Regulation Num. 022.P/DIR/2015 and Num. 023.P/DIR/2015 dated 31 August 2015 on the Formation of Master Development Units (UIP) XV and XVI.
- Board of Directors Regulation Num. 024.P/DIR/2015 and Num. 025.P/DIR/2015 dated 31 August 2015 regarding the change of name from Construction Management Services Master Unit to the Construction Management Center and Certification Services Master Unit to Certification Center.
- Board of Directors Regulation Num. 0080.K/DIR/2015 dated 13 April 2015 on the Addition of 1 (one) Senior Manager for Electricity Permits in DIVPNK.
- Board of Directors Regulation Num. 0034.K/DIR/2015 and Num. 0035.K/DIR/2015 dated 4 March 2015 on the transfer of UPK 1 to UIP VIII from Pelabuhan Ratu to Lontar and UPK 5 to UIP VIII from Pacitan to Pasuruan in the interest of power plant extension.

Benefits: To support and synergize power plant development to be on time, on cost and on quality.

3. Organization Management (OM) Implementation Centered around ERP-HR Modules.
   Benefits: Consistency of Position Formation between applicable Board of Directors Regulations (SK) in the ERP, the process of Organizational SK issuance to facilitate rapid uploading to OM, standardization in writing position titles and professional titles, savings on number of users and costs.

4. Development and Refinement of the competency directory by adding competencies in construction and internal audit.

5. Determination of Corporate Workforce Planning and Recruitment Capping in 2015 for each PLN unit.
   Benefit: Satisfying human resource requirements (capacity and capability) to support the Company's strategy, policies and work program.

6. Implementation of the Corporate Culture and Code of Conduct (CoC):
   Benefit: Ensuring the Corporate Culture and Code of Conduct are implemented, internalized and sustainable.

ROADMAP BUDAYA PERUSAHAAN 2014-2019

CORPORATE CULTUREROAD MAP 2014-2019

2013–2014

Internalisasi tata nilai Perusahaan khususnya integritas dengan Program *Organizational Capital Readiness* (OCR) dengan tingkat maturitas 3.6 yaitu internalisasi sudah dilakukan secara sistematis, menaknisme sudah dibakukan/ distandarkan secara formal/resmi dan dilaksanakan secara konsisten sesuai standar.

- ***Set up*/pembentukan zona integritas PLN (ZIP) menuju PLN sebagai wilayah bebas dari Korupsi (WBK).**
- **Penyempurnaan *Whistle Blowing System* (Sistem Pelaporan Pelanggaran).**
- **Penyusunan aturan terkait Sistem gratifikasi.**
- **Penyusunan materi pembekalan pelapor PLN Bersih.**
- **Pembentukan pelapor/*agent of Change* PLN bersih dengan memberikan pembekalan terkait PLN bersih, penyusunan dan tindaklanjut.**
- **Pelaksanaan PLN bersih tersebut terhadap seluruh unit PLN dan 3 unit anak perusahaan.**

Corporate values internalization, in particular the Integrity of Organizational Capital Readiness (OCR) program with maturity level reaching 3.6, which means an internalization has been implemented systematically and its mechanism has been standardized formally/officially and consistently.

- Establishing the PLN Integrity Zone (ZIP) to PLN as a non-corrupt zone (WBK).
- Improving the Whistle Blowing System (a system to report violations).
- Drafting the rules of the gratification System.
- Preparing briefing materials for PLN Bersih Pioneer.
- Creating pioneer or agent of change for Clean PLN by disseminating and drafting follow-up PLN Bersih actions.
- Implementing PLN Bersih action plans in each unit and their 3 subsidiary units.

2015–2016

Internalisasi tata nIlai Perusahaan khususnya integritas dengan Program *Organizational Capital Readiness* (OCR) dengan tingkat maturitas 4 yaitu sudah terukur dan hasilnya digunakan dalam penyempurnaan mekanisme melalui siklus evaluasi dan perbaikan.

- **Pemantauan PLN bersih terhadap 47 Unit PLN.**
- **Implementasi, monitoring, analisa dan evaluasi PLN bersih.**
- **Pembaharuan Pedoman Metodologi pengukuran PLN BERSIH di tingkat unit.**
- **Pengukuran tingkat integritas unit (bekerjasama dengan pihak independen (KPK, KIP, TII dll).**
- **Survei Pengukuran TIngkat Integritas yang dilakukan secara periodik.**
- **Pemberian penghargaan PLN Bersih.**
- **Memperkuat *Corporate Culture Academy* (CCA) melalui *enhancement soft competency* (Tata Nilai, PLN Bersih).**
- **Pembentukan sistem integritas PLN.**

Corporate values internalization, particularly on the Integrity of Organizational Capital Readiness (OCR) program with maturity level reaching 4, indicating an internalization has been scalable and its result can be used to evaluate and improve its mechanism.

- Supervising PLN Bersih in 47 PLN units.
- Implementing, monitoring, analyzing and evaluating PLN Bersih.
- Updating methodology Tools including the measurement of PLN Bersih in each unit.
- Measuring integrity level in each unit (collaborating with independent parties such as KPK, KIP, TII, etc).
- Conducting a survey periodically in order to measure integrity level.
- Announcing Clean PLN Award.
- Strengthening Corporate Culture Academy (CCA) by enhancing soft competency (including corporate and PLN Bersih Values) within the workforce.
- Setting up PLN Integrity System.

2017–2019

Internalisasi tata nIlai Perusahaan khususnya integritas dengan Program *Organizational Capital Readiness* (OCR) dengan tingkat maturitas 5 yaitu sudah terukur di evaluasi dan ditinjau ulang *(review)* secara periodik serta diselaraskan dengan seluruh proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan organisasi.

- **Penguatan terhadap PLN Bersih.**
- **Pengukuran terhadap sejauh mana nilai-nilai PLN Bersih itu terinternalisasi pada setiap Individu PLL hal ini diukur dengan mengukur seberapa banyak jumlah pegawai yang secara konsisten menunjukkan perilaku PLN Bersih tersebut dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari.**
- **Pengukuran *soft competency* terkait tata Nilai.**
- **Pengukuran sistem integritas PLN.**

Corporate values internalization, in particular the Integrity of Organizational Capital Readiness (OCR) program with maturity level reaching 5, indicating it has been measured, evaluated and reviewed periodically and aligned with the entire processes and work units in support of the Company's vision.

- Strengthening Clean PLN
  Measuring Clean PLN's individual internalization. This can be measured by assessing the number of workers exhibiting their values consistently in their operational work on a daily basis.
- Assessing soft competency according to Corporate values.
- Strengthening PLN Integrity System.

ROADMAP SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES ROADMAP 2015–2019

Pilar SDM HR Pillars	2015	2016	2017	2018	2019
Kinerja **Performance**	*HR Audit* dan Survei Strategis **HR Audit and Service Strategy**		*HR Audit* dan Survei Strategis **HR Audit and Service Strategy**		*HR Audit* dan Survei Strategis **HR Audit and Service Strategy**
	Pengembangan Performa Manajemen secara Sistematis **Developing Performance Management Systematically**				
	Siklus Tahunan Perusahaan **Annual Corporate Cycle**				
	Manajemen Integrasi Produktifitas **Integrated Productivity Management**				
	Penguatan dan Penyesuaian **Strengthening Alignment**				
Penghargaan **Award**	Remunerasi Pegawai Berbasis Bobot Jabatan **Employee Remuneration Based on Job Weighting**				
	Evaluasi dan Penyempurnaan Remunerasi Berdasarkan Kinerja **Evaluation and Improvement to the Performance-Based Remuneration**				
Hubungan Industrial **Industrial Relations**	Pengembangan Materi Pelatihan Hubunga Industrial **DevelopingIndustrial Relations Training Material**				
	Pelatihan Hubungan Industrial **Industrial Relations Training**				
	Pengembangan *Data Base* Hubungan Industrial **Industrial Relations Database Development**				
	Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Collective Bargaining Agreement Meeting		Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Collective Bargaining Agreement Meeting		Perundingnan Perjanjian Kerja Bersama Collective Bargaining Agreement Meeting
Kompetensi **Competence**	Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Suksesi Jabatan Evaluating and Improving Competency-based Development System and Job Succession Management				
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Karir untuk *Technical Expert* dan *Specialist* Developing Career Management System for Technical Experts and Specialists				

STRUKTUR ORGANISASI BARU PLN, MENJAMIN KESUKSESAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT 35.000 MW

NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE, SECURING THE SUCCESS OF 35.000 MW POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Dalam rangka menjalankan penugasan Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan listrik, dan yang utama adalah menjamin kesuksesan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW & jaringan tegangan tinggi 46 ribu kms, memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar yaitu kurang lebih Rp1.200 triliun, pemenuhan pertumbuhan *demand* berupa penjualan yang naik 16,200 GWh/tahun, pelanggan baru tumbuh 3 juta/tahun serta penambahan rasio elektrifikasi dari 88,3% menjadi di atas 97,4% pada 2019, PLN melakukan perubahan struktur organisasi PLN sebagai salah satu strategi korporat yang mendasar. Tujuannya adalah memastikan terjaminnya kecukupan dan keandalan sistem serta kecepatan pelayanan serta pemenuhan tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan dalam tataran operasional.

Mulai September 2015, PLN melakukan perombakan struktur di tingkat Direktorat dengan membagi manajemen operasional PLN per daerah, sesuai pembagian Wilayah Regional. Masing-masing Wilayah Regional di Indonesia dipimpin oleh satu Direktur yang akan mengatur seluruh bisnis Perseroan dari hulu ke hilir, dari proses Perencanaan, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan sampai dengan Pelayanan Konsumen/retail. Direktur dari Direktorat dengan fungsi bisnis regional tersebut bertanggung jawab secara keseluruhan dalam suatu wilayah *(end to end)*, sedangkan Direktur dari Direktorat penunjang, seperti: Direktur SDM, Direktur Keuangan, bertindak sebagai pendukung *(support)*.

Perubahan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan kekurangan dari pengelolaan Program FTP yang tidak selesai pada waktunya. Berbagai kelemahan struktur organisasi lama dalam pengelolaan FTP, perbaikan dan perubahan di tatanan operasional dari struktur baru serta kelebihannya dalam mengelola penyelesaian program dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut.

- Pelajaran dari pengelolaan FTP sebelumnya (2006-2009).
  - Tim koordinasi proyek tidak ditetapkan sejak perencanaan.
  - Tim melapor langsung ke Direksi, tidak ada kepemilikan secara khusus oleh salah satu Direktur
  - Tidak ada Organisasi yang mengelola tingkat Program.

In order to implement the Government's mandate to meet electricity needs and to ensure the successful completion of the 35.000 MW power plant project and the 46,000-kilometer high voltage network, requiring substantial funds of approximately Rp1,200 trillion, along with the fulfillment of increasing demand (namely sales growth of 16,200 GWh annually), 3 million new customers annually and the electrification ratio rising from 88.3% to over 97.4% by 2019, PLN has changed its organizational structure as a fundamental corporate strategy. The end result aims to ensure an adequate and reliable system, fast service and accountability in the corporate financial management at the operational level.

Commencing in September 2015, PLN revamped its structure at the directorate level by dividing operational management according to Regional Area divisions in Indonesia. Each division is led by a Director, who will manage the entire upstream-to-downstream business, from Planning, Construction, Operation and Maintenance Services to End User/Retail Consumer. The director of regional business functions will be responsible for the overall region (end-to-end), while the Director of supporting directorates (i.e. Director of Human Resources, Director of Finance) will act as support.

The change to the organizational structure was implemented while considering any shortcomings of the incomplete FTP program management at the due time. Weaknesses in the old FTP management structure, newly-made improvements and changes in the operational structure, as well as the advantages of program completion management, are described briefly as follows:

- Lessons learned from previous FTP management (2006–2009).
  - There was no project coordination team determined in the planning stage.
  - The team directly reported to Board of Directors, each Director had no particular ownership.
  - There was no organization managing on the Program level.

STRUKTUR ORGANISASI BARU PLN, MENJAMIN KESUKSESAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT 35.000 MW

NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE, SECURING THE SUCCESS OF 35.000 MW POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

- Direktorat Konstruksi Strategis tahun 2008 baru dibentuk tahun 2008.
  - Pengelolaan dan Organisasi PMO serta Fungsi SPKK pasca reorganisasi.
  - PMO di bawah Div AKO*.
  - PMO mengelola database, administrasi pelaporan dan laporan kemajuan, termasuk me-*review* dan mengevaluasi kemajuan unit konstruksi.
  - Mengolah data sejak Tahap Inisiasi, Implementasi s/d Pasca Proyek berbasis TI *(PMO Tools).*
  - SPKK (Manajer Senior Program Strategis) menjalankan fungsi *tracking, monitoring*, evaluasi, dan *early warning system* atas program strategis kelistrikan.

- Keunggulan Pola Organisasi Pengelolaan Program 35.000 MW:
  - Memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan berkualitas.
  - Integrasi dan koordinasi proses dan jadwal secara *end-to-end.*
  - Ada *shared* KPI yang fokus pada pencapaian tujuan utama Program 35.000 MW (listrik siap digunakan oleh pelanggan).
  - Kejelasan komando dan *dedicated champion* didukung ketetapan formal
  - Mengikuti skema pengelolaan proyek dengan mempertimbangkan beban kerja pada periode program dan pasca program.
  - Mempertimbangkan penyebaran wewenang dan beban kerja.

Perubahan struktur organisasi tersebut menunjukkan kesiapan internal PLN untuk memastikan Proyek 35.000 MW berhasil diselesaikan tepat waktu, efisien dan berkualitas.

- Strategic Construction Directorate for 2008 was newly formed in the same year.
  - PMO Management and Organization as well as SPKK Post Reorganization Functions.
  - PMO is under AKO Division*. PMO manages the database, as well as reporting administration and progress. It also reviews and evaluates progress in each construction unit.
  - Processing data starting from from Initiation, Implementation and Post-IT-Based Project Phases (PMO Tools).
  - SPKK (Strategic Programs Senior Manager) runs the functions of tracking, monitoring, evaluating and providing early warning system to the strategic electricity programs.

- Advantages of the Organizational Scheme of the 35,000 MW Program Management:
  - Enabling quick and quality data-driven decision-making.
  - End-to-end integration and coordination of processes and schedules.
  - Shared KPIs are focused on the achievement of the 35.000 MW Program's main goal (ready-to-use electricity).
  - Clarity in command and a dedicated champion supported by formal provisions.
  - Following project management schemes by considering work load during the program and post-program phases.
  - Consideration of authority and workload deployment.

Changes made to the PLN organizational structure demonstrate PLN's own internal readiness to ensure that the 35,000 MW project will be successfully completed in a timely and efficient manner, and to a very high standard.

* Dipimpin oleh seorang manajer senior.
* Led by Senior Manager.

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGKIT

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF POWER PLANT

Membangun pembangkit baru dan mengelola kinerja pembangkit secara optimal untuk mencapai biaya penyediaan tenaga listrik terendah *(least cost)* dengan tetap memperhatikan *reserve margin* yang mencukupi untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Building new power plant and managing power plant performance to achieve the lowest cost of production (least cost) while maintaining a sufficient reserve margin to support national economic development.

Sebagai konsekuensi sebuah perusahaan yang mendapatkan penugasan untuk menyediakan energi listrik di seluruh wilayah negara dan pada seluruh lapisan masyarakat, PLN memiliki kewajiban untuk terus menambah daya listrik dan mengembangkan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Tenaga listrik, kini merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki dampak *multiplier* besar dalam mendukung pembangunan perekonomian suatu negara.

Kekurangan tambahan daya, akan berakibat pada terjadinya pemadaman bergilir, seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu, yang laju pertambahan pasokan daya listriknya, sama atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

Persoalan yang cukup mendasar dalam memenuhi kebutuhan listrik adalah besarnya biaya investasi dan lamanya masa kembali modal, dengan risiko sosial yang cukup tinggi, mengingat penyediaan tenaga listrik tidak hanya melibatkan pembangunan pembangkit, namun pembangunan saluran distribusi yang berada di wilayah publik.

As a company mandated to supply electricity throughout the country and to all citizens, PLN has an obligation to increase electricity production an develop a distribution network in order to meet electricity needs. Electricity is one of the basic infrastructure types which have a huge multiplier effect on supporting a country's economic development.

Power supply shortages will result in scheduled power outages, as have occurred in certain areas, where the rate of increase in electricity supply is equal to or lower than the economic growth rate.

A fundamental issue in fulfilling electricity demand is the high cost of investment and duration of return of capital with a relatively high social risk, as electricity supply involves not only construction of the power plants, but also development of distribution channels in public areas.

Oleh karena itu, dalam membangun dan mengembangkan kapasitas pembangkit, PLN senantiasa memperhitungkan beberapa kriteria, seperti: keandalan pembangkit bersangkutan, biaya yang rendah, tingkat keandalan/kinerja pembangkitan yang optimum dan lokasi pembangkit yang harus sedekat mungkin dengan konsumen. Mengingat pembangunan pembangkit akan terus berlangsung selaras dengan pembangunan ekonomi, PLN menyusun rencana pengembangan kapasitas pembangkit dengan menetapkan kebijakan pengembangan pembangkit dan merealisasikan rencana pembangunan dalam beberapa program pembangunan pembangkit untuk mengefisienkan biaya pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBANGKIT

1. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan: (i) untuk memenuhi pertumbuhan beban yang direncanakan; (ii) pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik, (iii) meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan.
2. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilakukan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan tenaga listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang wajar, yang diukur dengan kriteria *Loss of Load Probability* (LOLP) dan cadangan daya (*reserved margin*). Pembangkit sewa dan *excess power* tidak diperhitungkan dalam membuat rencana pengembangan jangka panjang, namun diperhitungkan dalam perencanaan jangka pendek untuk menggambarkan upaya PLN dalam mengatasi kondisi krisis kelistrikan.
3. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk lebih banyak mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan.
4. Kebijakan dalam besarnya cadangan daya mengacu kepada kecukupan pemenuhan tenaga listrik sesuai kriteria perencanaan. Dengan nilai cadangan daya tertentu, pembangkit-pembangkit di suatu sistem mampu memasok tenaga listrik secara terus menerus.

Kepemilikan proyek-proyek pembangkitan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan perusahaan. Oleh karena kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan yang sangat besar, maka PLN tidak dapat sendirian membangun seluruh kebutuhan pembangkit baru. Dengan demikian, pembangunan sebagian proyek pembangkitan akan dilakukan oleh pihak swasta dalam skema *independent power producer* (IPP).

Therefore, when constructing and developing the capacity of power plants, PLN always takes into account several criteria, such as: the reliability of the respective plants, least cost, the level of reliability/optimum performance and plant proximity to users. Keeping in mind that constructing power plants will take place in conjunction with economic development, PLN formulates its plans to develop power generation capacity and policies regarding their development as part of overarching programs, to reduce development costs at later stages.

POWER PLANT CAPACITY DEVELOPMENT POLICY

1. The development of plant generation capacity aims to: (i) meet the planned load growth; (ii) fulfill electricity demand in certain areas, (iii) increase supply reliability by prioritizing local energy sources which are mainly renewable.
2. The development of power generation capacity is conducted optimally with certain principles such as lowest cost of production (least cost), while still meeting a reasonable level of reliability, as measured by the criteria of Loss of Load Probability (LOLP) and backup power (reserved margin). Rented plants and excess power are not taken into account by the long-term development plan, but taken into account by the short-term plan to demonstrate PLN's efforts in overcoming the electricity crisis.
3. In line with the Government's policy to develop and utilize more renewable energy.
4. The amount of power reserves refers to the fulfillment of electricity corresponding with planning criteria. With the value of certain power reserves, plants in a system capable of supplying electric power continuously.

The ownership of power generation projects is in line with the Company's financial capability. The investment needs of the electricity sector are massive, so PLN cannot build the entire amount of plants individually. Therefore, the construction of some generation projects will be undertaken by the private sector under the independent power producers (IPP) scheme.

TARGET PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

Untuk melayani pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia sesuai rencana jangka panjang perusahaan, maka pada kurun waktu 2015 – 2024 diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebanyak 70,4 GW untuk seluruh Indonesia, atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 7 GW per tahun. Dari total kapasitas tersebut, PLN dan IPP akan membangun masing-masing sebesar 21,4 GW dan 35,5 GW, sedangkan sisanya sebesar 13,5 GW merupakan proyek yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya.

PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang dibangun yaitu sebesar 59,8% dari total kapasitas pembangkit, diikuti PLTGU gas alam sebesar 13,0 % dan PLTG/ MG sebesar 7,1%. Untuk pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, maka pembangkit yang terbesar adalah PLTA sebesar 13,1%, diikuti oleh PLTP sebesar 6,8%, serta pembangkit lain yaitu PLTS, PLTB dan lainnya sebesar 0,1%.

PLANT DEVELOPMENT OBJECTIVES

To meet Indonesia's growing electricity demands according to the Company's long-term plan, in the period of 2015-2024 an additional generation capacity of 70.4 GW is required, or an average of 7 GW per year. Of the total capacity required, PLN and IPP will develop 21.4 GW and 35.5 GW respectively, while generation of the remaining 13.5 GW is yet to be established as regards its potential developers and funding sources.

Coal power plants will be the most common type of power plants comprising 59.8% of the total generation capacity, followed by natural gas power plants comprising 13.0% and gas/oil & gas power plants at 7.1%. For renewable energy power plants, hydro power plants comprise the largest section at 13.1%, followed by geothermal power plants at 6.8%, as well as others, namely solar power plants, thermal power stations and others at 0.1%.

Rencana Tambahan Kapasitas Pembangkit Baru (PLN + IPP) 2015 - 2024
Additional Power Plant Capacity Plan (PLN + IPP) 2015-2024

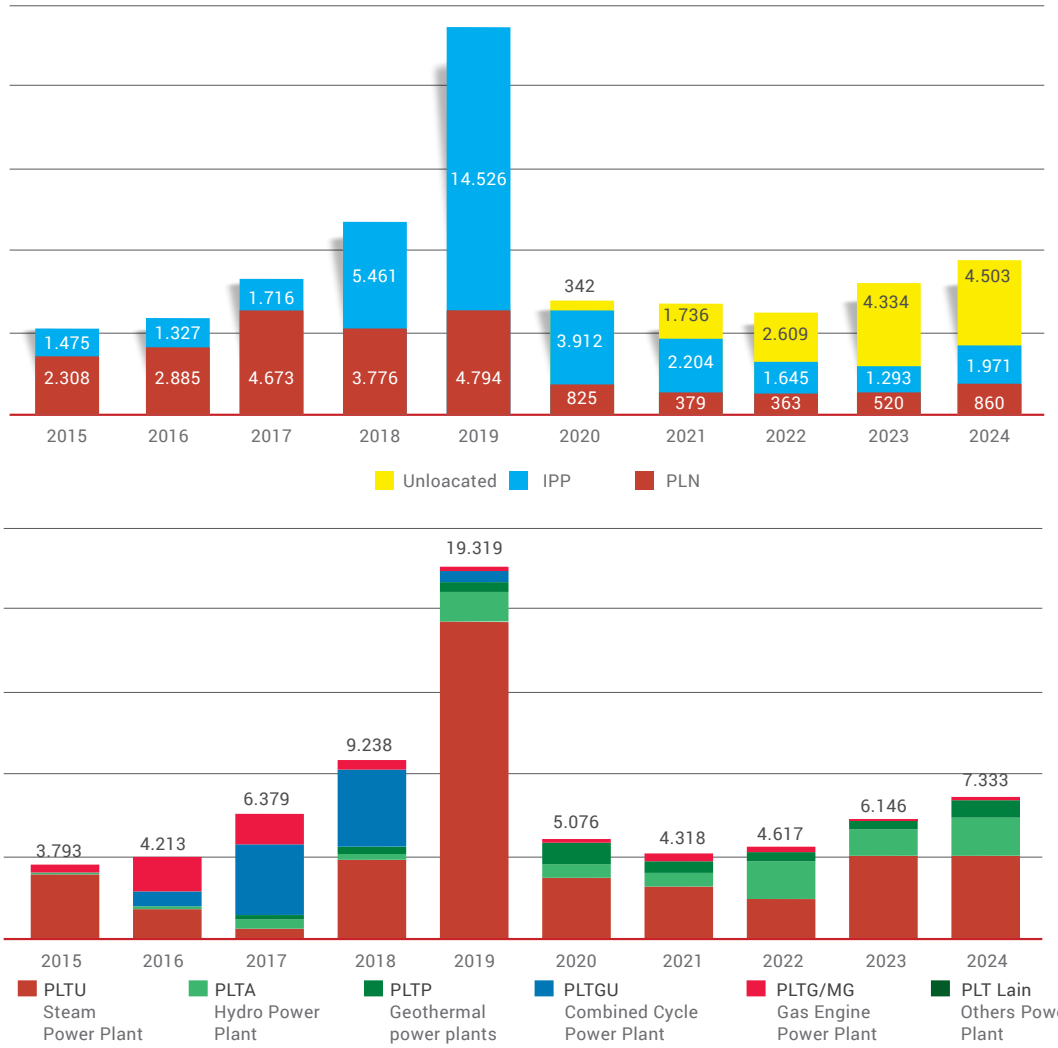

Proyeksi Bauran Energi Total (PLN + IPP)
Projection of Total Energy Mix (PLN + IPP)

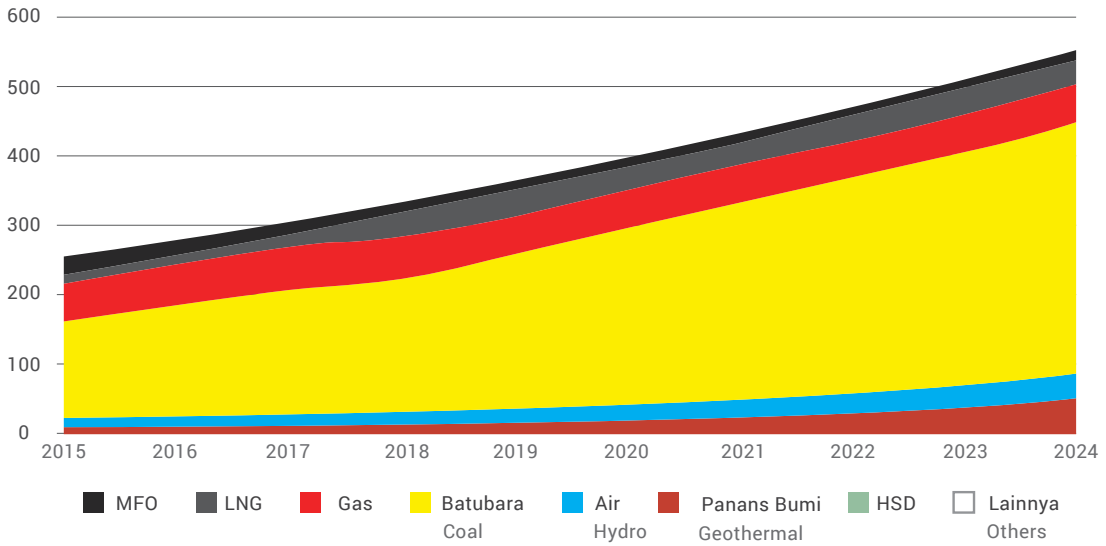

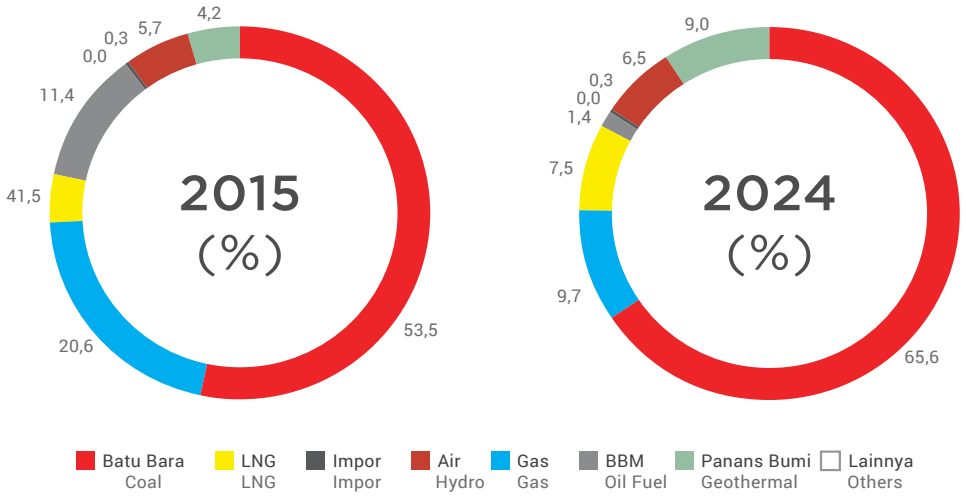

Program pembangunan ketenagalistrikan untuk tahun 2015 – 2019 meliputi pengembangan pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi. Pengembangan tersebut untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi 6,7%, pertumbuhan kebutuhan listrik 8,8% dan rasio elektrifikasi 97,4% pada tahun 2019.

Pembangunan pembangkit secara massive telah dimulai sejak tahun 2006 melalui program FTP -1, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2011 dimana pemerintah menugaskan PLN untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 37 lokasi di Indonesia yang meliputi 10 lokasi dengan kapasitas 7.490 MW di Jawa Bali,

The electricity development program for 2015 to 2019 includes the development of power plants, transmission lines and substations, and distribution networks. The development will meet economic growth of 6.7%, electricity demand growth of 8.8% and electrification ratio of 97.4% will be achieved by 2019.

Massive construction was commenced in 2006 through the FTP-1 program, marked by the publication of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Num. 71 of 2006 dated 5 July 2006, then amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Num. 59 of 2009 dated 23 December 2009, then amended by Presidential Regulation Num. 47 of 2011 where the Government commissioned PLN to build coal-fired steam power plant infrastructure at 37 locations in Indonesia, with ten sites

12 lokasi dengan kapasitas 1.600 MW di Sumatera dan 15 lokasi dengan kapasitas 885 MW di Indonesia Timur.

Berikut tabel progress FTP-1 dan jadwal COD:

with a capacity of 7,490 MW in Java and Bali, 12 with a capacity of 1,600 MW in Sumatra Indonesia, and 15 with a capacity of 885 MW in Eastern Indonesia.

The following table shows the FTP-1 progress and COD schedule:

Daftar Proyek 10.000 MW
List of Project 10,000 MW

No.	Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD Schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
		Unit	MW					
1.	PLTU 2 di Banten (Labuan)	1	300	2009	PLTU Steam Power Plant	PLN	300	Banten 2 (Labuan) Steam Power Plants
		2	300	2010	PLTU Steam Power Plant	PLN	300	
2.	PLTU 1 di Jawa Barat (Indramayu)	1	330	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	330	West Java 1 (Indramayu) Steam Power Plants
		2	330	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	330	
		3	330	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	330	
3.	PLTU 1 di Banten (Suralaya Unit 8)	1	625	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	625	Banten 1 (Suralaya Unit 8) Steam Power Plant
4.	PLTU di Banten (Lontar)	1	315	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	Banten (Lontar) Steam Power Plants
		2	315	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	
		3	315	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	
5.	PLTU 2 di Jawa Barat (Pelabuhan Ratu)	1	350	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	350	West Java 2 (Pelabuhan Ratu) Steam Power Plants
		2	350	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	350	
		3	350	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	350	
6.	PLTU 1 di Jawa Tengah (Rembang)	1	315	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	Central Java1 (Rembang) Steam Power Plants
		2	315	2011	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	
7.	PLTU 2 Di Jawa Tengah (PLTU Adipala)	1	660	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Central Java 2 Steam Power Plant (Adipala Steam Power Plant)
8.	PLTU 1 di Jawa Timur (Pacitan)	1	315	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	East Java 1 (Pacitan) Steam Power Plants
		2	315	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	315	
9.	PLTU 2 di Jawa Timur (Paiton Unit 9)	1	660	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	660	East Java 2 (Paiton Unit 9) Steam Power Plant
10.	PLTU 3 di Jawa Timur (Tanjung Awar-Awar)	1	350	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	350	East Java 3 (Tanjung Awar-Awar) Steam Power Plants
		2	350	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
11.	PLTU di Aceh (Meulaboh/ Nagan Raya)	1	110	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	110	Aceh (Meulaboh/Nagan Raya) Steam Power Plants
		2	110	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	110	
12.	PLTU 2 di Sumatera Utara (Pangkalan Susu)	1	220	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	220	North Sumatra 2 (Pangkalan Susu)
		2	220	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	220	Steam Power Plants
13.	PLTU Tenayan di Riau	1	110	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Tenayan Riau Steam Power Plants
		2	110	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN		
14.	PLTU di Kepulauan Riau (Tanjung Balai)	1	7	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	7	Riau Island (Tanjung Balai) Steam Power Plants
		2	7	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	7	
15.	PLTU 4 di Bangka Belitung	1	17	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	17	Bangka Belitung 4 Steam Power Plants
		2	17	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	

No.	Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD Schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
		Unit	MW					
17.	PLTU 3 di Bangka Belitung (Air Anyer)	1	30	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	30	Bangka Belitung 3(Air Anyer) Steam Power Plants
		2	30	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	30	
18.	PLTU 2 di Kalimantan Barat (Pantai Kura-kura)	1	27.5	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	West Kalimantan (Pantai Kura-kura) Steam Power Plants
		2	27.5	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
20.	PLTU di Sumatera Barat (Teluk Sirih)	1	112	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	112	West Sumatera (Teluk Sirih) Steam Power Plants
		2	112	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	112	
21.	PLTU di Lampung (Tarahan Baru)	1	100	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	100	Lampung (Tarahan Baru) Steam Power Plants
		2	100	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
22.	PLTU 1 di Kalimantan Barat (Parit Baru)	1	50	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	West Kalimantan (Parit Baru) Steam Power Plants
		2	50	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
23.	PLTU di Kalimantan Timur (Teluk Balikpapan)	1	110	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	East Kalimantan (Teluk Balikpapan) Steam Power Plants
		2	110	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
24.	PLTU di Kalimantan Tengah (Pulau Pisau)	1	60	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Central Kalimantan (Pulau Pisau) Steam Power Plants
		2	60	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
25.	PLTU di Kalimantan Selatan (Asam-asam)	1	65	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	65	South Kalimantan (Asam-asam) Steam Power Plants
		2	65	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	65	
26.	PLTU 2 di Sulawesi Utara (Amurang)	1	25	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	25	North 2 Sulawesi (Amurang) Steam Power Plants
		2	25	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	25	
27.	PLTU di Gorontalo (Anggrek)	1	25	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Gorontalo (Anggrek) Steam Power Plants
		2	25	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
28.	PLTU di Maluku Utara (Tidore)	1	7	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	--	North Maluku (Tidore) Steam Power Plants
		2	7	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN		
29.	PLTU 2 di Papua (Jayapura)	1	10	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Papua (Jayapura) Steam Power Plants
		2	10	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
30.	PLTU di Maluku (Ambon)	1	15	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Maluku (Ambon) Steam Power Plants
		2	15	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
31.	PLTU di Sulawesi Tenggara (Kendari)	1	10	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	10	South East Sulawesi (Kendari) Steam Power Plants
		2	10	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	10	
32.	PLTU di Sulawesi Selatan (Barru)	1	50	2012	PLTU Steam Power Plant	PLN	50	South Sulawesi (Barru) Steam Power Plants
		2	50	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	50	
33.	PLTU 2 di NTB (Lombok)	1	25	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	West Nusa Tenggara 2 (Lombok) Steam Power Plants
		2	25	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
34.	PLTU 1 di NTT (Ende)	1	7	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	7	NTT (Ende) Steam Power Plants
		2	7	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
35.	PLTU 2 di NTT (Kupang)	1	17	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	16,5	NTT (Kupang) Steam Power Plants
		2	17	2013	PLTU Steam Power Plant	PLN	16,5	

No.	Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD Schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
		Unit	MW					
36.	PLTU 1 di Nusa Tenggara Barat (Bima)	1	10	2014	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	West Nusa Tenggara 1 (Bima) Steam Power Plants
		2	10	2015	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	
	Total		**9.927**				**7.894,5**	**Total**

Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2015 untuk proyek FTP-1 telah beroperasi sebesar 7.894 MW dari total yang direncanakan sebesar 9.927 MW atau telah mencapai 79,52%.

Overall until the end of 2015, FTP-1 project was in operation for 7,894 MW of the total planned 9,927 MW, or a completion rate of 79.52%.

Selanjutnya di tahun 2010 diluncurkan program FTP-2, melalui Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 dan diamandemen melalui Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2013, No. 32 Tahun 2014, dan No. 40 Tahun 2014 yang menugaskan PLN untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk didalamnya pengadaan IPP dengan total kapasitas 17.563 MW.

Furthermore, in 2010 FTP-2 was launched through Presidential Regulation Num. 4 of 2010 as amended by Presidential Regulation Num. 48 of 2011 and the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 21 of 2013, Num. 32 of 2014 and Num. 40 of 2014, which assigned PLN the mandate to construct power plants including the provision of IPPs with a total capacity of 17,563 MW.

Berikut tabel *progress* FTP-2 dan jadwal COD:

The following table shows the FTP-2 progress and COD schedule:

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
	Unit	MW					
PLTA Upper Cisokan Jawa Barat	1	260	2019	PLTA Hydro Power Plant	PLN	-	Upper Cisokan West Java Hydro Power Plants
	2	260	2019			-	
	3	260	2019			-	
	4	260	2019			-	
PLTU Indramayu-Jawa Barat	1	1.000	2019	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Indramayu-West Java Steam Power Plant
PLTP Baturaden Jawa Tengah	1	110	2021	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Baturaden Central Java Geothermal Power Plants
	2	110	2023			-	
PLTP Cibuni Jawa Barat	1	10	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Cibuni West Java Geothermal Power Plant
PLTP Cisolok Jawa Barat	1	50	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Cisolok West Java Geothermal Power Plant
PLTP Dieng Unit 2 & 3 Jawa Tengah	2	55	2019	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Dieng Unit 2 & 3 Central Java Geothermal Power Plants
	3	60	2019			-	
PLTP Guci Jawa Tengah	1	40	2021	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Guci Central Java Geothermal Power Plant
PLTP Gunung Ciremai Jawa Barat	1	55	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Gunung Ciremai West Java Geothermal Power Plants
	2	55	2022			-	
PLTP Gunung Endut Banten	1	55	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Gunung Endut Banten Geothermal Power Plant
PLTP Ijen Jawa Timur	1	55	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Ijen East Java Geothermal Power Plants
	2	55	2020			-	
PLTP Iyang Argopuro Unit 1 Jawa Timur	1	55	2021	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Iyang Argopuro Unit 1 East Java Geothermal Power Plant

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
	Unit	MW					
PLTP Kamojang 5 Jawa Barat	5	30	2015	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	30	Kamojang 5 West Java Geothermal Power Plant
PLTP Karaha Bodas 1,2,3 Jawa Barat	1	30	2016	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Karaha Bodas 1,2,3 West Java Geothermal Power Plants
	2	55	2020			-	
	3	55	2020			-	
PLTP Patuha Unit 1,2,3 Bandung-Jawa Barat	1	55	2014	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	55	Patuha Unit 1,2,3 Bandung-West Java Geothermal Power Plants
	2	55	2019			-	
	3	55	2019			-	
PLTP Rawa Dano Banten	1	110	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Rawa Dano Banten Geothermal Power Plantt
PLTP Tampomas Jawa Barat	1	45	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Tampomas West Java Geothermal Power Plant
PLTP Tangkuban Perahu I Jawa Barat	1	55	2019	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Tangkuban Perahu I West Java Geothermal Power Plant
	2	55	2020			-	
PLTP Tangkuban Perahu II Jawa Barat	1	30	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Tangkuban Perahu II West Java Geothermal Power Plants
	2	30	2020			-	
PLTP Umbul Telomoyo Jawa Tengah	1	55	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Umbul Telomoyo Central Java Geothermal Power Plant
PLTP Ungaran Jawa Tengah	1	55	2021	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Ungaran Central Java Geothermal Power Plant
PLTP Wayang Windu Unit 3 & 4 Jawa Barat	3	110	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Wayang Windu Unit 3 & 4 West Java Geothermal Power Plants
	4	110	2020			-	
PLTP Wilis /Ngebel 1,2 & 3 Jatim	1	55	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Wilis /Ngebel 1,2 & 3 East Java Geothermal Power Plants
	2	55	2021			-	
	3	55	2021			-	
PLTU Jawa 1 Jawa Barat	1	1000	2019	PLTU Steam Power Plant	IPP	-	Jawa 1 West Java Steam Power Plant
PLTU Jawa 3 Jawa Barat	1	660	2021	PLTU Steam Power Plant	IPP	-	Jawa 3 West Java Steam Power Plants
	2	660	2021			-	
PLTU Jawa 4 Jawa Tengah	1	1000	2019	PLTU Steam Power Plant	IPP	-	Jawa 4 Central Java Steam Power Plants
	2	1000	2019			-	
PLTU Jawa 5 Jawa Barat	1	1000	2019	PLTU Steam Power Plant	IPP	-	Jawa 5 West Java Steam Power Plants
	2	1000	2019			-	
PLTA Jatigede-Jawa Barat	1	55	2019	PLTA Hydro Power Plant	PLN	-	Jatigede-West Java Hydro Power Plants
	2	55	2019			-	
PLTU Jawa 6 Jawa Barat	1	1000	2023	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Jawa 6 West Java Steam Power Plants
	2	1000	2023			-	
PLTA Asahan 3, Sumatera Utara	1	87	2019	PLTA Hydro Power Plant	PLN	-	Asahan 3, North Sumatra Hydro Power Plants
	2	87	2019			-	

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
	Unit	MW					
PLTA Masang 2 Sumatera Barat	1	55	2021	PLTA Hydro Power Plant	PLN	-	Masang 2 West Sumatra Hydro Power Plants
PLTU Pangkalan Susu 3 & 4-Sumatera Utara	3	200	2018	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Pangkalan Susu 3 & 4-North Sumatra Steam Power Plants
	4	200	2019			-	
PLTP Hululais 1&2 Bengkulu	1	55	2019	PLTP Geothermal Power Plant	PLN	-	Hululais 1 & 2 Bengkulu Geothermal Power Plants
	2	55	2020			-	
PLTP Sungai Penuh 1&2 Jambi	1	55	2024	PLTP Geothermal Power Plant	PLN	-	Sungai Penuh 1 & 2 Jambi Geothermal Power Plants
	2	55	2024			-	
PLTA Hasang-Sumatera Utara	1	40	2019	PLTA Hydro Power Plant	IPP	-	Hasang-North Sumatra Hydro Power Plant
PLTA Peusangan 4-NAD	1	83	2022	PLTA Hydro Power Plant	IPP	-	Peusangan 4-NAD Hydro Power Plant
PLTA Semangka-Lampung	1	28	2018	PLTA Hydro Power Plant	IPP	-	Semangka-Lampung Hydro Power Plant
	2	28	2018			-	
PLTA Wampu -Sumatera Utara	1	15	2016	PLTA Hydro Power Plant	IPP	-	Wampu -North Sumatra Hydro Power Plants
	2	15	2016			-	
	3	15	2016			-	
PLTP Bonjor Sumatera Barat	1	20	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Bonjor West Sumatra Geothermal Power Plants
	2	20	2022			-	
	3	20	2022			-	
PLTP Danau Ranau Lampung	1	55	2023	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Danau Ranau Lampung Geothermal Power Plants
	2	55	2023			-	
PLTP Jaboi Sabang NAD	1	5	2019	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Jaboi Sabang NAD Geothermal Power Plants
	2	5	2020			-	
PLTP Lumut Balai 1, 2, 3, 4 Sumatera Selatan	1	55	2017	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Lumut Balai 1, 2, 3, 4 South Sumatra Geothermal Power Plants
	2	55	2019			-	
	3	55	2024			-	
	4	55	2024			-	
PLTP Muara Laboh Sumatera Barat	1	110	2017	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Muara Laboh West Sumatra Geothermal Power Plants
	2	110	2024			-	
PLTP Rajabasa Unit 1&2 Lampung	1	110	2023	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Plants Rajabasa Unit 1 & 2 Lampung Geothermal Power Plant
	2	110	2024			-	
PLTP Rantau Dadap Sumsel	1	110	2019	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Rantau Dadap Sumsel Geothermal Power Plants
	2	110	2020			-	
PLTP Sarulla I Unit 1,2&3 Sumatera Utara	1	110	2017	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Sarulla I Unit 1, 2 & 3 North Sumatra Geothermal Power Plants
	2	110	2018			-	
	3	110	2018			-	

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
	Unit	MW					
PLTP Sarulla II Sumatera Utara	1	55	2024	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Sarulla II North Sumatra Geothermal Power Plants
	2	55	2024			-	
PLTP Seulawah Agam NAD	1	55	2024	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Seulawah Agam NAD Geothermal Power Plants
	2	55	2024			-	
PLTP Simbolon Samosir Sumatera Utara	1	55	2023	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Simbolon Samosir North Sumatra Geothermal Power Plants
	2	55	2023			-	
PLTP Sipaholon Ria Ria Sumatera Utara	1	20	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Sipaholon Ria Ria North Sumatra Geothermal Power Plants
PLTP Sorik Merapi Sumatera Utara	1	80	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Sorik Merapi North Sumatra Geothermal Power Plants
	2	80	2021			-	
	3	80	2021			-	
PLTP Suoh Sekincau Lampung	1	55	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Suoh Sekincau Lampung Geothermal Power Plants
	2	55	2020			-	
	3	55	2024			-	
	4	55	2024			-	
PLTP Ulubelu 3 & 4 Lampung	3	55	2016	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Ulubelu 3 & 4 Geothermal Power Plants
	4	55	2017			-	
PLTP Wai Ratai Lampung	1	55	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Wai Ratai Lampung Geothermal Power Plants
PLTMG Bangkanai-Kalteng	1	70	2016	PLTA Hydro Power Plant	PLN	-	Bangkanai Central Kalimantan Gas Engine Power Plant
	2	70	2016			-	
	3	70	2017			-	
	4	70	2017			-	
PLTP Kotamobagu 1,2,3,4 Sulut	1	20	2024	PLTP Geothermal Power Plant	PLN	-	Kotamobagu 1, 2, 3, 4 North Sulawesi Geothermal Power Plants
	2	20	2024			-	
	3	20	2024			-	
	4	20	2024			-	
PLTP Sembalun Unit 1 NTB	1	20	2021	PLTP Geothermal Power Plant	PLN	-	Sembalun Unit 1 West Nusategara Geothermal Power Plant
PLTP Tulehu Unit 1&2 Maluku	1	10	2018	PLTP Geothermal Power Plant	PLN	-	Tulehu Unit 1 & 2 Maluku Geothermal Power Plant
	2	10	2019			-	
PLTU Lombok-NTB	1	50	2018	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Lombok-West Nusa Tenggara Steam Power Plants
	2	50	2019			-	
PLTU Parit Baru-Kalbar	1	50	2017	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Parit Baru - West Kalimantan Steam Power Plants
	2	50	2018			-	
PLTA Bonto Batu - Sulsel	1	55	2024	PLTA Hydro Power Plant	IPP	-	Bonto Batu - South Sulawesi Hydro Power Plants
	2	55	2024				

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity		Jadwal COD schedule of COD	Tipe Pembangkit Type of Power Plant	Kepemilikan Ownership	Beroperasi (MW) Operating (MW)	Power Plant
	Unit	MW					
PLTA Malea-Sulsel	1	45	2020	PLTA Hydro Power Plant	IPP	-	Malea South Sulawesi Hydro Power Plants
	2	45	2020				
PLTP Atadel NTT	1	2.5	2019	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Atadel East Nusa Tenggara Geothermal Power Plants
	2	2.5	2019				
PLTP Bora Pulu Sulteng	1	40	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Bora Pulu Central Sulawesi Geothermal Power Plants
PLTP Hu'u NTB	1	10	2024	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Hu'u West Nusa Tenggara Geothermal Power Plants
	2	10	2024				
PLTP Jailolo Maluku Utara	1	10	2021	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Jailolo North Maluku Geothermal Power Plants
	2	10	2022				
	3	10	2023				
	4	10	2023				
PLTP Lahendong 5&6 Sulawesi Utara	5	20	2017	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Lahendong 5 & 6 North Sulawesi Geothermal Power Plants
	6	20	2018				
PLTP Mataloko NTT	1	20	2019	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Mataloko East Nusa Tenggara Geothermal Power Plants
PLTP Merana/Masangi Sulawesi Tengah	1	10	2022	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Merana/Masangi Central Sulawesi Geothermal Power Plants
	2	10	2022				
PLTP Sokoria NTT	1	5	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Sokoria East Nusa Tenggara Geothermal Power Plants
	2	5	2020				
	3	5	2021				
	4	5	2022				
	5	5	2023				
	6	5	2023				
PLTP Songa Wayaua Maluku Utara	1	5	2020	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Songa Wayaua North Maluku Geothermal Power Plant
PLTU Kalsel 1-Kalsel	1	100	2018	PLTU Steam Power Plant	IPP	-	South Kalimantan 1 - South Kalimantan Steam Power Plants
	2	100	2019				
PLTU Kaltim 2-Kaltim	1	100	2018	PLTU Steam Power Plant	IPP	-	East Kalimantan 2 - East Kalimantan Steam Power Plants
	2	100	2019				
PLTP Oka Ile Ange NTT	1	10	2021	PLTP Geothermal Power Plant	IPP	-	Oka Ile Ange - East Nusa Tenggara Geothermal Power Plant
PLTU Punagaya Sulsel	1	100	2017	PLTU Steam Power Plant	PLN	-	Punagaya South Sulawesi Steam Power Plants
	2	100	2018				
Total		**17.458**				**85**	**Total**

Untuk progress FTP-2 sampai dengan tahun 2015 dari sebesar 85 MW yang direncakan beroperasi, seluruhnya telah beroperasi yakni IPP PLTP Kamojang 30 MW dan IPP PLTP Patuha 55 MW.

For FTP-2 progress until 2015, 85 MW of the planned operation was generated, which consists of 30 MW geothermal power plant IPP Kamojang and 55 MW Patuha geothermal power plant.

PROGRAM 35.000 MW
35,000 MW PROGRAM

Semangat baru pembangunan pembangkit sebesar 35.923 MW untuk 5 tahun kedepan, dilandasi pula oleh kenyataan bahwa rasio elektrifikasi akhir tahun 2014 sebesar 84% yang menunjukkan Indonesia masih tertinggal di bidang ketenagalistrikan dibandingkan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (100%) Brunei (99,7%), Thailand (99,3%), Malaysia (99%), dan Vietnam (98%).
Global Status Report 2014, GIZ, data 2013.

Mempertimbangkan urgensinya pemenuhan listrik dan belajar dari pengalaman program pembangunan pembangkit FTP-1, Pemerintah dengan PLN sebagai pelaksana, menjadikan Program Pembangunan Pembangkit 35.923 MW yang selanjutnya disebut sebagai program 35.000 MW sebagai program utama pemerintah Republik Indonesia guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional pada kurun waktu 2015-2019.

The construction of 35,923 MW over the next 5 years is based on the fact that the electrification ratio by the end of 2014 was 84%, which indicated that Indonesia still lagged behind in the field of electricity compared to other Southeast Asian countries, such as Singapore (100%) Brunei (99.7%), Thailand (99.3%), Malaysia (99%), and Vietnam (98%).
Global Status Report 2014, GIZ, 2013 data.

Considering the urgency of fulfilling electricity needs and learning from the experience of running the FTP-1 program, the Government and PLN as implementer decided to roll out the 35,923 MW Plant Development Program (hereinafter referred to as the 35,000 MW Program) as the primary program of the Government of the Republic of Indonesia to jump start national economic growth in the 2015–2019 period.

MEMACU PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
STIMULATING ECONOMIC GROWTH

Program Pembangkit 35.000 MW diyakini memiliki dampak penggandaan kegiatan ekonomi yang amat besar di seluruh Indonesia. Dengan sebaran lokasi pembangunan mencapai 210 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, sementara di Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi, maka selain berdampak positif terhadap bidang industri dan investasi, juga akan membuka lapangan kerja hingga meningkatkan serapan komponen dalam negeri.

Perhitungan awal yang dilakukan Kementerian ESDM mengindikasikan megaproyek ini akan membuka peluang pembangunan 75.000 set tower, pemanfaatan 300.000-an km konduktor aluminium, pembangunan 1.382 unit gardu induk, penggunaan 2.600 set trafo, serta kebutuhan akan 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit.

Pemenuhan seluruh produk tersebut, diprakirakan akan menyerap sekurang-kurangnya 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta orang tenaga kerja tak langsung. Jika 1 tenaga kerja membawa manfaat bagi paling-tidak 4 orang lainnya, maka sekitar 20 juta orang akan mendapat manfaat ekonomi dari program ini. Adapun nilai investasi total yang diperlukan jika minimal 40% saja kebutuhan komponen dipenuhi oleh produk dalam negeri bisa mencapai lebih dari Rp1.100 triliun. Suatu angka yang cukup besar untuk menggerakan ekonomi nasional secara langsung.

Di luar itu, energi listrik yang dihasilkan akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan yang akan terus berlangsung, yang pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian nasional.

The 35,000 MW program is believed to have a multiplying effect on the acceleration of economic activities throughout Indonesia. With distribution of construction sites to reach 210 locations across Indonesia, which consists of 59 locations in Sumatra, 34 in Java, 49 in Sulawesi, 34 in Kalimantan, and 34 in eastern Indonesia, in addition to the positive impact on industry and investment, this program will also create jobs to improve the uptake of domestic components.

Preliminary calculations by the Ministry of Energy and Mineral Resources indicate this mega project would enable the construction of 75,000 towers, utilizing 300,000 km of aluminum conductors, construction of 1,382 substation units, utilization of 2,600 transformers, as well as generate the need for 3.5 million tons of steel plant profile and outer pipes.

These projects are expected to absorb at least 650,000 direct labor personnel and 3 million indirect labor personnel. If one worker brings benefits to at least 4 other people, then about 20 million people will receive economic benefits from this program. The minimum investment of 40% of the required amount will result in the supply of local components may exceed Rp1.100 Trillion. This is a large enough sum of investment to directly drive the national economy.

Beyond that, the electrical energy produced will be a driving force for economic growth and development activities will continue, which in turn will accelerate national economic growth.

PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 2015-2019

Keseluruhan program pembangunan pembangkit baik FTP-1, FTP-2 maupun reguler selanjutnya dikonsolidasikan dalam RUPTL tahun 2015-2024 dan tambahan pembangkit baru yang diperlukan untuk kurun waktu 2015-2019 adalah sebesar 42.940 MW dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar 7.412 MW yang sedang dalam tahap konstruksi dan merupakan kelanjutan *(carry over)*. **Selanjutnya program ini disebut sebagai program 7.000 MW**.
b. Sebesar 35.528 MW yang sedang dalam proses perencanaan dan pengadaan. **Selanjutnya progam ini disebut dengan program 35.000 MW**.

POWER PLANT DEVELOPMENT PROGRAM 2015–2019

All the FTP-1, the FTP-2 plant, as well as the regular power plant development programs are further consolidated in the Electricity Power Supply Business Plan 2015–2024, and additional new plants are required for the 2015 to 2019 period totalling 42,940 MW with the following details:

1. 7,412 MW is under construction as carry over, and **subsequently will be called the 7,000 MW program**.
2. Furthermore, 35,528 MW is still in the process of planning and procurement. **This program is hereinafter referred to as the 35,000 MW program**.

TANTANGAN PROGRAM 35.000 MW

1. Perseroan perlu segera memperkuat struktur permodalan untuk menjaga rasio keuangan yang sehat.
2. Perseroan memerlukan percepatan dan kejelasan skema penjaminan Pemerintah untuk pendanaan.
3. Interdependensi antar aktivitas pada Program 35.000 MW sangat tinggi, sehingga memerlukan integrasi antar fungsi dan proses yang kuat.
4. Pengadaan tanah membutuhkan waktu 488-742 hari (sesuai dengan UU 2 tahun 2012) dan harus selesai sebelum penunjukan pengembang.
5. Perizinan membutuhkan akselerasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta perlu waktu yang lama (rencana PTSP masih membutuhkan 240 hari sampai dengan siap konstruksi).

CHALLENGES OF 35,000 MW PROGRAM

1. The Company needs to strengthen its capital infrastructure immediately to maintain healthy financial ratios.
2. The Company requires acceleration and clarity of the Government guarantee for funding scheme.
3. Interdependence of activities for the 35.000 MW program is very high, so collaboration between functions and robust structures are required.
4. Land acquisition takes about 488–742 days (in accordance with Law Num.2 of 2012) and must be completed before the appointment of the developer.
5. Licensing requires acceleration by the Central Government and the Regions and takes a long period of time (PTSP plan still takes 240 days until ready for construction).

REALISASI PROGRAM 35.000 MW
Dukungan dan Kerjasama Lembaga Pemerintah
REALIZATION OF 35,000 MW PROGRAM
Government Institutions Support and Cooperation

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam proses pembangunan pembangkit listrik beserta sarana transmisinya adalah lamanya proses lelang. Nilai investasi yang besar membuat pemilihan kontraktor tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena aturan regulasi. Dilain pihak upaya percepatan lelang dari pemilik proyek, PLN, sangat dihindari oleh para Pejabat Pembuat Komitmen. Sebabnya adalah, kekhawatiran adanya tuduhan *fraud*.

Faktor lain yang menghambat adalah kerjasama antar Lembaga Pemerintah terkait yang lemah, karena adanya ego sektoral, membuat proses perizinan membutuhkan waktu lebih lama dari pada proses konstruksi.

Dua faktor tersebut kini berupaya diatasi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Pemerintah dan Presiden beserta Wakil Presiden.

Sebelum maupun sesudah Program 35.000 MW diresmikan, berbagai lembaga Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk turut mendukung kesuksesan implementasi program, sebagaimana ditunjukkan dalam rangkaian aktivitas berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk mengawal dan memantau implementasi program-program yang telah diresmikan, termasuk mengkoordinasikan langkah-langkah mengatasi kendala di lapangan.
2. Kementerian ESDM mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri ESDM, untuk memudahkan pelaksanaan di tingkat teknis operasional.
3. BKPM menyediakan dan mengembangkan sistem perizinan satu pintu.
4. Lembaga Kejaksaan menyediakan Asistensi agar seluruh kebijakan yang diambil PLN senantiasa berada dalam koridor hukum.
5. Kementerian koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk bersama-sama mengawal proyek yang tengah dilaksanakan PLN.
6. Kementerian Agraria menyediakan asistensi terkait proses pembebasan lahan dan perijinan.
7. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dan harmonisasi regulasi dan perijinan terkait penggunaan lahan di daerah konservasi.

Berbagai dukungan dan kerjasama antar lembaga Pemerintah tersebut diharapkan mengurangi hambatan yang selama ini menjadi kendala utama dari pembangunan proyek ketenaga listrikan, sehingga seluruh kegiatan yang tercakup dalam Program Pembangunan 35.000 MW dapat selesai tepat pada waktunya.

An obstacle to power plant construction along with its transmission infrastructure is the duration of the tender process. Great investment value means selection of the contractor cannot be done quickly because of regulations. On the other hand, PLN's efforts as the project owner to accelerate the project tender process are avoided by the Committing Officers. The reason for this concerns the potential for allegations of fraud.

Another inhibiting factor is a weak cooperation among relevant Government institutions, and sectoral ego, making permit progress takes longer time than the construction process.

All stakeholders, including Government agencies and the President and Vice President, are now working to overcome these two factors.

Before and after the 35,000 MW program was inaugurated, various Government agencies demonstrated their commitment to contributing to the program's successful implementation, as shown in the following series of activities:

1. The President and Vice President are committed to overseeing and monitoring the implementation of programs which have been unveiled, including coordinating steps to overcome the obstacles.
2. The Ministry of Energy and Mineral Resources issues decrees to facilitate implementation at the technical level of operations.
3. BKPM established and developed a 'one door' licensing system.
4. The State Attorney provides support to PLN so that all activities are within legal corridors.
5. The Ministry of Coordination of Political, Legal and Security Affairs, the Indonesian National Police, and the State Attorney are committed to jointly overseeing PLN project implementation.
6. The Ministry of Agriculture provides assistance relating to the process of land acquisition and licensing.
7. The Ministry of Environment coordinates and aligns regulations and permits for land use in conservation areas.

Various forms of support and cooperation among government agencies are expected to reduce barriers that have been the main obstacle to the construction of electricity power projects, so that all activities covered by the 35,000 MW Program can be completed on time.

6. Untuk memberikan waktu konstruksi yang cukup dan mencapai target COD tahun 2019, maka penunjukan pengembang harus selesai paling lambat kuartal IV tahun 2016 untuk pembangkit PLN dan kuartal IV tahun 2015 untuk pembangkit IPP.
7. Perseroan memerlukan langkah khusus pengamanan pasokan energi primer, terutama gas.

DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35.000 MW

Keberhasilan program 35.000 MW untuk 5 (lima) tahun ke depan membutuhkan dukungan Pemerintah dalam hal:

1. Mempermudah dan mempercepat persetujuan SLA dan PKLN.
2. Menyetujui *direct loan* dari bank pembangunan internasional ke PLN dengan jaminan pemerintah.
3. Melanjutkan proyek kelistrikan tahun jamak *(multi years)* melalui APBN.
4. Merencanakan tambahan modal ke PLN untuk menambah kapasitas investasi.
5. Menyetujui tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.
6. Memberikan dispensasi izin kehutanan (memberikan ijin bekerja di hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
7. Menetapkan Perhutani sebagai penerima kuasa dan pengguna hutan untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.
8. Menerbitkan ijin *jetty* secara otomatis apabila Pemda telah menerbitkan ijin penetapan lokasi.
9. Menyederhanakan perijinan terkait dengan kelistrikan.
10. Membentuk Tim Pengadaan Tanah khusus program 35.000 MW.

PROGRAM ANTISIPATIF OLEH PLN

Mengambil hikmah dari pelaksanaan tugas pembangunan ketenaga listrikan dalam FTP 1 dan FTP 2, PLN telah melakukan berbagai persiapan untuk mengawal keberhasilan implementasi Program 35.000 MW, meliputi:

1. Melakukan perubahan struktur organisasi dengan membentuk organisasi berbasis regional dimana Direktorat Regional bertanggung jawab secara *end to end* termasuk didalamnya pembangunan proyek PLTU dari Program 35.000 MW di regionalnya.
2. Melakukan program perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan dan perkembangan Program 35.000 MW.
3. Mengembangkan teknologi informasi berupa aplikasi *Project Management Office* (PMO) untuk memantau perkembangan realisasi pembangunan masing-masing proyek.
4. Menetapkan keberhasilan realisasi proyek program 35.000 MW sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang menjadi dasar penilaian kinerja organisasi dan individu.

6. To provide sufficient construction time and achieve the COD target in 2019, the appointment of the developer must be completed by no later than the fourth quarter of 2016 for PLN and the fourth quarter of 2015 for IPP power plants.
7. The Company requires special measures to secure primary energy supplies, particularly gas.

GOVERNMENT SUPPORT TO ACCELERATE 35,000 MW DEVELOPMENT PROGRAM

The success of the 35,000 MW program over five years requires Government support in terms of:

1. Simplifying and expediting the approval of SLA and PKLN.
2. Approving direct loans from international development banks to PLN with the Government as guarantor.
3. Continuing the multi-year electricity projects through the State Budget.
4. Planning for additional capital for PLN to increase investment capacity.
5. Approving an additional allocation of gas and LNG to PLN.
6. Providing dispensation for forestry permits (granting permission to work in forests with the Borrow and Use of Forest Areas License).
7. Establishing Perhutani as endorser and forest users to buy land and forests for forestation.
8. Issuing Jetty licenses automatically when the local government issues permits to determine the location.
9. Simplifying license associated with electricity.
10. Forming a special Land Procurement Team for the 35,000 MW program.

PLN ANTICIPATORY PROGRAMS

From the development of FTP 1 and FTP 2 program, PLN has learned lessons and made various preparations to oversee the successful implementation of the 35,000 MW Program, covering:

1. Restructuring the Organization Structure by establishing regional organizations where the Regional Directorate is responsible from end to end including the construction of a 35,000 MW power plant project in its region.
2. Conducting recruitment program of Human Resources (HR) according to the needs and development of the 35,000 MW program.
3. Developing a Project Management Office (PMO) information technology application form to monitor the progress of each project's construction.
4. Determining that the completion of the 35,000 MW program as a Key Performance Indicators (KPI), which becomes the basis of performance assessment for organizations and individuals.

PLTU BATANG AKHIRNYA MULAI DIBANGUN

BATANG STEAM POWER PLANT CONSTRUCTION HAS FINALLY COMMENCED

Peresmian pembangunan PLTU Batang 2x1000 MW, sekaligus peresmian program elektrifikasi desa-desa terpencil di seluruh Indonesia.

The official announcement of 2x1,000 MW Batang Steam Power Plant construction, along with the electrification program of remote villages throughout Indonesia.

Hari Jum'at 28 Agustus 2015 akhirnya pembangunan Proyek Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dengan kapasitas 2x1000 MW, yang sempat tertunda selama 4 tahun, resmi dimulai. PLTU terbesar di ASEAN yang termasuk ke dalam program FTP II tersebut selama ini terkendala pembebasan lahan. Kendala sama yang dihadapi oleh berbagai proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkit maupun jalur transmisi.

PLTU Batang dibangun dengan skema IPP, merupakan PLTU pertama yang dibangun pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP). Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Investor utama proyek adalah PT Bimasena Power Indonesia, joint venture antara Electric Power Development Co.Ltd (J-Power) dan PT Adaro Power (anak usaha AE dan Itochu Corporation/Itochu). Nilai investasi pada proyek ini adalah US$4 miliar (Rp40 triliun pada kurs Rp10.000/US$), dengan target penyelesaian adalah tahun 2018.

On Friday 28 August 2015, the construction of Batang steam power plant with a 2x1000 MW capacity, after a four-year delay, officially commenced. The delayed construction of the biggest Steam Power Plant in ASEAN, which was included in the FTP II program, was due to land acquisition issues. These problems were also faced in various sections of electricity infrastructure construction, for both power plants and transmission lines.

Batang steam power plant is developed under the Independent Power Producer (IPP) scheme and is the first Steam Power Plant constructed with the Public Private Partnership (KPS/PPP) scheme. This Steam Power Plant Central Java Steam Power Plant KPS Project is the first large scale KPS Project with more than USD 4 billion worth of investment, and the first KPS project implemented according to the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Num. 67 of 2005 on Cooperation Between the Government and Business Entities in Infrastructure Provision. The main investor in this project is PT Bimasena Power Indonesia, a joint venture between Electric Power Development Co. Ltd (J-Power) and PT Adaro Power (a subsidiary of AE and Itochu Corporation/Itochu). The total investment in this project is USD 4 billion (or IDR 40 trillion under an exchange rate of IDR 10,000/1 USD). This project is scheduled to be completed in 2018.

PLTU Batang menggunakan teknologi *Ultra Super Critical*, yang lebih ramah lingkungan. Ada dua keunggulan utama dari teknologi ini dibandingkan dengan tenknologi pembangkitan yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia. Pertama adalah konsumsi batubara yang lebih minim ketimbang teknologi terdahulu yakni teknologi *super critical*. Keunggulan kedua, adalah emisi atau limbah sisa pembakaran yang lebih sedikit, sehingga lebih aman dan lebih ramah lingkungan.

Kehadiran proyek ini diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah sekitar, mengingat pada masa konstruksi saja jumlah tenaga kerja langsung yang terserap mencapai 5.000 orang. Sementara di tingkat nasional, kehadiran proyek ini akan menghindarkan sistim Jawa-Bali dari risiko kekurangan pasokan daya listrik di tahun 2018.

Batang steam power plant uses Ultra Super Critical technology, which is a more environmentally friendly technology. It has two main advantages compared with the common technology used by power plants in Indonesia for years. The first advantage is reduced coal consumption compared with the old technology, while the second advantage is reduced emissions or combustion waste residues, which makes it safer and more environmentally friendly.

This project is certain to significantly impact the economic development of surrounding communities, because the number of direct labor employed reached 5,000 persons during the construction period alone, while nationwide this project will reduce the risk of electricity supply shortages in the Java-Bali system starting from 2018.

PEMBANGUNAN PLTU CILACAP EXPANSION -2 1.000 MW DIMULAI

CONSTRUCTION OF 1,000 MW CILACAP STEAM POWER PLANT EXPANSION-2 HAS COMMENCED

Salah satu proyek 35.000 Mega Watt (MW), yaitu PLTU Cilacap ekspansi, 1 x 1.000 MW yang diusung melalui konsep *Independent Power Producer* (IPP) dalam waktu dekat mulai dibangun.

Tanda awal dimulainya tahap pembangunan ini adalah ditandatanganinya kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) antara PT Sumber Segara Primadaya (S2P) selaku pengembang PLTU Cilacap dengan China Chengda Engineering Co. Ltd (Chengda) di Chengdu, Propinsi Sichuan, China (5/6). Penandatanganan dilakukan Direktur Utama S2P Muhammad Rasul dan President and CEO Chengda Liu Yiheng.

S2P sebelumnya telah mengoperasikan PLTU Cilacap 2 x 300 MW dan saat ini juga sedang mengembangkan PLTU Cilacap ekspansi phase 1 sebesar 1 x 660 MW yang akan selesai tahun ini.

Proyek PLTU Cilacap 1 x 1.000 MW ini adalah ekspansi *phase 2.* PLTU CIlacap 1x1000 MW ditargetkan beroperasi komersial pada 2018 untuk memperkuat pasokan listrik di sistem kelistrkan Jawa Bali, khususnya di Jawa bagian selatan. PLTU ini direncanakan menggunakan teknologi *Ultra Super Critical Boiler* berbahan bakar Batubara *Low Range* (4200 GAR) menggunakan *Fluidized Gas Desulphurizaton* (FGD) yang didesain untuk dapat beroperasi secara efisien dan ramah lingkungan.

The 1x1,000 MW Cilacap steam power plant expansion is one part of the 35,000 Megawatt (MW) Project implemented through the scheme of Independent Power Producer (IPP). The construction of this project will commence soon.

The initial indication of the project's impending commencement is the signing of the Engineering Procurement and Construction (EPC) contract by PT Sumber Segara Primadaya (S2P) as the Cilacap Steam Power Plant developer and China Chengda Engineering Co. Ltd (Chengda) in Chengdu, Sichuan Province, China on 5 June 2015. The contract was signed by the President Director of S2P, Muhammad Rasul and the President and CEO of Chengda, Liu Yiheng.

Previously, S2P has operated Cilacap steam power plant with a capacity of 2x300 MW, and now the Cilacap steam power plant expansion phase 1 with a capacity of 1x660 MW is being developed and is scheduled to be completed this year.

The 1x1,000 MW Cilacap steam power plant is an expansion of phase 2 and scheduled to be operating commercially in 2018. The aim of this project is strengthening the Java-Bali system's electricity supply, especially in Southern Java. This Steam Power Plant is designed with Ultra Super Critical Boiler technology, using Low Range Coal (4,200 GAR) and Fluidized Gas Desulphurizaton (FGD) as fuel. The design of this power plant is expected to ensure efficient and environmentally friendly operation.

PENANDATANGANAN PPA PEMBANGUNAN PROGRAM 35.000 MW

SIGNING OF POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) ON 35,000 MW CONSTRUCTION PROGRAM

Sebagai langkah awal realisasi Program 35.000 MW, pada tanggal 22 Desember 2015 PLN berhasil menyelesaikan penandatanganan kontrak-kontrak perjanjian jual beli listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) dan kontrak pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) dengan jumlah 17.336 MW. Total nilai investasi dari keseluruhan kontrak yang sudah ditandatangani tersebut senilai 20 miliar USD atau sekitar Rp280 triliun.

Dari 17.336 MW pembangkit yang telah ditandatangani, 4.291 MW menggunakan energi yang bersih dan terbarukan yaitu gas, air dan panas bumi. Selebihnya menggunakan batubara dengan jumlah kapasitas mencapai 13.045 MW. Pilihan ini merupakan optimasi dari ketersediaan energi primer yang ada di Indonesia serta memanfaatkan potensi energi primer di masing-masing lokasi. Adapun sebaran lokasi pembangkit yang sudah ditandatangani kontraknya mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Para kontraktor yang terpilih untuk mengerjakan proyek pembangkit 35.000 MW telah menjalani serangkaian proses pengadaan tender secara ketat dan transparan dan akan menggunakan teknologi pembangkit terbaru yang berasal dari negara Jepang, China, Amerika, dan Eropa.

Prestasi di awal pelaksanaan Program 35.000 MW tersebut membuat keyakinan PLN dan Pemerintah semakin besar, bahwa seluruh program yang dicanangkan akan terealisir sesuai waktu yang ditetapkan.

As an initial step of the 35,000 MW Program realization, on 22 December 2015 PLN completed the signing of the Power Purchase Agreement (PPA) and the contract for 35,000 MW power plant construction with a total capacity of 17,336 MW. The investment costs for all signed contracts reached USD 20 billion or approximately Rp280 trillion.

As many as 4,291 MW of the total 17,336 MW power will utilize clean and renewable energy sources, such as gas, water, and geothermal, whereas the remaining capacity, 13,045 MW, will be generated by coal. The decision to use these types of energy will optimize the availability of primary energy in Indonesia as well as utilize the potential for primary energy in each location. Power plant construction locations are distributed across almost all regions in Indonesia, such as Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua.

The contractors selected to conduct the 35,000 MW power plant construction project underwent a series of tightly controlled and transparent tender and procurement processes. They will utilize the latest in power plant technology from Japan, China, America, and Europe.

Achievements in the initial implementation of the 35,000 MW Program have convinced PLN and the Government that all programs will be completed on schedule.

Implementasi Peraturan & Perundangan, dengan tetap menjalin konsultasi dengan penegak hukum, PLN menerapkan aturan-aturan baru yang berlaku dalam pemilihan dan penunjukan kontraktor pembangunan proyek pembangkit, termasuk memutuskan penunjukan langsung pada proyek-proyek tertentu yang memenuhi syarat.

Implementation of Rules and Regulations, by consulting with law enforcement, PLN implements new rules for the selection and appointment of contractor development projects, including deciding the appointment directly for specific eligible projects.

PROGRESS PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

Progress Pembangkit 7.000 MW

Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2015 progress pembangkit 7.000 MW telah berhasil dibangun dan beroperasi sebesar 1.988,7 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 980,4 MW dan pembangkit IPP sebesar 1.008,3 MW, sedangkan sisanya masih dalam proses konstruksi dan *commissioning*. Adapun pembangkit program 7.000 MW yang telah beroperasi adalah sebagai berikut:

PROGRESS OF POWER PLANT CONSTRUCTION PROGRAM

Progress of the 7,000 MW Program

The overall progress of 7,000 MW power plant program until the end of 2015 was 1,988.7 MW built completely and is now operating, consisting of 980.4 MW from PLN's power plants and 1,008.3 MW from IPP's power plants, with the remainder still in the process of construction and commissioning. The 7,000 MW power plant program that has been operating now is as follows:

No.	Jenis Pembangkit	Lokasi Location	Milik Ownership	Kapasitas Capacity	Type of Power Plant
1.	PLTM	Lokomboro 6, 7	PLN	0,4	Micro Hydro Power Plant
2.	PLTMG	Pesanggaran	PLN	199,7	Gas Engine Power Plant
3.	PLTU	Pangkalan Susu #1,2 (FTP1)	PLN	440	Steam Power Plant
4.	PLTA	Orya (Genyem)	PLN	20	Hydro Power Plant
5.	PLTU	Ende (FTP1)	PLN	7	Steam Power Plant
6.	PLTU	Belitung Baru (FTP1)	PLN	16,5	Steam Power Plant
7.	PLTMG	Arun *Peaker*	PLN	184,9	Gas Engine Power Plant
8.	PLTU	Air Anyer	PLN	30	Steam Power Plant
9.	PLTM	Prafi	PLN	2,5	Micro Hydro Power Plant
10.	PLTG	Kaltim (Peaking)	PLN	79,4	Gas Engine Power Plant
	Total Pembangkit Milik PLN			**980,4**	**Total of Power Plants Owned by PLN**
11.	PLTM	Siteba	IPP	7,5	Micro Hydro Power Plant
12.	PLTM	Segara 1	IPP	7	Micro Hydro Power Plant
13.	PLTU	Keban Agung	IPP	124,9	Steam Power Plant
14.	PLTP	Kamojang 5 (FTP2)	IPP	30	Geothermal Power Plant
15.	PLTU	Celukan Bawang	IPP	426	Steam Power Plant
16.	PLTU	Bau-Bau	IPP	14	Steam Power Plant
17.	PLTM	Niagara	IPP	1,7	Micro Hydro Power Plant
18.	PLTU	Banjarsari	IPP	270	Steam Power Plant
19.	PLTG	Senipah	IPP	112	Gas Engine Power Plant
20.	PLTMG	Musi Rawas	IPP	8,6	Gas Engine Power Plant
21.	PLTS	Kupang	IPP	5	Solar Cell Power Plant
22.	PLTSA	PLTSA Sumber Organik	IPP	1,6	Waste Power Plant
	Total Pembangkit Milik IPP			**1.008,3**	**Total of IPP Power Plants**
	Total			**1.989**	**Total**

Progress Pembangunan Pembangkit 35.000 MW

Sampai dengan akhir tahun 2015 untuk program 35.000 MW, *progress*nya adalah sebagai berikut:

a. Sebesar 64 MW telah beroperasi yang terdiri dari 58 MW pembangkit milik PLN dan 6 MW pembangkit milik IPP dengan rincian sebagai berikut:

Construction Progress of 35,000 MW Program

Until the end of 2015, the 35,000 MW power plant program has progressed significantly, with details as follows:

a. A total of 64 MW consisting of 58 MW from PLN's power plants and 6 MW from IPP's power plants, has been in operation, with details as follows:

Jenis Pembangkit	Lokasi Location	Milik Ownership	Kapasitas (MW) Capacity	Type of Power Plant
PLTD	Pulau Terluar & Daerah Perbatasan Outermost Islands & Borderline Areas	PLN	58	Diesel Power Plant
Total Pembangkit Milik PLN			**58**	**Total of Power Plant PLN Owned**
PLTM	Tombolo Pao	IPP	3	Micro Hydro Power Plant
PLTM	Taludaa	IPP	3	Micro Hydro Power Plant
Total Pembangkit Milik IPP			6	Total IPP Power Plants
Total			**64**	**Total**

b. Sebesar 2.883 MW telah menandatangani kontrak EPC dengan rincian sebagai berikut:

b. A total of 2,883 MW has passed the signing of the EPC contract, with the details as follows:

Jenis Pembangkit	Lokasi Location	Milik Ownership	Kapasitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plant
PLTA	Upper Cisokan Pump Storage (FTP2)	PLN	1.040	Hydro Power Plant
PLTU	Lontar Exp	PLN	315	Steam Power Plant
PLTGU	Jawa-2 (Tj Priok)	PLN	800	Combined Cycle Power Plant
PLTA	Jatigede (FTP2)	PLN	110	Hydro Power Plant
PLTGU	Grati	PLN	300	Combined Cycle Power Plant
PLTGU	Grati	PLN	150	Combined Cycle Power Plant
PLTG/MG	Gorontalo *Peaker*	PLN	100	Gas Turbine Power Plant/Gas Engine Power Plant
PLTD	PLTD Terluar dan Daerah Perbatasan	PLN	68	Diesel Power Plant
Total			**2.883**	**Total**

c. Sebesar 14.334 MW telah menandatangani PPA dengan rincian sebagai berikut:

c. A total of 14,334 MW has passed the signing of the PPA, with the following details:

Jenis Pembangkit	Lokasi Location	Milik Ownership	Kapasitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plants
PLTA	Semangka	IPP	56	Hydro Power Plant
PLTP	Meulaboh	IPP	70	Geothermal Power Plant
PLTP	Tangkuban Perahu I (FTP2)	IPP	55	Geothermal Power Plant
PLTU Mulut Tambang	Sumatera Selatan-8 South Sumatra-8	IPP	1.200	Mine Mouth Steam Power Plant
PLTB	Samas	IPP	50	Wind Power Plant
PLTP	Rantau Dadap (FTP2)	IPP	110	Geothermal Power Plant
PLTP	Patuha (FTP2)	IPP	110	Geothermal Power Plant
PLTU	Nias	IPP	21	Steam Power Plant
PLTU	Nabire - Kalibobo	IPP	14	Steam Power Plant

Jenis Pembangkit	Lokasi Location	Milik Ownership	Kapasitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plants
PLTU	Klalin	IPP	30	Steam Power Plant
PLTU	Kendari 3	IPP	100	Steam Power Plant
PLTU	Kaltim (FTP2)	IPP	100	Steam Power Plant
PLTU	Kaltim (FTP2)	IPP	100	Steam Power Plant
PLTU	Kalselteng 1	IPP	100	Steam Power Plant
PLTU	Kalsel (FTP2)	IPP	100	Steam Power Plant
PLTU	Kalsel (FTP2)	IPP	100	Steam Power Plant
PLTU	Kalbar-1	IPP	200	Steam Power Plant
PLTU	Jeneponto 2	IPP	125	Steam Power Plant
PLTU	Jeneponto 2	IPP	125	Steam Power Plant
PLTU	Jayapura	IPP	30	Steam Power Plant
PLTU	Jawa-8 (Exp Cilacap)	IPP	1.000	Steam Power Plant
PLTU	Jawa-7	IPP	2.000	Steam Power Plant
PLTU	Jawa-4 (Ekspansi Tj Jati B)	IPP	2.000	Steam Power Plant
PLTU	Jawa-1 (FTP2) (Cirebon Ekspansi)	IPP	1.000	Steam Power Plant
PLTU	Jawa Tengah	IPP	950	Steam Power Plant
PLTU	Jawa Tengah	IPP	950	Steam Power Plant
PLTP	Jaboi (FTP2)	IPP	5	Geothermal Power Plant
PLTA	Hasang (FTP2)	IPP	40	Hydro Power Plants
PLTU	Gorontalo Energi	IPP	14	Steam Power Plant
PLTP	Dieng (FTP2)	IPP	55	Geothermal Power Plant
PLTU	Biak	IPP	14	Steam Power Plant
PLTU	Bengkulu	IPP	200	Steam Power Plant
PLTG/MG	Bangka *Peaker*	IPP	100	Gas Turbine Power Plant/Gas Engine Power Plant
PLTP	Atadei (FTP 2)	IPP	5	Geothermal Power Plant
PLTU	Andai	IPP	14	Steam Power Plant
PLTM	Tersebar	IPP	349	Micro Hydro Power Plant
PLTA	Malea	IPP	90	Hydro Power Plant
PLTB	Sidrap	IPP	70	Wind Power Plant
PLTS	Gorontalo	IPP	2	Solar Cell Power Plant
PLTA	Batang Toru	IPP	510	Hydro Power Plant
PLTU	Sumsel-1 MT	IPP	600	Steam Power Plant
PLTU	Banyu Asin	IPP	250	Steam Power Plant
PLTU	Jawa 3	IPP	1.320	Steam Power Plant
Total			**14.334**	**Total**

d. Sebesar 120 MW telah menandatangani kontrak sewa dengan rincian sebagai berikut:

d. A total of 120 MW has passed the signing of the lease contract, with the following details:

Jenis Pembangkit	Lokasi Location	Milik Ownership	Kapasitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plants
PLTG	Marine Vesel power plant -Amurang	IPP	120	Gas Turbine Power Plant

Total capaian proyek pembangkit 35.000 MW yang sudah kontrak/ PPA adalah sebesar 17.336 MW.

From the 35,000 MW total, 17,336 MW has passed the signing of the contract/PPA.

KEBIJAKAN PEMBANGKIT ENERGI BARU TERBARUKAN

Seiring dengan misi PLN untuk menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah, maka PLN merencanakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang meliputi pengembangan panas bumi, pembangkit tenaga air, pembangkit tenaga bayu, serta EBT skala kecil tersebar berupa PLTS, biomassa, *biofuel*, biogas dan gratifikasi batubara (energi baru).

Kebijakan perusahaan dalam pengembangan EBT didukung oleh Kebijakan Pemerintah yang tercermin dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Batubara dan Gas, yang sudah terangkum dalam program FTP-2, seperti yang telah disampaikan pada tabel progress FTP-2 dan jadwal COD dari sebesar 17.458 MW pembangkit FTP-2 porsi pembangkit energi terbarukan adalah sebesar 3.206 MW yang terdiri atas PLTP sebesar 2.413 MW, PLTA sebesar 793 MW.

Peraturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2 Tahun 2010 yang selanjutnya telah dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2012, Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2014. PLTP dan PLTA dapat masuk ke sistem tenaga listrik kapan saja mereka siap, dengan tetap memperhatikan kebutuhan listrik dan adanya rencana pembangkit yang lain.

Pemerintah juga mendukung pengembangan EBT dengan pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Untuk tenaga air, kebijakan ini tidak membatasi PLN untuk merencanakan sebuah proyek PLTA tanpa menganut prinsip *demand driven* demi mencapai suatu tujuan khusus tertentu, walaupun hal ini hanya dilakukan secara sangat terbatas dan selektif. Dalam konteks ini PLN merencanakan pembangunan PLTA Baliem berkapasitas 50 MW untuk

NEW RENEWABLE ENERGY POLICY

According to PLN's mission, which is conducting environmentally friendly business activities, the Government Regulation Num. 79 of 2014 on the National Energy Policy and the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 2 of 2006 on Medium-Scale Power Generation using Renewable Energy, PLN plans to develop new renewable energy (EBT) including geothermal, hydro, and wind power plants, as well as distribute small-scale renewable energy, such as solar, biomass, biofuel, biogas, and coal gasification (new energy).

The Company policy on renewable energy development is supported by the Government's policies, as embodied in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Num. 4 of 2010 regarding Assignment to PT Perusahaan Listrik Negara (Pesero) to Accelerate Development of Power Plant Using Renewable Energy, Coal, and Gas, as summarized in FTP-2 program and explained by the FTP-2 progress table and the COD table. It states that the portion of new renewable energy in the 17,458 MW FTP-2 Power Plant is as great as 3,206 MW, and comprises 2,413 MW from Geothermal Power Plants and 793 MW from Hydro Power Plants.

This regulation is detailed by the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 2 of 2010, which was subsequently revoked by the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 15 of 2010 and amended by the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 1 of 2012, the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 21 of 2013 and the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 32 of 2014. The Geothermal and Hydro Power Plants can be included into the electricity system whenever these power plants are ready, with consideration of electricity needs and development of other power plants.

The Government also supports renewable energy development through the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 17 of 2013 on Electricity Purchase by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) from Photovoltaic Solar Power Plants, the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 12 of 2014 on Electricity Purchase from Hydro Power Plants by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as amended by the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 22 of 2014, and the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Num. 27 of 2014 on Electricity Purchase from Biomass Power Plants and Biogas Power Plants by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

In regards to hydro power, this policy does not limit PLN to plan a Hydro Power Plant without following the demand-driven principle for the sake of achieving certain objectives, even though the application may be highly specific and selective. Regarding this matter, PLN plans to construct the Baliem Hydro Power Plant with a 50 MW capacity to supply

melistriki 7 kabupaten baru di dataran tinggi Pegunungan Tengah yang sama sekali belum memiliki listrik. Proyek ini diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk pengolahan sumber daya alam di Papua.

Khusus mengenai PLTS, PLN mempunyai kebijakan untuk mengembangkan *centralized Photo Voltaic* (PV) untuk melistriki banyak komunitas terpencil yang jauh dari *grid* pada daerah tertinggal, pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga dan pulau-pulau terluar lainnya. Hal ini didorong oleh semangat PLN untuk memberi akses ke tenaga listrik yang lebih cepat kepada masyarakat di daerah terpencil. Lokasi *centralized* PV/PLTS komunal dipilih setelah mempertimbangkan faktor tekno-ekonomi seperti biaya transportasi BBM ke lokasi dan mengoperasikan PV secara *hybrid* dengan PLTD yang telah ada sehinggga mengurangi pemakaian BBM. Selain itu PLN juga memperhatikan, alternatif sumber energi primer/EBT yang tersedia setempat dan tingkat pelayanan yang akan disediakan pada lokasi tersebut.

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT ENERGI BARU TERBARUKAN

PLN telah menyusun rencana pengembangan EBT sebagai berikut:

1. PLTA: PLN akan mengembangkan sebagian besar dari potensi tenaga air yang ada di Indonesia sebagai proyek PLN.
2. PLTP: PLN akan mengembangkan proyek PLTP, terutama di Sumatera, Jawa dan beberapa di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.
3. PLTMH: PLN mendorong pengembangan PLTMH terutama oleh swasta atau masyarakat untuk melistriki kebutuhan setempat dan juga untuk disalurkan ke grid atau sistem kelistrikan PLN.
4. PLTB: karena potensi energi angin di Indonesia sangat terbatas, maka pengembangannya akan terbatas di daerah yang memiliki potensi.
5. Biomassa: PLN bermaksud untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomassa dengan menjalin kerjasama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten untuk merintis industri biomassa.
6. Energi kelautan: teknologi dan keekonomiannya masih belum diketahui, PLN akan melakukan uji coba skala kecil sebagai proyek penelitian dan pengembangan.
7. Biofuel: tergantung kepada kesiapan pasar biofuel, PLN siap untuk memanfaatkan biofuel apabila tersedia.
8. PLTS: PLN akan mengembangkan program PLTS di 1.000 lokasi/pulau terutama di wilayah yang terluar maupun yang terisolasi untuk mempercepat rasio elektrifikasi.
9. CBM *(Coal Bed Methane): Reserve* gas CBM diperkirakan lebih besar daripada *reserve* gas konvensional, terutama di South Sumatera Basin (183 TCF) dan Kutai Basin. PLN berkeinginan untuk memanfaatkan gas non-konvensional ini apabila telah tersedia dalam jumlah yang cukup.

electricity in 7 new districts in Pegunungan Tengah plateau where electricity has never been available. This project is expected to stimulate economic activity in the region as it utilizes Papua's own natural resources.

Specifically for Solar Power Plants, PLN has a policy to develop a centralized Photovoltaic (PV) to supply electricity in many remote communities in the outermost islands bordering neighbouring countries, which are far from the grid. This policy is supported by PLN's enthusiasm to provide electricity access for remote communities. The location of communal centralized PV/Solar Power Plant is selected after considering a techno-economy factor such as fuel transportation cost to the location as well as PV operation using hybrid methods and existing Diesel Power Plants, so fuel usage can be reduced. In addition to this, PLN also considers some primary energy source alternatives (Renewable Energy) which are available locally, along with the level of available services in each location.

NEW RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENTS

PLN has compiled an renewable energy development plan, as follows:

1. Hydro Power Plant: PLN will develop most of the hydropower potential in Indonesia as a PLN project.
2. Geothermal Power Plant: PLN will develop Geothermal Power Plants, especially in Sumatra, Java, and some other areas in Sulawesi, Nusa Tenggara, and Maluku.
3. Micro Hydro Power Plant: PLN will boost the development of Micro Hydro Power Plants, especially those conducted by private parties or local communities to supply electricity to local communities. PLN will also distribute them to the grid or the PLN electricity system.
4. Wind Power Plant: Wind power potential in Indonesia is very limited, so its development will be limited to areas that actually have potential.
5. Biomass: PLN intends to develop Biomass Power Plants by entering into a partnership with some regency governments to pioneer a biomass industry.
6. Marine Energy: The technology and economic conditions of marine energy is still unknown, so PLN will conduct small-scale trials as a research and development project.
7. Biofuel: PLN will utilize biofuel whenever it is available on the market, so this depends on the readiness of the market.
8. Solar Power Plant: PLN will develop Solar Power Plants in 1,000 locations or islands, especially in outermost and isolated areas to accelerate the increase of the electrification ratio.
9. CBM (Coal Bed Methane): PLN estimates that CBM gas reserves will be higher than conventional gas reserves, especially in the South Sumatra Basin (183 TCF) and Kutai Basin. PLN wants to utilize this non-conventional gas when there is sufficient supply.

10. *Coal slurry*: merupakan batubara yang dicairkan melalui proses *upgrading* sehingga lebih ramah lingkungan serta lebih mudah ditransportasikan dan disimpan dalam tangki. *Coal slurry* digunakan sebagai pembangkit skala kecil pengganti PLTD untuk beban dasar. PLN sudah membangun pembangkit *pilot project* dengan kapasitas 500 kW di Karawang, Jawa Barat.
11. Nuklir: Program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan Pemerintah, karena pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan *profitability*, namun juga aspek politik, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

10. Coal slurry is coal liquefied through an upgrading process, resulting in more environmentally friendly coal, which is easily transported and stored in tanks. Coal slurry is used in small-scale power plants which substitute a Diesel Fuel Power Plant's base load. PLN has built a pilot project power plant with 500kW capacity in Karawang, West Java.
11. Nuclear: Nuclear Power Plant Construction program can only be decided by the Government, because the decision to use nuclear power is not merely based on economic and profit considerations, but also on political aspects, social acceptance, culture, climate change and environmental protection.

PEMELIHARAAN PEMBANGKIT

Untuk memastikan keandalan pasokan daya listrik dari seluruh unit pembangkit yang dikelolanya, maka PLN menjadwalkan pemeliharaan pembangkit di masing-masing Unit. Jadwal pemeliharaan tersebut dibuat dengan memperhatikan masa pakai dan kondisi masing-masing unit sesuai rekomendasi pabrikan, meliputi unit boiler, generator dan sebagainya.

Jadwal pemeliharaan dituangkan dalam Rencana Pemeliharaan Pembangkit setiap periode operasi, dengan tetap memperhatikan kontinuitas pasokan listrik di setiap Unit. Kondisi fisik unit pembangkit, unjuk kerja dan proyeksi beban puncak serta *availability factor* dari jaringan distribusi menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan pemeliharaan.

Pada tahun 2015, PLN telah melakukan pemeliharaan pembangkit sejumlah 721 unit pembangkit dengan total kapasitas 19.541 MW. Rincian pemeliharaan pembangkit terlampir.

POWER PLANT MAINTENANCE

In order to ensure the reliability of the electricity supply of all power plant units under its management, PLN schedules a maintenance program for all power plants in each unit. The maintenance schedule is formulated by considering each unit's utilization period and condition, based on the manufacturers' recommendation, and consists of the boiler unit, power plant unit, etc.

The maintenance schedule is included in a Power Plant Maintenance Plan which is formulated for each operation period, and always considers the continuity of each unit's electricity supply. The physical condition of the power plant unit, work performance and peak load projection, as well as the availability of the distribution network, constitute the main considerations in each maintenance program.

In 2015, PLN conducted maintenance on its 721 power plant units with a total capacity of 19,541 MW. Attached are the details of the plant maintenance.

Keterangan	Jumlah Fisik Total Units		Jumlah Kapasitas Total Capacity		Description
	Target (Unit)	Realisasi Realization (Unit)	Target (MW)	Realisasi Realization (MW)	
Jawa Bali	28	24	9.719	8.071	Java Bali
Sumatera	78	56	2.079	1.472	Sumatra
Indonesia Timur	651	506	962	516	East Indonesia
PLN Batam	3	3	243	162	PLN Batam
PLN Tarakan		-	5	-	PLN Tarakan
IP	86	77	6.254	4.826	IP
PJB	62	55	5.175	4.494	PJB
Jumlah	**909**	**721**	**24.437**	**19.541**	**Total**

Realisasi pemeliharaan tidak sesuai terget dikarenakan, terutama disebabkan oleh adanya penundaan jadwal pemeliharaan untuk menghindari pemadaman akibat adanya defisit pasokan listrik.

The actual maintenance did not achieve the target mainly due to postponement of maintenance schedule in order to avoid blackouts because of deficits in power supply.

PENGEMBANGAN SISTIM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

DEVELOPMENT OF TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM

Membangun sistim transmisi dan distribusi dengan tingkat keandalan optimal untuk mendukung penyaluran daya listrik dari program 35.000 MW maupun daya listrik eksisting dan yang akan datang untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Nusantara.

Building the transmission and distribution system with optimum reliability level to support the electrical power distribution program of 35.000 MW, as well as the existing and future power load to support equitable development in all areas of the archipelago.

PENGEMBANGAN SISTIM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Program pembangunan Pembangkit selain terdiri atas pembangunan 402 proyek pembangkit, juga melibatkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, dengan area tersebar sesuai sebaran pembangunan pembangkit. Jumlah proyek untuk transmisi adalah 732 proyek dengan panjang transmisi adalah 46.597 kms dan Gardu Induk dengan kapasitas mencapai 108.789 MVA.

Sebagaimana halnya dengan pembangunan pembangkit, sebaran proyek pembangunan transmisi dan gardu induk untuk tahun 2015-2019 juga telah disesuaikan dengan pembagian Wilayah Regional, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

DEVELOPMENT OF TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM

Besides the development of 402 power plants, the plant development program will involve the development of the transmission and distribution network within the area based on the spread of plant development. There are 732 transmission projects with a transmission length of 46,597 kilometres, and substation capacity up to 108.789 MVA.

In accordance with the plant development, the spread of development projects for the transmission system and substations for the years 2015–2019 have been adjusted based on the distribution of the Regional Areas, with the following details:

Wilayah	Transmisi Transmission		Jumlah Gardu Induk (GI) Total of Substation		Region
	Panjang (ribu kms) Length (thousand kilometers)	Unit / Proyek Unit/Project	Kapasitas (MVA) Capacity (MVA)	Unit /Proyek Unit/Project	
Sumatera	19,3	210	32.406	398	Sumatra
Jawa-Bali	11,2	349	66.083	672	Java-Bali
Kalimantan	7,9	68	3.910	115	Kalimantan
Sulawesi & NTT	7,2	90	5.620	165	Sulawesi & East Nusa Tenggara
Maluku & Papua	1,0	15	770	25	Maluku & Papua

Berbeda dengan pembangunan unit pembangkit yang lebih banyak melibatkan peran swasta, pada pembangunan sistem transmisi dan gardu induk mayoritas dilakukan oleh PLN. Seluruh proyek pembangunan sistim transmisi dan distribusi tersebut telah tercakup dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 2015-2019 yang tengah dijalankan oleh PLN. Skema pembangunan dan aspek teknis lainnya juga telah dituangkan dalam RUPTL tersebut. Penjelasan umum mengenai program pembangunan sistem transmisi dan distribusi adalah sebagaimana uraian berikut.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSMISI

Pengembangan saluran transmisi dan gardu induk dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien dengan memenuhi kriteria keandalan tertentu. Disamping itu pengembangan saluran transmisi merupakan suatu usaha untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran, perbaikan tegangan pelayanan dan fleksibilitas operasi.

Pengembangan sistem transmisi dilaksanakan oleh (i) PLN, (ii) pengembang IPP (terkait pembangkit milik IPP yang sesuai dengan kontrak PPA) dan (iii) pihak swasta dengan skema bisnis tertentu.

Adapun program pengembangan sistem transmisi sebagai berikut:

Region Sumatera

Pengembangan transmisi di Sumatera akan membentuk transmisi *backbone* 500 kV yang menyatukan sistem interkoneksi Sumatera pada koridor timur, dimana pusat-pusat pembangkit skala besar dan pusat-pusat beban yang besar di Sumatera akan tersambung ke sistem transmisi 500 kV. Transmisi ini juga akan mentransfer tenaga listrik

Contrary to the development of power plant units, which involves more private sector role, the transmission and substation development is generally carried out by PLN. All development of transmission and distribution system has been included in the 2015–2019 Long Term Plan (Rencana Jangka Panjang—RJP) which will be executed by PLN. The development scheme and other technical aspects have also been stated in Electricity Power Supply Business Plan (RUTPL). The general information about the development program of the transmission and distribution system is as follows.

TRANSMISSION SYSTEM DEVELOPMENT PROGRAM

The development of the transmission channel and substations is intended to achieve an efficient balance between upstream plant capacity, and power demand downstream, by achieving particular reliability criteria. In addition to this, the transmission channel development is an effort to prevent bottleneck distribution, and enhance voltage maintenance and operational flexibility.

The development of the transmission system is performed by (i) PLN, (ii) IPP developers (related to IPP-owned plants based on PPA contracts) and (iii) private sector with a specific business scheme.

The transmission system development program is as follows:

Sumatra Region

The transmission development in Sumatra will form the 500 kV backbone transmission which will unify Sumatra's interconnection system in the east corridor, where the centers of the big-scale plants in Sumatra will be connected to the 500 kV transmission system. This transmission will transfer electricity from the power plants in the regions with

dari pembangkit listrik di daerah yang kaya sumber energi primer murah (Sumatera bagian selatan dan Riau) ke daerah yang kurang memiliki sumber energi primer murah (Sumatera bagian utara). Selain itu, transmisi 500 kV juga akan bertindak sebagai *feeder* pemasok listrik dari PLTU mulut tambang ke stasiun konverter transmisi HVDC yang akan menghubungkan pulau Sumatera dan pulau Jawa. Selain interkoneksi Sistem Sumatera dengan Sistem Jawa - Bali, direncanakan juga akan di Interkoneksikan Sistem Sumatera ke Sistem Peninsular (Malaysia), melalui stasiun konverter transmisi HVDC di Riau.

Rencana pengembangan sistem transmisi dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015 - 2024 akan banyak mengubah topologi jaringan dengan terwujudnya sistem interkoneksi 275 kV dan 500 kV di Sumatera. Pengembangan juga banyak dilakukan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan listrik dalam bentuk penambahan kapasitas trafo. Pengembangan untuk meningkatkan keandalan dan *debottlenecking* yang juga terdapat di beberapa sistem, antara lain rencana pembangunan sirkit kedua dan *rekonductoring* beberapa ruas transmisi di Sistem Sumbagut dan Sumbagsel.

Rencana interkoneksi *backbone* 275 kV di Sumatera diprogramkan untuk terlaksana mulai tahun 2015 dan selesai seluruhnya pada tahun 2017. Selain itu terdapat pembangunan beberapa gardu induk dan transmisi 150 kV untuk mengambil alih beban dari pembangkit diesel ke sistem interkoneksi (dedieselisasi). Dengan beroperasinya seluruh *Backbone* SUTET 275 kV Sumatera di tahun 2017, maka Sistem Sumbagut dan Sistem Sumbagselteng sudah terinterkoneksi sepenuhnya. Terinterkoneksinya Sistem Sumbagut dan Sumbagselteng maka konsumsi BBM di Sistem Sumbagut dapat berkurang signifikan.

rich primary energy sources (Southern Sumatra to Riau) into regions with poor primary energy sources (Northern Sumatra). In addition to this, 500 kV transmission also functions as a power supply feeder from Steam Power Plant at the mine mouth to HVDC transmission converter station, which will connect Sumatra and Java. As well as the interconnection between the Sumatra System and the Java-Bali System, the Sumatra System and Malaysia (Peninsular) system will be planned to connect through the HVDC transmission converter in Riau.

The transmission system development in the 2015–2024 Electricity Power Supply Business Plan (RUTPL) will change most of the network topology in Sumatra with the implementation of the 275 kV and 500 kV interconnection system. To manage the rise in demand for electricity, most of the developments will be performed in order to increase demand for power, by increasing transformer capacity. Developments will be made to improve reliability and to reduce the bottlenecks that exist in some systems, such as the second-circuit development plan and the reconductoring of the Southern and the Northern Sumatra transmission space systems.

The 275 kV backbone interconnection plan in Sumatra is planned to commence in 2015 and be completed by 2017. In addition, certain substation developments and 150 kV transmission will be made to take over the load of the diesel plant in the interconnection system. As the 275kV Extra High Voltage Electricity Network (SUTET) in Sumatra will be operational in 2017, the Northern Sumatra System and Southern Sumatra System must be fully interconnected. The interconnection between the Northern and Southern Systems will reduce fuel consumption in Northern Sumatra.

PEMBANGUNAN TRANSMISI BACKBONE 500 KV REGION SUMATERA DIMULAI

DEVELOPMENT OF 500 KV BACKBONE TRANSMISSION IN SUMATRA REGION BEGINS

Tanggal 23 Oktober 2015 kontrak perjanjian proyek pembangunan jaringan transmisi 500 kV di Pulau telah ditanda-tangani oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Amir Rosidin bersama Direktur Waskita Karya Desi Aryani di PLN Kantor Pusat. Penandatanganan ini merupakan salah satu wujud nyata sinergi antar BUMN dalam membangun proyek Infrastruktur.

Pembangunan transmisi listrik 500 kV Sumatera merupakan proyek fundamental karena merupakan proyek pertama transmisi 500 kV di pulau Sumatera. Fungsi transmisi 500 kV ini seperti jalan tol. Ini adalah jalan tol bagi transmisi tenaga listrik yang sangat besar. Kontrak paket 1 dan 2 merupakan 30 persen dari jalan tol listrik yang akan dibangun, mulai dari Muara Enim yang nanti akan berakhir di Langsa, dengan total sekitar 1.400 kilometer.

Pengerjaan pembangunan transmisi listrik 395 kilometer di Sumatera oleh Waskita Karya terdiri dari dua paket. Paket 1 pembangunan transmisi 500 kV dengan tower 4 sirkit dari New Aur Duri (Jambi) ke Peranap (Riau) dengan panjang transmisi 235 kilometer dan masa pembangunan selama 3 tahun dengan nilai kontrak sebesar 3,88 triliun rupiah. Kemudian, paket 2, pembangunan transmisi 500 kV dengan tower 4 sirkit dari Peranap (Riau) ke Perawang (Riau) sepanjang 160 kilometer dengan masa pembangunan selama 3 tahun dan nilai kontrak paket 2 ini sebesar 2,83 triliun rupiah.

Transmisi 500 kV Sumatera yang dibangun tersebut merupakan "Back Bone" atau penyangga utama penyaluran listrik dari pembangkit-pembangkit listrik yang berada di wilayah Sumatera bagian selatan ke Sumatera bagian utara. Pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas penyaluran listrik di sistem jaringan listrik seluruh Sumatera.

Untuk jangka panjang, transmisi 500 kV Sumatera juga disiapkan sebagai lanjutan dari interkoneksi kelistrikan Jawa – Sumatera yang dihubungkan dengan kabel listrik bawah laut 500 kV yang saat ini masih dalam proses pengadaan. Lebih lanjut lagi, transmisi 500 kV Sumatera pun disiapkan sebagai bagian dari rencana transfer energi listrik dari dan ke Malaysia.

On 23 October 2015, the contract of 500kV transmission network development in Sumatra was signed by the Sumatra Regional Business Director of PLN, Amir Rosidin, with Waskita Karya Director, Desi Aryani, at PLN Head Office. The agreement forms a synergy between the State-Owned Enterprises in establishing infrastructure projects.

The development of the 500 kV electrical transmission in Sumatra is a fundamental project, as this will be the first 500 kV transmission development project on the island. The function of the 500 kV transmission is similar to a highway. The Contract of Package 1 and 2 is as big as 30 per cent of the electrical toll road which will be constructed, from Muara Enim to Langsa, with a total length of 1,400 kilometers.

The development of the 395-kilometer power transmission in Sumatra by Waskita Karya will consist of two packages. Package 1 is a transmission development of 500 kV with a 4-circuit tower from New Aur Duri (Jambi) to Peranap (Riau), totaling 235 kilometers. The estimated development time is three years with a contract value of Rp3.88 trillion. Package 2 is a transmission development of 500 kV with a 4-circuit tower from Peranap (Riau) to Perawang (Riau), totaling 160 kilometers. The estimated development time is three years and the contract value is Rp2.83 trillion.

The 500 kV transmission in Sumatra will be constructed as the 'Backbone', or the main support for electrical power distribution from other power plants in Southern and Northern Sumatra. The development will enable the stability of power distribution across the overall electrical power network in Sumatra.

In the long term, the 500 kV transmission in Sumatra is also prepared to be an extension from the Java-Sumatra power interconnection with a 500 kV underwater power cable which is currently in the installation stage. Furthermore, the Sumatra 500kV transmission is also prepared to be part of the two-way power transfer from and to Malaysia.

Region Jawa Bali

Pengembangan transmisi 500 kV di Jawa dimaksudkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit-pembangkit baru maupun ekspansi skala besar serta untuk menjaga kriteria sekuriti N-1, baik statik maupun dinamik. Pengembangan transmisi 150 kV dimaksudkan untuk menjaga kriteria sekuriti N-1 dan sebagai transmisi yang terkait dengan gardu induk 150 kV baru.

Memperhatikan pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang sering terlambat karena masalah perizinan, *rate of way* dan sosial, serta kebutuhan tambahan daya yang mendesak, maka PLN perlu melakukan usaha meningkatkan kapasitas transmisi dalam waktu dekat. Pembangunan SUTET dengan menggunakan rute baru akan memerlukan waktu yang lama sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah rekonduktoring beberapa ruas transmisi 500 kV dan 150 kV.

Region Indonesia Timur

Pengembangan transmisi dan gardu induk di wilayah Indonesia Timur dibangun untuk menghubungkan sistem-sistem yang selama ini masih *isolated* yang selama ini dipasok dari PLTD (dedieselisasi) membentuk *backbone* transmisi untuk menyalurkan energi dalam jumlah besar ke pusat beban yang lokasinya sangat berjauhan, mengatasi *bottleneck* penyaluran serta untuk menghubungkan antar sistem menjadi sistem yang lebih besar.

Perencanaan Sistem Transmisi dan Gardu Induk

Pada rencana jangka panjang perusahaan, pengembangan sistem penyaluran dibagi kedalam beberapa kategori, berupa pengembangan sistem transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV di sistem Jawa Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera.

Pembangun sistem transmisi diarahkan kepada (i) tercapainya kesesuaian antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien; (ii) untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan.

Kebijakan Pengembangan Transmisi dan Gardu Induk

Dalam mengembangkan sistem transmisi dan gardu induk, Perseroan menerapkan berbagai kebijakan pokok, meliputi:

1. Perencanaan kapasitas transmisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan pertumbuhan beban hingga 30 tahun ke depan.
2. Untuk jaringan yang memasok listrik ke ibukota negara direncanakan *looping* antar sub-sistem dengan pola operasi terpisah untuk meningkatkan keandalan pasokan.
3. Pada saluran transmisi yang tidak memenuhi kriteria keandalan N–1 akan dilaksanakan *reconductoring* dan *uprating*.
4. Perluasan jaringan transmisi dari *grid* yang telah ada untuk menjangkau sistem *isolated* yang masih dilayani PLTD BBM (*grid extension*) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis.

Java Bali Region

The 500 kV transmission development in Java is intended to transfer power from new plants as well as the new expansion in order to maintain the N-1 security criteria, both static and dynamic. The development of the 150 kV transmission is intended to maintain the N-1 security criteria and function as a transmission related to the new 150 kV substation.

Pointing the delayed development of Extra High Voltage Transmission and High Voltage Transmission due to rate of way and social permit issues, as well as the demand for additional capacity supply, PLN must strive to increase transmission capacity in a short period of time. The development of Extra High Voltage Transmission using the new route will expend a great deal of time, therefore the method that will be taken is the reconductoring of some 500 kV and 150 kV transmission spaces.

East Indonesia Region

The transmission and substation development in East Indonesia is intended to connect the isolated systems which have been supplied by Diesel Power Plant (dedieselization) forming the transmission backbone, to distribute bulk energy to the power load located far away. This prevents bottleneck distribution as well connects the systems into the bigger system.

Transmission System and Substation Planning

In the PLN's Long Term Planning, the development of the distribution system is divided into several categories, consisting of the transmission system development with 500 kV and 150 kV in the Java-Bali system, as well as the 500 kV, 275 kV, 150 kV and 70 kV in East Indonesia and Sumatra.

Transmission system development will be directed to (i) efficiently achieve balance between the plant capacity in the upstream and the power demand in the downstream; and (ii) prevent bottleneck distribution and service voltage recovery.

Transmission and Substation Development Policy

In developing the transmission systems and substations, the Company is implementing various basic policies, including:

1. Planning transmission capacity implementation by considering the load growth for the next 30 years.
2. For a network that supplies electricity to a provincial capital, looping will be planned between sub-systems with a separated operational pattern to improve reliability of supply.
3. For a transmission channel that does not match the N-1 reliability criteria, reconductoring and uprating will be implemented.
4. The expansion of a transmission network from an existing grid to reach isolated systems which are still served by Diesel Power Plant (grid extension) that will be implemented with consideration of economic and technical aspects.

5. Penentuan lokasi GI dilakukan dengan mempertimbangkan keekonomian biaya pembangunan fasilitas sistem transmisi tegangan tinggi, biaya pembebasan tanah, biaya pembangunan fasilitas sistem distribusi tegangan menengah dan harus disepakati bersama oleh unit pengelola sistem distribusi dan unit pengelola sistem transmisi.
6. Pemilihan teknologi seperti jenis menara transmisi, penggunaan tiang, jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah, kabel laut) dan perlengkapannya (pemutus, pengukuran dan proteksi) mempertimbangkan aspek keekonomian jangka panjang, dan pencapaian tingkat mutu pelayanan yang lebih baik.

Kebijakan lebih rinci mengenai pengembangan transmisi dan GI adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi kabel 500 kV di ibu kota provinsi di Jawa - Bali.
2. Setiap Ibu kota kabupaten yang belum terlayani jaringan tegangan tinggi direncanakan GI-GI baru. Perencanaan GI-GI baru tersebut tetap mempertimbangkan kelayakan teknis dan ekonomis.
3. Peningkatan *size unit* trafo daya (150/20 kV) menjadi maximum 100 MVA untuk GI Baru di wilayah yang padat dan sulit mendapatkan lokasi GI.
4. Jumlah unit trafo yang dapat dipasang pada suatu GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang *(feeder)* keluar yang dapat ditampung oleh GI tersebut. Dengan kriteria tersebut suatu GI dapat mempunyai 3 atau lebih unit trafo. Sebuah GI baru diperlukan jika GI-GI terdekat yang ada tidak dapat menampung pertumbuhan beban lagi karena keterbatasan tersebut.
5. Pengembangan GI baru juga dimaksudkan untuk mendapatkan tegangan yang baik di ujung jaringan tegangan menengah.
6. Trafo daya (TT/TM) pada dasarnya direncanakan mempunyai kapasitas sampai dengan 60 MVA.
7. Trafo Inter Bus GITET (500/150 kV dan 275/150 kV) dapat dipasang hingga 4 unit per GITET.
8. *Spare* trafo Inter Bus 1 fasa disediakan per lokasi untuk GITET jenis GIS, dan 1 fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional.
9. Pembangunan gardu induk dengan desain minimalis dapat dilaksanakan untuk melistriki komunitas dengan kebutuhan listrik yang dalam jangka panjang diperkirakan akan tumbuh lambat.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI

Pengembangan sistem distribusi diperlukan untuk mempertahankan keandalan serta menampung penambahan pelanggan yang diprakirakan terus meningkat signifikan, selain itu juga diselaraskan dengan perkembangan perekonomian suatu daerah.

5. Determining the location of substations will be conducted by considering the economic cost of the construction of high voltage transmission system facilities, the cost of land acquisition, the cost of facility construction and it was agreed together by distribution system management unit and transmission system management unit.
6. Selection of technologies such as transmission towers, use of poles, types of distribution (airways, underground cables, submarine cables) and equipment (breakers, measures and protection) will consider the long-term economic aspects and better service levels.

More detailed policies regarding the development of the transmission system and substations include:

1. The use of 500 kV technological cable in the capital cities of Java and Bali.
2. Each district capital city which is not served by a high-voltage network will have new substation. The planning of the new substations will consider the technical and economic feasibility.
3. There will be an increase in size of the power transformer (150/20 kV) into the maximum of 100 MVA for new substations in areas that are dense and difficult to reach from the substation.
4. The number of transformer units that can be mounted at a substation is limited by the availability of land and the number of feeders that can be accommodated by the substation. With this criteria, a substation can install three or more units of power transformers. A new substation will be necessary if nearby substations cannot accommodate the power load due to limitations.
5. The development of a new substation is also intended to achieve voltage stability at the end of the medium-voltage network.
6. The power transformer (TT / TM) is basically planned to have a capacity of up to 60 MVA.
7. The Inter Bus Transformer High Voltage (500/150 kV and 275/150 kV) can be mounted up to four units per GITET.
8. A spare Inter Bus Transformer 1 phase transformer is provided per location for GITET types of substations, and one phase per type per province for conventional GITET types.
9. The development of substations with minimalistic design can be implemented in the long term to provide electricity to communities which are expected to grow slowly.

DISTRIBUTION SYSTEM DEVELOPMENT PROGRAM

Development of the distribution system is necessary to maintain reliability and to accommodate the predicted significant increase in customers. Additionally, it must also be adjusted in accordance with the economic development of a region.

Secara keseluruhan, pada tahun 2015 PLN merealisasikan pembangunan trafo distribusi berkapasitas total 3.596 MVA, pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (TM) sepanjang 15.740 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (TR) sepanjang 33.136 kms.

Perencanaan Sistem Distribusi

Perencanaan Sistem Distribusi dibuat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Membatasi panjang maksimum saluran distribusi (JTM dan JTR) untuk menjaga agar tegangan pelayanan sesuai standar SPLN.
2. Konfigurasi JTM untuk kota-kota besar dapat berupa topologi jaringan yang lebih andal seperti *spindle*, sementara konfigurasi untuk kawasan luar kota minimal berupa saluran radial yang dapat dipasok dari 2 sumber.
3. Mengendalikan susut teknis jaringan distribusi pada tingkat yang optimal.
4. Program listrik desa dilaksanakan dalam kerangka perencanaan sistem kelistrikan secara menyeluruh dan tidak memperburuk kinerja jaringan dan biaya pokok penyediaan.

Sasaran sistem distribusi adalah menyediakan sarana pendistribusian tenaga listrik yang cukup, andal, berkualitas, efisien, dan susut teknis wajar.

Oleh sebab itu, perencanaan sistem distribusi diarahkan untuk meningkatkan kontinuitas pasokan kepada pelanggan (menekan SAIDI dan SAIFI) melalui upaya:

1. Membangun SCADA Distribusi untuk ibukota propinsi dan kota-kota lain yang minimal dipasok oleh 2 Gardu Induk dan 15 *feeder*.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan *recloser* atau AVS yang terpasang di SUTM, dikoordinasikan dengan *reclosing relay* penyulang di GI.
3. Memonitor pengoperasian *recloser* atau AVS, dan menyempurnakan metode pemeliharaan periodiknya.
4. Dimungkinkan menggunakan DAS *(Distribution Automation System)* pada daerah yang sangat padat beban dan potensi pendapatan tinggi.

Kebijakan Pengembangan Distribusi

Fokus pengembangan dan investasi sistem distribusi diarahkan pada: (i) perbaikan tegangan pelayanan, (ii) perbaikan SAIDI dan SAIFI, (iii) penurunan susut teknis jaringan dan (iv) rehabilitasi jaringan yang tua, dilanjutkan dengan perluasan jaringan untuk melayani pertumbuhan dan perbaikan sarana pelayanan.

Faktor lain yang juga memerlukan analisis dan pertimbangan keekonomian jangka panjang, namun tetap memenuhi standar SNI atau SPLN yang berlaku adalah:

1. Pemilihan teknologi seperti jenis tiang (beton, besi atau kayu);
2. Jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah);
3. Sistem jaringan *(radial, loop atau spindle)*;
4. Perlengkapan (menggunakan *recloser* atau tidak), termasuk penggunaan tegangan 70 kV sebagai saluran distribusi ke pelanggan besar.

Overall, in 2015 PLN realized the development of power transformer distributor with total capacity of 3,596 MVA, the development of Medium Voltage (MV) network totalling 15,740 kms, and a Low Voltage (LV) network totalling 33,136 kms.

Distribution system planning

Distribution system planning is generally made with consideration of the following criteria:

1. Limiting the maximum length of the distribution channel (MV and LV) to maintain standards of SPLN service voltage.
2. The configuration of the mid-voltage network (MV) to serve larger cities can have a more reliable topology network through the use of spindles, while the minimum configuration for the outer regions of a city is radial channels supplied from two sources.
3. Controlling the technical losses in the distribution network optimally.
4. The rural electricity program is implemented within the framework of the overall electricity system planning and should not degrade the network performance and the primary operational budget.

The aim of the distribution system is to provide an electrical power distributing facility which operates sufficiently, reliably, efficiently, and decent technical losses.

Therefore, the distribution planning system is directed to improve the supply continuity to customers (stressing SAIDI and SAIFI) with the following efforts:

1. Building the SCADA Distribution to the provincial capital and other cities, which are supplied by a minimum of two substations and 15 feeders.
2. Optimizing the use of recloser or AVS Automatic Vacuum Switch (AVS) installed in Overhead Medium Voltage, coordinated with the reclosing of relay feeders in GI.
3. Monitoring the operation of the recloser or AVS, and refine methods of periodical maintenance.
4. Possibility of using DAS (Distribution Automation System) in highly populated areas and with the potential for high income.

Distribution Development Policy

The focus of development and investment system is directed to: (i) refinement of service voltage; (ii) refinement of SAIDI and SAIFI; (iii) decrease of technical network loss and (iv) rehabilitation of the old network, followed by network expansion to encourage growth and improvement of service facilities.

Other factors require analysis and long-term economic consideration, but still fulfill SNI and SPLN applicable standards, are:

1. Selection of technologies such as the type of poles (concrete, iron and timber);
2. Type of channels (airways, underground cables);
3. Type of network (radial, loop or spindle);
4. Equipment (the use or not of recloser), including the use of 70 kV voltage as a distribution channel to bigger consumers.

PENDANAAN
FUNDING

Menjalin kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai lembaga keuangan bereputasi tinggi baik dari dalam maupun luar negeri untuk memastikan kecukupan sumber pendanaan jangka panjang dengan biaya dana yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan Program Pembangkit 35.000 MW maupun pembangkit reguler lainnya dalam rangka menjamin ketersediaan listrik yang memadai, handal dan mampu mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian Nasional.

Establishing extensive collaboration with various reputable national and international financial institutions to ensure sufficient sources of long-term funding which is cost effective and appropriate for the needs of long-term investment, in order to support the development of the 35,000 MW Power Plant Program and other regular power plant programs to ensure the availability of electricity which is sufficient, reliable and can support the accelerated growth of the national economy.

Untuk membiayai seluruh kegiatan investasi pembangunan unit pembangkit, baik dalam skema Program 35.000 MW maupun program reguler lengkap dengan penyediaan sistem transmisi, sistem distribusi, pembangunan sarana termasuk talangan dana cicilan bunga dalam masa pembangunan (*interest during construction*/IDC) memerlukan dana besar.

To finance all investments in power plant construction, both the 35,000 MW program scheme and regular programs along with the provision of transmission and distribution systems and supporting infrastructure, including bailout funds for interest during construction (IDC), a large amount of funding is required.

Sumber pendanaan untuk investasi PLN diperoleh dari internal maupun eksternal. Sumber dana internal berasal dari laba usaha dan penyusutan aktiva tetap. Sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa:

1. Penyertaan Modal Negara (PMN);
2. Pinjaman *two-step loan / Sub Loan Agreement* (SLA);
3. *Direct Lending with Government Guarantee;*
4. *Direct Lending without Government Guarantee* (ECA, pinjaman komersial bank, dsb.);
5. Penerbitan obligasi nasional maupun internasional.

Untuk mengantisipasi tingginya biaya investasi yang diperlukan maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan perseroan, antara lain:

1. Mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya pengadaan pendanaan serendah mungkin (biaya bunga pinjaman rendah).
2. Mengupayakan peningkatan penyertaan modal negara untuk mengurangi pinjaman.
3. Melibatkan partisipasi swasta di dalam investasi ketenagalistrikan.
4. Mengendalikan pinjaman dalam batas kemampuan.

Saat ini PLN bersama Pemerintah akan lebih mengembangkan sumber pendanaan dengan pola *Direct Lending with Government Guarantee* bekerjasama dengan Bank-Bank Pembangunan *(Development Bank)* yang ada di dunia. Dengan skema ini, diharapkan PLN akan mendapatkan sumber dana yang murah, namun tanpa harus melalui prosedur yang panjang dalam proses persetujuannya. Beberapa *development bank* sudah menunjukkan komitmen awal untuk mendukung program pembangunan kelistrikan di Indonesia.

Peningkatan penyertaan modal negara merupakan bentuk dukungan dari pemerintah terhadap program investasi yang dijalankan oleh PLN, sebagai bentuk komitmen pemerintah di tahun 2015 telah direalisasikan penyertaan modal negara kepada PLN dengan nilai Rp5 triliun dan menyusul penyertaan modal negara untuk tahun-tahun berikutnya.

Untuk menstimulir keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan unit pembangkit dan pembangunan infrastruktur dasar lain, PLN bersama Pemerintah bahkan telah menggagas penerapan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang melibatkan perusahaan penyedia Jasa Penjaminan Pembangunan Infrastruktur KPS.

Funding for PLN investments is acquired from both internal and external sources. Internal funding sources include operational income and depreciation of Property, plant and equipment, while external funding sources may consist of:

1. Government Investment Scheme (PMN);
2. Two-step loan/Sub Loan Agreement (SLA);
3. Direct Lending with Government Guarantee;
4. Direct Lending without Government Guarantee (ECA, commercial bank loans, etc.);
5. National and international bonds.

In anticipation of high investment costs, there are several things that the Company must consider, which are:

1. Obtaining funding sources with least procurement costs (low interest rate).
2. Improving the state investment scheme to reduce lending.
3. Involving private participation in electricity investment.
4. Regulating loans within limits.

Currently, PLN together with the Government will further develop funding sources through the Direct Lending scheme with the Government Guarantee in cooperation with several Development Banks. In this scheme, it is expected that PLN will obtain a low-cost source of funds, without having to go through lengthy procedures during the approval process. Some Development Banks have already demonstrated their early commitment to supporting the electricity development program in Indonesia.

The increase of state capital funding is a form of Government support towards PLN's investment programs and in 2015 the Government invested IDR 5 trillion, and will invest further in the following years.

To stimulate the involvement of the private sector in the construction of power plants and other basic infrastructure development, PLN and the Government initiated the implementation of the Public Private Partnership (PPP) program involving the provider of Assurance Services

Proyek dengan skema KPS ini telah mulai dijalankan, yakni pada pembangunan PLTU Batang 2 x 1.000 MW dengan kebutuhan dana investasi mencapai US$4 miliar.

Infrastructure Development (KPS). The PPP scheme project has been initiated, namely the construction of the Batang Steam Power Plant 2 x 1,000 MW with an investment fund of USD 4 billion.

KEMAMPUAN PENDANAAN SENDIRI (APLN)

Kemampuan pendanaan internal PLN relatif rendah karena sebelum tahun 2009 PLN tidak memperoleh marjin PSO, sehingga tidak ada investasi PLN yang didanai dari pendanaan internal (seluruh investasi didanai dengan hutang). Rasio hutang terhadap aset PLN meningkat seiring dengan realisasi program percepatan pembangkit 10.000 MW tahap 1 *(fast track 1),* akibat seluruh pendanaan proyek *fast track 1* berasal dari pinjaman komersial dan obligasi. Rasio ini akan semakin besar apabila pendapatan PLN tidak meningkat.

Kebutuhan investasi PLN harus ditunjang dengan meningkatnya kemampuan pendanaan sendiri, dan menjaga rasio hutang terhadap aset PLN sehingga dapat secara terus menerus mendukung perkembangan penyediaan listrik. Peningkatan pendanaan sendiri, tentunya harus dilakukan dengan peningkatan pendapatan PLN akan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PLN dalam melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan listrik.

SELF-FUNDING CAPABILITY (APLN)

PLN's internal financing capability is relatively low, because prior to 2009 the Company did not obtain any PSO margin, and there were no PLN investments funded internally (all investments were funded by loans). PLN's debt to asset ratio increased with the realization of the accelerated construction program of the 10,000 MW Power plant Phase 1 (Fast Track 1). This is because the Fast Track 1 funding sources were fully obtained from commercial loans and bonds. This ratio would be even greater if revenue did not increase.

PLN investments require the support of increased internal funding capability, in order to maintain the debt to assets ratio and continuously support electricity supply development. Increased funding is related to increased PLN revenue, which then increases PLN's ability to invest in projects that meet growing demand for electricity.

KOMPOSISI SUMBER PENDANAAN UNTUK INVESTASI

Sumber pendanaan investasi PLN berasal dari 3 sumber: (i) ekuitas Pemerintah dari APBN (ii) dana internal yang berasal dari laba operasi dan (iii) pinjaman. APLN (dana internal perusahaan) berasal dari laba operasi yang sangat terbatas karena BPP lebih tinggi dari tarif rata-rata. APLN hanya didapat dari selisih antara marjin PSO ditambah depresiasi aset dan pembayaran cicilan pokok. PLN hanya dapat meminjam dalam jumlah yang sangat terbatas karena dibatasi oleh *covenant* pinjaman yang disyaratkan oleh *lender* dan *bond holder*. Kapasitas PLN dalam membuat pinjaman baru dapat ditingkatkan jika *revenue* PLN meningkat, baik dari tarif maupun marjin PSO. Dengan melihat kemampuan pendanaan internal PLN dan kemampuan meminjam PLN yang sangat terbatas seperti dijelaskan di atas, maka suntikan modal menjadi sangat penting untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kemampuan PLN dalam melayani pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Pemerintah, maka harus dilakukan perbaikan antara lain:

1. Peningkatan pendapatan PLN.
2. Peningkatan dana investasi dari Pemerintah.

INVESTMENT FUNDING SOURCES MIX

PLN's investment fund sources comprise: (i) Government equity from the state budget (ii) Internal funds derived from operating profit and (iii) Loans. APLN (internal funds) come from a very limited operating profit because cost of production is higher than the average tariff. APLN can only be obtained from the difference between the PSO margin plus the depreciation of assets and principal repayments. PLN can only borrow a limited amount because it is restricted by loan covenants required by lenders and bond holders. PLN's capacity to receive new loans can increase if revenue increases, both through tariffs and the PSO margin. Judging from PLN's internal financing capability and its limited borrowing ability as described above, capital injection can be very crucial importance to meet the growing demand for electricity, and is necessary to drive the economic growth targeted by the Government.

From the explanation above, it can be concluded to maintain PLN's ability to serve the growing electricity demand and support economic growth targeted by the Government, the following is essential:

1. Increasing PLN revenue.
2. Increasing Government investment funds.

FINANCIAL LEVERAGE PERUSAHAAN

Selain tantangan pembangunan sarana ketenagalistrikan yang membutuhkan biaya investasi besar, penyediaan tenaga listrik saat ini juga dibebani oleh biaya produksi yang tinggi. Pendapatan dari pelanggan tidak cukup untuk menutupi biaya produksi. Selisih antara biaya produksi dan pendapatan PLN merupakan beban subsidi listrik pada APBN. Subsidi listrik yang diberikan sebelum tahun 2009 hanya cukup untuk menutupi biaya operasi, tetapi kurang memadai untuk menunjang investasi pengembangan sistem kelistrikan.

Penjelasan atas Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 Ayat 1 menyatakan bahwa jika BUMN diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah yang secara finansial tidak layak, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan termasuk *margin* yang diharapkan. Pemerintah menugaskan PLN menyediakan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia tetapi harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah, dimana harga jual ini tidak sesuai dengan harga keekonomiannya. Oleh karena itu Pemerintah semestinya memberikan margin PSO ke PLN dengan besaran tertentu untuk memastikan keuangan PLN tetap sehat dan dapat memenuhi semua kewajiban korporasinya. *Margin* ini diperlukan oleh PLN untuk menjamin terciptanya laba perusahaan dan meminimalisir risiko-risiko unsur biaya pembentuk BPP seperti risiko fluktuasi harga energi primer, risiko kurs, risiko beban pinjaman, dan sebagainya. Pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 Pemerintah mengalokasikan *margin* sebesar 5%, 8%, 8%, 7%, 7%, dan 7% untuk mendukung kemampuan meminjam PLN untuk investasi.

Program FTP 1 yang ditugaskan Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 sepenuhnya didanai oleh pinjaman. Sejak program ini digulirkan, PLN untuk pertama kalinya harus melakukan pinjaman langsung dalam jumlah yang cukup besar, baik melalui penerbitan obligasi internasional maupun pinjaman kepada perbankan nasional dan internasional. Kondisi ini dilakukan pada saat struktur pendapatan perusahaan belum mencerminkan tingkat keekonomian harga jual listrik, yang akibatnya membebani neraca keuangan PLN (*financial leverage* menjadi tinggi) yang ditunjukkan dengan meningkatnya *Debt to Equity Ratio* (DER). Sejak tahun 2005, sebagian besar dana pembangunan bersumber dari hutang. Hutang tersebut berasal dari hutang Pemerintah maupun hutang korporasi. Kedua jenis hutang tersebut memiliki kewajiban yang harus dijaga oleh PLN untuk menjamin kemampuan pengembalian hutangnya. Kewajiban tersebut adalah *covenant* pinjaman.

Covenant adalah komitmen untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian hutang. Dari beberapa *covenant* yang ada, umumnya *covenant* yang perlu dijaga oleh PLN terdiri dari 2 indikator: (i) *Consolidated Interest Coverage Ratio* (CICR) dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

COMPANY FINANCIAL LEVERAGE

In addition to the challenges of electricity infrastructure development which require large amounts of investment, the supply of electricity is also burdened by high production costs. Revenue from customers is not sufficient to cover production costs. The margin between production costs and PLN revenue is a burden to electricity subsidies in the state budget. Electricity subsidies granted before 2009 were only enough to cover operating costs, but were not sufficient to support the investment in electrical system development.

Explanation of Act 19 of 2003 on State-Owned Enterprises Article 66 Paragraph 1 states that if an SOE is given a special mandate by the Government which is not financially feasible, then the Government must provide compensation for costs incurred, including expected margins. The Government commissioned PLN to provide electricity and increase Indonesia's electrification ratio, however, the electricity sales price was set by the Government and is not adjusted to economic conditions. Therefore, the Government should provide a certain amount of PSO margin to PLN to ensure financial soundness and fulfil all corporate obligations. This margin is required by PLN to guarantee corporate profits and minimize production cost risks, such as the primary energy price volatility risk, exchange rate risk, loan burden risk, and so on. In 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 the Government allocated a margin of 5%, 8%, 8%, 7%, 7%, and 7% respectively to support PLN's borrowing power for investment.

The FTP 1 program was assigned by the Government through the Presidential Regulation Num. 71 of 2006 and fully funded by loans. Since the program's initiation, for the first time in history PLN should seek a substantial amount, either through the issuance of international bonds as well as loans from national and international banks. This decision was made when the Company's revenue structure did not reflect the economies of scale for electricity, which consequently weighed down on the PLN balance sheet (financial leverage becomes high) as indicated by the increasing Debt to Equity Ratio (DER). Since 2005, the majority of development funds were sourced from debt. The debts originated from Government debts and corporate debts. Both types of debt have liabilities which must be maintained by PLN to ensure debt repayment. This obligation is called loan covenant.

Covenant is a commitment to maintain the Company's financial condition as outlined in a debt agreement. From several existing covenants, in general they need to be maintained by PLN in terms of two indicators: (i) Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) and (ii) Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

CICR merupakan rasio antara *Consolidated Cash Flow* dengan *Consolidated Interest Expense*, yang merupakan persyaratan *bond holder* dari pendanaan *Global Bond*.

PLN melakukan pendanaan dengan tetap memperhatikan batasan kapasitas pendanaan yang disyaratkan pada *covenant*, mengendalikan pinjaman dalam batas kemampuan, mencari sumber pendanaan dengan biaya pinjaman yang rendah, mencari sumber pendanaan dengan fleksibilitas yang tinggi (jangka waktu pinjaman, dan persyaratan pinjaman) dan mengupayakan konversi SLA menjadi Penyertaan Modal Negara. Untuk mengurangi risiko kenaikan kurs USD terhadap Rupiah yang mengakibatkan kenaikan biaya bunga dan pokok pinjaman dalam USD, tidak menutup kemungkinan dilakukan program *hedging* yang didahului dengan membentuk sistem pengendalian yang memadai seperti kebijakan internal perusahaan, prosedur dan kontrol untuk memastikan bahwa program *hedging* memang layak untuk dilakukan.

CICR is the ratio between Consolidated Cash Flow to Consolidated Interest Expense, which is the bond holders' requirement from Global Bond funding.

PLN implements funding within the limits of the covenant requirements, controls loans within limits, seeks funding sources with low borrowing costs, seeks funding sources with high flexibility (loan terms) and seeks conversion of SLA into the Government Investment Scheme. To mitigate the risk of higher USD to IDR exchange rate, which would result in increased interest costs and principal in USD, hedging is preceded by establishing the procedures for adequate supervision in internal policies of the Company, to ensure the feasibility of the hedging program.

REALISASI PENDANAAN 2015

Pada tahun 2015, PLN telah merealisasikan investasi untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga sebesar Rp45,28 triliun, atau 119,8% dari tahun sebelumnya sebesar Rp37,8 triliun. Rincian hasil realisasi investasi pada tahun 2015 adalah:

2015 FUNDING REALIZATION

In 2015, PLN invested Rp45.28 trillion or 119,8% of the value of the previous year, Rp37.8 trillion, for various development projects. The details of 2015 investments are:

Pembiayaan Kegiatan Investasi PLN (triliun Rp)
Investment Funding Activity of PLN (trillion Rp)

Sumber Dana	2014	2015	Fund
Anggaran PLN (APLN)	24,25	25,33	Internal Fund
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	2,31	1,68	Government Fund
DIPA SLA	0,77	2,87	Subsidiary Loan Agreement
Pinjaman Bank	1,87	15,40	Bank Loans
Jumlah	**37,81**	**45,28**	**Total**

Pada tahun 2015, PLN mendapatkan komitmen pendanaan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan kelistrikan, dengan rincian:

1. Penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman *(Subsidiary Loan Agreement)* antara Pemerintah Indonesia dengan PT PLN (Persero) No. SLA-1260/DSMI/2015 pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar USD 240.983.647,00 dalam rangka pembiayaan Takalar *Coal Fired Steam Power Plant Project* (2x100MW) yang bersumber dari Pinjaman *The Export-Import Bank of China* (CEXIM) dengan *Loan Agreement* PBC No. 35 Total No.(329) tanggal 22 Desember 2014.

2. Penandatanganan penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PLN *(Subsidiary Loan Agreement)* dengan No. SLA-1261/DSMI/2015 pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar USD 373.009.532,12 dalam rangka pembiayaan Pangkalan Susu *Coal Fired*

In 2015, PLN committed to finance several electricity development projects, with the following details:

1. Signing of the Loan Agreement between the Government of Indonesia and PLN (Subsidiary Loan Agreement) Num. SLA-1260/DSMI/2015 on 5 March 2015 amounting to USD 240,983,647.00 under the financing framework of the Takalar Coal Fired Steam Power Plant Project (2 x 100 MW), which was funded by the Export-Import Bank of China (CEXIM) and the Loan Agreement PBC Num. 35 Total Num. (329) dated 22 December 2014.

2. The signing of the Loan Agreement between the Government of Indonesia and PLN (Subsidiary Loan Agreement) Num. SLA-1261/DSMI/2015 on 5 March 2015 amounting to USD 373,009,532.12 under the financing framework of the Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant Project Units 3 & 4 (2 x 200 MW),

BANK DALAM NEGERI DUKUNG PLN WUJUDKAN 35.000 MW

INDONESIAN BANKS SUPPORT PLN'S COMPLETION OF THE 35,000 MW PROGRAM

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menandatangani Perjanjian Kredit Investasi PLN dengan Sindikasi 6 Bank Dalam Negeri di PLN Kantor Pusat, Kamis (17/12). Dari pihak bank, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Kelembagaan BUMN BRI Kuswiyoto, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar, Direktur Bisnis Banking BNI Herry Sidharta, Direktur Bank BCA Dhalia M. Ariotedjo, Direktur Pelaksana III Indonesia Exim Bank Basuki Setyadjid, dan Direktur Financing & Investment PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) Edwin Syahruzad. Penandatanganan disaksikan oleh Kasubdit Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi Kementerian Keuangan Lalu Taruna Anugerah dan Dewan Komisaris beserta jajaran Direksi PLN.

Perjanjian Kredit Investasi PLN bertujuan untuk mendanai kebutuhan pembiayaan perusahaan *(corporate loan)* untuk investasi sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 dan sisa investasi dalam RKAP tahun 2015 yang belum direalisasi yang meluncur/ tercantum kembali dalam RKAP tahun 2016 dan/atau RKAP tahun 2017 yang belum dibiayai oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam perjanjian, keenam Bank ini akan memberikan *plafond* kredit sebesar Rp12 triliun dengan tenor pinjaman selama 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian, termasuk masa tenggang 3 tahun. Kredit ini akan disalurkan untuk membiayai investasi PLN di semua fungsi, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga fungsi pendukung.

Penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi PLN ini sudah berjalan untuk kali kelima. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan komitmen Bank Dalam Negeri terhadap PLN dalam mendukung Program Kelistrikan 35.000 MW.

"Pada kesempatan ini, kembali kita membuktikan kesolidan kita sebagai komponen bangsa, dalam memberikan bukti nyata untuk kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia," ujar Sofyan.

Sofyan berharap, perjanjian ini menjadi awal yang positif bagi PLN dan perbankan tanah air, mengingat potensi bisnis PLN yang sangat besar, terutama untuk lima tahun ke depan.

The President Director of PT PLN (Persero), Sofyan Basir signed an Investment Loan Agreement with a syndication of Six Indonesian Banks at PLN Head Office on Thursday (17/12). The Six Banks are represented by the Director of BRI, Kuswiyoto, the Corporate Banking Director of Bank Mandiri, Royke Tumilaar, the Director of BNI Business Banking, Herry Sidharta, the Director of Bank BCA, Dhalia M. Ariotedjo, the Managing Director III of Indonesia Exim Bank, Basuki Setyadjid, and the Finance & Investment Director of PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), Edwin Syahruzad. The signing was witnessed by Head of Contingent Liabilities Unit – Ministry of Finance and Treasury, Lalu Taruna Anugerah, as well as PLN's Board of Commissioners and Board of Directors.

PLN Investment Loan Agreement aims to fund the Company's needs for investment funding in line with the Annual Work Plan and Budget (RKAP) 2015 and the remaining unrealized or carried-over investments from RKAP 2015 in RKAP 2016 and/or RKAP 2017 which have not been financed by any banks or other financial institutions. In this agreement, these six banks will provide a credit limit amounting to Rp12 trillion with loan tenure for 10 years since the date the agreement signed, including a grace period of 3 years. This loan will be channeled to finance PLN's investment in all functions, ranging from power generation, transmission, distribution and other supporting functions.

This is the fifth time that PLN has signed an Investment Loan Agreement, demonstrating the confidence and commitment from the Indonesian Banks in supporting PLN's 35,000 MW Power Plant Program.

"On this occasion, we prove our solidity as a component of the nation, to provide a tangible evidence of progress and improve Indonesian people's quality of life," said Sofyan.

Sofyan also hopes that this agreement will serve as a starting point for PLN and other national banks, as PLN has a huge business potential, especially in the next five years.

PENDANAAN UNTUK PLTU KALTIM

Selain penandatanganan perjanjian *corporate loan*, PLN juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi untuk mendanai 85% nilai proyek PLTU Teluk Balikpapan (Kalimantan Timur) dengan BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Indonesia Eximbank. Untuk perjanjian ini, pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PLN kepada perbankan yang menyediakan pendanaan atau kredit.

PLTU Kaltim 2 x 110 MW termasuk dalam Program Percepatan Tahap I atau *Fast Track* I (FTP I). Progres konstruksi PLTU yang dibangun oleh kontraktor Adhi Karya dan Shinohydro ini sudah 95 persen. Untuk mempercepat penyelesaian proyek ini, keempat Bank akan memberikan plafond kredit sebesar Rp2,45 triliun dengan tenor pinjaman selama 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian, termasuk masa tenggang 3 tahun.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah tanggung jawab seluruh *stakeholders* kelistrikan. PLN sebagai salah satu agen pembangunan akan mengajak seluruh komponen untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sofyan menegaskan bahwa PLN akan membuka peluang kerjasama bagi perbankan dalam negeri. Hal ini mengingat kebutuhan listrik yang begitu besar, perkembangan masyarakat dan tuntutan pemerintah untuk mensejahterakan Indonesia, membutuhkan pembiayaan yang besar. Oleh karenanya diperlukan kemitraan yang lebih luas dengan perbankan dalam negeri.

"Kami berterima kasih dan sangat bangga dapat berbisnis dan selalu menunjang bisnis PLN. Semoga tahun 2022, 99 persen mungkin 100 persen Indonesia sudah terang benderang. Itu Berkat PLN, terima kasih," ungkap Kuswiyoto.

FINANCING FOR EAST KALIMANTAN STEAM POWER PLANT

In addition to the signing of the corporate loan agreement, PLN also signed a syndicated loan agreement with BRI, BNI, Bank Mandiri and Indonesia Exim Bank to finance 85% of Teluk Balikpapan Steam Power Plant in East Kalimantan. The government provided guarantee in this agreement to fully repay PLN's liabilities to the syndicated banks that provided the financing.

East Kalimantan Steam Power Plant with a capacity of 2 x 110 MW was included in the Fast Track Program I (FTP I). The construction progress of the Steam Power Plant built by Adhi Karya and Shinohydro has already reached 95 percent of completion. In order to accelerate project completion, the four banks will provide a loan up to Rp2.45 trillion with a loan tenure of 10 years since the date of the agreement signing, including a grace period of 3 years.

All stakeholders are responsible for the development of electricity infrastructure. As an agent of development, PLN invites all components to accomplish the nation's goals in improving overall social wellbeing in Indonesia. Sofyan asserts that PLN would open up cooperation opportunities for national banks due to a great demand of electricity, social development and welfare improvement. This will require substantial financing. Therefore, it is crucial to broaden the partnership with national banks.

"We are truly grateful and proud to partner with PLN and support the business. We hope that in 2022 PLN will reach and provide electricity to 99 percent, or probably 100 percent, of areas across Indonesia. Thank you," says Kuswiyoto.

PLN PEROLEH PINJAMAN LANGSUNG DARI ADB

PLN RECEIVED DIRECT LOAN FROM ADB

PLN memperoleh pinjaman langsung senilai USD 600 juta dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera dengan jaminan pemerintah. Penyerahan Dokumen Pemberian Jaminan Pemerintah atas pinjaman langsung ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (7/12).

PLN akan menggunakan dana pinjaman ini untuk mengembangkan dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan Sumatera, sekaligus memperluas penetrasi jaringan tenaga listrik dalam mendukung implementasi program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW. Lingkup program meliputi pembangunan Jaringan Tegangan Tinggi (TT) sepanjang 19.305 kilo meter sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 18.200 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 19.300 kms, dan trafo sebesar 6.987 Mega Volt Ampere (MVA).

"Pemberian jaminan Pemerintah pada *direct lending* ini sangat membantu PLN dalam merealisasikan Program 35.000 MW. Dana pinjaman akan digunakan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera, sehinga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi" ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati di sela-sela acara.

Lebih jauh Nicke menjelaskan Program 35.000 MW memerlukan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi untuk memasok listrik kepada seluruh pelanggan. Skema pinjaman langsung dengan jaminan Pemerintah yang berbasis hasil ini merupakan salah satu terobosan untuk menjawab kebutuhan pendanaan bagi PLN dalam membangun infrastruktur transmisi dan distribusi.

Pinjaman langsung dengan jaminan Pemerintah berbasis Hasil ini, merupakan yang pertama di Indonesia, dan pertama di dunia untuk sektor energi. Setelah berjalan di Sumatera, PLN dan ADB berencana untuk memperluas cakupan ke sistem kelistrikan Indonesia Bagian Timur, Indonesia Bagian Tengah, dan Jawa-Bali. Dengan demikian, PLN secara bertahap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Untuk Implementasi proyek awal akan berlangsung selama 5 tahun yakni 2015-2019 dan akan dilakukan *monitoring* indikator kinerja yang menentukan besaran penyerapan pinjaman *(Result-Based Lending)*.

PLN received direct loan worth USD 600 million from the Asian Development Bank (ADB) for transmission and distribution network development in Sumatra guaranteed by the Government. The handover of the Government Guarantee Document for the Direct Loan was carried out by the Finance Minister, Bambang Brodjonegoro to the Director of Corporate Planning of PLN, Nicke Widyawati at Dhanapala Building (Ministry of Finance) on Monday (7/12).

PLN will utilize the loan to develop and strengthen the reliability of its electricity system in Sumatra, as well as expanding electricity network penetration in support of the implementation of 35,000 MW power plant construction program. The program scope includes constructing a 19,305-km High Voltage Distribution Network (TT), an 18,200-km Medium Voltage Distribution Network (JTM), a 19,300-km Low Voltage Distribution Network (JTR) and a 6,987 mega-volt ampere (MVA) transformer.

"The provision of the Government's Guarantee on the Direct Loan was extremely helpful in realizing our 35,000 MW program. The funds will be used to build transmission and distribution network in Sumatra in order to increase electrification ratio," said the Director of Corporate Planning of PLN, Nicke Widyawati, at the event.

Nicke further explained that 35,000 MW power plant program will require a good transmission and distribution infrastructure to supply electricity to all customers. Thus, the result-based direct loan scheme with the Government's guarantee was a breakthrough to secure funding in order to build the transmission and distribution infrastructure..

Result-based direct loan scheme with the Government's guarantee was a first to be implemented in the energy sector in Indonesia, and in the world. After Sumatra, PLN and ADB plan to expand the scope to electricity systems in Java, Bali as well as Central and Eastern Indonesia. Hence, PLN will gradually provide better services in terms of quality and quantity.

The initial project implementation will take place for 5 years, from 2015 to 2019 and performance indicator monitoring will be carried out to determine the amount of loan absorption (Result-Based Lending).

Steam Power Plant Project Unit 3 & 4 (2x200MW) yang bersumber dari Pinjaman *The Export-Import Bank of China* (CEXIM) dengan nomor *Loan Agreement* PBC No.(2014) 36 No.(330) tanggal 22 Desember 2014.

3. Penandatanganan penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PLN *(Subsidiary Loan Agreement)* dengan No. SLA-1262/DSMI/2015 pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar USD 16.299.910,19 dalam rangka pembiayaan *Scattered Transmissions and Substations Package 3 Project* yang bersumber dari Pinjaman KfW dengan nomor *Loan Agreement* 26180 tanggal 5 Desember 2014.
4. Penandatanganan *Direct Loan* antara *Agence Francaise De Developpement* (AFD) dengan PLN dengan No.CID 1041 01 J pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar EUR 100.000.000,00 dalam rangka pembiayaan 500 kV *overhead line between* Duri – Kosambi *and* Muara-Karang *substations as well as a* 500kV GIS *and a* 150kV GIS *at* Muara-Karang *substation.*
5. Penandatanganan *Direct Loan* antara *Agence Francaise De Developpement* (AFD) dengan PLN dengan No.CID 1048 02 J pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar EUR 1.000.000,00 dalam rangka pembiayaan *Improve the Voltage Control of the Jakarta transmission grid.*
6. Penandatanganan *Direct Loan* antara KfW dengan PT PLN (Persero) dengan *Loan* No.27348 pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar EUR 175.000.000,00 dalam rangka pembiayaan *Energy Efficiency Programme – Rehabilitation of Unit* 3 & 4 *of Suralaya Power Plant.*
7. Penandatanganan *Direct Loan* antara KfW dengan PT PLN (Persero) dengan *Loan* No.27349 pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar EUR 65.000.000,00 dalam rangka pembiayaan 1000 *Islands Renewable Energy for Electrification Program* (*Pilot Phase in* Nusa Tenggara Timur).
8. Penandatanganan *Direct Loan* antara KfW dengan PT PLN (Persero) dengan *Loan* No.27354 pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar EUR 60.000.000,00 dalam rangka pembiayaan *Rehabilitation of the Kamojang Geothermal Power Plant.*
9. Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Jaminan Pemerintah antara Sindikasi PT Bank DKI dengan PT PLN (Persero) dengan Perjanjian No.18 tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.2.225.000.000.000,00 dalam rangka pembiayaan PLTU Riau Tenayan (2 x110 MW).
10. Penandatanganan *Direct Loan* dengan Jaminan Pemerintah antara *Asian Development Bank* (ADB) dengan PT PLN (Persero) *Loan* No.3339-INO tanggal 4 Desember 2015 sebesar USD 575.000.000,00 dalam rangka pembiayaan *Electricity Grid Strengthening Sumatra Program – Results Based Lending.*
11. Penandatanganan *Direct Loan* dengan Jaminan Pemerintah antara *Asian Development Bank* (ADB) dengan PT PLN (Persero) Loan No.8297-INO yang merupakan dana partisipasi dari *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) tanggal 4 Desember 2015 sebesar USD 25.000.000,00 dalam rangka pembiayaan *Electricity Grid Strengthening* Sumatra Program – Results Based Lending.

which was funded by the Export-Import Bank of China (CEXIM) and the Loan Agreement PBC Num. (2014) 36 Num. (330) dated 22 December 2014.

3. The signing of the Loan Agreement between the Government of Indonesia and PLN (Subsidiary Loan Agreement) Num. SLA 1262/DSMI/2015 on 5 March 2015 amounting to USD 16,299,910.19 under the financing framework of Scattered Transmissions and Substations Package 3 Project, which was funded by KfW and the Loan Agreement Num. 26180 dated 5 December 2014.
4. The signing of Direct Loan between the Agence Francaise de Development (AFD) and PLN Num. CID 1041 01 J on 7 May 2015 amounting to EUR 100,000,000 under the financing framework of the 500 kV overhead line between Duri-Kosambi and Muara-Karang substations as well as a 500kV GIS and a 150kV GIS substation at Muara-Karang.
5. The signing of Direct Loan between the Agence Francaise de Developpement (AFD) and PLN Num. CID 1048 02 J on 7 May 2015 amounting to EUR 1,000,000 under the financing framework of Improve the Voltage Control of the Jakarta transmission grid.
6. The signing of Direct Loan between KfW and PT PLN (Persero) Loan Num. 27348 on 8 May 2015 amounting to EUR 175,000,000 under the financing framework of the Energy Efficiency Program – Rehabilitation of Units 3 & 4 of the Suralaya Power Plant.
7. The signing of Direct Loan between KfW and PT PLN (Persero) Loan Num. 27349 on 8 May 2015 amounting to EUR 65,000.000 under the financing framework of the Thousand Islands Renewable Energy for Electrification Program (Pilot Phase in East Nusa Tenggara).
8. The signing of Direct Loan between KfW and PT PLN (Persero) Loan Num. 27354 on 8 May 2015 amounting to EUR 60,000,000 under the financing framework of the Rehabilitation of the Kamojang Geothermal Power Plant.
9. Signing of Syndicated Loan Agreement with Government Guarantee between PT Bank DKI and PT PLN (Persero) under the Agreement Num. 18 dated 12 November 2015 with an amount of Rp2,225,000,000,000.00 in order to finance the construction of the Riau Tenayan Steam Power Plant (2 X110 MW).
10. Signing of Direct Loan with Government Guarantee between the Asian Development Bank (ADB) and PT PLN (Persero) Loan Num. 3339-INO dated 4 December 2015 with an amount of USD 575,000,000.00 in order to finance Electricity Grid Strengthening Program (Result-Based Lending) in Sumatra.
11. Signing of Direct Loan with Government Guarantee between the Asian Development Bank (ADB) and PT PLN (Persero) Loan Num. 8297-INO dated 4 December 2015 with an amount of USD 25,000,000.00 to participate in the ASEAN Infrastructure Fund (AIF) and finance the Electricity Grid Strengthening Program (Result-Based Lending) in Sumatra.

12. Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi antara Sindikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT PLN (Persero) Perjanjian No. 92 tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp12.000.000.000.000,00 dalam rangka pembiayaan Kebutuhan Investasi Perusahaan.
13. Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Jaminan Pemerintah antara Sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT PLN (Persero) Perjanjian No.93 tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp2.449.962.746.818,00 dalam rangka pembiayaan PLTU Kalimantan Timur (2 x 110 MW).

12. Signing of Syndicated Loan Agreement between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. and PT PLN (Persero) under the Agreement Num. 92 dated 17 December 2015 with an amount of Rp 12,000,000,000,000.00 in order to finance the Company's Investments.
13. Signing of Syndicated Loan Agreement with Government Guarantee between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. and PT PLN (Persero) under the Agreement Num. 93 dated 17 December 2015 with an amount of Rp 2,449,962,746,818.00 in order to finance the construction of the East Kalimantan Steam Power Plant (2 x 110 MW).

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT BERJANGKA

PLN juga berupaya mendapatkan sumber dana lain yang berdurasi jangka panjang, yakni obligasi, selain berupaya mendapatkan pembiayaan yang bersumberkan dana pemerintah, pinjaman penerusan luar negeri dan pinjaman perbankan. Sejak 1992, PLN telah memanfaatkan pendanaan dari Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi untuk keperluan investasi pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi serta untuk modal kerja. Obligasi PLN yang telah diterbitkan dikelola oleh wali amanat yang berpengalaman dan setiap periode tertentu peringkatnya ditinjau oleh badan pemeringkat bereputasi internasional maupun nasional.

ISSUANCE AND MANAGEMENT OF BONDS AND SECURITIES

Apart from the financing of funds sourced from the Government, foreign two-step loans, and bank loans, PLN strives to acquire other long-term funding sources, such as bonds. Since 1992, PLN has been registered in the capital market through the issuance of bonds for the purpose of financing investment in power plants and transmission and distribution networks, as well as for working capital. PLN's bonds are managed by reputable international or national rating agencies, and are annually assessed by experienced trustees.

Aksi korporasi penerbitan obligasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2013, dimana PLN melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahun 2013 untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka membiayai kegiatan investasi jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Jawa dan/atau Bali. Total ada tujuh seri obligasi yang diterbitkan sepanjang tahun 2013 lalu, sebesar Rp 2,67 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A, diterbitkan tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp182.000.000.000,00.
2. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B, diterbitkan tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp697.000.000.000,00.
3. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, diterbitkan tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp121.000.000.000,00.
4. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp593.000.000.000,00.
5. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp651.000.000.000,00.
6. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp321.000.000.000,00.
7. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp108.000.000.000,00.

The last corporate action to issue bonds was carried out in 2013, where PLN offered a Continuous Public Offering I Year 2013 of Bonds and Sukuk Ijarah for financing the transmission network investment in Sumatra and/or Java, and/or Bali, and/or Sulawesi and/or Maluku and/or Papua and/or the interconnection network among them and/or electrical power distribution network in Java and/or Bali. In total, there were seven series of bonds issued during 2013, totaling Rp 2.67 trillion, which were distributed as follows:

1. PLN I Continuous Bond I Year 2013 Series A issued on 5 July 2013 amounting to IDR182,000,000,000.00.
2. PLN I Continuous Bond I Year 2013 Series B issued on 5 July 2013 amounting to IDR697,000,000,000.00.
3. PLN I Continuous Sukuk Ijarah I Year 2013 issued on 5 July 2013 amounting to IDR121,000,000,000.00.
4. PLN II Continuous Bond I Year 2013 Series A issued on 10 December 2013 amounting to IDR593,000,000,000.00.
5. PLN II Continuous Bond I Year 2013 Series B issued on 10 December 2013 amounting to IDR651,000,000,000.00.
6. PLN II Continuous Sukuk Ijarah I Year 2013 Series A issued on 10 December 2013 amounting to IDR321,000,000,000.00. and
7. PLN II Continuous Sukuk Ijarah I Year 2013 Series B issued on 10 December 2013 amounting to IDR108,000,000,000.00.

AKSI KORPORASI PELUNASAN OBLIGASI

Pada tahun pelaporan 2015, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang belum kondusif, PLN tidak menerbitkan obligasi baru untuk membiayai realisasi kegiatan investasi yang telah direncanakan. Namun demikian sesuai jangka waktunya, PLN melakukan pelunasan atas beberapa obligasi yang telah jatuh tempo, sebagai berikut :

1. Obligasi PLN XII Seri A dengan plafond Rp645.000.000.000,00
2. PLN Sukuk Ijarah V Seri A dengan plafond Rp160.000.000.000,00

Dengan pelunasan tersebut rekapitulasi daftar obligasi domestik PLN, Obligasi PLN yang pernah diterbitkan dan masih *outstanding* sebagai berikut:

CORPORATE ACTIONS TO SETTLE BONDS

In the 2015 reporting year, taking into account the unfavorable economic climate, the Company did not issue new bonds to finance the fulfillment of planned investment activities. Nevertheless, PLN repaid some bonds that had matured, the details of which are as follows:

1. PLN XII Series A Bonds worth IDR 645 billion, which maturity on 8 July 2015.
2. Sukuk Ijarah PLN V Series A worth IDR 160 billion, which maturity on 8 July 2015.

With the settlements above, the list of domestic bonds issued by PLN are as follows:

Daftar Efek Domestik yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo

List of Domestic Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

Kode Referensi Ref. Code		Plafon Plafond	Penandatanganan Pinjaman Loan Signing	Tenor (Tahun Years)	Jatuh Tempo Maturity Date	Fixed Rate/Fee Ijarah	Peringkat Rating	Lembaga Rating Rating Agency	Tempat *Listing* Listing Location
PLN VIII 2006 SERI A	IDR	1.335.100.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	10	21 Juni 2016 June 21, 2016	13,60%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN VIII 2006 SERI B	IDR	865.000.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	15	21 Juni 2021 June 21, 2021	13,75%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SYARIAH IJARAH I	IDR	200.000.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	10	21 Juni 2016 June 21, 2016	13,60%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN IX 2007 SERI A	IDR	1.500.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	10	10 Juli 2007 July 10, 2007	10,40%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN IX 2007 SERI B	IDR	1.200.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	15	10 Juli 2022 July 10, 2022	10,90%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SYARIAH IJARAH II	IDR	300.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	10	10 Juli 2017 July 10, 2017	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN XI 2010 SERI A	IDR	920.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	7	12 Januari 2017 January 12, 2017	11,95%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN XI 2010 SERI B	IDR	1.783.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	10	12 Januari 2020 January 12, 2020	12,55%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SUKUK IJARAH IV SERI A	IDR	130.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	7	12 Januari 2017 January 12, 2017	11,95%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN SUKUK IJARAH IV SERI B	IDR	167.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	10	12 Januari 2020 January 12, 2020	12,55%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
PLN XII 2010 SERI B	IDR	1.855.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	12	8 Juli 2022 July 8, 2022	10,40%	idAAA	Pefindo	IDX
PLN SUKUK IJARAH V SERI B	IDR	340.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	12	8 Juli 2022 July 8, 2022	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A	IDR	182.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	7	5 Juli 2020 July 8, 2020	8,00%	idAAA	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B	IDR	697.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	10	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,25%	idAAA	Pefindo	IDX
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I	IDR	121.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	7	5 Juli 2020 July 8, 2020	8,00%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	593.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	5	10 Desember 2018 December 10, 2018	9,00%	idAAA	Pefindo	IDX
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	651.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	10	10 Desember 2023 December 10, 2023	9,60%	idAAA	Pefindo	IDX
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	321.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	5	10 Desember 2018 December 10, 2018	9,00%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	108.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	10	10 Desember 2023 December 10, 2023	9,60%	idAAA (sy)	Pefindo	IDX

Dalam rangka menggalang sumber dana jangka menengah PLN juga menerbitkan Surat Hutang Jangka Menengah di pasar domestik, dengan nama MTN PLN I. PLN menerbitkan 10 seri MTN I (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), pada tahun 2008, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 500 miliar. Seluruh seri MTN PLN I telah dilunasi, dengan pelunasan terakhir pada tanggal 15 Desember 2013 untuk seri J. Seluruh surat berharga (obligasi dan MTN) PLN di pasar domestik tersebut mendapatkan peringkat AAA dari Lembaga Pemeringkat Indonesia (Pefindo).

Seluruh surat berharga (obligasi dan MTN) PLN di pasar domestik tersebut mendapatkan peringkat AAA dari Lembaga Pemeringkat Indonesia (Pefindo).

Selain di pasar domestik, PLN juga menerbitkan obligasi dan MTN di pasar uang internasional dalam denominasi US Dollar. Perseroan pertama kali menerbitkan *Global Bond* pada tahun 2006, yaitu *Global Bond* I dengan nominal sebesar USD 450 Juta untuk *Tranche* A dan USD 550 Juta untuk *Tranche* B. Selain itu, PLN juga menerbitkan *Global Medium Term Note* (GMTN) melalui GMTN Program dengan penarikan pertama sebesar USD 1 Miliar pada tahun 2011 dan penarikan kedua sebesar USD 1 Miliar pada tahun 2012.

Obligasi PLN di pasar internasional mendapatkan peringkat BB dari Lembaga Pemeringkat *Standard & Poor's* dan Ba1 dari *Moody's*, sedangkan untuk GMTN yang baru diterbitkan di tahun 2011 dan 2012, mendapatkan peringkat BB/Baa3 dan BBB- dari lembaga pemeringkat yang sama. Kenaikan peringkat tersebut sejalan dengan perbaikan peringkat hutang negara RI.

In order to raise medium-term funding, PLN issued a Medium Term Note in the domestic market, namely MTN PLN I. PLN published 10 series of MTN I (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) in 2008, with a nominal value of Rp500 billion. The entire MTN PLN I series have been fully repaid and the last repayment was for the J series, made on 15 December 2013. PLN's securities (bonds and MTN) in the domestic market received the AAA rating from Pefindo.

All PLN securities in the domestic market, both bonds and MTN, have AAA ranking, as rated by Indonesia Rating Agency (Pefindo).

PLN also issued US dollar-denominated bonds and MTN in the international financial markets, in addition to the domestic market. The first Global Bond was issued in 2006, called the Global Bond I with a nominal amount of USD 450 million for Tranche A and USD 550 million for Tranche B. Furthermore, PLN also issued Global Medium Term Note (GMTN) through GMTN Program with the first withdrawal of USD 1 billion in 2011 and a second withdrawal of USD 1 billion in 2012.

PLN's bonds in the international market were ranked BB by Standard & Poor's, and Ba1 by Moody's. Meanwhile, the GMTN issued in 2011 and 2012 were ranked BB/Baa3 and BBB- by the same rating agencies. The rank increase is in line with the improvement in Indonesia's debt ranking.

Daftar obligasi internasional yang diterbitkan oleh Perseroan adalah: (Lihat juga tabel "Daftar Ikhtisar Efek Perseroan").

The international bonds issued by the Company are: (See also table "Summary List of the Company").

Uraian Description	Jangka Waktu Time Frame	Mata Uang Currencies	Nominal Obligasi Value	Jatuh Tempo Maturity Date	Kupon Cuopon	Peringkat Rating			
						Standard & Poor's	*Moody's*	*Fitch Rating*	*Tempat Listing* Listing Location
GLOBAL BOND PLN I									
The "2016 Notes" - 16 Oktober 2006	10 Tahun Year	USD	550.000.000	17 Oktober October 2016	7,750%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL BOND PLN II									
The "2017 Notes" - 28 Juni 2007	10 Tahun Year	USD	500.000.000	28 Juni June 2017	7,250%	BB	Baa3	BBB-	SGX
The "2037 Notes" - 28 Desember 2007	30 Tahun Year	USD	500.000.000	29 Juni June 2037	7,875%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL BOND PLN III									
The "2019 Guaranteed Notes" - 07 Agustus 2009	10 Tahun Year	USD	750.000.000	07 Agustus August 2019	8,000%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL BOND PLN IV									
The "2020 Guaranteed Notes" - 06 Nopember 2010	10 Tahun Year	USD	1.250.000.000	20 Januari January 2020	7,750%	BB	Baa3	BBB-	SGX
GLOBAL MEDIUM TERM NOTE PROGRAM									
The "2021 Guaranteed Notes" - 22 Nopember 2011	10 Tahun Year	USD	1.000.000.000	22 November 2021	5,500%	BB	Baa3	BBB-	SGX
The "2042 Guaranteed Notes" - 24 Oktober 2012	30 Tahun Year	USD	1.000.000.000	24 Oktober October 2042	5,250%	BB	Baa3	BBB-	SGX
Total		**USD**	**5.550.000.000**						

Jumlah Obligasi yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

Number of Ongoing and Not Yet Maturity Bonds

Keterangan	2014	2015	Description
Obligasi Domestik (IDR)	2.684.400.100.000	2.683.595.100.000	Domestic bonds (IDR)
Obligasi Internasional (USD)	5.550.000.000	5.550.000.000	International bonds (USD)

15

PENGELOLAAN OPERASIONAL

OPERATIONAL MANAGEMENT

hal. 170 - 225

Mengacu kepada pencapaian kinerja operasi perusahaan yang didominasi oleh keterbatasan infrastruktur ketenagalistrikan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi operasi, PLN telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala realisasi berbagai proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Referring to the company's operational performance achievements, which are dominated by electricity infrastructure limitations that impact on the effectiveness and efficiency of operations, PLN has taken strategic steps to resolve the various problems that constrain the realization of electricity infrastructure development projects.

STRATEGI USAHA DI TAHUN 2015

2015 BUSINESS STRATEGY

Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan menyusun prioritas kegiatan sesuai rencana strategis jangka pendek untuk memastikan tercapainya tujuan pengembangan usaha dan terlaksananya amanat Program 35.000 MW.

Identifying the obstacles and prioritizing activities according to the short-term strategic plan, to achieve business development goals and the implementation of the 35,000 MW program mandate.

Strategi usaha yang dijalankan di tahun pelaporan 2015 pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan strategi pengembangan usaha jangka menengah dan jangka panjang. Tahun 2015 masih merupakan Periode Pertumbuhan, dimana pada masa tersebut masih banyak program-program investasi yang harus direalisasikan. Selain realisasi investasi, Perseroan masih harus menjalankan berbagai perbaikan internal, meliputi: perbaikan kondisi keuangan, pemenuhan SDM, perbaikan pengelolaan organisasi, dan sebagainya. Selain perbaikan kondisi internal, Perseroan juga harus memperhatikan dengan seksama kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi hasil-hasil operasional yang telah dijalankan.

Perseroan sebetulnya telah memperhitungkan dengan seksama perkembangan eksternal maupun internal dalam menyusun asumsi-asumsi yang kemudian dijadikan landasan penyusunan target capaian, kerangka strategi dan program kerja yang akan dijalankan. Namun demikian, adakalanya kondisi-kondisi tersebut mengalami perubahan sehingga implementasi strategi dalam jangka pendek akan selalu ditinjau sesuai kondisi yang dihadapi.

The business strategy undertaken in the 2015 reporting year was part of the implementation of the medium-term and long-term business development strategy. 2015 was a period of growth, during which many investment programs were realized. In addition to the realization of these programs, the Company conducted various internal improvements, including: improvement of the financial situation, fulfillment of workforce requirements, improvement of organizational management, and so on. In addition to improving internal conditions, the Company also had to consider external factors that may have affected the results of operations which were executed.

The Company carefully considered the external and internal developments in formulating assumptions used as the basis for formulating achievements, the strategic framework, and work programs. Nevertheless, it is imperative to monitor continuoulsy conditions and adjust the implementation of the short-term strategy faced.

Pada tahun 2015, terdapat sedikitnya tiga kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja Perseroan, yakni pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD yang berada di atas asumsi dan penurunan harga ICP *(International Crude Price)*. Selain itu, Perseroan juga dihadapkan pada terhambatnya penyelesaian berbagai proyek pembangunan pembangkit maupun transmisi karena masalah perijinan dan pembebasan tanah.

Pada tahun 2015 juga ditandai dengan dimulainya Program 35.000 MW, yakni penambahan kapasitas pembangkitan lengkap dengan jaringan transmisi dan distribusi dalam 5 tahun kedepan dengan sasaran meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi lebih dari 97,4% dan adanya pemerataan pembangunan kelistrikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar dan daerah-daerah perbatasan.

Untuk merealisasikan target pengembangan usaha dalam Masa Pertumbuhan dan menjalankan amanat Program 35.000 MW, Perseroan telah menetapkan kendala strategis yang harus diatasi dan menetapkan program-program prioritas untuk direalisasikan. Perseroan juga telah menetapkan Rencana Strategis yang diterapkan pada tahun pelaporan.

TANTANGAN DAN PRIORITAS

Tantangan strategis yang dihadapi perusahaan di tahun 2015 adalah:

1. Kemampuan keuangan, yaitu keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan untuk melakukan investasi sarana ketenagalistrikan.
2. Pembangunan kapasitas sarana ketenagalistrikan:
   a. Diperlukan tambahan kapasitas dan penyelesaian proyek dengan tepat waktu.
   b. Pengembangan bisnis model, sehingga tidak hanya bertumpu pada skema IPP (*Independent Power Producer*) dan PPP/KS (*Public Private Partnership/* Kerjasama Pemerintah dan Swasta).
3. Energi primer, Ketidakpastian kontinuitas ketersediaan pasokan serta fluktuasi harga energi primer.
4. Efisiensi operasi, dilakukan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.
5. Regulasi:
   a. Perijinan penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk.
   b. Implementasi UU No. 30 Tahun 2009.
   c. Kesiapan Perusahaan dan peraturan pendukung untuk implementasi kebijakan *Performance Based Regulatory* (PBR).
6. Kepercayaan pelanggan melalui peningkatan citra positif perusahaan dalam memenuhi peningkatan ekspektasi pelanggan untuk mendapatkan pelayanan listrik.
7. Kesiapan organisasi perusahaan yang meliputi perubahan lingkungan bisnis, perubahan budaya dan peningkatan kualitas SDM.

In 2015, there were at least three external factors which affected the Company's performance. The first two are: the depreciation of the Rupiah which exceeded forecasts and the decrease of ICP (International Crude Price). Lastly, the Company also faced delays in the completion of various power plant and transmission projects because of license issues and land acquisition.

2015 was also marked by the start of the 35,000 MW program, such as: the additional generation capacity equipped with transmission and distribution network over the next five years, with the goals of increasing the electrification ratio to more than 97,4%, and equitable development of electricity infrastructure in remote areas, outermost islands and border areas.

To achieve the business development goals during the growth period and fulfill the mandate of the 35,000 MW program, the Company identified strategic challenges and determined priority programs. The Company also produced a Strategic Plan that was implemented in the reporting year.

CHALLENGES AND PRIORITIES

Strategic challenges faced by the Company in 2015 were:

1. Financial capability: limited funds to invest in electricity infrastructure.
2. Construction of electricity infrastructure:
   a. Additional capacity required and timely project completion.
   b. Development of the business model, in order to reduce dependency on IPP scheme (Independent Power Producer) and PPP/KS scheme (Public Private Partnership).
3. Primary energy: uncertainty of supply continuity and fluctuating primary energy price.
4. Operational efficiency: carried out in order to lower the cost of production.
5. Regulations:
   a. Land use and land acquisition permits for the construction of power plants, transmission lines and substations.
   b. Implementation of Law Num. 30 of 2009.
   c. The Company's readiness and regulatory support for the implementation of Performance-Based Regulatory (PBR) policy.
6. Improving customers' trust through the enhancement of the Company's positive image by fulfilling their increasing expectations to access electricity services.
7. The Company's readiness for reorganization which includes business environment change, cultural change and the improvement of workforce quality.

Prioritas program kerja perusahaan di tahun 2015 adalah untuk mensinergikan tuntutan mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan. Upaya tersebut berhadapan dengan kemampuan pendanaan investasi yang masih terbatas, sehingga Perseroan menyusun program prioritas kerja mencakup:

1. Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
   a. Menerapkan pola perhitungan subsidi berdasarkan kebijakan *Performance Base Regulatory* (PBR).
   b. Meningkatkan harga jual rata-rata melalui kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), implementasi *automatic tariff adjustment*, pemberian subsidi langsung kepada pelanggan yang layak disubsidi, dan mendorong perubahan (penambahan) daya pelanggan.
   c. Mendiversifikasi model pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam skema kredit ekspor yang dijamin oleh *Export Credit Agency* (ECA) dan *direct lending* tanpa jaminan Pemerintah.
   d. Memperbaiki struktur permodalan melalui tambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
   e. Menjaga *compliance* terhadap *debt covenant.*
2. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
3. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
   a. Meningkatkan *availability factor* pembangkit yang telah beroperasi.
   b. Menyelesaikan pembangkit FTP-1, melanjutkan perencanaan dan konstruksi FTP-2, serta pembangkit reguler lainnya, termasuk transmisi dan gardu induk terkait.
   c. Optimalisasi aset dan sumber-sumber energi listrik lokal, pembelian *excess power*, dan sewa pembangkit non BBM.
   d. Mengembangkan pembangkit *peaker* dengan memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai pengganti BBM.
   e. Mengembangkan energi baru dan terbarukan.
4. Menjamin ketersediaan energi primer
   a. Memanfaatkan ketersediaan pasokan gas termasuk kesiapan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU).
   b. Melakukan pencarian sumber gas baru berupa *Liquid Natural Gas (LNG), Coal Natural Gas (CNG) and Coal Bed Methane (CBM).*
   c. Memastikan stok BBM pada level yang efisien dan optimal, serta mengendalikan konsumsi BBM.
   d. Mengendalikan harga beli BBM.
   e. Memastikan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dan tersedianya persediaan rata-rata batubara yang efisien dan optimal.
   f. Memastikan penyediaan batubara sesuai dengan kualitas pembangkit.

The Company's 2015 work program priorities were to synergize the demands of realizing excellence in operational performance and to serve the growing customer base. Efforts were constrained by limited investment capability, therefore the Company prioritized work programs including:

1. Maintaining the Company's financial healthy
   a. Implementing a subsidy calculation scheme based on PBR policy.
   b. Increasing the average selling price by increasing Electricity Rates (TTL), implement automatic tariff adjustment, provide direct subsidies to subsidy-eligible customers and encourage changes or addition to customers' electricity capacity.
   c. Diversifying the funding model through bank loans in the form of an export credit scheme, guaranteed by Export Credit Agency (ECA) and direct lending without government guarantees.
   d. Improving the capital structure through Government's Investment Scheme.
   e. Ensuring compliance with debt covenants.
2. Encouraging the completion of financial closing for Independent Power Producer (IPP) and completion of construction as scheduled.
3. Maintaining sufficient electricity supply.
   a. Increasing plant availability factor for operating plants.
   b. Completing the construction of FTP-1 power plant, continue the planning and construction of FTP-2, as well as other regular plants, including related transmissions and substations.
   c. Optimizing assets and locally-sourced electricity, purchase excess power, and non-fuel plant leases.
   d. Developing peaker plants by utilizing Compressed Natural Gas (CNG) as a substitute to oil.
   e. Developing new and renewable energy.
4. Ensuring the availability of primary energy
   a. Harnessing the availability of gas supply including the readiness of Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
   b. Searching for new gas sources in the form of Liquid Natural Gas (LNG), Coal Natural Gas (CNG) and Coal Bed Methane (CBM).
   c. Ensuring fuel stocks are at an efficient and optimal level, as well as controlling fuel consumption.
   d. Controlling the fuel purchase price.
   e. Ensuring the fullfilment of coal purchase agreements and the availability of coal, efficiently and optimally.
   f. Ensuring coal supply is in accordance with plant quality.

5. Optimalisasi bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang ditransfer melalui kabel laut, dan mengoperasikan pembangkit rendah energi termasuk *biofuel* dan *solar cell.*
6. Meningkatkan efisiensi operasi.
   a. Melakukan efisiensi biaya energi primer melalui peningkatan *availability* dan *capacity factor* pembangkit, memperbaiki *heat rate* dan *specific fuel consumption (SFC)* serta memperbaiki manajemen energi primer.
   b. Menurunkan biaya non-fuel per kWh jual.
   c. Melanjutkan program penurunan susut jaringan.
   d. Menurunkan angka SAIDI – SAIFI.
   e. Mengimplementasikan *Operational Performance Improvement* (OPI).
   f. Meningkatkan efisiensi *working capital.*
7. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
   a. Melanjutkan program Listrik Prabayar.
   b. Menyempurnakan proses bisnis dan mengimplementasikan regulasi pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan efisiensi pengelelolaan *supply chain.*
   c. Implementasi aplikasi dan fungsi pendukung, seperti *Enterprise Asset Management* (EAM) Pembangkit/ Transmisi/Distribusi.
8. Melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan melalui pengelolaan SLA secara intensif.
9. Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
   a. Mengimplementasikan pengembangan organisasi.
   b. Melajutkan program *Corporate University.*
   c. Meningkatkan implementasi budaya perusahaan.
10. Sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis PLN serta meningkatkan kinerja dan ketahanan Anak Perusahaan dalam menghadapi tuntutan bisnis.

5. Optimizing energy mix by generating electricity from non-fuel plants, increasing the capacity of the electricity transferred through submarine cables, and operating a low-energy power plant with biofuel and solar cells.
6. Increasing operational efficiency.
   a. Performing efficiency methods for primary energy costs through increased plant availability and capacity, improving heat rate and specific fuel consumption (SFC) and improving primary energy management.
   b. Reducing non-fuel cost per kWh sold.
   c. Continuing network losses reduction program.
   d. Reducing the number of SAIDI-SAIFI.
   e. Implementing Operational Performance Improvement (OPI).
   f. Improving working capital efficiency.
7. Improving consolidation of business processes to maintain efficiency and service integrity.
   a. Continuing Prepaid Electricity program.
   b. Improving business processes, implement goods and services procurement regulations and improve supply chain efficiency management.
   c. Implementing applications and support functions, such as Enterprise Asset Management (EAM) Generation/Transmission/Distribution.
8. Accelerating construction permit approvals and land acquisition process through intensive SLA management.
9. Optimizing organization and improvement of workforce quality.
   a. Implementing organizational development.
   b. Continuing Corporate University program.
   c. Increasing corporate culture implementation.
10. Synergizing subsidiary companies to achieve corporate strategic direction and to support PLN's business processes, as well as to improve the subsidiary companies' performance and resilience in the face of business demands.

STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN TAHUN 2015

Sasaran strategis Perusahaan di tahun 2015, meliputi:

1. Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
2. Meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan pasokan tenaga listrik dengan memastikan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi, meningkatkan keandalan pembangkit dan jaringan, serta memastikan kecukupan pasokan energi primer.
3. Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui pencapaian bauran energi, pola operasi sistem dan proses operasi lainnya.
4. Memperbaiki kinerja operasional.
5. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

2015 COMPANY DEVELOPMENT STRATEGY

The Company's strategic objectives in 2015 were as follows:

1. Maintaining the Company's financial soundness.
2. Improving the capacity and sustainability of electricity supply by ensuring the completion of generation and transmission projects, improving the reliability of power plants and networks, and ensuring sufficient supply of primary energy.
3. Improving the efficiency of electricity supply through optimization of energy mix, operating system patterns and other operating processes.
4. Improving operational performance.
5. Improving corporate governance practices.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DIJALANKAN

Mempertimbangkan dengan seksama kondisi-kondisi eksternal dan internal yang dihadapi selama tahun 2015, Perseroan telah menjalankan berbagai langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Mengingat berbagai kendala yang dihadapi bermuara pada keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja operasional maupun keuangan perusahaan, Perseroan memfokuskan upaya penyelesaian permasalahan terkait, meliputi:

(i) Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal pembebasan lahan untuk proyek pembangkit maupun transmisi termasuk perintisan upaya untuk menerapkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
(ii) Melakukan amandemen kontrak dalam hal deviasi kontrak.
(iii) Melakukan penyelesaian permasalahan untuk kontraktor yang tidak mampu melalui langkah pengambilalihan pekerjaan.
(iv) Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk IPP.

Disamping hal-hal yang terkait dengan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan dari sisi efisiensi operasi dan keandalan, perusahaan mengambil langkah strategis melalui penerapan program berkelanjutan *Operational Performance Improvement* (OPI), yang bertujuan untuk meningkatkan *performance* pada level terbaik pada bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sumber daya manusia.

Perseroan juga menjalankan langkah strategis lain berupa pelaksanaan implementasi tarif yang diberlakukan oleh pemerintah secara proaktif dengan melakukan sosialisasi kepada pelanggan untuk mensukseskan tarif baru, serta di sisi lain meningkatkan efisiensi operasional untuk mengendalikan biaya. Selain itu, merintis kerjasama *Forex Line* dengan beberapa Bank BUMN untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar.

Terkait dengan pelaksanaan Program 35.000 MW, Perseroan juga telah menjalankan berbagai langkah strategis, meliputi:

1. Pembenahan Struktur Organisasi di tingkat Direktorat.
2. Inventarisasi Peraturan Perundangan di bidang kelistrikan, perijinan dan pembebasan lahan.
3. Menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi negara, seperti BIN, Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk mencari solusi dengan mengedepankan kepatuhan terhadap koridor hukum.

EXECUTED STRATEGIC MEASURES

After carefully considering the internal and external factors arising in 2015, the Company conducted various strategic measures to overcome these challenges. Various constraints caused the delayed completion of electricity infrastructure, which in turn affected the Company's operational and financial performance. The Company focused to resolve the related problems through measures including:

(i) Coordinating with relevant land acquisition-related institutions for generation and transmission projects, including attempting to implement Act Num. 2 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest.
(ii) Amending the contract in terms of contract deviation.
(iii) Resolving issues of non-performing contractors by taking over the work.
(iv) Encouraging the completion of financial closing for IPP.

Beside issues related to the addition of electricity infrastructure in terms of operating efficiency and reliability, the Company took a strategic measure through the implementation of an ongoing program of Operational Performance Improvement (OPI), which aims to optimize performance in the fields of generation, transmission, distribution and human resources.

The Company also conducted other strategic measures, such as implementing proactive Government tariffs, disseminating of information to customers to ensure their success, also increasing operational efficiency to keep costs under control. In addition, the Company initiated Forex Line cooperation with several state-owned banks to anticipate changes in the exchange rate.

In relation to the implementation of the 35,000 MW program, the Company also conducted a variety of strategic measures, including:

1. Improving Organizational Structure at the Directorate level.
2. Inventorying legislation in the field of electricity, licenses and land acquisition.
3. Sustaining cooperation with government institutions such as BIN, police, state attorney and KPK to seek solutions by promoting compliance with the law.

4. Mengantisipasi kebutuhan SDM.
5. Menciptakan prosedur pemantauan kemajuan proyek berbasiskan inovasi teknologi informasi.
6. Menggalang kerjasama dengan lembaga keuangan luar dan dalam negeri (perbankan, lembaga pembiayaan).
7. Mencari alternatif pembiayaan proyek.

KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Seluruh program jangka pendek tersebut merupakan bagian dari realisasi program jangka panjang perusahaan sehingga terdapat keselarasan dan kesinambungan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan tujuan perusahaan dan pencapaian misi perusahaan. Hal tersebut tercermin dalam diagram berikut:

4. Anticipating the needs of human resources.
5. Establishing IT-based procedures as a means to monitor project progress.
6. Promoting cooperation with national and international financial institutions (banking and financial institutions).
7. Seeking alternative project financing.

ALIGNMENT OF SHORT-TERM AND LONG-TERM DEVELOPMENT PROGRAMS

All short-term programs are part of the realization of the Company's long-term programs, thus there is harmony and continuity of electricity development and accomplishment of the Company's missions, as stated in the Company's purpose statement. This is reflected in the following diagram:

KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

ALIGNMENT OF SHORT-TERM AND LONG-TERM DEVELOPMENT PROGRAMS

TUJUAN PERUSAHAAN

- Menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

MISI PERUSAHAAN RJP

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- Menyediakan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

TUJUAN STRATEGIS RJP

- Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
- Meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan pasokan tenaga listrik dengan memastikan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi, meningkatkan keandalan pembangkit dan jaringan, serta memastikan kecukupan pasokan energi primer.
- Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui pencapaian bauran energi, pola operasi sistem dan proses operasi lainnya.
- Memperbaiki kinerja operasional.
- Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

INISIATIF STRATEGIS

- Mengoptimalkan ekspansi kapasitas dan pembiayaan.
- Mengamankan kebutuhan energi primer dengan biaya rendah.
- Melanjutkan *Operational Performance Improvement* (OPI).
- Melanjutkan *Procurement and Construction Excellence.*
- Melanjutkan *Commercial Excellence.*
- Meningkatkan Manajemen *Stakeholders* dan *regulatory.*
- Melanjutkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat.
- Meningkatkan pembentukan citra yang positif.

PRIORITAS PROGRAM KERJA RKAP 2015

- Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
- Menerapkan pola perhitungan subsidi berdasarkan kebijakan *Performance Base Regulatory* (PBR).
- Meningkatkan harga jual rata-rata melalui kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), implementasi *automatic tariff adjustment*, pemberian subsidi langsung kepada pelanggan yang layak disubsidi, dan mendorong perubahan (penambahan) daya pelanggan.
- Mendiversifikasi model pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam skema kredit ekspor yang dijamin oleh *Export Credit Agency* (ECA) dan direct lending tanpa jaminan Pemerintah.
- Memperbaiki struktur permodalan melalui tambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
- Menjaga *compliance* terhadap *debt covenant.*
- Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
- Menjaga kecukupan pasokan listrik.
- Meningkatkan *availability factor* pembangkit yang telah beroperasi.
- Menyelesaikan pembangkit FTP-1, melanjutkan perencanaan dan konstruksi FTP-2, serta pembangkit reguler lainnya, termasuk transmisi dan gardu induk terkait.
- Optimalisasi aset dan sumber-sumber energi listrik lokal, pembelian *excess power*, dan sewa pembangkit non BBM.
- Mengembangkan pembangkit *peaker* dengan memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai pengganti BBM.
- Mengembangkan energi baru dan terbarukan.
- Menjamin ketersediaan energi primer .
- Memanfaatkan ketersediaan pasokan gas termasuk kesiapan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU).
- Melakukan pencarian sumber gas baru berupa LNG, CNG, dan CBM.
- Memastikan stok BBM pada level yang efisien dan optimal, serta mengendalikan konsumsi BBM.
- Mengendalikan harga beli BBM.
- Memastikan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dan tersedianya persediaan rata-rata batubara yang efisien dan optimal.
- Memastikan penyediaan batubara sesuai dengan kualitas pembangkit.
- Optimalisasi bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dikirimkan melalui kabel laut, dan mengoperasikan pembangkit rendah energi termasuk *biofuel* dan *solar cell.*
- Meningkatkan efisiensi operasi.
- Melakukan efisiensi biaya energi primer melalui peningkatan availability dan *capacity factor* pembangkit, memperbaiki *heat rate* dan *specific fuel consumption* (SFC) serta memperbaiki manajemen energi primer.
- Menurunkan biaya *non-fuel* per kWh jual.
- Melanjutkan program penurunan susut jaringan.
- Menurunkan angka SAIDI – SAIFI.
- Mengimplementasikan *Operational Performance Improvement* (OPI).
- Meningkatkan efisiensi *working capital.*
- Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
- Melanjutkan program Listrik Prabayar.
- Menyempurnakan proses bisnis dan mengimplementasikan regulasi pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan efisiensi pengelelolaan *supply chain.*
- Implementasi aplikasi dan fungsi pendukung, seperti EAM Pembangkit/ Transmisi/Distribusi.
- Melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan melalui pengelolaan SLA secara intensif.
- Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
- Mengimplementasikan pengembangan organisasi.
- Melanjutkan program *Corporate University.*
- Meningkatkan implementasi budaya perusahaan.
- Sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis PLN serta meningkatkan kinerja dan ketahanan Anak Perusahaan dalam menghadapi tuntutan bisnis.

COMPANY GOALS

Running a profitable electricity business for public use, which is sufficient both in quantity and quality, and to perform the Government's mandate relating to the electricity industry in order to support the development of the application of Limited Liability Companies principles.

LONG-TERM COMPANY MISSION

- Running an electricity business and other related sectors revolving around customer, employee, and shareholder satisfaction.
- Providing electricity as medium which improves quality of life.
- Striving to make electricity an economic booster.
- Operating an environmentally friendly business.

STRATEGIC GOALS

- Maintaining the financial soundness of the Company.
- Increasing the capacity and sustainability of electricity supply by ensuring the completion of generation and transmission projects, by improving the reliability of power plants and networks, as well as by ensuring a sufficient supply of primary energy.
- Increasing the efficiency of electricity supply through optimization of energy mix, operating system patterns and other operating processes.
- Improving operational efficiency.
- Improving GCG practices.

STRATEGIC INITIATIVES

- Optimizing capacity expansion and financing.
- Securing primary energy demand at a low cost.
- Continuing Operational Performance Improvement (OPI).
- Continuing Procurement and Construction Excellence.
- Continuing Commercial Excellence.
- Improving stakeholders and regulatory management.
- Continuing high performance culture and strong leadership.
- Improving positive corporate image.

2015 WORK PROGRAM PRIORITIES

- Maintaining the Company's financial soundness.
- Implementing a subsidy calculation scheme based on PBR policy.
- Increasing the average selling price by increasing Electricity Rates (TTL), implement automatic tariff adjustment, provide direct subsidies to subsidy-eligible customers and encourage changes or addition to customers' electricity capacity.
- Diversifying the funding model through bank loans in the form of an export credit scheme, guaranteed by Export Credit Agency (ECA) and direct lending without government guarantees.
- Improving capital structure through Government Investment Scheme (PMP).
- Ensuring compliance with debt covenants.
- Encouraging the completion of financial closing for Independent Power Producer (IPP) and completion of construction as scheduled.
- Maintaining sufficient electricity supply.
- Increasing plant availability factor for operating plants.
- Completing the construction of FTP-1 power plant, continue the planning and construction of FTP-2, as well as other regular plants, including related transmission and substations.
- Optimizing assets and locally-sourced electricity, purchase excess power, and non-fuel plant leases.
- Developing peaker plants by utilizing Compressed Natural Gas (CNG) as a substitute to oil.
- Developing new and renewable energy.
- Ensuring the availability of primary energy.
- Harnessing the availability of gas supply including the readiness of Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
- Searching for new gas sources in the form of LNG, CNG and CBM.
- Ensuring fuel stocks are at an efficient and optimal level, as well as controlling fuel consumption.
- Controlling the fuel purchase price.
- Ensuring the fulfillment of coal purchase agreements and the availability of coal, efficiently and optimally.
- Ensuring coal supply is in accordance with plant quality.
- Optimizing energy mix by generating electricity from non-fuel plants, increase the capacity of the electricity transferred through submarine cables, and operate a low-energy power plant with biofuel and solar cells.
- Increasing operational efficiency.
- Performing efficiency methods for primary energy costs through increased plant availability and capacity, improve heat rate and specific fuel consumption (SFC) and improve primary energy management.
- Lowering non-fuel cost per kWh sold
- Continuing network losses reduction program.
- Reducing the number of SAIDI-SAIFI.
- Implementing Operational Performance Improvement (OPI).
- Improving working capital efficiency.
- Improving consolidation of business processes to maintain efficiency and service integrity.
- Continuing Prepaid Electricity program.
- Improving business processes, implement goods and services procurement regulations and improve supply chain efficiency management.
- Implementing applications and support functions, such as EAM Generation/ Transmission/ Distribution.
- Speeding up construction permit approvals and land acquisition process through intensive SLA management.
- Optimizing organization and improvement of workforce quality.
- Implementing organizational development.
- Continuing Corporate University program.
- Expanding corporate culture implementation.
- Synergizing subsidiaries to achieve corporate strategic direction and to support PLN's business processes, as well as to improve the subsidiaries' performance and resilience in the face of business demands.

MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

INCREASING HUMAN RESOURCES COMPETENCY

PLN telah menyusun, menerapkan dan meninjau *Road Map* Pengembangan SDM dengan memperhatikan kondisi perusahaan terkini dan rencana strategis perusahaan, termasuk menyelaraskan kebutuhan SDM untuk mendukung realisasi Program 35.000 MW yang telah kini telah dimulai dan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.

PLN has developed, implemented, and reviewed its Road Map for Human Resource Development taking into account the company's current condition and latest strategic plans, including aligning demand for human resources to support the realization of the 35,000 MW program, which has already started and will continue for several years into the future.

Sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik utama, tuntutan bagi PLN untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia dengan kuantitas dan kualitas yang semakin baik, semakin besar. Terlebih lagi dengan hadirnya Program 35.000 MW yang sudah barang tentu tidak hanya menyangkut kesiapan pendanaan, sistem manajemen proyek maupun teknologi. Lebih dari itu, yang paling mendasar adalah kesiapan seluruh jajaran SDM PLN yang kini tersedia maupun yang kelak akan ditambah, seiring dengan perkembangan realisasi pembangunan proyek-proyek pembangkit berikut sarana transmisi dan distribusinya.

As the primary electricity provider, PLN is responsible for fulfilling the electricity needs of Indonesia with improved quality and quantity. Furthermore, the 35,000 MW power plant program does not merely require the availability of funding, project management systems and technology. More importantly, the most fundamental aspect is the readiness of PLN's entire existing and future human resources, along with the realization of power plant construction, including the infrastructure for transmission and distribution.

Posisi PLN sendiri tetap tidak berubah, yakni BUMN yang dituntut untuk dapat memberikan dividen kepada Pemerintah yang disisihkan dari laba operasional, sekaligus mendapatkan penugasan untuk melistriki masyarakat diseluruh Indonesia. Perkembangan terakhir menunjukkan Pemerintah mulai menjalankan rencana pemilahan kategori 'masyarakat mampu dan tidak mampu/miskin'

PLN's position remains unchanged, as a State-Owned Enterprise with a mandate to provide dividends to the Government from its operational profit, as well as tasked to provide electricity to all communities throughout Indonesia. Recent developments indicate that Government has started implementing a plan in which the community category is divided into 'affluent and underprivileged', along with a

bersamaan dengan rencana pengubahan skema subsidi. Suatu perkembangan yang akan membuat PLN harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk menunjukkan peningkatan kinerja saat skema tersebut direalisasikan.

Untuk menjawab seluruh tantangan tersebut, maka PLN harus dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. PLN meyakini bahwa salah satu elemen strategis dalam menjawab tantangan usaha di masa mendatang, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. Oleh karenanya PLN telah menyusun rencana strategis pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia.

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SDM

PLN mengembangkan rencana dan menjalankan pengelolaan serta pemenuhan SDM berdasarkan posisi dan kualifikasi sesuai pengembangan strategis Perseroan, dengan fokus kepada: (i) memenuhi kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi (ii) mengelola pegawai yang berkinerja rendah, (iii) *outsourcing*/kebijakan kemitraan bisnis dan metodologinya, (iv) menciptakan kemitraan dengan institusi pendidikan dan (v) membangun sistem perekrutan pegawai yang kompetitif bagi *fresh graduate*.

Sebagai organisasi yang terus berkembang, PLN membutuhkan tambahan pegawai yang signifikan, sehubungan dengan bertambahnya pembangkit baru, jaringan yang lebih luas, dan jumlah pelanggan yang lebih banyak. Penambahan pegawai ini akan meningkat semakin pesat seiring dengan mulai direalisasikannya secara resmi Program 35.000 MW di tahun 2015 yang terus akan berlanjut hingga tahun 2019 mendatang.

PLN berupaya mengatasi tantangan ini melalui: (i) memastikan bahwa tenaga kerja yang ada telah dioptimalkan atau memastikan bahwa setiap orang bekerja secara efektif dan efisien dengan produktivitas yang setara dengan perusahaan yang mempraktikkan standar terbaik di dunia, (ii) melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Dari proses review atas kondisi SDM saat ini, khususnya pada fungsi-fungsi operasional, PLN telah mengidentifikasi adanya kelebihan pekerja yang cukup moderat di beberapa fungsi jika dibandingkan dengan standar global. PLN telah menetapkan kelebihan tenaga tersebut sebagai *buffer*, mengingat operasional Perseroan yang akan terus meningkat. PLN juga telah mengidentifikasi kecukupan SDM untuk fungsi-fungsi lain dan mempersiapkan skenario peningkatan kompetensi maupun penambahan tenaga kerja.

Selain dari sisi alokasi SDM dikaitkan dengan kebutuhan fungsi operasional, PLN telah menyiapkan program

plan to change the subsidy scheme accordingly. This is a development which will require PLN to work harder and smarter to show its performance improvement with the realization of this scheme.

In order to respond to all business challenges, PLN must be able to operate more effectively and efficiently. PLN believes one of the strategic elements to respond to future business challenges as well as increasing operational efficiency and effectiveness is the availability of competent and dedicated Human Resources (HR). Therefore, PLN has devised strategic plans for the development and management of human resources.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGIC PLAN

PLN has developed the plan, managed and fulfilled HR based on position and qualification in accordance with the Company's strategic development by focusing on: (i) fulfilling HR quality in accordance with Company needs, (ii) managing low-performing employees, (iii) outsourcing business partnership policies and their methodologies, (iv) developing partnerships with education institutions, and (v) developing a competitive recruitment system for fresh graduates.

As a constantly growing organization, PLN needs to increase its workforce significantly size due to the addition of new power plants, network expansion, and increasing number of customers. This additional employees increased rapidly along with the realization of the 35,000 MW power plant in 2015 and will continue to increase until 2019.

PLN strives to overcome this challenge by: (i) ensuring current optimized employees and each employee works effectively and efficiently with the same productivity level as the standard implemented by the world's best companies, (ii) improving the quality and quantity of its workforce based on organizational needs.

By reviewing the current condition of HR, especially those involving operational functions, PLN has identified a moderate number of employees excess in some operational functions, compared with the global standard. PLN has concluded that this redundancy acts as a buffer, considering the Company's operations will continue to grow. PLN has also identified an adequate number of employees in other functions, and has prepared various competency improvement scenarios along with workforce expansion.

Apart from the HR allocation sector, related to operational function requirements, PLN has prepared various Human

untuk menjamin lahirnya generasi pemimpin perusahaan masa depan melalui berbagai program pengelolaan SDM dengan tujuan meningkatkan kompetensi pekerja, memberi kompensasi sesuai kompetensi, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjamin kesejahteraan pekerja pada masa bakti maupun purna bakti.

ROAD MAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PLN menyusun *Road Map* SDM sebagai acuan dalam melakukan *review* dan pembaruan rencana pengelolaan yang dilakukan secara berkala. Penyusunan *Road Map* memperhatikan kondisi perusahaan terkini dan rencana strategis perusahaan dalam beberapa tahun kedepan. Dalam implementasinya, setiap pelaksanaan *item* program selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan umum pengelolaan SDM, yang menyatakan bahwa,

Sampai dengan akhir tahun 2015, pengembangan SDM sesuai *RoadMap* telah berada pada tahap:

1. Meningkatkan Pemanfaatan *Knowledge Management* (KM) dalam proses bisnis, antara lain melalui:
   - Pembuatan aplikasi penilaian kegiatan KM (APKM).
   - Perancangan materi *Organizational Capital Readiness* (OCR) *Teamwork* dalam *Human Capital Readiness* (HCR).
   - Pembuatan Materi diklat pembelajaran *Knowledge Management.*
   - Penyempurnaan dan pengembangan fitur Portal KM dalam *Media Channeling* yang mana meningkatkan penyerapan pengetahuan melalui media video.
2. Program *Strengthening Alignment Framework* pada Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dalam rangka penyelarasan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu, yang berisi pohon KPI sesuai proses bisnis, *template upload* dalam SIMKPNAS beserta validasi KPI dan targetnya.
3. Implementasi Model Produktivitas Pegawai yang memasukkan unsur lingkungan geografis, demografi dan input internal PLN yang telah disusun di tahun sebelumnya kepada Unit Pilot (13 Unit PLN) dan penelitian untuk pembuatan formula Unit Jasa, serta aplikasi pendukungnya.

Resources Management (HRM) programs to ensure the existence of the Company's next generation of leaders. The program aims to enhance employees' competency by providing compensation based on competency, by creating a conducive work environment, and by ensuring employees' welfare during and after tenure.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ROAD MAP

PLN has drafted the HR Road Map as a guideline to conduct a periodic review and renewal of the management plan. The Road Map design concerns the Company's current condition and its strategic plan over the next few years. In its implementation, each program item always considers HRM general policy, which states that

By the end of 2015, HR development according to the Road Map was in the stages of:

1. Improving utilization of Knowledge Management (KM) in business processes, for example through:
   - Creating an application for KM activity assessment (APKM).
   - Designing Organizational Capital Readiness Teamwork material in the Human Capital Readiness (HCR).
   - Creating KM training material.
   - Completing and developing the KM Portal, featuring Media Channeling to improve knowledge comprehension through video.
2. Strengthening Alignment Framework Program for the Employees Performance Management System, which aims to align Organization Performance with Individual Performance. It contains a KPI tree based on business processes, a template uploaded to National Employee Performance Information System (SIMKP) as well as KPI validation and targets.
3. Implementation of the Employee Productivity Model in which environmental sectors such as geography, demography, and PLN internal input–devised in previous year–were included in a Pilot Unit (13 PLN Unit) as well as research, in order to create a Service Unit formula and supporting applications.

Pengembangan sumber daya manusia PLN selalu mengikuti kondisi perusahaan terutama mengingat lokasi operasional yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan PLN baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

The development of PLN human resources follows the Company's condition, especially to its operational locations which are spread widely throughout Indonesia. The recruitment of new employees as well as improvement of employees' quality and competency are in accordance with PLN's needs in the medium and the long term.

4. Implementasi *Third Party Administration* (TPA) untuk pengendalian fasilitas kesehatan dan pengobatan.
5. Pelaksanaan perubahan Sistem *Payroll* (Penyesuaian terhadap SAP) terkait sistem Remunerasi yang baru.
6. Pengelolaan *payroll* secara terpusat.

Strategi yang dijalankan untuk mencapai tahapan sesuai *road map* SDM, diantaranya adalah memperkuat kinerja organisasi saat ini dan di masa mendatang, mempersiapkan organisasi yang ramping, efektif dan adaptif untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan, desentralisasi kewenangan operasional dan sentralisasi kebijakan yang bersifat strategis, implementasi kriteria kinerja ekselen, menjalankan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif, melakukan penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja yang selaras dengan strategi bisnis, serta meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pencapaian visi dan misi perseroan.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Sebagai salah satu perusahaan dengan jumlah pendapatan terbesar, PLN menyadari keberhasilan suatu korporasi untuk menjadi perusahaan yang unggul dan berkualitas kelas dunia pada dasarnya bukan disebabkan oleh banyaknya *tangible asset* yang dimiliki perusahaan tersebut, namun lebih dikarenakan oleh tingkat pengetahuan *(intangible asset)* yang dimiliki oleh organisasi tersebut. *Intangible asset* adalah aset yang bertumpu pada potensi insani atau karyawan-karyawan perusahaan. Semakin maju kualitas dan tingkat pengetahuan karyawan yang dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan organisasi, maka akan semakin mudah pula bagi perusahaan itu untuk menghasilkan inovasi dan nilai tambah bisnis, dan pada akhirnya memenangkan kompetisi bisnisnya.

4. Implementation of Third Party Administration (TPA) for controlling of medical facility of employee.
5. Implementation of the modification of payroll system (adjusted to SAP), regarding the remuneration system.
6. Management of centralized payroll system.

In order to reach the stages in the HR Road Map, PLN implements certain strategies such as reinforcing current and future organizational performance; preparing a lean, effective, and adaptive organization to support Company needs; decentralizing operational authority and centralizing strategic policy; implementing performance excellence criteria; executing a comprehensive HRM System; improving the Performance Management System in accordance with business strategies; and enhancing employees' participation to achieve the Company's vision and mission.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

As one of the companies with the largest revenue, PLN realizes that a company's ability to become a leading and high world class company is not solely influenced by the number of its tangible assets, but also by its intangible assets. An intangible asset is an asset based on human potential, or the Company's employees. The higher the quality and knowledge level of an employee which can be transformed into an organization's knowledge, the easier it is for an organization to innovate and add value to its operations, in the end, will win the business competition.

Oleh karena pentingnya pengelolaan pengetahuan tersebut, PLN sejak beberapa tahun terakhir mulai membangun suatu *Knowledge Management* sebagai basis dari Organisasi Pembelajar *(Learning Organization)* yang merupakan prasyarat untuk dapat diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang. Dengan adanya budaya pembelajar, maka aliran pengetahuan akan makin lancar dan terbarukan, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya bibit-bibit inovatif diantara insan-insan pekerja PLN.

Because of that knowledge management importance, over the last few years PLN has started to build KM as a basis for becoming a Learning Organization, which is a prerequisite for being acknowledged as a flourishing world class company. With the existence of a learning culture, the flow of knowledge will be smoother and enhanced, so it possible to make a conducive environment for the growth of an innovative generation of PLN employees.

Sejak tahun 2007, Manajemen memutuskan untuk membentuk Tim *Knowledge Management* (KM) untuk menyusun rencana dan strategi penerapan KM.

Since 2007, Management has decided to build a KM team whose responsible for developing plans and strategies for KM implementation.

Strategi Penerapan

Knowledge Management PLN mempunyai visi yaitu "Terbangunnya PLN sebagai suatu organisasi pembelajar dengan melancarkan aliran aset pengetahuan dan mendorong tumbuhnya inovasi yang relevan dengan strategi perusahaan".

Adapun Misi dari *Knowledge Management* adalah:

1. Memfasilitasi semua karyawan perusahaan untuk menjadi *"knowledge worker"*, yang memiliki semangat dan kemampuan untuk berbagi pengetahuan dan kemudian melakukan modifikasi dan implementasi pengetahuan eksplisit untuk meningkatkan kinerja;
2. Melakukan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Mempertahankan dan memelihara aset pengetahuan dari kehilangan atau ketinggalan jaman, dan kemudian menumbuhkembangkan lebih cepat dan lebih efektif;
4. Mengintegrasikan seluruh aset pengetahuan dari setiap unit bisnis, menjadi aset perusahaan;
5. Mensinkronisasi strategi bisnis PLN dengan operasional;
6. Mengintegrasikan *knowledge management,* Organisasi Pembelajar dan proses inovasi di PLN.

Roadmap Knowledge Management sampai dengan tahun 2018 berisikan 5 sasaran utama, yaitu:

1. Membangun budaya dan kesadaran berbagi pengetahuan,
2. Melaksanakan *knowledge management* dalam pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung strategi perusahaan,
3. Menanamkan *knowledge management* dalam proses bisnis,
4. Mengembangkan teknologi kolaboratif dan *e-learning*,
5. Menjadikan inovasi sebagai pendorong bisnis.

Pencapaian sasaran tersebut didukung melalui *initiative action plan* yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Implementation Strategy

PLN KM's vision is "Developing PLN as a learning organization to expedite the flow of knowledge assets and foster innovation aligned with the Company's strategies".

The missions of Knowledge Management are:

1. Facilitating all employees to become a "knowledge worker", with the spirit and capability to share knowledge aimed at executing the modification and implementing the knowledge explicitly for the sake of performance improvement;
2. Performing continuous innovation to enhance the Company's competitiveness;
3. Preserving and maintaining knowledge assets from loss or becoming outdated, and developing them more rapidly and effectively;
4. Integrating all knowledge assets for each business unit into the Company's assets;
5. Synchronizing business strategies with business operations;
6. Integrating the KM, Learning Organization and innovation processes within PLN.

KM Roadmap to 2018 contains five main targets, which are:

1. Building a culture and awareness of knowledge sharing,
2. Implementing KM in employees' competency development to support Company strategies,
3. Integrating KM into business processes,
4. Developing collaborative technology and e-learning,
5. Ensuring innovation is a business support.

The achievement of these targets requires an initiative action plan which must be implemented annually.

Knowledge management report digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

The KM Road Map is depicted in the following chart:

2013-2019 KM ROAD MAP AND INITIATIVE ACTION PLAN

2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2019
Mengembangkan dan memelihara budaya berbagi pengetahuan Developing and maintaining of a knowledge sharing culture					
Level 2,5 Penilaian tingkat kematangan KM Level 2,5 Completeness level assessment	Level 3 Penilaian tingkat kematangan KM Level 3 Completeness level assessment	Level 3,5 Penilaian tingkat kematangan KM Level 3,5 Completeness level assessment	Level 4 Penilaian tingkat kematangan KM Level 4 Completeness level assessment	Level 4,5 Penilaian tingkat kematangan KM Level 4,5 Completeness level assessment	Level 5 Penilaian tingkat kematangan KM Level 5 Completeness level assessment
Mengembangkan teknologi kolaboratif *(Online Community of Practice, Ask the Expert, Expert System, Media Sosial)* Developing collaborative technologies (Online Community of Practice, Ask the Expert, Expert System, Social Media)					
Penyempurnaan personalisasi kanal aliran pengetahuan Improvement of knowledge flow channel personalization Implementasi CoP online Implementation of online CoP Implementasi Ask the Expert Implementation of Ask the Expert Penyempurnaan *workflow* validasi konten Improvement of Content Validation Workflow	Membangun *Media Channeling* untuk kegiatan KM (Jejaring media sosial) Development of Media Channeling for KM activities (social media network)	Pengoptimalan *Media Channeling* untuk kegiatan KM (Jejaring media sosial, IP - TV) Optimization of Channeling Media for KM activities (social media network, IP-TV) Membangun *Media Channeling* KM bagi alumni, mitra kerja dan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya *(stakeholder)* Developing KM Channeling Media for alumni, co-workers, customers and stakeholders			
Menanamkan KM dalam proses bisnis Integrating KM into business processes					
Menjadikan inovasi sebagai pendorong bisnis Ensuring innovation as business support					
Mendorong tumbunya inovasi melalui CoP Boosting innovation growth via CoP *Capturing* SME kritikal Capturing Critical SME	Komersialisasi Karya Inovasi Commercialization of innovation results Komersialisasi Hasil *Capturing*, Modul *E-learning dan Expert System* Commercialization of Capturing Result, E-learning Module, and before expert Expert System	Produksi baru & layanan berbasis teknologi pra - bayar, energi terbarukan & PDKB New Products and Prepaid Technology-Based Services, Renewable Energy, and PDKB			
Pelaksanaan KM dalam pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung strategi perusahaan KM integration into employee competency development to support Company strategies					
Menyusun aplikasi DRR *(Decision Robustness Ratio)* Developing DRR (Decision Robustness Ratio) Application	Menetapkan kebijakan DRR Determining DRR Policy	Mengintegrasikan KM dengan ERP. Integrating KM with ERP			

Strategi Implementasi KM PLN

PLN berupaya mewujudkan suatu *Knowledge Management System* yang terintegrasi secara korporat melalui penyatuan seluruh 3 pilar utama KM, yaitu *People, Process* dan *Technology*.

People: salah satu kriteria pengukuran kompetensi pegawai adalah melalui aktifitas *knowledge management* yang meliputi *knowledge sharing, knowledge capturing, community of practice,* dan inovasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan diri pegawai.

Process: telah diterbitkan dan disempurnakan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan aktifitas *knowledge management* termasuk pemberian penghargaannya.

Technology: menerapkan teknologi kolaboratif yang diharapkan cukup adaptif mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

PLN KM Implementation Strategy

PLN strives to realize an integrated KM System through the three main KM pillars, such as People, Process and Technology.

People: one of the employee competency criteria is measured via KM activities, including knowledge sharing, knowledge capturing, community practice, and innovation which are inseparable from employee self-development practice.

Process: various policies have been developed and completed as guidelines for KM activities including compensation.

Technology: implementing collaborative technologies which are expected to be sufficiently adaptive to developmental trends.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HCMS)

Dalam menghadapi tantangan bisnis ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) telah mempersiapkan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga menjadi insan-insan profesional, berkompeten dan berintegritas tinggi guna mendukung strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Perseroan dengan internalisasi tata nilai dan budaya perusahaan melalui implementasi *Human Capital Management System* (HCMS) yang bercirikan kompetitif, adil dan transparan.

Penyusunan dan implementasi HCMS sangat menjunjung tinggi kesetaraan kesempatan pada seluruh pegawai untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya. Kesetaraan ini tidak mengenal gender, namun berdasarkan pada kemampuan individual pegawai. Setiap tahun Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi pegawai.

HCMS memiliki 4 pilar utama, yakni: i) Sistem Manajemen Kinerja, ii) Sistem Penghargaan/Remunerasi, iii) Sistem Hubungan Industrial, iv) Sistem Kompetensi.

HCMS memiliki tujuan utama sebagai pola pengelolaan SDM untuk mendukung strategi dan pencapaian korporat yang selaras dengan optimasi sumber daya terutama biaya-biaya jangka panjang Perseroan, yang diberlakukan kepada pegawai yang diangkat sejak tahun 2011 (kualifikasi SMA/SMK) dan tahun 2012 (kualifikasi D3, S1/D4, S2 dan Profesional) untuk kemudian secara jangka panjang akan diselaraskan dengan keseluruhan entitas pegawai yang ada.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HCMS)

To face electricity industry challenges, PT PLN (Persero) has prepared its human resources to become professional, competent and people of high integrity to support the Company's short-, medium-, and long-term strategies. This has been achieved through the internalization of the Company's values and culture, and implementation of Human Capital Management System (HCMS) with competitive, fair, and transparent characteristics.

The design and implementation of HCMS strongly uphold equality and opportunity for all employees to develop according to their competencies. It does not discriminate towards gender, and focuses purely on individual workers' ability. The Company annually conducts special promotion trainings to fill certain positions, which forms part of the employee regeneration process.

HCMS has four main pillars: i) Performance Management System, ii) Remuneration System, iii) Industrial Relations System, iv) Competency System.

As the HR management system, HCMS main objective is supporting the Company's strategy and objective in line with HR optimization, especially in areas relating to the Company's long-term expenses. This optimization is applicable for employees recruited since 2011 (with High School/SMK qualification) and 2012 (D3, S1/D4, S2 and Professional qualifications). In the long term, this will be applied to all existing employees.

Adapun uraian pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan SDM PLN berdasarkan implementasi HCMS tersebut adalah:

1. Manajemen Kinerja

PLN kini telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dengan tujuan: i) terwujudnya penilaian kinerja yang dapat membangun dan membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi bagi Perseroan, ii) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara lebih transparan, terukur, dan obyektif sehingga Perseroan dapat memberikan kompensasi dan atau penghargaan yang berkeadilan dan sepadan dengan Kinerja Pegawai selama bekerja dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

PLN menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai indikator keberhasilan dari sebuah organisasi/unit kerja/pejabat pimpinan Unit dan individu yang ada dalam Perusahaan. KPI adalah ukuran kinerja itu sendiri, sedangkan target KPI adalah target kinerja yang menyatakan standar dan kesepakatan hasil yang diharapkan dan keselarasannya dengan *job description* jabatan adalah yang utama untuk memastikan setiap pegawai memiliki pekerjaan yang berkesesuaian dan selaras dengan tujuan utama dibentuknya jabatan tersebut. PLN mengembangkan KPI melalui *value drivers* yang terkait dengan sasaran-sasaran strategis.

KPI yang terkait dengan bidang SDM diukur melalui Perspektif SDM berbasis *Malcolm Baldrige*, yaitu:

1. *Human Capital Readiness*
2. *Organization Capital Readiness*

2. Sistem Remunerasi

PLN menetapkan besaran remunerasi Pegawai mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai beserta peraturan perubahannya yang terakhir yaitu SK Direksi No.0035.K/DIR/2014, yakni setiap pegawai berhak atas kompensasi berdasarkan:

a. *Pay for person* (P1), merupakan kompensasi dalam bentuk uang setiap bulan untuk menghargai kompetensi, pengalaman kerja dan masa kerja yang besarannya ditentukan berdasarkan level *grade* dan skala *grade*.
b. *Pay for position* (P2), diberikan sebagai Kompensasi atas bobot jabatan yang dibebankan kepada Pegawai yang menggambarkan *know how*, *problem solving*, *accountability*. Rumusan umum penetapan P2 adalah = indeks daerah x koefisien posisi x tarif posisi.
c. *Pay for performance* (P3), diberikan sebagai kompensasi atas prestasi kerja Pegawai berdasarkan hasil kinerja yang dicapai baik secara individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

The details of PLN HRM activities based on HCMS implementation include:

1. Performance Management

Currently, PLN applies the Employees Performance Management System with the following objectives: i) performance assessment that can build and cultivate a culture of learning and accomplishment, as well as motivate employees to enhance their competencies and contribution to the Company, ii) as a guideline to evaluate employees performance in a more transparent, quantifiable and objective manner, so the Company can provide fair and equal compensation and/or reward based on employee performance in one semester of work.

PLN's KPIs are a success indicator of organization/work unit/unit leaders and individuals within the Company. KPI is a measure of performance itself, whereas a KPI target is a performance target which states that the standard and agreed upon expected result and its compliance with the job description are the most aspects for ensuring every employee has a proper position and in accordance with the main objective of job creation. PLN developed KPIs through value drivers related to the strategic targets.

The KPI's associated with HR sectors which are measured by HR perspectives based on Malcolm Baldrige Criteria are:

1. Human Capital Readiness
2. Organizational Capital Readiness

2. Remuneration System

PLN determined employee remuneration in reference to the Decree of PT PLN (Persero)'s Board of Directors Num. 007.K/DIR/2008 on Employee Remuneration System including its latest revised regulations, Decree of the Board of Directors Num. 0035.K/DIR/2014, which states every employee is entitled to compensation based on:

a. Pay for person (P1), which is compensation in the form of money provided every month to value competency, work experience, and working period. Its amount is determined based on grade level and grade scale.
b. Pay for position (P2), is awarded as compensation for job weighting assigned to employees representing knowledge, problem solving ability and accountability. The general formula in determining P2 is = Area Index x Position Coefficient x Position Rate.
c. Pay for performance (P3), is awarded as compensation for the employee's work performance, which is a real and measurable contribution, either individually or in a team.

Selanjutnya, didefinisikan pula bahwa:

1. *Pay for Person* (P1) merupakan Kompensasi tetap bulanan Pegawai, yang terdiri atas Tunjangan Kompetensi dan Tarif *Grade*.
2. Tunjangan Kompetensi dan Tarif *Grade* merupakan konversi dari unsur-unsur penghasilan Pegawai sebelum diberlakukannya Keputusan ini yang terdiri atas Gaji Dasar, Tunjangan Dasar, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Jabatan.
3. *Pay for Position* (P2) diberikan berupa Tunjangan Posisi yang ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

Furthermore, there are also the following definitions:

1. Pay for Person (P1) is a Fixed Monthly Compensation, consisting of Competency Allowance and Grade Rate.
2. Competency Allowance and Grade Rate are a conversion of employee income elements before this Decree is applied, consisting of Basic Salary, Basic Allowance, Region Allowance, and Position Pay.
3. Pay for Position (P2) is awarded as a Position Pay and determined by the following formula:

Tunjangan Posisi = Indeks Daerah x Koefisien Posisi x Tarif Posisi

Incentive Position = Regional Index X Coefficient of Position X Tariff Position

4. *Pay for Performance* (P3) diberikan berupa Kompensasi berdasarkan hasil kinerja Pegawai baik secara individu maupun kelompok.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka remunerasi Pegawai di PT PLN (Persero), didasarkan pada masa kerja yang direfleksikan skala pada P1, tingkat pendidikan yang direfleksikan grade pada P1, dan prestasi kerja pada P3.

Selain remunerasi di atas, PLN memberikan paket jaminan sosial pegawai, meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan Bantuan Ganti Rugi.

Untuk jaminan Pensiun, maka bentuk pengelolaannya melalui dua skema, yakni Dana Pensiun Iuran Pasti dan Dana Pensiun Manfaat Pasti.

3. Hubungan Industrial

PLN berupaya membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat, melalui pembahasan dan penyusunan kerangka kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB disusun bersama-sama perwakilan pekerja dalam Serikat Pekerja, yang akan ditinjau secara berkala tiap 2 (dua) tahun sekali.

Sebagai salah satu upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memulai tahapan awal rangkaian perundingan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk maksud tersebut Perseroan telah menyusun Bahan Perundingan PKB dan

4. Pay for Performance (P3) is provided as compensation based on employee performance as an individual and in a team.

Based on the explanations above, the employee remuneration at PT PLN (Persero) is determined based on years of service reflected on the P1 grade, education level reflected on the P1 grade, and work achievement on P3.

Besides the remuneration program, PLN also provides a social security package such as Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance, Pension Insurance, Health Care Insurance, and Compensation Aid.

The Pension Insurance is managed by two schemes: Defined Contribution Pension Fund and Defined Benefit Pension Fund.

3. Industrial Relations

PLN strives to build good workforce relations through a discussion and development of a partnership frame as outlined in the Collective Agreement. The collective agreement is drafted by the representatives of the Labor Union and is reviewed every two years.

As one of the measures to create a conducive work environment, the Company has entered into the initial stages of a series of discussions to determine the framework of the collective agreement. The Company has identified the Collective Agreement discussion

melakukan pembekalan kepada Tim Negosiasi PKB, baik dari unsur manajemen maupun unsur Serikat Pekerja. Tim Perunding PKB dari Perseroan tersebut dibentuk Tim Perunding Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0088.K/DIR/2015 tanggal 15 April 2015 kemudian diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0139.K/DIR/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Sementara PKB yang baru masih dalam tahap penyusunan dan perundingan, maka yang saat ini diberlakukan adalah Addendum PKB 2010 – 2012 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2013 lalu untuk menjamin terjalinnya Hubungan Industrial yang harmonis.

Pada tahun 2015, agar proses perundingan mengenai butir-butir kesepakatan dalam PKB yang masih dibicarakan memiliki kualitas yang semakin baik, diterima kedua belah pihak dan memberi manfaat optimal kepada kedua belah pihak. Perseroan menyelenggarakan beberapa program terkait, yakni:

- Studi Banding
  Studi Banding dilakukan dengan tujuan *benchmarking* dalam mempersiapkan *draft* Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Studi Banding dilakukan kepada 2 (dua) perusahaan BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia dan PT Pertamina.
- Supervisi Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial.

Selain melalui program Studi banding Perseroan melaksanakan pertemuan periodik dengan Serikat Pekerja (SP) dalam forum Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) dalam rangka memantapkan kualitas hubungan industrial yang telah terjalin semakin kondusif.

Perseroan meyakini kualitas hubungan industrial yang meningkat akan membuat perundingan bagi penyusunan PKB dalam waktu dekat akan berjalan lancar. Mengingat PKB juga memberi andil besar bagi terciptanya suasana kerja yang semakin kondusif, yang memungkinkan seluruh pegawai dapat memberikan kompetensi terbaiknya dan meyakini bahwa kerja kerasnya akan mendapatkan imbalan yang layak dari perusahaan.

Pada PKB dimuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja secara seimbang, dengan maksud untuk:

- Memberi kepastian hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja yang meliputi: hubungan industrial, syarat-syarat kerja, serta Tata Tertib Perusahaan;
- Memperteguh dan meningkatkan kerjasama antara Perusahaan dan Pekerja;
- Mengatur cara penyelesaian perbedaan pendapat secara adil sehingga tidak mengarah pada perselisihan dan setiap perbedaan akan selalu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Selain tiga kegiatan tersebut, berbagai kegiatan Hubungan Industrial yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015, mencakup:

topics and briefed the Collective Agreement Negotiation Team. Briefing was conducted by Management and the Labor Union. The Company's Collective Agreement Negotiation Team was established based on the Decree of PT PLN (Persero)'s Board of Directors Num. 0088.K/DIR/2015 dated 15 April 2015 was revised by the Decree of PT PLN (Persero)'s Board of Directors Num. 0139.K/DIR/2015 dated 24 June 2015.

As the new Collective Agreement is still in the drafting and discussion stage, the Addendum of Collective Agreement 2010-2012 signed on 11 October 2013 is currently being applied to ensure harmonious Industrial Relations.

In 2015, in order to improve the quality of Collective Agreement clauses still under discussion, Collective Agreement clauses were accepted and was beneficial for both parties. The Company has conducted various programs such as:

- Comparative Study
  The Comparative Study was aimed to benchmark in drafting the collective agreement. The study was conducted in two State-Owned Enterprises, PT Kereta Api Indonesia and PT Pertamina.
- Supervision on Industrial Relations Dispute Cases

In addition to the Comparative Study, the Company also conducts periodic meetings with the Labor Union (SP) in the Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) to strengthen existing Industrial Relations, resulting in a more conducive work environment.

The Company believes that improving the quality of industrial relations will make the discussion smoother of the next collective agreement draft. collective agreement can contribute significantly to a conducive work environment, making all workers to perform to their base competency and to believe that their hard work will get an appropriate compensation from the company.

The collective agreement contains fair and balanced rights as well as obligations aimed at:

- Granting certain rights and obligations for the Company and employees, including industrial relations, employment conditions, and the Company's Code of Conduct;
- Strengthening and improving the partnership between the Company and employees;
- Justly regulating disagreement resolution in order to prevent disputes, and ensuring every disagreement is resolved through discussion towards consensus.

In addition to the three activities above, various Industrial Relations activities were conducted during 2015, such as:

- Memberikan saran dan supervisi kasus–kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan serta kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Disiplin Pegawai.
- Menangani dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
- Menginventarisir dan membuat rekapitulasi data Perselisihan Hubungan Industrial serta penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Unit-unit PLN.

- Providing suggestions to and supervision of Industrial Relations Dispute (PHI) cases and other cases relating to the implementation of Employee Discipline Regulation.
- Handling alleged employee discipline violations.
- Inventorying and making data recapitulation of PHI along with the settlement of employee discipline violation cases in PLN units.

4. Kesetaraan Kesempatan dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir

PLN melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dengan menerapkan ketentuan bahwa pengembangan eksekutif dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level, dan pengelolaan calon pemimpin masa depan dilakukan melalui penyempurnaan sistem *talent management*.

4. Equal Opportunities in Competency and Career Development

PLN consistently implements a competency-based HR Management System by determining regulations in which the executive is implemented through improvement of HR competencies based on each level's requirements. Potential future leaders are managed through improvements to the talent management system.

PLN memberikan kesempatan setara pada seluruh pegawai untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya. Kesetaraan ini tidak mengenal gender, namun semata-mata berdasarkan pada kemampuan individual pegawai.

PLN provides all its employees with equal opportunities to develop based on their competency. This equality is regardless of gender and is based entirely on the abilities of each individual employee.

Jabatan Manajer Menurut Jenis Kelamin
Manager Position Based on Gender

Uraian	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	Description
Manajemen Atas	4	79	83	Senior Management
Manajemen Menengah	37	325	362	Middle - Level Management
Manajemen Dasar	114	1.090	1.154	Base - Level Management
Jumlah	**155**	**1.444**	**1.599**	**Total**

Sesuai dengan tabel tersebut tampak bahwa pada setiap jenjang manajer terdapat sebagian pejabat berjenis kelamin wanita. Mayoritas pejabat berjenis kelamin pria semata-mata karena sifat usaha yang lebih banyak berlangsung di lapangan yang membuat kebutuhan pegawai laki-laki lebih dominan.

As per the table, each level of management comprises both genders. Due to the nature of PLN's business, The employee majority is men because the nature of PLN's business makes men more dominant.

Program Rekrutmen

Rekrutmen

Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, *aptitude test*, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut mengikuti program orientasi. Kebijakan umum yang diterapkan adalah bahwa proses penerimaan pegawai berawal dari kebutuhan unit bisnis (*user)* dan dalam bagian akhir (wawancara) juga melibatkan *user*.

PLN merealisasikan proses rekrutmen untuk jenjang jabatan tertentu secara terbuka untuk menjaring calon SDM yang kompeten dan bertalenta tinggi. Sementara untuk rekrutmen rutin bagi calon pegawai dari jenjang pendidikan S1/D4/D3 dilakukan dengan metode *direct shopping* dan rekrutmen terbuka. Rekrutmen *fresh graduate* ini dilakukan secara terpusat dan dikoordinir oleh Kantor Pusat, sedangkan untuk rekrutmen pekerja dari jenjang pendidikan SMA/SMK pelaksanaannya dilakukan terbuka dan dapat dilakukan oleh masing-masing Unit Induk PLN dengan supervisi dari bidang rekrutmen dan seleksi kantor pusat.

Hasil proses rekrutmen dievaluasi tiap tahun, dan dilakukan *mapping* dengan kebutuhan pegawai dari masing-masing unit pada tiap periode operasional. Proses rekrutmen dari masing-masing unit akan terus dibuka hingga pagu kebutuhan telah terpenuhi.

Pada tahun 2015, PLN menerapkan program rekrutmen dengan berbagai strategi sebagai berikut:

Total target penerimaan pegawai baru di tahun 2015 adalah 4.397 orang yang terdiri dari penetapan 2015 sejumlah 3.696 orang dan luncuran 2014 sejumlah 701 orang (S2 sejumlah 4 orang, D3 Elektro sejumlah 166 orang, SMA/SMK sejumlah 381 orang dan SMA/SMK khusus PLTD terluar sejumlah 150 orang).

1. Kerjasama rekrutmen terbuka tingkat S1/D4/D3 melalui even acara *Job Fair* dan *career expo* diantaranya di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Politeknik Negeri Bandung;
2. Rekrutmen terbuka tingkat S1/D4/D3 di beberapa kota besar di Indonesia meliputi kota Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar dan Manado;

Recruitment Program

Recruitment

The recruitment process is based on the short term and long-term plan for workforce requirements. The selection process involves a third party and is conducted through fulfillment of administration aspects, an aptitude test, a psychological test, a medical test, and an interview. Before being appointed as a permanent employee, a prospective employee completes an orientation program. The general policy applied is the recruitment process which starts with the needs of the business units (users), and ends with an interview which also involves the users.

The recruitment process for certain position levels is conducted openly and aims to find prospective employees with high competency and capabilities. For regular recruitment of prospective employees freshly graduated from university or an academy (S1/D4/D3 qualification), the "direct shopping" method and open recruitment is used. This fresh graduate recruitment is executed centrally and coordinated by Head Office, whereas the recruitment process for positions with SMA/SMK qualification able to be executed openly by each PLN main unit and supervised by recruitment and selection department of PLN head office.

The recruitment result is evaluated yearly and the mapping process is conducted based on each unit's workforce needs during each operational period. Each unit's recruitment process is continuing until the needs limit is fulfilled.

In 2015, PLN applied a recruitment program using the following strategies:

The total recruitment target for new employees in 2015 was 4,397 people, comprising 3,696 placements in 2015 and a further 701 from 2014 programs (4 with Master's Degree, 166 with 3-year diplomas in electronics, 381 high school students and 150 for Outermost Diesel Power Plant).

1. Open recruitment cooperation for S1/D4/D3 levels through Job Fairs and career expos at Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh November dan Politeknik Negeri Bandung;
2. Open recruitment for S1/D4/D3 levels in large cities across Indonesia, including Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar and Manado;

3. Rekrutmen khusus bekerjasama dengan beberapa universitas seperti UI, UGM, ITB, Politeknik Negeri Bandung, Undip, Politeknik Negeri Semarang, ITS, Politeknik Negeri Malang;
4. Rekrutmen tingkat SMA/SMK yang dilaksanakan oleh unit PLN di seluruh Indonesia; tahap 1 dilakukan di 33 lokasi secara serentak dan tahap dua dilakukan di 21 lokasi yang dilakukan oleh unit dengan evaluasi yang dilakukan oleh PLN pusat;
5. Program D3 kelas kerjasama pada lima perguruan tinggi yaitu Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Jumlah calon Pegawai yang telah diseleksi sampai akhir 2015 adalah sebanyak 4.603 orang dari total target 4.397 (pencapaian 105%) yang terdiri dari 2.267 orang untuk tingkat S1/D4/D3 dan 2.336 orang untuk tingkat SMA/SMK.

Berikut ini adalah tabel pagu dibandingkan realisasi pencapaian rekrutmen 2015:

3. Special recruitment in cooperation with several universities, such as UI, UGM, ITB, Politeknik Negeri Bandung, Undip, Politeknik Negeri Semarang, ITS, Politeknik Negeri Malang.
4. High school level recruitment conducted by PLN units across Indonesia; stage 1 took place in 33 locations simultaneously, while stage 2 took place in 21 locations with assessment by PLN Head Office;
5. D3 program cooperation with five colleges: Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Negeri Malang and Politeknik Negeri Ujung Pandang.

As of the end of 2015, a total of 4,603 people had been selected out of a targeted 4,397 (105% achievement), comprising 2,267 at S1/D4/D3 level and 2,336 at high school level.

Here is the employee limit compared with 2015's recruitment achievement:

Pagu Cap					**Realisasi** Realization					**Pencapaian** Achievement
S2	S1	D3	SMA	TOTAL	S2	S1	D3	SMA	TOTAL	%
4	949	1.241	2.203	4.397	7	1.024	1.243	2.336	4.603	105%

Program Pendidikan dan Pelatihan

PLN mengembangkan sistem pembelajaran berjenjang sesuai kebutuhan organisasi, dimana jenis pelatihan terbagi atas beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus operasional hingga pelatihan manajerial.

Program pendidikan dan pelatihan meliputi seminar dan kursus yang dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Adapun jenis pendidikan dan pelatihan meliputi:

Diklat Seleksi Pegawai Baru
Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada seorang calon pegawai. Diklat ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusdiklat, dengan mekanisme diklat yang dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang profesi.

Diklat Profesi
Adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi bidang yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Education and Training Program

PLN has developed a tiered learning system based on organizational needs, in which training categories are divided into several stages, starting from operational special training to managerial training.

The education and training program involves various seminars and courses conducted in Indonesia and overseas, which aim to improve employee competencies.

Various types of education and training are:

New Employee Selection Training
This training provides briefing for candidates and is conducted by PT PLN (Persero) Centre of Education and Training. Its mechanism is divided based on education level and professional field.

Professional Training
This training aims to fulfill each sector's competency requirements based on job competency needs, for both structural and functional positions.

Diklat Profesi merupakan pelatihan Ketrampilan Kompetensi yang meliputi berbagai jenis pelatihan sesuai kompetensi bidang tugas, antara lain: Administrasi, Audit, Distribusi, Pembangkitan, SDM, Keuangan, Komunikasi, Produksi Peralatan, Ketenagalistrikan dan sebagainya.

Professional Training and Competency Skills include various trainings based on job competencies such as Administration, Audit, Distribution, Generation, HR, Finance, Communication, Equipment Production, Electricity, and so forth.

Diklat Penunjang

PLN juga menyelenggarakan Diklat Penunjang, yakni diklat yang dilaksanakan untuk menambah kompetensi yang dipersyaratkan dalam kebutuhan kompetensi jabatan, sehingga nantinya pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan jabatan. Diklat yang menjadi kebutuhan utama perusahaan meliputi bidang *Knowledge Management*, Pengadaan Barang dan Jasa, Lingkungan, Hukum, Manajemen Risiko, Kehumasan dan lain-lain. Bidang-bidang yang menjadi prioritas dalam diklat penunjang meliputi: akuntansi, teknologi informasi, teknik pemeliharaan SUTET, dan sebagainya.

Support Training

PLN also conducts Support Training which aims to improve the required job competencies, so employees can execute their tasks properly. Various fields of training which the Company requires are Knowledge Management, Goods and Services Procurement, Environment, Law, Risk Management, Public Relations, and so forth. Other fields which are prioritized as Support Training are Accounting, Information Technology, Super Extra Voltage Electricity Network (SUTET) maintenance techniques, and so forth.

Diklat Penjenjangan

Adalah diklat yang dilakukan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan bagi pegawai struktural yang dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dengan PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan *(Corporate University)* sebagai pelaksana utama. Di dalam diklat Penjenjangan inilah nantinya akan dipilih calon pemimpin yang mempunyai visi ke depan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di dunia dan mampu bersaing dengan negara lain.

Tiered Training

Tiered Training aims to fulfill Job Competencies Requirements for structural employees and is conducted as Tiered Education and Training, with PT PLN (Persero) Center of Education and Training (Corporate University) the main organizer. During Tiered Training, potential leaders with a vision for the future who are responsive to global changes, and are able to compete with counterparts in other countries.

Diklat penjenjangan berupa Kursus Manajemen yang meliputi 5 jenis pelatihan, yakni: *Supervisory* Dasar, Supervisory Atas, Manajemen Dasar, Manajemen Menengah dan Manajemen Atas.

Tiered Training is conducted as five Management Courses, which are Base-level Supervisory, Senior Supervisory, Base-level Management, Mid-level Management, and Senior Management.

Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti

Diklat ini diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti, bertujuan agar pegawai lebih siap dalam menghadapi pensiun serta mempunyai kegiatan yang positif untuk mengisi masa pensiun.

Retirement Preparatory Training

This training is provided for employees who are about to enter their retirement period, and aims to prepare them for retirement as to have positive activities to fill their post-retirement days.

Program Pengembangan Eksekutif

Setiap tahun Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi pegawai.

Executive Development Program

The Company provides special training annually to support promotion of certain positions, as part of the employee regeneration process.

Selain Optimasi Pegawai PLN juga menekankan percepatan pembentukan kader-kader pimpinan masa depan. Program yang dijalankan meliputi: *Talent Management* dan Perancangan Diklat Penjenjangan bagi golongan pegawai kategori tertentu. Rincian realisasi program Pengembangan Eksekutif adalah:

a. Perancangan ulang Diklat Penjenjangan EE I s.d. EE III sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini.

As well as Employee Optimization, PLN also emphasizes the rapidity of preparation of the future leader hierarchy. PLN conducts various programs such as Talent Management and Tiered Training Designation for certain employee categories. The details of the Executive Development program are:

a. Redesignation of Tiered Training for EE I to EE III, based on current organizational needs.

b. Penerapan konsep baru pelaksanaan diklat Penjenjangan yaitu:
   - Duk – dik (pegawai PLT) artinya Diklat EE hanya bersifat sebagai *development* dimana peserta harus melaporkan kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan PLT. Peserta tersebut akan melaporkan program-program unggulan yang telah dilakukan selama menjadi PLT.
   - Dik – duk (kandidat) artinya Diklat EE dianggap sebagai *selection* and *development* dan dilengkapi dengan penugasan *Project Assignment*. Untuk jangka panjang, seleksi meliputi Uji Pra EE (MSDM, MKEU, M. Perubahan dan M.Strategik) dan *Assessment Centre*. *Assessment Centre* yang semula dilaksanakan di akhir, saat ini dilaksanakan di awal pembelajaran.

Penyelarasan pemahaman pengelolaan data kepegawaian di seluruh unit PLN yang bertujuan untuk peningkatan akurasi data yang berguna dalam hal pengambilan keputusan, khususnya keputusan-keputusan strategis.

Selain jenis-jenis pelatihan tersebut di atas terdapat pula pelatihan Pengembangan Manajemen yang meliputi tiga jenis pelatihan yaitu Studi/Kajian Manajemen, Jasa Konsultasi Manajamen dan Seminar/ Lokakarya Manajemen.

Melaksanakan Asesmen Kompetensi Inti Bertujuan untuk Lebih Memahami Kompetensi Pegawai secara Lebih Pasti dan Terarah.

b. Implementation of new concepts for Tiered Training, which are:
   - Duk-dik (acting employees) means the EE Training serves as a development program in which participants must report on their activities while under the employ. Participants should report that excellence programs have been conducted during their service as acting employees.
   - Dik-duk (candidates) means that the EE Training is regarded as a selection and development program along with the Project Assignment. For the long-term, the selection process includes a Pre-EE Test (such as HRM, Financial Management, Change Management and Strategic Management) and Assessment Centre Test. Previously, the Assessment Centre Test was conducted post-training, but currently it is conducted at the beginning of training.

The alignment in understanding of workforce data management of all PLN units aims to increase data accuracy which is useful for decision making, especially for strategic decisions.

Besides these trainings, PLN also conducts three types of Management Development Training, which are Study/Research Management, Consultancy Service Management, and Seminar/Workshop Management.

Implementing of Core Competency Assessment aims to Provide a More Focused and Reliable Understanding of Employee Competency.

PROGRAM DANA PENSIUN

Dana Pensiun PLN merupakan Badan Hukum yang terpisah dari Pendirinya dan bertugas mengelola dana yang dihimpun dari iuran pensiun untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan setelah berhenti bekerja bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak).

Tujuan pendirian Dana Pensiun PLN adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai PT PLN (Persero) beserta anak perusahaannya yang menjadi Mitra Pendiri, yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batam dan PT Indonesia Comnets Plus.

Penyelenggaraan program pensiun ini khusus bagi pegawai pendiri dan mitra pendiri yang diangkat menjadi pegawai sebelum Januari 2012. Seiring dengan peralihan bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi

PENSION FUND PROGRAM

The PLN Pension Fund is separate Entity from its founder and has a responsibility to manage funds collected from pension contributions. The objective is to ensure and maintain the continuity of post-retirement income of Members and Beneficiaries (Widow/Widower/Child).

The PLN Pension Fund was established to implement the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for PT PLN (Persero) employees and its co-founding subsidiaries, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batam and PT Indonesia Comnets Plus.

This pension program is specifically applied to the employees of the founder and co founders employed prior to January 2012. Along with the legal transition of General State-Owned Electricity Company into PLN (Persero), the

Perusahaan Perseroan (Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero), atau disebut juga Dana Pensiun PLN (DP-PLN).

Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2013 sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-481/NB.1/2013 tanggal 11 September 2013.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang program pensiun, maka disusun Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero). Saat ini yang berlaku adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 008.E/DIR/2013 tanggal 18 November 2013.

OPTIMALISASI PEGAWAI

Sehubungan dengan Program Pembangunan 35.000 MW Pembangkit baru maupun rencana pembangkit esksiting beserta fasilitas pendukungnya, membuat PLN terpacu untuk mengoptimalkan kompetensi pegawai yang dimiliki saat ini, selain mulai melakukan proses rekrutmen berjenjang sesuai kebutuhan.

Menyusul perubahan struktur organisasi yang mendasar, dengan adanya 7 regional sebagai Direktrorat yang menangani proses bisnis *end-to-end*, program-program yang tercakup dalam HCMS dipercepat implementasinya. Penjenjangan, pelatihan, penilaian kinerja serta proses mutasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pegawai dijalankan bersamaan, dengan ringkasan program sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan karir dan kompetensi Pegawai sebagai tindak lanjut dari kelulusan Diklat Penjenjangan, Uji Portofolio Kompetensi, hasil *fit and proper test*.
2. Pelaksanaan mutasi Pegawai antar unit PLN dan program rotasi OJT angkatan 39 dan 40 dengan Pegawai pengangkatan Pusat sejak tahun 2000 di luar Pulau Jawa untuk mutasi ke Unit-unit yang ada di Pulau Jawa.
3. Pengusulan Diklat Penjenjangan bagi Pegawai yang sudah memenuhi syarat dan menjadi prioritas untuk mengikuti diklat penjenjangan.
4. Pengisian Formasi Jabatan yang menjadi kewenangan PLN Pusat untuk jabatan yang kosong akibat pegawai yang pensiun atau rotasi mutasi mulai dari Level Manajemen Dasar Unit Pelaksana hingga Level Manajemen Atas termasuk di Anak Perusahaan.
5. Evaluasi pemberhentian Pegawai akibat Pensiun Normal, pengajuan Pensiun Dini, dan Masa Persiapan Pensiun.

name of the Pension Fund of the General State-Owned Electricity Company was then changed to the Pension Fund of PT PLN (Persero), also known as Pension Fund of PLN (DP-PLN).

Currently the prevailing regulation regarding pension programs is PT PLN (Persero) Pension Fund Regulation in accordance with the Decree of OJK's Board of Commissioners Num. KEP-481/NB.1/2013 dated 11 September 2013.

In order to implement the pension program regulation, the Procedures and Guidelines for the Enforcement of Pension Program based on Pension Fund Regulation of PT PLN (Persero) Pension Fund has been drafted. The Circular of PT PLN (Persero)'s Board of Directors Num. 008.E/DIR/2013 dated 18 November 2013 currently prevails.

EMPLOYEES OPTIMIZATION

Regarding the development program of the new 35,000 MW Power Plant, and the existing power plant and its support facilities, PLN strives to optimize the competencies of its existing employees as well as conduct tiered recruitment based on organizational needs.

Following the basic changes to the organizational structure, there are now seven regions which serve as Directorates that manage end-to-end business processes, and speed up the implementation of HCMS programs. Tiered training, performance review, and job mutations are based on employee competencies, and requirements are implemented simultaneously through the following program summary:

1. Implementation of Employees Career and Competence Training as a follow-up to the completion of Tiered Training and the Competence Portfolio Test, which incorporates the results of the Fit and Proper Test.
2. Implementation of employee mutation between PLN units and the OJT rotation program between the 39th and 40th cohorts and Head Office employees. Since 2000 these cohorts have been working outside Java and will be transferred to business units in Java.
3. Nomination of employees meeting requirements for Tiered Training, who will then become prioritized for Tiered Training participation.
4. Filling Position Formation, which is PLN Head Office's responsibility, when there is a vacant position because of a retired employee or position rotation or mutation, starting from Managing Unit of Base-level Management and continuing to Senior-level Management, including those in the subsidiaries.
5. Evaluation of employee resignation due to various reasons such Normal Pension, Early Pension, and Pension Preparation Period.

6. Penjaringan, penilaian dan evaluasi kandidat Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta pengurus Dana Pensiun.
7. Bersama Bagian Hubungan Industrial melakukan evaluasi dan penindakan pelanggaran disiplin Pegawai serta tindak lanjut kasus –kasus Hubungan Industrial.
8. Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pegawai Tugas Karya sebagai bentuk pelaksanaan addendum PKB 2010-2012 Pasal 70 tentang Perkawinan Antar Pegawai.

6. Recruitment, assessment, and evaluation of candidates for Board of Directors and Commissioners of the subsidiaries, as well as Pension Fund Administrators.
7. In partnership with the Industrial Relations Sector, evaluate and determine sanctions given to employees for violations, including follow-up actions of Industrial Relations cases.
8. Evaluation of the implementation of Employee Training for Duty as an implementation of the Addendum of Collective agreement, 2010-2012 Articles 70 on Marriage between Employees.

SISTIM INFORMASI SDM

PLN juga terus mengembangkan Sistem Informasi SDM dengan mengoptimalkan kemampuan anak usaha di bidang Teknologi Informasi. Untuk tahun 2015 PLN telah menyelesaikan Perancangan dan Implementasi software *talent pool*, dimana untuk aplikasi sudah siap 100%, sedangkan kebijakan yang mendukung program ini masih belum selesai seluruhnya.

HR INFORMATION SYSTEM

PLN also continues to develop its Human Resource Information System to optimize the Information Technology ability of its subsidiaries. In 2015, PLN completed the software talent pool design and implementation, with the application being 100% ready, meanwhile policies to support the program have not been fully completed.

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia PLN dan anak perusahaan sampai akhir 2015 berjumlah 47.594 pegawai terdiri dari 40.450 pegawai dan 7.144 pegawai anak perusahaan.

Komposisi pegawai PLN berdasarkan level manajemen dapat dilihat pada tabel berikut:

HUMAN RESOURCES PROFILE

In the end of 2015, PLN and its subsidiaries' total workforce amounted to 47,594 employees, consisting of 40,450 PLN employees and 7,144 subsidiary employees.

The mix of PLN employees based on management level is displayed in the following table:

Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Level Manajemen
Mix of PLN Management Level Employees

Tingkat	2013	2014	2015	Level
Manajemen Atas	84	84	**83**	Senior Management
Manajemen Menengah	328	358	**362**	Mid-level Management
Manajemen Dasar	868	1.110	**1.154**	Base-level Management
Supervisor Atas	2.285	2.698	**2.808**	Senior Supervisory
Supervisor Dasar	4.232	4.711	**5.807**	Base-level Supervisory
Fungsional	33.549	32.039	**30.236**	Functional
Anak Perusahaan	7.540	7.068	**7.144**	Subsidiary
Total	**48.886**	**48.068**	**47.594**	**Total**

Jumlah Pegawai Menurut Level Organisasi
Number of PLN Employees Based on Organization Level

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Kantor Pusat	1.276	1.356	**1.365**	Head Office
Unit Bisnis	40.070	39.644	**39.085**	Business Unit
Anak Perusahaan	7.540	7.068	**7.144**	Subsidiary
Total	**48.886**	**48.068**	**47.594**	**Total**

Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai
Number of PLN Employees Based on Status

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Pegawai Tetap	48.886	48.068	**47.592**	Permanent
Pegawai Kontrak	0	0	**2**	Contract
Total	**48.886**	**48.068**	**47.594**	**Total**

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai PLN yang berlatar belakang pendidikan di bawah D1 adalah 21.855 pegawai atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah pegawai yang berpendidikan D3, S1, S2 dan S3 mengalami kenaikan.

Based on education level, the number of PLN employees with an educational background below D1 was 21,855 employees, or is smaller than the previous year's figure, whereas the number of employees with D3, S1, S2 and S3 educational background increased.

Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of PLN Employees Based on Education Level

Tingkat	2013	2014	2015	Level
≤ D1	24.847	23.692	**21.855**	≤ D1
D3	6.068	6.875	**7.359**	D3
S1	9.413	9.459	**10.185**	Bachelors
S2	1.014	969	**1.045**	Masters
S3	4	5	**6**	PhD
Anak Perusahaan	7.540	7.068	**7.144**	Subsidiary
Total	**48.886**	**48.068**	**47.594**	**Total**

Berdasarkan usia maka jumlah pegawai PLN yang berada pada rentang usia 46 tahun ke atas mencapai 39,6%.

Based on age, the largest number of PLN employees is those above 46 years old as 39.6%.

Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Kelompok Usia
Number of PLN Employees Based on Age

Umur	2013	2014	2015	Age
≤ 25	7.241	8.220	**7.855**	≤ 25
26-30	6.786	7.354	**8.234**	26-30
31-35	2.731	2.936	**3.599**	31-35
36-40	1.369	1.199	**1.158**	36-40
41-45	4.394	4.175	**3.553**	41-45
46-50	6.579	5.934	**5.064**	46-50
>50	12.246	11.182	**10.987**	>50
Anak Perusahaan	7.540	7.068	**7.144**	Subsidiary
Total	**48.886**	**48.068**	**47.594**	**Total**

Data demografi pendidikan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kompetensi dasar, PLN harus mulai meningkatkan kualifikasi SDM yang dimilikinya, agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sementara dari demografi menurut usia, maka berarti dalam beberapa tahun kedepan, PLN harus mempersiapkan tambahan SDM yang memasuki usia pensiun dengan jumlah di atas 10.000 orang.

Dengan memperhatikan ketersediaan SDM dan keharusan mengembangkan kegiatan operasional agar dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia, jelas bahwa PLN menghadapi tugas yang tidak ringan. Untuk mengelola SDM yang ada agar dapat memberikan sumbangsih maksimal kepada kinerja operasional, PLN menerapkan sistem manajemen SDM, yakni *Human Capital Management System*, yang mencakup pengelolaan seluruh fungsi penambahan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan sebagainya, hingga persiapan purna bakti.

TINGKAT *TURN-OVER*

Dengan berbagai upaya pengelolaan SDM yang dilakukan secara adil, transparan dan berimbang, PLN berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya tingkat *turn-over* pegawai.

Pada Tahun 2015 tercatat ada 2.254 PLN yang berhenti, atau berarti mencapai 4,74% dari total pegawai PLN per-akhir tahun yang mencapai 47.594 dan 1.897 atau 84,16% dari pegawai yang berhenti tersebut adalah karena faktor alami (pensiun), 160 karena meninggal dunia dan 167 orang karena permintaan sendiri dan pensiun dini. Di sisi lain pada tahun 2015, PLN merekrut 4.603 untuk berbagai posisi tertentu.

This education demographic data reveals that based on the basic competency aspect, PLN needs to start improving the qualifications of its human resources in order to be better prepared for developmental demand. Furthermore, according to the age demography, within the next few years PLN should prepare additional human resources to replace more than 10,000 employees who will enter the retirement period.

Considering the availability of human resources and the need to develop its operational activities to meet the electricity needs of all Indonesians, it is clear that PLN is facing a significant challenge. To manage the existing human resources so they can contribute optimally to operational performance, PLN applies the human resource management system, i.e. Human Capital Management System, which covers management of all additional functions, competency development, performance assessment, and so forth, until the preparation of the retirement plan.

EMPLOYEE TURNOVER RATE

As a result of various measures to manage human resources fairly, transparently, and impartially, PLN has succeeded in creating a conducive work environment for all employees. This can be seen from the relatively low employee turnover rate.

In 2015, it was noted that 2,254 PLN employees resigned, with this figure reaching 4.74% of total PLN employees by the end of the year, which amounted to 47,594 employees. As many as 1,897 or 84.16% of the total number of retired employees left the Company due to normal reasons (retirement), 160 were deceased, while 167 voluntarily resigned or retired early. On the other hand in 2015, PLN recruited 4,603 new employees to be placed in various positions.

DAMPAK KEUANGAN PENGELOLAAN SDM

Setiap tahun PLN menganggarkan sejumlah dana yang memadai untuk memastikan dipenuhinya kesejahteraan pegawai. Selain dimaksudkan sebagai imbalan atas jasa pegawai, dana belanja pegawai dimaksudkan sebagai insentif agar setiap pegawai tergerak untuk memberikan kompetensi terbaiknya dalam melakukan tugasnya sehari-hari.

Oleh karena itu, pada umumnya dana belanja pegawai PLN setiap tahun meningkat. Peningkatan tersebut bukan semata pengaruh penambahan pegawai, namun selaras dengan kenaikan skala usaha. Agar ada kesesuaian antara jumlah SDM dengan skala usaha, PLN merealisasikan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Dengan demikian, maka dampak keuangan pengelolaan SDM terdiri dari dua bagian besar, yakni menyangkut pemberian imbal jasa (beban pegawai) serta penyediaan anggaran pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Beban Pegawai

Seperti tampak pada uraian "Ikhtisar Rugi Laba Komprehensif" beban pegawai PLN tahun 2015 naik 22% dari Rp16.645,7 miliar di tahun 2014 menjadi sebesar Rp20.321,1 miliar. Beban kepegawaian tersebut terdiri dari: imbalan kerja, gaji, jasa produksi dan insentif prestasi kerja, tunjangan dan lain-lain.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Secara total, pada tahun 2015, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan baik yang berasal dari PLN, anak Perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp741 miliar.

Mengingat besarnya biaya pegawai dan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung program peningkatan kompetensi, dalam melakukan penambahan pegawai maupun melaksanakan program menyangkut kepegawaian, PLN mempertimbangkan ukuran produktifitas pegawai sebagai salah satu butir yang diperhatikan. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program pelatihan, menunjukan memiliki korelasi positif dengan produktifitas pegawai yang diukur melalui satuan energi terjual per pegawai, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

HR MANAGEMENT FINANCIAL IMPACT

Every year PLN allocates sufficient funds for employee welfare. Apart from compensating employees' service, the funds serve as an incentive to encourage every employee to give their utmost best while performing their daily duties.

Because of this, employee expenditures increase annually. The rise is not only due to the increase in employee numbers, but also due to the expansion in the scale of business. To align the number of human resources with the scale of business, PLN implements competency training and development programs.

The financial impact of HRM comprises two main components. Budget is allocated to service compensation (employee expenses), and to competency training and development.

Employee Costs

As described in the "Overview of Comprehensive Profit and Loss Statements", in 2015 PLN employee costs rose by 22%, from Rp16,645.7 billion in 2014 to Rp20,321.1 billion. These costs included employee compensation, salary, production services and work performance incentives, allowances, etc.

Employee Competency Development Costs

In 2015, the PLN Education and Training Center held various training programs, which were conducted by PLN, PLN subsidiaries, and external parties, with the training budget totaling Rp741 billion.

Given the magnitude of employee costs and other expenses incurred to support the competency enhancing program, PLN considers employee productivity when recruiting new employees and executing personnel-related programs. In relation to this, the execution of training programs shows a positive correlation with employee productivity. Employee productivity is measured by the unit of energy sold per employee, as shown in the following table.

Produktifitas Pegawai (Energi terjual MWh jual/jumlah pegawai)
Employee Productivity (Unit of energy sold MWh of sales/number of employees)

Tahun	Produktivitas Pegawai Employee Productivity
2011	3.635,0 MWh/pegawai employee
2012	4.019,7 MWh/pegawai employee
2013	3.836,0 MWh/pegawai employee
2014	4.131,7 MWh/pegawai employee
2015	**4.262,0 MWh/pegawai employee**

PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KORPORAT

Pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi perseroan. Dimensi Budaya Kinerja Tinggi/Unggul memiliki inisitiaf untuk menciptakan pegawai PLN yang kompeten, produktif, memiliki tata nilai & etika kerja tinggi, berjiwa *intrapreneur*, dan *cost-benefit conscious*.

Pembentukan budaya organisasi unggul dicapai melalui 3 (tiga) pilar utama sebagai berikut:

1. *High Performance Culture* (HPC)
   Business Concern: PLN menjadi *Emerging Industry Leader* pada tahun 2017 dengan nilai sebagai berikut:
   - *Customer Focus*;
   - *Performance Minded*;
   - *Managing Quality*.
2. *Synergizing in Business and Values* (SBV)
   Business Concern: Membangun PLN menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dengan nilai sebagai berikut:
   - *Integrity and Business Ethic*;
   - *Human Capital Management*;
   - *Knowledge Capturing*;
   - *Change Management, Strategy Alignment*.
3. *Business Acumen* (BAC)
   Business Concern: Membangunkan jiwa *intrapreneurship* dan *business survival* pada tiap insan PLN dengan nilai sebagai berikut:
   - *Cost and Benefit Minded*;
   - *Intrapreneurship & Entrepreneurship*.

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul yang dilakukan adalah dengan Implementasi PLN Bersih, dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penetapan Kep.Dir. No. 060.K/DIR/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pedoman PLN Bersih.
2. Penetapan Kep.Dir. No. 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan antara PLN dengan Mitra Kerja Guna mendukung PLN Bersih.
3. Penyusunan Juklak Kinerja *Organizational Readiness* terkait kultur sebagai Panduan Unit dalam menyelaraskan *Culture* dengan Program PLN Bersih.
4. Melakukan Revisi dan Updating materi pembelajaran terkait Pelopor PLN Bersih.
5. Memfasilitasi Mentoring terkait KPI DIR SDM Kesiapan Budaya Kerja.
6. Memfasilitasi *mentoring cascading* KPI terkait PLN Bersih terhadap 48 Unit Bisnis dan 3 Anak Perusahaan.

IMPROVEMENT OF EXCELLENCE CULTURE AND INTERNALIZATIONS OF CORPORATE CULTURE VALUES

The establishment and enhancement of Excellence Culture are parts of the efforts to motivate employees to perform and give the best contribution to the company constantly. Excellent Performance Culture Dimension has the initiative to shape PLN employees who are competent, productive, high value & work ethics, intrapreneur spirit, and cost-benefit concious.

The establishment of excellent organization culture is achieved through 3 (three) main pillars as follows:

1. High Performance Culture (HPC)
   Business Concern: PLN will become Emerging Industry Leader in 2017 with the following values:
   - Customer Focus;
   - Performance Minded;
   - Managing Quality.
2. Synergizing in Business and Values (SBV)
   Business Concern: Creating PLN as Corruption Free Zone (WBK) in 2017 with the following values:
   - Integrity and Business Ethic;
   - Human Capital Management;
   - Knowledge Capturing;
   - Change Management, Strategy Alignment.
3. Business Acumen (BAC)
   Business Concern: Enhancing entrepreneurial and business survival spirits in every PLN personnel with the following values:
   - Cost and Benefit Minded;
   - Intrapreneurship & Entrepreneurship.

Programs for establishing and enhancing a culture of excellence are conducted through PLN Bersih activities, such as:

1. Issuance of the Decree of Board of Directors Num. 060.K/DIR/2014 dated 12 February 2014 on PLN Bersih Guidelines.
2. Issuance of the Decree of Board of Directors Num. 0054.K/DIR/2014 on Financial Transaction Guidelines between PLN and business partners in order to support PLN Bersih.
3. Preparation of Organizational Readiness Performance Guidelines in relation to Culture as Unit Guidelines while aligning Culture with the PLN Bersih Program.
4. Revising and Updating of PLN Bersih Pioneer learning materials.
5. Facilitating Mentoring activities relating to KPI DIR HR: Work Culture Readiness.
6. Facilitating KPI cascading mentoring relating to PLN Bersih for 48 business units and 3 subsidiaries.

7. Menetapkan kriteria dan peserta pelopor PLN Bersih.
8. Melakukan pelatihan pelopor *(change agent)* PLN Bersih terhadap 48 Unit Bisnis dan 3 Anak Perusahaan.

PLN meyakini bahwa SDM merupakan unsur penggerak terpenting dari seluruh operasional bisnis yang dilaksanakan dan oleh karenanya menempatkan SDM sebagai kunci sukses pengembangan usaha di masa mendatang. Untuk memastikan seluruh SDM memberikan seluruh kompetensi terbaiknya, PLN berupaya memenuhi seluruh kebutuhan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Pada setiap periode tertentu PLN menyelenggarakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan dan *engagement* pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan berkarya di lingkup perusahaan. Akhir tahun 2014 PLN merealisasikan program *Employee Engagement Survey* (EES) / Survey Kepuasan dan *Engagement* Pegawai bekerjasama dengan pihak Independen dengan nilai EEI = 77%. Hasil *survey* tersebut kemudian dijadikan salah satu masukan untuk meningkatkan pola pengelolaan SDM di masa mendatang.

7. Determining the PLN Bersih Pioneer criteria and participants.
8. PLN Bersih Pioneer training (change agent) for 48 business units and 3 subsidiaries.

PLN believes that HR is the most important driving element of all business operations. Therefore, PLN considers HR as a key to success in future business development. In order to ensure all employees contribute their best, PLN strives to meet all employee needs based on the Company's financial ability.

PLN periodically conducts a survey to measure employees' level of satisfaction and engagement with performing their tasks, and in providing their services to the Company. In the end of 2014, PLN carried out an Employee Engagement Survey (EES) in partnership with an independent party, resulting in an Employee Engagement Index of 77%. This result was included as one input for improving HRM strategy in the future.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

INFORMATION SYSTEM TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Kondisi operasional yang semakin penuh tantangan dan pelaksanaan Program Pembangkit 35.000 MW membuat PLN semakin memantapkan peran TI sebagai "enabler", baik dalam proses pemantauan kemajuan proyek maupun mendukung kegiatan operasional dengan cepat dan akurat. Oleh karenanya pengembangan sistim Teknologi dan Informasi PLN semakin cepat bergerak, berubah dari model distributed menuju sistem yang terpusat dan standar melalui penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan kapasitas dan keandalan *data center.*

The operating conditions that are increasingly challenging and the execution of the 35,000 MW Program have compelled PLN to further strengthen the role of IT as an 'enabler', both in the process of monitoring project progress as well as quick and accurate operations support. Therefore, the development of PLN's Information Technology Systems is moving ever faster, transforming from the distributed model to the centralized and standardized system by strengthening the network infrastructure, data center capacity and reliability.

Mengikuti pesatnya pekembangan teknologi serta untuk mendukung proses bisnis yang lebih cepat, akurat dan akuntabel, maka Teknologi Informasi (TI) kini diposisikan sebagai "*enabler*", yaitu sistem yang mampu mendukung dan menjawab seluruh tantangan pertumbuhan operasi yang cepat dan akurat.

Following the rapid technological developments and to make business processes run faster, more accurate and accountable, Information Technology (IT) is now positioned as an 'enabler', namely as a system that is capable of supporting and addressing all the challenges of rapid and accurate operational growth.

Hal tersebut membuat Teknologi Informasi harus selalu memandang ke depan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan teknologi, mengevaluasi teknologi proses bisnis sekarang dan melakukan upaya peningkatan kinerja-nya untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, pengembangan Teknologi Informasi bergerak dari model *distributed* menuju sistem yang terpusat dan standar melalui penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan kapasitas dan keandalan *data center*.

Mengacu pada pelaksanaan program PLN *IT Strategic Plan* (2002) dan PLN *IT Master Plan* (2004), maka secara bertahap aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang tersebar mulai distandarisasikan dan pengelolaannya dilakukan secara terpusat sebagai sistem aplikasi teknologi informasi korporat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

This has compelled IT to always look forward to obtain the latest information about technological developments, to evaluate current business process technologies, and to strive to enhance its performance to increase the Company's value.

In connection with these objectives, the development of IT moves toward a system of distributed model to a centralized and standardized system, by strengthening the network infrastructure, data center capacity and reliability.

The information technology-based applications for the implementation of the PLN IT Strategic Plan (2002) and PLN IT Master Plan (2004) program are gradually being standardized and managed centrally to create a corporate information technology applications system, as illustrated below:

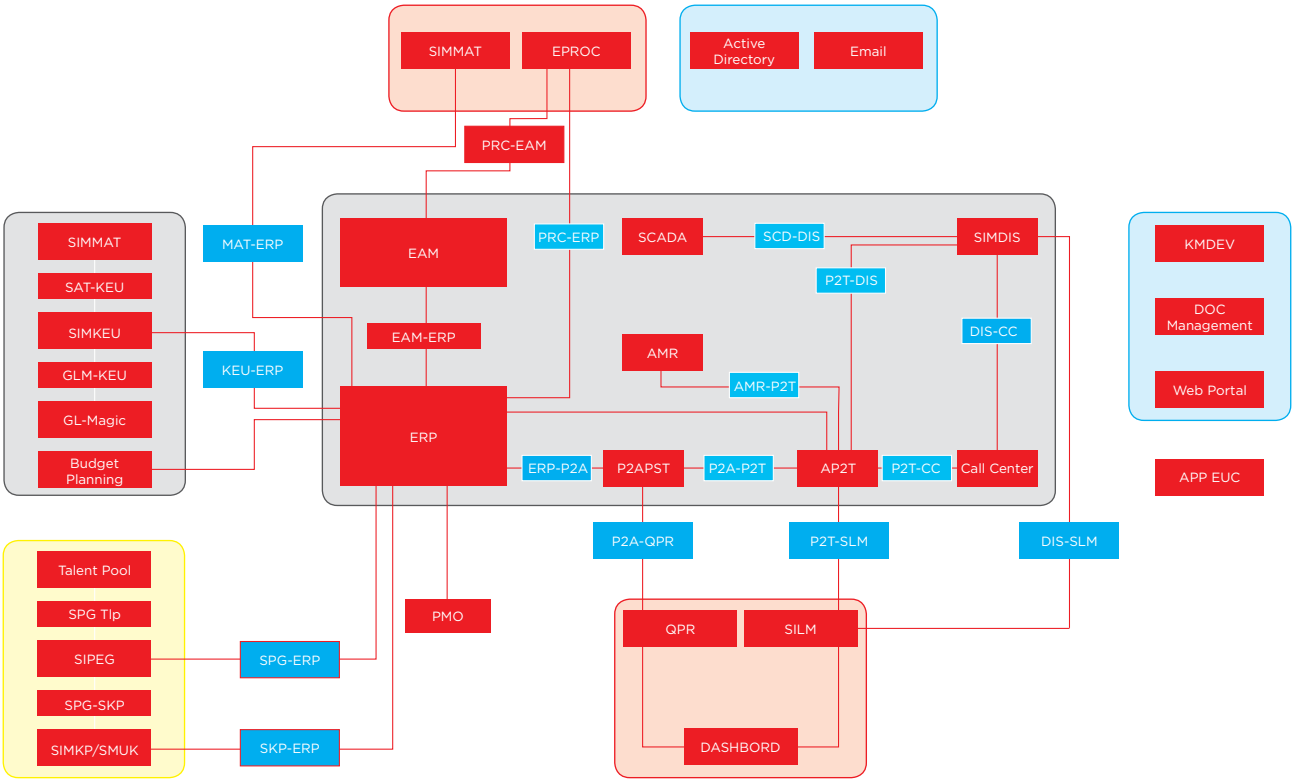

STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PLN

Teknologi Informasi di PLN berkembang dari aplikasi-aplikasi yang bersifat lokal menuju *TI shared services* guna mendorong efisiensi dan standarisasi serta pada akhirnya menuju pada *Business Shared Services*, dimana proses *sharing* tidak hanya pada aspek operasional teknologi informasi semata melainkan lebih jauh, hingga menjangkau level operasional bisnis sehari-hari.

PLN telah menyusun dan mengaplikasikan *Information Technology Road Map* (ITRM) untuk memberikan arah pengembangan teknologi informasi di PT PLN (Persero) menuju layanan teknologi informasi yang *Centralized, Integrated* dan *Standardize* dalam rangka mendukung terciptanya *IT Shared Services* dan *Business Shared Services.*

Layanan teknologi informasi terpusat (*centralized)* adalah bentuk layanan teknologi informasi dimana seluruh data dan informasi ditempatkan pada satu Pusat Layanan. Melalui pemusatan tersebut, maka penggabungan berbagai bentuk layanan berbasis teknologi informasi dapat berlangsung dengan lebih mudah dan murah, terlebih jika sistem input dan operasional yang digabungkan telah distandarisasikan, sehingga semua pengguna mempunyai preferensi yang sama pada setiap proses bisnis.

Pusat Layanan rencananya berada di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, dan yang akan men-*share* layanan ke seluruh Unit PLN, hal ini yang disebut dengan *IT Share Services.* Oleh karena layanan yang diberikan adalah layanan untuk menggerakkan bisnis, maka dinamakan *Business Share Services.*

Strategi pengembangan teknologi informasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Sentralisasi informasi dan Desentralisasi proses, yaitu bahwa semua data dan informasi dari sistem yang dibangun akan dipusatkan pada sebuah *data center*, sedangkan penggunaan data dan informasi dapat di-*share* ke Unit PLN di seluruh Indonesia.
2. Standarisasi Proses Bisnis, berarti sistem yang dibangun secara korporat akan mendukung proses bisnis yang sama di seluruh Unit PLN.
3. Transparansi, yang berarti seluruh aktivitas terlihat nyata dan adanya tanggung gugat yang jelas pada peran manajemen, sehingga pihak yang memiliki otoritas adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan.
4. Integrasi dan *Shared Services*, proses-proses yang berbiaya efektif dan cerdas, serta sistem yang sudah terstandarisasi memberikan layanan dengan kualitas baik.
5. *Security* dan *Disaster preparedness*, melindungi keakuratan, integritas, keselamatan proses maupun sumber-sumber daya yang digunakan.
6. *IT Governance*, pedoman untuk mewujudkan pola standarisasi kerangka pelaksanaan pengembangan,

PLN'S INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT STRATEGY

Information Technology in PLN has been developing from local applications to IT shared services in order to promote greater efficiency and standardization, and at last to Business Shared Services, where the sharing process covers not only reach the operational aspects of information technology but also reach the level of daily business operations.

PLN has developed and applied the Information Technology Road Map (ITRM) to provide a direction of development for information technology at PT PLN (Persero) towards centralized, integrated and standardized information technology services, in order to support the creation of IT Shared Services and Business Shared Services.

Centralized information technology services is a form of information technology services where all data and information are placed in one Service Center. Through this unified storage, the incorporation of various forms of information technology-based services can take place more easily and cheaply, especially if the operational systems and input systems have been standardized, so that all users have the same preferences in every business process.

The Service Center is planned to be installed at PT PLN (Persero) Head Office, and is going to share the services to all PLN Units, and thus it is called the IT Shared Services. Therefore, the services provided are services to drive business, and thus are called the Business Shared Services.

The information technology development strategy is based on the following principles:

1. Centralization of information and Decentralization of processes, namely that all data and information from a system to be built will be concentrated in a data center, while the use of data and information can be shared to all PLN Units in Indonesia.
2. Business Process Standardization, which means the system to be built will support the same business processes throughout all PLN Units.
3. Transparency, which means all the activities are visible and have clear accountability as regards the role of management, so that the parties with authority are those most responsible for its successful development.
4. Integration and Shared Services, which means that processes are cost-effective and intelligent, and the system be standardized and provide excellent service.
5. Security and Disaster preparedness, which protects the accuracy, integrity, safety processes and resources used.
6. IT Governance, that is a guideline for realizing the pattern of standardization of framework of the implementation

penerapan dan operasional teknologi informasi selaras dengan kebutuhan strategis perusahaan, pedoman untuk memantau dan mengevaluasi unjuk kerja Penyelenggara Teknologi Informasi dan pedoman untuk meningkatkan kapabilitas Perseroan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perseroan.

of the development, implementation and operation of information technology in alignment with the Company's strategic needs, guideline for monitoring and evaluating the performance of the Information Technology Organizers and a guideline for improving the capability of the Company to contribute to the creation of added value and improve effectiveness and efficiency of operational activities of the Company.

MANFAAT *IT SHARED SERVICES* DAN *BUSINESS SHARED SERVICES*

Keuntungan dari bentuk layanan *IT Shared Services* dan *Business Shared Services* adalah standarisasi layanan, peningkatan kualitas layanan yang terus menerus dan efektifitas biaya *(Cost Effective)*.

Untuk hal tersebut, PLN telah menerapkan aplikasi Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara terpusat (P2APST) yaitu mekanisme pembayaran rekening listrik yang kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh pelanggan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh pengolahan informasi yang telah distandarisasi, sehingga dapat digunakan oleh unit bisnis secara terpusat.

ADVANTAGES OF IT SHARED SERVICES & BUSINESS SHARED SERVICES

The advantage of having IT Shared Services and Business Shared Services are the standardization of services, continuous improvement of service quality, and cost effectiveness.

For that matter, PLN has implemented the Centralized Management and Monitoring of Income Flow (P2APST) application, i.e. electricity bill payment mechanism that can now be performed anywhere and at any time by the customers more easily and quickly. This is caused by standardized information management, so that it can be used by all business units.

TEKNOLOGI INFORMASI BERGERAK KE SISI HULU

Teknologi informasi PLN diarahkan pengembangannya ke bidang distribusi, transmisi dan pembangkitan sesuai dengan bisnis PLN yang secara *realtime* melayani pelanggan.

Fungsi teknologi informasi tersebut adalah:
(i) Melihat keselarasan antara inisiatif teknologi informasi dengan proses bisnis,
(ii) Menentukan persyaratan teknologi yang melayani proses bisnis,
(iii) Memastikan adanya standarisasi proses bisnis dan sentralisasi informasi, serta
(iv) Memastikan adanya integrasi sistem yang baru dengan sistem korporasi yang telah ada untuk menjamin transparansi dan auditibilitas.

INFORMATION TECHNOLOGY MOVES UPSTREAM

PLN's information technology development is directed towards the aspects of distribution, transmission and generation, in accordance with PLN's businesses that serve customers in real time.

Such information technology has the following functions:
(i) Observing the alignment between information technology initiatives with business processes,
(ii) Determining the technological requirements that serve business processes,
(iii) Ensuring the standardization of business processes and centralization of information, as well as
(iv) Ensuring the integration of the new system with the existing corporate systems to ensure transparency and auditability.

ITRM *(INFORMATION TECHNOLOGY ROAD MAP)*, PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PLN

Mengingat banyaknya manfaat penerapan teknologi informasi dalam mendukung operasional PLN dengan lingkup kegiatan yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia dalam 24 jam, maka PLN menyusun dan merealisasikan program pengembangan teknologi informasi dalam beberapa tahap, yang secara keseluruhan membentuk suatu *roadmap* pengembangan teknologi informasi, seperti terlihat pada bagan berikut ini:

ITRM (INFORMATION TECHNOLOGY ROAD MAP), PLN INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROGRAM

Keep in mind that many advantages of applying information technology to support PLN's operations with activities that take place in all parts of Indonesia 24 hours every day, PLN has prepared and made implementation its information technology development program in several stages, which altogether form a roadmap for information technology development, as seen in the following chart:

Kegiatan	2014				2015				2016				
	TW1 Q1	TW2 Q2	TW3 Q3	TW4 Q4	TW1 Q1	TW2 Q2	TW3 Q3	TW4 Q4	TW1 Q1	TW2 Q2	TW3 Q3	TW4 Q4	T
INVESTASI													
Upgrade ECC SAP	■	■	■										
Roll Out ERP SAP	■	■	■	■	■	■	■						
Implementasi EAM Pembangkitan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Implementasi EAM Transmisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Implementasi AMR *Standard* PLN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Implementasi *Budget Panning*	■	■	■										
Implementasi PMO Investasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pembangunan Virtualisasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pembangunan Data *Warehouse*				■	■	■	■	■					
Pembangunan *Business Intelligent*									■	■	■	■	■
Pengkajian Arsitektur *Enterprise*			■										
OPERASIONAL													
Pemeliharaan Infrastruktur *Data Center*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pemeliharaan Aplikasi Korporat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GOVERNANCE													
Pembuatan Tata Kelola TI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Peningkatan *Maturity Level & Compliance*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Organizational													
Implementasi SSC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

2017				2018				2019				Activity
TW1 Q1	TW2 Q2	TW3 Q3	TW4 Q4	TW1 Q1	TW2 Q2	TW3 Q3	TW4 Q4	TW1 Q1	TW2 Q2	TW3 Q3	TW4 Q4	
												INVESTMENT
												Upgrade ECC SAP
												Roll Out ERP SAP
■	■	■	■									EAM Power Plant Implementation
■	■	■	■									EAM Transmission Implementation
												PLN's AMR Implementation Standard
												Budget Planning Implementation
												PMO Investment Implementation
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Virtual Development
												Data Warehouse Development
■												Business Intelligent Development
	■											Enterprise Architecture Assessment
												OPERATIONAL
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Data Center Infrastructure Maintenance
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	System Infrastructure Maintenance
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Corporate Application Maintenance
												GOVERNANCE
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	The Making of IT Governance
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Maturity Level & Compliance Improvement
												Organizational
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	SSC Implementation

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2015

Proyek strategis yang menjadi fokus utama pada tahun 2015 adalah implementasi EAM *(Enterprise Asset Management)* Pembangkit, Sistem Informasi Dokumen Hukum, *review* dan *update IT Masterplan* PT PLN (Persero).

Sebagai proyek percontohan implementasi, EAM Pembangkit adalah PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, sedangkan implementasi Sistem Informasi Dokumen Hukum dilakukan di PT PLN (persero) Kantor Pusat, PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali dan PT PLN (Persero) UIP V.

Untuk kegiatan *Review* dan *Update IT Masterplan,* telah dilakukan wawancara dengan pemilik bisnis proses untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan bisnis, serta harapannya terhadap dukungan sistem dan teknologi informasi yang dapat menjadi inovasi bisnis bagi perusahaan.

2015 INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Strategic projects that became the main focus in 2015 were the implementation of EAM (Enterprise Asset Management) Plant, Legal Documents Information System, and review and update of PT PLN (Persero)'s IT Masterplan.

As the pilot project for the implementation, EAM Plants were PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan and PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, while the implementation of the Legal Documents Information System took place at PT PLN (Persero) Head Office, PT PLN (Persero) P3B Java Bali and PT PLN (Persero) UIP V.

For Reviewing and Updating IT Masterplan activities, interviews have been conducted with business owners to obtain information about their business objectives, as well as their expectations for the support of information technology systems that can become innovations for the Company.

A. KINERJA OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI

- **ERP *(Enterprise Resources Planning)***
  Manfaat:
  - Proses bisnis terintegrasi dan standar
  - Akuntabilitas menjadi lebih baik
  - Proses bisnis lebih terkontrol
  - Akses informasi lebih cepat dan akurat
  - Pengambilan keputusan menjadi lebih baik

A. OPERATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY PERFORMANCE

- **ERP (Enterprise Resources Planning)**
  Benefits:
  - Integrated and standardized business processes
  - Better accountability
  - More controlled business processes
  - Quicker and more accurate access to information
  - Better decision-making

ERP sudah terimplementasi di seluruh Unit PLN: Distribusi, Wilayah, Pembangkitan, PLN P3B, Unit Jasa Penunjang dan Proyek.

- **P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat)**
  Manfaat:
  - Risiko pengelolaan kas pendapatan menjadi minimum
  - Penyederhanaan proses bisnis
  - Sentralisasi pengelolaan penagihan
  - Efisiensi biaya
  - Pembayaran rekening listrik dapat dilakukan dimana dan kapan saja

Karena bersifat sentralisasi, maka setelah selesai dilakukan sistem *backup (Disaster Recovery).*

- **AP2T**
  Manfaat:
  - Proses bisnis pelayanan pelanggan menjadi standar dan terpusat
  - Efisiensi biaya operasional
  - Mendukung *Revenue Protection*
  - Mempercepat proses pembuatan laporan Tata Usaha Langganan
  - Memperoleh akses informasi dari Unit Bisnis terkait secara *real time*

Aplikasi ini membantu pelaksanaan bisnis proses untuk mengelola transaksi pelanggan mulai dari permintaan menjadi pelanggan, pengelolaan pemakaian listrik, penghitungan pemakaian listrik, penagihan dan pengelolaan perubahan lainya.

- **EAM Distribusi *(Enterprise Asset Management for Distribution)* dan EAM Transmisi *(Enterprise Asset Management for Transmission)***
  EAM adalah penerapan konsep manajemen yang menyeluruh dalam rangka memaksimalkan nilai dan mengoptimalkan siklus hidup fisik aset distribusi perusahaan yang meliputi aktivitas: (i) perencanaan; (ii) pembangunan / konstruksi, (iii) operasi/pemeliharaan dan sampai ke penarikan/ penghapusan.

  Manfaat:
  - Standarisasi proses bisnis pemeliharaan dan integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien
  - Mengoptimalkan pemanfaatan *software* SAP yang dimiliki perusahaan
  - Tersedianya sumber informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang akurat dan cepat
  - Tersedianya mekanisme kontrol dan monitoring sistem operasi dan pemeliharaan yang lebih baik dan terukur
  - Hasil implementasi dapat di *roll-out* di Unit PLN Distribusi di Indonesia

ERP has been implemented in all PLN Units: Distribution, Regional, Power Generation, PLN P3B, and Project Support Services Units.

- **P2APST (Centralized Management and Monitoring of Income Streams)**
  Benefits:
  - Less risk exposure of income management
  - Simplified business processes
  - Centralized billing management
  - Cost efficiency
  - Payment of electricity bills can now be done anywhere and at any time

Because this is centralized, the system will be back up (Disaster Recovery) after completed.

- **AP2T**
  Benefits:
  - More standardized and centralized customer service business processes
  - Greater operational cost efficiency
  - Supporting Revenue Protection
  - Accelerating the process of consumer administration report
  - Receiving real-time information access to from Business Units

This application helps the implementation of business processes to manage customer transactions ranging from subscription application, management of electricity consumption, calculation of electricity consumption, billing, and management of other changes.

- **EAM Distribution (Enterprise Asset Management for Distribution) and EAM Transmission (Enterprise Asset Management for Transmission)**
  EAM is an application of comprehensive management concepts to maximize value and optimize the life cycle of physical assets of the Company's distribution activities, which include activities of: (i) planning; (ii) development/construction, (iii) operation/maintenance, up to withdrawal/removal.

  Benefits:
  - Standardized business process for more effective and efficient maintenance and integrated system
  - Optimizing utilization of SAP software
  - Availability of resources for more accurate and faster management decision-making
  - Availability of control mechanisms and monitoring system operation, and better and more measurable maintenance
  - The results of the implementation can be rolled out in all PLN Distribution Units in Indonesia

- **SIP2A (Sistem Perencanaan dan Pengendalian Anggaran)**
  Manfaat:
  - Sistem Anggaran dan Akuntansi Konsolidasi yang terintegrasi sehingga proses *planning, budgeting, controlling*, dan *reporting* serta konsolidasi laporan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien
- **E-Proc *(Electronic Procurement)***
  Manfaat:
  - Penghematan biaya
  - Efisiensi dan standarisasi pross
  - Meningkatkan kontrol
  - Akses global

  Aplikasi e-Proc berbasis web yang mengubah proses pengadaan dari sistem konvensional menjadi elektronis berdasarkan bisnis proses pengadaan yang ditetapkan oleh perusahaan.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

- **Implementasi EAM Pembangkit Sumatera**
  Manfaat:
  - *Return on Asset* yang maksimal
  - Menurunnya biaya karena umur aset yang lebih panjang
  - *Outage Management*
  - Informasi yang lebih baik untuk keperluan pengambilan keputusan

  Implementasi EAM saat ini merupakan tahap pertama, selanjutnya akan dilakukan roll-out untuk unit-unit pembangkitan lainnya.

  Progres Implementasi EAM Pembangkitan Sumatera telah menyelesaikan Tahap *Business Process Review* dan Tahap *Business Requirement Specification*. Saat ini progres sudah masuk dalam tahap desain *Business System*.
- **Review IT Masterplan**
  Manfaat:
  - *ITMP* merupakan acuan bagi pengembangan teknologi informasi di lingkungan PLN. ITMP yang sudah ada saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebijakan dan regulasi.
  - Menjaga keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan keuntungan maksimal. Progres saat ini adalah Dokumen IT Master Plan PLN 2015 telah selesai dan akan disahkan pada 2016.

- **SIP2A (Budget Planning and Control System)**
  Benefits:
  - A Consolidated integration of Budgeting and Accounting System allowing the processes of planning, budgeting, controlling, and reporting as well as the consolidation of financial statements to run effectively and efficiently

- **E-Proc (Electronic Procurement)**
  Benefits:
  - Cost savings
  - Efficiency and standardized processes
  - Improving control
  - Global access

  The web-based e-Proc application transforms conventional procurement processes to those based on electronic systems established by the Company.

B. INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROGRAM

- **Implementation of EAM Pembangkit Sumatra**
  Benefits:
  - Optimal Return on Assets
  - Reduced costs due to longer asset lifetime
  - Outage Management
  - More comprehensive information for decision-making

  The EAM implementation is currently in its first phase, to be followed up by roll-out in other power plant units.

  The EAM of Sumatra power plant has finished the Business Process Review and Business Requirement Specification stages. Currently it is in the Business System design stage.

- **IT Master Plan Review**
  Benefits:
  - ITMP is a reference for information technology development in PLN. The current ITMP needs to be adjusted in line with developments in technology, policies and regulations.
  - The PLN 2015 IT Master Plan Document has been completed and will be ratified in 2016 to maintain alignment between business and information technology for maximum efficiency and benefit.

- **Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Hukum**
  Manfaat:
  - Akan dibangun Sistem Informasi Hukum PT PLN (Persero), yang di dalamnya mencakup:
    - » Regulasi/Peraturan-peraturan
    - » Bantuan Hukum
    - » Kontrak / Perjanjian
    - » Dokumen Korporasi (Anggaran Dasar Holding/Anak Perusahaan, RUPS Sirkuler)
    - » Kajian / Pendapat Hukum
    - » Mekanisme Penanganan Perkara
    - » *Frequently Asked Question (FAQ)*

Karena solusi secara umum adalah berupa sistem manajemen dokumen, maka inisiatif Sistem Informasi Dokumen Hukum dikaji untuk digabungkan dengan kebutuhan serupa seperti Sistem Dokumen *Invoice*, Sistem Dokumen *Engineering*, dan Sistem Manajemen Surat.

- **AT2LT (Aplikasi Transaksi Tenaga Listrik Terpusat)**

  Manfaat:
  - Mengembangkan sistem transaksi energi dan susut terpusat antar unit dan fungsi dengan pola *push data.*

Progres pengembangan aplikasi ini sesuai jadwal dan telah diselesaikan pada tahun pelaporan 2015.

- **Development of Legal Documents Information System**
  Benefits:
  - A Legal Documents Information System will be built by PT PLN (Persero), and will include:
    - » Regulations
    - » Legal Aid
    - » Agreements/Contracts
    - » Corporate Documents (Articles of Association of Holding/Subsidiaries, Circular Meetings)
    - » Case Studies/Legal Opinions
    - » Case Handling Mechanisms
    - » Frequently Asked Questions (FAQ)

As the general solution is a document management system, the Legal Document Information System initiative was reviewed and planned to be grouped with similar needs, such as Invoice Document System, Engineering Document System, and Letters Document System.

- **AT2LT (Centralized Electricity Transaction Application)**
  Benefits:
  - Developing of a centralized system for energy transactions and losses between units and functions with the push data pattern.

This development was on schedule and was completed in the 2015 reporting year.

GO LIVE GOLDS NON – EAM

Selain program-program tersebut, bekerja sama dengan ICON+ (anak usaha di bidang Teknologi Informasi), PLN mengembangkan program aplikasi GOLDS *(Gudang Online Delivery* Swayalan), khusus untuk pemesanan barang-barang inventaris suku cadang. Melalui implementasi sistem ini, rayon dapat lebih cepat melayani kebutuhan konsumen. Petugas cukup memesan secara *online*, dan barang pun direservasi serta siap untuk diantar/digunakan rayon.

Selain mempercepat pelayanan, PLN dapat mengetahui barang-barang mana saja yang sering dibutuhkan. Sehingga kelebihan atau kekurangan stok bisa diantisipasi. Sementara, dari segi SDM, dapat terjadi efektivitas yang optimal, dimana kelebihan pegawai petugas penjaga gudang dapat dialokasikan ke unit lain yang membutuhkan. Di masa mendatang, aplikasi GOLDS tidak hanya diaplikasikan di Rayon, melainkan hingga ke pelanggan.

GO LIVE GOLDS NON – EAM

In addition to the above mentioned programs, in collaboration with ICON+ (a subsidiary engaged in Information Technology), PLN has developed the GOLDS Gudang Online Delivery Swayalan application, specifically for ordering inventories or spare parts. Through the implementation of this system, regional units can better and more quickly serve customers needs. Officers can simply order items online, and the goods will be reserved and delivered.

In addition to expediting services, PLN is now able to determine which items are often required. Hence, excess or shortage of inventories can be addressed. In terms of human resources, optimal effectiveness can be achieved, as the warehouse guards may be reallocated to other units that are more in need. In the future, the GOLDS application will not only be applied to the Regions, but also to customers.

PINTAR – CARA PLN MEMONITOR DAN MENGATASI KENDALA PERIJINAN DAN PENGADAAN TANAH

Selain program-program yang dikembangkan di tingkat korporasi tersebut, unit-unit divisi operasional PLN juga turut bergerak mengembangkan sistim berbasis teknologi infermasi untuk mendukung peningkatan kinerja korporasi.

PINTAR - HOW PLN MONITOR AND OVERCOME PERMIT AND LAND ACQUISITION OBSTACLES

In addition to the programs developed on the corporate level, the operational divisions of PLN are also developing information technology-based systems to improve the corporate performance.

Sebagaimana diketahui, kendala utama yang membuat tugas PLN dalam merealisasikan proyek-proyek dalam program skala besar FTP 1, tidak selesai tepat waktu dan tepat jadwal adalah proses pembebasan lahan dan perijinan yang lama dan tidak dapat dipantau dengan akurat. Akibat kendala tersebut *Commercial Operation Date* pada proyek- proyek ketenagalistrikan, baik pembangkit maupun transmisi, banyak yang terlambat sehingga beberapa tempat di Indonesia terpaksa mengalami pemadaman listrik bergilir. Lambatnya *Commercial Operation Date* proyek membuat berbagai daerah tersebut mengalami kekurangan pasokan tenaga listrik.

The main obstacle for PLN in the realization of projects in a large-scale FTP 1 program is project delays due to the lengthy processes of land acquisition and license. These processes are also hard to track accurately. Due to these issues, Commercial Operation Date in electricity projects, including power generation and transmission, is greatly delayed and thus many areas in Indonesia have to experience regular blackouts. The project Commercial Operation Date delays have resulted in these areas experiencing power shortage.

Divisi Perizinan dan Pertanahan (DIVPNK) sebagai Divisi yang dibentuk untuk mempercepat Perijinan dan Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Ketenagalistrikan berinisiatif membangun sebuah aplikasi Pengurusan Izin dan Urusan antar Lembaga (PINTAR).

The Permit and Land Division as a division established to accelerate the acquisition of permits and land for electrification development projects has the initiative to develop a Cross-Institution Licensing Management application called PINTAR.

Aplikasi ini digunakan untuk merencanakan dan merekam progres perizinan, pengadaan tanah dan urusan kelembagaan pada proyek-proyek ketenagalistrikan PLN. Desain aplikasi ini menghubungkan beberapa entitas dan stakeholder yang terlibat dalam proses perizinan dan pengadaan tanah.

This application will be used to plan and record the progress of obtaining permits, land acquisition, and other institutional issues in all of PLN's electrification projects. This application is designed to connect multiple entities and stakeholders involved in the process of obtaining permits and acquiring land.

Fitur-fitur yang ada di PINTAR terdiri dari *Query Proyek*, Laporan mengenai Proses Perizinan dan Pengadaan Tanah Proyek Ketenagalistrikan (Laporan terkait Kementerian/ Lembaga, Laporan terkait Jenis Perizinan, Laporan terkait tenggat waktu Proses Perizinan dan Pengadaan Tanah), Progres Perizinan dan Pengadaan Tanah, dan Master Data. Fitur- fitur ini akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi Perizinan dan Pengadaan Tanah.

Features of PINTAR will consist of Project Query, Reporting on the Processes of Obtaining Permits and Land Acquisition for Electrification Projects (reports related to various ministries and institutions, permit types, and project deadlines), Progress of Obtaining Permits and Land Acquisition, and Master Data. These features will continue to be developed to meet needs for information related to Obtaining Permits and Land Acquisition.

Pengembangan dan penggunaan aplikasi PINTAR ditargetkan dapat membantu PLN dalam mengidentifikasi permasalahan perizinan dan pengadaan tanah dengan baik. Identifikasi masalah sejak dini membuat PLN dapat melaksanakan Percepatan Proses Perizinan dan Pengadaan Tanah sehingga Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berjalan lancar.

The development and usage of PINTAR application can assist PLN in identifying issues related to obtaining permits and land acquisition issues. Early identification of issues will enable PLN to run its Electrification Projects more smoothly.

Ketersediaan aplikasi di tingkat operasional seperti ini, membuat manajemen PLN meyakini bahwa pembangunan proyek-proyek kelistrikan dalam Program 35.000 MW dapat terkelola dengan baik dan dapat diselesaikan pada waktunya.

The availability of the application at the operational level allows PLN's management to believe that the development of the 35,000 MW Program will be managed excellently, and will be completed on time.

KERJA SAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK

COLLABORATION WITH OTHER PARTIES

Menjamin keberhasilan seluruh realisasi rencana pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka implementasi Program 35.000MW maupun rencana investasi rutin dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam pemenuhan dana investasi maupun dalam mengatasi kendala pelaksanaan kegiatan sesuai koridor hukum.

Ensuring the success of the entire development plan realization and maintaining the electricity infrastructure in order to implement the 35,000 MW Program along with the routine investment plan by collaborating with other parties, both in fulfilling the investment funds and overcoming obstacles on implementing activities according to the legal corridor.

Hampir seluruh kegiatan PLN, baik pembangunan pembangkit (terutama PLTA), pembangunan maupun perawatan jaringan transmisi, distribusi dan Gardu Induk berlangsung di lapangan, umumnya bersinggungan atau bahkan berada di ruang publik. Kegiatan operasional PLN yang banyak berlangsung di ruang publik tersebut membuat Perseroan harus menjalin komunikasi dan kerjasama yang intens dengan seluruh pihak terkait.

Intensitas kegiatan di lapangan semakin meningkat saat PLN merealisasikan investasi pembangunan pembangkit lengkap dengan jaringan transmisi dan distribusinya, terlebih saat Program 35.000 MW mulai memasuki tahap pembangunan fisik. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keberhasilan seluruh program investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi guna meningkatkan keandalan yang bermuara pada meningkatnya kualitas layanan sesuai dengan harapan para pelanggan, PLN dan Anak Perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Most of PLN's activities, such as building power plants (especially Hydro Power Plants), developing and maintaining transmission network, distribution and substation take place in the field, either in contact with or in public space. Because of this, the Company must foster an intense communication and cooperation with all related parties.

Intensity of field activities increases as PLN realizes its power plant project investment with its transmission network and distribution, especially when the 35,000 MW Program began its construction phase. Therefore, in order to ensure the success of the entire realization of the investment program of electricity infrastructure development, including maintaining network distribution in order to gain reliability to improve quality service in line with customers' expectations, PLN and its subsidiaries have set up partnership with various parties.

Kerjasama tersebut dilakukan baik dalam kaitan kegiatan usaha, seperti dengan kalangan BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan dari luar negeri, maupun dalam kegiatan pengamanan pelaksanaan pembangunan fisik, seperti dengan Kepolisian dan pihak terkait lainnya. Berkaitan dengan mulai bergulirnya Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW lengkap dengan instalasi jaringan transmisi, distribusi dan Gardu Induk, Perseroan memperluas cakupan kerjasama tersebut dengan seluruh pihak-pihak yang berpotensi membantu memperlancar realisasi proyek-proyek yang tercakup dalam program tersebut.

Realisasi kerjasama meliputi hal-hal spesifik yang merupakan kompetensi khusus dari para pihak, dan didasarkan pada perolehan manfaat dalam jangka panjang bagi kedua pihak maupun terhadap para pemangku kepentingan. Adapun penjelasan ringkas dari kerjasama yang dilakukan PLN dengan berbagai pihak pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut.

KERJASAMA DENGAN BUMN

Kerjasama dengan sesama BUMN baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan terus dilanjutkan dan ditingkatkan, meliputi:

1. Bidang pelayanan melalui *call center* 123 dengan PT Telkom. Sedang dikembangkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi baik dengan PT Telkom maupun PT Indosat melalui jaringan listrik dan fiber optik PLN;
2. Pembelian tenaga listrik dengan Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) dan PT Pusri;
3. Pemenuhan seluruh kebutuhan bahan bakar dengan Pertamina dan pemenuhan sebagian kebutuhan gas dengan PT PGN;
4. Pemenuhan kebutuhan batu bara dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam;
5. Pemanfaatan dan pengusahaan aset PLN seperti dermaga (PLTU Gresik dan PLTU Grati), *right of way* di PLN UB Sulselra, UBD Jatim dengan PT Telkom dan Indovision;
6. Pendampingan Pengelolaan Sistem Kelistrikan di Bandara Udara Soekarno Hatta dengan PT Angkasa Pura II (Persero);
7. Pelayanan pasokan listrik ke kawasan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II;
8. PLN dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik PLTS Kupang dengan kapasitas 5 Mwp;
9. Pelaksanaan *hedging* PLN bekerjasama dengan Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI;
10. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan PT Pertamina Geothermal Energy, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, UGM, Unsrat-Manado dan Universitas Negeri Manado;

Those partnerships are formed both in business activities, such as those made with State Owned Enterprises (SOEs), national private companies, foreign companies, as well as the securing of physical developments, such as with the police and other relevant parties. Associated with the implementation of 35,000 MW power plant development program including its transmission network installation, distribution and substation, the Company expands the scope of cooperation with all potential parties to accelerate the fulfillment of all projects included in the program.

The realization of these partnerships includes specific issues that are the special competency of parties and is based on long-term acquisition benefits for all parties and stakeholders. An overview of the cooperation between PLN and parties in the reporting year is as follows.

COLLABORATION WITH SOES

Cooperation with other SOEs undertaken by PT PLN (Persero) and PLN subsidiaries continues to be proceeded and be improved. This cooperation includes:

1. Service sector through call center 123 with PT Telkom. A cooperation in telecommunication sector via PT Telkom and PT Indosat through the PLN electricity and fiber optic network is underway;
2. Purchasing electric power from Perum Otorita Jatiluhur (Jatiluhur Hydro Power Plant) and PT Pusri;
3. Fulfilling all fuel needs with Pertamina and partial gas needs with PT PGN;
4. Fulfilling coal needs with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam;
5. Application and utilization of PLN's assets including piers (Gresik Steam Power Plant and Grati Steam Power Plant) and the right of way at PLN UB Sulselra, UBD Jatim, with PT Telkom and Indovision;
6. Coaching Electric System Management at Soekarno-Hatta International Airport in cooperation with PT Angkasa Pura II (Persero).
7. Supplying electricity to the ports managed by Pelindo II;
8. PLN and PT LEN Industri (Persero) signed a sales and purchase agreement of electricity from the Kupang Solar Cell Power Plant with a capacity of 5 MWp;
9. PLN performed hedging in cooperation with Bank Mandiri, Bank BNI and Bank BRI;
10. Collaboration in education, research and community service with PT Pertamina Geothermal Energy, Gadjah Mada, Universitas Sam Ratulangi Manado and Universitas Negeri Manado;

11. Kerjasama mengenai pembangunan jaringan transmisi 500 kV di pulau Sumatera dengan PT Waskita Karya;
12. Kerjasama mengenai (i) pemeliharaan peralatan pembangkit dan (ii) supervisi, pelatihan, alih teknologi dan pemberdayaan SDM dengan PT Krakatau Steel, PT PAL, PT Boma Bisma Indra, PT Bharata, dan PT PINDAD.

KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA LAIN

Kerjasama dengan mitra usaha non BUMN baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan tidak terbatas pada bidang kelistrikan saja, namun meliputi juga kerjasama penyediaan barang dan jasa bagi kelancaran operasional Perseroan, meliputi:

1. Pelatihan, pengembangan SDM dan rekrutmen pegawai dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti ITB, ITS, UI, UGM;
2. Kerjasama proyek konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) antara PT PLN (Persero) dengan PT Wilmar Nabati sebagai pemasok bahan bakar nabati;
3. Pembayaran rekening listrik di *payment point* untuk meningkatkan pelayanan dengan bank swasta, bank pemerintah dan KUD;
4. Suplai gas dengan PT Emerada Hess, PT Kodeco dan PT Madya Karya Sentosa;
5. Pelaksanaan *operation maintenance* dengan PT Siemens Indonesia di PLTG Muara Tawar;
6. Penelitian dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, antara lain: Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Balitbang Depkes, BATAN, BPPT, LIPI, Puslitbang Geologi dan LAPAN;
7. Kerjasama dengan *Transparency International Indonesia* (TII) yaitu jaringan organisasi global anti korupsi. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya sungguh-sungguh menerapkan praktik GCG dan anti korupsi;
8. Kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak tentang pengoptimalan penerimaan pajak di sisi konsumen listrik;
9. Kerjasama pembelian komponen *switchgear* dengan PT CPSI;
10. PLN dan Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara;
11. PLN menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dalam hal menjaga pasokan batubara;

11. Collaboration in the construction of 500 kV transmission in Sumatera with PT Waskita Karya.
12. Collaboration in (i) maintaining power plant supplies and (ii) supervising, training, transferring technology and human empowering resources with PT Krakatau Steel, PT PAL, PT Boma Bisma Indra, PT Bharata, and PT PINDAD.

COLLABORATION WITH OTHER BUSINESS PARTNERS

Cooperation with other business partners (non-SOE) carried out by PT PLN and PLN subsidiaries is not limited to specific business services in electricity, but includes cooperation in products and services procurement to facilitate the Company's operation. The cooperation includes:

1. Training, human resources development, and employee recruitment through educational institutions such as Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Indonesia, and Universitas Gadjah Mada;
2. Cooperation in fuel conversion from fossil fuel into biofuel with PT PLN and PT Wilmar Abati as the biofuel supplier;
3. Electricity payment services at payment points to improve service with private banks, state banks, and village cooperatives (KUD).;
4. Gas supply cooperation with PT Emerada Hess, PT Kodeco, and PT Madya Karya Sentosa.
5. Implementation of operation maintenance with PT Siemens Indonesia in the Muara Tawar Gas Turbine Power Plant;
6. Research in electricity development with government and private institutions, such as: Bank Indonesia, Central Bureau of Statistics, Research and Development Agency of the Ministry of Health, National Nuclear Energy Agency (BATAN), Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Research and Development Center for Geology, and National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN);
7. Cooperation with Transparency International Indonesia (TII), a global network of anti-corruption. This partnership aims at ensuring PLN to seriously put into practice GCG and anti-corruption principles;
8. Cooperation with the Directorate General of Taxation as regards optimization of tax revenue from electricity customers;
9. Purchase agreement for switchgear component with PT CPSI;
10. PLN and the Attorney General's Office signed an agreement on handling legal issues in civil and state administration;
11. PLN signed a Memorandum of Understanding with the National Armed Forces (TNI) to secure coal supply;

KERJASAMA DENGAN LEMBAGA NEGARA DAN PENEGAK HUKUM

PLN kini juga menjalin komunikasi yang semakin intens dan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, Kementerian Agraria, Kehutanan dan sebagainya.

1. Kementerian ESDM Mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri ESDM, untuk memudahkan pelaksanaan di tingkat teknis operasional.
2. BKPM Menyediakan dan mengembangkan sistem perizinan satu pintu.
3. Lembaga Kejaksaan menyediakan Asistensi agar seluruh kebijakan yang diambil PLN senantiasa berada dalam koridor hukum.
4. Badan Intelejen Negara menyediakan asistensi terkait proses hukum.
5. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk bersama-sama mengawal proyek yang tengah dilaksanakan PLN.
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyediakan asistensi terkait proses pembebasan lahan dan perijinan.
7. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dan harmonisasi regulasi dan perijinan terkait penggunaan lahan di daerah konservasi.

Kerjasama ditekankan pada upaya bersama agar terhadap setiap kendala yang berpotensi menghambat realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama yang tergabung kedalam Program 35.000 MW dapat dicarikan jalan keluarnya sesuai koridor perundangan dan peraturan. Dengan intensitas komunikasi dan kerjasama yang erat, diharapkan kendala-kendala yang menghambat realisasi investasi seperti pada saat pelaksanaan FTP 1 dapat diatasi dan diminimalisasikan.

COOPERATION WITH STATE AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES

PLN is also fostering an intense communication and cooperation with law enforcement agencies such as the Attorney General's Office (AGO), State Intelligence Agency (BIN), the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesian National Police, Ministry of Agriculture, Ministry of Forestry, and others.

1. Ministry of Energy and Mineral Resources has issued various Regulations of the Energy and Mineral Resources Minister to facilitate implementation with respect to technical operations.
2. The Investment Coordinating Board (BKPM) has accommodated and developed a one door licensing system.
3. The AGO provides assistance to ensure all PLN policies are lawful.
4. The State Intelligence Agency (BIN) provides legal assistance.
5. Coordinating Ministry of Politics, Law and Security, The Indonesian National Police, together with Attorney General Office have committed to overseeing PLN's ongoing projects.
6. Ministry of Agriculture and Spatial has provided assistance in land acquisition and permit process.
7. Ministry of Environment coordinates and harmonizes regulations and permit of land usage in conservation areas.

Cooperation is emphasized on joint efforts in order to find solutions for every potential obstacle that may interfere the realization of the electricity development projects, especially the projects incorporated in the 35,000 MW Program, in line with the laws and regulations. With intense communication and solid cooperation, it is expected that these obstacles that may interfere the realization of implementing FTP 1 can be solved and minimized.

KERJASAMA LUAR NEGERI

PLN juga menjalin kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak dari luar negeri, yang meliputi berbagai bidang, termasuk dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan usaha penyaluran tenaga listrik.

Kerjasama dengan pihak luar negeri baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan, meliputi:

1. HAPUA (*Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities*), pertemuan dilakukan setiap tahun diantara negara anggota ASEAN secara *alphabetis*. Kerjasama tersebut meliputi 8 proyek, yaitu: *Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability*

COOPERATION WITH FOREIGN PARTIES

PLN also engages in long-term cooperation with foreign parties. The subjects of the cooperation vary, including exchange of scientific knowledge and experience sharing in the business of electricity supply.

The partnerships between foreign parties and PT PLN, PLN Units, and PLN's subsidiaries include:

1. HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities) annually holds gathering of members of ASEAN, rotated alphabetically. The partnership incorporates eight project areas, namely power plant, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resources Development, Power Reliability,

and Quality dan *Human Resource.* Kegiatan tersebut dilaporkan ke SOME/AMEM (*Senior Official on Energy/ ASEAN Ministers on Energy Meeting*) yang diadakan setiap tahun.

2. AESIEAP (*The Association of Electricity Supply Industry East Asia and the Western Pacific*) yang beranggotakan 19 Negara Asia Timur dan Pasifik bagian barat, dengan 4 *Technical Sub Commitee* yaitu: *Deregulation, Privatization and Competition (DPC), Power Quality (PC), Performance Benchmarking(PB)* dan *Customer Relations Management (CRM).*
3. PLN dipercaya sebagai sebagai ketua ASEAN *Power Grid Consultative Committee* dan tergabung dalam IERE (*International Electric Research Exchange*).
4. Kerjasama antara PT PLN (Persero) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia dalam rangka interkoneksi Sumatera–Peninsular (Malaysia).
5. Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Serawak *Electricity Suply Company* (SESCO) dalam rangka interkoneksi Kalimantan-Serawak.
6. Perusahaan multinasional secara *job order* yang bersifat tidak mengikat, antara lain: *Sulzer Hydro* untuk perbaikan PLTA, Yokogawa untuk perbaikan sistem control industri, *Sulzer Pump* untuk perbaikan pompa, Vatech-Elin untuk pembuatan sistem kontrol PLTA, Entec/GTZ untuk pembuatan PLTMH, Hickam Industries untuk perbaikan PLTG, Thomassen untuk perbaikan PLTG, *Quality Assurance Services* untuk sertifikasi ISO, *Cast Iron Welding* Ltd. untuk pengelasan *cast iron*, Global Crankshaft Services Ltd. untuk *regrinding crankshaft* dan *Suzler Metco* untuk *metal coating.*
7. Indramayu *Coal Fired Power Plant Project* antara JICA dengan PT PLN (Persero), BAPPENAS, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi.
8. Kerjasama di bidang kelistrikan dengan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Penandatanganan MoU ini membuka kemungkinan kerjasama segala bidang untuk keuntungan kedua belah fihak, termasuk kemungkinan interkoneksi Kalimantan Utara dengan Sabah.
9. *Project Prepatory Technical Assistance For Geothermal Energy Development Plant* antara BAPPENAS, PLN, PERTAMINA dan ADB.
10. Kerjasama dengan *Ministry of Electric Power Myanmar* dalam hal penanganan susut jaringan dan efisiensi energi.
11. Kerjasama dengan *The Export-Import Bank Korea* dalam hal dukungan finansial untuk proyek-proyek PLN.
12. PLN menandatangani perjanjian program kemitraan dengan perusahaan listrik dari Perancis *Electricité de France (EDF)* dan *Agence Française de Développement* (EDF). Kemitraan antara PLN dan EDF bertujuan untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia.
13. PLN menandatangani perjanjian kerjasama dengan *State Grid Corporation of China* tentang pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Indonesia.

and Quality and Human Resources. These activities are reported to SOME/AMEM (Senior Official on Energy/ ASEAN Ministers on Energy Meeting) which is also held annually.

2. AESIEAP (The Association of Electricity Supply Industry East Asia and the Western Pacific), a joint cooperation of 19 East Asian and Western Pacific states, with four Technical Sub Committees, namely Deregulation, Privatization and Competition (DPC), Power Quality (PC), Performance Benchmarking (PB), and Customer Relations Management (CRM).
3. PLN has been entrusted as the head of the ASEAN Power Grid Consultative Committee, and is a member of the IERE (International Electric Research Exchange).
4. PT PLN (Persero) cooperates with Malaysia's Tenaga Nasional Berhad (TNB) in the framework of achieving interconnection between Sumatra and the Malaysian Peninsula.
5. PT PLN (Persero) cooperates with Serawak Electricity Supply Company (SESCO) in the framework of achieving interconnection between Kalimantan and Serawak.
6. Conducting non-binding job orders with multinational companies, among others: Sulzer Hydro for hydro power plant repairs, Yokogawa for internal automation and control, Sulzer Pump for pump repairs, Vatech-Elin for Hydro Power Plant control system improvements, Entec/GTZ for implementing Micro Hydro Power Plant, Hickam Industries for Gas Turbine Power Plant improvements, Thomassen for Gas Turbine Power Plant for improvements, Quality Assurance Services for ISO certification, Cast Iron Welding Ltd. for cast iron welding, Global Crankshaft Services Ltd. for crankshaft regrinding, and Suzler Metco for metal coating.
7. The JICA cooperated with PT PLN (Persero), BAPPENAS, Ministry of Energy and Mineral Resources for the Indramayu Coal Fired Power Plant project.
8. Cooperation with Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). The MoU opens an opportunity for cooperation in all fields for the benefit of both parties, including the opportunity to interconnect North Kalimantan with Sabah.
9. Project Preparatory Technical Assistance for Geothermal Energy Development Plant among BAPPENAS, PLN, PERTAMINA and ADB.
10. Cooperation with Ministry of Electric Power of Myanmar for handling of network losses and energy efficiency.
11. Cooperation with The Export-Import Bank of Korea to obtain financial support for PLN projects.
12. PLN signed an agreement of partnership with electricity companies from France, Electricité de France (EDF) and Agence Française de Développement (EDF). This partnership between PLN and EDF aims to build a formidable electricity sector and achieve low carbon emission in Indonesia.
13. PLN signed a cooperation agreement with State Grid Corporation of China for electricity transmission network development in Indonesia.

PLN TANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA STRATEGIS DENGAN LIMA BUMN

PLN SIGNED STRATEGIC COOPERATION AGREEMENT WITH 5 STATE OWN ENTERPRISE (SOE'S)

(Jakarta, 3 November 2015) – Di tahun ke-70 Hari Listrik Nasional, PLN menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan program pembangunan proyek kelistrikan 35.000 MW dengan menandatangani perjanjian kerjasama strategis bersama lima BUMN, Selasa (3/11).

Penandatangan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Sukandar, Direktur Utama PT PAL (Persero) M. Firmansyah Arifin, Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) Muhammad Mudhiq, Direktur Utama PT Bharata (Persero) Zakky Gamal Yasin, dan Direktur Utama PT PINDAD (Persero) Silmy Karim. Penandatangan berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, bersamaan dengan pembukaan acara Seminar dan Pameran Kelistrikan Indonesia 2015 yang diselenggarakan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Perjanjian Strategis ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna optimalisasi sumber daya produksi yang dimiliki. Sinergi antar BUMN bertujuan untuk meningkatkan daya saing Nasional menghadapi globalisasi serta memperkuat perekonomian Nasional dengan tetap memperhatikan pertimbangan keekonomian *(business to business)* sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Perjanjian yang berlangsung selama tiga tahun ini meliputi hal berikut:

1. Pemeliharaan / rehabilitasi / rekondisi / *reverse engineering* peralatan spesifik komponen mekanikal dan elektrikal pada peralatan pembangkit listrik;

2. Supervisi, pelatihan, Alih Teknologi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

(Jakarta, 3 November 2015) – On the 70th anniversary of the National Electricity Day, PLN demonstrated its dedication to the 35,000 MW electricity development program by signing astrategic cooperation agreement with five SOEs, on Tuesday (3/11).

This signing involved the President Director PT PLN (Persero) Sofyan Basir, President Director of PT Krakatau Steel (Persero) Sukandar, President Director of PT PAL (Persero) M. Firmansyah Arifin, President Director of PT Boma Bisma Indra (Persero) Muhammad Mudhiq, President Director of PT Bharata (Persero) Zakky Gamal Yasin, and President Director of PT PINDAD (Persero) Silmy Karim. The signing took place at the Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, on the opening of Seminar and Exhibition of Indonesia Electricity 2015, organized by the Indonesia Electricity Community (Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia—MKI).

This Strategic Agreement was made in order to achieve synergy between SOEs to optimize production resources. The synergy among SOEs aims to improve national competitiveness in facing globalization and strengthen the nation's economy while being heedful of the economic considerations (business to business) in line with the Minister of SOE Regulation Num. PER-05/MBU/2008 dated 3 September 2008 on the General Guidelines for the Procurement of Goods and Services for State Owned Enterprises.

This agreement, which will be in force for a period of three years, covers the following:

1. Maintenance/rehabilitation/recondition/reverse engineering of specific mechanical and electrical components of power plants;

2. Supervision, coaching, transfer of technology and empowerment of human resources.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM Sudirman Said juga menegaskan bahwa sebagian besar pembangunan proyek 35.000 MW dibangun oleh *Independent Power Producer* (IPP). Untuk itu PLN harus membuka diri dan memberi kemudahan akses untuk berkomunikasi dengan mitra. "PLN harus menjadi mitra. Karena semuanya saling ketergantungan", ujar Sudirman.Selain itu, PLN juga harus mengikuti tren perkembangan energi dunia terutama di bidang energi baru terbarukan.

Bicara soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sudirman berharap proyek 35.000 MW dapat menggunakan peralatan yang diproduksi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi transaksi dalam US dollar, sekaligus meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

Program 35.000 MW mempunyai nilai ekonomi dengan investasi sebesar US$ 72.942 Juta. Program ini akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri dari 291 Pembangkit, 732 Transmisi, dan 1.375 Gardu Induk. Komponen pada Program 35.000 MW ini antara lain 301.300 km konduktor aluminium, 2.600 set trafo, dan 3,5 juta ton baja. Program ini akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 650 ribu (langsung) dan 3 juta (tidak langsung). Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditargetkan adalah sebesar 40% dari total investasi (US$ 29,2 Juta).

In his speech, the Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said asserted that most of the 35,000 MW project developments are being built by Independent Power Producers (IPPs). Therefore PLN must open up and provide easy access to all partners to foster communication. "PLN should be a partner, because all parties are now interdependent." said Sudirman. In addition, PLN also needs to follow the trend of the world's energy development, especially in renewable resources.

As regards the Level of Domestic Content, Sudirman hopes that the 35,000 MW project will utilize equipment manufactured in Indonesia. This is intended to reduce transactions billed in US dollar, and at the same time strengthen the national economy and create jobs.

The 35,000 MW Program has an economic value from the investment of US$72,942 million. This program will build electricity infrastructure that consists of 291 power plants, 732 transmission lines, and 1,375 substations. The components of the 35,000 MW Program include 301,300-km long aluminium conductor, 2,600 transformer sets, and 3.5 million tons of steel. This program will employ around 650 thousand workers (directly) and 3 million (indirectly). The TKDN target is 40% from the total investment (US$29.2 million).

PLN BEKERJA SAMA DENGAN TNI JAGA PASOKAN BATUBARA

PLN COOPORATES WITH TNI TO SECURE COAL SUPPLY

(Jakarta, 20 Maret 2015) PT PLN (Persero) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan dalam rangka penerimaan dan pengujian batubara. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, dengan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di PLN Kantor Pusat, Jakarta, pada Jumat (20/3).

Nota kesepahaman yang berlaku selama dua tahun ini meliputi pendampingan oleh TNI AD pada proses penerimaan dan pengujian batubara serta pelatihan personel dalam rangka pengujian kuantitas dan kualitas batu bara yang digunakan sebagai energi primer pembangkit PLN.

Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, pada kesempatan yang sama juga ditandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan pendampingan dan pelatihan penerimaan dan pengujian batubara antara Direktur (Operasi Jawa Bali) PLN, Supangkat Iwan Santoso dan Direktur (Operasi Luar Jawa Bali) PLN, Amir Rosidin dengan Asisten Teritorial KASAD, Mayor Jenderal TNI Kustanto Widyatmoko, MDA untuk 15 pembangkit listrik berbahan bakar batubara (PLTU). 15 PLTU tersebut berada di pulau Sumatera (6 lokasi) dan pulau Jawa (9 lokasi), dengan rincian sebagai berikut:

Sumatera:

1. PLTU Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. PLTU Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
3. PLTU Labuan Angin, Kabupaten Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.
4. PLTU Ombilin, Kabupaten Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
5. PLTU Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
6. PLTU Teluk Sirih, Kabupaten Bungus, Provinsi Sumatera Barat.

(Jakarta, 20 March 2015) PT PLN (Persero) with the Indonesian Army (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat—TNI AD) signed a Memorandum of Understanding on the supervision and coaching of coal admission and inspection. Signing was done by the President Director of PLN, Sofyan Basir, with the TNI AD Chief of Staff, TNI General Gatot Nurmantyo, at PLN Head Office, Jakarta, on Friday (20/3).

The MoU, covering a period of two years, covers assistance from TNI AD for coal admission and inspection processes, and also personnel training in order to supervise the quantity and quality of coal that will be used as PLN's primary energy source.

As a follow up to the MoU, on the same occasion was also signed the cooperation agreement for the assistance and supervision of coal admission and inspection by PLN Director (Java Bali Operations), Supangkat Iwan Santoso and PLN Director (Outer Java-Bali Operations), Amir Rosidin, with the Territorial Assistant Army Chief of Staff (KASAD), Major General TNI Kustanto Widyatmoko, MDA, for 15 Steam Power Plants. Those Steam Power Plants are located in Sumatera (6) and Java (9), with the details as follows:

Sumatera:

1. Nagan Raya Steam Power Plant, Nagan Raya District, Nanggroe Aceh Darussalam Province.
2. Pangkalan Susu Steam Power Plant, Langkat District, North Sumatera Province.
3. Labuan Angin Steam Power Plant, Sibolga District, North Sumatera Province.
4. Ombilin Steam Power Plant, Sawahlunto District, West Sumatera Province.
5. Sebalang Steam Power Plant, Lampung Selatan District, Lampung Province.
6. Teluk Sirih Steam Power Plant, Bungus District, West Sumatera Province.

Jawa:

1. PLTU Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
2. PLTU Lontar, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
3. PLTU Suralaya 8, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten.
4. PLTU Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
5. PLTU Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
6. PLTU Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
7. PLTU Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
8. PLTU Tanjung Awar-awar, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur.
9. PLTU Paiton 9, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya mendukung sistem ketenagalistrikan nasional. "Selain kerja sama ini kami meminta bantuan TNI Angkatan Darat untuk pengamanan daerah di sekitar objek PLN seperti jalur transmisi yang sering mendapat gangguan. Ini dilakukan untuk menangkal semua hal yang mengganggu kedaulatan energi nasional," ungkap Sofyan.

Mengenai kesiapan personelnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan akan memilih personel diantaranya dengan melalui tes psikologi untuk ditugaskan membantu PLN. "Kerja sama ini menindaklanjuti pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh Komandan Kodim dan Komandan Korem pada awal Desember tahun lalu tentang upaya mewujudkan kedaulatan yang salah satunya kedaulatan energi yang berkaitan langsung dengan listrik untuk rakyat," jelas Gatot.

Java:

1. Labuan Steam Power Plant, Pandeglang District, Banten Province.
2. Lontar Steam Power Plant, Tangerang District, Banten Province.
3. Suralaya 8 Steam Power Plant, Cilegon District, Banten Province.
4. Pelabuhan Ratu Steam Power Plant, Sukabumi District, West Java Province.
5. Indramayu Steam Power Plant, Indramayu District, West Java Province.
6. Rembang Steam Power Plant, Rembang District, Central Java Province.
7. Pacitan Steam Power Plant, Pacitan District, East Java Province.
8. Tanjung Awar-awar Steam Power Plant, Tuban District, East Java Province.
9. Paiton 9 Steam Power Plant, Probolinggo District, East Java Province.

The President Director of PLN, Sofyan Basir, said that this cooperation is a part of PLN's efforts to support the national electricity system. "In addition to this cooperation, we are asking the assistance of TNI AD to secure areas around PLN's projects, such as transmission lines that are often disturbed. This is to avoid issues that will interfere with the national energy sovereignty," said Sofyan.

Concerning the preparedness of its personnel, the KASAD General TNI Gatot Nurmantyo said that he will choose personnel that have passed the psychotest to be assigned for PLN. "This cooperation is an implementation of President Joko Widodo's mandate to all Commanders of Military Districts (Kodim) and Commanders of Military Resorts (Korem) in early December last year, about the efforts to achieve national sovereignty, including energy sovereignty, that is directly related to electricity for the benefit of the people," Gatot explained.

PLN BEKERJA SAMA DENGAN KEJAKSAAN TANGANI MASALAH HUKUM PERDATA

PLN COOPERATES WITH THE ATTORNEY GENERAL OFFICE TO HANDLE CIVIL LAW

(Jakarta, 13 Februari 2015) PT PLN (Persero) bersama Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Nur Rochmad, bertempat di PLN Kantor Pusat, Jakarta, pada Jumat (13/2).

Kerja sama kedua pihak ini meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang akan diberikan oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kesepakatan serupa antara 17 Kepala Kejaksaan Tinggi yang berada di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera dengan 33 General Manager/Kepala unit PLN yang berada di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Semua kesepakatan tersebut berlaku untuk masa 3 tahun.

Dalam acara ini, Dirut PLN Soyan Basir menyatakan bahwa saat ini PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. "Supaya proyek besar ini sukses perlu kerja sama efektif PLN dengan para stakeholder. Salah satunya dengan Kejaksaan Agung. PLN sebagai pelaksana pembangunan proyek bisa mendapat supervisi dari Kejaksaan supaya dalam mengambil keputusan dan kebijakan aman dan terhindar dari risiko dan tuntutan hukum," jelas Soyan Basir.

Dalam upaya melistriki nusantara, tak jarang PLN berada dalam situasi yang membawa implikasi hukum seperti pembebasan lahan untuk lokasi pembangkit, Gardu Induk, jaringan transmisi atau penyelesaian tunggakan dan penertiban pemakaian listrik ilegal. Berdasar pertimbangan tersebut PLN juga memandang penting unit-unit PLN di seluruh Indonesia untuk bekerja sama dengan Kejaksaan khususnya Kejaksaan tinggi dalam penanganan masalah hukum secara bersama-sama. Hal ini sudah sesuai dengan peran kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan amanat Undang-undang No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

(Jakarta, 13 February 2015) PT PLN (Persero) and the Attorney General Office signed an agreement on the handling of civil and state administration cases. The signing was done by the President Director of PLN, Sofyan Basir, with the Attorney General General for Civil and Administrative, Nur Rochmad, at PLN Head Office, Jakarta, on Friday (13/2).

This cooperation will cover legal assistance, legal considerations, and other legal actions that will be provided by the Attorney General Office in the context of recovering and rescuing the finances/assets of PLN and other civil and administrative issues faced by PLN.

At the same time a similar agreement was signed by 17 Chief Prosecutors of Java, Bali and Sumatera and 33 General Managers of PLN Head Units located in Java, Bali and Sumatera. This agreement covers a period of three years.

In this event, President Director of PLN, Sofyan Basir, said that PLN has received a mandate from the government to build a 35,000 MW Program to support the national electricity growth and bolster the economy. "In order for this project to succeed, effective cooperation with PLN stakeholders is needed. One of them is with the Attorney General Office. PLN as the executor of this project will receive supervision from the Attorney General Office in decision-making and implementation of policies to avoid legal risks," Sofyan Basir explained.

In order to support the effort to provide electricity to the nation, PLN often faces legal ramifications due to among others land acquisition for power plants, substations, transmission network, and also arrears settlement and demolition of illegal electricity usage. Based on these considerations, PLN sees the importance of having all PLN Units in Indonesia to cooperate with the Attorney General Office especially with the Regional Attorney General Office in handling lawsuits. This is in accordance with the role of the Attorney General Office as the state prosecutor based on the mandate of the Law Num. 16 of 2014 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.

PLN JALIN KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN LISTRIK PERANCIS

PLN ENGAGES PARTNERSHIP WITH FRENCH ELECTRICITY COMPANIES

Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Tripartit
(Jakarta, 11 Februari 2015) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani perjanjian program kemitraan dengan perusahaan listrik dari Perancis Electricité de France (EDF) dan Agence Française de Développement (AFD). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Perencanan dan Pembinaan Afiliasi PLN, Murtaqi Syamsuddin, perwakilan EDF, Mr. Gérard Szabason dan Country Director AFD Mr. Ghislain de Valon selaku pihak pengelola pembiayaan, di kantor Kementerian Maritim, Jakarta, pada Rabu 11 Februari 2015. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Indroyono Soesilo dan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne Breuze.

Kemitraan antara PLN dan EDF ini untuk berbagi keahlian yang bertujuan untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia. Program kemitraan dibiayai melalui dana hibah sebesar € 500.000, yang merupakan bagian dari pendanaan Perancis untuk keahlian teknis dan pertukaran pengalaman *(French Fund for Technical Expertise and Exchange of Experience/FEXTE)* yang dikelola oleh AFD dan Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis.

Pembiayaan ini sesuai dengan mandat AFD di Indonesia, yakni untuk mempromosikan *"green and inclusive growth"*, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. PLN merupakan operator utama dalam pelaksanaan kebijakan iklim dan energi dari Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, PLN dan AFD selama beberapa tahun telah menjalin hubungan yang baik dan AFD melalui pinjamannya membiayai beberapa proyek untuk pengembangan kegiatan PLN, terutama di bidang energi terbarukan. Pembiayaan kemitraan tersebut akan memperkuat hubungan kedua pihak dan menciptakan peluang kerjasama yang baru.

Melalui kemitraan tersebut, kedua perusahaan listrik itu dapat bertukar pengalaman dan *best practice* tentang sistem perencanaan dan operasi, pemasaran dan regulasi manajemen risiko. PLN dan EDF telah melakukan pra-identifikasi sembilan sub area yang masing-masing sub area akan dilakukan diagnosis, rekomendasi, dan seminar diskusi.

Signing of the Tripartite Partnership Agreement
(Jakarta, 11 February 2015) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) signs an agreement for a partnership with electricity companies from France, Electricité de France (EDF) and Agence Française de Développement (AFD). The signing was done by the Director of Planning and Development of PLN Affiliations, Murtaqi Syamsuddin, representative of EDF, Mr. Gérard Szabason, and Country Director of AFD, Mr. Ghislain de Valon as the Manager of Finance, at the Ministry of Maritime Affairs in Jakarta on Wednesday, 11 February 2015. This signing was witnessed by the Coordinating Minister for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia, Indroyono Soesilo, and the Ambassador of France for Indonesia, Corinne Breuze.

The partnership between PLN and EDF is to share expertise in order to create a robust electricity development and achieve low carbon emission in Indonesia. This partnership program was financed by a grant of €500,000 as part of the French Fund for Technical Expertise and Exchange of Experience (FEXTE) managed by AFD and the Economic Department of the Embassy of France.

This grant is suitable with AFD's mandate in Indonesia to promote "green and inclusive growth" of the economy. PLN is the main operator in implementing climate and energy policies of the Indonesian government. In this case, PLN and AFD has enjoyed a good relationship for several years, and AFD through its loan has financed a number of PLN's development projects, especially in renewable energy. This funding partnership will enhance the relationship between both parties and create new cooperation opportunities.

Through this partnership, both electricity companies are able to share experience and best practices in planning and operation system, marketing, and risk management regulation. PLN and EDF have pre-identified 9 sub-areas, and each sub-area will be diagnosed as well as receive recommendations and be discussed in seminars.

1. Sistem operasi dan perencanaan (sistem Jawa-Bali)
2. Sumatera: keahlian pada gangguan dinamis pada sistem
3. Teknologi *High Voltage Direct Current* (HVDC)
4. Interaksi dengan otoritas regulasi dan *stakeholder power system* lainnya
5. Optimasi dan *areas of concerns* jaringan terisolasi di pulau-pulau
6. Peningkatan keandalan jaringan distribusi
7. Desain dan *engineering assistance*
8. Masalah stabilitas tegangan
9. Perhitungan *transformer* paralel dan konsekuensi teknis

Inisiatif ini akan menjadikan kemitraan jangka panjang antara dua pihak dengan transfer pengetahuan dari produsen dan pemasok listrik di Perancis untuk perusahaan listrik di Indonesia, tentang keahlian di bidang operasi jaringan listrik, dan electrical engineering pada umumnya. Kemitraan ini diharapkan menandai awal untuk kerjasama yang kuat dan berjangka panjang.

1. Planning and Operation System (Java Bali system)
2. Sumatra: expertise in dynamic interferences to systems
3. High Voltage Direct Current (HVDC) Technology
4. Interaction with regulatory authorities and other power system stakeholders
5. Optimization of areas of concerns regarding isolated networks in remote islands
6. Reliability Improvement of distribution network
7. Design and engineering assistance
8. Stability tension issues
9. Calculation of parallel transformers and their technical consequences

This initiative will create a long-term partnership between two parties by transferring knowledge from manufacturers and suppliers in France to electricity companies in Indonesia, including expertise in electricity network and electrical engineering in general. This partnership is expected to be a start of a strong and long-lasting partnership.

ECONOMIC REVIEW
AND BUSINESS
PROSPECT
FINANCIAL
PERFORMANCE
OTHER FINANCIAL
INFORMATION

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

hal. 226 - 325

Ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh dengan permintaan daya listrik yang juga meningkat membuat PLN terus berupaya menyelesaikan berbagai proyek pembangunan ketenagalistrikan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Pertumbuhan permintaan yang terus berkembang tersebut, baik karena naiknya tingkat kesejahtaraan maupun adanya penyambungan baru untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membuat PLN harus terus meninjau dan menetapkan program prioritas, sesuai dengan kapabilitas perusahaan baik dari sisi sumber daya maupun dari sisi finansial, secara berkala.

The continual growth of the Indonesian economy and the growing demand for electrical power have caused PLN to continue its work to complete electricity development projects to meet the growing demand for electricity. The growth in demand continues both because of prosperity improvement and new electricity connections to increase the electrification ratio, making PLN should periodically review and set priority programs according to the company's capability in terms of resources and finances.

TINJAUAN EKONOMI DAN PROSPEK USAHA

ECONOMIC REVIEW AND BUSINESS PROSPECT

PLN menyadari besarnya peran ketenagalistrikan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Nasional. Oleh karenanya, PLN berupaya keras meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat. Mulai tahun 2015, melalui Program 35.000 MW PLN mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun kecukupan pasokan listrik seluruh Kawasan Nusantara dengan merealisasikan pembangunan pembangkit, sistim transmisi dan distribusi. Mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya dalam negeri yang tersedia, dan bersama-sama mensejajarkan Indonesia dengan kelompok negara maju untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

PLN recognizes the important role of electricity in boosting the nation's economic growth. Therefore, PLN strives to improve its ability to fulfill the increasing demand for electricity. Commencing in 2015, through the 35,000 MW program, PLN encourages all components of the nation to build a sufficient electricity supply throughout the archipelago together by developing power plants, transmission and distribution systems to optimize all natural resources available, to align Indonesia with developed countries for the well-being of the nation.

TINJAUAN EKONOMI

Kondisi perekonomian global di tahun 2015 masih belum kondusif dengan tingkat pertumbuhan negara-negara maju yang tidak seimbang. Pertumbuhan perekonomian negara-negara kawasan Eropa masih belum stabil. Di Asia, Tiongkok bahkan harus melakukan devaluasi mata uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah yang kemungkinan besar akan kembali berlanjut di tahun 2016. Demikian juga Jepang yang masih terus berupaya memulihkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal yang positif adalah Amerika Serikat konsisten menunjukkan gejala pemulihan kondisi ekonomi, sehingga memungkinkan The Fed merealisasikan kenaikan suku bunga acuan di akhir tahun 2015.

Kondisi ekonomi global tersebut berdampak pada rendahnya permintaan komoditas primer pertambangan, perkebunan dan energi, dengan harga minyak mentah tercatat ke level terendah dalam 10 tahun terakhir, hingga sebesar US$36,7/barrel. Selain rendahnya harga komoditas, kondisi ekonomi global tahun 2015 juga ditandai dengan terjadinya gejolak nilai tukar mata uang, terutama terhadap dollar Amerika. Rencana kenaikan suku bunga rujukan The Fed secara bertahap membuat nilai tukar mata uang Amerika Serikat cenderung terus menguat di masa mendatang.

Ekonomi Indonesia di tahun 2015, menurut data BPS tumbuh 4,79%, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 sebesar 5,02%, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak ekonomi, dan juga peningkatan belanja pemerintah. Porsi belanja pemerintah membaik selaras dengan realisasi beragam proyek infrastruktur dasar yang mulai meningkat sejak pertengahan tahun 2015. Perkembangan lainnya, tekanan defisit neraca perdagangan mulai berkurang, sebagai hasil penerapan kebijakan pencabutan subsidi BBM dan tarif listrik, sehingga nilai tukar rupiah relatif terkendali. Upaya BI menerapkan kebijakan makro prudential berdampak pada nilai tukar rupiah yang terjaga dan ditutup pada Rp13.795/US$ (sumber: Bank Indonesia) atau 11% lebih rendah dari Rp12.440 pada tahun sebelumnya. Tingkat inflasi terjaga pada level 3,35% dan tingkat suku bunga rujukan BI menjadi 7,50%, turun dari 7,75% pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, sebagai hasil dari pengalihan alokasi subsidi BBM dan tarif listrik, Pemerintah mulai merealisasikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar, meliputi ketenagalistrikan, perhubungan dan telekomunikasi. Realisasi berbagai proyek infrastruktur dasar tersebut diyakini akan menaikkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi langsung dan akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa-masa mendatang. Bank Indonesia maupun pakar ekonomi meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik di tahun 2016, untuk selanjutnya akan terus bertumbuh dengan kisaran kenaikan 5,5-7,0%.

ECONOMIC REVIEW

In 2015, global economic conditions were not yet conducive with the imbalance in the growth rate of developed nations. Economic growth in European region countries was not conducive yet. In Asia, China had to devaluate its currency to boost economic growth This phenomenon will continue in 2016. Japan also had the same situation, which has been attempting to recover its level of economic growth. The positive thing is that the United States of America is consistently shows the recovery of its economic condition, so The Fed can realize interest rate improvement in the end of 2015.

The global economy has an implication in low demand of mining primary commodities, plantation, and energy, with the price of crude oil plummeting to its lowest level in the last 10 years as US$36.7/barrel. Aside from the low commodity prices, the global economy in 2015 was also marked by fluctuation in currency exchange rate, especially in favor of the US Dollar. The Fed's plan of gradually increasing the interest rate will strengthen the US Dollar in the years to come.

According to data from the Central Statistics Agency, in 2015, the Indonesian economy grew 4.79%, slightly lower than the growth in 2014 of 5.02%. Domestic household consumption, along with increased government spending, became the main driver of the economy. Government spending increased along with the realization of basic infrastructure projects which have been on the rise since mid-2015. Furthermore, trade deficit started to be reduced as a result of fuel-and-electricity subsidy policy implementation, so that exchange rate remained relatively under control. Efforts of Bank Indonesia in implementing macro-prudential policies gave an impact on the exchange rate which was maintained at Rp13,795/USD *(source: Bank Indonesia)* or 11% lower than the previous year, which was Rp12,440/USD. The inflation rate was also maintained at 3.35% and BI rate was lowered to 7.50% from 7.75% in 2014.

In 2015, as a result of the transfer in fuel subsidy allocations and electricity tariffs, the Government commenced the implementation of various basic infrastructure development projects, including electrification, transportation and telecommunication. It is believed that the realization of these projects will increase Indonesia's competitiveness in pursuing direct investments, and positively impact the national economic growth for many years to come. Bank Indonesia and economists believe that Indonesia's economic growth will improve in 2016 and the following years, with the growth rate ranging from 5.5 to 7.0%.

Perkembangan tersebut pada akhirnya diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga Indonesia diyakini akan terus tumbuh menjadi kelompok negara berpendapatan menengah-tinggi, dari saat ini yang masih berada pada kelompok negara berpendapatan sedang-menengah.

Growth is expected to increase society income, therefore it is expected that Indonesia will achieve the status of a middle-to-high income country, whereas currently it is still a low-to-middle income country.

PROSPEK USAHA

Pembangunan nasional selanjutnya menargetkan naiknya GDP perkapita agar Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan tinggi, yang mensyaratkan pemenuhan berbagai infrastruktur dasar, termasuk ketenagalistrikan. Meningkatnya pendapatan per kapita, akan mendorong pertumbuhan kebutuhan berbagai produk dan jasa termasuk sektor kelistrikan.

Tingkat rasio elektrifikasi nasional hingga akhir tahun 2015 adalah sekitar 88,3%, masih di bawah rata-rata negara lain dikawasan Asia yang telah mencapai rasio sekitar 99% (Malaysia, Thailand, Vietnam), bahkan 100% (Singapura, Brunei).

Kebijakan Pemerintah untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur dasar, berupa jalan dan jalur kereta api yang tersebar di seluruh kawasan Nusantara membuat pertumbuhan ekonomi akan lebih merata di masa mendatang. Di sisi lain, keputusan Pemerintah untuk mewajibkan pendirian fasilitas smelter bagi pelaku kegiatan penambangan mineral logam, membuat kebutuhan listrik untuk industri di masa mendatang akan meningkat dengan jumlah yang substansial dan dengan sebaran yang semakin merata.

Dengan demikian pertumbuhan ketenagalistrikan di masa mendatang akan meningkat lebih cepat lagi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB. Studi empiris menunjukkan, setiap pertumbuhan PDB 1%, perlu didukung dengan pertumbuhan suplai listrik sebesar 1,2-1,5%. Sehingga dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5-7% pertahun, Indonesia membutuhkan tambahan suplai listrik antara 7,5% sampai 10,5% per tahun.

Realisasi penyesuaian tarif listrik secara periodik sampai ke tarif keekonomian, diyakini akan menjadikan PLN memiliki kemampuan keuangan yang semakin baik, sehingga mampu membiayai pembangunan pembangkit baru dengan sumber dana dari kas internal, melengkapi sumber pendanaan dari kreditor maupun sumber lainnya.

Tahun 2015, PLN mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk membangun pembangkit baru sebesar 35.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusi yang dibutuhkan pada periode 2015-2019 di luar proyek-proyek yang telah mendapatkan kepastian pendanaan dan tengah dalam masa konstruksi. Program ini akan membuat rasio elektrifikasi Indonesia naik hingga di atas 97,4% diakhir tahun 2019, yang berarti perlunya tambahan pembangkit dengan total daya minimal 7 GW setiap tahunnya.

BUSINESS PROSPECT

The national development thus targets the increase of GDP per capita, so Indonesia can achieve the high income country status. This requires the fulfillment of basic infrastructure, including electricity. Increasing income per capita will improve demand for products and services in many sectors, including the electricity sector.

The national electrification ratio in the end of 2015 was around 88.3%, below the average in other Asian countries which have achieved a ratio above 99% (Malaysia, Thailand, Vietnam), and even 100% (Singapore, Brunei).

The Government's policy to implement the development of basic infrastructure, including roads and railways across the archipelago has ensured that economic growth will be more evenly distributed in the future. On the other side, the Government's decision to develop smelting facilities for metal mining companies will create a substantial industrial electricity demand in the future, and with more equitable distribution.

Therefore, electricity growth in the future will improve faster than the projected PDB growth. Empirical studies have shown that every 1% of PDB growth needs to be supported by a 1.2 to 1.5% growth in electricity supply. Projected growth is within the range of 5-7%, therefore Indonesia requires additional electricity supply between 7.5%–10.5% annually.

The realization of the tariff adjustment periodically will be in economical tariff. It is believed will make PLN to have better financial capacity, so it can fund power plant development from internal cash, complementing funding from creditors along with other sources.

In 2015, PLN received the mandate from the Government to develop a new 35,000 MW power plant, as well as the necessary transmission and distribution network, to be completed during 2015–2019, outside of other projects with confirmed funding and in the construction phase. This program will increase Indonesia's electrification ratio to above 97.4% by the end of 2019, which means additional power plants with minimum load of 7 GW will be required annually.

Untuk membangun pembangkit baru berkapasitas total 35.000 MW lengkap dengan jaringan transmisi dan distribusi (gardu induk), dibutuhkan total biaya sebesar US$72,94 miliar. Oleh karena besarnya dana yang dibutuhkan, lebih dari 62% pembangunan pembangkit dikerjakan oleh swasta dengan mekanisme IPP, sedangkan sisanya sebesar 38% akan dibangun oleh PLN berikut sarana transmisi dan distribusi yang diperlukan.

Kebutuhan pendanaan bagi pembangunan ketenagalistrikan tersebut bersumber dari dana internal maupun eksternal Perusahaan. Sumber dana internal berasal dari laba usaha, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa pinjaman *two step loan*, pinjaman pemerintah melalui rekening dana investasi, obligasi nasional maupun internasional, serta pinjaman komersial perbankan lainnya.

Seluruh uraian data tersebut menggambarkan cerahnya prospek industri ketenagalistrikan di masa mendatang. Hal tersebut juga mengindikasikan besarnya peran PLN dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa mendatang.

To develop a new 35,000 MW power plant with complete transmission and distribution infrastructure (substation) requires a total amount of US$72.94 billion. Due to the sheer amount of the funding required, more than 62% of total development of power plants is assigned to the private sector through the IPP mechanism. In the other hand, the remaining 38% will be developed by PLN, along with the required transmission and distribution infrastructure.

The required funding for electricity development is sourced from the Company's internal funding as well as external sources. Internal funding consists of business profits, while external funding may be in the form of two-step loans, the Government's loan through an investment account, national and international bonds, as well as other loans from commercial banks.

The above details illustrate the optimism surrounding the future of the electricity industry. They also indicates the significant role of PLN in supporting Indonesia's future economic growth.

SEKILAS TRANSFORMASI KINERJA PLN

Setiap tahun PLN merealisasikan rencana investasi bernilai puluhan triliun untuk membangun fasilitas ketenagalistrikan meliputi unit pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Selaras dengan realisasi tersebut, PLN mencatatkan peningkatan kinerja keuangan, terutama dari sisi naiknya pendapatan penjualan listrik sebagai hasil dari naiknya jumlah pelanggan dan jumlah daya listrik terjual. Namun demikian PLN menghadapi beberapa kendala untuk mencatatkan kinerja lebih optimal berupa hasil laba bersih yang lebih baik atau dalam bentuk tingkat pengembalian investasi, ROA dan ROE yang lebih baik.

Beberapa kendala utama adalah keterbatasan PLN untuk mendapatkan sumber energi, terutama energi primer pada harga yang bersaing, dan ketentuan penugasan sebagai perusahaan penyedia PSO *(Public Service Obligation)* untuk tenaga listrik, yang tidak memungkinkan PLN menentukan tarif listrik sesuai harga keekonomian. Sekalipun PLN mendapatkan kompensasi berupa subsidi atas selisih harga pokok produksi listrik dengan tarif listrik ditambah margin tertentu, mekanisme penetapan besaran subsidi dan pencairan dana subsidi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat PLN tidak memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan operasional perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dengan lebih cepat, tepat dan efektif.

Kendala utama lainnya adalah risiko valas yang selalu mengiringi kegiatan operasional, untuk memenuhi kebutuhan impor pengadaan barang modal dan pendanaan yang sebagian menggunakan dana dalam valuta asing, sementara pendapatan PLN dalam rupiah.

OVERVIEW OF PLN'S TRANSFORMATION PERFORMANCE

Yearly, PLN realizes investment plan worth of trillions of rupiah to develop electricity projects as power plant units, transmission and distribution network. Along with these, PLN has recorded growth in economic performance, mainly from the sides of increasing electricity sales income as the result of expanding market and increasing number of power. Notwithstanding, PLN faces numerous hindrance to record a more optimum performance in the form of bigger nett profit or in the form of better return on investment, ROA and ROE.

Few major barriers include limited access to get source of energy, especially competitive price of oil-based fuel, and assignment provision as PSO providing company for electricity, which makes PLN impossible to decide electricity tariff based on economical tariff. Even if PLN has the compensation in the form of subsidies on cost of good sold margin for electricity with the electricity tariff and summed up with the complex and time consuming mechanism of subsidies value appointment limits PLN's authority to run company's operation especially in providing faster, more accurate and more effective financial management.

Another major barrier is the foreign exchange risk that consistently occurs in daily operational activities, to comply with import demand on procurement of capital goods and funding partially in foreign exchange, on the other hand PLN revenue is in rupiah.

Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir kinerja keuangan PLN tidak optimal, mengakibatkan peringkat surat utang PLN belum masuk kategori *investment grade*, dan premi suku bunga/kupon yang dikenakan juga relatif tinggi.

Kondisi tersebut mulai berubah sejak awal tahun 2014 dan terus berlanjut di tahun 2015. Implementasi keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik pada golongan tarif tertentu selama periode 2014-2015, membuat PLN memiliki ruang untuk menyesuaikan tarif dasar listrik semakin mendekati harga ke-ekonomian. Hasilnya, PLN mampu mencatatkan kenaikan pendapatan penjualan listrik secara substansial dan memiliki ruang untuk mengelola likuiditas keuangan dengan lebih optimal.

PLN juga telah melaksanakan transaksi lindung nilai sesuai ketentuan Pemerintah mengenai ketentuan transaksi lindung nilai bagi BUMN yang senantiasa menghadapi risiko valas, termasuk PLN.

Kinerja keuangan PLN jika dilihat dari besaran EBITDA dan rasio EBITDA/daya listrik terjual sesungguhnya cukup baik. Naiknya tarif dasar listrik yang dimulai sejak akhir tahun 2013 dan berlanjut sampai akhir tahun 2015 membuat EBITDA PLN meningkat signifikan.

Tahun 2015, PLN telah berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu dari 500 perusahaan besar dunia dengan pendapatan terbesar dari FORTUNE Global 500, sebuah ajang tahunan yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Realisasi Program 35.000 MW akan membuat PLN memiliki peluang mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia dan memiliki kemampuan yang semakin besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Nasional.

As a result, in the past few years PLN's financial performance has not been performing optimally, making PLN's debt securities rank has not listed in investment grade category and high premium interest rate/ coupon applied.

This condition started to change in 2014 and still continuing in 2015. Government's policy to lower electricity subsidy in certain class, in the period of 2014-2015 gives PLN higher authority to adjust basic electricity tariff with economic price. As a result, PLN manages to record substantial improvement in electricity sales income and obtains more space to manage financial liquidity optimally.

PLN has also performed hedging transactions in accordance with the Government's regulation on hedging for SOEs that are exposed to foreign exchange risks. These SOEs include PLN.

PLN's economic performance, seen from the standpoint of EBITDA and ratio of EBITDA to electricity sold, is relatively quite good. The electricity tariff increase began in late 2013 until the end of 2015 allowing PLN's EBITDA to rise significantly.

In 2015, PLN successfully established in the list of top 500 companies in the world by revenue. FORTUNE Global 500 is an annual ranking event held by Fortune magazine since 1955. In the future, PLN is targeted to have opportunity to secure itself as Indonesia's top revenue company and record highest nett profit to eventually placing PLN in supporting national economic growth.

EBITDA (Rp triliun)
EBITDA (Rp trillion)

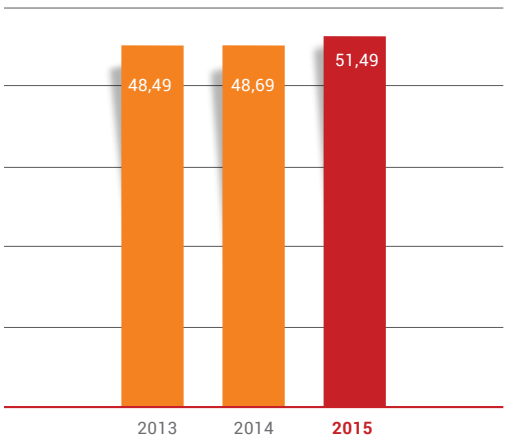

EBITDA/Daya Terjual (Rp/kWh)
EBITDA/ Energy Sold (Rp/kWh)

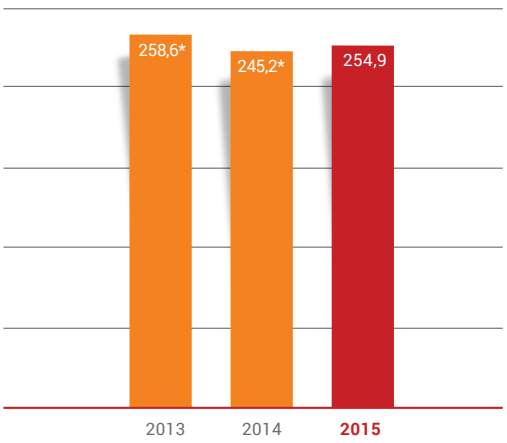

*Angka disajikan kembali
*Restated numbers

AKURASI *COMMERCIAL OPERATION DATE* PEMBANGKIT - TITIK KRITIS YANG MENENTUKAN KINERJA PLN

ACCURACY OF POWER PLANTS' COMMERCIAL OPERATION DATE A CRITICAL POINT DEFINING PLN'S PERFORMANCE

Pada setiap penyusunan tahun anggaran, PLN menyusun rencana investasi pembangunan pembangkit baru, penyelesaian pembangkit, pemeliharaan pembangkit, pembangunan sarana transmisi dan gardu induk, serta menentukan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan asumsi utama bahwa semua rencana pembangunan berjalan dan diselesaikan tepat waktu. Dalam rencana tersebut juga telah dialokasikan komposisi dari jenis pembangkit yang akan beroperasi dan perhitungan kebutuhan bahan bakar yang diperlukan.

Untuk perhitungan pendapatan, maka penjualan tambahan daya dari pembangkit baru yang telah beroperasi secara komersial dimasukan sebagai salah satu *item* tambahan pendapatan, demikian juga penjualan kembali tambahan daya dari selesainya pemeliharaan pembangkit.

Hal-hal utama yang diperhitungkan dari rencana investasi tersebut, adalah:

- Jumlah unit pembangkit baru *Commercial Operation Date*, sumber energi dan jumlah pasokan daya
- Jumlah unit pembangkit pemeliharaan, sumber energi dan jumlah pasokan daya

Selain sarana kelistrikan utama tersebut, PLN juga memperhitungkan kebutuhan dana operasional untuk menjalankan tugas memenuhi kebutuhan listrik. Seluruh rangkaian perhitungan tersebut berkaitan erat dengan penyelesaian pembangunan pembangkit, proyeksi penambahan pelanggan dan target-target kuantitatif serta target keandalan sistim kelistrikan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dituangkan dalam target-target kinerja operasional dan finansial tahunan.

Perubahan kondisi dari yang telah diperhitungkan, akan mempengaruhi capaian target kinerja operasional dan keuangan PLN.

Dari seluruh parameter operasional, realisasi tambahan daya dari pembangkit *Commercial Operation Date* merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja operasional tahun anggaran, seperti: bauran energi, SAIDI, SAIFI dan lain-lain target operasional yang

During the phase of planning of every annual budget, PLN prepares the investment plans for new plants development, completion, maintenance, transmission and substation infrastructure development, as well as allocates the budget in line with the primary assumption that all development plans will be carried out and completed on time. In these plans PLN also determines the composition of the operating power plant types and the amount of required fuel.

For calculating revenue, the sales of additional electricity from new commercially-operating plants are included as additional revenue, as well as the sales of additional electricity from the completion of plant maintenance.

Primary considerations for the investment plans are:

- The number of new Commercial Operation Date power plants, energy sources and total amount of electricity supply
- The number of plants to be under maintenance, energy sources and total amount of electricity supply

In addition to the primary electricity facilities, PLN has also calculated the operational funding required to meet its obligation, that is to provide electricity and meet demand. All calculations are closely related to the completion of power plants, the projection of additional customers, and quantitative targets as well as electricity system reliability targets. The result of the calculations is then integrated into the annual operational and financial performance targets.

The predicted change in conditions will affect the achievement of the annual operational and financial performance targets.

From all operational parameters, the realization of additional COD load is an influential parameter in achieving the annual operational performance targets, including: fuel mix, SAIDI, SAIFI, and other relevant targets. The inaccuracy

relevan. Melesetnya target *Commercial Operation Date* juga pada akhirnya mempengaruhi laba usaha perusahaan dengan tingkat selaras kuantitas daya listrik terkait.

Mengingat pentingnya capaian *Commercial Operation Date* sesuai target, PLN semakin meningkatkan upaya-upaya guna mengenali dan mengatasi kendala yang mempengaruhi capaian target *Commercial Operation Date*. Pemantauan proses perizinan dan ketersediaan lahan sebagai kendala utama terus ditingkatkan dengan mengembangkan sistim PMO berbasiskan teknologi informasi. Cara lain yang diterapkan mencakup: skreening kontraktor, evaluasi penanggung jawab proyek, peningkatan bobot KPI dan lain-lain.

PLN bertekad target *Commercial Operation Date* dapat dicapai semaksimal mungkin dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

of Commercial Operation Date targets will influence the Company's business profits in line with the quantity of electricity.

Given the importance of achieving the Commercial Operation Date target, PLN has increased efforts to recognize and overcome obstacles that influence their achievement. The supervision of the licensing process and the availability of land, the two primary obstacles, will continue to be increased, along with the development of an IT-based PMO system. Other measures include: contractor screening, project responsibility evaluation, increasing KPI load, and others.

PLN is committed to achieve Commercial Operation Date target with optimal accountability quality.

Dari grafik EBITDA/daya terjual tampak bahwa sesungguhnya PLN mencatatkan perbaikan kinerja finansial secara konsisten, hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian tarif sehingga membuat kinerja keuangan PLN meningkat signifikan dibandingkan kinerja sebelum ada penyesuaian tarif. Mengingat di masa mendatang tarif dasar listrik pada beberapa golongan tertentu masih akan disesuaikan hingga berada pada level keekonomian, maka kinerja keuangan PLN diharapkan semakin meningkat.

Namun demikian, naiknya nilai tukar USD terhadap seluruh mata uang di dunia, termasuk rupiah, membuat kinerja keuangan PLN terpengaruh. Pelemahan rupiah terhadap mata uang US Dollar yang melebihi ekspektasi awal dan mencapai 11% dengan kurs akhir tahun menjadi Rp13.795/US$ membuat PLN harus membukukan rugi selisih kurs yang substansial. Rugi selisih kurs terutama disebabkan oleh kewajiban dalam mata uang asing, selain karena pembelian barang modal, yakni peralatan pembangkit dan peralatan utama gardu induk yang harus diimpor.

The above graph of EBITDA to electricity sold shows that in fact PLN has been recording consistent improvements in its financial performance, due to the tariff adjustments which has improved PLN's financial performance in comparison to pre-tariff adjustment performance. Considering that in the future certain electricity tariff groups will still be adjusted to achieve economical scale, PLN's financial performance is expected to be even greater.

However, the strengthening of the US dollar towards international currencies, including the Rupiah, affected PLN's financial performance. The weakening of the rupiah against the US dollar exceeded early expectations, 11% to record a year-end rate of Rp 13,795/USD, forcing PLN should record a substantial foreign exchange loss. Foreign exchange loss was mainly due to liabilities denominated in foreign currencies, in addition to the purchase of capital goods, such as power plant equipment and substation equipment, which must be imported.

TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL MENURUT SEGMEN

Segmen usaha PLN sebagian besar, hingga 75%, berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan, mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai transmisi dan distribusi ke pengguna akhir. Sebagian segmen usaha lain baik berkaitan langsung dengan ketenagalistrikan maupun segmen pendukung usaha yang relevan, pada umumnya dilaksanakan oleh entitas Anak Usaha, meliputi: pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, rancang bangun ketenagalistrikan, teknologi informasi, angkutan laut khusus, tambang dan perdagangan batubara, keuangan dan sebagainya.

Kinerja segmen usaha tersebut, akan dijelaskan melalui uraian mengenai kinerja Anak Usaha PLN. Sementara uraian kinerja segmen usaha listrik disampaikan dalam rangkaian penjelasan pada sub-bab berikut ini.

Adapun distribusi pendapatan PLN dan Anak Usaha dengan kepemilikan di atas 90% sesuai segmen usaha yang dijalankan, digambarkan dalam tabel ringkas berikut.

OPERATIONAL PERFORMANCE REVIEW BASED ON BUSINESS SEGMENTS

PLN's main business segment, comprising 75%, relates to electrification, starting from power plants, transmission to all customers. Other segments related directly to electrification, or other related supporting segments, are handled by subsidiary entities including: power plants, electricity distribution, electricity design, information technology, special sea transport, mining and coal trading, finances, and others related areas.

The performance of these business segments will be explained through a review of PLN subsidiaries performance. In the other hand, the electricity segment's performance will be explained in the following section.

The revenue distribution of PLN and its subsidiaries (with ownership of more than 90%) by business segment is described in the following table.

Distribusi Pendapatan Menurut Segmen Usaha – Tahun 2015
Revenue Distribution Based on Business Segments - 2015

Pendapatan Usaha Per Entitas Revenue Per Entity			
Penjualan Tenaga Listrik			Electricity Sales
Pembangkitan			**Power Plant**
	PT Indonesia Power	30.680.909	
	PT Pembangkitan Jawa Bali	25.616.707	
	Holding	91.274.683	
Distribusi			Distribution
	PT PLN Batam	2.720.646	
	PT PLN Tarakan	351.657	
	Holding	404.828.671	
Eliminasi		**(345.628.732)**	**Elimination**
Penjualan Tenaga Listrik - bersih		209.844.541	Sales of electricity-Net
Pendapatan Biaya Penyambungan			Revenue from Connection Fees
	PLN Batam	95.384	
	PLN Tarakan	9.625	
	Holding	6.036.326	
Jumlah Pendapatan Biaya Penyambungan		**6.141.335**	**Total Revenue from Connection Fees**
Pendapatan Usaha Lain			Other Income
	PT Indonesia Power	1.339.277	
	Pembangkitan Jawa Bali	2.238.260	
	PLN Batam	23.653	
	PLN Tarakan	53	
	PT Indonesia Comnets Plus	1.622.883	
	PT PLN Enjiniring	293.410	
	Majapahit Holding	-	
	PT PLN Batubara	3.407.242	
	PT PLN Geothermal	-	
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	1.071.459	
	PT Haleyora Power	1.048.498	
	Holding	18.518.380	
Eliminasi		(28.202.001)	Elimination
Jumlah Pendapatan Usaha Lain - bersih		1.361.114	Total of Other Revenues - Net
Total Pendapatan Usaha		**217.346.990**	Total Revenue

KINERJA MENURUT SEGMEN GEOGRAFIS

Selain menurut bidang usaha, untuk alasan administrasi dan koordinasi lapangan, mulai akhir bulan September 2015 segmen usaha PLN dibedakan menurut 7 area Bisnis Regional, yakni: Bisnis Regional Sumatera, Bisnis Regional Jawa Bagian Barat, Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Bisnis Regional Kalimantan, Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara serta Bisnis Regional Maluku dan Papua. Ketentuan tersebut akan diberlakukan secara efektif mulai awal 2106, sehingga keterangan Segmen Geografi masih sama dengan yang terdapat di halaman 86-87.

PERFORMANCE REVIEW BASED ON REGIONAL BUSINESS SEGMENTS

Aside from these business segments, since late September 2015 PLN's administration and field coordination have been divided into 7 Regional Business areas, which are: Regional Business of Sumatra, Regional Business of West Java, Regional Business of Central Java, Regional Business of East Java and Bali, Regional Business of Kalimantan, Regional Business of Sulawesi and East Nusa Tenggara, and also Regional Business of Maluku and Papua. Such provisions will come into effect from early 2016, so that the Geographical Segment information is the same as the information found in pages 86-87.

PRIORITAS PROGRAM KERJA DI TAHUN 2015

Realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% dengan permintaan daya listrik yang juga meningkat membuat PLN terus berupaya menyelesaikan berbagai proyek pembangunan ketenagalistrikan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Pertumbuhan permintaan yang terus berkembang tersebut, baik karena naiknya tingkat kesejahteraan maupun adanya penyambungan baru untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membuat PLN harus menetapkan program prioritas, sesuai dengan kapabilitas perusahaan baik dari sisi sumber daya maupun dari sisi finansial.

Adapun prioritas program kerja yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
2. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
3. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
4. Menjamin ketersediaan energi primer.
5. Mengoptimalkan bauran energi.
6. Meningkatkan efisiensi operasi
7. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
8. Melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan melalui pengelolaan *Service Level Agreement* secara intensif.
9. Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
10. Memperkuat bisnis dan sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis PLN serta meningkatkan kinerja dan ketahanan Anak Perusahaan dalam menghadapi tuntutan bisnis, antara lain kerjasama penyediaan dan transportasi batubara untuk PLTU, kerjasama di bidang IT.

Sesuai dengan prioritas program kerja tersebut, PLN berupaya meningkatkan setiap *output* program secara optimal dan mencatatkan berbagai keberhasilan operasional. Adapun pencapaian hasil operasional tahun 2015 diuraikan pada pembahasan masing-masing aspek berikut.

2015 PRIORITY WORK PROGRAMS

With economic growth at the rate of 4.79%, PLN continues seeking to realize electricity development projects to meet the growing electricity demands. The ever-growing demands, either due to higher welfare level or new installations for raising electrification ratio, cause PLN to set the priority programs in accordance with the latest condition and the Company's capability, either from resources or financial aspects.

The priority work programs implemented throughout 2015 covers:

1. Improving the Company's financial health position.
2. Speeding up the financial closing process for Independent Power Producer (IPP) and completion of various constructions according to schedule.
3. Maintaining electricity supply sufficiency.
4. Ensuring the primary energy availability.
5. Optimizing the energy mix.
6. Increasing operational efficiency.
7. Consolidating business processes services integrity and efficiency.
8. Accelerating licen process and land acquisition process to build electricity projects through intensive Service Level Agreement management.
9. Optimizing the organization and improving the quality of human resources.
10. Strengthening the business and synergizing subsidiary companies in order to achieve the target of the corporate strategies and PLN's business processes, and to increase subsidiaries' performance and endurance in fulfilling business demands, including cooperation in coal provision and transportation for Steam Power Plants, and cooperation in the field of IT.

In accordance with the priority work programs, PLN is striving to improve every program output by optimizing each program and recording all operational successes. Operation results achieved in 2015 are described in the following, for each aspect.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM EFISIENSI

INCREASING THE EFFECTIVITY OF THE EFFICIENCY PROGRAM

Untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, pada tahun 2014 PLN menerapkan 10 langkah/ strategi penghematan atau yang dikenal pula sebagai *"The Ten Commandment"* melalui *Cost & Revenue Management Program* (CRMP), yang terdiri atas 10 inisiatif strategi penghematan, meliputi: Efisiensi konsumsi BBM, efisiensi susut dan PS (Pemakaian Sendiri), efisiensi sewa pembangkit, efisiensi biaya pemeliharaan, efisiensi persediaan, efisiensi biaya administrasi, efisiensi biaya pegawai, efisiensi piutang, efisiensi kas, dan efisiensi pendanaan.

In order to enhance financial and operational performance, in 2014 PLN implemented 10 saving strategies known as "The Ten Commandments" through the Cost & Revenue Management Program (CRMP), which includes 10 strategic saving initiatives, comprising: fuel efficiency, losses and self-usage efficiency, power plant rent efficiency, maintenance fee efficiency, supply efficiency, administration fee efficiency, employee costs efficiency, receivable efficiency, cash efficiency, and funding efficiency.

Menghadapi kondisi usaha yang semakin penuh tantangan di tahun 2015, PLN menambah jurus efisiensi dengan mengedepankan keberhasilan target-target indikator kinerja strategis. Pilihan ini dikedepankan dengan dasar bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis di bidang operasional selain memberi dampak meningkatnya efisiensi juga berdampak pada perolehan potensi pendapatan yang optimal, sehingga pada akhirnya memperbaiki kinerja keuangan secara substansial. Sebaliknya kurangnya keberhasilan pencapaian sasaran strategis akan mempengaruhi pendapatan dan biaya secara substansial pula.

Facing the business challenges in 2015, PLN developed new efficiency measures to achieve the strategic performance indicator targets. This was prioritized in order to achieve strategic operational targets not only to increase efficiency but also to optimize potential revenue and substantially improve financial performance. On the other hand, failure to achieve these strategic objectives will significantly influence revenue and costs.

Beberapa sasaran strategis yang akan dipantau dengan ketat tingkat ketercapaiannya adalah: COD *(Commercial Operation Date)*, EAF *(Equivalent Availibilty Factor)*, CF *(Capacity Factor)*, SFC *(Specifiec Fuel Oil Comsumption)*, fuel mix, Susut Jaringan, Biaya Sewa PLTD, dan BPP (Biaya Pokok Penyediaan). Dari seluruh target operasional strategis tersebut Manajemen memberi perhatian lebih pada pencapaian target COD Pembangkit maupun COD Transmisi/Distribusi, karena memiliki pengaruh langsung terhadap ketercapaian beberapa target operasional strategis lainnya. Simulasi dan evaluasi kinerja kuartalan yang diselenggarakan manajemen menunjukkan kuatnya pengaruh ketidakberhasilan pencapaian COD terhadap sasaran strategis lainnya.

Several strategic targets which are strictly supervised are: COD (Commercial Operation Date), EAF (Equivalent Availability Factor), CF (Capacity Factor), SFC (Specific Fuel Oil Consumption), fuel mix, Network Losses, Diesel Fuel Power Plant Rent Fee, and Cost of Production. Among all strategic operational targets, management is more focused on achieving power plant COD and Transmission/ Distribution COD, because they have a direct impact on achieving the other operational strategic targets. Simulation and quarterly performance evaluation are conducted by the management, demonstrating the strong impact of unsuccessful COD achievement on achieving other strategic targets.

Oleh karenanya, Manajemen menetapkan pencapaian sasaran strategis COD pembangkit maupun transmisi sebagai prioritas dalam menjalankan kegiatan operasional, di tahun 2015 maupun di tahun-tahun mendatang.

Therefore, the management prioritized the achievement of power plant COD and transmission COD as the strategic targets in PLN's operational activities, in 2015 as well as in the following years.

PEMASARAN

Strategi Pemasaran

1. Pembangunan infrastruktur dalam rangka penyambungan baru antara lain penarikan jaringan, pembangunan gardu, ketersediaan cubicle 20 kV, kendala beban GI 100 kV dan 150 kV.
2. Menerapkan program GOS *(Generation of Sales)* atau program membangkitkan upaya penjualan yang terdiri dari:
   (i) Melakukan peningkatan penjualan di Jawa Bali.
   (ii) Mengevaluasi daftar tunggu permintaan sambungan baru /penambahan daya, terutama di daerah yang didorong untuk meningkatkan penjualan (Jawa, Sumbar, S2JB, Sulsel).
   (iii) Mengkaji penjualan pada ceruk – ceruk yang menguntungkan seperti pada saat Luar Waktu Beban Puncak.

Pangsa Pasar

Pangsa pasar penjualan tenaga listrik PLN di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sekitar 95%.

Penjualan Tenaga Listrik

PLN menargetkan penjualan tenaga listrik di tahun 2015 dengan berpatokan bahwa volume bahan bakar minyak yang digunakan untuk produksi tenaga listrik tidak melampaui target konsumsi sebagai bagian dari implementasi program efisiensi. Pengendalian kenaikan penjualan listrik dilakukan pada daerah-daerah yang pasokan listriknya masih didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar minyak, yaitu: Sumatera Utara dan sekitarnya, Kalimantan Barat dan sekitarnya, Kalimantan Timur, Bali, dan sebagian besar di daerah Indonesia Timur.

Sementara pada daerah-daerah yang pasokan listriknya disuplai pembangkit listrik berbahan bakar non-minyak didorong untuk meningkatkan penjualan dengan tetap memperhatikan kendala operasional lainnya, seperti: Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu; Kalimantan Selatan & Tengah; Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo; Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat; dan Jawa.

Pengendalian pertumbuhan penjualan listrik ini pada dasarnya tidak mengurangi target peningkatan rasio elektrifikasi karena pelayanan penyambungan baru bagi pelanggan rumah tangga tidak dibatasi.

MARKETING

Marketing strategy

1. Building infrastructure for new connections, including expanding the network, constructing substations, providing 20kV cubicles, controlling substation 100 kV and 150 kV loads
2. Applying the GOS (Generation of Sales) program, comprising:
   (i) Increasing sales in Java and Bali.
   (ii) Assessing waiting lists for new connections / increased power, especially in areas where sales are being promoted (Java, West Sumatera, S2JB, South Sulawesi).
   (iii) Reviewing sales in profitable niches, such as Off Peak Load.

Market Share

PLN's market share across Indonesia for electricity sales in 2015 was approximately 95%.

Electricity Sales

The sales of electricity in 2015 is based upon the oil based-fuel's volume utilized to produce electrical power which is not exceeding consumption target as a part of the implementation of efficiency program. The sales control is focused on areas whose electricity supply is dominated by oil based fuel fired power plants, such as: North Sumatra and nearby areas, West Kalimantan and nearby areas, East Kalimantan, Bali and most of East Indonesia.

On the other hand, areas whose electricity is supplied from non-oil based fired plants, the sales are boosted by taking into account other operational impediments, including in: South Sumatra, Jambi and Bengkulu; South and Central Kalimantan; North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo; South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi; and Java.

The control of electric power supply growth basically does not hamper the electricity ratio increase, because new installation service for household customers is not limited.

Penjualan Tenaga Listrik (GWh) per Kelompok Pelanggan
Electricity Sales (GWh) per Customer Group

Kelompok Pelanggan	2013	2014	2015	Customer Group
Rumah Tangga	77.211	84.086	88.682	Households
Bisnis	34.498	36.282	36.978	Business
Industri	64.381	65.909	64.079	Industry
Lainnya	11.451	12.324	13.106	Others
Jumlah	**187.541**	**198.602**	**202.845**	**Total**

Dilihat dari pertumbuhannya, maka penjualan tenaga listrik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 5,90% di tahun 2014 menjadi 2,14 % di tahun 2015. Penurunan pertumbuhan penjualan tenaga listrik (GWh) merupakan hasil kontribusi dari penghematan yang dilakukan pelanggan akibat kenaikan tarif listrik secara bertahap di sepanjang tahun 2015 dan masih belum kondusifnya perekonomian dalam negeri.

Disamping itu, penurunan pertumbuhan secara signifikan terjadi pada kelompok pelanggan Industri sebesar 2,78%, khususnya pada kelompok industri I3 dan I4 yang disebabkan oleh:

- Adanya kenaikan tarif listrik, yang mengakibatkan sebagian konsumen industri berhenti menjadi pelanggan dan beralih ke pembangkit sendiri, serta beberapa pelanggan industri yang mengurangi pemakaian listrik dari PLN karena mengoperasikan pembangkitnya secara paralel dengan sistem ketenagalistrikan PLN.
- Menurunnya konsumsi listrik yang terjadi pada beberapa sektor industri, disebabkan oleh:
  - Industri baja serta industri lainnya yaitu industri makanan, kertas, kimia, logam mengalami kelesuan yang disebabkan oleh tidak kompetitifnya harga jual sebagai dampak dari : (i) merosotnya harga minyak dunia serta merosotnya konsumsi komoditas di tingkat global; (ii) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (iii) kenaikan harga energi yaitu listrik dan gas alam; (iv) meningkatnya upah buruh
  - Industri otomotif, penjualan otomotif tahun 2015 tergerus pasca kenaikan harga BBM
  - Industri tekstil, konsumsi listrik pada industri tekstil menurun sebagai dampak Program Restrukturisasi Mesin / Peralatan Industri TPT Tahun Anggaran 2014/2015, sehingga terjadi peningkatan efisiensi penggunaan energi dan biaya produksi serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing
  - Industri karet mengalami kelesuan, karena : (i) harga karet anjlok; (ii) ekspor menurun akibat ketidakpastian cuaca dan lain-lain.

In terms of growth, electricity sales slowed from a rate of 5.90% in 2014 to 2.14% in 2015. Decline in electricity sales growth (GWh) was the result of customer electricity savings after a gradual increase of electricity tariffs throughout 2015, and a less conducive domestic economy.

In addition, significant decline in growth, i.e. 2.78%, was experienced in the industrial customer segment, particularly in the I3 and I4 groups, which was due to:

- An increase in electricity tariffs, resulting in most of the industrial customers stopping to purchase electricity from PLN and switching to build their own power plants. Some industrial customers also reduced their electricity usage by operating their own power plants in parallel with PLN's electricity system.
- A decrease in electricity consumption occurred in several industrial sectors was caused by:
  - Steel and other industries, such as food, paper, chemical, and metal industries experienced a decline due to less-than-competitive selling prices, which were in turn caused by: (i) the falling global oil prices and commodity demand sharply on the global level; (ii) the weakening Rupiah against the US Dollar; (iii) the increasing, such as electricity and natural gas; (iv) the rising labor cost.
  - In the automotive industry, higher fuel price was a primary contributing factor to the fast decline of sales in 2015.
  - In the textile industry, electricity consumption also declined due to the Machinery/Textile Equipment Restructuring Program for Fiscal Year 2014/2015, resulting in energy usage efficiency and production cost to produce higher quality and more competitive products.
  - The rubber industry experienced a decline, because (i) rubber prices plummeted; (ii) rubber export decreased due to uncertain weather conditions and other reasons.

Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik, Menurut Kelompok Pelanggan

Electricity Sales Growth, Based on Customer Groups

Kelompok Pelanggan	2013	2014	2015	Customer Group
Rumah Tangga	7,04%	8,90%	5,47%	Household
Bisnis	11,32%	5,17%	1,92%	Business
Industri	6,99%	2,37%	(2,78%)	Industry
Lainnya	7,08%	7,63%	6,34%	Others
Jumlah	**7,79%**	**5,90%**	**2,14%**	**Total**

Berdasarkan segmen wilayah regional, kontribusi penjualan terbesar terjadi pada wilayah regional Jawa Bali yakni sebesar 74,4% dari penjualan tenaga listrik Perseroan tahun 2015, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Based on regional segmentation, the biggest sales contribution was from Java Bali, amounting to 74.4% of the Company's total electricity sales in 2015, as shown in the following table.

Penjualan Listrik Menurut Wilayah Regional (ribu GWh)
Electricity Sales based on Regional Areas (GWh in thousands)

Wilayah Regional	2013	2014	2015	Kontribusi Contribution	Perubahan Change	Regional Area
Sumatera	27.565	29.596	31.206	15,4%	5,4%	Sumatra
Indonesia Timur	17.980	19.600	20.742	10,2%	5,8%	East Indonesia
Jawa Bali	141.996	149.406	150.898	74,4%	1,0%	Java Bali
Jumlah	**187.541**	**198.602**	**202.846**	**100%**	**2,1%**	**Total**

Jumlah Pelanggan

Pertumbuhan penjualan tenaga listrik (GWh) sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Hal ini terlihat dari penambahan pelanggan sampai akhir tahun 2015 yang mencapai 3.674.746 pelanggan atau meningkat 5,08% dibanding tahun sebelumnya. Penambahan pelanggan terbesar terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga, yang mencapai sebesar 3.295.935 pelanggan dibanding tahun lalu sebesar 3.193.198 pelanggan.

Number of Customers

The growth of electricity sales (GWh) is in line with the increasing number of customers. It can be seen from the addition of the customer until the end of 2015 reached 3,674,746 million customers, or rose 5.08% compared to the previous year. The addition of the largest customers in the category of household customers, which reached 3,295,935 customers compared to last year amounted to 3,193,198 customers.

Penambahan Pelanggan
Customer Growth

Kelompok Pelanggan	Penambahan Pelanggan Additional Customers			Customer Group
	2013	2014	2015	
Rumah Tangga	3.896.347	3.193.198	3.295.935	Household
Bisnis	200.089	207.729	268.830	Business
Industri	2.885	2.804	4.964	Industry
Lainnya	101.638	93.295	105.017	Others
Jumlah	**4.200.959**	**3.497.026**	**3.674.746**	**Total**

Peningkatan jumlah pelanggan tersebut juga ditopang oleh hasil penerapan inovasi PLN dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis penyambungan baru dan penyediaan layanan fasilitas antara lain melalui:

- "Contact Center 123" Penyambungan Baru, Penambahan Daya dan Penyambungan Sementara Online ("PB/PD/PS Online") melalui website.
- Pemasaran Listrik Prabayar.

Penerapan inovasi di bidang layanan tersebut membuat pelanggan dapat langsung melakukan proses pemasangan listrik baru tanpa harus datang ke kantor unit layanan PLN. Penambahan pelanggan baru sebesar 3.674.746 pelanggan tersebut membuat jumlah pelanggan PLN menjadi 61,2 juta pelanggan, meningkat 6,39% dibandingkan tahun lalu.

The increase in the total customer was a result of PLN's innovation application in customer service quality improvement through the betterment of new installation business process and providing of facility services including:

- "Contact Center 123" New Connections, Additional Power Capacity, and Online Temporary Connections ("PB/PD/PS Online") through the PLN website.
- Prepaid electricity installation.

These innovations have facilitated customers in submitting applications for new installations without coming to a PLN service unit office. The additional new 3,674,746 customers brings the customer total to 61.2 million customers, an increase of 6.39% from last year.

Penambahan pelanggan didominasi oleh pelanggan prabayar yang merupakan salah satu program prioritas perusahaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, sekaligus meningkatkan kualitas arus kas.

The new customers are dominantly pre-paid customers, and this is one of the company's priority programs of increasing the electrification ratio and improving cashflow.

Pada tahun 2015 penambahan pelanggan prabayar baik pelanggan baru maupun migrasi dari pelanggan pasca bayar ke prabayar mencapai 4.622.928 pelanggan, sehingga jumlah pelanggan prabayar telah mencapai 22.182.551 pelanggan naik 26% dari 17.559.623 pelanggan di tahun 2014.

The number of prepaid (both new and migrations of postpaid to prepaid) customers rose by 4,622,928 in 2015, bringing the total prepaid customers to 22,182,551, or a 26% increment from the previous year's figure of 17,559,623 customers in 2014.

Jumlah Pelanggan (ribu pelanggan)
Number of Customers (thousands)

Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan Total Customers			Customer Group
	2013	2014	2015	
Rumah Tangga	50.116	53.309	56.605	Household
Bisnis	2.418	2.626	2.895	Business
Industri	56	58	63	Industry
Lainnya	1.406	1.500	1.604	Others
Jumlah	**53.996**	**57.493**	**61.167**	**Total**

Perkembangan Rasio Elektrifikasi, 2013 – 2015 (%)
Electrification Ratio Growth, 2013 – 2015 (%)

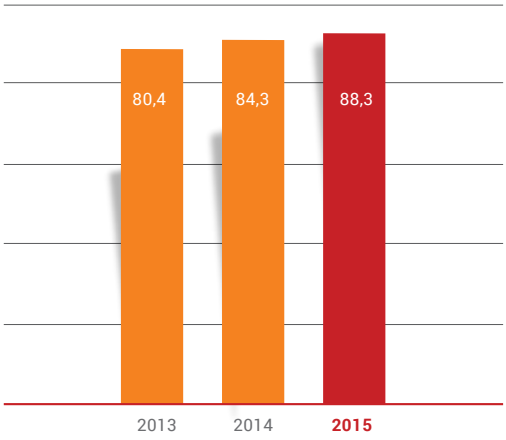

Pertumbuhan jumlah pelanggan di tahun 2015 tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi sebesar 88.30% (termasuk pelanggan non PLN) dari angka tahun sebelumnya sebesar 84,35%.

Customer growth in 2015 caused the national electrification ratio to be 88.30% (including non-PLN customers) from the previous year's electrification ratio of 84.35%.

Berdasarkan segmen wilayah regional, jumlah pelanggan di wilayah regional Jawa Bali tetap mendominasi, dengan kontribusi sebesar 64,5% diikuti wilayah regional Sumatera sebesar 19,8% dan regional Indonesia Timur sebesar 15,6%, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

By geographical segment, the number of customers in Java-Bali was still dominant, with contribution of 64.5%. This was followed by Sumatra of 19.8% and East Indonesiaof 15.6%, as shown in the table below.

Jumlah Pelanggan menurut segmen geografis
Total Customers by geographical segment

Wilayah	2013	2014	2015	Kontribusi Contribution	Perubahan Change	Area
Sumatera	10.746.346	11.448.744	12.129.363	19,8%	5,9%	Sumatra
Indonesia Timur	8.344.464	8.999.845	9.568.669	15,6%	6,3%	East Indonesia
Jawa Bali	34.905.398	37.044.645	39.469.948	64,5%	6,5%	Jawa Bali
Jumlah	**53.996.208**	**57.493.234**	**61.167.980**	**100,0%**	**6,4%**	**Total**

Daya Tersambung

Penambahan daya tersambung di tahun 2015 sebesar 6.552MVA, namun dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,53%.

Penurunan daya tersambung terbesar terjadi pada kelompok pelanggan Industri khususnya kelompok industri I3 dan I4. Hal ini seiring dengan penjualan energi listrik (GWh) pada kelompok tersebut yang mengalami penurunan. Adapun penjelasan mengenai penurunan penjualan energi listrik pada kelompok Industri telah diuraikan sebelumnya.

Connected Power

The additional connected powert was 6,552 MVA in 2015, 5.53% less than the addition in the previous year.

The largest decline in connected power occurred in Industrial Customer segment, particularly in I3 and I4 groups. This was in line with a decline of electricity sales (GWh) in those groups. Details regarding the decline in electricity sales in the Industrial Customer segment have been presented previously in this report.

Penambahan Daya Tersambung (MVA)
Growth of Connected Power (MVA)

Kelompok Pelanggan	Penambahan Daya Tersambung Additional Connected Power			Customer Group
	2013	2014	2015	
Rumah Tangga	4.345	3.160	3.280	Household
Bisnis	2.703	1.292	1.254	Business
Industri	1.563	1.998	1.482	Industry
Lainnya	586	486	536	Others
Jumlah	**9.197**	**6.936**	**6.552**	**Total**

Jumlah daya tersambung hingga akhir 2015 mencapai 106.582 MVA atau naik 6,55% dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

The total connected power up to end 2015 was 106,582 MVA, or a 6.55% increase from the previous year, as shown by the table below.

Daya Tersambung (MVA)
Connected Power (MVA)

Kelompok Pelanggan	Daya Tersambung (MVA) Conected Power			Customer Group
	2013	2014	2015	
Rumah Tangga	45.214	48.374	51.655	Household
Bisnis	19.931	21.224	22.477	Business
Industri	21.544	23.542	25.024	Industry
Lainnya	6.405	6.890	7.426	Others
Jumlah	**93.094**	**100.031**	**106.582**	**Total**

Secara geografis, daya tersambung untuk region Jawa Bali mendominasi hingga sekitar 72,2% dari total daya tersambung nasional, disusul oleh daya tersambung di wilayah Sumatera dan Indonesia Timur seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

By geographic segment, the connected power for Java-Bali dominates by about 72.2% of the total national connected power, followed by Sumatra and East Indonesia. This is shown by the table below.

Daya Tersambung per Regional (MVA)
Connected Power per Region (MVA)

Area Geografis	Daya Tersambung (MVA) Connected Power					Geographical Area
	2013	2014	2015	Kontribusi Contribution	Perubahan Change	
Sumatera	15.080	16.113	17.240	16,2%	7,0%	Sumatra
Indonesia Timur	10.446	11.442	12.384	11,6%	8,2%	East Indonesia
Jawa Bali	67.569	72.475	76.958	72,2%	6,2%	Java Bali
Jumlah	**93.095**	**100.031**	**106.582**	**100,0%**	**6,6%**	**Total**

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik

Nilai pendapatan penjualan tenaga listrik pada tahun 2015 mencapai Rp209.667,87 miliar, naik 12,34% dari tahun sebelumnya sebesar Rp186.634 miliar, sebagai dampak dari meningkatnya penjualan tenaga listrik (GWh), penambahan jumlah pelanggan dan daya tersambung serta adanya kenaikan tarif listrik secara bertahap sepanjang tahun 2015.

Kenaikan tarif listrik pada tahun 2015 membuat harga jual rata-rata penjualan tenaga listrik menjadi sebesar Rp1.033,63/kWh atau 9,99% di atas harga rata-rata tahun 2014 sebesar Rp939,74/kWh.

Electricity Sales Revenue

The revenue of power sales in 2015 reached Rp209,667.87 billion, rose 12.34% from the previous year of Rp186.634 billion. This is in line with the increase of electricity sales (GWh), addition of total customers, connected power and gradual electricity tariff hike in 2015.

The 2015 electricity tariff hike results in an increase of average sales price to Rp1.033,63/kWh or 9.99% above 2014 average sales price which was Rp939.74/kWh.

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Power Sales Revenue

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Pendapatan Penjualan Listrik (Rp miliar)	153.485	186.634	209.667	Revenue from Electricity Sales (Rp billion)
Harga Jual Rata-rata (Rp/kWh)	818,41	939,00	1.033,63	Average Sales Price (Rp/kWh)

PRODUKSI DAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Perseroan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat melalui: pembangkit milik sendiri, pembangkit sewa dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit milik swasta.

Untuk mendapatkan efisiensi operasional dari proses produksi listrik, prioritas program kerja yang dilaksanakan bertujuan antara lain: menjaga kecukupan pasokan listrik, optimalisasi bauran energi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP), serta meningkatkan efisiensi operasi proses/kinerja pembangkit.

Produksi tenaga listrik tahun 2015 mencapai 233.982 GWh, naik 2,37% dari tahun 2014 sebesar 228.555 GWh. Produksi tenaga listrik tahun 2015 yang berasal dari pembangkit sendiri dan pembelian listrik swasta (termasuk proyek)

PRODUCTION AND PURCHASE OF ELECTRICITY

The Company meets the continuously increasing electricity demand by utilizing its power plants, rental power plants, and through electricity purchase from independent power producers.

In order to achieve operational efficiency in its electricity production processes, the Company's priority programs are aimed at maintaining a sufficient electricity supply, optimizing energy mix to reduce the Cost of Production, as well as improving efficiency of operational processes and power plant performance.

Electricity production in 2015 reached 233,982 GWh, or an increase of 2.37% from 2014's figure of 228,555 GWh. Electricity production in 2015 from PLN's own power plants

mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,47%, 7,98% dibanding tahun 2014, sedangkan produksi dari pembangkit sewa mengalami penurunan sebesar 11,6% dibanding tahun sebelumnya.

and private purchase (including private projects) rose by 2.47% and 7.98%, respectively, compared to the previous year's figures. Power generation from rental power plants fell by 11.6% from the 2014 figure.

Produksi Tenaga Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)

Produksi Listrik (GWh)	2013	2014	2015	Electricity Generation (GWh)
Produksi Sendiri	144.220	152.853	156.631	Own Generation
BBM	11.307	9.491	5.783	Oil
Non-BBM	132.913	143.362	150.848	Non Oil
Batubara	74.269	83.373	90.275	Coal
Gas Alam	41.254	44.398	46.039	Natural Gas
Panas Bumi	4.345	4.285	4.392	Geothermal
Air	13.010	11.164	10.004	Hydro
Surya dan Bayu	35	7	5	Solar and Wind
Biodiesel dan Olein	0	135	133	Biodiesel and Olein
Sewa	19.746	22.444	19.841	Rent
Pembelian	52.223	53.258	57.510	Purchase
Total Produksi Listrik	**216.189**	**228.555**	**233.982**	**Electricity Generation Total**

Dari tabel di atas tampak bahwa produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sendiri berbahan bakar minyak (BBM), mengalami penurunan sebesar 39.08% dari tahun 2014, sedangkan produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM (batubara, gas alam, tenaga air, panas bumi, surya dan angin) mengalami peningkatan sebesar 5,22% dari tahun lalu.

The table shows that electricity production from oil-based fuel-fired power plants decreased by 39.08% from 2014, while the production from non-oil based (coal, natural gas, hydro, geothermal, solar and wind) power plants increased by 5.22% compared to last year.

Produksi Tenaga Listrik Menurut Segmen Geografis (GWh)
Electricity Production, Based on Geographical Segment (GWh)

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Sumatera	33.161	35.385	37.496	Sumatra
Jawa Bali	161.970	170.230	172.249	Java Bali
Indonesia Timur	21.058	22.940	24.237	East Indonesia
Jumlah	**216.189**	**228.555**	**233.982**	**Total**

Menurunnya prosentase produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit BBM disebabkan oleh:

1. Adanya tambahan COD dari beberapa pembangkit FTP I – 10.000 MW yang berbahan bakar batubara.
2. Selesainya proses pemeliharaan pembangkit eksisting.
3. Adanya pasokan gas alam, sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat menghasilkan produksi tenaga listrik yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
4. Meningkatnya penggunaan teknologi CNG sebagai pembangkit peaker.

The declining percentage of oil based fuel electrical power production mainly was caused by:

1. Additional COD from several coal-soure power plants of FTPI- 10.000 MW.
2. The completion of maintenance processes for existing power plants.
3. Natural gas supply, so gas-fired power plants can produce bigger electricity production than the previous year.
4. The increase in CNG technology usage as peaker power plants.

Usaha yang dilakukan untuk menekan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak, telah sejalan dengan prioritas program kerja Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui optimalisasi produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM.

The efforts taken to minimize electricity production from oil-based fuel plant have been in line with the Company's work program priority of reducing the cost of production by maximizing production from non-oil based plants.

Adapun produksi listrik sendiri yang berasal dari pembangkit berbahan bakar non BBM mengalami peningkatan sebesar 150.848 GWh dari tahun sebelumnya sebesar 143.362 GWh. Hal ini terlihat dari produksi yang dihasilkan oleh pembangkit berbahan bakar batubara, gas alam, panas bumi, air, dan surya yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,28%, 3,69%, 2,48%.

The production from non-oil based plants increased at 150,848 GWh compared to 143.362 GWh last year. This is shown by the production resulted from coal, natural gas, solar wind and biodiesel power plants, which increased at 8.28%, 3.69%, and 2.48% respectively.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk menggunakan energi baru terbarukan, PLN semakin mengintensifkan penggunaan bahan bakar bio fuel dalam memproduksi tenaga listrik sebagai salah satu upaya mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, terutama di daerah-daerah yang memiliki area perkebunan kelapa sawit skala besar, seperti di Kalimantan dan Sumatera.

In accordance with the Government's campaign for using renewable energy sources, PLN is utilizing biofuel for electricity production more intensively, as one of the efforts to reduce its use of oil-based fuel, especially in areas with large-scale palm oil plantations such as Kalimantan and Sumatra.

PLN juga semakin intens mengembangkan potensi PLT-Bayu sebagai salah satu alternatif sumber energi untuk mensuplai daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi bayu cukup besar.

PLN is also more intensively developing the potential of wind power plants as one of the alternative energy sources to supply remote areas where a significant potential for wind energy exists.

Produksi tenaga listrik dari pembangkit sewa sebesar 19.841 GWh mengalami penurunan sebesar 11,6% dibanding tahun 2014 sebesar 22.444 GWh, hal ini dikarenakan telah beroperasinya beberapa pembangkit baru terutama di luar Jawa dan juga meningkatnya pembelian tenaga listrik sebesar 57.510 GWh atau meningkat 7,98 % dari tahun 2014 sebesar 53.258 GWh.

Power generation from rental power plants reached 19,841 GWh or 11.6% lower compared to 2014's figure of 22,444 GWh. This was due to the operation of a number of new plants, particularly outside Java, as well as an increased electricity purchase by 57,510 GWh or increased 7.98% from the previous year's figure of 53,258 GWh.

Kapasitas Terpasang

Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebesar 52.889,22 MW, meningkat sebesar 2,46 % dari kapasitas sebesar 51.620,6 MW di tahun 2014, seperti tampak pada tabel berikut.

Installed Capacity

Installed capacity of the power plants reached 52,889.22 MW by the end of 2015, improved 2.46% from 51,620.6 MW in 2014, as detailed in the following table.

Status Kepemilikan	2014	2015	Perubahan Change	Ownership
Milik PLN	39.257,55	40.295,2	2,64%	Owned by PLN
Swasta (IPP)	7.950,68	8.964,54	12,75%	Independent Power Producer
Sewa Pembangkit	4.412,37	3.629,48	(17,74%)	Leased Power Plant
Jumlah	**51.620,6**	**52.889,22**	**2,46%**	**Total**

Tambahan kapasitas terpasang merupakan kontribusi dari penambahan pembangkit milik PLN sebesar 1.038,4 MW dan IPP sebesar 1.014,3 MW sehingga total penambahan kapasitas sebesar 2.053 MW, untuk pembangkit sewa mengalami penurunan seiring dengan beroperasinya pembangkit milik PLN dan masuknya pembangkit IPP.

The additional installed capacity was contributed by PLN's and IPP's new power plants each generating 1,038.4 MW and 1,014.3 MW, respectively, bringing a total additional capacity of 2,053 MW. Power generation from rental power plants declined, in line with the operation of new power plants belonging to PLN and IPP.

Penambahan kapasitas sebesar 2.053 MW tersebut masih di bawah target penambahan kapasitas terpasang tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 3.870 MW.

Additional capacity in 2015 of 2,053 MW was still below the target for additional installed capacity as 3,870 MW.

Kapasitas terpasang pembangkit milik PLN sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 40.295,2 MW, meningkat sebesar 2,64 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 39.257,5 MW. Penambahan ini disebabkan telah beroperasinya tambahan beberapa pembangkit baik dari program 7.000 MW maupun 35.000 MW di tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

PLN power plants' total installed capacity reached 40,295.2 MW by the end of 2015, a slight increase of 2.64% from the previous year's figure of 39,257.5 MW. This was due to the addition of power plants through the 7,000 MW and 35,000 MW programs in 2015, with details as follows:

Jenis Pembangkit	Nama Pembangkit Power Plant	Milik Ownership	Program	Kapastitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plant
PLTMH	Lokomboro 6, 7	PLN	7.000 MW	0,4	Micro Hydro Power Plant
PLTMG	Pesanggaran	PLN	7.000 MW	199,7	Gas Engine Power Plant
PLTU	Pangkalan Susu #1,2	PLN	7.000 MW	440	Steam Power Plant
PLTA	Orya (Genyem)	PLN	7.000 MW	20	Hydro Power Plants
PLTU	Ende	PLN	7.000 MW	7	Steam Power Plant
PLTU	Belitung Baru	PLN	7.000 MW	16,5	Steam Power Plant
PLTMG	Arun *Peaker*	PLN	7.000 MW	184,9	Gas Engine Power Plant
PLTU	Air Anyer	PLN	7.000 MW	30	Steam Power Plant
PLTMH	Prafi	PLN	7.000 MW	2,5	Micro Hydro Power Plant
PLTG	Kaltim (Peaking)	PLN	7.000 MW	79,4	Gas Turbine Power Plant
PLTD	Tersebar	PLN	35.000 MW	58	Diesel Power Plant
Total				**1.038,4**	**Total**

Sedangkan untuk pembangkit milik IPP sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 8.964,54 MW, meningkat sebesar 12,75 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 7.950,68 MW. Penambahan ini disebabkan telah beroperasinya tambahan beberapa pembangkit baik dari program 7.000 MW maupun 35.000 MW di tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Installed capacity from IPP power plants until the end of 2015 rose by 12.75% to 8,964.54 MW compared to the previous year's figure of 7,950.68 MW. This is due to additional power plants that are part of the 7,000 MW and 35,000 MW programs in 2015, with details as follows:

Jenis Pembangkit	Nama Pembangkit Power Plant	Milik Ownership	Program	Kapastitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plant
PLTMH	Siteba	IPP	7.000 MW	7,5	Micro Hydro Power Plant
PLTMH	Segara 1	IPP	7.000 MW	7	Micro Hydro Power Plant
PLTU	Keban Agung	IPP	7.000 MW	124,9	Steam Power Plant
PLTP	Kamojang 5	IPP	7.000 MW	30	Geothermal Power Plant
PLTU	Celukan Bawang	IPP	7.000 MW	426	Steam Power Plant
PLTU	Bau-Bau	IPP	7.000 MW	14	Steam Power Plant
PLTMH	Niagara	IPP	7.000 MW	1,7	Micro Hydro Power Plant
PLTU	Banjarsari	IPP	7.000 MW	270	Steam Power Plant
PLTG	Senipah	IPP	7.000 MW	112	Gas Turbine Power Plant
PLTMG	Musi Rawas	IPP	7.000 MW	8,6	Gas Engine Power Plant
PLTS	Kupang	IPP	7.000 MW	5	Solar Cell Power Plant

Jenis Pembangkit	Nama Pembangkit Power Plant	Milik Ownership	Program	Kapastitas (MW) Capacity (MW)	Type of Power Plant
PLTSA	PLTSA Sumber Organik	IPP	7.000 MW	1,6	Waste Power Plant-Organic Source
PLTMH	Tombolo Pao	IPP	35.000 MW	3	Micro Hydro Power Plant
PLTMH	Taludaa	IPP	35.000 MW	3	Micro Hydro Power Plant
Total IPP				**1.014,3**	**Total IPP**

Kapasitas Terpasang Pembangkit (MW) Milik PLN

Installed capacity of the power plants (MW) Owned by PLN

Jenis Pembangkit	2013	2014	2015	Type of Power Plant
Pembangkit Milik PLN				**Power Plants Owned by PLN**
PLTA	3.519,50	3.526,90	3.566,15	Hydro Power Plant
PLTU	15.554,00	20.451,70	21.117,15	Steam Power Plant
PLTG	2.893,90	3.012,10	2.981,31	Gas Turbine Power Plant
PLTGU	8.814,10	8.886,10	8.894,11	Combined Cycle Power Plant
PLTP	568,00	573,00	550,89	Geothermal Power Plant
PLTD	2.847,80	2.798,60	3.175,79	Diesel Power Plant
PLTMG	-	-	-	Gas Engine Power Plant
PLT Surya	7,90	8,70	8,86	Solar Cell Power Plant
PLT Bayu	0,40	0,50	0,99	Wind Power Plant
Total Kapasitas Terpasang Milik PLN	34.205,60	39.257,60	40.295,25	Total capacity owned by PLN
Pembangkit Milik IPP *				**Power Plants Owned by IPP***
PLTA	566,44	628,73	721,83	Hydro Power Plant
PLTU	5.057,23	5.331,52	5.925,54	Steam Power Plant
PLTG	236,33	278,03	329,03	Gas Turbine Power Plant
PLTGU	880,10	763,80	823,80	Combined Cycle Power Plant
PLTP	713,80	766,69	796,69	Geothermal Power Plant
PLTD	147,38	155,41	323,50	Diesel Power Plant
PLTMG	-	-	-	Gas Engine Power Plant
PLT Surya	0,06	0,06	0,06	Solar Cell Power Plant
PLT Bayu	0,50	26,45	44,10	Wind Power Plant
Total Kapasitas Terpasang Milik IPP	7.601,84	7.950,69	8.964,55	Total capacity owned by IPP
Pembangkit Sewa				**Rent Power Plants**
PLTA	0,02	-	0,80	Hydro Power Plants
PLTU	155,80	186,00	187,26	Steam Power Plant
PLTG	573,20	501,60	490,86	Gas Turbine Power Plant
PLTGU	68,00	60,00	60,00	Combined Cycle Power Plant
PLTP	-	-	-	Geothermal Power Plant
PLTD	3.499,41	3.664,77	2.890,56	Diesel Power Plant
PLTMG	-	-	-	Gas Engine Power Plant
PLT Surya	-	-	-	Solar Cell Power Plant
PLT Bayu	-	-	-	Wind Power Plant
Total Kapasitas Terpasang Sewa	4.296,43	4.412,37	3.629,48	Total capacity owned by rent Power Plant
Total	**46.103,87**	**51.620,66**	**52.889,28**	**Total**

* Termasuk *excess power* * Including excess power

Pemeliharaan Pembangkit

Untuk menjaga stabilitas pasokan tenaga listrik, PLN melakukan pemeliharaan pembangkit yang berada di seluruh Indonesia secara rutin. Sepanjang tahun 2015, total pemeliharaan pembangkit yang telah dilakukan terdiri dari 721 unit pembangkit dengan total kapasitas 19.541 MW, dengan rincian:

1. Pembangkit di Jawa Bali sebanyak 24 unit - kapasitas 8.071 MW.
2. Pembangkit di Sumatera sebanyak 56 unit - kapasitas 1.472 MW.
3. Pembangkit di Indonesia Timur sebanyak 506 unit – kapasitas 516 MW.
4. Pembangkit pada anak perusahaan PT Indonesia Power, PT PJB, dan PLN Batam sebanyak 135 unit – kapasitas 9.482 MW.

Jumlah pemeliharaan pembangkit tersebut telah/belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, yakni meliputi 909 pembangkit dengan total kapasitas sebesar 24.437 MW.

Perseroan memutuskan menunda pemeliharaan beberapa stasiun pembangkit lain, khususnya yang berada di luar Jawa Bali, dengan pertimbangan: (i) Menghindari terjadinya kekurangan pasokan listrik; (ii) Mempertahankan bebas pemadaman bergilir. Namun demikian, penundaan pemeliharaan ini tetap memperhatikan toleransi keamanan mesin pembangkit.

Power Plant Maintenance

Keeping the electric power supply stability, PLN has maintained the power plants throughout Indonesia. In 2015, the total maintained power plants is 721 units with a total capacity of 19,541 MW, as detailed below:

1. Power plants in Java - Bali as many as 24 units – 8,071 MW in capacity.
2. Power plants in Sumatra as many as 56 units – 1,472 MW in capacity.
3. Power plants in East Indonesia as many as 506 units – 516 MW in capacity.
4. Power plants in the subsidiary of PT Indonesia Power and PT PJB as many as 135 units – 9,482 MW in capacity.

The total power plant maintenance target of 909 power plants with the total capacity of 24,437 MW was not met.

The Company decided to postpone the maintenance of some power plant stations, especially those outside Java-Bali, due to the following considerations: (i) Avoiding electricity supply insufficiency; (ii) Maintaining the prevention of rolling blackouts. However, this postponed maintenance always brings certain concerns regarding the security tolerance of the power plant machinery.

BIAYA POKOK PENYEDIAAN (BPP)

Perseroan berupaya menurunkan BPP melalui penerapan berbagai program dengan tujuan menurunkan komponen biaya yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap BPP. Salah satu komponen utama dari BPP adalah biaya pembangkitan yang sangat dipengaruhi oleh jenis energi primer yang digunakan unit pembangkit.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) adalah:

1. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang relatif lebih mahal dan menggantikannya dengan sumber energi primer lain seperti batubara dan gas;
2. Meningkatkan efisiensi distribusi dan transmisi serta menjaga adanya kasus-kasus pencurian listrik dengan tujuan mengurangi susut jaringan;
3. Meningkatkan keandalan pengelolaan sistem distribusi, transmisi dan pembangkitan melalui pemeliharaan secara berkala atas fasilitas tersebut dengan tetap memperhatikan pengaturan penyaluran tenaga listrik dan beban listrik.

Berbagai program yang dijalankan dengan konsisten tersebut telah memberikan hasil nyata berupa relatif terjaganya besaran BPP dalam empat tahun terakhir, seperti ditunjukan pada grafik berikut.

COST OF PRODUCTION (BPP)

For better performance, PLN sets the calculation of cost of production through the implementation of various programs, with the goal of lowering the cost components that significantly influence the cost of production. One of the main components of the cost of production is the cost of power generating that is highly influenced by the type of primary energy used.

Some of the PLN's efforts of reducing the cost of production are:

1. Reducing the use of relatively expensive fuels and replacing them with other primary energy sources, such as coal and gas.
2. Increasing the efficiency of distribution and transmission as well as preventing the electricity theft cases, aimed at reducing network losses.
3. Improving the reliability of the management system of distribution, transmission and power plant through regular maintenance of the facility by taking into account the arrangement of power distribution and electrical loads.

A variety of programs implemented consistently have been delivering tangible results in the form of stable Cost of production in the last three years. This is demonstrated in the following graph.

Biaya Pokok Penyediaan Tenaga listrik (BPP) (Rp/kWh)
Electricity Cost of Production (Rp/kWh)

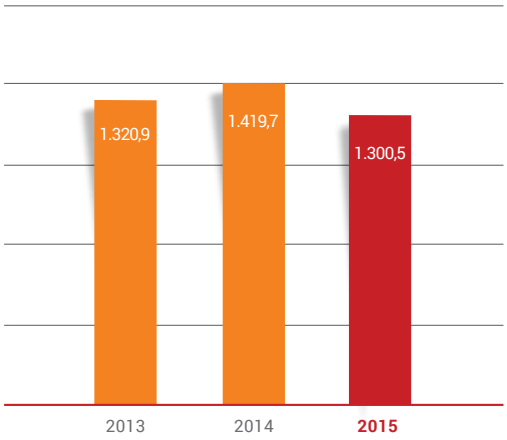

PLN berupaya meningkatkan penggunaan energi primer batubara dan gas sebagai sumber bahan bakar utama pengganti minyak bumi yang mahal meskipun di tahun 2015 harga minyak bumi cenderung menurun tajam, namun trend penurunan ini tidak menjamin harga minyak bumi ke depan tetap murah. Disamping itu Perseroan juga mengembangkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, bayu, surya, dan *bio fuel* (CPO) dengan tujuan menurunkan BPP. Namun demikian PLN menghadapi kendala dalam meningkatkan secara substansial penggunaan energi primer, terutama gas dan panas bumi dalam mengembangkan stasiun pembangkit yang dengan biaya per kWh yang lebih murah. Kendala yang dihadapi meliputi:

1. Ketiadaan jaminan pasokan gas yang cukup dan konsisten. Perseroan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan dan menjamin pemenuhan gas untuk kebutuhan bahan bakar pembangkit dari pasar bebas. PLN berupaya mengatasi kendala pasokan gas ini dengan menjalin kerja sama dengan BUMN di bidang Gas, yakni Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
2. Belum adanya aturan yang jelas mengenai perijinan pembangunan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang sumbernya banyak berada di areal hutan lindung. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang memungkinkan pembangunan pusat PLTP di kawasan hutan lindung. Namun demikian peraturan lanjutan (PP dan turunan aturan lainnya) belum ada, sehingga potensi pembangkitan dari area prospek belum dapat dioptimalkan dalam waktu dekat.

PLN is working to increase the use of primary energy sources of coal and natural gas as the primary fuel to replace oil based fuels, which are high cost even though oil price slow down in 2015, but this trend is not guarantee oil price to keep cheap. Besides that PLN also develops the use of new and renewable energy sources such as geothermal, wind, solar, and bio fuel (CPO) in order to lowering the Cost of production. Nonetheless, PLN is still facing barriers to increase the use of primary energy significantly especially natural gas and geothermal in developing power plants with lower costs per kWh. These barriers are:

1. Lack of adequate and consistent guarantees of gas supply. The Company does not have the full authority to establish and ensure the fulfillment of gas needs for its plants from the free market. PLN try to overcome gas supply obstacle in building cooperation with SOE's in gas sector, which are Pertagas & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
2. Lack of clear regulations on permit of developing geothermal power plants, whose source mostly located in conservation forest area. The Republic of Indonesia Forestry Minister issued the Regulation Number P.18/Menhut-II/2011 on guidelines for borrow-to-use permits for forest areas which allows the construction of geothermal power plant station in protected forest area. However, there are no derivative regulations yet, so the potentials of power plant from the prospective area could not yet be optimized in the near future.

3. Keterbatasan kapasitas dari unit pembangkit bertenaga bayu dan surya, sehingga lebih cocok untuk digunakan pada sistem kecil.

Mengingat pentingnya perhitungan biaya pokok pengadaan ini terhadap keseluruhan operasional Perseroan, PLN berupaya meningkatkan akuntabilitas dan akurasi pencatatan transaksi keuangan (termasuk penerimaan pembayaran dari pelanggan) dengan menerapkan berbagai program, meliputi:

1. Perbaikan sistim akuntansi pencatatan keuangan dengan menerapkan PSAK terbaru seusai ketentuan.
2. Perbaikan sistem transaksi keuangan dengan menerapkan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara Terpusat (P2APST) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) sebagai bagian perbaikan sistem bisnis ini.
3. Pengelolaan seluruh transaksi keuangan secara terpusat.
4. Bekerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan dan pengelolaan keuangan.
5. Bekerjasama dengan KPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.

3. Limited capacity from solar and wind power plants making them more suitable for use on small systems.

Considering the importance of basic cost of electricity production to all operations of the company, PLN is working to improve accountability and accuracy in recording of financial transactions (including the receipt of payments from customers) by implementing several programs that covers:

1. Improvement in financial records accountancy system by the latest PSAK in accordance with the regulation.
2. Improvement in financial transaction system by implementing P2APST and AP2T as a part of business system improvement.
3. Centralization of financial transaction management.
4. Cooperation with the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) to enhance accountability and transparency of financial records and management.
5. Cooperation with Corruption Eradication Commission (KPK) to enhance accountability and prevent actions that may harm the Company and/or the country.

PLN GELAR KONSULTASI PASAR UNDANG PEMASOK GAS

PLN INVITED GAS SUPPLIERS TO ITS MARKET CONSULTATION EVENT

PT PLN (Persero) menggelar konsultasi pasar untuk mengundang para pemasok dalam pengadaan pasokan gas LNG *(Liquid Natural Gas)* berikut infrastruktur pengelolaan gas yg akan dipasok ke pembangkit listrik berbahan bakar gas yang tersebar di Indonesia. Untuk tahap pertama, PLN membuka lelang untuk kebutuhan pembangkit gas baru yang berada di lokasi bagian tengah. Acara konsultasi pasar yang berlangsung pada Rabu (1/4) di PLN Kantor Pusat Jakarta ini dihadiri oleh 91 perusahaan yang kompeten dalam hal pasokan gas.

Acara yang bertajuk *Market Consultation Procurement of Gas Supply* (LNG) *for Distributed Gas Power Plants in Central Region of Indonesia* merupakan gelaran konsultasi pasar yang pertama kalinya diadakan di Indonesia.

Tujuan acara ini, PT PLN (Persero) ingin menjaring perusahaan yang berkompeten dan berminat mengikuti lelang LNG pada saatnya nanti. Lelang LNG akan dilakukan untuk pembangkit listrik tenaga gas baik tipe gas engine tipe gas turbine atau tipe diesel, yang tersebar di wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total kebutuhan gas sebesar 41 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD) dengan total kapasitas 450 mega watt (MW), pulau Sulawesi sebesar 94 MMSCFD dengan total kapasitas 1.520 MW dan Kalimantan sebesar 48 MMSFCD dengan total kapasitas 48 MW.

"Dalam RUPTL, proyek 35 ribu MW terdiri dari kira-kira 20 ribu MW pembangkit menggunakan batubara dan 13 ribu MW pembangkit menggunakan gas. Jadi gas menjadi salah satu faktor yang penting bagi PLN untuk mewujudkan program 35.000 MW", ungkap Direktur PLN Amin Subekti.

Ada 32 *New Distributed Gas Power Plants* dengan total kapasitas 2.531 MW yang tersebar di Indonesia bagian tengah. 10 pembangkit (450 MW) berada di Nusa Tenggara, 14 pembangkit (1.520 MW) berada di Sulawesi,

PLN (Persero) conducted a market consultation event and invited suppliers engaged in the supply of LNG and gas management infrastructure operation for gas power plants across Indonesia. For the first stage, PLN will conduct a tender on its need for a new gas power plant in the central region. The market consultation event was held on Wednesday (1/4) at the PLN Head Office in Jakarta, and was attended by 91 companies with competence in supplying gas.

Titled "Market Consultation Procurement of Gas Supply (LNG) for Distributed Gas Power Plants in Central Region of Indonesia", this event was the first of such kind to be held in Indonesia.

The objective of this event was for PT PLN (Persero) to recognize companies that have competence and have shown interest in participating in the LNG tender when the time comes. The LNG tender will be conducted for gas power plants of various types, namely gas turbine and diesel, to be installed in East Nusa Tenggara (NTT) and West Nusa Tenggara (NTB), with a total gas demand of 41 million standard cubic feet per day (MMSCFD) and a total capacity of 450 MW; in Sulawesi amounting to 94 MMSCFD with a total capacity of 1,520 MW; and in Kalimantan amounting to 48 MMSCFD with a total capacity of 48 MW.

"In the Electricity Power Supply Business Plan, the 35,000 MW project will consist of about 20,000 MW of coal-fired power plants and 13,000 MW of gas power plants. Thus gas will be a key factor for PLN in realizing the 35,000 MW program," said PLN Director Amin Subekti.

There are 32 New Distributed Gas Power Plants with a total capacity of 2,531 MW spread in the central region of Indonesia. Ten of them (450 MW) are located in Nusa

dan 8 pembangkit (561 MW) berada di Kalimantan. Ketiga puluh dua pembangkit yang membutuhkan pasokan gas sekitar 100-230 MMSCFD ini akan beroperasi seluruhnya pada 2018.

Jadwal *commercial operation date* (COD) pada tahun 2015, satu unit pembangkit *(power plant)* dengan kapasitas sebesar 100 MW, COD tahun 2016 sebanyak 15 unit pembangkit sebesar 695 MW, COD tahun 2017 sebanyak 11 unit pembangkit sebesar 1.246 MW dan COD tahun 2018 sebanyak 5 unit pembangkit sebesar 490 MW.

PLN akan membangun sekitar 11.000 MW PLTG, separuhnya akan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan separuhnya lagi pembangkit baru. "Untuk pembangkit yang menggunakan gas terbagi menjadi 2, yaitu untuk menggantikan pembangkit diesel dan sebagian lagi adalah pembangkit baru. PLN sangat serius dalam mengembangkan pembangkit gas ini", tambah Amin Subekti.

Tenggara, 14 (1,520 MW) in Sulawesi, and 8 (561 MW) in Kalimantan. All 32 of them require about 100-230 MMSCFD of gas supply and will commence operation fully in 2018.

The schedule for commercial operation date (COD) of 2015 was for one power plant with a capacity of 100 MW, COD of 2016 is for 15 power plants with a capacity of 695 MW, COD of 2017 is for 11 power plants with a capacity of 1,246 MW, and COD of 2018 is for 5 power plants with a capacity of 490 MW.

PLN will develop gas power plants with a total capacity of about 11,000 MW, half of which will replace the Diesel Power Plant and the remaining half will be new power plants. "Gas power plants are divided into two categories, namely for replacing old diesel power plants and as new ones. PLN is seriously developing these gas power plants," said Amin Subekti.

Bauran Energi

Sepanjang tahun 2015, PLN terus mengintensifkan upaya mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak secara bertahap. Hal ini terlihat dari pencapaian bauran energi, dimana produksi tenaga listrik dari pembangkit BBM hanya sebesar 8,22% lebih baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 11.37%. Produksi dari pembangkit non BBM telah mencapai 91.78% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 88,63%, seperti tampak pada tabel berikut.

Energy Mix

Throughout 2015, PLN has put out efforts to reduce dependency on oil based fuel. This is reflected in the fuel mix achievement, where electric power produced from oil-based plants only amounted to 8.22%, better than 11.37% of last year. Meanwhile production from non-oil based fuel power plant has reached 91.78% compared to the previous year of 88.63%, as shown in the table below.

Bauran Energi (%)
Energy Mix Table (%)

Jenis Pembangkit	2013	2014	2015	Power Plant Types
BBM	**12,35**	**11,37**	**8,22**	**Oil**
Non-BBM	**87,65**	**88,63**	**91,78**	**Non Oil**
Gas Alam	23,96	24,58	25,34	Natural Gas
Batubara	51,35	52,59	55,79	Coal
Panas Bumi	4,49	4,39	4,29	Geothermal
Air	7,83	6,63	5,87	Hydro
Surya dan Bayu	0,02	0,02	0,02	Solar and Wind
Biodiesel, Olein, dan Biomass	-	0,41	0,47	Biodiesel, Olein, and Biomass

Pada tabel di atas terlihat bahwa bauran energi dari pembangkit berbahan bakar batubara dan gas alam meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM, yang disebabkan oleh:

1. Telah beroperasinya tambahan beberapa pembangkit FTP I – 10.000 MW yang berbahan bakar batubara.
2. Adanya tambahan pembangkit reguler yang operasional dengan bahan bakar batubara.
3. Adanya pasokan gas alam, sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat menghasilkan produksi tenaga listrik yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya dengan biaya per kWh yang lebih rendah.
4. Semakin intensifnya penggunaan CNG untuk pembangkit *peaker*.

The table above shows that fuel mix from coal and natural gas power plant has risen compared to last year. This goes alongside with the increase of production from non oil based fuel power plants, which was caused by:

1. Some FTP I – 10,000 MW coal power plant projects have started the operation.
2. Natural gas supply is available, thus the natural gas-fired power plants can produce higher electric power in comparison to last year, at lower cost per kWh.
3. The existence of natural gas supply, thus the natural gas-based power plants were able to generate more electricity than in previous years, with lower per kWh cost.
4. Intensive use of CNG for peaker plant.

Konsumsi dan Harga Energi Primer

Penambahan kapasitas pembangkit (MW) dan peningkatan produksi tenaga listrik berjalan seiring dengan meningkatnya pemakaian bahan bakar primer, yakni batubara dan gas alam. Peningkatan volume pemakaian batubara dan gas alam ini merupakan realisasi dari upaya yang dilakukan Perseroan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak yang harganya lebih mahal.

Primary Energy Consumption and Price

The increase in the power plant capacity (MW) and electricity production volume is in line with the use of primary energy, such as coal and natural gas. This increase of coal and gas use is resulted from PLN's efforts to suppress the use of oil-based fuel, which is more expensive.

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 pemakaian bahan bakar minyak mengalami penurunan, dan sebaliknya pemakaian batubara dan gas alam meningkat. Hal ini disebabkan (i) telah beroperasinya sebagian pembangkit FTP I – 10.000 MW yang berbahan bakar batubara, serta (ii) adanya pasokan gas alam yang sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat memproduksi tenaga listrik.

The following table shows that since the use of oil based fuel underwent a decrease in 2012, on contrary the use of coal and natural gas was increasing. This is because (i) some coal FTP I – 10,000 MW coal power plant projects have started the operation, and (ii) natural gas supply is available, thus the natural gas-fired power plants can produce higher electric power.

Pemakaian Energi Primer
Primary Energy Usage

Jenis Bahan Bakar	2013	2014	2015	Fuel Type
BBM (Kilo liter)	7.474.492	7.431.004	5.478.863	Oil (kiloliter)
Batubara (ton)	39.601.034	44.604.981	48.995.169	Coal (ton)
Gas Alam (MMSCF)	409.890	450.190	456.494	Natural Gas (MMSCF)

Adapun realisasi harga pengadaan energi primer untuk tahun 2015 mengalami kenaikan yang bervariasi sebagai berikut:

The realization of the primary energy procurement price throughout 2015 experienced various increases, as follows:

Harga Energi Primer
Price of Primary Energy

Jenis Bahan Bakar	2013	2014	2015	Fuel Type
BBM (Rp/liter)	9.123,62	9.787,43	6.632	Oil (Rp/Liter)
Batubara (Rp/kg)	643,13	710,71	662,07	Coal (Rp/kg)
Gas Alam (Rp/MMSCF)	87.011,4	100.905,29	85.334	Natural Gas (Rp/MMSCF)
Gas Alam (USD/MSCF)	8,33	8,49	-	Natural Gas (USD/MSCF)

TARIF TENAGA LISTRIK

Komponen utama pendapatan PLN adalah penjualan tenaga listrik dengan dasar perhitungan Tarif Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian digunakan sebagai dasar menghitung jumlah tagihan rekening listrik kepada pelanggan. Besaran Tarif Tenaga Listrik ditinjau dan ditetapkan secara berkala dan terdiri dari berbagai kelompok tarif sesuai dengan kelompok pelanggan.

Tarif Tenaga Listrik ditetapkan dengan memperhitungkan kemampuan pelanggan dan mempertimbangkan daya terpasang dari masing-masing kelompok pelanggan. Semakin tinggi daya terpasang, maka akan semakin besar pula besaran Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan. Semakin besar volume pemakaian listrik, maka akan semakin besar pula faktor pengali dalam menetapkan Tarif Tenaga Listrik yang akan ditagih. Penerapan faktor volume ini dimaksudkan agar para pelanggan menggunakan tenaga listrik dengan lebih hemat dan bijaksana.

Kondisi usaha di akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2015 ditandai dengan turunnya harga minyak mentah ke level terendahnya dalam 10 tahun. Hal ini juga mempengaruhi nilai besaran biaya bahan bakar minyak yang digunakan oleh pembangkit berbahan bakar BBM. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pelanggan, PLN melakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dengan memperhitungkan dampak penurunan BBM terhadap BPP, dan dengan mengacu pada formula *tariff adjustment* sesuai Peraturan Menteri ESDM No.31 Tahun 2014.

Sepanjang tahun 2015 PLN telah memberlakukan tarif tenaga listrik baru yang mengadopsi kondisi usaha 2015 sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Maret 2015, PLN menurunkan tarif listrik pada 10 golongan tarif listrik non subsidi untuk periode Maret 2015, yakni
   a. Rumah tangga menengah (R-2) dengan daya 3.500-5.500 *Volt Ampere* (VA);
   b. Rumah tangga besar (R-3) dengan daya 6.600 VA ke atas;
   c. Bisnis menengah (B-2) 6.600-200.000 VA;
   d. Kantor pemerintah (P-1) 6.600-200.000 VA;
   e. Penerangan jalan umum (P-3).

Sesuai *tariff adjustment* periode Maret 2015 sebesar Rp1.426,58, untuk golongan tarif tersebut, dibandingkan dengan tarif pada Februari 2015 terjadi penurunan Rp41,67 per kWh, dan penurunan sebesar Rp69,47 per kWh dibandingkan tarif pada Januari 2015.

2. Tanggal 4 Juni 2015, PLN menyesuaikan tarif listrik sesuai ketentuan *tariff adjustment* dengan memperhatikan nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), harga minyak dengan acuan

ELECTRICITY TARIFF

The main component of PLN's revenue is the electricity sales, calculated based on the Electricity Tariff. Electricity Tariff is determined by the Government and the House of Representatives (DPR) to then be used as the basis for calculating the utility bill. Electricity Tariff is reviewed and adjusted periodically, and consists of a number of tariff groups for different customer groups.

In general, electricity tariffs are set taking into account the ability of customers and the installed power of each customer group. The higher the installed power, the greater tariff imposed. The greater the volume of electricity consumption, the greater the multiplier in setting the tariff. The application of this volume factor is meant for the customers to use electricity more sparingly and wisely.

The business conditions in late 2014 and throughout 2015 were marked by the plunge in oil prices to the lowest level in ten years. This affected the amount of fuel cost for the fuel used in power plants that use oil as their fuel. To demonstrate its accountability to customers, PLN thus adjusted the Electricity Tariff by taking into account the impact of the drop in fuel prices to the cost of production, and with reference to the tariff adjustment formula in accordance with the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Num. 31 of 2014.

Throughout 2015 PLN adopted a new Electricity Tariff which took into account the following business conditions in 2015:

1. On 4 March 2015, PLN reduced electricity tariffs for 10 non-subsidized groups for the period of March 2015, namely:
   a. Medium Household (R-2) with power of 3,500-5,500 Volt Amperes (VA);
   b. Large Household (R-3) with a power of 6,600 VA and above;
   c. Medium Business (B-2) from 6,600 to 200,000 VA;
   d. Government Offices (P-1) 6,600-200,000 VA;
   e. Public street lighting (P-3).

In accordance with the tariff adjustment in March 2015, amounting to Rp1,426.58, for that tariff group, compared with the rate in February 2015, showed a decrease of Rp41.67 per kWh, and a decrease of Rp69.47 per kWh compared to the tariff in January 2015.

2. On 4 June 2015, PLN adjusted electricity tariffs in accordance with the tariff adjustment stipulations, by taking into account the currency exchange rate of the US Dollar against the Indonesian Rupiah, with

Indonesian Crude Price (ICP), dan pengaruh inflasi. Tarif Tenaga Listrik baru dengan kenaikan bervariasi diberlakukan terhadap:

a. Golongan R-2 dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA;
b. Golongan R-3 daya 6.600 VA ke atas;
c. Golongan B-2 daya 6.600 VA hingga 200 kVA,
d. Golongan B-3 daya di atas 200 kVA;
e. Golongan I-3 daya di atas 200 kVA;
f. Golongan I-4 daya 30.000 kVA ke atas;
g. Golongan P-I daya 6.600 VA sampai 200 kVA,
h. Golongan P-2 daya di atas 200 kVA;
i. Golongan P-3;
j. Golongan L/TR, TM, TT;

Sedangkan golongan R-1 dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA, tarif tetap.

3. Tanggal 4 Agustus 2015 PLN menurunkan tarif tenaga listrik pada beberapa golongan tarif dengan besaran Rp/kWh, yakni.
   a. R-2 dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA, Golongan R-3 dengan daya 6.600 VA ke atas, dan Golongan B-2 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA;
   b. (TM) B-3 dengan daya di atas 200 kVA dan Golongan I-3 dengan daya di atas 200 kVA;
   c. I-4/Tegangan Tinggi (TT) dengan daya 30.000 kVA ke atas
   Penurunan Tarif Agustus 2015 disebabkan oleh: kurs dolar Amerika Serikat (AS), patokan harga minyak Indonesia (*Indonesia crude price*/ICP) dan inflasi dua bulan sebelum tarif ditetapkan.
4. Bulan September 2015, kembali PLN menurunkan Tarif Tenaga Listrik dengan besaran penurunan Rp/kWh yang bervariasi, terhadap beberapa kelompok pelanggan, yakni:
   a. Golongan Tarif Tegangan Rendah, terdiri dari: R-2 dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA, Golongan R-3 dengan daya 6.600 VA ke atas, dan Golongan B-2 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA;
   b. Golongan Tegangan Menengah (TM) B-3 dengan daya di atas 200 kVA dan Golongan I-3 dengan daya di atas 200 kVA;
   c. Golongan I-4/Tegangan Tinggi (TT) dengan daya 30.000 kVA ke atas.

the benchmark oil price used being the Indonesian Crude Price (ICP), and the effects of inflation. The new Electricity Tariff with the varied increases are as follows:

a. Group R-2 with a power of 3,500 VA to 5,500 VA;
b. Group R-3 power of 6600 VA and above;
c. Group B-2 power of 6,600 VA to 200 kVA;
d. Group B-3 power above 200 kVA;
e. Group I-3 power above 200 kVA;
f. Group I-4 power of 30,000 kVA and up;
g. Group P-I power 6,600 VA to 200 kVA;
h. Group P-2 power above 200 kVA;
i. Group P-3;
j. Groups L/TR, TM, TT;

On the other hand, R-1 group with 1,300 VA and 2,200 VA power, have their rates remain.

3. On 4 August 2015, PLN reduced the electricity tariff for some groups using the Rp/kWh unit, namely:
   a. Group R-2 with the power of 3,500 VA to 5,500 VA, Group R-3 with the power of 6,600 VA and up, and Group B-2 with the power of 6,600 VA to 200 kVA;
   b. Group (TM) B-3 with the power of above 200 kVA and Group I-3 with the power of above 200 kVA;
   c. Group I-4/High Voltage (TT) with the power of 30,000 kVA and upRates declined in August 2015 due to: US dollar exchange rate (US), the benchmark oil price of Indonesia (Indonesia crude price/ICP) and inflation rate two months before the new tariffs were determined.
4. On September 2015, PLN further reduced the Electricity Tariff with a varying decrease of Rp/kWh unit, for some customer groups, namely:

a. Low Voltage Groups, consisting of: R-2 with the power of 3,500 VA to 5,500 VA, Group R-3 with the power of 6,600 VA and up, and Group B-2 with the power of 6,600 VA to 200 kVA;

b. Medium Voltage Groups (TM) B-3 with the power of 200 kVA and up, and Group I-3 with the power of 200 kVA and above;
c. Group I-4/High Voltage (TT) with the power of 30,000 kVA and above.

Adapun gambaran mutasi Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan oleh PLN untuk tahun 2015 sebagai realisasi penerapan perhitungan *Tariff Adjustment* adalah sebagai berikut:

The description of the Electricity Tariff adjustments imposed by PLN for the year 2015 as a realization of the application of the Tariff Adjustment calculation is as follows:

Realisasi Tarif Tenaga Listrik pada Segmen Pelanggan yang Diberlakukan *Automatic Tariff Adjustment* 2015
Realization of Electricity Tariff for Customer Segment that was Applied Automatic Tariff Adjustment in 2015

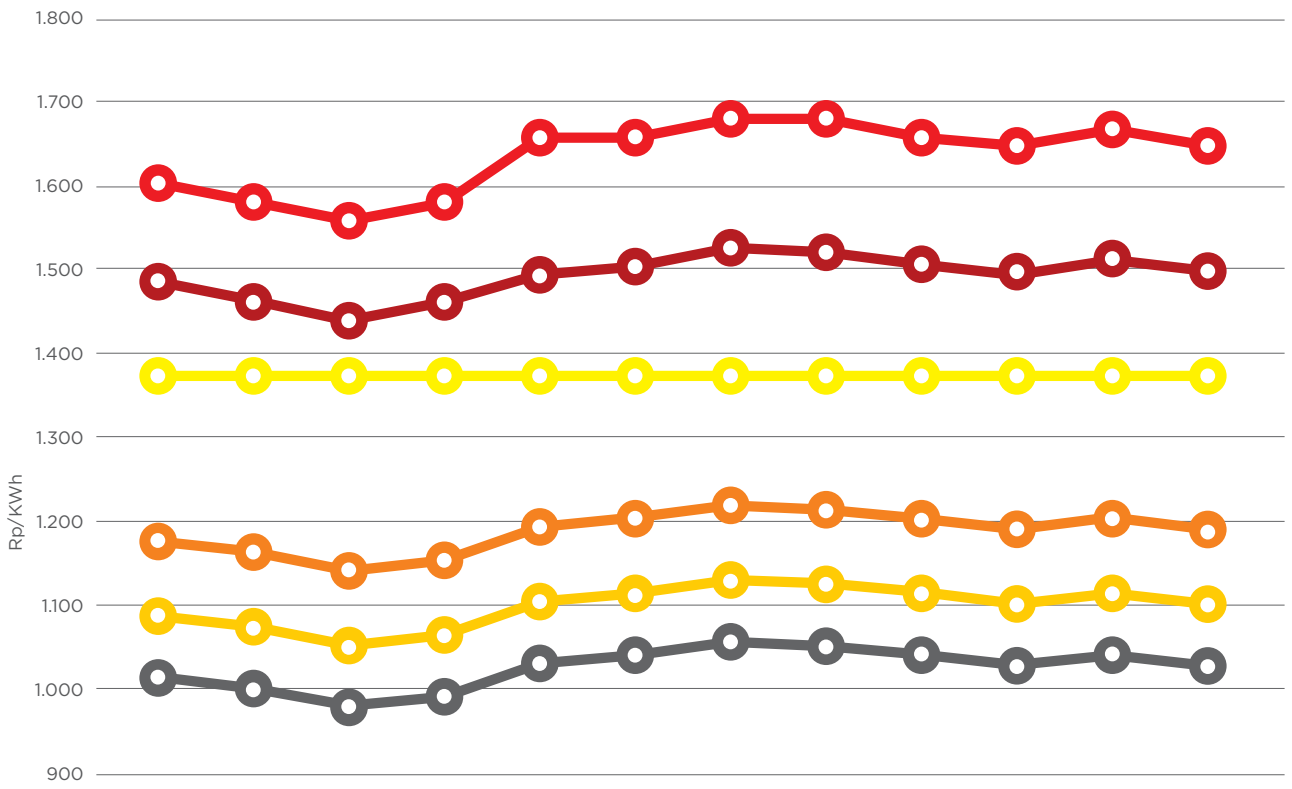

- L/TR/ TM/ TT
- R2/TR -3.500 VA - 5.500, R3/TR-6.600 VA s.d keatas/ above B2/ TR – 6.600 VA - 200 kVA & P2/ TM Blok WBP & LWBP – di atas/above 200 kVA
- R1/TR-1300 VA & 2.200 VA
- B3/TM Blok WBP & LWBP - di atas/above 200 kVA, I3/ TM Blok WBP & LWBP - di atas 200 kVA & P2/TM Blok WBP & LWBP - di atas/above 200 kVA
- B3/TM KVArh di atas/above 200 kVA, I3/ TM kVArh – di atas/ above 200 kVA & P2/ TM kVArh - di atas/ above 200 kVA
- I4 / TT WBP, LWBP, & kVArh – 30.000 kVA keatas/ above

Untuk WBP dikalikan faktor K yang besarnya ditentukan oleh keputusan direksi PLN.

K: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 <= K <= 2).

For WBP, multiplied by factor K, the amount of which is determined by PLN's Board of Directors.

K: The comparison factor between the cost of WBP and LWBP according to local electricity system load characteristics (1.4 <= K <= 2).

Sehingga rata-rata Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan terhadap pelanggan sesuai golongan tarif sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Therefore the average Electricity Tariff charged to customers in accordance with the tariff groups throughout the year 2015 is as follows.

Tarif Listrik Rata-rata Menurut Golongan, Tahun 2015 (Rp/kWh)
Average Electricity Tariff Based on Groups, 2015 (in Rp/kWh)

Golongan Tarif Tariff Class	Tegangan Voltage	Harga Jual Rata-Rata Average of Selling Price (Rp/kWh)	BPP Rata-Rata Average Cost of Production (Rp/kWh)	Subsidi Subsidy (Rp/kWh)
1	2	4	5	6=4-5
S.2/450VA	TR	319,41	1.400,51	(1.081,09)
S.2/900VA	TR	437,80	1.400,51	(962,71)
S.2/1.300VA	TR	706,54	1.400,51	(693,96)
S.2/2.200VA	TR	773,55	1.400,51	(626,96)
S.2/>3.500s/d200kVA	TR	923,59	1.400,51	(476,91)
S.3/>200kVA	TM	923,05	1.216,65	(293,60)
S				
R.1/s/d450VA	TR	415,97	1.400,51	(984,53)
R.1/900VA	TR	586,35	1.400,51	(814,15)
R.1/1.300VA	TR	1.375,66	1.400,51	(24,85)
R.1/2.200VA	TR	1.382,27	1.400,51	(18,23)
R.2/>3.500s/d5.500VA	TR	1.522,80	1.400,51	122,30
R.3/>6.600VA	TR	1.534,77	1.400,51	134,27
R				
B.1/s/d450VA	TR	502,74	1.400,51	(897,77)
B.1/900VA	TR	602,28	1.400,51	(798,23)
B.1/1.300VA	TR	989,50	1.400,51	(411,00)
B.1/2.200s/d5.500VA	TR	1,133,61	1.400,51	(266,90)
B.2/>6.600s/d200kVA	TR	1.548,97	1.400,51	148,46
B.3/>200kVA	TM	1.212,09	1.216,65	(4,57)
B				
I.1/450VA	TR	458,87	1.400,51	(941,63)
I.1/900VA	TR	426,83	1.400,51	(973,67)
I.1/1.300VA	TR	953,73	1.400,51	(446,78)
I.1/2.200VA	TR	992,03	1.400,51	(408,48)
I.1/3.500s/d14kVA	TR	1.189,68	1.400,51	(210,82)
I.2/>14kVAs/d200kVA	TR	1.114,77	1.400,51	(285,73)
I.3/>200kVA	TM	1.195,08	1.216,65	(21,57)
I.4/>30.000kVA	TT	1.057,54	1.144,82	(87,29)

I				
P.1/s/d450VA	TR	657,34	1.400,51	(743,16)
P.1/900VA	TR	770,31	1.400,51	(630,19)
P.1/1.300VA	TR	1.083,66	1.400,51	(316,85)
P.1/2.200s/d5.500VA	TR	1.113,57	1.400,51	(286,93)
P.1/>6.600s/d200kVA	TR	1.548,14	1.400,51	147,63
P.2/>200kVA	TM	1.224,512	1.216,65	7,86
P.3	TR	1.508,72	1.400,51	108,22
P				
T/>200kVA	TM	727,91	1.216,65	(488,74)
C/>200kVA	TM	842,09	1.216,65	(374,56)
L	TM	1.464,94	1.216,65	248,29

SUBSIDI LISTRIK

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif.

PLN memerlukan subsidi, mengingat hingga akhir tahun 2015 harga penjualan tenaga listrik masih berada di bawah rata-rata biaya pokok penyediaan listrik (sudah termasuk *margin*). Hal ini dapat digambarkan pada grafik berikut.

ELECTRICITY SUBSIDY

Electricity subsidy is calculated from negative difference between selling price of electricity on average (Rp/kWh) of each tariff group minus the cost of production (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by sales volume (kWh) for each tariff class.

PLN requires a subsidy, given the prices of electricity sales that occur at this time continue to be below the average cost production (including margin). This can be illustrated in the following graph.

Tarif Tenaga Listrik dan Besaran Subsidi per Golongan Tarif (Tegangan Rendah)
Electricity Tariff and Subsidy Amount per Tariff Group (Low Voltage)

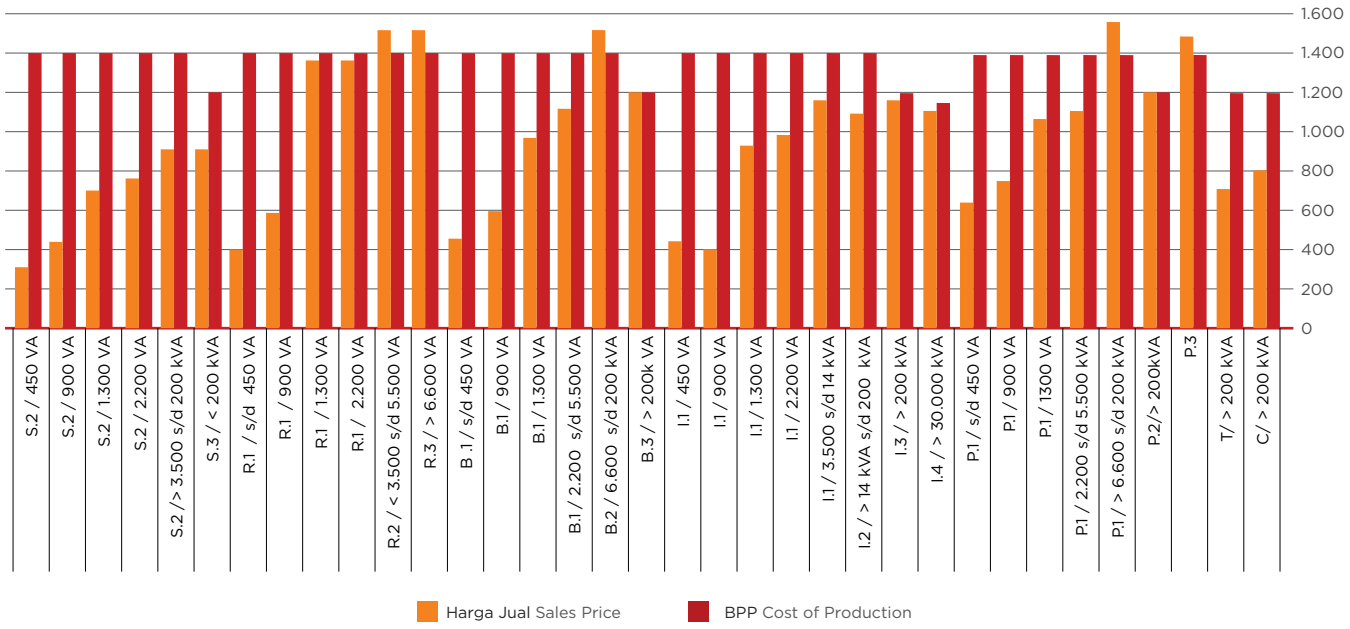

Akumulasi besaran subsidi yang diperlukan oleh Perseroan tersebut ditentukan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, diputuskan untuk masing-masing tahun operasional dan dibayarkan oleh Pemerintah sesuai jadwal realisasi APBN tahun berjalan.

BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula tertentu dengan telah memasukkan perhitungan tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan.

Subsidi listrik yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015 awalnya adalah sebesar Rp68,69 triliun yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Alokasi subsidi listrik pada APBN TA 2015 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan dan disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-999-07.1.979321/2015 tanggal 31 Desember 2014, yang mencantumkan pagu subsidi listrik sebesar Rp68,69 triliun

Namun kemudian jumlah alokasi subsidi ini diubah sesuai ketetapan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2015 tentang APBN-P 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2015, alokasi subsidi tersebut berubah menjadi sebesar Rp73,15 triliun. Alokasi subsidi listrik pada APBN-P TA 2015 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan dan disahkan Revisi ke-01 tanggal 19 Juni 2015 atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-999-07.1.979321/2015 tanggal 31 Desember 2014, yang mencantumkan pagu subsidi listrik sebesar Rp73.15 triliun.

Jumlah alokasi subsidi tersebut termasuk didalamnya pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2014 *(Audited)* sebesar Rp7,0 triliun serta *margin* kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi.

Pencairan subsidi listrik oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik serta Surat Menteri Keuangan No. S-25/MK.2/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penjelasan Tambahan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 170/PMK.02/2013.

Pelaksanaan pembayaran subsidi listrik sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pagu subsidi listrik tahun 2015 termasuk kekurangan subsidi listrik tahun 2014 hasil audit BPK sebesar Rp73,15 triliun.

The accumulated amount of subsidy required by the Company is determined by the Government with the approval of Parliament, and decided for each operational year and paid by the government according to the schedule the budget outcome for the ongoing year.

The cost of production is calculated based on a certain formula by taking into account the calculation of the transmission and distribution network losses, set by the Minister of Energy and Mineral Resources, specifically the Directorate General of Electricity.

The electricity subsidy budgeted in the Budget for the Fiscal Year of 2015 was originally Rp68.69 trillion. This has been approved and endorsed by the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia, and the Law of the Republic of Indonesia Num. 27 of 2014 on the National Budget for the Year 2015 has been issued. Electricity subsidy allocation in the National Budget for FY 2015 has been followed through by the publication and approval of the Budget Implementation List (DIPA) Num. SP DIPA-999-07.1.979321/2015 dated 31 December 2014, which included a capped budget for electricity subsidy at Rp68.69 trillion.

However, the amount of subsidy allocation was amended in accordance with the provisions of the Law Num. 3 of 2015 on APBN-P 2015 and the Government Regulation Num. 36 of 2015. The amount of the subsidy allocation was amended to Rp 73.15 trillion. The electricity subsidy allocation in the APBN-P for FY 2015 has been followed up by the publication and approval of the First Revision dated 19 June 2015 on the Budget Implementation List (DIPA) Num. SP DIPA-999-07.1.979321/2015 dated 31 December 2014, which capped the budget for electricity subsidy at Rp73.15 trillion.

The amount of the subsidy allocation has included the payment for the deferred electricity subsidies in 2014 (audited) amounting to Rp 7.0 trillion and the business margin to PT PLN (Persero) in order to meet the requirements of the investment.

Disbursement of electricity subsidy by the Government, in this case the Ministry of Finance, for 2014 was pursuant to the Finance Minister Regulation Num. 170/PMK.02/2013 dated 28 November 2013 on Procedures for the Provision of Budget, Calculation, Payment and Accountability Electricity Subsidy and Finance Minister Decree Number S-25/MK.2 of 2014 dated 5 March 2014 on Additional Declaration for Finance Minister Regulation Article 9 Number 170/PMK.02/2013.

The disbursement of the electricity subsidy payments up to the year 2015 is as follows:

1. Maximum cap on the electricity subsidies in 2015, including the deferred payment of electricity subsidies in 2014 as audited by the National Audit Body, amounted to Rp73.15 trillion

2. Realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2015 termasuk kekurangan subsidi listrik tahun 2014 hasil audit BPK sebesar Rp58,33 triliun
3. Sisa pagu subsidi listrik tahun 2015 sebesar Rp14,82 triliun

Sesuai berbagai ketetapan tersebut, maka pendapatan subsidi listrik untuk Perseroan adalah sebagai berikut:

2. Realization of electricity subsidy payments in 2015, including the deferred payment of electricity subsidies in 2014, as audited by the National Audit Body, amounted to Rp58.33 trillion
3. The remaining budget for electricity subsidies in 2015 amounted to Rp14.82 trillion

In accordance with these various stipulations, the electricity subsidies received by the Company and recorded as revenue are as follows:

Besaran Subsidi Listrik Pemerintah
Government's Electricity Subsidies

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Subsidi Pemerintah (juta Rupiah)	101.207.859	99.303.250	56.552.531	Government subsidy (million Rupiah)

SUSUT JARINGAN

Susut jaringan merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya beban pada jaringan tenaga listrik baik pada jaringan transmisi maupun jaringan distribusi. Pertumbuhan beban memberikan kontribusi terhadap meningkatnya susut, namun demikian beberapa upaya yang dilakukan antara lain: investasi dan perbaikan pada jaringan, baik pada jaringan transmisi maupun distribusi, berhasil menekan kenaikan susut akibat pertumbuhan beban.

Realisasi pencapaian susut jaringan pada tahun 2015 sebesar 9,77% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 9,71%. Meningkatnya angka susut jaringan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh:

1. Jawa Bali
   a. Pada regional Jawa Bali beban di Jawa bagian barat tumbuh lebih besar dari pada Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Di sisi lain, kesiapan kapasitas pembangkit di Jawa bagian timur dan tengah lebih besar dan sebagai konsekuensi merit order system dalam rangka menekan biaya pokok penyediaan, maka aliran daya mengalir dari timur dan tengah Jawa ke Jawa bagian barat yang mengakibatkan meningkatnya susut transmisi. Berdasarkan kondisi ini, upaya telah dilakukan antara lain : (i) percepatan penyelesaian proyek-proyek pembangkit tenaga listrik di Jawa bagian barat seperti PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Adipala; (ii) upaya pemasaran dalam rangka mendorong pertumbuhan beban di Jawa bagian tengah dan timur.
   b. Sejak beroperasinya kabel laut Jawa-Bali, maka pembangkit-pembangkit berbahan bakar minyak yang beroperasi di Pulau Bali dimatikan dan pasokannya dikirim dari sistem transmisi kabel laut Jawa - Bali. Hal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya susut.

NETWORK LOSSES

Network losses is a consequence of the increasing load on the electricity network, both on the transmission network and the distribution network. Load growth contributed to more losses, however, some efforts were made to address this issue, among others: the investments and improvements to the network, both in the transmission and distribution networks, managed to suppress the increase in network losses due to load growth.

Electric power transmission and distribution losses in 2015 was 9.77%, higher than the previous year's figure of 9.71%. The increase in transmission losses compared to the previous year was due to:

1. Java and Bali
   a. The western part of Java required larger electricity capacity than the central or eastern parts of Java. Eastern and central Java have bigger power plant capacity as a consequence of the merit order system in order to reduce costs. Thus, electricity is transmitted from central and eastern Java to western Java, resulting in some transmission losses. Attempts have been made given these circumstances, among others: (i) acceleration of power plant project completion in western Java, namely the Pelabuhan Ratu Steam Power Plant and the Adipala Steam Power Plant; (ii) marketing efforts in order to encourage load growth in central and eastern Java.
   b. Since the operation of undersea cables along Java and Bali, the fossil-fuel power plants operating in Bali were turned off and electricity is supplied using the undersea cable transmission system. This also contributed to transmission losses.

2. Sumatera
   Pada regional Sumatera, susut jaringan terutama disebabkan oleh masih panjangnya jaringan distribusi. Rata-rata jaringan distribusi tegangan menengah di Sumatera sebesar 57 kms. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain : (i) melakukan penyelesaian beberapa proyek pembangkit untuk mendekatkan pembangkit dengan pusat beban antara lain PLTU Teluk Sirih, PLTU Nagan Raya dan PLTU Pangkalan Susu; (ii) melakukan percepatan penyelesaian proyek transmisi dan distribusi. Disamping itu, hal lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya susut adalah masih banyak trafo-trafo dengan kapasitas 10-60 MVA yang menyalurkan beban lebih dari 80%, yang berkontribusi terhadap besarnya susut.
3. Indonesia Timur
   Pada regional Indonesia Timur, susut jaringan terutama disebabkan oleh defisit pembangkit akibat tingginya permohonan pasang baru serta meningkatnya konsumsi listrik yang menyebabkan dilakukannya *brownout*. Disamping itu, hal yang cukup menonjol adalah penggunaan listrik secara ilegal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyelesaian proyek-proyek pembangkit di Indonesia bagian timur.
4. Hal-hal Lain
   a. Masih banyaknya PJU yang ilegal dan pemakaian ilegal.
   b. Masih terjadinya kesalahan baca meter.
   c. Tingginya pertumbuhan beban.

2. Sumatera
   Transmission losses in Sumatera were particularly due to the average length of medium voltage distribution network the average is 57 km. Several attempts were made to address the problem, among others: (i) completing several power plant projects to bring them closer to load centers, such as in the Teluk Sirih Steam Power Plant, the Nagan Raya Steam Power Plant and the Pangkalan Susu Steam Power Plant; (ii) accelerating transmission and distribution project completion. Besides, onother factor that increases transmission losses is a large number of 10-60 MVA transformers distributing load more than 80% of their capacity.
3. East Indonesia
   Transmission and distribution losses are mainly due to power plant deficit as a result of high demand in establishing new installed plants. Moreover, there was illegal use of electricity and an increased consumption which caused brownout. PLN has made serious efforts in completing power plant projects throughout eastern Indonesia.
4. Others
   a. There are still a great number of illegal street lights (PJU) and electricity consumption.
   b. There are still errors in reading electricity meters.
   c. High electrical load growth.

Susut Jaringan
Network Losses

Jenis Susut	2013	2014	2015	Network Losses
Susut Distribusi	7,77%	7,52%	7,64%	Distribution Losses
Susut Transmisi	2,33%	2,37%	2,33%	Transmission Losses
Susut Jaringan	9,91%	9,71%	9,77%	Network Losses

Susut Jaringan per Regional
Network Losses by Region

Keterangan	Realisasi 2013 2013 Realization	Realisasi 2014 2013 Realization	Realisasi 2015 2013 Realization	Description
Susut Transmisi	2,33%	2,37%	2,33%	**Transmission Losses**
Jawa - Bali	2,38%	2,49%	2,44%	Java - Bali
Sumatera	2,64%	2,44%	2,46%	Sumatra
Indonesia Timur	1,32%	1,36%	1,30%	East Indonesia
Susut Distribusi	7,77%	7,52%	7,64%	**Distribution Losses**
Jawa - Bali	6,55%	6,24%	6,28%	Java - Bali
Sumatera	12,05%	11,84%	11,88%	Sumatra
Indonesia Timur	11,30%	10,24%	10,61%	East Indonesia
Susut Jaringan	9,91%	9,71%	9,77%	**Network Losses**
Jawa - Bali	8,77%	8,57%	8,55%	Java-Bali
Sumatera	14,35%	13,99%	14,04%	Sumatra
Indonesia Timur	12,46%	11,45%	11,76%	East Indonesia

Adapun upaya berkesinambungan yang telah dilakukan oleh PLN untuk menurunkan susut jaringan yaitu:

1. Melakukan penambahan penyulang / jurusan baik untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat.
2. Melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi.
3. Melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan.
4. Penyeimbangan beban trafo.
5. Penggantian kWh meter macet.
6. Melaksanakan dan mengintensifkan program *Revenue Assurance.*
7. Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban PJU liar dan P2TL.
8. Melakukan perbaikan proses pengadaan Material Distribusi Utama (MDU).
9. Melakukan penyempurnaan sistem *Billing Management.*
10. Penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.

PLN has made continuous efforts to reduce transmission and distribution losses, as follows:

1. Performing additional feeders either for medium or low voltage network on several locations with heavy loads.
2. Installing substations on distribution network.
3. Replacing conductors.
4. Balancing transformer load.
5. Replacing broken meters.
6. Implementing and intensifying Revenue Assurance.
7. Implementing a consistent and sustainable program in addressing illegal street lights and energy consumption control (P2TL).
8. Improving procurement processes of Primary Distribution Material (MDU).
9. Improving Billing Management system.
10. Completing power plant construction and related transmission network.

Tingkat Keandalan Layanan

Tingkat keandalan pelayanan diukur dengan menggunakan indeks lama gangguan *(System Average Interruption Duration Index/SAIDI)* yang dihitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan per tahun. Sedangkan indeks frekuensi gangguan *(System Average Interruption Frequency/SAIFI)* menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan per tahun.

Service Reliability

Service reliability is measured by System Average Interruption Duration Index (SAIDI) to calculate interruptions per minute per customer per year. Whereas, System Average Interruption Frequency (SAIFI) measures the number of interruptions per customer per year.

Pada tahun 2015, indeks SAIDI sebesar 5.31 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI sebesar 5,97 kali/pelanggan/tahun, sedangkan untuk tahun 2014 5,81 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI sebesar 5,58 kali/pelanggan/tahun. Pencapaian tahun 2015 kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan oleh:

1. Masih banyak jaringan distribusi tegangan menengah yang memiliki panjang lebih dari 50 kms dan trafo yang dioperasikan dengan beban di atas 80% sehingga dapat menyebabkan sering terjadinya gangguan.
2. Adanya defisit daya akibat gangguan dan rehabilitasi pembangkit pada beberapa PLTU di Sumatera dan Indonesia Timur.
3. Mundurnya jadwal Commercial operation date beberapa pembangkit baru seperti PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat, PLTU Tenayan di Riau, PLTU 3 Bangka Belitung dan PLTU 4 Bangka Belitung di Bangka Belitung, dan PLTU Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur.

In 2015, SAIDI reached 5.31 hours/customer/year and SAIFI was 5.97 times/customer/year, while in 2014, SAIDI reached 5.81 hours/customer/year and SAIFI was 5.58 times/customer/year. These achievements in 2015 were worse than the previous year, due to:

1. A lot of medium voltage distribution networks are more than 50 kms long and transformers operated with a load of above 80%, which may lead to frequent disruptions.
2. Power deficits due to interference and plant rehabilitation in some Steam Power Plants in Sumatra and East Indonesia.
3. Delays in Commercial Operation Date schedule in several new plants such as the Teluk Sirih Steam Power Plant in West Sumatra, the Tenayan Steam Power Plant in Riau, the Bangka Belitung 3 Steam Power Plant and the Bangka Belitung 4 Steam Power Plant in Bangka Belitung, and the Teluk Balikpapan Steam Power Plant in East Kalimantan.

SAIDI dan SAIFI

SAIDI and SAIFI

Ukuran Keandalan	2013	2014	2015	Reliability Measurement
Indeks lama gangguan SAIDI (jam/pelanggan/tahun)	5,76	5,81	5,31	Duration of interuption index SAIDI (hours/customer/year)
Indeks frekuensi gangguan SAIFI (kali/pelanggan/tahun)	7,26	5,58	5,97	Frequency of interuption index SAIFI (times/customer/year)

SAIDI – SAIFI per Regional
SAIDI and SAIFI by Region

Keterangan	2013	2014	2015	Reliability Measurement
SAIDI (jam/plg/tahun)	5,76	5,81	5,31	SAIDI (hours/customer/year)
Jawa-Bali	4,59	5,37	3,44	Java-Bali
Sumatera	9,01	8,03	5,75	Sumatra
Indonesia Timur	6,46	4,79	12,45	East Indonesia
SAIFI (kali/plg/tahun)	7,26	5,58	5,97	SAIFI (times/customer/year)
Jawa-Bali	5,38	4,89	3,48	Java-Bali
Sumatera	14,19	8,44	5,47	Sumatra
Indonesia Timur	6,19	4,8	16,86	East Indonesia

Peningkatan Mutu Layanan dan Keandalan

Upaya berkesinambungan yang dilakukan PLN agar terus dapat meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan adalah:

1. Melengkapi manajemen dengan *tools* pemantauan gangguan penyulang guna mendorong kinerja penyulang yang lebih baik.
2. Meningkatkan peralatan proteksi, melakukan pembenahan pemeliharaan dan pengaturan alat proteksi agar di masa depan tidak terjadi lagi malfungsi.
3. Melakukan pembersihan *Right of Way* (ROW) secara efektif dengan memanfaatkan informasi peta pohon.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja trafo distribusi yang meliputi: pemeliharaan, penyeimbangan beban, pengurangan jumlah trafo yang berbeban lebih *(overblast),* trafo sisipan maupun relokasi, sekaligus mengurangi risiko kerusakan trafo.

Service Quality and Reliability Improvement

The continuous efforts taken into action by the company to improve service quality for customers include:

1. Providing management with monitoring tools of feeder disorders to support better feeders' performance.
2. Improving protection equipment, and its maintenance and organization to prevent malfunctions in the future.
3. Implementing of Right of Way (ROW) effectively by utilizing tree map information.
4. Applying stringent control to distribution transformation performance which covers: maintenance, load distribution, reducing number of over blasted transformation, additional and relocated transformers, as well as lowering the risk of transformers' malfunction.

PENCAPAIAN KEY *PERFORMANCE INDICATORS*

Pengukuran kinerja perusahaan mencakup 5 perspektif Key Performance Indicator (KPI) berbasis "Kriteria Penilaian Kinerja Unggul" sesuai Kontrak Manajemen yaitu Fokus Pelanggan, Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tata Kelola.

Pencapaian score Key Performance Indicators PT PLN (Persero) tahun 2015 adalah 94,6.

COMPANY PERFORMANCE LEVEL

Measurement of the company performance covers 5 Key Performance Indicators (KPI) perspectives based on "Assessment Criteria of Performance Excellences" according to the Management Contract: Customer Focus, Product and Process, The focus of Manpower, Finance and Markets, Leadership and Governance.

PT PLN (Persero) Key Performance Indicators score in 2015 was 94.6.

Pencapaian *Key Performance Indicator*
Key Performance Indicator Scores

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Nilai	77,76	88,04	94,6	Score

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

PLN mencatatkan kinerja keuangan business as usual yang cukup menggembirakan, seperti tercermin dari penurunan subsidi yang diterima, sekalipun harus membukukan rugi penurunan nilai tukar yang berada di luar kendali PLN. Namun dengan memasukkan penghasilan komprehensif dari realisasi laba hasil revaluasi aset, Perseroan mencatatkan kinerja keuangan yang sangat membanggakan dengan catatan laba (penghasilan) komprehensif tahun berjalan naik 63,6 kali dari tahun sebelumnya, mencapai Rp658,3 triliun.

PLN has recorded quite encouraging business as usual financial performance, as reflected in the decrease in subsidy received, although recording forex losses that are beyond PLN's control. However, by posting comprehensive revenue from the asset revaluation profit, the Company is very proud to achieve a financial performance that recorded comprehensive profit (income) for the current year up 63.6 times from the previous year, reaching Rp658,3 trillion.

PENGANTAR TINJAUAN KEUANGAN

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PLN memiliki target menyediakan tenaga listrik yang memadai bagi seluruh penduduk Indonesia dengan capaian rasio elektrifikasi mencapai level 97,4% pada akhir tahun 2019, dari posisi akhir tahun 2015 sebesar 88,3 %.

Untuk mencapai target tersebut, saat ini PLN tengah membangun sejumlah instalasi pembangkit yang sebagian diantaranya diselenggarakan oleh pihak swasta karena keterbatasan dana investasi. PLN juga tengah membangun jaringan transmisi dan distribusi ke seluruh pelosok negeri. Pada saat yang bersamaan, PLN juga berupaya meningkatkan kualitas jaringan distribusi, agar efisiensi penyaluran tenaga listrik dari stasiun pembangkit meningkat. Selain itu, PLN berupaya meningkatkan efisiensi operasional, untuk menekan beban usaha, baik melalui

FINANCIAL REVIEW INTRODUCTION

As previously explained, PLN is targeting an electrification ratio of 97.4% by the end of 2019, up from 88.3% in the end of 2015, by providing sufficient electrical power for almost the entire population of Indonesia.

To achieve this target, PLN is currently building a number of power plants, some of which are being organized by the private sector due to limited investment funds. PLN is also building transmission and distribution networks throughout the country. At the same time, PLN is also working to improve the distribution network quality to increase the efficiency of electrical power distribution from its power stations. Furthermore, PLN is striving to improve operational

pengaturan penggunaan energi primer maupun upaya efisiensi dalam pengelolaan dana maupun pengelolaan pengeluaran operasional lainnya.

Untuk mendukung pendanaan pembangunan berbagai infrastruktur ketenagalistrikan tersebut, PLN kemudian menggalang dana melalui penerbitan serangkaian instrumen obligasi dan surat hutang berjangka menengah dan panjang, serta mencari dana dari kalangan perbankan dan sumber dana *two step loan* dengan garansi dari Pemerintah. PLN semakin intens mencari dana dengan skema B to B dari berbagai lembaga keuangan Internasional, untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBN dalam skema penjaminan Pemerintah. PLN juga merealisasikan pengelolaan dan mitigasi risiko secara terintegrasi, meliputi seluruh risiko strategis untuk meminimalisir dampaknya, sesuai koridor ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Indikator Operasional Strategis

Sebagai perusahaan kelistrikan yang menjalankan tugas pemenuhan tenaga listrik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu, PLN mendapatkan subsidi atas tenaga listrik yang digunakan oleh masyarakat kurang mampu tersebut. Besaran subsidi dihitung dari selisih harga jual dan biaya pokok pengadaan (BPP) dan dianggarkan setiap periode sesuai perhitungan yang dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi pokok yang telah ditentukan. Anggaran tersebut selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dipertimbangkan dan disetujui setelah melalui kajian mendalam, seperti diuraikan selengkapnya pada sub-judul "Subsidi Listrik".

Besaran subsidi, bersama-sama dengan rencana penambahan pembangkit listrik, pembangunan jaringan, prakiraan pendapatan maupun biaya yang dibutuhkan dihitung berdasarkan satu model proyeksi kebutuhan ketenagalistrikan untuk setiap periode di masa mendatang, jangka pendek maupun jangka panjang.

Perhitungan tersebut melibatkan penyusunan beberapa target utama dan asumsi kunci, berupa target capaian di bidang operasional, sebagai dasar bagi diperolehnya gambaran kinerja yang dapat dicapai di masa mendatang termasuk perhitungan kebutuhan dana bagi pengembangan ketenagalistrikan sesuai target yang ditetapkan tersebut. Perubahan kondisi yang mempengaruhi asumsi utama, akan membuat kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan membuat kebutuhan dana berubah. Perubahan tersebut tercermin dalam neraca keuangan dan laba rugi PLN pada setiap periode.

Mengingat pentingnya pemenuhan target dan asumsi kunci tersebut terhadap kinerja keuangan PLN, beberapa diantaranya kemudian dimasukan sebagai komponen *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi yang ditetapkan dan dievaluasi setiap periode, sebagai wujud akuntabilitas Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan aset Perusahaan.

efficiency and reduce operating expenses by regulating the use of primary energy and making efficiency measures in the management of funds and other operational expenses.

To support the funding of electrical power infrastructure development, PLN is raising funds through the issuance of a series of medium and long-term bonds and debentures, and seeking funding from banks and other funding sources through 'two step loans' guaranteed by the Government. PLN is increasing the intensity of its search for B to B funding schemes from various international financial institutions to overcome the limitations of the state budget in the government guarantee scheme. PLN is also realizing integrated risk management and mitigation, covering all strategic risks to minimize impact in accordance with applicable rules and regulations.

Strategic Operational Indicators

As an electricity company with the duty of fulfilling the electricity needs of the entire population, including the poor, PLN receives a subsidy for electricity used by the poor. The subsidy amount is calculated as the discrepancy between the selling price and cost of production and is budgeted for each period according to calculations made based on the basic pre-determined assumptions. The budget is subsequently submitted to the House of Representatives for consideration and approval after in-depth review, as described more fully under the sub-heading "Electricity Subsidy".

The amount of subsidy, together with the plan to increase power generation, network construction, required revenue and cost forecasts, are calculated based on a projected model of electricity demand for each future period, both short and long term.

The calculation involves the preparation of several main targets and key assumptions, such as operational target achievements, as a basis for obtaining an overview of the performance that can be achieved in the future, including calculating funding requirements for electrical power developments according to pre-determined targets. Changes in conditions that affect the main assumptions mean the targeted performance is not achieved and funding requirements change. These changes are reflected in PLN's balance sheet and profit and loss statement in each period.

Given the importance of meeting PLN's financial performance targets and key assumptions, some are included as Key Performance Indicators (KPI) to assess the performance of the Board of Directors and increase their accountability in managing the company's assets.

Beberapa asumsi kunci / target operasional utama yang memberi dampak signifikan terhadap kinerja keuangan PLN, meliputi:

1. Kenaikan jumlah pelanggan: Penambahan jumlah pelanggan merupakan salah satu sasaran yang ditetapkan untuk PLN, tujuannya adalah meningkatkan rasio elektrifikasi.
   Penambahan jumlah pelanggan secara umum didominasi oleh pelanggan rumah tangga yang tarifnya masih di bawah tarif keekonomian, sehingga pendapatan PLN dari segmen tersebut masih membutuhkan subsidi dari pemerintah.
2. *Commercial Operation Date* (COD) / Penambahan Kapasitas Pembangkit: Pertambahan kapasitas pembangkit tepat pada waktunya membuat berbagai proyeksi perhitungan biaya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, pembelian daya dari pembangkit IPP maupun sewa dan subsidi lebih dapat dialokasikan dengan tepat. Sebaliknya kekurang akuratan COD membuat perhitungan tersebut kurang tepat dan berdampak pada meningkatnya biaya operasional yang berujung pada naiknya biaya pokok pengadaan.
3. *Fuel Mix BBM* (Bauran Energi) : Kurang berhasilnya capaian bauran energi membuat biaya operasional cenderung meningkat, mengingat biaya produksi BBM secara umum masih lebih mahal dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.
4. Kapasitas Pembangkit Sewa: Sewa pembangkit dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit energi pada suatu area serta juga untuk mempertahankan tingkat mutu pelayanan. Namun, penggunaan pembangkit sewa akan berdampak pada naiknya biaya operasional.
5. Faktor Ketersediaan Pembangkit / *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU: Menunjukkan prosentase kesiapan unit pembangkit untuk dapat dioperasikan pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi EAF berarti kesiapan pembangkit untuk memproduksi tenaga listrik semakin besar.
6. Susut Jaringan: menunjukan besarnya tingkat kehilangan daya listrik dalam proses transmisi dari pembangkit ke pelanggan. Semakin besar susut jaringan, maka semakin besar kehilangan kWh yang pada akhirnya meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Target dan Realisasi Kinerja Operasional

Adapun target dan realisasi pencapaian indikator kinerja operasional utama untuk tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Dari tabel tersebut tampak bahwa kinerja operasional PLN di tahun 2015 bersifat tidak merata, beberapa menunjukan hal yang positif, seperti pada capaian penambahan pelanggan, *fuel mix*, EAF dan penggunaan pembangkit sewa. Sementara pencapaian kinerja yang lain kurang memenuhi target yang ditetapkan, sekalipun menunjukan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian operasional tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, seperti di jelaskan dalam kolom dampak utama.

Some of the key assumptions / key operational targets that have a significant impact on PLN's financial performance include:

1. Increased number of customers: An increasing number of customers is one of PLN's targets, with the aim of increasing the electrification ratio.
   Increases in customer numbers are generally from the household sector, the tariffs for which are below the economic price, thus PLN's income from this segment still requires subsidizing by the government.
2. Commercial Operation Date (COD) / Increasing Power Plant Capacity: On-time increases in power plant capacity impact on various cost calculations, such as fuel requirements and purchased power from IPP and leased plants, and mean that subsidies can be allocated more appropriately. However, inaccurate COD makes the calculations imprecise and results in increased operating costs that finally lead to an increased cost of production.
3. Fuel Mix: A less than optimal fuel mix means operational costs tend to rise, as generally oil fuel production costs are more expensive than other fuels.
4. Leased Power Plant Capacity: Power plants are leased in an effort to address the energy deficit in certain areas and to maintain service quality. However, leasing power plants causes increased operational costs.
5. Power Plant Equivalent Availability Factor (EAF): Indicates the percentage readiness of power plants that can be operated in a given period. The higher the EAF, the greater the readiness of the power plants to produce power.
6. Network Losses: Indicates the amount of electricity lost in the transmission process between the power plant and the customer. The higher the network loss, the higher the amount of kWh lost, which finally increases the cost of production.

Operational Performance Targets and Realization

The targets and realization of primary operational performance indicators in 2015 are shown in the following table. The table shows that PLN's operational performance in 2015 was mixed, with positive achievements such as additional customers, fuel mix, EAF and use of leased plants. Meanwhile, other targets were not met, despite showing growth compared to the previous year. These operating results affect the financial performance of the Company, as described in the column on primary impact.

Pada tabel berikut dicantumkan target dan realisasi kinerja operasional reguler, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

In the following table are regular operational performance targets and realizations, which finally affect the company's financial performance.

Target Operasional Operational Targets	Satuan Units	2014	2015		% Tumbuh Growth	% Realisasi %Realization 2015	Polaritas*	Dampak Utama Primary Impact
			Target	Realisasi Realization				
Indikator Operasional Utama Primary Operational Indicator								
Penambahan Pelanggan Additional Customers	Ribu Thousand	3.497,0	3.595,0	3,674,7	5,1%	102,2%	Positif Positive	Penambahan jumlah pelanggan secara umum didominasi oleh pelanggan rumah tangga yang tarifnya masih di bawah tarif keekonomian, sehingga pendapatan PLN dari segmen tersebut masih membutuhkan subsidi dari pemerintah. The increase in the number of customers mostly dominated by household customers of which the tariff is below economical tariff, because of that, PLN income from that segment still needs to be subsidized by the government.
Fuel Mix BBM termasuk IPP Fuel Mix BBM including IPP	%	11,37	8,52	8,22	(27,9%)	96,6%	Negatif Negative	Potensi pengurangan subsidi Potential to reduce subsidy
Penambahan Kapasitas Pembangkit (COD) Commercial Operation Date (COD)	MW	1.930,0	3.870,0	2.050,0	6,2%	53,0%	Positif Positive	Potensi penambahan sewa dan biaya BBM pembangkit, target *fuel mix* & BPP tidak tercapai Potential to increase power plant lease and fuel cost, fuel mix &cost of production target not achieved
Pemeliharaan Maintenance	MW	n.a	47.663,0	34.028,0		71,4%	Positif	Risiko keandalan di masa depan Future reliability risk
Kapasitas Pembangkit Sewa BBM Lease Power Plant Fuel Capacity	MW	3.180,0	4.380,0	2.640,0	(17,0%)	60,3%	Negatif Negative	Pengurangan sewa pembangkit, mendukung pencapaian target *fuel mix* & BPP Reducing power plant lease, supports in achieving fuel mix and Cost of production target
EAF PLTU EAF Steam Power Plant	%	74,6	81,0	82,0	9,9%	101,2%	Positif Positive	Potensi pengurangan pembelian listrik swasta , mendukung pencapaian target *fuel mix* & BPP Potential of decrease in total electricity purchase from private plants, supports in achieving fuel mix and Cost of production target
Susut Jaringan Network Losses	%	9,71	8,45	9,77	0,6%	115,6%	Negatif Negative	Potensi meningkatnya biaya pokok penyediaan Potential of cost of electricity supply increase
Keandalan Jaringan Network reliability								
SAIDI System Average Interruption Duration Index	jam/ pelanggan our/ customer	5,81	5,0	5,31	(8,7%)	106,2%	Negatif Negative	Kepercayaan pelanggan turun Decrease in customer trust
SAIFI System Average Interruption Frequency Index	Kali/ pelanggan Times/ pelanggan	5,58	5,50	5,97	6,6%	108,5%	Negatif Negative	Kepercayaan pelanggan turun Decrease in customer trust
Indikator Operasional Reguler Regular Operational Indicator								
Penjualan Tenaga Listrik Sale of Electricity	TWh	198,6	210,2	202,8	2,1%	96,5%	Positif Positive	Pendapatan tidak mencapai target Income does not reach target

Target Operasional Operational Targets	Satuan Units	2014	2015		% Tumbuh Growth	% Realisasi %Realization 2015	Polaritas*	Dampak Utama Primary Impact
			Target	Realisasi Realization				
Produksi Listrik Sendiri Own Electricity Production	TWh	152,9	158,0	156,6	2,5%	99,1%	Positif Positive	Biaya pembelian listrik meningkat Increase in electricity purchase cost
Total Produksi Listrik Total Electricity Production	TWh	228,6	233,0	233,9	2,4%	100,4%	Positif Positive	Tidak ada defisit listrik No electricity deficit
Total Daya Tersambung Total Connected Capacity	MVA	100.031,0	106.407,0	106.582,0	6,5%	100,2%	Positif Positive	
BPP Cost of Production	Rp/kWh	1.419,7	1.437,0	1.300,49	(8,48%)	90,41	Negatif Negative	Mengurangi jumlah subsidi Reducing subsidy

Dampak Eksternal

Pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 11,3% yang terjadi di tahun 2015 membuat PLN mencatatkan rugi translasi valas sebagai konsekuensi atas besarnya portofolio pinjaman (pinjaman Bank maupun Obligasi dan Surat Berharga) dalam mata uang valas. Namun demikian, PLN tetap mencatatkan laba bersih yang substantial sebagai buah keberhasilan implementasi program efisiensi operasional, termasuk di dalamnya pengendalian BPP melalui peningkatan strategi bauran energi.

External Impacts

The 11.3% weakening of the rupiah exchange rate in 2015 caused PLN to recorded foreign exchange losses as a consequence of the size of the loan portfolio (bank loans, bonds and securities) held in foreign currency. However, PLN still recorded a substantial net profit as a result of the operational efficiency program, including controlling the Cost of production by improving the energy mix strategy.

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan data-data keuangan dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015. Laporan Keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Laporan keuangan konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015 yang menjadi dasar pembahasan, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) *a member firm of PWC Global Network.*

Laporan Keuangan tersebut memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Pengecualian diberikan karena Perusahaan berbeda pendapat dengan auditor tentang pengukuran dan pelaporan transaksi jual beli tenaga listrik antara IPP dengan PLN (ISAK 8) dimana Perusahaan berpendapat bahwa penerapan ISAK 8 akan menghasilkan informasi yang tidak akurat mengenai kondisi dan kinerja

FINANCIAL REVIEW

The following Management Discussion and Analysis on the financial performance is based on financial data from the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) for the years ended 31 December 2014 and 2015. The financial statements are presented in accordance with rules set out in the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). All information contained in these consolidated financial statements is complete and accurate; they contain no untrue information or material facts and do not omit information or material facts.

The Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) for the years ended 31 December 2014 and 2015, which form the basis of this discussion, have been audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (Price Waterhouse Coopers Indonesia) a member firm of PWC Global Network.

These Financial Statements have obtained an qualified opinion. Qualified opinion is given because the Company has dissenting opinion with the auditor about measurement and electricity purchase transaction report between IPP and PLN (IFSAS 8). The company has an argument that IFSAS 8 will produce not accurate information about company's

perusahaan sehingga tidak diterapkan. Namun demikian Perusahaan mengungkapkan secara komprehensif dalam Catatan atas Laporan Keuangan pengaruh dari ISAK 8 tersebut jika perusahaan menerapkannya.

Posisi keuangan berdasarkan mata uang asing telah disajikan dalam jumlah yang setara Rupiah dengan kurs yaitu Rp13.785/USD dan Rp12.385/USD pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Baru Berdampak Substansial

Pada tahun pelaporan 2015, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

Penerapan dari standar akuntansi berikut oleh Perseroan, yang berlaku efektif 1 Januari 2015, menyebabkan perubahan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian PLN:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1 (revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan" mengenai pendapatan komprehensif lain. Perubahan yang utama adalah persyaratan Grup untuk mengelompokkan hal-hal yang disajikan sebagai "pendapatan komprehensif lain" berdasarkan apakah hal-hal tersebut berpotensi untuk direklasifikasi ke laporan laba rugi selanjutnya (penyesuaian reklasifikasi).
- PSAK No. 24 (revisi 2013) " Imbalan Kerja"
  Standar ini mengatur semua keuntungan/(kerugian) aktuarial dari kewajiban imbalan pasca kerja harus diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain sedangkan biaya jasa lalu diakui pada laba rugi dan mengganti biaya bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program dengan jumlah bunga bersih yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas/(aset) bersih atas manfaat pasti. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 56.
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama",
  pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama tergantung atas hak dan kewajiban kontraktual yang dimiliki setiap investor, dibanding bentuk legal suatu perikatan bersama. Operasi bersama timbul dimana para investor mempunyai hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas dari sebuah pengaturan. Operator mencatat kepemilikannya atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Ventura bersama timbul

condition and performance, so it is not implemented. However, the company reveals the impact of IFSAS 8 implementation in Notes to the Financial Statement if the company adjusts that.

The financial position in foreign currency has been presented in an amount equivalent to a rupiah exchange rate that is Rp13,785/USD and Rp12,385/USD on 31 December 2015 and 2014.

Application of New Accounting Policies with Substantial Impact

In the 2015 reporting year, the Company applied new and revised Financial Accounting Standards ("PSAK"), as well as Interpreted Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") that were relevant to operations and came into effect for the accounting period commencing 1 January 2015.

The Company's implementation of the following accounting standards, effective from 1 January 2015, resulted in significant differences in the reporting of PLN's consolidated financial statement:

- Financial Accounting Standards ("PSAK") Num. (revised 2013), "Financial Report Presentation" on other comprehensive revenue. The main change is the Group requirement to group things that are presented as "other comprehensive revenue" based on whether they have the potential to be reclassified in the following profit and loss (reclassification adjustment).
- PSAK Num. 24 (revised 2013) "Employee Benefits"
  This standard regulates all actuarial profits / (loss) from post employment benefit liabilities that must be recognized directly in other comprehensive revenue, whereas the past service costs were recognized in profit or loss and replaced interest expenses and expected returns from asset programs with net interest calculated using a discounted rate on net liabilities / (assets) for defined benefit. The impacts of this revised standard on the consolidated financial statements are presented in Note 56.
- PSAK Num. 66, "Joint Arrangements",
  Joint arrangements are classified as joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor, rather than the legal form of a joint engagement. A joint operation arises when investors have a right to assets and liabilities of the liabilities of an arrangement. The operator notes ownership of assets, liabilities, revenues and expenses. Joint ventures arise where investors have the right to the net assets of the joint arrangement. Joint ventures

dimana para investor memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidak diijinkan. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 8.

- PSAK No. 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain".
  Standar ini mengatur pengungkapan seluruh bentuk kepemilikan di entitas lain, termasuk pengaturan bersama, entitas asosiasi, dan entitas struktur. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 8.
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".
  Standar ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat atas nilai wajar dan sumber tunggal atas pengukuran nilai wajar dan syarat pengungkapan. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 6, 7 dan 55.

Selain standar akuntansi yang berdampak signifikan tersebut, Perseroan juga telah menerapkan beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi standar baru, namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, mencakup:

- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- ISAK No. 15 (Revisi 2015), "Batas Aset Imbalan Pasti"
- ISAK No. 26 (Revisi 2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"

Penyajian Kembali

Sebagai konsekuensi dari penerapan beberapa kebijakan akuntansi baru tersebut, terutama PSAK 24 (revisi 2013), Perseroan menyajikan kembali (dengan penyesuaian) beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2014, mengingat ketentuan ini berlaku restrospektif, sebagaimana tampak pada skema penyesuaian berikut.

are recorded using the equity method. Proportional consolidation is not permitted. The impacts of this revised standard on the consolidated financial statements are presented in Note 8.

- PSAK Num. 67 "Disclosure of Interests in Other Entities". This standard regulates disclosure of all forms of ownership in other entities, including joint arrangements, associate entities and entity structures. The impacts of this revised standard on the consolidated financial statements are presented in Note 8.
- PSAK Num. 68, "Measuring Fair Value".
  This standard aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise definition of fair value and a single source on fair value measurement and disclosure requirements. The impacts of this revised standard on the consolidated financial statements are presented in Note 6, 7 and 55.

In addition to the above accounting standards with significant effect, the Company has also applied several new accounting standards and new interpretation standards that do not have a material impact on the financial statements, namely:

- PSAK Num. 4 (revised 2013), "Separate Financial Statements"
- PSAK Num. 15 (revised 2013), "Investments in Associate Entities and Joint Ventures"
- PSAK Num. 46 (revised 2014), "Income Tax Accountancy"
- PSAK Num. 48 (revised 2014), "Impairment of Assets"
- PSAK Num. 50 (revised 2014), "Financial Instruments: Presentation"
- PSAK Num. 55 (revised 2014), " Financial Instruments: Disclosure and Measurement"
- PSAK Num. 60 (revised 2014), " Financial Instruments: Disclosures"
- PSAK Num. 65, "Consolidated Financial Statements"
- ISAK Num. 15 (revised 2015), "Defined Benefit Asset Limitation"
- ISAK Num. 26 (revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives"

Restatement

As a consequence of the adoption of the new accounting policies, notably PSAK 24 (revised 2013), the Company has restated (with adjustments) several accounts in the 2014 consolidated financial statements, considering that this provision applies retrospectively, as shown in the following adjustment scheme.

Keterangan	Jumlah Sebelum Penyesuaian 31 Desember 2014 Balance Before Adjustment December 31, 2014	Penyesuaian Adjustment PSAK 24 SFAS 24	Tanpa ISAK 8 Without ISFAS 8[*1)]	Reklasifikasi karena PSAK 66 Reclassification due to SFAS 66	Jumlah Setelah Penyesuaian 31 Desember 2014 Balance After Adjustment December 31, 2014	Description
Laporan posisi keuangan konsolidasian						Consolidated statement of financial position
Aset tidak lancar						Non-current assets
Aset tetap	501.706.275	-	(61.304.901)	-	440.401.374	Property, plant and equipment
Investasi pada entitas asosiasi	2.318.945	-	-	(1.014.234)	1.304.711	Investment in associates
Investasi pada ventura bersama	253.648	-	-	1.014.234	1.267.882	Investment in joint venture
Aset pajak tangguhan	2.899.848	3.789.133	(6.622.233)	-	66.748	Deferred tax assets
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.752.797	-	4.880.193	-	8.632.990	Deferred tax liabilities - net
Utang sewa pembiayaan	128.096.528	-	(105.337.567)	-	22.758.961	Lease liabilities
Utang listrik swasta	6.654.142	-	689.367	-	7.343.509	Electricity purchase payable
Liabilitas imbalan kerja	25.922.391	15.156.544	-	-	41.078.935	Post employment benefit
Liabilitas jangka pendek						
Utang usaha						
Pihak berelasi	12.654.991	-	16.926	-	12.671.917	Related parties
Pihak ketiga	13.629.164	-	2.039.016	-	15.668.180	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	9.403.153	-	(1.850.489)	-	7.552.664	Accrued expense
Utang sewa pembiayaan	5.116.369	-	(2.241.788)	-	2.874.581	Lease liabilities
Utang listrik swasta	291.744	-	7.485	-	299.229	Electricity purchase payable
Ekuitas						Equity
Saldo laba - tidak						Retained earnings -
Ditentukan penggunaannya	46.814.284	123.685	33.869.723	-	80.807.692	Unappropriated other
Penghasilan komprehensif lain	-	(11.491.096)	-	-	(11.491.096)	Other comprehensive income

[*1)] Dampak dari perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan sewa menurut ISAK 8.

[*1)] Impact of power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8.

Revaluasi Aset

Pada tahun pelaporan Perseroan telah melaksanakan program penilaian kembali aset-aset yang dimilikinya (revaluasi aset), terutama terhadap aset-aset properti yang dimiliki. Hasil revaluasi aset ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, terutama terhadap nilai aset tetap yang dimiliki. Oleh karena dampaknya yang signifikan, revaluasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten di bidangnya.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tertentu dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Pelaksanaan revaluasi aset tetap untuk PT PLN (Persero) dilaksanakan berdasarkan tender yang dimenangkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") yang selanjutnya melaksanakan penilaian. KJPP RHR adalah Penilai Publik Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan No. 2.09.0012 dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Asset Revaluation

In the reporting year, the Company has been implementing a program of revaluing its assets (asset revaluation), in particular property assets. Asset revaluation has had a significant impact on the consolidated financial statements, specifically on the value of Property, plant and equipment owned by the company. Due to this significant impact, the revaluation was carried out by an independent third party that is competent in its field.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for certain class of assets from the cost model to the revaluation model.

The revaluation of PT PLN (Persero) is conducted based on tender process where Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR") was selected as the winner. KJPP RHR is an Independent Public Valuer registered in The Ministry of Finance Num. 2.09.0012 and Financial Services Authority ("OJK").

Adapun Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar
   Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

   Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode Arus Kas Terdiskonto, atau keduanya.

   Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

3. Pendekatan Biaya
   Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi sebuat aset modern yang ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

   Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, material cadang, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

The valuation standard that has been used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, which used the following valuation approaches:

1. Market approach
   This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sales transaction.

   The market approach can be applied to land rights asset class.

2. Income approach
   This approach considers the income and costs related to the subject assets and estimates value through a capitalization process. Capitalization involves the conversion of income (usually net income) into an indication of value. This process uses the direct capitalization method or the Discounted Cash Flow method or both.

   The income approach can be applied to commercial land rights or land rights with development scale.

3. Cost approach
   This approach is based on the principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would be not more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking into consideration undue time, and overtime charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

   The cost approach is applied to asset classes such as buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, spare parts, and telecommunications and data processing equipments used for electricity supply.

RINGKASAN KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan penjualan listrik meningkat 12,44% mencapai Rp209,85 triliun.
2. Biaya bahan bakar turun 21,26%.
3. Biaya pokok penyediaan turun 8,40%.
4. Laba usaha naik 0,83% menjadi sebesar Rp27,64 triliun.
5. EBITDA naik 5,75% menjadi sebesar Rp51,5 triliun.
6. Total Penghasilan Komprehensif naik signifikan hingga 6.263,0% mencapai Rp658,59 triliun.
7. Laba bersih naik 11,29% menjadi Rp15,58 triliun.
8. Ekuitas naik signifikan 353,2% menjadi sebesar Rp848,22 triliun.
9. Pemenuhan covenant pinjaman membaik.

FINANCIAL PERFORMANCE SUMMARY

1. Income from electricity sales rose 12.44% to Rp209.85 trillion.
2. Fuel expenses fell 21.26%.
3. Cost of production fell 8.40%.
4. Operating income rose 0.83% to Rp27.64 trillion.
5. EBITDA rose 5.75% to Rp51.5 trillion.
6. Total Comprehensive Income rose significantly by 6,263.0% to Rp658.59 trillion.
7. Net profit rose 11.29% to Rp15.58 Trillion.
8. Equity rose significantly by 353.32% to Rp848.22 trillion.
9. Improvement of Fulfilling Debt Covenant.

IKHTISAR POSISI KEUANGAN

Pada ikhtisar posisi keuangan berikut, total aset PLN per 31 Desember 2015 meningkat 127,5% menjadi Rp1.227.356 miliar dari Rp539.521 miliar di tahun 2014 (setelah penyajian kembali). Total Liabilitas naik 7,6% menjadi Rp379.136 miliar dari Rp352.348 miliar di tahun 2014 (setelah penyajian kembali). Sementara ekuitas Perusahaan naik 353,2% menjadi Rp848.219 miliar dari posisi Rp187.173 di tahun sebelumnya (setelah penyajian kembali).

SUMMARY OF FINANCIAL POSITION

In the following overview of the financial position, PLN's total assets per 31 December 2015 increased by 127.5% to Rp1.227.356 billion from Rp539,521 billion in 2014 (after restatement). Total liabilities rose 7.6% to Rp379,136 billion from Rp 352,348 billion in 2014 (after restatement). While the Company's equity rose 353.2% to Rp848,219 billion from Rp187,173 the previous year (after restatement).

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar Billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
Aset tidak lancar	438.815,31	454.097,45	1.148.010,72	3,48%	152,81%	83,80%	84,17%	93,54%	Non-Current Assets
Aset lancar	84.837,18	85.423,74	79.344,79	0,69%	(7,12%)	16,20%	15,83%	6,46%	Current Assets
TOTAL ASET	523.652,49	539.521,19	1.227.355,51	3,03%	127,49%	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL ASSETS
Liabilitas jangka panjang	261.853,09	266.818,23	262.132,01	1,90%	(1,76%)	74,94%	75,73%	69,18%	Non-current Liabilities
Liabilitas jangka pendek	87.574,27	85.529,43	117.004,43	(2,33%)	43,23%	25,06%	24,27%	30,82%	Short-term Liabilities
TOTAL LIABILITAS	349.427,36	352.347,65	379.136,44	0,84%	7,60%	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS	174.225,13	187.173,54	848.219,07	7,43%	353,2%	NA	NA	NA	EQUITY

Nilai Aset (Rp miliar)
Asset Values (Rp billion)

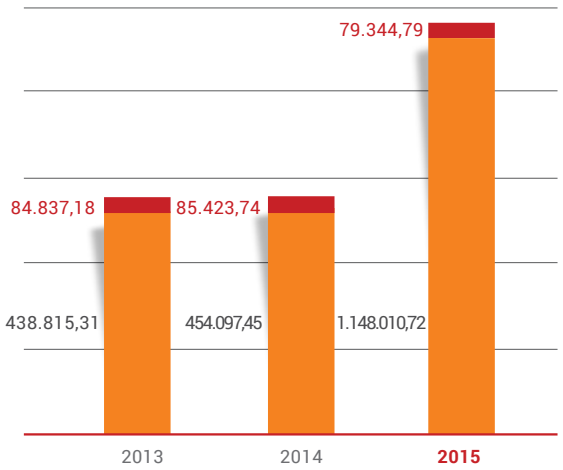

Ikhtisar Komposisi Aset (%)
Asset Composition Overview (%)

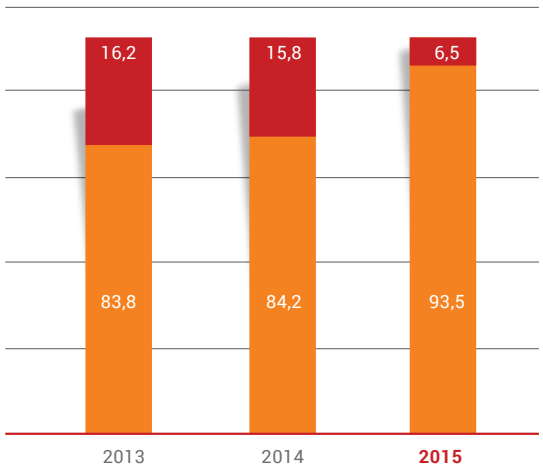

Aset Lancar Current Assets
Aset Tidak Lancar Non Current Assets

Adapun penjelasan pos-pos neraca utama yang menyebabkan perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

Clarification of the main balance sheet items that resulted in these changes is as follows.

ASET

Bidang usaha PLN yang padat modal, membuat komponen aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan yang termasuk kedalam kelompok akun Aset Tidak Lancar terus mendominasi nilai posisi keuangan. Seperti tampak pada tabel sebelumnya dan ditunjukkan pada 2 grafik berikut, komponen aset tidak lancar (didalamnya didominasi oleh akun aset tetap) mendominasi komposisi aset hingga pada kisaran 93,5%. Nilai Aset tersebut akan terus bertambah mengingat PLN tengah dan akan terus membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Pertambahan nilai aset di masa mendatang diprakirakan meningkat semakin cepat seiring dengan realisasi pembangunan pembangkit maupun infrastruktur transmisi dalam Program 35.000 MW.

ASSETS

PLN's capital intensive business means fixed asset and work in progress components that are included in the Non-Current Assets account continue to dominate the financial position. As shown in the previous table and illustrated in the following two graphs, non-current assets (dominated by the fixed asset account) dominate asset composition by approximately 93.5%. This asset value will continue to rise as PLN is in the midst of and will continue to build electrical power infrastructures.

Future asset value is forecast to increase exponentially in line with realization of power plant construction and transmission infrastructure for the 35,000 MW Program.

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada akhir tahun 2015 mencapai Rp1.148.010,7 miliar, naik 152,81% dibandingkan tahun 2014. Komposisi terbesar aset tidak lancar di tahun 2015 adalah aset tetap bersih, mencapai 97,2% (sudah termasuk aset dalam pelaksanaan dan aset tidak digunakan dalam operasi), diikuti aset pajak tangguhan 1,25% dan rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar 0,77%, serta beberapa akun yang jumlahnya kurang dari 0,6% terhadap total aset tidak lancar.

Komposisi aset tidak lancar tercantum pada tabel berikut.

NON CURRENT ASSETS

As of the end of 2015, the Company's total noncurrent assets amounted to Rp1.148.010,7 billion, up 152,81% compared to 2014. The largest composition of non-current assets in 2015 was net Property, plant and equipment, reaching 97.2% (including construction in progress and assets not used in operations), followed by 1.25% in deferred tax assets and 0.77% in bank accounts and restricted use deposits, as well as several accounts totaling less than 0.6% of total noncurrent assets.

The composition of noncurrent assets is noted in the following table.

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar Billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
ASET TETAP	427.432,79	440.401,37	1.115.651,99	3,03%	153,33%	97,41%	96,98%	97,18%	NET PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Properti investasi	159,33	233,06	1.000,97	46,27%	329,50%	0,04%	0,05%	0,09%	Investment property
Investasi pada entitas asosiasi	1.003,75	1.304,71	1.645,41	29,98%	26,11%	0,23%	0,29%	0,14%	Investment in associates
Investasi pada ventura bersama	1.025,32	1.267,88	1.529,29	23,66%	20,62%	0,23%	0,28%	0,13%	Investment in joint venture
Aset pajak tangguhan	35,77	66,75	14,300,50	86,59%	21324,61%	0,01%	0,01%	1,25%	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	176,03	98,83	268,65	(43,86%)	171,83%	0,04%	0,02%	0,02%	Receivables from related party
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659,75	5.994,03	8.796,98	5,91%	46,76%	1,29%	1,32%	0,77%	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	304,30	321,39	312,08	5,61%	(2,89%)	0,07%	0,07%	0,03%	Other receivables
Aset tidak lancar lain	3.018,27	4.409,44	4.504,85	46,09%	2,16%	0,69%	0,97%	0,39%	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	438.815,31	454.097,45	1.148,010,72	3,48%	152,81%	100,00%	100,00%	100,00%	Total Non-Current Assets

ASET TETAP

Aset tetap bersih pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.115.651.990 miliar, naik signifikan hingga 153,33% dari tahun sebelumnya, terutama disebabkan adanya program revaluasi aset yang berkontribusi hingga Rp653,4 triliun terhadap nilai aset dan adanya penambahan aset tetap bersih (di luar program revaluasi) di tahun 2015 sebesar Rp34,4 triliun.

Kenaikan aset tetap bersih (di luar hasil revaluasi aset) adalah akibat realisasi pada berbagai proyek pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi di tahun 2015 dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan keandalan jaringan, meliputi diantararanya:

- Pembangunan pembangkit dalam rangka Proyek FTP I.
- Pembangunan pembangkit reguler.
- Pembangunan sistem transmisi dan distribusi.
- Penambahan areal tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai area gardu induk.
- Pembangunan sarana penunjang lainnya.

Seluruh pembangkit dan fasilitas transmisi/distribusi telah diasuransikan dengan nilai penutupan yang memadai.

Mengingat masih banyaknya kekurangan daya listrik (target rata-rata penambahan daya adalah 7 GW per tahun), maka penambahan aset tetap PLN akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang. Gambaran lebih lengkap mengenai penambahan dan prospek penambahan aset tetap diuraikan pada sub-bab "Pembangunan Pembangkit – Program 35.000 MW" dan "Pengembangan Sistim Transimisi dan Distribusi".

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

Mengalami kenaikan 46,76% dari posisi tahun 2014 sebesar Rp5.994,0 miliar menjadi senilai Rp 8.796,9 miliar, mencerminkan kemajuan pembangunan berbagai proyek pembangkit, transmisi dan distribusi. Deposito yang dibatasi penggunaannya, merupakan akun yang mencatat nilai jaminan dana yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa uang muka pembelian barang modal maupun uang muka kontrak pembangunan proyek ketenagalistrikan.

Peningkatan terjadi sejalan dengan kebijakan PLN untuk memastikan kemajuan pembangunan proyek-proyek tersebut sebelum melakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi sesuai dengan kemajuan proyek.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Mengalami kenaikan sebesar 26,16% dari Rp1.304,7 miliar menjadi sebesar Rp 1.645,4 miliar sebagai realisasi berbagai proyek pembangunan pembangkit yang dilakukan bersama-sama partner strategis. Beberapa proyek dimaksud, meliputi pembangunan PLTU mulut

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Net Property, plant and equipment in the end of 2015 stood at Rp1,115,651,990 billion, increase significantly by 153.33% from the previous year, mainly due to the asset revaluation program that contributed Rp653.4 trillion to asset value and the addition of net Property, plant and equipment (excluded from the revaluation program) in 2015 amounting to Rp34.4 trillion.

The increase in net Property, plant and equipment (excluded from the revaluation program) is due to the realization of development projects for electricity generation and the transmission and distribution network in 2015 to increase the electrification ratio and improve network reliability, including among others:

- Power plant construction in the FTP I project.
- Regular power plant construction.
- Transmission and Distribution system construction.
- Additional land and buildings for substations.
- Construction of other supporting facilities.

All the power plants and transmission / distribution facilities have been insured for an adequate amount.

Considering there is still a great demand for electricity that remains unsatisfied (the average annual target is an additional 7GW), PLN's Property, plant and equipment will continue to grow in the years to come. A more complete illustration of additional and prospective additional assets can be seen in the sub-chapter "Power Plant Construction – 35,000 MW Program" and "Developing the Transmission and Distribution System".

Bank Accounts and Restricted Use Deposits

A 46.76% increase from the position in 2014 from Rp5,994.0 billion to Rp 8,796.9 billion, reflecting the progress of various power plant construction projects and developments in the transmission and distribution system. Restricted use deposits are an account that records the value of guaranteed allocated funds to complete a particular project. The guarantee can be either an advance purchase of capital goods or down payments on construction contracts for electrical power projects.

The increase occurred in line with PLN's policy of ensuring the construction progress of such projects before implementing instalments under finance leases and operation guarantees in accordance with the project progress.

Investments in Associate Entities

An increase of 26.16% from Rp1,304.7 billion to Rp1,645.4 billion as realization of various development projects undertaken with strategic partners. Some of the intended projects include the construction of Banjarsari 2x110 MW mine mouth power plant in Palembang by PT Bukit

tambang Banjarsari 2x110 MW di Palembang oleh PT Bukit Pembangkit Innovative (kerjasama dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan pengoperasian beberapa pembangkit listrik bersama PT Geo Dipa Energi, PT Unelec, PT KOMIPO Pembangkitan Jawa Bali, dan sebagainya.

Pembangkit Innovative (in cooperation with PT Bukit Asam (Persero) Tbk and the operation of several power plants in cooperation with PT Geo Dipa Energi, PT Unelec, PT KOMIPO Pembangkitan Java Bali, and others.

Investasi pada Ventura Bersama

Naik sebesar 20,67% dari Rp1.267,9 miliar menjadi senilai Rp1.529,3 miliar sebagai akibat adanya penambahan investasi pada perusahaan eksisting dan investasi baru pada perusahaan penyedia peralatan listrik. Termasuk kedalam akun ini adalah kerjasama pada PT Indo Pusaka Berau (melalui PT Indonesia Power), PT Energi Pelabuhan Indonesia dan PT Crompton Prima Switchgear yang baru didirikan pada tahun 2014.

Investments in Joint Ventures

An increase of 20.67% from Rp1,267.9 billion to Rp 1,529.3 billion as a result of additional existing investment and new investments with electrical equipment supply companies. Included in this account is cooperation with PT Indo Pusaka Berau (through PT Indonesia Power), PT Energi Pelabuhan Indonesia and PT Crompton Prima Switchgear, which was established in 2014.

Investasi pada ventura bersama ditujukan untuk mengembangkan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri Ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak, dengan sumber pendanaan mayoritas berasal dari partner strategis sehingga tidak membebani Perseroan.

Investment in joint ventures is aimed at developing long-term growth potential as all these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries, with the majority of funding sources derived from the strategic partners so the Company does not bear the burden.

Investasi pada PT Crompton Prima Switchgear terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap upaya meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam industri terkait ketenagalistrikan, khususnya komponen-komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri. Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN dan mitranya di PT Crompton Prima dalam mendukung suksesnya pembangunan program Pembangkit 35.000 MW.

Investment in PT Crompton Prima Switchgear continues to increase as the Company's commitment to improve local content (TKDN) in electricity-related industries, specifically components that have been produced in the country. This step has also been taken to show the commitment of PLN and its partners for PT Crompton Prima to support the success of the 35,000 MW development program.

Aset Pajak Tangguhan

Merupakan akun yang mencatat adanya mutasi dari liabilitas imbalan pasca kerja (Rp10.032,91 miliar), aset tetap (Rp4.815,40 miliar), pendapatan ditangguhkan (Rp382,64 miliar), bonus (Rp130,30 miliar), dan lainnya. Nilai aset tangguhan pada tahun 2015 tangguhan sebesar Rp14.300,5 miliar dari Rp66,75 miliar pada tahun 2014.

Deferred Tax Assets

This account recorded a mutation from post employment benefits (Rp10,032.91 billion), property plant and equipment (Rp4,815.40 billion), deferred income (Rp382.64 billion), and bonus (Rp130.30 billion). The Rp14,300.5 billion deferred tax asset value in 2015 was derived from Rp66.75 billion in 2014.

Aset Tidak Lancar Lain

Terutama terdiri dari pengeluaran uang muka pengembangan proyek, uang muka pembelian batubara dan biaya dibayar dimuka untuk pembelian gas. Nilai aset tidak lancar naik 2,16% dari Rp4.409,4 miliar menjadi Rp4.504,8 miliar lebih disebabkan turunnya nilai uang muka pengembangan proyek. Sedangkan biaya dibayar dimuka untuk pembelian gas tetap naik, sejalan dengan kebijakan PLN untuk meningkatkan penggunaan gas sebagai sumber energi pembangkit dan naiknya nilai tukar Dollar Amerika Serikat. Kontrak pembelian gas biasanya dilakukan dengan menggunakan denominasi US Dollar.

Other Non Current Assets

This mainly consisted of advance payments for development projects, advances for coal purchases and prepayments for gas purchases. The value of non current assets rose 2.16% from Rp4,409.4 billion to Rp 4,504.8 billion due to the falling value of advance payments for development projects. Meanwhile, prepayments for gas purchases continued to rise in line PLN's policy of increased gas use for power generation and the rising value of the US Dollar against the rupiah. Gas purchase contracts are typically made in US Dollar denomination.

ASET LANCAR

Jumlah aset lancar Perseroan pada akhir tahun 2015 turun 7,12% menjadi Rp 79.344,8 miliar dari nilai sebesar Rp85.423,7 miliar di tahun sebelumnya. Komposisi terbesar aset lancar di tahun 2015 adalah kas dan setara kas 29,74%, diikuti piutang usaha 25,0%, piutang subsidi listrik 22,06%, dan persediaan sebesar 14,39% serta beberapa akun yang jumlahnya kurang dari 6% terhadap total aset lancar. Komposisi aset lancar tercantum pada tabel berikut.

CURRENT ASSETS

The Company's total current assets as of the end of 2015 fell 7.12% to Rp 79,344.8 billion from Rp85,423.7 billion in the previous year. The composition of current assets in 2015 was cash and cash equivalent at 29.74%, followed by trade receivables at 25.0%, electricity subsidy receivables 22.06%, and inventories at 14.39%, as well as several accounts totalling less than 6% of total current assets. The current asset composition is listed in the following table.

Kas dan setara kas

Posisi kas dan setara kas pada tahun 2015 turun 12,97% menjadi senilai Rp23.596,3 miliar dari nilai sebesar Rp27.111,5 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan saldo kas dan setara kas tersebut salah satunya dikontribusikan turunnya nilai penempatan dana Perseroan di bank-bank nasional. (Lihat juga uraian "Jumlah Pelanggan dan "Arus Kas", dan "Piutang Usaha").

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in 2015 fell 12.97% to Rp23,596.3 billion from Rp27,111.5 billion in the previous year. The fall in cash and cash equivalents balance is partly due to a decline in value of the Company's funds in national banks. (See also the description "Number of Customers" and "Cash Flow" and "Accounts Receivable").

Kas dan setara kas pada tahun 2015 terdiri dari kas di tangan sebesar Rp12,74 miliar, ditempatkan di rekening giro dalam mata uang asing maupun Rupiah sebesar Rp21.624,8miliar yang merupakan 91,6% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas, serta deposito berjangka sebesar Rp1.958,8 miliar atau sebesar 8,3% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perusahaan dalam bentuk deposito, ditempatkan diantaranya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin.

Cash and cash equivalents in 2015 consisted of cash in hand of Rp12.74 billion in current accounts in foreign currency and Rupiah amounting to Rp21,624.8 billion, which is 91.6% of total cash and cash equivalents, as well as time deposits of Rp1,958.8 billion or 8.3% of total cash and cash equivalents. The Company's cash and cash equivalents in the form of deposits are in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Bukopin.

Dari penempatan dana tersebut PT PLN (Persero) mendapatkan bunga antara 4,5%-9,5% untuk penempatan dana dalam Rupiah dan 0,73%-0,83% untuk penempatan dana dalam mata uang asing.

From these funds, PT PLN (Persero) earns interest at between 4.5%-9.5% on Rupiah deposits and 0.73%-0.83% on foreign currency deposits.

Dengan pola penempatan dana seperti tersebut Perseroan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp627,4 miliar, turun 7,42% dari Rp584,1 miliar di tahun 2014.

From this pattern of fund placement, the Company earned Rp627.4 billion in interest, decrease 7.42% from Rp584.1 billion in 2014.

Rincian penempatan dana Kas dan Setara kas disajikan pada tabel berikut.

Details of the Cash and Cash Equivalent fund placement is as follows.

Posisi dan Penempatan dana Kas dan Setara Kas
Placement of Cash and Cash Equivalents

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar Billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
KAS	9,73	9,57	12,74	(1,59%)	33,05%	0,04%	0,04%	0,05%	CASH
REKENING BANK	21.217,49	23.294,01	21.624,77	9,79%	(7,17%)	83,11%	85,92%	91,64%	RESTRICTED CASH IN BANKS
Bank - Pihak berelasi	15.512,33	17.077,47	16.926,81	10,09%	(0,88%)	60,76%	62,99%	71,73%	Banks - Related Parties
Bank Rakyat Indonesia	5.491,61	8.256,42	8.980,84	50,35%	8,77%	21,51%	30,45%	38,06%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	4.933,38	3.863,99	4.193,60	(21,68%)	8,53%	19,32%	14,25%	17,77%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	5.087,34	4.927,71	3.749,48	(3,14%)	(23,91%)	19,93%	18,18%	15,89%	Bank Negara Indonesia

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar Billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
Bank Tabungan Negara	0,00	29,36	2,90	100,00%	(90,13%)	0,00%	0,11%	0,01%	Bank Tabungan Negara
Bank - Pihak ketiga	5.705,16	6.216,54	4.697,96	8,96%	(24,43%)	22,35%	22,93%	19,91%	Banks - Third Parties
Bank Bukopin	4.099,46	3.703,07	2.240,98	(9,67%)	(39,48%)	16,06%	13,66%	9,50%	Bank Bukopin
Bank Internasional Indonesia	205,10	72,35	2,07	(64,72%)	(97,14%)	0,80%	0,27%	0,01%	Bank Internasional Indonesia
Bank Danamon	56,19	80,18	77,99	42,69%	(2,73%)	0,22%	0,30%	0,33%	Bank Danamon
Bank Central Asia	356,66	629,00	456,29	76,36%	(27,46%)	1,40%	2,32%	1,93%	Bank Central Asia
Lain-lain	987,76	1.731,93	1.920,63	75,34%	10,89%	3,87%	6,39%	8,14%	Others
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA	4.302,75	3.807,94	1.958,84	(11,50%)	(48,56%)	16,85%	14,05%	8,30%	CASH EQUIVALENTS - TIME DEPOSITS
Bank - Pihak berelasi	2.714,97	2.235,93	1.249,54	(17,64%)	(44,12%)	10,63%	8,25%	5,30%	Banks - Related Parties
Bank Rakyat Indonesia	1.050,02	1.092,59	651,99	4,05%	(40,33%)	4,11%	4,03%	2,76%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	801,26	511,77	237,55	(36,13%)	(53,58%)	3,14%	1,89%	1,01%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	863,69	631,56	360,00	(26,88%)	(43,00%)	3,38%	2,33%	1,53%	Bank Negara Indonesia
Bank - Pihak ketiga	1.587,79	1.572,02	709,30	(0,99%)	(54,88%)	6,22%	5,80%	3,01%	Banks - Third Parties
Bank Bukopin	1.476,13	1.452,55	557,50	(1,60%)	(61,62%)	5,78%	5,36%	2,36%	Bank Bukopin
Lain-lain	111,65	119,47	151,80	7,00%	27,06%	0,44%	0,44%	0,64%	Others
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	25.529,97	27.111,53	23.596,34	6,19%	(12,97%)	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENT

Piutang Usaha

PLN mencatat Piutang Usaha dengan membagi pelanggan kedalam dua kelompok besar, yakni piutang pihak berelasi – terdiri dari pelanggan BUMN – dan piutang pihak ketiga, terdiri dari kelompok pelanggan umum, TNI dan Polri serta Lembaga Pemerintah dan Kementerian.

Saldo piutang BUMN (pihak berelasi) di tahun 2015 adalah sebesar Rp569,08 miliar, turun 2,26% dari nilai sebesar Rp582.3 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi penghematan oleh BUMN sehubungan kondisi perekonomian dan adanya pengaruh penyelesaian TTL.

Piutang usaha-pihak ketiga - pelanggan umum naik 3,26% menjadi Rp18.564 miliar dari senilai Rp18.912,61 miliar di tahun sebelumnya, terutama dikontribusikan oleh naiknya jumlah pelanggan dan adanya penyesuaian TTL. Piutang usaha TNI dan Polri turun 5,50% menjadi sebesar Rp430,7 miliar dari nilai sebesar Rp455,7 miliar terutama dikontribusikan oleh realisasi pelunasan tagihan, sedang piutang Lembaga dan Kementerian naik tipis sebesar 5,7% menjadi Rp1.129,9 miliar dari Rp1.074,5 miliar di tahun sebelumnya.

Accounts Receivable

PLN books Accounts Receivable by dividing customers into two major groups, namely accounts receivable from related parties – comprised of SOE customers - and third party receivables, consisting of general customers, the armed forces and national police, as well as government institutions and ministries.

The SOE accounts receivable balance (related parties) in 2015 amounted to Rp569.08 billion, down 2.26% from Rp582.3 billion in the previous year. This decrease was caused by SOE savings related to economic conditions and the influence of electricity tariff adjustments.

Third party accounts receivable – general customers rose 3.26% to Rp18,564 billion from 18,912.61 billion in the previous year, mainly from an increase in the number of customers and electricity tariff adjustments. Trade receivables for the armed forces and national police fell 5.50% to Rp430.7 billion from Rp455.7 billion mainly as a result of bill payments, while receivables from Government Institutes and Ministries edged up 5.7% to Rp1,129.9 billion from Rp1,074.5 billion on the previous year.

PLN menerapkan kebijakan untuk melakukan pemutusan aliran listrik jika ada keterlambatan pembayaran pada periode tertentu. Penerapan sistem aplikasi AP2T maupun P2APST, membuat PLN lebih cepat mendeteksi adanya keterlambatan pembayaran dan mempercepat tindakan penyelesaian. Namun jika piutang tersebut menyangkut kepentingan umum yang lebih besar, PLN menunda penyelesaian, sehingga jumlah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 360 hari, kembali naik 98,12% menjadi sebesar Rp481,6 miliar dari Rp243,1 miliar di tahun 2014.

Kondisi tahun 2015 yang diwarnai dengan kurang kondusifnya perekonomian dalam negeri sepanjang tahun, membuat PLN menempuh kebijakan tersebut.

Jumlah cadangan piutang ragu-ragu yang harus disisihkan meningkat 44,35% menjadi sebesar Rp862,8 miliar dari posisi Rp597,6 miliar di tahun 2014 seiring naiknya jumlah piutang usaha. PLN terus berupaya menyelesaikan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 360 hari ini sesuai peraturan yang berlaku.

PLN implements a policy of terminating electricity connections for late payments over a certain period. Implementation of the AP2T and P2APST application systems have accelerated PLN's detection of payment delays and accelerated follow up actions. However, if the receivables concerns the greater public interest, PLN suspends settlement, thus the amount of receivables overdue for more than 360 days once again rose 98.12% to Rp481.6 billion from Rp243.1 billion in 2014.

Conditions in 2015 were characterized by a less than conducive domestic economy throughout the year, resulting in PLN enacting this policy.

Total reserves for doubtful accounts increased 44.35% to Rp862.8 billion from Rp597.6 billion in 2014, in line with the increased number of accounts receivable. PLN continues to work to resolve receivables overdue for more than 360 days in accordance with applicable regulations.

Piutang Usaha
Company Receivables

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar Billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
Pihak berelasi									Related Parties
Badan Usaha Milik Negara	408,67	582,26	569,09	42,48%	(2,26%)	2,60%	2,99%	2,87%	SOE - net
Pihak ketiga									Third Parties
Umum	14.641,15	17.977,48	18,564,36	22,79%	3,26%	93,27%	92,22%	93,60%	Public
TNI dan Polri	339,87	455,73	430,67	34,09%	(5,50%)	2,17%	2,34%	2,17%	Military and Police
Institusi lainnya	772,17	1,074,45	1,129,93	39,15%	5,16%	4,92%	5,51%	5,70%	Institution and Ministries
Sub jumlah	15.753,19	19.507,66	20.124,96	23,83%	3,16%	100,36%	100,07%	101,47%	Sub Total
Penyisihan piutang	(464,93)	(595,05)	(859,82)	27,99%	44,49%	(2,96%)	(3,05%)	(4,34%)	Allowance for impairment losses
Pihak ketiga - bersih	15.288,27	18.912,61	19.265,14	23,71%	1,86%	97,40%	97,01%	97,13%	Net - Third Parties
Total Piutang Usaha - Bersih	**15.696,94**	**19.494,87**	**19.834,23**	**24,20%**	**1,74%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**Net Receivable**

PIUTANG SUBSIDI LISTRIK

Turun sebesar 9,23% menjadi senilai Rp 17.051,01 milar dari posisi sebesar Rp19.280,9 miliar di tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh belum terealisirnya subsidi listrik pada tahun 2014 disamping disebabkan oleh naiknya jumlah pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan sejalan dengan realisasi program peningkatan rasio elektrifikasi yang dicanangkan oleh Perseroan dan Pemerintah.

ELECTRICITY SUBSIDY RECEIVABLES

Decrease 9.23% to Rp 17,051.01 billion from Rp19,280.9 billion in the previous year. This decrease was mainly caused by the lack of electricity subsidy realization in 2014, as well the rising number of customers. The increase in customer numbers was in line with realization of the electrification ratio improvement program initiated by the Company and the Government.

PETTY CASH CARD TEROBOSAN PENGELOLAAN *CASH* AGAR LEBIH TERKONTROL DAN LEBIH EFISIEN

PETTY CASH CARD
BREAKTHROUGH FOR MORE CONTROLLED AND EFFICIENT CASH MANAGEMENT

PLN sukses melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan efisiensi, pengendalian dan pengelolaan keuangannya secara efektif dan *cash less*. Salah satunya adalah keberhasilan dalam mengimplementasikan *Petty Cash Card*.

PLN adalah perusahaan BUMN pertama yang mengimplementasikan *Petty Cash Card*. *Cash Card* merupakan pengganti kas kecil berupa kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank Mitra atas inisiasi PLN yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil yang terintegrasi dengan program Imprest Terpusat.

Petty Cash Virtual Account Debet dengan menggunakan *Cash Card* (Kartu ATM) ini diimplementasikan dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan yang tidak diproses melalui *Purchase Order* (PO) untuk keperluan yang bersifat Insidentil dan nilainya relatif kecil.

Tujuan dari *Virtual Account Debet Cash Card* tersebut adalah : Mengontrol pengeluaran kas kecil; Mengurangi jumlah rekening bank yang terdapat di UP dan Sub UP;*cash less* dan membuat UP dan Sub UP lebih fokus ke pekerjaan utamanya.

Berbagai *benefit* yang diperoleh dari implementasi *Petty Cash Card* ini. Diantaranya adalah tidak perlu ada rekening bank untuk di level UP dan Sub UP, transaksi kas kecil bisa menggunakan kartu ATM dan bisa juga di teller bank, masing-masing kartu dapat diberikan limit transaksi. Penggunaan kas kecil dapat dimonitor melalui CMS Bank yang sudah terintegrasi dengan ERP PLN, UP danSub UP lebih fokus kepada operasional dan pelayanan.

Petty Cash Card pertama kali diluncurkan pada 12 September 2012. Hingga saat ini, Kas Kecil *(Petty Cash)* dengan *Virtual Account* menggunakan Kartu ATM *(Cash Card)* sudah diimplementasikan di 38 Unit PLN di seluruh Indonesia. Unit PLN yang belum menggunakan fasilitas *Cash Card* tinggal 5 unit. Sedangkan terdapat 3 unit PLN yang tidak mengunakan *Cash Card* karena tidak memiliki entitas dibawahnya. Bank Mitra yang digandeng PLN untuk memfasilitasi *Cash Card* ini yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, BNI dan Bukopin. Kartu ATM *(Cash Card)* PLN yang sudah dikeluarkan oleh keempat bank tersebut hingga saat ini sudah mencapai 1.346 kartu.

PLN has successfully made several breakthroughs to improve efficiency, effectively control and manage its finances and become cashless. One of these is the successful implementation of the Petty Cash Card.

PLN is the first state-owned company to implement the Petty Cash Card, which is a debit card issued by Partner Banks to replace petty cash. PLN initiated the use of this card for petty cash management integrated into the centralized Imprest program.

Use of the Petty Cash Virtual Account Debit Cash Card (ATM card) has been implemented to pay for incidental and relatively small value operational activities that are not processed through Purchase Order (PO).

The purposes of the Virtual Account Debit Cash Card are: Controlling petty cash spending; Reducing the number of bank accounts at UP and Sub UP; being cashless and facilitating UP and Sub UP to focus more on their main tasks.

Various benefits derived from the Petty Cash Card implementation include there being no need for a bank account at UP and Sub UP level, petty cash transactions can be made with ATM cards or through bank tellers, each card can have a transaction limit. Petty cash use can be monitored via the Bank CMS, which is already integrated with PLN ERP, so the UP and Sub UP can be more focused on operations and service.

The Petty Cash Card was first launched on 12 September 2012. To date, the Petty Cash Virtual Account using an ATM Card (Cash Card) has been implemented in 38 PLN units across Indonesia. There are only five remaining PLN Units not using the Cash Card facility. Meanwhile, there are three PLN units not using the Cash Card because they have no subsidiaries. Bank Partners working with PLN on the Petty Cash Card are Bank BRI, Bank Mandiri, BNI and Bukopin. So far, a total of 1,346 PLN ATM Cards (Cash Cards) have been issued by these four banks.

Dampak penghematan kebutuhan subsidi sebagai akibat naiknya tarif listrik secara berkala untuk beberapa golongan tarif tertentu langsung terefleksikan pada jumlah subsidi yang dialokasikan dan dibayarkan pada tahun operasional 2015.

The subsidy requirement savings impact resulting from periodic rising electricity rates for certain classes of tariff is directly reflected in the amount of subsidy allocated and paid during operational year 2015.

Persediaan

Nilai saldo Persediaan turun 1,65% menjadi sebesar Rp11.415,9 miliar dari posisi Rp11.607,9 miliar di tahun 2014. Nilai persediaan terbesar adalah persediaan bahan bakar dan pelumas, diikuti persediaan umum, persediaan switchgear& jaringan serta alat ukur, pembatas dan kontrol diikuti dengan kabel dan transformator.

Nilai persediaan untuk komponen bahan bakar dan pelumas di tahun 2015 turun 9,25% menjadi sebesar Rp7.165,5 miliar dari Rp7.895,5 miliar di tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia. Sekalipun volume pembelian BBM relatif sama, sedangkan volume pembelian pelumas naik, penurunan harga minyak dunia dapat mengkompensasi kenaikan tersebut.

Sementara komponen nilai persediaan umum, *Switchgear*, alat pengukur dan pengendali naik bervariasi. Hal tersebut terjadi akibat adanya realisasi pemeliharaan pembangkit serta adanya kebutuhan peningkatan kualitas operasional, yang mensyaratkan penggantian maupun penambahan alat pengukur dan pengendali.

Sekalipun aplikasi pengelolaan operasional berbasis teknologi informasi, seperti ERP yang telah roll-out diseluruh unit bisnis, aplikasi EAM dan aplikasi GOLS di beberapa unit bisnis tetap dioperasikan, operasional beberapa pembangkit baru dan kebutuhan pemeliharaan beberapa pembangkit berikut jaringan transmisi-distribusi dan gardu induk maupun gardu distribusi membuat nilai persediaan meningkat. Beberapa komponen persediaan yang harus di impor pada saat nilai rupiah melemah juga berpengaruh terhadap nilai persediaan yang dicatat dalam mata uang rupiah.

Jumlah persediaan tersebut, sebenarnya sudah mencerminkan nilai minimal sebagai hasil aplikasi pengelolaan berbasis teknologi informasi, dengan tetap mengacu pada level yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional yang berkualitas.

Inventories

The Inventories balance fell 1.65% to Rp11,415.9 billion from Rp11,607.9 billion in 2014. The largest value in inventories was fuel and lubricants, followed by general inventories, switchgear and network, as well as gauges, limiters and controls, followed by cables and transformers.

The value of the fuel and lubricant component in 2015 fell 9.25% to Rp7,165.5 billion from Rp7,895.5 billion the previous year, mainly due to lower global oil prices. Although the fuel purchase volume was relatively unchanged while the volume of lubricant purchases rose, the decline in global oil prices compensated for this increase.

Meanwhile, the component value for general inventories, Switchgear, gauges and controllers rose by varied amounts. This was due to plant maintenance and the need to improve operations quality, which required the replacement or addition of gauges and controllers.

Despite the roll out across all business units of information technology-based operational management applications such as ERP, the EAM application and GOLS application remain operational in several business units. The operation of several new power plants and maintenance requirements of several power plants and their associated transmission-distribution network and substations caused the value of inventories to increase. Some inventories components had to be imported at a time when the rupiah was weak, which also affected the value of inventories recorded in the rupiah currency.

The amount of inventories is in fact in a minimum value due to information technology-based management applications, while continuing to maintain adequate levels to support high quality operational activities.

Nilai Liabilitas PLN (Rp miliar)
PLN Liability Value (Rp billion)

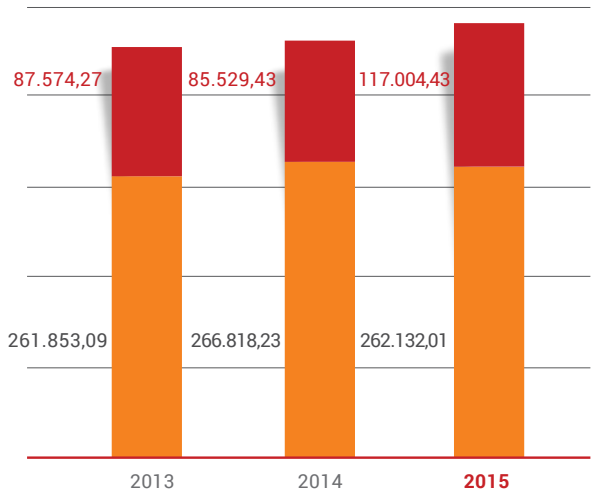

Komposisi Liabilitas PLN (%)
PLN Liability Composition (%)

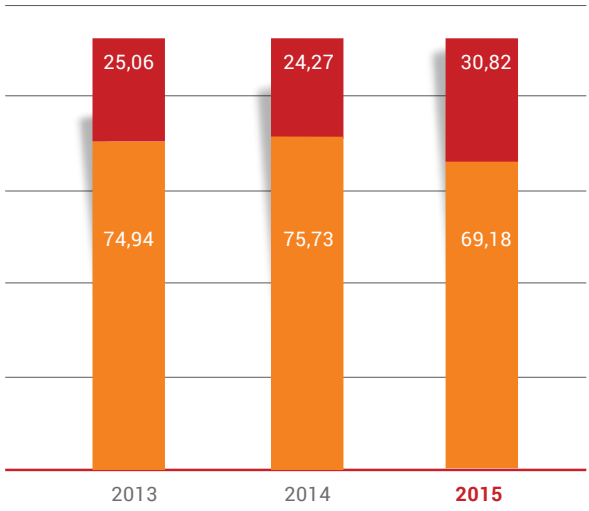

Liabilitas Jangka Pendek Short Therm Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Long Therm Liabilities

LIABILITAS

Total liabilitas PLN di tahun 2015 naik 7,53% menjadi sebesar Rp389.296 miliar dari Rp344.065 miliar di tahun sebelumnya. Liabilitas di tahun 2015 terdiri dari 69,18% liabilitas jangka panjang dan 30,82% liabilitas jangka pendek. Peningkatan total liabilitas terjadi pada liabilitas jangka pendek yang naik 36,50% menjadi sebesar Rp116.767,5 miliar. Untuk liabilitas jangka pendek naik 36,5% menjadi sebesar Rp116.767,5 miliar, kontributor utama kenaikannya adalah utang pajak, disusul oleh utang usaha, uang jaminan langganan serta utang bank dan surat utang jangka menengah. Kenaikan utang pajak terjadi karena adanya kewajiban pajak dari pelaksanaan revaluasi aset tetap yang masih belum diselesaikan.

Sesuai dengan sifat usaha yang padat modal dan periode pengembalian investasi yang berjangka waktu lama, komposisi liabilitas PLN mayoritas adalah liabilitas jangka panjang. Seperti ditunjukan dalam grafik berikut, selama tiga tahun terakhir prosentase liabilitas jangka panjang sangat dominan, yakni berada dikisaran 80% dari total liabilitas PLN.

LIABILITIES

PLN's total liabilities in 2015 rose 7.53% to Rp389,296 billion from Rp344,065 billion the previous year. Liabilities in 2015 comprised 69.18% long term liabilities and 30.82% short term liabilities. The rise in total liabilities occurred due to the 36.50% increase in short term liabilities to Rp116,767.5 billion. Meanwhile, short term liabilities rose 36.5% to Rp116,767.5 billion with the main contributor being taxes payable, followed by accounts payable, customer security deposits, as well as bank loans and medium term notes. The rise in taxes payable is a result of taxes incurred from the fixed asset revaluation, which is still ongoing.

In line with the nature of PLN's capital intensive business and the long term return on investment, PLN's liability composition is primarily long term. As shown in the following graph, during the last three years, the percentage of long term liabilities is very dominant, at approximately 80% of PLN's total liabilities.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang pada akhir tahun 2015 turun 1,8% menjadi Rp262.119 miliar dari nilai sebesar Rp266.818 miliar di tahun sebelumnya (setelah adanya penyajian kembali). Komposisi liabilitas jangka panjang terdiri atas: utang obligasi sebesar 30,54%, utang bank dan surat utang jangka menengah sebesar 29,69%, utang sewa pembiayaan sebesar 8,22%, liabilitas imbalan kerja sebesar 14,26%, penerusan pinjaman sebesar 11,14%, dan beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing kurang dari 3,0%.

LONG TERM LIABILITIES

As of end 2015, long term liabilities fell 1.8% to Rp262.119 billion from Rp266,818 billion the previous year (after restatement). The composition of short term liabilities comprised: bonds payable at 30.54%, bank loans and medium-term notes at 29.69%, debt finance leases at 8.22%, employee benefit liabilities at 14.26%, forwarding loans (two step loans) at 11.14%, and several accounts each with a total below 3.0%.

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	6,152.67	8,632.99	5.48	40.31%	(99.94%)	2.3%	3.2%	0.0%	Deferred tax liabilities - net
Utang jangka panjang - setelah dikurangi									Long-term liabilities - net of current maturities
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun									Net of current maturities
Penerusan pinjaman	29.498,06	26.453,07	29.205,24	(10,32%)	10,40%	11,27%	9,91%	11,14%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	8.578,72	8.371,93	8.194,69	(2,41%)	(2,12%)	3,28%	3,14%	3,13%	Government loans
Utang sewa pembiayaan	28.669,92	22.758,96	21.556,62	(20,62%)	(5,28%)	10,95%	8,53%	8,22%	Lease liabilities
Utang bank	66.457,95	70.400,17	77.828,87	5,93%	10,55%	25,38%	26,39%	29,69%	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi dan sukuk ijarah	81.017,99	81.672,56	80.043,34	0,81%	(1,99%)	30,94%	30,61%	30,54%	Bonds payable
Utang listrik swasta	7.466,11	7.343,51	7.849,06	(1,64%)	6,88%	2,85%	2,75%	2,99%	Payable to private party
Utang pihak berelasi	6,91	7,33	2,57	6,15%	(65,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	Payable to related party
Liabilitas imbalan kerja	33.783,62	41.078,94	37.378,47	21,59%	(9,01%)	12,90%	15,40%	14,26%	Employee Benefits Obligation
Utang lain-lain	221,15	98,77	67,68	(55,34%)	(31,48%)	0,08%	0,04%	0,03%	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**261.853,09**	**266.818,23**	**262.132,01**	**1,90%**	**(1,76%)**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**Total Non-current Liabilities**

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini menunjukkan pencatatan nilai saldo pembelian daya listrik oleh PLN terhadap pembangkit listrik milik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) Tanjung Jati B. Akun utang sewa pembiayaan di tahun 2015 mencatatkan sedikit penurunan, sebesar 5,28% menjadi sebesar Rp21.556,6 miliar, dikarenakan adanya kenaikan pembayaran saldo utang yang jatuh tempo.

DEBT FINANCE LEASES

This account shows the balance of electricity purchases made by PLN from Independent Power Producer/IPP Tanjung Jati B. The debt finance leases account in 2015 booked a slight fall of 5.28% to Rp21,556.6 billion due to the increase in payables falling due.

Utang Obligasi

Posisi utang obligasi mengalami penurunan sebesar 1,99% dari posisi tahun 2014, menjadi sebesar Rp80.043,34 miliar. Hal ini karena pada tahun 2015 PLN tidak menerbitkan obligasi baru. Kenaikan lebih disebabkan oleh adanya dampak pelemahan nilai tukar rupiah, yang menyebabkan saldo obligasi berdenominasi mata uang asing meningkat nilainya ketika dicatat dalam mata uang rupiah.

Bonds Payable

The bonds payable position fell 1.99% from the 2014 position to Rp80.043,34 billion as PLN did not issue any new bonds in 2015. The increase was mainly due to the weakening of the rupiah, which resulted in the foreign currency bonds balance rising when recorded in rupiah.

PLN menerbitkan obligasi untuk membiayai berbagai proyek pembangunan instalasi pembangkitan, transmisi maupun distribusi.

PLN issues bonds to finance various power plant installation projects, as well as transmission and distribution projects.

Utang Bank dan Surat Utang Jangka Menengah

Naik 10,55% dari posisi saldo tahun 2014 menjadi sebesar Rp77.828,87 miliar. Peningkatan terutama berasal dari pinjaman program pembangunan pembangkit reguler, selanjutnya dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap 1.

Peningkatan akun ini lebih banyak berasal dari pencairan pinjaman bank dalam negeri yakni BRI, BNI dan Bank DKI selain dari bank luar negeri yakni The Export-Import Bank of China.

Pinjaman bank dalam negeri, yakni BRI, BNI dan DKI dilakukan untuk membiayai beberapa proyek konstruksi rutin yang dilakukan oleh PLN (lihat catatan 26 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian).

Sedangkan pinjaman Percepatan Pembangunan Pembangkit dilakukan untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

Bank Loans and Medium Term Notes

Increase 10.5% from the balance in 2014 to Rp77,828.87 billion. The primary reason for the increase is the loan program for the regular power plant construction program, followed by the acceleration of 10,000 MW Stage 1 power plant construction.

The majority of the rise in this account is derived from loan disbursement from the domestic banks BRI, BNI and DKI, as well as overseas bank The Export-Import Bank of China.

Loans from the domestic banks, BRI, BNI and DKI, were taken to finance several routine construction projects conducted by PLN (see Note 26 of the Audited Consolidated Financial Statement).

Meanwhile, the loan for Power Plant Construction Acceleration is 85% financed by an Engineering Procurement and Construction (EPC) contract for the acceleration program. This loan is fully guaranteed by the Government of Indonesia pursuant to Presidential Regulation (PP) Num. 91 of 2007 replacing PP Num. 86 of 2006, on the Provision of Government Guarantees to Accelerate Development of Coal-Fired Power Plants.

Penerusan Pinjaman

Naik 10,40% dari posisi tahun 2014 menjadi sebesar Rp29.205,24 miliar, karena adanya pencairan pinjaman dan adanya pengaruh pelemahan mata uang rupiah. Sebagian pinjaman penerusan ini diperoleh dalam mata uang asing.

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan untuk membiayai proyek-proyek PLN.

Two Step Loans

Increase 10.40% from the 2014 position to Rp29,205.24 billion due to loan disbursement and the impact of the weakening rupiah. The two step loan is in foreign currency.

This account is Government foreign loan that there is no collateral and be continued to the Company to fund PLN projects.

Penyisihan Imbalan Kerja

Jumlah penyisihan untuk manfaat pensiun dan kesejahteraan karyawan pada tahun ini turun 9,01% menjadi Rp37.378,47miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar Rp41.078,94 miliar (setelah penyajian kembali).

Penurunan disebabkan karena mulai 1 Januari 2015, PLN dan entitas anak menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Dengan penerapan standar ini, terdapat beberapa perubahan terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Salah satu perubahan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah pengakuan keuntungan dan

Provision for Employee Benefits

The total provision for retirement benefits and employee benefits this year fell 9.01% to Rp37,378.47 billion compared to the previous year's Rp41,078.94 billion (after restatement).

The fall was caused as a result of PLN and its subsidiaries adopting PSAK Num. 24 (revised 2013) "Employee Benefits" effective 1 January 2015.

With the adoption of this standard, there have been some changes with respect to recognition, measurement and disclosure. One of these changes that has had a significant impact on the financial statements of the Company and its

kerugian aktuarial. Sebelumnya, Perusahaan dan entitas anak menggunakan metode koridor dan menangguhkan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial ke Laba Rugi.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anak harus mencatat keuntungan dan kerugian aktuarial secara langsung pada Pendapatan Komprehensif Lainnya. Dilakukan juga reklasifikasi jumlah yang sudah diakui di Pendapatan Komprehensif Lainnya ke Laporan Laba Rugi tidak diperkenankan. (Lihat uraian lebih lengkap di Catatan 49. "Liabilitas Imbalan Kerja" pada Laporan Audit Konsolidasi PLN 2015).

subsidiaries is the recognition of actuarial gains and losses. Previously, the Company and its subsidiaries used the corridor method and deferred the recognition of actuarial gains and losses to the Profit and Loss Statement.

Now, the Company and its subsidiaries must record actuarial gains and losses directly in Other Comprehensive Income. It is not permissible to reclassify the amount already recognized in Other Comprehensive Income to the Profit and Loss Statement. (See a more complete description in Note 49 "Employee Benefits Liabilities" in the PLN 2015 Audited Consolidated Financial Statement).

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek pada akhir tahun 2015 naik 36,51% dari tahun sebelumnya sebesar Rp85.529,43 miliar (setelah penyajian kembali), menjadi senilai Rp117.004,43 miliar. Komposisi liabilitas jangka pendek diantaranya meliputi utang usaha kepada ketiga sebesar 19,86%, biaya masih harus dibayar 11,36%, uang jaminan langganan 4,58%, utang pajak 1.314,39, utang bank dan surat utang jangka panjang menengah yang akan jatuh tempo 23,35%, sewa pembiayaan sebesar 19,86%, utang lain lain sebesar 23,54% utang obligasi sebesar 1.033,21% dan beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing di bawah 3%.

SHORT TERM LIABILITIES

Short term liabilities as of end 2015 had risen 36.51% on the previous year's Rp85,529.43 billion (after restatement) to Rp117,004.43 billion. The short term liabilities composition is accounts payable to third parties at 19.86%, accrued expenses at 11.36%, customer security deposits at 4.58%, taxes payable at 1,314.39%, current maturities of bank loans and medium term notes at 23.35%, finance leases at 19.86%, other payables at 23.54%, bonds payables at 1,033.21% and several other accounts with respective totals of under 3%.

Posisi Liabilitas Jangka Pendek Perseroan (Rp miliar)
Company's Short-Term Liabilities Position (billion Rp)

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
Utang usaha	28.373,78	28.340,10	29.004,55	(0,12%)	2,34%	32,40%	33,13%	24,84%	Trade accounts payable
Utang pajak	1.222,39	1.151,25	15.131,86	(5,82%)	1214,39%	1,40%	1,35%	12,96%	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	7.057,45	7.552,66	8.410,97	7,02%	11,36%	8,06%	8,83%	6,99%	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	10.107,40	10.828,52	11.324,90	7,13%	4,58%	11,54%	12,66%	9,70%	Customer security deposits
Utang biaya proyek	1.061,45	857,73	1,113,83	(19,19%)	29,86%	1,21%	1,00%	0,95%	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	990,91	1.306,98	1.533,70	31,90%	17,35%	1,13%	1,53%	1,31%	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun									Current portion of long term liabilities
Penerusan pinjaman	3.208,98	2.644,61	2.505,35	(17,59%)	(5,27%)	3,66%	3,09%	2,15%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	293,79	293,79	293,79	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,25%	Government loans
Utang sewa pembiayaan	2.972,99	2.874,58	3.445,60	(3,31%)	19,86%	3,39%	3,36%	2,95%	Lease liabilities
Utang bank	8.387,88	9.527,68	11.752,46	13,59%	23,35%	9,58%	11,14%	10,07%	Bank Loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2.808,00	805,00	9.122,35	(71,33%)	1033,21%	3,21%	0,94%	7,81%	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Utang listrik swasta	278,56	299,23	321,16	7,42%	7,33%	0,32%	0,35%	0,28%	Electricity Purchase Payables

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan Change		Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar billion)			2013-2014	2014-2015	2013	2014	2015	
Utang pihak berelasi	2,79	-	-	(100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	2.584,48	2.700,11	2.848,66	4,47%	5,50%	2,95%	3,16%	2,44%	Employee Benefits Obligation
Utang lain-lain	18.223,41	16.347,20	20.195,25	(10,30%)	23,54%	20,81%	19,11%	17,30%	Others Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**87.574,27**	**85.529,43**	**117.004,43**	**(2,33%)**	**36,51%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**Total Current Liabilities**

Utang Usaha

PLN melakukan pembelian beberapa jasa dan barang tertentu dari para pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, dengan term pembayaran sesuai kesepakatan dan dicatat pada akun utang usaha. Beberapa jasa dan bahan pokok yang dipasok tersebut meliputi: bahan bakar (BBM, Batubara dan Gas), tenaga listrik, pelumas dan jasa konsultasi dengan pemasok utama adalah perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Paiton Energy, PT Jawa Tower dan sebagainya.

Mengingat kesamaan pada struktur kepemilikan perusahaan pemasok, maka utang usaha PLN dicatat pada dua sub-akun, yakni utang usaha dengan pihak berelasi dan utang usaha pada pihak ketiga lainnya.

Utang usaha pihak berelasi naik 2,34% menjadi Rp29.004,55 miliar dari posisi di tahun 2014, sebesar Rp28.340,10 miliar (setelah penyajian kembali). Kenaikan ini terjadi karena peningkatan pembelian tenaga listrik sebesar Rp1.215,64.

Utang usaha kepada pihak ketiga naik 25,82% dari posisi tahun sebelumnya menjadi Rp19.713,71 miliar, terutama karena naiknya pembelian beragam barang dan jasa lainnya (Lihat catatan 30. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN).

Biaya Masih Harus Dibayar

Naik sebesar 11,36% dari tahun 2014 sebesar Rp7.552,66 miliar (setelah penyajian kembali) menjadi sebesar Rp8.410,97 miliar disebabkan pembayaran kewajiban pihak berelasi yang akan jatuh tempo, meliputi: utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank, utang sewa pembiayaan, bonus & insentif prestasi kerja, utang obligasi, utang listrik swasta dan utang bank.

Uang jaminan langganan.

Naik sebesar 4,58% dari posisi tahun 2014 sebesar Rp10.828,52 miliar, menjadi sebesar Rp11.324,90 miliar.

Accounts Payable

PLN purchases some goods and services from certain key suppliers to meet its operational needs with agreed terms of payment that are recorded in accounts payable. Some of the staple services and goods supplied include: fuel (oil fuel, coal and gas), electricity, lubricants and consultation services with key suppliers that are large companies, such as PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Paiton Energy, PT Jawa Tower and so on.

Given the similarities in ownership structure with the supplier companies, PLN's accounts payable are recorded in two sub-accounts: accounts payable to related parties and accounts payable to third parties.

Accounts payable to related parties rose by 2.34% to Rp29,004.55 billion from the 2014 position of Rp28,340.10 billion (after restatement). This is because an improvement purchases of electricity.

Accounts payables to third parties rose 25.82% from the previous year's Rp19,713.71 billion, mainly due to increased purchases of a variety of other goods and services (See Note 30 of PLN's Consolidated Audited Financial Statement).

Accrued Expenses

Increase 11.36% from 2014's Rp7,552.66 billion (after restatement) to Rp8,410.97 billion due to the payment of imminent maturities to related parties, including: Government and non bank Government financial institution loans, lease liabilities, bonus & performance incentives, bonds payable, electricity purchase payable and bank loans.

Customer Security Deposits

Increase 4.58% from 2014's Rp10,828.52 billion to Rp11,324.90 billion.

Akun ini mencatat uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besaran daya dan golongan tarif. Berlakunya ketentuan TTL baru dan naiknya jumlah pelanggan baru, maupun pelanggan yang menambah daya membuat jumlah uang jaminan meningkat.

Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account records customer security deposits determined based on the amount of power supplied and tariffs. The implementation of new electricity tariffs and the increase in new customers, as well as the rise in customers increasing their power supply, resulted in customer security deposits rising.

The security deposit is returned when customers terminate their agreement and unpaid electricity bills are taken into account.

Utang bank dan surat utang jangka menengah

Naik 23,35% dari posisi tahun 2014 yang sebesar Rp9.527,68 miliar menjadi sebesar Rp11.752,46 miliar terutama karena telah jatuh temponya beberapa fasilitas pinjaman bank, baik dari bank BUMN maupun dari bank swasta dalam dan luar negeri.

Utang bank yang jatuh tempo tersebut mayoritas berasal dari pinjaman dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap 1. Sebagian besar posisi akun ini juga dicatat pada bagian Liabilitas Jangka Panjang, dengan nama akun yang sama. (Lihat catatan 26. Laporan Audited Konsolidasian PLN).

Bank loans and medium-term notes

Increase 23.35% from Rp9,527.68 billion in 2014 to Rp11,752.46 billion mainly due to the maturing of several bank loans, both from state-owned banks and private banks in Indonesia and overseas.

The majority of the maturing bank loans were those financing Stage 1 of the 10,000 MW power plant acceleration program. The majority of this account is recorded as Long Term Liability under an account of the same name. (See Note 26 of PLN's Consolidated Audited Financial Statement).

EKUITAS

EQUITY

Struktur Ekuitas PLN (miliar)

PLN Equity Structure (billion)

Keterangan	2013	2014	2015	2013-2014	2014-2015	Komposisi Composition 2013	2014	2015	Description
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk									Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham									Capital stock - par value of Rp 1 million per share
Modal dasar - 63.000.000 saham									63,000,000 basic equity share
Modal ditempatkan dan disetor penuh	46.197.380	46.197.380	46.197.380	0,00%	0,00%	26,52%	24,68%	5,44%	Subscribed and paid up shares
Tambahan modal disetor	49.901.404	52.496.893	49.707.027	5,20%	(5,31%)	28,64%	28,05%	5,86%	Additional paid - in capital
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham	-	-	9.468.627			-	-	1,12%	Government share subscribe
Saldo laba									Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	19.108.528	19.108.528	26.872.493	0,00%	40,63%	10,97%	10,21%	3,17%	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	66.761.811	80.807.692	84.650.585	21,04%	4,76%	38,32%	43,17%	10,01%	Unappropriated
Komponen ekuitas lain -									Other Equity Component
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	638.105.386			-	-	75,21%	Fixed Asset revaluation
Keuntungan (kerugian) Aktuaria	(7.837.169)	(11.491.096)	(6.900.639)	46,62%	(39,95%)	(4,50%)	(6,14%)	(0,81%)	Actuarial Gain (Loss)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	36.978			0,00%	0,00%	0,00%	Other comprehensive income from association entity
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	174.131.954	187.119.397	848.137.837	7,46%	353,26%	99,95%	99,97%	99,99%	Total Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan non pengendali	93.175	54.141	81.234	(41,89%)	50,04%	0,05%	0,03%	0,01%	Non - controlling interests
Jumlah Ekuitas	**174.225.129**	**187.173.538**	**848.219.071**	**7,43%**	**353,17%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Total Equity**

Ekuitas (Modal) Perseroan naik signifikan sebesar 353,2% menjadi sebesar Rp848.219,07 miliar dari tahun 2014 yang sebesar Rp187.173,54 miliar (setelah penyajian kembali). Ekuitas perusahaan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh dengan komposisi 5,45%, tambahan modal disetor 5,86% penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham 1,12%, saldo laba 13,15%, komponen ekuitas lain 74,42% dan kepentingan non pengendali 0,01%.

Peningkatan signifikan ekuitas terjadi adanya penghasilan komprehensif lain tersebut di atas, yang terutama berasal dari selisih hasil revaluasi aset tetap, khususnya properti sebesar Rp590.981,4 miliar dengan nilai pembukuan sebelumnya, disamping adanya keuntungan aktuaria sebesar Rp11.670,5 miliar di tahun 2015.

Selain itu, peningkatan dikontribusikan oleh adanya tambahan laba bersih tahun buku yang naik akibat adanya penyesuaian TTL dari kebijakan penghapusan subsidi beberapa golongan tarif dan keberhasilan PLN dalam menerapkan strategi efisiensi operasional. Sekalipun masih membukukan kerugian translasi dan transaksi valas akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing lainnya, kenaikan laba usaha yang cukup besar mampu mengkompensasi rugi translasi valas tersebut.

The Company's equity (capital) increased significantly by 353.2% to Rp848.219,07 billion from Rp187,173,54 billion in 2014 (after restatement). The company's equity consists of issued and fully paid capital at 5.45%, additional paid in capital 5.86%, Government share subscribe 1.12%, retained earnings 13.15%, other equity component 74.42% and non controlling interest 0.01% .

This significant increase in equity occurred due to other comprehensive income, as mentioned above, which is primarily the difference between the results of fixed asset revaluation, especially property, at Rp590,981.4 billion and the previous accounting value, in addition to actuarial gains, of Rp11,670.5 billion in 2015.

In addition, net profit for the fiscal year rose due to the adjustment in electricity tariffs resulting from the policy to remove electricity subsidies for several groups and PLN's success in implementing operational efficiencies. Despite posting losses from foreign currency translation and transactions due to the weakening of the rupiah against foreign currencies, operating profits rose considerably and were able to compensate for the currency translation losses.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal PLN di tahun 2015 terdiri dari 30,89% berupa liabilitas dan 69,11% berupa ekuitas. Liabilitas PLN sebagian besar digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sebagian digunakan untuk memenuhi modal kerja. Sedangkan ekuitas seluruhnya digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan risiko usaha.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

PLN's capital structure in 2015 comprised 30.89% liabilities and 69.11% equity. PLN's liabilities are primarily used to finance capital investment in electricity infrastructure construction, such as power plants and the transmission and distribution network; the remainder is used as working capital. Meanwhile, the equity is used entirely to finance capital investment in electricity infrastructure development and cover business risks.

Struktur Modal (dalam miliar)
Capital Structure (in billion)

Keterangan	2013	2014	2015	Komposisi Composition			Description
	(Rp Miliar Billion)			2013	2014	2015	
Liabilitas	349.427	352.348	379.136	66,7%	65,3%	30,89%	Liability
Ekuitas	174.225	187.174	848.219	33,3%	34,7%	69,11%	Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**523.652**	**539.521**	**1.227.356**	**100,0%**	**100,0%**	**100,00%**	**Total liabilities and Equity**

Kebijakan Struktur Modal

Perseroan menetapkan kebijakan terkait struktur modal yang meliputi:

1. Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Capital Structure Policy

The Company capital structure policy consists of:

1. Capital structure reflects the balance between financial risks and rate of returns to increase the company value.

- Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan penggunaan hutang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas perusahaan.
- Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri.

2. Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai perusahaan dan biaya modal.
3. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
4. Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisa sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh PLN.
5. Perseroan telah memilih kebijakan struktur modal dengan menetapkan batas pemenuhan *covenant* dari para kreditur yang direpresentasikan dalam nilai-nilai rasio DSCR dan CICR.

- This is implemented by taking into account proportional loan utilization in order to maintain financial obligation payment ability (interest rate) and collateral in line with control over the company's liquidity.
- Optimizing economic rentability and equity rentability.

2. Capital structure is reviewed through evaluation of the relations between financial leverage, company value and capital cost.
3. Capital structure comprises an optimum combination of loans and equity that can increase the Company value to the maximum and ascertain the business development program.
4. The capital structure combination, which encompasses the comparison between equity and liquidity, is set through analysis of sensitivity taking into account various core assumptions that PLN would most likely face.
5. The company also determined a capital structure policy that sets limits on the fulfillment of creditor covenants represented in the ratio values DSCR and CICR.

MODAL KERJA BERSIH

Tahun 2015 modal kerja Perusahaan adalah sebesar negatif Rp37.409,64 miliar naik dari modal kerja di tahun 2014 yang sebesar negatif Rp105,64 miliar (setelah penyajian kembali). Peningkatan modal kerja bersih terjadi karena adanya peningkatan aktivitas Perseroan, seperti peningkatan daya listrik dari realisasi pembangunan pembangkit, penambahan pelanggan dan jumlah daya listrik terjual.

Naiknya TTL, membuat nilai penjualan PLN meningkat secara substansial berkontribusi terhadap kenaikan piutang usaha *(account receivable)*, sehingga membuat PLN mampu memenuhi kebutuhan modal kerja dari kegiatan operasional.

NET WORKING CAPITAL

In 2015, the Company's working capital was negative Rp37,409.64 billion, increase from working capital in 2014 of negative Rp105.64 billion (after restatement). The increase in working capital was due to increased activity by the Company, such as an increase in electrical power from realized power plant construction, a rising number of customers and the amount of electricity sold.

The increase in electricity tariffs caused PLN's sales value to rise substantially, contributing to a rise in accounts receivable, thus PLN was able to fulfill its working capital requirements from operational activities.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PERSEROAN

ANALYSIS OF THE COMPANY'S COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan (dalam juta)
Analysis on Company Statements of Comprehensive Income (in million)

Keterangan	2013 *)	2014 *)	2015	Description
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	153.485.606	186.634.484	209.844.541	Sale of electricity
Penyambungan pelanggan	6.027.799	5.623.913	6.141.335	Customer connection fees
Lain-lain	1.125.778	1.159.544	1.361.114	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	160.639.183	193.417.941	217.346.990	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	132.204.551	153.136.934	120.587.310	Fuel and lubricant
Pembelian tenaga listrik	40.012.570	46.052.377	51.690.867	Electricity Power Purchase
Sewa	7.102.106	7.464.835	7.560.994	Lease
Pemeliharaan	16.643.829	16.611.461	17.593.261	Maintenance
Kepegawaian	14.493.831	16.645.797	20.321.137	Personnel
Penyusutan	18.495.382	19.911.211	21.418.640	Depreciation
Lain-lain	5.481.268	5.488.617	7.090.077	Others
Jumlah Beban Usaha	234.433.537	265.311.232	246.262.286	Total Operating Expense
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(73.794.354)	(71.893.291)	(28.915.296)	LOSS BEFORE SUBSIDY
Subsidi listrik Pemerintah	101.207.859	99.303.250	56.552.532	Government Electricity Subsidy
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	27.413.505	27.409.959	27.637.236	PROFIT AFTER SUBSIDY
Penghasilan keuangan	736.378	584.061	627.412	Financial Income
Beban keuangan	(13.300.075)	(16.639.653)	(17.536.348)	Financial cost
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	1.792.124	4.157.018	2.437.066	Others income/expense - Net
LABA SEBELUM SELISIH KURS DAN PAJAK	16.641.932	15.511.385	13.165.366	PROFIT BEFORE FOREIGN EXCHANGE MARGIN AND TAX
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(27.678.465)	3.436.148	(16.229.625)	Gain (loss) on foreign exchange - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(11.036.534)	18.947.533	(3.064.259)	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2.624.442	(4.943.455)	18.649.497	TAX BENEFIT (EXPENSE)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(8.412.092)	14.004.078	15.585.238	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Laba (rugi) periode berjalan diatribusikan kepada:				Income (loss) for the year attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(8.408.511)	13.988.874	15.569.299	Owners of the Company
Kepentingan Non pengendali	(3.581)	15.204	15.939	Non-controlling Interest
Jumlah	(8.412.092)	14.004.078	15.585.238	Total
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	(182.013)	302.807	337.017	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi - Catatan 56
*) Restated and reclassified- Note 56

PENDAPATAN USAHA

Sebagai bagian dari usaha untuk lebih memonitor kinerja penjualan tenaga listrik serta mengendalikan beban subsidi listrik, maka PLN mereklasifikasi penyajian Subsidi Listrik yang tidak lagi dalam kelompok pendapatan usaha tetapi disajikan sebagai line item tersendiri setelah laba (rugi) usaha sebelum subsidi.

Dengan demikian pendapatan usaha PLN di tahun 2015 terutama berasal dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan, jasa penyambungan pelanggan dan lain-lain. Total pendapatan usaha PLN di tahun 2015 sebesar Rp217.346,99 miliar, naik 12,4% dari total pendapatan usaha pada tahun sebelumnya sebesar Rp.193.417,94 miliar.

REVENUES

As a part of efforts to monitor electricity transaction performance and to control electricity subsidy, so PLN reclassify that electricity subsidy presentment is not a part of revenue group but it is presented as a separate line item after profit (loss) before subsidy.

As such, PLN's revenue in 2015 was primarily derived from sales of electrical power to customers, customer connection services and others. PLN's total revenue for 2015 amounted to Rp217,346.99 billion, up 12.4% from Rp193,417.94 billion the previous year.

Pendapatan Penjualan Listrik

Pendapatan dari penjualan tenaga listrik di tahun 2015 naik 12,44% menjadi Rp209.844,54 miliar dari tahun 2014 yang sebesar Rp186.634,48 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan berlanjutnya realisasi kenaikan TTL sebagai berikut dan naiknya jumlah daya listrik yang terjual.

Revenue from Electricity Sales

Revenue from the sales of electricity in 2015 rose 12.44% to Rp209,844.48 from Rp186.634,48 billion in 2014. This increase was primarily due to the continuing increase in electricity tariffs and the increasing amount of electricity sold.

Keterangan	2013	2014	2015	Perubahan 2015 2015 Change	Description
Daya Listrik Terjual GWh	187.541	198.602	202.846	2,1%	Electric Power Sold GWh
Rata-rata Tarif Tenaga Listrik (Rp/kWh)	818,41	939,74	1.033,63	9,99%	Average Electricity Tariff (Rp/kWh)

Pada tahun 2015, berlanjutnya pemberlakuan kenaikan TTL secara otomatis dan periodik, sesuai No. 09 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN yang diperbarui dengan Peraturan No. 19 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, membuat rata-rata tarif tenaga listrik untuk seluruh golongan tarif naik sebesar 9,99%.

In 2015, the automatic and periodic increase in electricity tariffs pursuant to regulation Num. 09 of 2014 dated 1 April 2014 on tariffs for electricity provided by PLN, amended by Regulation Num. 19 of 2014 dated 30 June 2014, resulted in the average overall electricity tariff for all groups rising 9.99%.

Realisasi daya listrik terjual sangat dipengaruhi oleh dua parameter, yakni penambahan jumlah pelanggan dan volume penggunaan tiap pelanggan/kelompok pelanggan. Jumlah pelanggan pada tahun 2015 naik, 63,9%, atau 3,7 juta pelanggan. Akibatnya, kendati kondisi perekonomian di tahun 2015 masih kurang kondusif, dimana pelanggan industri cenderung mengurangi kegiatan dan jumlah konsumsi listrik, total daya listrik terjual tetap naik.

Sales of electricity were greatly influenced by two parameters: a higher number of customers and usages by each type of customer / customer group. Total customers in 2015 had risen 63.9%, or by 3.7 million. Subsequently, despite the non-conducive state of the economic conditions and the reduction in activity and electricity consumed by the industrial sector, total electrical power sold rose.

Tabel berikut menunjukkan, berdasarkan kelompok pelanggan, maka kontribusi kenaikan pendapatan penjualan listrik terutama berasal dari kelompok umum, yang meliputi Institusi Pemerintah lain, yang naik sebesar 25,12%, rumah tangga, industri dan bisnis, yang naik sebesar 12,06%, TNI & POLRI yang naik sebesar 7,64% Konsumsi dari kelompok BUMN hanya naik sebesar 6,19%, sebagai dampak pengurangan realisasi ekspansi usaha dan program penghematan yang dijalankan dengan konsisten seperti pada kelompok industri semen, pertambangan maupun pengolahan. Laju pengurangan konsumsi listrik dari kelompok sektor penambangan lebih cepat, mengingat

The following table demonstrates, by customer group, the contribution to increased electricity sales based on other Government Institutions, which rose 25.12%, households, industry and business, which rose 12.06%, Army - Police, which rose 7,64%. Consumption by SOEs only rose 6.19% as a result of reduced business expansion in sectors such as cement, mining and manufacturing, and consistently implemented savings programs. The rate of reduction in the mining sector was more rapid due to the heavier impact of

sektor ini merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak pelemahan permintaan produk primer di pasar global, selain karena adanya pelarangan ekspor bahan mentah, yang membuat para pelaku mengurangi intensitas kegiatannya.

weakened global demand for primary products, in addition to the export ban on raw materials, both of which resulted in reduced activities.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2014	2015	Perubahan Change	Description
Pihak berelasi	5.084	5.399	6%	Related Parties
Badan Usaha Milik Negara	5.084	5.399	6%	SOE
Pihak ketiga	181.550	204.446	13%	Third parties
Umum	172.517	193.321	12%	Public
Lembaga dan kementerian	8.017	10.031	25%	Government
TNI dan Polri	1.016	1.094	8%	Military and Police
Total Penjualan Tenaga Listrik	**186.634**	**209.845**	**12%**	**Total Sales Of Electric Power**

Pendapatan Biaya Penyambungan

Pendapatan biaya penyambungan pelanggan naik 9,20% menjadi sebesar Rp6.141,33 miliar dari nilai Rp5.623,9 miliar di tahun 2014 menjadi karena bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya daya listrik untuk pelanggan dan naiknya TTL. Penambahan 3,7 juta pelanggan baru di tahun 2015 membuat total pelanggan PLN berkembang menjadi 61,2 juta pelanggan.

Daya tersambung juga naik 6,55% dari tahun 2014, bertambah sebesar 6.552 MVA menjadi sebesar 106.582 MVA. PLN mengenakan biaya penyambungan dengan besaran yang berbeda sesuai golongan tarif, dengan kebijakan umum adalah - semakin meningkat sejalan dengan naiknya golongan tarif pelanggan (lihat kembali uraian "Jumlah Pelanggan" dan "Daya Tersambung ").

Revenue from Customer Connections

Revenue from customer connections rose 9.20% to Rp6,141.33 billion from Rp5,623.9 billion in 2014 due to the increasing number of customers, increase in electrical power and rising electricity tariffs. The addition of 3.7 million customers in 2015 saw PLN's total customers rise to 61.2 million.

Connected power also rose 6.55% from 2014 with an additional 6,552 MVA, totaling 106,582 MVA. PLN charges a connection fee based on the amount of power supplied and the tariff charged for each group, with a general policy of a higher connection fee for larger amounts of power available (see "Total Customers" and "Connected Power").

Pendapatan lain-lain

Meningkat 17,38% menjadi sebesar Rp1.361,11 miliar dari Rp1.159,54 miliar di tahun 2014. Pendapatan lain-lain ini berasal dari penjualan jasa yang dilakukan oleh unit bisnis PLN yang maupun anak usaha dikonsolidasi yang bergerak diberbagai bidang yang berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jaringan telekomunikasi, perbaikan mesin pembangkit, sewa transformator dan jasa lain-lain. (Lihat kembali "Struktur Usaha PLN").

Konsistensi Pemerintah dalam membangun ketenagalistrikan membuat permintaan jasa-jasa tersebut naik, dan mempengaruhi pendapatan anak usaha. Rincian pendapatan lain-lain yang berasal dari unit bisnis, anak usaha maupun kegiatan PLN lainnya adalah sebagai berikut.

Other Revenues

Increase 17.38% to Rp1.361,11 billion from Rp1,159.54 billion in 2014. Other revenues were derived from sales of services by PLN's business units and consolidated subsidiaries engaged in various fields related to electrical power, such as telecommunication networks, power plant machinery repair, transformer leasing and other services. (See "PLN Business Structure").

The government's consistency in developing electrical power has seen demand for services rise, thus impacting on the revenue to PLN's subsidiaries. Details of other revenues based on business unit, subsidiary and PLN's other activities are as follows.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2014	2015	Perubahan Change	Description
Jaringan dan jasa telekomunikasi	718,17	798,44	11,18%	Telecommunication network and service
Perubahan daya tersambung dan administrasi	45,53	58,61	28,73%	Upgrading of electricity power and administration fees
Sewa transformator	198,42	270,26	36,20%	Transformer rental
Jasa-jasa dan lainnya	197,43	291,15	18,43%	Services and others
Total Pendapatan Usaha Lain	**1.159,54**	**1.361,11**	**17,38%**	**Total Other Income**

BEBAN USAHA

OPERATING EXPENSES

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2014	2015	Perubahan Change	Description
Bahan bakar dan pelumas	153.136,93	120.587,31	(21,26%)	Fuel and lubricant
Pembelian tenaga listrik	46.052,38	51.690,87	12,24%	Electricity Power Purchase
Sewa	7.464,84	7.560,99	1,29%	Lease
Pemeliharaan	16.611,46	17.593,26	5,91%	Maintenance
Kepegawaian	16.645,80	20.321,14	22,08%	Personnel
Penyusutan	19.911,21	21.418,64	7,57%	Depreciation
Lain-lain	5.488,62	7.090,08	24,62%	Others
Total Beban Usaha	**265.311,23**	**246.262,29**	**(7,27%)**	**Total Operating Expense**

Total beban usaha di tahun 2015 turun 7,18% menjadi Rp246.262,29 miliar dari Rp265.311,23 miliar di tahun 2014.

Berbagai upaya perbaikan kinerja operasional yang dilakukan PLN memberi andil besar terhadap penurunan total beban usaha.

Upaya perbaikan operasional ditujukan untuk mengelola besaran biaya usaha yang substansial. Untuk itu, selain biaya BBM yang berkontribusi paling besar, PLN berupaya mengelola besaran biaya operasional lain, misalnya dengan melakukan penghematan dalam pengadaan komponen untuk pemeliharaan rutin.

Penghematan tersebut diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan tender secara elektronik (e-procurement) untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa rutin, serta pelaksanaan tender terbuka untuk pembangunan instalasi pembangkit dan transmisi/distribusi, sementara efisiensi operasional dilakukan melalui perbaikan sistem kerja dan sistem bisnis dengan dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi, seperti penerapan AP2T, P2APST, roll-out ERP di tingkat unit bisnis dan beberapa aplikasi sistem operasi berbasis TI lainnya.

Total operating expenses in 2015 fell 7.18% to Rp246.262,29 billion from Rp265,311.23 billion in 2014.

Various efforts to improve PLN's operational performance have contributed greatly to the decline in total operating expenses.

Operational improvement efforts have been aimed at managing the substantial size of business expenses. To that end, other than the cost of fuel, which made the highest contribution to cost, PLN is striving to manage other operating expenses, for example by making savings in the procurement of components for routine maintenance.

These savings include implementation of electronic tenders (e-procurement) for regular goods and services, as well as the implementation of open tenders for the construction of power plant and transmission / distribution facilities, while operational efficiencies are achieved by improving work systems and business systems through information technology-based applications, such as AP2T, P2APST, ERP roll-out in business units and multiple other IT-based applications for operating systems.

Adapun penjelasan terhadap penyebab utama terjadinya penurunan beban usaha di tahun 2015 dan upaya pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Beban Bahan Bakar dan Pelumas

Realiasi pembelian BBM dan pelumas di tahun 2015 turun sebesar 21,26% dari Rp153.136,93 miliar menjadi Rp120.587,31 miliar. Komponen beban usaha ini berkontribusi sebesar 49,02% dari total beban usaha, terdiri dari pembelian BBM dan non BBM (batubara, gas alam dan panas bumi).

PLN berupaya keras menurunkan penggunaan BBM dengan bahan bakar lain yang lebih ekonomis. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif, ditunjukkan dengan turunnya volume penggunaan BBM hingga sebesar 40,64%, dan hal ini tercermin juga dari rasio bauran energi, dimana rasio penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik semakin rendah. (Lihat kembali tabel Kinerja Operasional Utama)

Harga BBM (minyak mentah, WTI) di pasar internasional juga sebetulnya turun cukup jauh, yakni sebesar 46%, dari US$92,42/barrel (Des 2014) menjadi sekitar US$50/barrel.

Pelemahan rupiah sebesar 12,5% membuat penurunan biaya pembelian minyak dan pelumas tidak berjalan linier dengan penurunan dimaksud, namun memberi dampak net penurunan biaya pembelian BBM sebesar 50,3%, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

A description of the main reasons for the decrease in operating expenses in 2015 and management efforts undertaken are as follows:

Fuel and Lubricant Expenses

Purchases of fuel and lubricants in 2015 fell 21.26% from Rp153,136.93 billion to Rp120,587.31 billion. This component of operating expenses contributed 49.02% to the total and was derived from purchases of oil fuels and other energy sources (coal, natural gas and geothermal energy).

PLN is striving to reduce the use of oil fuels by using more economical alternatives. This has had a positive result, as demonstrated by the reduced use of oil fuels (40.64%), which was also reflected in the energy mix, which saw the ratio of oil fuel used in electricity generation continue to fall. (See Primary Operational Performance table)

The price of fuel oils (crude oil, WTI) on the international market also plummeted 46% from US$92.42/barrel (Dec 2014) to approximately US$50/barrel.

The rupiah weakened against the US dollar by 12.5%, resulting in a non-linear reduction in the cost of purchasing fuel and lubricants, however, this had a net impact of a 50.3% reduction in fuel and oil purchases, as shown in the following table.

Beban Bahan Bakar dan Pelumas (Dalam Rp miliar)
Fuel and Lubricants (In Billion Rp)

Keterangan	2014	2015	Perubahan Change	Description
Bahan Bakar Minyak				Fuel (BBM)
Solar High Speed Diesel	63.735,46	30.425,93	(53,34%)	Solar High Speed Diesel
Residu	7.709,64	4.599,61	(40,34%)	Residue
Solar Industrial Diesel	41,66	14,36	(65,53%)	Solar Industrial Diesel
Lainnya	1.600,92	948,08	626,84%	Others
Sub jumlah	73.087,68	35.987,98	(50,76%)	Subtotal of Fuel
Bahan Bakar - Non Minyak				Non Fuel
Batubara	31.810,00	32.457,17	2,03%	Natural Gas
Gas alam	44,965,59	48.350,88	7,53%	Coal
Panas bumi	2.757,37	3.263,41	18,35%	Geothermal
Air	241,30	241,85	0,23%	Water
Sub jumlah	79.774,25	84.313,31	5,69%	Subtotal of Non-Fuel
Minyak pelumas	275,01	286,03	4,01%	Lubricants
Total Beban Bahan Bakar dan Pelumas	**153.136.93**	**120.587.31**	**(21,26%)**	**Total Fuel And Lubricants**

Beban Bahan Bakar Non Minyak

- **Batu Bara**
  Sejalan dengan kebijakan PLN yang berupaya meningkatkan porsi pembangkit PLTU berbahan batubara untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional, volume kebutuhan batubara sebagai bahan bakar naik 9,8% menjadi 48.995,17 ribu ton dari 44.605,0 ribu ton di tahun 2014.

  Sama halnya dengan minyak bumi, harga batubara di pasar global tahun 2015 cenderung turun, dengan kisaran penurunan sebesar 17-20% (FOB Newcastle). Namun karena rata-rata harga pembelian batubara dalam ekuivalen rupiah hanya turun 6,79% (sebagian pembelian batubara dilakukan dalam US$), maka beban pembelian batubara hanya naik sebesar 2,0% menjadi Rp32.457,17 miliar.

  Biaya pembelian batubara akan semakin meningkat di masa mendatang sejalan dengan penyelesaian pembangunan pembangkit dalam FTP-1 yang mayoritas berbahan bakar batubara maupun Pembangunan Pembangkit 35.000MW.

- **Gas Alam**
  Demikian juga dengan volume kebutuhan gas alam yang naik 1,4% menjadi 456.494 MMSCF dari 450.190 MMSCF di tahun 2014, sejalan dengan kebijakan PLN tersebut. Namun karena rata-rata harga pembelian gas alam dalam ekuivalen rupiah rata-rata naik 4,97% maka beban pembelian gas alam naik lebih tinggi dari kenaikan volume, yakni 7,53% menjadi Rp48.350,9 miliar.

  Selain batubara, beban bahan bakar untuk penggunaan gas juga akan semakin meningkat, mengingat akan semakin banyak pembangkit yang dikonversikan menjadi berbahan bakar gas.

- **Panas Bumi**
  Sementara itu, beban pembelian listrik panas bumi naik paling tinggi, yakni 18,35% walaupun produksi listrik panas bumi hanya naik 2,5%. Penyebabnya lebih pada adanya penyesuaian harga pembelian listrik dari panas bumi, seperti ditetapkan oleh Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2014.

PLN juga memiliki target untuk menggunakan bahan bakar nabati sebagai alternatif sumber energi baru terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik. Penggunaan BBN ini diharapkan membuat kualitas bauran energi semakin baik, dengan biaya yang semakin rendah.

Beban Pembelian Tenaga Listrik dan Sewa

Beban pembelian naik 12,24% menjadi Rp51.690,87 miliar dari Rp46.052,38 miliar di tahun sebelumnya. Beban pembelian tenaga listrik berkontribusi 21,01% terhadap total beban usaha PLN.

Non-oil fuels

- **Coal**
  In line with PLN's policy of seeking to increase the proportion of coal-fired power plants to meet electricity demand, the volume demand for coal as fuel rose 9.8% to 48,995.17 thousand tons from 44,605.0 thousand tons in 2014.

  As with petroleum prices, coal prices also fell on the global market in 2015, declining between 17-20% (FOB Newcastle). However, since the average purchase price for coal in the equivalent rupiah fell only 6.79% (some coal purchases are made in US$), then cost of coal purchases only rose 2.0% to Rp32,457.17 billion.

  The cost of coal purchases will continue to increase in the future, in line with the completion of FTP-1 program power plants, which are predominantly coal-fired, and the 35,000MW development program.

- **Natural Gas**
  Likewise, the volume of natural gas required rose 1.4% to 456,494 MMSCF from 450,190 MMSCF in 2014, in line with PLN's policy. However, since the average purchase price of natural gas in rupiah equivalent rose 4.79%, the cost of purchasing natural gas exceeded the increase in volume, up 7.53% to Rp48,350.9 billion.

  In addition to coal, the use of natural gas to generate electricity will also increase, given the growing number of plants being converted to gas.

- **Geothermal Energy**
  Meanwhile, the cost of geothermal generated electricity saw the highest increase, at 18.35%, despite geothermal power production rising only 2.5%. The reason for this is an adjustment in purchase price for electricity generated by geothermal energy pursuant to ESDM Ministerial Regulation Num. 17 of 2014

PLN is also targeting an increased use of bio fuels as an alternative new and renewable energy source to generate electricity in the hope that this will further improve the energy mix and reduce costs.

Electricity Purchases and Lease Expenses

Electricity purchase increased 12.24% to Rp51,690.87 billion from Rp46,052.38 billion the previous year. The cost of power purchases contributed 21.01% to PLN's total operating expenses.

Kenaikan terutama disebabkan bertambahnya daya listrik yang harus dibeli dari pihak swasta, yakni dari 53.258 GWh di tahun 2014 menjadi sebesar 57.506 GWh atau naik 8,0% di tahun 2015, maupun dari pihak berelasi. Penambahan pembelian listrik swasta dan pihak berelasi harus dilakukan diantaranya tidak tercapainya target penyelesaian pembangkit baru dan turunnya produksi listrik dari PLTA maupun pembangkit sewa.

Seperti tampak dari tabel Kinerja Operasional Utama, penambahan pembangkit baru hanya mencapai 53% dari yang ditargetkan.

Sedangkan jumlah pelanggan naik, sehingga suplai listrik harus bertambah. Selain dari pembelian listrik swasta, PLN harus menunda realisasi pemeliharaan beberapa pembangkit untuk memastikan kecukupan pasokan listrik.

Beban pembelian tenaga listrik di masa mendatang akan meningkat, dengan persentase terutama tergantung pada pertambahan kapasitas pembangkit milik sendiri, penambahan permintaan pelanggan dan kemampuan pasokan listrik swasta dalam skema IPP dimaksud.

Beban Sewa juga meningkat, namun dengan tingkat kenaikan yang rendah, hanya sebesar 1,29%. Selain itu, beban sewa juga hanya berkontribusi 3,07% terhadap total beban usaha PLN.

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan berkontribusi sebesar 7,15% dari total Beban Usaha PLN di tahun 2015, naik 5,91% menjadi sebesar Rp17.593,26 miliar dari Rp16.611,64 miliar di tahun 2014.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pemakaian material selama tahun 2015, karena PLN harus melakukan penggantian rutin atas berbagai peralatan di gardu induk dan perawatan rutin pada pembangkit-pembangkit lain untuk menjaga unjuk kerja seluruh instalasi pembangkit, jaringan transmisi, distribusi maupun fasilitas gardu induk. Pemeliharaan dan penggantian peralatan dilakukan untuk mencegah terjadinya *mal-function* pada sistem jaringan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas layanan seperti terjadinya pemadaman bergilir karena rusaknya salah satu sistem jaringan atau instalasi pembangkit.

Kenaikan biaya material tersebut dikompensasi oleh turunnya biaya jasa borongan, diantaranya disebabkan oleh penerapan sistem lelang berbasis teknologi informasi, e-auction / e-procurement.

Beban Kepegawaian

Beban Kepegawaian berkontribusi sebesar 8,26% terhadap Total Beban Usaha PLN di tahun 2015. Beban ini naik cukup tinggi, 22,08% menjadi sebesar Rp20.321,14 miliar terutama disebabkan oleh naiknya biaya program imbalan kerja, naiknya gaji, naiknya jasa produksi dan insentif prestasi

This increase was mainly due to an increase in electrical power purchased from private parties, up from 53,258 GWh in 2014 to 57,506 GWh in 2015, an increase of 8.0%, as well as from related parties. The increase in power purchases from private and related parties was the result of not achieving the targeted completion of new power plants and a decline in electricity production from hydropower plants, as well as leased plants.

As demonstrated in the Primary Operational Performance table, additional new power plants only reached 53% of target.

Meanwhile, the increasing number of customers meant more electricity had to be supplied. As well as purchasing private power, PLN had to postpone maintenance on several power plants to ensure an adequate supply of electricity.

Future purchases of electricity will increase, with the percentage depending mainly on PLN's increase in generating capacity, additional customer demand and the ability of independent power suppliers in the IPP scheme.

Lease expenses also rose, albeit slightly, at only 3.29%. Furthermore, lease expenses contributed only 3.07% to PLN's total operating expenses.

Maintenance Costs

Maintenance expenses accounted for 7.15% of PLN's total Operating Expenses in 2015, rose 5.91% to Rp17,593.26 billion from Rp16,611.64 billion in 2014.

This increase was primarily due to higher material consumption during 2015 due to PLN's routine replacement of various pieces of substation equipment and routine maintenance on power plants to maintain the performance of all installations, from power plants, to the transmission and distribution network and substation facilities. Maintenance and equipment replacement is conducted to prevent the malfunction of network systems that would of cause a decrease in service quality, such as rolling blackouts due to network or power plant damage.

The increase in material expenses was compensated by a decrease in the cost of services, in part resulting from the application of the information technology-based auction system, e-auction / e-procurement.

Employment Expenses

Employment expenses accounted for 8.26% of PLN's Total Operating Expenses in 2015. This expense rose quite significantly, by 22.08%, to Rp20,321.14 billion, mainly due to the rising cost of the employee benefits program, increased salaries, rising production services and performance

kerja serta peningkatan biaya tunjangan, selain karena naiknya jumlah pegawai.

Kenaikan biaya tunjangan relatif tinggi, yakni 51,92%, menunjukkan komitmen PLN untuk memberi kompensasi yang lebih layak sesuai dengan tuntutan beban pekerjaan yang semakin meningkat di tahun 2015 dan tahun-tahun mendatang, sehubungan dengan dimulainya program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW, lengkap dengan sarana pendukungnya dalam kurun waktu 4 tahun mendatang, sampai akhir tahun 2019.

Beban penyusutan

Beban penyusutan berkontribusi sebesar 8,71% terhadap total Beban Usaha PLN di tahun 2015. Beban ini naik 7,57% menjadi sebesar Rp21.418,64 miliar dari Rp19.911,21 miliar di tahun 2014, terutama karena adanya realisasi kegiatan pembangunan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi yang membuat beban penyusutan terkait pembangunan proyek tersebut naik.

LABA USAHA SEBELUM SUBSIDI

Sebagai akibat peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dari peningkatan beban usaha, maka rugi usaha sebelum subsidi PLN di tahun 2015 berkurang sebesar 59,78% menjadi sebesar Rp28.915,30 miliar dari rugi usaha di tahun 2014 yang sebesar Rp71.893,30 miliar. Masih besarnya nilai rugi usaha ini menunjukkan bahwa pelanggan listrik saat ini masih mendapatkan pasokan listrik dengan membayar biaya listrik di bawah Biaya Pokok Pengadaan. Atau dengan kata lain mayoritas masih mendapatkan subsidi atas daya listrik yang dipakai sehari-hari (Lihat kembali Grafik BPP terhadap TTL, halaman 258).

Pengurangan rugi usaha sebelum subsidi mencerminkan keberhasilan Manajemen PLN dalam meningkatkan efisiensi operasional selain mencerminkan hasil penerapan kebijakan pencabutan subsidi energi (listrik) yang diwujudkan dalam bentuk naiknya TTL secara berkala (Lihat kembali bahasan Tarif Tenaga Listrik, halaman 254).

SUBSIDI

Sesuai dengan tugas awalnya sebagai pelaksana *Public Service Obligation* (PSO) di bidang penyediaan tenaga listrik, PLN mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Hal ini karena PLN wajib menyediakan tenaga listrik dengan harga jual yang terjangkau oleh seluruh pelanggannya, walaupun harga jual tersebut berada di bawah rata-rata biaya penyedian tenaga listrik (BPP).

Subsidi ini diperhitungkan berdasarkan pada selisih negatif antara harga jual rata-rata dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari masing-masing golongan tarif. (Lihat penjelasan “Subsidi Listrik”; Biaya Pokok Pengadaan” dan “Tarif Tenaga Listrik”).

incentives, as well as increased benefits expenses, partly due to an increase in the number of employees.

The relatively high increase in employee benefits, at 51.92%, demonstrates PLN’s commitment to paying more appropriate salaries in accordance with the demands of an increased workload in 2015 and the coming years, due to the commencement of the 35,000 MW power plant development program, complete with supporting facilities, over the next four years, until the end of 2019.

Depreciation Expenses

Depreciation expenses contributed 8.71% of PLN’s total Operating Expenses in 2015. This cost rose 7.57% to Rp21,418.64 billion from Rp19,911.21 billion in 2014, primarily due to the construction of power plants, transmission and distribution networks that caused associated depreciation costs to rise.

OPERATING INCOME BEFORE SUBSIDIES

As a result of the increase in revenue exceeding the increase in operating expenses, PLN’s operating loss before subsidies in 2015 fell by 59.78% to Rp28.915,30 billion from Rp71,893.30 billion in 2014. The size of this operating loss demonstrates that customers are still purchasing electricity for less than the economic cost, or Cost of Production. In other words, the majority are still subsidized for their daily electricity use (See cost of production graph regarding electricity tariffs on page 258).

The reduction in operating losses before subsidies reflects the success of PLN’s management in improving operational efficiency, as well as reflecting the results of the energy subsidy removal policy and its resultant periodic increases in electricity tariffs. (See Electricity Tariffs, page 254).

SUBSIDY

In accordance with its primary duty as the executor of the Public Service Obligation (PSO) to supply electricity, PLN receives a subsidy from the Government. This is because PLN is required to provide electricity at an affordable price to all customers, even if the sales price is below the average cost of production.

These subsidies are calculated based on the negative difference between average selling price to each customer group less the cost of production to each customer group. (See “Electricity Subsidies”, “Cost of Production” and “Electricity Tariffs”).

Sampai akhir tahun 2015 sebagian pelanggan PLN masih membayar penggunaan tenaga listrik dengan tarif subsidi, karena membayar pemakaian daya dengan tarif di bawah biaya pokok penyediaan. Tahun 2015 nilai rata-rata BPP adalah sebesar Rp1.300,49/ kWh, sementara harga rata-rata tarif listrik yang dikenakan adalah sebesar Rp1.033,63/ kWh, naik dari rata-rata tahun 2014 yang sebesar Rp1.419,68/kWh sebagai realisasi penyesuaian TTL.

Selisih kekurangan pembayaran tarif listrik tersebut dikalikan dengan jumlah penggunaan tenaga listrik yang terjual menjadi dasar penetapan subsidi listrik. (lihat kembali uraian "Biaya Pokok Penyediaan", "Tarif Tenaga Listrik" dan "Subsidi Listrik").

Realisasi subsidi di tahun 2015 adalah sebesar Rp56.552,53 miliar, lebih rendah 43,05% dari nilai sebesar Rp99.303,3 miliar di tahun 2014. Penurunan nilai subsidi tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan pencabutan subsidi energi yang diterapkan Pemerintah melalui penyesuaian TTL secara berkala tersebut.

Di sisi lain, pencairan subsidi sebesar Rp56,6 triliun tersebut menunjukkan komitmen dukungan Pemerintah terhadap PLN agar tetap merealisasikan investasi pengembangan ketenagalistrikan, tetap menyalurkan listrik kepada masyarakat yang kurang mampu dan menjaga rasio kecukupan modal terhadap hutang sesuai persyaratan pinjaman yang ditentukan.

Penentuan besaran subsidi listrik tetap dilakukan melalui serangkain proses yang melibatkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI), yang telah mendapatkan akses terhadap pencatatan pembukuan keuangan PLN sesuai kerjasama antara BPK dan PLN dan pembahasan intensif antara PLN, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Keuangan dan DPR (lihat kembali uraian "Subsidi Listrik").

LABA (RUGI) USAHA SETELAH SUBSIDI

Di tahun 2015 PLN mencatatkan Laba Usaha setelah subsidi sebesar Rp27.637,24 miliar naik 1,74% dari nilai Rp27.409,96 miliar di tahun sebelumnya. Sekalipun turun, yang menjadi pembeda adalah jumlah subsidi yang diterima PLN di tahun 2015, jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, seperti telah disinggung di atas.

As of the end of 2015, some PLN customers were still paying PLN a subsidized rate for electricity at a cost lower than the cost of production. In 2015, the average cost of production amounted to Rp1,300.49/ kWh, while the average electricity tariff charged was Rp1,033.63 / kWh, up from the average in 2014 of Rp1,419.68 / kWh due to electricity tariff adjustments.

The discrepancy in the underpayment is multiplied by amount of electricity sold, which forms the basis for setting electricity subsidies. (See "Cost of Production", "Electricity Tariffs" and "Electricity Subsidy").

Subsidy realization in 2015 amounted to Rp56,552.53 billion, down 43.05% from Rp99,303.3 billion in 2014. The fall in subsidy is the direct impact of the subsidy removal policy implemented by the government through periodic adjustments of the electricity tariffs.

Meanwhile, the disbursement of Rp56.6 trillion in subsidies demonstrates the Government's commitment to support PLN's investment in electrical power development, while continuing to supply power to the poor and maintaining a capital adequacy ratio of debt according to loan terms.

Determining the size of electricity subsidies requires a series of processes involving input from the Supreme Audit Agency (BPK), who have access to PLN's financial accounting records due to cooperation between the Supreme Audit Agency and PLN, and intensive discussions between PLN, the Director General of Electricity, Ministry of Finance and the House of Representatives (See "Electricity Subsidy").

OPERATING PROFIT (LOSS) AFTER SUBSIDIES

In 2015, PLN'S Operating Income recorded after subsidies was Rp27,637.24 billion, rose 1.74% from Rp27,409.96 billion the previous year. Despite this reduction, the difference was a significant reduction in the subsidy received in 2015 compared to the previous year, as mentioned above.

BEBAN LAIN-LAIN

PLN mencatat beban lain-lain (di luar beban translasi) sebesar Rp14.471,87 miliar, naik 21,6% dari beban dari tahun 2014 yang sebesar Rp11.898,57 miliar. Penyebab utama kenaikan beban lain-lain adalah:

- Kenaikan Beban Keuangan Akibat Pelemahan nilai rupiah terhadap berbagai mata uang asing.
  PLN memiliki eksposur pinjaman bank maupun penerbitan obligasi dan surat utang berjangka menengah panjang yang berdenominasi mata uang utama, yakni US dollar, Yen dan Euro. Pelemahan nilai tukar rupiah membuat jumlah bunga yang harus dibayar naik pada saat dicatat dalam mata uang rupiah.

  Pada tahun 2015, persentase pelemahan rupiah terhadap mata uang asing US$ adalah sebesar 10,89% (kurs tengah akhir tahun). Sementara persentase pelemahan rupiah terhadap mata uang lainnya bervariasi, antara 10,57% (untuk Yen Jepang). Sementara untuk mata uang Euro mengalami penguatan 0,42%.
  Akibat pelemahan nilai tukar tersebut, jumlah beban keuangan (utang obligasi rupiah dan valas) naik 5,38% menjadi sebesar Rp17.536,35 miliar, sekalipun jumlah pokok pinjaman telah berkurang.
  Beban keuangan yang berasal dari utang sewa pembiayaan, utang obligasi, utang bank serta utang listrik swasta masing-masing naik sebesar 10,97% 10,81%, 9,74%, dan 2,69%.
- PLN sebenarnya mendapatkan bunga dari penempatan dananya di bank-bank dalam negeri maupun di bank asing, dengan nilai sebesar Rp627,41 miliar di tahun 2015. Jumlah ini tidak dapat menutup beban keuangan tersebut di atas.
- Turunnya pendapatan denda administrasi, keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi, laba bersih entitas asosiasi, penghasilan jasa dan klaim, serta lainnya menjadi sebesar total Rp2.437,07 miliar dari total sebesar Rp4.157,02 miliar di tahun 2014.

OTHER EXPENSES

PLN recorded other expenses (excluding translation expenses) of Rp14,471.87 billion, up 21.6% from 2014's Rp11,898.57 billion. The main cause of the increase in other expenses was:

- Increased Financial Expenses resulting from the weakening of the rupiah against various foreign currencies.
  PLN has bank loan exposure, as well as bonds and medium and long term notes issued in major currencies, namely US dollars, Yen and Euros. The weakening rupiah exchange rate resulted in the amount of interest paid increasing when currencies were recorded in rupiah.

  In 2015, the rupiah weakened 10.89% against the US dollar (year-end mid rate). Meanwhile, the percentage depreciation of the rupiah against other currencies varied at between 10.57% (for Japanese Yen). In addition, the rupiah strengthened 0.42% against Euro.
  Due to the weakened exchange rate, financial expenses (rupiah bond interest and foreign exchange) rose 5.38% to Rp17,536.35.5 billion, although the loan principal was reduced.
  Financial expenses derived from interest on lease liabilities, bonds payable, bank loans, as well as private electricity debt, respectively increased by 10.97%, 10.81% 9.74%, and 2.69%.
- PLN earns interest on its funds in domestic and foreign banks, which amounted to Rp627.41 billion in 2015. This did not cover the above financial expenses.

- PLN recorded revenue from administrative fines, gains on the sale of assets not used in operations, net income of associate entities, service and claims revenue, and others, amounting to a total of Rp2,437.07 billion, down from Rp4,157.02 billion in 2014.

LABA SEBELUM SELISIH KURS DAN PAJAK

Dengan naiknya beban lain-lain tersebut, pada tahun 2015 PLN mencatatkan laba sebelum selisih kurs dan Pajak sebesar Rp13.415.366 miliar, turun 13,51% dari Rp15.511,385 miliar di tahun sebelumnya.

PROFIT BEFORE FOREIGN EXCHANGE DISCREPANCIES AND TAX

With the increase in other expenses, in 2015, PLN booked profit before foreign exchange discrepancies and tax of Rp13,415,366 billion, a fall of 13,51% from Rp15,511,385 billion in the previous year.

RUGI SELISIH KURS - BERSIH

Besarnya kewajiban (dalam bentuk obligasi dan pinjaman penerusan jangka panjang) dalam mata uang asing serta turunnya nilai tukar seperti disebutkan di atas, membuat di tahun 2015 PLN mencatatkan rugi selisih kurs sebesar Rp16.229,63 miliar dari sebelumnya mencatatkan keuntungan selisih kurs sebesar Rp3.436,15 miliar.

FOREIGN EXCHANGE LOSSES – NET

PLN's liabilities (in bonds and long-term two step loans) in foreign exchange and the weakening value of the rupiah, mentioned above, saw PLN record a foreign exchange loss of Rp16,229.63 billion, having previously recorded foreign exchange gains of Rp3,436.15 billion.

PLN TANDATANGANI FOREX LINE DENGAN 3 BANK BUMN

PLN SIGNS FOREX LINES WITH THREE STATE-OWNED BANKS

FOREX LINE MERUPAKAN TITIK AWAL PELAKSANAAN *HEDGING*

(Jakarta, 10 April 2015) PT PLN (Persero) menandatangani *Forex Line* dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir bersama Direktur Corporate Banking Mandiri, Royke Tumilaar, Direktur Business Banking 2 BNI, Sutanto, dan Direktur Bisnis Konsumer BRI, A. Toni Soetirto, bertempat di Bank Indonesia, Jakarta Jum'at (10/4).

Dirut PLN, Sofyan Basir mengatakan penandatangan forex line ini merupakan titik awal pelaksanaan hedging bagi PLN. "Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), PLN memiliki eksposur kebutuhan valuta asing yang besar untuk memenuhi kewajiban pembayaran bahan bakar gas dan panas bumi, pembelian listrik swasta, pembayaran angsuran pinjaman dan investasi. Sehingga PLN harus melakukan mitigasi risiko atas eksposur tersebut terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah," jelas Sofyan.

Persiapan pelaksanaan hedging oleh PLN dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2013 tanggal 25 September 2015 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Bank Indonesia No. 15 /8/PBI/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) kepada Bank. Disusul kemudian dengan terbitnya Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Kegiatan Lindung Nilai (Hedging) tanggal 16 September 2014 dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan PLN telah berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung serta konsultan independen membahas kebijakan dan Standar Operating Procedure (SOP) hedging. PLN juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian BUMN. "Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut menambah dasar bagi PLN untuk meyelesaikan persiapan transaksi lindung nilai (hedging)," pungkas Sofyan.

FOREX LINES ARE THE STARTING POINT FOR HEDGING

(Jakarta, 10 April 2015) PT PLN (Persero) signed Forex Lines with Bank Mandiri, Bank BNI and Bank BRI. The signatories were PLN President Director Sofyan Basir and Mandiri Corporate Banking Director Royke Tumilaar, BNI Business Banking 2 Director Sutanto and BRI Consumer Business Director A. Toni Soetirto; the signing took place at Bank Indonesia, Jakarta, on Friday 10 April 2015.

PLN President Director, Sofyan Basir, said that the signing of the forex lines was the starting point for PLN to implement hedging. "As a State-Owned Enterprise (SOE), PLN has significant exposure to foreign exchange to fulfill its payment obligations for gas and geothermal energy, the purchase of privately generated electricity, payment of interest installments and for investment. Thus PLN must mitigate the risk of this exposure due to the fluctuating rate of the rupiah," explained Sofyan.

PLN's hedging preparations have been underway since the issuance of SOE Ministerial Regulation Num. PER-09/MBU/2013 dated 25 September 2015 on General Policy for Hedging by State-Owned Enterprises, and Bank Indonesia Regulation Num. 15 /8/PBI/2013 dated 7 October 2013 on Hedging Transactions with Banks. These regulations were followed by an SOE Circular on Standard Operating Procedures (SOP) for Hedging dated 16 September 2014 and Bank Indonesia Regulation Num. 16/20/PBI/2014 dated 28 October 2014 on Applying the Principle of Prudence in the Management of Non-Bank Corporate Foreign Debt, further amended by Bank Indonesia Regulation Num. 16/21/PBI/2014 dated 29 December 2014.

Furthermore, Sofyan explained that PLN had held discussions with the Supreme Audit Agency (BPK), Attorney General and independent consultants on hedging policies and Standard Operating Procedures (SOP). PLN was also coordinating with Bank Indonesia and the SOE Ministry. "These regulations add to the basis for PLN's preparations to complete its hedging preparations," commented Sofyan.

LABA SEBELUM PAJAK

Dengan adanya rugi selisih kurs sebesar Rp16.229,63 miliar, maka pada tahun 2015 PLN mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp3.064,26 miliar dari sebelumnya mencatatkan laba sebelum pajak (setelah disajikan kembali) sebesar Rp18.947,53 miliar.

PROFIT BEFORE TAX

With a foreign exchange loss of Rp16,229.63 billion, in 2015, PLN recorded a loss before tax of Rp3,064.26 billion having previously recorded a profit (after restatement) of Rp18,947.53 billion.

LABA TAHUN BERJALAN

PLN mencatatkan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp18.649,50 miliar di tahun 2015, sehingga di akhir tahun 2015 membukukan Laba tahun berjalan sebesar Rp15.585,24 miliar, naik 11,29 dari Rp14.004,08 miliar (setelah disajikan kembali).

PROFIT FOR THE CURRENT YEAR

PLN recorded a deferred tax benefit of Rp18,649.50 billion in 2015, such that as of the end of 2015, the company posted a profit for the current year of Rp15.585,24 billion, improve 11.29 from Rp14,004.08 billion (after restatement).

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN DAN TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2015, sesuai dengan anjuran dan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah, PLN melakukan program revaluasi aset properti yang dimilikinya. Revaluasi aset dilakukan dengan melibatkan pihak penilai independen seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Dari proses tersebut PLN mencatatkan penghasilan komprehensif lain hasil revaluasi sebesar Rp653.441,22 miliar. Selain itu PLN juga mencatatkan keuntungan aktuaria sebesar Rp6.120,61 miliar, dan beban pajak terkait sebesar Rp16.865,98 sehingga total mencatatkan penghasilan komprehensif lain, setelah pajak sebesar Rp642.732,82 miliar.

Setelah ditambah laba bersih tahun berjalan sebesar Rp15.585,24 miliar dan bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp36,98 miliar, maka PLN membukukan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total sebesar Rp658.318,06 miliar, naik dari nilai sebesar Rp10.350,15 miliar di tahun sebelumnya. Dan kepentingan non pengendali Rp15.939 miliar dan bagian atas komprehensif lainnya Rp36,98 miliar.

OTHER COMPREHENSIVE REVENUES AND TOTAL COMPREHENSIVE REVENUE FOR THE CURRENT YEAR

In 2015, in accordance with the advice and opportunities presented by the government, PLN undertook a program of asset revaluation on its property. The asset revaluation was carried out by an independent appraiser, as previously described.

From this process, PLN recorded other comprehensive revenue resulting from the revaluation program of Rp653,441.22 billion. Furthermore, PLN recorded an actuarial gain of Rp6,120.61 billion, and related income tax expense as Rp16,865.98 bringing the total recorded other comprehensive revenue to Rp642,732.82 billion.

With the addition of the net profit for the current year of Rp15,585.24 billion and some of the other comprehensive revenue from associate entities and joint ventures of Rp36,98 billion, PLN recorded Comprehensive Revenue for the Current Year of Rp658,318.06 billion, an increase on the negative Rp110,350.15 billion the previous year. And other non controlling interests as Rp15.939 billion and part of other comprehensive Rp36.98 billion.

LABA BERSIH DAN LABA PERSAHAM TAHUN BERJALAN

Dengan demikian PLN membukukan Laba Tahun berjalan diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp15.569,30 miliar dan diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp15,94 miliar, sehingga Total Laba Bersih Tahun Berjalan adalah sebesar Rp15.585,24 miliar, turun 11,29% dari nilai sebesar Rp14.004,08 miliar di tahun sebelumnya (setelah disajikan kembali).

Dengan laba bersih tersebut, maka laba persaham PLN di tahun 2015 menjadi sebesar Rp337.017per saham, naik dari posisi sebesar Rp302.807per saham di tahun 2014 (setelah disajikan kembali).

NET PROFIT AND EARNINGS PER SHARE FOR THE CURRENT YEAR

PLN recorded Profit for the Current Year attributed to the Owning Parent Entity of Rp15,569.30 billion and attributed to Non-Controlling Interests of Rp15.94 billion, thus Total Net Profit for the Current Year amounted to Rp15.585,24 billion, a fall of 11.29 from the Rp14,004.08 billion the previous year (after restatement).

With this net profit, in 2015, PLN's earnings per share amounted to Rp337,017 improved from Rp302,807 per share in 2014 (after restatement).

EBITDA DAN EBITDA MARGIN

EBITDA Perseroan di tahun 2015 mencatatkan nilai sebesar Rp51,49 triliun, naik 5,75% dibanding tahun 2014. Hal ini selaras dengan naiknya pendapatan Perseroan akibat naiknya jumlah pelanggan dan TTL.

EBITDA Margin 2015 sebesar 18,8%, naik 13,25% dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar 16,6%, disebabkan naiknya beban usaha, terutama beban kepegawaian sebagai langkah penyesuaian kesejahteraan yang belum diimbangi dengan kenaikan produktivitas.

EBITDA AND EBITDA MARGIN

The Company's EBITDA in 2015 was recorded at Rp51.49 trillion, improved 5.75% compared to 2014. This is in line with the Company's increased income from rising customer numbers and electricity tariffs.

The EBITDA Margin in 2015 was 18.8%, improved 13.25% compared to 2014 which was 16,6%, due to increasing operating expenses, specifically employment costs resulting from adjustments to benefits that have not yet been matched with increased productivity.

ARUS KAS

PLN mencatatkan penurunan arus kas pada tahun 2015, sebesar Rp3.515,19 miliar, seperti tampak pada tabel di bawah, dengan penjelasan sebagai berikut.

CASH FLOW

PLN recorded a fall in cash flow in 2015 of Rp3,515.19 billion, as shown in the table below and as explained below.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2014	2015	Perubahan Change	Description
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	37.283,31	35.173,11	(9,25)	Net Cash Provided by Operating Activities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(30.399,07)	(38.297,31)	25,98	Net Cash Used in Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(5.285,60)	(753,59)	(83,89)	Net Cash Provided by Financing Activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.599,24	(3.877,78)	(345,19)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	25.529,97	27.111,53	6,19	Cash and cash equivalents at beginning of year
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(17,68)	362,59	-	Foreign exchange change
Kas dan setara kas akhir tahun	27.111,53	23.596,34	(12,97)	Cash and cash equivalents at end of year

Perseroan memperoleh arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp35.173,11 miliar, turun dari Rp37.283,91 miliar di tahun 2014. Arus kas masuk dari kegiatan operasional terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp219.257,34 miliar, penerimaan subsidi listrik sebesar Rp55.332,38 miliar, penerimaan bunga sebesar Rp627,41 miliar dan penerimaan restitusi pajak penghasilan sebesar Rp2.258,07 miliar (Lihat catatan "Arus Kas" pada Laporan Audit Konsolidasian PLN).

Dana dari hasil operasional tersebut kemudian digunakan untuk membayar jasa dan barang kepada para pemasok sebesar Rp200.977,91 miliar, gaji karyawan sebesar Rp17.325,87 miliar, bunga pinjaman Rp16.896,44 miliar dan pajak penghasilan sebesar Rp3.789,94 miliar.

Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi naik 25,98% dari Rp30.399,07 miliar menjadi sebesar Rp38.297,30 miliar, terutama digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan, selain digunakan untuk membayar pajak penghasilan revaluasi sebesar Rp3.145,21 miliar. Dalam kegiatan investasi ini Perseroan memberi pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp18,70 miliar,

The Company recorded net cash inflow from operating activities of 35,173.11 billion, down dari Rp37,283.91 billion in 2014. The cash inflow was derived from operating activities, primarily cash receipts from customers of Rp219,257.34 billion, electricity subsidies of Rp55,332.38 billion, interest earned of Rp627.41 billion and income tax refunds of Rp2,258.07 billion (See "Cash Flow" in PLN's Consolidated Financial Statement).

Funds generated by operations were used to pay for goods and services from suppliers at Rp200,977.91 billion, employee salaries amounting to Rp17,325.87 billion, loan interest of Rp16,896.44 billion and income tax of Rp3,789.94 billion.

Cash used for investments rose 25,98% from Rp30,399.07 billion to Rp38,297.30 billion and was primarily used to finance the acquisition of Property, plant and equipment and work being implemented, as well as to pay revalued income tax of Rp3,145.21 billion. In its investment activities, the Company provided loans to related parties amounting to Rp18.70 billion, and placed limited use funds in accounts in related banks amounting to RP2,132.99 billion, in addition

dan menempatkan dana yang dibatasi penggunaanya di rekening bank berelasi sebesar Rp2.132,99 miliar, selain menempatkan dana investasi jangka pendek sebesar Rp19,36 miliar. Dari kegiatan investasi ini PLN menerima dividen dari entitas asosiasi sebesar Rp161,01 miliar serta mendapatkan dana investasi dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp16,74 miliar.

Dari sisi pendanaan, PLN mencatat penurunan kas bersih sebesar Rp753,59 miliar, jauh dari penggunaan kas untuk pendanaan di tahun 2014 sebesar 5.285,60 miliar. Penurunan terjadi karena adanya pengeluaran kas meliputi: sejumlah Rp805 miliar untuk pembayaran utang obligasi jatuh tempo, membayar dana pinjaman penerusan sebesar Rp2.819,35 miliar, membayar utang Pemerintah Rp293,79 miliar, membayar dividen tunai Rp3.962,4 miliar, membayar hutang bank sebesar Rp38.032,57 miliar, membayar utang listrik swasta sebesar Rp297,5 miliar dan membayar angsuran sewa pembiayaan sebesar Rp3.067,58 miliar. Sementara penerimaan dana berasal dari tambahan modal disetor tunai sebesar Rp5.000 miliar dan perolehan pinjaman dari bank sebesar Rp43.525,66 miliar.

PLN juga mencatat pengaruh perubahan kurs mata uang sebesar Rp362,60 miliar, sehingga setelah ditambah Kas dan Setara Kas di akhir tahun, dan dikurangi penurunan kas dan setara kas sebesar Rp3.877,78 miliar tersebut, maka posisi Kas dan Setara Kas di akhir tahun menjadi sebesar Rp23.596,34 miliar.

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Kemampuan PLN dalam membayar hutang, dapat dilihat dari tiga rasio keuangan yang relevan, yakni rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan.

Rasio Solvabilitas

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo. Rasio ini juga terpengaruh oleh hasil revaluasi aset yang dilakukan PLN yang membuat total aset dan modal perusahaan naik substansial.

Kenaikan kewajiban pada tahun 2015 menyebabkan solvabilitas Perusahaan terhadap aset turun menjadi 30,89% dari 65,31% di tahun 2014, sedangkan solvabilitas terhadap ekuitas adalah 44,70%, turun dari posisi 188,25% di tahun 2014.

Penurunan solvabilitas tersebut merupakan dampak positif dari pelaksanaan revaluasi aset yang dilakukan PLN, sehingga walaupun liabilitas PLN dari aktivitas penggalangan dana berupa penarikan dana pinjaman bank di tahun 2015 tetap naik, namun jumlah kenaikannya jauh lebih kecil dari peningkatan aset dan modal PLN dari hasil revaluasi.

Dengan demikian di masa mendatang PLN memiliki kapabilitas lebih besar dalam menggalang dana untuk mendukung pengembangan usaha sepanjang masih dalam batas-batas yang dapat ditanggung oleh Perseroan.

to placing short-term investment funds of Rp19,36 billion. From these investments, PLN received dividends from associate entities totaling Rp161.01 billion, as well as investment funds from associate entities and joint ventures of Rp16.74 billion.

In terms of funding, PLN recorded a decrease in net cash of Rp753.59 billion, far from cash usage for funding in 2014 as Rp 5,285,60 billion. This reduction occurred due to cash outlays including: Rp805 billion for the repayment of maturing bonds, Rp2,819.35 billion to pay two step loans, Rp293,79 billion to pay government debt, cash dividends payments of Rp3,962.4 billion, bank loan payments of Rp38,032.57 billion, privately generated electricity loans of Rp297.5 billion and financing lease instalments of Rp3,067.58 billion. Meanwhile, inflows were derived from additional cash paid-in capital of Rp5,000 billion and borrowing from banks amounting to Rp43,525.66 billion.

PLN also booked foreign exchange fluctuation changes of Rp362,60 billion, thus, after the addition of Cash and Cash Equivalents in the end of the year, less the decrease in cash and cash equivalents of Rp3,877.78 billion, as of the end of 2015, the Cash and Cash Equivalents position was Rp23,596.34 billion.

ABILITY TO PAY DEBTS

PLN's ability to pay its debts can be seen in three relevant financial ratios, namely the solvability ratio, liquidity ratio and accounts receivable collectability ratio.

Solvability Ratio

This ratio demonstrates the company's ability to meet maturing short and long term liabilities. This ratio was also affected by the asset revaluation conducted by PLN which resulted in total assets and capital rising substantially.

The increase in liabilities in 2015 caused the Company's solvability to assets to decrease to 30.89% from 65.31% in 2014, while the solvability to equity ratio was 44.70%, down from 188.25% in 2014.

This decline in solvency was positively impacted by PLN's asset revaluation, so despite PLN's increased liabilities from fundraising and the withdrawal of bank loans in 2015, the increase was much less than the increase in assets and capital resulting from the revaluation.

Thus, in future, PLN will have a greater ability to raise funds to support business development, while remaining within the limits that can be borne by the Company.

Likuiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Tahun 2015 rasio likuiditas PLN adalah sebesar 67,81%, turun dari posisi 99,88% di tahun 2014.

Liquidity

This ratio demonstrates PLN's ability to meet its maturing short-term liabilities and is calculated by dividing current assets and current liabilities. In 2015, PLN's liquidity ratio was 67.81%, up from 99.88% in 2014.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang dihitung dengan membandingkan total piutang terhadap total hasil penjualan. Dengan perhitungan tersebut tingkat perputaran piutang PLN adalah sebesar 34,20 hari, sedikit lebih baik dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar 34,41 hari.

Adapun posisi piutang PLN tahun 2015 secara keseluruhan adalah senilai Rp19.834,23 miliar. Dari total piutang usaha tersebut hanya 2,4% yang melebihi masa pembayaran di atas 360 hari. Sisanya adalah terdiri dari piutang usaha dengan masa lewat jatuh tempo kurang dari 360 hari, seperti ditunjukan tabel berikut (Lihat juga uraian "Piutang Usaha").

Accounts Receivable Collectability

The collectability of accounts receivable is calculated by comparing total debts to total sales. With this calculation, PLN's accounts receivable turnover amounted to 34.20 days, slightly better than the position the previous year of 34.41 days.

PLN's receivables position in 2015 overall was worth Rp19,834.23 billion. Of these total trade receivables, only 2.4% exceeded a payment period in excess of 360 days. The remainder was made up of accounts receivable with an overdue period of less than 360 days, as shown in the following table (See also "Accounts Receivable").

Piutang Usaha Berdasarkan Umur	2013	2014	2015	Perubahan Change	Account Receivable Based on Period
Belum Ditagih	13.723,8	16.786,16	17.462,47	5,77%	Not yet billed
Lewat Jatuh Tempo					Past Due
1 s/d 90 hari	1.625,9	2.290,88	1.553,52	(46,05%)	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	158,8	473,33	740,30	72,48%	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	188,5	542,10	940,55	98,12%	More than 360 days
Jumlah	**15.696,9**	**20.092,46**	**20.696,85**	**1,74%**	**Total**

RASIO-RASIO KEUANGAN

Adapun rasio-rasio keuangan lain dari PLN untuk tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut.

FINANCIAL RATIOS

Other financial ratios applicable to PLN for 2014 and 2015 are as follows.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2014	2015	Perubahan Change	Description
RASIO LIKUIDITAS				LIQUIDITY RATIO
Rasio lancar	99,88%	67,81%	(32,11%)	Current Ratio
Rasio kas	31,82%	20,27%	(36,30%)	Cash Ratio
RASIO SOLVABILITAS				SOLVENCY RATIO
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	65,31%	30,89%	(52,70%)	Debt to asset ratio
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	188,25%	44,70%	(76,27%)	Debt to equity ratio
RASIO PROFITABILITAS				PROFITABILITY RATIO
Margin laba kotor	14,69%	13,17%	10,35%	Gross Profit Margin
Margin laba bersih	7,50%	7,43%	(0,93%)	Net Profit Margin
RASIO RENTABILITAS				RENTABILITY RATIO
Rasio laba terhadap ekuitas	6,16%	2,46%	(60,06%)	Return on Equity (ROE)
Rasio laba terhadap aset	2,60%	1,27%	(51,15%)	Return on Assets (ROA)
RASIO OPERASIONAL				OPERATIONAL RATIO
Collection period (hari)	33,50%	34,20%	2,09%	Collection period (times)
Perputaran piutang usaha (hari)	15,99%	10,66%	(33,33%)	Accounts receivable turnover (day)
Perputaran aset tetap (kali)	0,41%	0,27%	(34,15%)	Fixed asset turnover (times)

Rentabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Rentabilitas terhadap ekuitas *(Return On Equity)* di tahun 2015 menjadi 1,84% turun dari angka 7,48% di tahun 2014 (setelah penyajian kembali).

Rentabilitas terhadap aset *(Return on Asset)* juga mengalami penurunan, yaitu menjadi 1,29% dari angka tahun 2014 yang sebesar 2,60% (setelah penyajian kembali). Hal ini menunjukkan kemampuan mencetak laba perusahaan dapat mengkompensasi rugi selisih kurs akibat penambahan kewajiban dalam valuta asing.

Penguatan nilai rupiah di masa-masa mendatang diyakini akan mendatangkan efek positif terhadap kinerja keuangan PLN, mengingat hasil-hasil operasional maupun keuangan yang ditunjukkan di tahun 2015 sudah baik, jika tidak ada rugi translasi valas maupun rugi akibat transaksi valas, mengiringi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap valas.

Selain itu, berlanjutnya program penghapusan subsidi melalui kenaikan tarif listrik di masa mendatang diyakini akan semakin menunjukkan dampak positif terhadap kinerja keuangan PLN.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas laba bersih di tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebagaimana tampak pada tabel di atas, walaupun ada dampak positif dari realisasi penyesuaian tarif listrik, namun karena jumlah subsidi yang diberikan jauh berkurang dan adanya pengarung pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat beban keuangan naik, laba bersih Perseroan, di luar penghasilan komprehensif, turun.

Debt Service Coverage Rasio (DCSR)

Menunjukan tingkat hutang yang masih dapat di jamin oleh ketersediaan modal perusahaan. DSCR disyaratkan oleh para kreditor luar negeri dalam memberikan tambahan pinjaman kepada PLN. Rasio DSCR yang disyaratkan adalah sebesar 1,5 kali. Peningkatan modal PLN sebagai hasil revaluasi aset membuat DSCR menjadi 1,52 kali, menunjukkan adanya potensi peningkatan kemampuan PLN dalam menggalang dana untuk mendukung ekspansi dan merealisasikan Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW.

Consolidated Interest Coverage Ratio

CICR merupakan rasio antara *Consolidated Cash Flow* dengan *Consolidated Interest Expense*, yang merupakan persyaratan *bond holder* dari pendanaan *Global Bond*. Ketentuan CICR sesuai covenant pemegang obligasi adalah sebesar 2 kali. Sementara posisi CICR per akhir tahun 2015 adalah sebesar 3,00 kali.

Peningkatan kinerja PLN dalam menurunkan besaran bauran energi, kebijakan penyesuaian tarif listrik dan upaya peningkatan efisiensi operasional yang dapat meningkatkan laba usaha, membuat PLN berpeluang memperbaiki rasio CICR dan kembali menggali sumber dana dari penerbitan obligasi global di masa mendatang.

Rentability

This ratio shows the Company's ability to generate net profit using the available resources. Rentability on equity (Return on Equity) in 2015 was 1.84%, fell from 7.48% in 2014 (after restatement).

Rentability on assets (Return on Assets) experienced a decline to 1.29% from 2.60% in 2014 (after restatement). This demonstrates the company's ability to make a profit after compensating for losses in foreign exchange due to the increased liabilities in foreign currency.

The future strengthening of the rupiah is expected to have a positive impact on PLN's financial performance, given that the operational and financial results indicated in 2015 are good, if there are no foreign exchange translation losses or losses due to foreign exchange transactions from a weak rupiah against foreign currency.

In addition, the continuation of the subsidy removal policy and subsequent electricity tariff increases will also show a positive impact on PLN's future financial performance.

Profitability

The net profit profitability ratio for 2015 rose compared to 2014, as shown in the above table, despite the positive impact of adjusted electricity tariffs, however, as the amount of subsidy received plummeted and the weak rupiah exchange rate caused operating expenses to rise, the Company's new profit, other than comprehensive revenue, fell.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

This demonstrates the level of debt that can still be guaranteed by the availability of capital. The DSCR is required by foreign creditors to provide additional loans to PLN. The required DSCR ratio is equal to 1.5 times. PLN's increase in capital as a result of asset revaluation resulted in a DSCR of 1.52 times, demonstrating PLN's increased potential ability to raise funds to support expansion and the 35,000 MW Generation Development Program.

Consolidated Interest Coverage Ratio

CICR is the ratio of Consolidated Cash Flow to Consolidated Interest Expenses, which is a requirement for bond holders in the Global Bond fund. The CICR liability according to the covenant of these bond holders amounts to 2 times. Meanwhile, the CICR position per end 2015 was 3.00 times.

PLN's improving performance in reducing the size of the energy mix, its electricity tariff adjustment policy and efforts to improve operational efficiencies that can increase operating profit, have caused PLN to strive to improve its CICR ratio and once again raise funds by issuing global bonds in the future.

IKATAN MATERIAL UNTUK BARANG MODAL

Selain melalui skema FTP I dan II, PLN juga membangun instalasi ketenagalistrikan secara mandiri, dikenal dengan pembangunan pembangkit reguler, jaringan transmisi dan distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan barang modal dalam proses pembangunan instalasi tersebut, PLN mengadakan ikatan pengadaan peralatan utama dengan para pemasok utama, umumnya melibatkan kreditor penyandang dana. Ikatan tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya pembangunan instalasi terkait, umumnya pada tahap EPC.

Ikatan material yang dilakukan dimaksud dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian, yakni: Catatan 55. Ikatan dan Kontinjensi, butir c "Perolehan Barang Modal". Beberapa penjelasan menyangkut ikatan tersebut, meliputi:

Ikatan Perolehan Barang Modal dan Tujuan Perikatan

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan (melalui percepatan pembangunan pembangkit), jaringan transmisi dan distribusi mencapai nilai total sebesar ekuivalen Rp26.488,80 miliar, terdiri dari:

1. Program Percepatan
   - Kontrak Pembangkitan Rp4.293,90 miliar
   - Kontrak Transmisi Rp227,15 miliar
2. Program Konstruksi Rutin Rp16.750,34 miliar

Berkaitan dengan Ikatan ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa – Bali. Proyek ini diharapkan beroperasi pada tahun 2014 dan 2015.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.486 MW di luar Jawa – Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$ 874,65 juta dan Rp 4.790,02 miliar untuk 37 kontrak EPC, atau

MATERIAL COMMITMENT ON CAPITAL GOODS

In addition to the FTP I and II schemes, electricity installation is developed by PLN independently, which is known as regular power plant, transmission and distribution network development. In order to fulfill the needs of capital expenditure during the development process, PLN makes a commitment with main suppliers to provide main equipment, which commonly involves creditors and occurs during the time when the installation is built, generally during the EPC stage.

Material commitments are documented and presented in Note 55 to the Consolidated Financial Statements (Audited): Commitment and Contingencies, point c "Capital Goods Acquisition". Some information related to the commitments are follows:

Capital Goods Procurement Commitments and Commitment objectives

On 31 December 2015, the amount of commitment on capital gods acquisition based on contracts, especially in relation to the procurement of power plants (through acceleration of power plant development), transmission and distribution network, amounted to Rp26,488.80 billion, consisting of:

1. Acceleration Program
   - Power Plant Contracts Rp4,293.90 billion
   - Transmission Contracts Rp227.15 billion
2. Regular Construction Program Rp16,750.34 billion

In relation to these commitments, pursuant to the Decree of the President of the Republic of Indonesia Num. 71 of 2006 dated 5 July 2006, which was amended by the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Num. 59 of 2009 dated 23 December 2009, the Government gives the Company the mandate to build steam power plants at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with an aggregate capacity of 7,490 MW in Java – Bali and 32 power plants with an aggregate capacity of 2,769 MW outside Java – Bali. These projects were expected to be operational by 2014 and 2015.

Power Plant Contracts

On 31 December 2015, the Company has signed 37 Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts consisting of 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in Java – Bali and 27 power plants with a total capacity of 2,486 MW outside Java – Bali. Under the terms of these contracts, the Company is required to pay a down payment to the contractor, at the amount of approximately 15% of the contract value, and the remaining 85% will be financed through loan facilities from banks.

Until 31 December 2015 the Company made a total down payment of USD 874.65 million and Rp4,790.02 million for

sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui biaya sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Desember 2015, PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah masing-masing sebesar Rp2.915,12 miliar.

Selengkapnya lihat Catatan 54c Laporan Keuangan Audit Konsolodasioan PLN 2015 dan pembahasan "Pembangunan Pembangkit" serta "Pengembangan Sistim Transmisi dan Distribusi".

Sumber Dana Perikatan

Sumber dana perikatan yang dilakukan oleh PLN berasal dari empat sumber, yakni: anggaran internal, APBN, SLA dan pinjaman perbankan. Penjelasan lengkap mengenai sumber dana perikatan dapat dijumpai pada uraian "Sumber Pendanaan" di halaman 160.

37 EPC contracts or approximately 15% of the value price, which were recognized as a construction in progress.

Transmission Contracts

Transmission contract is to improve and develop new transmission and sub station in Java and outside Java. This project is funded by self funding and credit facilities from bank.

Regular Construction Contracts

The commitment on capital expenditure for regular construction represents the contracts that have been signed for additional power plants and development of transmission and distribution networks. This project is funded throw self funding and external from foreign debt, assistance and investment project as a part of state budget.

On 31 December 2015, PJB entered into commitments or contracts with various parties to supply materials, Property, plant and equipment, and wholesale services. The transactions are conducted in various currencies with an equivalent amounting to Rp2,915.12 billion.

For further details, see Note 54c to PLN's 2015 Consolidated Financial Statements (Audited), the "Power Plant Development" section and "Transmission and Distribution System Development" section.

Commitment Funding

PLN's funding for these commitments is derived from four sources: the internal budget, state budget, sales level agreements (SLA) and bank loans. A full explanation of these funding sources can be seen in "Funding Sources" on page 160.

Nominasi Ikatan untuk Barang Modal

Nominasi ikatan bergantung pada persyaratan teknis dan persyaratan kreditor dalam proses pembangunan instalasi dimaksud. Adapun dalam laporan Keuangan Audit Konsolidasian, nilai ikatan tersebut disajikan dalam mata uang rupiah (untuk perjanjian dalam rupiah) dan dalam mata uang US$ untuk ikatan dalam mata uang asing lainnya.

Nomination on Capital Goods Commitment

The nomination of commitments depends on technical and the creditors' requirements during the development process. In the Consolidated Financial Statement (Audited), the commitment value is stated in Rupiah (for the agreements in Rupiah) and in USD for the commitment with foreign currencies.

REALISASI BELANJA MODAL

Dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas daya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh. Disamping berasal dari penambahan daya masyarakat golongan mampu, pertambahan kebutuhan daya listrik adalah sejalan dengan program peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional, yang ditargetkan mencapai angka 97,4% diakhir tahun 2019 mendatang. Untuk mencapai sasaran elektrifikasi rasio tersebut, PLN menargetkan penambahan daya listrik sebesar 7 GW per tahun.

Oleh karena itu, di tahun 2015 PLN terus merealisasikan pembangunan berbagai proyek pembangkit maupun sistim transmisi dan distribusi. Namun demikian berbagai hambatan yang masih dijumpai di lapangan membuat nilai investasi (belanja modal) di tahun 2015 mencapai Rp45.279,10 miliar naik 71,98% dari realisasi investasi pengembangan pada tahun 2014 yang sebesar Rp37.800 miliar.

Adapun berbagai proyek yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2015 lalu, mencakup:

- Pembangunan beberapa instalasi pembangkit listrik baru.
- Pembangunan proyek jaringan transmisi.
- Pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi.
- Peningkatan sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan sistem penunjang.

Adapun rekapitulasi investasi pembangkitan, transmisi, distribusi dan pengembangan sarana pendukung lain di tahun 2015 adalah sebagai berikut.

CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

This was conducted with the aim of increasing capacity to meet the continually growing demand for electricity. Derived not only from rising demand for additional power from affluent customers, an increase in electricity demand is in line with the rising national electrification ratio, which will reach 97.4% by the end of 2019. To achieve the targeted electrification ratio, the company aims to increase electrical power by 7GW per year.

Therefore, in 2015, PLN continued to realize the construction of various generation projects and transmission and distribution systems. However, various obstacles were encountered in the field resulting in investment value (capex) in 2015 amounting to Rp45,279.10 billion, rose 71,98% from realized investments in 2014 of Rp37,800 billion.

Various projects were successfully implemented throughout 2015, including:

- Construction of various new power plant installations.
- Construction of the transmission lines.
- Implementation of distribution network development.
- Improvements to the Company's Information Technology system and supporting system.

A summary of investments in power plant, transmission, distribution and supporting infrastructure development in 2015 is as follows.

Jenis	Satuan Unit	Rencana Plan	Realisasi Realization	Perbandingan Comparison	Type
Pembangkit	MW	3.868	2.053	53,08	Power Plant
Transmisi	kms	4.717	2.063	43,74	Transmission
Gardu Induk	MVA	7.480	5.645	75,47	Sub-station
Distribusi					Distribution
JTM	kms	20.474	15.740	76,88	JTM
JTR	kms	15.389	33.136	25,32	JTR
Gardu	MVA	3.757	3.596	95,71	Station

REALISASI DIBANDINGKAN TARGET

Pencapaian target-target operasional utama telah disampaikan dalam bentuk tabel, sebagai ringkasan kinerja yang mempengaruhi kinerja keuangan sebagaimana diuraikan. Oleh karenanya pada bagian ini hanya ditampilkan target-target capaian di bidang keuangan PLN di tahun 2015.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, beberapa target kinerja di bidang keuangan terpenuhi namun beberapa diantaranya tidak terpenuhi. Penyebab umum dari tidak tercapainya target-target di bidang keuangan akhir, yakni laba bersih, adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di luar kendali manajemen. Adapun uraian mendetail mengenai penyebab tercapai maupun tidak tercapainya target dimaksud, ada pada pembahasan topik-topik yang relevan dimaksud.

Ringkasan capaian beberapa target utama di bidang keuangan tersebut ditunjukkan dalam tabel singkat berikut.

ACHIEVEMENTS COMPARED TO TARGETS

The achievement of key operational targets has been presented in table form to summarize performance affecting indicated financial performance. Therefore, in this section only PLN's financial target achievements for 2015 are shown.

Based on the above description, some financial performance targets were met while others were not. The general reason for not achieving financial targets, namely net income, was the weakening of the rupiah, which was beyond the control of management. A detailed description of the reasons for achieving or not achieving intended targets is discussed in the relevant topics.

A summary of some of the main financial target achievements is shown in the following brief table.

Keterangan	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization		Perubahan Change		Description
		(a)	2014 (b)	2015 (c)	(c) / (a)	(c) / (b)	
Pendapatan Penjualan Listrik	Rp miliar Rp billion	228.713,26	186.634,48	209.844,54	91,75%	112,44%	Revenue from Electricity Sales
Beban Usaha	Rp miliar Rp billion	251.060,35	265.311,23	246.262,29	98,09%	92,82%	Operating Expenses
Laba Usaha	Rp miliar Rp billion	33.301,63	27.409,96	27.637,24	82,99%	100.83%	Operating Income
Subsidi	Rp miliar Rp billion	66.049,93	99.303,25	56.552,53	85,62%	56,95%	Subsidy
Laba Bersih	Rp miliar Rp billion	4.521,45	14.004,08	15.585,24	433,70%	111,29%	Net Profit

TARGET-TARGET KUANTITATIF PADA TAHUN MENDATANG

PLN telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2016. Beberapa target yang diharapkan dicapai untuk tahun operasional 2016, diantaranya tercakup pada tabel berikut.

QUANTITATIVE TARGETS FOR THE COMING YEAR

PLN has developed a series of quantitative targets that are outlined in the 2016 work plan. Some of these targets to be achieved in the 2016 operating year are included in the following table.

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi Realization 2015	Target 2016	Perubahan Change	Description
Penjualan Tenaga Listrik	GWh	202.846	227.321	12,07%	Sales of Electric Power
Penambahan Pelanggan	Pelanggan Customer	3.674.746	3.808.279	3,63%	New Customer
Penambahan Daya Tersambung	MVA	6.552	9.440	44,09%	Installed Capacity Addition
Pendapatan Penjualan tenaga Listrik	Rp miliar Rp billion	209.844,54	264.789,29	26,18%	Revenue
Laba Usaha setelah subsidi	Rp miliar Rp billion	27.637,24	53.940,97	95,17%	Operating Profit
Laba Bersih	Rp miliar Rp billion	15.585,24	11.863,33	23,88%	Net Profit

Dividen dan Kebijakan Dividen

PLN memiliki kebijakan pembagian dividen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun demikian, realisasi pembagian dividen setiap tahun operasional ditetapkan dalam RUPS untuk tahun buku bersangkutan. Adapun kebijakan umum mengenai pembagian dividen laba usaha mencakup:

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Laba bersih tersebut akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang prosentasinya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
3. Dividen harus sudah diambil dalam waktu maksimal lima tahun, atau jika tidak diambil akan dimasukkan kedalam dana cadangan, kecuali dividen untuk Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya dapat memberikan tantiem kepada Komisaris dan Direksi jika seluruh akumulasi kerugian telah terkompensasikan oleh akumulasi laba tahun-tahun selanjutnya.

Pada tahun 2015, PLN membagikan dividen kepada Pemerintah sebesar Rp3.962,4 miliar yang disisihkan dari laba bersih tahun 2014, sedangkan pada tahun 2014 PLN tidak membagikan dividen karena pada tahun 2013 PLN masih membukukan rugi bersih operasional hingga sebesar Rp26,2 triliun.

Total Dividen Dibagikan

Total Dividen Dibagikan Pembayaran dilakukan 4 kali, yakni: Angsuran 1 pada tanggal-26 Juni 2015 sebesar Rp990,60 miliar, Angsuran kedua tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp600,00 miliar, Angsuran 3 pada 21 Agustus 2015 sebesar Rp990,60 miliar dan Angsuran ke 4 pada tanggal 22 September 2015, sebesar Rp1.381,20 miliar.

Nilai dividen tersebut merepresentasikan rasio dividen per saham sebesar 85.772 dividen per saham, jumlah saham adalah sebesar 46.197.380 untuk tahun 2015 atau PE rasio 33,8%.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN / MANAJEMEN

PLN merupakan perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Negara RI, sehingga tidak ada program penawaran saham untuk karyawan maupun untuk Manajemen.

REALISASI PENGGUNAAN DANA OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Pada tahun 2015, PLN tidak menerbitkan obligasi maupun efek lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Demikian juga pada tahun 2014. Penerbitan obligasi / efek terakhir (yakni Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan) dilakukan pada tahun 2013.

Dividends and Dividend Policy

PLN has a dividend policy setting out in the Company's Articles of Association, however, the actual distribution of dividends each operational year is determined at the GMS for the financial year concerned. The general policy regarding dividend distribution profits includes:

1. The Company's net profit for the financial year as stated in the balance sheet and profit and loss statement approved by the General Meeting of Shareholders is divided accordingly as determined by the meeting.
2. The net profit will be distributed between reserves, dividends and others with respective percentages determined each year by the GMS.
3. Dividends must be taken within a maximum of five years, or if not taken shall be entered into a reserve fund, except for dividends to the Government of the Republic of Indonesia.
4. The Company can only give the bonus to the Board of Commissioners and the Board of Directors if the entire accumulated losses have been compensated by the cumulative gains in the following year.

In 2015, PLN paid dividends to the Government of Rp3,962.4 billion that has been reserved from net profit in 2014, while in 2014, the company did not distribute dividends for 2013 as PLN had posted a net operational loss of Rp26.2 trillion.

Total Dividends Were Paid

Total dividends were paid out across four tranches: Tranche 1 on 26 June 2015 for Rp990.60 billion, Tranche 2 on 22 July 2015 for Rp600.00 billion, Tranche 3 on 21 August 2015 for Rp990.60 billion and Tranche 4 on 22 September 2015 for 1,381.20 billion.

This dividend amount represents a dividend per share ratio of 85.772 dividend per share, number of shares outstanding 46,197,380 for 2015 or a PE ratio of 33.8%.

EMPLOYEE / MANAGER SHARE OWNERSHIP PROGRAM

The shares of PLN are 100% owned by the Indonesian Government, thus there is no share ownership program for employees or the management.

USE OF FUNDS RAISED FROM BONDS AND OTHER SHARES

In 2015, PLN did not issue any bonds or other shares to finance electricity infrastructure construction. No bonds or shares were issued in 2014 either. The most recent issuance of bonds / shares (Bonds and Sustainable Ijarah Sukuk) was in 2013.

Seluruh dana penerbitan Obligasi / Sukuk Ijarah Berkelanjutan tersebut telah digunakan sebagaimana dijelaskan pada prospektus penerbitannya.

All funds raised from the issuance of bonds and Sustainable Ijarah Sukuk were used as previously disclosed in the issuance prospectus.

INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

Informasi Material Mengenai

1. **Investasi untuk Pemeliharaan**

   PLN memiliki kebijakan menyediakan dana untuk pemeliharaan rutin guna memastikan keandalan sistim kelistrikan eksisting. Dana tersebut dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan pembangkit eksisting, pemeliharaan sistem transmisi, mengganti komponen utama gardu induk, dan lain-lain.

   Pada tahun 2015, PLN merealisasikan berbagai rencana investasi pemeliharaan, meliputi:
   - Pemeliharaan 748 unit pembangkit dengan kapasitas daya 47.663 MW, dimana 621 unit pembangkit dengan daya 34.028 MW diantaranya telah diselesaikan dan 127 pembangkit dengan 13.635 MW diantaranya masih berlangsung.

   Total dana investasi rutin yang dikeluarkan di tahun 2015 adalah sebesar Rp 17.837,07 triliun. Rincian Kegiatan Investasi terkait juga dapat dilihat pada pembahasan "Pengembangan Pembangkit" dan "Pengembangan Sistim Transmisi dan Distribusi".

2. **Ekspansi**

   PLN melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas daya listrik melalui pembangunan unit pembangkit sendiri, membeli daya listrik dari pembangkit swasta maupun melalui sewa pembangkit. Pembangunan pembangkit dilakukan melalui skema reguler, FTP 1 maupun FTP 2, dan yang terakhir sebagai integrasi dari seluruh program tersebut, Program Pembangkit 35.000 MW. Selain pembangkit, PLN juga membangun jaringan transmisi dan distribusi, termasuk unit-unit gardu induk. Pada kondisi tertentu, PLN juga adakalanya melakukan ekspansi kegiatan usaha terkait ketenagalistrikan dengan mendirikan entitas anak usaha.

   Di tahun 2015, PLN merencanakan membangun pembangkit dengan total kapasitas sebesar 3.868 MW dan berhasil diselesaikan sebesar 2.053 MW, sedangkan sisanya masih dalam tahap konstruksi dan pengujian. Untuk transmisi dari sebesar 4.717 kms yang direncanakan, berhasil diselesaikan sebesar 2.063 kms, sedangkan sisanya masih dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan. Untuk gardu induk, dari sebesar 7.480 MVA yang direncanakan, berhasil diselesaikan sebesar 5.645 MVA, sedangkan sisanya masih dalam konstruksi dan pengujian.

   Total dana ekspansi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2015 adalah sebesar Rp 50,22 triliun.

OTHER FINANCIAL INFORMATION

Material Information On

1. **Investment for Maintenance**

   PLN has a policy to allocate funds for regular maintenance activities aimed at ensuring the existing electricity system's reliability. The fund is disbursed to maintain the existing power plants and transmission systems as well as to replace the main components of substations, etc.

   In 2015, PLN implemented various maintenance investment plans, as follows:
   - Maintenance of 748 generator units with 47,663 MW capacity, with the maintenance for 621 units with 34,028 MW capacity has been completed, and the remaining 127 units with 13,635 MW capacity are still undergoing maintenance.

   In 2015, the disbursement of regular investment costs amounted to Rp17,837.07 trillion. Further details of these investment activities can also be found in the "Power Plant Development" section and "Transmission and Distribution System Development" section.

2. **Expansion**

   PLN expands its business by adding power generation capacity, which is fulfilled by developing its own power plants, by purchasing electricity from private parties, and by renting power plants. The development of new power plants is done under the regular schemes, namely FTP I and FTP II, and the latter as an integration of all programs, the 35,000 MW Power Plant Program. Besides power plants, PLN also develops transmission and distribution lines, including substations. Under certain conditions, PLN sometimes expands to other business activities related to electricity by establishing new subsidiaries.

   In 2015, PLN planned to build power plants with a total capacity of 3,868 MW. As many as 2,053 MW of capacity have been completed, whereas the remainder is still in the construction and test phase. The transmission line that PLN planned to build in 2015 is 4,717 kms in total, of which 2,063 kms have been completed, while the remainder is in the construction phase and land acquisition process. In regards to substations, PLN planned to build 7,480 MVA, of which 5,645 MVA have been completed, while the remainder are still in the construction and test phase.

   In 2015, the total fund disbursed for expansion activities was to Rp50.22 trillion.

Uraian lebih lengkap mengenai kegiatan ekspansi melalui pembangunan unit pembangkit, sistim transmisi/distribusi termasuk rangkaian Gardu Induk dapat dilihat pada pembahasan "Pengembangan Pembangkit" dan "Pengembangan Sistim Transmisi dan Distribusi". Sementara pendirian perusahaan baru dapat dilihat pada "Entitas Anak Usaha" dan "Profil Perusahaan".

3. **Divestasi**
   Tidak ada Divestasi usaha pada periode laporan.

4. **Penggabungan / Peleburan Usaha**
   Tidak ada penggabungan/peleburan usaha pada periode laporan.

5. **Akuisisi**
   Tidak ada Akuisisi perusahaan lain pada periode laporan.

6. **Restrukturisasi Utang/Modal**
   Tidak ada restrukturisasi Utang/Modal pada periode laporan.

INVESTASI BARANG MODAL

Setiap tahun, PLN merancang dan merealisasikan kegiatan investasi pembelian barang modal dalam rangka menambah kapasitas produksi, melakukan pemeliharaan pembangkit, membeli peralatan dalam rangka membangun transmisi, dan peralatan-peralatan utama untuk perbaikan maupun pembangunan gardu induk.

Total alokasi belanja barang modal dalam rangka investasi maupun ekspansi di tahun 2015 adalah sebesar Rp60.205,36 miliar, dengan angka realisasi mencapai Rp45.279,10 miliar.

Rincian Realisasi Kegiatan Investasi Barang Modal dapat dilihat pada pembahasan "Pengembangan Pembangkit" dan "Pengembangan Sistim Transmisi dan Distribusi".

TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pada tahun 2015, Perseroan mulai melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya.

Total kewajiban PLN dalam mata uang asing yang telah dilindungi dengan fasilitas lindung nilai adalah sebesar US$ 145.000.000.

Transaksi lindung nilai tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait.

For further details on expansion activities (development of generator units and transmission/distribution systems including substation units) refer to the "Power Plant Development" section and the "Transmission and Distribution System Development" section. The development of new business units is explained in the "Subsidiaries" section and "Company Profile" section.

3. **Divestment**
   There were no business divestment conducted during the reporting period.
4. **Merger**
   There were no merger conducted during the reporting period.

5. **Acquisition**
   There were no acquisition conducted during the reporting period.

6. **Debt/Capital Restructuring**
   There were no Debt/Capital Restructuring conducted during the reporting period.

CAPITAL GOODS INVESTMENT

Every year, PLN plans and implements investment activities on capital goods to expand production capacity, maintain power plants, purchase equipment for building transmission lines as well as main equipment for maintaining and building substations.

The allocation of capital expenditure due to investment and expansion activities in 2015 was Rp60,205.36 trillion in total, and its realization reached Rp45,279.10 trillion.

For further details on Realization of Capital Expenditure Investment Activities refer to the "Power Plant Development" section and "Transmission and Distribution System Development" section.

HEDGING TRANSACTIONS

In 2015 the Company began hedging its transactions against multiple exposures in its commitments and contingencies related to its foreign currency transactions.

PLN's total liabilities in foreign currencies which have been protected by hedging amount to US$ 145,000,000.

Hedging transactions are carried out in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Num. 09/MBU/2013 on General Policy for Hedging Transactions in State-Owned Enterprises, along with the technical instructions related to the transactions.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Selain perikatan perolehan barang modal, Perseroan juga memiliki perikatan pasokan bahan bakar dan perjanjian pembelian tenaga listrik dalam jangka panjang dengan para mitra usaha, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Perjanjian pengadaan bahan bakar

a. **Bahan bakar gas**

PLN dan anak perusahaan memiliki perikatan penting berupa perjanjian pemasokan gas dengan beberapa operator pengelola blok migas. Perjanjian pemasokan tersebut berlaku dalam jangka pendek maupun panjang, diantaranya berlaku untuk periode sampai dengan tahun 2027, volume pembelian dengan masing-masing pemasok bervariasi namun pemasok gas terbesar adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Per tanggal 31 Desember 2015 harga pembelian gas pada titik penyerahan berkisar antara US$3,09 sampai dengan US$10,28 per MMBtu untuk gas pipa. Sedangkan untuk LNG antara US$7,17 sampai US$10,61 per MMBtu.(lihat catatan 54, Laporan Keuangan Audited Konsolidasian "Ikatan dan Kontinjensi", butir a)

b. **Bahan Bakar Batubara**

PLN dan Anak perusahaan juga memiliki perikatan perjanjian pemasokan Batubara dengan beberapa pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) proses Produksi. Perjanjian tersebut pada intinya mengatur volume pasokan, waktu pengiriman dan kualitas batubara. Harga pembelian akan ditinjau secara berkala dan ditetapkan sesuai kesepakatan berdasarkan pada patokan harga yang berlaku. Jangka waktu perjanjian bervariasi, dengan periode terpanjang berlaku sampai dengan tahun 2031. Beberapa pemasok batubara utama PLN adalah PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro.

Per tanggal 31 Desember 2015 harga stockpile pembelian batubara berkisar antara Rp341.867 dan Rp763.993 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, AFT *(Ash Fusion Temperature)* dan HGI.

Selain melalui mekanisme jual-beli batubara biasa, PLN memenuhi kebutuhan batubara melalui mekanisme kerja sama operasi penambangan batubara dengan beberapa pemasok (7 pemasok) dengan pasokan terbesar berasal dari PT Tansri Madjid Energi yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan.

c. **Bahan Bakar Minyak**

Perseroan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang berlaku sampai dengan 8 Oktober 2004. Perjanjian ini telah di addendum pada tanggal 16 Mei 2007, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Besides the commitment on capital expenditure, the Company also has a commitment on fuel supply and power purchase agreements for long term with several partners, as described below:

Fuel Supply Agreements

a. **Gas**

PLN and its subsidiaries have material commitments in the form of gas supply agreements with several operators of oil and gas blocks. These supply agreements are for both short and long term, some of which will end in 2027. The amount purchased from each supplier varies, but the largest one is from PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

As at 31 December 2015, the gas price is at the point of delivery ranges from USD 3.09 to USD 10.28 per MMBtu for piped gas. Meanwhile, the price of LNG ranges from USD 7.17 to USD 10.61 per MMBtu (see Note 54 on the Consolidated Financial Statements (Audited): "Commitments and Contingencies", point a).

b. **Coal**

PLN and its subsidiaries also have commitments on coal supply agreements with several holders of Mining Production Operation Permits (Production Operation IUP). Basically, the agreement determines the volume of the coal supplied, delivery time and coal quality. The coal price is periodically reviewed and determined in the agreement based on the prevailing benchmark price. The agreement periods vary, with the longest being in effect until 2031. Several of PLN's main coal suppliers are PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, and PT Adaro.

As at 31 December 2015, the stockpile price of coal ranges from Rp341,867 to Rp763,993 per ton, which is adjusted to calorific value, ash content, sulfur content, water content, AFT (Ash Fusion Temperature) and HGI (Hardgrove Grindability Index).

In addition to an ordinary coal trading mechanism, PLN fulfills its coal needs through the mechanism of a coal mining operation partnership with seven suppliers, of which the largest is PT Tansri Madjid Energi, in Muara Enim, South Sumatra.

c. **Oil**

The Company and Pertamina entered into an Main Contract of Oil Trading Num. 071.PJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001, which was effective until 8 October 2004. The addendum to that contract was effective from 16 May 2007 until 31 December 2011.

Perjanjian ini kemudian diaddendum pada tanggal 14 Agustus 2009, kemudian diadendum untuk kedua kalinya pada tanggal 1 Juni 2010. Pada tanggal 7 November 2011 PLN dan Pertamina melaksanakan addendum ke-III atas perjanjian tersebut. Pada intinya perjanjian pengadaan BBM dengan Pertamina mengatur harga, tempat penyerahan, denda keterlambatan pengiriiman maupun pembayaran.

Selengkapnya lihat catatan 54.a laporan Keuangan Audited Konsolidasian "Ikatan dan Kontinjensi".

The agreement was then amended on 14 August 2009, and for the second time the amendment was issued on 1 June 2010, and then for the third time on 7 November 2011. Essentially, the contracts of oil provision between PLN and Pertamina set forth the price, place of delivery, and penalties for delayed delivery or payment.

For further details see Note 54.a to the Consolidated Financial Statements (Audited): "Commitments and Contingencies".

d. **Uap Panas Bumi**

Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pertamina Geothermal Energy untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 3 tahun yang berakhir tahun 2037, dan untuk daerah Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030, serta untuk PLN Lahendong selama 30 tahun yang berakhir tahun 2038.

d. **Geothermal Steam**

The Company has a geothermal heat procurement agreement with Pertamina Geothermal Energy for Kamojang area for 3 years until 2037, for Gunung Salak and Darajat area for 30 years until 2030 and for PLN Lahendong for 30 years until 2038.

Perjanjian jual beli tenaga listrik

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PPA dan ESC dengan IPP. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumber daya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" dan karena itu PSAK 30, "Sewa" untuk menentukan apakah Perjanjian tersebut termasuk dalam sewa keuangan atau sewa operasi tidak diaplikasikan, oleh karena itu terdapat penyajian kembali pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 atas hal tersebut. Dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 56.

Perusahaan menampilkan dampak apabila perjanjian jual beli tenaga listrik termasuk sewa sesuai dengan ISAK 8 di Catatan 57.

Untuk IPP yang perjanjiannya adalah pembelian sewa, maka Perusahaan dan entitas anak perlu melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Lihat Catatan 3l untuk kebijakan akuntansi mengenai sewa.

Biaya yang dibayarkan Perusahaan untuk membeli tenaga listrik dari perjanjian yang tidak berbentuk perjanjian sewa dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Power Purchase Agreements (PPA)

The Company and its subsidiaries have various PPAs and ESCs with IPPs. Under those contracts, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Management is of the opinion that power purchase agreements are not arrangements that are, or contain, leases based on ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease", and hence SFAS 30, "Lease" in determining whether such arrangements fall into finance lease or operating lease are not applied, hence there is a restatement as at and for the year ended December 31, 2014 on that matter. The impact of restatement on the consolidated financial statement is presented in Note 56.

The Company disclosed the impact as if power purchase agreements contain leases in accordance with ISFAS 8 in Note 57.

For IPP with lease agreement, the Company and its subsidiaries have assessed whether it is a finance or an operating lease based on the contractual terms of the agreement. Please refer to Note 3l for the accounting policies for leases.

The costs paid to purchase electricity on agreements that are not lease agreements are recognized as expenditures in profit or loss account as incurred.

Pada tanggal 31 Desember 2015, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian dengan 44 perusahaan pengelola pembangkit listrik yang sudah beroperasi sebagai sewa pembiayaan.
2. Perjanjian jual beli listrik dengan 5 perusahaan pemasok listrik yang sudah beroperasi sebagai sewa operasi.
3. Perjanjian jual beli listrik dengan 49 perusahaan pemasok listrik yang masih dalam pengembangan dan perusahaan listrik skala kecil dengan kapasitas kurang dari 50 MW, diperlakukan sebagai transaksi pembelian normal.

Butir-butir pokok perjanjian jual beli listrik tersebut adalah:

1. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.
2. Penetapan AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
3. Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi dan pemeliharaan.

   Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

   Selengkapnya lihat Catatan 54b Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN Tahun 2015.

Fasilitas pinjaman belum digunakan

Penerusan pinjaman

Per akhir tahun 2015, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman penerusan yang belum digunakan sebesar Rp38.729,80 miliar. Fasilitas ini akan berakhir antara tahun 2016 sampai dengan 2053.

Perjanjian pinjaman program percepatan

Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

By 31 December 2015, the significant agreements between the Company, including its subsidiaries, and the IPPs were as follows:

1. Agreements with 44 companies that manage power plants that have been operating as a financing lease.
2. Power Purchase Agreements with 5 companies that supply electricity and are in operations as an operation lease.
3. Power Purchase Agreements with 49 companies that supply electricity are still being developed, as well as other small scale companies with a capacity of less than 50 MW, but are treated as regular purchasing transactions.

The main points of the power purchase agreements are as follows:

1. The agreements are effective from the date of signing and the electricity purchase is valid from 19 to 30 years, commencing from the commercial production date.
2. Determination of AF, which is the power supply factor that should be absorbed by the Company.
3. The electricity price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formula as stated in the agreements which, among others, regulate the recovery of capital expenses as well as the payment of fixed operation and maintenance expenses, fuel expenses, and also variable operation and maintenance expenses.

   In regards to geothermal heat power plants, the electricity price is determined by a certain formula as stated in the agreement, such as Energy Charge and Capacity Charge.

   For further details, see Note 54b to PLN's 2015 Consolidated Financial Statements (Audited).

Unused Loan Facilities

Two-step loans

In 2015, the Company still has unused two-step loans facilities amounting to Rp38,729.80 billion. The expiration dates of these facilities range between 2016 and 2053.

Loan Agreements for Fast Track Program (FTP)

The purpose of these loan facilities is to finance 85% of EPC contract value for the fast track program. The loan term is 36 months, which includes the period of credit provision and is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia (PP) Num. 91 of 2007, superseding the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Num. 86 of 2006 on Government Guarantee for Fast Track Program of Coal Power Plant Development. In regards to these loans, the Company is obliged to comply with several general restrictions.

Selengkapnya lihat Catatan 54d Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN tahun 2015.

Program operasi dan pemeliharaan

Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Sampai akhir tahun 2015 nilai komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebesar ekuivalen Rp4.130,91 miliar. Selengkapnya lihat Catatan 54e Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN 2015.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi, PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dalam rangka menerapkan ketentuan SAK, tersebut, pada tahun 2015 PLN telah menerapkan beberapa standar akuntansi keuangan baru (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Penjelasan ringkas dan dampaknya diuraikan pada tabel berikut:

1. Perubahan Standar Akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015 menyebabkan perubahan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Standar baru dan revisi yang berlaku berikut telah diterbitkan.
   - PSAK No. 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
   - PSAK No. 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja.
   - PSAK No. 66, Pengaturan Bersama,
   - PSAK No. 67, Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain.
   - PSAK No. 68, Pengukuran Nilai Wajar.

2. Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan:
   - PSAK No. 4 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
   - PSAK No. 15 (Revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
   - PSAK No. 46 (Revisi 2014), Akuntansi Pajak Penghasilan
   - PSAK No. 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset
   - PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian
   - PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
   - PSAK No. 60 (Revisi 2014), "nstrumen Keuangan: Pengungkapan

For further details, see Note 54d to PLN's 2015 Consolidated Financial Statements (Audited).

Operation and Maintenance Program

The Company has signed Operation and Maintenance Agreements with several contractors. The contract value comprises fixed and variable portions. The contractors have to achieve certain targets and will be penalized if these targets are not met. As the end of 2015, the value of commitments with contractors for fixed portions amounted to Rp4,130.91 billion. For further details, see Note 54e to PLN's 2015 Consolidated Financial Statements (Audited).

ADOPTION OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

In preparing the consolidated financial statements, PLN always complies with the rules set forth in the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

In order to comply with the stipulations of the PSAK, in 2015 PLN adopted the new PSAK and the Interpretations of Indonesian Financial Accounting Standards (ISAK). A short explanation including the impacts is described below:

1. Changes in Financial Accounting Standards effective since 1 January 2015 made significant change in consolidated financial statement. New standards and revisions applied are:
   - SFAS Num. 1 (Revised 2013), Financial Statement Presentation
   - SFAS Num. 24 (revised 2013), Employee Benefits
   - SFAS Num. 66, Joint Arrangements
   - SFAS Num. 67, Disclosures of Interest in Other Entities
   - SFAS Num. 68, Fair Value Measurement.

2. The following new standards and amendments to existing standard have been published and are mandatory for the Company's consolidated financial statements for period beginning on or after January 1, 2015 which do not have a material impact to the consolidated financial statements of the Company:
   - SFAS Num. 4 (Revised 2013), Separate Financial Statements
   - SFAS Num. 15 (Revised 2013), Investments in Associates and Joint Ventures
   - SFAS Num. 46 (Revised 2014), Income Taxes
   - SFAS Num. 48 (Revised 2014), Impairment of Assets
   - SFAS Num. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation
   - SFAS Num. 55 (Revised 2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement
   - SFAS Num. 60 (Revised 2014), Financial Instruments: Disclosures

- PSAK No. 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
- ISAK No. 15 (Revisi 2015), Batas Aset Imbalan Pasti
- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Penilaian Ulang Derivatif Melekat

- SFAS Num. 65, Consolidated Financial Statements
- ISFAS Num. 15, The Limit on a Defined Benefit Asset
- ISFAS Num. 26 (Revised 2014), Reassessment of Embedded Derivatives

PENYAJIAN KEMBALI

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, untuk tahun 2015 seiring dengan penerapan ISAK 8, Perseroan melakukan penyajian kembali atas catatan akun-akun tertentu yang terpengaruh oleh penerapan ISAK 8.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menerbitkan PSAK No. 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan PSAK No. 66 (revisi 2015), "Pengaturan Bersama" yang disyaratkan untuk diaplikasikan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi standar ini sesuai dengan ketentuan transisi yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) dan PSAK No. 66 (revisi 2015) dengan berlaku surut. Lihat Catatan 2 untuk ringkasan penjelasan atas perubahan terkait.

Di tahun 2015, manajemen melakukan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa sesuai dengan ISAK 8.

Akun-akun laporan keuangan berikut ini disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari penerapan PSAK No. 24, PSAK No. 66, dan penyajian kembali ISAK 8:

RESTATEMENT

As previously discussed, for 2015, due to the implementation of ISAK 8, the Company restates certain accounts which were influenced by the application of ISAK 8.

The Indonesian Financial Accounting Standards Board issued SFAS Num. 24 (revised 2013), "Employee Benefits" and SFAS Num. 66 (revised 2015), "Joint Arrangements" which is required to be applied for financial years beginning and or after January 1, 2015. The Company and its subsidiaries have adopted this standard in accordance with the provisions of SFAS Num. 24 (revised 2013) and SFAS Num. 66 (revised 2015) retrospectively. Please refer to Note 2 for a brief description of the changes.

In the year 2015, management reassessed the application of ISFAS 8 for power purchase agreements and management is of the opinion that power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8.

The following financial statement line items were adjusted to reflect the implication of applying SFAS Num. 24, SFAS Num. 66, and restatement of ISFAS 8:

Keterangan	Jumlah Sebelum penyesuaian 31 Desember Balance Before adjustment December 31,2014	Penyesuaian Adjustment			Jumlah Setelah penyesuaian 31 Desember/ Balance Before adjustment December 31,2014	Description
		PSAK 24 SFAS 24	Tanpa ISAK 8 Without ISFAS 8*1)	Reklasifikasi karena PSAK 66 Reclassification due to SFAS 66		
Laporan posisi keuangan konsolidasian						Consolidated statement of financial position
Aset tidak lancar						Non-current assets
Aset tetap	501.706.275	-	(61.304.901)	-	440.401.374	Property, plant and equipment
Investasi pada entitas asosiasi	2.318.945	-	-	(1.014.234)	1.304.711	Investment in associates
Investasi pada ventura bersama	253.648	-	-	1.014.234	1.267.882	Investment in joint ventures
Aset pajak tangguhan	2.899.848	3.789.133	(6.622.233)	-	66.748	Deferred tax assets
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.752.797	-	4.880.193	-	8.632.990	Deferred tax liabilities - net
Utang sewa pembiayaan	128.096.528	-	(105.337.567)	-	22.758.961	Lease liabilities
Utang listrik swasta	6.654.142	-	689.367	-	7.343.509	Electricity purchase payable
Liabilitas imbalan kerja	25.922.391	15.156.544	-	-	41.078.935	Post employment benefit
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	12.654.991	-	16.926	-	12.671.917	Related parties

Keterangan	Jumlah Sebelum penyesuaian 31 Desember Balance Before adjustment December 31,2014	Penyesuaian Adjustment			Jumlah Setelah penyesuaian 31 Desember/ Balance Before adjustment December 31,2014	Description
		PSAK 24 SFAS 24	Tanpa ISAK 8 Without ISFAS 8*1)	Reklasifikasi karena PSAK 66 Reclassification due to SFAS 66		
Pihak ketiga	13.629.164	-	2.039.016	-	15.668.180	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	9.403.153	-	(1.850.489)	-	7.552.664	Acurued expense
Utang sewa pembiayaan	5.116.369	-	(2.241.788)	-	2.874.581	Lease liabilities
Utang listrik swasta	291.74	-	7.485	-	299.229	Electricity purchase payable
Ekuitas						Equity
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	46.814.284	123.685	33.869.723	-	80.807.692	Retained earnings - unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	-	(11.491.096)	-	-	(11.491.096)	Other comprehensive income
Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian						Consolidated Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan usaha:						Revenues:
Subsidi listrik pemerintah	99.303.250	-	-	(99.303.250)	-	Government's electricity subsidy
Beban usaha:						Operating expenses:
Bahan bakar dan pelumas	170.487.926	-	(17.350.992)	-	153.136.934	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	3.492.679	-	42.559.698	-	46.052.377	Purchase electricity
Sewa	7.866.347	-	-401.51	-	7.464.835	Lease
Pemeliharaan	20.206.661	-	(3.595.200)	-	16.611.461	Maintenance
Kepegawaian	15.749.478	896.319	-	-	16.645.797	Personnel
Penyusutan	23.618.262	-	(3.707.051)	-	19.911.211	Depreciation
Laba/(Rugi) usaha sebelum pendapatan lain-lain	45.811.221	(896.319)	(17.504.943)	(99.303.250)	(71.893.291)	Operating income/(loss)
Pendapatan/(beban)lain-lain:						Other income (charges)-net:
Subsidi listrik pemerintah	-	-	-	99.303.250	99.303.250	Government's electricity subsidy
Beban keuangan	(35.971.211)	-	19.331.558	-	(16.639.653)	Financial cost
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	1.319.299	-	2.116.849	-	3.436.148	Gain (loss) on foreign exchange – net
Laba/(Rugi) sebelum pajak	15.900.388	(896.319)	3.943.464	-	18.947.533	Income/(loss) before tax
Manfaat (beban) pajak	(4.158.778)	224.080	(1.008.757)	-	(4.943.455)	Tax benefit (expense)
Laba tahun berjalan	11.741.610	(672.239)	2.934.707	-	14.004.078	Income for the year
Penghasilan komprehensif periode berjalan						Other comprehensive income for the period
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss
Keuntungan/(kerugian) aktuaria	-	(4.871.902)	-	-	(4.871.902)	Actuarial gain/(loss)
Manfaat/(beban) pajak terkait	-	1.217.975	-	-	1.217.975	Related income tax benefits (expense)
Laba per saham dasar/ dilusian	253.83	(14.551)	63.525	-	302.807	Basic/diluted earning per share

*1) Dampak dari perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan sewa menurut ISAK 8
*1) Impact of power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak ada transaksi benturan kepentingan selama periode pelaporan.

TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST

There were no transactions with conflict of interest reported during the reporting period.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (AFILIASI)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi (hubungan afiliasi). Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Sifat Hubungan Berelasi

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan.
3. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
4. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Ketentuan Transaksi Berelasi

Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut, PLN menerapkan kebijakan, meliputi:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan.
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.
3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan benefit optimal pada Perseroan.
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi term dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In business, the Company and its subsidiaries implement certain transactions with related parties (affiliates). All significant transactions with parties with a special relation with the Company, either under the same or different terms and conditions with transactions with the third party, have been disclosed in the notes to consolidated financial statements.

Nature of Related Party Transactions

1. The Government is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Stockholder of the Company and State-Owned Enterprises (SOE).
2. The Company is related to other SOE owned by the Ministry of Finance.
3. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).
4. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

Provisions of Transactions with Related Parties

PLN adopted the following policies in conducting transactions with related parties:

1. Product and service sales with the affiliates is assigned based on sales contracts, which commonly use the prevailing market price plus a previously agreed specific margin.
2. The shipment of fuel and spare parts conducted by the affiliates is assigned based on the shipping contract signed and negotiated together in consideration of the costs which may arise, plus a specific margin.
3. Funds are allocated in consideration of requirements, mutual agreement, and the Company's optimal benefit.
4. Loans are acquired through a negotiation of terms and conditions which will provide optimal benefit to the Company's operational interest.

Adapun ringkasan saldo realisasi transaksi berelasi menurut masing-masing jenis transaksi adalah sebagai berikut:

The summary of transactions with affiliates based on each transaction type is as follows:

Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp miliar) Transaction Amount (Rp billion)		Keterangan Description	Persentasi (%) Percentage (%)		Transaction Type
	2015	2014		2015	2014	
Piutang berelasi	340,32	381,62	Persentase terhadap total aset Percentage to total assets	0,02	0,07	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya	15,12	7,69	Persentase terhadap total aset Percentage to total assets	0,00	0,00	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	19.145,25	20.253,06	Persentase terhadap total aset Percentage to total assets	1,55	3,75	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	116,15	93,89	Persentase terhadap total aset Percentage to total assets	0,01	0,02	Short-term investments
Piutang usaha	571,89	584,80	Persentase terhadap total aset Percentage to total assets	0,05	0,11	Trade accounts receivable
Piutang subsidi listrik	17.501,01	19.280,86	Persentase terhadap total aset Percentage to total assets	1,43	3,57	Receivables on electricity subsidy
Total terhadap aset	37.689,74	40.601,92	Persentase terhadap aset Percentage to assets	3,06	7,52	Total compared with asset
Penerusan pinjaman	31.710,58	29.097,68	Persentase terhadap total liabilitas Percentage to total liabilities	8,37	8,26	Two-step loans
Utang kepada pemerintah dan lembaga kuangan pemerintah non bank	8.488,49	8.665,73	Persentase terhadap total liabilitas Percentage to total liabilities	2,24	2,46	Government and non bank government financial institution loans
Utang bank	39.691,97	29.165,26	Persentase terhadap total liabilitas Percentage to total liabilities	10,47	8,28	Bank loans
Utang pihak berelasi	2,57	7,33	Persentase terhadap total liabilitas Percentage to total liabilities	0,00	0,00	Payable to related parties
Utang usaha	9.290,85	12.671,92	Persentase terhadap total liabilitas Percentage to total liabilities	2,43	3,58	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	713,76	620,74	Persentase terhadap total liabilitas	0,18	0,18	Accrued expenses
Total terhadap liabilitas	89.898,21	80.228.65	Persentase terhadap total pendapatan Percentage to total income	23,69	22,76	Total compared with liabilities
Penjualan tenaga listrik	5.398,59	5.084,03	Persentase terhadap total pendapatan Percentage to total income	2,57	2,72	Sale of electricity
Subsidi listrik pemerintah	56.552,53	99.303,25	Persentase terhadap total pendapatan Percentage to total income	100,00%	100,00%	Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas	77.052.12	82.855,23	Persentase terhadap total beban Percentage to total expense	28,59	54,11	Fuel and lubricants expense
Beban pemeliharaan	204,10	574,03	Persentase terhadap total beban Percentage to total expense	1,16	3,46	Maintenance expense
Beban usaha lain-lain	772,32	402,50	Persentase terhadap total beban Percentage to total expense	11,29	7,33	Other operating expense
Beban keuangan	3.954,56	4.547,89	Persentase terhadap total beban Percentage to total expense	22,56	27,33	Financial cost

Perseroan menyajikan saldo transaksi berelasi pada Catatan 51 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN periode tahun buku 2015.

The Company reports the balance of affiliated transactions in Note 51 to PLN's 2015 Consolidated Financial Statements (Audited).

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

PLN mencatatkan beberapa peristiwa setelah periode pelaporan, yakni:

i. Pada tanggal 25 Januari 2016, melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-82/MBU/01/2016, telah disetujui Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar 9.468.627 lembar saham dengan nilai Rp9.468,6 miliar, sehingga modal ditempatkan/disetor Perusahaan menjadi Rp55.666 miliar.
Dampak dari penambahan PMN tersebut adalah meningkatkan kemampuan penggalangan dana pinjaman dan merealisasikan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

ii. Anggaran dasar Perusahaan diubah pada tanggal 22 Februari 2016 sesuai akta notaris No. 12 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar menjadi Rp 204.000.000 juta dan peningkatan sejumlah Rp 9.468.627 juta atas modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0029081 tanggal 7 Maret 2016.

iii. Pada tanggal 21 Maret 2016, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung sehubungan dengan pemadaman listrik di Wilayah Lampung. Nilai tuntutan ganti rugi atau gugatan sebesar Rp 100.000 juta.

iv. Pada tanggal 25 April 2016, Perusahaan menghadapi gugatan di yang diajukan oleh Ny. Halimah (binti Sairih) dkk. sehubungan dengan sengketa tanah PLTGU Muara Tawar seluas 21.160 m2. Nilai gugatan sebesar Rp 52,9 milyar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

v. Pada tanggal 24 Mei 2016, berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016, Hasan Bisri diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Kuntoro Mangkusubroto.

SUBSEQUENT EVENTS

PLN recorded several events occurring after the financial reporting date, namely:

i. On 25 January 2016, through State-Owned Enterprises Ministerial Circular Num. S-82/MBU/01/2016, approval was given for Additional Equity by the Republic of Indonesia amounting to 9,468,627 shares at a value of Rp9,468.6 billion, increasing the Company's subscribed / paid up capital to Rp55,666 billion.
The impact of this additional capital will be to increase the ability to raise funds and realize electricity infrastructure development programs.

ii. The articles of association of the Company were amended on February 22, 2016 by notarial deed No. 12 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, regarding the increase of the Company's authorized capital to Rp 204,000,000 million and increase of Rp 9,468,627 million of subscribed and paid up capital. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No. AHU-AH.01.03-0029081 dated March 7, 2016.

iii. On March 21, 2016, the Company faced unlawful acts suit which categorized as Class Action suit in the District Court of Tanjung Karang, Lampung relating to the Power outage in Lampung. The amount of the claim is Rp 100,000 million.

iv. On April 25, 2016, the Company faced unlawful act from Mrs. Halimah binti Sairih and co-claimants relating to disputes regarding 21,160 m2 PLTGU Muara Tawar land. The amount of the claim is Rp 52.9 billion. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the South Jakarta Court.

v. On May 24, 2016, based on the Decision Letter of MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016, Hasan Bisri was appointed as President Commissioner to replace Kuntoro Mangkusubroto.

PERUBAHAN PERATURAN

Beberapa Peraturan Baru yang berpengaruh signifikan terhadap operasional PLN, mencakup diantaranya:

CHANGES IN REGULATIONS

Several new regulations that have significant impacts on PLN's operational activities are as follows:

Peraturan Perundang-Undangan Law and Regulation	Topik dan Penjelasan Topic and Explanation	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
Peraturan Menteri ESDM 1 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 1 of 2015 on Partnership in Electricity Procurement and Joint Utilization of Power Grid	• Terbit tanggal 6 Januari 2015 • Peraturan ini membuka eksklusifitas jaringan tenaga listrik dengan memberikan kemungkinan pemanfaatan bersama atas jaringan tenaga listrik. • Issued on 6 January 2015 • This regulation eliminates the exclusive use of power grids by providing opportunities for joint utilization	PLN mempunyai dasar hukum untuk melakukan tindakan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan bisnis dan operasi. PLN has a legal basis to conduct the utilization of power grids for the sake of its businesses and operations

Peraturan Perundang-Undangan Law and Regulation	Topik dan Penjelasan Topic and Explanation	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
Peraturan Menteri ESDM 2 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 2 of 2015 on Rules of Power Grid System in Sulawesi	• Terbit tanggal 8 Januari 2015 • Peraturan ini merupakan tindak lanjut atas sistem tenaga listrik di Sulawesi yang semakin berkembang, sehingga diperlukan aturan/ panduan tata kelola sistem tenaga listrik. • Issued on 8 January 2015 • This regulation serves as a follow-up action to the continuously growing electricity system in Sulawesi, hence requiring several rules/guidelines for electricity system governance	PLN sebagai penyelenggara sistem ketenagalistrikan di Sulawesi berkewajiban terus melakukan pemutakhiran tata kelola ketenagalistrikan agar memenuhi standar yang ditetapkan. As an administrator of the electricity system in Sulawesi, PLN must continously update its electricity management system in order to comply with the prevailing standards
Peraturan Menteri ESDM 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 3 of 2015 on Power Purchase Procedure and Benchmark Price conducted by PT PLN (Persero) through Direct Selection and Appointment	• Terbit tanggal 13 Januari 2015 • Peraturan ini akan memotong waktu negosiasi yang signifikan dan memberi keleluasaan kepada PLN dalam menunjuk *Independent Power Producer* tanpa harus setiap kali meminta ijin kepada Menteri ESDM, sepanjang semua persyaratan telah dipenuhi. • Issued on 13 January 2015 • This regulation will significantly reduce the negotiation time and grant scope to PLN in selecting IPPs. PLN will not be required to request a permit from the Minister of Energy and Mineral Resources in the selection process as long as all requirements are complied with	PLN mempunyai dasar hukum untuk mempercepat penetapan kontraktor/ pengembang pembangkit maupun transmisi untuk mempercepat pembangunan pembangkit/transmisi. PLN has legal basis to accelerate the determination of power plants and transmissions contractors/developers
Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas sampai dengan 10 megawatt (MW) oleh PLN. Perubahan atas Peraturan Menteri 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PLN dan Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik tenaga Air oleh PLN. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 19 of 2015 on PT PLN's Power Purchase of Hydro Power Plant with a capacity of max. 10 MW. This regulation supersedes the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 12/2014 on PT PLN's Power Purchase of Steam Power Plant and the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 22 of 2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 12 of 2014 on PT PLN's Power Purchase of Steam Power Plant	• Ditetapkan 29 Juni 2015. • Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai 10 MW sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PLN. • Harga yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli listrik (PJBL) tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi serta berlaku pada saat pembangkit dinyatakan telah mencapai *commercial operation date* (COD) sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL. • Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW antara PLN dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah • Issued on 29 June 2015 • The price of power purchase of Steam Power Plant with a capacity up to 10 MW has included the procurement cost of connecting networks from power plants to PLN's power grid • Price used in any Power Purchase Agreement (PPA) is non-negotiable and fixed, and effective at the time the power plant is declared as having reached the commercial operation date (COD) on schedule, as stated and agreed to in the PPA. • Power purchase transactions of Steam Power Plant with capacity up to 10 MW is denominated in Rupiah.	PLN mempunyai tambahan alternatif sumber energi primer yang terbarukan untuk menambah kapasitas terpasang. PLN has an alternative source of renewable primary energy to expand its installed capacity

Peraturan Perundang-Undangan Law and Regulation	Topik dan Penjelasan Topic and Explanation	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN

Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Num. 18 of 2015 on Free Space and Minimum Clearance of High Voltage Transmission, Extra High Voltage Transmission, and one way High Voltage Transmission for power distribution.
	• Ditetapkan 26 Juni 2015
	• Mengatur tentang:
	  • Ketentuan ruang bebas dan jarak bebas saluran udara tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang.
	  • Ketentuan pemberian kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan bangunan yang digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan hak
	  • Ketentuan pemanfaatan atas ruang bebas saluran udara tenaga listrik
	• Issued on 26 June 2015
	• Regulates about:
	  • Provision of free space and free to air channels within the electric power using stark wire.
	  • Provision on the granting of compensation to holders of rights to land and buildings used indirectly for the construction of electricity without any waiver
	  • Utilization conditions of space free of transmission
		PLN memiliki kepastian dalam pemasangan, perbaikan dan perawatan instalasi listrik.
		PLN has certainty on installations and maintenances of electricity installations.

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Presidential Regulation Num. 04 of 2016 on Acceleration of Electricity Infrastructure Development
	• Ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2016
	• Mengatur tentang:
	  • Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta kebijakan-kebijakan pendukung yang diberikan oleh pemerintah untuk kelancaran implementasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
	• Issued on 8 January 2016
	• Regulates about:
	  • Assignment to PT PLN (Persero) for conducting electricity infrastructure development programs and policies support given by the government for the smooth implementation of electricity infrastructure development
		PLN memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
		PLN has legal basis to conduct electricity infrastructure development program

INFORMASI SEGMEN
Tinjauan Operasi Menurut Segmen

Untuk kepentingan pelaporan, PLN sejak 1 September 2015 telah membagi segmen operasio menjadi 7 segmen operasi, yakni: Sumatera, West Java, Central Java, East Java – Bali, Kalimantan, Sulawesi – Nusa Tenggara, and Maluku – Papua. Namun dalam tahun 2015, Perseroan masih menyajikan pelaporan berdasarkan 3 segmeni operasi, yakni: Sumatera, Jawa-Bali, Indonesia Timur dengan pertimbangan pada akhir tahun 2015 masih berlangsung proses migrasi, dimana pembagian 7 segmen operasi tersebut belum efektif.

Selain itu, PLN juga membagi segmen menurut bidang usaha yang diwakili oleh kinerja anak usaha terkonsolidasi yang disajikan dalam bentuk tabel kinerja anak usaha secara ringkas.

Penjualan Tenaga Listrik Menurut Segmen Wilayah Regional

Berdasarkan Wilayah Regional, penjualan tenaga listrik terbesar terjadi pada region yang berada di Jawa-Bali yaitu region Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, dan Jawa Bagian Timur dan Bali yang secara keseluruhan berkontribusi hingga 74,39 % dari penjualan tenaga listrik

SEGMENT INFORMATION
Operational Review by Segment

In the interests of reporting, since 1 September 2015, PLN has divided its operational segments into 7 segments: Sumatera, West Java, Central Java, East Java – Bali, Kalimantan, Sulawesi – Nusa Tenggara, and Maluku – Papua. However, in 2015, the Company was still presenting its reports based on 3 operational segments: Sumatera, Java – Bali, and East Indonesia based on the consideration that, as of the end of 2015, the Company was still in the process of migrating and the division into 7 operational segments was not yet effective.

Furthermore, PLN also divides the operation segments based on lines of business, as represented by the consolidated subsidiaries' performance and presented shortly in the form of subsidiary performance table.

Electricity Sales By Regional Area Segment

Based on Regional Area, the largest electricity sales occurred in several regions in Java–Bali areas, covering West Java, Central Java, and East Java–Bali with a contribution of up to 74.39% of the total electricity sales of the Company in 2015. Electricity sales data based on

perseroan di tahun 2015. Data penjualan listrik menurut Segmen Geografis dapat dilihat pada pembahasan "Pemasaran – Penjualan Tenaga Listrik".

Pelanggan PLN Menurut Wilayah Regional

Berdasarkan Wilayah Regional-nya, jumlah pelanggan yang berada di Wilayah Regional Jawa Bali yaitu region Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, dan Jawa Bagian Timur dan Bali tetap mendominasi dengan kontribusi hingga 64,53 % dari total jumlah pelanggan di tahun 2015 diikuti Wilayah Regional Sumatera dan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi-Nusa Tenggara dan Maluku Papua) masing-masing sebesar 19,83 % dan 15,64 %. Persentasi jumlah pelanggan di wilayah yang berada di Regional Jawa-Bali (64,53%) yang relatif lebih kecil dari jumlah konsumsi listrik (74,39%), menunjukkan pelanggan di region ini memiliki tingkat perekonomian yang lebih tinggi dan menunjukkan relatif lebih banyaknya pelanggan, industri maupun bisnis yang membutuhkan listrik dalam jumlah lebih besar dari pelanggan rumah tangga. Jumlah pelanggan menurut segmen geografis dapat dilihat pada pembahasan "Pemasaran – Jumlah Pelanggan".

Nilai Penjualan Perseroan Menurut Segmen Geografis

Sejalan dengan jumlah pelanggan dan jumlah penjualan daya listrik, maka nilai penjualan listrik terbesar terdapat pada segmen geografis Jawa Bali, diikuti Sumatera dan Indonesia Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel ringkas berikut.

Geographical Segment are available in the "Electricity Marketing and Sales" section.

PLN's Customers by Regional Area

Based on Regional Areas, the number of customers in Java–Bali area, comprising West Java, Central Java, and East Java–Bali remains dominant, with a contribution of up to 64.53% of the total number of customers in 2015, followed by Sumatera and East Indonesia (Kalimantan, Sulawesi–Nusa Tenggara and Maluku–Papua), at 19.83% and 15.64% respectively. The percentage of customers in Java–Bali area (64.53%) is relatively smaller than the total electricity consumption (74.39%), showing that the customers in this region have a higher economic level. It also indicates that the number of customers who need a higher amount of electricity from the industry and business categories is relatively higher than the number of customers from households. For PLN's customers by geographical segment please refer to "Marketing – Total Customer" segment.

Corporate Sales by Geographical Segment

In line with the number of customers and amount of power sales, the largest amount of electricity sale is found at Java–Bali geographical segment, followed by Sumatera and East Indonesia. This is summarized in the following table.

Nilai Penjualan Menurut Segmen Geografis (Dalam GWh)
Sales Amount by Geographical Segment (In GWh)

Area Geografis	2014	2015	% Kontribusi		% Perubahan	Geographic Area
			2014	2015		
Sumatera	26.514	31.596	14,9%	15,4%	5,4%	Sumatra
Indonesia Timur	17.825	21.020	9,9%	10,2%	5,8%	East Indonesia
Jawa Bali	149.079	164.731	75,2%	74,4%	1,0%	Java Bali
Jumlah	**193.418**	**217.347**	**100%**	**100%**	**2,1%**	**Total**

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Kinerja anak usaha mencerminkan kinerja sesuai segmen usaha sebagaimana tergambar pada struktur usaha. Adapun ringkasan kinerja keuangan Anak Perusahaan pada tahun 2015, sesuai bidang usahanya adalah sebagai berikut.

SUBSIDIARIES PERFORMANCE

The subsidiaries performance reflects the performance based on business segments as described in the business structure. The summary of subsidiaries financial performance in 2015 by business segment is as follows:

(Dalam Rp Miliar In Billion Rp)

Uraian	PT IP	PT PJB	PT ICON +	PLN Batam	PLN Tarakan	PLN Enjiniring	PLN Batubara	PT BAG	PT Haleyora Power	Description
AKTIVA										ASSETS
Total Aktiva	226.486,56	195.545,84	2.070,87	6.414,09	308,87	516,03	1.223,99	1.345,08	458,36	Total Assets
- Aktiva Lancar	28.125,82	22.573,68	883,23	5.136,28	113,48	279,72	143,61	406,73	383,32	-Current Assets
- Aktiva tidak Lancar	198.360,74	172.972,16	1.187,64	1.277,81	195,39	236,31	1.080,38	938,35	75,04	- Non Current Assets

Uraian	PT IP	PT PJB	PT ICON +	PLN Batam	PLN Tarakan	PLN Enjiniring	PLN Batubara	PT BAG	PT Haleyora Power	Description
Total Ekuitas dan Kewajiban	226.486,56	195.545,84	2.070,87	6.414,09	308,87	516,02	1.223,99	1.345,08	458,36	Total Equity and Liabilities
- Ekuitas	214.874,69	186.241,53	1.195,33	4.298,82	18,92	382,28	(68,54)	199,55	247,07	- Equity
- Kewajiban Lancar	9.111,00	7.602,51	520,76	979,56	32,98	80,58	1.291,13	395,82	63,64	- Current Liabilities
- Kewajiban tidak Lancar	2.500,87	1.701,80	354,78	1,135,71	256,97	53,16	1,40	749,71	147,65	- Non current Liabilities
LABA (RUGI)										EARNINGS (LOSS)
Pendapatan Usaha	32.020,18	27.861,78	1.609,24	2,841	361,34	295,18	3.398,57	1.088,11	1,047,09	Operating Income
(Beban) Usaha	(29.929,50)	(26.392,68)	(1.272,06)	(2.676,92)	(350,71)	(77,39)	(3.470,15)	(884,13)	907,88	Operating Expenses
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	8,20	781,08	(57,53)	61,93	5,32	8,43	(23,67)	(125,85)	(34,72)	Others Income/ Expenses
Laba (Rugi) Bersih	4.679,53	3,227,76	202,22	333,65	25,36	53,74	(95,08)	88,36	76,92	Gain (Loss)

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Beberapa aspek penting yang mempengaruhi bisnis PLN secara signifikan adalah:

- **Kemampuan Keuangan**
  Berkurangnya kemampuan keuangan akan membuat membawa dampak melemahnya kemampuan pendanaan Perusahaan dan tertundanya program investasi strategis yang mendukung pertumbuhan, efisiensi (fuelmix) dan penguatan reserve margin yang pada akhirnya dapat berakibat pada pemadaman listrik. Pemadaman yang berulang dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan pelanggan, terutama pelanggan indsutri yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan.

- **Pembangunan Kapasitas Pembangkit**
  Dampak utama dari kurangnya pembangunan pembangkit adalah bertambahnya jumlah penambahan sewa pembangkit dan meningkatnya pemakaian BBM; target fuelmix tidak tercapai; peningkatan BPP dan overrun subsidi; defisit sistem (pemadaman); serta penurunan citra PLN.

- **Ketersediaan Energi Primer**
  Kekurangan pasokan energi primer, terutama batubara adalah tidak optimalnya produksi pembangkit PLTU, yang akan berakibat pada kenaikan pemakaian BBM; Target fuelmix yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai; Peningkatan BPP dan Overrun subsidi; Terjadi pemadaman.

  Sedangkan untuk pasokan gas, dampaknya adalah Konsumsi BBM untuk pembangkit akan meningkat, hal ini berhubungan langsung dengan meningkatnya biaya operasional pembangkit; Target fuelmix yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai; Overrun subsidi.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Some important aspects that significantly affect PLN's business are:

- **Financial abilities**
  A reduced financial capability will cause the Company to have a weakened funding ability and delay strategic investment programs that support growth, efficiency (fuel mix) and the strengthening of reserve margins, and could finally result in power outages. Repeated blackouts may result in reduced customer confidence, especially in industrial customers who contribute greatly to the company's income.

- **Construction of Plant Capacity**
  The main impact of a lack of construction is an increase in the number of additional leased power plants and rising fuel oil consumption; fuel mix targets not being achieved; cost of production increasing and the subsidy overrunning; system deficits (blackouts); and a worsening of PLN's image.

- **Primary Energy Availability**
  An insufficient supply of primary energy, specifically coal, is not optimal for power plant generation. This would result in an increase in fuel consumption; the fuel mix target not being met; rising Cost of production and subsidy overrun; outages.

  Meanwhile, for the gas supply, the impact would be rising consumption of oil fuel for power generation, which is directly related to rising operational costs for power generation; the fuel mix target not being met; subsidy overrun.

TATAKELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

hal. 326 - 475

PLN bertekad terus menerapkan *best practice* Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yakni tumbuh berkelanjutan dan memberi *benefit* optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. PLN berupaya memastikan tercapainya tujuan tersebut, dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras GCG (yakni penguatan kelembagaan pelaksana dan unit kerja) diikuti dengan pelaksanaan penilaian kualitas penerapan praktik terbaik GCG untuk mendapatkan umpan balik bagi langkah perbaikan selanjutnya.

PLN is determined to continue to apply Good Corporate Governance best practices to support the achievement of corporate objectives, namely sustainable growth and providing optimum benefit to all stakeholders. PLN seeks to ensure the achievement of these goals by taking steps toward continuous improvement, both in terms of GCG software (guidelines, rules and work systems) and hardware (strengthening implementation institutions and work units) followed by implementation of GCG best practice quality assessment to obtain feedback for further corrective measures.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola terbaik melalui perbaikan struktur organisasi dan pengkinian berbagai aturan pengelolaan perusahaan diiringi upaya sosialisasi berkelanjutan aturan kode etik sebagai landasan untuk menjalankan tugas pemenuhan kebutuhan listrik nasional dalam bentuk Program pembangunan Pembangkit 35.000 MW maupun pembangkit reguler lainnya serta sarana Transmisi dan Distribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Improving the quality of implementation of best corporate governance through improving organizational structure and updating the rules of corporate management accompanied by efforts to sustainably socialize the code of ethics as a foundation to run the task of fulfilling the national electricity demand in the form of construction program of 35,000 MW generators as well as other regular generators, and also construction of the means of transmission and distribution to support national economic growth and to meet the expectations of stakeholders

TUJUAN

PLN bertekad terus menerapkan *best practice* Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yakni tumbuh berkelanjutan dan memberi *benefit* optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dilandasi oleh keyakinan seluruh jajaran manajamen puncak maupun jajaran pelaksana, bahwa penerapan best practices GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Penerapan lima prinsip dasar GCG yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi PLN, yakni:

OBJECTIVE

PLN is determined to continue the best implementation practices of Good Corporate Governance to achieve the corporate objectives, such as: sustainable growth and optimum benefit to all stakeholders. It was based on the belief from the whole top management team and the executive team, that the implementation of best practices in corporate governance will improve the company trust and value on an ongoing basis.

Implementation of the five basic principles of GCG, such as: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, is consistently believed that it would improve the quality of GCG implementation with a target, the achievement of PLN's GCG implementation objectives.

1. Memaksimalkan nilai PT PLN (Persero) dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional
2. Mendorong pengelolaan PT PLN (Persero) secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT PLN (Persero) terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT PLN (Persero)
4. Meningkatkan kontribusi PT PLN (Persero) dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional

PLN berupaya memastikan tercapainya tujuan tersebut, dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras GCG (yakni penguatan kelembagaan pelaksana dan unit kerja).

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG di masa depan, PLN secara berkala melakukan penilaian kualitas penerapan praktik terbaik GCG.

1. Maximizing the value of PT PLN (Persero) by enhancing the principles of openness, accountability, trustworthy, responsible and equitable in order to help the company to have strong competitiveness, both nationally and internationally
2. Encouraging professional, transparent, and efficient management of PT PLN (Persero) and empowering function as well as increasing the independence of organs.
3. Encouraging Organs in making decisions and performing actions based on high moral values and compliance to the legislation in force, as well as awareness of the social responsibility of PT PLN (Persero) to the stakeholders and to the preservation of environment surrounding PT PLN (Persero).
4. Increasing the contribution of PT PLN (Persero) to the national economy.
5. Improving national investment climate.

PLN seeks to ensure the achievement of these goals, by performing improvement measures sustainably, both in terms of GCG software (i.e., guidelines, rules and working system) and hardware (i.e., strengthening executive institution and working units).

To get feedback for improvement of corporate governance practices in the future, PLN regularly assesses the quality of GCG best practice.

KOMITMEN

Seluruh jajaran PLN, mulai dari jajaran manajemen puncak, manajemen madya hingga pelaksana, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik tata kelola perusahaan. Komitmen implementasi praktek terbaik tata kelola perusahaan ditunjukkan dengan selalu mendasarkan seluruh keputusan dan penetapan kebijakan operasional pada peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan terbaik.

Selain itu, manajemen puncak juga mempelopori pelaksanaan penandatanganan pakta integritas untuk tunduk, taat dan konsisten melaksanakan seluruh pokok-pokok aturan dan kebijakan yang digariskan dalam Pedoman Tata-Kelola Perusahaan serta Pedoman Kode Etik Perusahaan.

Sejak deklarasi "PLN Bersih, No Suap" di tahun 2012, seluruh jajaran perseroan termotivasi untuk menerapkan praktek terbaik tata kelola pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, saat melaksanakan kegiatan operasional maupun saat merealisasikan proyek-proyek pengembangan.

COMMITMENT

The whole range of PLN, starting from the top Management, middle Management to executive, has committed to implementing all the rules and policies as part of efforts to implement the best practices of Corporate Governance. Commitment to the implementation of Corporate Governance best practices demonstrated by always put all decisions and determination of operational policy on the rules and laws that applied.

In addition, top management also pioneered the implementation of integrity pact to submit, obey and consistently perform all the main points of the rules and policies outlined in the Corporate Governance Guidelines and Codes of Conduct.

Since the declaration of "PLN Bersih, No Suap" in 2012, the whole range of the company have been motivated to implement best practices in governance at the time of carrying out everyday tasks, carrying out operational activities and when realizing development projects.

Deklarasi "PLN Bersih, No Suap" merupakan salah satu upaya yang dilakukan perseroan untuk menunjukkan komitmen penerapan praktik tata-kelola perusahaan yang baik, yang telah dikampanyekan dan dilaksanakan secara konsisten.

Pernyataan deklarasi "PLN Bersih, No Suap" adalah:

1. Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang dilaksanakan PLN. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme, gratifikasi, mark up, pemberian hadiah, konflik kepentingan, dan pemerasan.
2. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegangan pada prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.
3. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga menekankan pada prinsip efisiensi dan transparansi

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA-KELOLA

Pedoman GCG telah menjadi pegangan bagi pelaksanaan tata kelola maupun landasan setiap kebijakan pengelolaan operasional perusahaan, serta merupakan penjabaran dari 10 Prinsip Praktis implementasi GCG di lingkungan PLN, yaitu:

1. Meletakkan dasar yang kuat untuk Direksi dan Dewan Komisaris
2. Mengembangkan struktur Dewan Komisaris dan Direksi yang bernilai tambah
3. Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab
4. Menumbuhkan dan mempertahankan integritas dalam Laporan Keuangan
5. Membuat *disclosure* atau pengungkapan yang tepat waktu dan berimbang mengenai segala sesuatu yang penting tentang perusahaan
6. Menghormati hak-hak Pemegang Saham
7. Mengidentifikasi dan mengelola risiko Perusahaan
8. Mendorong dan meningkatkan kinerja
9. Mengembangkan sistem remunerasi yang adil dan bertanggung jawab
10. Memahami dan peduli terhadap kepentingan-kepentingan sah para *stakeholders*

Implementasi GCG di PLN didukung oleh perangkat yang lengkap yaitu dengan memiliki dan memberlakukan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* yang berisi panduan, batasan dan nilai-nilai yang mengatur segala kebiasaan dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN.

PLN telah memiliki *Board Manual*, yakni Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah

"PLN Bersih, No Suap" Declaration is an effort by the company to demonstrate commitment on practical application of Good Corporate Governance, which has been campaigned and implemented consistently.

"PLN Bersih, No Suap" declaration statements are:

1. It will not do any action that can be categorized as corruption according to Law Num. 20 of2001 on Corruption, in every process of procurement of public services are carried out by PLN. Such actions include corruption, nepotism, graft, mark up, gifts, conflicts of interest, and extortion.
2. Run the process of procurement of goods and services by holding on to the principles of transparency and efficiency in the use of state assets.
3. Run the process of procurement of goods and services by following the formal legal process also emphasizes the principles of efficiency and transparency.

GUIDELINES, STRUCTURE AND MECHANISM OF GOVERNANCE

GCG Guideline has become a handbook for the implementation of governance and policy cornerstone of any Company's operational management, as well as the elaboration of the 10 Principles of Practical implementation of GCG in the PLN, namely:

1. Laying down a solid foundation for the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Developing the structure of Board of Commissioners and Board of Directors which can seek value-added.
3. Developing a process of ethical and responsible decision-making.
4. Fostering and maintaining the integrity of the Financial Statements.
5. Making a disclosure on timely basis and balanced approaching about everything important about the company.
6. Respecting the rights of Shareholders.
7. Identifying and manage risks Company.
8. Encouraging and improve performance.
9. Developing a fair remuneration system and responsible.
10. Understanding and care for the legitimate interests of stakeholders

GCG implementation in PLN is supported by a complete device that is by having and enforcing the Code of Conduct, which contains guidelines, limits and values that govern all practices and procedures in the inter-action among the professional association in the PLN.

PLN has a Board Manual, namely Work Guidelines for Board of Directors and Board of Commissioners, which contains guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners which describes the activity in a structured,

dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Juga dilengkapi dengan *Charter* masing-masing Organ utama dan Organ pendukung perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan peran wewenang dan tanggung jawabnya.

Tujuan dari penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

1. Memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas hubungan kerja di dalam maupun di antara kedua organ perusahaan tersebut; dan
2. Mempermudah organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, maupun hubungan tugas keduanya.

Untuk melengkapi aturan tata laksana keorganisasian, sejak akhir tahun 2012 PLN telah memiliki buku Panduan Hubungan antara Kantor Pusat dengan Anak Perusahaan, serta Hubungan antara Kantor Pusat dengan Unit Bisnis.

Struktur

Struktur mekanisme GCG di lingkungan PT PLN (Persero) adalah:

systematic, easily understood and can be implemented consistently so that it becomes a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of the Company. There is also a Charter of each of Company main and supporting organs which serves as the organ's guidelines in performing its authorities and responsibilities.

The purpose of the preparation and application of the Working Guidelines for Board of Directors and Board of Commissioners are:

1. Clarifying the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as clarifying the working relationships within and between the two organs of the company; and
2. Facilitating the Organs under the Board of Commissioners and Board of Directors to understand the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the relationship of both Board tasks.

To further improve the completeness of organizational corporate governance regulations, in the end of 2012 PLN published a Guideline for Relationships between Head Office and Subsidiaries, as well as a Guideline for Relationships between Head Office and Business Units.

Structure

The structure of corporate governance mechanisms in PT PLN (Persero) is:

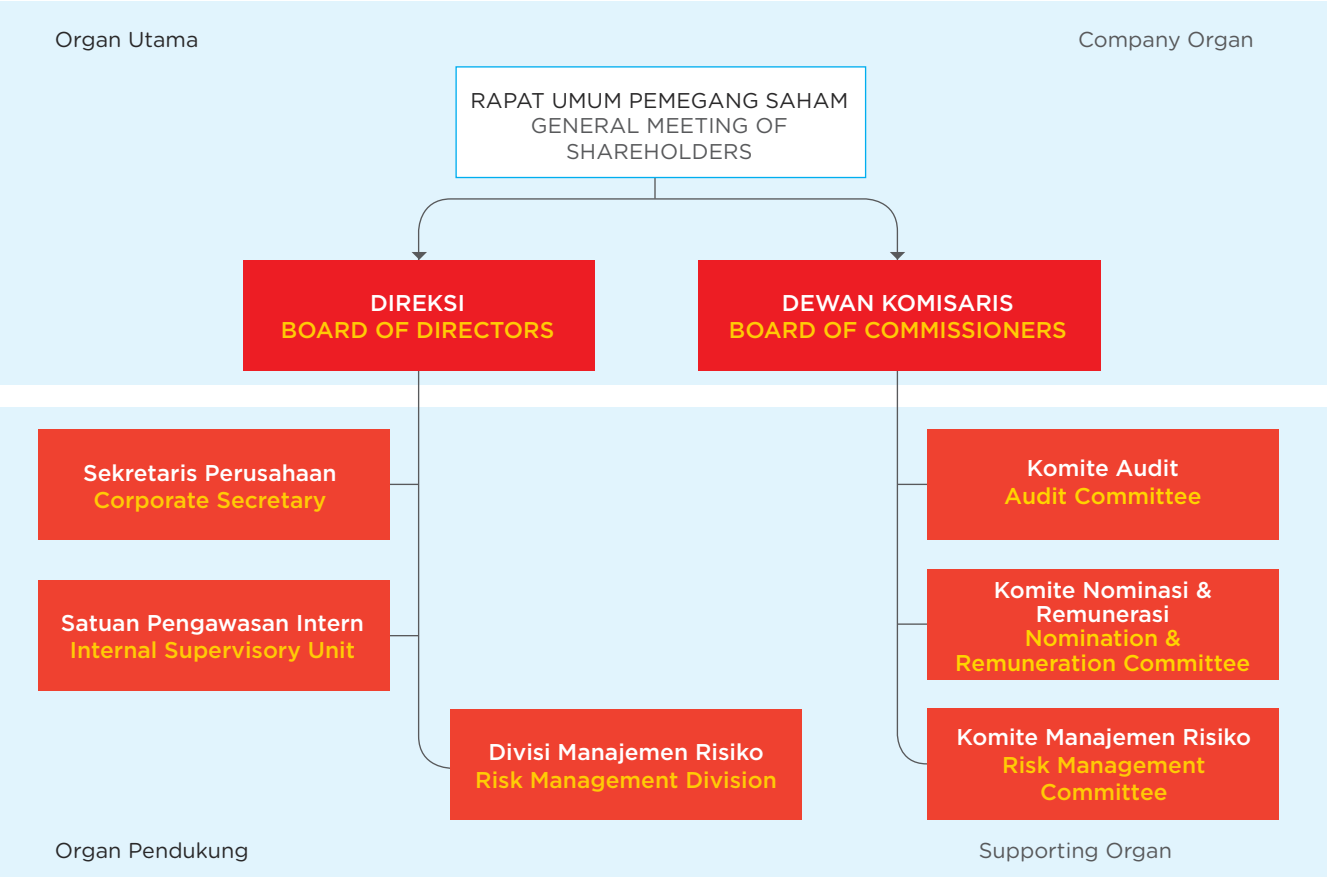

Mekanisme

Pada struktur tersebut tampak bahwa lembaga tertinggi di perusahaan adalah forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam forum ini, Pemegang Saham dapat mengusulkan suatu keputusan penting dengan kedudukan yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai contoh adalah pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, dimana RUPS dapat menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku

Pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan setiap keputusan RUPS dilakukan oleh Direksi, dan Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat guna memastikan tujuan Perusahaan serta Keputusan RUPS terlaksana dan tercapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait.

Mechanism

As demonstrated in the structure above, the highest corporate organ is the General Meeting of Shareholders (GMS).

In this forum, the Shareholders can propose an important decision with an equal vote. For example, in making the decision to invest, where the GMS may submit all of the authority and supervision of the implementation of the decision to the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the statutes and regulations applied.

The management of the Company and the implementation of any decision made in GMS is conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners shall supervise and provide advice to ensure company objectives and decisions of Shareholders done and achieved. To ensure a successful and smooth execution of big duties and responsibilities, the Board is assisted by the Audit Committee and Risk Management Committee, the Nomination and Remuneration Committee while the Board of Directors is assisted by relevant work units.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Untuk menunjang peningkatan penerapan tatakelola perusahaan yang baik PLN terus berupaya melengkapi aturan kebijakan operasional sebagai bagian dari panduan GCG. Berikut adalah beberapa aturan kebijakan *(soft-structure)* yang telah selesai disusun dan diimplementasikan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Perseroan

PLN menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi.

PLN telah memiliki Divisi Manajemen Risiko, sebagai upaya meningkatkan pengelolaan risiko secara terus menerus, tepat dan komprehensif. Pengelolaan risiko disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi, sehingga terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam mencapai tujuannya. (Selengkapnya lihat uraian “Risiko dan Manajemen Risiko”, halaman 434).

Transaksi Benturan Kepentingan

PLN memiliki peraturan “Transaksi Benturan Kepentingan”, yang menegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang keuntungan dari terjadinya benturan kepentingan dalam suatu transaksi, dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris setiap tahun menandatangani Pakta Integritas Benturan Kepentingan sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-

GENERAL POLICY OF THE COMPANY

To support the increased the adoption of Good Corporate Governance PLN continues to complement the operational policy rules as part of corporate governance guidelines. Following these are some rules of the policy (soft-structure) that has been implemented.

Risk Management Policy The Company

PLN prepares and establishes a Risk Management Policy as part of the control system and internal control for the purpose of minimizing the occurring of potential losses.

PLN has a Risk Management Division, as an effort to improve risk management continuously, accurately and comprehensively. Risk management plus the effort of risk mitigation of all identified risk, will avoid negative impacts that may arise in achieving the company’s objectives. (for details see the description “Risks and Risk Management”, page 434.

Conflict of Interest Transaction

PLN has rules “Conflict of Interest Transaction”, which confirms that the party-internal or external- which having opportunities to have advantage from the possibility the existing of conflicts of interest in a transaction, are prohibited from engaging in the decision-making process regarding the transaction.

Every year the Board of Directors and Board of Commissioners sign a Pact of Conflict of Interest Integrity as one of the forms in compliance to the applicable laws

undangan yang berlaku dan bentuk integritas Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan seluruh kegiatan Perusahaan.

and regulations and a form of the Boards' integrity in performing all of the Company's activities.

Kebijakan Manajemen Kinerja

Dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN membuat Kontrak Manajemen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang mencakup lima perspektif *Key Performance Indicators* yang berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN, yaitu perspektif pelanggan; efektivitas produk dan proses; fokus tenaga kerja; keuangan dan pasar; kepemimpinan dan tata kelola.

Kontrak Manajemen ini tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN / RUPS.

Performance Management Policy

In order to optimize the performance of the corporation, PLN creates Contract Management, which are agreed and signed by the Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners, in which includes five perspectives of Key Performance Indicators of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) which is issued by the State-Owned Enterprises Ministry; i.e. customers' perspective, product and process effectiveness, human resources focus; finance and market; as well as leadership and governance.

The management contract is stated in the 2015 Work and Budget Plan, which was signed by the Board of Directors, Board of Commissioners and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises / General Meeting of Shareholders (GMS).

Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan.

Prohibition of Giving and Receiving Gifts and Donations

PLN prohibits giving or receiving of gifts and donations by both inside and outside the enterprise environment. This prohibition applied to uphold the independence of decision-making as well as potential conflicts of interest and or decline in public confidence in the integrity of the company.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transaparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing dengan adil serta tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Procurement of Goods / Services

PLN implement procurement policies based on the principles of transparent and accountable, effective and efficient, openness and competition in fairly, and not discriminatory. The procurement process is pursued through healthy competition in accordance with rules and regulations that applied.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas terhadap seluruh proses bisnis yang dilakukan, serta untuk mencegah tindakan korupsi, *fraud* dan tindakan penyalahgunaan kewenangan lainnya, PLN telah menerapkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (KPP) atau dikenal juga dengan *whistleblowing system* sejak akhir tahun 2012. (Lihat uraian "*Whistleblowing System*" selengkapnya di halaman 458)

Reporting Policy Violations

To improve accountability, transparency and responsibility of all business processes carried out, as well as to prevent corruption, fraud and abuse of authority, PLN has implemented Reporting Policy Violations (KPP) or also known as the Whistleblowing System since the end of 2012. (See description "Whistleblowing System" more on page 458)

IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR DAN PRAKTEK TERBAIK GCG

PLN senantiasa memastikan bahwa seluruh prinsip-prinsip dasar GCG, yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*/kesetaraan diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua tingkat/struktur operasional perusahaan. Implementasi kelima prinsip dasar GCG dalam kegiatan operasional perusahaan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

IMPLEMENTATION OF BASIC PRINCIPLES AND BEST PRACTICE OF GCG

PLN always make sure that all the basic principles of Good Corporate Governance, i.e., Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness/equality are implemented in every aspect of the business at all levels / company's operational structure. Implementation of the five basic principles of good corporate governance (GCG) in the company's operational activities are described in the following description.

Transparansi

Yakni keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Implementasi asas transparansi tercermin dalam berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, sehingga para investor, kreditor, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara merata.

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU PT serta UU KIP, PLN berkewajiban mengungkapkan informasi perusahaan. Oleh karenanya PLN menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja, termasuk kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Perseroan juga menyediakan beragam informasi dasar berkaitan dengan status perusahaan, maupun informasi lain yang wajib disampaikan dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Informasi diberikan melalui beragam saluran, berupa media cetak, tatap muka melalui acara *press release*, presentasi dan *press gathering*, maupun media elektronik sebagaimana disediakan pada website Perseroan. Adapun informasi yang disajikan oleh PLN meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
2. Nama lengkap pemegang saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca dan laporan laba-rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4. Hasil penilaian oleh Auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau Direktur dan Komisaris perusahaan;
8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
9. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
10. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;

Transparency

Transparency is the disclosure of information, both in the decision-making process and in disclosing material information and its relevance about the company.

Implementation of the principle of transparency is reflected in the various activities and intensive communication media and professionally managed, so that investors, creditors, communities and all stakeholders can be informed about the performance and activities of the management of the company evenly.

As a company that has issued bonds, in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (FSA), Company Law and Freedom of Information Law, PLN has the obligation to disclose company information. Therefore PLN provides information for the public regarding any corporate actions that have been carried out no later than two business days, including to the Shareholders and the Board of Commissioners. The Company also provides a variety of basic information pertaining to the status of the company, as well as other information that must be submitted and was required by stakeholders.

Information is provided through a variety of channels, such as printed media, face-to-face with press release events, presentation and press gathering, and electronic media, as provided on the Company website. The information presented by PLN includes:

1. Name and Address/ business site, aim and purpose as well as type of business activity, the period of establishment, and capital, as stated in the Articles of Association;
2. Full name of shareholders, members of Board of Directors, and members of the Board of Commissioners;
3. Audited annual reports, financial statements, balance sheet and income statements, and statement of corporate social responsibility;
4. Results of assessment by External Auditors, credit rating agencies and other agencies;
5. System and allocation of remuneration funds for Board of Commissioners and Board of Directors;
6. Mechanism for the determination of Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Legal case which under the law is open as a public information and important lawsuits against the company and / or Directors and Commissioners;
8. Guidelines for the implementation of good corporate governance based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness;
9. Merger, stock purchase, consolidation or formation of joint ventures;
10. Gain or loss of significant contracts;

11. Produk atau penemuan baru yang berarti;
12. Perubahan dalam pengendalian;
13. Perubahan penting dalam manajamen;
14. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
15. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
16. Penggantian akuntan yang mengaudit;
17. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
18. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi; dan
19. Transparansi mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Akuntabilitas

Yakni kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan fokus peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dan manajemen, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas operasional, PLN menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan regulator di pasar modal, sebagai berikut.

1. Memiliki Komisaris Independen.
   PLN memiliki Dewan Komisaris yang berjumlah 9 orang termasuk Komisaris Utama, 2 anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham perseroan. Dengan status dan sikapnya yang independen, Komisaris Independen

11. New Products or other significant discoveries;
12. Changes in control;
13. Important changes in management;
14. Relatively important labor disputes;
15. Announcement of the issuance of debt securities;
16. Replacement of Auditing accountants;
17. Changes in the company's fiscal year;
18. Activities of the government assignment and / or public services or subsidies; and
19. Transparency in the mechanism of goods and services procurement.

Accountability

Accountability is clarity of function, structure, system and responsibility so that the governance of corporate organs are implemented effectively.

The principles of accountability are implemented with a focus on improving the function and role of each organ of the company and management, so that management of the business runs well. In order to increase the accountability of conducting operational tasks, PLN implements various rules and regulations and various basic policies of corporate management in accordance with the regulator in the capital market, as follows.

1. To have Independent Commissioners.
   PLN has Board of Commissioners totalling 9 people including the Main Commissioner, two commissioners are Independent Commissioners, unaffiliated with the company's shareholders. With their independent status and stance, the Independent Commissioner is able to protect and promote the interests of the stakeholders

mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan stakeholders dan memberikan pendapat yang independen dan mewakili kepentingan seluruh pihak.

2. Membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten.
   Sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan berjalannya kegiatan operasional sesuai kaidah korporasi yang baik, Dewan Komisaris PLN membentuk Komite Audit, dengan anggota-anggota yang berkompeten di bidangnya, berstatus independen dan mampu bertindak independen. Agar hasil rekomendasi di bidang pengawasan dan kerjasama dengan internal audit (Satuan Pengawasan Intern/SPI) berjalan bebas dari pengaruh pihak yang tidak berkepentingan, Komite Audit PLN diketuai oleh Komisaris Independen yang memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi dan/atau manajemen keuangan.

3. Membentuk Komite Manajemen Risiko
   Dewan Komisaris PLN juga membentuk Komite Manajemen Risiko dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan memiliki anggota-anggota yang berkompeten dalam bidang Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko bertugas melakukan evaluasi terhadap model, kebijakan, pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

4. Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
   Selain membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris PLN juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh seorang Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk melakukan evaluasi atas sistem nominasi dan remunerasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

5. Pengawasan dan Pengendalian Internal.
   PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. PLN menerapkan sistem pengendalian internal yang sebagian tugasnya adalah melakukan pengawasan atas akuntabilitas Direksi dan jajaran operasionalnya. Melalui unit Satuan Pengawasan Intern, manajemen PLN memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan serta ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan. (Selanjutnya lihat uraian "Satuan Pengawasan Intern", halaman 449).

   Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan transaksi dan pengelolaan keuangan perusahaan, PLN merintis dan meningkatkan kerjasama dengan BPK dan KPK, badan negara yang aktif terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. PLN juga

and provide independent opinions and they represent the interests of all parties.

2. To Establish an Independent and Competent Audit Committee.
   As part of the enforcement of internal rules and the functioning of operational activities in accordance to the principles of good corporations, PLN Board of Commissioners established an Audit Committee, whose members are competent in their field, have independent status and are able to act independently. To ensure that the recommendation in supervision and cooperation with internal audit (Internal Supervisory Unit / SPI) runs free from the influence of unauthorized parties, PLN Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who has a background of expertise in accounting and / or financial management.

3. To Establish a Risk Management Committee
   PLN Board of Commissioners also established a Risk Management Committee to assist the implementation of supervisory duties. The Risk Management Committee is chaired by an independent commissioner and has members who are competent in the field of Risk Management. Risk Management Committee is in charge of evaluating the models, policy, risk measurement used by the company and provide recommendations for further action.

4. To Establish a Nomination and Remuneration Committee
   Apart form the Audit Committee and Risk Management Committee, the PLN Board of Commissioners also formed a Nomination and Remuneration Committee is chaired by a commissioner. Nomination and Remuneration Committee tasked to conduct an evaluation of the nomination and remuneration system and provide recommendations for further action.
5. Internal Supervision and Internal Control.
   PLN organizes supervision and internal controls as part of the implementation of the of accountability and transparency principles from the basic principles of good corporate governance. PLN implements internal control system, which part of its duty is to supervise the Board of Directors' accountability and their operational team. Through the Internal Supervisory unit, PLN's management has guaranteed the effectiveness and efficiency of its operations, the compliance to the rules and regulations as well as the accuracy and reliability of financial reporting. (See also the description of "Internal Supervision Unit", page 449).

   As part of efforts to improve the accountability of the transaction activities and the financial management of the company, PLN pioneers and increases its cooperation with the Anti-Corruption Commission (KPK) and State Audit Agency (BPK), the state agencies that are actively involved in efforts to combat corruption. PLN also formed a partnership with Transparency International

menjalin kerjasama dengan Tranparansi Internasional Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan usaha.

6. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (KPP)
   Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabiltas, PLN telah menerapkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (KPP) atau dikenal juga dengan *whistleblowing system* sejak akhir tahun 2012.

7. Pengembangan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi
   Pengembangan modul sistem transaksi berbasis teknologi informasi dimaksudkan untuk dua tujuan, yakni akuntabilitas pencatatan dan pembukuan transaksi, sekaligus efisiensi operasional. PLN telah menerapkan beragam modul transaksi berbasis teknologi informasi, meliputi: AP2T (Aplikasi Pengelolaan Pelanggan Terpusat) dan P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat), yang meminimalisir kontak antara petugas dengan pelanggan sehingga meminimalisir peluang terjadinya tindakan penyimpangan.

8. Pedoman Perilaku
   Pedoman perilaku atau *Code of Conduct* PLN telah diterbitkan pada Oktober 2005 sebagai implementasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, khususnya dalam hal akuntabiltas. *Code of Conduct* berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota, dan hubungan dengan pihak eksternal. Secara berkala, Buku Pedoman Perilaku PLN disempurnakan mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis perusahaan.

9. Budaya Perusahaan
   Gerakan "PLN Bersih, No Suap", merupakan upaya menciptakan budaya perusahaan, budaya seluruh jajaran PLN untuk meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Seluruh "warga PLN" yakin untuk mewujudkan falsafah, visi dan misi perusahaan harus dilakukan secara bersama-sama dilandasi oleh Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar (SIPP).

   Budaya Perusahaan PLN diresmikan pada 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-57, menjadi alat agar tercipta integritas di seluruh "warga PLN" sekaligus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

   Implementasi Budaya Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh jajaran perusahaan oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga dilakukan kepada pegawai baru dalam masa orientasi.

Indonesia in order to increase the accountability of its business activities.

6. Violation Reporting Policy (KPP)
   As part of efforts to improve accountability, PLN has implemented Violation Reporting Policy (KPP) or also known as the whistle blowing system since the end of 2012.

7. Development of module on the Information Technology based Transactions
   Development of module on the Information Technology based Transactions is intended for two purposes, i.e., accountability of records and bookkeeping of transactions, as well as operational efficiency. PLN has implemented a variety of transaction modules based on information technology, including: AP2T (Central Application of Management and Customer) and P2APST (Centralized Management and Supervision of Revenue Flows), which minimize the contact between the officer with customers to minimize the chances of violations.

8. Code of Conduct
   PLN Code of conduct was published in October 2005 as an implementation to improve the quality of Good Corporate Governance implementation, particularly in terms of accountability. Code of Conduct contains good habits and social professional conducts in PLN. These guidelines guides leadership aspects in PLN, responsible membership, professional relationships between members, and relationships with external parties. Periodically, PLN Conduct Handbook is revised following the developments and changes in the business environment of the company.

9. Corporate Culture
   "PLN Bersih, No Suap", is an attempt to create a corporate culture, culture of the whole range of PLN personnel to improve accountability in performing daily management tasks of the company. The whole PLN personnel believe that to implement the corporate philosophy, vision and mission, they should carry out together based on the Corporate Culture containing the values of Mutual Trust, Integrity, Caring, and eager to learn.

   PLN Corporate Culture was inaugurated on October 27, 2002 coincided with the 57th National Electrical day, it is a tool to create integrity in all PLN personnel, while enhancing the quality of Good Corporate Governance implementation.

   Implementation of Corporate Culture is conducted through socialization to the whole company by PLN Headquarters Socialization Team. Socialization is conducted using presentations, discussions, face-to-face question-and-answer and group discussions. Planting Corporate culture values is also made to new employees during orientation.

Responsibilitas

Yakni kesesuaian/kepatuhan Perseroan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Responsibilitas atau asas pertanggungjawaban diterapkan melalui ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kaidah pengelolaan sesuai standar-standar korporasi yang berlaku universal serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Beberapa kebijakan dan praktek operasional PLN yang menunjukan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini meliputi:

1. Sistem Manajemen Mutu (ISO).
   Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3, Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. Penerapan sertifikasi ini untuk menunjukkan bahwa PLN dikelola dengan memperhatikan standar-standar pengelolaan korporasi yang berlaku universal.

   Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.

   PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan. Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja *(zero accident)* dengan mewajibkan setiap unit memperoleh sertifikat ISO 27000.

   Penerapan sistem manajemen mutu melalui program sertifikasi diyakini akan membuat akuntabilitas kegiatan operasional meningkat, sehingga tingkat kepercayaan para kreditor dan para Pemangku kepentingan lain terhadap PLN membaik.

2. Penerapan Manajemen Risiko
   PLN berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko secara berkesinambungan di seluruh proses bisnis dan pengelolaan perusahaan guna mendukung tercapainya tujuan dan terhindarnya perusahaan dari dampak negatif atas risiko yang tidak tertangani dengan baik. Komitmen ini tercermin dari penetapan Kebijakan Manajemen Risiko, pembentukan Divisi Manajemen Risiko dan pelaksanaan penilaian risiko secara berjenjang hingga ke level korporasi. (Selanjutnya lihat uraian “Manajemen Risiko”, halaman 434).

Responsibility

Responsibility is Company’s compliance / adherence in the management in accordance to healthy corporate principles as well as to the law and regulations.

Responsibility is applied through strict adherence to the precautionary principle and ensure compliance to company regulations, statutes and regulations in force, applying management principles in accordance to appropriate corporate standards applied universally and implementing social responsibility. Some PLN’s policies and operational practices which shows efforts to improve the quality of the application of this principle include:

1. Quality Management System (ISO)
   Since 2004, PLN has intensively implemented a certification program on power plant sector which includes Services ISO 9001 on services, ISO 14001 on environmental management and monitoring, SMK3, operational feasibility, and Operation and Maintenance Competency Certification. Implementation of these certifications shows that PLN is managed with great consideration on the corporate management standards applied universally.

   Target to be achieved is that every power plant should be managed according to international standards as shown by the evidence of obtaining certification on Power Plant Sector.

   PLN also intensifies the implementation of the certification program on costumer service sector such as ISO 9001 in the distribution business units and in regions as an effort to improve the quality of service to customers. Companies always prioritizes safety and health of its employees, so that occupational accident is not expected to happen at all (zero accident) by requiring each unit to obtain ISO 27000.

   Implementation of the quality management system through the certification program is believed to improve the accountability of operating activities, which in turn, will improve the creditors and other stakeholders’ level of trust towards PLN.

2. Application of Risk Management
   PLN is committed to implementing sustainable Risk Management in all business processes and management of the company in order to support the achievement of company objectives and avoiding negative impacts on the risks that are not handled properly. This commitment is reflected in the establishment of the Risk Management Policy, the establishment of the Division of Risk Management and implementation of risk assessment in stages up to the corporate level. (See also the description “Risk Management”, page 434).

3. Manajemen Kinerja
   Untuk meningkatkan tanggung jawab setiap jajaran terhadap kualitas pelaksanaan tugasnya, PLN menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja. Melalui kebijakan tersebut, setiap insan PLN dituntut menunjukkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima. Remunerasi berbasis kinerja ini sejalan dengan ketentuan peraturan terbaru dari kementerian BUMN.

   Kebijakan Manajemen Kinerja juga diterapkan dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi. Dalam kaitan ini, seluruh jajaran insan PLN, mulai dari karyawan pelaksana, manajemen hingga Direksi, diberikan target kinerja yang harus dicapai sesuai lingkup dan tanggung jawabnya. Untuk level pelaksana, pertanggungjawaban kinerja dilakukan dalam bentuk asesmen kinerja atas *Key Performance Indicators* yang dilakukan secara berkala pada setiap periode operasional. Sementara untuk tingkatan Direksi dan Komisaris, target kinerja dituangkan dalam bentuk *Key Performance Indicators* Direksi dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris yang dipertanggungjawabkan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Performance Management
   To increase the responsibility of every personnel to the quality of his operated tasks, PLN implements a Performance Management Policy. Through this policy, every PLN personnel is required to show responsibility in carrying out his duties and his conduct in carrying out duties is assessed to provide the basis for career path and the amount of remuneration to be received. Performance based remuneration is in line with the latest rules and regulations of the ministry of state enterprises.

   Performance Management Policy is also applied in order to optimize corporate performance. In this regard, all PLN personnel, ranging from executive employees, management to the Board of Directors, are given the performance targets that must be achieved within the scope of work and responsibilities. For the executive level, responsibility for performance is shown in the form of performance assessment on Key Performance Indicators (KPI) which is taken periodically at each operational period. As for the level of Directors and Commissioners, the performance targets are written in the form of KPI for Board of Directors and KPI for Board of Commissioners, for which they have to hold responsible before the General Meeting of Shareholders.

Kemandirian

Kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian diterapkan melalui penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan *(conflict of interest)*.

Selain itu, PLN menerapkan kebijakan larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para Direktur dengan anggota Dewan Komisaris ataupun antara masing-masing anggota Direktur dan Dewan Komisaris.

Untuk memastikan Independensi / Kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, PLN juga menerapkan dengan ketat kebijakan-kebijakan sebagaimana tercantum dalam Pedoman GCG, Board Manual maupun Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* yang sudah diberlakukan.

Independence

Independence is a conditions where a company is professionally managed with no conflict of interest and influence / pressure from any party that does not comply with the law and the principles of healthy corporate.

The principle of independence is applied through the development and implementation of code of conduct including the entire arrangement of transactions and investment plans that contains or potentially contains conflict of interest.

In addition, PLN implements a policy of banning family relationship or kinship to some degree between Directors and members of the Board of Commissioners or between each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

To ensure independence in decision-making and execution of tasks, PLN also strictly implements policies as contained in the Good Corporate Governance Guidelines, Board Manual and the Code of Conduct that have been enacted.

Kesetaraan dan Kewajaran

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Asas kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan seluruh *stakeholder* secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh PLN. PLN juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan.

Kesetaraan juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Pada keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia tersebut, PLN hanya mendasarkan pada kompetensi, kemauan dan kinerja setiap karyawan, seperti dijelaskan dalam uraian Manajemen Kinerja.

Selain dalam pengelolaan sumber daya manusia, PLN juga menerapkan asas kewajaran/kesetaraan dalam pemilihan vendor barang maupun jasa. PLN menerapkan program e-proc dalam proses tender pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan penilaian dan pengumuman secara terbuka atas setiap kesempatan pengadaan barang dan jasa. Proses kualifikasi jenis barang dan jasa yang ditenderkan juga diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh calon peserta tender sesuai kualifikasi masing-masing.

Equality and Fairness

It means fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders arising under the agreement and applicable laws and regulations.

The principle of equality is applied by treating all stakeholders in balance between the rights and obligations granted to and by PLN. PLN also opens access to information to all stakeholders to give suggestions for progress and for the company's service quality improvement.

Equality is also applied in the process of recruitment, training, assessment and arrangement of career path for employees. In the whole process of managing human resources, PLN makes decisions solely based on competence, willingness and performance of each employee, as described in the description of Performance Management.

Apart from the management of human resources, PLN also applies the principle of fairness / equality in the selection of a vendor of goods or services. PLN implements e-proc program in the process of the procurement of goods and services, and implements assessment and conducts an open public announcement on each occasion the procurement of goods and services. Processes and qualification of goods and services are placed on an open bid which is also publicly announced and is accessible for potential bidders in accordance to qualifications of each.

PLN BERINTEGRITAS
PLN WITH INTEGRITY

Pada tahun 2015, PLN melanjutkan komitmennya dalam mewujudkan perusahaan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme melalui program PLN berintegritas.

Program PLN berintegritas ini merupakan kelanjutan dari program "PLN Bersih, No Suap" dengan melakukan *assessment* terhadap 4 pilar yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Adapun 4 pilar yang dilakukan *assessment* adalah

1. Pilar Pertama: Partisipasi
   Partisipasi meliputi deklarasi komitmen integritas pegawai PLN di seluruh lapisan unit kerja dan wilayah kerja PLN, dari mulai pegawai PLN hingga seluruh jajaran *stakeholders*.

   Partisipasi ini juga aktif melibatkan pihak-pihak yang terlibat kerjasama dengan PLN melalui deklarasi *Collective Action*, yang merupakan komitmen bersama (antara PLN, Vendor dan Publik) untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Secara lebih dalam, PLN dan para mitra kerja ini perlu saling mendukung lewat sarana komunikasi, evaluasi kualitas, akuntabilitas dan integritas dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan pelanggan.

2. Pilar Kedua: Integritas
   Integritas dari para pegawai dalam bekerja melayani masyarakat sangat penting artinya untuk membangun budaya PLN Bersih. Integritas menjadikan pegawai PLN patuh terhadap *Code of Conduct* (CoC) yang berlaku di perusahaan.

   Implementasinya misalnya pegawai PLN dilarang berinteraksi dengan vendor yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan *(conflict of Interest)* dan timbulnya gratifikasi melalui berbagai media. Integritas ini pun berlaku pada proses pelayanan pelanggan, yakni melalui perbaikan indeks integritas layanan public (ILP).

In 2015, PLN continues its commitment in creating a company that is clean and free from corruption, collusion, nepotism through PLN with integrity program.

PLN integrity program is a continuation of the program "PLN Bersih, No Suap" by conducting assessment to the 4 pillars that have been implemented in the previous year. The four pillars of the assessment are:

1. First Pillar: Participation
   Participation includes a declaration of commitment to the integrity of PLN employees at all levels of work units and PLN work areas, starting from PLN employees up to a whole range of stakeholders.

   Participation also involves the active participation of the parties involved in cooperation with PLN through the declaration of Collective Action, which is a shared commitment (between PLN, vendors and the public) to prevent corruption in the procurement of goods and services. In a deeper thought, PLN and business partners are required to support each other through the means of communication, evaluation of quality, accountability and integrity in the procurement of goods / services and in customer service.

2. Second Pillar: Integrity
   Integrity of the employees working to serve the community is very important to build a culture of clean PLN. Integrity makes PLN employees adhere to the Code of Conduct (CoC) of the company.

   The example of its implementation is PLN employees are prohibited from interacting with a vendor that has the potential to seed a conflict of interest (conflict of Interest) and the emergence of gratification through various media. This also applies to the integrity of the customer service process, i.e., through the improvement of public service integrity index (ILP).

Salah satu penerapan yang sudah dilakukan, antara lain terkait kemudahan proses pasang baru (PB), tambah daya (TD), dan layanan gangguan (LG) sehingga berperan dalam menciptakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang bebas korupsi dan suap.

3. Pilar Ketiga: Transparansi
   Keterbukaan informasi dan sikap responsif terhadap permintaan informasi publik sangat menentukan dan penting dalam pembangunan budaya PLN. Dengan mengedepankan transparansi, maka peluang korupsi, suap, pungli dan yang lainnya dapat ditekan seminimal mungkin.

   Penerapan prinsip transparansi ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 yang telah diakomodir oleh PLN melalui Keputusan Direksi No. 501 Tahun 2012.

   Keputusan ini mengatur tentang prosedur keterbukaan dan permintaan informasi oleh publik, baik melalui media seperti internet maupun media konvensional, seperti buku panduan, brosur, leaflet, dll.

4. Pilar Keempat: Akuntabilitas
   Mendorong pegawai PLN untuk selalu bersikap responsif terhadap setiap keluhan pelanggan, dan memberi kesempatan pengaduan terkait pelayanan pelanggan dan pengadaan barang/jasa.

   Contact center 123 dan *website* PLN saat ini merupakan wujud dari ketersediaan akuntabilitas. Selain itu juga mendukung implementasi *whistle blower system* dan program pengendalian gratifikasi untuk melindungi kerahasiaan pelapor.

Assessment PLN Berintegritas dilakukan terhadap seluruh unit dan anak perusahaan PLN. *Assessment* dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kebijakan anti korupsi beserta program kepatuhannya. Kebijakan anti korupsi beserta program kepatuhan tersebut menjadi prasyarat terwujudnya "PLN Berintegritas".

One application that has been carried out, among others, is related to the simple and convenience process of new installation (PB), additional power (TD), and the complain handling (LG), so that it plays role in creating service for public welfare which is free of corruption and bribery.

3. Third Pillar: Transparency
   Disclosure of information and responsiveness to public information requests is very decisive and important in the development of PLN culture. By prioritizing transparency, then the opportunities for corruption, bribery, extortion and similar actions can be minimized.

   This implementation of the transparency principle is in line with the Law on Public Information Openness (KIP) Num. 14 of 2008 which was adopted by the PLN Board of Directors through Decree Num. 501 of 2012.

   This decree regulates procedures of disclosure and requests for information by the public, either through media such as the Internet or through conventional media, such as guide books, brochures, leaflets, etc.

4. The Fourth Pillar: Accountability
   PLN encourages employees to always be responsive to any customer complaints, and to provide an opportunity to file complaints related to customer service and procurement of goods / services.

   Contact center 123 and PLN website is a manifestation of the availability of accountability. It also supports the implementation of the whistle-blower system and gratification control program to protect the confidentiality of the complainant.

PLN with Integrity Assessment was conducted on all PLN units and subsidiaries. Assessment is conducted with the aim to strengthen the anti-corruption policy and its compliance program. Anti-corruption policy and its compliance program has become a prerequisite for the realization of "PLN with Integrity".

Beberapa indikator yang digunakan dalam *assessment* ini adalah Risiko Pelanggaran Integritas, Implementasi PLN Berintegritas dan Integritas Pengadaan-Pelayanan. Risiko Pelanggaran Integritas dan Integritas Pengadaan-Pelayanan dilakukan dengan cara Survei Online baik ke pegawai, mitra kerja maupun pelanggan. Kegiatan assessment dilaksanakan oleh PLN yang bekerjasama dengan TII *(Transparency International Indonesia)*. Ketiga fokus penilaian tersebut mencerminkan:

1. Seberapa tinggi risiko pelanggaran integritas yang dihadapi oleh unit/anak perusahaan
2. Seberapa baik implementasi PLN Berintegritas yang dilakukan oleh unit/anak perusahaan, dan
3. Seberapa baik integritas pengadaan-pelayanan pelanggan di unit/anak perusahaan

Beberapa kegiatan yang rutin dilakukan dalam konteks PLN Berintegritas diantaranya adalah:

1. Membentuk dan mendidik pelopor PLN Berintegritas di unit dan anak perusahaan
2. *Employee Volunteer Program* (EVP) atau kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh para pelopor untuk memupuk semangat dan cinta negeri
3. Internalisasi nilai-nilai integritas
4. Pelaporan gratifikasi
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
6. *Whistle Blowing System* (WBS)
7. Pertemuan/seminar dengan para stakeholder PLN untuk menyamakan visi, misi dan semangat bebas KKN,
8. Identifikasi potensi gratifikasi untuk mengenali dan menindaklanjuti celah-celah potensi gratifikasi
9. Menindaklanjuti budaya integritas untuk meningkatkan kemampuan pegawai

Some of the indicators used in this assessment is the Integrity Violation Risk, Implementation of PLN with Integrity and integrity of Service-Procurement. Integrity Violation Risk and Integrity-of Service-Procurement are conducted through Online Survey Services to employees, partners and customers. PLN assessment activities are carried out under the collaboration with TI-Indonesia (Transparency International Indonesia). The three focus of the assessment reflects:

1. How high is the risk of integrity violations faced by units / subsidiaries
2. How well the implementation of PLN with Integrity conducted by units / subsidiaries, and
3. How well the integrity of the procurement- customers service in units / subsidiaries

Some activities regularly carried out in the context of PLN with Integrity are

1. Establishing and educating pioneers in PLN with Integrity in units and subsidiaries
2. Employee Volunteer Program (EVP) or Corporate Social Responsibility (CSR) conducted by the pioneers to create spirit and love of country/ patriotism.
3. The internalization of integrity values
4. Reporting gratifications.
5. Wealth Report State (LHKPN)
6. Whistle Blowing System (W)
7. Meetings / seminars with PLN stakeholders to get a common vision, mission and passion, and corruption-free spirits
8. Identification of gratification potential to recognize and to follow up potential cracks on gratifications
9. Maintaining a culture of integrity to improve the competence of employees

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, PLN melakukan asesmen kualitas penerapan GCG secara berkala sejak tahun 2002. Melalui asesmen berkala tersebut, PLN mempertimbangkan dengan seksama rekomendasi yang dikemukakan asesor, untuk memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik GCG pada periode selanjutnya.

PLN telah melakukan penilaian GCG sejak tahun 2002, *Assessment* dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dari Kementerian BUMN mengenai praktik GCG di lingkungan BUMN.

Pada setiap periode penilaian, PLN berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun pembentukan infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi penilai. PLN kemudian kembali melakukan asesmen penerapan praktek GCG pada periode dimaksud, dengan memperhatikan skor penilaian dan berupaya melakukan perbaikan sesuai rekomendasi asesor.

APPLICATION ASSESSMENT

In order to get feedback for improvement in the quality of corporate governance best practices, PLN to assess the quality of the implementation of GCG regularly since 2002. Through these periodic assessments, PLN consider carefully the recommendations put forward to improve the quality of corporate governance best practice, then do the assessment again to get feedback on improvements in the next period.

PLN has assessed GCG since 2002, Assessment conducted in accordance with the provisions of the Ministry of State Owned Enterprises on the practice of GCG in the environment of State Owned Enterprises

At every assessment period, PLN attempted to correct some policies, work mechanism and new governance infrastructure establishment in accordance with the recommendation from the appraisers. PLN then re-assessed the application of good corporate governance practices in the period in question, taking into account assessment scores and attempted to make improvements as recommended by the assessors.

Skor Penilaian Kualitas Penerapan GCG Periode Tahun 2011-2015
GCG Application Quality Assessment Score Chart on the Period of 2011-2015

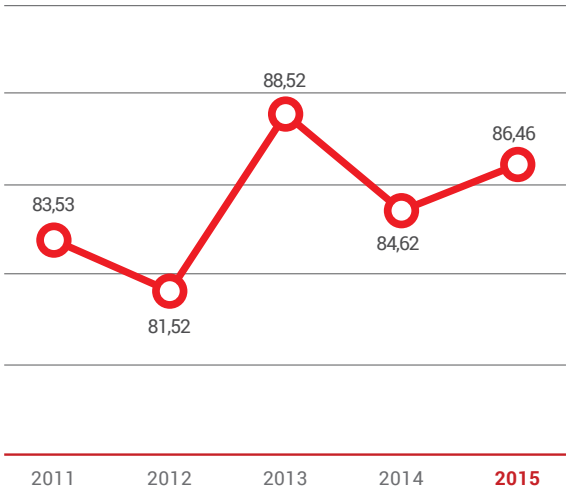

Catatan
Mulai tahun 2012 penilaian menggunakan parameter sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk tahun 2011 dan sebelumnya menggunakan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. S-168/MBU/2008 tentang Penerapan Praktik GCG di BUMN.

Notes
Starting in 2012 assessment using appropriate parameters Letter Secretary to the Minister of SOEs Num.SK-16 / S.MBU / 2012 on the indicators / parameters Assessment and Evaluation of the Implementation of Corporate Governance (Good Corporate Governance) on State-Owned Enterprises. As for the year 2011 and previous use Circular Letter Num. Ministry of State Enterprises. S-168 / MBU / 2008 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOEs.

Pada awal tahun 2012, PLN melakukan penilaian kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2011, yang dilakukan oleh Trisakti *Governance Center* selaku konsultan independen. Penilaian dilaksanakan dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG dari Kementerian BUMN yang didasarkan pada dokumen, kuesioner dan hasil wawancara.

In 2012, PLN had Trisakti Governance Center, an independent consultant, evaluate 2011 GCG implementation quality. The evaluation referred to GCG Assessment Terms of Reference published by SOE Ministry which was based on documents, questionnaires, and interviews.

Pada awal tahun 2013, PLN kembali melakukan penilaian penerapan praktik GCG untuk tahun 2012 berdasarkan metode yang mengacu kepada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG dari Kementerian BUMN yang terbaru, yang dilaksanakan oleh BPKP dengan mendapatkan skor hasil penilaian sebesar 81,52.

In 2013, PLN had Development Finance Controller (BPKP) evaluate 2012 GCG practice implementation which was based on methods in the newest GCG Assessment Terms of Reference published by SOE Ministry and gained a score of 81.52.

Pada awal tahun 2014, PLN melakukan *self assessment* atas kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2013, yang pelaksanaannya didampingi oleh BPKP. Hasil *self assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) tahun 2013 mencapai total skor sebesar 88,52.

In 2014 PLN assisted by BPKP held self assessment on 2013 GCG implementation quality. The result of GCG implementation on 2013 reached total score of 88.52

Assessment GCG pada awal tahun 2015 untuk menilai implementasi penerapan GCG tahun 2014 kembali dilakukan oleh BPKP, Hasil *assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) tahun 2014 mencapai total skor sebesar 84,62.

GCG Assessment in early 2015 to assess the implementation of GCG application in 2014 was performed again by BPKP. Results of assessment of the application of GCG in PT PLN (Persero) in 2014 reached a total score of 84.62.

Pada awal tahun 2016, PLN kembali melakukan penilaian implementasi GCG untuk periode tahun 2015 dengan metode *Self Assessment*. Pada tahun 2016 ini PLN melakukan *self assessment* secara mandiri tanpa didampingi oleh asesor independen.

In early 2016, PLN conducted assessment of GCG implementation for 2015 period through Self Assessment method. In 2016, PLN performed a self-assessment independently without being accompanied by independent assessors.

Self Assessment penerapan GCG di PT PLN (Persero) dilaksanakan sesuai kriteria yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.

Self Assessment of GCG implementation at PT PLN (Persero) is carried out according to criteria developed by the Ministry of State Owned Enterprises based on:

1. SOE Minister Regulation Num. Per-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprise (SOE).
2. SOE Minister Secretary Decree Num. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicators/Evaluation Parameters and Evaluation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprise.

Adapun tujuan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG adalah untuk:

1. Menilai kecukupan infrastruktur dan praktik tata kelola perusahaan dalam memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN pada tahun 2015;
2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2015
3. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan *(area of improvement)*;
4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PLN (Persero) dan merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan yang masih diperlukan.

The objectives of self assessment of GCG implementation are to:

1. Evaluate infrastructure sufficiency and governance practice in fulfilling Good Corporate Governance criteria which are established by SOE Ministry in 2015;
2. Follow up 2015 assessment recommendations;
3. Identify area of improvement;
4. Monitor GCG implementation consistency in PT PLN (Persero) and formulate improvement and refinement steps, if required.

Pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT PLN (Persero), sehingga hasil self assessment juga merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG di PT PLN (Persero).

The execution of self assessment on GCG implementation is one part of sustainable GCG implementation in PT PLN (Persero), therefore, the result of self assessment is an evaluation of GCG advance in PT PLN (Persero).

Hasil *self assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2015 mencapai total skor sebesar 86,46. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2015 mencapai kualifikasi 'Sangat Baik'.

In 2015, PLN gained a score of 86,46 on GCG self assessment. It shows that GCG implementation in PT PLN (Persero) in 2015 achieved a 'Very Good' qualification.

Hasil *self assessment* penerapan GCG di PT PLN (Persero) yang dilakukan pada tahun 2016 untuk periode Tahun 2015 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The result of GCG implementation assessment in PT PLN (Persero) in 2016 can be highlighted as follows:

Aspek Penilaian	**Bobot** Portion	**Capaian Perusahaan** Achievement	**Persentase** Percentage	**Penjelasan** Description	Assessment Aspect
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7	5,39	77,00	Baik Good	Commitment to Continuous Good Corporate Governance Application
Pemegang Saham dan RUPS	9	7,49	83,22	Baik Good	Shareholder and General Meeting of Shareholders (GMS)
Dewan Komisaris	35	32,95	94,14	Sangat Baik Very Good	Board of Commissioners
Direksi	35	32,79	93,69	Sangat Baik Very Good	Board of Directors
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7,84	87,11	Sangat Baik Very Good	Information disclosure and Transparency
Sub Total	95	86,46	-	Sangat Baik Very Good	Sub Total
Aspek Lainnya	5	0,00	-		Other aspects
Total	**100**	**86,46**	**-**	**Sangat Baik Very Good**	**Total Score**

Berdasarkan hasil Penilaian terhadap indikator, dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 indikator dari total 43 indikator yang masih memerlukan upaya perbaikan dalam praktik penerapannya.

Based on the assessment results of the indicator, it can be concluded that there are 10 indicators out of a total of 43 indicators that still require improvements in its implementations practices.

Capaian skor tertinggi terdapat pada aspek Dewan Komisaris yaitu 32,95 dari nilai maksimum 35 atau 94,14% dan nilai capaian terendah terdapat pada aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan yaitu 5,39 dari nilai maksimum 7 atau 77,00%.

The highest percentage of achieved score was 32.95 out of a maximum score of 35 or equivalent to 94.14% on the Board of Commissioners aspect. Meanwhile, the lowest score was 5.39 out of a maximum score of 7 or equivalent to 77.00% on Commitment aspect of Good Corporate Governance Implementation.

Parameter pada masing-masing aspek pengujian (indikator) yang masih memerlukan perbaikan, adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan
   - Pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau RUPS terhadap pemutakhiran dokumen Tata Kelola Perusahaan *(GCG Code, Board Manual dan Code of conduct)*

Parameters on each indicator that still need improvement, are as follows:

1. Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance
   - Ratification by the Board of Directors and the Board of Commissioners or GMS on the update of Good Corporate Governance documents (GCG Code, Board Manual dan Code of conduct)

- Pernyataan Kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan terhadap *Code of Conduct* (CoC) sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dan diperbaharui secara berkala
- Kepatuhan Penyampaian LHKPN bagi Pejabat Perusahaan sesuai dengan Perundang-undangan dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
- Mekanisme, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan *whistle blowing system* pada Perusahaan

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
   - Penetapan pedoman/kebijakan Dividen dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
   - Pemberian persetujuan secara tepat waktu (khususnya untuk persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan asset)
   - Penetapan sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam suatu kontrak kerja.
   - Menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) Tata Kelola Perusahaan
3. Dewan Komisaris
   - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan rencana pengawasan terhadap Sistem teknologi Informasi, Pengembangan karir, kebijakan pengadaan dan kebijakan mutu dan pelayanan.
   - Penetapan ketentuan tentang tingkat kesegeraan komunikasi keputusan dan pemberian persetujuan/tanggapan secara tepat waktu (7 – 14 hari)
4. Direksi
   - Penetapan kebijakan dan penyampaian laporan terkait dengan pelatihan yang dibutuhkan Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan
   - Pemutakhiran Piagam Audit/Internal Audit Charter
   - Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Temuan Pengawasan eksternal (BPK, KAP, BPKP)
   - Evaluasi efektivitas pengendalian internal untuk tingkat entitas dan tingkat operasional
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
   Penyusunan *Annual Report* dan *Sustainability Report* secara komprehensif sehingga dapat bersaing dan mendapat penghargaan dalam ARA.

Rekomendasi

Terhadap Parameter pada masing-masing aspek pengujian yang masih memerlukan perbaikan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham
   - Menetapkan pedoman/kebijakan tentang Dividen dan pedoman/kebijakan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
   - Memberikan persetujuan secara tepat waktu (khususnya untuk persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan asset).

- Statement of Compliance of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees on the Code of Conduct (CoC) as a commitment to implement the Corporate Governance and updated regularly
- Compliance of LHKPN Submission for the Company officials in accordance with the Regulations and the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero)
- Mechanism, implementation and report of whistle blowing system implementation on the Company

2. Shareholders and GMS/Capital Owner
   - Determination of guidelines/policies on Dividend and Supervisory Reports of the Board of Commissioners
   - Approval in a timely manner (particularly for the approval/decision in no later than 30 (thirty) days for KSO/BOT and a maximum of seven (7) days for the disposition of assets)
   - Determination of the performance appraisal system of the Board of Commissioners in an employment contract.
   - Following up Area of Improvement (AOI) of the Corporate Governance
3. Board of Commissioners
   - Determination of policies and implementation of supervision plans on information technology systems, career development, procurement policy and quality and service policy.
   - Determination of provisions on the level of communication immediacy of decision and approval/feedback in a timely manner (7-14 days)
4. Board of Directors
   - Determination of policy and submission of reports associated with the training required by the Board of Directors in accordance with the needs of the Company
   - Update of Audit Charter/Internal Audit Charter
   - Follow-up on Recommendations/Findings of the External Supervision (BPK, KAP, BPKP)
   - Evaluation on the effectiveness of internal control for entity level and operational level
5. Disclosure and Transparency
   Preparation of the Annual Report and Sustainability Report comprehensively so it can compete and received award in ARA.

Recommendation

Toward parameter on each testing aspect that still require improvement, there are recommendations the following:

1. Shareholders
   - Determining guidelines/policies on Dividends and guidelines/policies on Supervisory Report of the Board of Commissioners.
   - Giving in a timely manner (particularly for the approval/decision in no later than 30 (thirty) days for KSO/BOT and a maximum of seven (7) days for the disposition of assets).

- Menetapkan sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam suatu kontrak kerja

2. Dewan Komisaris
   - Segera mengesahkan pemutakhiran dokumen Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code, Board Manual* dan *Code of conduct*) oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau RUPS
   - Memperbaharui Pernyataan Kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan terhadap *Code of conduct* (CoC) sebagai bentuk Komitmen dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala
   - Menetapkan kebijakan dan melaksanakan rencana pengawasan terhadap Sistem teknologi Informasi, Pengembangan karir, kebijakan pengadaan dan kebijakan mutu dan pelayanan.
   - Menetapkan ketentuan tentang tingkat kesegeraan komunikasi keputusan dan pemberian persetujuan/ tanggapan secara tepat waktu (7 – 14 hari)
3. Direksi
   - Segera mengesahkan pemutakhiran dokumen Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code, Board Manual* dan *Code of conduct*) oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau RUPS
   - Memperbaharui Pernyataan Kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan terhadap *Code of conduct* (CoC) sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala
   - Mengistruksikan kepada Pejabat terkait untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan Perundang-undangan dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) secara tepat waktu
   - Memperbaharui mekanisme, melaksanakan mekanisme yang telah disepakati dan membuat laporan penyelenggaraan *whistle blowing system* Perusahaan
   - Menetapkan kebijakan pelatihan Direksi dan membuat laporan terkait dengan pelatihan yang dibutuhkan Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan
4. Sekretaris Perusahaan
   Menyusun *Annual Report* dan *Sustainability Report* secara komprehensif sehingga dapat bersaing dan mendapat penghargaan dalam Annual Report Award
5. Satuan Pengawasan Intern
   - Memutakhirkan Piagam Audit/*Internal Audit Charter*
   - Menindaklanjuti Rekomendasi Seluruh Pengawasan eksternal (BPK, KAP, BPKP)
   - Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal untuk tingkat entitas dan tingkat operasional.

- Determining the performance appraisal system of the Board of Commissioners in an employment contract.

2. Board of Commissioners
   - Immediately ratifying the updates of Good Corporate Governance documents (GCG Code, Board Manual and Code of conduct) by the Board of Directors and the Board of Commissioners or GMS
   - Updating the Statement of Compliance of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees on the Code of Conduct (CoC) as a commitment to implement the Corporate Governance regularly
   - Determining policies and implementation of supervision plans on information technology systems, career development, procurement policy and quality and service policy.
   - Determining provisions on the level of communication immediacy of decision and approval/feedback in a timely manner (7-14 days)
3. Board of Directors
   - Immediately ratifying the updates of Good Corporate Governance documents (GCG Code, Board Manual and Code of conduct) by the Board of Directors and the Board of Commissioners or GMS
   - Updating the Statement of Compliance of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees on the Code of Conduct (CoC) as a commitment to implement the Corporate Governance regularly
   - Instructing the officials concerned to submit LHKPN in accordance with the Regulations and the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) in a timely manner
   - Updating mechanisms, implementing the agreed mechanism and making report on the whistle blowing system implementation on the Company
   - Determining training policy for the Board of Directors and making a reports associated with the training required by the Board of Directors in accordance with the needs of the Company
4. Secretary of the Company
   Preparing Annual Report and Sustainability Report comprehensively so that it can compete and received an award in Annual Report Award
5. Internal Supervisory Unit
   - Updating the Audit Charter/Internal Audit Charter
   - Following Up the Recommendations of all External Supervision (BPK, KAP, BPKP)
   - Evaluating the effectiveness of internal control for entity level and operational level

Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG

Selama tahun 2015, PLN merealisasikan berbagai program penyempurnaan tata laksana serta sosialisasi kebijakan internal baru maupun restrukturisasi perangkat Dewan Komisaris. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada perkembangan *best practises* GCG terkini dan aturan terakhir menyangkut pelaksanaan GCG di perusahaan BUMN.

Program yang dilakukan di tahun 2015, mencakup:
Evaluasi pedoman GCG dan pedoman tata laksana Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)*.

1. Perseroan telah mengkaji butir-butir isi pedoman tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris berupa pedoman GCG dan *Board Manual*. Perseroan berpendapat sudah waktunya beberapa ketentuan yang mengatur tata laksana kerja Direksi maupun Dewan Komisaris disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini yang dihadapi PLN

Quality Improvement of GCG Best Practices

During 2015, PLN had been conducted various governance improvement programs and socialized new internal policies, as well as restructured Board of Commissioners composition. All of those programs were held based on current GCG best practises development and the latest rule regarding GCG implementation in SOE companies.

Programs that were held in 2015 consist of:
Evaluation of GCG guidelines and work management guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual).

1. Company has reviewed the contents of content points of work management guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the form of GCG guidelines and Board Manual. The Company believes it is time for some provisions that governing work management of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be adjusted to the applicable law and regulations and the current conditions faced by PLN

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan, PLN merealisasikan beragam program penyempurnaan tata laksana serta sosialisasi kebijakan internal baru sesuai dengan rekomendasi *assessor* penilai kualitas penerapan praktek GCG Perseroan.

As a part of efforts to improve of Good Corporate Governance, PLN holds various governance improvement program as well as socialization of new internal policies which are based on recommendations given from assessor of Company's GCG implementation evaluation.

2. Perseroan telah menyelesaikan draft pedoman tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang telah di*update* berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini dan telah dibahas dengan Komite Dewan Komisaris.
3. *Draft* pedoman tersebut saat ini sedang proses pengajuan persetujuan Direksi dan dewan Komisaris.

2. The Company has completed draft of work management guidelines of the board of directors and the board of commissioners that have been updated based on the applicable law and regulations and the current conditions as well as has been discussed by the committee of the board of commissioners.
3. Guidelines draft is currently under the process of filing the approval of the board of directors and the board of commissioners.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sebagai instansi tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Direktur dan lain-lain.

RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memberikan suara dan menetapkan sikap dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan rencana strategis Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Perseroan RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun, RUPS Tahunan bersifat rutin, RUPS Tahunan terdiri dari:
   - RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan.
   - RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
2. RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

RUPS diselenggarakan dengan wewenang utama dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, di antaranya:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Meningkatkan permodalan Perseroan, memecah maupun mengurangi jumlah saham dan membeli kembali saham.
3. Menggabungkan, melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain.
4. Menjaminkan sebagian besar aktiva perusahaan.
5. Mengesahkan transaksi material atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan, serta benturan kepentingan

PLN merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan mengacu pada keputusan Kementerian BUMN sebagai Pembina seluruh BUMN di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan RUPS dapat berlangsung dengan hadirnya kuasa pemegang saham Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri BUMN beserta staff yang ditugaskan serta dihadiri oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi PLN.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

As the highest level in Company, General Meeting of Shareholders (GMS) possesses authorities which are not given to either Board of Commissioners or and Board of Directors with its limitation set in Articles of Association and applicable laws and regulations. These authorities include requesting Board of Commissioners' and Board of Directors' accountability related to Company management; changing Articles of Association; appointing and dismissing members of Board of Directors and Commissioners; deciding task division and management authorities between Directors and others.

GMS is a forum for Shareholders to vote and conclude a stance in important decision making process associated with Company's strategic plan.

According to provisions in Company's Articles of Association, GMS consists of:

1. Annual GMS which is held every year, Annual GMS is routine meeting, Annual GMS consists of:
   - Annual GMS concerning the Approval of the Annual Report and the Approval of the Financial Statements.
   - Annual GMS concerning the Approval of the Work and Budget Plan (RKAP)
2. Extraordinary GMS is General Meeting of Shareholders which is held whenever necessary.

GMS is held and has main authority and responsibility to make decisions, such as:

1. Appointing and dismissing members of Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Increasing Company's capital, breaking down or reducing the amount of share, as well as repurchasing share.
3. Acquiring, merging, taking over, or separating Company's business units from other companies or to another business unit.
4. Using a large part of Company's assets as collateral
5. Ratifying material transaction or changes in Company's main business activity, and resolving conflict of interest.

PLN is a company that 100% of the shares owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, ordinances and procedures for the implementation of the GMS that was held refer to the decision of the Ministry of State Owned Enterprises as supervisor of all state owned enterprises in Indonesia and the Articles of Association of the Company.

Organization of GMS can be held with the presence of shareholders authorized by the Government of the Republic of Indonesia, in this case the Minister of State Enterprises and staff assigned and attended by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of PLN.

Pemberitahuan rencana RUPS disampaikan oleh Direksi secara resmi kepada Kementerian BUMN beberapa waktu sebelum pelaksanaan, lengkap dengan agenda RUPS.

Notification on GMS plan was submitted by the Board of Directors formally to the Ministry of State Owned Enterprises some time before the implementation, complete with the GMS agenda.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

1. RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2015.
2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015.
3. RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2015
4. RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2015.
5. RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Direksi yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2015.
6. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 10 November 2015.

In 2015 General Meeting of the Shareholders has been held 6 (six) times, namely:

1. GMS concerning the Ratification of the 2015 Work and Budget Plan (RKAP), was held on January 23, 2015.
2. GMS concerning the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Statements of Financial Year 2014 was held on May 27, 2015.
3. Extraordinary GMS concerning the dismissal of the Members of the Board of Commissioners that was set on April 28, 2015
4. Extraordinary GMS concerning the appointment of the Members of the Board of Commissioners that was set on September 25, 2015.
5. Extraordinary GMS concerning the appointment of the Members of the Board of Directors that was set on October 30, 2015.
6. Extraordinary GMS concerning the dismissal and the appointment of the Members of the Board of Commissioners that was set on November 10, 2015.

Keputusan dan Realisasi Keputusan RUPS

Penyelenggaraan RUPS di tahun 2015 tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang telah ditindaklanjuti, dengan Rekapitulasi sebagai berikut.

Decisions and Realizations of GMS Decisions

General Meeting of Shareholders organizations in 2015 resulted in some decisions that have followed up, with the Recapitulation as follows.

Keputusan RUPS Tahun 2015 dan Realisasinya
Decisions of the 2015 GMS and Its Realizations

No.	RUPS Tahunan Annual GMS	Realisasi RUPS Realizations of GMS
1.	RUPS tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 GMS on January 23, 2015 concerning the Ratification of the 2015 Work and Budget Plan (RKAP)	
a.	RUPS menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2015. GMS approved and ratified Work and Budget Plan financial year 2015.	Keputusan Langsung Berlaku This decision came into immediate effect.
	RUPS mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program PKBL tahun 2015 sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU 2007 tanggal 27 April 2007 tentang PKBL. GMS ratified Partnerships and Community Development Program (PKBL) of Work and Budget Plan year 2015 in accordance with Regulation of Minister of State Owned Enterprises number: PER-05/MBU 2007 dated April 27, 2007 concerning Partnerships and Community Development Program (PKBL).	Keputusan Langsung Berlaku This decision came into immediate effect.
b.	RUPS meminta kepada Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengusulkan indikator aspek operasional tahun 2015 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan RUPS dalam rangka persetujuan definitif RUPS lebih lanjut GMS requested to the Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to propose indicator of the 2015 operational aspect by no later than 30 (thirty) days since the organization of GMS in order to get further definitive approval from GMS	Sudah diusulkan. Usulan indikator aspek operasional tahun 2015 telah diusulkan oleh Dewan Komisaris melalui surat No. 90/DK-PLN/2015 tanggal 20 Mei 2015. It had been proposed. Proposal of indicators of the 2015 operational aspects was proposed by the Board of Commissioners through letter Num. 90/DK-PLN/2015 dated May 20, 2015.

No.	**RUPS Tahunan** Annual GMS	**Realisasi RUPS** Realizations of GMS
c	RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen *(Key Performance Indicators)* antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul sesuai Surat Wakil Menteri BUMN No. S-17/Wk.MBU/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang *shareholder aspiration*. GMS approved and ratified Contract Management (Key Performance Indicators) between the Board of Directors & Board of Commissioners and the Shareholders of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) by refer to the Excellent Performance Assessment Criteria in accordance with Letter of Deputy Minister of State Owned Enterprises Num. S-17/Wk.MBU/2013 dated October 30, 2013 concerning shareholder aspiration.	Keputusan Langsung Berlaku This decision came into immediate effect.
d	RUPS meminta kepada Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengusulkan penghapusbukuan aktiva tetap tidak beroperasi tahun 2015 kepada RUPS, guna mendapatkan persetujuan definitif dengan melengkapi data pendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. GMS requested the Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to propose write-offs of Property, plant and equipment that were not operating in 2015 to the GMS, in order to obtain a definitive agreement by completing supporting data in accordance with the applicable law and legislation.	Telah dilakukan pengusulan penghapusbukuan aktiva tetap tidak beroperasi tahun 2015 kepada RUPS. Write-offs of fixed asset that were not operating in 2015 has been proposed to GMS.
2.	RUPS Tanggal tanggal 27 Mei 2015 tentang "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014". GMS on May 27, 2015 concerning "the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Statements of Financial Year 2014".	
a	RUPS menyetujui dan mengesahkan Laporan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 termasuk Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014. GMS approved and ratified the Company Report of the Financial Year 2014 and the Report of the Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) of the Financial Year 2014 including the report of the implementation of the supervisory task of the Board of Commissioners of the financial year 2014.	Laporan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 termasuk Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014 telah disetujui dan disahkan pada tanggal 27 Mei 2015. Company Report of the Financial Year 2014 and Implementation Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) of the Financial Year 2014 including the report of the implementation of the supervisory task of the Board of Commissioners of the financial year 2014 have been approved and ratified on May 27, 2015.
b	RUPS menyetujui penyajian kembali *(restatement)* Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 termasuk besaran nilai dari akun-akun yang terpengaruh akibat penyajian kembali *(restatement)* Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 tersebut. GMS approved the restatement of Financial Statement of the Financial Year 2013 included the amount of the value of the accounts affected by the restatement of the Financial Statement of the Financial Year 2013.	Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 (restatement) telah disetujui pada tanggal 27 Mei 2015. The restatement of Financial Statements of Financial Year 2013 was approved on May 27, 2015.

No.	RUPS Tahunan Annual GMS	Realisasi RUPS Realizations of GMS
c	RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan tahun buku 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. GMS provides full release and discharge of the responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the financial year 2014 as well as the provision of release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners on acts of management and supervision on the Partnership and Community Development Program	Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan tahun buku 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah diberikan pada tanggal 27 Mei 2015. Full release and discharge of the responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the financial year 2014 as well as the provision of release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners on acts of management and supervision on the Partnership and Community Development Program has been granted on May 27, 2015.
d	RUPS menyetujui penetapan penggunaan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2014 sebesar Rp11.726.406 juta sebagai berikut. • Dividen tunai sebesar Rp3.962.441 juta dari laba yang diatribusikan pada pemilik entitas induk. • Sisa laba diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2014 sebesar Rp7.763.965 juta ditetapkan sebagai cadangan umum. GMS approved the establishment of the use of the profit attributable to owners of the parent entity of the financial year 2014 amounting to Rp11,726,406 million as follows. • Cash dividend of Rp3,962,441 million of profit attributable to owners of the parent entity. • Remaining profit attributable to owners of parent entity of the financial year 2014 amounted to Rp7,763,965 million designated as general reserves.	Dividen sebesar Rp3.962.441 juta telah dibayarkan kepada entitas induk. Dividends amounting to Rp3,962,441 million has been paid to the holding entity.
e	Penetapan Tantiem/ insentif kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2014 dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun 2015 akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri. Determination of Devidend/Performance Incentives to the Board of Directors and the Board of Commissioners on the performance of the financial year 2014 and determination of the remuneration of the board of directors and board of commissioners of the company in 2015 will be determined in a separate decision.	Telah ditetapkan keputusan RUPS tentang remunerasi dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. GMS decisions concerning remuneration and the devident for the Board of Directors and Board of Commissioners has been determined.

No.	**RUPS Tahunan** Annual GMS	**Realisasi RUPS** Realizations of GMS
f	RUPS meminta Dewan Komisaris untuk menyampaikan secara tersendiri usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 untuk mendapatkan penetapan secara definitif dari RUPS. GMS asking the Board of Commissioners to convey the proposals of Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Financial Statements of the Company of the financial year 2015 to get a definitive determination of the GMS	Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-372/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, telah ditetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan, a member firm of Pricewaterhouse Coopers International Limited Global Network dalam rangka melaksanakan general audit atas laporan keuangan perseroan tahun 2015, laporan evaluasi kinerja tahun buku 2015, laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern tahun buku 2015, laporan PKBL, dan *Key Performance Indicators* Perseroan tahun buku 2015. Based on the letter of Minister of State Owned Enterprises Num. S-372/MBU/06/2015 dated June 26, 2015, has been determined Tanudiredja, Wibisana, Rintis & associates, a member firm of Pricewaterhouse Coopers International Limited Global Network to implement the general audit of the 2015 financial statements of the company, performance evaluation reports of the financial year 2015, reports of compliance with laws and regulations and internal control of the financial year 2015, PKBL reports, and Company's KPI of the financial year 2015.

No.	**RUPS Luar Biasa** Extraordinary GMS	**Realisasi RUPS** Realizations of GMS
1.	RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2015 Extraordinary GMS concerning the dismissal of the Members of the Board of Commissioners that was set on April 28, 2015	Pemberhentian dengan Hormat "Sdr. Zulkifli Zaini" sebagai Komisaris Perseroan Dismissal with respect "Mr. Zulkifli Zaini" as member of the Board of Commissioners of the Company
2.	RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2015. Extraordinary GMS concerning the dismissal and the appointment of the Members of the Board of Commissioners that was set on September 25, 2015.	Pengangkatan "Sdr. Aloysius Kiik Ro" sebagai Anggota Komisaris Perseroan Appointment of "Mr. Aloysius Kiik Ro" as member of the Board of Commissioners of the Company

No.	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	Realisasi RUPS Realizations of GMS
3.	RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2015. Extraordinary GMS concerning the dismissal and the appointment of the Members of the Board of Directors that was set on October 30, 2015.	Pengangkatan: Sdr. Muhamad Ali Sdr. Djoko Rahardjo Abu Manan Machnizon Haryanto W.S. Sebagai Anggota Direksi Perseroan Appointment of: 1. Mr. Muhamad Ali 2. Mr. Djoko Rahardjo Abu Manan 3. Mr. Machnizon 4. Mr. Haryanto W.S. As members of the Board of Directors of the Company
4.	RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 10 November 2015 Extraordinary GMS concerning the dismissal and the appointment of the Members of the Board of Commissioners that was set on November 10, 2015	Pemberhentian dengan Hormat: 1. Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Sdr. Sumanggar Milton Pakpahan sebagai Komisaris Perseroan. Pengangkatan: 1. Sdr. Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komisaris Utama Perseroan 2. Sdr. Jarman sebagai Anggota Komisaris Perseroan Dismissal with respect: 1. Mr. Chandra M. Hamzah as the President Commissioner of the Company. 2. Mr. Sumanggar Milton Pakpahan as the Commissioner of the Company. Appointment of: 1. Mr. Kuntoro Mangkusubroto as President Commissioner of the Company 2. Mr. Jarman as member of the Board of Commissioners of the Company
5.	RUPS Luar Biasa Tentang Pemberhentian Komisaris Utama yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2016 The Extraordinary GMS on dismissal of President Commissioner set on May 24, 2016	Pemberhentian dengan Hormat : 1. Sdr. Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komisaris Utama Perseroan 2. Pengangkatan Sdr. Hasan Bisri sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan Termination Respectfully: 1. Mr. Kuntoro Mangkusubroto as President Commissioner of the Company 2. Appointment of Mr. Hasan Bisri as Acting President Commissioner of the Company

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perangkat aturan yang menjadi dasar tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi PLN adalah *Board Manual* PLN. *Board Manual* merupakan tata laksana hubungan antar Organ Perusahaan yang mengacu kepada Peraturan Menteri dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian Wewenang dan Pengaturan Persetujuan Dewan Komisaris

Isi dari *Board Manual* di atas diantaranya adalah pendelegasian wewenang kepada Direksi pada batas-batas tertentu sesuai Anggaran Dasar dan sesuai butir-butir ketentuan *Board Manual,* untuk merealisasikan aksi korporasi tertentu sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagai pengelola Perusahaan.

Namun, jika nilai maupun dampak dari aksi korporasi yang akan dilaksanakan Direksi ternyata melebihi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* tersebut, maka Direksi harus terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Apabila untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan penjelasan lebih detail dari Direksi, maka Dewan Komisaris dapat mengundang dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.

Rapat Konsultasi Dewan Komisaris - Direksi & Kehadiran Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi adalah Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. Rapat dapat berlangsung atas inisiatif Dewan Komisaris maupun Direksi. Rapat tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional.

Melalui Rapat tersebut diharapkan dihasilkan keputusan-keputusan strategis mengenai suatu rencana aksi korporasi, jika rencana dimaksud berada di luar batas kewenangan Direksi. Rapat tersebut juga dapat menjadi tempat bagi Dewan Komisaris memberikan pandangan dan arahan strategis pengembangan perusahaan.

Selama tahun 2015, PLN menyelenggarakan 19 kali Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

WORKING RELATIONSHIP MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Set of rules that becomes the basis of working relationship management between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PLN is the Board Manual of PLN. Board Manual is the relationship management between Organs of the Company, which refers to applicable Minister Regulation and Legislation.

Authority Distribution and Approval Management of The Board of Commissioners

The contents of the above Board Manual include the delegation of authority to the Board of Directors at the certain limits according to the Articles of Association and according to the points of the Board Manual provisions, to realize certain corporate actions in accordance with the duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors as the manager of the Company.

However, if the value and impact of corporate actions that will be implemented by the Board of Directors exceed the provisions as stipulated in the Manual Board, the Board of Directors must first submit a proposal to the Board of Commissioners and obtain written approval from the Board of Commissioners.

If such approval is required to obtain a more detailed explanation of the Board of Directors, the Board of Commissioners may invite and held a Board of Commissioners Meeting which was attended by the Board of Directors.

Consultation Meeting of The Board of Commissioners and The Board of Directors & Attendance at Consultation Meeting

Consultation Meeting is the Board of Commissioners Meeting which was attended by the Board of Directors or Board of Directors meeting, which was attended by the Board of Commissioners. Meetings can take place at the initiative of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The meeting was held to obtain unity in views and harmony between the Board of Commissioners acts as a supervisor, the Board of Directors as the operational executor.

The meeting is expected to produced strategic decisions concerning a corporate action plan, if the plan is beyond the authority of the Board of Directors. The meeting can also be a place for the Board of Commissioners to provide insight and strategic direction of the company's development.

In 2015, PLN held 19 times Consultation Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors with the recapitulation of attendance as follows:

Kehadiran dan Persentasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Pada Rapat Konsultasi Tahun 2015:
Attendance and percentage of attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Consultation Meeting during 2015:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Comissioner's Attendance	Partisipan Participant
1.	7 Januari January 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/78 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
2.	23 Januari January 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/67 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Darmono, Andin Hadiyanto, Zulkifli Zaini, Budiman, Hasan Bisri
3.	02 Maret March 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/100 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
4.	18 Maret March 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/89 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
5.	1 April April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN))	Korum Quorum/78 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
6.	1 April April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(DAN))	Korum Quorum/67 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
7.	8 April April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN))	Korum Quorum/67 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan
8.	8 April April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(KONS))	Korum Quorum/67 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan
9.	10 April April 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/100 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
10.	29 April April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN))	Korum Quorum/78 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
11.	30 April April 2015 (Dihadiri Direksi – DIRUT)	Korum Quorum/75 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Hasan Bisri
12.	20 Mei May 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/88 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
13.	27 Mei May 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/88 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
14.	17 Juni June 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/75 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
15.	5 Agustus August 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/100 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Comissioner's Attendance	Partisipan Participant
16.	2 September 2015 (Dihadiri DIRREG Jateng)	Korum Quorum/88 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
17.	2 September 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/88 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
18.	7 Oktober October 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/67 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman
13.	28 Oktober October 2015 (Dihadiri Direksi)	Korum Quorum/88 %	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri, Aloysius Kiik Ro

Tingkat kehadiran dihitung berdasarkan masa tugas:
(*) Sdr. Chandra Hamzah dan Sdr. S. Milton Pakpahan berhenti bertugas sejak tanggal 10 November 2015
(**) Sdr. Kuntoro Mangkusubroto dan Sdr. Jarman mulai bertugas sejak tanggal 10 November 2015
(***) Sdr. Zulkifli Zaini berhenti bertugas sejak tanggal 28 April 2015
(****) Sdr. Aloysius Kiik Ro mulai bertugas sejak tanggal 25 September 2015

Attendance level is calculated based on the assignment period:
(*) Mr. Chandra Hamzah and Mr. S. Milton Pakpahan were dismissed with respect in November 10, 2015
(**) Mr. Kuntoro Mangkusubroto and Mr. Jarman on duty from November 10, 2015
(***) Mr. Zulkifli Zaini stopped working since April 28, 2015
(****) Mr. Aloysius Kiik Ro on duty from September 25, 2015

Keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi

Materi utama Rapat Konsultasi Dewan Komisaris & Direksi PLN selama tahun 2015, mencakup:

Decision of The Joint Meeting of The Board of Commissioners & The Board of Directors

The main subjects of Consultation Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors of PLN during 2015 are:

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	7 Januari January 2015	• Perkenalan Dewan Komisaris dengan Direksi • Info PLN Terkini • Introduce Board of Commissioners with the Board of Directors • Current Info of PLN
2.	23 Januari January 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Info PLN Terkini • Follow up of the results of the Board of Commissioners meeting • Current Info of PLN
3.	02 Maret March 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Info Terkini PLN • Follow up of the results of the Board of Commissioners meeting • Current Info of PLN
4.	18 Maret March 2015	• Hasil *assessment* GCG 2014 • Info Terkini • Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Assessment Results of 2014 GCG • Current Info of PLN • Long Term Plan 2015-2019 • Revision of Work and Budget Plan 2015 • Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
5.	1 April 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners • Long Term Plan (RJP) 2015-2019 • Revision of Work and Budget Plan 2015
6.	1 April 2015	Proyek 35.000 MW 35.000 MW Project
7.	8 April 2015	• Revisi Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Revision of Long Term Plan (RJP) 2015-2019 • Revision of Work and Budget Plan 2015
8.	8 April 2015	Info PLN Terkini Current Info of PLN
9.	10 April 2015	Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners
10.	29 April 2015	Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners
11.	30 April 2015	Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners
12.	20 Mei May 2015	• Laporan Manajemen TW I / 2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Management Report of TW I / 2015 • Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners
13.	27 Mei May 2015	• Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2014 • Penetapan tantiem Direksi-Dewan Komisaris 2014 • Laporan Manajemen TW I/2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Determination of the use of 2014 Net Profit • Determination of 2014 tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners • Management Report of TW I/2015 • Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners
14.	17 Juni June 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Info PLN terkini • Sistem *Whistleblower* dan penanganan gratifikasi • Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners • Current Info of PLN • Whistleblower system and dividend handling
15.	5 Agustus August 2015	• Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Revisi Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Laporan Manajemen TW II/2015 • Info PLN Terkini • Revision of Work and Budget Plan 2015 • Revision of Long Term Plan (RJP) 2015-2019 • Laporan Manajemen TW II/2015 • Current Info of PLN
16.	2 September 2015	Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners
17.	2 September 2015	Info PLN Terkini Current Info of PLN
18.	7 Oktober October 2015	Info PLN terkini Current Info of PLN
19.	28 Oktober October 2015	• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Laporan Manajemen TW III/2015 • Info PLN terkini • Work and Budget Plan 2016 • Proposal of the Board of Directors that needs the approval/recommendation of the Board of Commissioners • Laporan Manajemen TW III/2015 • Current Info of PLN

Hubungan Keluarga, Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Dalam rangka menjaga independensi, menghindarkan adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, PLN memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Aturan tersebut dipegang teguh, sehingga tidak terdapat hubungan keluarga di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, dan di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Demikian juga tidak ada hubungan bisnis di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, di antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dengan PLN.

Family Relationship, Affiliation Relationship Between Members of Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

In order to maintain independency, to avoid conflict of interest and ensure accountability in decision-making and in the implementation of operational activities, PLN had a rule prohibits an affiliation or family relationships directly or indirectly between the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Key and/or Controlling Shareholders.

The rules are adhered to, so that there are no family relationships between members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Likewise, there is no business relationship between members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, between the members of the Board of Commissioners with the members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners/Board of Directors with PLN.

Nama Name	**Hubungan Keluarga dengan** Familial Relationship with						**Hubungan Afiliasi dengan** Afiliation Relationship with					
	BOC		**BOD**		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder		**BOC**		**BOD**		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder	
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Kuntoro Mangkusubroto		√		√		√		√		√		√
Oegroseno		√		√		√		√		√		√
Darmono		√		√		√		√		√		√
Jarman		√		√		√		√		√		√
Andin Hadiyanto		√		√		√		√		√		√
Budiman		√		√		√		√		√		√
Harry Susetyo Nugroho		√		√		√		√		√		√
Hasan Bisri		√		√		√		√		√		√
Aloysius Kiik Ro		√		√		√		√		√		√
Direksi Board of Directors												
Sofyan Basir		√		√		√		√		√		√
Sarwono Sudarto		√		√		√		√		√		√
Nicke Widyawati		√		√		√		√		√		√
Supangkat Iwan Santoso		√		√		√		√		√		√
Amin Subekti		√		√		√		√		√		√
Nasri Sebayang		√		√		√		√		√		√
Amir Rosidin		√		√		√		√		√		√
Murtaqi Syamsuddin		√		√		√		√		√		√
Muhamad Ali		√		√		√		√		√		√
Djoko R. Abu Manan		√		√		√		√		√		√
Machnizon		√		√		√		√		√		√
Haryanto W.S		√		√		√		√		√		√

DEWAN KOMISARIS

Sebagai salah satu BUMN, PLN tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menegaskan bahwa semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia wajib mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi.

Sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, masa tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, demi kebaikan perusahaan yang bersangkutan.

Agar tidak terjadi benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris PLN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BOARD OF COMMISSIONERS

As one of the state owned enterprises, PLN subject to the provisions of Law Num. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") which confirms that all of the Company incorporated under the laws of Indonesia shall have a Board of Commissioners on duty to supervise the management policy, the course of management, either on the Company or the Company's business that is conducted by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors.

In accordance with the Articles 28 Paragraph 3 of Law Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises, working period of the members of the Board of Commissioners is set for 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term, with no prejudice to the right of GMS to make a replacement at any time if deemed necessary, for the good of the company concerned.

To avoid conflict of interest, each member of the Board of Commissioners of PLN is forbidden to hold position as a member of the Board of Directors in other state owned enterprises, regional owned enterprises, private enterprises, and/or other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja *(Board Manual/Charter)* Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*, sedangkan untuk pedoman kerja internal dewan komisaris mengacu pada manual Dewan Komisaris.

Manual Dewan Komisaris mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
4. Pengawasan dan Pemberian Nasehat
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
7. Organ Pendukung

Guidelines and Code of Conduct (Board Manual/Charter) Board of Commissioners

In order to carry out the supervision and providing advice task to the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Working Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual), while for the internal working guidelines the board of commissioners refers to the Board of Commissioners manual.

Board of Commissioners Manual includes:

1. General Provisions
2. Duties and Authority of the Board of Commissioners
3. Rights and Responsibilities of the Board of Commissioners
4. Supervision and Providing Advice
5. Meetings of the Board of Commissioners
6. Work Plan and KPI as well as the Implementation Report of the Supervisory task of the Board of Commissioners
7. Supporting Organ

KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia

CRITERIA AND PROCEDURES FOR DETERMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is an assembly and each member of the Board of Commissioners can not act alone but by a decision of the Board of Commissioners. Formal requirements of the members of the Board of Commissioners are individuals who has Indonesian nationality who are legally competent, except within 5

yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: (a) dinyatakan pailit, (b) menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, dan (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Dewan Komisaris tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Mengingat bidang usaha PLN merupakan salah satu bidang usaha strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dengan posisi kegiatan operasional berada di seluruh wilayah Indonesia serta fasilitas distribusi meliputi area publik, komposisi personalia Dewan Komisaris PLN dibentuk dengan memperhitungkan latar belakang kompetensi yang beragam, namun dapat saling melengkapi, sehingga membentuk satu lembaga dengan kompetensi menyatu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dangan Anggaran Dasar dan dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis pengembangan PLN agar dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta independen.

Sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa tertanggal 10 November 2015, komposisi Dewan Komisaris berubah oleh karena adanya pemberhentian dengan hormat terhadap Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama. Beliau digantikan oleh Sdr. Kuntoro Mangkusubroto, sosok yang tidak asing bagi PLN mengingat beliau pernah menjabat sebagai Dirut PLN, serta berpengalaman dengan berbagai jabatan strategis di pemerintahan, dengan pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia (sekarang ESDM), juga pernah menjabat Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia (UKP4).

(five) years prior to the appointment ever: (a) is declared bankrupt, (b) become a member of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or members of the supervisory board who were responsible for causing a company or state owned enterprise is declared bankrupt, and (c) convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's financial and/or state owned enterprises and/or related to the financial sector.

Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The structure, requirements, nomination, and appointment of the Board of Commissioners are determined by the GMS in accordance with the provision of the Articles of Association and applicable legislation.

Members of the Board of Commissioners are entitled to resign from their position by notifying in writing of this intention to the Company with a copy to the Authority of the Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia, the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors in no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the resignation does not specify the effective date of the resignation and no decision on the GMS concerning the resignation, then the members of the Board of Commissioners are effectively resigned since the lapse of 30 (thirty) days from the receiving date of the letter of resignation.

Diversity in Composition of The Board of Commissioners

Given the field of PLN's business is one of the strategic business areas in supporting the growth of the economy by positioning the operational activities in all territories of Indonesia as well as facilities distribution covering public areas, the personnel composition of Board of Commissioners of PLN was established by taking into account the diversity in competence background, but can complete each other, so it can form one body with united competency in performing supervisory duties.

Number and composition of the Board of Commissioners have been set by GMS, in accordance with the Articles of Association and with considering the vision, mission and strategic development plan of PLN to make the monitoring implementation effective as well as quick, precise, independent decision making.

In accordance with the decision of the Extraordinary GMS dated November 10, 2015, the composition of the Board of Commissioners has been changed because of the dismissal with respect of Mr. Chandra M. Hamzah as President Commissioner. He was replaced by Mr. Kuntoro Mangkusubroto, a familiar figure to PLN considering he had ever served as President Director of PLN, and experienced with various strategic positions in the government, by ever served as Minister of Mines and Energy of Indonesia (now Energy and Mineral Resources), he has also served as Head of the Working Unit of President of Indonesia in the field of Development Monitoring and Control of Indonesia (UKP4).

Pengalaman panjang Sdr. Kuntoro Mangkusubroto di bidang ketenagalistrikan dan di pemerintahan diharapkan mampu mendukung terwujudnya tugas PLN dalam menyelesaikan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW, selain pembangkit reguler lengkap dengan jaringan transmisi dan distribusi pendukungnya tepat pada waktunya.

Long experience of Mr. Kuntoro Mangkusubroto in the electricity sector and the government is expected to support the realization of PLN task in completing the Development of 35,000 MW Plant, in addition to the regular plant complete with its supporting transmission and distribution network on time.

Selain itu, beberapa anggota Dewan Komisaris juga diberhentikan dengan hormat, yakni Sdr. Zulkifli Zaini dan Sdr. S. Milton Pakpahan untuk kemudian digantikan dengan oleh Sdr. Jarman dan Sdr. Aloysius Kiik Ro. Kedua anggota Komisaris baru tersebut juga memiliki latar belakang kompetensi dan pengalaman yang sangat memadai untuk menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional.

In addition, several members of the Board of Commissioners also have been dismissed with respect, namely Mr. Zulkifli Zaini and Mr. S. Milton Pakpahan then were replaced with Mr. Jarman and Mr. Aloysius Kiik Ro. The two new members of the board of Commissioners also have sufficient background in the competence and experience to carry out the monitoring task and providing advice to the Board of Directors in carrying out operational activities.

Pada Akhir Mei Tahun 2016 Sdr. Kuntoro Mangkusubroto diberhentikan dengan hormat melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-106/MBU/05/2016 dan Sdr. Hasan Bisri ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan.

In the end of May 2016, Mr Kuntoro Mangkusubroto was honorably dismissed through the Minister of SOEs as GMS Num. SK-106/MBU/05/2016 and Mr. Hasan Bisri appointed as Acting President Commissioner of the Company.

PLN meyakini bahwa keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang dibentuk melalui RUPS, telah memenuhi kebutuhan Perusahaan akan keberagaman latar belakang akademis, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan, yang saat ini diisi oleh personalia dengan latar belakang keahlian di bidang: pemerintahan, makro ekonomi, keuangan, hukum, keamanan, restrukturisasi/pengembangan usaha, maupun pengelolaan sumber daya manusia.

PLN believes that the diversity of the composition of the Board of Commissioners formed by GMS, has met the needs of the Company on the diversity of academic backgrounds, skills and experience required, which is currently filled by personnel with the background expertise in: governance, macro-economic, financial, legal, security, restructuring/business development, as well as human resource management.

Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah 2 orang, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER — 01 /MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara bahwa komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya oleh RUPS.

Independence of The Board of Commissioners

Total members of the Board of Independent Commissioners are 2 people, it has been in line with the Regulation of the State Minister of the State Owned Enterprises Number: PER — 01 /MBU/2011 concerning the implementation of corporate governance practices in the State Owned Enterprises whereas the composition of the Board of Commissioners at least 20% is members of the Board of Independent Commissioners whose appointment was set out in the decision by GMS.

Kriteria Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN di atas, bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Board of Independent Commissioners Criteria

Members of the Board of Independent Commissioners have met the criteria as set out in the above mentioned Decree of the Minister of the State Owned Enterprises, whereas do not have financial, management, share ownership and/or family relationship to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the controlling shareholders or have relationship with the State Owned Enterprises concerned, which may affect their ability to act independently.

Selain hal tersebut, anggota Dewan Komisaris telah membuat pernyataan terkait dengan tidak ada benturan kepentingan *(conflict of interest)* dan tidak mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

In addition to this matter, members of the Board of Commissioners have made a statement related to no conflict of interest and do not take personal advantage, from the decision-making and/or the implementation of the activities of the SOE in question, beside a legitimate income.

Pernyataan Mengenai Komisaris Independen

Adapun independensi anggota Komisaris Independen yang menjabat sejak tahun 2014 tercermin dalam tabel dengan aspek-aspek utama sebagai berikut:

Statement of the Independent Commissioners

As for the independence of the Independent Commissioners who served since 2014 is reflected in the table with key aspects as follows:

Aspek Independensi	Oegroseno	Darmono	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya	√	√	Has no financial ties, management position, share ownership and/or family relationships with other Board of Commissioners member.
Tidak memiliki hubungan dengan Direksi	√	√	Has no relationships with Board of Directors
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN lain yang bersangkutan dengan PLN	√	√	Has no relationships with other State-Owned Enterprises related to PLN
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintahan	√	√	Does not hold position in political party management or governmental official
Tidak menjabat kepengurusan di anak usaha PLN	√	√	Does not hold management position at PLN subsidiary

Susunan Personalia dan Masa Tugas Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PLN selama tahun 2015 mengalami dua kali pergantian, sebagai berikut.

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-2273/MBU/2014 tanggal 23 Desember 2014, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Personnel Organization and Working Period of The Board of Commissioners

Composition of the Board of Commissioners of PLN during 2015 has been changed twice, as follows.

- In accordance with the Decree of the Minister of State Owned Enterprise as GMS Number: SK-2273/MBU/2014 dated December 23, 2014, the personnel composition of the Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama President Commissioner	Chandra M. Hamzah
Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris Commissioner	Zulkifli Zaini
Komisaris Commissioner	Andin Hadiyanto
Komisaris Commissioner	Budiman
Komisaris Commissioner	Hasan Bisri
Komisaris Commissioner	S. Milton Pakpahan

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-53/MBU/04/2015 tanggal 28 April 2015, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- In accordance with SoE (State-owned Enterprise) Ministerial Decree as GMS of PLN Num. SK-53/MBU/04/2015 dated 28 April 2015, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Komisaris Utama President Commissioner	Chandra M. Hamzah
Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris Commissioner	Andin Hadiyanto
Komisaris Commissioner	Budiman
Komisaris Commissioner	Hasan Bisri
Komisaris Commissioner	S. Milton Pakpahan

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- In accordance with SoE (State-owned Enterprise) Ministerial Decree as GMS of PLN Num. SK-183/MBU/09/2015 dated 25 September 2015, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Komisaris Utama President Commissioner	Chandra M. Hamzah
Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris Commissioner	Andin Hadiyanto
Komisaris Commissioner	Budiman
Komisaris Commissioner	Hasan Bisri
Komisaris Commissioner	Aloysius Kiik Ro

- Kemudian sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-223/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Furthermore, in accordance with SoE (State-owned Enterprise) Ministerial Decree as GMS of PLN Num. SK-223/MBU/11/2015 dated 10 November 2015, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Komisaris Utama President Commissioner	Kuntoro Mangkusubroto
Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris Commissioner	Jarman
Komisaris	Andin Hadiyanto
Komisaris	Budiman
Komisaris	Hasan Bisri
Komisaris	Aloysius Kiik Ro

- Kemudian sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-106 MBU/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Then, according to the Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-106/MBU/05/2016 dated May 24, 2016, the personnel composition of the Board of Commissioners

Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	Hasan Bisri
Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris Commissioner	Jarman
Komisaris Commissioner	Andin Hadiyanto
Komisaris Commissioner	Budiman
Komisaris Commissioner	Hasan Bisri

Sehingga ringkasan perubahan komposisi personalia Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan dan masa jabatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Thus, the summary of changes in the composition of the Board of Commissioners, date of assignment, and tenure in 2014 are as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan
Composition and Tenure of Board of Commissioners of the Company

Nama Name	**Jabatan** Title	**Tanggal Pengangkatan** Date of Appointment	**Akhir Masa Jabatan** End of Tenure
Chandra M. Hamzah (*)	Komisaris Utama	23 Desember December 2014	10 November 2015
Zulkifli Zaini (***)	Komisaris	2 Juli July 2013	28 April 2015
S. Milton Pakpahan (*)	Komisaris	16 Oktober October 2014	10 November 2015
Kuntoro Mangkusubroto(*****)	Komisaris Utama	10 November 2015	24 Mei May 2016
Oegroseno	Komisaris Independen	16 Oktober October 2014	16 Oktober October 2019
Darmono	Komisaris Independen	16 Oktober October 2014	16 Oktober October 2019
Jarman (**)	Komisaris	10 November 2015	10 November 2020
Andin Hadiyanto	Komisaris	3 Oktober October 2012	3 Oktober October 2017
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris	2 April 2013	2 April 2018

Nama Name	Jabatan Title	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Tenure
Budiman	Komisaris	23 Desember December 2014	23 Desember December 2019
Hasan Bisri	Komisaris	23 Desember December 2014	23 Desember December 2019
Aloysius Kiik Ro (****)	Komisaris	25 September 2015	25 September 2020
Hasan Bisri	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	24 Mei May 2016	Hingga ditetapkannya Komisaris Utama Definitif oleh Pemegang Saham Until Definitive President Commissioner Appointed

Catatan:
(*) Diberhentikan dengan hormat melalui RUPS No. SK-223/MBU/11/2015 pada tanggal 10 November 2015.
(**) Diangkat sebagai Komisaris melalui RUPS No. SK-223/MBU/11/2015 pada tanggal 10 November 2015.
(***) Diberhentikan dengan hormat melalui RUPS No. SK-53/MBU/04/2015 pada tanggal 28 April 2015.
(****) Diangkat sebagai Komisaris melalui RUPS No. SK-183/MBU/09/2015 pada tanggal 25 September 2015.
(*****) Diberhentikan dengan hormat melalui RUPS No. SK - 106/MBU/05/2016 pada tanggal 24 Mei 2016

Notes:
(*) Officially dismissed by virtue of GMS Num. SK-223/MBU/11/2015 dated 10 November 2015.
(**) Appointed as Commissioner by virtue of GMS Num. SK-223/MBU/11/2015 dated 10 November 2015.
(***) Officially dismissed by virtue of GMS Num. SK-53/MBU/04/2015 dated 28 April 2015.
(****) Appointed as Commissioner by virtue of GMS Num. SK-183/MBU/09/2015 dated 25 November 2015.
(*****) Officially dismissed with respect of GMS Num. SK-106/MBU/05/2016 on 24 May 2016.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Beberapa anggota Dewan Komisaris PLN memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Namun demikian perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan larangan rapat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria Dewan Komisaris PLN. Adapun rincian Rangkap Jabatan dari anggota Dewan Komisaris PLN adalah sebagai berikut:

Dual Positions Held by Members of The Board of Commissioners'

Several members of the Board of Commissioners of PLN hold positions at other institutions. However, the dual positions are not in contravention of stipulations on offices stated in the criteria for the Board of Commissioners of PLN. Dual Positions held by members of the Board of Commissioners of PLN are as follows:

Nama Name	Jabatan di PLN Title at PLN	Jabatan di Instasi/Perusahaan Lain Title at Other Institutions/Companies	Nama Instansi/Perusahaan Lain Name of Other Institutions/Companies
Hasan Bisri	Komisaris dan Plt. Komisaris Utama Commissioner and Act. President Commissioner	-	-
Oegroseno	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Darmono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	-	-
Jarman	Komisaris Commissioner	Dirjen Ketenagalistrikan Director General of Electricity	Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources
Andin Hadiyanto	Komisaris Commissioner	Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Finance Minister Expert Staff in Macroeconomics and International Finance	Kementerian Keuangan Ministry Of Finance
Budiman	Komisaris Commissioner	-	-
Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commissioner	Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Deputy in Restructuring and Business Development	Kementerian BUMN Ministry of State-owned Enterprises

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan BAPEPAM dan OJK;
4. Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan;
5. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
6. Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*).

Duties, Responsibilities, And Authorities Of The Board Of Commissioners

The legal foundations of the Board of Commissioners' tasks and authorities are:

1. Law Num. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law Num. 19 of 2003 on State-owned Enterprises;
3. Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and Financial Services Authority regulations;
4. Regulations issued by the Minister of State-owned Enterprises, Minister of Energy and Mineral Resources, and Minister of Finance;
5. Articles of Association of PT PLN (Persero);
6. Board Manual.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are supervising management policies, managing the company and its interests, and advising the Board of Directors. The duties are conducted in the interests of the company and based on its purposes and objectives, and not in the interests of particular parties or groups.

According to the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners' duties and authorities are:

1. Supervising the Company's management policies carried out by the Directors as well as advising the Directors on the Company's development plan, work plan, annual budget, and implementation of provisions of the Articles of Association and decisions of General Meeting of Shareholders (GMS) as well as prevailing laws and regulations;
2. Performing duties, authorities, and responsibilities based on the provisions of the Articles of Association and decisions made in the General Meeting of Shareholders, as well as prevailing laws and regulations;
3. Satisfying the Company's interests by taking into consideration the interests of Shareholders and accountable to the General Meeting of Shareholders;
4. Assessing and reviewing Annual Reports, including Financial Statements prepared by the Board of Directors as well as signing-off those reports.

Authorities of the Board of Commissioners

In its supervisory capacity, the Board of Commissioners has the authorities to:

Untuk memastikan dipatuhinya seluruh keputusan RUPS dan dipenuhinya seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki wewenang meliputi: memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan posisi uang kas dan lain-lain dalam rangka verifikasi.

To ensure compliance of every GMS decisions and satisfaction of prevailing laws and regulation, the Board of Commissioners has the authority to examine books, evidence papers, inventory, examine and match cash positions for verification purposes.

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu:
   - Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan; dan

1. Collectively or individually, at every time:
   - Entering buildings, yards, and locations used by or owned by the Company; and

- Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan posisi uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa keberadaan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli. Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit dengan anggota yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab Dewan Komisaris; dan
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta membagi tugas dan wewenang diantara Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai Ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut.

Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal ini Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris;
7. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
8. Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris juga mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Examining books, evidence papers, inventory, examining and matching cash positions for verification or other purposes, examining securities, and having knowledge of actions which have been taken by the Board of Directors.

2. Form committees to support the supervisory duties of the Board of Commissioners or appoint experts. The Board of Commissioners is however required to form the Audit Committee, whose member consists of at least one or more member of the Board of Commissioners and accountable to the Board of Commissioners; and
3. Inquire answers to questions given to the Board of Directors, to which the Board of Directors must provide answers to.

In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and three committees, namely the Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners has the authority to delegate duties and authorities among its members in appointing Commissioners as Chairman or members of the committees.

Obligations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners according to the Articles of Association of the Company are obliged to:

1. Dispense opinions and advices to the General Meeting of Shareholders on the Company's development plan, work plan, and annual budget, including its amendments and supplementations, regular reports, and other reports from the Board of Directors;
2. Supervise the execution of the company's Work and Budget Plan, informing evaluation results, and provide its opinion in the General Meeting of Shareholders;
3. Follow developments of the Company's activities. If the Company is showing signs of recession, the Board of Commissioners are to report it in the General Meeting of Shareholders with recommendations for remedy;
4. Dispense opinions and advices to the General Meeting of Shareholders on other issues deemed necessary in the management of the Company;
5. Perform other supervisory duties as required by the General Meeting of Shareholders;
6. Take Minutes of Meeting of the Board of Commissioners;
7. Report to the Company on its share ownership and/or kinship ties in the Company or other companies;
8. Provide a report of duties and supervision conducted in the last financial year in the General Meeting of Shareholders.

In addition to the above, the Board of Commissioners supervises compliance to all and every applicable laws and regulations.

Rapat Rutin Dewan Komisaris

Berdasarkan anggaran dasar, rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika rapat yang bersifat segera / strategis dan dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; dan
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil selain dalam rapat tersebut juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan catatan keputusan tersebut telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Routine Meetings of The Board of Commissioners

In accordance with the Articles of Association, the Board of Commissioners' meetings are held at least once a month and may include members of the Board of Directors.

The Board of Commissioners may also meet outside its routine schedule, if it is deemed urgent/strategic and called by:

1. One or more members of the Board of Commissioners; and
2. Written requests by one or more members of the Board of Commissioners.

Decisions made by the Board of Commissioners outside of the routine meetings above may be enacted, provided that the decisions are approved in writing and signed-off by all of the board members.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Meeting Agenda of the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	7 Januari January 2015	• Perkenalan Komisaris Baru • Sharing Pengalaman Komisaris lama • Laporan Komite • Introduction of New Commissioners • Experience sharing with previous Commissioners • Committee Reports
2.	7 Januari January 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Perkenalan Dewan Komisaris dengan Direksi • Info PLN Terkini • Introducing Commissioners to Directors • Recent PLN Updates
3.	14 Januari January 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Follow-up of Commissioners' Meeting
4.	21 Januari January 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Laporan Komite • Follow-up on Commissioners' Meeting • Committee Reports
5.	23 Januari January 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Info PLN Terkini • Follow-up on Commissioners' Meeting • Recent PLN Updates
6.	4 Februari February 2015	• Tindak Lanjut RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Laporan Komite • Follow-up on 2015 GMS Work and Budget Plan • Committee Reports
7.	18 Februari February 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Laporan Komite • Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris • Follow-up on Commissioners' Meeting • Committee Reports • Planned Commissioners' Working Visits
8.	25 Februari February 2015	• Pengaturan Jadwal Rapat Dewan Komisaris • Info Terkini • Scheduling Commissioners' Meetings • Recent Updates
9.	2 Maret March 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Info Terkini PLN • Follow-up on Commissioners' Meeting • Recent PLN Updates

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10.	18 Maret March 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Laporan Komite • Follow-up on Commissioners' Meeting • Committee Reports
11.	18 Maret March 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Hasil *assessment* GCG 2014 • Info Terkini • Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • 2014 GCG results assessment • Recent Updates • Long-term Plan 2015-2019 • Revision of 2015 Work and Budget Plan • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
12.	25 Maret March 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
13.	1 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR[REN]) (Directors Present –DIR[REN])	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Long-term Plan 2015-2019 • Revision of 2015 Work and Budget Plan
14.	1 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(DAN)) (Directors Present - DIR(DAN))	• Proyek 35.000 MW • 35,000MW Project
15.	8 April 2015	• Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris • Tindak Lanjut Hasil *Assessment* GCG • Follow-up on Commissioners' Meeting • Follow-up on GCG Results Assessment
16.	8 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN)) (Directors Present – DIR(REN))	• Revisi Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Revision of Long-term Plan 2015-2019 • Revision of 2015 Work & Budget Plan
17.	8 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(KONS)) (Directors Present – DIR(KONS))	• Info PLN Terkini • Recent PLN Updates
18.	10 April 2015 (Dihadiri Direksi) Directors Present	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
19.	11 April 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
20.	15April 2015	• Laporan Komite • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Committee Reports • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
21.	22 April 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
22.	29 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN)) (Directors Present – DIR(REN))	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
23.	30 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIRUT) (Directors Present – DIRUT)	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
24.	6 Mei May 2015	• Tanggapan atas Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Response on Long-term Plan 2015-2019 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
25.	20 Mei May 2015	• Indikator Aspek Operasional • Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Laporan Komite • Operational Aspect Indicators • Long-term Plan 2015-2019 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Committee Reports
26.	20 Mei May 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Laporan Manajemen TW I / 2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Management Report, Q1/2015 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
27.	27 Mei May 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2014 • Penetapan tantiem Direksi-Dewan Komisaris 2014 • Laporan Manajemen TW I/2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Allocation of 2014 Net Profit Utilization • Allocation of 2014 tantiem/bonus for Directors-Commissioners • Management Report, Q1/I/2015 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
28.	17 Juni June 2015	• Laporan Komite • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Committee Reports • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
29.	17 Juni June 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Info PLN terkini • Sistem Whistleblower dan penanganan gratifikasi • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Recent PLN Updates • Whistleblowing system and gratuities control
30.	24 Juni June 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
31.	1 Juli July 2015	• Pending Items • Pending Items
32.	8 Juli July 2015	• Pending Items • Pending Items
33.	29 Juli July 2015	• Laporan Komite • Committee Reports
34.	5 Agustus August 2015	• Laporan Komite • Pending Items • Committee Reports • Pending Items
35.	5 Agustus August 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Revisi Rencana Jangka Panjang 2015-2019 • Laporan Manajemen TW II/2015 • Info PLN Terkini • Revision of 2015 Work and Budget Plan • Revision of Long-term Plan 2015-2019 • Management Report, Q1/II/2015 • Recent PLN Updates
36.	12 Agustus August 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 • Laporan Komite • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Revision of 2015 Work and Budget Plan • Committee Reports
37.	20 Agustus August 2015	• Laporan Komite • Committee Reports
38.	26 Agustus August 2015	• Info PLN Terkini • Recent PLN Updates
39.	2 September 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
40.	2 September 2015 (Dihadiri DIRREG Jateng) (Central Java Regional Directors Present)	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
41.	2 September 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Info PLN Terkini • Recent PLN Updates
42.	16 September 2015	• Laporan Komite • Committee Reports
43.	30 September 2015	• Laporan Komite • Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris • Committee Reports • Planned Commissioners' Working Visits
44.	7 Oktober October 2015	• Laporan Komite • Rencana Kerja Anggaran dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2016 • Committee Reports • Commissioners' Planned Activities and Budget and Key Performance Indicators 2016
45.	7 Oktober October 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Info PLN terkini • Recent PLN Updates
46.	19 Oktober October 2015	• Info PLN terkini • Recent PLN Updates
47.	21 Oktober October 2015	• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Info PLN terkini • Kunjungan Kerja Dewan Komisaris • Work and Budget Plan 2016 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Recent PLN Updates • Commissioners' Working Visit
48.	28 Oktober October 2015	• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • Laporan Management Tri Wulan III/2015 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Work and Budget Plan 2016 • Management Report, Q3/2015 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation
49.	28 Oktober October 2015 (Dihadiri Direksi) (Directors Present)	• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Laporan Management Tri Wulan III/2015 • Info PLN terkini • 2016 Work and Budget Plan • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Management Report, Q3/2015 • Recent PLN Updates
50.	4 November 2015	• *Pendings Items*: Energi Terbarukan • Laporan Komite • Pending Items: Renewable energy • Committee Reports
51.	11 November 2015	• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • 2016 Work and Budget Plan
52.	25 November 2015	• Info PLN Terkini • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • Laporan Komite • Recent PLN Updates • Work and Budget Plan 2016 • Committee Reports
53.	2 Desember December 2015	• Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Info PLN Terkini • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Recent PLN Updates

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
54.	2 Desember December 2015	• Info PLN terkini • Recent PLN Updates
55.	16 Desember December 2015	• Persiapan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 • Usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris • Persetujuan Dewan Komisaris melalui ITE • Laporan Komite • Preparation for GMS Work and Budget Plan 2016 • Directors' proposals requiring Commissioners' approval/recommendation • Commissioners' approval via ITE • Committee Reports

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015, jumlah pemberian nasehat/teguran/ arahan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun yang memerlukan persetujuan RUPS sebanyak 90 buah.

Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan / tanggapan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham / RUPS terkait kewajiban Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan monitoring langsung ke unit bisnis dan anak perusahaan dengan melakukan kunjungan kerja sebanyak 9 kali kunjungan dengan jumlah Unit/AP yang dikunjungi adalah 40 Unit/Proyek PLN dan Anak Perusahaan.

Board of Commissioners Supervision Report

In 2015, the Board of Commissioners dispensed 90 advices/ warnings/guidance and written response/approval to proposals by the Board of Directors which require approval of the Board of Commissioners or GMS.

In addition, the Board of Commissioners has submitted reports/feedback to the Minister of State-owned Enterprises as Shareholder/GMS on the obligations of the Board of Commissioners in accordance with the articles of association. The Board of Commissioners has also conducted direct monitoring to business units and subsidiaries in a series of 9 working visits to 40 Units/PLN projects and Subsidiaries.

Dewan Komisaris melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan maupun penasehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja operasional, keuangan dan terpenuhinya harapan pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners conduct various supervisory and advisorial duties, offering remedial recommendations to the Board of Directors to ensure operational and financial improvements, in addition to satisfy the stakeholders' demands.

Produk Pengawasan Dewan Komisaris

Pemberian pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi atas:

1. Permintaan rekomendasi maupun persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi sesuai Anggaran Dasar, antara lain: penghapusan piutang ragu-ragu, penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak (ATTB), pendanaan perbankan, pembelian tenaga listrik IPP, penerusan pinjaman proyek;
2. Perubahan Struktur Organisasi ;
3. Pejabat Satu Tingkat Di bawah Direksi dan Direksi/ Komisaris Anak Perusahaan;
4. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 2015;
5. Rencana Jangka Panjang 2015-2019;
6. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2016;

Products of the Board of Commissioners' Supervision

The Board of Commissioners opines to the Directors on:

1. Requests of recommendation or approval of the Board of Commissioners pertaining to the Directors' action plans in accordance with the Articles of Association, including: writing-off non-accrual loans, writing-off non-operational Property, plant and equipment (ATTB), banking funding, IPP purchases, and two-step loans.
2. Changes in the Organizational Structure;
3. Officials one level below the Directors and Directors/ Commissioners of Subsidiaries;
4. Remuneration of the Board of Commissioners and Directors for 2015;
5. Long-term Plan 2015-2019;
6. 2016 Work and Budget Plan;

7. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan 2015;
8. Laporan Pencapaian *Key Performance Indicators* Triwulanan dan Tahunan serta *Key Performance Indicators* masing-masing Direktorat 2015;
9. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal.

Selain hal tersebut, Dewan Komisaris juga memberikan nasehat dan teguran kepada Direksi sesuai informasi yang diperoleh dari fakta/kenyataan di lapangan.

Pemberian Tanggapan/Laporan Dewan Komisaris kepada RUPS:
1. Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2015 dan 2016
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2014 dan 2015
3. Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Laporan Manajemen 2014 dan 2015
4. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit PLN 2015
5. Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2014 serta Tantiem Direksi-Dewan Komisaris 2015
6. Rekomendasi dan Pendapat Dewan Komisaris Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016
7. Usulan Indikator Aspek Operasional 2015 dan 2016
8. Usulan Calon Direksi PT PLN (Persero)

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan 2 (dua) kali yaitu persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan dan pengesahan Laporan Perhitungan Tahunan (LPT).

Sepanjang tahun 2015, total kegiatan rapat Dewan Komisaris adalah 55 kali rapat yang terdiri dari rapat internal dan rapat konsultasi. Sesuai dengan ketentuan internal, kehadiran Dewan Komisaris pada rapat internal maupun rapat konsultasi telah memenuhi kuorum yang ditetapkan (minimal 5 Komisaris).

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komisaris dalam rapat tersebut sebagai berikut.

7. Quarterly and Annual Management Reports for 2015;
8. Quarterly and Annual KPI Achievement Reports and KPI of each Directorate for 2015;
9. Follow-ups on external and internal audit findings.

In addition to the above, the Board of Commissioners dispenses advices and warnings to the Directors based on factual field information.

Responses/Reports of the Board of Commissioners in the GMS:
1. Work Plans and KPI of the Board of Commissioners for 2015 and 2016;
2. Supervision Report of the Board of Commissioners for 2014 and 2015;
3. Opinions of the Board of Commissioners on Management Reports for 2014 and 2015;
4. Proposals on Public Accountant Firm selection for the 2015 PLN Audit;
5. Proposals on Determination of 2014 Net Profit Utilization and Tantiem/Bonus for Directors-Commissioners for 2015;
6. Recommendations and Opinions of the Board of Commissioners on Planned Activities & Company Budget for 2016;
7. Proposals on Operational Aspect Indicators for 2015 and 2016;
8. Proposal on Directorial Candidates of PT PLN (Persero).

Meeting Frequency of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners is always present in the Annual Meeting of Shareholders, held twice annually. In the annual meetings, the Board of Commissioners approved the Company's Work and Budget Plan and ratified the Annual Account Report (LPT).

In 2015, the Board of Commissioners has held 55 meetings, consisting of internal and consultative meetings. In accordance with internal provisions, the Board of Commissioners' internal and consultative meetings have satisfied the set quorum (at least 5 Commissioners present).

The following shows the attendance of each Commissioner in those meetings.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran dan Agenda Rapat Meeting Attendance and Participants	
		Kehadiran Attendance	Uraian Description – Meeting Participants
1.	7 Januari January 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
2.	7 Januari January 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/78%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran dan Agenda Rapat Meeting Attendance and Participants	
		Kehadiran Attendance	Uraian Description – Meeting Participants
3.	14 Januari January 2015	Korum Quorum/89%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
4.	21 Januari January 2015	Korum Quorum/78%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Darmono, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
5.	23 Januari January 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Darmono, Andin Hadiyanto, Zulkifli Zaini, Budiman, Hasan Bisri
6.	4 Februari February 2015	Korum Quorum/89%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
7.	18 Februari February 2015	Korum Quorum/89%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
8.	25 Februari February 2015	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
9.	02 Maret March 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
10.	18 Maret March 2015	Korum Quorum/89%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
11.	18 Maret March 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/89%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
12.	25 Maret March 2015	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Hasan Bisri
13.	1 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN)) (attended by Director – DIR(REN))	Korum Quorum/78%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
14.	1 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(DAN)) (attended by Director – DIR(DAN))	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
15.	8 April 2015	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan
16.	8 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN)) (attended by Director – DIR(REN))	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan
17.	8 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(KONS)) (attended by Director – DIR(KONS))	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan
18.	10 April 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
19.	11 April 2015	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman
20.	15April 2015	Korum Quorum/78%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
21.	22 April 2015	Korum Quorum/78%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran dan Agenda Rapat Meeting Attendance and Participants	
		Kehadiran Attendance	Uraian Description – Meeting Participants
22.	29 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIR(REN)) (attended by Director – DIR(REN))	Korum Quorum/78%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
23.	30 April 2015 (Dihadiri Direksi – DIRUT) (attended by Director – PRESDIR)	Korum Quorum/75%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Hasan Bisri
24.	6 Mei May 2015	Korum Quorum/75%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, Budiman, Hasan Bisri
25.	20 Mei May 2015	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
26.	20 Mei May 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
27.	27 Mei May 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
28.	17 Juni June 2015	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
29.	17 Juni June 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/75%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Oegroseno, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
30.	24 Juni June 2015	Korum Quorum/75%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Andin Hadiyanto, Budiman, Hasan Bisri
31.	1 Juli July 2015	Korum Quorum/88%	Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
32.	8 Juli July 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
33.	29 Juli July 2015	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
34.	5 Agustus August 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
35.	5 Agustus August 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
363	12 Agustus August 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
37.	20 Agustus August 2015	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
38.	26 Agustus August 2015	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
39.	2 September 2015	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
40.	2 September 2015 (Dihadiri DIRREG Jateng) (attended by Board of Directors DIRREG Central Java)	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran dan Agenda Rapat Meeting Attendance and Participants	
		Kehadiran Attendance	Uraian Description – Meeting Participants
41.	2 September 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
42.	16 September 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
43.	30 September 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
44.	7 Oktober October 2015	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman
45.	7 Oktober October 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman
46.	19 Oktober October 2015	Korum Quorum/77%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri
48.	21 Oktober October 2015	Korum Quorum/77%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Budiman, Hasan Bisri, Andin Hadiyanto, Aloysius Kiik Ro
49.	28 Oktober October 2015	Korum Quorum/88%	Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri, Aloysius Kiik Ro
50.	28 Oktober October 2015 (Dihadiri Direksi) (attended by Board of Directors)	Korum Quorum/88%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri, Aloysius Kiik Ro
51.	4 November 2015	Korum Quorum/77%	Komisaris Commissioner Chandra M. Hamzah, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, S. Milton Pakpahan, Budiman, Hasan Bisri, Aloysius Kiik Ro
52.	11 November 2015	Hadir 44%	Komisaris Commissioner Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro
53.	25 November 2015	Korum Quorum/100%	Komisaris Commissioner Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto, Jarman, Budiman, Hasan Bisri, Aloysius Kiik Ro
54.	2 Desember December 2015	Korum Quorum/56%	Komisaris Commissioner Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Budiman
55.	2 Desember December 2015	Korum Quorum/67%	Komisaris Commissioner Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Budiman, Jarman
56.	16 Desember December 2015	Korum Quorum/77%	Komisaris Commissioner Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Budiman, Hasan Bisri, Aloysius Kiik Ro

Catatan:
(*) Chandra Hamzah dan S. Milton Pakpahan berhenti bertugas sejak tanggal 10 November 2015
(**) Kuntoro Mangkusubroto dan Jarman mulai bertugas sejak tanggal 10 November 2015
(***) Zulkifli Zaini berhenti bertugas sejak tanggal 28 April 2015
(****) Aloysius Kiik Ro mulai bertugas sejak tanggal 25 September 2015.

Notes:
(*) Chandra Hamzah and S. Milton Pakpahan were dismissed on 10 November 2015.
(**) Kuntoro Mangkusubroto and Jarman were dismissed on 10 November 2015.
(***) Zulkifli Zaini was dismissed on 28 April 2015.
(****) Aloysius Kiik Ro assumed office on 25 September 2015.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris secara kuorum menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015.

In 2015, the Board of Commissioners has satisfied the set quorum of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Accountability Report for 2014 and Work and Budget Plan for 2015.

Nama RUPS GMS Name	**Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir** Member of the Board of Commissioners Attended
Januari January 2015 (RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015) GMS Work and Budget Plan 2015	Chandra M. Hamzah, Zulkifli Zaini, S Milton Pakpahan, Oegroseno, Darmono, Andin Hadiyanto, Harry Susetyo Nugroho, Budiman, Hasan Bisri
Mei May 2015 (LPT 2014) GMS Ratified the Annual A ccount Report for 2014	Chandra Hamzah, Zulkifli Zaini, S Milton Pakpahan, Oegroseno, Darmono, Harry Susetyo Nugroho, Budiman, Hasan Bisri

Asesmen Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur, Kriteria dan Pelaksana Asesmen

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris. *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN.

Performance Assessment of The Board of Commissioners

Procedure, Criteria and Implementation Assessment

Evaluation of the Board of Commissioners' performance is conducted by Shareholders. The evaluation is based on Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' KPI is prepared by taking into consideration the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association and Ministry of State-owned Enterprises regulations.

Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Tahun 2015

KPI Realization of The Board of Commissioners of PT PLN (Persero) 2015

Program Kerja Program	**Uraian** Description	**KPI 2015**			
		Sasaran Objectives	**Bobot** Weight	**Realisasi** Realization	**Bobot** Weight
Dewan Komisaris dengan Direksi **Board of Commissioners with the Board of Directors**			54		53
1. Review dan tanggapan Rencana Perusahaan Reviews and Responses to Company Plans	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, *Key Performance Indicators* dan Rencana Jangka Panjang Discussion, advice, and/or approval of Work and Budget Plan, KPI, and Long-term Plan Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat Response deadline following receipt of the draft from the Board of Directors with accurate data	2 kali setahun Twice annually	7	Pembahasan /tanggapan - Rencana Jangka Panjang 2015-2019 - Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015	7
		14 hari kerja 14 business days	3	- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 Discussion/response - Long-term Plan 2015-2019 - Revision of 2015 Work and Budget Plan - 2016 Work and Budget Plan Rata-rata 11 hari kerja Averaged 11 business days	3

Program Kerja Program	**Uraian** Description	**KPI 2015**			
		Sasaran Objectives	**Bobot** Weight	**Realisasi** Realization	**Bobot** Weight
2. Review dan tanggapan kinerja perusahaan Reviews and Responses to Company Performance	Pembahasan, tanggapan dan persetujuan atas: - Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* PLN Triwulanan - Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* PLN Tahunan - *Key Performance Indicators* Direksi Tahunan Discussion, response, and approval of: - Management Report and Quarterly PLN KPI - Management Report and Annual PLN KPI - Annual Directors KPI	5 kali setahun 5 times annually	9	Pembahasan /tanggapan - Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* TW I/2015 - Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* TW II/2015 - Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* TW III/2015 - Laporan Manajemen 2014 - Diminta Direksi membuat *Key Performance Indicators* Direktorat Discussion/response - Management Report and Q1/2015 Key Performance Indicators - Management Report and Q2/2015 Key Performance Indicators - Management Report and Q3/2015 Key Performance Indicators - Management Report 2014 - Directors requested to prepare Directorate Key Performance Indicatorss	9
	Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat Response deadline following receipt of the draft from the Board of Directors with accurate data	14 hari kerja 14 business days	3	Rata-rata 13 hari kerja Averaged 13 business days	3
3. Review tindak lanjut hasil / temuan audit internal /eksternal Reviews on the follow-ups to internal/external audit findings	Pembahasan dan tanggapan/ saran atas Efektifitas pemeriksaan internal dan monitoring tindak lanjut temuan auditor Discussions and feedbacks/ advices on effectiveness of internal checks and follow-up monitoring of the auditor's findings	6 kali 6 times	10	6 kali 6 times	10
4. Memberi tanggapan tertulis/ persetujuan / nasehat /saran / teguran kepada Direksi Provision of written responses/ approvals/advices/ proposals/ warnings to the Board of Directors	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis /persetujuan atas permintaan Direksi setelah data lengkap Discussions and written responses/approvals of requests of the Board of Directors following complete data	usulan Direksi ditanggapi Responding to Directors' proposals	15	100 %	15
			3	Rata-rata 18 hari kerja Averaged 18 business days	2
	Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap Response deadline following receipt of the draft from the Board of Directors with complete data and supporting documents	14 hari kerja 14 business days	4	20 kali 20 times	4
	Pemberian nasehat/saran/ teguran Dispensing advice/suggestions/ warnings	4 kali 4 times			

Program Kerja Program	**Uraian** Description	**KPI 2015**			
		Sasaran Objectives	**Bobot** Weight	**Realisasi** Realization	**Bobot** Weight
Dewan Komisaris Dengan RUPS **Board of Commissioners with the General Meeting of Shareholders**			20		20
1. Menyampaikan program kerja dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris tahunan Submitting work program and Key Performance Indicators of the Board of Commissioners	Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris Tahunan Annual Work Plans and KPI of the Board of Commissioners Ketepatan waktu penyampaian Submission deadline	1 paper 1 paper sebelum RUPS prior to GMS	3 2	1 paper 1 paper 60 hari sebelum RUPS 60 days prior to GMS	3 2
2. Menyampaikan pendapat/ usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS Presenting opinions/proposals of the Board of Commissioners to Shareholders/GMS	Pendapat atas: - Rencana Jangka Panjang - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan - Laporan Manajemen & *Key Performance Indicators* PLN Tahunan Menyampaikan: - Usulan penetapan Kantor Akuntan Publik - Usulan Remunerasi Opinions on: - Long Term Plan - Work and Budget Plan - Management Report and Annual PLN Key Performance Indicators Presenting: - Public Accounting Firm proposals - Remuneration proposals Ketepatan waktu penyampaian Submission deadline	4 pendapat atau usul setahun 4 opinions or proposals annually sebelum RUPS prior to GMS	4 2	Pendapat atas: - Laporan Manajemen & *Key Performance Indicators* 2014 - Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 Usulan: - Kantor Akuntan Publik 2015 - Remunerasi 2015 Opinions on: - Management Report & Key Performance Indicators 2014 - Work and Budget Plan 2015 Revisions - Work and Budget Plan 2016 Proposing: - Public Accounting Firm 2015 - Remuneration 2015 20 hari sebelum RUPS 20 days prior to GMS	4 2

Program Kerja Program	**Uraian** Description	**KPI 2015**			
		Sasaran Objectives	**Bobot** Weight	**Realisasi** Realization	**Bobot** Weight
3. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Submitting reports on supervisory duties of the Board of Commissioners	Laporan terdiri atas: - Laporan Progres *Key Performance Indicators* Semesteran - Laporan Pengawasan dan *Key Performance Indicators* Tahunan Reports consist of: - Quarterly Key Performance Indicators Progress Reports - Annual Supervisory and Key Performance Indicators Report Ketepatan waktu penyampaian: - Laporan *Key Performance Indicators* Semesteran Submission deadlines for: - Quarterly Key Performance Indicators Reports	- Laporan Pengawasan dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2014 - Laporan Pengawasan dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris Semester I/ 2015 - Supervisory and Key Performance Indicators Report of the Board of Commissioners for 2014 - First Quarter 2015 Supervisory and Key Performance Indicators Report of the Board of Commissioners	4 1 2	- Laporan Pengawasan dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2014 - Laporan Pengawasan dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris Semester I/ 2015 - Annual Supervisory and Key Performance Indicators Report of the Board of Commissioners for 2014 - First Quarter 2015 Supervisory and Key Performance Indicators Report of the Board of Commissioners	4 1 2
	- Laporan Pengawasan Tahunan - Annual Supervisory Report	Ketepatan waktu: - 30 hari kerja sejak berakhirnya periode Deadline: - 30 days following period termination - Sebelum RUPS - prior to GMS		Ketepatan waktu: - Laporan Semester I/2015: tanggal 14 Juli 2015 atau 14 hari sejak berakhirnya periode - Laporan 2014: tanggal 17 April 2015 atau 40 hari Sebelum RUPS LPT 2014 Deadline: - First Quarter 2015 Report: 14 July 2015 or 14 days following period termination - 2014 Report: 17 April 2015 or 40 days prior to UPS LPT 2015	

Program Kerja Program	**Uraian** Description	**KPI 2015**			
		Sasaran Objectives	**Bobot** Weight	**Realisasi** Realization	**Bobot** Weight
4. RUPS GMS	Kehadiran Komisaris korum: - RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan - RUPS Tahunan/LPT Board of Commissioners quorum attendance: - GMS in Work and Budget Plan - Annual GMS/AAR	Kehadiran Komisaris korum: - RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 - RUPS LPT 2014 Board of Commissioners quorum attendance: - 2015 GMS Work and Budget Plan - AAR GMS 2014	2	Kehadiran Komisaris korum: - RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 - RUPS LPT 2014 Board of Commissioners quorum attendance: - 2015 GMS Work and Budget Plan - AAR GMS 2014	2
Internal Dewan Komisaris **Internal Board of Commissioners**			26		26
1. Rapat Dewan Komisaris Meetings of the Board of Commissioners	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari: Rapat internal dan rapat konsultasi Meetings of the Board of Commissioners consists of: Internal and consultative meetings	24 kali 24 times	20	55 kali 55 times	20
2. Pengenalan/ Induksi / peningkatan kompetensi Introduction/ Induction/ competence enhancement	Mengikuti seminar/workshop Participation in seminars/ workshop	Seminar/Workshop 3 kali 3 times	2	- Induksi 1 kali - Seminar/Workshop 3 kali - 1 time induction - 3 seminars/workshops	2
3. Pengelolaan GCG GCG Management	Penunjukan *assessor* GCG GCG assessor appointment Pencapaian skor asesmen GCG Dewan Komisaris Achievement of Board of Commissioners GCG score	1 kali setahun Once annually 75%	1 3	1 Kali setahun Once annually 90 %	1 3
Total			**100**		**99**

Prosedur Penetapan dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan dan besaran nilai remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa RUPS menetapkan penghasilan anggota Dewan Komisaris berupa honorarium; tunjangan; fasilitas; dan tantiem.

Board of Commissioners Remunerations Determination Procedure

Remuneration of the Board of Directors is determined in accordance with the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises Num. PER-04/MBU/2014 on Guidelines on Determining the Incomes of Boards of Directors, Commissioners, and Trustees of State-owned Enterprises.

The regulation states the GMS sets the honorarium, allowances, facilities, and bonus (tantiem) as the Board of Commissioners' income.

Adapun bagan ringkas prosedur penetapannya sebagai berikut:

The following diagram shows the summarized procedure:

Bagan Ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Determination Procedure

• Mendapatkan masukan dari Konsultan Independen dalam menetapkan dasar penentuan remunerasi
• Konsultan Independen memberi masukan berdasarkan:
  • BUMN No. PER-04/MBU/ 2014 tgl 10 Maret 2014 Pasal 5
  • Survey Remunerasi dan Faktor Penyesuian Industri
  • Keberhasilan memitigasi risiko
  • Kemampuan Perseroan, Kompetensi dan Pengalaman
	KNR	• Receiving input from Independent Consultant in setting the remuneration bases
		• Independent Consultant provides input in accordance with:
		  • Article 5 of the Minister of State-owned Enterprises Regulation Num. PER-04/MBU/ 2014 dated 10 March 2014
		  • Remuneration Survey and Industry Adjustment Factor
		  • Success in risk mitigation
		  • Company Capability, Competency and Experience

Mengusulkan dasar dan besaran Remunerasi kepada Dewan Komisaris (DK)	KNR	Proposing Remuneration bases and amounts to BOC
Membahas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan besaran remunerasi kepada RUPS	DK	Discussing Nomination and Remuneration Committee proposal and propose remuneration amounts to GMS.
Memutuskan Honor dan Tantiem Dewan Komisaris	RUPS	Determining honorarium and bonus amounts of the BoC
Honor dan Tantiem Dewan Komisaris		Honorarium and Incentives of performance for Board of Commissioners

KNR: Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
DK: Dewan Komisaris Board of Commissioners
RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran honorarium Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menetapkan besaran honorarium tersebut diterapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur *(benchmark)*, kondisi persaingan usaha *(competitiveness)* atau kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia.

Board of Commissioners Remuneration

The amount of Board of Commissioners honorarium is adjusted with company financial condition and capability and must not contradict laws and regulations. In deciding the amount of honorarium, Industry Adjustment Factor is applied to consider measurable similar industries (benchmark), business competitiveness or business complexity, as well as human resource shortage.

Besaran remunerasi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/ MBU/2014 adalah Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, sedangkan besaran remunerasi anggota Komisaris lainnya adalah 90 % dari Komisaris Utama.

Adapun rincian Honorarium, tunjangan dan fasilitas sesuai keputusan RUPS 2015 adalah sebagai berikut:

Remuneration amount of Board of Commissioners in accordance with SOE Minister Regulation Number PER-04/ MBU/2014 is that the President Commissioners remuneration is 45% of from President Director's remuneration while remuneration of other Board of Commissioners member is 90% from President Commissioners.

Details of honorarium, allowances, and facilities of the Board of Commissioners in accordance with the 2015 GMS are as follows:

Jenis Penghasilan	**Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah)** GMS/Ministerial Decision (in Rupiah)		**Keterangan** Notes	Income Source
	Komisaris Utama President Commissioner	**Komisaris** Commissioner		
Honorarium	90.000.000,00	81.000.000,00	a. Komisaris Utama: 45% gaji Direktur Utama b. Komisaris: 90% Honorarium Komisaris Utama a. President Commissioner: 45% of President Director's salary b. Commissioner: 90% of President Commissioner's Honorarium	Honorarium
Tunjangan				**Allowances**
• Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) bulan Honorarium 1 (one) month's Honorarium			• Religious Holidays
• Tunjangan Transportasi	20% dari Honorarium 20% of Honorarium			• Transport
• Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung 25% Premium covers 25% of annual honorarium			• Pension Insurance
Fasilitas				**Facilities**
• Fasilitas Kesehatan	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25th One wife and three children with 25th years old maximum age			• Health Coverage
• Fasilitas Bantuan Hukum	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Provided in accordance with prevailing laws and regulations			• Legal Assistance
• Fasilitas Club Membership	Keanggotaan Business Club Membership in Business Clubs			• Club Membership
• Pakaian Seragam	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year			• Uniform

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2015
Remuneration Table of the Board of Commissioners and Directors for 2015

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium / Gaji (Rp) Honorarium/ Salary	Tunjangan Transportasi (Rp) Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya (Rp) Holiday Allowance	Tantiem (Rp)	Tanggungan Pph Ps 21 (Rp) Tax Art. 21 Allowance	Total (Rp)
Chandra Martha Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	889.500.000	177.900.000	78.750.000	-	292.926.670	1.439.076.670
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	951.750.000	187.110.000	70.875.000	944.516.300 *	698.313.200	2.852.564.500
Andin Hadiyanto	Komisaris Commissioner	951.750.000	187.110.000	70.875.000	944.516.300 *	696.513.200	2.850.764.500
Zulkifli Zaini	Komisaris Commissioner	354.375.000	70.875.000	-	-	100.617.710	525.867.710
Darmono	Komisaris Commissioner	951.750.000	187.110.000	70.875.000	157.419.500*	361.886.000	1.729.040.500
Sumanggar Milton Pakpahan	Komisaris Commissioner	816.750.000	160.110.000	-	157.419.500*	315.488.170	1.449.767.670
Oegroseno	Komisaris Commissioner	951.750.000	187.110.000	70.875.000	157.419.500*	361.886.000	1.729.040.500
Hasan Bisri	Komisaris Commissioner	951.750.000	187.110.000	70.875.000	-	294.420.500	1.504.155.500
Budiman	Komisaris Commissioner	951.750.000	187.110.000	70.875.000	-	293.520.500	1.503.255.500
Kuntoro Mangkusubroto	Komisaris Commissioner	150.000.000	30.000.000	-	-	16.000.000	196.000.000
Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commissioner	243.000.000	48.600.000	20.250.000	-	37.212.500	349.062.500
Jarman	Komisaris Commissioner	135.000.000	27.000.000	-	-	12.850.000	174.850.000
	Jumlah Total	**8.299.125.000**	**1.637.145.000**	**524.250.000**	**2.361.291.100**	**3.481.634.450**	**16.303.445.550**

*Tantiem atas kinerja Tahun 2014 * 2014 Performance bonus

Program Pelatihan dan Program Pengenalan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar, *workshop*, *benchmarking*, training/diklat. Jumlah seminar/*workshop/benchmarking/training*/diklat yang diikuti selama tahun 2015 yang diadakan di Jakarta maupun di luar negeri adalah 3 kali.

Tabel seminar/*workshop/benchmarking/training*/diklat yang diikuti oleh Dewan Komisaris pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Seminar/*Workshop/Benchmarking* yang diikuti Dewan Komisaris 2015

1. *Benchmarking* ke China dalam rangka proyek ekspansi PLTU Cilacap di Chengdu pada tanggal 4-7 Juni 2015
2. *Benchmarking* ke Jepang mengenai pengelolaan kelistrikan dan pembangkit di Tokyo pada tanggal 6-14 September 2015
3. Kursus mengenai Peran Komite Pemantau Risiko dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris pada tanggal 8-9 April 2015, di Jakarta

Selain hal tersebut Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 1 kali program pengenalan/induksi untuk Komisaris baru, yaitu Sdr. Aloysius Kiik Ro.

Board of Commissioners' Training Program and Introduction Program

Boards of Commissioners improve competencies by participating in seminars, workshops, benchmarking, and trainings. The total of seminar/workshop/benchmarking/training participation in 2014 which were held both in Jakarta and other countries is 3 times.

The following table shows the details of Board of Commissioners':

Seminars/Workshops/Benchmarking Attended by the Board of Commissioners in 2015

1. Benchmarking to Chengdu, China pertaining to the Cilacap Steam Power Plant expansion project on 4-7 June 2015.
2. Benchmarking to Tokyo, Japan pertaining to power and generator management on 6-14 September 2015
3. Course on the Role of Risk Monitoring Committee in direct monitoring of the Board of Commissioners on 8-9 April 2015 in Jakarta

In addition, the Board of Commissioners has conducted 1 induction program for the new Commissioner, namely Mr Aloysius Kiik Ro.

Kepemilikan Saham Anggota Komisaris

Mengingat saham PLN seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah, maka seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PLN maupun anak-anak usaha PLN lainnya.

Share Ownership of The Board of Commissioners

Since PLN shares are wholly owned by the Government, the members of the Board of Commissioners do not own any PLN shares or its subsidiaries.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan perusahaan, Direksi wajib berpegang pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)*.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara, sedangkan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Dalam pengelolaan perusahaan, masing-masing anggota Direksi dapat bertindak dan memutuskan suatu kebijakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan pada masing-masing anggota Direksi, namun demikian tetap bertanggung jawab secara kolegial dalam pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan tugas sesuai kewenangan tersebut harus semata-mata dijalankan sesuai maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ which responsible for daily management of the company to meet its interests and objectives. The Board of Directors has the rights to represent the company in and out of court in accordance with the Articles of Association of the Company. In conducting managerial duties of the company, the Board of Directors is required to act in accordance with the Articles of Association of the Company, decisions of the GMS, and Board Manual.

While the President Director coordinates the duties of Directors, both are structurally equal.

In managing the company, each Director may act and pursue policies in accordance with the duties and authorities delegated to him/her. Nevertheless, each is collegially accountable in the management of the company. The duties must be conducted in the interests and objectives of the company.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Board Manual / Board Charter) Direksi

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*. yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam *Board Manual* PLN diatur secara khusus dalam Bab II yang mencakup:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan wewenang Direksi
3. Hak dan kewajiban Direksi
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
5. Pelaksanaan tugas pengurusan perseroan oleh Direksi
6. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi
7. Rapat Direksi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Hubungan dengan Anak Perusahaan.

Guidelines and Code of Conduct (Board Manual/Charter) Board of Directors

In managing company and relationship with Board of Commissioners, Board of Directors refer to Board of Commissioners and Board of Directors Employment Guidelines (Board Manual) which contain work procedures for Board of Commissioners and Board of Directors as well as explanation of activity steps in a structured, systematic, easily understood, and consistent way, therefore, it can be guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors in performing each task to achieve Vision and Mission of the Company.

Board of Directors Employment Guidelines are specially stated in Chapter II of PLN's Board Manual which includes:

1. Main Provisions of Board of Directors
2. Board of Directors' Duties and Authorities
3. Board of Directors' Rights and Obligations
4. Division of Directors' Duties and Authorities
5. Execution of Company management duties by Board of Directors
6. Board of Directors' Decision Making Principles
7. Board of Directors Meeting
8. Corporate Secretary
9. Relationship with Subsidiaries

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas Direksi

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; dan

Board of Directors' Duties, Responsibilities, and Authorities

Board of Directors' Duties

Board of Directors' main duties are:

1. Leading and managing Company based on Company's purposes and objectives as well as putting efforts continuously in increasing Company efficiency and effectiveness; and

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas itu, wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan diatur sebagai berikut:

1 Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris adalah:
   - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
   - Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
   - Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan PT PLN (Persero), dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
   - Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
   - Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun;
   - Menetapkan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi;

2. Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, adalah:
   - Mengalihkan kekayaan perusahaan; atau
   - Menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaan, yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku.

3. Pelaksanaan wewenang Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS, yakni:
   - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
   - Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
   - Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   - Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak usaha
   - Mengikat perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
   - Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah,

2. Controlling, maintaining, and managing Company wealth.

In performing those duties, according to Company Articles of Association, Board of Directors possess authorities which are:

1. Implementation of Board of Directors' authorities which require written approval from Board of Commissioners comprises:
   - Mortgaging Property, plant and equipment to obtain short-term credit;
   - Holding cooperation with other business or entities in form of licensing, management contract, asset leasing, Cooperative operations (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate, and other cooperation with fixed value or time frame as ratified by GMS;
   - Receiving or providing medium/long-term loans, except for loans (debt or receivables) which occur due to business transaction and loans given to PT PLN (Persero) subsidiaries and reported to Board of Commissioners;
   - Writing off any stuck account payable and provisions of goods from books;
   - Writing down movable Property, plant and equipment with a generally fair economic life of up to five years applicable in the industry.
   - Defining organization structure which is one level under Board of Directors;

2. Implementation of Board of Directors' authorities which requires approval from GMS consists of:
   - Transferring company assets or
   - Pledging company assets with a value exceeding 50% of the total net value of the company in one or more transactions, whether the transactions are related or not. Such transactions are transactions which transfer the net value of the company occurring in one financial year.

3. Implementation of Board of Directors' authorities which require written response from Board of Commissioners and approval from GMS consists of:
   - Using Property, plant and equipment to gain medium/long-term credit;
   - Undertaking equity investments in other companies;
   - Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
   - Redeeming equity investments to subsidiaries and/or joint ventures;
   - Conducting mergers, consolidation, takeovers, separations, and dissolution of subsidiaries
   - Warranting the company in surety (borg or avalist)
   - Holding cooperation with other business or entities which include contract management license, assets leasing, Operation Cooperation (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer

Bangun Serah Guna dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perusahaan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun;
- Menetapkan *blue print* organisasi perusahaan;
- Menetapkan dan mengubah logo perusahaan;
- Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang berdampak bagi perusahaan;
- Membebankan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan; dan
- Mengusulkan wakil perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Operate, and other cooperation with a value or time frame exceeding that ratified by General Meeting of Shareholders;
- Re-billing stuck account payable which have been written off;
- Redeeming and writing off company Property, plant and equipment, except for movable Property, plant and equipment with a fair economic life as applicable in the industry in general of up to five years;
- Setting the blue print of company organization;
- Setting and changing company logo;
- Conducting other actions and those which has not been ratified in GMS;
- Establishing foundations, organizations, and/or associations whether they are directly or indirectly related to company or can affect the company;
- Charging fixed and routine company costs for foundation, organization, and/or association activities, whether they are related directly or indirectly to company; and
- Proposing a company representative to become the candidate of Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries which give significant contribution to the company and/or has strategic value as defined in General Meeting of Shareholders.

Tugas pokok Direksi adalah memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional; dan menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan dalam rangka meningkatkan level kinerja pada setiap periode operasional dan memastikan pencapaian tujuan.

Board of Directors' main duties are to lead and manage Company according to Company purposes and objectives, increase operational efficiency and effectiveness; and to control, maintain, and manage Company assets on the means of improving performance level in every operational period and ensuring objectives achievement.

Hak dan Kewajiban Direksi

Hak dan kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berhak untuk:
1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan rapat umum pemegang saham;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Board of Directors' Rights and Obligations

Board of Directors' rights and obligations are stated in Company's Articles of Association.

In performing their main duties, Board of Directors have rights to:
1. Establish policies in leading and managing company;
2. Organize provisions regarding company employees including setting the value of salaries, pensions, and other income for company employees based on laws and regulations and general meeting of Shareholders decision;
3. Appoint and dismiss company employees based on company employee regulations and applicable laws and regulations;

4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan
5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Manage transfer of Directors' power to one or several members of Board of Directors who are specially appointed or to one or several company employees, either individually or together or to other people or bodies to represent company in and out of court.
5. Perform other actions, related to either management or ownership based on provisions stated in articles of association and ratified by general meeting of Shareholders according to applicable laws and regulations.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja *(Board Manual / Board Charter)* Direksi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan termasuk rencana–rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat umum pemegang saham guna mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada rapat umum pemegang saham;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta pemegang saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Board of Directors Employment Guidelines (Board Manual)

In performing their main duties, Board of Directors are obliged to:

1. Make every effort and guarantee business operation and company activities based on company purposes and objectives as well as business activities;
2. Prepare company development plan, annual Work and Budget Plan as well as other plans which are related to business operation and company activities at the scheduled time; and submit them to Board of Commissioners and Shareholders to be communicated further in general meeting of Shareholders to obtain ratification;
3. Establish and maintain company records and administration based on applicable norms in the company;
4. Organize accounting system based on financial accounting standards and internal control principles, especially administration, records, storage, and monitoring;
5. Report accountability and all information regarding company condition and operation in form of annual report which includes annual accounts to general meeting of Shareholders;
6. Submit routine report based on method and time in applicable provisions as well as other reports as requested by Shareholders;
7. Prepare a complete company organization structure and its job description details.
8. Prepare balance sheets and income statement for Minister of Law and Human Rights of Indonesia which have been ratified in General Meeting of Shareholders based on laws and regulations; and
9. Perform other obligations based on provisions stated in articles of association and ratified in General Meeting of Shareholders according to laws and regulations.

Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Aturan pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dijelaskan dalam *Charter* BOD adalah:

1. Pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Perusahaan lainnya yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

Delegation of Duties and Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors delegates duties and authorities among its members to ensure optimum execution of both. According to the provisions of the BoD Charter, delegation of duties and authorities of the Board of Directors are as follows:

1. The duties and responsibilities delegated to each member of the Board of Directors are determined by the Decisions of the General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders does not do so, delegation is determined following a meeting of the Board of Directors.
2. The description of duties, authorities, and responsibilities of the members of the Board of Directors is stipulated by Company Regulations on Organizational Structure and other Company Regulations stipulating the authority of each member.

Kriteria, Ketentuan dan Pemilihan Anggota Direksi

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Calon Direktur dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Untuk dapat dipilih, calon Direktur harus menjalani tahap *fit and proper test* terlebih dahulu. Setiap Direktur PLN memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya yang dimulai sejak tanggal pengangkatan. Namun demikian, pemegang saham melalui RUPS tahunan atau RUPS luar biasa berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Kriteria Anggota Direksi

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, maka yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

Pemilihan anggota Direksi PLN dilakukan melalui tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK/ *fit and proper test*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Criteria, Requirements, and Appointment Of Directors

The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS. A prospective candidate may be from both inside and outside of the company. To be eligible for appointment, the candidate must first undergo a fit and proper test. Every PLN Director is tenured for up to 5 (five) years since his/her date of appointment. However, shareholders may, in annual or extraordinary GMS, dismiss a member of the Board of Directors before his/her tenure ends.

Criteria for Directors

Law Num. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Minister of State-owned Enterprises Regulation Num. PER-03/MBU/02/2015 on Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of State-owned Enterprises state that a Director is a person capable of legal actions, unless in a period of 5 (five) years prior to appointment:

1. Declared bankruptcy;
2. Being a Member of a Board of Directors or Board of Commissioners/Board of Trustees declared guilty of bankrupting a State-owned Enterprise and/or Company;
3. Sentenced for crimes which cause losses to the state, state-owned company, Company, and/or other entities in the financial sector.

Selection of a member of the Board of Directors of PLN is conducted using a fit and proper test, in accordance with the Minister of State-owned Enterprises Regulation Num. PER-03/MBU/02/2015 on Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of State-owned Enterprises.

Independensi Direksi

Kriteria Independensi Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan antara lain diatur mengenai larangan jabatan rangkap yaitu Direksi dilarang memangku jabatan sebagai berikut:

1. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepada daerah/wakil kepada daerah
8. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri

Independence Board of Directors

Independence Criteria of the Board of Directors based on Company's Articles of Association include prohibition of double titles in which Directors are prohibited to hold titles as follows:

1. Member of SOE, Regional Owned Enterprise, Private-owned Enterprise Directors
2. Member of Board of Commissioners / Board of Supervisors in SOE, Regional Owned Enterprise, Private-owned Enterprise
3. Other structural and functional title in central and/or regional government institutions/bodies.
4. Other titles based on provisions in laws and regulations
5. Leader of a political party and/or prospective member of the legislature and/or candidate of regional head/deputy head and/or regional head/deputy head.
6. Other titles which can lead to conflict of interest.
7. Being Legislative candidate or regional head/deputy head candidate.
8. Dismissed by virtue of decisions of the GMS in writing, Ministerial decree as GMS, or unanimous circular decision of shareholders.

A member of the Board of Directors is prohibited to hold dual positions as a member of a Board of Commissioners at other companies, except he/she is:

1. A member of the Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture of the given SoE, providing that he/she, as a member of the Board of Commissioners at one or more subsidiaries/joint ventures, is only entitled to a maximum accumulated income of 30% of the salary of a member of the Board of Directors of the given SoE. The remainder of the salary is absorbed as the income of the given SoE.
2. A member of the Board of Commissioners at another company to represent/speak in the interest of the SoE, providing he/she obtains Ministerial permission.

Untuk mencegah terjadinya transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta menjaga independensi pengambilan keputusan, Direksi PLN dilarang merangkap jabatan pada berbagai instansi BUMN sejenis, swasta maupun di instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

To prevent transactions with potential conflict of interest and maintain the independence in decision making, the members of the Board of Directors of PLN are not allowed to assume concurrent positions in any other similar SOEs, private companies, or central or regional government institutions.

Kebijakan Suksesi Direksi

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan masa depan, PLN menyelenggarakan program *Talent Management*. Kader-kader potensial yang masuk kedalam *Talent Pool* akan menjalani serangkaian program pelatihan dengan muatan utama adalah peningkatan kapabilitas di bidang manajemen, strategi pengembangan usaha, evaluasi rencana strategis dan sejenisnya. Pada saat tibanya pergantian kepemimpinan, PLN akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Panitia *Adhoc* dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Board of Directors Succession Policy

In order to prepare future leader cadres, PLN hold Talent Management program. Potential cadres who join Talent Pool will participate in several training programs with main contents of capabilities improvement in management, business development strategy, strategic plan evaluation, and other similar contents. At the time of leadership change, PLN will propose internal candidates through a selection which is conducted by an ad hoc committee and facilitated by Board of Commissioners. The selected internal candidate will then be proposed to SOE Ministry to face fit and proper test.

Keberagaman, Komposisi dan Masa Tugas Direksi

Keberagaman Direksi

Keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan dari segi organ Direksi secara keseluruhan maupun secara individu masing-masing calon anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan. Kombinasi tersebut ditetapkan melalui pertimbangan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Dengan cara tersebut Perseroan memastikan kombinasi karakteristik maupun keahlian dari masing-masing anggota Direksi membentuk suatu kesatuan yang akan berdampak pada ketetapan dan kecepatan pengambilan keputusan pengelolaan oleh Direksi yang selalu bertanggung jawab secara kolegial.

Dalam menentukan komposisi Direksi, Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek keahlian tertentu untuk jabatan dan tugas strategis, secara garis besar perseroan telah membagi tugas direksi ke dalam dua bagian besar, yaitu tugas-tugas korporasi yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi keuangan, perencanaan, pengadaan, dan sumber daya manusia. Sedangkan, tugas-tugas operasional dilakukan oleh Direktur Bisnis Regional yang terbagi dalam 7 regional, yaitu Bisnis Regional Sumatera, Bisnis Regional Jawa Bagian Barat, Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Bisnis Regional Kalimantan, Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara, dan Bisnis Regional Maluku & Papua.

Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat, telah memenuhi komposisi dan keberagaman keahlian kolegial maupun individu yang dipersyaratkan agar kepengurusan perusahaan berlangsung profesional, efektif, dan akuntabel agar dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan optimal dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Diversity, Composition, and Tenure of The Board of Directors

Diversity of the Board of Directors

Diversity in the Board of Directors is a desired combination of the directorial organ. Collectively or individually, each member of the Board of Directors contributes to the growth of the Company. The combination is a considered mixture of expertise, knowledge, and experience suitable with the delegation of duties and functions of the Director to fulfill the objectives of the Company. By using such methods, the Company has ensured a characteristic combination of expertise of each Director to form a cohesive unit capable of taking swift, accurate and collegially-responsible business decisions.

In arranging the composition of the Board of Directors, the Company always considers certain expertise for strategic offices and duties. In general, directorships in the company falls into two major parts: 1) Corporate duties conducted by Directors of Finance, Planning, Procurement, and Human Resources; and 2) Directors of Regional Businesses covering 7 regions: Sumatera, West Java, Central Java, East Java and Bali, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, and Maluku and Papua.

The current members of the Board of Directors have satisfied the composition and regional expertise on both collegial and individual levels. This is so that the company's management is professional, effective, and accountable so as to ensure optimum execution of duties and satisfy shareholder demands.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan mengenai Kriteria Direksi, masa jabatan Direksi PLN adalah 5 tahun. Adapun komposisi Direksi PLN selama tahun 2015 mengalami satu kali perubahan, yakni:

- Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/MBU/12/2014 pada tanggal 24 Desember 2014, susunan Direksi PLN beserta akhir masa jabatan adalah sebagai berikut.

Composition and Tenure of the Board of Directors

As mentioned earlier, the tenure of the Board of Directors of PLN is 5 years. In 2015, the composition of the Board of Directors of PLN was amended once, namely:

- In accordance with the SoE Ministerial Decree as PLN GMS Num. SK-272/MBU/12/2014 dated 24 December 2014, the members of the Board of Directors of PT PLN and their tenure are follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Anggota Direksi
Composition and Tenure of the Board of the Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tanggal Pengangkatan** Appointed date	**Akhir Masa Jabatan** End of Tenure
Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Sarwono Sudarto	Direktur Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Nasri Sebayang	Direktur Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Supangkat Iwan Santoso	Direktur Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Amir Rosidin	Direktur Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Nicke Widyawati	Direktur Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Amin Subekti	Direktur Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Murtaqi Syamsudin	Direktur Director	8 Maret March 2013	8 Maret March 2018

- Sesuai dengan Surat Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. S-548/MBU/09/2015 tanggal 8 September 2015, dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, susunan Direksi Perseroan beserta akhir masa jabatan mengalami perubahan sebagai berikut:

- In accordance with the SoE Ministerial Decree as PLN GMS Num. S-548/MBU/09/2015 dated 8 September 2015, and SoE Ministerial Decree Num. SK-211/MBU/10/2015 dated 30 October 2015, the members of the Board of Directors of PT PLN and their tenure are amended as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tanggal Pengangkatan** Appointed date	**Akhir Masa Jabatan** End of Tenure
Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Finance Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Nicke Widyawati	Direktur Perencanaan Korporat Corporate Planning Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Procurement Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Sumatera Sumatra Regional Business Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Murtaqi Syamsudin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat West Java Regional Business Director	8 Maret March 2013	8 Maret March 2018
Nasri Sebayang	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Central Java Regional Business Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019
Amin Subekti	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali East Java & Bali Regional Business Director	24 Desember December 2014	24 Desember December 2019

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Appointed date	Akhir Masa Jabatan End of Tenure
Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Human Capital Management Director	30 Oktober October 2015	30 Oktober October 2020
Djoko R. Abu Manan	Direktur Bisnis Regional Kalimantan Kalimantan Regional Business Director	30 Oktober October 2015	30 Oktober October 2020
Machnizon	Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business Director	30 Oktober October 2015	30 Oktober October 2020
Haryanto W.S.	Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Maluku & Papua Regional Business Director	30 Oktober October 2015	30 Oktober October 2020

Perubahan susunan dan personalia Direksi menunjukkan perubahan cara pengelolaan perusahaan. Tujuh Direktur yang membawahi Tujuh Wilayah Regional, kini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas pembangkit, memelihara pembangkit eksisting, mengelola jaringan distribusi, dan melayani pelanggan di wilayahnya. Dengan kata lain, para Direktur Wilayah Regional kini mengelola proses bisnis PLN secara *end-to-end* di wilayahnya. Sedangkan Direktur yang membawahi fungsi korporasi, lebih berkonsentrasi untuk mengelola kegiatan korporasi sesuai bidangnya, yakni: Direktur Perencanaan Korporat, Direktur Pengadaan, Direktur Human Capital Management dan Direktur Keuangan.

The changes in the composition of the Board of Directors reflected changes in the company's management. The Seven Directors supervising the Seven Business Regions are now responsible to expand generator capacity, maintain existing generators and distribution lines, and service customers in their regions. In other words, the Regional Directors are now managing end-to-end business processes of their respective regions. On the other hand, Directors responsible for corporate functions are more concentrated in the business affairs of their area of expertise, namely: Corporate Planning Director, Procurement Director, Human Capital Management Director and Finance Director.

Perubahan struktur organisasi di tingkat Direktorat ini dilakukan sebagai respon dan bentuk antisipasi serta kesiapan PLN dalam melaksanakan tugas pembangunan Pembangkit 35.000 MW beserta pembangkit regular lainnya dan jaringan transmisi serta distribusi yang mengiringinya. Lihat uraian lengkap terkait pada Bab "Pengembangan Organisasi"

The organizational restructuring at the directorial level is to respond, anticipate, and prepare PLN for the construction of a 35,000 MW Generator and regular generators, in addition to the accompanying transmission and distribution networks. For a detailed overview, see the chapter "Organizational Development."

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi

Deskripsi ringkas tugas pokok masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut.

Direktur Utama:

1. Memastikan bahwa arah pengelolaan Perusahaan berjalan dengan benar menuju terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan
2. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance)*
3. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para *Stakeholder*
4. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan melangkah mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Scope of Work and Responsibility of Each Member of the Board of Directors

A brief description of each member of the Board of Directors of the Company is as follows:

President Director:

1. Ensuring that the managerial direction of the Company is based on its Vision, Mission, and Objectives
2. Ensuring that the Company is managed in accordance with Good Corporate Governance principles.
3. Ensuring that the Company maintains growth and offers added value for Stakeholders.
4. Carrying out corporate leader functions to ensure full engagement of every member of the Company. The President Director also inspires and motivates Company resources to meet the Company's Vision, Mission, and Objectives.

Direktur Perencanaan Korporat (DIRREN):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai Visi melalui perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk didalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang pendanaannya.
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, standarisasi enjiniring dan tersedianya perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis termasuk didalamnya hasil *feasibility study, engineering design*, Rencana Kerja dan Spesifikasi untuk proses pengadaan.
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis IPP, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, serta pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam Manajemen Risiko dan Kepatuhan
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Perencanaan Korporat, melakukan pembinaan dan pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan, pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Perencanaan Korporat serta pembinaan Regional dan Unit Pusat Pengatur Beban.

Corporate Planning Director (DIRREN):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies to meet the Company's Vision by planning and developing power systems and business development plans as outlined in the Electricity Power Supply Business Plan, Long-term Company Plan, and Work and Budget Plan. These include planning the Company's financial projections and funding.
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in planning, developing, and utilizing new and renewable energy.
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in developing electricity generation technologies, research and development, engineering standardizations, and availability of supply and services procurement, including results of feasibility studies, engineering designs, and Business Plan and Specification for procurement.
4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in the management of power transactions, business partnerships, IPP business model development, power transmission and distribution, and development of Subsidiaries and Joint Ventures;
5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in Risk and Compliance Management.
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Corporate Planning, development and growth of Subsidiaries and Joint Ventures, development and growth of Regional businesses and Units under the Director of Corporate Planning, and development and growth of Regional and Transmission and Load Dispatching Units.

Direktur Pengadaan (DIRDAN):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perijinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perusahaan;
2. Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan kontrak korporat;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan *supply chain management* dan pengelolaan logistik korporat;

Procurement Director (DIRDAN):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in the management of licenses, land procurement, and land allocation for those affected by Company businesses;
2. Adopting and ensuring the availability of regulations on, policies for, and strategies in corporate goods and services procurement, execution of strategic goods and services procurement, execution of Regional and Unit goods and services procurement development, and administration of goods and services procurement and corporate contracts;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate procurement policies and strategies in procuring operational materials via management of supply chain and corporate logistics;

4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara *online* serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan *Project Management Information System* (PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan, pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Pengadaan.

Direktur *Human Capital Management* (DIRHCM):
1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia meliputi antara lain perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem *Human Capital Management*, sistem remunerasi dan pemberian penghargaan, sistem administrasi SDM, budaya Perusahaan dan manajemen perubahan;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hubungan industrial dan kebijakan pengelolaan tenaga kerja alih daya,
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum di kantor pusat dan pengelolaan properti korporat secara terintegrasi;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan sistem *knowledge management*, pengembangan sistem informasi SDM;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat *Human Capital Management*, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat *Human Capital Management*.

Direktur Keuangan (DIRKEU):
1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam penyediaan dan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan, pengelolaan pinjaman dan pemenuhan terhadap kewajiban serta *covenant* Perusahaan.
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan

4. Adopting and ensuring the availability of policies and strategies on online procurement applications for goods and services as well as corporate procurement integration and centralization;
5. Adopting and ensuring the execution of project database and administration management, Project Management Information System (PMIS), project budgets management, and construction integration and development;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Procurement, development and growth of Regions and Units under the Director of Procurement.

Human Capital Management Director (DIRHCM):
1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in organizational and human resources development. The duties consist of planning the workforce, recruitment systems, education and training systems, developing the Human Capital Management system, remuneration and recognition systems, HR administration systems, corporate culture, and change management;
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in industrial relations and outsourcing policies;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in general services at the head office and integrated management of corporate properties;
4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in health management, work safety, and environmental management and safety;
5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in knowledge management systems and HR information systems development;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Human Capital Management and development and growth of Regions and Units under the Director of Human Capital Management.

Finance Director (DIRKEU):
1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in funding and financial management, funding allocation, loan management, and settlement of the Company's obligations and covenant.
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in managing funds to support the Work and Budget Plan;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in treasury management, share

perbendaharaan *(treasury)*, kepemilikan saham, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan dan aset *liability management*, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pegelolaan pajak dan asuransi;

4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan niaga tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus, pengelolaan dan pelaksanaan *Public Services Obligation* (PSO) dan *Performance Base Regulation* (PBR);
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi sistem dan aplikasi teknologi informasi korporat;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Keuangan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Keuangan

Direktur Bisnis Regional (DIRREG-SUM, DIRREG-JBB, DIRREG-JBT, DIRREG-JBTB, DIRREG-KAL, DIRREG-SNT, DIRREG-MP):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk didalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional *(capital expenditure dan operation expenditure)* sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional.
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi / gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya.
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi / gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya.
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Bisnis Regional

ownership, cash and liquidity management, income and asset liability management, debt servicing, accounting practices, and tax and insurance management;

4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in commercial power management, corporate and industrial accounts management of special services customers, Public Services Obligation (PSO) management and execution, and Performance Base Regulation (PBR);
5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in information systems and technology as well as centralization and integration of corporate IT systems and applications;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and risk management at the Directorate of Finance, development and growth of Regions and Units under the Director of Finance.

Regional Business Directors (DIRREG-SUM, DIRREG-JBB, DIRREG-JBT, DIRREG-JBTB, DIRREG-KAL, DIRREG-SNT, DIRREG-MP):

1. Adopting and ensuring the execution of planning, development, and control of regional businesses, including procurement plans as well as capital and operation expenditures in accordance with their respective authorities. In addition, the Directors evaluate and manage regional performance.
2. Adopting and ensuring the construction of generators, transmissions, substations, and regional distributions, execution of IPP to COD developments, and management of contracts and construction administrations in their respective regions.
3. Adopting and ensuring the operation and maintenance of generators, transmissions, substations, and regional distributions, and management and planning of their spare parts in their respective regions;
4. Adopting and ensuring the execution of power procurement from IPPs, electricity marketing, corporate and industrial accounts management of special services customers in their respective regions, commercial and business power management, and electricity sales in their respective regions.
5. Adopting and ensuring the execution of customer service management and income and operational costs of their respective regions;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and risk management at the Directorate of Regional Businesses, development and growth of Regions and Units under the Directors of Regional Businesses.

Rapat Rutin Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
   - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris; dan
   - Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
3. Tindakan Strategis lainnya, dengan batasan:
   - Bersifat strategis / signifikan mempengaruhi operasional perusahaan;
   - Di luar rencana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
   - Bersifat mendesak; dan
   - Atau, menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Rapat Direksi harus dilaksanakan secara berkala dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Direksi PT PLN (Persero) memutuskan untuk mengadakan rapat direksi secara rutin setiap hari Kamis.

Selain rapat rutin tersebut, dapat dilaksanakan juga rapat tambahan sesuai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi berikut seluruh jajaran pejabat yang terkait, dan kehadiran Direksi dalam rapat tersebut harus bersifat kuorum.

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Rapat yang dilakukan melalui sarana elektronik harus senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib administrasi dan dokumentasi hukum

Board of Directors Routine Meeting

Board of Directors Meeting is a meeting which is held by Board of Directors. Decisions which bind can be made without holding any Board of Directors Meeting, but written decision should be approved and signed by all members of Board of Directors.

Board of Directors determine several following issues which require decision making through Directors Meeting:

1. Actions related to implementation of authority in accordance with provisions in Articles of Association, namely:
   - Authorities which require Directors' approval;
   - Authorities which require Commissioners' approval; and
   - Authorities which require GMS approval.
2. Actions associated with Goods and Service Procurement in accordance with applicable regulations in Company; and
3. Other Strategic Actions, with limitations as follows:
   - Tend to influence company operation strategically/ significantly.
   - Outside the Work and Budget Plan set in GMS;
   - Urgent; and
   - Or, involving employees in strategic position.

In accordance with SOE State Minister Regulation Num. PER-01/MBU/2011, Directors Meeting should be held routinely and at least once in a month. Board of Directors of PT PLN (Persero) decided to hold directors meeting every Tuesday.

Apart from routine meeting, additional meetings can be held based on urgent needs which require an immediate decision. A Director Meeting is participated by Board of Directors and all related officials. The attendance of Directors in the meeting must be a quorum.

Board of Directors Meeting can be conducted via teleconference, video conference or other electronic media which enable all participants to see and listen each other directly and participate in meeting.

Meeting conducted via electronic media should always be recorded and compiled in minutes of meeting as administration obligation and legal documentation.

Kehadiran Direktur dalam Rapat Direksi dan Hasil Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2015 sebanyak 26 kali dengan ringkasan tingkat kehadiran masing-masing Direktur sebagai berikut:

Directors' Attendance in Board of Directors Meeting & Results of Board of Directors Meeting

There were 26 Board of Directors Meetings in 2015, with an attendance summary of each Board of Director as follows:

Keterangan	Dirut	Dirkeu	Dirdan	Dirren	Dirhcm	Dirreg-Sum	Dirreg-Jbb	Dirreg-Jbt	Dirreg-Jbtb	Dirreg-Kal	Dirreg-Snt	Dirreg-Mp	Total Rapat Total Meeting	Description
Hadir	13	18	26	17	4	22	22	21	25	5	6	6	27	Attendance
Absen	14	9	1	10	2	5	5	6	2	1	0	0		Absent
Persentase	48%	67%	96%	63%	67%	81%	81%	78%	93%	83%	100%	100%		Percentage

DIR HCM , DIR REG-KAL, DIR REG-SNT, DIR REG-MP was appointed in late October 2015, the Board of Directors Meeting attendance is calculated proportionately.

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2015
Board of Directors' Attendance in 2015 Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Partisipan Participant
1.	06 Januari January	Kourum Quorum/100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
2.	14 Januari January	Kourum Quorum/87,5%	Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
3.	03 Februari February	Kourum Quorum/100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
4.	10 Februari February	Kuorum/62,5%	Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
5.	24 Februari February	Kuorum/62,5%	Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
6.	16 Maret March	Kourum Quorum/87,5%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
7.	24 Maret March	Kourum Quorum/87,5%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
8.	31 Maret March	Kuorum/75%	Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso.
9.	14 April	Kourum Quorum/100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
10.	19 Mei May	Kuorum/62,5%	Sofyan Basir, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
11.	26 Mei May	Kourum Quorum/75%	Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
12.	16 Juni June	Kourum Quorum/62,5%	Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
13.	17 Juni June	Kourum Quorum/75%	Sarwono Sudarto, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
14.	23 Juni June	Kourum Quorum/87,5%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
15.	14 Juli July	Kourum Quorum/100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
16.	28 Juli July	Kourum Quorum/75%	Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
17.	12 Agustus August	Kourum Quorum/62,5%	Sarwono Sudarto, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
18.	15 September	Kourum Quorum/75%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso.
19.	23 September	Kourum Quorum/100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
20.	13 Oktober October	Kourum Quorum/62,5%	Sarwono Sudarto, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti.
21.	19 November	Kourum Quorum/67%	Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Djoko R Abumanan, Haryanto WS, Machnizon
22.	26 November	Kourum Quorum/ 75%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Muhamad Ali, Djoko R Abumanan, Haryanto WS, Machnizon.
23.	03 Desember December	Kourum Quorum/67%	Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R Abumanan, Haryanto WS, Machnizon.
24.	07 Desember December	Kourum Quorum/100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Muhamad Ali, Djoko R Abumanan, Haryanto WS, Machnizon.
25.	10 Desember December	Kourum Quorum/58,3%	Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Muhamad Ali, Haryanto WS, Machnizon.

No.	Tanggal Date	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Partisipan Participant
26.	17 Desember December	Kourum Quorum/ 75%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Djoko R Abumanan, Haryanto WS, Machnizon.

Materi Utama/Muatan Rapat Direksi Tahun 2015: Primary Agenda in the 2015 Board of Directors' Meeting:

1. **Bidang Operasional** Operations

No.	Uraian Description	Tanggal Rapat Direksi Board of Directors' Meeting Date
1.	Pembahasan Infrastruktur Kelistrikan (RUPTL 2015-2019) Discussions on Electricity Infrastructure (ESBP 2015-2019)	06 Januari January 2015
2.	Pembahasan Implementasi Proyek IPP dan PLN serta PLTD Pulau terluar Discussions on IPP and PLN Project Implementation and Diesel Power Plants in Frontier Islands	14 Januari January 2015
3.	Persiapan penyaluran tambahan pasokan listrik dari inalum ke jaringan PLN Preparation for Power Supply Increase from Inalum to PLN Networks	14 Januari January 2015
4.	Pembahasan Perhitungan Harga Batubara Discussions on Coal Price Calculations	10 February February 2015
5.	Pembahasan Program Pembangunan Transmisi Discussions on Transmission Construction Program	24 February February 2015
6.	Pembahasan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Discussions on EMR Ministerial Regulation Num. 3 of 2015 on Electricity Purchase Procedure and Electricity Benchmark Purchase Prices	24 Maret March 2015
7.	Pembahasan IPP Terkendala Discussions on Delayed IPP	24 Maret March 2015
8.	Pembahasan Transportasi Batubara Discussions on Coal Transportation	24 Maret March 2015
9.	Pembahasan Kondisi Kelistrikan Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sewa Pembangkit Discussions on Power Conditions in North Sumatera, South Sumatera, and Generator Lease	31 Maret March 2015
10.	Pembahasan Perpres No. 30/2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Discussions on Presidential Regulation Num. 30/2015 on Land Procurement for Developments in the Public Interest	14 April 2015
11.	Pembahasan Program 35.000 MW Discussions on the 35,000MW Program	19 Mei May 2015
12.	Pembahasan Pengadaan Batubara Tahun 2015 Discussions on Coal Procurement for 2015	19 Mei May 2015
13.	Pembahasan Pengadaan Mobile Power Plant Discussion on Procuring Mobile Power Plants	26 Mei May 2015
14.	Pembahasan Pengadaan PLTG Gorontalo *Peaker* 100 MW Discussion on Procuring 100MW Peaker Gas Power Plant in Gorontalo	26 Mei May 2015
15.	Pembahasan Pengadaan PLTGU Lombok *Peaker* 150 MW Discussion on Procuring 100MW Peaker Combined Cycle Power Plant in Lombok	26 Mei May 2015
16.	Pembahasan Peraturan Direksi tentang *Excess Power* Discussion on Directorial Regulation on Excess Power	23 Juni June 2015
17.	Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas Discussion on Gas Sales and Purchase Agreement	23 Jun June 2015
18.	Pembahasan Anggaran Sewa Pembangkit untuk Sumatera Discussion on Budget to Lease Generators in Sumatera	14 Juli July 2015
19.	Pembahasan Progress Pengadaan PLTD Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar Indonesia Discussion on the Progress of Procuring Diesel Power Plants in Frontier Regions and Islands	28 Juli July 2015

No.	Uraian Description	Tanggal Rapat Direksi Board of Directors' Meeting Date
20.	Pembahasan Peraturan Direksi *Excess Power* terkait Peraturan Menteri 3 Tahun 2015 Discussion on Directorial Regulation on Excess Power with regard to Ministerial Regulation Num. 3 of 2015	15 September 2015
21.	Pembahasan Biaya Administrasi Listrik Prabayar Discussions on Administrative Costs of Prepaid Electricity	15 September 2015
22.	Pembahasan PLTP Muara Laboh Discussions on Muara Laboh Geothermal Power Plant	15 September 2015
23.	Pembahasan PLTP Kamojang Discussions on Kamojang Geothermal Power Plant	15 September 2015
24.	Pembahasan Progress IPP Sumsel 9,10 Discussions on the South Sumatera 9,10 IPP Progress	15 September 2015
25.	Pembahasan Progress IPP Sumsel 6 Discussions on the South Sumatera 6 IPP Progress	15 September 2015
26.	Pembahasan Perkembangan IPP Discussions on IPP Developments	15 September 2015
	a. IPP PLTA Batang Toru Batang Toru IPP Hydroelectric Power Plant	15 September 2015
	b. PP PLTU Bengkulu Bengkulu IPP Steam Power Plant	15 September 2015
	c. IPP PLTU Sulbagut Sulbagut IPP Steam Power Plant	15 September 2015
	d. IPP PLTU Sumbagsel Sulbagsel IPP Steam Power Plant	15 September 2015
27.	Pembahasan Progress Kontrak Batubara Discussions on the Coal Contract Progress	15 September 2015
28.	Pembahasan kontrak-kontrak EPC Discussions on EPC Contracts	15 September 2015
29.	Pembahasan *Excess Power* Discussion on Excess Power	23 September 2015
30.	Pembahasan Penyelesaian Klaim melalui BANI Discussions on Claims Settlement in the Indonesian National Board of Arbitration (INBA)	23 September 2015
31.	Pembahasan Pengadaan Transmisi 500 kV Sumatera Discussion on Procuring 500kV Transmission Lines in Sumatera	23 September 2015
32.	Pembahasan Tindak lanjut Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 Discussion on the Follow-up of EMR Ministerial Regulation Num. 19 of 2015	23 September 2015
33.	Pembahasan RUPTL Discussions on Electricity Supply Business Plan	23 September 2015
34.	Progress Pengadaan PLTU IPP Sumsel 9,10 South Sumatera 9,10 IPP Steam Power Plant Progress	27 Oktober October 2015
35.	Pembahasan Penyusunan RUPTL 2016-2025 Discussion on Drafting 2016-2025 Electricity Supply Business Plan	27 Oktober October 2015
36.	Pembahasan Pengadaan IPP Bangka *Peaker* Discussion on Procuring IPP Peaker in Bangka	19 Oktober October 2015
37.	Pembahasan PLTU Celukan Bawang Discussions on Celukan Bawang Steam Power Plant	26 Oktober October 2015
38.	Pembahasan Pengadaan *Mobile Power Plant* Discussion on Procuring Mobile Power Plants	03 Oktober October 2015
39.	Pembahasan PLTGU Belawan Discussions on Belawan Combined Cycle Power Plant	03 Oktober October 2015
40.	Implementasi Sentralisasi Baca Meter dan AMR Implementation of Centralized Meter Reading and AMR	03 Oktober October 2015

2. **Bidang Keuangan** Finance

No.	Uraian Description	Tanggal Rapat Direksi Board of Directors' Meeting Date
1.	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 Discussions on 2015 Work and Budget Plan	06 Januari January 2015
2.	Penetapan Anggaran Investasi 2015 Resolution of 2015 Investment Budget	14 Januari January 2015
3.	Pembahasan Penerbitan Anggaran Investasi Tahun 2015 Discussion on Publication of 2015 Investment Budget	10 Februari February 2015
4.	Penerbitan Anggaran Investasi Tahun 2015 Publication of 2015 Investment Budget	24 Februari February 2015
5.	Pembahasan dana APBN untuk Proyek-proyek Discussion on State Budget and Expenditure for Projects	24 Februari February 2015
6.	Pembahasan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 Discussions on 2015 Work and Budget Plan Revisions	16 Maret March 2015
7.	Pembahasan Persiapan Implementasi Transaksi Lindung Nilai *(Hedging)* Discussions on Preparation on Hedging Implementation	
8.	Pembahasan Penghapusan ATTB dan PRR Discussion on Writing-off NOFAs and NALs	24 Maret March 2015
9.	Pembahasan Penetapan Implementasi ISAK 27 Discussion on Adopting ISAK 27 Implementation	14 April 2015
10.	Pembahasan Laporan Keuangan Prospektif/Retrospektif pada anak perusahaan Discussion on Prospective/Retrospective Financial Statements of Subsidiaries	14 April 2015
11.	Pembahasan Biaya *Hedging* Discussions on Hedging Costs	14 April 2015
12.	Pembahasan Laporan Pengelolaan Hutang Discussions on Debt Management Report	26 Mei May 2015
13.	Pembahasan Pertumbuhan 2015 dan Rencana 2016 Discussions on 2015 Growth and 2016 Plan	17 Juni June 2015
14.	Pembahasan Tambahan Pagu *Disburse* Investasi Discussions on Investment Disbursement Cap Increase	26 November 2015

3. **Bidang GCG** Good Corporate Governance

No.	Uraian Description	Tanggal Rapat Direksi Board of Directors' Meeting Date
1.	Pembahasan Pelimpahan Kewenangan Discussions on Delegation of Authority	24 Februari February 2015
2.	Pembahasan Perubahan Otorisasi Dokumen Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik (IPP) Discussions on Amendment to IPP Authorization Document	16 Juni June 2015
3.	Pembahasan Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW Discussions on Presidential Regulation on Accelerating Development of 35,000MW Generator	14 Juli July 2015
4.	Pembahasan Pelaksanaan Audit pada Anak Perusahaan Discussion on Auditing Subsidiaries	28 Juli July 2015
5.	Pembahasan Agenda Peresmian Pembangunan Pembangkit Program 35.000 MW Discussion on 35,000MW Generator Program Inauguration Agenda	28 Juli July 2015

4. **Bidang Sumber Daya Manusia** Human Resources

No.	Uraian Description	Tanggal Rapat Direksi Board of Directors' Meeting Date
1.	Pembahasan Penetapan Nilai Kinerja Discussion on Determining Performance Values	15 September 2015
2.	Pembahasan Tempat Kedudukan Kepala Divisi Regional Discussion on Residences of Head of Regional Divisions	15 September 2015
3.	Pembahasan Penetapan Remunerasi untuk Pegawai Anak Perusahaan Discussion on Determining Remuneration for Employees of Subsidiaries	15 September 2015
4.	Pembahasan penempatan Personel Discussion on Personnel Placement	23 September 2015

Prosedur dan Penetapan Besaran Remunerasi Direksi

Remunerasi Komisaris dan Direksi dikaji oleh Dewan Komisaris. Hasil kajian melibatkan konsultan independen yang kompeten di bidangnya. Kajian tersebut mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain komitmen waktu, pencapaian target sesuai *key performance Indicators* yang ditetapkan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, serta imbal jasa yang terkait dengan tanggung jawab atas tindakan masing-masing yang mengandung risiko bagi pribadi masing-masing.

Pemberian remunerasi bagi anggota Direksi dihitung berdasarkan formula yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan yang juga dipakai untuk penentuan gaji anggota Direksi, dan besarannya mengacu pada persentase gaji Direktur Utama yang telah disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014.

Bagan ringkas penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors' Remuneration Procedures and Determination

Remuneration of Commissioners and Board of Board of Directors is assessed by the Board of Commissioners. The assessment involves an independent consultant competent in his field. Some main factors taken into account in the assessment are time commitment, the target achievement as compared to the key performance indicators (KPI) set by the Board of Commissioners and Board of Directors, and the fee related to responsibility for individual actions carrying a personal risk to each individual.

The remuneration for Board of Directors members, including the salary, is calculated based on the formula the Nomination and Remuneration Committee set. Determination of the remuneration amount of Board of Directors members refers to the president director's salary percentage that has been approved by General Shareholders' Meeting, taking into account SOE Minister Regulation Num. PER-04/MBU/2014.

Chart of Determination Procedure of Board of Directors Remuneration is as follows:

Komite Nominasi dan Remunerasi • Mendapatkan masukan dari Konsultan Independen dalam menetapkan dasar penentuan remunerasi • Konsultan Independen memberi masukan berdasarkan: • Peraturan Menteri BUMN no PER-04/MBU/ 2014 tanggal 10 Maret 2014 Pasal 5 • Survey Remunerasi Industri sejenis dan faktor Industri • Beban Tugas dan Tanggung Jawab • *Key Performance Indicators* Direksi • Kemampuan / Kesehatan Keuangan Perusahaan	KNR	Nomination and Remuneration Committee • Receiving inputs from independent consultant in deciding bases of remuneration. • Independent consultant provides input based on: • SOE Minister Regulation Num. Per-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 art. 5 • Survey of similar industry remuneration and industry factors • Workload and responsibilities • Board of Directors' KPI • Company Financial Ability / Health
Mengusulkan dasar dan besaran Remunerasi kepada Dewan Komisaris (DK)	KNR	Proposing the bases and amount of Remuneration to Board of Commissioners (BoC).
Membahas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan besaran remunerasi kepada Pemegang Saham	DK	Discussing Nomination and Remuneration Committee suggestion and propose amount of remuneration to Shareholders
Mengevaluasi usulan Dewan Komisaris dan menetapkan gaji dan tantiem Direksi	RUPS	Assessing proposals made by the Board of Commissioners and determining the Board of Directors' salaries and bonuses.
Gaji dan Tantiem Anggota Direksi		Directors' Salary and Bonus (Tantiem)

KNR : Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
DK : Dewan Komisaris Board of Commissioners
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
General Meetings of Shareholders

Remunerasi Direksi

Penetapan besaran remunerasi, yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem Direksi didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Direksi juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PLN No. 0309.K/DIR/2014, tanggal 20 Juni 2014 yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Adapun rincian gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai keputusan RUPS 2015 adalah sebagai berikut:

Remuneration of Directors

The Directors' remuneration, comprising salary, allowance and tantiem were established pursuant to SOE Minister Regulation Num. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014.

Directors also receive allowance and other facilities established in the PLN Board of Directors Meeting Decision Num. 0309.K/DIR/2014 dated June 20, 2014which referred to SOE Minister Regulation Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014.

The salary, allowance and facilities in accordance with the General Shareholders' Meeting 2015 decisions are detailed below:

Jenis Penghasilan	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS/SOE Minister's Decision (in Rupiah)		Keterangan Description	Income Type
	Direktur Utama President Director	**Direksi** Board of Directors		
Gaji	200.000.000,00	180.000.000,00	a. Direktur Utama: 100 % b. Direktur: 90 % dari DIrektur Utama a. President Director: 100% b. Board of Directors: 90% of President Director's	**Salary**
Tunjangan				**Allowance**
• Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) bulan gaji 1 (one) month salary			• Religious Holiday Allowance
• Tunjangan Perumahan	27.500.000,00	27.500.000,00		• Housing Allowance
• Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung 25% dari Gaji dalam satu tahun Premi is covered 25% of salary in one year			• Life Insurance
Fasilitas				**Facility**
• Fasilitas Kendaraan Dinas	1 (satu) unit 1 (one) unit			• Vehicle facility
• Fasilitas Kesehatan	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 th 1 wife and 3 children aged up to 25			• Health facility
• Fasilitas Bantuan Hukum	diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku It is given in accordance with the provisions of the legislation			• Legal aid facility
• *Fasilitas Club Membership*	Dapat diikutsertakan 2 keanggotaan Club Membership yaitu Business Club atau Sport Club Can sign up to 2 Club Memberships, i.e. Business Club or Sports Club			• Cub membership facility
• Fasilitas Komunikasi	Biaya komunikasi ditanggung sepenuhnya oleh perseroan Costs covered entirely by the company			• Communication facility
• *Corporate Credit Card*	1 (satu) kartu kredit untuk keperluan menjamu tamu dinas perseroan atau biaya representasi kedinasan lainnya 1 (one) credit card for entertaining guests of company or other official representation expenses		Pemakaian untuk keperluan pribadi tidak ditanggung oleh perseroan Personal usage is not covered by the company	• Corporate Credit Card
• Pakaian Seragam	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year			• Uniform

Sementara remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi untuk tahun operasional 2015 adalah sebagai berikut.

Meanwhile, the amount of remuneration obtained by each Board of Directors member in operational year of 2015 is as follows.

Remunerasi Direksi Tahun 2015

Board of Directors Remuneration in 2015

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium / Gaji Honorarium/ Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Tantiem	Tanggungan Pph Ps 21 Leave Large Allowance	Total
Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	2.310.000.000	330.000.000	139.590.000	175.000.000	-	816.977.000	3.771.567.000
Nasri Sebayang	Direktur Director	2.079.000.000	330.000.000	-	157.500.000	2.098.922.000*	1.600.988.000	6.266.410.000
Murtaqi Syamsuddin	Direktur Director	2.079.000.000	330.000.000	-	157.500.000	2.098.922.000 *	1.600.988.000	6.266.410.000
Supangkat Iwan Santoso	Direktur Director	2.124.725.806	337.983.871	11.632.500	157.500.000	-	718.352.600	3.350.194.777
Amir Rosidin	Direktur Director	2.124.725.806	200.483.871	11.632.500	157.500.000	-	677.102.600	3.171.444.777
Nicke Widyawati	Direktur Director	2.124.725.806	337.983.871	139.590.000	157.500.000	-	760.339.700	3.520.139.377
Amin Subekti	Direktur Director	2.124.725.806	35.483.871	11.632.500	157.500.000	-	628.502.600	2.957.844.777
Sarwono Sudarto	Direktur Director	2.079.000.000	330.000.000	139.590.000	157.500.000	-	743.327.000	3.449.417.000
Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Director	360.000.000	27.500.000	-	-	-	115.950.492	503.450.492
Machnizon Masri	Direktur Director	360.000.000	55.000.000	-	-	-	143.559.367	558.559.367
Haryanto WS	Direktur Director	360.000.000	27.500.000	-	-	-	56.125.000	443.625.000
Muhamad Ali	Direktur Director	360.000.000	55.000.000	-	-	-	63.000.000	478.000.000
	Jumlah Total	**18.485.903.224**	**2.396.935.484**	**453.667.500**	**1.277.500.000**	**4.197.844.000**	**7.925.212.359**	**34.737.062.567**

*Merupakan tantiem kinerja tahun 2014 *2014 Performance bonus

Asesmen Kinerja Direksi

Prosedur, Kriteria dan Pelaksana Asesmen

Pihak yang melakukan asesmen terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit. Hasil asesmen kemudian menjadi catatan untuk dibahas dalam RUPS dan menjadi dasar bagi perpanjangan maupun perubahan posisi tugas Direktur di jajaran Direksi.

Dasar penilaian dalam pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah *Key Performance Indicators* Direksi / *Key Performance Indicators* Korporat yang ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. *Key Performance Indicators* tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pada akhirnya, pihak yang menjadi penilai dari capaian *Key Performance Indicators* Direksi adalah RUPS. Melalui RUPS Direksi bersama Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja *Key Performance Indicators* korporat pada tahun operasional. Dalam pertanggung jawaban tersebut, Direksi harus mampu menjabarkan kaitan raihan *Key Performance Indicators* dengan kondisi lapangan dan respon operasional yang dijalankan oleh Direksi. Adapun Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan penasehatan yang telah dilaksanakan selama tahun operasional.

Board of Directors' Performance Assessment

Procedure, Criteria and Assessment Implementer

The entity who assesses Board of Directors' performance is Board of Commissioners supported by Audit Committee. The result of assessment will then become notes which are going to be discussed in GMS and become the bases of extension or changes in Directors' duties in Board of Directors.

The base of Board of Directors' performance assessment is Board of Directors' KPI / Corporate KPI which is determined together with Board of Commissioners in the beginning of tenure. Basically, KPI is a qualitative and quantitative scale from Work and Budget Plan which becomes the objectives of activity budget planning and execution.

Eventually, GMS is the evaluator of Board of Directors' KPI achievement. In GMS, Board of Directors, together with Board of Commissioners, report their accountability in achieving Corporate KPI performance in an operational year. In this accountability, Board of Directors should be able to explain relationship between KPI achievement and field condition as well as operational response taken by Board of Directors. Moreover, Board of Commissioners give explanation and account for supervisory and advisory aspects have been conducted during operational year.

***Key Performance Indicators* Direksi**

Mengacu pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) No. RIS-31/D2.MBU/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015, maka penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) terhitung tahun 2012, mencakup 5 perspektif *Key Performance Indicators* berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi perspektif Fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tatakelola.

Evaluasi atas pencapaian kinerja perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat.

Adapun pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Board of Directors' KPI

In accordance with General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN (Persero) Minutes Num. RIS-31/D2.MBU/2015 dated Januari 23, 2015 regarding Work and Budget Plan, the evaluation of Health Level of PT PLN (Persero) starting from 2012 referring to the excellence performance of assessment criteria, which covers 5 perspective of Customer Focus, Excellent Performance Assessment Criteria in accordance with the Management Contract, which covers 5 perspective of Customer Focus, Product and Process, Effectiveness, Human Resources Focus, Financial and Marketplace, Leadership and Governance.

Evaluation on company performance is implemented by Corporate Performance Control Unit

Company performance achievements in 2015 are:

Perspektif	Nilai score	Perspective
Fokus Pelanggan	21	Customer Focus
Efektifitas Produk dan Proses	17,2	Product and Process Effectiveness
Fokus Tenaga Kerja	16,7	Human Resources Focus
Keuangan dan Pasar	22,9	Financial and Marketplace
Kepemimpinan dan Tata Kelola	16,9	Leadership and Governance
Jumlah	**94,6**	**Total**

Adapun gambaran *Key Performance Indicators* Direksi / Korporat untuk tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut.

The following table shows 2015 Board of Directors' / Corporate KPI.

No.	Indikator KPI	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian 2015 Achievement 2015	Nilai Value	Keterangan Description	KPI Indicators
1	2	3	4	6	7	8	9		2
I	Fokus Pelanggan		22				21,0		Customer Focus
1.1	Kepuasan Pelanggan	%	6	88,0	88,1	100,1%	6,0	Baik	Customer Satisfaction
1.2	Penambahan jumlah pelanggan	Juta Plg	3	3,60	3,67	102,2%	3,0	Baik	Increasing total customer
1.3	Keandalan Jaringan								Network Reliability
1.3.a	SAIDI	Menit/Plg	6	300	318,6	93,8%	5,6	Masalah	SAIDI
1.3.b	SAIFI	Kali/Plg	7	5,5	5,97	90,9%	6,4	Masalah	SAIFI
II	Efektivitas Produk dan Proses		20				17,2		Effectiveness of Product and Process
2.1	Fuel Mix BBM Termasuk IPP	%	6	8,50	8,22	103,2%	6,0	Baik	Fuel Mix BBM include IPP
2.2	Penambahan Kapasitas Pembangkit (COD)	GW	5	3,87	2,05	53,1%	2,7	Masalah	Additional power plant capacity (COD)
2.3	Kapasitas Pembangkit Sewa BBM	GW	2	4,38	2,64	139,7%	2,0	Baik	Controlling Lease Power Plant Fuel Capacity
2.4	EAF PLTU	%	4	81,0	82,0	101,3%	4,0	Baik	EAF Steam Power Plant
2.5	Susut Jaringan	%	3	8,45	9,77	84,4%	2,5	Masalah	Network Losses
III	Fokus Tenaga Kerja		17				16,7		Labor Focus
3.1	Human Capital Readiness	Level	5	3,70	3,80	102,7%	5,0	Baik	Human Capital Readiness
3.2	Organization Capital Readiness	Level	5	3,70	3,72	100,5%	5,0	Baik	Organization Capital Readiness
3.3	Produktifitas Pegawai	MWh/Peg	7	5,129	4,915	95,8%	6,7	Hati-hati	Employee Productivity

No.	Indikator KPI	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian 2015 Achievement 2015	Nilai Value	Keterangan Description	KPI Indicators
IV	Keuangan dan Pasar		24				22,9		Market and Finance
4.1	Biaya Non Fuel	Rp/kWh	6	222	227,9	97,1%	5,8	Hati-hati	Controlling Non Fuel Cost
4.2	BPP (Biaya Pokok Penyediaan)	Rp/kWh	8	1,419	1,300	108,4%	8,0	Baik	Controlling the cost of production
4.3	EBITDA Margin	%	2	18,8	17,9	95,2%	1,5	Masalah	Margin EBITDA
4.4	Pencapaian Investasi								Investment Achievement
4.5.a	Program (Realisasi program terkontrak UIP) tanpa luncuran	%	4	100	94,7	94,7%	3,8	Masalah	Program (Contracted Actual Program UIP) without distribution
4.5.b	Fisik (realisasi bayar/pagu *disburse*)	%	4	75	70,04	93,4%	3,7	Masalah	Physical (disburse realization)
VI	Kepemimpinan dan Tata Kelola		17				16,9		Governance and Leadership
5.1	Tata Kelola Perusahaan								Good Corporate Governance
5.1.a	Jumlah Pembangkit yang masuk kriteria PROPER dari hasil sampling Kementrian Lingkungan Hidup	%	2	65	72,4	111,4%	2,0	Baik	Total Power Plant Unit in PROPER Criteria from Ministry of Environment Sampling
5.1.b	Peningkatan tingkat PROPER unit	Unit	2	6	10	166,7%	2,0	Baik	Improvement of PROPER Level in Unit
5.1.c	Skor Penilaian Kinerja Unggul BUMN	Skor	3	576	587	101,9%	3,0	Baik	Assessment Score of Superior Performance of SOE
5.1.d	Skor GCG	Skor	3	86	86	100,0%	3,0	Baik	GCG Score
5.1.e	Pengelolaan risiko	Level	3	3,5	3,4	98,0%	2,9	Hati-hati	Risk Management
5.2	Pemenuhan Portal BUMN	%	2	100	100	100,0%	2,0	Baik	Fulfillment Portal of SOE
5.3	Penyelesaian temuan auditor (BPK)	%	2	100	100	100,0%	2,0	Baik	The completion of auditor's findings (BPK)
	Total Penilaian Kinerja		**100**				**94,7**		**Total Performance Assessment**

Program Pelatihan dan Program Pengenalan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, PLN memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Beberapa program sejenis yang sempat diikuti oleh anggota Direksi, mencakup:

1. *Benchmarking* ke China dalam rangka proyek ekspansi PLTU Cilacap di Chengdu pada tanggal 4-7 Juni 2015.
2. *Benchmarking* ke Jepang mengenai pengelolaan kelistrikan dan pembangkit di Tokyo pada tanggal 6-14 September 2015.

Seluruh Direksi baru yang diangkat pada tahun 2015 telah mendapatkan program pengenalan dalam bentuk kunjungan ke unit-unit operasi.

Board of Directors' Training Program and Introduction Program

In order to increase knowledge and competencies, PLN provides various trainings, seminars, workshops for Board of Directors. Various similar programs which were participated by Directors include:

1. Benchmarking to China for Cilacap Steam Power Plant in Chengdu on June 4-7, 2015.
2. Benchmarking to Japan in relation to electricity and power plant management, in Tokyo on September 6-14, 2015.

All the directors appointed in 2015 have undertaken the introduction program with site visits to operational units.

KOMITE DAN LAPORAN KOMITE DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Dewan Komisaris PLN membentuk Komite Audit (KA), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR).

Komite Audit (KA) dan Komite Manajemen Risiko (KMR) telah memiliki Piagam Komite yang berisikan tugas pokok dan kewenangan komite.

COMMITTEES AND BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEE REPORTS

In accordance with company articles of association, Board of Commissioners form committees, especially Audit Committee as a supporting function in performing supervision task.

The committee consists of one or more members of Board of Commissioners and is responsible to Board of Commissioners. Members of Board of Commissioners' Committee are appointed and dismissed by Board of Commissioners.

In accordance with SOE State Minister Decree Num. KEP-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 regarding SOE Board of Commissioners'/Board of Supervisors' Supporting Organ, PLN's Board of Commissioners PLN established the Audit Committee (AC), Risk Management Committee (RMC) and Nomination and Remuneration Committee (NRC).

The Audit Committee (AC) and the Risk Management Committee (KMR) each has a Committee Charter which contains the committee main duties and authorities.

PLN saat ini memiliki tiga perangkat Komite Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi yang masing-masing telah memiliki Piagam Komite sebagai pedoman kegiatan dan pelaksanaan tugas Komite Komisaris dalam mempersiapkan rekomendasi untuk mendukung tugas pengawasan dan penasehatan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris

Currently PLN has three instruments of Commissioner Committees, i.e. the Audit Committee (AC), Risk Management Committee (RMC) and Nomination and Remuneration Committee (NRC). Each has a Committee Charter that serves as guidelines in the Commissioner Committee activity and duty performance for preparing recommendations to support the supervisory and counselling duties the Board of Commissioners undertakes.

Komite Audit

PLN membentuk Komite Audit guna memenuhi prinsip akuntabilitas pada perusahaan BUMN sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Piagam Komite Audit

Detail tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam *(Charter)* Komite Audit yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Audit adalah melakukan pengawasan *(oversight)* terhadap proses pelaporan keuangan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap independensi dari auditor independen, di luar tanggung jawab atas isi Laporan Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen.

Audit Committee

PLN established the Audit Committee in order to meet the accountability principle in state-owned enterprise in accordance with the laws and regulations in Indonesia.

Audit Committee Charter

The Audit Committee's duties, responsibilities and obligations are explained in detail in the Audit Committee Charter, which is put into effect in accordance with the Board of Commissioners decision. One of the Audit Committee's main duties is to carry out oversight over financial reporting process, including by monitoring and evaluating the independent auditor's independence. However, this excludes the responsibility for the Financial Statement, which is the responsibility of the management.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN dan melakukan telaah untuk memastikan efektivitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik;
3. Melakukan telaah untuk menilai keandalan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN;
4. Melakukan telaah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) PLN;
5. Melakukan telaah atas ketaatan PLN terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan;
6. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PLN;
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:
   - Memastikan bahwa penghapusan piutang, penghapusan persediaan dan penghapusan aktiva tidak beroperasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
   - Tugas-tugas khusus lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
9. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan atas setiap pelaksanaan tugas khusus ;
10. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai PLN, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
11. Melaksanakan *self assessment* atas efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan melakukan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara periodik.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Duties and Responsibilities of Audit Committee are:

1. Conducting an assessment into financial information that PLN would publish, such as Financial Statement, Work and Budget Plan, and Management Report.
2. Selecting a Public Accounting Firm that would perform the audit into PLN's Financial Statement and conducting assessment to ensure the activity effectiveness and the audit results that the Public Accounting Firm conducts.
3. Conducting assessment into the relability and effectiveness of PLN's Internal Control System.
4. Reviewing the effectiveness of internal audit execution and results held by Internal Supervisory Unit;
5. Reviewing the companies' compliance with laws and regulations especially related to reporting to the stakeholders;
6. Reviewing the complaints related to PLN;
7. Performing other tasks given by Board of Commissioners, such as:
   - Ensuring that proposal of account receivable removal, inventory removal, non operational Property, plant and equipment removal, and other assets removal is in accordance with the prevailing laws and regulations;
   - Other special duties in accordance with applicable laws and regulations;
8. The Audit Committee is independent, both in its performance of duties and in reporting; and reports directly to the Board of Commissioners.
9. The Audit Committee's reporting to Board of Commissioners is conveyed in the form of annual report and report of every special duty assignment;
10. The Audit Committee is obliged to keep the confidentiality of documents, data and information on PLN, both from the internal and external parties, and ensure that the usage is only for the interest of its duty performance.
11. Conducting self assessment into the effectiveness of the Audit Committee in performing its duties and refining the Audit Committee's Charter periodically.

Anggota Komite Audit PLN senantiasa bersikap professional, independen, objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Members of PLN's Audit Committee always behave professionally, independently, objectively, and freely from conflict of interest in performing duties and giving opinion to Board of Commissioners

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen atau yang dapat bersifat independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) terdiri dari akademisi dan profesional (akutansi, keuangan, teknik) yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Komite Audit bersifat independen dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN;
3. Bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan PLN dan atau perusahaan afiliasi PLN;
5. Tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non audit atau jasa konsultasi pada PLN dalam sekurangnya satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN

Independence of Audit Committee Members

In accordance with Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) regulation and SOE State Minister Regulation Num. PER-01/MBU/2011, one of the criteria to become Audit Committee is being independent and free from conflict of interest in order to behave objectively in giving opinion when facing problems.

Another matter which is emphasized to all committee members is to act professionally in performing duties and giving opinion to Board of Commissioners.

Audit Committee is led by Independent Commissioners or one who is able to be independent. Meanwhile, members of Committee (non-Commissioners) consist of academics (accounting, finance, engineering) who possess competencies and experience based on fields of duty or company former employees/officials who own experience and broad knowledge associated with company and its activities.

Audit Committee behaves independently based on following criteria:

1. Does not have any family relationship due to marriage and offspring to the second degree with members of Board of Directors and/or Board of Commissioners;
2. Does not have any business relationship both directly and indirectly which are related to PLN's business operations.
3. Is not Director or PLN's and/or PLN's subsidiary employees in no less than one year before appointed as PLN's Audit Committee;
4. Does not hold any share in PLN's subsidiaries and/or affiliation companies both directly and indirectly;
5. Does not work for Public Accounting Firm, Legal Consultancy or other entities who provide audit and/or non-audit services or consultation service to PLN in no less than one year prior to being appointed to be PLN's Audit Committee.

Kualifikasi dan Pendidikan Anggota Komite Audit

Kualifikasi pengalaman kerja, profesi dan latar belakang pendidikan anggota Komite Audit dapat dilihat pada uraian "Profil Anggota Komite Audit, halaman 526)

Susunan Anggota Komite Audit

Sejalan dengan perubahan komposisi Personalia Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan, sebagai berikut:

Qualification and Education of Audit Committee Members

Work experience, profession, and education background of Committee Audit members can be seen in "Committee Audit Member Profiles" (page 526).

Composition of Audit Committee Personnel

In line with the changes in the composition of Board of Commissioners Personnel, the composition of the Audit Committee has also changed to the following:

1. Sesuai keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK/DK-PLN/2015 tanggal 15 Januari 2015 susunan keanggotaan Komite Audit, sebagai berikut:

1. In accordance with Board of Commissioners Decision Num. 01/SK/DK-PLN/2015 dated January 15, 2015, the composition of the Audit Committee members is as follows:

Darmono	:	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Andin Hadiyanto	:	Anggota Member
Hasan Bisri	:	Anggota Member
Sugeng Rochadi	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Aidil Yuzar	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

2. Pada bulan Agustus tahun 2015, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 29/SK/DK-PLN/2015 tanggal 27 Agustus 2015, susunan keanggotaan Komite Audit bertambah sehingga menjadi sebagai berikut:

2. In August 2015, in line with Board of Commissioners Decision Number 29/SK/DK-PLN/2015 dated August 27, 2015, the composition of the Audit Committee members is as follows:

Darmono	:	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Andin Hadiyanto	:	Anggota Member
Hasan Bisri	:	Anggota Member
Sugeng Rochadi	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Aidil Yuzar	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Joseph Suardi Sabda	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2015 Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 92 kali yang terdiri dari rapat yang dihadiri anggota komite unsur Komisaris sebanyak 69 kali dan rapat yang hanya dihadiri anggota komite unsur non komisaris 22 kali. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni Satuan Pengawasan Intern, Auditor Eksternal dan Manajemen Perusahaan.

Di samping itu, Komite Audit juga melaksanakan rapat internal Komite Audit dan rapat dengan komite-komite Dewan Komisaris lainnya untuk membahas beberapa permasalahan secara lebih mendalam.

Selain rapat, Komite Audit melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya sebanyak 11 kali ke Unit Kerja PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan maupun lokasi proyek pembangunan pembangkit dan transmisi.

Audit Committee Meeting

In 2015, Audit Committee conducted 92 meetings, consisting of meetings attended by Board of Commissioners element's committee members, 69 times, and meeting attended by non-commissioner element committee members, 22 times. Also invited in the meeting are related parties in line with the duties and responsibilities of the Audit Committee, i.e. Internal Supervisory Unit, External Audit and Company Management.

In addition, Audit Committee also held internal meeting and other Board of Commissioners' Committees meeting to discuss several problems more thoroughly.

Apart from meetings, Audit Committee conducted 11 work visits with the Board of Commissioners and the other Board of Commissioners Committees to PLN Work Unit and Subsidiary as well as power plant and transmission project locations.

Realisasi Rapat dan Pokok Bahasan Komite Audit 2015
Performance of Audit Committee Meeting and Discussion Points in 2015

Uraian Description	2015
Rapat internal Komite Audit Audit Committee Internal Meeting	10
Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris Audit Committee Meeting with Board of Commissioners	36

Uraian Description	2015
Rapat pembahasan dengan Direktorat terkait (pembahasan RKAP, Laporan Manajemen dan permasalahan dengan masing-masing Direktorat) Discussion Meeting with Related Directorates (discussing the Work and Budget Plan, Management Report and Issues Related to Each Directorate)	18
Rapat dengan SPI PT PLN (Persero) Meeting with PT PLN Internal Supervisory Unit	6
Rapat dengan Kantor Akuntan Publik Meeting with Public Accounting Firm	6
Mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris dan rapat dengan pimpinan Unit PLN setempat Joining Board of Commissioners Work Visits and Meeting with Local PLN Unit's Leader	11
Pembahasan dengan manajemen untuk menelaah permohonan penghapusan atas ATTB, PRR, Aktiva Lainnya, Piutang macet lainnya yang diajukan Direksi Discussion with Management to Examine the Removal Request of ATTB, PRR, Other Assets, Other Accounts Receivables Proposed by the Directors	4
Jumlah Rapat Total Meeting	**91**

Catatan: Terdiri dari rapat dihadiri seluruh anggota Komite sejumlah 69 kali dan rapat yang dihadiri anggota Komite Non Komisaris sejumlah 22 kali.

Notes: As many as 69 meetings were attended by all the Committee members and 22 meetings; by Non-commissioner Committee Members.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit, Tahun 2015

Audit Committee Members' Meeting Attendance, 2015

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Darmono	Ketua Chairman	69	57	83%
Hasan Bisri	Anggota Member	69	59	86%
Andin Hadiyanto	Anggota Member	69	12	17%
Sugeng Rochadi	Anggota Member	69	66	96%
Aidil Yuzar	Anggota Member	69	69	100%
Joseph Suardi Sabda	Anggota Member	15	15	100%

Sedangkan tingkat kehadiran rapat yang tidak mengundang anggota Komite Audit yang berasal dari unsur Komisaris (hanya dihadiri anggota Komite Audit non Komisaris) adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the attendance of meeting where the Audit Committee members from Commissioner elemenst were not the invitees (only attended by non-Commissioner Audit Committee members) is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Sugeng Rochadi	Anggota	22	22	100%
Aidil Yuzar	Anggota	22	22	100%
Joseph Suardi Sabda	Anggota	4	3	75%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Rekapitulasi Kunjungan Kerja Komite Audit Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah melakukan 11 (sebelas) kali kunjungan kerja sebagai berikut:

BRIEF REPORT ON THE AUDIT COMMITTEE'S ACTIVITIES

Recapitulation of Work Committee Work Visit in 2015

Throughout 2015, the Audit Committee has made 11 work visits as follows:

Tanggal Date	Unit/Anak Perusahaan Unit/Subsidiary
24 Februari 2015	PLN P3B Jawa Bali PLN P3B Java Bali
4-6 Maret 2015	Distribusi Jawa Timur (termasuk Area, Rayon UPD dan Call Center), Unit PLTGU Gresik PJB dan PLTU Tanjung Awar-awar East Java Distribution (including Area, Rayon UPD dan Call Center), Gresik PJB Combined Cycle Power Plant Unit and Tanjung Awar-awar Steam Power Plant
24 Maret 2015	PT PLN E, PLN Pussenlis dan PT Rekadaya Elektrika PT PLN E, PLN Pussenlis and PT Rekadaya Elektrika
3-5 Juni 2015	Wilayah Sumut, UIP I, UIP II, KIT SBU di Medan, termasuk Rayon Kabanjahe, PLTA Wampu (IPP), dan PLTU Pangkalan Susu, North Sumatra Region, UIP I, UIP II, KIT SBU in Medan, including Rayon Kabanjahe, Wampu Hydro Power Plant (IPP), and Pangkalan Susu Steam Power Plant
10-12 Juni 2015	Wilayah Riau dan Kepri, PT PLN Batam, P3B Sumatera, dan Area Tanjung Pinang Riau and Riau Islands Region, PT PLN Batam, Transmission and Load Dispatching Center Sumatra, and Tanjung Pinang Area
26-27 Agustus 2015	PLTU Lontar, PLTU Suralaya dan PLTU Labuan Lontar Steam Power Plant, Suralaya Steam Power Plant and Labuan Steam Power Plant
7 - 11 September 2015	Wilayah Kalselteng (termasuk Area Banjarmasin, PLTU Asam-Asam dan PLTA Riam Kanan), Proyek PLTU Pulang Pisau South ad Southeast Kalimantan Region (including Banjarmasin Area, Asam-Asam Steam Power Plant and Riam Kanan Hydro Power Plant), Pulang Pisau Steam Power Plant Project
21-23 Oktober 2015	Distribusi Jawa Tengah, PLTGU Tambak Lorok dan PLTU Tanjung Jati B Central Java Distribution, Tambak Lorok Combined Cycle Power Plant and Tanjung Jati B Steam Power Plant
21-23 Oktober 2015	Distribusi Jawa Barat dan Banten, PLTA Saguling, Bengkel Dayeuh Kolot di Bandung dan PLTA Cirata West Java and Banten Distribution, Saguling Hydro Power Plant, Bengkel Dayeuh Kolot in Bandung and Cirata Hydro Power Plant
18-20 November 2015	Wilayah Sulserabar, PLTU Barru, PLTU Kendari dan PLN Sektor Tello Sulserabar Region, Barru Steam Power Plant, Kendari Steam Power Plant and PLN Tello Sector
18-20 November 2015	Wilayah Suluttenggo, PLTP Lahendong, PLTU Amurang, PLTS Bunaken, PLTU Anggrek dan PLTD Telaga Suluttenggo Region, Lahendong Geothermal Power Plant, Amurang Steam Power Plant, Bunaken Solar Cell Power Plant, Anggrek Steam Power Plant and Telaga Diesel Power Plant

Kegiatan-Kegiatan Komite Audit

1. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi dalam rapat Konsultasi Direksi/Dewan Komisaris agar meningkatkan kepatuhan seluruh unit dan anak perusahaan terhadap ketentuan intern dan ketentuan perundangan-undangan, serta agar Direksi segera menindaklanjuti seluruh temuan SPI dan auditor ekstern dengan tertib.
2. Menelaah dan memberikan tanggapan terhadap surat Direksi perihal permintaan persetujuan/rekomendasi penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) & Piutang Ragu Ragu (PRR) sebanyak 15 surat permohonan.

Activities Conducted by Audit Committee

1. Conveying the recommendation to the Board of Commissioners so that the Board of Directors can improve entire unit compliance or subsidiary to the internal regulations and the provisions of legislation and to follow up the Internal Supervisory Unit's entire findings or the external auditor with orderly.
2. Reviewing and responding to the letter of Board of Directors regarding the the approval / recommendation of ATTB & doubtful accounts (PRR) removal, totaling 15.

3. Membuat kajian tentang perlunya penambahan jumlah Komite Audit (non Komisaris) PT PLN (Persero) dan membuat usulan ke Dewan Komisaris serta mengusulkan pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
4. Menelaah tentang perlunya keikutsertaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam penelitian penghapusan Aset.
5. Menelaah dan menanggapi surat Direksi tentang Usulan Penggunaan Referensi untuk Indikator Aspek Operasional. Hasil telaahan Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk:
   a. Menyampaikan *Key Performance Indicators* bersama secara resmi kepada Direksi dan menugaskan Direksi untuk menyusun/menetapkan *Key Performance Indicators* Direksi dengan mengikuti Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* pada BUMN, sesuai surat Sekretaris Kementerian No. S-08/S. MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 dan;
   b. Menyampaikan Kontrak Manajemen sebagai dasar penilaian kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan tahun 2015
6. Menelaah Indikator aspek operasional yang akan diusulkan kepada RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015. Hasil telaahan Komite Audit merekomendasikan agar Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS, bahwa Indikator aspek operasional untuk penilaian tingkat kesehatan perusahaan diukur berdasarkan Kontrak Manajemen tahun 2015 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT PLN (Persero)
7. Menelaah Laporan Manajemen PT PLN (Persero) tahun 2014 (audited). Hasil telaahan Komite Audit merekomendasikan agar Dewan Komisaris menyurati Direksi, agar memperbaiki draft Laporan Manajemen PT PLN (Persero) sesuai dengan usulan hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direktur terkait pada tanggal 17 Maret 2015. Disamping itu diusulkan agar manajemen melakukan langkah-langkah yang strategis dan upaya maksimal untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun 2015.
8. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi dalam rapat Konsultasi Direksi/Dewan Komisaris agar meningkatkan kepatuhan seluruh unit dan anak perusahaan terhadap ketentuan intern dan ketentuan perundangan-undangan, serta agar Direksi segera menindaklanjuti seluruh temuan SPI dan auditor eksternal dengan tertib.
9. Menelaah Indikator Aspek Operasional Tahun 2015 dengan mempertimbangkan masukan Direksi dan kepentingan *stakeholder* lainnya.
10. Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan indikator aspek operasional PT PLN (Persero) tahun 2015 berikut justifikasinya kepada Menteri BUMN.
11. Menelaah usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2015 dan mempelajari dokumen-dokumen yang telah disampaikan Direksi berikut lingkup

3. Studying on the necessity of PT PLN non-commissioner Audit Committee member addition and proposing to the board of Commissioners as well as proposing the establishment of Nomination, Remuneration and GCG Committees.
4. Assessing the necessity of the Internal Supervisory Unit participation in the study of asset removal.
5. Assessing and responding to the Board of Directors letter regarding Reference Utilization Proposal for Operational Aspect Indicators. The Audit Committee's study recommends that the Board of Commissioners:
   a. Officially conveying the joint KPI to the board of Directors and assigning the Board of Directors to compile/set the Board of Directors' KPI following the Guidelines of KPI Determination at State-owned enterprises in accordance with the Ministerial Secretary letter Num. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 and;
   b. Conveying the Management Contract as the base for the assessment of 2015 company performance and soundness.
6. Reviewing the operational aspect Indicator to be proposed in the General Meeting of Shareholders on 2015 Work and Budget Plan. The Audit Committee's review resulted in the recommendation that the Board of Commissioners propose to GMS that the operational aspect Indicator for company soundness assessment is measured based on 2015 Management Contract between Board of Directors / Board of Commissioners and the shareholders of PT PLN.
7. Reviewing PT PLN 2014 Management Report The Audit Committee's study recommends that the Board of Commissioners write to the Board of Directors requesting that the latter revise the PT PLN Management Report draft in accordance with the propositions of the meeting between Board of Commissioners and related Board of Directors members on March 17, 2015. In addition, it is also recommended that the management take strategic measures and endeavor as best as it can to perform better in 2015.
8. Conveying the recommendation to the Board of Commissioners so that the Board of Directors can improve entire unit compliance or subsidiary to the internal regulations and the provisions of legislation and to follow up the Internal Supervisory Unit's entire findings or the external auditor with orderly.
9. Reviewing the 2015 Operational Aspects by taking into account the Board of Directors' suggestions and other stakeholders' interests.
10. The Audit Committee recommends that the Board of Commissioners present PT PLN's 2015 operational aspects along with the justification to the SOE Minister.
11. Reviewing the proposition of Public Accounting Firm appointment for Fiscal Year 2015 and study the documents that the Board of Directors has submitted including the work scope and the audit

pekerjaan serta biaya audit dan juga melaksanakan rapat dengan Direktur Keuangan. Selanjutnya Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengirim surat usulan rekomendasi penunjukan KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham.

12. Menelaah Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 yang telah dibahas bersama dengan Komite Manajemen Risiko di Dewan Komisaris, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris melalui untuk menyetujui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 yang telah ditandatangani oleh Direksi tersebut
13. Menelaah laporan Manajemen Triwulan 1 2015. Komite Audit merekomendasikan agar Dewan Komisaris membuat surat ke Direksi untuk memberikan apresiasi atas hasil yang dicapai dalam triwulan 1 tahun 2015 sekaligus mendorong untuk melakukan langkah-langkah strategis dan upaya maksimal guna mencapai sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015.
14. Disamping itu diusulkan agar manajemen melakukan langkah-langkah yang strategis dan upaya maksimal untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun 2015.
15. Melakukan revisi Piagam Komite Audit.
16. Menindaklanjuti rekomendasi BPKP, Komite Audit telah menyelesaikan revisi piagam Komite Audit dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada bulan September 2015.
17. Menelaah usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 yang disampaikan Direksi. Komite Audit menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa mengingat perubahan faktor eksternal yang berada di luar kendali manajemen diantaranya kenaikan kurs USD sebaiknya Direksi mempertimbangkan untuk menggunakan asumsi kurs yang lebih realistis. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 agar Direksi diminta:
    a. Melakukan upaya efisiensi antara lain memperbaiki fuel mix, menekan biaya sewa pembangkit serta penurunan susut jaringan.
    b. Melakukan reviu kembali dan membenahi sistem IT untuk mendukung sistem manajemen logistik, billing system yang lebih handal.
    c. Mengelola kenaikan biaya pegawai secara optimal dengan mengacu pada pelaksanaan kebijakan Performance Base Remuneration.
    d. Memastikan pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Perusahaan.
    e. Menggunakan anggaran yang optimal.
    f. Mengupayakan secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk mencapai realisasi COD Proyek dan perolehan dana investasi sesuai jadwal.
18. Menelaah laporan Manajemen Triwulan II tahun 2015 dengan rekomendasi agar Dewan Komisaris membuat surat ke Direksi untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan upaya maksimal guna mencapai sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015.

cost, as well as hold a meeting with the Finance Director. The Audit Committee recommends that the Board of Commissioners sent a letter proposing the recommendation of Public Accounting Firm Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners appointment to SOE Minister as Shareholder.

12. Reviewing the 2015 Work and Budget Plan Revision that has been discussed with Risk Management Committee of the Board of Commissioners, the Audit Committee recommends that the Board of Commissioners approve the revision that the Board of Directors has signed.
13. Reviewing the Management Report of 1st Quarter of 2015. The Audit Committee recommends that the Board of Commissioners write to the Board of Directors to convey appreciation of the achievements in the first quarter of 2015 and to encourage it to take strategic measures and maximum efforts to meet the performance target as set in the 2015 Work and Budget Plan.
14. In addition, it is also recommended that the management take strategic measures and endeavor as best as it can to perform better in 2015.
15. Making revision to the Audit Committee Charter
16. Following up the Development and Finance Controller's recommendation, the Audit Committee has completed the revision to Audit Committee Charter. The Board of Commissioners has approved this in September 2015.
17. Reviewing the Board of Directors' suggestion of revision to 2015 Work and Budget Plan The Audit Committee gave the Board of Commissioners suggestions that, considering the external factors beyond the management's control-including the USD exchange rate increase, the Board of Directors should consider using more realistic exchange rate assumption. In executing 2015 Work and Budget Plan, the Board of Directors is requested to:
    a. Take efforts in efficiency, including improving fuel mix, minimizing plant rent cost and reducing network losses.
    b. Review and improve the IT system so as to support more reliable logistics management system and billing system.
    c. Optimally manage personnel expense by referring to Performance-Based Remuneration policy implementation.
    d. Ensure the Leasing Marine Vessel Power Plant procurement optimally benefits the Company.
    e. Optimally expend the budget.
    f. Endeavor as best as possible and with commitment to meet projects' COD and investment fund acquisition according to schedule.
18. Reviewing the Management Report of 2nd Quarter of 2015, recommending that the Board of Commissioners write to the Board of Directors to take strategic measures and maximum efforts to meet the performance target as set in the 2015 Work and Budget Plan.

19. Menelaah laporan Manajemen Triwulan III tahun 2015 dengan rekomendasi agar Dewan Komisaris membuat surat ke Direksi untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan upaya maksimal guna mencapai sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015, terutama untuk meningkatkan laba perusahaan, maupun upaya peningkatan kesehatan perusahaan.
20. Menelaah surat dari Kementerian BUMN No. S-501/MBU/D2/09/2015 tanggal 21 September 2015 perihal dukungan sehubungan pelaksanaan revaluasi aset PT PLN (Persero). Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk membuat surat rekomendasi persetujuan rencana revaluasi aset tetap tersebut ke Menteri BUMN. Komite Audit berpendapat bahwa rencana revaluasi aset dapat disetujui karena dapat memperbaiki struktur permodalan PLN.
21. Menelaah hasil rapat Komite Audit dengan SPI tanggal 29 Oktober 2015 dengan rekomendasi agar Dewan Komisaris menyurati Direksi untuk hal-hal sebagai berikut:
    a. Segera menyelesaikan, memperkuat menyempurnakan organisasi SPI serta SOP dan rekrutmen SDM nya.
    b. Agar SPI segera menyusun rencana kerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016.
    c. Agar manajemen segera menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan-temuan auditor internal (SPI) dan eksternal (BPK & KAP) dan melaporkan perkembangan penyelesaiannya secara periodik
    d. Memerintahkan SPI agar memetakan sistim pengendalian internal di semua bisnis proses yang penting dan signifikan supaya memudahkan tindak lanjutnya oleh manajemen.
22. Menelaah usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko menyampaikan masukan, bahwa usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 agar dilengkapi angka-angka prognosa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015, rencana kerja Direktorat Bisnis Regional, serta rencana pembelian listrik antara PT PLN (Persero) dengan IPP yang dicantumkan dalam bab tersendiri. Disamping itu Komite Audit juga memberikan masukan tentang materi pendapat Dewan Komisaris pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 yang dicantumkan sebagai lampiran surat Dewan Komisaris kepada Direksi.
23. Menelaah indikator aspek operasional yang sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Komite Audit mengusulkan agar Indikator Aspek Operasional Tahun 2016 terdiri dari Penjualan kepada pelanggan Industri, Jumlah PPA IPP yang ditandatangani, Susut Jaringan, Penambahan kapasitas pembangkit dan *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU.
24. Komite Audit non Komisaris bersama-sama Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) melakukan rapat pembahasan revisi *Board Manual* Dewan Komisaris.

19. Reviewing the Management Report of 3rd Quarter of 2015, recommending that the Board of Commissioners write to the Board of Directors to take strategic measures and maximum efforts to meet the performance target as set in the 2015 Work and Budget Plan, especially to increase the Company's profit and improve Company's soundness.
20. Reviewing the SOE Ministerial Letter Number S-501/MBU/D2/09/2015 dated September 21, 2015 regarding the support for PT PLN asset revaluation. The Audit Committee recommends that the Board of Commissioners write a recommendation letter to the SOE Minister for approving the fixed asset revaluation asset. The Audit Committee is of the opinion that the asset revaluation plan can be approved as it would improve the Company's capital structure.
21. Reviewing the output of Audit Committee meeting with the Internal Supervisory Unit dated October 29, 2015, recommending that the Board of Commissioners write to the Board of Directors regarding the following:
    a. To complete, strengthen and refine the Internal Supervisory Unit as well as its SOP and Human Resources recruitment.
    b. Internal Supervisory Unit is to complete its 2016 work plan.
    c. The management is to resolve and follow up the Internal Supervisory Unit's and external (State Audit Board & Public Accounting Firm) findings and periodically report the resolution progress
    d. Internal Supervisory Unit is ordered to map the internal oversight system at all important business processes so as to facilitate the follow-ups by the management.
22. Reviewing the proposals of 2016 Work and Budget Plan The Audit Committee and the Risk Management Committee gave input that the 2016 Work and Budget Plan contain the 2015 Work and Budget Plan prognosis, the Regional Business Directorate's work plan, and the Company's plan of electricity purchase with Independent Power Producer, which is discussed in a separate chapter. In addition the Audit Committee also gave input regarding the Board of Commissioners' opinion materials in the 2016 Work and Budget Plan that are annexed to the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors.
23. Reviewing the operational aspects in accordance with the SOE Ministerial Decision Num. KEP-100/MBU/2012 on State-owned enterprises Soundness Assessment. The Audit Committee proposed that the 2016 Operational Aspects comprise the Sales to Industrial customers, the amount of Independent Power Producer PPA that is signed, Network Losses, Power plant capacity and Steam power plant Equivalent Availability Factor (EAF) additions.
24. The non-Commissioner Audit Committee together with the Risk Management Committee, Nomination & Remenration Committee, Board of Commissioners Secretary and Company Secretary held a meeting to discuss the revisions to Board of Commissioners Board Manual.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

Piagam Komite Manajemen Risiko (KMR)

Detail tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Manajemen Risiko dijabarkan dalam Piagam *(Charter)* Komite Manajemen Risiko yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Manajemen Risiko adalah menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis perusahaan, yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan hasil kajian manajemen risiko untuk kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan; serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite;
2. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko perusahaan, pengendalian intern perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* dalam perusahaan;
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di perusahaan;
8. Mengkaji hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

Risk Management Committee (Rmc) Charter

The Risk Management Committee's duties, responsibilities and obligations are explained in detail in the Risk Management Committee Charter, which is put into effect in accordance with the Board of Commissioners decision. One of the main duties of the Risk Management Committee is to serve as an independent assessor in reviewing the Company's strategic policy that the Board of Directors presents to the Board of Commissioners, which contains the results of risk management analysis into the Company's activities that carry potential risks; and other activities under the scope of the Board of Commissioners' supervisory duty.

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee are:

1. Developing Work and Budget Plan;
2. Understanding company risk management including various risks faced by company; company risk management strategies, system, and policies; company internal control which covers policies, methodology, and infrastructures;
3. Conducting evaluation of risk measurement model used by company and providing further improvement recommendation;
4. Monitoring various risk potencies faced by company;
5. Evaluating various company risk management policies;
6. Coordinating implementation and supervision of existence and effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) component in company
7. Measuring effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) set by company;
8. Reviewing risk assessment result and other documents submitted by Directors as complement to proposal of investment/funding/transaction plans and other operational activities which give major impact to company as well as giving response to Board of Commissioners regarding Board of Directors' proposal;
9. Supervising and monitoring consistent implementation of risk mitigation in investment activities and company operations which have major impact;
10. Identifying matters and Board of Commissioners' other duties which require Board of Commissioners' attention;
11. Performing other duties given by Board of Commissioners in accordance with Risk Management Charter and applicable laws

12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Realisasi Triwulanan Komite;

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Ketua Komite adalah Komisaris Independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan karena anggota Komite merupakan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Kualifikasi dan Pendidikan Anggota Komite Manajemen Risiko.

Kualifikasi pengalaman kerja, profesi dan latar belakang pendidikan anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada uraian "Profil Anggota Komite Manajemen Risiko, halaman 524.

Susunan Personalia Komite Manajemen Risiko

Sejalan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2015 mengalami perubahan, sebagai berikut

1. Mengawali tahun 2015, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK/DK-PLN/2015 tanggal 15 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

12. Coordinating with Board of Commissioners Secretary to facilitate Committees' duties;
13. Conveying the Committee's Quarter and Annual Duties Realization Report;

Independence of Risk Management Committee Members

One of criteria to be selected as members of Risk Management Committee is independence and freedom from conflict of interest in order to behave objectively in giving opinion in handling problems. Another criteria required by members of committee is professional behaviour in performing duties and giving opinion to Board of Commissioners.

The head of committee is Independent Commissioner, meanwhile, members of committee (non-commissioners) are ones who are from outside the company and do not have any relationship with management, ownership, as well as company business activities, since members of Committee are academics who possess competencies and experience based on field of duties or company former employees/officials who possess experience and broad knowledge associated with company and its activities.

Qualification and Education Background of Risk Management Committee Members

Work experience, profession, and education background of Risk Management Committee Members can be seen on "Risk Management Committee Member Profiles" (page 524).

Composition of Risk Management Committee Members

In accordance with changes in Board of Commissioners composition, composition of Risk Management Committee also faced the following changes during 2015

1. In early 2015, the composition of Risk Management Committee based on Board of Commissioners Decree Number 02/SK/DK-PLN/2015 dated January 15, 2015 is as follows:

Zulkifli Zaini	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Oegroseno	Anggota Member
S. Milton Pakpahan	Anggota Member
Yusuf Hamdani	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

2. Pada bulan Mei tahun 2015, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/DK-PLN/2015 tanggal 22 Mei 2015, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko, berubah menjadi sebagai berikut:

2. In May 2015, in line with Board of Commissioners Decision Number 17/SK/DK-PLN/2015 dated May 22, 2015, the composition of the Risk Management Committee members is as follows:

Oegroseno	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
S. Milton Pakpahan	Anggota Member
Marlius Alrobin	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Djoko Hastowo	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

3. Pada bulan Agustus tahun 2015, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 30/SK/DK-PLN/2015 tanggal 22 Mei 2015, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko bertambah sehingga menjadi sebagai berikut:

3. In August 2015, in line with Board of Commissioners Decision Number 30/SK/DK-PLN/2015 dated May 22, 2015, the composition of the Risk Management Committee members is as follows:

Oegroseno	:	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
S. Milton Pakpahan	:	Anggota Member
Marlius Alrobin	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Djoko Hastowo	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Bambang Purwo	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

4. Pada bulan September tahun 2015, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 40/SK/DK-PLN/2015 tanggal 30 September 2015, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko menjadi sebagai berikut:

4. In September 2015, in line with Board of Commissioners Decision Number 40/SK/DK-PLN/2015 dated September 30, 2015, the composition of the Risk Management Committee members is as follows:

Oegroseno	:	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Aloysius Kiik Ro	:	Anggota Member
S. Milton Pakpahan	:	Anggota Member
Marlius Alrobin	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Djoko Hastowo	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Bambang Purwo	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

5. Pada bulan November tahun 2015, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 46/SK/DK-PLN/2015 tanggal 25 November 2015, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berubah menjadi sebagai berikut:

5. In November 2015, in line with Board of Commissioners Decision Number 46/SK/DK-PLN/2015 dated September 25, 2015, the composition of the Risk Management Committee members is as follows:

Oegroseno	:	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Aloysius Kiik Ro	:	Anggota Member
Jarman	:	Anggota Member
Marlius Alrobin	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member
Djoko Hastowo	:	PH Anggota non Komisaris (merangkap Sekretaris Dewan Komisaris) Acting Non-Commissioner member & Board of Commissioner Secretary
Bambang Purwo	:	Anggota non Komisaris Non-commissioner member

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2015 Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 41 kali, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko.

Risk Management Committee Meeting

In 2015, there were 41 meetings conducted by Risk Management Committee, including meeting which invites parties who are related based on Risk Management Committee's field of duties and responsibilities.

Di samping itu, Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan rapat internal komite Manajemen Risiko dan rapat komite-komite Dewan Komisaris lainnya untuk membahas beberapa permasalahan secara lebih mendalam. Selain rapat, Komite Manajemen Risiko melakukan kunjungan kerja sebanyak 14 kali.

Pokok Bahasan Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2015

1. Pembahasan Rencana Jangka Panjang 2015-2019 dan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 terkait terbitnya RUPTL 2015-2024 dan penugasan 35.000 MW
2. Struktur Organisasi, Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* 2014 dan Laporan Manajemen dan *Key Performance Indicators* Triwulan I/2015
3. Implementasi Manajemen Risiko di PT PLN (Persero)
4. Perpanjangan periode PUB (lanjutan), dan Pembangunan PLTU Tanjung Uncang terkait arahan Dewan Komisaris pada RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2014 dan Rencana Jangka Panjang 2015-2019
5. Persiapan dan *Progress* Proyek 35.000 MW
6. Kebutuhan tambahan anggota KMR Non Komisaris
7. Usulan *Bluebook* 2015-2019
8. Reorganisasi PLN
9. Permintaan rekomendasi untuk daftar yang diusulkan dalam *Blue Book* 2015-2019
10. Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang 2015-2019
11. Perkembangan Program 35.000 MW
12. Usulan Pemilihan dan Penunjukan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Pendukung Tugas Komite Manajemen Risiko
13. Permohonan Wilayah Usaha atas nama PT Energia Prima Nusantara
14. Piagam Komite Manajemen Risiko
15. Rekomendasi atas pembelian tenaga listrik IPP PLTU Cilacap II, Cirebon Ekspansi dan PLTA Hasang
16. Pendapat Hukum/Kajian Kewenangan Dewan Komisaris Dalam Anggaran Dasar PT PLN (P)
17. Rekomendasi / Persetujuan Penetapan Rencana Penggunaan Dana Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)
18. Divestasi PT Adhiguna Putera (PT AGP) – Cucu Perusahaan PT PLN (Persero) – Anak Perusahaan PT Bahtera Adhiguna
19. Penandatanganan Proyek PLTU Riau 2x110 MW bagian dari FTP-1
20. Pembahasan Proses Pengadaan IPP antara PT PLN (Persero) dengan PT Mabar Elektrindo.
21. Kelengkapan Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris
22. Pengecualian Batasan Pagu Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris
23. Permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Penggunaan Dana Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero) untuk tahun 2016
24. Permohonan Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pinjaman Langsung dengan Jaminan Pemerintah untuk *Program Result Based lending* (RBL) dan Program for Result (PforR).

In addition, Risk Management Committee also held internal meeting and other Board of Commissioners' Committees meeting to discuss several problems more thoroughly. Apart from meetings, Risk Management Committee made 14 work visits.

Subjects Discussed in Risk Management Committee Meeting in 2015

1. Discussion of 2015-2019 Long-Term Plan and 2015 Work and Budget Plan revision in relation to the 2015-2024 RUPTL issuance and the 35,000 MW project assignment.
2. Organizational Structure, Management Report, and 2014 KPI also Management Report and Q1/2015 KPI
3. Risk Management application at PT PLN
4. Extension of PUB period (continuation), and Tanjung Steam Power Plant Uncang Development related to BoC advise in 2014 GMS, Work and Budget Plan and 2015-2019 Long Term Plan
5. 35,000 MW Project Preparation and Progress
6. Needs of Additional Non-Commissioner KMR Member
7. 2015-2019 Bluebook Proposal
8. PLN Organizational Restructuring
9. Recommendation request for points proposed in 2015-2019 Bluebook.
10. 2015-2019 Long Term Plan Approval Request
11. 35,000 MW Program Progress
12. Proposal of BoC Secretariat Staff Selection and Appointment for Supporting Risk Management Committee Duties
13. Request of Business Area Under the Name of PT Energia Prima Nusantara
14. Risk Management Committee Charter
15. Recommendation for Independent Power Producer Cilacap II Steam Power Plant electrical power purchase
16. Legal Opinion/Analysis on Board of Commissioners' Authority in PT PLN Articles of Association
17. Recommendation/Approval on Setting the Plan of Additional Fund Usage of State Equity Participation
18. Divestment of PT Adhiguna Putera (PT AGP) – Subsidiary of PT Bahtera Adhiguna (PT PLN's subsidiary)
19. Signing the Riau Steam Power Plant 2 x 110 MW Project, part of FTP-1
20. Discussion of IPP Procurement between PT PLN and PT Mabar Elektrindo
21. Completeness of Supporting Documents for Board of Commissioners' Approval
22. Board of Directors' and Board of Commissioners' Authority Limit Exception
23. Request of Approval of Plan of Usage of Additional Fund in State Equity Participation in PT PLN for 2016
24. Request for Board of Commissioners' Recommendation for Direct Loan with Government Guarantee for Result-Based Lending (RBL) Program and Program for Results (PforR).

25. Pendapat Hukum Status Staf Sekretariat Dewan Komisaris
26. Penambahan Modal Dasar PT PLN (Persero)
27. PLTM
28. Divestasi Saham PT Adhiguna Putera, Anak Perusahaan PT Bahtera Adhiguna
29. Persetujuan Tertulis Atas Rencana Pinjaman dengan Perbankan Dalam Negeri dengan Nilai maksimum Rp.12 Triliun untuk pendanaan Investasi Tahun 2015-2016
30. Pendapat Hukum Mediasi *Win-Win Solution* Rumah Jabatan Disjabar
31. Proggress Program 35.000 MW
32. Penandatanganan Proyek PLTU KALTIM (2x110 MW) Bagian Dari FTP-1
33. PMO-Pedoman Manajemen *Operasional Dashboard*

Kunjungan Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan kunjungan kerja ke:

1. PT PLN P3B Jawa Bali pada tanggal 24 Februari 2015
2. PT PLN Distribusi Jawa Timur dan PLTGU Gresik dari tanggal 4-6 Maret 2015
3. Proyek PLTU Tanjung Awar-Awar tanggal 4-6 Maret 2015
4. Area, Rayon, UPD dan *Call Centre* di lingkungan PLN Distribusi Jawa Timur tanggal 4-6 Maret 2015
5. PT PLN Wilayah SUMUT, KITSU, APB Medan, UIP 1 dan UIP2 tanggal 9-13 Juni 2015
6. PT PLN RWKR, P3BS, UIP1 dan UIP 2, PLN Batam dan Area Tj. Pinang dari tanggal 9-13 Juni 2015
7. PT PLN (Persero) PLTU Lontar, PLTU Suralaya dan PLTU Labuan dari tanggal 26-27 Agustus 2015
8. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dari tanggal 7-11 September 2015
9. PT PLN (Persero) PLTU Indramayu pada tanggal 12 Oktober 2015
10. PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Wilayah Jawa Tengah & DIY, PLTGU Tambak Lorok dan PLTU Tanjung Jati B dari tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015
11. PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten, PLTA Saguling dan PLTA Cirata dari tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015
12. PT PLN (Persero) Kantor Distribusi PT PLN (Persero) Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo dari tanggal 18 November 2015 sampai dengan 20 November 2015

Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko adalah:

a. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam memberikan tanggapan atas:
   1. Usulan mendapatkan pinjaman;
   2. Usulan melakukan transaksi dalam bidang pembelian listrik dari IPP, pembelian bahan bakar, serta transaksi lainnya;

25. Legal Opinion on Board of Commissioners Secretariat Staff's Status
26. PT PLN (Persero) Authorized Capital Addition
27. Micro Hydro Power Plant
28. Divestment of shares of PT Adhiguna Putera, Subsidiary of PT Bahtera Adhiguna
29. Written Approval for Plan of Loan from Domestic Bank with maximum amount of Rp12 Trillion for Investment in 2015-2016
30. Legal opinion on Win-Win Solution Mediation in West Java Distribution Official Residence
31. 35,000 MW Program Progress
32. Signing the East Kalimantan Steam Power Plant 2x 110 MW Project, part of FTP-1
33. PMO - Guidelines off Operational Management Dashboard

Risk Management Committee Work Visit In 2015

During 2015, the Risk Management Committee made work visit to:

1. PT PLN P3B Java Bali on February 24, 2015
2. PT PLN East Java Distribution and Gresik Combined Cycle Power Plant, March 4-6, 2015
3. Tanjung Awar-Awar Steam Power Plant Project, March 4-6, 2015
4. Area, Sub-Area, UPD and Call Center in PLN East Java Distribution premise, March 4-6, 2015
5. PT PLN North Sumatra Region, KITSU, APB Medan, UIP 1 and UIP2, June 9-13, 2015
6. PT PLN RWKR, P3BS, UIP1 and UIP 2, PLN Batam and Tj. Pinang Area, June 9-13, 2015
7. PT PLN (Persero) LontarSteam Power Plant, Suralaya Steam Power Plant and Labuan Steam Power Plant, August 26-27, 2015
8. PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Region, September 7-11, 2015
9. PT PLN (Persero) Indramayu Steam Power Plant, October 12, 2015
10. PT PLN (Persero) Central Java & Yogyakarta Regional Distribution Office, Tambak Lorok Combined Cycle Power Plant and Tanjung Jati B Steam Power Plant, October 21-23, 2015
11. PT PLN (Persero) West Java and Banten Distribution Office, Saguling Hydro Power Plant and Cirata Hydro Power Plant, October 21-23, 2015
12. PT PLN (Persero) Distribution Office PT PLN (Persero) North Sulawesi, Southeast Sulawesi and Gorontalo, November 18-20, 2015

Risk Management Committee Activities

The activities carried out by Risk Management Committee are:

a. Giving input to Board of Commissioners in giving response to:
   1. Proposal to obtain loans;
   2. Proposal to make transaction in electricity purchase from IPP, fossil oil purchase, and other transaction.

3. Penerusan pinjaman pemerintah (SLA);
4. Rencana investasi untuk dimasukkan ke dalam Blue Book;
5. Pembuatan rencana jangka panjang perusahaan;
6. Rencana pengembangan perusahaan;
7. Usulan pembentukan / penggabungan / penghapusan unit organisasi PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan.

b. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris berupa tanggapan atas pengembangan sistem SDM dan Organisasi.
c. Bersama dengan Komite/Bidang lainnya, memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas:
   1. Pencapaian target kinerja Manajemen
   2. Penyusunan RKA Dewan Komisaris
   3. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016 dan *Key Performance Indicators* Manajemen
d. Melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi dengan pengelola proses manajemen risiko dan investasi di Perusahaan.
e. Melakukan koordinasi dengan Direksi serta jajaran terkait dalam bidang:
   1. Penerapan *Enterprise Risk Management*
   2. Perencanaan dan Pengelolaan Investasi yang berdampak besar bagi Perusahaan.

Frekuensi dan Agenda Rapat

Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 41 kali rapat internal, dan selain itu juga menghadiri rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 55 kali dan rapat rutin yang diadakan Sekretaris Dewan Komisaris sebanyak 2 kali.

Adapun tingkat kehadiran anggota Komite pada rapat Komite, sebagai berikut:

3. Government's two-step loans (SLA);
4. Investment plan be included in Bluebook;
5. Compiling company's long term plan;
6. Company's expansion plan;
7. Proposal for PT PLN and Subsidiary establishment/ merger/ organization unit removal

b. Providing inputs to Board of Commissioners, i.e. response to the Human Resources and Organization system development.
c. Together with other Committees, providing inputs to Board of Commissioners on:
   1. Management's performance target achievement
   2. Board of Commissioners Work Plan 7 Budget preparation
   3. 2016 Work and Budget Plan and Management KPI proposal
d. Coordinating data and information collection with risk and investment management process manager at the Company
e. Coordinating with Board of Directors and related departments in:
   1. Enterprise Risk Management application
   2. Planning and Management of Investment bearing significant impact on Company

Meeting Frequency and Agenda

The Risk Management Committee has held 41 internal meetings, and attended Board of Commissioners internal meetings totaling 55 times, and routine meetings held by Board of Commissioners Secretary, 2 times.

The Committee members' attendance rate in Committee meetings is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Prosentase** Percentage
Zulkifli Zaini	Ketua merangkap Anggota Chairman-cum-Member	94%
Oegroseno	Ketua merangkap Anggota Chairman-cum-Member	78%
S. Milton Pakpahan	Anggota Member	2%
Aloysius Kiik Ro	Anggota Member	62 %
Jarman	Anggota Member	60
Djoko Hastowo	Anggota Non Komisaris (Merangkap Sekretaris Dewan Komisaris) Non-commissioner Member (concurrently BoC Secretary)	100
Marlius Alrobin Bachtiar	Anggota Non Komisaris Non-commissioner Member	100 %
Bambang Purwo Handoko	Anggota Non Komisaris Non-commissioner Member	100 %

Komite Nominasi dan Remunerasi

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap proses penetapan nominasi dan remunerasi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi

1. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) secara benar;
2. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat *variable* bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
7. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 24/SK/DK-PLN/2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Budiman	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member
Suharto	Anggota Member

2. Pada bulan September 2015, Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 38/SK/DK-PLN/2015 tanggal 18 September 2015 menambah anggota Komite sehingga menjadi sebagai berikut:

Budiman	Ketua merangkap anggota Chairman-cum-member
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member
Suharto	Anggota Member
Murniati	Anggota Member

Nomination and Remuneration Committee

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The criteria to become a member of the Nomination and Remuneration Committee are independent and free from conflicts of interest, allowing members to act objectively when providing opinions on the process for determining nominations and remuneration. All committee members are also encouraged to act professionally in carrying out their duties and in providing advice to the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee are:

1. Reviewing and monitoring to ensure that Board of Directors have set the Nomination and Remuneration variables of PT PLN (Persero) correctly;
2. Reviewing and monitoring to ensure the Board of Directors have performed recruitment, career development, nomination and remuneration in accordance with the ratified provisions;
3. Assisting in formulating remuneration policy to decide Board of Commissioners and Directors' salary and honorarium, allowance, and facilities which are fixed as well as incentives and tantiem (bonus) which are variable.
4. Identifying matters that need the Board of Commissioners' attention and other duties of other Board of Commissioners
5. Performing other tasks given by Board of Commissioners,
6. Coordinating with Board of Commissioners Secretary to facilitate Committees' duties;
7. Making a report in accordance with their sectors according to applicable regulations.

Composition of Nomination and Remuneration Committee Members

1. Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration through the Board of Commissioners Decision Number 24/SK/DK-PLN/2015 dated July 28, 2015 with composition as follows:

2. In September 2015, Board of Commissioners through Board of Commissioners Decision Number 38/SK/DK-PLN/2015 dated September 18, 2015, added Committee members, thus the composition is as follows:

Frekuensi dan Agenda Rapat

Sejak dibentuk pada 28 Juli 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 9 kali rapat internal dengan pokok bahasan berupa calon Direksi PT PLN (Persero), calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan Direksi PT PLN (Persero), calon personalia Komite Dewan Komisaris serta menghadiri rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 18 kali.

Adapun tingkat kehadiran anggota Komite pada rapat internal Komite, sebagai berikut:

Meeting Frequency and Agenda

Established since July 28, 2015, the Nomination and Remuneration Committee has held 9 internal meetings with discussion points including the candidates of PT PLN (Persero) Board of Directors, Director and Commissioner candidates at Subsidiary proposed by Board of Directors, Board of Commissioners Committee personnel candidates; and attended Board of Commissioners' internal meeting as many as 18 times.

The Committee members' attendance rate in Committee internal meetings is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Prosentase Kehadiran** Attendance Percentage
Budiman	Ketua Komite Chairman Committee	100 %
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member	96 %
Suharto*)	Anggota Member	100 %
Murniati	Anggota Member	100 %

*) Hadir penuh saat membahas usulan Direksi PT PLN (Persero) pada rapat KNR.

*) Attended the meeting entirely for discussion of PT PLN Board of Directors proposals during KNR meeting.

Kunjungan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejak dibentuk pada 28 Juli 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 4 kali kunjungan kerja sebagai berikut:

Work Visit of Nomination and Remuneration Committee

Established since July 28, 2015, the Nomination and Remuneration Committee made 4 work visits as follows:

Tanggal Date	**Unit/Proyek** Unit/Project
12 Oktober October 2015	PLTU Indramayu
21 Oktober October 2015	PLN Dist Jabar, PLN Pusharlis, PLN UIP V, PLTA Saguling, PLTA Cirata
17 November 2015	PLN Sulutenggo, PLN UIP XII, PLN UIP XIII, PLTS Bunaken, PLTU Amurang, PLTA Lahendong, PLTA Tanggari, PLTA Tonsea Lama, PLTU Anggrek, PLTG Gorontalo
17 November 2015	PLN Sulserabar, PLN UIP XII, PLN UIP XIII, PLTU Kendari, PLTG/PLTD Tello, PLTU Barru, PLTA Bili-bili

Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Tahun 2015

1. Melaksanakan kajian dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi PLN mengenai calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
2. Melaksanakan kajian dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Melaporkan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2015.
4. Menyusun Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.
7. Melaksanakan rapat internal Komite dan menghadiri rapat-rapat yang diadakan di lingkungan Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Activities in 2015

1. Conducting an analysis and conveying recommendations to Board of Commissioners following the PLN Board of Directors proposals regarding Subsidiary Board of Directors member and Board of Commissioners member candidates
2. Conducting an analysis and conveying recommendations to Board of Commissioners regarding Board of Commissioners Committee member and Board of Commissioners Secretary candidates
3. Reporting Nomination and Remuneration Committee activities in 2015
4. Preparing 2016 Work Plan and Nomination and Remuneration Committee KPI
5. Performing other tasks given by Board of Commissioners
6. Making work visit with Board of Commissioners and other Board of Commissioners Committees
7. Organizing internal Committee meeting and attending meetings held within the scope of Board of Commissioners

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Uraian mengenai Kebijakan Suksesi Direksi dapat dilihat pada sub bab - Direksi - dengan judul "Kebijakan Suksesi Direksi" (Halaman 392).

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

A description of the Director's Succession Policy can be seen in sub-chapter Directors under the heading "Director's Succession Policy" on page 392.

KOMITE-KOMITE DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, PLN telah membentuk komite di bawah Direksi yang beranggotakan Direktur-Direktur. Komite Direktur dibagi menjadi 8 Komite, dengan ruang lingkup Komite dan keanggotaan Direktur sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES

In order to support effectiveness in performing operational duties and responsibilities, PLN formed committees under Board of Directors comprising directors as members. Board of Directors Committees comprises 8 Committees, with scope of Committee and Director's membership as follows:

Komite Direktur Board of Directors Committee	**Ruang Lingkup Pembahasan** Discussion Scope	**Keanggotaan Direktur** Director Membership
Komite IPP dan Kerjasama Kemitraan IPP & Partnership Cooperation Committee	Pembelian Tenaga Listrik dari IPP, Excess Power, Kemitraan dan Kerjasama Komersial lainnya Purchasing electric power from IPP, Excess Power, Partnership and others commercialization working	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Keuangan 4. Regional terkait Directors in Charge: 1. Planning 2. Procurement 3. Finance 4. Related Regions
Komite Energi Primer Primary Energy Committee	Pengadaan Gas, Batubara, BBM, Uap Panas Bumi dan Air. Gas, Coal, Fossil Fuel, Geothermal and Hydro Procurement	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Keuangan 4. Regional terkait Directors in Charge: 1. Planning 2. Procurement 3. Finance 4. Related Regions
Komite Investasi dan Pendanaan Investing and Financing Committee	Proyek Pembangkit Baru, Pembangkit *Existing, Repowering, Refurbishment* dan Konversi. New Power Plant, Existing Plant, Repowering, Refurbishment and Conversion Project.	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Keuangan 4. Regional terkait Director in charge: 1. Planning 2. Procurement 3. Finance 4. Related Regions
Komite Niaga Commerce Committee	Mekanisme dan Aspek Komersial Transaksi Tenaga Listrik Khusus, Tarif Tenaga Listrik, Subsidi serta Aspek Komersial Lainnya Mechanism and Commercial Aspect of Special Tariff Electricity Transaction, Electricity Rate, Subsidy and Other Aspects	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Keuangan 3. Regional terkait Directors in Charge: 1. Planning 2. Finance 3. Related Regions
Komite SDM & Organisasi Human Resources & Organization Committee	Sistem SDM, Remunerasi, Suksesi Manajerial Unit Bisnis dan AP/Afiliasi, Perubahan Organisasi, Pengembangan/ Penyederhanaan Organisasi Human Resources System, Remuneration, Business Unit and AP/Affiliation Managerial Succession, Organizational Change, Organizational Restructuring	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Human Capital Management 3. Keuangan 4. Regional terkait Directors in Charge: 1. Planning 2. Human Capital Management 3. Finance 4. Related Regions

Komite Direktur Board of Directors Committee	Ruang Lingkup Pembahasan Discussion Scope	Keanggotaan Direktur Director Membership
Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi	Pembentukan AP, Akuisisi Perusahaan menjadi AP, Penyertaan atau Pelepasan Modal pada AP/Afiliasi, Penggabungan, Pemisahan, Peleburan dan Pembubaran AP/Afiliasi, Pembentukan Yayasan, Pembebanan Biaya Perseroan yang bersifat tetap untuk Yayasan/Organisasi Perkumpulan.	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Human Capital Management 3. Keuangan 4. Regional terkait
Subsidiary and Affiliation Committee	Subsidiary Establishment; Company Acquisition into Subsidiary; Equity Participation or Withdrawal in Subsidiary/ Affiliation; Merger, Separation, Consolidation and Dissolution of Subsidiary/Affiliation; Foundation Establishment; Charging fixed company costs for foundation, organization, and/or association.	Directors in Charge: 1. Planning 2. Human Capital Management 3. Finance 4. Related Regions
Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset	Penghapusan ATTB, PRR, Piutang Macet, Persediaan atau Material, Pelepasan dan Penghapusan Aktiva Tetap (kecuali Aktiva Beroperasi) dengan Umur Ekonomis s/d 5 tahun.	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Keuangan 3. Regional terkait
Asset Removal Committee	Removal of ATTB, PRR, Accounts Receivables, Inventory or Material, Property Removal (except assets in operation) with economic life up to 5 years	Directors in Charge: 1. Planning 2. Finance 3. Related Regions
Komite Operasional	Sewa Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Sistem Grid Code dan Sistem Operasional Tenaga Listrik Lainnya.	Direktur yang membidangi: 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Keuangan 4. Regional terkait
Operational Committee	Power Plant Rent, Transmission, Distribution, Grid Code System and Other Electrical Power Operational System.	Directors in Charge: 1. Planning 2. Procurement 3. Finance 4. Related Regions

Selama Tahun 2015 Komite Direktur telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Komite dan Keputusan Rapat tersebut diratifikasi dalam Rapat Direksi.

In 2015 the Board of Directors Committees held meeting where the Committee Members attended, and the Meeting Decision was ratified in Board of Directors Meeting.

Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Secretary

In order to ensure that Board of Commissioners perform their duties smoothly, Board of Commissioners may be assisted by Board of Commissioners' Secretary appointed by Board of Commissioners and paid by Company.

Board of Commissioners' Secretary possesses a function to provide administrative and secretarial supports for Board of Commissioners in order to facilitate Board of Commissioners in performing duties.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/ informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Memfasilitasi kegiatan Dewan Komisaris.
6. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Selama tahun 2015 Sekretariat Dewan Komisaris telah:

1. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat lainnya sejumlah 64 kali rapat.
2. Membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris sejumlah 55 risalah.
3. Membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris 2014.
4. Membuat Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2015.
5. Mengadministrasikan surat-surat yang masuk atau ditujukan kepada Dewan Komisaris sejumlah 855 surat, dan surat-surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris baik sebagai jawaban dari surat masuk, mau pun dalam jenis surat lainnya sejumlah 263 surat.
6. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris sebanyak 9 kali dengan jumlah yang dikunjungi sebanyak 40 Unit/Proyek PLN dan 4 Anak Perusahaan.
7. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke luar negeri sebanyak 2 kali.

Duties of Board of Commissioners' Secretary

Board of Commissioners' Secretary performs the following duties:

1. Holding secretarial activities in Board of Commissioners' scope.
2. Coordinating provision of information required by Board of Commissioners, such as routine reports from Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Supervisory Unit Reports) as well as other reports/information about Company;
3. Finalizing reports which are the obligations of Board of Commissioners, such as Board of Commissioner Supervision Report;
4. Holding Board of Commissioners meetings, preparing and sending invitations, submitting meeting materials, writing minutes of meeting, as well as other related tasks;
5. Facilitating Board of Commissioners' activities;
6. Administering minutes of meeting and other Board of Commissioners' documents as well as delivering meeting decision to related parties.

Activities of Board of Commissioners' Secretary

Throughout 2015 the Board of Commissioners Secretary

1. Held BOC's meetings and other meetings totaled 64 meetings
2. Conducted and managing the minutes of meetings of the Board of Commissioners with total 55 minutes of meetings
3. Compiled the 2014 Board of Commissioners Supervisory Report.
4. Compiled the 2015 Work Plan and Board of Commissioners KPI
5. Administered incoming letters or addressed to the Board of Commissioners about 855 letters, and letters issued by the Board of Commissioners as the response of incoming mail, and even in other types of letter with total 263 letters
6. Organized 9 times of Board of Commissioners and Board of Commissioners' Committee work visit with number of location of 40 PLN Units/Projects and 4 Subsidiaries.
7. Held 2 times of Board of Commissioners work visit abroad

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada uraian "Data Perusahaan - CV - Sekretaris Perusahaan (Halaman 523).

Dasar Penunjukan

Kebijakan Regulator yang dijadikan sebagai acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan oleh PLN antara lain:

1. Keputusan Ketua Bapepam IX.I.4 No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35./POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penata usahaan dan penyimpanan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat *(public relations)* dan hubungan investor;
3. Bekerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan Hukum Korporat.
4. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;
5. Menyiapkan Laporan Tahunan, Laporan Manajemen dan Laporan Statistik; dan
6. Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut.

Sekretaris Perusahaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary Profile

A profile of the Corporate Secretary can be seen in "Company Data – CV – Corporate Secretary" (page 523).

Bases of Selection

Regulations which are used by PLN as guidelines in forming Corporate Secretary are:

1. Chairman of Capital Market Supervisory Agency Decree Num. Kep-63/PM/1996 about Corporate Secretary Establishment.
2. SOE State Minister Regulation Num. PER-01/MBU/2011 about Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprise, which was amended with PER-09/MBU/2012.
3. Regulation of Financial Services Authority (FSA) Num. 35. /POJK.04 / 2014 on Corporate Secretary for Public Listed Company.

Corporate Secretary's Duties

Board of Directors appoint one Corporate Secretary with following duties:

1. Conducting activities related to administration and company document storage, including but not limited to Special List, Shareholder List, Directors or GMS Minutes of Meetings.
2. Conducting activities related to public relations and investor relationship;
3. Cooperating with function which handles Corporate Law
4. Coaching and controlling corporate governance
5. Preparing Annual Report, Management Report and Statistical Report; and
6. Acting as communicator between Board of Directors and GMS or Board of Commissioners.

Corporate Secretary is responsible to Board of Directors in performing duties.

Resume Kegiatan Sekretaris Perusahaan
Summary of Corporate Secretary Activities

Kegiatan Activity	**Jumlah** Total
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	2 kali times
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) General Meeting of Bondholders	-
Conference Call and Investor Update	2 kali times
Analyst Update & Analyst Meeting	3 kali times
Road show	4 kali times
Press Release	78 kali times
Press Briefing	2 kali times
Press Visit	7 kali times
Press Conference	3 kali times

PT PLN (Persero) juga menyampaikan berbagai informasi terkait operasional perusahaan dalam rangka keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK maupun melalui Siaran Pers, diantaranya mencakup:

On the means of information disclosure, PT PLN (Persero) also communicated various information related to company operations to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) or through Press Release, such as:

Tanggal Date	Judul Title
Januari January	
09 Januari January	PLN dan PT Len Tandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTS Kupang PLN and PT Len Sign Kupang Solar Cell Power Plant Electrical Power Purchase Agreement
13 Januari January	Menteri ESDM Terbitkan Peraturan Menteri Percepatan Pembangunan Listrik 35 Gigawatt Energy Minister Issues Ministerial Regulation of 35 Gigawatt Electricity Development Acceleration
Februari February	
11 Februari February	PLN Jalin Kemitraan Dengan Perusahaan Listrik Perancis PLN Teams Up with French Electricity Company
12 Februari February	*Coffee Morning* Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015 Coffee Morning Socialization of Energy Ministerial Regulation Num. 3 of 2015 and Energy Ministerial Decision Number 0074 K/21/MEM/2015
13 Februari February	PLN Bekerja Sama Dengan Kejaksaan Tangani Masalah Hukum Perdata PLN Collaborates with AGO to Handle Civil Law Issues
18 Februari February	Upaya PLN Mengatasi Krisis Listrik Di Sumatera Utara Terkendala Pengrusakan/Pencurian *Member Tower* PLN's Efforts to Overcome Electricity Crisis in North Sumatra Hampered by Man Bracing Destruction/Theft
23 Februari February	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo, PLN Percepat Pembangunan Pembangkit Baru Support Gorontalo's Economic Growth, PLN Steps Up New Plant Development
27 Februari February	Polisi Tangkap Pencuri *Member Tower* Transmisi Pangkalan Susu Police Arrest Pangkalan Susu Transmission Main Bracing Thief
Maret March	
04 Maret March	Menjawab Tantangan untuk Menerangi Seluruh Pelosok Tanah Air dan Menjadi Perusahaan Kelas Dunia Taking the Challenge to Brighten Entire Archipelago and Becoming World-Class Company
05 Maret March	PLN Tandatangani Kerja Sama Hukum Dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Luar Jawa Bali Sumatera PLN Signs Legal Cooperation with High Court Chiefs Outside Java-Bali-Sumatra
08 Maret March	PLN Siap Operasikan Jaringan Transmisi 150 kV Poso – Palu Sepanjang 284 Kms PLN Prepares Poso – Palu 150 kV Transmission Network of 284 Km
09 Maret March	PLN Buka Lelang LNG Untuk Pembangkit Di Indonesia Tengah Total 2.800 MW PLN Opens LNG Bidding for Plant in Central Indonesia Totaling 2,800 MW
09 Maret March	Transmisi Listrik 150 kV Poso – Palu Resmi Beroperasi Polo - Palu 150 kV Transmission Officially Operates
09 Maret March	PLN Perkuat Kelistrikan Sumatera Utara Dengan Gas Regasifikasi Arun PLN Strengthens North Sumatra Electricity with Gas of Arun Re-gasification
20 Maret March	PLN Bekerja Sama Dengan TNI Jaga Pasokan Batubara PLN Collaborates with TNI to Maintain Coal Supply
21 Maret March	Nyepi, Beban Listrik Di Bali Turun Drastis Nyepi Day, Electricity Load in Bali Plunges
27 Maret March	PLN Ajak Pegawai dan Masyarakat Dukung *Earth Hour* PLN Calls for Employees, General Public to Support Earth Hour
29 Maret March	*Earth Hour* 2015, Beban Jakarta dan Jabar Turun 2015 Earth Hour, Jakarta's and West Java's Load Drops
31 Maret March	PLN Tandatangani Dua PPA PLTMH Cianten PLN Signs Two PPAs of Cianten Micro Hydro Power Plant

Tanggal Date	Judul Title
April	
01 April	PLN Gelar Konsultasi Pasar Undang Pemasok Gas Holding Market Consultation, PLN Invites Gas Suppliers
02 April	Tarif Listrik Rumah Tangga 1.300 VA dan 2.200 VA Tidak Naik Bulan Ini House-hold Electricity Rates of 1,300 VA, 2,200 VA Remain for This Month
05 April	Optimalkan PLTMG Waymon, PLN Sorong Hemat Rp160 Juta per Hari Optimizing Waymon Gas Engine Power Plant, PLN Sorong Saves Rp160 Million a Day
07 April	PLN Tidak Berencana Menaikkan Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga 1.300 VA dan 2.200 VA Hingga Desember 2015 PLN Not Plans to Raise 1,300 VA, 2,200 VA Electricity Rates Up to December 2015
10 April	PLN Tandatangani Forex Line Dengan 3 Bank BUMN PLN Signs Forex Line with 3 SOE Banks
14 April	Pemerintah dan PLN Komit Garap Proyek 35.000 MW Bersama Investor Government and PLN Committed to Undertake 35,000 MW Project with Investors
18 April	PLN Kerahkan Ratusan Petugas Amankan Listrik KAA PLN Deploys Hundreds of Officers to Secure AAC's Electricity
23 April	Pemerintah Menerapkan Syarat Ketat Dalam Penetapan Investor Proyek 35.000 MW Government Applies Strict Requirements in Appointing 35,000 MW Project Investor
Mei May	
04 Mei May	Program 35.000 MW: Lebih Menjangkau, Menggerakkan, dan Berkelanjutan 35,000 MW Project; Farther Outreach, More Engaging, More Sustainable
19 Mei May	Solusi Permanen Tanggung Jawab Bersama Permanent Solution, Common Responsibility
19 Mei May	Perbaikan PLTU butuh waktu lebih lama Steam power plant repair takes longer time
Juni June	
04Juni June	Penyesuaian Tarif Listrik Periode Juni 2015 Electricity Rate Adjustments for June 2015
Juli July	
29 Juli July	Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Semester I 2015 PT PLN Financial Statement of 1st Semester 2015
Agustus August	
12 Agustus August	Program "BUMN Hadir Untuk Negeri" "BUMN Hadir Untuk Negeri" (SOE is there for the country) Program
19 Agustus August	PLN Tandatangani PPA Pembangkit EBT Sebesar 622 Mega Watt di Ajang EBT Conex PLN Signs EBT Plant's PPA with Capacity of 622 MW in EBT Conex Event
28 Agustus August	Presiden Jokowi Resmikan *Construction Kick-off* Pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Dan Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan President Jokowi Inaugurates Batang Steam Power Plant Jawa Tengah 2x 1,000 MW Construction Kick-off and Electrification Program in 50 Locations in Bordering Islands and Areas.
September	
11 September	Perkuat Kelistrikan Gorontalo, PLN Bangun PLTG Gorontalo 100 MW Strengthening Gorontalo's Electricity, PLN Builds Gorontalo Gas Turbine Power Plant of 100 MW
15 September	PJB Tandatangi HoA dengan Nebras Power PLN Java Bali Generation Company Signs HoA with Nebras Power
18 September	Proyek 35.000 MW: PLTU Lontar Ekspansi 1×315 MW Siap Dibangun The 35,000 MW project Lontar Steam Power Plant 1x 315 MW Expansion Ready to Build
22 September	PLN Terjunkan Tim Gabungan Percepat *Recovery* Pasokan Listrik PLTA Poso Akibat Gangguan Transmisi 150 kV PLN Deploys Joint Team to Step Up Poso Hydro Power Plant Electricity Supply Recovery, Due to Disturbance to 150 kV Transmission

Tanggal Date	Judul Title
Oktober October	
07 Oktober October	KNIFE 2015: 270 Karya Inovasi PLN Ciptakan Potensi Hemat Lebih dari Dua Triliun Rupiah KNIFE 2015: 270 PLN's Innovation Works Create Potentials of Saving Over 2 B Rupiah
08 Oktober October	PLN Turut Menggairahkan Ekonomi Indonesia Melalui Paket Ekonomi Oktober 2015 PLN Also Stimulates Indonesia's Economy Through Economic Package in October 2015
23 Oktober October	Proyek 35.000 MW: PLTU Cirebon Ekspansi 1×1.000 MW Siap Dibangun The 35,000 MW project Lontar Steam Power Plant 1x 1,000 MW Expansion Ready to Build
23 Oktober October	PLN Gandeng Waskita Karya Bangun Tol Listrik Sumatera Sepanjang 395 Kilometer PLN Teams Up with Waskita, Build 395 km Sumatra Electricity Toll
27 Oktober October	Bersama Menerangi Nusantara, Peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 Tahun 2015 Brighten the Archipelago Together, 70th National Electricity Day Commemoration in 2015
27 Oktober October	Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Triwulan III 2015 PT PLN Financial Statement of Q3/2015
29 Oktober October	Kemarau Panjang, PLTA Tidak Bisa Beroperasi Maksimal Prolonged Dry Season, Hydro Power Plant Cannot Operate Maximally
30 Oktober October	PLN Tandatangani PPA PLTU Cilacap Ekspansi 1.000 MW PLN Signs PPA of Cilacap Steam Power Plant Expansion 1,000 MW
November	
02 November	*Groundbreaking* Pabrik Air-*Insulated Switchgear* Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan Ekstra Tinggi (TET) Pertama di Indonesia Milik PT Crompton Prima Switchgear Indonesia PT Crompton Prima Swithgear Indonesia's High Voltage and Extra-High Voltage Switchgear Air-Insulated Factory is Groundbreaking, First in Indonesia
04 November	PLN Tandatangani Perjanjian Kerjasama Strategis dengan Lima BUMN PLN Signs Strategic Cooperation Agreement with 5 SOEs
06 November	Beban Puncak Listrik Jawa-Bali Tembus 24.258 MW Java-Bali Electricity Peak Load Surpasses 24,258 MW
09 November	Pulihkan Listrik Palangkaraya, PLN Bangun Tower Darurat Recovering Palangkaraya's Electricity, PLN Builds Emergency Tower
10 November	PLN Perbaiki Rumah yang Rusak Tertimpa Tower Roboh PLN Repairs Houses Hit by Collapsing Tower
11 November	Warga Palangka Raya Bantu Pembangunan Tower Sementara Palangkaraya Residents Help Temporary Tower Construction
12 November	Pelanggan PLN Palangka Raya Manfaatkan Posko Tanggap Darurat PLN Palangkaraya Customers Benefit the Emergency Response Shelter
12 November	Kredit Sindikasi Pendanaan PLTU Riau 2X110 MW Dijamin Pemerintah Riau Steam Power Plant 2x 110 MW Financing Syndicate Credit Protected by Government
12 November	Cuaca Ekstrem, PLN Terus Kebut Pembangunan Tower Extreme Weather, PLN Steps Up Tower Construction
13 November	TNI Ikut Serta Percepat Pembangunan Tower TNI Joins in Tower Construction Acceleration
14 November	Konstruksi Tower *Emergency* Telah Berdiri Emergency Tower Construction Begins
16 November	Proses Pengerjaan Tower Darurat Terhambat Cuaca Emergency Tower Construction Hampered by Weather
17 November	Listrik Palangka Raya Kembali Normal Palangkaraya Electricity Starts Recovering
19 November	PLN Terus Perkuat Kelistrikan Kupang PLN Continues Strengthening Electricity in Kupang

Tanggal Date	Judul Title
22 November	Listrik Kupang Kembali Normal Kupang's Electricity Returns to Normal
25 November	Seminar Bendungan Besar Sebagai Ajang Inovasi Teknologi Pembangunan Bendungan Seminar of Large Dam as Dam Construction Technology Innovation
25 November	PLN Tandatangani PPA Proyek IPP PLTU Bengkulu 2 x 100 MW PLN Signs PPA of IPP Bengkulu Steam Power Plant 2 x 100 MW
27 November	Bersama Berbagi 1000 Keceriaan Dengan Anak Yatim Share Joy in Thousand Ways with Orphans
29 November	*Tariff Adjustment* Desember 2015 Electricity Rate Adjustments in December 2015
Desember December	
07 Desember December	PLN Peroleh Pinjaman Langsung dari ADB PLN Pockets Direct Loan from ADB
08 Desember December	PLN Siapkan Kapal Perkuat Pasokan Listrik di Berbagai Daerah PLN Prepares Ship to Strengthen Power Supply in Regions
14 Desember December	Peringati Hari Nusantara, PLN bertekad terangi Bangsa Commemorating Archipelago Day, PLN Aims to Brighten the Country
14 Desember December	PLN Selenggarakan *Assesment* PLN Berintegritas PLN Holds PLN Assessment with Integrity
15 Desember December	PLN Konsisten Menjalankan Keterbukaan Informasi Publik PLN Consistently Applies Public Information Transparency
17 Desember December	6 Bank Dalam Negeri Dukung PLN Wujudkan 35.000 MW 6 Local Banks Support PLN's 35,000 MW Realization
18 Desember December	PLN Tambah Transmisi, Pasokan Listrik Jakarta Semakin Kuat PLN Adds Transmission, Jakarta's Electricity Supply More Robust
22 Desember December	17.340 MW Pembangkit Listrik Program 35 Ribu MW Siap Dibangun 17,340 MW Plant of 35,000 MW Program Ready to Construct
29 Desember December	Tarif Listrik Januari 2016 Turun Electricity Rate Drops in January 2016
30 Desember December	PLN Optimalkan Pembangunan Infrastuktur Kelistrikan PLN Optimizes Electricity Infrastructure Development
31 Desember December	PLN Berlakukan Piket Siaga Jelang Tahun Baru PLN Applies Stand-by Turns for New Year
31 Desember December	Efisiensi Berdampak Pada Penurunan Tarif Efficiency Affects Electricity Rate Decrease

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2015 Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan dan *workshop* antara lain:

1. *Workshop* Kebijakan Korporasi dan Perspektif Hukum yang diselenggarakan oleh satuan hukum PLN.
2. *Workshop* sertifikasi dan Standarisasi Produk-produk BUMN yang diselenggarakan oleh Kementrian BUMN.
3. *Bali Energy Forum.*
4. *Workshop* Pembangunan Kabel Laut Tegangan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Bappenas.

Corporate Secretary Training Program

During 2015, the Corporate Secretary took part in training and workshops, including:

1. Workshop on Corporate Policies and the Legal Perspective held by PLN's legal unit.
2. Workshop on SOE Product Standardization and Certification held by the SOE Ministry.
3. Bali Energy Forum.
4. Workshop on Constructing High Voltage Submarine Cables held by the Ministry of National Development Planning.

RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO

RISK AND RISK MANAGEMENT

Dalam rangka mengembangkan agar dapat mencapai tingkat maturity yang lebih tinggi, PLN memperbaiki penerapan manajemen risiko yang telah ada. PLN telah membuat sistem pelaporan manajemen risiko berbasis aplikasi untuk membantu menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan lebih efektif. PLN juga terus mengembangkan implementasi *Business Continuity Management System* (BCMS) untuk memastikan efektivitas mitigasi risiko dan keberlanjutan usaha.

In order to develop and achieve higher levels of maturity, PLN is improving the application of its existing risk management. PLN has created an application-based risk management reporting system to help implement Enterprise Risk Management (ERM) more effectively. PLN also continues to develop implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) to ensure the effectiveness of risk mitigation and business continuity.

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, maka PLN menjalankan manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan profil risiko yang akan dihadapi dan berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut.

Dalam rangka mengelola risiko-risiko tersebut, Perseroan telah meletakan dasar-dasar untuk menerapkan implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan kaidah *best practice*. Sejak tahun 2011, PT PLN (Persero) telah menggambarkan Profil Risiko Perusahaan untuk mencapai sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang didasarkan pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko sesuai KEPDIR No. 537.K/DIR/2010 yang saat ini telah diperbaharui menjadi PERDIR No. 0355.K/DIR/2014.

In accordance with the Decree of the Ministry of State Owned Enterprises (SOE) Num. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs, PLN implements risk management by constantly paying attention to the risk profile it faces, and strives to mitigate such risks.

In order to mitigate such risks, the Company has established the foundation for risk management based on best practices. Since 2011 PT PLN (Persero) has described the Risk Management Profile to achieve its Work and Budget Plan (RKAP) targets, based on the Risk Management Implementation Policy in accordance with the Decree of the Board of Directors Num. 537.K/DIR/2010 which has been amended by the Regulation of the Board of Directors Num. 0355.K/DIR/2014.

Dengan semakin membaiknya pengelolaan risiko PT PLN (Persero), maka diharapkan perkembangan tersebut dapat mendukung perubahan paradigma pengelolaan perusahaan dari *crisis management*, yang bersifat reaktif-korektif terhadap suatu permasalahan yang timbul, menjadi *risk management* yang berupa pengelolaan *preventif* sebelum suatu risiko benar-benar terjadi dan menjelma menjadi masalah bagi perusahaan.

The improvement of PT PLN (Persero)'s implementation of risk management is expected to support the change in the Company's paradigm from previously one of crisis management, that is reactive and corrective to any problem that arises, towards one that is more preventive, before a risk occurs to become a problem for the Company.

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesiapan *(preparedness)* Perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian *(uncertainty)* yang semakin tinggi di lingkungan global, regional maupun lokal yang berpotensi mengancam sumber daya dan bahkan kelangsungan Perusahaan.
2. Menjaga agar Perusahaan tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian *(prudent operation)* dalam setiap aktivitas yang dilakukannya sebagai bentuk tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* guna meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION GOALS

The implementation of Risk Management by the Company is intended to:

1. Increasing the Company's preparedness in facing increasing uncertainties in the global, regional and local environment, that has a potential to threaten the Company's resources and sustainability.
2. Maintaining the Company's business management to remain within the corridors of prudent operation in each of its activities, as a part of Good Corporate Governance in order to increase added value for the Company.

Lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Pada prinsipnya setiap pemilik risiko di Perusahaan berkewajiban mengelola risikonya, dan setiap proses bisnis wajib dikelola risikonya sesuai ketentuan Perusahaan.
2. Manajemen Risiko Perusahaan diterapkan pada
   a. Proses pengambilan keputusan;
   b. Proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional Perusahaan;
   c. Segenap proses bisnis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah proses pelaporan, dalam rangka *continuous improvement*;
   d. Aspek Kepatuhan *(Compliance)*.
3. Pada prinsipnya Manajemen Risiko diterapkan pada segenap unsur organisasi dalam Perusahaan, namun demikian baik pemantauan secara korporat dilakukan hanya sampai dengan Unit Induk dan Anak Perusahaan maupun risiko tertentu yang secara spesifik akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan
4. Dalam pelaksanaannya, Manajemen Risiko yang spesiflk pada bidang, fungsi, proses bisnis maupun kebutuhan tertentu dapat ditetapkan dalam ketentuan tersendiri, namun tetap mengacu pada Peraturan ini, diantaranya seperti namun tidak terbatas pada Manajemen Risiko Keuangan, Manajemen Risiko Proyek; Manajemen Risiko Teknologi Informasi; Manajemen Risiko Kecurangan *(Fraud)*, Manajemen Risiko Kelangsungan Usaha *(Business Continuity)*, dan Implementasi Pengendalian Internal (termasuk di dalamnya pengendalian internal dalam pelaporan keuangan /ICoFR).

The scope of Risk Management implementation is as follows:

1. In principle, it is compulsory for every risk owner in the Company to manage risks, and for every business process risk to be managed in accordance with the Company's regulations.
2. Risk Management is applied to:
   a. Decision-making process;
   b. Planning process and achievement of the Company's strategic and operational goals.
   c. The Company's entire business process, including reporting, in order to achieve continuous improvement.
   d. Compliance aspect.
3. In principle, risk management is implemented in all of the Company's organizational elements, however corporate monitoring is applied only on the level of the holding company and its subsidiaries, and on particular risks that will specifically affect the Company's business continuity.
4. In practice, Risk Management specific to each field, function, business process and requirement can be stipulated in separate provisions, although they must still refer to this Regulation, and these include, but not limited to: Financial Risk Management, Project Risk Management; Information Technology Risk Management; Fraud Risk Management, Business Continuity Risk Management, and implementation of internal control (including Internal Control Over Financial Reporting/ICoFR).

SISTIM PENGELOLAAN RISIKO

Dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan maupun pelaksanaan pengelolaan kegiatan lainnya, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *risk management* melalui implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM).

Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PLN disusun dengan menggunakan acuan utama ISO 31000: 2009 *(International Standard of Risk Management)*. Namun demikian beberapa hal seperti aspek *compliance*, lingkup penerapan, beberapa peristilahan, mengacu pada standar COSO – ERM, AS/NZS dan lain-lain.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

In order to achieve the Company's goals and manage its activities, the Company is committed to applying risk management by implementing Enterprise Risk Management (ERM).

The guideline for Risk Management Implementation in PLN is based on ISO 31000:2009 (International Standard of Risk Management). However there are several aspects such as compliance, scope of application, and terminologies that are based on COSO – ERM, AS/NZS, and other standards.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN STANDAR PROSES MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengelola risiko, Perseroan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Divisi MRK) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko tersebut dilingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk menyusun *risk profile* yang bersifat strategis sebagai *early warning* kepada manajemen Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat.

RISK MANAGEMENT STRUCTURE AND RISK MANAGEMENT STANDARD PROCESS

In order to manage risks, the Company has formed the Risk Management and Compliance Division (RMC Division) which is responsible for managing policy, framework, guidance of risk management implementation, risk management infrastructure, and socializing and implementing risk management in the Company's environs. This division is also responsible for reporting the strategic risk profile as an early warning to the Company's management. The Risk Management Division reports to the Director of Corporate Planning.

Perseroan melakukan pengelolaan risiko dalam suatu siklus pengelolaan risiko (atau penyusunan Kajian Risiko) yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

The Company manages risks in the Risk Management Cycle (or Risk Assessment Preparation) described in the following diagram:

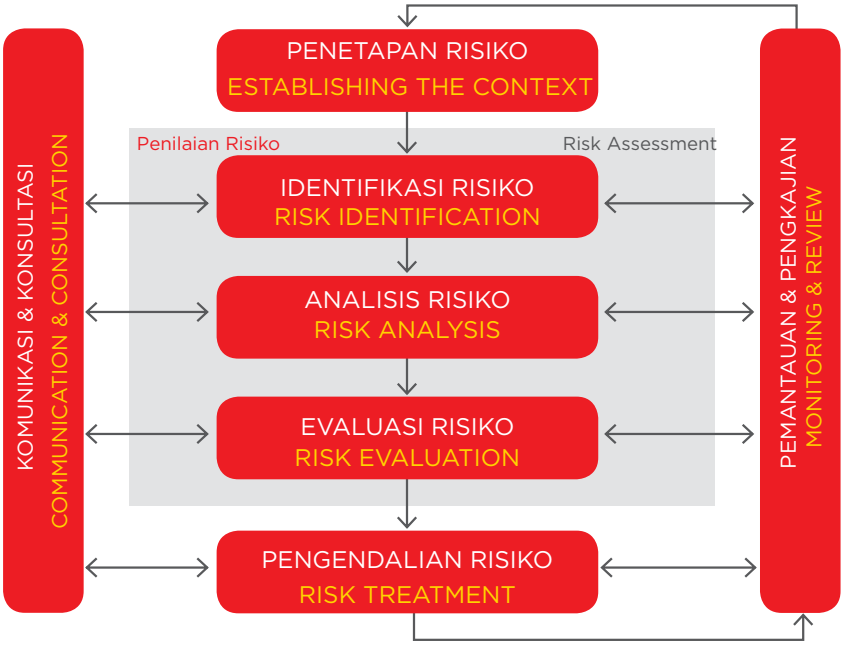

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, diantaranya adalah dengan memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam *Key Performance Indicators* Korporat, unit maupun Anak Perusahaan, audit manajamen risiko oleh auditor internal, *review* implementasi dan asesmen *risk maturity* oleh Pihak Independen, *risk management award (RMA), maupun pemantauan dan pelaporan kepada stakeholders.*

Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat, dengan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi. Profil risiko dimaksud meliputi laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional, proyek dan kepatuhan serta penilaian atas perbaikan kontrol dan penanganan risiko.

Unit kerja operasional selaku *risk owner* bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas yang dilakukan. Pemimpin unit kerja operasional bertanggung jawab mengidentifikasi risiko, menilai risiko yang ada di unit kerjanya dan memantau risiko termasuk memitigasi risiko dengan level ekstrem dan tinggi, kemudian melaporkan profil risiko serta tindak lanjut mitigasi yang dilakukan.

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

Monitoring and evaluating of risk management implementation are conducted through several mechanisms, such as by incorporating aspects of Risk Management into the Company's and subsidiaries' KPIs, conducting the risk management audit by the Internal Supervisory Unit, reviewing implementation and risk maturity assessment by an independent party, the Risk Management Award (RMA), and monitoring and reporting to stakeholders.

In its implementation, the Compliance and Risk Management Division conducts periodic evaluation of the effectiveness of the Company's risk management system, and reports the Risk Profile to the Board of Directors. The Risk Profile includes strategic risk management, financial, operational, project, and compliance reports, as well as an assessment of the control and risk management improvements.

Operational working units as risk owners are responsible for managing risks in all activities. The Head of an Operational Working Unit is responsible for identifying, rating, monitoring and mitigating high and extreme levels of risk, reporting risk profiles and performing mitigation.

PELAKSANAAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* (ERM)

Dalam rangka mengembangkan agar dapat mencapai tingkat *maturity* yang lebih tinggi, PLN memperbaiki penerapan manajemen risiko yang telah ada. Untuk tahap awal, PLN membuat sistem pelaporan manajemen risiko berbasis aplikasi sehingga akan mempermudah proses pemantauan dari profil risiko. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk membantu PLN dalam implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan lebih efektif dengan mengunakan *software* untuk *data entry*, *cataloging* dan juga database untuk membantu menganalisa daftar risiko dan *tracking* implementasi program mitigasi risiko.

PLN juga melaksanakan program *Project Risk Analysis* untuk melakukan review dan analisis risiko-risiko yang terkait dengan proyek di PLN, dengan *pilot project* pada Proyek Pangkalan Susu 3 dan 4 (2 x 200 MW) dan Proyek Jawa Bali Crossing. Yang tidak kalah penting, PLN juga sedang mengembangkan dan mengimplementasikan *Business Continuity Management System* (BCMS) untuk membantu PLN dalam membangun dan mengimplementasikan sebuah *business continuity plan* yang ringkas dan teratur.

Business Continuity plan ini akan digunakan oleh PLN untuk secara efektif mengurangi efek samping dari sebuah krisis dan untuk memulai kembali kegiatan usaha setelah mengalami gangguan.

Program-program tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan PLN untuk mencapai target *Maturity Level* ERM 3,5 di tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut, PLN telah memetakan *maturity level* ERM di awal tahun, kemudian melakukan *Gap Analysis* untuk menentukan program kerja yang perlu dilaksanakan oleh PLN secara korporat untuk mencapai maturity level ERM 3.5 dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya tersebut melibatkan Asesor independen yang melakukan pengukuran maturity level.

Metode Pengukuran maturity level menggunakan metode *Six Element of Infrastructure* yang dikombinasikan dengan *Capability Maturity Model* yang dikembangkan oleh *Carnegie Melon University*. *Six Element of Infrastructure* adalah 6 elemen atau aspek yang dilihat untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan risiko.

Berdasarkan penilaian dengan metode tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko di PT PLN (Persero) telah melampaui tingkat *Defined*. Penilaian tersebut berdasarkan penilaian rata – rata pada 8 (delapan) unit, anak perusahaan dan divisi yang disampling dengan menggunakan bobot tertimbang jumlah risiko korporat yang dikelola oleh masing – masing unit, anak perusahaan atau divisi tersebut.

IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

In order to achieve a higher level of maturity, PLN improves its risk management implementation. In the initial phase, PLN created a risk management reporting application to improve the risk profile monitoring process. The main goal of this application is to support PLN in implementing Enterprise Risk Management (ERM) more effectively, by using data entry, cataloging and a database software to analyze a list of risks, and to track the implementation of the risk mitigation program.

PLN also conducts Project Risk Analysis to review and analyze project risks in its projects, with the pilot projects being the Pangkalan Susu Project 3 and 4 (2x200MW), and the Java–Bali Crossing Project. More importantly, PLN is also developing and implementing the Business Continuity Management System (BCMS) to support the formulation and implementation of a concise and well-organized business continuity plan.

The Business Continuity plan will be used by PLN to effectively reduce the adverse effects of a crisis and to restart business activities after an interruption.

Such programs are a continuation of the efforts made to achieve the target of ERM Maturity Level of 3.5 in 2014. To achieve this target, PLN mapped the maturity level ERM at the beginning of the year and conducted a Gap Analysis to determine the subsequent Company programs necessary to achieve it, based on the criteria stated in advance. The effort also involved an independent assessment of the risk management maturity level.

Maturity levels measurement methods of utilizing the Six Elements of Infrastructure method combined with Capability Maturity Model, which was developed by Carnegie Mellon University. The Six Elements of Infrastructure are six elements or aspects used to measure the risk management maturity level.

Based on a review of the methods described above, it can be concluded that the maturity level of PT PLN (Persero)'s risk management system has exceeded the Defined level. This review is based on an average score of eight units; subsidiaries and divisions were sampled using indicators weighted by the number of corporate risks managed by each unit, subsidiary or division.

Risk Market Survey 2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan pembangkit dan gardu induk, PLN bekerja sama dengan pihak asuransi, telah melakukan kegiatan *risk market survey* yang bertujuan untuk mengetahui hal–hal yang dapat menjadi risiko di pembangkit dan gardu induk.

Pembangkit yang di-*survey* adalah pembangkit dengan kapasitas di atas 25 MW yang termasuk di dalam polis asuransi PLN, sedangkan untuk gardu induk yang di-*survey* adalah Gardu Induk Ekstra Tegangan Tinggi (GITET) 500kV. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh PLN untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi pada pembangkit dan gardu induk. Kegiatan telah dimulai pada akhir bulan April 2015 dan sudah selesai pada akhir bulan Juni 2015.

Dari hasil rekomendasi tersebut PLN telah menyusun program pengelolaan dan mitigasi risiko-risiko potensial dari Pembangkit dan Gardu Induk.

2015 Risk Market Survey

In order to improve the quality of risk management implementation, especially risks related to power plants and substations, PLN cooperates with insurance parties on a risk market survey in order to understand the risks of power plants and substations.

The power plants surveyed were power plants with a capacity of more than 25 MW which were included in PLN's insurance policy, while substations surveyed were Extra High Volt Substations (EHVS) 500kV. The result of this survey is the recommendation for PLN to minimize possible risks that may affect power plants and substations. This activity was initiated in the end of April 2015 and completed in June 2015.

Based on this recommendation, PLN developed a program for managing and mitigating potential risks to power plants and substations.

PROFIL RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN 2015

Penyusunan Profil Risiko Tahun 2015 dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan fokus perusahaan tahun 2015, yang telah diselaraskan dengan sasaran jangka panjang perusahaan. Risiko-risiko yang diidentifikasi dalam Profil Risiko Korporat Tahun 2015 terdiri dari risiko-risiko dengan level Ekstrem, Tinggi, Moderat dan Rendah. Perseroan kemudian fokus melakukan proses mitigasi terhadap risiko dengan profil ekstrim.

Profil Risiko Perusahaan tahun 2015 yang diuraikan berikut adalah *key risks*, yaitu risiko-risiko yang secara dominan berpotensi mempengaruhi sasaran perusahaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. **Risiko tidak diperolehnya pendanaan yang memadai untuk Investasi**
   Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjaga keandalan penyediaan listrik kepada masyarakat, PLN membutuhkan pendanaan yang memadai setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pengembangan fasilitas penyediaan tenaga listrik. Atas hal ini, PLN menghadapi risiko tidak diperolehnya pendanaan yang memadai untuk investasi, melemahnya kemampuan pendanaan investasi yang berupa potensi hambatan pada proses penyediaan pendanaan seperti keterbatasan kapasitas pendanaan dari ekuitas maupun pinjaman dari Perbankan serta Pasar Modal dalam negeri.

2015 CORPORATE RISK PROFILE AND MANAGEMENT

The 2015 Risk Profile of PLN was compiled based on the Company's goals and focus in 2015, aligned with the Company's long-term goals. Risks identified in the 2015 Company Risk Profile include risks with extreme, high, moderate and low levels. The Company focus is on the risk mitigation process of extreme level risks.

The 2015 Company Risk Profile below describes the key risks, which are dominant risks with the potential to affect the Company's goals:

1. **Risk of Insufficient Investment Funding**
   In order to increase the electrification ratio and maintain the reliability of electricity provision to the public, every year PLN needs sufficient funds to fulfill investment requirements in order to improve its facilities and provision of electricity. Consequently, PLN faces the risk of being unable to obtain sufficient funding for investment, because of limited capacity for obtaining bank loans and funding from the domestic capital market.

Risiko ini dapat terjadi disebabkan antara lain *debt covenant* yang dimiliki PLN terutama *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang terus mengalami penurunan di bawah ambang batas, hingga akhirnya Pemerintah meminta *lender* untuk mem-*waiver*. Pembatasan jaminan Pemerintah dalam skema SLA (*Subsidiary Loan Agreement*) menyebabkan sumber pendanaan melalui pinjaman baru semakin terbatas. Selain itu proses persetujuan usulan pendanaan jangka panjang memakan waktu lama dan ketidakpastian pendanaan *multi years* untuk program APBN juga menghambat terpenuhinya kebutuhan dana yang optimal secara tepat waktu. Risiko ini akan membawa dampak melemahnya kemampuan pendanaan Perusahaan dan tertundanya program investasi strategis yang mendukung pertumbuhan, efisiensi (*fuelmix*) dan penguatan *reserve margin* yang pada akhirnya dapat berakibat pada pemadaman.

This risk can occur due to PLN's debt covenants, mainly Debt Service Coverage Ratio (DSCR), which is steadily declining below the threshold, until at last the Government requested the lender to waive the debts. The restriction on Government guarantees in the Subsidiary Loan Agreement (SLA) scheme affects the limited sources of new funding loans. Furthermore, approval of purposed long-term funding takes a long time, while the uncertainty of multi-year funding for APBN programs is also an obstacle to the optimal fulfillment of funding requirements in a timely manner. This risk affects the Company's weakening funding capacity to support growth, efficiency (fuel mix) and strengthening of the reserve margin, which will result in power outages.

Mitigasi (rencana penanganan risiko) yang dilakukan antara lain: (i) menjaga *covenant* dan mengkoordinasikan perbaikan *rating* PLN, (ii) memfokuskan pada penyelesaian proses pendanaan jangka panjang melalui GMTN (*Global Medium-Term Note*), (iii) memaksimalkan perolehan kebutuhan pendapatan investasi jika konsep PBR diterapkan, (iv) memperbaiki struktur permodalan PLN melalui proses pengalihan APBN menjadi PMN sebesar Rp41 Trilyun atas aset yang telah beroperasi; (v) mengupayakan pinjaman dengan skema *direct lending*, bahwa PLN memperoleh pinjaman dari pihak *Lender* secara *business-to-business* (B2B) tanpa jaminan pemerintah, (vi) serta diupayakan pula pendanaan dari ECA (*Export Credit Agency*).

Mitigation measures have been carried out, such as: (i) maintaining covenant and coordinating the PLN rating improvement, (ii) focusing on completing the process of long-term funding by Global Medium-Term Note (GMTN), (iii) maximizing the investment income requirement if the PBR concept is applied, (iv) improving PLN's capital structure by diversion of State Budget into PMN of Rp41 trillion of operating assets; (v) seeking loans with direct lending schemes, which PLN will receive from business-to-business (B2B) lenders without a Government guarantee, (vi) and seeking funding from the Export Credit Agency (ECA).

2. **Risiko Terganggunya Cash Flow Operasional**
Dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan pada tahun 2015, diperlukan pendanaan operasi, baik untuk membeli bahan bakar, pemeliharaan, membayar pegawai dan juga untuk administrasi. Atas hal ini, PLN menghadapi risiko terganggunya kebutuhan *cash flow* operasi, baik ketidakpastian dalam penerimaan maupun dalam pengeluaran.

Risiko terganggunya *cash flow* dapat terjadi disebabkan antara lain karena keterbatasan alokasi subsidi dan ketepatan waktu pencairan, kegagalan pelaksanaan *tariff adjustment* yang sudah direncanakan, rencana penjualan yang tidak tercapai, kenaikan tren kurs Dollar di atas asumsi, dan terganggunya kinerja operasi pembangkit dan transmisi distribusi.

2. **Risk of Operational Cash Flow Disruption**
In order to achieve the Company's goals in 2015, operational funding was needed, in order to purchase fuel, and fund the maintenance, employee costs and administration. Therefore, PLN faced the risk of disruption to its operational cash flow needs, both in terms of the uncertainty of revenue and costs.

Risk of operational cash flow disruption may occur due to the limited subsidies and prolonged timelines of disbursements, lack of tariff adjustments, unfulfilled sales plans, an increase in the USD exchange rate above estimated levels, and disruption of power plants' operations and transmission distribution.

Adapun dampak yang ditimbulkan apabila risiko ini terjadi, antara lain hambatan penyelesaian pemeliharaan dan penurunan Citra Perusahaan karena pembayaran Pihak Ketiga terhambat, melemahnya kemampuan pendanaan internal Perusahaan, baik operasi maupun investasi, terjadi pemadaman dan tidak mampu membayar kewajiban kepada IPP.

Mitigasi (rencana penanganan risiko) yang dilakukan antara lain adalah: (i) mendorong terlaksananya *Performance Based Regulation* sesuai dengan best *practices*, (ii) mengkoordinasikan terlaksananya skema *tariff adjustment* dengan *stakeholder* terkait, (iii) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pemenuhan minimum *cash flow*, (iv) melanjutkan program *Cost Revenue Management Program* yang efektif, (v) mengoptimalkan skema Kredit Modal Kerja, dan (vi) memberi perhatian khusus untuk percepatan proses Pasang Baru dan tambah daya pelanggan potensial, terutama untuk daerah dengan BPP di bawah tarif rata-ratanya.

3. **Risiko Ketidaksiapan PLN dalam implementasi *Performance Based Regulation***
   Performance Based Regulation adalah suatu metode regulasi yang dikembangkan untuk mendorong perusahaan yang masih *regulated* baik monopoli maupun non monopoli untuk melakukan efisiensi biaya (*cost efficiency*) untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini direncanakan akan menggantikan skema subsidi yang sudah berlangsung selama ini, metode *cost plus margin*. Pendekatan PBR yang digunakan di PLN adalah *revenue cap*, d mana komponen yang dihitung adalah: *Allowed Revenues Generation* (ARG), *Allowed Revenues Transmission* (ART), *Allowed Revenues Distribution and Retail* (ARDR), *Allowed Revenues Corporate Functions* (ARC), *Allowed Costs of Existing Financial Obligations (cost of equity + debt service)*, CAPEX, dan Cadangan *Covenant*.

   Kunci utama pelaksanaan PBR adalah perencanaan PLN yang harus akurat dan tepat mengingat pemerintah tidak mengakomodir permintaan tambahan subsidi di luar dari hal-hal yang sudah disepakati.

   Risiko ini dapat terjadi disebabkan antara lain masih terdapat perbedaan persepsi antara PLN dan Pemerintah mengenai konsep PBR untuk PLN. Pemahaman mengenai implikasi PBR terhadap perubahan proses dan fokus bisnis PLN kurang difahami.

   Adapun dampak yang ditimbulkan apabila risiko ini terjadi, antara lain; subsidi yg telah disepakati tidak dapat menutup kebutuhan pendapatan operasional/ investasi. Ketidaklancaran pencairan subsidi, yang berakibat terganggunya likuiditas perusahaan. Penurunan reputasi dan kepercayaan *stakeholder* kepada perusahaan.

The impacts of this risk include hindrances to the completion of assets maintenance and a harm done to the Company's reputation owing to the delayed payments to third parties, while the Company's internal funding ability is weakened, both in terms of operational and investment needs, power outages occurring, and the Company being unable to fulfill its obligation to IPPs.

Mitigation measures have been carried out, such as: (i) supporting the implementation of Performance Based Regulation according to best practices, (ii) coordinating the tariff adjustment scheme with related stakeholders, (iii) intensifying coordination with MoF to fulfill the minimum cash flow, (iv) continuing the Cost Revenue Management Program effectively, (v) optimizing the Working Capital Credit scheme, and (vi) giving special attention to the acceleration of new installations and additional power for potential customers, especially for areas with lower-than-average cost of production.

3. **Risk of PLN's Unpreparedness for PBR Implementation**
   Performance Based Regulation is a regulation method developed to encourage regulated business entities (both monopolies and non-monopolies) to achieve cost efficiency and improve performance. It is planned that Performance Based Regulation will replace the subsidy scheme conducted previously, in the cost plus margin method. The Performance Based Regulation approach used by PLN is revenue cap, where the components considered are: Allowed Revenues Generation (ARG), Allowed Revenues Transmission (ART), Allowed Revenues Distribution and Retail (ARDR), Allowed Revenues Corporate Functions (ARC), Allowed Costs of Existing Financial Obligations (cost of equity + debt service), CAPEX, and Reserve Covenant.

   The main key to PBR implementation is PLN's planning that should be accurate and precise, as the Government does not accommodate requests for additional subsidies other than those previously agreed upon.

   This risk may be caused by differing perceptions of PLN and the Government regarding the concept of PBR for PLN. Understanding of the implication of PBR regarding change of processes and PLN's business focus is less clear.

   The impacts of this risk actually occurring include: subsidies that have been agreed to being insufficient to cover operational/investment income needs; the possibility of subsidy disbursement affecting the Company's liquidity; harmed reputation and declining stakeholders' trust in the Company.

Mitigasi yang dilakukan antara lain: (i) koordinasi dengan Kementerian terkait untuk penerapan PBR yang sesuai dengan konsep PBR yang telah berjalan baik di *best practice* (marjin terhadap aset dan insentif kinerja), (ii) sosialisasi dan internalisasi PBR dan implikasinya terhadap proses bisnis perusahaan; (iii) membentuk fungsi / Tim khusus sebagai koordinator pengelolaan subsidi dengan mekanisme PBR; (iv) memetakan dan memperbaiki kondisi dan operasi eksisting pembangkit dan penyaluran; (v) menata kembali perlakuan akuntansi terhadap status biaya kepegawaian AP, UIP, dsb serta pembukuan terpisah sesuai fungsinya, (vi) set-up *Key Performance Indicators* berbasis PBR, Optimalisasi OPI. Bersama kementerian terkait mengevaluasi keberhasilan implementasi PBR selama masa transisi beserta rekomendasi perbaikan, dan merencanakan kebutuhan pendapatan, biaya dan *baseline indicators* secara detail dan terpadu.

Pada akhir Desember 2015, telah terbit PMK No. 195/PMK.08/2015 serta KMK No. 1029/KMK.08/2015 terkait Implementasi PBR dimana PBR akan diterapkan pada tahun 2017.

4. **Risiko Kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap IDR**
Kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah sangat mempengaruhi kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Pengaruh mata uang USD sangat besar terhadap PLN sehubungan pinjaman porsi USD yang cukup signifikan (78,5%) dari total keseluruhan pinjaman, dan juga mengingat bahwa sebagian besar material pembangkit dan penyaluran merupakan produk impor yang biayanya dalam mata uang asing.

Dampak yang ditimbulkan dari risiko ini antara lain munculnya *cost overrun*, memicu *debt covenant* yang terlampaui dari batas yang ditentukan, termasuk DSCR terlampaui sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor/pemberi pinjaman terhadap kemampuan PLN menghasilkan laba (profitablitas).

Mitigasi (rencana penanganan risiko) yang dilakukan antara lain: (i) pemantauan secara ketat kebutuhan valas agar pembelian valas dapat dilakukan pada harga yang optimal, (ii) mengupayakan kontrak-kontrak ke depan dilakukan dalam mata uang rupiah, (iii) meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kegiatan operasi dan investasi, (iv) melaksanakan Peraturan BI (PBI) tentang *hedging*, dan (v) penyiapan material suku cadang melalui *reverse engineering*.

Mitigation measures have been carried out, such as: (i) coordinating with the ministries associated with the implementation of PBR in accordance with the PBR concept that has already been running well and in keeping with the best practices (margin on assets and performance incentives), (ii) disseminating and internalizing PBR and its implications for the Company's business processes; (iii) creating a special function or team to coordinate subsidy management with the PBR mechanism; (iv) mapping and improving the condition and operation of existing power plants and distribution systems; (v) reorganizing accounting treatment of the status of staffing costs to AP, UIP etc., as well as separate bookkeeping according to its function, (vi) setting up PBR-based KPIs and optimizing OPI. Together with relevant ministries, evaluation of the success of PBR implementation during the transition period, recommending improvements, planning revenue needs, and providing detailed and integrated costs and baseline indicators.

In the end of December 2015, PMK Num. 195/PMK.08/2015 and KMK Num. 1029/KMK.08/2015 on PBR implementation, which will be implemented in 2017.

4. **Risk of increase in foreign exchange rate against Rupiah**
The increase of the exchange rate of foreign currency against the Rupiah greatly affects PLN's ability to meet debt obligations. The USD has a huge influence on PLN, as a significant portion (75.8%) of total PLN loans are in USD, and also because a majority of the costs of power plant materials and distribution of the imported products are in foreign currencies.

The impact of these risks is because of the cost overrun, which triggers debt covenants that exceed specified limits, including exceeding of DSCR which may cause investors/lenders to doubt PLN's ability to generate profits (profitability).

Mitigation plans conducted, among others, are: (i) strict monitoring of demand for foreign currencies in order to purchase foreign currencies at the optimal price, (ii) settling future contracts in Rupiah, (iii) increasing Domestic Local Contract in operations and investments, (iv) implementing BI Regulations (PBI) on hedging, and (v) preparing spare parts materials by reverse engineering.

5. **Risiko Kenaikan harga energi primer**
   Risiko kenaikan harga energi primer sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (harga pasar). Dampak risiko ini di antaranya adalah terjadinya hambatan suplai bahan bakar ke PLN untuk kontrak jangka panjang; Peningkatan beban operasi dan Biaya Pokok Penyediaan dengan asumsi kenaikan 1 USD harga bahan bakar akan menyebabkan biaya operasi bertambah Rp3,9 Triliun ; dan Terjadi *overrun* subsidi.

   Beberapa rencana mitigasi yang dilakukan antara lain: (i) meningkatkan performa pembangkit non-BBM, khususnya pada aspek *heat rate* dan EAF; (ii) memantau tren harga energi primer secara berkelanjutan *sebagai early warning*; (iii) mengusulkan memperbesar porsi alokasi *Domestic Market Obligation*; (iv) optimalisasi pola operasi sistem dengan *merit order*; (v) melakukan koordinasi keselarasan jadwal pemeliharaan pembangkit, khususnya pembangkit non-BBM.

6. **Keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit dan penyaluran**
   Proyek–proyek pembangkit PLN yang saat ini sedang dalam fase–fase akhir proyek dimana 61% dari rencana *Commercial Operation Date* pembangkit tahun 2015 adalah luncuran dari tahun 2014. PLN memiliki risiko keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit dan penyaluran dikarenakan adanya hambatan pada proses perijinan dan pembebasan lahan proyek; Kontraktor tidak *perform*; Fasilitas pendukung penerimaan bahan bakar belum optimal; Jaringan untuk *backfeeding* atau untuk evakuasi daya belum siap; Tidak terbit ijin *multi years* untuk program APBN; Ketidakselarasan pengelolaan proyek pembangkit dan penyalurannya.

   Dampak jika risiko ini terjadi adalah terjadinya peningkatan biaya sewa dan biaya BBM pembangkit; Target *fuelmix* dan BPP yang telah ditetapkan tidak tercapai; *Deemed Dispatch / Take or Pay* (TOP), termasuk karena ketidakselarasan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi *associated*-nya; dan Terjadi pemadaman.

   Adapun rencana mitigasi yang dilakukan PLN adalah (i) meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian / Lembaga yang terkait melalui *Service Level Agreement*, khususnya terkait perijinan dan pembebasan lahan; (ii) memastikan kesiapan energi primer untuk *commissioning* dan operasional; (iii) penyempurnaan fasilitas penerimaan bahan bakar pada fase konstruksi; (iv) optimalisasi *Project Management Office* dalam pemantauan proyek; (v) memastikan kesiapan jaringan *backfeeding* maupun evakuasi daya pembangkit; (v) mengkoordinasikan ijin *multi years* untuk program APBN; (vi) memastikan program mitigasi risiko yang tertuang dalam Kajian Risiko Proyek dilaksanakan.

5. **Risk of increasing primary energy prices**
   The risk of increasing primary energy prices is affected by external factors (market price). The impact of this risk includes barriers to the supply of fuel to PLN for long-term contracts; increase in operational expenses and Cost of Production assuming an increase of 1 USD in fuel prices will result in operating costs increasing to Rp3.9 trillion; and subsidy overruns.

   Mitigation activities conducted, among others, are (i) improving the performance of non-fuel power plants, especially in terms of heat rate and EAF; (ii) monitoring the price trends of primary energy in a sustainable manner as an early warning; (iii) proposing to increase the share allocation of Domestik Market Obligation; (iv) optimizing system operation pattern with merit order, (v) coordinating the power plant maintenance schedule, particularly non-fuel power plants.

6. **Delayed completion of power plant and distribution project**
   Certain PLN projects are currently in the final phase, where 61% of the Commercial Operation Date power plant plan in 2015 is a continuation from 2014. PLN faces the risk of delays in completing the power plant and distribution project because of the obstacles of the licensing process and land acquisition; poorly-performing contractors; supporting fuel-receiving facilities are not optimal; distribution for backfeeding and evacuation is not ready; the multi-year license for the state budget is not issued; incompatibility between power plant project maintenance and its distribution.

   The impacts of these risks are increased rental costs and power plant fuel costs; fuel mix and Cost of Production target not reached; Deemed Dispatch/Take or Pay (TOP), including discrepancy of power plant project completion and associated transmission; and power outage.

   Mitigation measures have been carried out, such as: (i) improving coordination with the ministries/ institutions related to Service Level Agreement, and particularly related to license and land acquisition (ii) ensure readiness of primary energy for commissioning and operation; (iii) improving fuel reception facility during the construction phase; (iv) optimizing PMO in monitoring projects; (v) ensuring network readiness of back feeding and power plant evacuation power; (v) coordinating multi-year license for APBN program; (vi) ensuring the risk mitigation program stated in Risk Assessment Project is implemented.

7. **Risiko hambatan pada kontinyuitas pasokan batubara**
Gangguan kontinyuitas pasokan batubara dapat terjadi akibat faktor cuaca buruk dan transportasi batubara, permasalahan pada fasilitas *coal handling*, serta ketidakpastian harga pasar batubara.

Dampak yang dapat timbul apabila risiko ini tidak ditangani adalah tidak optimalnya produksi pembangkit PLTU yang akan berakibat pada kenaikan pemakaian BBM, target *fuelmix* yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai, peningkatan BPP dan *overrun* subsidi, serta dapat menyebabkan terjadinya pemadaman.

Beberapa rencana mitigasi yang dilakukan PLN antara lain: (i) melakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba untuk kepastian pasokan batubara melalui *Domestic Market Obligation*; (ii) mengkaji harga batubara secara B2B pada saat harga pasar lebih rendah daripada biaya operasi tambang; (iii) mengoptimalkan *availability* pembangkit non-BBM dan non-batubara, maupun IPP; (iv) memperbaiki/menambah fasilitas *coal handling*; (v) mengoptimalkan peran Anak Perusahaan yang berkaitan dengan *supply chain* batubara; serta (vi) optimasi pengaturan stok batubara.

8. **Risiko hambatan pada kontinyuitas pasokan gas**
Risiko hambatan pada kontinyuitas pasokan gas dapat disebabkan karena:
(i) Adanya kontrak gas/ Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang akan berakhir di tahun 2015 diantaranya kontrak PLTGU Muara Karang dan Priok.
(ii) Terjadinya depleting sumur gas lebih cepat dari yang terkontrak.
(iii) Belum selesainya pembangunan fasilitas regasifikasi di Arun.
Dampak yang ditimbulkan akibat risiko ini cukup signifikan, diantaranya konsumsi BBM untuk pembangkit akan meningkat dimana hal ini berhubungan langsung dengan meningkatnya biaya operasional pembangkit. Di sisi lain, target *fuelmix* yang sudah ditetapkan dapat terlampaui/ tidak dapat tercapai dan beresiko terjadi *overrun* subsidi.

Rencana mitigasi yang dilakukan PLN antara lain dengan: (i) melakukan koordinasi untuk mengoptimalkan pasokan gas pada kontrak eksisting; (ii) memastikan amandemen perpanjangan PJBG untuk kontrak yang akan habis pada tahun 2015; (iii) memastikan koordinasi dengan SKK Migas untuk beberapa tambahan dan alokasi baru; (iv) mengkoordinasikan penyelesaian pembangunan fasilitas regasifikasi Arun; (v) pengembangan *Compressed Natural Gas* (CNG) di lokasi pembangkit PLN.

7. **Risk of constraints to coal supply continuity**
Risks to the continuity of coal supply may occur due to bad weather and coal transportation, coal handling problems at facilities and uncertainty of coal market price.

Impacts which may occur if the risks are not addressed include non-optimization of the Steam Power Plant resulting in the increase of fuel usage; unmet fuel mix targets; increase of cost of production. and subsidy overruns; and power outage.

Mitigation measures have been carried out, such as: (i) coordinating with Director General of Coal and Minerals to ensure coal supply by Domestic Market Obligation (DMO); (ii) assessing the coal price sold B2B when the price is lower than the cost of mining operations; (iii) optimizing availability of non-coal and non-fuel power plants and IPP (iv) improving/expanding coal handling facilities; (v) optimizing subsidiary roles related to the coal supply chain; and (vi) optimizing coal supply arrangements.

8. **Risk of constraints to gas supply continuity**
Risks to the continuity of gas supply can be caused by:
(i) Gas contracts/Gas Sales Agreement (GSA) which expired in 2015 including Muara Karang and Priok Gas Engine Power Plant.
(ii) Gas sources depleting faster than according to the rate stated in the contract.
(iii) Construction of the regasification facilities in Arun not yet completed.

The impact of these risks is significant, and includes an increase in power plant fuel consumption which directly results in increased operational costs. On the other hand, fuel mix targets may be exceeded/not met, and there is a risk of subsidy overruns.

Mitigation measures have been carried out, such as: (i) coordinating to optimize gas supply for existing contracts; (ii) ensuring contracts/Gas Sales Agreement amendments to the contract extension which expired in 2015; (iii) ensuring coordination with Special Task Force for up Stream Oil and Gas Business activities of Republic of Indonesia (SKK MIGAS) for some additions and new allocations; (iv) coordinating the completion of Arun regasification construction; (v) developing Compressed Natural Gas (CNG) in the location of PLN power plants.

9. Risiko penurunan *availability* pembangkit

Risiko terjadi penurunan *availability* pembangkit yang dikelola oleh PLN disebabkan tertundanya jadwal pemeliharaan pembangkit, baik karena kebutuhan sistem maupun karena keterlambatan masuknya pembangkit baru; hambatan pada proses pengadaan material dan jasa pemeliharaan; terjadi gangguan pembangkit; serta *performance* pembangkit baru belum optimal. Kemungkinan terjadi penurunan *availability* pembangkit yang dikelola oleh PLN adalah besar karena 20% (7.540 MW) pembangkit eksisting berusia > 25 tahun; serta rata-rata *Equivalent Availability Factor* pembangkit baru eks-FTP1 sebesar 64% dan *Equivalent Availability Factor* PLTU keseluruhan 2014 adalah 77,4% dari target 86,7%.

Dampak risiko ini di antaranya adalah potensi penambahan sewa pembangkit dan meningkatnya pemakaian BBM, target *fuelmix* tidak tercapai, peningkatan BPP dan *overrun* subsidi, defisit sistem (pemadaman), serta penurunan citra PLN.

Beberapa mitigasi yang dilakukan diantaranya: (i) peningkatan koordinasi/ keterpaduan dalam penjadwalan pemeliharaan unit pembangkit beserta pengadaan *sparepart*-nya; (ii) penyiapan material suku cadang melalui *reverse engineering*; (iv) mengoptimalkan penerapan *risk rating* pembangkit untuk *improvement* pengelolaan pembangkit; (v) meningkatkan efektifitas *Operational Performance Improvement*; (v) pengadaan pembangkit *barge mounted*; (vi) memetakan unit pembangkit, Gardu Induk dan trafo yang berusia di atas 25 tahun dan menyusun program/rencana tindaklanjut/antisipasinya.

9. Risk of reduction in power plant availability

Risk of reduction in the availability of power plants managed by PLN can be delayed due to power plant maintenance schedule, either out of necessity or delays of new power plants' operations; hindrances in goods and services procurement; disruptions to power plants; and new power plants that are not yet optimal. The probability of reduction in the availability of power plants managed by PLN is high, as 20% (7,540 MW) of existing power plants are older than 25 years; and average EAF of new power plants ex-FTP1 is 64% and total Steam Power Plant EAF in 2014 was 77.4% compared to a target of 86.7%.

The impact of this risk among others are the possibility of additional rental power plants required, fuel use increasing, fuel mix target not achieved, Cost of Production increasing and subsidies overrunning, system deficit (power outage) and PLN's image being harmed.

Mitigation measures have been carried out, such as: (i) increasing coordination/alignment in scheduling power plant maintenance and procurement of spare parts; (ii) preparing spare parts through reverse engineering; (iii) optimizing the risk rating implementation on power plants to improve power plant management; (iv) increasing Operational Performance Improvement effectiveness; (v) procuring barge mounted power plants; (vi) mapping power plants and sub station trafo units over the age of 25 years and developing anticipative programs/plans.

10. Risiko hambatan pada proses pengadaan material dan jasa

Risiko hambatan pada proses pengadaan material dan jasa disebabkan:

(i). Keputusan Direksi PLN No.0620.K/DIR/2013 belum tersosialisasikan dengan baik dengan pihak eksternal.
(ii). Terdapat jabatan struktural pengadaan yang belum terisi atau pejabat pengadaan yang belum bersertifikat.
(iii). Nilai investasi/operasi yang akan diadakan sangat besar.
(iv). Aplikasi Pengadaan belum mengacu pada Keputusan Direksi No.0620.K/DIR/2013
(v). Keragu-raguan *business process owner* (BPO) dalam menggunakan mekanisme baru pengadaan barang dan jasa sesuai Keputusan Direksi No.0620.K/DIR/2013.

Dampak risiko ini di antaranya adalah keterlambatan pelaksanaan program kerja dan proyek strategis; hasil pengadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan; serta tuntutan hukum.

10. Risk of hindrances in the procurement of goods and services

Risk of hindrances in the procurement of goods and services may be due to:

i. The Decree of the Board of Directors Num.0620.K/DIR/2013 not having been properly disseminated to external parties.
ii. A number of vacant structural positions, or procurement officials who are not yet certified.
iii. Substantial value of future investments/operations.
iv. Application of procurement that is not in accordance with the Decree of the Board of Directors Num. 0620.K/DIR/2013.
v. Indecisiveness of business process owners (BPO) in implementing new mechanisms for the procurement of goods and services in accordance with the Decree of the Board of Directors Num. 0620.K/DIR/2013.

The impacts of this risk are delayed work programs and strategic projects; procurement results not as expected; as well as litigations.

Beberapa mitigasi yang dilakukan di antaranya dengan mengkoordinasikan proses *legal opinion* oleh instansi yang berwenang; pengisian formasi jabatan struktural terkait pengadaan sesuai persyaratan kompetensi; program sertifikasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pejabat/pegawai terkait pengadaan; supervisi dari *Supply Chain Management Division* dan Divisi Pengadaan Strategis sebagai *center of excellence* untuk pengadaan kepada unit-unit; sosialisasi/*sharing* praktek dan hasil pengadaan dengan pola baru yang dilakukan oleh PLN Kantor Pusat; memetakan risiko hukum dan melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan pengadaan dengan pola baru; serta mempercepat penyiapan aplikasi pengadaan sesuai Keputusan Direktur No.0620.K/DIR/2013.

11. **Risiko Kebutuhan jumlah dan komposisi SDM tidak terpenuhi**

Untuk mendukung aktifitas PLN secara keseluruhan dalam menyediakan listrik ke masyarakat dibutuhkan SDM yang handal. PLN menghadapi risiko kebutuhan jumlah dan komposisi SDM tidak terpenuhi yang berpotensi menghambat integritas layanan PLN ke masyarakat, hal ini disebabkan pensiunnya pegawai-pegawai dengan kompensasi tertentu dan belum tercapainya sasaran rekrutmen pegawai.

Risiko kebutuhan jumlah dan komposisi SDM tidak terpenuhi disebabkan perencanaan tenaga kerja (PTK) belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan riil perusahaan sesuai perkembangan proses bisnis dan kompetensi yang dibutuhkan; hasil rekrutmen (kuantitas dan kualitas) belum memenuhi PTK; berkurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi tertentu karena pensiun; berkurangnya peran pegawai yang mempunyai kompetensi tertentu karena mutasi/promosi; serta jumlah pegawai pensiun tahun 2014 sebanyak 2.378 orang, tahun 2015 sebanyak 2.074 dan tahun 2016 sebanyak 2.329 orang. Kemungkinan terjadinya kebutuhan jumlah dan komposisi SDM tidak terpenuhi adalah besar karena adanya rencana proyek pembangkit sebesar 35.000 MW baik dibangun oleh PLN maupun IPP.

Dampak risiko ini di antaranya adalah kompetensi dasar perusahaan mengalami penurunan; keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan; serta penurunan kinerja Perusahaan.

Beberapa langkah mitigasi risiko yang dijalankan antara lain dengan menyusun kajian kesiapan organisasi dan SDM terkait rencana pembangunan pembangkit oleh PLN sebesar 15.000 MW; memastikan Perencanaan Tenaga Kerja yang optimal dan memperkuat jumlah

Mitigation measures have been carried out, such as: coordinating legal opinion process with relevant authorities; filling up the structural procurement positions according to the competence requirements; carrying out certification programs and continuous training for officers/employees in procurement; supervision from Supply Chain Management Division and Procurement Division as centers of excellence for procurement for units, dissemination/sharing of procurement practices and outcomes using a new pattern by PLN Head Office; mapping legal risks and evaluating the new procurement implementation based on the new pattern; and accelerating procurement application preparation in line with the Decree of the Board of Directors Num. 0620.K/DIR/2013.

11. **Risk of Unfulfilled Human Resources Requirements in terms of Number and Composition**

In order to support the overall activities of PLN in providing electricity to the public, a reliable workforce is necessary. PLN is faced with the risk of having the size and composition of its workforce unfulfilled, threatening to disrupt PLN's integrity in providing service to the public. This may be due to the retirement of employees with certain competence and the actual employee recruitment being lower than the target.

The risk of Unfulfilled Human Resources Needs in terms of Number and Composition may be due to the possibility that Manpower Planning has not been completely aligned with the actual needs of the Company according to the business processes and competence required; the recruitment results (in terms of both quantity and quality) having not met the Manpower Planning; a decrease in the number of employees possessing certain competence due to retirement; a decrease in the number of employees possessing certain competence due to job rotation/promotion; as well as the number of employees retiring in 2014 being as high as 2,378, and while in 2015 the number reached 2,074, and in 2016 as many of 2,329 employees are expected to retire. The possibility of having the number and composition of human resources unfulfilled is high, owing to the 35,000 MW power plant construction program to be developed by either PLN or IPPs.

The impacts of this risk are reduction in the Company's basic competency; delays in the completion of development projects, and decreasing performance of the Company.

Mitigation measures have been carried out, such as: arranging organizational readiness review and related human resources in relation to the power plant construction by PLN with a capacity of 15,000 MW; ensuring optimal Manpower Planning and increasing the number of employees at UIPs; evaluating human resources recruitment implementation by referring to

SDM di UIP; mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dengan mengacu pada PTK antara lain melaksanakan *joint recruitment* dengan Anak Perusahaan, memperbanyak *event* rekrutmen melalui *Job Fair, Direct Shoping, career center* dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi; meng-*hire* Konsultan *Engineering Services* untuk mendukung kapabilitas SDM UIP sejak awal proyek; serta meningkatkan kapabilitas SDM Pembangunan melalui pendidikan di *Project Academy* – Corpu.

the Manpower Planning, among others through joint recruitment at subsidiaries, increasing the frequency of participation in events such as Job Fairs, Direct Shopping, career centers and cooperating with universities, hiring Engineering Services Consultants to support the IUP employees' capabilities since the beginning of the project; as well as improving human resources capability through education at Project Academy – Corpu.

12. Risiko Ketidakpatuhan pada regulasi aspek lingkungan hidup (LH)

PLN menghadapi risiko ketidakpatuhan pada regulasi aspek lingkungan hidup yang disebabkan oleh: (i) pemahaman masih kurang memadai pada ketentuan Perundangan/Regulasi lokal maupun internasional mengenai LH beserta konsekuensinya; (ii) terdapat keterbatasan personil/pegawai yang bersertifikasi di bidang Lingkungan; (iii) mayoritas pembangkit PLN potensial menghadapi isu lingkungan; (iv) serta proses pendanaan luar negeri harus memenuhi regulasi internasional tentang lingkungan. Kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan pada regulasi aspek lingkungan hidup adalah besar karena peringkat PROPER di unit-unit PLN pada tahun 2013-2014 adalah merah sebanyak 38 unit, dan hitam sebanyak 12 unit.

Dampak risiko ini di antaranya adalah tuntutan pidana (sesuai UU), tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang melebihi ketentuan Pemerintah, penurunan reputasi dan kepercayaan *stakeholder* kepada Perusahaan, serta hambatan pada proses pencarian sumber pendanaan.

PLN mengupayakan beberapa langkah mitigasi risiko antara lain dengan mengkaji penyiapan fungsi HSSE (*health, safety, security and environment*) di PLN Pusat dan unit/AP; mengisi jabatan penanggung jawab LH di PLN Pusat dan/atau HSSE; me-*review* kebijakan perencanaan, pengelolaan dan pemenuhan aspek LH di PLN, termasuk alokasi anggarannya; sertifikasi kompetensi bidang LH di Pusat dan Unit/AP; mengkaji desain pembangkit baru yang memasukkan infrastruktur pengelolaan LH; melakukan pemantauan secara konsisten tingkat PROPER di unit-unit/AP dan memperbaiki proses pengelolaannya; memasukkan aspek Lingkungan Hidup sebagai salah satu *Key Performance Indicators* 2015, berupa pinalti jika mendapat PROPER hitam/merah; serta membuat materi diklat tentang Ketentuan Perundangan dan Internasional mengenai Lingkungan Hidup.

12. Risk of Non-Compliance with Environmental Regulations

PLN faces a risk of non-compliance with environmental regulation, which may be caused by: (i) lack of understanding on Local Regulations and international regulations on the environment and its consequences; (ii) limited employees having certifications in environmental issues; (iii) a majority of PLN power plants being mired in environmental issues; and (iv) foreign funding must previously meet the international regulations regarding the environment. The possibility of the Company's non-compliance with the regulatory aspect of the environment is high because PROPER rating of some of PLN units in 2013-2014 were 38 Red and 12 Black.

The impacts of this risk include criminal litigations (in accordance with the law), claims for compensation from people who have gone beyond the government's requirements, compromised reputation and stakeholders' confidence in the Company, as well as hindrances in terms of funding disbursement.

PLN pursues a number of risk mitigation measures, including testing the Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) at the PLN Head Office and units/subsidiaries; filling the vacant position of the Person in Charge of Environment at PLN Head Office and/or HSSE; reviewing planning policies, management and compliance with environmental aspects in PLN, including budget allocation, certification of environmental competence at the Head Office and Unit/Subsidiaries; reviewing new power plants' designs that incorporate an infrastructure for managing the environment; consistently supervising PROPER rating is in the units/subsidiaries and improving their management's processes; incorporating environment aspect as one of the KPIs for 2015, and giving a penalty if the particular site earned PROPER Black/Red; and preparing training material on Litigations and International Provisions of the Environment. Materials for this training are published as a training material under the title of "Legal and Professional Stipulations on the Environment".

13. Pertumbuhan Penjualan Menurun

Pertumbuhan penjualan tenaga listrik memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga apabila pertumbuhan perekonomian nasional menurun maka pertumbuhan listrik juga akan menurun.

Pada beberapa wilayah di luar Jawa- Bali seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terjadi keterbatasan pasokan daya dan Biaya Pokok Penyediaan yang lebih tinggi dibanding harga jualnya, sehingga pertumbuhan listrik di wilayah tersebut tidak dapat tumbuh secara maksimal. Sementara di Jawa-Bali meskipun tidak terdapat kendala pasokan daya dan Biaya Pokok Penyediaan yang lebih baik, namun terjadi penurunan pertumbuhan listrik yang antara lain di samping terjadinya penurunan perekonomian nasional juga adanya kemudahan pembangunan pembangkit sendiri oleh industri.

Hal lain yang menjadi penyebab penurunan ini adalah terhambatnya proses pasang baru dan tambah daya pada pelanggan besar akibat kesulitan melakukan pembebasan lahan dan perijinan terkait pembangunan dan perluasan GI serta transmisi.

Dampak terjadinya penurunan penjualan ini antara lain, menyebabkan pendapatan PLN menurun, mengingat saat ini sudah ada 12 golongan tariff yang menggunakan mekanisme *adjustment* penurunan penjualan akan secara langsung menyebabkan penurunan pendapatan PLN. Penurunan penjualan ini juga berdampak pada pola pengoperasian pembangkit, dimana beberapa pembangkit bisa dibebani rendah atau bahkan dimatikan pada saat beban rendah, dan yang harus diwaspadai portofolio pembangkit kita saat ini ada beberapa pembangkit yang mengharuskan mekanisme *Take or pay*, seperti IPP dan juga PLTGU LNG.

Mitigasi yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan program GOS (*Generation of Sales*) di Divisi Jawa Bali, mengevaluasi daftar tunggu permintaan sambungan baru /penambahan daya, terutama di daerah yang didorong untuk jualan (Jawa, Sumbar, S2JB, Sulsel). Bila ada kendala penyambungan, segera dilakukan kooordinasi dengan Divisi terkait. Mengkaji penjualan pada ceruk – ceruk yang menguntungkan seperti pada saat Luar Waktu Beban Puncak.

13. Risk of Declining Sales Growth

The growth in electricity sales has a positive correlation with the national economy growth. Therefore, if a nation's economic growth rate declines, electricity growth will also decline.

In several areas outside Java–Bali, such as South Sulawesi, South Sumatera, and Jambi, all of which often experience power supply limitations and higher cost of provision compared to selling price, growth in the use of electricity in those areas cannot become optimal. Meanwhile in Java and Bali, even though there are no disruptions to the power supply and the calculation of a better cost of production, electricity growth has been slowing down. This is because of the economic slowdown and also easiness on industries owned power plants development.

Other factors resulting in this decline are obstacles experienced during new installations and installation of additional power for major customers due to difficult land acquisition, and agreements in relation to the development and expansion of substations including its transmission line.

The impact of the decline in sales has caused a decline in PLN's revenue, considering that there are now 12 groups under the tariff adjustment mechanism that will directly cause a decrease in PLN's revenue. Decline in sales will also affect the power plants' operation system, whereas several power plants can enjoy very low loads or even be switched off during low load situations; and being aware of our current generation's portfolio in which there are some power plants that require the Take or Pay mechanism, such as IPP and LNG Combined Cycle Power Plant.

Mitigation measures have been carried out, among others: implementing the Generation of Sales (GOS) program in the Java–Bali division, and evaluating the waiting list of new installation request/additional power, especially in areas that are targeted for sales (Java, West Sumatera, S2JB, South Sulawesi). Obstacles in installations are immediately addressed by the relevant divisions; and reviewing sales during profitable niche episodes such as outside the designated Peak Hours.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Intern (SPI) PLN bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi Satuan Pengawasan Intern meliputi tetapi tidak terbatas pada fungsi audit internal dan audit khusus dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan berbasis risiko.

INTERNAL SUPERVISORY UNIT (SPI)

The Internal Supervisory Unit of PLN has the responsibility to lead, plan, implement, evaluate, and conduct training on Internal Audit function, although this is not restricted to internal and specific audit functions in order to implement good corporate governance (risk-based internal audit).

TUGAS POKOK KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern, bertanggung jawab memastikan terlaksananya audit internal berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance),* dengan tugas pokok:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit intern, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit perusahaan, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas audit perusahaan;
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program audit intern yang berbasis risiko di seluruh regional dan unit perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekonmendasi hasil audit intern, dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program audit khusus (investigasi/ *fraud*) diseluruh regional dan unit perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit khusus dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
4. Memastikan perencanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan audit perusahaan pada fungsi korporat, bisnis regional, dan regional dan unit dalam rangka meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan regional dan unit;
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hubungan kerja dengan auditor eksternal termasuk di dalamnya Badan Pemeriksa Keuangan dan kantor akuntan publik;
6. Memastikan terlaksananya evaluasi dan melakukan koordinasi audit pada perusahaan dan usaha patungan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada 20 Januari 2010, perusahaan telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern PT PLN (Persero) sebagai wujud pelaksanaan GCG. Piagam ini dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip GCG.

MAIN TASKS OF THE HEAD OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The head of Internal Supervisory Unit is responsible for ensuring the implementation of internal audit according to good corporate governance (GCG). Its main tasks are as follows:

1. Ensuring the planning, implementation, policy evaluation and internal audit management strategy, audit standards, methodology, systems and information technology, which includes improvement of the Company's overall audit quality;
2. Ensuring the planning, implementation and risk-based internal audit program evaluation across regional and Company units, as well as evaluation, providing recommendations on the internal audit results and monitoring follow-up actions upon its completion;
3. Ensuring the planning, implementation and special audit program evaluation (investigation/fraud) across regional and Company units, as well as evaluation, providing recommendations on special audits and monitoring follow-up actions upon its completion;
4. Ensuring the planning, implementation and audit management evaluation on Company functions, as well as regional and unit business in order to minimize risks and improve the quality of the Company's management both at regional and unit levels;
5. Ensuring the planning, implementation and relationships with external auditors, including Supreme Audit Board and public accounting firms;
6. Ensuring the implementation of overall evaluation and coordinate the Company's audit with Joint Ventures, as well as provide recommendations in accordance with applicable regulations.

On 20 January 2010, the Company published the Internal Audit Charter of PT PLN (Persero) as a form of GCG implementation. The Charter is designed to provide added value and improve the Company's operations, while also aiming to achieve its objectives through a systematic and orderly approach to evaluation and improvement in professionalism and operational effectiveness, risk management, risk control and governance processes, according to the principles of good corporate governance.

Piagam Pengawasan Intern juga dibuat untuk mengatur kegiatan SPI dalam melakukan kegiatan pengujian *(assurance)* dan konsultasi yang independen, objektif, tidak berprasangka buruk terhadap auditee serta menjunjung kode etik auditor.

The Internal Audit Charter was also established to regulate ISU activities in conducting testing (assurance), and independent, objective and fair consultation with the auditees, as well as upholding their code of ethics.

STRUKTUR KEDUDUKAN ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern telah berubah dengan keluarnya Peraturan Direksi No. 0064.P/DIR/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Susunan Organisasi, tanggung jawab dan tugas pokok pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero), yang terdiri dari 1 Kepala Satuan Pengawasan Intern, 8 Inspektur, 22 Group Head Auditor Regional, 1 Group Head Audit TI, 1 Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit (KSPKA), 1 Group Head PSKA, dan 193 tenaga auditor. Struktur tersebut mulai berjalan semester 2 tahun 2015.

Struktur organisasi Satuan Pengawas Intern sesuai SK DIR No. 0064.P/DIR/2015 tanggal 14 September 2015 adalah sebagai berikut:

ORGANIZATION STRUCTURE OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The organization structure of the Internal Supervisory Unit was amended with the issuance of Board of Directors Regulation Num. 0064.P/DIR/2015 dated 14 September 2015 on Organization Structure, responsibilities and basic duties of the PT PLN (Persero) Internal Supervisory Unit, which comprises 1 Internal Supervisory Unit Head, 8 inspectors, 22 Regional Auditor Group Heads, 1 IT Audit Group Head, 1 Audit Quality System Development Head (KSPKA), 1 PSKA Group Head and 193 auditors. This structure came into effect in the second of semester of 2015.

According to Decree of the Directors Num. 0064.P/DIR/2015 on the organization structure of the Internal Supervisory Unit as at 14 September 2015 is as follows:

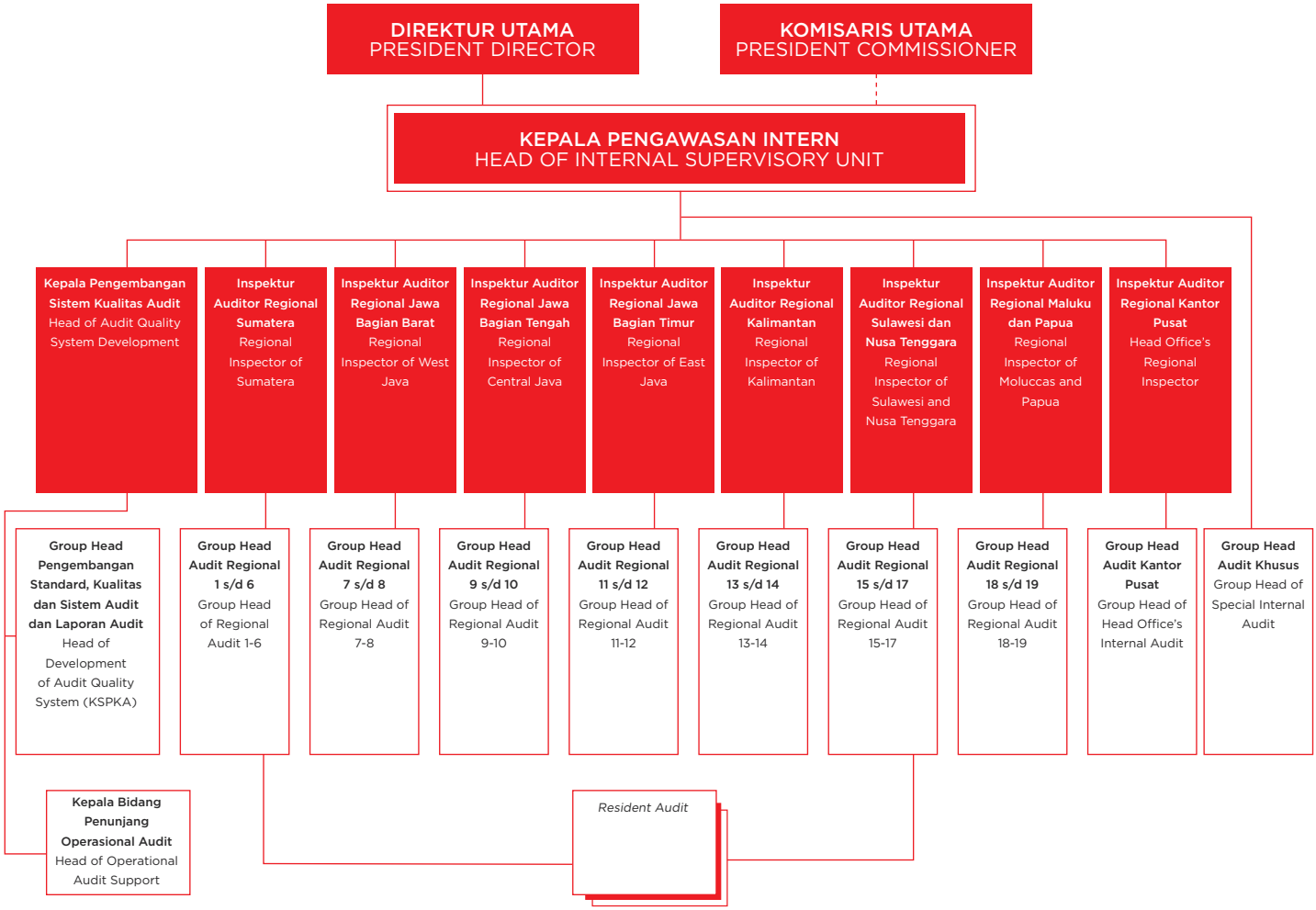

Ketua SPI

Ketua SP adalah Ali Mudin. Profil Ketua SPI PLN dapat dilihat pada Bagian "Data Perusahaan - CV Ketua SPI", halaman 529.

Head of Internal Supervisory Unit

The Internal Supervisory Unit Head is Ali Mudin. His profile can be seen in "Company Data – CV – Internal Supervisory Unit Head" on page 529.

Proses Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal

Sesuai formasi tersebut, organisasi SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan bertangggung jawab kepada Direktur Utama. Pemilihan Ketua SPI dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris

The Election and Appointment Process for the Head of the Internal Supervisory Unit

In accordance with this formation, the Internal Audit organization is led by the Internal Audit Head and falls directly under the President Director and is directly responsible to the President Director. The selection of the Internal Audit Head is conducted by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

Sertifikasi Auditor Internal

Untuk memastikan assurance hasil pemeriksaan audit terhadap kepatuhan dan proses bisnis yang berlangsung, PLN menerapkan kebijakan perolehan sertifikasi di bidang audit oleh setiap auditor. Oleh karenanya PLN menyediakan anggaran pelatihan sertifikasi bagi setiap pegawai yang bertugasi di Satuan Pengawasan Internal. Dari proses pelatihan tersebut, saat ini sebagian besar tenaga auditor di PT PLN (Persero) sudah bersertifikat *Qualified Internal Audit* (QIA).

Internal Audit Certification

To ensure the assurance of the audit results for compliance and sustainable business processes, PLN implemented a policy of obtaining audit certification for all auditors. Therefore PLN has provided a certification training budget for all employees assigned to ISU. Of these training processes, at present most of the auditors in PT PLN (Persero) have been certified Qualified Internal Audit (QIA).

Jumlah Personalia SPI - PLN

Total ISU Staff in 2015

Jumlah Personalia SPI Tahun 2015
Total ISU Staff in 2015

Uraian	Jumlah Total	Description
KSPI	1	KSPI
Inspektur	8	Inspector
Group Head Auditor Regional	22	Group Head Auditor Regional
Group Head Audit TI	1	Group Head Audit TI
Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit (KPSKA)	1	Head of Audit Quality System Development
Group Head PSKA	1	Group Head PSKA
Tenaga Auditor	193	Auditor
Jumlah	**227**	**Total**

PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN PENGAWAS INTERN

ACTIVITIES OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT

Pemeriksaan Operasional Tahun 2015 dan Tindak Lanjut

Berdasarkan Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2015, telah dilaksanakan Pemeriksaan Operasional terhadap 48 unit induk, 112 unit pelaksana, 2 kantor pusat dan 2 anak perusahaan. Total Obyek *(auditee)* yang diperiksa adalah sebanyak 164 dengan jumlah temuan sebanyak 1013 temuan.

1. Berdasarkan 1.030 temuan, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh *auditee* (unit PLN). Tindaklanjut yang telah dinyatakan selesai sebanyak 666 temuan dengan rincian temuan sebagai berikut:

Operational Audit and Follow-Up Actions of 2015

Based on the Annual Audit Work Plan (AAWP) in 2015, PLN conducted an Operational Audit of 48 main units, 112 implementation units, two head offices and two subsidiaries by the fourth quarter of 2015 with a total of 164 auditees, with 1,013 findings.

1. All of the 1,030 findings have been fully followed up by the auditees (PLN units). The completed and declared follow-ups amounted to 666 findings, as follows:

Regional Wilayah	*Auditee*					Auditee yang telah Diaudit Auditee					Temuan Audit Findings		
	Ki	Up	Kp	Ap	Jumlah Total	Ki	Up	Kp	Ap	Jumlah Total	Jumlah Total	Selesai Completed	Di Monitor Monitored
1-Medan	5	33			38	4	7			11	32	20	12
2-Padang	3	23			26	3	10			13	41	28	13
3-Palembang	3	19			22	3	10			13	164	122	42
4-Lampung	3	13			16	1	3			4	39	22	17
5-Jakarta I	5	26	11	3	45	5	11	2	1	19	96	52	44
6-Jakarta II	3	36		1	40	5	12			17	116	88	28
7-Bandung	3	24			27	2	6			8	79	61	18
8-Semarang	4	22			26	7	6			13	66	27	39
9-Surabaya	4	34			38	4	29			33	96	47	49
10-Makassar	4	30			34	4	15			19	139	87	52
11-Balikpapan	4	17		1	22	7	4		1	12	48	41	7
12-Mataram	3	10			13	3	3			6	67	36	31
13-Ambon	3	10			13	3	10			13	47	35	12
Jumlah Total	47	297	11	5	360	51	126	2	2	181	1030	666	364

2. Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Operasional Tahun 2015 Berdasarkan Kode Temuan

2. Findings and Follow-up Actions of 2015 Operational Year Based on Finding Code

Kode / Klasifikasi Temuan Finding Code Classification		Temuan Findings		
		Jumlah Total	Selesai Completed	Di Monitor Monitored
01.1	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Compliance with laws and regulations	18	11	7
01.2	Kepatuhan terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Compliance with applicable work procedures	512	321	191
01.3	Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran Compliance with budget implementation provisions	21	17	4
01.4	Temuan berulang Recurring findings	12	11	1
02.1	Keandalan & keakuratan informasi/laporan keuangan & non keuangan Reliability and accuracy of financial information/statements and non-financial information	114	67	47
02.2	Keandalan & keakuratan informasi/laporan TUL Reliability & accuracy of Subscription Administration Report	27	22	5
03	Pengamanan Asset Asset security	28	16	12

Kode / Klasifikasi Temuan Finding Code Classification		**Temuan** Findings		
		Jumlah Total	**Selesai** Completed	**Di Monitor** Monitored
04.1	Pemanfaatan sumber daya manusia Human resources leverage	11	5	6
04.2	Pemanfaatan sumber daya material dan peralatan Material resources and equipment utilization	18	8	10
04.3	Pemanfaatan sumber daya uang Money resources utilization	17	10	7
05	Pencapaian tujuan dan sasaran program atau operasi Target accomplishment and program or operational objective	239	168	71
06.1	Kasus yang merugikan perusahaan Cases that cause losses to company	6	5	1
06.2	Kewajiban penyetoran kepada negara/perusahaan Obligatory deposit payment to state or company	7	5	2
	Jumlah Total	**1.030**	**666**	**364**

PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2015

Pemeriksaan Khusus dilaksanakan atas permintaan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan informasi dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan fakta atas suatu masalah dan dilaporkan kepada Direktur Utama.

Realisasi pemeriksaan khusus telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebanyak 9 laporan, yaitu:

SPECIAL AUDIT OF 2015

A Special Audit may be conducted at the request of the Board of Directors and Board of Commissioners, based on the information provided by a Public or Non-Governmental Organization (NGO). Special audits are intended to gather facts regarding certain issues reported to the Directors.

Nine special audits were conducted and subsequently reported to the President Director, namely:

Uraian Decription	**Unit/Anak Perusahaan** Unit/Subsidiaries	**Progres** Progress
Pengadaan Renovasi Gedung Kantor Procurement of Office Building Renovation	Kantor Distribusi Jawa Tengah & Yogyakarta Central Java & Yogyakarta Distribution Office	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah selesai Completed Examination Report
	Area Tegal Tegal Area	
	Area Pekalongan Pekalongan Area	
	Area Magelang Magelang Area	
	Area Cilacap Cilacap Area	
	Area Purwokerto Purwokerto Area	

Uraian Decription	**Unit/Anak Perusahaan** Unit/Subsidiaries	**Progres** Progress
Pelaksanaan kewenangan Deputy Manager Pembangkitan (WBS) Implementation Authority of Power Plant Project Deputy Manager	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Island Areas	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah Selesai Completed Examination Report
Pembayaran PLTU Waai Waai Steam Power Plant Payment	UIP XII - Makassar	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah Selesai Completed Examination Report
Pengadaan CCTV & Alat ukur Vibrasi PLTG Procurement of CCTV & Gas Turbine Power Plant Vibration Measurement	Wilayah Sumatera Selatan Jambi & Bengkulu South Sumatera, Jambi & Bengkulu Areas	Pemeriksaan Sedang berlangsung Ongoing
Pengadaan Material Pemeliharaan MO Plus Procurement of MO Plus Material Maintenance	Wilayah Suluttenggo & Maluku Suluttenggo & Maluku Areas	Pemeriksaan Sedang berlangsung Ongoing Examination
Pelaksanaan kewenangan General Manager (WBS) Implementation Authority, General Manager	UIP II	Pemeriksaan Sedang berlangsung Ongoing Examination
Proses Pembangunan PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau Steam Power Plant Establishment	UIP IX	Pemeriksaan Sedang berlangsung Ongoing Examination
Pelaksanaan kewenangan Manajer area (WBS) Implementation Authority, Areal Manager	Wilayah Suluttenggo - Area Luwuk Suluttenggo – Luwuk Areas	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah Selesai Completed Examination Report
Pengadaan Batubara pola Kerja Sama Operasi Operational Operation Scheme Coal Procurement	PLN Batubara	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah selesai Completed Examination Report

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2015

Selain melaksanakan Pemeriksaan Khusus, SPI melaksanakan kegiatan audit teknologi informasi. Program ini dilakukan mengingat PLN telah dan akan semakin mengandalkan dukungan aplikasi teknologi informasi dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan operasionalnya.

Adapun realisasi kegiatan audit teknologi informasi ditujukan pada beberapa masalah, yakni:

1. Audit Aplikasi PMO
2. *Joint Audit* Divisi Sistem dan Teknologi Informasi.

2015 INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT

In addition to conducting Special Audits, the ISU also conducted an information technology (IT) audit. The program was carried because PLN has and will increasingly rely on the support of IT applications in order to achieve operational efficiency and effectiveness.

The realization of IT audit activities was aimed at addressing several issues, such as:

1. PMO Application Audit
2. Joint Audit on the Division of Information System and Technology

PENUGASAN KHUSUS 2015

1. Audit PLTD Pulau Terluar
   Merupakan penugasan khusus dari DIRUT untuk mengawal pelaksanaan kelistrikan Pulau terluar agar dapat beroperasi tepat waktu. Kegiatan audit PLTD pulau terluar menugaskan seluruh auditor internal untuk terlibat di 50 Lokasi.
2. Audit PT ICON+
   Merupakan penugasan khusus dari DIRUT PLN sebagai pemegang saham mayoritas untuk melakukan pemeriksaan operasional.

2015 SPECIAL ASSIGNMENTS

1. Audit of Diesel Power Plants in the Outermost Islands
   This was a specific assignment from the President Director to oversee the islands' electricity provision and distribution in a timely manner. PLN assigned all internal auditors to be involved in 50 locations for these audit activities.
2. Audit of PT ICON +
   This was a specific assignment from the President Director of PLN as a majority shareholder, to perform operational audit.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI

Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI, terdapat 625 rekomendasi dan sampai dengan Desember 2015 status temuannya adalah sudah sesuai 356 temuan, belum sesuai 106 temuan, belum ditindaklanjuti 5 temuan, dan tidak dapat ditindaklanjuti 17 temuan.

FOLLOW-UP OF SUPREME AUDIT BOARD OF RI AUDIT RECOMMENDATIONS

According to the audit results conducted by Supreme Audit Board, 625 recommendations were received. An audit conducted until December 2015 produced 356 findings, of which 106 were incorrect, five have not been followed-up and 17 were non-actionable.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	**Jumlah Rekomendasi** Total Recommendations	**Status Temuan** Findings Status				State Auditor Audit Report
		Sudah Sesuai Already appropriate	**Belum Sesuai** Not yet appropriate	**Belum Ditindaklanjuti** Not yet followed up	**Tidak Dapat Ditindaklanjuti** Cannot be followed up	
Laporan Keuangan PLN TB 2003 dan 2004	46	41	2	0	3	Financial Report of PT PLN (Persero) Fiscal Year 2003 and 2004
Laporan Keuangan PLN TB 2004 dan 2005	53	37	14	0	2	Financial Report of PT PLN (Persero) Fiscal Year 2004 and 2005
BPP TL dan Pembangkitan Tahun 2006	13	12	1	0	0	Electricity Tarrif of Basic Production Cost and Power Generation Year 2006
Subsidi Listrik Tahun 2007	15	13	2	0	0	Electricity Subsidy Year 2007
Subsidi Listrik Tahun 2008	20	18	0	0	2	Electricity Subsidy Year 2008
Subsidi Listrik Tahun 2009	26	21	4	0	1	Electricity Subsidy Year 2009
Subsidi Listrik Tahun 2010	4	3	1	0	0	Electricity Subsidy Year 2010
Sektor Hulu Listrik	86	57	19	3	7	Upstream Electricity Sector
Kinerja Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2011	26	23	1	0	2	Central Java and Yogyakarta Provinces' Distribution Performance Year 2011
Kinerja Distribusi Jawa Barat dan Banten Tahun 2009 dan Semester I 2010	23	23	0	0	0	West Java and Banten's Distribution Performance Year 2009 and first semester 2010
Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2011	9	3	6	0	0	Electricity Subsidy of Budget Year 2011
Uang Jaminan Langganan PLN	7	5	1	1	0	PLN's customer deposit
Subsidi Listrik Tahun 2012	64	60	3	1	0	Electricity Subsidy of Budget Year 2012
Batubara dan BBM Tahun 2013	12	4	8	0	0	Coal and Fuel 2013
Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik th 2013	12	4	8	0	0	Purchase and Lease of Electric Power
Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya 2010 - 2013	6	5	1	0	0	The Unspecified Status of Government Assistance 2010 - 2013

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	Status Temuan Findings Status				State Auditor Audit Report
		Sudah Sesuai Already appropriate	Belum Sesuai Not yet appropriate	Belum Ditindaklanjuti Not yet followed up	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Cannot be followed up	
Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2013	62	27	35	0	0	Electricity Subsidy of Budget Year 2013
Subsidi Listrik Tahun 2014	51					Electricity Subsidy of Budget Year 2014
Pengelolaan, pemeliharaan dan investasi jaringan transmisi Tahun Anggaran 2013 s/d semester I 2014 untuk Dis Jabar, Jasa Sertifikasi, P3B Jawa Bali, P3BS, UIP	57					Transmission Management, Maintenance, and Investment in 2013 until semester 1 2014 for West Java Distribution, certification Services, P3B Java Bali, P3BS, UIP.
Pengelolaan, pemeliharaan dan investasi jaringan transmisi Tahun Anggaran 2013 sd semester I 2014 untuk PT Icon+,Disjaya, DisJatim, Disjateng						Transmission Management, Maintenance, and Investment in 2013 until semester 1 2014 for PT Icon+,Dis Jaya, Dis Jatim, Dis Jateng.
Total	**625**	**356**	**106**	**5**	**17**	**Total**

AKUNTAN PERSEROAN

Biaya dan Jasa

Pada periode 2015, KAP yang melaksanakan audit perseroan adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) Auditor dengan biaya jasa audit sebesar Rp18,07 miliar (delapan belas koma nol tujuh miliar rupiah). Ruang lingkup jasa audit meliputi:

1. Jasa audit umum laporan keuangan,
2. Jasa Audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014,
3. Audit Atas Laporan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan,
4. Audit Atas Laporan Proyek Percepatan 10.000 MW,
5. Audit Atas Laporan Penerusan Pinjaman,
6. Review Atas Laporan Evaluasi Kinerja,
7. Audit Atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),

Nama Akuntan Publik Pelaksana Audit

KAP yang melaksanakan audit sebelum tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia), untuk Laporan Keuangan tahun 2014, auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA.
2. Osman Bing Satrio dan Eny (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2013, auditor Drs. Osman Sitorus.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM (PAF)

Fees and Services

In 2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) Auditor conducted a full-scope general audit amounting to Rp18,07 billion (eighteen point zero seven billion rupiah). The audit services included:

1. General financial statement,
2. Adherence to the Established Legislation and Internal Control of 31 December 2014,
3. Audit of Ongoing Work Statement,
4. Audit of 10,000 MW Acceleration Project Report,
5. Audit of Two-Step Loan Report,
6. Review of Performance Evaluation Report,
7. Audit of Partnership and Community Development Program (CSR),

Names of the Public Accountant Responsible for the Audit

Public Accounting Firms that have performed a general internal audit prior to 2015 are as follows:

1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2014, auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA
2. Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2013, auditor Drs. Osman Sitorus

3. Osman Bing Satrio dan Eny (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012, auditor Drs Osman Sitorus.
4. Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2011, auditor Rusli
5. Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2010, auditor Ali Hery

SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/ MBU/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada BUMN, ditegaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk sistim pengendalian internal. Pembentukan sistim pengendalian internal ini berfungsi sebagai salah satu mekanisme internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi, agar dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi ada mekanisme internal yang telah dilalui untuk memastikan bahwa keputusan transaksi tersebut telah berlangsung dengan benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka COSO

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan dan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, PLN mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan COSO *(Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions)*. Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi; dan
5. Monitoring, yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, PLN membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang disebut Satuan Pengawasan Intern. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

3. Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2012, auditor Drs Osman Sitorus.
4. Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2011, auditor Rusli
5. Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2010, auditor Ali Hery

INTERNAL CONTROL AND AUDIT SYSTEM

In accordance with Article 26 of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) Num. PAER-01/ MBU/2011 as a replacement of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises Num. KEP-117/M-MBU/2002 on Promoting Good Corporate Governance of SOE, it was affirmed that each SOE shall establish an internal control system. The internal control system performs as an internal mechanism of each organizational unit. Thus, an internal mechanism benefits each transaction implementation as a decision-maker in ensuring proper, correct, fair and accountable decisions.

Adjustments to the Internal Audit System for compliance with the COSO Framework

In order to implement these regulations and increase the accountability of each decision, and the transparency and accuracy of business transaction records, PLN has developed an internal control system using COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions) approach. The Internal Control System includes:

1. A disciplined and structured internal control environment;
2. Risk assessment and business management;
3. Control activities;
4. Information and communication systems; as well as
5. Monitoring, covering the external oversight of internal controls and policies i.e. Manuals, Operational Guidelines and Work Instructions.

Assessment of Internal Audit System Effectiveness

To evaluate the implementation of its internal control system, PLN has established the Internal Supervisory Unit. The results of the evaluation of the internal control system is used as one of the factors considered by the management as it evaluates the efficacy of the internal control system in order to determine the improvements to the system or policies that allow the management to conduct operational activities in a more effective way.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, ataupun praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG. Hal ini adalah kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) terhadap berbagai cara yang paling mungkin diterapkan oleh suatu organisasi, baik di kalangan pemerintahan maupun korporasi, untuk menekan dan mencegah secara dini terjadinya tindak korupsi dan penyimpangan lain yang sejenis.

Meyakini efektifitas sistem tersebut dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan korupsi, fraud dan sejenisnya sebelum merebak lebih jauh, PLN bekerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam bidang tersebut, merancang sistem pelaporan pelanggaran untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perseroan, baik di Unit Bisnis maupun di anak usaha. Sejak pertengahan tahun 2012, Perseroan melakukan kajian dan merancang sistem pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya perusahaan.

Setelah mengalami pembahasan intensif dan tahap uji coba secara terbatas, pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.21.E/Dir/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perseroan secara resmi memberlakukan "Sistem Pelaporan Pelanggaran" (*Whistleblowing System*) diseluruh jajaran bisnis PLN. Dalam ketetapan tertulis yang mengiringi pemberlakuan tersebut, dijelaskan secara ringkas dan jelas seluruh definisi, maksud dan tujuan serta mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System or violation reporting system is considered as the most effective method to prevent and deal with corruption, bribery and other fraudulent practices which are contrary to the implementation of good corporate governance. The whistleblowing system is a result of a study conducted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) and the Global Economic Crime Survey (GECS) on various methods most applicable to organizations (both the governing body and the company). It is aimed to suppress and prevent early occurrences of corruption and other similar irregularities.

PLN ensures the effectiveness its system for detecting, preventing and overcoming the occurrence of corruption, fraud and other similar problems. It cooperates with competent institutions, designing systems to report violations at all levels (Business Units and subsidiaries). Since mid-2012, the Company has conducted studies and designed a violation reporting system according to its culture and conditions.

After conducting intensive discussions and a limited test phase, the Company formally implemented the Whistleblowing System, throughout the Company under the Decree of the Board of Directors Num. 21.E/Dir/2012 dated 20 December 2012. It consists of definitions, purposes, reporting mechanisms, whistleblower's protection and follow-ups, which were described succinctly and clearly under a written provision.

TUJUAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Perseroan merupakan tindakan pelanggaran yang harus diperangi bersama. Korupsi dapat hidup dan langgeng diantaranya disebabkan oleh sifat permissive (pembiaran) banyak pihak terhadap tindakan tidak terpuji tersebut. Untuk mengurangiya, seluruh insan PLN sebagai insan yang berintegritas harus menghilangkan sifat permissive terhadap korupsi dan aktif memberantas dengan melaporkan terjadinya tindak korupsi melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *whistleblowing system* (WBS) milik Perseroan.

Pelaporan pelanggaran *(whistleblowing)* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personil atau badan hukum dari

WHISTLEBLOWING SYSTEM OBJECTIVES

Corruption and abuse of power within the Company constitute an action of violation that must be fought as a matter of injustice. Corruption may occur in the long-term due to the permissive nature and improper actions from many parties. In order to eliminate corruption, PLN individuals should act with integrity and rectify their permissive nature to actively overcome and report corruption through the Whistleblowing System (WBS).

Reporting violations (whistleblowing) reveal illegal acts, corruption or other actions that could harm PLN and its stakeholders. Reporting (whistleblowing) is submitted personally or through legal entities internally and externally

lingkungan internal maupun eksternal Perseroan kepada pimpinan PLN agar dapat diambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan tersebut diupayakan dapat berlangsung secara rahasia *(confidential)*, namun didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dimaksudkan menjadi sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan unit bisnis PLN.

MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN

1. Pelapor dapat mengirimkan laporan pelanggaran yang diketahuinya ke alamat email plnbersih123@gmail.com atau PO Box 6043 GN JKS 12120.
2. Alamat email dan PO Box tersebut dipegang oleh lembaga yang diberi mandat oleh Direksi untuk menerima laporan pelanggaran dan mempunyai akses langsung kepada Direksi.
3. Penggunaan alamat email khusus tersebut dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan pengirim dan penerima laporan serta tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi Perseroan.
4. Untuk pelapor internal yang tidak menginginkan identitasnya diketahui, disarankan untuk menggunakan email non korporat agar tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi perusahaan. Demikian pula untuk pelapor eksternal.
5. Komunikasi lebih lanjut atas laporan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat email pengirim laporan.

PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pengelolaan *whistleblowing system* dilakukan oleh Direktur Utama Atas penyampaian laporan, Direksi akan menindaklanjuti dengan upaya investigasi untuk mendapatkan kebenaran atas laporan tersebut dan selanjutnya laporan akan dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan, laporan yang telah dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dapat ditindaklanjuti, oleh Direksi akan diteruskan kepada penegak hukum antara lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses lebih lanjut.

Perlindungan Pelapor dan Insentif

1. Pelapor dijaga kerahasiaan dengan cara menggunakan media komunikasi email yang di luar pengeloaan perusahaan (bukan alamat email pln.co.id)

2. Pelapor dilindungi secara khusus oleh Direksi

to the head of PLN in order to implement disciplinary action. Disclosure must be supported by strong evidence and remain confidential.

Violation Reporting System (VRS) is a system conducted by the Company to collect, process, follow up and report any violations occurring within PLN business units.

REPORTING MECHANISM

1. The whistleblowers may submit reports of known violations to plnbersih123@gmail.com or PO Box 6043 GN JKS 12120.
2. The email address and PO Box are entrusted to a specific institution by the Board of Directors to receive violation reports. This institution also has a direct access to the Board of Directors.
3. This email address was created to maintain confidentiality of both the sender's and the recipient's identity. Thus, it can not be tracked by the Company's information management system.
4. For an internal whistleblower whose identity cannot be revealed, it is advisable they use a non-corporate email, so it cannot be tracked by the Company's information management system. Similarly, it also applies to any external whistleblowers.
5. Further communication on reports submitted is be made to the sender's email address.

MANAGEMENT OF THE WHISTLE BLOWING SYSTEM

The whistle blowing system is managed by the Board of Directors, the Board of Directors will follow-up report submission with investigative efforts to reveal the truth. Furthermore, reports will be corroborated with necessary evidence for further proceedings.

A report with sufficient proof must be adressed within one month at the latest by the Board of Directors and will be forwarded to the law enforcement entity for further processing, which among others, is the Corruption Eradication Commission (KPK).

Whistleblower's Protection and Incentives

1. The whistleblower's identity will remain confidential and be protected through the use of an email address other than the Company's email address (not using an email address ending with pln.co.id)
2. The whistleblowers will be protected by the Board of Directors

3. Bagi pelapor internal, Direksi memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai
   - Pemecatan
   - Penurunan jabatan atau pangkat;
   - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
   - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya *(personal file record)*.

   Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 43 UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Bagi Pelapor yang laporannya benar dan dapat ditindaklanjuti serta bersedia membuka identitasnya kepada Direksi, akan diberikan insentif yang menarik.

PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING* SELAMA TAHUN 2015 DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

Selama tahun 2015 terdapat 3 laporan yang dilaporkan melalui *whistleblower*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat *Deputy Manager* di salah satu unit,
2. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat *General Manager* di salah satu unit,
3. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat Manajer Area di salah satu unit.

Keseluruhan pelaporan sudah ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERKARA HUKUM YANG MELIBATKAN PERSEROAN

PLN menghadapi beberapa perkara hukum dalam menjalankan kegiatan operasinya. Beberapa perkara hukum tersebut pada tahun 2015 telah selesai diputus oleh Pengadilan. Sebagian perkara lagi masih dalam tahap akan memulai proses sidang pengadilan, sebagian lagi menjalani proses banding dari para pihak, saat Laporan Tahunan ini dibuat.

Laporan lengkap penanganan kasus hukum sepanjang tahun 2015 yang melibatkan PLN adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2012 yang diajukan PT Acset Indonusa kepada PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan karena Tergugat dianggap sewenang-wenang terhadap Penggugat atas hasil temuan yang dilakukan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Distribusi Jakarta

3. For internal whistleblowers, the Board of Directors guarantees their protection from:
   - Dismissal;
   - Demotion (Rank);
   - Harassment or discrimination of all forms;
   - Harmful notes on their Personal File Record

   In addition, the Company will also provide legal protection to whistleblowers, which is in line with Article 43 of Law Num. 15 of 2002 jo. Law Num. 25 of 2003 on Money Laundering Act and Article 13 of Law Num. 13 of 2006 on Witness Protection, and Article 5 of Regulation Num. 57 of 2003 on The Procedure of Special Protection of Reporting Parties and Witnesses in Money Laundering.
4. Whistleblowers, whose reports are validated and able to be followed up, and who are willing to disclose their credentials to the Board of Directors, will receive incentives.

MANAGEMENT OF WHISTLE BLOWING COMPLAINTS DURING 2015 AND ACTIONS TAKEN

During 2015 there were three cases reported through the Whistleblowing System, with details as follows:

1. Violation report on the authority-level of Deputy Manager in one particular unit,
2. Violation report on the authority-level of General Manager in one particular unit,
3. Violation report on the authority-level of Area Manager in one particular unit.

All violation reports are followed up and implemented based on concurrent laws.

LITIGATIONS INVOLVING THE COMPANY

PLN is facing a number of litigations in running its operations. Some of these litigations in 2015 have been decided by the Court. Some others are still under pre-trial stage, with the rest in the process of appeal from the involved parties, at the time of writing of this annual report.

A complete list of the litigations in 2015 involving PLN is as follows:

1. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Number 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 10 January 2012 filed by PT Acset Indonusa against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the Defendant being considered as acting without consideration to the Litigant's rights for the findings of the Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Distribusi Jakarta

Raya dan Tangerang. PT PLN (Persero) dituntut Rp1.180.856.880,00 dan Rp2.361.713.760,00.

Perkara telah diputus dan PLN kalah di tingkat Pengadilan Negeri (putusan tanggal 15 Agustus 2012), PLN juga kalah di tingkat Pengadilan Tinggi. PLN mengajukan Kasasi. Saat ini perkara dalam Proses Kasasi.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh PT Meta Epsi terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat II. Gugatan diajukan karena Penggugat meminta Bank Garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada PT PLN (Persero). Nilai gugatan sebesar Rp83.346.920.456,00 dan US$5.116.957,00.

   Perkara telah diputus dan PLN kalah di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 14 Maret 2013. Pada Tingkat Banding PLN Menang. Saat ini masih dalam proses Kasasi.

3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 692/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2012 yang diajukan oleh Lydia Manurung terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat. Gugatan diajukan karena Penggugat merasa tanahnya yang terletak di Desa Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Propinsi Papua, seluas 15.000 m2 telah dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan telah berdiri bangunan kantor PT PLN (Persero) Ranting Timika. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.200.000.000,00, ganti rugi immaterial Rp15.000.000.000,00, dwangsom Rp1.000.000,00 per hari.

   Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 16 September 2013. Pada Tingkat Banding PLN Menang. Saat ini masih dalam proses Kasasi.

4. Pada tahun 2001 Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi selaku Ahli Waris kepada PT PLN (Persero) atas tanah PLTA Tonsealama sebesar Rp54.000.000.000,00, di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI PT PLN (Persero) kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, PT PLN (Persero) melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi tanah tersebut dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses di Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.

Raya & Tangerang. PT PLN (Persero) was demanded to pay Rp1,180,856,880.00 and Rp2,361,713,760.00.

The case has been decided and PLN lost at the District Court (with the verdict made on 15 August 2012), PLN also lost at the High Court. PLN filed for cassation. Currently the case is in the process of cassation.

2. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel filed by PT Meta Epsi against PT PLN (Persero) as Defendant II. The lawsuit was filed due to the Litigant requesting for the Bank Guarantee from Bank Niaga to not be liquidated for PT PLN (Persero). The claim of the lawsuit was Rp83,346,920,456.00 and US$5,116,957.00.

   The case has been decided and PLN lost at the District Court, with the verdict made on 14 March 2013. Upon appeal, PLN won. Currently the case is in the process of cassation.

3. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 692/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 29 November 2012 filed by Lydia Manurung against PT PLN (Persero) as Defendant. The lawsuit was filed by the Litigant who alleged that her land located in Koperapoka Village, Mimika Baru Subdistrict, Mimika Regency, Papua, of 15,000 m2 had been controlled by the Defendant without having the rights to do so, and now there stands the building of PT PLN (Persero) Ranting Timika. Compensation claimed was Rp5,200,000,000.00, as well as compensation for non-material harm of Rp15,000,000,000.00, and penalty of Rp1,000,000.00 per day.

   The case has been decided and PLN won at the District Court, with the verdict made on 16 September 2013. Upon appeal, PLN won. Currently in the process of cassation.

4. In 2001 Hendrik Nelwan and associates filed a lawsuit to obtain a compensation as the Beneficiary against PT PLN (Persero) for the land of Tonsealama Hydro Power Plant, valued at Rp54,000,000,000.00, to the Manado District Court. In the trial of the case, starting from the First Level to the Review Level at the Supreme Court of RI, PT PLN (Persero) lost. When execution was about to take place by the Manado District Court, PT PLN (Persero) filed a Resisting Lawsuit against the execution of the plot of land. Currently the case is under Review by the Supreme Court of RI.

5. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara : 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Desember 2012 yang diajukan oleh PT Modaco Enersys terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis karena alasan Tergugat memberikan rancangan pekerjaan yang keliru kepada Penggugat. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp10.140.825.582,00.

   Pada Tingkat Pengadilan Negeri PLN Menang. Saat ini masih dalam proses Banding.

6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Desember 2012 yang diajukan oleh PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima yang keliru sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp61.927.363.731,00.

   Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 17 Februari 2014, selanjutnya PLN menang di tingkat Banding tanggal 27 Februari 2015.

7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar dengan No. Perkara : 37/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 31 Januari 2013 yang diajukan oleh Abner Lumentut terhadap PT PLN (Persero) Kantor Pusat selaku Turut Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat merasa memiliki tanah yang saat ini digunakan PT PLN (Persero) sebagai gardu trafo yang dibangun pada tahun 1940. Penggugat merasa dirugikan karena lokasi tersebut bernilai ekonomis, serta keberadaan gardu tersebut dirasakan membahayakan Penggugat beserta keluarganya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp810.000.000,00 dan pengosongan lahan.

   Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 27 Januari 2014. Perkara saat ini masih dalam proses Banding.

8. Gugatan Hubungan Industrial oleh Sdr. Bambang Suryantoro melalui Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, Perkara No. 63/G/2009/PHI.SMG. Gugatan diajukan karena Penggugat menganggap Direksi PLN wanprestasi dengan tidak mematuhi PKB Pasal 20 ayat (4) perihal kesetaraan gaji dasar di perseroan dengan Anak Perusahaan paling lambat akhir tahun 2006. Penggugat menuntut agar selisih kenaikan gaji dasar yang dianggap belum dilakukan sejak tahun 2007

5. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 26 December 2012 filed by PT Modaco Enersys against PT PLN (Persero) as Defendant. This lawsuit was filed due to the Litigant being incapable of performing the construction of Riau 1 Steam Power Plant (2x10 MW) Bengkalis due to the Defendant providing an incorrect design to the Litigant. Amount of compensation claimed was Rp10,140,825,582.00.

   At the level of District Court PLN won. Currently this case is in the process of Appeal.

6. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 26 December 2012 filed by PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta against PT PLN (Persero) as Defendant. This lawsuit was filed due to the Litigants alleging that they had been harmed as the Defendant provided an incorrect design for the construction of Nusa Tenggara Barat 1 Steam Power Plant (2x10 MW) Bima so that the Litigants could not continue the construction of said power plant. Amount of compensation claimed was Rp61,927,363,731.00.

   The case was decided and PLN won at the District Court, with the verdict made on 17 February 2014, and subsequently PLN won at the Appeal on 27 February 2015.

7. Tort Lawsuit at the Makassar District Court with Case Num. 37/Pdt.G/2012/PN.Mks on 31 January 2013 filed by Abner Lumentut against PT PLN (Persero) Head Office, as Co-Defendant. This lawsuit was filed due to the Litigant alleging that he had the right to the land currently used by PT PLN (Persero) as a location for a transformer built in 1940. The Litigant felt that he had been harmed as the location had some economical value and the presence of the transformer had been alleged to endanger the safety of the Litigant and his family. Amount of compensation claimed was Rp810,000,000.00 and that the land be cleared.

   The case has been decided and PLN won at the District Court, with the verdict made on 27 January 2014. The case is currently under Appeal.

8. Industrial Relations Lawsuit filed by Bambang Suryantoro through the Semarang Court of Industrial Relations, Case Num. 63/G/2009/PHI.SMG. The lawsuit was filed as the Litigant alleged that the Board of Directors of PLN did not perform as promised by not conforming to the Article 20 Paragraph (4) of the CLA, concerning the equality of basic salary in the Company and the Subsidiaries at the latest by the end of 2006. The Litigant demanded that the difference in the increase

s.d tahun 2009 sebesar Rp48.625.008.000,00 untuk dibayarkan kepada semua pegawai di lingkungan PLN Wilayah Disjateng.

Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 02 Maret 2010. PLN kalah di tingkat Kasasi, putusantanggal 20 Oktober 2010. Saat ini perkara masih dalam proses di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

9. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Sdr. Ir. Ermansyah Jamin terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah No. 008-1PJ/523/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003. Penggugat meminta PLN mempertimbangkan permohonan untuk meneruskan kembali pembayaran angsuran rumah sebesar Rp7.548.402.036 (tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu tiga puluh enam rupiah).
   Perkara saat ini sudah diputus oleh PN Jakarta selatan yang memenangkan PLN dan Sdr. Ir. Ermansyah Jamin menyatakan banding atas putusan tersebut. PLN menang pada tingkat banding putusan tanggal 27 Mei 2015. Saat ini perkara dalam proses kasasi.

10. Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan No. Perkara: 62/Pdt.G/2014/PN.TK yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dilakukannya pemadaman yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Pada Tingkat Pengadilan Negeri PLN Menang, dan Penggugat Mengajukan Banding.

11. Permohonan Arbitrase di BANI Jakarta dengan No. Perkara: 596/VI/ARB-BANI/2014 diajukan oleh PT Betasurya Tatagraha. Permohonan arbitrase ini diajukan karena kontrak tentang Pengadaan *Combined Cycle* PLTG Batanghari Sektor Pembangkitan Jambi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan diterminasi oleh PT PLN (Persero). Pemohon menuntut ganti rugi materiil Rp31.599.007.734,00 dan immateriil Rp2.211.636.680,00. Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di BANI.

12. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2014 diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih dkk terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan PLTGU Muara Tawar dianggap belum dibebaskan dan belum dibayarkan ganti rugi dan kompensasi oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp59.264.000.000,00.

of the basic salary which the Litigant alleged to have not been calculated and paid for the period of 2007 to 2009 by PLN, amounting to Rp48,625,008,000.00, be paid to all employees of PLN Wilayah Disjateng.
The case has been decided and PLN won at the District Court, with the verdict made on 02 March 2010. PLN lost at the Cessation on 20 October 2010. Currently the case is under Review by the Supreme Court.

9. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel filed by Ir. Ermansyah Jamin against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed on the grounds of the Agreement for the Sales and Purchase of Land and Residential Building Num. 008-1PJ/523/DIR/2003 on 25 August 2003. The Litigant demanded that PLN reconsider the plea to continue the payment of installments for the house, amounting to Rp7,548,402,036 (seven billion five hundred and forty eight million four hundred and two thousand and thirty six rupiah).

   The case has been decided by South Jakarta District Court, and PLN won. Ir. Ermansyah Jamin filed for Appeal against the verdict. PLN won upon Appeal, with the verdict made on 27 May 2015. Currently the case is under the process of cassation.

10. Legal Standing Lawsuit at the Tanjung Karang District Court with Case Num. 62/Pdt.G/2014/PN.TK filed by Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the power blackout by PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. At the District Court PLN won, and the Litigant filed for Appeal.

11. Request for Arbitration at BANI Jakarta with Case Num. 596/VI/ARB-BANI/2014 filed by PT Betasurya Tatagraha. This request for arbitration was filed due to the contract for the Procurement of Batanghari Combined Cycle Power Plant, Sektor Pembangkitan Jambi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan was terminated by PT PLN (Persero). The Litigant claimed for material compensation of Rp31,599,007,734.00 and for immaterial harm of Rp2,211,636,680.00. The case is currently under trial at BANI.

12. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel on 21 August 2014 filed by Ny. Nesah binti Sadih et al. against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the land used by Muara Tawar Combined Cycle Power Plant had not been released and compensation had not been paid by PT PLN (Persero) to the Litigant as beneficiary of the land. the Litigant claimed for compensation amounting to Rp59,264,000,000.00.

PLN menang di Pengadilan Negeri dengan putusan pada tanggal 5 Oktober 2015.

13. Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan No. 237/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 5 September 2014 yang diajukan oleh PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras selaku kontraktor atas dasar Kontraktor berdalil bahwa permintaan pengetestan dengan HVAC bertentangan dengan dokumen kontrak dan penawaran serta tidak dapat dilakukan tanpa adanya addendum, dan jika terjadi addendum akan menimbulkan kerugian bagi kontraktor karena harga untuk HVDC sebesar Rp. 138.000.000 sedangkan untuk HVAC adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 sehingga apabila hal itu terjadi menyimpangi Perjanjian No. 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008.

    PLN Kalah di pengadilan negeri dan saat ini dalam proses banding.

14. Gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 748/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh PT ISIS MEGAH MANDIRI atas dasar dinyatakan gagal Pelelangan / tender pengadaan jasa penarikan SKTM 20 kV Penyulang Baru untuk penunjang pemasaran GI Kemang dan Rencana Gardu Hubung PLN Jasdik No. 036.DP/LG/P2BJ(I)-A.LTA/2014 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Materiil Rp10.000.000 dan Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.

    Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

15. Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 638/XII/ARB-BANI/2014 yang diajukan oleh KSO PT Wijaya Karya, PT Flamboyant Huma Arta karena PLN selaku pemberi kerja dianggap cidera janji karena tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III tepat waktu sehingga pembangunan access tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.012.739.997,45 dan dwangsom Rp10.000.000.

    Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di BANI.

16. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 662/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 07 November 2014 diajukan oleh Ny. Tina Anggraeny terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan tapak tower SUTET yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor tanpa hak, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp10.000.000.000,00. Dan Immateriil sebesar Rp5.000.000.000.

PLN won at the District Court with the verdict made on 5 October 2015.

13. Lawsuit for Non-Performance at the Makassar District Court with Case Num. 237/Pdt.G/2014/PN.Mks on 5 September 2014 filed by PT Dwipa Konetra and PT Bina Energi Selaras as Contractors, on the grounds that the Contractors alleged that the request for HVAC testing was at odds with the contract and proposal documents and could not be performed without the presence of an addendum, and when an addendum was to be made the Contractors would have to bear a loss as the price of HVDC was Rp138,000,000 while the price of HVAC was Rp1,000,000,000 and thus, should that happen, the Agreement Num. 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008 would be violated.

    PLN lost at the District Court and has filed for Appeal.

14. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 748/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel filed by PT ISIS MEGAH MANDIRI on the grounds that the Litigant failed in the tender for the services related to SKTM 20 kV Penyulang Baru to support the marketing of GI Kemang and Rencana Gardu Hubung PLN Jasdik Num. 036.DP/LG/P2BJ(I)-A.LTA/2014, causing material losses to the Litigant amounting to Rp10,000,000 and material harm amounting to Rp1,000,000.

    The case is currently under trial at the District Court.

15. Request for Arbitration at the Badan Arbitrase Nasional Indonesia Num. 638/XII/ARB-BANI/2014 filed by KSO PT Wijaya Karya, PT Flamboyant Huma Arta because PLN as employer was accused to have failed to fulfill its promise to provide land for the construction of Access Road of Asahan III Hydro Power Plant on time, so that the construction of said access road had not taken place as per the agreement, causing losses amounting to Rp29,012,739,997.45 and penalty of Rp10,000,000.

    The case is currently under trial at BANI.

16. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 662/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel on 07 November 2014 filed by Tina Anggraeny against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the land used for the base of the SUTET tower located in Gadog Village, Megamendung Subdistrict, Bogor Regency, was allegedly used without obtaining the right, permission, or knowledge of the Litigant. The Litigant claimed for material compensation of Rp10,000,000,000.00 and immaterial harm amounting to Rp5,000,000,000.

PLN menang dalam tingkat Pengadilan Negeri putusan tanggal 7 September 2015.

17. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 754/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Sdr. Alex Lyandouw terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah No. 1242.PJ/554/DIR/2005 tanggal 18 April 2005. Penggugat meminta PLN menyatakan harga rumah dinas seharga Rp370.445.276 dan menmbayar ganti rugi sebesar Rp3.212.323.377. PLN menang dalam tingkat Pengadilan Negeri putusan tanggal 12 Agutus 2015.

    Penggugat menyatakan Banding. Perkara saat ini masih dalam proses banding.

18. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar yang diajukan oleh Sanusi Fajar sebagai PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah tercatat dalam Register Perkara Perdata No. 737/Pdt/G/2014/PN.DPS tanggal 13 Oktober 2014. Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan tapak tower SUTT keberadaan tiang listrik (tower) dengan ukuran 5m x 5m dan lintasan SUTT yang melewati tanah milik Penggugat seluas 800 m2 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp12.000.000.000,00. Dan Immateriil sebesar Rp738.793.320,00.

    Perkara saat ini dimenangkan PLN pada tingkat pengadilan negeri tanggal putusan 16 April 2015, Penggugat Menyatakan Banding. Perkara saat ini masih dalam proses banding.

19. Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan oleh Agung Rijoto (Penggugat) terhadap PT PLN (Persero) (Tergugat) di Pengadilan Negeri Indramayu yang tercatat dalam register perkara perdata No. 06/Pdt.G/2015/PN.Idm tanggal 17 Februari 2015. Gugatan diajukan atas dasar PLN belum melakukan pembayaran atas sisa tanah HGU No. 1 Desa Sumeradem seluas 135.426 M2. Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp20.313.900.000 (dua puluh milyar tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang kompensasi/sewa sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

    Pada Tingkat Pengadilan Negri PLN kalah dan saat ini dalam Proses Banding.

20. Gugatan perdata yang diajukan oleh Dorkas Marunduri – Djami, SH sebagai Penggugat terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat I yang tercatat dalam Register Perkara Perdata No. 190/Pdt/G/2014/PN.Kpg.

PLN won at the District Court with the verdict made on 7 September 2015.

17. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case Num. 754/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel filed by Alex Lyandouw against PT PLN (Persero). This lawsuit was filed on the grounds of the Agreement of the Sales and Purchase of Land and Residential Building Num. 1242.PJ/554/DIR/2005 on 18 April 2005. The Litigant demanded PLN to state that the value of the official residence was Rp370,445,276 and pay compensation amounting to Rp3.212.323.377. PLN won at the District Court with the verdict made on 12 August 2015.

    The Litigant filed for Appeal. The case is currently under Appeal.

18. Tort Lawsuit at the Denpasar District Court filed by Sanusi Fajar as the Litigant at the Denpasar District Court as registered on the Civil Lawsuit Register Num. 737/Pdt/G/2014/PN.DPS on 13 October 2014. The lawsuit was filed due to the land used for the base of the SUTT tower, with a 5m x 5m tower and SUTT line passing the 800 m2 land owned by the Litigant 800 located on Jalan Gatot Subroto Barat, Kuta Utara Subdistrict, Badung Regency, Bali. The Litigant claimed for material compensation of Rp12,000,000,000.00 and immaterial harm of Rp738,793,320.00.

    PLN won at the District Court based on the verdict on 16 April 2015, and the Litigant subsequently filed for Appeal. The case is currently under Appeal.

19. Tort Lawsuit and compensation filed by Agung Rijoto (the Litigant) against PT PLN (Persero) (Defendant) at the Indramayu District Court as registered in the Civil Lawsuit Register Num. 06/Pdt.G/2015/PN.Idm on 17 February 2015. The lawsuit was filed due to the allegations that PLN had not made payment for the remainder of the land in the HGU Num. 1 Sumeradem Village with an area of 135,426 m2. The Litigant claimed for material compensation amounting to Rp20,313,900,000 (twenty billion three hundred and thirteen million nine hundred thousand rupiah) and compensation for rent of Rp1,800,000,000 (one billion eight hundred million rupiah).

    At the District Court, PLN lost and subsequently filed for Appeal.

20. Civil Lawsuit filed by Dorkas Marunduri – Djami, SH as the Litigant against PT PLN (Persero) as Defendant I, as registered on the Civil Lawsuit Register Num. 190/Pdt/G/2014/PN.Kpg. The lawsuit was filed due to the

Gugatan diajukan atas dasar keberadaan 3 (tiga) tiang listrik PLN beserta jaringan yang berada didalam dan melintasi tanah milik Penggugat, dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp1.543.350.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pada Tingkat Pengadilan Negri PLN kalah dan saat ini dalam Proses Banding.

21. Gugatan perdata yang diajukan oleh Jaya Bin Jaiyan sebagai Penggugat terhadap PT PLN (Persero) selaku Turut Tergugat 1 yang tercatat dalam Register Perkara Perdata No. 57/Pdt.G/2015/PN.BKS tanggal 28 Januari 2015. Gugatan diajukan atas dasar Penggugat selaku pemilik tanah seluas 8.200 M2 yang terletak di Jl. PLTGU Muara Tawar Desa Segara Jaya Kec. Taruma Jaya Bekasi yang sejak tahun 2009 telah dikuasai oleh PLN sebagai PLTGU Muara Tawar, dimana tanah Penggugat belum diberikan ganti rugi oleh PLN. Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp24.600.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah rupiah) dan immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

    Perkara saat ini masih dalam proses pengadilan negeri.

22. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Dharma Lautan Utama selaku pemilik kapal KM Kirana III kepada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3BJB) Region Jawa Timur dan Bali selaku Tergugat I dan PT PLN (Persero) selaku Tergugat II dengan Register Perkara Perdata No. 115/Pdt.G/2015/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Gugatan diajukan atas dasar Penggugat sebagai pemilik Kapal KM Kirana III pada tanggal 4 Januari 2010 Nahkoda Kapal telah melakukan lego jangkar di area bebas berlabuh jangkar di selat Madura sehingga jangkar kapal KM Kirana III menarik kabel laut 150 kV Sirkit I I milik PLN, akibat kejadian tersebut listrik di pulau Jawa Madura menjadi padam. Dengan adanya kejadian tersebut jangkar kapal KM Kirana III telah di putus oleh petugas PLN dan petugas penjaga pantai. Dengan diputusnya jangkar Kapal KM Kirana III, maka Pemilik Kapal merasa rugi karena kapal tersebut tidak dapat beroperasi. Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp1.058.000.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Perkara saat ini masih dalam proses pengadilan negeri.

presence of 3 (three) grid towers belonging to PLN along with the power line located under and traversing the land belonging to the Litigant. In the lawsuit the Litigant claimed for material compensation amounting to Rp1,543,350,000.00 (one billion five hundred and forty three million three hundred and fifty thousand rupiah) and compensation for immaterial harm amounting to Rp7,000,000,000.00 (seven billion rupiah).

At the District Court PLN lost and subsequently filed for Appeal.

21. Civil Lawsuit filed by Jaya Bin Jaiyan as the Litigant against PT PLN (Persero) as Co-Defendant 1, as registered on the Civil Lawsuit Register Num. 57/Pdt.G/2015/PN.BKS on 28 January 2015. The lawsuit was filed due to the Litigant as owner of a land with an area of 8,200 m2 located at Jl. PLTGU Muara Tawar Desa Segara Jaya Kec. Taruma Jaya Bekasi which since 2009 had been controlled by PLN as Muara Tawar Combined Cycle Power Plant, had not received the compensation for the land from PLN. The Litigant claimed for compensation for material losses of Rp24,600,000,000.00 (twenty four billion six hundred million rupiah) and for immaterial harm of Rp50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah).

    The case is currently under trial at the District Court.

22. Tort Lawsuit filed by PT. Dharma Lautan Utama as owner of the vessel KM Kirana III to PT PLN (Persero) Penyaluran and Pusat Pengatur Beban (P3BJB) Region Jawa Timur & Bali as Defendant I and PT PLN (Persero) as Defendant II with Civil Lawsuit Register Num. 115/Pdt.G/2015/PN.Sda at Sidoarjo District Court. The lawsuit was filed by the Litigant as owner of the vessel KM Kirana III, as on 4 January 2010 the Captain of the Vessel dropped anchor in an anchor-free area in the Madura Strait, so that the anchor of KM Kirana III dragged the 150 kV undersea cable of Sirkit I I belonging to PLN, and owing to this incident power outages took place in Jawa and Madura. Due to that incident, the anchor rope of KM Kirana III was severed by PLN official and coast guard. With the severing of the anchor rope of KM Kirana III, the Owner of the Vessel absorbed a loss because the vessel could no longer be operational. The Litigant claimed for compensation for material losses of Rp1,058,000,000.00 (one billion fifty eight million rupiah) and for immaterial harm of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

    The case is currently under trial at the District Court.

23. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh H. Wiwik Anwarudin kepada PT PLN (Persero) sebagai Tergugat I dengan register perkara No. 184/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel. Gugatan diajukan atas dasar Penggugat selaku Tim P2TL di PLN Area Banten menuntut haknya berupa premi P2TL. Dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.1.517.924.400 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) dan Rp.189.740.550 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratuh empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

    Perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2015, dimana Putusan Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini (PLN menang).

24. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Salim Mengga, dkk terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat VIII dengan Register Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR. Gugatan diajukan atas dasar permasalahan warisan rumah di internal Penggugat, dimana Penggugat yang telah lama menguasai Rumah dan ahli waris keluarga yang lain belakangan ini menduduki dan menguasai rumah tersebut serta meminta PLN balik nama identitas pelanggan listrik kepada ahli waris yang baru. Penggugat menuntut agar PT PLN (Persero) mengembalikan perubahan identitas pelanggan pada alat pengukur dan pembatas (APP) milik PLN di lokasi sengketa rumah Penggugat atas nama Penggugat.

    Perkara saat inimasih dalam proses pengadilan negeri.

25. Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT. Sumber Usaha Radiator kepada PT. Humbahas Bumi Energi selaku Tergugat I dan PT. Bakara Bumi Energi selaku Tergugat II dan PT PLN (Persero) selaku Turut Tergugat. Gugatan diajukan atas dasar Pengugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian No. 012/KP/HBE-2/X/2010 tentang Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Cooling Radiator Beserta Aksesorinya untuk proyek PLTD Likupang di Kecamatan Likupang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Gugatan ini tercatat dalam Register Perkara Perdata No. 154/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 25 Maret 2015. Penggugat menuntut agar 3 unit cooling radiator pada PLTD Likupang yang saat ini dikuasai oleh PLN disita sebagai sita jaminan.

    Perkara saat inimasih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan.

23. Tort Lawsuit filed by H. Wiwik Anwarudin against PT PLN (Persero) as Defendant I with Case Register Num. 184/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel. The lawsuit was filed due to the Litigant as P2TL Team at PLN Area Banten claimed for their rights, i.e. P2TL premium. In the lawsuit the Litigant claimed for compensation of Rp1,517,924,400 (one billion five hundred and seventeen million nine hundred and twenty four thousand and four hundred rupiah) and Rp189,740,550 (one hundred and eighty nine million seven hundred and forty thousand and five hundred and fifty rupiah).

    The case has been decided by the South Jakarta District Court on 22 October 2015, whereby The Court's Verdict stated that the South Jakarta District Court had no authority to administer the case (PLN won).

24. Tort Lawsuit filed by Salim Mengga, et al. against PT PLN (Persero) as Defendant VIII with Civil Lawsuit Register Num. 12/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR. The lawsuit was filed due to the issue related to an inheritance in the form of a house located within the premises belonging to the Litigant, whereby the Litigant which had for a long time had control of the House and other beneficiaries from the family of late had occupied and taken control of said House, and had asked PLN to return the identity of the electricity account for the house to the new beneficiary. the Litigant claimed for PT PLN (Persero) to change the identity of the customer on the meter and limiter (APP) belonging to PLN at the location of the House in question belonging to the Litigant back to the Litigant's name.
    The case is currently under trial at the District Court.

25. Lawsuit for Non-Performance filed by PT. Sumber Usaha Radiator against PT. Humbahas Bumi Energi as Defendant I and PT. Bakara Bumi Energi as Defendant II and PT PLN (Persero) as Co-Defendant. The lawsuit was filed due to the Litigant and the Defendant having signed the Agreement Num. 012/KP/HBE-2/X/2010 on the Procurement, Delivery and Installation of Cooling Radiator and Its Accessories for the Likupang Diesel Power Plant project at Likupang Subdistrict, Manado, North Sulawesi, however the Defendant did not make payment for the deed that had been done by the Litigant, as agreed. The lawsuit is registered on the Civil Lawsuit Register Num. 154/Pdt.G/2015/PN.Mdn on 25 March 2015. The Litigant claimed for the confiscation of the 3 units of cooling radiator at Likupang Diesel Power Plant which are currently under PLN's control as collateral.

    The case is currently under investigation at the Medan District Court.

Dampak Perkara Hukum dan Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Seluruh perkara hukum tersebut di atas, tidak memberikan dampak finansial signifikan terhadap PLN. Perkara tersebut juga tidak menyebabkan adanya pengurus PLN yang dikenai sanksi dari otoritas yang berwenang dan tidak melibatkan jajaran Perseroan lainnya.

PLN memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dan proses hukum atas setiap pelanggaran kode etik dan wewenang yang terindikasi fraud, sebagai bentuk konsistensi Perseroan dalam menegakan hukum dan menerapkan praktek terbaik tata kelola perusahaan.

Impacts of the Litigations and Administrative Sanctions from the Authorities.

All of the litigations above bear no significant financial impact on PLN. These cases have not resulted in any member of the PLN's management to be sanctioned by the authorities, and have not involved the other parties within the Company.

PLN gave heavy sanctions in the form of job termination and legal proceedings for every violation of the code of conduct and authority in any proven allegations of fraud, demonstrating the Company's consistent approach in enforcing the rule of law and in enacting the best practices in corporate governance.

KODE ETIK/PEDOMAN PERILAKU

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa publik, Perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan Pemangku Kepentingan *(stakeholders)*. Perseroan dikelola secara profesional serta senantiasa menjaga dan membina hubungan dengan semua Pemangku Kepentingan *(stakeholders)* sesuai standar etika bisnis. Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, Perusahaan menerapkan Pedoman GCG secara konsisten, serta didukung dengan standar etika perilaku bisnis dan individu yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku PLN.

Pada Oktober 2005, Perseroan telah menerbitkan Pedoman Perilaku PLN *(Code of Conduct)* sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan budaya perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik ini harus menjadi panduan serta dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero).

Pedoman Perilaku PLN berisi mengenai kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN, serta mengatur aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, Pedoman Perilaku merupakan sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antara Pemangku Kepentingan *(stakeholders)* dengan Perseroan.

CODE OF CONDUCT

As a public service company, the Company is responsible to meet the expectations of the stakeholders. The Company is managed professionally and also maintains relationships with all the stakeholders in accordance with the standards of business ethics. Bearing all the responsibilities, the Company applies the GCG Guidelines consistently, supported with standards of business and individual ethics described in PLN Code of Conduct.

On October 2005, the Company published PLN Code of Conduct as an implementation and improvement of excellent practices in corporate culture and corporate governance. This code of conduct serves as a guideline and it must be adhered to by all employees of PT PLN (Persero).

PLN Code of Conduct contains the desirable habits and professional interaction in PLN environment, and regulates PLN leadership aspect, responsible membership, and internal and external professional relationship. Furthermore, the Code of Conduct is a tool to construct compatible, synergetic, and mutually beneficial relationship between the stakeholders and the Company.

PLN menerbitkan dan mensosialisasikan Pedoman Perilaku PLN *(Code of Conduct)* sebagai bentuk komitmen dan tekad Perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

PLN published and disseminated PLN Code of Conduct to demonstrate its commitment and determination to improve the quality of its good corporate governance practices

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan penyusunan ulang atas butir-butir ketentuan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang telah ada, menyesuaikan kembali aturan di dalamnya dengan Pedoman GCG dan praktek-praktek lazim terkini dan menampilkannya dalam bentuk yang lebih ringkas agar mudah dibawa saat beraktifitas. Penyusunan Buku Pedoman Perilaku tersebut dilaksanakan sesuai SK Direksi No. 548A/K/DIR/2010 tentang. "Buku Pedoman Perilaku".

Pedoman Perilaku Perusahaan ini digunakan sebagai landasan untuk membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten dalam menjalankan bisnis dan kegiatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar, selanjutnya disingkat dengan SIPP. Pada akhirnya komitmen disertai integritas yang tinggi untuk menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik akan menjamin perwujudan visi, misi, falsafah, nilai-nilai dan Budaya Perusahaan.

In 2010, the Company rearranged the provisions from the previous Company Code of Conduct, readjusted the regulations with GCG Guideline, and updated the common current practices, and presented them in a briefer form in order to be easily carried in all activities. The preparation of the Code of Conduct Book is based on the Decree of the Board of Directors Num. 548A/K/DIR/2010 on the Code of Conduct Book.

The Code of Conduct functions as a foundation to shape and regulate consistency of behavior in running the business and activities based on Trust, Integrity, Caring, and Learning (TICL). Eventually, the commitment, which is followed by a high level of integrity to apply the best practices in good corporate governance, guarantees the realization of the Company's vision, mission, philosophy, values, and culture.

PENYEBAR LUASAN KODE ETIK/PEDOMAN PERILAKU

Penyebar luasan Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi diantaranya melalui kewajiban menanda-tangani pernyataan kepatuhan terhadap butir-butir Pedoman Perilaku secara berkala.

DISSEMINATION OF THE CODE OF ETHICS / CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is disseminated and promoted by requiring the periodic signing of a statement of compliance with the contents of the Code of Conduct, among other things.

POKOK-POKOK KODE ETIK / PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku Perseroan menekankan kebijakan pelaksanaan perilaku insan perusahaan, yang menjadi tanggung jawab pegangan setiap insan Perseroan dalam berhubungan dengan seluruh individu jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan Perseroan, meliputi:

FUNDAMENTALS OF THE CODE OF ETHICS / CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct emphasizes the policy regarding the behaviors that are the responsibility of each element of the Company in maintaining relationship with all individuals and other parties who are doing business with the Company, such as:

1. Perilaku Pemimpin
   a. Memberikan gambaran ringkas mengenai sikap perilaku pemimpin yang harus dikedepankan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Sikap pemimpin tersebut harus:
   b. Menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku Saling Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar.
   c. Mempelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran yang out of the box.
   d. Memastikan semua unsur Perseroan bekerjasama secara sinergis guna mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik.
   e. Membina kader melalui proses CMC *(coaching, mentoring dan counselling)*.
   f. Mengantisipasi kondisi turbulence dan lingkungan yang selalu berubah dengan gesit *(agility)* dan fleksibel.
   g. Perilaku Pemimpin sangat diharapkan tidak bertentangan dengan sikap-sikap tersebut di atas.

2. Perilaku dalam Berhubungan Antar Insan PLN
   a. Saling Percaya
      i. Berpikir dan berperilaku positif.
      ii. Menghargai pendapat dan gagasan yang berbeda.
      iii. Obyektif dan transparan.
      iv. Menjalin hubungan yang harmonis.
   b. Integritas
      i. Jujur dan menjaga komitmen.
      ii. Memberikan keteladanan.
      iii. Adil dan bertanggung jawab.
      iv. Mengakui keterbatasan.
   c. Peduli
      i. Saling membantu, memotivasi dan memberi perhatian.
      ii. Santun, ramah dan terbuka.
      iii. Menjaga citra dan memberikan pelayanan terbaik.
      iv. Saling mengingatkan bila ada yang melanggar aturan.
   d. Pembelajar
      i. Memahami dan melaksanakan kebijakan Perseroan.
      ii. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
      iii. Berbagi ide, informasi, pengetahuan dan pengalaman.
      iv. Melakukan inovasi dan mendorong perubahan.

3. Sikap Korporasi Terhadap Hubungan Eksternal / Pemangku Kepentingan
   a. Hubungan dengan Pelanggan
      i. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.
      ii. Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan.
      iii. Memenuhi standar mutu pelayanan yang telah disepakati.
      iv. Menegakkan integritas pelayanan publik.

1. Leader Behaviors
   a. Giving brief description regarding leader behavior which should always be prioritized in performing daily duties
   b. Inspiring and becoming a role model to perform Trust, Integrity, Caring, and Learning
   c. Pioneering renewal and modernization in the Company, through out-of-the-box thinking
   d. Ensuring that all aspects of the Company mutually cooperate in order to reach excellent performance and improve service to the public
   e. Developing cadres through CMC (coaching, mentoring, and counseling) process
   f. Anticipating turbulent conditions in the environment flexibly and with agility
   g. Leader behavior is expected to not be in conflict with the above points

2. Behavior in Interaction with PLN Individuals
   a. Trust
      i. Thinking and behave positively
      ii. Respecting the different ideas and opinions
      iii. Objective and transparent
      iv. Building harmonious relationship
   b. Integrity
      i. Truthful and preserving commitment
      ii. Becoming a role model
      iii. Being fair and responsible
      iv. Admitting one's limitations
   c. Caring
      i. Helping, motivating, and caring each other
      ii. Being polite, friendly, and open
      iii. Maintaining good image and provide best service
      iv. Reminding each other if there is any violation
   d. Learner
      i. Understanding and complying with the Company's policies
      ii. Keeping improving competence
      iii. Sharing ideas, information, knowledge, and experience
      iv. Creating innovation and encouraging change

3. Corporation Behavior toward External Relationships/ Stakeholders
   a. Relationship with Customers
      i. Prioritizing customer satisfaction and trust
      ii. Fostering healthy, friendly, fair, honest, and proper communication
      iii. Complying with the agreed service quality standards
      iv. Upholding public service integrity

b. Hubungan dengan Mitra Kerja / Pemasok
   i. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan
   ii. Menilai secara objektif, transparan dan akuntabel
   iii. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan
   iv. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi
   v. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja
c. Hubungan dengan Pesaing
   i. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan
   ii. Menjadikan pesaing sebagai pemicu peningkatan diri
   iii. Menjaga kerahasiaan data dan informasi.
d. Hubungan dengan Investor
   i. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab
   ii. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan
   iii. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi
   iv. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif
   v. Menjaga kepercayaan Investor
e. Hubungan dengan Pemerintah / DPR
   i. Mendukung program dan menjaga kepercayaan Pemerintah/DPR
   ii. Membina hubungan yang harmonis dan konstruktif
   iii. Memberikan laporan data secara benar dan akurat
f. Hubungan dengan Masyarakat
   i. Mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik
   ii. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang mengalami musibah
   iii. Menghormati tata nilai daerah
   iv. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
g. Hubungan dengan Media Massa
   i. Menjaga dan mengutamakan citra Perseroan
   ii. Memberikan informasi yang aktual, relevan, dan berimbang
   iii. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya.
h. Hubungan dengan Organisasi Profesi / Institusi Pendidikan
   i. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
   ii. Menerapkan standar-standar dan sertifikasi yang disepakati bersama
   iii. Memberikan kesempatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat.

b. Relationship with Suppliers
   i. Maintaining and prioritizing the interest of the Company
   ii. Evaluating objectively, transparently, and accountably
   iii. Making work contract benefit each other
   iv. Fostering truthful and effective communication by maintaining the confidentiality of data and information
   v. Giving sanctions to those who do not comply with the work agreement
c. Relationship with Competitors
   i. Maintaining robust competition through excellence services and products
   ii. Treating competitors as development triggers
   iii. Maintaining the confidentiality of data and information
d. Relationship with Investors
   i. Choosing trustworthy, credible, and responsible investors
   ii. Creating mutually beneficial agreements
   iii. Fostering truthful and effective communication by maintaining the confidentiality of data and information
   iv. Providing actual, accurate, and prospective information
   v. Maintaining investors' trust
e. Relationship with the Government
   i. Supporting the Government's programs and preserve trust
   ii. Fostering harmonious and constructive relationship
   iii. Providing valid and accurate reports
f. Relationship with the Society
   i. Building and maintaining good relationship
   ii. Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs and helping disaster victims
   iii. Respecting local culture
   iv. Engaging in conservation and sanitation of the environment
g. Relationship with Mass Media
   i. Maintaining and prioritizing the image of the Company
   ii. Providing actual, relevant, and balanced information
   iii. Accepting and following up any constructive criticisms by observing the aspects of risk and cost
h. Relationship with Professional Organizations/ Educational Institutions
   i. Fostering continuous collaboration to gain information on science and technology development
   ii. Applying the agreed standards and certifications
   iii. Providing opportunities in education, research, and social development

iv. Hubungan dengan Penegak Hukum
v. Obyektif, transparan dan taat aturan
vi. Menjalin kerjasama dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan aset Perseroan
vii. Melaksanakan program konsultatif dan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

iv. Relationship with Law Enforcers
v. To be objective, transparent, and comply with the regulations
vi. Fostering cooperation in order to preserve the safety and security of assets
vii. Conducting consultative programs and legal assistance in accordance with the law

PEDOMAN PERILAKU BERLAKU BAGI SELURUH INSAN PLN

Untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi, Perseroan menyebarkan Pernyataan Kepatuhan untuk semua Pegawai agar mematuhi dan melaksanakan Pedoman Peraturan tanpa kecuali. Penandatanganan pernyataan ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012, sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh insan PLN dari Manajemen Puncak hingga pelaksana lapangan untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku ini adalah bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG).

Perseroan mewajibkan seluruh jajaran Organ Perusahaan dan Pegawai, Anak Usaha serta Pemangku Kepentingan *(stakeholders)* lainnya untuk turut mendukung, memahami dan mematuhi Pedoman Perilaku, Pedoman GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berhubungan dan berbisnis dengan Perseroan dan bersama-sama menegakkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari tindakan yang merugikan negara.

CODE OF CONDUCT APPLIED FOR ALL PLN INDIVIDUALS

To develop compliance culture in the entire organization, the Company published Compliance Statement to all employees so that the Code of Conduct is entirely adhered to without exception. This statement was signed in mid 2012 as a form of commitment of the entire PLN individuals, from the top management to the staff, to improve the good corporate governance. The practices and the establishment of the Code of Conduct are part of the Good Corporate Governance (GCG) implementation.

The Company requires the management and employees, subsidiaries, and stakeholders to support, comprehend, and comply with the Code of Conduct, GCG Guideline, and the regulations in maintaining business relationships with the Company and together establishing a clean business environment free from any actions which may harm the country.

Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika merupakan wujud dantekad seluruh jajaran dalam menerapkan praktek terbaik tata kelola perusahaan yang bersih bebas dari penyimpangan.

The signing of the Statement of Corporate Values and Ethics is the Company's manifestation of its determination in achieving the best good corporate governance practices, creating a clean working environment, and preventing irregularities and fraud activities.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK / PEDOMAN PERILAKU

1. Mitra kerja / pemasok PLN yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan;
2. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner secara berjenjang, mulai dari teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
3. Untuk jenis pelanggaran yang mengandung unsur pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib;

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS / CODE OF CONDUCT

1. Partners / suppliers to PLN with proven violations will be penalized in accordance with the regulations and the Company's decision;
2. Employees proven to have violated the Code of Conduct may be subject to staged disciplinary measures, ranging from oral or written reprimands, to stern warning, or suspension up to termination of employment;
3. Offenses with legal ramifications will be forwarded to the authorities;

4. Sifat dari tindakan disipliner yang diambil, bergantung kepada keseriusan jenis pelanggaran yang dilakukan serta situasi terkait.

JUMLAH PELAKU PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Pada tahun 2015 jumlah pegawai PLN yang melakukan pelanggaran terhadap butir-butir Pedoman Perilaku ada 96 orang.

Akibatnya 20 orang dikenakan sanksi ringan, 62 orang dikenakan sanksi sedang dan 14 orang dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian status hubungan kerja.

BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-nilai perusahaan sebagaimana disederhanakan dalam tag-line SIPP, yakni Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar, dan dijabarkan dengan singkat dan jelas pada uraian "Profil Perusahaan" terus diusahakan untuk disosialisasikan kepada seluruh pegawai Perseroan.

Saling percaya

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

Integritas

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Peduli

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

Pembelajar

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

4. The nature of disciplinary action taken depends on the severity of the offense committed and the relevant circumstances.

NUMBER OF OFFENDERS AND SANCTIONS TAKEN

In 2015, a total of 96 PLN employees violated the fundamentals of the Code of Conduct.

As a result, 20 received light penalties, 62 moderate penalties and 14 serious penalties in the form of termination of employment.

COMPANY CULTURE

The Company's values, as abbreviated into TICL (Trust, Integrity, Caring, and Learning) and briefly and clearly described in the Company Profile section, continue to be disseminated to all employees.

Trust

The atmosphere of mutual respect and openness among members of the Company, based on conviction of integrity, good will, and competency from related parties in a clean and ethical business conduct.

Integrity

Manifestation of the Company's members' behaviors which are consistently showing truthfulness, conformity between words and actions, responsibility to the Company's management and property utilization for short and long term interest, and responsibility to all stakeholders.

Caring

Reflection of the intention to maintain and preserve the work-life quality, which is perceived by the Company's members and all stakeholders in order to grow together, driven by sensitivity to every issue and the pursuit of the best solutions.

Learning

The behavior of the Company's members to always have courage to keep questioning the established systems and practices of development, management, and operation, and to keep making efforts in mastering the latest knowledge and technologies to ensure sustainable development of the Company.

SEBARKAN VIRUS PERUBAHAN- MENUMBUHKAN SPIRIT INTEGRITAS

SPREADING THE REVOLUTION VIRUS – FOSTERING THE SPIRIT OF INTEGRITY

Dengan mengambil momentum peringatan Hari Anti Korupsi (HAKI) pada 9 Desember, PLN kembali mengadakan kegiatan Jambore Pelopor PLN Berintegritas. Kegiatan ini adalah bentuk *"celebrating the spirit of integrity."* Jambore Pelopor PLN Berintegritas ini juga diselenggarakan bersamaan dengan acara Pekan Anti Korupsi yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.

Selama empat hari yaitu mulai 10 sampai 13 November 2015, perwakilan pelopor dari seluruh Unit PLN di Indonesia dipompa semangatnya dan diberikan pembekalan yang lebih dalam tentang wawasan anti korupsi dan nilai-nilai positif lain dengan narasumber yang kredibel, antara lain dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), penggagas *crown founding* www.kitabisa.co.id yaitu M. Alfatih Timur, serta pengajar bagi masyarakat terasing dan terpencil di Indonesia yaitu Butet Manurung.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen Direksi PLN untuk menciptakan pelayanan PLN yang bersih dan berintegritas. Berbagai kegiatan digalangkan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, mulai dari In house training, tatap muka, hingga *focus group discussion.*

Selain menambah wawasan anti korupsi, Jambore PLN Berintegritas tahun ini juga diisi dengan kegiatan PLN Peduli yang digawangi oleh pelopor PLN Berintegritas. Seluruh pelopor terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat di Desa Sindang Sari, Kecamatan Suka Sari untuk membangun pos keamanan dan memberikan bantuan pelayanan lainnya, seperti perbaikan TK/ TPA. Mulai dari pembelian perlengkapan, pembangunan, hingga penataan dan pemberisihan, semuanya dilakukan oleh pelopor mulai dari pagi hingga petang. Dengan demikian, semangat

Taking the momentum of the Anti Corruption Day celebration on 9 December, PLN held "Jambore Pioneer PLN Integrity" event. This event is aimed at "celebrating the spirit of integrity". Jambore Pelopor PLN Berintegritas was also held together with the Anti Corruption Week which was conducted in Bandung, West Java.

In four days, starting from 10 to 13 November 2015, the representatives of pioneers from all PLN Units in Indonesia were encouraged and given a deeper understanding on anti-corruption knowledge and other positive values by credible speakers, such as from the Directorate of Gratification of the Corruption Eradication Commission (KPK), an initiator of crowd founding www.kitabisa.co.id M. Alfatih Timur, a teacher of the outcast and remote societies in Indonesia, Butet Manurung.

This event demonstrated PLN's commitment to creating clean and integrated PLN services. Many activities are held to cultivate the values, starting from in-house training, face-to-face activity, to group discussions.

Besides providing broader insight regarding anti-corruption, this year's Jambore PLN Berintegritas was also complemented with PLN Peduli activity, which was carried out by PLN Berintegritas pioneers. All pioneers went to the location to support the people of Sindang Sari Village to build security station and to provide them other services, such as TK/TPA renovation. The activity processes include equipment purchase, construction, arrangement and cleaning, all done by the pioneers from morning to evening.

kebersamaan diantara para pelopor dapat semakin kokoh, sekaligus juga meningkatkan caring and giving kepada lingkungan sekitar.

Pemilik Yayasan AT-Taqwa, Nani sangat antusias menerima kunjungan Pelopor PLN Berintegritas. Ia mengatakan bahwa yayasannya yang saat ini mengelola sekitar 90 siswa TPA sangat membutuhkan perlengkapan belajar mengajar.

Kegiatan Jambore ini akan terus dilakukan untuk menyebarkan virus perubahan dan menumbuhkan spirit intergitas melalui pelopor PLN berintegritas.

Therefore, the pioneers strengthened their rapport and fostered the spirit of caring and giving to the surroundings.

The owner of At-Taqwa Foundation, Nani, was very enthusiastic to welcome PLN Berintegritas pioneers. She said that her foundation was currently taking care of about 90 students who desperately need learning tools.

This Jambore activity will continue its movement to spread the revolution virus and to foster the spirit of integrity through PLN Berintegritas.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

hal. 476 - 509

Menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberi hasil terbaik kepada para pemangku kepentingan dengan sumber daya yang tersedia melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan para pihak sebagai subyek program baik dari unsur pegawai, pemerintah, mitra kerja maupun pelanggan.

Showing the Company's commitment to give the best result to stakeholders with available resources through corporate social responsibility programs involving employees, government, business partners and customers.

MAKSUD DAN TUJUAN

PLN berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan secara menyeluruh dengan konsisten guna mewujudkan misi perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, yakni: pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya, media massa dan masyarakat sekitar, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Perbaikan kualitas pelaksanaan tersebut mengandung maksud pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak terbatas pada kegiatan pemberian bantuan semata, melainkan menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengembangan usaha jangka panjang Perseroan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan CSR PLN adalah:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Sesuai dengan tujuan tersebut, PLN secara berkala menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi realisasi program tanggung jawab perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

PURPOSE AND OBJECTIVE

PLN strives to consistently improve the overall quality of its CSR program in order to fulfill the Company's mission, while creating quality growth and meeting the expectations of all stakeholders, namely: the customers, partners, governments, employees, non-governmental organizations, mass media and the surrounding communities, while maintaining environmental sustainability.

Improvement in CSR implementation quality means the purpose of CSR is not restricted to the provision of assistance, but rather acts as one of the supporting elements of the Company's success in long-term business development, with clearly defined objectives and accountable measurements of success.

The objectives of CSR activity implementation are:

1. Creating a harmonious relationship between the Company and the public.
2. Encouraging the growth and development of small enterprises and cooperative union management so they can be more independent, resilient, competitive, and professionally managed.
3. Fostering an approach towards development of small enterprises and cooperative unions based on equality, independence, professionalism and ethics.
4. Fostering environmental sustainability, as well as assisting the improvement of quality of life through the development of infrastructure in education, public health, and welfare.

Based on these objectives, PLN periodically prepares, implements and evaluates the realization of the corporate social responsibility program which involves, and provides added value, for all stakeholders.

VISI DAN MISI KEGIATAN CSR PLN

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang pelaksanaan kegiatan CSR tersebut, PLN menetapkan Visi dan Misi kegiatan CSR sebagai berikut.

Visi

"Menjadikan CSR PT PLN (Persero) terdepan dalam meningkatkan kebutuhan Kelistrikan dengan tetap memperhatikan keharmonisan seluruh lapisan *stakeholder* dan Lingkungan".

Misi

"Melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu menjembatani semua kepentingan stakeholder perusahaan agar dapat berjalan sinergis menjalankan dan memajukan citra perusahaan".

PLN CSR VISION AND MISSION

In order to achieve the long-term objectives of the CSR activities, PLN has formulated its Vision and Mission as follows:

Vision

"Making the CSR of PT PLN (Persero) the leading program in increasing the electricity supply, while maintaining harmony among stakeholders and the environment".

Mission

"Implementing social activities in order to build links for all the stakeholders, so they can interact in synergy to maintain and promote the image of the Company".

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN CSR

PLN melaksanakan kegiatan CSR yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab dalam lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab produk, dengan tujuan pencapaian misi perusahaan dan terpenuhinya harapan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan oleh masing-masing unit kerja, dan sumber dana untuk membiayai kegiatan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun.

Mengingat kegiatan di bidang ketenagakerjaan, tanggung jawab produk dan keselamatan kerja memberi dampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, PLN berusaha untuk merealisasikan kegiatan di bidang CSR dengan sungguh-sungguh.

Bentuk kegiatan CSR PLN pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yakni:

1. CSR dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dasar Hukum dan Kebijakan Pelaksanaan Program CSR PKBL

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaannya, kegiatan CSR PLN dalam bentuk PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada tahun 2012, 2013 dan 2015 terdapat beberapa perubahan kebijakan dari Kementerian BUMN, yaitu:

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sudah mengalami beberapa perubahan di tahun 2012 dan 2013, 2015 yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Perubahan atas Peraturan No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

SCOPE AND FUNDING OF CSR ACTIVITIES

PLN implements CSR activities that fully support the environment, workforce, occupational health and safety, and product responsibility with the objectives of fulfilling the Company's mission and meeting stakeholder expectations.

The CSR program is conducted by work units, and the funds to cover the cost of activities are allocated annually in the Company Work and Budget Plan (RKAP).

Given that the activities regarding labor practices, product quality assurance and occupational safety significantly influence long-term business sustainability, PLN strives to carry out CSR programs seriously.

CSR activities implemented by PLN consist of two main activities, which are:

1. Activities in which stakeholders are the beneficiaries are mandated in Articles 74 of the Government Regulation Num. 40 of 2007 on Limited Liability Company, and Government Regulation Num. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company.
2. Activities in the form of the Partnership and Community Development Program.

Legal Basis and Policy of CSR PKBL Program

As a state-owned enterprise, PLN is obliged to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). The activities in this program are based on Regulation of the SOE Minister Num. PER 05/MBU/2007, dated 27 April 2007 regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs.

In 2012, 2013, and 2015 some changes were made to the policies of the Ministry of SOE, such as:

Regulation of the Minister of SOE Num. PER-05/MBU/2007 on the Partnership Program of State-Owned Entities with Small Businesses and Community Development Program has been amended a number of times, i.e. in 2012, 2013 and 2015, as follows:

1. Regulation of the Minister of SOE Num. PER-20/MBU/2012, dated 27 December 2012, on the Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Num. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs.
2. Regulation of the Minister of SOE Num. PER-05/MBU/2013, dated 1 May 2013, on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Num. Per-05/MBU/2007 on SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs,

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. Per-05/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2013 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013.

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015, tanggal 22 Mei 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Peraturan Menteri ini langsung diimplementasikan menggantikan Peraturan Menteri BUMN sebelumnya perihal yang sama.

6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Peraturan Menteri ini langsung diimplementasikan menggantikan Pemen BUMN sebelumnya perihal yang sama.

Sumber Dana Program CSR – PKBL

Memperhatikan ketentuan Program Kemitraan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 03 Juli 2015 dan sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 09 Juli 2015, perihal Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, dimana PLN mendapatkan alokasi anggaran PKBL Tahun 2015 senilai Rp234,53 miliar.

Sementara untuk melaksanakan Program CSR sebagaimana dimaksud oleh Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 sumber pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan. Pada tahun 2015, perusahaan tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab perusahaan yang dilaksanakan di tahun 2015 mencakup kegiatan bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, kesehatan, sarana fasilitas umum, tempat ibadah, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan.

as amended by the Regulation of the Minister of SOE Num. Per-20/MBU/2012, dated 27 December 2012.

3. Regulation of the Minister of SOE Num. PER-07/MBU/2013, PER-05/MBU/2013, dated 27 June 2013, on the Third Amendment to Regulation of the Minister of SOE Num. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs, as amended by the Regulation of the Minister of SOE Num. PER-20/MBU/2012, dated 27 December 2012, and Regulation of the Minister of SOE Num. PER-05/MBU/2013 dated 1 May 2013.
4. Regulation of the Minister of SOE Num. PER-08/MBU/2013, dated 10 September 2013, on the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Num. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs.
5. Regulation of the Minister of SOE Num. PER-07/MBU/05/2015, dated 22 May 2015, regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs. This regulation is effective immediately and replaces the previous Regulations of the Minister of SOE concerning the same issue.
6. Regulation of the Minister of SOE Num. PER-09/MBU/07/2015, dated 3 July 2015, regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs. This regulation is effective immediately replacing the previous Regulations of the Minister of SOE concerning the same issue.

CSR – PKBL Program Funding

In regard to the Regulation of the Minister of SOE Num. PER-09/MBU/07/2015, dated 3 July 2015, on SOE Partnership Programs and according to Letter of the Minister of SOE Num. S-23/D2.MBU/08/2015 dated 9 July 2015, concerning Changes to the Resolutions of Shareholders on the 2014 Annual Report, PLN acquired a CSR budget allocation in 2015 of Rp234.53 billion.

Meanwhile, the funds for the CSR program referring to Articles 74 of Law Num. 40 of 2007 were taken from the Company's budget allocation. In 2015, the Company did not allocate any budget for such programs.

Overall, the Company's CSR activities in 2015 covered activities concerning the environment, workforce, occupational health and safety, partnership program and community empowerment program, public facilities and infrastructure development, as well as natural disaster aid and social aid.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN, KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) DAN PERUBAHAN IKLIM

Misi perusahaan menegaskan bahwa PT PLN (Persero) akan "Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan". Oleh sebab itu, PLN selalu berusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN secara maksimal telah berupaya mengurangi pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu pada instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi maupun pada anak-anak usaha.

Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai implementasi dari misi tersebut di atas, Perseroan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmennya dalam bidang lingkungan.
Adapun Kebijakan Lingkungan yang mendukung Komitmen Perusahaan sebagai berikut :

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara Kebijakan Lingkungan, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.

SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENT, ELECTRICAL SAFETY (K2) AND CLIMATE CHANGE

In line with one aspect of the Company's mission, which is "Running environmentally business activities", PT PLN (Persero) is always concerned with environmental issues in all its activities. PLN has devoted maximum efforts to minimize the impact of its land, water and air pollution, which includes carefully controlling its greenhouse gas emissions. These efforts are exercised comprehensively across all PLN activities from the generation of electricity, to the development of transmission and distribution units.

Environmental, Occupational Health and Safety Policy

To realize its mission, the Company includes the environmental aspect as one of the factors in performance assessment of PLN business units across Indonesia. Through this performance assessment, the Company will be able to evaluate the realization of its commitment to environmental issues.

To realize these commitments, PLN has established an Environment Policy, as follows:

1. Preventing environmental pollution and biodiversity degradation around the Company's business areas, as well as protect the safety and health of its workers.
2. Complying with regulations and other stipulations, as well as controlling the important aspects and effects on the environment of any activity, process and product from various work units and subsidiaries.
3. Documenting, implementing, maintaining and reviewing periodically the Company's environmental policies to ensure their continued relevance and suitability, and use them as a basic guideline for the specific environmental management applied to each work unit and subsidiary.
4. Developing these policies as the foundation for determining and evaluating the achievement of environmental goals and objectives.
5. Encouraging each working unit and subsidiary to continuously improve the management of the environmental protection program, as well as safety and health programs.
6. Preparing and facilitating resources required to implement and conduct the environmental policies so that every unit, subsidiary and working partner can apply those policies gradually, with consideration of the Company's capability and local environment conditions.

7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan.
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (*lender*) dan masyarakat luas.

Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Sekitar Instalasi

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, Perseroan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, PT PLN (Persero) dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen perusahaan dalam bidang lingkungan.

1. Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
2. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Progres Kegiatan Bidang Lingkungan Dalam Pembangunan Proyek Ketenagalistrikan

1. SUTET 500kV Paiton – Antosari dan SUTT 150kV Antosari – Kapal Proyek Java Bali *Crossing* (Pendanaan ADB)
   Perbaikan *draft* dokumen *Update* LARAP *(Land Acquisition and Resettlement Action Plan)* final sesuai dengan masukan dari ADB *(Asian Development Bank)*
2. PLTA Nua 2 x 4,4 MW (Pendanaan KFW)
   Pelaksanaan studi lingkungan sesuai dengan hasil *Feasibility Study*
3. Indonesia *Second Power Transmission Development* Project (IPTD 2 – Group 2; Pendanaan World Bank) .
   Pelaksanaan survey lapangan untuk penyusunan dokumen EMP *(Environmental Management Plan)* dan LARAP *(Land Acquisition And Resettlement Plan).*
4. PLTA Wae Racang 2 x 4,4 MW (Pendanaan KFW)
   - Surat pengajuan permohonan izin lingkungan sudah disampaikan ke BLH Kab Manggarai, saat ini menunggu jadwal pertemuan dengan BLH untuk membahas dokumen UKL UPL *eksisting.*
   - Pelaksanaan studi EMP *(Environmental Management Plan)* dan LARAP ditangguhkan dikarenakan akan dilaksanakan *review feasibility study*
5. PLTA Poko 2x117 MW *(Pendanaan World Bank)*
   Proses Pengadaan Konsultan ESIA *(Environmental Social Impact Assessment)*/AMDAL

7. Developing the environmental concerns and safety and health program as the fundamental aspect of all management and individual employee's concerns.
8. Stimulating community development in the area of each working unit and subsidiary in the effort to make the Company an integral part of that community and its surroundings.
9. Participating in Government programs for reducing greenhouse gas emissions.
10. Ensuring that the policies will always be available for all stakeholders, including lenders and the community in general.

Activities in the Environments of Electricity Development Projects

To implement the policies mentioned above, the Company determined that environmental aspects are subject to performance review programs implemented in all PLN business units across Indonesia. Through the performance review, the Company will be able to evaluate its commitment to the environment.

1. PLN routinely conducts environmental management and monitoring activities in accordance with its environmental certification (AMDAL/UKL-UPL).
2. Performance Rating Program for the Environment, known as PROPER, was implemented by the Ministry of Environment (MoE).

Progress of Activities in the Environment of Electricity Development Projects

1. Extra High Voltage Transmission 500kV Paiton-Antosari and High Voltage Transmission 150kV Antosari-Kapal Project Java Bali Crossing (ADB Funding)
   Amending updated final draft of LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) as advised by ADB (Asian Development Bank).
2. Nua Hydro Power Plant 2 x 4,4 MW (KFW Funding)
   Conducting environmental studies in accordance with feasibility study results.
3. Indonesia Second Power Transmission Development Project (IPTD 2-Group 2; World Bank Funding).
   Conducting field surveys for the preparation of EMP (Environmental Management Plan) and LARAP (Land Acquisition and Resettlement Plan) documents.
4. Wae Racang Hydro Power Plant 2 x 4,4 MW (KFW Funding)
   - Letter of application for environmental permit was submitted to BLH Manggarai district, the Company is currently waiting to schedule a meeting to discuss the UKL UPL document with BLH.
   - EMP (Environmental Management Plan) and LARAP studies were postponed while the feasibility study is being reviewed.
5. Poko Hydro Power Plant 2x117 MW (World Bank Funding)
   The ESIA (Environmental Social Impact Assessment)/ AMDAL consultant procurement process is underway.

6. PLTA Bakaru II 2 x 63 MW (*Loan* KFW)
   Pekerjaan persiapan penyusunan dokumen KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)

7. PLTA Kumbih 3 x 15 MW (*Loan* KfW)
   Draft KA ANDAL sudah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dibahas bersama Tim Teknis

8. PLTP Mataloko 20 MW (*Loan* KFW)
   Finalisasi *Term of Reference* konsultan penyusun dokumen Lingkungan
9. PLTP Ulumbu 2 x 5 MW (*Loan* KFW)
   Finalisasi *Term of Reference* konsultan penyusun dokumen Lingkungan

Proyek Percepatan 35.000 MW

1. PLTGU Muara Karang (1x500 MW)
   Revisi dokumen AMDAL sesuai Berita Acara sidang komisi telah disampaikan, PLN sedang mempersiapkan perizinan KRK (Ketetapan Rencana Kota), SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah), RTLB (Rencana Tata Letak Bangunan) dan Rekomendasi Peil Banjir sebagai syarat penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
2. PLTGU Jawa-2 800 MW
   Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) telah terbit pada bulan Juni 2015. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan, RKL, RPL telah dipresentasikan pada sidang teknis dan saat ini sedang pengajuan penerbitan SKKL.
3. PLTU Lombok FTP-2 (2 x 50 MW)
   Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan telah disampaikan untuk dapat dibahas dalam sidang komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan

4. PLTGU Lombok *Peaker* (150 MW)
   Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan belum dapat disahkan dikarenakan PLN harus mengajukan perubahan Kesesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah ke BKPRN.
5. PLTMG Kupang *Peaker* (40 MW)
   Proses penyusunan dokumen UKL UPL
6. PLTMG Maumere *Peaker* (40 MW)
   Proses penyusunan dokumen UKL UPL
7. PLTU Timor 1
   Proses pengadaan konsultan penyusun dokumen Lingkungan

Penyusunan Dokumen Lingkungan (DELH – Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup / DPLH - Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) melalui Surat Edaran KLH No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

6. Bakaru Hydro Power Plant II 2 x 63 MW (KFW Loan)
   Preparing documents for EIA Terms of Reference/Term of Reference of the Environment Impact Assessment (Terms of Reference for the Environmental Impact Analysis).
7. Kumbih Hydro Power Plant 3 x 15 MW (KFW Loan)
   Term of Reference of the Environment Impact Assessment draft has been submitted to the Ministry of Environment and will be further discussed with the technical team.
8. Mataloko Geothermal Power Plant 20 MW (KFW Loan)
   Finalization of the Terms of Reference for the consultants of environmental documents.
9. Ulumbu Geothermal Power Plant 2 x 5 MW (KFW Loan)
   Finalization of the Terms of Reference for the consultants of environmental documents.

35,000 MW Acceleration Project

1. Muara Karang Combined Cycle Power Plant (1x500 MW)
   Revision to the AMDAL documents according to the minutes of the commission meeting has been submitted, and PLN is preparing the permits for KRK (Municipal Planning Stipulations), SIPPT (License to Operate on Land), RTLB (Building Zoning Plan) and Flood-Free Area Recommendation as the requirements for Environmental Feasibility Confirmation Letter permit.
2. Jawa-2 Combined Cycle Power Plant 800 MW
   Term of Reference of the Environment Impact Assessment was approved on June 2015. Environment Impact Assessment, RKL, RPL documents have been presented in technical meetings and are currently in the process of application for SKKL issuance.
3. Steam Power Plant Lombok FTP-2 (2 x 50 MW)
   Term of Reference of the Environment Impact Assessment have been submitted to be discussed at Environment Impact Assessment assessor committee meeting.
4. Lombok Peaker Combined Cycle Power Plant (150 MW)
   Term of Reference of the Environment Impact Assessment could not be approved as PLN had to amend the Alignment with Regional & Zoning Code to BKPRN.
5. Kupang Peaker Gas Engine Power PLant (40 MW)
   UKL UPL documents are in preparation.
6. Maumere Peaker Gas Engine Power PLant (40 MW)
   UKL UPL documents are in preparation.
7. Timor 1 Steam Power Plant
   Procuring consultants for the preparation of environmental documents.

Preparation of Environmental Documents (DELH – Environmental Evaluation Document/ DPLH – Environmental Management Document)

The Ministry of Environment and Forestry through Circular Letter Num. B-14134/MENLH/KP/12/2013 dated 27 December 2013 on the implementation of Article 121 Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and

mewajibkan seluruh kegiatan yang telah memiliki izin usaha dari Tahun 2009 untuk menyusun dokumen lingkungan (DELH/DPLH) dan memiliki izin lingkungan. Oleh karena itu, seluruh unit operasional PLN yang sudah memiliki izin usaha sebelum Tahun 2009, baik unit bisnis Pembangkit, Jaringan, Distribusi dan Perkantoran diwajibkan menyusun dokumen Lingkungan (DELH/DPLH). Sampai saat ini, dari 184 unit yang berkewajiban menyusun dokumen lingkungan, 89 unit telah menyelesaikan dan sisanya masih tahap penyusunan.

Program PROPER

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengumumkan hasil penilaian PROPER tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.557/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014 – 2015 tanggal 20 November 2015. Tingkat ketaatan unit PLN (tanpa Anak Perusahaan) mengalami peningkatan dari 51% (tahun 2014) menjadi 67%. Jumlah peringkat PROPER Unit PLN berturut-turut dari yang terendah yaitu Merah 23 Unit, Biru 47 Unit, Hijau 2 Unit.

Penggunaan Bahan-Bahan Daur Ulang dan Pengembangan Penggunaan Energi Terbarukan.

PLN berupaya meningkatkan penggunaan bahan-bahan daur ulang dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, dengan merealisasikan program-program:

1. Penggunaan bahan-bahan daur ulang:
   a. Penggunaan air sampling rack.
   b. Menggunakan proses purifier pada minyak pelumas.
   c. Menggunakan purifier dan reklamasi pada minyak oli trafo.
   d. Menggunakan kertas bekas.

Management, obliged every activity which have obtained license to operate from 2009 to prepare Environmental Documents (DELH/DPLH) and to possess environmental licenses. Due to these reasons, all PLN operational units which possess licenses before 2009, such as Power Plants, Network, Distribution, and Offices are required to prepare environmental documents (DELH/DPLH). Until now, from 184 units required to prepare environmental documents, 89 units have completed the documents and the remainder are still in the preparation process.

PROPER Program

The Ministry of Environment and Forestry announced the results of 2015 PROPER assessment through the Ministry of Environment and Forestry Decree Num. SK.557/Menlhk-Setjen/2015 on the Results of Performance Rating in Environmental Management for 2014-2015 dated 20 November 2015. The compliance of PLN units (not including subsidiaries) increased from 51% (2014) to 67%. The successive PROPER rating of PLN Units is 23 Red-rated units, 47 Blue-rated units, and 2 Green-rated units.

Use of Recycled Materials and Development of Renewable Energy

PLN strives to use recycled materials or use renewable energy, namely by:

1. The use of recycled materials:
   a. The use of rack water sampling.
   b. Performing purification of lubricants.
   c. Performing purification and reclamation of transformer oil.
   d. Using recycled paper.

e. Menggunakan kembali limbah minyak HSD / MFO, melalui separator ulang atau memompa kembali ke *receiving* tank dan digunakan kembali.
f. Memanfaatkan sampah daun untuk pembuatan kompos.
g. Memanfaatkan limbah besi untuk dipakai kembali.

2. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan: Dalam RUPTL Tahun 2015 - 2024, PLN merencanakan untuk membangun pembangkit energi terbarukan skala besar dan pembangkit berbahan bakar gas dengan kapasitas total 28,27 GW, yang terdiri dari PLTGU, PLTG/MG, PLTP, PLTA dan PLT EBT lainnya seperti pembangkit termal modular, PLTS, PLTB dan lainnya.

3. Untuk meningkatkan efisiensi energi, akan dilakukan rehabilitasi PLTU Suralaya Unit 3 dan 4 dengan target peningkatan efisiensi sebesar 3%.

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

PLN menggalang kerjasama dengan beberapa pihak ke-3 dalam berbagai bidang terkait lingkungan hidup, seperti:

1. Kerjasama dalam hal pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke 3 yang memiliki izin Pengangkutan, Pengumpulan, dan Pengelola akhir limbah B3 (pengolahan, pemanfaatan, penimbunan).
2. Kerjasama peningkatan kapasitas SDM Bidang Lingkungan terkait penyiapan dokumen lingkungan dan sosial oleh Bank Dunia.
3. Kerjasama studi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) tersebar dengan konsultan yang terakreditasi
4. Kerjasama pembuatan laporan pelaksanaan RKL-RPL tersebar dengan konsultan independen
5. Kerjasama pelaksanaan pemantauan lingkungan tersebar dengan laboratorium terakreditasi
6. Kerjasama pelaksanaan pelatihan AMDAL A dan AMDAL C dengan lembaga pelatihan yang terakreditasi
7. Kerjasama pelaksanaan pelatihan Auditor Lingkungan dengan Institute Pertanian Bogor sebagai lembaga pelatihan yang terakreditasi
8. Kerjasama pengurusan izin PPLH dengan konsultan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, di tahun 2015 kembali PLN melakukan berbagai penelitian terkait lingkungan hidup, meliputi:

1. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang Lingkungan hidup untuk pegawai yang bertugas di bidang Lingkungan baik di Pusat, Kantor Induk maupun Unit Pelaksana dengan Pusdiklat.
2. Pelaksanaan *Workshop* Penyusunan DPLH – DELH, serta monitoring progress penyusunan DPLH-DELH di seluruh unit PLN.

e. Reusing oil waste of HSD/MFO, through a separator or pumped backed into receiving tanks and reused.
f. Utilizing leaf waste for composting.
g. Reusing iron waste.

2. The use of Renewable Energy
In RUPTL 2015-2024, PLN plans to build a large-scale renewable energy power plant and a gas power plant with a total capacity of 28.27 GW comprising: Combined Cycle Power Plant, Gas Turbine Power Plant/ Gas Engine Power Plant, Geothermal Power Plant, Hydro Power Plant and other Renewable Energy Power Plant modular thermal power plant, Solar Cell Power Plant, Wind Power Plant and others.
3. To increase energy efficiency, Suralaya Steam Power Plant Unit 3 and 4 will be rehabilitated with a target of increasing efficiency by 3%.

Cooperation with Third Parties

PLN supports cooperation with several third parties in many areas related to the environment, such as:

1. Cooperation in terms of hazardous and toxic waste (B3 waste) management with a third party licensed for freight, collection, and final management of B3 waste (processing, use, stockpiling).
2. Cooperation in human capital capacity improvement in Environment Sector related to environmental and social document preparation by the World Bank.
3. Cooperation in studies of environmental documents (EIA, UKL-UPL) with accredited consultants.
4. Cooperation in implementation of reports on RKL-RPL with independent consultants.
5. Cooperation in implementation of environmental monitoring scattered with accredited laboratories.
6. Cooperation in training implementation of AMDAL A and AMDAL C with accredited trainers.
7. Cooperation in implementation of Environmental Auditor training with Institute Pertanian Bogor as an accredited trainer.
8. Cooperation in permit management of PPLH with consultants.

Research and Development in Environmental Aspect

As a commitment to the environment, PLN also conducts several environmental-related studies, including:

1. Identification of needs for training in Environmental aspect for employees working in the Environmental field at the Head Office, Main Offices, as well as Implementing Units, with the Pusdiklat.
2. Workshop on DPLH – DELH Preparation and monitoring of progress of DPLH – DELH preparation across all PLN units.

10 UNIT PEMBANGKIT PLN DAN ANAK PERUSAHAAN MENDAPATKAN PERINGKAT PROPER HIJAU

10 POWER PLANT UNITS AND SUBSIDIARIES OF PLN OBTAINED GREEN PROPER RATING

Komitmen PLN untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan prosedur pengelolaan pembangkit berstandar internasional dan inovasi pengelolaan lingkungan lainnya membuahkan pengakuan dari pihak eksternal. Dalam acara PROPER tahun 2015 yang diselenggarakan pada bulan November 2015, 10 unit Pembangkit PLN dan Anak Perusahaan memperoleh PROPER Peringkat Hijau dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sepuluh unit Pembangkit tersebut adalah: PLN Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon (PLTGU), Indonesia Power UBP Suralaya (PLTU), Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Priok (PLTGU) dan PJB Unit Pembangkit (UP) Muara Tawar (PLTGU). Selain itu, Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kamojang Unit PLTP Kamojang- Darajat (PLTP), Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang – Tambak Lorok (PLTG), PLN Pembangkit Tanjung Jati B Jepara (PLTU) dan Indonesia Power UBP Perak - Grati PLTGU Grati (PLTGU) serta PJB UP Paiton (PLTU) dan PJB UP Gresik (PLTU & PLTGU) turut meraih penghargaan tersebut.

PLTU Peringkat PROPER Hijau adalah PLTU yang aman terhadap manusia dan lingkungannya, efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati.

PLN berkeyakinan peningkatan unit usaha dan anak usaha yang meraih PROPER Hijau tersebut akan memacu seluruh unit usaha lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungannya untuk meraih prestasi serupa, dan bersama-sama menunjukkan komitmen PLN untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

PLN's commitment to participating in maintaining environmental sustainability by implementing international standards in plant management procedures and other environmental management innovations has resulted in recognition from external parties. At the 2015 PROPER Award event held in November 2015, 10 power plant units and subsidiaries of PLN obtained Green PROPER Rating in Environmental Management from the Ministry of Environment and Forestry.

Those 10 power plant units were: PLN Cilegon Combined Cycle Power Plant Sector, Indonesia Power UBP Suralaya Steam Power Plant, Indonesia Power UBP Priok Combined Cycle Power Plant Unit and PJB Unit Power Plant (UP) Muara Tawar Combined Cycle Power Plant. In addition, Indonesia Power Unit Business Power Plant (UBP) Kamojang Geothermal Power Plant Kamojang-Darajat Unit, Indonesia Power Business Power Plant (UBP) Semarang-Tambak Lorok Gas Turbine Power Plant Unit, PLN Tanjung Jati B Jepara Steam Power Plant and Indonesia Power UBP Perak Grati Combined Cycle Power Plant, PJB UP Paiton Steam Power Plant and PJB UP Gresik Steam Power Plant & Combined Cycle Power Plant also obtained the award.

A Steam Power Plant with Green PROPER Rating is defined as a Steam Power Plant that is safe for people and the environment, uses natural resources efficiently, and positively contributes to the environment and biodiversity.

PLN believes increasing the number of its business units and subsidiaries that receive the Green PROPER Rating will encourage other business units to increase their quality of environmental management and obtain similar awards, and together this will demonstrate PLN's commitment to participating in maintaining environmental sustainability.

Penghargaan PROPER Ketiga bagi PLTU Tanjung Jati B

Bagi PLTU Tanjung Jati B, PROPER Peringkat Hijau tahun 2015 merupakan penghargaan ketiga-kalinya secara berturut-turut sejak penyelenggaraan PROPER periode 2013. PLN Tanjung Jati B merupakan PLTU berbahan batubara milik PLN pertama di Indonesia yang mendapatkan PROPER Hijau, yakni mulai tahun 2013, yang kemudian mendorong unit PLTU Batubara lain mendapatkan penghargaan serupa di tahun berikutnya, yakni PLTU Paiton dan Suralaya.

Perjalanan PLN Tanjung Jati B mendapatkan PROPER Hijau memanglah tidak mudah, mengingat paradigma PLTU batubara yang kotor, hitam, dan tidak ramah lingkungan menjadi tantangan tersendiri yang harus diubah.

Upaya tersebut dimulai sejak tahun 2012, saat PLN Tanjung Jati B masih mendapatkan PROPER Biru, dengan mencanangkan Program *E-Green* yang merupakan program untuk menjadikan PLTU Tanjung Jati B menjadi perusahaan hijau dengan 5E. Yaitu *Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, Empowering Community, dan Establishing High Trust Culture.*

Implementasi Program *E-Green* yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten mamberi hasil nyata. Terbukti, intensitas emisi CO_2 PLTU Tanjung Jati B hanya berada di angka 560 ton/GWh, hampir separuh dari standar internasional dengan 1.116 ton/GWh. Bahkan PLTU Tanjung Jati B masih unggul dibandingkan dengan pembangkit listrik terkemuka di dunia seperti Trans Alta (1.041 ton/GWh), Delta Electricity – Australia (945 ton/GWh), East West Power – Korea (774 ton/GWh), Origin Power – Australia (740 ton/GWh), dan J Power – Jepang (730 ton/GWh). Sehingga tidak heran jika jurnal internasional, Power Magazine, menempatkan PLTU Tanjung Jati B sebagai 10 PLTU terbaik di dunia dalam pengurangan pencemaran udara.

Third PROPER Award for Steam Power Plant Tanjung Jati B

For Tanjung Jati B Steam Power Plant, the 2015 Green PROPER Rating was its third successive award since the first PROPER Award received in 2013. PLN Tanjung Jati B was the first coal-fired Steam Power Plant to receive the Green PROPER Rating in 2013, which encouraged other coal-fired steam power plants, i.e. Paiton and Suralaya Steam Power Plant, to win similar awards in the following years.

The road to obtaining the Green PROPER Rating was not easy, considering the prevailing perception that coal-fired steam power plants are dirty, smoggy, and not environmental friendly.

The effort began in 2012 when PLN Tanjung Jati B obtained the Blue PROPER Rating, by launching E-Green Program, i.e. a program to transform Tanjung Jati B Steam Power Plant into a green company espousing 5E: Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, Empowering Community, and Establishing High Trust Culture.

The E-Green Program is implemented effort-fully, and has consistently produced results. The intensity of CO_2 emissions in Tanjung Jati B Steam Power Plant is below 560 tons/GWh, which is almost half the international standard of 1,116 tons/GWh. Tanjung Jati B Steam Power Plant also ranks better when compared to other renowned power plant, such as Trans Alta (1,041 tons/GWh), Delta Electricity – Australia (945 tons/GWh), East West Power – Korea (774 tons/GWh), Origin Power – Australia (740 tons/GWh), and J Power – Japan (730 tons/GWh). An international journal, Power Magazine, ranked Tanjung Jati B Steam Power Plant among the ten best steam power plants in the world in terms of air pollution management.

Tidak hanya itu, program pemanfaatan ash menempatkan PLTU Tanjung Jati B menduduki peringkat ketiga di antara perusahaan listrik berbahan bakar batubara terbesar di dunia, sebesar 66 persen di bawah J Power – Jepang (97 persen) dan EON – Jerman (88 persen) serta mengungguli perusahaan listrik sebesar Fortum – Finlandia (48 persen), AEP – Australia (36 persen) dan Delta Electric Power (18 persen).

Sedangkan pemanfaatan limbah gypsum PLTU Tanjung Jati B berada di peringkat pertama dunia dengan jumlah limbah termanfaatkan 100 persen. Unggul atas J Power – Jepang (99,9 persen), Fortum – Finlndia (99 persen), *East West Power – Korea* (98 persen), dan EON – Jerman (97 persen).

Penghargaan PROPER juga menuntut perusahaan tidak hanya concern di operasional saja, namun juga aspek pemberdayaan masyarakat. Terbukti PLTU Tanjung Jati B menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah untuk program *Community Development* di 2014.

Raihan PROPER Peringkat Hijau, tidak membuat PLN Tanjung Jati B berpuas diri. Manajemen dan seluruh jajaran PLN Tanjung Jati B bertekad terus meningkatkan implementasi program E-Green disertai upaya inisiatif pelestarian alam dan penerapan program pengembangan masyarakat lainnya, dengan sasaran peringkat PROPER Emas di tahun-tahun mendatang

Not only that, LTU Tanjung Jati B ranked third on the ash use program, after the largest coal-fired steam power plant in the world, by 66%, after J Power – Japan (97%) and EON – Germany (88%) and surpasses other electrical companies such as Fortum – Finland (48%), AEP – Australia (36%) and Delta Electric Power (18%).

The use of gypsum waste at Tanjung Jati B Steam Power Plant is ranked first in the world, with waste used amounting to 100%. This means that it surpasses J Power – Japan (99.9%), Fortum – Finland (99%), East West Power – Korea (98%), and EON – Germany (97%).

The PROPER Award also requires companies to not only be concerned with the environment in their operations, but also be concerned with aspects of community development. The Company's commitment to community development was recognized through the award received from the Central Java Governor for Community Development program in 2014.

With the receipt of the Green PROPER Rating, the Management and all staff of PLN Tanjung Jati B are determined to improve the implementation of the E-Green program while preserving the environment and contributing to other community development programs, with the ultimate goal of winning Gold PROPER Rating in the years ahead.

3. Pelaksanaan *Workshop* Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4. Pelaksanaan *Workshop* Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Penyusunan Kesepakatan Bersama antara tiga kementerian (KLHK, PUPR, ESDM) terkait Kerja Sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi serta Percepatan Pemanfaatan Abu Terbang *(Fly Ash)* dan Abu Dasar (Bottom Ash) dari PLTU Batubara untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Pembentukan Asosiasi Lingkungan Ketenagalistrikan Indonesia (ALLIN) bersama pelaku usaha ketenagalistrikan.
6. Inventarisasi kualitas *Fly Ash* dan *Bottom Ash Unit* PLTU Batubara Unit PLN dalam rangka perjanjian kerjasama antara tiga kementerian dalam hal penelitian pengembangan dan pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* oleh PUPR

Kegiatan di Bidang Lingkungan lainnya

1. Monitoring rutin Dokumen Pelaksanaan RKL
2. Pembuatan database lingkungan

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan hidup selama tahun 2015 sebesar Rp116,3 miliar (2014: Rp.128,1 miliar) mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta realisasi kegiatan penghijauan di sekitar area operasi pembangkitan maupun area pendukung lainnya.

Sertifikasi Bidang Lingkungan Hidup

Selaras dengan pencapaian misi Perseroan "Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan", PLN menerapkan kebijakan perolehan sertifikasi lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga independen bagi unit-unit bisnis dan anak usaha yang mengelola stasiun pembangkit. Adapun sertifikasi lingkungan hidup yang dipersyaratkan bagi unit pengelola pembangkit adalah ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dan sertifikasi lingkungan lain yang relevan.

Pada tahun 2015, PLN, melalui unit-unit bisnis dan entitas anak, mendapatkan 42 sertifikasi bidang lingkungan hidup, yakni ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan.

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PLN sangat menyadari makna penting dari terciptanya hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh pegawai. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan operasional, Perseroan senantiasa menjalankan praktik atau perlakuan yang sama terhadap semua karyawan dengan tidak memandang suku, ras, agama, gender dan

3. Workshop on Licensing for Protection and Management of the Environment (PPLH).
4. Workshop on Protection and Management of the Environment (PPLH).
5. Preparation of Joint Agreement between three ministries (Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Public Works and Housing, and Ministry of Energy and Mineral Resources) related to the Cooperation for the Research of Technological Development and Implementation and Acceleration of Utilization of Fly Ash and Bottom Ash from Coal-Fired Power Plants for the Infrastructure Development of the Public Works and Housing. Establishment of the Indonesian Electricity Environmental Association (ALLIN) with other companies in the electricity business.
6. Inventorying of Quality of Fly Ash and Bottom Ash at Steam Power Plants of PLN with regard to the agreement for the cooperation between the three ministries in the research, development and utilization of Fly Ash and Bottom Ash by the Ministry of Public Works and Housing.

Other Environmental Activities

1. Monitoring the planning and implementation of environmental documents (RKL).
2. Creating an environmental database.

Financial Impact of Environmental Activities

The total cost incurred for environmental activities in 2015 was Rp116.3 billion (2014: Rp128.1 billion) consisting of environmental documentation, environmental management and monitoring activities as well as reforestation activities in the surrounding areas of the power generation operations and other supporting areas.

Environmental Certification

In line with the effort to achieve the Company's mission: "Running environmentally sound business activities", PLN implements an environmental certification acquisition policy which is issued by an independent agency, for business units and subsidiaries that manage the power stations. The environmental certification required for plant management units is ISO 14001 Environmental Management System and other relevant environmental certifications.

In 2015, PLN business units and subsidiaries obtained 42 ISO 14001 (environmental management system) certifications.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

PLN realizes the important benefit of creating a harmonious partnership between the management party and all employees. Therefore, in all operational activities, the Company always adheres to the same practices and treatment of all employees without discriminating against

haluan politiknya, begitu pula semua karyawan memiliki kebebasan berserikat. Untuk merealisasikan hubungan kerja yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang kondusif, PLN bersama-sama dengan Serikat Pekerja menyetujui untuk tetap menggunakan PKB periode 2010-2012 sebagai dasar bagi penyelenggaraan hubungan industrial yang saling menghargai. PLN bersama dengan Serikat Pekerja kini tengah membahas PKB untuk periode selanjutnya sebagai pengganti PKB dimaksud.

Selain kesepakatan hubungan industrial tersebut, Perseroan aktif menyelenggarakan berbagai forum komunikasi bipartit dalam kerangka formal maupun informal. Kemudian untuk memastikan pengelolaan SDM yang optimal dan selaras dengan tujuan pengembangan usaha PLN mengorganisasikan tenaga kerja dengan kebijakan sesuai butir-butir yang tercantum dalam Keputusan Direksi No.032.K/DIR/2009.

ethnicity, race, religion, gender and political opinion, as well as allowing freedom to participate in the Labor Union. In order to implement the labor relation supporting a conducive work environment, PLN and the Labor Union agree to consistently use the collective agreement of 2010-2012 as the foundation for implementing industrial relations under the ethos of mutual respect. PLN along with the Labor Union recently discussed the next collective agreement to renew the old collective agreement mentioned above.

Besides this agreement, the Company actively conducts various bipartite formal and informal communication fora. Furthermore, to ensure optimal human resources management that is consistent with business development objectives, PLN manages human resources based on the policies embodied in the Articles of the Decree of PT PLN's Board of Directors Num. 032.K/DIR/2009.

KETENAGAKERJAAN
Kebijakan

PLN berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, sesuai dengan kemampuan Perseroan, maka PLN menerapkan kebijakan dasar pengelolaan SDM sebagai berikut:

1. Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerjasama timbal balik yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan ditinjau secara berkala.

WORKFORCE
Policies

PLN strives to increase the optimization of human resources management by always observing employee needs. As part of high quality human resources management practices and fair consideration of Company and customer needs, while also taking into account the Company's abilities, PLN applies several basic policies of human resources management, as follows:

1. Developing good relations with employees based on a mutual partnership as embodied in the collective agreement, which is reviewed periodically.

2. Mematuhi seluruh peraturan-peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
3. Memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kinerja yang diterpakan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pegawai dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Serikat Pegawai.
5. Menyiapkan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan akhirnya korporasi.
6. Menerapkan kesetaraan dalam jejang karir
7. Menerapkan kesetaraan gender dalam hal remunerasi

Kegiatan

Uraian lebih lengkap mengenai Kegiatan di bidang pengelolaan ketenagakerjaan terdapat dalam bahasan "Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia".

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Sebagai realisasi kebijakan PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai, Perseroan menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang terbuka bagi seluruh pegawai, sesuai dengan jenjang jabatan dan program pengembangan perusahaan. Program-program tersebut juga diuraikan secara lengkap pada bahasan "Pengelolaan Sumber Daya Manusia". Adapun gambaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai di tahun 2015 sebesar Rp473,5 miliar (2014: Rp239,8 miliar).

2. Complying with all rules and regulations related to the employment sector.
3. Applying a performance-based wage payment system that is fair, transparent, and accountable.
4. Upholding employee rights and fully supporting the establishment of the Labor Union.
5. Preparing various programs to increase and training employee competencies for the sake of escalating individual, group, and finally Company performance.
6. Ensuring the principle of equality at the career level.
7. Ensuring the principle of gender equality regarding remuneration.

Activities

A more complete description regarding Activities in the employment management sector is included in the "Increasing Human Resources Competency" topic.

Financial Impacts of Environmental Activities

As a realization of PLN policies to increase employee competencies, the Company conducts various open training programs for all employees according to their position level and the Company development program. These programs are also fully described in the "Human Resources Management" topic. The budget issued by PLN in 2015 to increase employee competencies is amounts to Rp473.5 billion (2014's amount was Rp239.8 billion).

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan

Kebijakan PLN dalam pengelolaan K3 tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), dengan ringkasan kebijakan K3, adalah:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degredasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan disekitar wilayah kerja perusahaan
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain dengan mengontrol resiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sehingga senantisasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik disetiap unit kerja dan anak perusahaan
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Policies

PLN's Occupational Health and Safety (OHS) policies are embodied in the Decree of PT PLN's Board of Directors Num. 134.K/DIR/2007 regarding Environment, Occupational Health and Safety Policy (LK3) and is summarized into Occupational Health and Safety policies, as follows:

1. Preventing pollution and biodiversity degradation; as well as protecting employees' Occupational Health and Safety around Company workplaces.
2. Complying with regulations and other stipulations by controlling the risk of employees' Occupational Health and Safety as well as important aspects of and impacts on environmental sectors in every activity, as along with processes and products in various working units and subsidiaries.
3. Periodically documenting, implementing, maintaining and reviewing the LK3 policies in order to make them consistently relevant, appropriate, and become the basic guideline for managing the LK3, which is especially applied to each working unit and subsidiary.
4. Developing this policy as a basis to determine and evaluate the objective as well as target of LK3 management.

5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan LK3, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan, dan mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berparstisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (lender) dan masyarakat luas.

Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 tersebut melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001 : 2004, mengenai pengelolaan lingkungan.

PLN menerapkan target dicapainya *zero-accident* pada setiap periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan bagian dari penilaian kinerja unit bisnis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan operasional berbasis K3

Komite Keselamatan Ketenagalistrikan

Mengingat operasional PLN melalui 47 unit bisnis dan 10 anak usaha berlokasi di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis Komite untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait K3, yang dinamakan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui SK Direksi No. 570.K/DIR/2010. Komite ini kemudian diperbaharui lagi melalui SK Direksi No. 017.K/DIR/2011 dan dinamakan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

Untuk lebih menguatkan kegiatan dan pengendalian keselamatan ketenagalistrikan di tahun 2015 telah dibentuk divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) yang secara khusus bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Encouraging all working units and subsidiaries to continuously conduct revisions on LK3 management system performance.
6. Providing and facilitating the resources needed to implement and maintain the LK3 policies, therefore every working unit, subsidiary, and partner have the ability to gradually implement this policy, while considering the Company's ability and local environment conditions.
7. Ensuring environment management and LK3 protection becomes the norm in every management line and among individual employees.
8. Supporting the development of communities living around the working units and subsidiaries as well as striving to make the Company become an integral part of surrounding communities.
9. Participating in Government programs to reduce greenhouse gas emissions.
10. Ensuring this policy is always obtainable by stakeholders such as lenders and public communities.

Occupational Health and Safety Certification

PLN applies the OHS management policies by implementing the OHS Management System (SMK3) and complying with OHSAS 18001 certification and ISO 14001:2004 application on environment management.

PLN applies the zero-accident target in the implementation of Occupational Health and Safety in every operational period. This target becomes the reference which must be complied with and utilized by all business units as an aspect of performance review. Thus, this target must be complied with while implementing all Occupational Health and Safety-based operational activities.

National Committee for Safety of Electrical Installation

In regards to PLN's operational activities in 47 business units and 10 subsidiaries throughout Indonesia, PLN established a special committee to coordinate the activities and programs related to Occupational Health and Safety, namely the Occupational Health and Safety Committee through the Decree of PT PLN's Board of Directors Num. 570.K/DIR/2010. This committee was then amended by the Decree of PT PLN's Board of Directors Num. 017.K/DIR/2011 and its named was changed to the National Committee for Safety of Electrical Installation (Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik—KONSUIL).

For further strengthening of the activities and controls on electrical safety, in 2015 PLN established the Health, Occupational Safety, Security and Environment (K3L) division with a special responsibility toward Occupational Health and Safety.

Program Strategis Di Bidang K2 dan K3

PLN menyakini bahwa penerapan kegiatan operasional berbasiskan K2 dan K3 yang berkualitas maka seluruh kegiatan internal maupun eksternal akan dapat berjalan secara optimal dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karenanya, PLN telah menyusun program/langkah strategis secara korporat guna meningkatkan implementasi K2/K3 baik secara internal maupun eksternal, yakni:

1. Peningkatan awareness terhadap seluruh insan PLN (tingkat top manajemen hingga karyawan), mitra kerja dan pekerja, dan masyarakat (terutama masyarakat sekitar instalasi).
   Dilakukan diantaranya dengan mengadakan workshop CSMS *(Contractor Safety Management System)*, workshop penyusunan SOP dan COC kepada seluruh pegawai; pemasangan rambu-rambu tanda bahaya; pemasangan poster-poster terkait K2/K3; serta penerapan BBS (*Behavior Base Safety)* perilaku berbasis *safety* dengan metode *Do It*.
2. Peningkatan peran top management di tiap tingkatan unit (Pusat, Unit Induk, Unit Pelaksana dan AP).
   Dilakukan melalui: pelaksanaan *workshop safety for manager*, para pimpinan unit seluruh Indonesia (310 manager); adanya komitmen manajemen yang berpihak pada K2/K3, serta *reward* dan *punishment* melalui sistem penilaian kinerja yang terukur.
3. Penyempurnaan struktur organisasi yang membidangi K2/K3 pada setiap tingkatan organisasi (Kantor Pusat, Unit Induk dan Unit Pelaksana).
4. Menetapkan alokasikan anggaran K2/ K3 dalam RKAP.
5. Peningkatan kompetensi pengawas, pelaksana dan mitra kerja PLN, melalui diklat maupun sertifikasi.
6. Peningkatan peran pusdiklat dalam peningkatan kompetensi berbasis K2 dan K3.
7. Implementasi SMK3 (Sistem Manajemen K3) dan pemeliharaan kualitasnya.
   PLN menargetkan 75% seluruh unit induk dan wilayah dan unit pelaksana mempunyai sertifikat SMK3 di tahun 2015.
8. *Continuous improvement* bagi SDM yang bergerak di K2 dan K3.
9. Penerapan sistim berbasis IT untuk mengawasi implementasi K2/K3 dan memperbaiki sistim pendataan agar semakin baik.

Strategic Programs in Electricity Safety (Electricity Safety) and OHS (Occupational Health and Safety)

PLN believes that the implementation of operational activities based on high quality Electricity Safety and Occupational health and Safety ensures all internal and external activities run optimally and finally to increase Company performance. Because of this, PLN has compiled corporate strategic programs and steps with the aim to intensify Electricity Safety and Occupational health and Safety implementation internally and externally. These strategic programs and steps are:

1. Increasing the awareness of all PLN personnel (starting from top management until employee level), partners, work force members, and communities (especially communities living around the location of electricity installation).
   This program is implemented by conducting various workshops, such as CSMS (Contractor Safety Management System), Standard Operating Procedures (SOP), and Code of Conduct (COC) for all employees; installing safety signs and posters related to Electricity Safety and Occupational health and Safety; as well as implementing BBS (Behavior Base Safety), which is safety-based behavior using the Do It method.
2. Expanding the role of top management in each unit level (Head Office, Main Unit, Managing Unit, and Service Area/AP). This program is conducted by implementing a workshop, namely safety for manager and unit leaders throughout Indonesia (310 managers). The existence of management commitments arising from Electricity Safety and Occupational health and Safety principles as well as the existence of a reward and punishment system through a measurable performance evaluation system also support this program.
3. Finishing the organization structure regarding Healthy Security and Safety (Electricity Safety and Occupational health and Safety) sectors in each unit level (Head Office, Main Unit, and Managing Unit).
4. Determining the budget allocation regarding Healthy Security and Safety (Electricity Safety and Occupational health and Safety) in the Work and Budget Plan (*Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan*/RKAP).
5. Increasing the competencies of PLN's supervisors, managers, and partners through various trainings as well as certifications.
6. Enlarging the role of the training center to increase Healthy Security and Safety (Electricity Safety and Occupational health and Safety) based competencies.
7. Implementing the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and maintaining its quality. PLN's target was 75% of all main units, areas, and managing units should be SMK3 certified in 2015.
8. Continuously improving human resources on Electricity Safety and Occupational health and Safety sectors.
9. Implementing an information technology/IT-based system to control Healthy Security and Safety (Electricity Safety and Occupational health and Safety) implementation and develop a better data system.

Kegiatan-Kegiatan Utama di Tahun 2015

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan, di tahun 2015 PLN melaksanakan berbagai langkah strategis terkait keselamatan ketenagalistrikan, baik di bidang sistem, organisasi, bidang pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan penetapan kebijakan, yakni:

1. Menerapkan SMK3 sesuai PP 50 Tahun 2012
2. Melaksanakan Sosialisasi, Workshop, diklat terhadap pelaksana/pengawas/manajerial tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Dibuatnya Edaran Direksi tentang Penilaian kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan yang didalamnya termasuk K3
4. Melaksanakan bulan K3 untuk menyemarakkan dan menggalakkan kegiatan K3 di seluruh unit PLN

Untuk meningkatkan kesiapan penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelatihan bersama di bidang penanggulangan kebakaran dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diselenggarakan secara periodik.

PLN juga melaksanakan kegiatan konseling dengan lebih banyak melibatkan karyawan dan masyarakat umum sebagai audience, tujuannya adalah agar karyawan dan masyarakat menjadi tahu dan lebih peduli dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, karena topik yang disampaikan lebih kepada pengenalan dan pencegahan bahaya ketenagalistrikan pada pekerjaan dan instalasi

Main Activities in 2015

In order to ensure the quality of Electricity Safety implementation, in 2015 PLN carried out various strategic programs related to electricity safety in the sectors of system, organization and training, as well as the provision of fire extinguishers and determination of policies, as follows:

1. Implementing the SMK3 in accordance with Government Regulation Num. 50/2012
2. Conducting socialization, workshops, and training for executive/supervisor/manager levels regarding Occupational Health and Safety topics.
3. Issuing a Director's Circular about the Evaluation of Electricity Safety Performance which also includes Occupational Health and Safety.
4. Conducting a Occupational Health and Safety Month to support and promote Occupational Health and Safety activities in all PLN units.

In order to improve the efficacy of accident prevention, fires and disasters, PLN implements several activities including periodic collective training on fire prevention and Occupational Health and Safety sectors.

PLN also conducts counseling activities with a greater involvement of employees and public communities as an audience. The aim of this activity is to make employees and public more alert and concerned with Occupational Health and Safety because its topics are more specific in

Jenis Kecelakaan
Type of Accident

TIngkat Keparahan
Severity Level

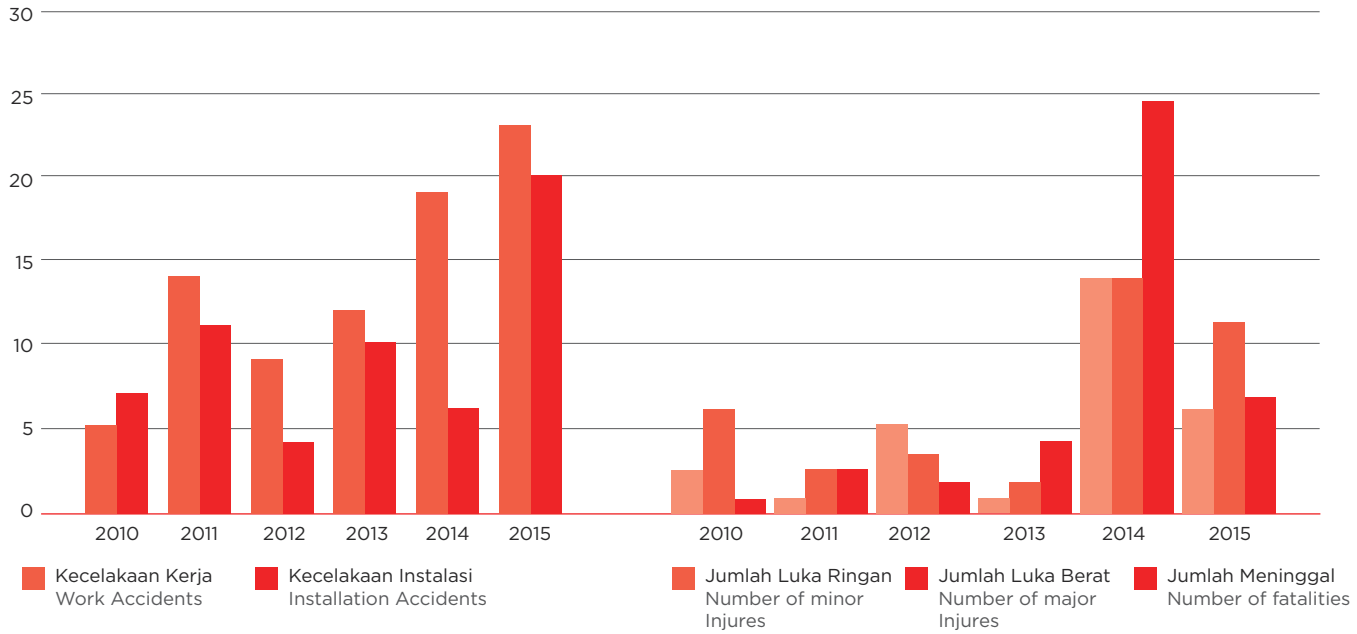

terutama bahaya yang ada pada instalasi perumahan, contoh : pemasangan stop kontak yang tumpang tindih dan lain-lain.

recognizing and preventing electricity hazards on work and housing installations, for example in overlapping socket installation, and many more.

Total Kecelakaan
Total Accident

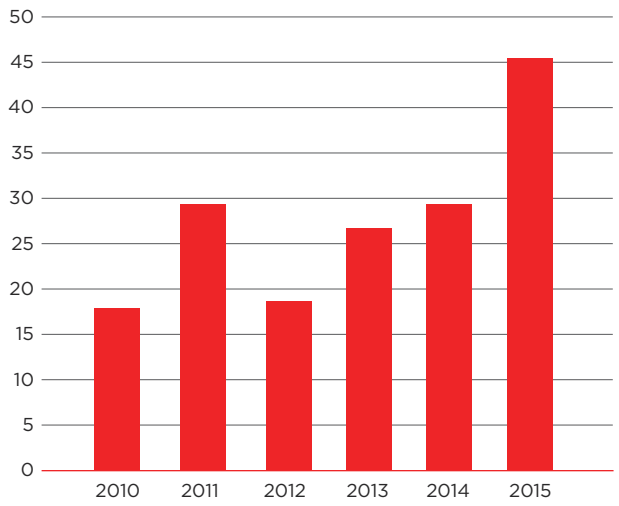

Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sekalipun prosedur kerja aman telah ditetapkan, kegiatan operasional yang banyak berlangsung di lapangan membuat insiden kecelakaan kerja pada unit-unit bisnis PLN yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia masih terjadi. Adapun gambaran insiden kecelakaan kerja selama lima tahun terakhir tergambar dari tabel dan tiga diagram sebagai berikut.

Occupational Health and Safety Performance

Even though a secure working procedure has been determined, there are many operational activities taking place in the field, so accidents on PLN business units throughout Indonesia still occur. The details of work accidents during the last five years are depicted in the following table and three diagrams:

Kecelakaan kerja 2010 sampai dengan 2015
2010 - 2015 Work Accidents

Insiden	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Incident
Kecelakaan Kerja	5	14	9	12	19	23	Type of Accident
Kecelakaan Instalasi	7	11	4	10	6	20	Installation Accident
Total Kecelakaan	**12**	**25**	**13**	**22**	**25**	**43**	**Total Accident**
Sudah Investigasi	12	25	13	22	25	43	Already investigated
Belum Investigasi	0	0	0	0	0	0	Not yet investigated
Jenis Luka							Type of Injury
Jumlah Luka Ringan	3	1	6	1	16	7	Total minor injury
Jumlah Luka Berat	7	3	4	2	16	13	Total major injury
Jumlah Tewas	1	3	2	5	28	8	Total Killed

Total Kecelakaan

Kondisi tingkat insiden kecelakaan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan prosedur kerja maupun program peningkatan kesadaran budaya sadar aspek K3 dalam kegiatan operasional di seluruh unit bisnis PLN.

Total Accident

The accident rate as described above is then used as material for evaluating the improvement of work procedures as well as enhancement of the Occupational Health and Safety culture awareness program in all PLN business unit operational activities.

KOMITMEN CAPAI *ZERO ACCIDENT*

COMMITMENT TO REACH A ZERO ACCIDENT TARGET

Bekerja di perusahaan listrik, maka harus bersiap dengan pekerjaan beresiko tinggi, khususnya untuk pekerja di lapangan. Komitmen untuk mengutamakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi budaya di lingkungan PLN.

Kini, memperkuat budaya K3 adalah suatu keharusan. Tak sekedar menyediakan alat pemadam kebakaran di kantor, namun harus siaga baik dari sisi personel, instalasi, dan alat. Management PLN telah berkomitmen untuk memperkuat budaya K3, misalnya dengan melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) dan Latdak (Latihan Mendadak) untuk melatih kesiapan personil yang berbudaya K3. Untuk kesiapan alat, tak sekedar menyediakan alat-alat yang memadai, tetapi tetap perlu dilakukan pengecekan alat secara berkala.

Pada workshop yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan tema *"Zero Tolerance for Zero Accident"*, PLN mengharuskan kepada seluruh unit-unit PLN agar segera membenahi personil, instalasi dan alat-alat K3, mulai dari mengecek instalasi di lingkungan sekitar serta menambahkan alat-alat pemadam kebakaran yang memadai, khususnya bagi unit-unit pembangkit.

PLN menetapkan bahwa pengelolaan K3 di Unit Induk dikelola oleh seorang *Deputi Manager* (DM), dan Supervisor untuk unit dibawahnya. Hal ini mempertimbangkan agar pengelolaan K3 di unit dapat lebih optimal sehingga cita-cita *zero accident* dapat dicapai.

Working at the national electricity company, PLN's employees, especially the field officers, must be vigilant when performing various high-risk jobs. The commitment to prioritize Electricity Safety and Occupational health and Safety must become entrenched in PLN's work culture.

It therefore is an obligation for all PLN personnel to strengthen the Occupational Health and Safety culture. Apart from providing an appropriate fire extinguisher in the areas of operation, the Company must also prepare appropriate personnel, installations, and other tools. The management's commitment to strengthening Occupational Health and Safety culture is implemented by Sidak (sudden inspection) and Latdak (sudden training), aimed to train all employees in Occupational Health and Safety preparedness. Furthermore, the Company is required to prepare and review appropriate tools periodically.

On 20 October 2015, PLN conducted a workshop titled "Zero Tolerance for Zero Accident". In this workshop, PLN demanded all units to manage their personnel, installations, and Occupational Health and Safety tools by checking the installations in surrounding communities and adding appropriate fire extinguishers, especially for power plant units.

PLN determines that Occupational Health and Safety management in the Main Unit is managed by a Deputy Manager (DM) who is in charge of supervising several Supervisors. Under this structure, Occupational Health and Safety management can be optimized so the zero accident target can be achieved.

Pada *workshop* tersebut, hadir Direktur Pengawasan Norma K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Amri AK yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) tantangan K3, antara lain:

1. Kualitas Penerapan K3 Rendah,
2. Kualitas Riksa Uji K3 Rendah,
3. Kualitas Dan Kuantitas Pengawasan Rendah,
4. Obyek Pengawasan K3 Semakin Kompleks.

Prinsip penerapan K3 adalah *controlling*. "Sebaik apapun membuat perencanaan, kalau tidak ada kontrol maka itu bisa menjadi buruk," tegas Amri.

Tak dapat dipungkiri, untuk membentuk K3 agar menjadi budaya mau tak mau harus dimulai dengan pola dipaksa dan terpaksa. Sehingga diharapkan ke depan, mengutamakan K3 menjadi kebiasaan pegawai hingga menjadi budaya.

In that workshop, the Director of Occupational Health and Safety Norm Control from Manpower and Transmigration Ministry, Amri AK explained there are at least 4 challenges in Occupational Health and Safety implementation, namely:

1. Low quality of occupational health and safety implementation,
2. Low quality of occupational health and safety check and test,
3. Low quality and quantity of control,
4. The monitoring object of occupational health and safety is more complex.

The key principle in Occupational Health and Safety implementation is controlling. "No matter how well a plan is made, if there is no control, it will turn bad," Amri said.

It cannot be denied that to develop Occupational Health and Safety as a culture, a force and obligation method must be taken. With this method, the Company expects that all employees will prioritize and embrace Occupational Health and Safety into the work culture.

Kesehatan

Berkaitan dengan kesehatan karyawan, PLN memiliki program pemeriksaan rutin bagi para pekerja yang bekerja pada lingkungan dan kondisi tertentu, misalnya terhadap para operator pada mesin pembangkit yang kesehariannya bekerja dengan kondisi kebisingan yang melewati ambang batas. PLN juga melakukan upaya pemantauan lingkungan di unit bisnis yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan yang bisa mencemarkan lingkungan. Dalam kaitan pemantauan kondisi lingkungan ini, PLN menetapkan SE Direksi No. 109 - Tahun 2014 yang didalamnya termasuk mewajibkan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja yang ada. Dalam pengukuran maturity level K3 juga telah dicantumkan kriteria terhadap pemeriksaan kesehatan pegawai.

Health

In relation to employee health, PLN has a routine inspection program for employees working in particular environments and conditions, for example power plant operators, who work daily with noise exceeding the standard threshold. PLN also conducts some efforts to monitor the environment around its business units, aimed at maintaining the environmental conditions and avoiding waste disposal that can pollute the environment. In regards to these monitoring actions, PLN issued the Director's Circular Num. 109/2014 which includes the requirement of periodic inspection of existing workforces. For measuring the Occupational Health and Safety maturity level, the criteria for examining employee health is also included.

Dampak Keuangan dari Kegiatan di bidang K3

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2015 adalah sebesar Rp65,27 miliar.

Financial Effects of Occupational Health and Safety Activities

The total cost incurred for Occupational Health and Safety-related activities during 2014 amounted to Rp65.27 billion.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L/CSR) yang memiliki makna sangat berarti bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga Perusahaan. Melalui program ini Perusahaan turut berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Selain itu Perusahaan mengharapkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap instalasi PLN, sehingga mereka turut berpartisipasi menjaga dan memelihara instalasi PLN.

SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

This activity was implemented in the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (P3L/CSR), with very positive benefits not only for the community, but the Company as well. Through this program, the Company contributes to and improves community members' lives, as well as expands employments.

Furthermore, the Company expects the community to have a sense of ownership towards the PLN installation, and therefore they can participate in protecting and maintaining the installation.

KEBIJAKAN

Kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan PLN, khususnya program PKBL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan dan perubahannya, yang merupakan bagian dari realisasi kegiatan CSR yang dilaksanakan dengan tujuan : (i) membantu pengembangan kemampuan masyarakat, (ii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, (iii) mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, (iv) mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (v) pengembangan desa mandiri energi, serta (vi) menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,

POLICIES

PLN's social and community development activites, especially the PKBL program, refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Num. PER 05/MBU/2007 on State-Owned Enterprise Partnership Program with Small Business and Community Development, including its amendments, which becomes part of the realization of CSR activities. The aims of CSR activities are: (i) to support the development of communities' capability, (ii) to increase community empowerment, (iii) to empower the community through education programs, iv) to increase the availability of electricity so quality of life is improved, (v) to support the villages to be independent in providing energy, and (vi) to maintain environmental sustainability through nature conservation.

CSR activities are conducted with the involvement of all stakeholders and collaboration with various parties including government, non-governmental organizations,

organisasi massa dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan emosi yang saling memahami, saling membutuhkan dan saling menjaga antara PLN dengan masyarakat sekitar.

Partisipasi PLN untuk turut aktif mengembangkan kehidupan masyarakat diimplementasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991.

Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan menyalurkan dana dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
3. Beban Pembinaan:
   a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
   b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
   c. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan

Memperhatikan ketentuan terakhir mengenai program PKBL sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 03 Juli 2015 dan berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 09 Juli 2015, perihal Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, dimana Program Kemitraan PLN mendapatkan alokasi anggaran PKBL tahun 2015 senilai Rp117,264 miliar.

Dengan demikian perseroan dapat menyalurkan dana dengan dukungan dua sumber, yakni dana PK dari bagian program PKBL tersebut dan menyalurkan bantuan modal usaha / Program Kemitraan menggunakan dana bergulir yang ada.

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 09 Juli 2015, perihal Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, dimana Program Kemitraan PLN mendapatkan alokasi anggaran PKBL Tahun 2015 senilai Rp117,264 miliar. Program Kemitraan PT PLN (Persero) tahun 2015 dalam proses

mass organizations and the others. Therefore, they are expected to encourage an emotional relationship with mutual understanding, interests and concerns between PLN and the surrounding community.

In order to actively support the improvement of people's lives, PLN has participated in the PKBL since 1991.

Partnership Program

The Partnership Program is a program to improve the capability of small businesses to be solid and independent through the utilization of funds derived from the State-Owned Enterprise (SOE)'s profit. The Partnership Program allocates funds in the form of:

1. Loans in order to finance working capital and/or Property, plant and equipment purchases to increase production and sales.
2. Special loans to fulfill the funds required by foster partners and treated as an additional short-term loan to fulfill orders from the foster partners' customers.
3. Coaching Expenses:
   a. The aim is to finance education, training, apprenticeships, marketing, promotion and other matters related to increasing the productivity of foster partners. The other aim is to review or research anything related to the Partnership Program.
   b. Coaching expense is take the form of a grant and its maximum amount must not exceed 20% of the Partnership Program fund disbursed in the current year;
   c. Coaching expense can only be given to or for the benefit of foster partners.

In regards to the last regulations of the PKBL program, based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Num. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 and the Letter of Minister of State-Owned Enterprises Num. S-23/D2.MBU/08/2015 dated 9 July 2015 on The Amendment of General Meeting of Shareholders Resolutions regarding the 2014 Annual Report, PLN Partnership Program received the PKBL budget allocation for 2015 amounting to Rp117.264 billion.

Thus, the Company can distribute the fund with the support of two sources, namely Partnership Program (PK) fund as a part of PKBL program and existing rolling funds to distribute working capital or Partnership Program aid.

Based on the Letter of State-Owned Enterprises Ministry Num. S-23/D2.MBU/08/2015 dated 9 July 2015 on The Amendment of General Meeting of Shareholders Resolutions regarding the 2014 Annual Report, PLN Partnership Program received PKBL budget allocation for 2015 amounting to Rp117.264 billion. In 2015, PLN Partnership Program was still

identifikasi calon mitra potensial untuk diberikan bantuan sehingga sampai dengan 31 Desember 2015, dana program kemitraan belum disalurkan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program CSR PLN

PT PLN (Persero) telah melaksanakan program pembinaan Usaha Kecil sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini. PKBL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan perubahan peraturan mengenai PKBL BUMN, serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

Sampai dengan tahun 2015 jumlah total mitra binaan sebanyak 43.872, dan penambahan jumlah mitra pada penyaluran tahun 2015 sebanyak 0 mitra, sehingga akumulasi sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah mitra binaan PLN tidak ada perubahan yaitu sebanyak 43.872 mitra.

Program Bina Lingkungan

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 09 Juli 2015, perihal Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, dimana Bina Lingkungan mendapatkan alokasi anggaran PKBL Tahun 2015 senilai Rp117,264 miliar.

Adapun kegiatan Bina Lingkungan yang dilakukan selama tahun 2015 meliputi:

in the process of identifying potential partners to whom the fund will be distributed. Thus, by 31 December 2015 the fund had not yet been distributed.

Partnership and Community Development Program (PKBL) and CSR Program

PT PLN (Persero) has been conducting its partnership program for Small Enterprises since 1991 until the present day. PKBL is implemented according to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Num. PER-05/MBU/2007 on State-Owned Enterprise Partnership Program with Small Business and Community Development and amended by the regulation on SOE's PKBL, the Decree of PT PLN (Persero)'s Board of Directors Num. 366.K/DIR/2007 dated 28 December 2007 on State-Owned Enterprise Partnership Program with Small Business and Partnership and Community Development Program/Corporate Social Responsibility (PKBL/P3L).

Until the end of 2015, the total number of foster partners was 43,872. No additional partners were recruited in 2015, so the accumulated number by the end of 2015 had not been changed, remaining at 43,872 partners.

Partnership Program

In regards to the Letter of State-Owned Enterprises Ministry Num. S-23/D2.MBU/08/2015 dated 9 July 2015 about the Amendment of General Meeting of Shareholders Result regarding 2014 Annual Report, PLN Partnership Program received PKBL budget allocation for 2015 at the amounting to Rp117.264 billion.

The Partnership Program activities for 2015 included:

Kegiatan	Nilai Dana (Rp) Fund	Activity
Bantuan Korban Bencana Alam	341.500.000	Natural Disaster Victim Aid
Bantuan Pendidikan / Pelatihan	15.878.096.071	Education/Training Aid
Bantuan Peningkatan Kesehatan	2.670.494.250	Health Improvement Aid
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana Umum	5.647.417.408	Infrastructure and/or Public Facilities Development Aid
Bantuan Sarana Ibadah	2.620.246.500	Religious Facilities Aid
Bantuan Pelestarian alam	1.072.139.000	Nature Conservation Aid
Bantuan Pengentasan Kemiskinan	8.620.496.600	Poverty Alleviation Aid
Biaya Operasional	0	Operational Cost
Jumlah	**36.850.389.829**	**Total**

DUTA MUDA BERSINAR - PLN PEDULI 70 SEKOLAH
THE SHINING YOUNG AMBASSADORS - PLN CARE FOR 70 SCHOOLS

Rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-70, diramaiakan dengan pelaksanakan kegiatan Peduli 70 Sekolah diseluruh Indonesia. Program ini melibatkan sekitar 2000 pegawai yang menjadi *Change Agent* PLN Ber-Integritas. Program dimulai sejak minggu pertama Oktober 2015 sampai dengan akhir November 2015, dengan melakukan pembangunan / rehabilitasi fasilitas sekolah, fasilitas sanitasi (toilet bagi Siswa & guru) dan program edukasi kelistrikan.

2000 *Change Agent* merupakan relawan karyawan PLN yang masuk dalam *Employee Volunteer Program* (EVP). Program direncanakan bersama antara pihak sekolah dengan relawan PLN yang tersebar di seluruh lokasi. Pelaksanaan program dan monitoring juga dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak.

Peduli 70 Sekolah telah dilaksanakan mulai dari SD Negeri I Holtekam Papua sampai dengan SD Iqro' Sigli Pidie Aceh. Dalam testimoninya Kepala Sekolah SDN 78 Kota Gorontalo, Risna Abbas, S.Pd, menyampaikan rasa terima kasihnya karena sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah pilihan dan masuk dalam 70 sekolah di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Duta Muda Bersinar PLN.

"Menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami, para Dewan Guru, Komite Sekolah serta anak didik kami, karena PLN memilih SDN 78 Kota Gorontalo masuk dalam 70 sekolah yang terpilih. , besar harapan kami, kedepannya perhatian-perhatian ke bidang pendidikan dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Sekolah kami telah berbasis internet, sekiranya kami di kesempatan berikut dapat dibantu fasilitas pendukung, entah itu komputer ataupun pendukung lainnya" sebut Risna Abbas.

"Program Peduli 70 sekolah Duta Muda Bersinar, sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungannya, patut diapresiasi, karena menjadi program nasional dan kita tentunya bangga karena SDN 78 Kota Gorontalo menjadi salah satu diantara sekolah-sekolah lainnya di seluruh Indonesia yang masuk dalam program nasional. Pendidikan menjadi modal dasar dalam membentuk karakter anak bangsa ke depan, dan sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta dalam mendukung kemajuan program pendidikan" sebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, DR. Hi. Abram AM Badu, M.Pd.

Program ini disambut hangat oleh siswa dan pihak-pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan di seluruh sekolah yang dipilih sebagai lokasi program, tidak ketinggalan pula 2000 *volunteer* PLN yang dilibatkan merasa bangga bisa terjun langsung berkontribusi terhadap pengembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Program Duta Muda Bersinar merupakan salah satu program berkelanjutan yang diinisiasi oleh PT PLN (Persero) dan akan terus dikembangkan baik dari segi kualitas dan luasan cakupannya. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan peningkatan kualitas SDM dimas a depan.

A series of commemorative events for the 70th National Electricity Day were enlivened by Care for 70 Schools throughout Indonesia. This program involves about 2,000 employees who serve as Agents of Change for PLN Shows Integrity. The program began in the first week of October 2015 and ran until the end of November 2015, undertaking the construction / rehabilitation of school facilities and sanitary facilities (toilets for students and teachers) and offered educational programs on electricity.

2000 Agents of Change is a PLN employee volunteer activity included in the Employee Volunteer Program (EVP). The program was planned jointly between schools and PLN volunteers scattered across various locations. Program implementation and monitoring was conducted jointly by both parties.

The Care for 70 Schools program was implemented starting with SD Negeri I Holtekam Papua and ending with SD Iqro' Sigli Pidie Aceh. In his testimony, School Principal Risna Abbas, S.Pd. of SDN 78 Kota Gorontalo expressed his gratitude that his school had been one of the 70 schools selected from across Indonesia as a location for the PLN Shining Young Ambassadors program.

"It is an honor and a matter of pride for us, the Teachers Council, School Committee and all our students, that PLN chose SDN 78 Gorontalo as one of the 70 schools selected, and it is our great hope that future attention to the field of education can be maintained and increased. Our school is Internet-based and we hope that on the next occasion we will receive supporting facilities, whether it is computers or some other kind of support," said Risna Abbas.

"The Shining Young Ambassadors Care for 70 Schools program, as a form of the company's care for the environment, should be appreciated as a program with national reach, and, of course, we are proud that SDN 78 Gorontalo was one of the schools from across Indonesia that could be part of this national program. Education is a basic foundation to form the character of Indonesia's children into the future and it is everyone's responsibility to participate and support progress in educational programs," said DR. Hi. Abram AM Badu, M.Pd., head of Gorontalo City Education Agency.

The program was warmly welcomed by the students and those who care about the world of education in all the schools selected as program locations, not excluding the 2,000 PLN volunteers who were involved and proud to directly contribute to the development of education in Indonesia.

The Shining Young Ambassador program is an ongoing program initiated by PT PLN (Persero) that will continue to be developed in terms of both quality and coverage. The program aims to support improvements to the quality of education in Indonesia, and to improve the quality of human resources in the future.

SUKSES STORY BAKPIAPIA

BAKPIAPIA'S SUCCESS STORY

BakpiaPia Djogdja adalah industri rumah tangga yang berdiri sejak bulan Juni 2004 di Jl. Sosro Menduran Yogyakarta. Produk ini kami perkenalkan kepada masyarakat melalui rapat, arisan,dan acara keluarga. Kemudian secara word of mouth usaha kami mulai dikenal karena rasa yang khas dengan kerenyahannya dan isi / filling yang lebih banyak dengan kulit yang renyah. Sampai bulan September 2004, industri rumah tangga ini mengalami perkembangan yang cukup baik sehingga kami memutuskan untuk mengontrak sebuah gerai kecil berukuran 3m x 5m di Jl. Dagen No. 7, Malioboro, Yogyakarta, dan untuk mendukung keberlangsungan usaha ini, kami mendapatkan bantuan pinjaman modal dari PLN pada tahun 2007 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan langsung dibelikan mesin pengolahan kacang hijau sebagai bahan dasar pembuatan bakpia. Yang kemudian berkembang hingga sekarang ini dan memberikan omzet Rp4 M / tahun, dan saat ini kami juga sudah mengembangkan system franchise untuk bermitra dengan usaha kami.

Harapan kami kedepan pada PLN, untuk selalu memberikan Pembinaan Kemitraan berupa fasilitas penyelenggaraan pameran UKM baik dalam negeri maupun di Luar Negeri, serta memberikan bantuan modal usaha bagi mitra mitra franchise kami.

Untuk menjaring konsumen yang lebih luas, BakpiaPia Djogdja secara berkesinambungan mengikuti berbagai pameran di Yogyakarta dan bahkan Jakarta. Media nasional seperti RCTI, TRANS TV, Tabloid NOVA, dan KOMPAS juga telah meliput industri kami sebagai bakpia dengan rasa yang khas dari Yogyakarta.

Kebutuhan masyarakat akan oleh-oleh khas Yogyakarta yang tinggi, membuat industri BakpiaPia Djogdja berkembang pesat. Kami telah memiliki 70 orang karyawan, dan membuka 7 gerai di Yogyakarta.

BakpiaPia Djogdja is a home industry established in June 2004 on Jl. Sosro Menduran, Yogyakarta. The products have been introduced to the public through various events, meetings, and gatherings. Through word of mouth, the business grew in size and recognition for its characteristically good taste and crunchiness, and generous filling with crispy skin. Up until September 2004, this home industry grew exceptionally well, causing the owners to rent a small outlet, 3m x 5m in size, at Jl. Dagen 7, Malioboro, Yogyakarta. To help finance the business, the owners secured capital loan assistance from PLN in 2007, amounting to Rp20 million, which was used to purchase mung bean processing machine to make the material for bakpia. The business has now grown to a Rp4-billion-a-year business, and currently the business is franchised to aspiring business partners.

The business owners' hope is for PLN to always provide Partnership Mentoring in the form of SME exhibitions both in the country and abroad, and also provision of working capital for the franchisees.

To expand the market, BakpiaPia Djogdja regularly participates in various exhibitions in Yogyakarta and Jakarta. National media such as RCTI, Trans TV, Tabloid Nova, and Kompas, have covered the business, which promotes the bakpia with a characteristic flavor of Yogyakarta.

There is such a strong demand for culinary souvenirs from Yogyakarta, and thus BakpiaPia Djogdja's business has been able to grow rapidly. Now the business employs 70 people, and has 7 outlets open across Yogyakarta.

Kami percaya bahwa pelayanan adalah hal terpenting untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Oleh karenanya, pelayanan yang baik, ramah, dan siap membantu adalah prioritas utama kami demi kepuasan pelanggan. "Monggo icip-icip" adalah sapaan khas apabila pelanggan mengunjungi gerai BakpiaPia Djogdja. Kami memberikan sample bakpia, pia, ampyang oven, maupun kacang oven untuk dicicipi terlebih dahulu.

Jika selama ini bakpia dikemas dengan kotak yang rata-rata bernuansa seragam, lengkap dengan angka-angka, BakpiaPia Djogdja menyuguhkan kemasan unik dan berbeda. Bpk. Zoehad (suami Ibu Rasuna) sendirilah yang merancang kemasan BakpiaPia Djogdja dengan memasukkan logo Tugu dan motif batik sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Dengan inilah akhirnya BakpiaPia Djogdja semakin memiliki karakter sebagai jajanan unik dari Yogyakarta yang layak dijadikan oleh-oleh ataupun dikonsumsi pribadi. Kami akan terus berinovasi untuk selalu menjadi "Lebih Dari Yang Asli".

The business owners believe that service is key to obtaining customer loyalty. Therefore, a good, friendly, and helpful service is the main priority in achieving customer satisfaction. "Monggo icip-icip" or "Please do try" is the greeting delivered to everyone who pays a visit to BakpiaPia Djogdja's outlets. Samples are provided to the customers, including bakpia, pia, ampyang oven, and kacang oven.

For so many years most bakpia are packaged in a regular box packaging with numbers as their brands. BakpiaPia Djogdja, however, wanted to be different and unique in its packaging. Mr. Zoehad (husband of Mrs. Rasuna) was the one who designed BakpiaPia Djogdja's packaging, which incorporates the Tugu logo and the batik motif as the characteristic elements of Yogyakarta. Thus BakpiaPia Djogdja has become increasingly renowned as a typical snack from Yogyakarta that is just as good to eat as given to friends and relatives as souvenirs. The business owners will maintain their promise to become "more than simply the original".

Bantuan yang diberikan adalah:

1. Bantuan Bencana alam sebesar Rp341.500.000 dipergunakan untuk:
   a. Bantuan Peduli Asap di Palembang, Sumatera Selatan
   b. Bantuan Peduli Asap untuk air bersih di Kabupaten Oki Sumatera Selatan
   c. Pemeriksaan balita akibat Asap di Kabupaten Oki Sumatera Selatan
2. Bantuan Pendidikan / Pelatihan sebesar Rp15.878.096.071 dipergunakan untuk:
   a. Bantuan Duta Muda Bersinar (DMB) dimana pegawai PLN turut berpartisipasi mengajar, membersihkan sekolah dan berbagi ilmu di 70 Sekolah yang tersebar di seluruh propinsi,
   b. Bantuan Pendidikan kepada Yayasan Annur di Aceh
   c. Bantuan peralatan komputer YYSN Anak Yatim di Riau
   d. Peduli Pulau terdepan, sosialisasi mengenal PLN lebih dekat di Kepulauan Riau
   e. Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui program Lampu Kita di Lampung
   f. Bantuan Beasiswa di PLTU Batang, pelatihan Hydroponik, Jawa Tengah dan pengelolaan limbah kotoran Kuda Yogyakarta
   g. Wirausaha bersinar yaitu bantuan pelatihan di 6 unit Bank Sampah, Reog Ponorogo, yang dilaksanakan di Jawa Timur
   h. Bantuan program pelatihan Biogas di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan
   i. Bantuan unit Terpencil untuk perbaikan sarana olahraga untuk pemersatu pemuda pemudi serta bantuan penerangan belajar di Sumba
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan sebesar Rp2.670.494.250 dipergunakan untuk:
   a. Bantuan operasi katarak di kota Palembang
   b. Penanggulangan Gizi Buruk dan pencegahan Demam Berdarah di Jawa Tengah
   c. Pengobatan gratis di Bali, PLTU Jeranjang NTB, dan Gorontalo
   d. Program Pola hidup bersih dan sehat di Kalimantan Barat
   e. Bedah Rumah di Kalimantan Selatan
   f. Pembangunan Puskesmas di Manggarai Barat, NTB
4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan/ atau sarana umum, sebesar Rp5.647.417.408 yang dipergunakan untuk:
   a. Bantuan lampu limar di Aceh
   b. Bantuan Siskampling di Riau
   c. Bantuan Biogas melalui program PLN Membiru di Lampung
   d. Bantuan air bersih di Klaten Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kadatua Buton (Bantuan Unit Terpencil)

Various aids distributed in 2015 are as follows:

1. Natural Disaster Aid amounting to Rp341,500,000.00 was used to:
   a. Support Peduli Asap (Smog Care) program in Palembang, South Sumatera,
   b. Support Peduli Asap program by providing clean water in Oki Regency, South Sumatera,
   c. Support toddler checkup because of the smog in Oki Regency, South Sumatera.
2. Education/Training Aid amounting to Rp15,878,096,071.00 was used to:
   a. Support the Duta Muda Bersinar (DMB) program, in which PLN employees participate to teach, clean school buildings, and share their knowledge in 70 schools across all provinces of Indonesia,
   b. Give an education donation to Annur Foundation in Aceh,
   c. Donate computers to an orphan foundation in Riau,
   d. Support Outermost Islands Care program, socialize "knowing PLN more closely" in Riau islands,
   e. Support communities empowerment program through Our Lamp program in Lampung,
   f. Donate scholarships to Batang Steam Power Plant as well as conduct hydroponic training in Central Java and horse manure management in Yogyakarta,
   g. Support Shining Entrepreneurship program, which is a training program at 6 Waste Bank units,Reog Ponorogo, East Java,
   h. Support biogas training program in Takalar Regency, South Sulawesi,
   i. Support remote units, aimed at developing sports infrastructure to support unity of youth community, as well as donate lighting equipment to aid learning activities in Sumba.
3. Health Improvement Aid amounting to Rp2,670,494,250.00 was used to:
   a. Support cataract operations in Palembang,
   b. Control malnutrition and prevent dengue fever in Central Java,
   c. Support free medication in Bali, Jeranjang Steam Power Plant, NTB, and Gorontalo,
   d. Support "clean and healthy pattern of life" program in West Kalimantan,
   e. Support house renovation program in South Kalimantan,
   f. Support the development of a Community Health Center (Puskesmas) in West Manggarai, NTB.
4. Infrastructure and/or public facilities development aid, amounting to Rp5,647,417,408.00 was used to:
   a. Donate Limar Lamp in Aceh,
   b. Support Neighborhood Security System (Siskamling) in Riau,
   c. Donate biogas through PLN Membiru program in Lampung,
   d. Support clean water provision in Klaten, Central Java, North Sulawesi, Gorontalo, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and Kadatua Buton (Remote Unit Aid),

e. Bantuan Sarana Fasilitas peningkatan Bank Sampah di Malang, Surabaya Jawa Timur, Sulawesi Selatan
f. Bedah Rumah Pensiunan di Jawa Timur
g. Bantuan Pembangunan rumah Singgah tenaga kerja di Balai Karangan Kalimantan Barat
h. Bantuan Jembatan di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara

5. Bantuan Sarana Ibadah, sebesar Rp2.620.246.500 dipergunakan untuk bantuan tempat ibadah tersebar di Riau, Bangka Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Gowa Sulawesi Selatan, NTT, Papua dan Papua Barat

6. Bantuan Pelestarian Alam sebesar Rp1.072.139.000 dipergunakan untuk:
   a. Bantuan pelestarian Penyu di Bali
   b. Bantuan Bank sampah di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Jakarta
7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp8.620.496.600 dipergunakan untuk:
   a. Bantuan Sembako pada saat Hari Raya besar Agama yang dilaksanakan di seluruh provinsi
   b. Bantuan Bedah Rumah di Jawa Barat

8. Bantuan Pembinaan Mitra Binaan : belum melaksanakan pembinaan mitra binaan karena belum ada penyaluran bantuan program Kemitraan

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dengan pertimbangan optimalisasi dana Program Bina Lingkungan, maka di tahun 2015 Kegiatan CSR seluruh pendanaannya memanfaatkan dana Program Bina Lingkungan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN/PELANGGAN

Kebijakan

1. Menjamin ketersediaan listrik yang berkualitas bebas dari pemadaman dan gangguan penyaluran.
2. Menjamin akurasi pencatatan meter pemakaian dan perhitungan tagihan
3. Memberikan pelayanan pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan akurat.
4. Pengoptimalan upaya perbaikan citra perusahaan dan pembangunan corporate brand perusahaan.
5. Peningkatan keandalan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk menekan SAIDI dan SAIFI.
6. Pemantauan terhadap angka penyambungan secara rutin.
7. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi guna mendukung *Customer Relationship Management System*, perbaikan proses bisnis pelayanan pelanggan serta layanan korporat lainnya secara terpusat setara perusahaan sejenis kelas dunia.

e. Support the development of public infrastructure by increasing Waste Bank in East Java (Malang and Surabaya) and South Sulawesi,
f. Support pensioners' house renovations in East Java,
g. Support the building of a halfway house for the workforce in Balai Karangan, West Kalimantan,
h. Support the construction of a bridge in Central Java and North Sulawesi.

5. Religious Facilities Aid, amounting to Rp2,620,246,500.00, was used to support various religious facilities in Riau, West Bangka, Lampung, Bali, West Kalimantan, Gowa, South Sulawesi, NTT, Papua and West Papua.
6. Nature Conservation Aid, amounting to Rp1,072,139,000.00 was used to:
   a. Support turtle conservation in Bali,
   b. Donate a Waste Bank in West Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and Jakarta.
7. Poverty alleviation aid, amounting to Rp8,620,496,600.00 was used to:
   a. Donate nine commodities that meet basic human needs (sembako) for religious events conducted in all provinces of Indonesia,
   b. Support house renovations in West Java.

8. In regards to the Partnership Program, there was no activity because there was no budget allocation for the Partnership Program sector.

Corporate Social Responsibility (CSR) Program

In terms of optimalization budget of Partnership Program, in 2015 CSR activities acquired Partnership Program budget.

RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

Policies

1. Ensuring the electricity supply is free of power blackouts and interruptions on the transmission line.
2. Ensuring the accuracy of usage meter records and billing calculations.
3. Providing service to customers and resolving customer complaints fast and accurately.
4. Optimizing the improvement efforts of the Company's image and corporate brand.
5. Improving the reliability of power plants, transmission and distribution to reduce SAIDI (System Average Interruption Duration Index) and SAIFI (System Average Interruption Frequency Index).
6. Regularly monitoring the connection points.
7. Optimizing the utilization of information technology to support Customer Relations Management System, improve and centralize the processes of customer service and other corporate services in order to achieve equality with similar world-class companies.

Program

PLN berkomitmen penuh untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen dalam menjalankan kegiatan operasioal dan mengembangkan usaha. Perbaikan ditujukan untuk mengubah maupun memperbaiki persepsi para pelanggan terhadap kualitas layanan PLN dalam memberikan jasa penyediaan tenaga listrik, memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan listriknya maupun dalam menyelesaikan kewajibannya atas tenaga listrik yang digunakan.

Sejalan dengan tuntutan efisiensi operasional dan tuntutan bagi terciptanya kegiatan operasional yang mampu meminimalisir human *error* dan lebih dapat dipertanggungjawabkan, PLN semakin intensif mengembangkan sistim layanan berbasiskan pada dukungan sistem teknologi informasi. Berbagi program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab terhadap konsumen meliputi:

1. Penyediaan *account officer* dan *official account* untuk pelanggan-pelanggan utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
2. Pengembangan sistim penagihan dan penyambungan, yakni AP2T dan P2APST.
3. Pengembangan Pelayanan *Borderless*, meliputi:
   - Pembukaan akun twitter @pln_123
   - Call center PLN 123, SMS 8123, USSD *8123#, email: pln123@pln.co.id, dan website pln www.pln.co.id.
4. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu (APKT).
5. Pengembangan program optimalisasi pengelolaan proses bisnis *back office*.

Pengembangan sistim operasional berbasis teknologi informasi tersebut selain dapat meningkatkan kecepatan layanan dan efisiensi operasional, juga dapat mengurangi peluang bagi terjadinya tindakan *fraud* akibat terjadinya kontak langsung dengan pelanggan.

Selain peningkatan kualitas layanan tersebut, PLN tetap konsisten melaksanakan upaya-upaya lain yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen. Upaya tersebut meliputi: pengurangan frekuensi gangguan pemadaman dan lama pemadaman, kestabilan tegangan dan pengembangan kapasitas pembangkitan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik.

Mengerti dan Memenuhi Kebutuhan Pelanggan

Sebagai wujud komitmen tinggi terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan, PLN menggunakan pendekatan yang berbeda pada masing-masing kelompok pelanggan, yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhannya. Masing-masing kelompok pelanggan PLN tersebut memiliki

Program

PLN is fully committed to improving the quality of responsibility towards customers while running operational activities and developing the business. The improvement is aimed at changing as well as elevating customers' perceptions of PLN's service quality in providing the electricity supply, fulfilling the electricity needs and solving problems faced by customers related to the fulfillment of their electricity needs as well as the settlement of their obligations related to electricity consumed.

In line with the demand for operational efficiency and creation of operational activities which are more accountable and capable of minimizing human error, PLN intensively develops its IT-based service system. The various programs conducted to improve the quality of responsibility towards customers are as follows:

1. Provision of account officers and official accounts for serving key customers, both business and commercial customers.
2. Development of billing and connection systems, namely Centralized Customer Service Application (AP2T) and Centralized Management and Supervision of Revenue Flows (P2APST).
3. Development of Borderless Service, consisting of:
   - Twitter account @pln_123
   - PLN Call Center at 123, SMS at 8123, USSD at *8123#, email at pln123@pln.co.id, and PLN's website at www.pln.co.id.
4. Development of Application of Integrated Complaint Management (APKT)
5. Development of optimization program for back office business process management.

The development of IT-based operational systems can improve the speed of service delivery to end customers and increase the efficiency of operational activities. Furthermore, it can minimize the chance of fraud because there is direct contact with customers.

In addition to service quality improvement as mentioned above, PLN consistently engages in other efforts which are aimed at fulfilling the responsibility to customers. These efforts include reducing the number and length of power blackouts, improvement of voltage stability and expansion of power plant capacity to fulfill electricity supply sufficiency.

Understanding and Fulfilling Customer Needs

In its strong commitment to the efforts of service quality improvement, PLN uses different approaches for each customer group, which comprise household, business, and industry customers. The aim of all approaches is to improve service quality and fulfill customer needs. Each

karakteristik kebutuhan spesifik yang berbeda. Oleh karenanya dengan menekankan program pemasaran yang semakin "*Customer Oriented*" PLN kini semakin proaktif dan berupaya memahami betul rencana pelanggan dan calon pelanggan, serta kemudian membuat rencana bisnis yang selaras dengan keinginan pelanggan.

Mempertimbangkan bahwa kelompok pelanggan industri merupakan sumber pendapatan utama, disusul dengan kelompok pelanggan bisnis, PLN merancang beragam program khusus untuk mengetahui, mengerti dan berusaha memenuhi kebutuhan spesifik mereka, seperti: layanan online dengan menyediakan *account officer* untuk memberi para pelanggan kemudahan mendapatkan tambahan daya, akses informasi perbaikan jaringan listrik, akses keluhan pelanggan dan kemudahan pembayaran tagihan dan sebagainya.

Untuk kelompok pelanggan rumah tangga, PLN juga menyiapkan berbagai program layanan sesuai dengan kebutuhan, seperti: akses pengaduan melalui layanan call 123, SMS 8123 dan sebagianya.

PLN juga mengintrodusir layanan yang bersifat umum, yang dapat digunakan untuk seluruh kelompok pelanggan. PLN juga berupaya keras memenuhi harapan umum dari seluruh kelompok pelanggan, yakni meningkatnya keandalan pasokan listrik, yang ditandai dengan semakin berkurangnya intensitas maupun lama gangguan/ pemadaman listrik, selain stabilnya tegangan listrik yang sampai ke instalasi pelanggan.

Sertifikasi Mutu Layanan dan Penghargaan

Untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan, PLN mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Uraian tambahan yang dilakukan PLN untuk menunjukkan pemenuhan tanggung jawab terhadap konsumen dijelaskan pula pada bab Diskusi dan Analisa Manajemen - "Peningkatan Mutu Layanan dan Keandalan".

Survey Kepuasan Pelanggan

Dalam rangka mendapatkan *feed-back* bagi perbaikan kualitas layanan kepada pelanggan, sejak beberapa tahun terakhir PLN secara berkala melaksanakan survey kepuasan pelanggan bekerja sama dengan konsultan independen untuk memastikan bahwa hasil survey tersebut telah mewakili suara pelanggan. Survey dilakukan dengan menggunakan sample acak dari masing-masing unit usaha PLN, untuk mengukur kinerja layanan unit-unit dimaksud, sekaligus mengukur rata-rata kinerja layanan PLN secara nasional. Kegiatan survey kepuasan pelanggan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2015 dan hasilnya baru diperoleh di akhir bulan Januari 2016.

PLN customer group has different characteristics and needs. Thus, by prioritizing the marketing program with a more "Customer-Oriented" method, PLN is becoming more proactive toward and understanding of customers' plans and potential customers' needs. With this, PLN also formulates a business plan that is more oriented towards customer needs.

The industry customer group is the main source of PLN's income, which is then followed by the business customer group. Because of this, PLN designs various specific programs to understand, comprehend, and strive to fulfill their specific needs. For example, the provision of online services through an account officer will enable customers to obtain additional electricity and information about electrical network repair, as well as pay their electricity bill. Online services also provide access to customer complaints, and many other services.

For the household customer group, PLN prepares various service programs based on customer needs, such as complaint access to PLN call center at 123, SMS at 8123, and many more.

PLN has also introduced some public services that can be utilized by all customer groups. PLN also strives to meet public expectation of all customer groups, which is increasing the reliability of electricity supply as indicated by a reduced intensity and length of power blackouts, as well as increasing electricity voltage stability of the customer's installation.

Service Quality and Award Certification

In order to improve customer service standards, PLN adopts the Quality Management System of ISO 9001:2008.

PLN has provided an additional explanation to show the fulfillment of responsibility toward customers which is embodied in the Management Discussion and Analysis chapter, the "Improving Service Quality and Reliability" topic.

Customer Satisfaction Survey

In order to receive feedback for customer service quality improvement, during the previous few years PLN has periodically conducted a customer satisfaction survey in collaboration with an independent consultant, to ensure the survey result has represented the customers' opinion. The survey is implemented by random samples taken from all PLN units in order to measure the service performance of those units as well as the average service performance of PLN nationwide. The most recent customer satisfaction survey was conducted in December 2015 and the result was revealed in the end of January 2016.

Hasil survey dikelompokkan kedalam dua bagian besar yakni mendapatkan nilai Indeks Kepuasan pelanggan (IKP) dan Indeks Ketidakpuasan (IktP). Untuk IKP, patokan yang digunakan adalah:

1. Nilai 65,00 < IKP < 80,00 adalah wilayah yang perlu menjadi prioritas bagi PLN untuk memperbaiki kinerja pelayanan di wilayah yang masuk ke kategori kisaran nilai IKP tersebut.
2. Nilai 80,00 <IKP < 88,11 adalah wilayah yang perlu diperbaiki kinerja pelayanannya.

Untuk pengukuran IKP, hasil survey kepuasan pelanggan pada PLN Distribusi/ Wilayah 2015 secara nasional dikategorikan "puas", dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) rata-rata sebesar 88,11%.

Berdasarkan hasil tersebut, dari 21 unit PLN Distribusi/ Wilayah se-Indonesia yang disurvey, terdapat 5 unit Distribusi/ Wilayah yang memiliki IKP "di atas" nasional. Yakni, Wilayah Kalselteng sebesar 88,32%, Dist. Bali sebesar 91,98%, Dist. Jawa Tengah 92,78%, Dist. Jawa Barat sebesar 95,58%, dan PLN Batam sebesar 89,82%. 5 unit distribusi mendapatkan Nilai 65,00 < IKP < 80,00 dan masuk prioritas untuk diperbaiki kualitas layanannya, 14 unit lainnya mendapatkan Nilai 80,00 <IKP < 88,11 yakni wilayah yang perlu diperbaiki kinerja pelayanannya.

Sedangkan nilai Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (IKtP) secara nasional, yaitu sebesar 1,46%.

Hasil Survei Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan pada PT PLN (Persero) 2015 yang meliputi PLN Wilayah/Distribusi dan Anak Perusahaan, Pelanggan PT PLN (Persero) secara Nasional dikategorikan puas karena memiliki Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) PT PLN (Persero) 2014 sebesar 88,11% dengan Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (IKtP) sebesar 1,46%.Kategori pelanggan yang memiliki nilai IKP di bawah IKP nasional, yaitu Pelanggan Bisnis dengan IKP sebesar 85,32% dan Pelanggan Pemerintah dengan IKP sebesar 87,20%.

Berdasarkan nilai IKP nasional, terdapat beberapa region dan Anak Perusahaan yang memiliki IKP di bawah nilai IKP Nasional. Prioritas perbaikan mutu pelayanan PLN region kepada pelanggan adalah PLN Tarakan (IKP 73,91%), Maluku dan Maluku Utara dan Papua (IKP 80,78%), Sulawesi dan Nusa Tenggara (IKP 82.56%), Kalimantan (IKP 84,83%), Jawa Bagian Barat (IKP 85.20%), dan Sumatera (IKP 85,20%).

Aspek yang menjadi prioritas peningkatan mutu pelayanan PLN untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan hasil analisis *Diagonal Split* adalah aspek mutu listrik dan respon pengaduan. Atribut layanan pada aspek mutu listrik yang menjadi prioritas perbaikan adalah listrik tidak sering padam dan cukup cepat menyala kembali setelah

The survey result was classified into two main sectors, namely Customer Satisfaction Index (IKP) and Customer Dissatisfaction Index (IKtP). For IKP calculation, the standard was:

1. IKP between 65.00 and 80.00 points (65.00 < IKP < 80.00) is the area where PLN must take priority to improve its service performance
2. IKP between 80.00 and 88.11 points (80.00 <IKP < 88.11) is the area where PLN must improve its service performance

In regards to IKP measurement, the result of the 2015 customer satisfaction survey of PLN's Distribution/Area is categorized as "satisfied" nationwide with the IKP at 88.11% in average.

According to this result, from the total of 21 units of PLN Distribution/Region throughout Indonesia which were surveyed, there were 5 units of Distribution/ Region with IKP "above" the total IKP. These units were South Central Kalimantan Region at 88.32%, Bali Region at 91.98%, Central Java Region at 92.78%, West Java Region at 95.58%, and Batam Region at 89.82%. These 5 units obtained IKP at the range of 65.00 and 80.00 points and the service performance was the priority area of improvement. The other 14 units produced a result in the range of 80.00 and 88.11, indicating their service performance needs to be improved.

The amount of IKtP nationwide reached 1.46%.

The result of the 2015 Customer Satisfaction and Dissatisfaction Survey of PT PLN (Persero) covered PLN Distribution/Area and its Subsidiaries, and states that PT PLN (Persero)'s customers nationwide are categorized as "satisfied" because its IKP is at 88.11% and IKtP is at 1.46%. The customer category with the IKP below the national IKP is Business Customer category at 85.32%, and Government Customer category at 87.20%.

Based on the national IKP, there are several areas and subsidiaries with an IKP below the national IKP. Areas where customer service quality needs to be improved are Tarakan (IKP 73.91%), Maluku and North Maluku and Papua (IKP 80.78%), Sulawesi and Nusa Tenggara (IKP 82.56%), Kalimantan (IKP 84.83%), West Java (IKP 85.20%), and Sumatra (IKP 85.20%).

Based on the result of the Diagonal Split analysis, there are two aspects which must be prioritized when improving PLN service quality and customer satisfaction, which are electricity quality and complaint response aspects. The service attribute for electricity quality aspect is the minimum frequency of electricity blackouts and fast

padam. Atribut layanan pada aspek respon pengaduan yang menjadi prioritas perbaikan adalah petugas lapangan cepat mendatangi pelanggan dan petugas lapangan cepat menyelesaikan gangguan. Pelanggan yang berada di PLN Tarakan memiliki keterikatan/*engagement* yang sangat rendah terhadap PT PLN sehingga diperlukan perbaikan mutu layanan dan event-event yang dapat membangun hubungan positif antara pelanggan dengan PLN Tarakan.

Faktor mutu listrik adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pascabayar dan pelanggan daya besar, sedangkan faktor mutu listrik dan transparansi biaya adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan prabayar.

Rekomendasi

Dari hasil survey tersebut, beberapa hal rekomendasi yang diberikan untuk PLN diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PT PLN perlu meningkatkan ketersediaan pasokan listrik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada aspek mutu listrik.
2. Sosialisasi terkait perhitungan biaya PB/PD/PS dan biaya listrik isi ulang perlu menjadi agenda penting bagi PT PLN untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan khususnya pelanggan prabayar.
3. PT PLN perlu melakukan evaluasi internal terhadap kinerja PLN 123 maupun petugas lapangan dalam menanggapi lapor gangguan maupun pelayanan PB/PD/PS
4. PT PLN perlu melakukan kajian atau evaluasi terhadap sistem prabayar untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk serta solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan terhadap sistem prabayar.
5. Untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan selanjutnya, perlu memasukkan variabel tarif listrik sebagai salah satu atribut mutu pengukuran.

PLN perlu meningkatkan ketersediaan pasokan listrik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan mutu listrik. PLN perlu meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah remote. PLN juga perlu meningkatkan kinerja aspek kemudahan informasi layanan relatif lebih mudah dilakukan dengan mengintensifkan kontak pelanggan melalui berbagai *channel/touch point* (*contact center, front liner, social media*, traditional media dll) dalam rangka *customer engagement*.

rectification of blackout conditions so the power is rapidly restored. The service attribute on complaint response aspect is the fast visit and solution from PLN operators in the handling of customer complaints. The customers in PLN Tarakan area have a low engagement with the Company, therefore improvement of service quality is required and various events must be conducted to build positive relations between customers and the Company.

Electricity quality is a factor that highly impacts upon the satisfaction of post-paid customers and customers using a large amount of electricity, while the cost transparency factor, in addition to electricity quality, highly impacts upon the satisfaction of pre-paid customers.

Recommendation

From the survey results above several recommendations were given to PLN, are as follows:

1. PT PLN is required to increase the availability of electricity supply to improve customer satisfaction towards electricity quality aspect.
2. Socialization related to PB/PD/PS cost calculation and rechargeable electricity cost must be included in PT PLN's main agenda to increase customer satisfaction and trust, especially for pre-paid customers.
3. PT PLN is required to conduct an internal evaluation toward PLN 123 performance and field officers in responding to complaints as well as PB/PD/PS services.
4. PT PLN is required to review or evaluate the pre-paid system to understand the strengths and weaknesses of its product, as well as produce a solution to improve customer comfort and satisfaction towards the pre-paid system.
5. In order to measure the next IKP, the electricity tariff variable must be included as one of the quality measurement components.

PLN is required to improve the availability of the electricity supply to increase customer satisfaction toward electricity service quality. PLN also needs to increase the electrification ratio in remote areas as well as ease of obtaining service information from the Company by intensifying customer relation tools through various channels or touch points, such as contact center, front liner, social media, traditional media, etc., for the sake of customer engagement.

BIODATA PERSEROAN
CORPORATE INFORMATION

hal. 510 - 536

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

HASAN BISRI
Komisaris dan Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Commissioner and Acting President Commissioner
(58 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris mulai tanggal 23 Desember 2014. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BPK RI sejak September 2011 s.d. Oktober 2014, setelah sebelumnya bertugas sebagai Anggota BPK RI periode Oktober 2009 s.d. September 2011 dan periode Oktober 2004 s.d. Oktober 2009.

Lulusan Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Djakarta (UID), Jakarta tahun 1985, selanjunya beliau menyelesaikan program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama Jakarta pada tahun 2004.

Hasan Bisri has served as a Commissioner since 23 December 2014. He previously served as Vice Chairman of the Supreme Audit Agency (BPK) between September 2011 and October 2014, having served as a Member of BPK from October 2009 until September 2011, and from October 2004 to October 2009.

He holds a bachelor's degree in Business Economics from the School of Economics, University of Islam Djakarta (UID), Jakarta in 1985, and a Master's degree in Financial Management from University Satyagama, Jakarta in 2004.

DARMONO
Komisaris Independen
Independent Commissioner
(62 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 16 Oktober 2014. Beliau juga aktif di bidang pendidikan sebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Esa Unggul Jakarta (2013-sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris pada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013-2014) serta menjabat di berbagai jabatan strategis dibidang penegakan hukum, meliputi: Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi (2010-2013), PLT. Jaksa Agung RI (2010) Wakil Jaksa Agung RI (2009-2013), Anggota Tim Pemberantasan Mafia Hukum (2009 – 2010).

Menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 Sarjana Hukum UII Yogyakarta (1977) selanjutnya jenjang Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen IPWI Jakarta (2000) dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (2010).

Darmono has served as an Independent Commissioner since 16 October 2014. He is active as a Lecturer in the Law Faculties of UII Yogyakarta, Trisakti University Jakarta and Esa Unggul University Jakarta (2013-present). Previously, he served as Commissioner in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013-2014) and has had various strategic roles related to legal enforcement, such as: Team Leader in the Integrated Hunt for Convicts and Suspects in Corruption Cases (2010- 2013), Acting Attorney General (2010), Deputy Attorney General (2009-2013) and Member of the Judicial Mafia Eradication Task Force (2009-2011).

He holds a bachelor's degree in Law from UII Yogyakarta (1977), Masters Degree in Management from IPWI Jakarta (2000) and Doctorate in Law from Padjadjaran University Bandung (2010).

OEGROSENO
Komisaris Independen
Independent Commissioner
(59 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Mulai Menjabat sebagai Komisaris Independen mulai tanggal 16 Oktober 2014. Sebelumnya beliau berkarir di bidang Kepolisian dan pernah menjabat berbagai jabatan strategis, meliputi: Wakil Kepala POLRI (2013), Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes POLRI (2012), Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (2011), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2010) dan Kadiv Propam POLRI (2009).

Memulai karir di Kepolisian setelah sebelumnya menempuh pendidikan di kademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1978), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986), selanjutnya SESPIMPOL (1996), SESPATI III (2002) dan terakhir di LEMHANAS (2007).

Oegroseno has served as an Independent Commissioner since 16 October 2014. He previously had a career in the police force, holding various strategic positions, including: Deputy Chief of Police (2013-2014), Head of Security Maintenance at National Police Headquarters (2012- 2013), Head of the National Police Education Institute (2011), Head of North Sumatra Police (2010) and Head of the National Police Professions and Security Division (2009).

He started his career in the police force after graduating from the Armed Forces Police Academy of the Republic of Indonesia (AKABRI) in 1978, Police Institute in 1986, Police Staff and Leadership College (SESPIMPOL) in 1996, High-Ranking Officers College (SESPATI III) in 2002 and finally the National Resilience Institute (LEMHANAS) in 2007.

ANDIN HADIYANTO
Komisaris
Commissioner
(50 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris mulai 3 Oktober 2012. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) (2016-sekarang) dan juga menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan International (2013-sampai dengan sekarang), Gubernur dari Indonesia untuk *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) (2014-sekarang) dan Anggota Dewan *Financial Stability Board* (FSB) (2015-sekarang). Beliau pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2014-2015), Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2012), setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2009-2011). Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perdagangan (2006-2009) dan Kepala Bidang Analisa Sektor Riil Pusat Analisa Ekonomi Makro Badan Analisa Fiskal (2001-2005).

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada (1989), mendapatkan gelar Master of Economic dari Universitas Nagoya Jepang (1997) dan mendapatkan gelar Doctor in Economic dari Universitas Nagoya Jepang (2000).

Andin Hadiyanto has served as a Commissioner since 3 October 2012. He currently also serves as Executive Director of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2016-present) and as Expert Advisory Staff to the Minister of Finance in Macroeconomics and International Finance (2013-present), Governor representing Indonesia for the International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2014-present) and as a Board Member of the Financial Stability Board (FSB) (2015-present). He has also served as Acting Head of the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (2014-2015), Secretary of the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (2012) having previously held the position of Head of International Cooperation Policy in the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (2009-2011). He has also served as Head of Research and Development, Ministry of Trade (2006-2009), Head of Real Sector Analysis in Macroeconomic Analysis Center of the Fiscal Analysis Office (2001- 2005).

He holds a bachelor's degree in Economics from University of Gajah Mada (1989), a Master's degree in Economics from the University of Nagoya, Japan (1997), and a Doctoral degree in Economics from the University of Nagoya, Japan (2000).

HARRY SUSETYO NUGROHO
Komisaris
Commissioner
(60 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris mulai 2 April 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris pada beberapa BUMN, seperti Komisaris PT Pertamina (Persero) (2012-2013), Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Dewan Pengawas Perum Peruri (2007-2012), Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012), serta bertugas di Kementerian BUMN dengan jabatan sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN (2013 - 2015), Staf Ahli Tata Kelola, Kementerian BUMN (2010 - 2013), Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2005-2010) dan Asisten Deputi Bidang Usaha Aneka Industri Lainnya, Kementerian BUMN (2003-2005).

Menyelesaikan pendidikan Strata-1 sebagai Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1980) selanjutnya menyelesaikan jenjang S-2 sebagai Master Business Administration (Finance) dari University of Denver di Colorado, USA (1988).

Harry Susetyo Nugroho has served as Commissioner since 2 April 2013. Previously, he has held roles as Commissioner in several State-Owned Enterprises, including Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2012-2013), President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Commissioner of Perum Peruri (2007-2012), Commissioner of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012) and served in the Ministry of State-Owned Enterprises with roles such as Deputy of Business Infrastructure, SOE Ministry (2013-2015), Expert Governance Staff, SOE Ministry (2010-2013), Deputy of Logistics and Tourism, SOE Ministry (2005-2010) and Deputy Assistant of Other Miscellaneous Industries, SOE Ministry (2003-2005).

He holds a bachelor's degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1980) and Master's degree in Business Administration (Finance) from the University of Denver, Colorado, USA (1988).

BUDIMAN
Komisaris
Commissioner
(59 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Mulai menjabat sebagai Komisaris mulai tanggal 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau berkarir di bidang kemiliteran dengan mengemban berbagai jabatan strategis, meliputi: Kepala Staff Angkatan Darat (2013), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (2013), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (2011), Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (2010) setelah sebelumnya menjabat sebagai Pangdam IV/ Diponegoro (2009).

Menyelesaikan pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang Tahun 1978, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (1994) dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI (2001).

Budiman has served as a Commissioner since 23 December 2014. He previously had a career in the military and held various strategic positions, including: Army Chief of Staff (2013), Secretary General of the Ministry of Defense (2013), Deputy Army Chief of Staff (2011), Army Commander of Education, Training and Doctrine Command (2010) and Military Commander IV / Diponegoro (2009).

He graduated from the Armed Forces Academy, Magelang in 1978, Army Staff and Command College (1994) and Armed Forces Staff and Command College (2001).

JARMAN
Komisaris
Commissioner
(58 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris mulai tanggal 10 November 2015. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2011 - sampai sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Energi, Kementerian BUMN (2006-2010), kemudian Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2014) setelah sebelumnya menjabat Komisaris PT Indosat Tbk (2008-2011) dan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2003-2008) serta Asisten Deputi Bidang Industri Strategis, Kementerian BUMN (2002-2006).

Lulusan Sarjana Listrik, Universitas Indonesia (1981) untuk selanjutnya menyelesaikan jenjang S-2 sebagai Master of Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute di Amerika Serikat (1991)

Jarman has served as a Commissioner since 10 November 2015. He also serves as Director General for Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2011-present). Previously, he served as Assistant Deputy for Energy, SOE Ministry (2006-2010), then Commissioner of PT PLN (Persero) (2012-2014) after serving as Commissioner of PT Indosat Tbk (2008-2011) and Commissioner of PT Bukit Asam Tbk (2003- 2008), as well as being Assistant Deputy for Strategic Industries, SOE Ministry (2002-2006).

He holds a Bachelor degree in Electricity from the University of Indonesia (1981), completing a Master of Electrical Power Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, USA (1991).

ALOYSIUS KIIK RO
Komisaris
Commissioner
(54 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Komisaris mulai tanggal 25 September 2015. Beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN (2015-sampai sekarang) selain aktif sebagai Tenaga Pengajar pada Magister Management Program, Universitas Pelita Harapan (2005-sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Kementerian BUMN (2002-2005), Tim Asistensi Menteri Keuangan (2006-2009), Direktur Eksekutif PT Danareksa (Juli 2005-Maret 2015), Direktur Keuangan PT Antam (31 Maret 2015 - 27 Juli 2015) dan Komisaris PT Pelindo III, Surabaya (2002 - 2005).

Menyelesaikan jenjang pendidikan S-2 Master of Business Administration-Finance, University of Illinois,USA (1994) dan selanjutnya jenjang S-3 (Doktoral) PhD-Finance, University of Kentucky Lexington, USA (1998).

Aloysius Kiik Ro has served as a Commissioner since 25 September 2015. He also serves as Deputy for Restructuring and Business Development, SOE Ministry (2015-present), as well as being active as a Lecturer in the Masters Management Program, Pelita Harapan University (2005-present). Previously, he served as Assistant Deputy for Restructuring and Privatization, SOE Ministry (2002-2005), he was also a member of the Assistance Team to the Minister of Finance (2006-2009), Executive Director of PT Danareksa (July 2005-March 2015), Finance Director of PT Antam (31 March 2015 – 27 July 2015) and Commissioner of PT Pelindo III, Surabaya (2002-2005).

He holds a Masters of Business Administration-Finance, University of Illinois, USA (1994) and a PhD in Finance, University of Kentucky Lexington, USA (1998).

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

SOFYAN BASIR
Direktur Utama
President Director
(57 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak 23 Desember 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (2005-2014), Direktur Utama Bank Bukopin (2005) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan jabatan di tingkat manajemen lainnya. Sebelum bergabung di Bank Bukopin, Beliau berkarir di Bank Duta pada periode 1981-1986.

Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta pada tahun 1980, gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha Jakarta pada tahun 2010, dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2012.

Sofyan Basir was appointed President Director on 23 December 2014. He previously served as President Director of Bank Rakyat Indonesia (2005-2014), President Director of Bank Bukopin (2005), having previously served as Commercial Director and held other management level positions. Prior to joining bank Bukopin, he served in Bank Duta between 1981 and 1986.

He was awarded a Diploma from STAK Trisakti in 1980, a Bachelor of Economics from STIE Ganesha Jakarta in 2010, and an Honorary Doctorate from Trisakti University Jakarta in 2012.

NICKE WIDYAWATI
Direktur Perencanaan Korporat
Corporate Planning Director
(48 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Mega Eltra (2014), Direktur Usaha PT. Rekayasa Industri (2010-2014), Komisaris Utama PT Tracon Industri (2009-2013), dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) PT Rekayasa Industri (2007-2010).

Beliau meraih gelar sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, selanjutnya meraih gelar Master di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2009.

Nicke Widyawati has served as a Director since 23 December 2014. Previously, she was President Director of PT Mega Eltra (2014), Business Director of PT Rekayasa Industri (2010-2014), President Commissioner of PT Tracon Industry (2009-2013) and Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) in PT Rekayasa Industri (2007-2010).

She holds a Bachelor's degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1991) and a Master's degree in Business Law from Padjadjaran University Bandung (2009).

SUPANGKAT IWAN SANTOSO
Direktur Pengadaan Procurement Director
(58 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur mulai 23 Desember 2014, setelah sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Indonesia Power (2013) dan Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali di Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera PLN. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power. Memulai karir di PT PLN pada tahun 1987 sebagai *Mechanical Engineer*.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1987, selanjutnya menyelesaikan jenjang S-2 dan meraih Master Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.

Supangkat Iwan Santoso has served as a Director since 23 December 2014, having previously served as President Director of PT Indonesia Power (2013) and Division Head of Java Bali Generation in PLN's Java Bali Sumatra Operations Directorate. He also served as Director of Development and Commerce in PT Indonesia Power. He started his career at PT PLN in 1987 as a Mechanical Engineer.

He holds a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia (1987) and a Masters degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1997).

AMIN SUBEKTI
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali
East Java and Bali Regional Business Director
(45 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau aktif menjabat sebagai ABAC *Executive Director (APEC Business Advisory Council)* (2013), dan pernah bertugas sebagai Senior Vice President (SVP) di PT Indika Energy Tbk, sebagai Direktur pada PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi Internasional dan PT Indika Infrastruktur Investindo. Beliau juga pernah berkiprah di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) – Aceh & Nias (2006-2009) dan pernah bertugas sebagai Team Leader untuk Pengembangan Regional pada Kantor World Bank Jakarta pada tahun 2009-2011.

Beliau menyelesaikan pendidikan Akuntansi di STAN untuk selanjutnya menyelesaikan meraih MBA dari Universitas Melbourne, Australia.

Amin Subekti has served as a Director since 23 December 2014. Previously, he served as Executive Director of ABAC (APEC Business Advisory Council) (2013), and Senior Vice President in PT Indika Energy Tbk, as a Director of PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi International and PT Indika Infrastruktur Investindo. He has also been active in the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) - Aceh and Nias (2006-2009) and served as Team Leader for Regional Development at the World Bank Jakarta Office (2009-2011).

He graduated in Accounting at STAN and earned a Master's degree in Business Administration from the University of Melbourne, Australia.

NASRI SEBAYANG

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Central Java Regional Business Director
(60 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Ditugaskan kembali sebagai Direktur PLN sejak 23 Desember 2014 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan mulai Maret 2013 setelah sebelumnya bertugas sebagai Direktur Konstruksi PLN sejak Oktober 2011. Sebelumnya beliau adalah Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN periode Desember 2009 hingga Oktober 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Energi Primer sejak April 2008 hingga Desember 2009, Deputi Direktur *Independent Power Producer* (2006-2008), Kepala Satuan Manajemen Risiko (2006), General Manager PLN Pembangkitan Muara Tawar (2005-2006), Manajer SDM PLN Pembangkitan Muara Tawar (2003-2005), Kepala Staf Operasi PLN Proyek Pembangkitan dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Utara (2000-2003) dan juga pernah memimpin beberapa proyek pengembangan *hydro* dari tahun 1993 hingga 2000.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara pada 1979 dan gelar Master Bisnis Administrasi dari Erasmus University & Center for Global Leadership pada 2007.

Nasri Sebayang was re-appointed as a Director of PLN on 23 December 2014 having previously served as Director of Construction and Renewable Energy from March 2013 and Director of Construction since October 2011. Previously, he was Director of Planning and Technology from December 2009 to October 2011. He also served as Head of Primary Energy from April 2008 to December 2009, Deputy Director of Independent Power Producers (2006-2008), Head of Risk Management (2006), General Manager of PLN Muara Tawar (2005-2006), HR Manager of PLN Muara Tawar (2003-2005), Head of the Operations Division in PLN Generation and Network Projects (Pikitring) North Sumatra (2000-2003) and led several hydroelectric development projects between 1993 and 2000.

He holds a bachelor's degree in Civil Engineering from the University of North Sumatra (1979) and a Masters of Business Administration from Erasmus University and the Center for Global Leadership (2007).

AMIR ROSIDIN

Direktur Bisnis Regional Sumatera
Sumatra Regional Business Director
(57 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Bertugas sebagai Direktur 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada Direktorat Bisnis & Manajemen Risiko PLN Kantor Pusat (2010-2013), General Manager PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (2010) dan General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (2008). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 untuk selanjutnya meraih Master di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta.

Amir Rosidin has served as a Director since 23 December 2014. Previously, he served as President Director of PT Java Bali Generation (PJB). In addition, he has served as Head of Risk Management Division in the Business & Risk Management Directorate at PLN Head Office (2010- 2013), General Manager of PLN South Sumatra, Jambi, Bengkulu (2010) and General Manager of PLN East Nusa Tenggara (2008). He started his career with PLN in 1985.

He holds a bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, (1985) and a Master's Degree in Management from PPM Management Institute, Jakarta.

MURTAQI SYAMSUDDIN
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
West Java Regional Business Director
(60 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Kembali menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014, setelah sebelumnya bertugas sebagai Direktur Perencanaan Dan Pembinaan Afiliasi (2013-2014) dan sebagai Direktur Perencanaan & Manajemen Risiko (2011-2013). Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko (2009-2011). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jawa Madura dan Bali (2008-2009), General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2003-2008), Ahli Pemasaran dan Pengembangan Unit Bisnis (2001-2003), Sekretaris Perusahaan (2000-2001), Kepala Dinas Kepegawaian (1998-2000) dan Deputi Manajer Perencanaan pada PLN Wilayah Sumatera Utara (1996-1998).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Gelar MBA Bidang Keuangan Perusahaan dari Universitas Oregon pada tahun 2003.

Murtaqi Syamsuddin was reappointed as a Director on 23 December 2014 having previously served as Director of Planning and Affiliation Development in (2013-2014) and as Director of Planning & Risk Management (2011-2013). He has also served as Director of Business and Risk Management (2009-2011), Director of Java, Madura and Bali (2008-2009), General Manager of PLN Distribution West Java and Banten (2003-2008), Marketing Expert and Business Unit Development (2001-2003), Corporate Secretary (2000-2001), Head of Employment Division (1998-2000) and Deputy Manager for Planning at PLN North Sumatra region (1996-1998).

He holds a degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia (1981) and an MBA in Corporate Finance from the University of Oregon (2003).

SARWONO SUDARTO
Direktur Keuangan
Finance Director
(63 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional BRI (2006-2014), setelah sebelumnya menduduki berbagai jabatan manajerial Bank Rakyat Indonesia diantaranya Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer BRI Finance Ltd. Hongkong.

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, Semarang (1975), gelar MBA dari Tulane University, Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011).

Sarwono Sudarto has served as a Director since 23 December 2014. He previously served as BRI Operations Director (2006-2014), having previously held various managerial positions at Bank Rakyat Indonesia, including Head of Treasury Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Internal Audit Division, Head of Retail Business Division, Vice Head of Management Accounting and Finance Division, Branch Manager of Palembang Sriwijaya, Guest Officer of Sanwa International Finance Ltd. Hong Kong, Treasury Manager and Chief Dealer of BRI Finance Ltd. Hong Kong.

He holds a Bachelor's degree in Business Administration from Diponegoro University, Semarang (1975), an MBA from Tulane University, USA (1987), and a doctorate from the Department of Educational Management, State University Jakarta (2011).

MUHAMAD ALI

Direktur *Human Capital Management*

Human Capital Management Director

(54 tahun year)

WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan 30 Oktober 2015. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bisnis Ritel BRI (2015), Pemimpin Wilayah Kantor BRI Yogyakarta (2014) dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial Bank Rakyat Indonesia diantaranya Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat, Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI, Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI, Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Surakarta, Kepala Bagian Pemasaran Consumer Banking, Pemimpin Kantor Cabang BRI Selong Kantor Wilayah Denpasar, Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Kandangan Kantor Wilayah Banjarmasin, Manager Loan Officer.

Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum Perdata dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Muhamad Ali has served as a Director since 30 October 2015. He previously served as Bank Rakyat Indonesia Retail Business Coordinator (2015), Branch Manager BRI Yogyakarta (2014) and has held various managerial positions in Bank Rakyat Indonesia, including Head of Corporate Secretariat Division at BRI Head Office, Division Head of the Board of Directors Bureau, Corporate Secretariat Division BRI Head Office, Deputy Head of Corporate Secretariat Division BRI Head Office, Branch Manager BRI Surakarta, Head of Marketing Consumer Banking, Branch Manager BRI Selong, Denpasar Regional Office, Branch Manager BRI Kandangan, Banjarmasin Regional Office and Loan Officer Manager.

He holds a Bachelor's degree in Civil Law from Gajah Mada University, Yogyakarta.

DJOKO RAHARDJO ABUMANAN

Direktur Bisnis Regional Kalimantan

Kalimantan Regional Business Director

(55 tahun year)

WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan 30 Oktober 2015. Beliau sebelumnya menjabat sebagai General Manager Distribusi Jawa Barat & Banten (2015). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Energy Baru dan Terbarukan PLN Kantor Pusat (2014-2015), General Manager PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY (2013-2014) dan General Manager PLN Wilayah Riau & Kepri (2011-2012). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1985).

Djoko Rahardjo Abumanan has served as a Director since 30 October 2015. He previously served as General Manager of Distribution West Java and Banten (2015). In addition, he served as Head of New and Renewable Energy Division at PLN Head Office (2014-2015), General Manager of PLN Distribution Central Java and Yogyakarta (2013-2014) and General Manager of PLN Riau and Riau Islands Region (2011-2012). He started his career with PLN in 1985.

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1985).

MACHNIZON

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara
Sulawesi and Nusa Tenggara Regional Business Director
(47 tahun year)
WNI, Domisili Jakarta

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan 30 Oktober 2015. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah pada Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai General Manager Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (2014-2015). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1993.

Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993), gelar Master of Business Administration dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2006).

Machnizon has served as a Director since 30 October 2015. He previously served as Operations Division Head of Central Java at the Directorate of Regional Business Central Java at PLN Head Office (2015). In addition, he served as General Manager of East Kalimantan and North Borneo (2014-2015). He started his career with PLN in 1993.

He holds a degree in electrical engineering from Bandung Institute of Technology (1993) and a Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2006).

HARYANTO W.S.

Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua
Maluku and Papua Regional Business Director
(56 tahun year)
WNI, Domisili Bogor

Menjabat sebagai Direktur sejak 30 Oktober 2015. Beliau sebelumnya menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015), General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (2011-2014), Kepala Divisi Distribusi Jawa-Bali pada Direktorat Operasi Jawa Bali PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat (2010), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2008-2009), Manajer Bidang Perencanaan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2003-2008). Serta Jabatan Manajer di lingkup PT PLN (Persero) lainnya. Mulai Berkarir di PLN sejak Desember 1983.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB Bandung (1983), selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan S-2 Bidang Manajemen Lainnya dari STIE IPWIJA (2003).

Haryanto W.S. has served as a Director since 30 October 2015. He previously served as General Manager of PLN Jakarta and Tangerang distribution (2014-2015), General Manager of PLN East Java distribution (2011-2014), Division Head of Java-Bali Distribution at the Java-Bali Operations Directorate at PLN Head Office (2010-2011), General Manager of PLN South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (2010), General Manager PLN West Kalimantan (2008-2009), Planning Manager at PLN Distribution Jakarta and Tangerang (2003-2008), as well as Manager of other PLN areas. His careers with PLN started in December 1983.

He holds a Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1983) and completed a Masters in Management at STIE IPWIJA (2003).

SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

CORPORATE SECRETARY AND BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

ADI SUPRIONO
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
WNI, Domisili Jakarta

Adi Supriono menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Februari 2012. Sebelumnya adalah Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB (tahun 2010), Direktur SDM & Administrasi PT PJB (tahun 2009), beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Anggaran, Pendanaan dan Perencanaan Korporat PT PJB (tahun 2001), Direktur Keuangan PT Bajradaya Sentra Nusa (tahun 2003), Sekretaris Perusahaan PT PJB (tahun 2008).

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB (1984), Master di bidang Manajemen Bisnis di Universitas Hasanuddin – Makasar tahun 2000 dan Master di bidang Administrasi Bisnis di University of Missouri – St Louis, USA tahun 2006.

Adi Supriono has served as Corporate Secretary since February 2012. Previously, he was Director of Development and Commerce at PT PJB (2010), Director of Human Resources & Administration at PT PJB (2009) and has also served as Manager of Budgeting, Financing and Corporate Planning at PT PJB (2001), Finance Director of PT Bajradaya Sentra Nusa (2003) and Corporate Secretary of PT PJB (2008).

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1984), Master's degree in Business Management from Hasanuddin University - Makasar (2000) and Master's degree in Business Administration from University of Missouri - St. Louis, USA (2006).

DJOKO HASTOWO
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 1 Oktober 2015. Beliau juga saat ini tercatat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko. Sebelum menjadi Sekretaris Dewan Komisaris, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power (2009 –2014), Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta pada PLN kantor Pusat (2009), General Manager PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008 - 2009), Deputi Direktur Pembinaan Transmisi pada PT PLN (Persero) kantor Pusat (2004 - 2008), Manajer Bidang Teknik pada PLN P3B (2001-2004) dan Kepala Dinas Operasi dan Pemeliharaan pada Divisi Penyaluran PLN P3B (1996-2001).

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB Bandung (1979).

Djoko Hastowo has served as Secretary to the Board of Commissioners since 1 October 2015. He is also currently listed as a member of the Risk Management Committee. Before becoming Secretary to the Board of Commissioners, he served as President Director of PT Indonesia Power (2009 - 2014), Deputy Director of Human Resources and Talent Development at PLN Head Office (2009), General Manager of PLN Construction Management Services (2008-2009), Deputy Director of Transmission at PLN Head Office (2004-2008), Manager of Engineering at PLN P3B (2001-2004) and Head of Operations and Maintenance at PLN P3B Distribution Division (1996-2001).

He holds a Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1979).

ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

DJOKO HASTOWO
Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak 4 November 2015), selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 1 Oktober 2015.

Uraian Riwayat Pekerjaan selanjutnya, sama dengan uraian Sekretaris Dewan Komisaris tersebut di atas.

Djoko Hastowo has served as a member of the Risk Management Committee since 4 November 2015, as well as serving as Secretary to the Board of Commissioners since 1 October 2015.

His Work Profile is as noted under the Secretary to the Board of Commissioners.

MARLIUS ALROBIN
Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak 1 Juni 2015. Merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero). Sebelumnya menjabat sebagai Departemen *Head Corporate Risk* Bank Mandiri (Vice President) (2008-2015), Special Project Officer Credit Recovery pada Bank Mandiri (Vice President) (2008), Regional Recovery Manager Bank Mandiri (Vice President) (2007-2008) dan Senior Credit Recovery Manager pada Bank Mandiri (Assistant Vice Mandiri) (2002-2007).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1986) selanjutnya menempuh jenjang pendidikan S-2 Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (1999).

Marlius Alrobin has served as a Member of the Risk Management Committee since 1 June 2015. Not being employed by PT PLN (Persero), he is an independent (non Commissioner) member of the Committee. He previously served as Head of the Corporate Risk Department of Bank Mandiri (Vice President) (2008-2015), Special Project Officer Credit Recovery at Bank Mandiri (Vice President) (2008), Regional Recovery Manager Bank Mandiri (Vice President) (2007-2008) and Senior Credit Recovery Manager at Bank Mandiri (Assistant Vice Mandiri) (2002-2007).

He holds a Bachelor of Economics from Trisakti University (1986) and a Masters degree in Management from the University of North Sumatra (1999).

BAMBANG PURWO

Anggota Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak 31 Agustus 2015. Merupakan anggota Komite (non Komisaris). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Instruktur pada PT PLN (Persero) Udiklat Cibogo (2012-2015), Konsultan pada PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2013-2015), VP hukum pada PT Indonesia Power (2002-2012), Ahli Kinerja merangkap DM Kepegawaian PT PLN (Persero) Disjaya & Tangerang (2000-2002), Kepala Staf Adm. & Keuangan PT PLN (Persero) Pikitring Jateng di Semarang (1996-2000), Kepala Staf Adm. & Keu. PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan di Balikpapan (1992-1996), Kepala Bagian Sekretariat PT PLN Proyek Induk Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi (1988-1992) dan Kepala Seksi Pengurusan Tanah PLN Proyek Induk Transtekstib Koreksi (1984-1988).

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Djember (1980) selanjutnya menempuh jenjang pendidikan Notariat (SP 1) dari Universitas Negeri Diponegoro, Semarang (2000) kemudian jenjang pendidikan S-2 Bidang Hukum dari Universitas Indonesia (2005).

Bambang Purwo has served as a Member of the Risk Management Committee since 31 August 2015. He is a (non Commissioner) member of the Committee. He previously served as an instructor at PLN Training and Education Center Cibogo (2012-2015), as a Consultant at PLN Construction Management Services (2013-2015), VP law in PT Indonesia Power (2002-2012), concurrently Performance Expert and DM Personnel at PLN Jakarta and Tangerang (2000-2002), Head of Staff Administration and Finance at PLN Central Java Pikitring in Semarang (1996-2000), Head of Staff Administration and Finance at PLN Pikitring Kalimantan in Balikpapan (1992-1996), Head of the Secretariat Division at PLN Extra High Voltage Network Parent Project (1988-1992) and Section Head for Land Management at Transtekstib Correction Project (1984-1988).

He holds a law degree from the State University Djember (1980), Notary (SP 1) qualification from Diponegoro State University, Semarang (2000) and a Master of Law from the University of Indonesia (2005).

ANGGOTA KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE MEMBERS

SUGENG ROCHADI
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Menjadi anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2013. Sebelumnya bertugas sebagai Staf Senior Bidang Teknik pada Sekretariat Dekom (2012-2013), Anggota Komite Audit (2010-2011), Kepala Bidang Audit Operasional Pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2006-2009), Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jaya & Tangerang (2001-2006) dan Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (1999-2001).

Menyandang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1973) dan Magister Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung (1997).

Sugeng Rochadi has served as a member of the PT PLN (Persero) Audit Committee since 1 August 2013. Previously, he served as Senior Staff of the Engineering Division at the Board of Commissioner's Secretariat (2012-2013), Audit Committee Member (2010-2011), Head of Operational Audit at the Internal Supervisory Unit at PLN Head Office (2006-2009), Head of Internal Audit at PLN Jakarta and Tangerang Distribution (2001-2006) and Head of Internal Audit at PLN West Java Distribution (1999-2001).

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1973) and a Master's Degree in Business and Technology Administration from Bandung Institute of Technology (1997).

AIDIL YUZAR
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2013. Merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero). Selain itu juga memimpin salah satu Kantor Akuntan Publik (2012 - sekarang). Sebelumnya pernah berkarya sebagai Auditor pada Ernst & Young dan Arthur Andersen-SGV Utomo (1993-2011).

Menyandang gelar Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara dan memiliki Piagam Akuntan Register Negara. Akuntan Publik bersertifikat (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia, *Chartered Accountant* (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia, serta Auditor bersertifikat di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aidil Yuzar has served as a Member of the PLN Audit Committee since 1 August 2013. He is an independent (non Commissioner) member of the committee because he is not employed by PT PLN (Persero). He also heads a Public Accountant Firm (2012 - present). Previously, he had served as an Auditor at Ernst & Young and Arthur Andersen-SGV Utomo (1993-2011).

He holds a Bachelor's degree in Economics – Accounting from the University of North Sumatra and has a Charter as a State Registered Accountant. A certified Public Accountant (CPA) in the Indonesian Public Accountants Institute, Chartered Accountant (CA) in the Indonesian Accountants Association and Certified Sharia Accountant (CSA) in the Indonesian Accountants Association, as well as a certified Auditor from Bank Indonesia and the Financial Services Authority (FSA).

YOSEPH SUARDI SABDA
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 31 Agustus 2015. Merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero). Selain itu juga menjabat sebagai *Legal Advisor* PT Hutama Karya (Persero) (2015-sekarang) dan Staf Ahli Bidang Legalitas Komite Kebijakan Industri Pertahanan RI (2011-sekarang). Pernah menjabat sebagai Anggota Tim Ahli Kejaksaan Agung RI (2010-2014), Konsultan Hukum PT Jasa Marga (Persero) (2009-2014), sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung RI (2008-2009) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perdata pada Kejaksaan Agung RI (2002-2008).

Menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (1978) untuk selanjutnya menyelesaikan Jenjang pendidikan S-2 dengan gelar Master of Laws (LLM) dari Victoria University, Wellington, New Zealand (1991).

Yoseph Suardi Sabda has served as a Member of the PLN Audit Committee since 31 August 2015. He is an independent (non Commissioner) member of the Committee because not employed by PLN. He also serves as Legal Advisor at PT Hutama Karya (Persero) (2015-present) and as Expert Staff on Legalities to the Defense Industry Policy Committee (2011-present). He previously had served as a Member of the Expert Team to the Attorney General (2010-2014), Legal Consultant to PT Jasa Marga (Persero) (2009-2014), as Functional Attorney to the Attorney General (2008-2009) after serving as Civil at the Attorney General's Office (2002-2008).

He holds a Bachelor degree in Law from Bandung School of Law (1978) and a Master's in Law (LLM) from Victoria University, Wellington, New Zealand (1991).

ANGGOTA NOMINASI & REMUNERASI

NOMINATION & REMUNERATION MEMBERS

SUHARTO

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 28 Juli 2015. Merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang berasal dari pegawai PT PLN (Persero). Selain itu juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Talenta - Direktorat *Human Capital Management* PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-sekarang), setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan - PT PLN (Persero) PUSDIKLAT (2011-2014).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Sumatera Utara (1986), selanjutnya menyelesaikan pendidikan S-2 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (2001).

Suharto has served as a Member of the PLN Nomination and Remuneration Committee since 28 July 2015. He is a (non Commissioner) member of the Committee employed by PT PLN (Persero). He also serves as Head of Talent Development Division - Human Capital Management Directorate at PLN Head Office (2014-present), having previously served as Head of Education and Training at PLN Education and Training Center (2011-2014).

He has a bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of North Sumatra (1986) and a Masters in Electrical Engineering from 10 November Institute of Technology (ITS) Surabaya (2001).

MURNIATI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober 2015. Merupakan anggota Komite (non Komisaris). Pernah menjabat sebagai Staf Senior Bidang Umum pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2015), Manajer Senior Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2009-2011) dan Ahli Analisa Investasi pada Direktorat Perencanaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2000-2009).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Nasional (1983).

Murniati has served as a Member of the PLN Nomination and Remuneration Committee since 1 October 2015. She is a (non Commissioner) member of the Committee. She had served as Senior Staff in Public Affairs at the PLN Board of Commissioners Secretariat (2012-2015), Senior Manager of Investor Relations and Corporate Governance in the Corporate Secretariat at PLN Head Office (2009-2011) and the Expert Investment Analysis for the Planning Directorate at PLN Head Office (2000-2009).

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from National Technical University (1983).

KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

HEAD OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT

ALI MUDIN
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Supervisory Unit

Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak September tahun 2015. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Asuransi Jiwa – Beringin Jiwa Sejahtera (2011-sekarang), setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris (2006-2011). Sebelumnya menjalani karir di PT Bank BRI (Persero) Tbk dengan berbagai jabatan dan tugas, meliputi : Kepala Audit Intern BRI, Kantor Pusat (2008-2015), Kepala Divisi Logistik, Kantor Pusat BRI (2005-2008), Pemimpin Wilayah – Kantor Wilayah Banda Aceh (2014-2015), Kepala Divisi Hukum, Kantor Pusat BRI (2003), Kepala Desk Hukum, Kantor Pusat BRI (2001-2003), Pemimpin Cabang Kebayoran BRI - Kantor Wilayah Jakarta (1998-2001) dan berbagai jabatan managerial lain di lingkup PT BRI (Persero) Tbk.

Menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (1981) dan melanjutkan jenjang pendidikan S-2 Magister Manajemen Ekonomi / Manajemen Pemasaran (2006) dari Universitas Padjadjaran, Bandung

Ali Mudin has served as Head of Internal Audit since September 2015. Currently, he also serves as President Commissioner of PT Asuransi Jiwa - Beringin Jiwa Sejahtera (2011-present), after serving as Commissioner (2006-2011). Previously he pursued a career in PT Bank BRI (Persero) Tbk with a variety of positions and duties, including: Head of Internal Audit, BRI Head Office (2008-2015), Head of Logistics Division, BRI Head Office (2005-2008), Regional Head - Banda Aceh Regional Office (2014-2015), Head of Legal Division, BRI Head Office (2003), Head of the Legal Desk, BRI Head Office (2001-2003), Branch Manager BRI Kebayoran - Jakarta Regional Office (1998-2001) and various managerial positions in PT BRI (Persero) Tbk.

He holds a Bachelor of Law from Padjadjaran University in Bandung (1981) and a Master's Degree in Economics Management / Marketing Management (2006) from Padjadjaran University, Bandung.

DAFTAR UNIT BISNIS DAN ALAMAT

ADDRESS AND BUSINESS UNITS

I	PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT	Jl. Trunojoyo Blok M I – 135 JAKARTA 12160 Telepon (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550 Fax. (021) 7221330; 7397150 E-mail : webmaster@pln.co.id Home page : www.pln.co.id
II.	PT PLN (Persero) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ISO/IEC 17025 – 2005	Jl. Duren Tiga No. 102, JAKARTA 12760 Telp. (021) 7973774, 7980190, 7989982 (Hunting) 7991155 (GM) Fax. (021) 7991762, 7975414 E-mail : customercare@pln-litbang.co.id Home Page : www.pln-litbang.co.id Jwots : 13107,13109,13110,13111,13115,13121
III.	PT PLN (Persero) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu JAKARTA SELATAN 12550 Telp. (021) 7811292, 7811293, 7800832, 7811368 (KPUSDIKLAT) Fax. (021) 7811294, 7811295 (Sekretaris KPUSDIKLAT) 7829263 (SDM) Website : http://pln-pusdiklat.co.id Vicon Ruang Meeting : 192.168.13.178
IV.	PT PLN (Persero) PUSAT ENJINIRING KETENAGALISTRIKAN ISO 9001 : 2008	Jl. Aipda K.S. Tubun I/2 Petamburan JAKARTA BARAT 11420 Kotak Pos : 4464 JKT Telp. (021) 5640141, 5638644 , 5638642 Fax. (021) 5638658, 5638661 E-mail : pusenlis@pln.co.id
V.	PT PLN (Persero) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN	Jl. Banten No. 10 BANDUNG 40272 Telp. (022) 7236791-3 Fax. (022) 7236794 Email : pusharlis@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/pusharlis
VI.	PT PLN (Persero) PUSAT MANAJEMEN KONSTRUKSI ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, SEMARANG 50232 Telp. (024) 8310060 Fax. (024) 8317241 E-mail : plnjmk@pln.co.id
VII.	PT PLN (Persero) PUSAT SERTIFIKASI ISO 17021 : 2011	Jl. Laboratorium, Duren Tiga JAKARTA SELATAN 12760 Telp. (021) 7900034 (hunting) Fax. (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots : 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail : niaga@pln-jaser.co.id, skt@pln-jaser.co.id, psm@pln-jaser.co.id Homepage : wwwpln.co.id/jaser Vicon : 192.168.1.154

VIII.	PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN	
	1. PT PLN (Persero) WILAYAH ACEH	JL. Tgk. H. Mohd Daud Bereu-eh No. 172 Lampriet BANDA ACEH 23243 Telp. (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax. (0651) 21516 E-mail : plnwilaceh@pln.co.id Website : www.plnaceh.co.id
	2. PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284 MEDAN 20115 Kotak Pos 2000 Telp. (061) 6615155 Fax. (061) 6613789 E-mail : plnsumut@plnwill.co.id
	3. PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT	Jl. Dr. Wahidin No. 8, PADANG 25121 Telp. (0751) 33446 Fax. (0751) 29540, 31564 E-mail : PLN W3@indosat.net..id
	4. PT PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPRI	Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, RIAU 28295 Telp. (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax. (0761) 855310 E-mail : wrkr@pln.co.id
	5. PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA SELATAN JAMBI DAN BENGKULU	Jl. Kapten A. Rivai No. 37, PALEMBANG 30129 Telp. (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax. (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail : gmws2jb@plnpalembang.co.id Website : http/www.plnpalembang.co.id
	6. PT PLN (Persero) WILAYAH BANGKA BELITUNG	Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang 33171 Kep. BANGKA BELITUNG Telp. (0717) 439300 (Hunting) Fax. (0717) 439600 E-mail : wbabel@pln.co.id
	7. PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN BARAT	Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Kubu Raya PONTIANAK 78391 Telp. (0561) 722037 (Hunting), 721960 (GM) Fax. (0561) 721395 E-mail : kalbar@pln.co.id Web : www.plnkalbar.co.id
	8. PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH	Jl. Panglima Batur Barat No. 1 Banjar Baru 70711, KALIMANTAN SELATAN Telp. (0511) 4772520, 4774342, 4772261 Fax. (0511) 4772442 E-mail: humas.kalseteng@pln.co.id
	9. PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA	Jl. M.T. Haryono No. 384, BALIKPAPAN 76114 Telp. (0542) 871840 (Hunting) Fax. (0542) 876130 E-mail : humas.kaltim@pln.co.id
	10. PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO	Jl. Bethesda No. 32, MANADO 95116 Telp : (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax : (0431) 863660, 862360 E-mail : gmsutg@pln.co.id

	11. PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT	Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206 Panakukang, MAKASSAR 90222 Telp. (0411) 457155, 457157 Fax. (0411) 444800
	12. PT PLN (Persero) WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA	Jl. Diponegoro No. 2, AMBON 97127 Telp. (0911) 311810, 347766, 354696 Fax : (0911) 310910 E-mail : plnwilmaluku@plnmmu.co.id
	13. PT PLN (Persero) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT	Jl. Ahmad Yani No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045 Telp. (0967) 533891, 533981, 536637 Fax. (0967) 534694 E-mail : wilpapua@pln.co.id Http:// www.pln.co.id
	14. PT PLN (Persero) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Langko No. 25-27 Ampenan MATARAM 83114 Telp. (0370) 643123, 642868 (GM) Fax. (0370) 634401 E-mail : sekretariat@plnntb.co.id Website : http://www.plnntb.co.id
	15. PT PLN (Persero) WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	Jl. Piet A. Tallo No. 101, KUPANG 85228 Telp. (0380) 8554005 (Hunting) Fax. (0380) 8554010 E-mail : ntt@pln.co.id Website : htpp//www.pln.co.id/ntt
IX	KANTOR DISTRIBUSI	
	1. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR	Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21 SURABAYA 60271 Telp. (031) 5340651 - 5340655 Fax. (031) 5310057 Jwots : 71016 – 18 Hunting E-mail : moch.sulatyo@pln.co.id Website : www.pln-jatim.co.id
	2. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA	Jl. Teuku Umar No. 47, SEMARANG Telp. (024) 8411991 (hunting) Fax. (024) 8412268 E-mail : plnjatengdiy@pln.co.id Website : www.plnjateng.co.id E-mail : plnubd@plnjateng.co.id
	3. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT	Jl. Asia Afrika No. 63, BANDUNG 40111 Telp. (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax. (022) 4230822 Jwots : 30995 E-mail : kontakkamijabarbanten@pln.co.id
	4. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI BANTEN	Jl. Jendral Sudirman (Akses By Pass) No. 1 TANGERANG 15118 Telp. (021) 5526716, 5526717 Fax. (021) 5526721 Email : disbanten@pln.co.id
	5. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG ISO 9001 : 2008	Jl. M.I.Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110 Telp. (021) 3454000, 3455000 Fax. (021) 3456694 Email : humasjaya@pln.co.id
	6. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI BALI ISO 9001 : 2000	Jl. Letda Tantular No. 1 Renon DENPASAR 80234 Telp. (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax. (0361) 227101

	7. PT PLN (Persero) DISTRIBUSI LAMPUNG ISO 9001 : 2008	Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144 Telp. (0721) 774868 Fax. (0721) 780247 Email : kanwil.lampung@pln.co.id
X	PEMBANGKITAN	
	1. PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA	Jl. Brigjend Katamso, KM. 5,5 No. 30 Titikuning MEDAN 20146 Telp : (061) 7869025 Fax : (061) 7867967 Website : http://www:pln.co.id/Kitsbu Email : plnksu@pln.co.id
	2. PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	Jl. Demang Lebar Daun No. 375 PALEMBANG 30128 Telp. (0711) 374955 (Hunting) Fax. (0711) 374958, 374959 E-mail : info.kitsbs@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/kitsbs/
	3. PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B	Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara JAWA TENGAH 59453 Telp. (0291) 772121, 772123, 772124 Fax. (0291) 772125 E-mail : tanjungjatib@pln.co.id
XI	UNIT INDUK PEMBANGUNAN	
	1. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I	Jl. Kartini No. 23 MEDAN 20152 Telp. (061) 4568532, 4568539, 4568504 Fax. (061) 4568532 Email : www.plnsumatera-1.co.id
	2. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II	Jl. Dr. Cipto No. 12, MEDAN 20152 Telp. (061) 4144151, 4144152, 4518580 (GM) Fax. (061) 4144153 E-mail :sekrt.gm@pikitringsuar.co.id
	3. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN III	Jl. Residen Abdul Rozak No. 2180 Sekojo, PALEMBANG 30118 Telp. (0711) 719103 s.d 719109 Fax. (0711) 719102 Email : info@uipring-sumatera2.co.id
	4. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IV	Jl. Aipda K. S. Tubun I/2 Lantai 3 Petamburan, JAKARTA BARAT 11420 Telp. (021) 56950412, 56950413 Fax. (021) 56950409 Email: sekr.uipv@pln.co.id
	5. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN V	Jl. Ehave-Gandul Kec. Cinere DEPOK 16512 Telp. (021) 7535500 Fax. (021) 7535599
	6. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI	Jl. Karawitan No. 32, BANDUNG 40264 Telp. (022) 7320595 Fax. (022) 7320596 Website : www.pln.co.id/hidrojb Email : hydro_jawa@yahoo.co.id

7. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 SURABAYA 60231 Telp. (031) 8281200 Fax. (031) 8280214 Email : sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
8. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VIII	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, SURABAYA 60231 Telp. (031) 8291377, 8291538 Fax. (031) 8288959
9. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX	Jl. Haji Mistar Cokrokusumo Km. 39 Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN Telp. (0511) 4777571 Fax. (0511) 4777571
10. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN X	Jl. MT. Haryono No. 384, Kotak Pos 210 Ring Road, Balikpapan 76114, KALIMANTAN TIMUR Telp. (0542) 871559 (Hunting), 872192 (GM) Fax. (0542) 871558, 871565 (Sek GM) E-mail : pikitringkal@pln-pikal.co.id
11. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XI	Jl. Pendidikan No. 56, MATARAM 83125 Telp. (0370) 621732, 621733 Fax. (0370) 621734 Email : pln@uip-nusra.co.id
12. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XII	Jl. Letjend. Hertasning, RT. RW. Pandang Panakkukang Makassar, SULAWESI SELATAN 90222 Telp. (0411) 886245 Fax. (0411) 886515 Email : sekretariatsulmapa@yahoo.co.id
13. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII	Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang Makassar SULAWESI SELATAN 90222 Telp. (0411) 452519, 452520, 452521 (Hunting) (0411) 457216 (GM) Fax. (0411) 444339 E-mail : komunikasi.sulmapa@pln.co.id
14. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIV	Jl. Baru Kotaraja, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura JAYAPURA 99225 Telp. (0967) 581740 Fax. (0967) 582323 Email : uipxiv@gmail
15. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XV	Jl. Kapt. Piere Tendean, Halong, AMBON 97127 Telp. (0911) 315017, 342478 (Mnj) Fax : (0911) 344179
16. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XVI	Jl. P. Mangkubumi No. 16, YOGYAKARTA 55232 Telp. (0274) 582912, 582922 Fax. (0274) 582971

XII	ANAK PERUSAHAAN	
	1. PT INDONESIA POWER	Jl. Gatot Subroto Kav. 18 JAKARTA SELATAN 12950 Telp. (021) 5267666 (Hunting), Fax. (021) 5252623 Jwot s : 161400, 161300 E-Mail : www.indonesiapower.co.id
	2. PT PEMBANGKITAN JAWA BALI (PT PJB)	Jl. Ketintang Baru No. 11, SURABAYA 60231 Telp (031) 8283180 (Hunting) Fax. (031) 8283183 Website : www.ptpjb.com
	3. PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM ISO 14001 ; PLTD Batu Ampar, PLTD Tanjung Sengkuang, PLTD Sekupang, PLTD Baloi	Jl. Engku Putri No. 3, Batam Centre BATAM 29432 Telp. (0778) 463150 s.d 463153 Fax. (0778) 463143 Website : http://www.plnbatam.com
	4. PT INDONESIA COMNETS PLUS	Gedung Wisma Mulia Lt. 50-51 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 JAKARTA 12710 Telp. (021) 5253019 (Hunting) Jwots : 12900 Fax. (021) 5253659 Jwots : 12264 E-mail : humas@iconpln.co.id Website : www.iconpln.co.id
	5. PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING	Jl. K.S. Tubun I No. 2 Lt.2 JAKARTA 11420 Telp. (021) 5608918, 5608432, 5609044 Fax. (021) 5640132 E-mail : contact@pln-enjiniring.com Website : http://www.pln-enjiniring.com
	6. PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN	Jl. P. Diponegoro No. 1, Tarakan , KALIMANTAN UTARA 77114 Telp. (0551) 35192, 21828, 22017 Fax. (0551) 34158, 21928 Email : spdtrk@telkom.net
	7. PT PLN BATUBARA	PT PLN (Persero) Kantor Pusat Gedung I Lantai 8 Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Telp . (021) 7206813, 7206814, 7206837 Fax : (021) 7206838 Website : kontak@plnbatubara.co.id
	8. PT PLN GEOTHERMAL	PT PLN (Persero) Kantor Pusat Gedung 1 Lantai 7 Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN 12160 Telp. (021) 7251234, 7261122 ext. 4171 Fax : (021) 7227063
	9. PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA	Jl. Kalibesar Timur No. 10 – 12, JAKARTA BARAT 11110 Telp. (021) 6912547, 6912548, 6912549 Fax : (021) 6901450, 6902726 Email : pelba@bahteradhiguna.co.id Website : http://www.bahteradhiguna.co.id
	10. PT HALEYORA POWER	Pejaten Office Park Blok B Jl. Warung Buncit Raya No. 79, Pejaten Barat JAKARTA SELATAN 12550 Telp. (021) 79192517 Fax : (021) 79192516 Email : sekper@haleyora.co.id
	11. PT GEO DIPA ENERGI	Gedung Recapital Lt 8 Jl. Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7245673 (hunting) Fax. (021) 7247539 E-mail : pusat@geodipa.co.id

XIII	IKATAN KELUARGA PENSIUNAN LISTRIK NEGARA (IKPLN) PUSAT	Gedung I Lt. 4 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7261122, 7251234, Pest : 1919, 1691 Fax. (021) 7227073
XIV	DANA PENSIUN PLN	Jl. Wolter Monginsidi No. 5 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7222867 (Hunting 4 nomor) Fax. (021) 7255358, 7206019, 7231390 E-Mail : webmaster@dppln.co.id, Pelayanan@dppln.co.id
XV	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO)	Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Gedung I Lantai 4, Kebayoran Baru-JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7261875, 7261122, 7262234, Pest : 5563 Fax. (021) 7221330
XVI	SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN (STT – PLN)	Kampus Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi Kotak Pos 6569/ JKBCK, CENGKARENG BARAT JAKARTA 11750 Telp. (021) 5440342, 5440344 Fax. (021) 5440343
XVII	DPP SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO	Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Gedung 1 Lantai 3 Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7251846 Ext. 1700 Fax.(021) 7251650 E-mail : dppsp@pln.co.id JL. Trunojoyo Blok M I/135 Gedung 1 Lantai 9 Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN Telp.(021) 7250550 Ext. 1699
XVIII	KANTOR HUKUM	
	1. KANTOR HUKUM AMANAH	Gedung Victoria Lantai 3 Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7397295 Fax. (021) 7227068. E-mail : kha@cbn.net.id Website : http//www.kantorhukumamanah.web.id
	2. KANTOR HUKUM REKSA PARAMITRA	Gedung Graha Iskandarsyah Lantai 1 Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7234610 Fax . (021) 7234683

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

hal. 537 - 722

31 Desember 2015 dan 2014

December 31, 2015 and 2014

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK*/AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2015 AND 2014/
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550
Kotak Pos : 4322/KBB Faximile : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPST

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014 /31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014	DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015 AND 2014 AND JANUARY 1, 2014 /DECEMBER 31, 2013 AND FOR YEARS ENDED DECEMBER 31,2015 AND 2014

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/*Name* : SOFYAN BASIR
   Alamat kantor/*Office address* : PT PLN (PERSERO)
   Jl. Trunojoyo Blok M I/135
   Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card* : Jl. Taman Bendungan Jatiluhur No. 3
   Bendungan Hilir
   Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone number* : (021) 7220300
   Jabatan/*Position* : DIREKTUR UTAMA / *PRESIDENT DIRECTOR*

2. Nama/*Name* : SARWONO SUDARTO
   Alamat kantor/*Office address* : PT PLN (PERSERO)
   Jl. Trunojoyo Blok M I/135
   Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card* : Komplek BRI Blok A No. 45
   Jl. Pramukasari IV RT 009 RW 005
   Rawasari, Cempaka Putih
   Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone number* : (021) 7392038
   Jabatan/*Position* : DIREKTUR KEUANGAN / *FINANCE DIRECTOR*

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;
2. The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;
   b. The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries Internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 28 Juni 2016/ June, 28 , 2016

METERAI TEMPEL
151ACADF942410942
6000
DIREKSI
DJAM RUSUPIAH
Persero

SOFYAN BASIR	SARWONO SUDARTO
Direktur Utama / *President Director*	Direktur Keuangan / *Finance Director*

MODEL 1001

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2015, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F:+ 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.
A160628005/DC2/HSH/2016

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 3l, 56 dan 57 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" ("ISAK 8") sehingga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30, "Sewa" ("PSAK 30") tidak perlu diterapkan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori sewa keuangan atau sewa operasi. Oleh karena itu, penyajian kembali dilakukan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 56.

Basis for Qualified Opinion

As discussed in Notes 3l, 56 and 57 to the consolidated financial statements, management is of the opinion that power purchase agreements are not arrangements that contain leases based on Interpretation of Financial Accounting Standards 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" ("ISFAS 8"), and hence it is not required to apply Statement of Financial Accounting Standards 30, "Leases" ("SFAS 30") to determine whether such arrangements fall into the categories of finance leases or operating leases. As a result, a restatement was made to the consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2014. The impact of the restatement on the consolidated financial statements is presented in Note 56.

Seandainya Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli listrik dan kemudian menghasilkan klasifikasi sebagai sewa keuangan menurut PSAK 30, dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dijelaskan dibawah ini.

Had the Company and its subsidiaries applied ISFAS 8 for power purchase agreements, which would then result in classification as finance leases under SFAS 30, the financial effects on the accompanying consolidated financial statements are described below.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset tidak lancar akan naik sebesar Rp 87,0 triliun, jumlah liabilitas jangka panjang akan naik sebesar Rp 127,3 triliun, jumlah liabilitas jangka pendek akan naik sebesar Rp 3,1 triliun dan jumlah ekuitas akan turun sebesar Rp 43,4 triliun.

As at December 31, 2015, total non-current assets would be increased by Rp 87.0 trillion, total non-current liabilities would be increased by Rp 127.3 trillion, total current liabilities would be increased by Rp 3.1 trillion and total equity would be decreased by Rp 43.4 trillion.

Oleh karena itu, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah biaya operasi akan turun sebesar Rp 20,7 triliun dan rugi sebelum pajak akan naik sebesar Rp 12,8 triliun.

Accordingly, for the year ended December 31, 2015, total operating expenses would be decreased by Rp 20.7 trillion and loss before tax would be increased by Rp 12.8 trillion.

Detil dari dampak keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dijelaskan dalam Catatan 57 atas laporan keuangan konsolidasian.

The details of the financial effects as at and for the year ended December 31, 2015 are disclosed in Note 57 to the consolidated financial statements.

Opini Wajar dengan Pengecualian

Qualified Opinion

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as at December 31, 2015, and their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
28 Juni/June 28, 2016

Drs. Haryanto Sahari, CPA
Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0223

A160628005/DC2/HSH/2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2015 AND 2014 AND JANUARY 1, 2014
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014*)	1 Januari/ *January 1,* 2014*)	
ASET					***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	1.115.651.990	440.401.374	427.432.785	*Property, plant and equipment*
Properti investasi	7	1.000.974	233.057	159.330	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi	8	1.645.413	1.304.711	1.003.750	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	8	1.529.285	1.267.882	1.025.316	*Investments in joint ventures*
Aset pajak tangguhan	47	14.300.502	66.748	35.773	*Deferred tax assets*
Piutang pihak berelasi	9	268.647	98.829	176.032	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	8.796.977	5.994.028	5.659.753	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	16	312.084	321.385	304.302	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	11	4.504.847	4.409.438	3.018.271	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1.148.010.719**	**454.097.452**	**438.815.312**	***Total Non-current Assets***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	12	23.596.339	27.111.528	25.529.969	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	13	120.059	100.696	97.667	*Short-term investments*
Piutang usaha					*Trade accounts receivable*
Pihak berelasi	14	569.088	582.259	408.674	*Related parties*
Pihak ketiga	14	19.265.139	18.912.608	15.288.266	*Third parties*
Piutang subsidi listrik	15	17.501.009	19.280.861	21.793.929	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang lain-lain	16	481.681	866.948	4.625.113	*Other receivables*
Persediaan - bersih	17	11.415.863	11.607.860	11.343.464	*Inventories - net*
Pajak dibayar dimuka	18	5.265.445	4.889.463	4.397.112	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	19	1.058.501	1.788.724	1.312.925	*Prepaid expenses and advances*
Piutang pihak berelasi	9	71.669	282.791	40.061	*Receivables from related parties*
Jumlah Aset Lancar		**79.344.793**	**85.423.738**	**84.837.180**	***Total Current Assets***
JUMLAH ASET		**1.227.355.512**	**539.521.190**	**523.652.492**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2015 AND 2014 AND JANUARY 1, 2014
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014*)	1 Januari/ *January 1,* 2014*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					*Equity attributable to owners of the Company*
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham					*Capital stock - par value of Rp 1 million per share*
Modal dasar - 63.000.000 saham					*Authorized - 63,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.197.380 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014	20	46.197.380	46.197.380	46.197.380	*Subscribed and paid-up - 46,197,380 shares as of December 31, 2015, 2014 and January 1, 2014*
Tambahan modal disetor	21	49.707.027	52.496.893	49.901.404	*Additional paid-in capital*
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	21	9.468.627	-	-	*Stock subscription from Government in issuance process*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	20	26.872.493	19.108.528	19.108.528	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya	20	84.650.585	80.807.692	66.761.811	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		631.241.725	(11.491.096)	(7.837.169)	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		848.137.837	187.119.397	174.131.954	*Equity attributable to owners of the Company*
Kepentingan Nonpengendali		81.234	54.141	93.175	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**848.219.071**	**187.173.538**	**174.225.129**	***Total Equity***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	47	5.475	8.632.990	6.152.674	*Deferred tax liabilities - net*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					*Long-term liabilities - net of current portion*
Penerusan pinjaman	23	29.205.236	26.453.073	29.498.060	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	24	8.194.693	8.371.933	8.578.716	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	25	21.556.619	22.758.961	28.669.923	*Lease liabilities*
Utang bank	26	77.828.870	70.400.166	66.457.948	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	80.043.338	81.672.556	81.017.989	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	28	7.849.063	7.343.509	7.466.112	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	29	2.566	7.331	6.906	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	49	37.378.472	41.078.935	33.783.615	*Post-employment benefits obligation*
Utang lain-lain	31	67.678	98.771	221.150	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**262.132.010**	**266.818.225**	**261.853.093**	***Total Non-current Liabilities***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2015 AND 2014 AND JANUARY 1, 2014
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014*)	1 Januari/ *January 1,* 2014*)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade accounts payable*
Pihak berelasi	30	9.290.847	12.671.917	12.371.027	*Related parties*
Pihak ketiga	30	19.713.705	15.668.180	16.002.748	*Third parties*
Utang pajak	32	15.131.857	1.151.248	1.222.393	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	33	8.410.971	7.552.664	7.057.450	*Accrued expenses*
Uang jaminan langganan	34	11.324.898	10.828.518	10.107.402	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	35	1.113.825	857.728	1.061.453	*Project cost payable*
Pendapatan ditangguhkan	22	1.533.703	1.306.976	990.913	*Deferred revenue*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					*Current portion of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	23	2.505.347	2.644.611	3.208.983	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	24	293.793	293.793	293.793	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	25	3.445.604	2.874.581	2.972.993	*Lease liabilities*
Utang bank	26	11.752.458	9.527.681	8.387.881	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	9.122.350	805.000	2.808.000	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	28	321.164	299.229	278.561	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	29	-	-	2.786	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	49	2.848.664	2.700.106	2.584.480	*Post-employment benefits obligation*
Utang lain-lain	31	20.195.245	16.347.195	18.223.407	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**117.004.431**	**85.529.427**	**87.574.270**	***Total Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**379.136.441**	**352.347.652**	**349.427.363**	***TOTAL LIABILITIES***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**1.227.355.512**	**539.521.190**	**523.652.492**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
DECEMBER 31, 2015 AND 2014
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	2015	Catatan/ *Notes*	2014*)	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUES***
Penjualan tenaga listrik	209.844.541	36	186.634.484	*Sale of electricity*
Biaya penyambungan pelanggan	6.141.335	22	5.623.913	*Customer connection fees*
Lain-lain	1.361.114	38	1.159.544	*Others*
Jumlah Pendapatan Usaha	217.346.990		193.417.941	*Total Revenues*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	120.587.310	39	153.136.934	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	51.690.867	40	46.052.377	*Purchased electricity*
Sewa	7.560.994	41	7.464.835	*Lease*
Pemeliharaan	17.593.261	42	16.611.461	*Maintenance*
Kepegawaian	20.321.137	43	16.645.797	*Personnel*
Penyusutan	21.418.640	6	19.911.211	*Depreciation*
Lain-lain	7.090.077	44	5.488.617	*Others*
Jumlah Beban Usaha	246.262.286		265.311.232	*Total Operating Expenses*
RUGI USAHA SEBELUM PENDAPATAN LAIN-LAIN	**(28.915.296)**		**(71.893.291)**	***OPERATING LOSS BEFORE OTHER INCOME***
Subsidi listrik Pemerintah	56.552.532	37	99.303.250	*Government's electricity subsidy*
LABA USAHA	**27.637.236**		**27.409.959**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan lain-lain - bersih	2.437.066	46	4.157.018	*Others income - net*
Penghasilan keuangan	627.412		584.061	*Financial income*
Beban keuangan	(17.536.348)	45	(16.639.653)	*Financial cost*
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih	(16.229.625)		3.436.148	*(Loss)/gain on foreign exchange - net*
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK	**(3.064.259)**		**18.947.533**	***(LOSS)/ INCOME BEFORE TAX***
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK	**18.649.497**	47	**(4.943.455)**	***TAX BENEFIT/(EXPENSE)***
LABA TAHUN BERJALAN	**15.585.238**		**14.004.078**	***INCOME FOR THE YEAR***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
DECEMBER 31, 2015 AND 2014
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	2015	Catatan/ *Notes*	2014*)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:*
Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi dan ventura bersama	36.978		-	*Share of other comprehensive income of associates and joint ventures*
	36.978		-	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:*
Keuntungan/(kerugian) aktuaria	6.120.608		(4.871.902)	*Actuarial gain/(loss)*
Cadangan revaluasi aset	653.441.219		-	*Asset revaluation reserve*
(Beban) manfaat pajak terkait	(16.865.984)		1.217.975	*Related income tax (expense) benefits*
	642.695.843		(3.653.927)	
TOTAL PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**642.732.821**		**(3.653.927)**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(EXPENSE) FOR THE YEAR, NET OF TAX***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**658.318.059**		**10.350.151**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				***Income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	15.569.299		13.988.874	*Owners of the Company*
Kepentingan Nonpengendali	15.939		15.204	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN	**15.585.238**		**14.004.078**	***INCOME FOR THE YEAR***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	658.302.120		10.334.947	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	15.939		15.204	*Non-controlling interests*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**658.318.059**		**10.350.151**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	**337.017**	48	**302.807**	***BASIC/DILUTED EARNING PER SHARES (In full Rupiah amount)***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock*	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ *Stock subscription from Government in issuance process*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk/ *Equity attributable to owners of the Company*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Bagian penghasilan komprehensif lain atas program manfaat pasti/ *Actuary gains (loss) on defined benefit plans*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi/ *Other comprehensive income from associates*				
Saldo per 1 Januari 2014		46.197.380	-	49.901.404	19.108.528	35.030.871	-	-	-	150.238.183	93.175	150.331.358	*Balance as of January 1, 2014*
Pengecualian dari ISAK 8 *)		-	-	-	-	30.935.015	-	-	-	30.935.015	-	30.935.015	*The exemption of ISFAS 8 *)*
Pengaruh penerapan PSAK 24 secara retrospektif *)		-	-	-	-	795.925	-	(7.837.169)	-	(7.041.244)	-	(7.041.244)	*The effect of retrospective application of SFAS 24 *)*
Saldo per 1 Januari 2014 setelah disajikan kembali		**46.197.380**	**-**	**49.901.404**	**19.108.528**	**66.761.811**	**-**	**(7.837.169)**	**-**	**174.131.954**	**93.175**	**174.225.129**	***Balance as of January 1, 2014 after restated***
Penambahan tahun berjalan	21	-	-	2.595.489	-	-	-	-	-	2.595.489	-	2.595.489	*Additions during the year*
Transaksi dengan pihak nonpengendali		-	-	-	-	57.007	-	-	-	57.007	(54.238)	2.769	*Transaction with non-controlling interests*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	13.988.874	-	(3.653.927)	-	10.334.947	15.204	10.350.151	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali		**46.197.380**	**-**	**52.496.893**	**19.108.528**	**80.807.692**	**-**	**(11.491.096)**	**-**	**187.119.397**	**54.141**	**187.173.538**	***Balance as of December 31, 2014 as restated***
Penambahan tahun berjalan	21	-	5.000.000	1.678.761	-	-	-	-	-	6.678.761	12.154	6.690.915	*Additions during the year*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor		-	4.468.627	(4.468.627)	-	-	-	-	-	-	-	-	*Reclassification from additional paid-in capital*
Cadangan umum tahun berjalan		-	-	-	7.763.965	(7.763.965)	-	-	-	-	-	-	*Appropriation during the year*
Dividen tunai		-	-	-	-	(3.962.441)	-	-	-	(3.962.441)	(1.000)	(3.963.441)	*Cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	15.569.299	638.105.386	4.590.457	36.978	658.302.120	15.939	658.318.059	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2015		**46.197.380**	**9.468.627**	**49.707.027**	**26.872.493**	**84.650.585**	**638.105.386**	**(6.900.639)**	**36.978**	**848.137.837**	**81.234**	**848.219.071**	***Balance as of December 31, 2015***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	2015	2014*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	219.257.343	194.886.601	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(200.977.911)	(227.874.202)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	(17.325.869)	(13.441.780)	*Cash paid to employees*
Kas diperoleh/(digunakan) untuk aktivitas operasi	953.563	(46.429.381)	*Cash provided/(used) in operations*
Penerimaan subsidi listrik	55.332.384	101.816.318	*Government subsidy received*
Pembayaran bunga	(16.896.444)	(16.813.255)	*Interest expense paid*
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	(166.719)	(169.085)	*Payments of financing related costs*
Penerimaan bunga	627.412	584.061	*Interest received*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	2.258.070	-	*Income tax restitution received*
Pembayaran pajak revaluasi aset tetap	(3.145.210)	-	*Tax on revaluation of assets*
Pembayaran pajak penghasilan	(3.789.944)	(1.704.744)	*Income tax paid*
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**35.173.112**	**37.283.914**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset	9.285	839.025	*Proceeds from sale of assets*
Perolehan aset tetap termasuk kapitalisasi biaya pinjaman	(36.365.403)	(30.132.270)	*Additions to property, plant and equipment including capitalization of borrowing cost*
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi - bersih	(18.700)	(131.177)	*Loans given to related parties - net*
Penerimaan kembali dari pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	85.601	-	*Repayment from loans given to related parties*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(16.739)	(149.771)	*Acquisition of investments in associates and joint ventures*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	161.006	94.063	*Proceeds from dividend of associates*
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(2.132.994)	(915.912)	*Placement of restricted cash in banks and time deposits*
Penempatan investasi jangka pendek	(19.363)	(3.029)	*Placement of short-term investments*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(38.297.307)**	**(30.399.071)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham	5.000.000	-	*Proceeds from stock subscription from Government in issuance process*
Pembayaran utang obligasi	(805.000)	(2.808.000)	*Payments of bonds payable*
Pembayaran penerusan pinjaman	(2.819.345)	(3.179.484)	*Payments of two-step loans*
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	(293.793)	(293.793)	*Payments of Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Pembayaran dividen tunai	(3.962.441)	-	*Payments of cash dividends*
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(1.000)	-	*Payment of dividends to non-controlling interest*
Perolehan utang bank	43.525.661	63.291.617	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	(38.032.571)	(58.992.548)	*Payments of bank loans*
Pembayaran utang listrik swasta	(297.519)	(235.811)	*Payments of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.067.581)	(3.067.581)	*Payments of lease liabilities*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(753.589)**	**(5.285.600)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(3.877.784)**	**1.599.243**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	362.595	(17.684)	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**27.111.528**	**25.529.969**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**23.596.339**	**27.111.528**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya Perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan (i) akta No. 15 tanggal 30 Januari 2009 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian hak dan kewajiban Direksi Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-0224 tanggal 20 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 Nopember 2008, Tambahan No. 23523 (ii) akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, atas perubahan pasal 4 ayat 2 tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-26937 tanggal 19 Agustus 2011

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or the "Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia ("Government"). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on the notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to limited liability company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

The articles of association of the Company were recently amended by (i) notarial deed No. 15 dated January 30, 2009 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, to clarify the rights and responsibilities of the Company's Directors. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-AH.01.10-0224 dated March 20, 2009, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated November 14, 2008, Supplement No. 23523 (ii) notarial deed No. 4 dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, in accordance with article 4 section (2) concerning the increase in the subscribed and paid-up capital. This change was received and recorded in the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.10-26937 dated August 19, 2011.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

(iii) akta No. 9 tanggal 20 Januari 2015 dari Lenny Janis Ishak,S.H., notaris di Jakarta, atas penghapusan pasal 10 ayat 19 dan 20 tentang masa jabatan anggota dewan direksi dan pasal 15 ayat 15 dan 17 tentang masa jabatan anggota dewan komisaris. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0004386.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 23 Januari 2015.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 47.594 karyawan (tidak diaudit) dan 48.068 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk jumlah karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and General Information** (continued)*

(iii) notarial deed No. 9 dated January 20, 2015 of Lenny Janis Ishak,S.H., notary in Jakarta, in accordance with article 10 section 19 and 20 regarding tenure of Board of Director and article 15 section 15 and 17 regarding tenure of Board of Commisioners. This changes was approved by the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0004386.AH.01.03.TAHUN 2015 dated January 23, 2015.

The Company is domiciled in Jakarta, with 48 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's head office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run an electricity business for public use, which must be satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit, and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development with the application of the principles of Limited Liability Companies.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises ("BUMN")", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing subsidized electricity to the public (Note 37).

As of December 31, 2015 and 2014 the Company and its subsidiaries had a total number of employees of 47,594 (unaudited) and 48,068 (unaudited), respectively. The total amount of employees does not include the employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is the subsidiary of PT Haleyora Power.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. The Company's Public Offering of Bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In *1)*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah yang Ditawarkan/ *Offered Amount*	
Obligasi Rupiah					*Rupiah Bonds*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	1.244.000	*Sustainable Bonds I PLN II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	429.000	*Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	879.000	*Sustainable Bonds I PLN I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	121.000	*Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	2.500.000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	500.000	*Sukuk Ijarah PLN V Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	2.703.000	*PLN XI Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	297.000	*Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010*
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	1.440.000	*PLN X Bonds Year 2009*
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	760.000	*Sukuk Ijarah PLN III Year 2009*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	2.700.000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	300.000	*Sukuk Ijarah PLN II Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	2.200.100	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	200.000	*Sukuk Ijarah PLN I Year 2006*
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 Nopember 2004/ *November 3, 2004*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Nopember 2004/ *November 12, 2004*	1.500.000	*PLN VII Bonds Year 2004*
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ *June 27, 1997*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Agustus 1997/ *August 12, 1997*	600.000	*PLN VI Bonds Year 1997*
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ *June 28, 1996*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	28 Agustus 1996/ *August 28, 1996*	1.000.000	*PLN V Bonds Year 1996*
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ *June 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	4 September 1995/ *September 4, 1995*	680.000	*PLN IV Bonds Year 1995*
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ *January 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	18 April 1995/ *April 18, 1995*	318.430	*PLN III Bonds Year 1995*
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ *September 28, 1993*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	8 Nopember 1993/ *November 8, 1993*	600.000	*PLN II Bonds Year 1993*
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ *September 25, 1992*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	10 Nopember 1992/ *November 10, 1992*	300.000	*PLN I Bonds Year 1992*
Jumlah				**21.271.530**	***Total***

*1) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya/*On July 22, 1995 Indonesia Parallel Exchange was acquired by Surabaya Stock Exchange*
Pada tanggal 30 Oktober 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan merger dengan melebur kedalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia/*On October 30, 2007 Surabaya Stock Exchange was officially merged to Jakarta Stock Exchange, which then changed its name to Indonesia Stock Exchange*

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah yang Ditawarkan/ *Offered Amount *)*	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$					*Global Medium Term Notes - US$*
Penerbitan tahun 2012	16 Oktober 2012/ *October 16, 2012*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012*	1.000.000.000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	15 Nopember 2011/ *November 15, 2011*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	23 Nopember 2011/ *November 23, 2011*	1.000.000.000	*Issued in 2011*
Jumlah				**2.000.000.000**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

**) In full amount*

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan (lanjutan)

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. The Company's Public Offering of Bonds** (continued)*

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed in*	Tanggal Pencatatan/ *Listed date*	Jumlah Efek Ditawarkan/ *Offered Amount*)*	
Obligasi Terjamin - US$					*Guaranteed Notes - US$*
Penerbitan 2009	30 Oktober 2009/ *October 30, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	9 Nopember 2009/ *November 9, 2009*	750.000.000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2009	3 Agustus 2009/ *August 3, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	10 Agustus 2009/ *August 10, 2009*	1.250.000.000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2007	21 Juni 2007/ *June 21, 2007*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	1.000.000.000	*Issued in 2007*
Penerbitan 2006	11 Oktober 2006/ *October 11, 2006*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	17 Oktober 2006/ *October 17, 2006*	1.000.000.000	*Issued in 2006*
Jumlah				4.000.000.000	*Total*

*) Dalam jumlah penuh

**) In full amount*

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Management and Other Information

As of December 31, 2015 and 2014, the Company's management consisted of the following:

	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	
Komisaris Utama	Kuntoro Mangkusubroto	*President Commissioner*
Komisaris	Andin Hadiyanto	*Commissioners*
	Harry Susetyo Nugroho	
	Jarman	
	Budiman	
	Hasan Bisri	
	Aloysius Kiik Ro	
Komisaris Independen	Oegroseno	*Independent Commissioners*
	Darmono	
		Tugas dan Wewenang/*Duties and Authority*
Direktur Utama/ *President Director*	Sofyan Basir	Direktur Utama/ *President Director*
Direktur/*Director*	Sarwono Sudarto	Keuangan/*Finance*
Direktur/*Director*	Nasri Sebayang	Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah/ *Regional Business of Central Side of Java*
Direktur/*Director*	Murtaqi Syamsuddin	Bisnis Regional Jawa Bagian Barat dan Lampung/*Regional Business of West Part of Java and Lampung*
Direktur/*Director*	Supangkat Iwan Santoso	Pengadaan/*Procurement*
Direktur/*Director*	Amir Rosidin	Bisnis Regional Sumatera/*Regional Business of Sumatera*
Direktur/*Director*	Nicke Widyawati	Perencanaan Korporat/*Corporate Planning*
Direktur/*Director*	Amin Subekti	Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali/ *Regional Business of East Side of Java and Bali*
Direktur/*Director*	Muhamad Ali	Human Capital Manajemen/ *Human Capital Management*
Direktur/*Director*	Djoko Rahardjo Abu Manan	Bisnis Regional Kalimantan/ *Regional Business of Kalimantan*
Direktur/*Director*	Machnizon	Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara/ *Regional Business of South East Nusa and Sulawesi*
Direktur/*Director*	Haryanto W.S.	Bisnis Regional Maluku dan Papua/ *Regional Business of Maluku and Papua*
Komite Audit		*Audit Committee*
Ketua	Darmono	*Chairman*
Anggota	Andin Hadiyanto	*Members*
	Hasan Bisri	
	Yoseph Suardi Sabda	
	Sugeng Rochadi	
	Aidil Yuzar	

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

c. Management and Other Information *(continued)*

	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	
Komisaris Utama	Chandra M. Hamzah	*President Commissioner*
Komisaris	Budiman	*Commissioners*
	Hasan Bisri	
	Andin Hadiyanto	
	Harry Susetyo Nugroho	
	Zulkifli Zaini	
	Sumanggar Milton Pakpahan	
Komisaris Independen	Oegroseno	*Independent Commissioners*
	Darmono	
		Tugas dan Wewenang/*Duties and Authority*
Direktur Utama/ *President Director*	Sofyan Basir	Direktur Utama, SDM dan Umum/ *President Director, Human Resource and General Affairs*
Direktur/*Director*	Sarwono Sudarto	Keuangan/*Finance*
Direktur/*Director*	Nasri Sebayang	Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan/ *Construction and New/Renewable Energy*
Direktur/*Director*	Murtaqi Syamsuddin	Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN/ *Planning and Development Affiliates PLN*
Direktur/*Director*	Supangkat Iwan Santoso	Operasi Jawa Bali/*Java Bali Operations*
Direktur/*Director*	Amir Rosidin	Operasi Luar Jawa Bali/*Outside Java Bali Operations*
Direktur/*Director*	Nicke Widyawati	Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/ *Commerce, Risk Management and Compliance*
Direktur/*Director*	Amin Subekti	Pengadaan Strategis dan Energi Primer/ *Strategic Procurement and Primary Energy*
Komite Audit		*Audit Committee*
Ketua	Zulkifli Zaini	*Chairman*
Anggota	Andin Hadiyanto	*Members*
	Harry Susetyo Nugroho	
	Oegroseno	
	Sugeng Rochadi	
	Aidil Yuzar	

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Sekretaris Perusahaan adalah Adi Supriono.

As of December 31, 2015 and 2014, the Company's corporate secretary is Adi Supriono.

Berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("Meneg BUMN") Republik Indonesia No. KEP-273/MBU//12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Chandra M. Hamzah, Budiman, dan Hasan Bisri menggantikan Yogo Pratomo, Achmad Yani Basuki dan Jarman sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("MSOE") of the Republic of Indonesia No. KEP-273/MBU//12/2014 dated December 23, 2014, Chandra M. Hamzah, Budiman, and Hasan Bisri were appointed as Commissioners replacing Yogo Pratomo, Achmad Yani Basuki and Jarman.

Berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-223/MBU/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015, Kuntoro Mangkusubroto diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Chandra M. Hamzah dan Jarman diangkat sebagai Komisaris menggantikan Sumanggar Milton Pakpahan.

Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-223/MBU/11/2015 dated November 10, 2015, Kuntoro Mangkusubroto was appointed as President Commissioner to replace Chandra M. Hamzah and Jarman was appointed as Commissioner to replace Sumanggar Milton Pakpahan.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain (lanjutan)

Berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon, dan Haryanto.W.S diangkat sebagai Direktur Perusahaan

Berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBO/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen dan Sumanggar Milton Pakpahan diangkat sebagai Komisaris menggantikan Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep dan Syahrial Loetan.

Aloysius Kiik Ro diangkat sebagai Komisaris berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015.

Harry Susetyo Nugroho sebagai Komisaris diangkat berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-199/MBU/2013 tanggal 2 April 2013 dan Zulkifli Zaini sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-302/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Andin Hadiyanto sebagai Komisaris diangkat berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-365/MBU/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. KEP-53/MBU/04/2015 tanggal 28 April 2015, Zulkifli Zaini tidak lagi menjabat sebagai Komisaris.

Untuk tahun 2015 Komite Audit Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 198/DK-PLN/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Untuk tahun 2014 Komite Audit Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 08/SK/DK-PLN/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Management and Other Information** (continued)*

Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon, and Haryanto.W.S were appointed as the Company's Directors.

Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBO/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners and Sumanggar Milton Pakpahan was appointed as Commissioner to replace Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep and Syahrial Loetan.

Aloysius Kiik Ro was appointed as Commissioner based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 dated September 25, 2015.

Harry Susetyo Nugroho was appointed as Commissioner based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-199/MBU/2013 dated April 2, 2013 and Zulkifli Zaini was appointed as Commissioner based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-302/MBU/2013 dated July 2, 2013.

Andin Hadiyanto was appointed as Commissioner based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-365/MBU/2012 dated October 3, 2012.

Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. KEP-53/MBU/04/2015 dated April 28, 2015, Zulkifli Zaini no longer serves as Commissioner.

For 2015 the Company's Audit Commitee was appointed based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 198/DK-PLN/2015 dated October 16, 2015.

For 2014 the Company's Audit Commitee was appointed based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 08/SK/DK-PLN/2014 dated October 21, 2014.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

Penerapan dari standar akuntansi berikut oleh Perusahaan dan entitas anak, yang berlaku efektif 1 Januari 2015, menyebabkan perubahan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1 (revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan" mengenai pendapatan komprehensif lain. Perubahan yang utama adalah persyaratan perusahaan untuk mengelompokkan hal-hal yang disajikan sebagai 'pendapatan komprehensif lain' ("OCI") berdasarkan apakah hal-hal tersebut berpotensi untuk direklasifikasi ke laporan laba rugi selanjutnya (penyesuaian reklasifikasi).

- PSAK No. 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja". Standar ini mengatur semua keuntungan/(kerugian) aktuarial dari kewajiban imbalan pascakerja harus diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain sedangkan biaya jasa lalu diakui pada laba rugi dan mengganti biaya bunga dan hasil yang diharapkan dari aset program dengan jumlah bunga bersih yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas/(aset) bersih atas manfaat pasti. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 56.

- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama tergantung atas hak dan kewajiban kontraktual yang dimiliki setiap investor, dibanding bentuk legal suatu perikatan bersama. Operasi bersama timbul dimana para investor mempunyai hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas dari sebuah pengaturan. Operator mencatat kepemilikannya atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Ventura bersama timbul dimana para investor memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidak diijinkan. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah reklasifikasi dari investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada entitas ventura bersama, dan sebaliknya, yang disajikan pada Catatan 8.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

In the current year, the Company and its subsidiaries have adopted all of the new and revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") that are relevant to their operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2015.

The following standards have been adopted by the Company and its subsidiaries for the first time for the financial year beginning on or after January 1, 2015 and have a material impact on the Company's consolidated financial statements:

- *Statement of Financial Statements ("SFAS") No. 1 (Revised 2013), "Financial Statement Presentation" regarding other comprehensive income. The main change resulting from these amendments is a requirement for entities to group items presented in 'other comprehensive income' ("OCI") on the basis of whether they are potentially reclassifiable to profit or loss subsequently (reclassification adjustments).*

- *SFAS No. 24 (revised 2013), "Employee Benefits". The standard requires all actuarial gains/(losses) of post-employment benefit obligations to be recognized immediately in other comprehensive income while the past service cost is recognized in profit or loss and to replace interest cost and expected return on plan assets with a net interest amount that is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability/(asset). The impact of the above revised standard on the consolidated financial statements is presented in Note 56.*

- *SFAS No. 66, "Joint Arrangements", joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations each investor has, rather than the legal structure of the joint arrangements. Joint operations arise where the investors have rights to the assets and obligations for the liabilities of an arrangement. A joint operator accounts for its share of the assets, liabilities, revenue and expenses. Joint ventures arise where the investors have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for under the equity method. Proportional consolidation of joint arrangements is no longer permitted. The impact of the above revised standard on the consolidated financial statements is a reclassification from investment in associates to investment in joint ventures, and vice versa, which is presented in Note 8.*

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain". Standar ini mengatur pengungkapan seluruh bentuk kepemilikan di entitas lain, termasuk pengaturan bersama, entitas asosiasi dan entitas struktur. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 8.

- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar". Standar ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat atas nilai wajar dan sumber tunggal atas pengukuran nilai wajar dan syarat pengungkapan. Dampak perubahan standar yang direvisi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 6, 7 dan 55.

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan:

- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- ISAK No. 15 (Revisi 2015), "Batas Aset Imbalan Pasti"
- ISAK No. 26 (Revisi 2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

- *SFAS No. 67, "Disclosures of Interest in Other Entities". This standard includes the disclosure requirements for all forms of interests in other entities, including joint arrangements, associates and structured entities. The impact of the above revised standard on the consolidated financial statements is presented in Note 8.*

- *SFAS No. 68, "Fair Value Measurement". This standard aims to improve consistency and reduces complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements. The impact of the above revised standard on the consolidated financial statements is presented in Note 6, 7 and 55.*

The following new standards and amendments to existing standard have been published and are mandatory for the Company's consolidated financial statements for period beginning on or after January 1, 2015 which do not have a material impact to the consolidated financial statements of the Company:

- *SFAS No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements"*
- *SFAS No. 15 (Revised 2013), "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes"*
- *SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets"*
- *SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation"*
- *SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement"*
- *SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures"*
- *SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements"*
- *ISFAS No. 15 (Revised 2015), "The Limit on a Defined Benefit Asset"*
- *ISFAS No. 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives"*

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

Sejumlah amandemen terhadap standar, interpretasi, dan perbaikan tahunan atas standar pakan efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2017 dan belum diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 4 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 5 (Revisi 2015), "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13 (Revisi 2015), "Properti Investasi"
- PSAK No. 15 (Revisi 2015), "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap"
- PSAK No. 19 (Revisi 2015), "Aset Tak Berwujud"
- PSAK No. 22 (Revisi 2015), "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 25 (Revisi 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Revisi 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 65 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66 (Revisi 2015), "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 (Revisi 2015), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 (Revisi 2015), "Pengukuran Nilai Wajar"
- PSAK No. 69, "Agrikultur"
- ISAK No. 30 (Revisi 2015), "Pungutan"
- ISAK No. 31 (Revisi 2015), "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13, Properti Investasi"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan revisi standar, interpretasi, dan perbaikan tahunan dari standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

A number of amendments to standards, interpretations, and annual improvement of standards will be effective for annual periods beginning on January 1, 2016 and January 1, 2017 and have not been applied in preparing these consolidated financial statements, are as follows:

- *SFAS No. 1 (Revised 2015), "Presentation of Financial Statements"*
- *SFAS No. 4 (Revised 2015), "Separate Financial Statements"*
- *SFAS No. 5 (Revised 2015), "Operating Segments"*
- *SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures"*
- *SFAS No. 13 (Revised 2015), "Investment Property"*
- *SFAS No. 15 (Revised 2015), "Investment in Associates and Joint ventures"*
- *SFAS No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets"*
- *SFAS No. 19 (Revised 2015), "Intangible Assets"*
- *SFAS No. 22 (Revised 2015), "Business Combinations"*
- *SFAS No. 24 (Revised 2015), "Employee Benefits"*
- *SFAS No. 25 (Revised 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
- *SFAS No. 53 (Revised 2015), "Share Based Payments"*
- *SFAS No. 65 (Revised 2015), "Consolidated Financial Statements"*
- *SFAS No. 66 (Revised 2015), "Joint Arrangements"*
- *SFAS No. 67 (Revised 2015), "Disclosure of Interests in Other Entities"*
- *SFAS No. 68 (Revised 2015), "Fair Value Measurement"*
- *SFAS No. 69, "Agriculture"*
- *ISFAS No. 30 (Revised 2015), "Levies"*
- *ISFAS No. 31 (Revised 2015), "Interpretation of Scope of SFAS 13, Investment Property"*

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these revised standards, interpretations, and annual improvement of standards to the Company's consolidated financial statements.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (“Rp”), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (“Rp”), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Ketika aset dari entitas anak dinyatakan sebesar nilai revaluasi atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas, jumlah yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi ekuitas dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas secara langsung aset yang relevan (sebagai contoh direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung ke saldo laba sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" atau, jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau entitas ventura bersama.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Basis of Consolidation *(continued)*

Changes in the Company and its subsidiaries' interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets, and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. When assets of the subsidiary are carried at the revalued amount or at fair value and the related cumulative gain or loss has been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity, the amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are accounted for as if the Company had directly disposed of the relevant assets (i.e. reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings as specified by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under SFAS 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture entity.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan nonpengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Business Combinations *(continued)*

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders is initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on an acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling interest even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. (“MH”) dan Majapahit Finance B.V. (“MF”) diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Business Combinations *(continued)*

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries’ previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. (“MH”) and Majapahit Finance B.V. (“MF”), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

The operating activities of MH and MF are an integral part of the Company’s activities; hence the accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same procedures adopted by the Company.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:

   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

c. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham dari Perusahaan dan perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: tersedia untuk dijual dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (“AFS”)

AFS pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Transactions with Related Parties *(continued)*

c. The entity is controlled, jointly controlled or materially affected by the Government. The government is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the stockholder of the Company and company owned by Regional Government.

All transactions with related parties, whether or not made with similar terms and conditions as those transacted with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: available-for-sale and loans and receivables.

Available-for-Sale Financial Assets (“AFS”)

AFS are initially recognized at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, they are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses, until they are derecognized.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS") (lanjutan)

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman Diberikan dan Piutang

Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Financial Assets *(continued)*

Available-for-Sale Financial Assets ("AFS") (continued)

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Loans and Receivables

Cash and cash equivalents, trade receivable and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Financial Assets *(continued)*

Impairment of Financial Assets (continued)

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Financial Assets *(continued)*

Impairment of Financial Assets (continued)

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Derecognition of Financial Assets

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Financial Assets *(continued)*

Derecognition of Financial Assets (continued)

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement, and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Liabilities or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (tidak termasuk sukuk ijarah dan obligasi syariah ijarah), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Sukuk ijarah dan obligasi syariah ijarah pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi.

Biaya transaksi sukuk ijarah dan obligasi syariah ijarah diamortisasi menggunakan metode garis lurus sepanjang umur kontrak dan liabilitasnya.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Liabilities and Equity Instruments *(continued)*

Financial Liabilities

Two step loans, Government and non bank Government Financial Institution Loans, bank loans and medium term notes, bonds payable (excluding sukuk ijarah and syariah ijarah bonds), electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Sukuk ijarah and syariah ijarah bonds are initially measured at fair value, net of transaction costs.

Transaction costs for sukuk ijarah and syariah ijarah bonds are amortized using the straight line method over the contractual life of the liability.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities when, and only when the Company's and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- *currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Sebelum 31 Desember 2015, aset tetap yang dimiliki untuk digunakan, kecuali tanah, dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah
- Bangunan umum, waduk dan prasarana
- Instalasi dan mesin pembangkit
- Perlengkapan transmisi
- Perlengkapan distribusi
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik
- Material cadangan utama

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25.

Kelas aset di atas, kecuali tanah, menggunakan model revaluasi, dan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisition

Before December 31, 2015, property, plant and equipment held for use, except land rights, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Land rights is stated at cost. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- *Land rights*
- *Buildings, reservoir and infrastructure*
- *Installations and power plant*
- *Transmission equipment*
- *Distribution equipment*
- *Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
- *Major spare parts*

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS No. 25.

The classes of asset above, except for land rights, use the revaluation model, and are shown at fair value, less subsequent depreciation and impairment losses. Land rights is shown at fair value. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("OJK"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Tanah tidak disusutkan. Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisition *(continued)*

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant, and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the profit or loss.

Land rights are not depreciated. Initial costs incurred to obtain land rights are recognized as part of the acquisition cost of the land rights, and these costs are not depreciated. Assets, except land rights, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful lives as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 47	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	13 - 30	*Installations and power plant*
Perlengkapan transmisi	37	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	15 - 37	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	4 - 8	*General equipment*
Kendaraan bermotor	3 - 5	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	10 - 25	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	5 - 10	*Telecommunication and data processing equipment used for supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	5 - 10	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	10 - 47	*Vessel and equipment*

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisition *(continued)*

The costs of maintenance and repairments are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Sewa

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa".

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik ("PPA" dan "ESC") dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") yang kemudian bergabung menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak yang termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta dikecualikan dari penerapan ISAK 8 sampai DSAK–IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mangatur transaksi tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak tetap mengikuti kebijakan akuntansi yang berlaku, dimana pembelian listrik dianggap sebagai transaksi pembelian komoditas normal.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi perlakuan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Leases

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011), "Leases".

The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried out by the Company as a state-owned enterprise, which serves as the holder of an Electricity Business Proxy. The holder of an Electricity Business Proxy and each holder of an Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements ("PPA") and energy sales contracts ("ESC") with Independent Power Producers ("IPP"). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("Bapepam-LK"), which has subsequently been merged into the Financial Services Authority ("OJK"), power supply arrangements by IPPs to the Company and its subsidiaries that are categorized as public-to private consession arrangements, are exempted from the application of ISFAS 8, until DSAK-IAI has issued an accounting interpretation that can specifically address such transactions. As a result, the Company and its subsidiaries continued to follow its existing accounting policy in which the supply of electricity is accounted for as a normal purchase of commodity.

Management assessed the impact of ISFAS 16, "Service Concession Arrangements" (effective January 1, 2012) on the Company's and its subsidiaries' Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which addresses the accounting of the operators of public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of Bapepam-LK, management decided to apply the provisions of ISFAS 8, in accordance with SFAS 30, on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa (lanjutan)

Di tahun 2015, manajemen melakukan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa sesuai dengan ISAK 8 "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" sehingga PSAK 30, "Sewa" tidak perlu diterapkan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori sewa keuangan atau sewa operasi. Oleh karena itu, penyajian kembali dilakukan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 56.

Manajemen juga berpendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak yang menyajikan transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP bukan sebagai sewa, akan membuat laporan keuangan konsolidasian lebih informatif, mencerminkan fakta hukum, mencerminkan kinerja real perusahaan, dan lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pendapat manajemen untuk tidak menerapkan ISAK 8 tersebut telah mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris melalui surat No. 14/DK-PLN/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Dukungan Pengecualian Penerapan ISAK 8 dan PSAK 10 kepada PT PLN (Persero), Menteri BUMN melalui surat No. S-206/MBU/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Dukungan atas Pengecualian ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) dan Menteri Keuangan melalui surat No. S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Dukungan atas Pengecualian Penerapan ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero).

Perusahaan menampilkan dampak yang akan terjadi apabila perjanjian jual beli tenaga listrik termasuk sewa sesuai dengan ISAK 8 di Catatan 57.

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Leases *(continued)*

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease (continued)

In the year 2015, management reassessed the application of ISFAS 8 for power purchase agreements and management is of the opinion that power purchase agreements are not agreements that contain leases based on ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease", and hence it is not required to apply SFAS 30, "Leases" to determined whether such arrangements fall into the categories of finance lease or operating lease. As a result, a restatement was made to the consolidated financial statements at and for the year ended December 31, 2014. The impact of the restatement on the consolidated financial statements is presented in Note 56.

Management is also of the opinion that the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements which do not present the purchase of electricity from IPP as leases, will make the consolidated financial statement more informative, reflecting the legal form, reflecting real performance of the company and more useful to financial statement user. Management's opinion for not implementing ISFAS 8 has been supported by Board of Commissioners through its letter No. 14/DK-PLN/2016 dated January 27, 2016 about BOC Support on Exclusion of the application of ISFAS 8 and SFAS 10 to PT PLN (Persero), the MSOE through its letter No. S-206/MBU/03/2016 dated March 28, 2016 concerning the support on the exclusions of ISFAS 8 on PT PLN (Persero) Financial Statements and the Minister of Finance through its letter No. S-246/MK/2016 dated April 5, 2016 concerning the exclusions of application of ISFAS 8 on PT PLN (Persero) Financial Statements.

The Company disclosed the effects that would be incurred if power purchase agreements contain leases in accordance with ISFAS 8 in Note 57.

Lease Classification

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incident to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Klasifikasi Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Pekerjaan dalam pelaksanaan perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang direkapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Leases *(continued)*

Lease Classification (continued)

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

m. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Borrowing costs are capitalized from foreign exchange losses to an extent by which the capitalized amount does not exceed the amount of borrowing costs which may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Biaya Pinjaman (lanjutan)

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Sebelum tanggal 31 Desember 2015, properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas properti investasi dari model biaya menjadi model revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Borrowing Costs *(continued)*

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land rights or a building - or part of building - or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Before December 31, 2015, investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Land rights are stated at cost and is not depreciated.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for investment properties from the cost model to the revaluation model.

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25.

Land rights are shown at fair value. Valuation of those assets are performed by external independent valuers which are registered with OJK. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

p. Investments in Associates and Joint Venture

Investments in Associates

Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Investments in Associates and Joint Venture *(continued)*

Investments in Associates (continued)

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations". In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries and associates are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries' interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Pada saat pelepasan suatu entitas asosiasi yang mengakibatkan Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, investasi yang tersisa diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal Investasi AFS atau Investasi yang Dimiliki untuk Diperjualbelikan sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai wajar termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas asosiasi. Selanjutnya, Perusahaan dan entitas anak memperhitungkan seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar yang sama dengan yang diperlukan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait, maka Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) sejak Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Investments in Associates and Joint Venture *(continued)*

Investments in Associates (continued)

The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Upon disposal of an associate that results in the Company and its subsidiaries losing significant influence over that associate, any retained investment is measured at fair value on the initial recognition of an AFS or Held for Trading Investment in accordance with SFAS 55. The difference between the previous carrying amount of the associate attributable to the retained interest and the fair value is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Company and its subsidiaries reclassify the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when it loses significant influence over that associate.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Bagian partisipasi dalam ventura bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali perusahan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Investments in Associates and Joint Venture *(continued)*

Interest in joint ventures

Under SFAS 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and its subsidiaries have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Company and its subsidiaries' share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Bagian partisipasi dalam ventura bersama (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

q. Aset Takberwujud

Biaya Pengembangan Piranti Lunak

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset takberwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

r. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3g.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Investments in Associates and Joint Venture *(continued)*

Interest in joint ventures (continued)

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control, and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

q. Intangible Assets

Software Development Cost

Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company and its subsidiaries are recognized as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight line method over their estimated useful lives.

Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the period of the land rights.

r. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

s. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3g for the accounting policy on loans and receivables.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

u. Pinjaman dan Utang Obligasi (Termasuk Sukuk Ijarah)

Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Subsidi Listrik Pemerintah

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

u. Borrowings and Bonds Payable (Including Sukuk Ijarah)

Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3h for the accounting policy on financial liabilities.

v. Revenue and Expense Recognition

Sale of Electricity

Revenue from the sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

The Government's Electricity Subsidy

The Government's electricity subsidy is recognized as revenue on an accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Customers Connection Fees

The Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant, and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection service.

Other Revenues

Other revenues consist of telecommunication network and services, transformer rental and other administrative services. Other revenue is recognized with reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

w. Pembelian Tenaga Listrik

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PPA dan ESC dengan IPP. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumber daya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Di tahun 2015, manajemen melakukan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa sesuai dengan ISAK 8 "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" sehingga PSAK 30, "Sewa" tidak perlu diterapkan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori sewa keuangan atau sewa operasi. Oleh karena itu, penyajian kembali dilakukan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian disajikan pada Catatan 56.

Perusahaan menampilkan dampak apabila perjanjian jual beli tenaga listrik termasuk sewa sesuai dengan ISAK 8 di Catatan 57.

Untuk IPP yang perjanjiannya adalah pembelian sewa, maka Perusahaan dan entitas anak perlu melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Lihat Catatan 3l untuk kebijakan akuntansi mengenai sewa.

Biaya yang dibayarkan Perusahaan untuk membeli tenaga listrik dari perjanjian yang tidak berbentuk perjanjian sewa dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Revenue and Expense Recognition *(continued)*

Interest Income

Interest revenue is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

w. Purchase of Electricity

The Company and its subsidiaries have various PPAs and ESCs with IPPs. Under those contracts, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

In the year 2015, management reassessed the application of ISFAS 8 for power purchase agreements and management is of the opinion that power purchase agreements are not agreements that contain leases based on ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease", and hence it is not required to apply SFAS 30, "Leases" to determined whether such arrangements fall into the categories of finance lease or operating lease. As a result, a restatement was made to the consolidated financial statements at and for the year ended December 31, 2014. The impact of the restatement on the consolidated financial statements is presented in Note 56.

The Company disclosed the impact as if power purchase agreements contain leases in accordance with ISFAS 8 in Note 57.

For IPP with lease agreement, the Company and its subsidiaries have assessed whether it is a finance or an operating lease based on the contractual terms of the agreement. Please refer to Note 3l for the accounting policies for leases.

The costs paid to purchase electricity on agreements that are not lease agreements are recognized as expenditures in profit or loss account as incurred.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Pensiun dan Imbalan Kerja

Mulai 1 Januari 2015, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Dengan penerapan standar ini, terdapat beberapa perubahan terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Salah satu perubahan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Sebelumnya, Perusahaan dan entitas anak menangguhkan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial dengan metode koridor. Saat ini, Perusahaan dan entitas anak harus mencatat keuntungan dan kerugian aktuarial secara langsung pada Pendapatan Komprehensif Lainnya. Reklasifikasi jumlah yang sudah diakui di Pendapatan Komprehensif Lainnya ke Laba Rugi tidak diperkenankan.

Perusahaan menampilkan dampak dari penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) di Catatan 56.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Pension and Employee Benefits

Effectively on January 1, 2015, the Company and its subsidiaries applied SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

Upon the application of this standard, there are few changes regarding recognitions, measurements and disclosures. One of the changes that significantly affects the Company and its subsidiaries' financial statements is the recognition of actuarial gains and losses. Previously, the Company and its subsidiaries deferred the recognition of actuarial gains and losses using the corridor approach. Currently, the Company and its subsidiaries must recognize actuarial gains and losses immediately in Other Comprehensive Income. Reclassification of the amount recognized in Other Comprehensive Income to profit or loss is not allowed.

The Company disclosed the impact of the application of SFAS No. 24 (Revised 2013) in Note 56.

Post-Employment Benefit

The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Pensiun dan Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui laba rugi.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

z. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Pension and Employee Benefits *(continued)*

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged to profit or loss.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

z. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Income Tax *(continued)*

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aa. Aset Donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

cc. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular ditelaah oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan dilakukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Government Contributed Assets

Assets contributed by the Government, in their capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional payment in capital by the shareholder.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.

cc. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries, and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where sales are made.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari di-*review* secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik Di Dalam Sewa Pembiayaan

Sejumlah perjanjian dengan IPP merupakan perjanjian sewa pembiayaan yang dicatat menggunakan PSAK 30. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan-perubahan selanjutnya atas asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company has identified the following matters under which significant judgments are made:

Fair Value of Power Plants Held Under Finance Leases

A number of agreements with IPPs are finance leases arrangement, which are accounted for using SFAS 30. At the commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.

The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including, the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the subsequent measurement amount of the leased asset.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Perusahaan perlu menentukan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik (terlepas dari jumlah biaya penyambungan yang dibayarkan). Oleh karena itu, penerimaan biaya penyambungan tidak menimbulkan kewajiban terpisah bagi Perusahaan dan entitas anak untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan biaya penyambungan dari pelanggan. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value)* untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi terkait.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES *(continued)*

Critical Judgments in Applying Accounting Policies *(continued)*

Revenues from Customers' Connection Fees

The Company and its subsidiaries has considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Company needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees.

The Company and its subsidiaries considered the facts that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Company charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of connection fees paid by the customers). Therefore, the receipt of connection fees does not create a separate performance obligation for the Company and its subsidiaries to provide ongoing electricity supply to its customers.

The Company and its subsidiaries concludes that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the connection fees. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. Consequently, the Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant, and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - Bentuk legal dari kendaraan terpisah
  - Persyaratan dari perjanjian kontraktual
  - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekindaya Mamuju, PT Unelec Indonesia, dan PT Crompton Power Switchgear Indonesia. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama. Lihat Catatan 8 untuk informasi lebih lanjut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES *(continued)*

Critical Judgments in Applying Accounting Policies *(continued)*

Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries' have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries' have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries' also considers the rights and obligations arising from:*
  - *The legal form of the separate vehicle*
  - *The terms of the contractual arrangement*
  - *Other facts and circumstances (when relevant)*

This assessment often requires significant judgement, and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company and its subsidiaries have joint arrangements which are structured through joint ventures, namely PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekindaya Mamuju, PT Unelec Indonesia, and PT Crompton Power Switchgear Indonesia. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that these arrangements are joint ventures. Refer to Note 8 for more information.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang di-*review* secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 14 dan 16.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi yang Menggunakan Model Revaluasi

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES *(continued)*

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgment as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgments as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 16.

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The carrying amounts of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair Value of Property, Plant and Equipment and Investment Properties That Use Revaluation Model

As at December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The assets revaluation was performed by an independent public valuer.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the group of assets. While it is believed that the Company and its subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation Property, Plant and Equipment and Investment Properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 49.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukkan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES *(continued)*

Key Sources of Estimation Uncertainty *(continued)*

Post-employment Benefits

The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit obligations.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 49.

Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/*Subsidaries*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2015 %	2014 %	Tahun Operasi komersial/ *Year of Operation*	Jumlah aset/ *Total assets* **) 2015	2014
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	1995	226.487	53.248
PT Cogindo Daya Bersama (CDB) *)	Jakarta	*Cogeneration*, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99,99	99,99	1999	797	790
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)	Jakarta	Perdagangan batubara/*Coal trading*	60,00	60,00	1999	116	87
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	86,00	86,00	***)	221	160
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) *)	Jakarta	Pengembangan energi panas bumi dan pembangkit tenaga listrik/ *Development of geothermal energy and electricity supplies*	95,21	95,21	****)	80	82
PT Putra Indotenaga *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan Energi/ *Electricity and Energy*	99,90	99,90	***)	261	231
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	1995	195.546	41.057
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Surabaya	Jasa/*Service*	98,00	98,00	2001	680	488
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/*Service*	92,00	92,00	2013	48	30
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik	Jakarta	Jasa/*Service*	95,00	-	2015	1	-
PT Rekadaya Elektrika (RDE) *) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ *Electricity and engineering*	98,68	98,68	2004	552	482
PT Rekadaya Elektrika Consult *)	Jakarta	Supervisi dan Konsultasi/ *Supervision and consultation*	99,80	99,80	2011	70	45
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trading, construction, mining and agriculture*	72,97	72,97	***)	206	150
PT PJB Investasi	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	***)	-	-
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) dan entitas anak/*and its subsidiary*	Batam	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,99	99,99	2000	5.932	5.752
PT Pelayanan Energi Batam	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ *Construction of gas pipeline and other energy sector*	99,99	99,99	***)	9	7
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ *Telecommunication provider*	99,99	99,99	2000	2.068	2.035
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99,90	99,90	2003	521	425
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)	Tarakan	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,97	99,97	2004	279	217
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100,00	100,00	2006	52.169	46.213
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100,00	100,00	2006	39.277	35.149
PT PLN Batubara (PLN Batubara)	Jakarta	Perdagangan batubara/*Coal trading*	99,99	99,99	2009	1.328	1.398
PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	2010	91	83
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Pelayaran/*Shipping*	100,00	100,00	2011	1.243	1.388
PT PBM Adhiguna Putera	Jakarta	Pelayaran/*Shipping*	99,95	99,95	1987	136	114
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	2013	444	364
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/*Service*	90,00	90,00	2013	267	173

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*
**) Dalam miliaran Rupiah/*Stated in billions of Rupiah*
***) Dalam tahap pengembangan/*under development stage*
****) Dalam tahap eksplorasi/*under exploration stage*

6. ASET TETAP / *6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT*

	1 Januari/ *January 1, 2015*)*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih penilaian kembali/ *Increse arising on revaluation*	31 Desember/ *December 31, 2015*	
Biaya perolehan							*At cost*
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	9.274.190	49.194	-	84.747	110.161.252	119.569.383	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	59.756.532	59.305	-	1.875.598	(12.235.006)	49.456.429	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	183.666.594	731.356	-	13.684.433	374.052.068	572.134.451	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	79.439.651	86.912	-	3.960.256	3.215.010	86.701.829	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	117.243.483	2.374.366	-	8.566.445	13.262.190	141.446.484	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	9.204.289	185.380	-	459.278	-	9.848.947	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1.035.574	47.222	-	(241.673)	-	841.123	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	1.021.880	203.398	-	(401.407)	(156.817)	667.054	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4.652.495	31.401	-	219.730	(2.300.536)	2.603.090	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1.646.287	183	-	-	-	1.646.470	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	774.041	276.000	-	363.675	-	1.413.716	*Vessels and equipment*
Sub jumlah	467.715.016	4.044.717	-	28.571.082	485.998.161	986.328.976	*Sub total*
Aset sewaan							*Leased assets*
Tanah	48.388	-	-	-	-	48.388	*Land rights*
Instalasi dan mesin pembangkit	40.772.636	-	-	-	-	40.772.636	*Installation and power plant*
Sub jumlah	40.821.024	-	-	-	-	40.821.024	*Sub total*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	94.901.088	40.196.223	-	(30.112.624)	-	104.984.687	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	6.672.832	-	(264.293)	1.646.701	-	8.055.240	*Assets not used in operation*
Jumlah	610.109.960	44.240.940	(264.293)	105.159	485.998.161	1.140.189.927	*Total*
Akumulasi penyusutan							*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	15.414.049	2.316.878	-	(70.172)	(17.660.755)	-	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	68.390.323	8.978.948	-	(853.527)	(76.515.744)	-	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	23.413.707	2.509.592	-	(83.755)	(25.839.544)	-	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	38.955.832	4.361.659	-	(16.839)	(43.300.652)	-	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	6.353.068	1.107.305	-	(26.820)	-	7.433.553	*General equipment*
Kendaraan bermotor	749.812	103.446	-	(93.745)	-	759.513	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	223.390	47.074	-	(15.588)	(254.876)	-	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2.701.740	315.601	-	86.305	(3.103.646)	-	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	914.070	199.152	-	(69.454)	-	1.043.768	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	121.712	83.129	-	83.103	-	287.944	*Vessels and equipment*
Sub jumlah	157.237.703	20.022.784	-	(1.060.492)	(166.675.217)	9.524.778	*Sub total*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	6.692.866	1.404.427	-	-	-	8.097.293	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.778.017	497.835	(142.921)	782.935	-	6.915.866	*Assets not used in operation*
Jumlah	169.708.586	21.925.046	(142.921)	(277.557)	(166.675.217)	24.537.937	*Total*
Jumlah Tercatat	440.401.374					1.115.651.990	*Net Carrying Value*

*) Disajikan kembali - Catatan 56 / *As restated - Note 56 *)*

6. ASET TETAP (lanjutan) / *6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (continued)*

	1 Januari/ *January 1,* 2014*)	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2014*)	
Biaya perolehan						*At cost*
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	9.226.099	192.089	(143.998)	-	9.274.190	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	55.723.605	123.021	(304.156)	4.214.062	59.756.532	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	170.074.426	158.897	(1.156.760)	14.590.031	183.666.594	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	75.541.561	308.507	(209.494)	3.799.077	79.439.651	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	107.057.415	2.580.655	(329.421)	7.934.834	117.243.483	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	8.951.236	171.826	(421.774)	503.001	9.204.289	*General equipment*
Kendaraan bermotor	925.567	63.938	(13.983)	60.052	1.035.574	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	948.892	467.356	(394.368)	-	1.021.880	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4.049.251	38.238	(28.846)	593.852	4.652.495	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1.493.038	80	(5.502)	158.671	1.646.287	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	731.828	39.328	(1.734)	4.619	774.041	*Vessels and equipment*
Sub jumlah	434.722.918	4.143.935	(3.010.036)	31.858.199	467.715.016	*Sub total*
Aset sewaan						*Leased assets*
Tanah	48.388	-	-	-	48.388	*Land rights*
Instalasi dan mesin pembangkit	41.060.946	-	-	(288.310)	40.772.636	*Installation and power plant*
Sub jumlah	41.109.334	-	-	(288.310)	40.821.024	*Sub total*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	95.738.735	33.313.805	(504.600)	(33.646.852)	94.901.088	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	6.054.271	-	(524.733)	1.143.294	6.672.832	*Assets not used in operation*
Jumlah	577.625.258	37.457.740	(4.039.369)	(933.669)	610.109.960	*Total*
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	13.194.770	2.015.967	(83.244)	286.556	15.414.049	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	59.464.233	9.806.308	(1.035.123)	154.905	68.390.323	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	21.070.692	2.448.377	(105.362)	-	23.413.707	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	35.116.579	4.032.179	(215.832)	22.906	38.955.832	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	5.541.615	1.031.578	(248.774)	28.649	6.353.068	*General equipment*
Kendaraan bermotor	677.163	88.453	(15.804)	-	749.812	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	197.008	47.085	(20.703)	-	223.390	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2.362.448	261.966	(24.898)	102.224	2.701.740	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	719.762	199.810	(5.502)	-	914.070	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	75.655	43.599	(1.734)	4.192	121.712	*Vessels and equipment*
Sub jumlah	138.419.925	19.975.322	(1.756.976)	599.432	157.237.703	*Sub total*
Aset sewaan						*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	6.745.666	45.095	-	(97.895)	6.692.866	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.026.882	408.446	(483.474)	826.163	5.778.017	*Assets not used in operation*
Jumlah	150.192.473	20.428.863	(2.240.450)	1.327.700	169.708.586	*Total*
Jumlah Tercatat	427.432.785				440.401.374	*Net Carrying Value*

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut: / *Depreciation expense was allocated to the following:*

	2015	2014*)	
Beban usaha	21.418.640	19.911.211	*Operating expenses*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	8.571	109.206	*Construction in progress*
Beban lain-lain	497.835	408.446	*Others charges*
Jumlah	21.925.046	20.428.863	*Total*

*) Disajikan kembali - Catatan 56 / *As restated - Note 56 *)*

6. ASET TETAP (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu. HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2045, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal dengan jumlah tercatat sebesar Rp 229.544.337 juta diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dengan, PT Asuransi Jasa Indonesia pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Ramayana terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$ 17.141 juta (setara dengan Rp 236.453.639 juta) dan Rp 993.997 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan US$ 21.274 juta (setara dengan Rp 246.648.560 juta) dan Rp 989.328 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Aset sewaan PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY 361.172 juta (setara dengan Rp 41.362.961 juta) pada tanggal 31 Desember 2015 dan JPY 363.895 juta (setara dengan Rp 37.935.617 juta) pada tanggal 31 Desember 2014. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, serta kapal dan perlengkapan.

Aset sewaan - instalasi dan mesin pembangkit merupakan pembangkit tenaga listrik berdasarkan perjanjian sewa dengan IPP dalam bentuk sewa pembiayaan sesuai dengan penerapan PSAK 30.

Pada tanggal 31 Desember 2015 setelah revaluasi, jumlah tercatat bruto dari aset tetap tersebut yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp 1.764.403 juta.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date. HGB will expire from 2016 to 2045, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land rights, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company and its subsidiaries.

Building, installation and power plant, transmission equipment and vessels with net carrying value of Rp 229,544,337 million were insured with several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead underwriter, PT Tugu Kresna Pratama and PT Asuransi Ramayana insuring against fire and other possible risks with insurance coverage of US$ 17,141 million (equivalent to Rp 236,453,639 million) and Rp 993,997 million as of December 31, 2015 and US$ 21,274 million (equivalent to Rp 246,648,560 million) and Rp 989,328 million as of December 31, 2014. Leased assets PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY 361,172 million (equivalent to Rp 41,362,961 million) as of December 31, 2015 and JPY 363,895 million (equivalent to Rp 37,935,617 million) as of December 31, 2014. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not cover insurance protection for assets other than building, installation and power plant, transmission equipment, and vessels and equipment.

Leased assets - installation and power plant represent certain power plants under lease agreement with IPPs which were accounted for as finance leases in accordance with PSAK 30.

As of December 31, 2015 after revaluation, the gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp 1,764,403 million.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of property, plant and equipment as of the reporting date.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tertentu dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Pelaksanaan revaluasi aset tetap untuk PT PLN (Persero) dilaksanakan berdasarkan tender yang dimenangkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") yang selanjutnya melaksanakan penilaian. KJPP RHR adalah Penilai Publik Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan No. 2.09.0012 dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Adapun Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar

   Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

   Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

2. Pendekatan Pendapatan

   Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode arus kas terdiskonto, atau keduanya.

   Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for certain class of assets from the cost model to the revaluation model.

The revaluation of PT PLN (Persero) is conducted based on tender process where Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR") was selected as the winner. KJPP RHR is an Independent Public Valuer registered in The Ministry of Finance No. 2.09.0012 and Financial Services Authority ("OJK").

The valuation standard that has been used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, which used the following valuation approaches:

1. *Market Approach*

   This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (valuation object) are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sales transaction.

   The market approach can be applied to land rights asset class.

2. *Income Approach*

   This approach considers the income and costs related to the subject assets and estimates value through a capitalization process. Capitalization involves the conversion of income (usually net income) into an indication of value. This process uses the direct capitalization method or the discounted cash flow method or both.

   The income approach can be applied to commercial land rights or land rights with development scale.

6. ASET TETAP (lanjutan)

3. Pendekatan Biaya

Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi sebuat aset modern yang ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, material cadangan utama, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

3. Cost Approach

This approach is based on the principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would be not more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking into consideration undue time, and overtime charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

The cost approach is applied to asset classes such as buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, major spare parts, and telecommunications and data processing equipments used for electricity supply.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 untuk Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

Information on the revaluation of assets as at December 31, 2015 for Class of Revalued Assets are as follows:

	Jumlah tercatat sebelum revaluasi/ *Net carrying value before revaluation* 31 Desember/ *December 31,* 2015	**Surplus (Rugi) Revaluasi/ *Profit (loss) Revaluation***	**Nilai Wajar/ *Fair Value* 31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Nilai revaluasi				*Revalued amount*
Pemilikan langsung				*Direct acquisitions*
Tanah	9.408.131	110.161.252	119.569.383	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	61.691.435	(12.235.006)	49.456.429	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	198.082.383	374.052.068	572.134.451	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	83.486.819	3.215.010	86.701.829	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	128.184.294	13.262.190	141.446.484	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	823.871	(156.817)	667.054	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4.903.626	(2.300.536)	2.603.090	*Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply*
Sub jumlah	486.580.559	485.998.161	972.578.720	*Sub total*
Akumulasi penyusutan				*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung				*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	(17.660.755)	17.660.755	-	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	(76.515.744)	76.515.744	-	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	(25.839.544)	25.839.544	-	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	(43.300.652)	43.300.652	-	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	(254.876)	254.876	-	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	(3.103.646)	3.103.646	-	*Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply*
Sub jumlah	(166.675.217)	166.675.217	-	*Sub total*
Jumlah Tercatat	319.905.342	652.673.378	972.578.720	*Net Carrying Value*

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi Kelompok Aset yang Direvaluasi dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" adalah sebesar Rp 652.673.378 juta.

Surplus revaluasi, dikurangi dengan pajak penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai “Cadangan Revaluasi Aset” pada laba komprehensif lainnya.

In total, the increase in the carrying amounts of the Class of Revalued Assets is recorded as “Asset Revaluation Reserve” amounting to Rp 652,673,378 million.

The revaluation surplus, net of final income tax and applicable deferred income taxes, was credited to other comprehensive income and is presented in “Asset Revaluation Reserve” in other comprehensive income.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis aset non-keuangan yang dicatat pada Nilai Wajar berdasarkan Hirarki Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68. Perbedaan tingkatan Nilai Wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kutipan (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Data masukan selain dari harga kutipan yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- Data masukan untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 3).

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

The table below analyses non-financial assets recorded at Fair Value, based on Fair Value Hierarchy in SFAS 68. The different levels of Fair Value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data, either directly or indirectly (Level 3).*

	Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2015 menggunakan/ *Level fair value measurement at 31 December 2015 using*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	-	48.169.865	71.399.518	119.569.383	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	9.618.342	39.838.087	49.456.429	*Building, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	572.134.451	572.134.451	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	-	-	86.701.829	86.701.829	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	-	-	141.446.484	141.446.484	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	-	-	667.054	667.054	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	-	-	2.603.090	2.603.090	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Jumlah	-	57.788.207	914.790.513	972.578.720	*Total*

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam Nilai Wajar tingkat 1.

Nilai Wajar tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. Data masukan yang digunakan diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi
b. Tingkat hunian
c. Tingkat pertumbuhan
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi
f. Depresiasi, keusangan fungsional dan eksternal

There were no property, plant and equipment which could be classified as the level 1 Fair Value.

The level 2 Fair Value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:

a. Sales or rental price per square meter
b. Occupancy rate
c. Growth rate
d. Discount and capitalization rate
e. Replacement cost new per square meter
f. Depreciation, functional and external obsolescence

6. ASET TETAP (lanjutan)

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Nilai wajar tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan data masukan yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan data masukan yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

The level 3 Fair Value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada 31 Desember 2015/ ***Fair value at December 31, 2015***	**Teknik penilaian/** ***Valuation technique***	**Informasi yang tidak dapat diobservasi/** ***Unobservable Input***	**Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/** ***Range of unobservable inputs***	**Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/** ***Relationship of unobservable inputs to fair value***	
Tanah	**71.399.518**					***Land rights***
Tanah tapak tower	8.344.953	Pendekatan pasar dengan metode/*Market approach with Across the Fence ("ATF") method*	Kompensasi/*Compensation Right of Way ("ROW")*	10% - 20%	Semakin tingi kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the ROW compensation, the higher the fair value*	*Land rights for tower site*
Tanah gardu dan kantor	42.550.076	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	1,35 - 3,40	Semakin tingi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the KLB, the higher the fair value*	*Land rights for substation and office building*
Tanah pembangkit	20.504.489	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter Development*	1,35 - 3,40	Semakin tingi KLB maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the KLB, the higher the fair value*	*Land rights for power plant*
		Pendekatan pasar dengan metode/*Market approach with Across the Fence ("ATF") method*	Biaya pembebasan lahan/ *Soft cost*	5% - 10%	Semakin tinggi biaya pembebasan lahan maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the soft cost, the higher the fair value*	
Bangunan	**39.838.087**					***Building***
Bangunan umum	20.766.582	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fisik/ *Physical depreciation*	0% - 83%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation, the lower the fair value*	*Buildings*
Waduk dan prasarana	19.071.505	Trending/*Trending*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1,00 - 2,44	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation, the lower the fair value*	*Reservoir and infrastructure*
			Indeks/*Index*		Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	

6. ASET TETAP (lanjutan)

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (continued)

	Nilai wajar pada 31 Desember 2015/ *Fair value at December 31, 2015*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Instalasi dan mesin pembangkit	572.134.451	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1% - 23%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher the functional depreciation rate, the lower the fair value*	*Installation and power plant*
			Indeks/*Index*		Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	
Perlengkapan transmisi	86.701.829	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,54	Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index rate, the higher the fair value*	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	141.446.484	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,54	Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index rate, the higher the fair value*	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	667.054	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,17	Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index rate, the higher the fair value*	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2.603.090	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,023	Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the index rate, the higher the fair value*	*Telecomunication and data processing equipments used for electricity supply*

Perusahaan dan entitas anak juga melakukan penilaian kembali atas aset tetap untuk tujuan perpajakan.

The Company and its subsidiaries also performed revaluation for tax purposes.

Selain aset yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than assets that have applied the revaluation model.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Construction In Progress

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows:

	2015	2014	
Proyek penugasan -			*Mandatory project -*
Program percepatan			*Fast track program*
Pembangkitan	33.499.918	38.084.328	*Power plants*
Transmisi	7.511.564	8.016.732	*Transmission*
Sub jumlah	41.011.482	46.101.060	*Sub total*
Konstruksi rutin			*Regular constructions*
Pembangkitan	19.991.986	13.187.566	*Power plants*
Transmisi	39.769.816	32.481.777	*Transmission*
Distribusi	3.842.308	2.925.154	*Distribution*
Perlengkapan	369.095	205.531	*Equipment*
Sub jumlah	63.973.205	48.800.028	*Sub total*
Jumlah	104.984.687	94.901.088	*Total*

6. ASET TETAP (lanjutan)

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (lanjutan)

(i) Program percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dapat dikapitalisasi.

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTA Peusangan 88 MW, PLTU Asahan III 2x87 MW dan PLTG Kaltim 2x50 MW.

Transmisi

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa - Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Distribusi

Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan

Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2016 dan 2019.

Proyek Sarulla

Perusahaan sebelumnya telah mengambilalih hak atas Proyek Sarulla dengan membayar kompensasi dengan nilai ekuivalen Rupiah Rp 504,6 milyar, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Setelah itu Proyek Sarulla telah dialihkan kepada Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. dan OrSarulla Inc dengan kompensasi US$70 juta kepada Perusahaan. Perusahaan telah menerima uang sejumlah US$70 juta di tahun 2014.

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

Construction In Progress *(continued)*

(i) Fast track program

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Company. Construction in progress by the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalizable expenditures.

(ii) Regular constructions

Power plants

Power plants under construction consist mainly of PLTA Peusangan 88 MW, PLTU Asahan III 2x87 MW and PLTG Kaltim 2x50 MW.

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 kV in Java - Bali, T/L 150 kV outside Java - Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribution

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Equipment

Equipment under construction consist of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

Constructions in progress are expected to be completed between 2016 and 2019.

Sarulla Project

The Company previously took over rights in the Sarulla Project by paying compensation with Rupiah equivalent amount of Rp 504.6 billion, which was recorded as construction in progress. The Sarulla Project was subsequently transferred to Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. and OrSarulla Inc. with a compensation paid to the Company of US$70 million. The Company has received US$70 million in the year 2014.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*
PLTU 2 Jateng - Adipala	11.566.340	99%
PLTU 3 Jatim - Tanjung Awar-awar	4.179.862	98%
PLTU Kaltim - Teluk Balikpapan	2.949.497	94%
PLTU Riau - Tenayan	2.925.080	95%
PLTGU Gorontalo Peaker	2.066.572	83%
PLTU Kalteng - Pulang Pisau	2.033.504	93%
PLTU Lampung - Tarahan Unit 4	2.015.633	99%
PLTG Bengkanai	1.821.973	96%
PLTA Peusangan	1.811.290	54%
PLTU Kalbar 1 - Parit Baru	1.686.895	85%
Transmisi lainnya/*Various transmission line*	47.281.380	2%-98%
Pembangkitan lainnya/*Other power plants*	20.435.258	2%-98%
Lainnya/*Others*	4.211.403	2%-98%
Jumlah/*Total*	**104.984.687**	

Pada tanggal 31 Desember 2014, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*
PLTU 2 Jateng - Adipala	9.809.378	98%
PLTU Sumut - Pangkalan Susu	5.120.908	99%
PLTU 3 Jatim - Tanjung Awar-awar	3.789.812	96%
PLTU Riau - Tenayan	2.959.716	93%
PLTU Kaltim - Teluk Balikpapan	2.489.600	86%
PLTU Kalteng - Pulang Pisau	1.799.106	86%
PLTU Kalbar 1 - Parit Baru	1.570.001	82%
PLTU Parit Baru Site Bengkayang	1.061.921	48%
PLTU 2 NTB - Lombok	918.145	93%
PLTU 3 Babel - Bangka	744.871	98%
Lainnya/*Others*	64.637.630	2%-98%
Jumlah/*Total*	**94.901.088**	

Informasi mengenai persentase penyelesaian yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan estimasi kemajuan tahap *engineering, procurement and construction.* Selanjutnya, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

Construction In Progress *(continued)*

As at December 31, 2015, the estimated percentage of completion of the Company's construction in progress projects are as follows:

As at December 31, 2014, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress projects were as follows:

The information about the percentages of completion disclosed in the table above indicate the estimated progress during the engineering, procurement and construction phases. There are still a number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are certified for operations.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT *(continued)*

Construction In Progress *(continued)*

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows:

	2015	2014	
Program percepatan			*Fast track program*
Bunga pinjaman	1.336.503	1.435.210	*Interest expense*
Kerugian kurs mata uang asing	589.801	709.570	*Loss on foreign exchange*
Sub jumlah	1.926.304	2.144.780	*Sub total*
Konstruksi rutin			*Regular constructions*
Bunga pinjaman	1.028.818	796.555	*Interest expense*
Kerugian kurs mata uang asing	379.385	287.909	*Loss on foreign exchange*
Sub jumlah	1.408.203	1.084.464	*Sub total*
Jumlah	3.334.507	3.229.244	*Total*

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 8,45%.

Borrowing costs were capitalized at the weighted average rate of general borrowings of 8.45%.

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi

Kerugian dari penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp 497.835 juta tahun 2015 dan Rp 408.446 juta tahun 2014 dicatat sebagai beban usaha lain-lain (Catatan 46).

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp 9.285 juta tahun 2015 dan Rp 32.975 juta tahun 2014. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah Rp nihil, sehingga hasil penjualan aset merupakan keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi.

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Assets Not Used In Operations

Loss on written off assets not used in operations amounting to Rp 497,835 million in 2015 and Rp 408,446 million in 2014, respectively are recorded as other operating expenses (Note 46).

Assets not used in operations are comprised of property, plant and equipment to be relocated, not yet used in operations and property, plant and equipment to be repaired.

Certain assets not used in operations were sold with a selling price of Rp 9,285 million in 2015 and Rp 32,975 million in 2014. The carrying value of such assets was Rp nil, hence the proceeds from the sale of assets represented a gain on the sale of assets not used in operations.

Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

7. PROPERTI INVESTASI

Akun ini merupakan tanah milik PJB yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa hak guna bangunan berjangka waktu dari 20 sampai 33 tahun, jatuh tempo pada 2041, yang disewakan kepada atau digunakan oleh PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas dan PT Bajradaya Sentranusa. Penyewa tidak mempunyai hak opsi membeli properti pada saat akhir masa sewa.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi properti investasi dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian pada nilai wajar entitas telah dilakukan oleh KJPP Rengganis Hamid dan Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai tingkat 2 dalam hirarki nilai wajar.

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi properti investasi yang direvaluasi dicatat sebagai “Pendapatan Komprehensif Lain”. Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.000.974 juta.

Penilaian kembali dilakukan atas properti investasi dengan nilai buku pajak sebelum revaluasi sebesar Rp 233.133 juta dan menghasilkan keuntungan revaluasi sebesar Rp 767.841 juta.

7. INVESTMENT PROPERTIES

This account pertains to pieces of land rights owned by PJB located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta and Asahan - North Sumatera with Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) for periods between 20 to 33 years until 2041, which are rented to or used by PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas and PT Bajradaya Sentranusa. The lessees do not have options to purchase at the expiry of the lease period.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy of investment properties from the cost model to the revaluation model. The revaluation to determine the fair value of the entity was performed by KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan, an independent valuers registered in OJK.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

In total, the increases in the carrying amounts of investment properties were recognized in “Other Comprehensive Income”. The total fair value of the investment properties as of December 31, 2015 amounting Rp 1,000,974 million.

The revaluation of the above properties investment with fiscal book value before revaluation amounting to Rp 233,133 million resulted in a gain on revaluation amounting to Rp 767,841 million.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	Domisili/ *Domicille*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun Operasi Komersial/ *Commercial Operations*	Presentase kepemilikan efektif/ *Effective percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2015	31 Desember/ *December 31,* 2014
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investment in associates*					
PT Geo Dipa Energi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2002	8,19	33,00
PT Mitra Energi Batam	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2004	30,00	30,00
PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	49,00	49,00
PT Dalle Energy Batam	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	20,00	20,00
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	45,00	45,00
PT Tanjung Kasam Power	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2012	10,00	10,00
PT Indo Pusaka Berau	Berau	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2005	46,80	46,80
Ventura bersama/*Joint ventures*					
PT Unelec Indonesia	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ *Electrical supports*	1988	32,35	32,35
PT Rajamandala Electric Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	51,00
PT Bajradaya Sentranusa	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2010	36,61	36,61
PT Bukit Pembangkit Innovative	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2015	37,25	37,25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (“Komipo PJB”)	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49,00	49,00
PT Perta Daya Gas	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ *Transportation and storage of LNG*	2015	35,00	35,00
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ *Electricity controller and distribution*	*)	49,00	49,00
PT Rekind Daya Mamuju	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	10,00	10,00

*) Tahap pengembangan/*Development stage*

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiaries using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

Per 31 Desember 2015 dan 2014, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As at December 31, 2015 and 2014, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

	Jumlah tercatat 1 Januari 2015/ *Carrying amount January 1, 2015*)*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *(Dividend)*	Bagian atas laba (rugi) bersih entitas/ *Equity in net income (loss)*	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income*	Jumlah tercatat 31 Desember 2015/ *Carrying amount December 31, 2015*	
Entitas asosiasi							*Associates*
PT Geo Dipa Energi	-	-	-	-	-	-	*PT Geo Dipa Energi*
PT Mitra Energi Batam	101.371	-	-	562	-	101.933	*PT Mitra Energi Batam*
PT Sumber Segara Primadaya	971.814	-	(54.225)	371.096	-	1.288.685	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Dalle Energy Batam	71.955	-	-	4.105	-	76.060	*PT Dalle Energy Batam*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	33.097	-	-	49	-	33.146	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Tanjung Kasam Power	28.457	-	-	15.782	-	44.239	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Indo Pusaka Berau	98.017	-	(2.327)	5.660	-	101.350	*PT Indo Pusaka Berau*
Sub jumlah	1.304.711	-	(56.552)	397.254	-	1.645.413	*Sub total*
Ventura bersama							*Joint ventures*
PT Unelec Indonesia	130.589	-	-	(18.556)	-	112.033	*PT Unelec Indonesia*
PT Perta Daya Gas	-	-	-	-	-	-	*PT Perta Daya Gas*
PT Rajamandala Electric Power	100.515	-	-	1.832	-	102.347	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Bajradaya Sentranusa	355.977	-	(69.350)	123.210	8.586	418.423	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Bukit Pembangkit Innovative	608.681	-	-	140.144	28.392	777.217	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	50.101	-	(35.104)	46.604	-	61.601	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	22.019	16.739	-	(1.497)	-	37.261	*PT Crompton Power Switchgear Indonesia*
PT Rekind Daya Mamuju	-	20.403	-	-	-	20.403	*PT Rekind Daya Mamuju*
Sub jumlah	1.267.882	37.142	(104.454)	291.737	36.978	1.529.285	*Sub total*
Jumlah	2.572.593	37.142	(161.006)	688.991	36.978	3.174.698	*Total*

	Jumlah tercatat 1 Januari 2014/ *Carrying amount January 1, 2014*)*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *(Dividend)*	Bagian atas laba (rugi) bersih entitas/ *Equity in net income (loss)*	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income*	Jumlah tercatat 31 Desember 2014/ *Carrying amount December 31, 2014*)*	
Entitas asosiasi							*Associates*
PT Geo Dipa Energi	-	-	-	-	-	-	*PT Geo Dipa Energi*
PT Mitra Energi Batam	103.966	-	(3.030)	435	-	101.371	*PT Mitra Energi Batam*
PT Sumber Segara Primadaya	681.783	-	(30.517)	320.548	-	971.814	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Dalle Energy Batam	67.931	-	-	4.024	-	71.955	*PT Dalle Energy Batam*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	23.359	-	-	9.738	-	33.097	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Tanjung Kasam Power	34.327	547	-	(6.417)	-	28.457	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Indo Pusaka Berau	92.384	-	(2.060)	7.693	-	98.017	*PT Indo Pusaka Berau*
Sub jumlah	1.003.750	547	(35.607)	336.021	-	1.304.711	*Sub total*
Ventura bersama							*Joint ventures*
PT Unelec Indonesia	171.973	-	-	(41.384)	-	130.589	*PT Unelec Indonesia*
PT Perta Daya Gas	11.684	-	-	(11.684)	-	-	*PT Perta Daya Gas*
PT Rajamandala Electric Power	64.780	36.493	-	(758)	-	100.515	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Bajradaya Sentranusa	299.965	-	(28.129)	84.141	-	355.977	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Bukit Pembangkit Innovative	433.438	90.712	-	84.531	-	608.681	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	43.476	-	(30.327)	36.952	-	50.101	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	-	22.019	-	-	-	22.019	*PT Crompton Power Switchgear Indonesia*
Sub jumlah	1.025.316	149.224	(58.456)	151.798	-	1.267.882	*Sub total*
Jumlah	2.029.066	149.771	(94.063)	487.819	-	2.572.593	*Total*

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2015 dan 2014 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

The following table contains the summarized financial information for associates and joint ventures as at December 31, 2015 and 2014, which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi/*Associates*

	31 Desember/*December 31*, 2015					
	PT Mitra Energi Batam	PT Sumber Segara Primadaya	PT Tanjung Kasam Power	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	25.280	71.155	170.488	91.685	358.608	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	171.640	614.713	149.256	190.475	1.126.084	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	196.920	685.868	319.744	282.160	1.484.692	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	2.091	566.800	101.750	126.364	797.005	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	4.545	151.590	211.917	33.053	401.105	*Accrued expenses*
Liabilitas lancar lainnya	59.068	1.526.391	1.296	33.803	1.620.558	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	65.704	2.244.781	314.963	193.220	2.818.668	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	533.732	11.962.019	2.728.715	953.538	16.178.004	*Assets*
Liabilitas keuangan	340.552	8.449.991	1.666.436	194.313	10.651.292	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	12.082	(198)	510.060	170.649	692.593	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	352.634	8.449.793	2.176.496	364.962	11.343.885	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	312.314	1.953.313	557.000	677.516	3.500.143	*Net assets*
% kepemilikan efektif	30	49	10	20 – 46,8	10 – 49	*% of effective ownership*
Bagian atas aset bersih asosiasi	93.694	957.124	55.700	212.506	1.319.024	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	8.239	331.561	(11.461)	(1.950)	326.389	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	101.933	1.288.685	44.239	210.556	1.645.413	*Total carrying value*
Pendapatan	116.177	3.833.634	418.505	733.847	5.102.163	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(51.372)	-	(60.323)	(477.457)	(589.152)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	-	(303.261)	-	(13.729)	(316.990)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	-	1.451	-	152	1.603	*Interest income*
Beban keuangan	(37.147)	(8.430)	(71.541)	(30.003)	(147.121)	*Interest expense*
Beban operasi	(38.619)	(2.389.378)	(77.661)	(163.159)	(2.668.817)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	13.343	(253.860)	-	404	(240.113)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(509)	(122.817)	(51.159)	(17.327)	(191.812)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) periode berjalan	1.873	757.339	157.821	32.728	949.761	*Profit/(loss) for the period*
% kepemilikan efektif	30	49	10	20 – 46,8	10 - 49	*% of effective ownership*
Bagian atas laba/(rugi) asosiasi periode berjalan	562	371.096	15.782	9.814	397.254	*Share of the profit or loss for the period of associates*
Laba/(rugi) komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba/(rugi) komprehensif asosiasi	-	-	-	-	-	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	-	54.225	-	2.327	56.552	*Dividends received from associates*

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Entitas asosiasi/*Associates*

	31 Desember/*December 31*, 2014					
	PT Mitra Energi Batam	PT Sumber Segara Primadaya	PT Tanjung Kasam Power	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	9.773	442.921	90.745	4.387	547.826	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	109.100	463.543	183.543	174.764	930.950	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	118.873	906.464	274.288	179.151	1.478.776	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	2.610	844.824	92.513	113.609	1.053.556	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	3.192	166.367	132.287	17.637	319.483	*Accrued expenses*
Liabilitas lancar lainnya	104.546	1.616.617	149.775	28.428	1.899.366	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	110.348	2.627.808	374.575	159.674	3.272.405	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	603.998	8.188.047	2.399.657	920.751	12.112.453	*Assets*
Liabilitas keuangan	6.575	4.744.077	1.502.752	142.601	6.396.005	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	285.013	2	412.438	201.714	899.167	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	291.588	4.744.079	1.915.190	344.315	7.295.172	*Total current liabilities*
Aset bersih	320.935	1.722.624	384.180	595.913	3.023.652	*Net assets*
% kepemilikan efektif	30	49	10	20 – 46,8	10 - 49	*% of effective ownership*
Bagian atas aset bersih asosiasi	96.281	844.086	38.418	175.643	1.154.428	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	5.090	127.728	(9.961)	27.426	150.283	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	101.371	971.814	28.457	203.069	1.304.711	*Total carrying value*
Pendapatan	88.935	3.348.389	390.286	609.058	4.436.668	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(41.499)		(247.440)	(445.984)	(734.923)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	-	(304.427)	-	-	(304.427)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	-	2.963	-	56	3.019	*Interest income*
Beban keuangan	(11.775)	(18.862)	(73.221)	(30.900)	(134.758)	*Interest expense*
Beban operasi	(30.680)	(2.188.339)	(84.413)	(76.911)	(2.380.343)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(699)	(21.287)	-	(2.630)	(24.616)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(2.831)	(164.258)	(49.384)	(16.132)	(232.605)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) periode berjalan	1.451	654.179	(64.172)	36.557	628.015	*Profit/(loss) for the period*
% kepemilikan efektif	30	49	10	20 - 46,8	10 - 49	*% of effective ownership*
Bagian atas laba/(rugi) asosiasi periode berjalan	435	320.548	(6.417)	21.455	336.021	*Share of the profit or loss for the period of associates*
Laba/(rugi) komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba/(rugi) komprehensif asosiasi	-	-	-	-	-	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	3.030	30.517	-	2.060	35.607	*Dividends received from associates*

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama/*Joint ventures*

	31 Desember/*December 31*, 2015					
	PT Unelec Indonesia	PT Bajradaya Sentranusa	PT Bukit Pembangkit Innovative	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	1.389	482.118	185.970	333.919	1.003.396	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	1.076.117	207.894	105.796	287.674	1.677.481	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	1.077.506	690.012	291.766	621.593	2.680.877	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	96.950	58.787	-	33.506	189.243	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	146.987	18.352	384.072	50.903	600.314	*Accrued expenses*
Liabilitas lancar lainnya	627.625	295.947	364	19.190	943.126	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	871.562	373.086	384.436	103.599	1.732.683	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	241.149	5.710.383	5.242.750	1.557.354	12.751.636	*Assets*
Liabilitas keuangan	-	3.006.284	2.476.395	1.387.184	6.869.863	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	158.063	760.041	315.951	1.421	1.235.476	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	158.063	3.766.325	2.792.346	1.388.605	8.105.339	*Total current liabilities*
Aset bersih	289.030	2.260.984	2.357.734	686.743	5.594.491	*Net assets*
% kepemilikan efektif	32,35	36,61	37,25	10 - 51	10 - 51	*% of effective ownership*
Bagian atas aset bersih ventura bersama	93.501	827.746	878.256	242.930	2.042.433	*Share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	18.532	(409.323)	(101.039)	(21.318)	(513.148)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	112.033	418.423	777.217	221.612	1.529.285	*Total carrying value*
Pendapatan	253.260	620.739	1.206.877	350.839	2.431.715	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(289.929)	(16.070)	(393.306)	(124.358)	(823.663)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	-	(335)	(816)	(57.866)	(59.017)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	-	200	6.781	12.466	19.447	*Interest income*
Beban keuangan	(9.537)	(240.059)	(114.163)	(45.872)	(409.631)	*Interest expense*
Beban operasi	(26.632)	(74.006)	(56.166)	(59.541)	(216.345)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	15.478	163.664	(174.934)	(4.374)	(166)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	-	(117.552)	(98.047)	2.775	(212.824)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) periode berjalan	(57.360)	336.581	376.226	74.069	729.516	*Profit/(loss) for the period*
% kepemilikan efektif	32,35	36,61	37,25	10 - 51	10 - 51	*% of effective ownership*
Bagian atas laba/(rugi) ventura bersama periode berjalan	(18.556)	123.210	140.144	46.939	291.737	*Share of the profit or loss for the period of joint ventures*
Laba/(rugi) komprehensif lainnya	-	23.455	76.220	-	99.675	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba/(rugi) komprehensif ventura bersama	-	8.586	28.392	-	36.978	*Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures*
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	-	69.350	-	35.104	104.454	*Dividends received from joint ventures*

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama/*Joint ventures*

	31 Desember/*December 31*, 2014					
	PT Unelec Indonesia	PT Bajradaya Sentranusa	PT Bukit Pembangkit Innovative	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	4.043	491.873	135.711	485.519	1.117.146	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	959.279	158.720	5.583	161.982	1.285.564	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	963.322	650.593	141.294	647.501	2.402.710	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	226.349	53.013	-	70.953	350.315	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	99.049	18.693	92.712	16.870	227.324	*Accrued expenses*
Liabilitas lancar lainnya	330.480	277.986	1.426	13.076	622.968	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	655.878	349.692	94.138	100.899	1.200.607	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	229.296	5.198.585	3.998.968	975.218	10.402.067	*Assets*
Liabilitas keuangan	-	2.856.261	1.954.131	1.011.267	5.821.659	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	133.064	776.943	193.840	1.421	1.105.268	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	133.064	3.633.204	2.147.971	1.012.688	6.926.927	*Total current liabilities*
Aset bersih	403.676	1.866.282	1.898.153	509.132	4.677.243	*Net assets*
% kepemilikan efektif	32,35	36,61	37,25	35 - 51	32,35 - 51	*% of effective ownership*
Bagian atas aset bersih ventura bersama	130.589	683.246	707.062	173.220	1.694.117	*Share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	-	(327.269)	(98.381)	(585)	(426.235)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	130.589	355.977	608.681	172.635	1.267.882	*Total carrying value*
Pendapatan	273.778	788.653	1.034.549	560.778	2.657.758	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(261.786)	52.412	(573.421)	(406.797)	(1.189.592)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	-	(601)	(644)	(33.655)	(34.900)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	-	2.034	9.203	7.599	18.836	*Interest income*
Beban keuangan	-	(511.277)	(85.746)	(24.155)	(621.178)	*Interest expense*
Beban operasi	(128.885)	(54.964)	(35.543)	(90.746)	(310.138)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(13.712)	(274)	(17.699)	(8.771)	(40.456)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	2.679	(46.152)	(103.770)	734	(146.509)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) periode berjalan	(127.926)	229.831	226.929	4.987	333.821	*Profit/(loss) for the period*
% kepemilikan efektif	32,35	36,61	37,25	35 - 51	32,35 - 51	*% of effective ownership*
Bagian atas laba/(rugi) ventura bersama periode berjalan	(41.384)	84.141	84.531	24.510	151.798	*Share of the profit or loss for the period of joint ventures*
Laba/(rugi) komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba/(rugi) komprehensif ventura bersama	-	-	-	-	-	*Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures*
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	-	(28.129)	-	(30.327)	(58.456)	*Dividends received from joint ventures*

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah tercatat investasi pada PT Geo Dipa Energi adalah Rp nihil.

Pada tahun 2015 dan 2014, Perusahaan tidak mengakui bagian rugi bersih PT Geo Dipa Energi masing-masing sebesar Rp 83.257 juta dan Rp 99.991 juta.

PT Mitra Energi Batam (“MEB”)

Pada tahun 2015, PLN Batam menerima dividen tahun buku 2013 sebesar Rp 3.030 juta.

PT Sumber Segara Primadaya (“S2P”)

Pada tahun 2015, PJB memperoleh dividen tahun buku 2014 dari S2P sebesar US$ 3.920.000 setara dengan Rp 54.225 juta.

PT Bajradaya Sentranusa (“BDSN”)

Pada tahun 2015, PJB memperoleh dividen tunai untuk saldo laba tahun 2014 dari BDSN sebesar US$ 5.308.450 (ekuivalen Rp 69.350 juta).

PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”)

Pada tahun 2014, PJB dan NII meningkatkan investasi saham BPI masing-masing sebesar Rp 65.696 juta dan Rp 25.016 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (“KPJB”)

Pada tahun 2015, PJB memperoleh dividen tahun buku 2014 dari KPJB sebesar Rp 35.104 juta.

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES *(continued)*

The investments in the companies above are held primarily for long-term growth potential, since these companies are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi was established to continue the development of the Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

As of December 31, 2015 and 2014, the carrying amount of investment in PT Geo Dipa Energi is Rp nil.

In 2015 and 2014, the Company did not recognize net loss of PT Geo Dipa Energi amounting to Rp 83,257 million and Rp 99,991 million, respectively.

PT Mitra Energi Batam (“MEB”)

In 2015, PLN Batam received the 2013 dividends in the amount of Rp 3,030 million.

PT Sumber Segara Primadaya (“S2P”)

In 2015, PJB received the 2014 dividends from S2P amounting to US$ 3,920,000 equivalent to Rp 54,225 million.

PT Bajradaya Sentranusa (“BDSN”)

In 2015, PJB received a cash dividend from BDSN for 2014 retained earnings amounting to US$ 5,308,450 (equivalent to Rp 69,350 million).

PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”)

In 2014, PJB and NII increased their investment in shares of BPI by Rp 65,696 million and Rp 25,016 million, respectively without changing their percentages of ownership.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (“KPJB”)

In 2015, PJB received the 2014 dividends from KPJB amounting to Rp 35,104 million.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Indo Pusaka Berau ("IPB")

Pada tahun 2015 dan 2014, IP memperoleh dividen tahun buku 2014 dan 2013 dari IPB masing-masing sebesar Rp 2.327 juta dan Rp 2.060 juta.

PT Tanjung Kasam Power ("TJK")

Walaupun PLN Batam hanya memiliki 10% kepemilikan TJK, PLN Batam mempunyai pengaruh yang signifikan atas TJK. Pengaruh yang signifikan dinilai berdasarkan keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK hingga tahun 2015.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")

Pada tahun 2014, IP melakukan penambahan investasi sebesar Rp 36.493 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan.

PT Crompton Power Switchgear Indonesia

Pada tahun 2014, PLN Enjiniring dan CG International Holding Singapore PTE. LTD. mendirikan PT Crompton Power Switchgear Indonesia untuk membuat peralatan yang digunakan untuk pendistribusian listrik. PLN Enjiniring melakukan penyertaan saham sebesar US$ 1,2 juta dan US$ 1,9 juta atau setara dengan Rp 16.739 juta dan Rp 22.019 juta pada tahun 2015 dan 2014.

PT Rekind Daya Mamuju

Walaupun PT Rekadaya Elektrika hanya memiliki 10% kepemilikan di PT Rekind Daya Mamuju, PT Rekadaya Elektrika mempunyai pengendalian bersama atas PT Rekind Daya Mamuju berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas pengambilan keputusan yang penting.

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES *(continued)*

PT Indo Pusaka Berau ("IPB")

In 2015 and 2014, IP received the 2014 and 2013 dividends from IPB amounting to Rp 2,327 million and Rp 2,060 million, respectively.

PT Tanjung Kasam Power ("TJK")

Although PLN Batam only has 10% ownership in TJK, PLN Batam has significant influence over TJK. The significant influence was indicated by PLN Batam's representation in TJK's Directors until 2015.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")

In 2014, IP has increased investment in REP by Rp 36,493 million without changing its percentage of ownership.

PT Crompton Power Switchgear Indonesia

In 2014, PLN Enjiniring and CG International Holding Singapore PTE. LTD. established PT Crompton Power Switchgear Indonesia, to manufacture equipment used for electricity distribution. PLN Enjiniring made an investment amounting to US$ 1.2 million and US$ 1.9 million or equivalent to Rp 16,739 million and Rp 22,019 million, in 2015 and 2014, respectively.

PT Rekind Daya Mamuju

Although PT Rekadaya Elektrika only has 10% ownership in PT Rekind Daya Mamuju, PT Rekadaya Elektrika has joined arrangement in PT Rekind Daya Mamuju as there must be unanimous consent on important decisions.

9. PIUTANG PIHAK BERELASI / ***9. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES***

	2015	2014	
PT Perta Daya Gas	293.369	249.072	*PT Perta Daya Gas*
PT Tanjung Kasam Power	23.935	23.935	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	22.329	27.441	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Mitra Energi Batam	683	3.712	*PT Mitra Energi Batam*
PT Geo Dipa Energi	-	76.500	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energy Batam	-	960	*PT Dalle Energy Batam*
Jumlah	340.316	381.620	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	71.669	282.791	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**268.647**	**98.829**	***Long-term portion***

9. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Perta Daya Gas ("PDG")

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$ 18,837 juta kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* (CNG) di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 28 Nopember 2014, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG. Jangka waktu pinjaman berubah menjadi enam tahun dan akan jatuh tempo pada 1 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) terhitung sejak tanggal *dropping* dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan akan dibayarkan secara penuh tanggal 1 Desember 2015. Pinjaman pokok akan ditagihkan setiap enam bulan sekali melalui angsuran sebanyak 15 kali dari tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo terhutang atas pokok dan bunga pinjaman ini sebesar US$ 21 juta atau setara dengan Rp 289.685 juta (2014: US$ 18,2 juta atau setara dengan Rp 226.302 juta). Piutang lainnya sebesar Rp 3.684 juta (2014: Rp 22.770 juta) merupakan piutang yang diantara lain atas piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada KPJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan KPJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian pengembangan operasi dan pemeliharaan dengan PJB. KPJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk enam bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Jangka waktu pinjaman tujuh tahun sejak tanggal 29 Desember 2010. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012.

PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energi Batam

Piutang dari PT Tanjung Kasam Power dan PT Dalle Energy Batam merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik. Piutang dari PT Dalle Energy Batam telah dilunasi pada tahun 2015.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

PT Geo Dipa Energi

Piutang dari PT Geo Dipa Energi merupakan pinjaman yang diberikan untuk membantu PT Geo Dipa Energi membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi.

9. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES *(continued)*

PT Perta Daya Gas ("PDG")

On June 12, 2013, IP granted a long-term loan of US$ 18.837 million to PDG for the financing of the Compressed Natural Gas (CNG) project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 28, 2014, IP made an amendment to the loan given to PDG. The tenor of the loan was revised to six years and it will mature on December 1, 2021. This loan bears interest at 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) is effective from the cash dropping until May 30, 2014 and will be paid in full on December 1, 2015. The principal shall be collected every six months in 15 installments from December 1, 2015 until December 1, 2021. On December 31, 2015, the outstanding principal and accrued interest of the loan amounted to US$ 21 million, equivalent to Rp 289,685 million (2014: US$ 18.2 million, equivalent to Rp 226,302 million). Other receivables from PDG amounting to Rp 3,684 million (2014: Rp 22,770 million) represent, among other things, interest receivables and cost of relocation of employees.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

On December 29, 2010, PJB agreed to provide loans to KPJB, in the form of a shareholder loan with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for KPJB in order to comply with the contractual obligations stipulated in the Expansion Operation and Maintenance Agreement with PJB, which requires KPJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for six months operation and maintenance of power plant. The term of the loan is seven years starting from December 29, 2010. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment was on December 29, 2012.

PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energi Batam

The receivable balance from PT Tanjung Kasam Power and PT Dalle Energy Batam represents receivables on penalty of power purchase contracts. Receivable from PT Dalle Energy Batam has been paid in 2015.

The Company's and its subsidiaries' managements consider these receivables from related parties to be collectible.

PT Geo Dipa Energi

The receivable balance from PT Geo Dipa Energi represents a loan given to assist PT Geo Dipa Energi to construct a geothermal power plant.

10. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA / *10. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS*

	2015	2014	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi			*Lease installments and operation guarantee*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura			*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
JPY	8.160.752	5.472.504	*JPY*
US$	613.115	508.333	*US$*
Jaminan pembelian gas			*Guarantee deposit for gas purchases*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Bank Mandiri* - pihak berelasi			*Bank Mandiri* - related party*
Rupiah	14.054	6.733	*Rupiah*
Rekening bank - Bank Central Asia			*Cash in bank - Bank Central Asia*
Rupiah	7.880	5.502	*Rupiah*
Jaminan bank garansi			*Bank guarantee*
Rekening bank			*Cash in banks*
Bank Rakyat Indonesia** - pihak berelasi			*Bank Rakyat Indonesia** - related party*
Rupiah	-	450	*Rupiah*
Bank Mandiri - pihak berelasi			*Bank Mandiri - related party*
Rupiah	291	-	*Rupiah*
Bank Negara Indonesia*** - pihak berelasi			*Bank Negara Indonesia***- related party*
Rupiah	777	-	*Rupiah*
Bank Woori Saudara			*Bank Woori Saudara*
Rupiah	108	-	*Rupiah*
Jaminan *letter of credit*			*Letter of credit guarantee*
Bank Negara Indonesia - pihak berelasi			*Bank Negara Indonesia - related party*
US$	-	506	*US$*
Jumlah	**8.796.977**	**5.994.028**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	0,15% - 2,00%	0,40% - 2,00%	*Rupiah*
JPY	0,02% - 0,11%	0,05% - 0,19%	*JPY*
US$	0,51% - 1,03%	0,40% - 0,51%	*US$*

* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Mandiri/*Hereafter PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is referred to as Bank Mandiri*
** PT BRI (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Rakyat Indonesia/*Hereafter PT BRI (Persero) Tbk is referred to as Bank Rakyat Indonesia*
*** PT BNI (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Negara Indonesia/*Hereafter PT BNI (Persero) Tbk is referred to as Bank Negara Indonesia*

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY 71.258 juta dan US$ 44,4 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan sebesar JPY 52.495 juta dan US$ 40,9 juta pada tanggal 31 Desember 2014 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* (“FLA”).

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY 71,258 million and US$ 44.4 million as of December 31, 2015 and amounting to JPY 52,495 million and US$ 40.9 million as of December 31, 2014 to fulfill the requirement of the Financial Lease Agreement (“FLA”).

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in bank and time deposits in foreign currencies are as follows:

	2015		2014		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	**Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)***	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	
US$	44.444.701	613.115	40.903.457	508.839	*US$*
JPY	71.257.878.838	8.160.752	52.494.647.420	5.472.504	*JPY*
Jumlah		**8.773.867**		**5.981.343**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

11. ASET TIDAK LANCAR LAIN / *11. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	2015	2014	
Beban ditangguhkan	-	40.634	*Deferred charges*
Biaya dibayar dimuka			*Prepaid expenses*
Pembelian gas	895.908	589.145	*Gas purchased*
Lain-lain	541.702	200.139	*Others*
Jumlah	**1.437.610**	**789.284**	***Total***
Uang muka			*Advances*
Pengembangan proyek	1.406.756	1.867.827	*Project development*
Pembelian batubara	848.825	849.302	*Purchase of coal*
Jumlah	**2.255.581**	**2.717.129**	***Total***
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah	50.404	53.127	*Legal costs to renew land rights*
Piranti lunak	759.565	788.610	*Software*
Jumlah	**809.969**	**841.737**	***Total***
Investasi saham tidak terdaftar di bursa	1.687	20.654	*Investment in non-listed shares*
Jumlah	**4.504.847**	**4.409.438**	***Total***

Amortisasi aset takberwujud

Beban amortisasi aset takberwujud di tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 213.194 juta dan Rp 140.938 juta.

Amortization of intangible assets

Amortization of intangible assets for 2015 and 2014 amounted to Rp 213,194 million and Rp 140,938 million, respectively.

12. KAS DAN SETARA KAS / *12. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2015	2014	
Kas	12.737	9.573	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	8.222.873	6.798.423	*Rupiah*
US$	684.829	1.172.673	*US$*
JPY	755	2.514	*JPY*
EUR	72.381	282.805	*EUR*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	3.747.226	2.975.548	*Rupiah*
US$	356.308	713.118	*US$*
EUR	89.005	171.781	*EUR*
JPY	1.057	3.547	*JPY*
Bank Negara Indonesia			*Bank Negara Indonesia*
Rupiah	3.315.716	3.997.858	*Rupiah*
US$	316.790	448.599	*US$*
JPY	2.192	135.566	*JPY*
CHF	6.511	5.873	*CHF*
EUR	108.266	339.810	*EUR*
Bank Tabungan Negara			*Bank Tabungan Negara*
Rupiah	2.898	29.360	*Rupiah*
Bank DKI			*Bank DKI*
Rupiah	905.042	898.540	*Rupiah*
US$	62.992	38.842	*US$*
JPY	871	2.272	*JPY*
Jumlah pihak berelasi	**17.895.712**	**18.017.129**	***Total related parties***

12. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *12. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2015	2014	
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
Rupiah	2.054.778	3.250.243	*Rupiah*
US$	117.179	406.643	*US$*
JPY	69.025	46.182	*JPY*
Bank Maybank Indonesia (dahulu Bank Internasional Indonesia)			*Bank Maybank Indonesia (formerly Bank Internasional Indonesia)*
Rupiah	1.434	22.441	*Rupiah*
US$	634	47.312	*US$*
EUR	-	2.600	*EUR*
Bank Danamon			*Bank Danamon*
Rupiah	77.993	77.586	*Rupiah*
US$	-	2.593	*US$*
Bank Central Asia			*Bank Central Asia*
Rupiah	407.122	575.717	*Rupiah*
US$	49.166	53.286	*US$*
Deutsche Bank			*Deutsche Bank*
US$	858.246	-	*US$*
EUR	106	-	*EUR*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	73.771	151.929	*Rupiah*
US$	5.704	633.669	*US$*
EUR	13.896	6.683	*EUR*
Jumlah pihak ketiga	**3.729.054**	**5.276.884**	***Total third parties***
Jumlah kas dan bank	**21.637.503**	**23.303.586**	***Total cash on hand and in banks***
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	651.986	1.092.593	*Rupiah*
Bank Negara Indonesia			*Bank Negara Indonesia*
Rupiah	360.000	631.562	*Rupiah*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	237.553	511.772	*Rupiah*
Jumlah pihak berelasi	**1.249.539**	**2.235.927**	***Total related parties***
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
Rupiah	557.500	1.452.547	*Rupiah*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	150.112	4.722	*Rupiah*
US$	1.685	114.746	*US$*
Jumlah pihak ketiga	**709.297**	**1.572.015**	***Total third parties***
Jumlah deposito berjangka	**1.958.836**	**3.807.942**	***Total time deposits***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**23.596.339**	**27.111.528**	***Total Cash and Cash Equivalents***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	4,50% - 9,50%	6,79% - 8,80%	*Rupiah*
US$	0,73% - 0,83%	2,25%	*US$*

12. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

12. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	2015		2014		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	177.856.702	2.453.533	291.919.659	3.631.481	*US$*
JPY	645.274.365	73.900	1.823.340.554	190.081	*JPY*
EUR	18.823.038	283.654	53.106.807	803.679	*EUR*
Lain-lain **)	472.008	6.511	472.085	5.873	*Others **)*
Jumlah		2.817.598		4.631.114	*Total*

*) Dalam jumlah penuh
**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Cash and cash equivalents in other currencies are presented in US$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date*

13. INVESTASI JANGKA PENDEK

13. SHORT-TERM INVESTMENTS

	2015	2014	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	50.000	84.100	*Rupiah*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	66.150	9.790	*Rupiah*
Jumlah pihak berelasi	116.150	93.890	*Total related parties*
Investasi lain-lain			*Other investments*
Rupiah	3.909	6.806	*Rupiah*
Jumlah investasi jangka pendek	**120.059**	**100.696**	***Total short-term investments***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	6,5% - 7,25%	6,79% - 10,07%	*Rupiah*

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

14. PIUTANG USAHA / *14. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE*

a. Berdasarkan langganan / *a. By Debtor*

	2015	2014	
Pihak berelasi			*Related parties*
Badan Usaha Milik Negara	571.894	584.802	*State-Owned Enterprises*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.806)	(2.543)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang usaha pihak berelasi	569.088	582.259	*Total of related parties accounts receivable*
Pihak ketiga			*Third parties*
Umum	18.564.360	17.977.478	*Public*
TNI dan Polri	430.670	455.732	*Indonesian Armed Forces*
Institusi Pemerintah lainnya	1.129.927	1.074.450	*Other Government Institutions*
Sub jumlah	20.124.957	19.507.660	*Sub total*
Provisi kerugian penurunan nilai	(859.818)	(595.052)	*Provision for impairment losses*
Jumlah piutang usaha pihak ketiga	19.265.139	18.912.608	*Total of third parties account receivable*
Bersih	**19.834.227**	**19.494.867**	***Net***

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya / *b. By age category of accounts receivable that are not impaired*

	2015	2014	
Belum jatuh tempo	17.462.474	16.786.155	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo			*Past due*
1 s/d 90 hari	1.553.524	2.290.877	*1 to 90 days*
91 s/d 360 hari	740.299	473.326	*91 to 360 days*
Lebih dari 360 hari	940.554	542.104	*More than 360 days*
Jumlah	**20.696.851**	**20.092.462**	***Total***
Mutasi provisi kerugian penurunan nilai			*Changes in provision for impairment losses*
Saldo awal tahun	(597.595)	(465.418)	*Balance at beginning of year*
Penambahan	(272.667)	(223.768)	*Additions*
Penghapusan	7.638	91.591	*Write-off*
Saldo akhir tahun	**(862.624)**	**(597.595)**	***Balance at end of year***

Piutang usaha Perusahaan, PLN Batam dan PLN Tarakan dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp 17.462.474 juta. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena Perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.

The Company, PLN Batam and PLN Tarakan's accounts receivable are secured by the customers' security deposits in case of default (Note 34).

Provision for impairment losses were made collectively for all accounts receivable which are past due.

Management believes that the allowances made for impairment losses are adequate. At December 31, 2015, the Company has Rp 17,462,474 million accounts receivable balance that is neither past due nor impaired. The Company believes there is no heightened risk of poor credit quality of accounts receivable because it has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Company's good historical collection rate of accounts receivable across the years.

15. PIUTANG SUBSIDI LISTRIK

15. RECEIVABLES ON ELECTRICITY SUBSIDY

	2015	2014	
Tahun anggaran			*Budget years*
2014	12.280.861	19.280.861	*2014*
2015	5.220.148	-	*2015*
Jumlah	**17.501.009**	**19.280.861**	***Total***

Dalam tahun 2015, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun anggaran 2014 sebesar Rp 7.000.000 juta.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Risiko kredit pada piutang subsidi listrik dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan Pemerintah Indonesia.

In 2015, the Company collected receivables on electricity subsidy for budget year 2014 amounting to Rp 7,000,000 million.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The credit risk on receivables on electricity subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

16. PIUTANG LAIN-LAIN

16. OTHER RECEIVABLES

	2015	2014	
Karyawan	354.756	396.728	*Employees*
Uang jaminan langganan	-	41.111	*Customers' security deposits*
Lain-lain	439.009	750.494	*Others*
Jumlah	793.765	1.188.333	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	481.681	866.948	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**312.084**	**321.385**	***Long-term portion***

Uang Jaminan Langganan

Uang jaminan langganan merupakan piutang dari pelanggan yang melakukan penyambungan baru dan perubahan daya sejak 1 Januari 2011 hingga 30 Juni 2013. Pelayanan yang dilakukan tidak dikenakan uang jaminan langganan pada saat melakukan penyambungan baru. Pada tahun 2013, manajemen menerbitkan peraturan baru yang mensyaratkan uang jaminan langganan sehubungan dengan penyambungan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan mengakui jumlah piutang sebesar nihil dan Rp 41.111 juta dari penerapan peraturan baru tersebut.

Customers' Security Deposits

Customers security deposits represent receivables from customers for new electricity connections and electricity power upgrades from January 1, 2011 through June 30, 2013. These services were not subject to security deposits at the time of connection. In 2013, the management issued a new regulation requiring customers deposits for those connections. As of December 31, 2015 and 2014, the Company recognized a total outstanding receivables of nil and Rp 41,111 million, respectively, as a result of the implementation of the new regulation.

Karyawan

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

Employees

Account receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

17. PERSEDIAAN / *17. INVENTORIES*

	2015	2014	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	7.165.500	7.895.486	*Coal, fuel and lubricants*
Persediaan umum	2.602.706	2.232.145	*General supplies*
Switchgear dan jaringan	1.020.159	841.845	*Switchgear and network*
Alat pengukur dan pengendali	539.591	485.422	*Meter recording device and control equipment*
Transformator	126.404	189.428	*Transformers*
Kabel	77.056	78.145	*Wire*
Jumlah	11.531.416	11.722.471	*Total*
Provisi penurunan nilai	(115.553)	(114.611)	*Provision for impairment*
Bersih	**11.415.863**	**11.607.860**	***Net***
Mutasi penyisihan penurunan nilai			*Changes in provision for impairment*
Saldo awal tahun	(114.611)	(138.746)	*Balance at beginning of year*
Pemulihan (penambahan)	(942)	24.135	*Recovery (additions)*
Saldo akhir tahun	**(115.553)**	**(114.611)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

18. PAJAK DIBAYAR DIMUKA / *18. PREPAID TAXES*

	2015	2014	
Pajak penghasilan badan lebih bayar			*Overpayment of corporate income tax*
Perusahaan			*The Company*
2015	2.323.797	-	*2015*
2014	147.993	147.993	*2014*
2013	-	1.998.693	*2013*
2012	-	130.775	*2012*
Entitas anak			*Subsidiaries*
2015	126.990	-	*2015*
2014	-	84.704	*2014*
2013	-	79.484	*2013*
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	2.109.238	2.164.451	*Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment*
Bea materai	19.156	-	*Stamp duty*
Pajak pertambahan nilai	538.271	283.363	*Value added tax*
Jumlah	**5.265.445**	**4.889.463**	***Total***

Lihat Catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 47 for income tax expense information and tax assessment letters.

19. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *19. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	2015	2014	
Biaya dibayar dimuka			*Prepaid expenses*
Premi asuransi	182.638	156.746	*Insurance*
Sewa	155.437	150.024	*Rent*
Gaji dan tunjangan	5.825	10.358	*Salaries and allowances*
Lain-lain	-	214.234	*Others*
Sub jumlah	343.900	531.362	*Sub total*
Uang muka			*Advances*
Pembelian barang	183.514	832.183	*Purchases*
Lain-lain	531.087	425.179	*Others*
Sub jumlah	714.601	1.257.362	*Sub total*
Jumlah	**1.058.501**	**1.788.724**	***Total***

20. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

Modal saham

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 63.000.000 juta yang terbagi atas 63.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain:

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp 28.781.355 juta, yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.781.354 juta, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 46.107.154 juta, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2001.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp 90.226 juta. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

20. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS

Capital stock

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

The Company has authorized capital of Rp 63,000,000 million consisting of 63,000,000 shares, with par value of Rp 1 million per share.

Based on The Extraordinary Stockholders' General Meeting dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved among other items as follow:

- *Converting the Company's liability to the Government of Rp 28,781,355 million, which arose from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.*

- *Increasing the subscribed and paid-up capital by Rp 28,781,354 million, resulting in the Company's total subscribed and paid-up capital of Rp 46,107,154 million consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp 1 million per share.*

On August 1, 2001, the Government issued Government Regulation No. 61 year 2001 in relation to the increase in Government equity participation in the Company.

On March 4, 2011, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the increase in the Government's equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp 90,226 million. The increase in the Government's equity participation in the Company is through the transfer of the Government's share in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

20. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 90.226 juta atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. RIS-53/D2.MBU/05/2015, terdapat saldo laba tahun lalu yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp 7.763.965 juta.

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp 26.872.493 juta dan Rp 19.108.528 juta atau 58% dan 41% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

ii. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya

Berdasarkan hasil dari penyajian kembali yang dilakukan karena penerapan PSAK 24 secara retrospektif dan pendapat manajemen bahwa kontrak pembelian tenaga listrik tidak mengandung sewa berdasarkan ISAK 8, saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 84.650.585 juta dan Rp 80.807.692 juta.

Dividen per lembar saham

Pada tahun 2015, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk tahun 2014 sejumlah Rp 3.962.441 juta atau Rp 85.772 (nilai penuh) per lembar saham.

20. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS *(continued)*

Capital stock (continued)

Based on the decision of the Company's shareholders at the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated on May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the new issuance of the Company's shares as stocks to the Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp 90,226 million, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia is for the planned transfer of 21,674 shares in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna belonging to the Government in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares from the Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.

Retained earnings

Retained earnings consist of:

i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid up capital.

Based on the Minutes of Shareholder's Meeting No. RIS-53/D2.MBU/05/2015, there is an addition of appropriated retained earning amounting to Rp 7,763,965 million.

The balance of the appropriated retained earnings as at December 31, 2015 and 2014 is Rp 26,872,493 million and Rp 19,108,528 million or 58% and 41% of the Company's subscribed and paid up capital.

ii. Unappropriated retained earnings

Based on the result of restatement made due to the retrospective application of SFAS 24 and management's opinion that power purchase agreements do not contain leases based on ISFAS 8, the balances of the unappropriated retained earnings as at December 31, 2015 and 2014 are Rp 84,650,585 million and Rp 80,807,692 million, respectively.

Dividends per share

In 2015, the Company paid a total cash dividend for 2014 of Rp 3,962,441 million or Rp 85,772 (full amount) per share.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PROSES PENERBITAN SAHAM

A. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

	2015	2014	
Bantuan proyek	16.706.712	16.706.712	*Project aid*
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	31.722.223	34.512.089	*List of Project Funds*
Bantuan pemerintah daerah dan lainnya	1.278.092	1.278.092	*Regional government participation and others*
Jumlah	**49.707.027**	**52.496.893**	***Total***

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

Bantuan pemerintah daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Jumlah aset yang didonasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dicatat sebagai penambahan aset tetap dan tambahan modal disetor sepanjang tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 1.678.761 juta dan Rp 2.595.489 juta.

B. PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PROSES PENERBITAN SAHAM

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2015 dan No. 125 tahun 2015 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Pemerintah) sebesar masing-masing Rp 4.468.627 juta dan Rp 5.000.000 juta. Sejumlah Rp 4.468.627 juta direklasifikasi dari tambahan modal disetor. Perusahaan telah menerima Rp 5.000.000 juta di tahun 2015.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND STOCK SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN ISSUANCE PROCESS

A. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined, with the following details:

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

The List of Project Fund represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Department of Mining and Energy.

Regional government participation represents land rights and electricity equipment donated by the regional government to the Company.

The total amount of assets contributed by the Government of the Republic of Indonesia that have been recognized as additions to property, plant and equipment and additional-paid-in capital in 2015 and 2014 amounted to Rp 1,678,761 million and Rp 2,595,489 million, respectively.

B. STOCK SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN ISSUANCE PROCESS

The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 42 year 2015 and No. 125 year 2015 regarding additional capital stock (Government's equity participation) amounting to Rp 4,468,627 million and Rp 5,000,000 million, respectively. An amount of Rp 4,468,627 million was reclassified from additional paid-in capital. The Company has received Rp 5,000,000 million in the year 2015.

22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

22. DEFERRED REVENUE

This account represents connection fees received from customers for which the connection services have not been completed by the Company and its subsidiaries. Details of the deferred revenue balance are as follows:

	2015	2014	
Saldo awal tahun	1.306.976	990.913	*Balance at beginning of year*
Penerimaan tahun berjalan	6.368.062	5.939.976	*Additions during the year*
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(6.141.335)	(5.623.913)	*Recognized as revenue during the year*
Saldo akhir tahun	**1.533.703**	**1.306.976**	***Balance at end of year***

23. PENERUSAN PINJAMAN

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

23. TWO-STEP LOANS

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are re-loaned to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2015					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period* Tahun/*Year*
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	66.540.782	917.930	124.825	793.105	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.684.626	257.754	-	257.754	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	87.699.511	1.209.815	-	1.209.815	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	28.781.237	397.037	-	397.037	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
IBRD - 8280 ID - 1256	3.534.667	48.761	-	48.761	LIBOR + 0,5%	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB - 1032 INO - 540	-	85.751	85.751	-	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB - 1092 INO - 580	-	29.863	29.863	-	ADB + 3,75%	1991 - 2016
US$						
ADB - 1982 INO - 1170	129.715.100	1.789.420	82.561	1.706.859	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	88.105.116	1.215.410	56.077	1.159.333	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	39.022.105	538.310	7.285	531.025	ADB + 0,6% - 0,4% + 0,5%	2010 - 2035
ADB - 3015 INO - 1255	24.547.135	338.628	-	338.628	ADB + 0,60% + 0,5%	2014 - 2033
ADB - 3083 INO - 1257	207.285	2.859	-	2.859	LIBOR + 0,60% + 0,5%	2014 - 2033
ADB - 8276 INO - 1258	22.881	316	-	316	LIBOR + 1,40% + 0,5%	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	5.409.742	81.522	16.304	65.218	0,75% - 2% dan/*and* KFW + 0,35%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	2.999.936	45.208	45.208	-	KFW + 0,35% dan/*and* OECD + 0,35%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	5.888.476	88.737	35.495	53.242	4,86% + 0,35%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	3.297.693	45.492	30.328	15.164	4,75% + 0,35%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
Yen						
JBIC IP 512 - 1163	47.546.784.000	5.445.257	302.514	5.142.743	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	14.511.132.000	1.661.876	92.326	1.569.550	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	51.132.479.348	5.855.906	323.116	5.532.790	1,3% + 0,35%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	521.721.000	59.750	2.096	57.654	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	517.347	18.158	499.189	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	876.004.726	100.324	28.664	71.660	2,01% + 1,99% + 0,35%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	15.541.780.000	1.779.910	60.336	1.719.574	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	655.189.398	75.035	2.544	72.491	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9.677.262.639	1.108.281	-	1.108.281	1,75%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	1.051.576.175	120.431	-	120.431	1,2%	2006 - 2047
JBIC IP 537 - 1220	284.232.810	32.552	-	32.552	1,95%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	10.875.225.119	1.245.476	-	1.245.476	1,20%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	8.747.820.071	1.001.837	-	1.001.837	1,95%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	1.412.791.775	161.799	-	161.799	0,012%	2013 - 2039
JBIC IP 556 - 1249	995.491.632	114.008	-	114.008	1,4% + 0,45%	2013 - 2040
JBIC IP 560 - 1253	138.158.006	15.822	-	15.822	0,3% + 0,45% dan/*and* 0,01% + 0,45%	2013 - 2053
JBIC IP - 1243	2.590.537.998	296.679	53.140	243.539	1,82% + 1,04% + 0,45%	2012 - 2022
JBIC IP - 1188	373.053.863	42.723	14.241	28.482	2,01% + 2,01% dan/*and* 4,02% + 0,35%	2005 - 2018
JBIC IP - 1192	4.631.047.835	530.367	212.147	318.220	1,96% + 2,51% dan/*and* 4,47% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	4.530.437.524	518.845	120.872	397.973	4,41%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	1.379.665.104	158.005	54.241	103.764	3,9%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	654.447.547	74.950	18.662	56.288	3,91%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	2.050.441.100	234.825	60.210	174.615	3,74%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	3.614.286.318	413.923	83.569	330.354	3,98%	2008 - 2020
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank - 798	-	74.682	14.936	59.746	SUN seri dengan jangka waktu 20 tahun/ *SUN series with tenor 20 years*	1995 - 2020
Midland Bank - 818	-	6.173	1.372	4.801	SUN seri dengan jangka waktu 20 tahun/ *SUN series with tenor 20 years*	1995 - 2020
Banque Paribas						
GBP						
Banque Paribas - 1063	7.084.795	144.892	20.699	124.193	3,34% + 0,35%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	10.473.374	157.829	39.240	118.589	7,89% + 0,35%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	4.339.034	65.388	26.155	39.233	4,76% + 0,35%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	2.013.031	30.336	10.112	20.224	5,32% + 0,35%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	23.142.769	348.753	77.502	271.251	4,81%	2006 - 2020
Kerajaan Belgia/*Kingdom of Belgium*						
EUR						
Kerajaan Belgia - 1185	2.033.259	30.640	1.702	28.938	0,35%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia -1186	468.952	7.067	4.711	2.356	4,82% + 0,35%	2005 - 2017
Efic Australia - 1071 AUD	9.376.548	94.367	14.518	79.849	3% + 0,5%	1997 - 2022
China Exim Bank						
US$						
China Exim Bank 1181	55.724.819	768.724	256.241	512.483	China Exim Bank 3% + 0,35%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248	44.212.212	609.907	-	609.907	3% + 0,35%	2013 - 2033
Magyar Kulkereskedelmi Bank RT - (MKB - Hungaria) 1180 - US$	1.567.760	21.627	8.651	12.976	4,81% + 0,35%	2005 - 2018
Agence Francaise De Developpement (AFD)						
US$						
AFD 101901F - 1237	29.121.875	401.736	68.975	332.761	AFD + 0,47% + 0,45%	2010 - 2025
AFD 102401B - 1254	21.001.907	289.721	-	289.721	AFD + 0,7% + 0,45%	2013 - 2028
		31.710.583	**2.505.347**	**29.205.236**		

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

23. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan) / *23. TWO-STEP LOANS (continued)*

	31 Desember/*December 31*, 2014					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period* Tahun/*Year*
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 3845 IND - 812	7.845.042	97.592	97.592	-	IBRD + 0,5%	1995 - 2015
IBRD - 3978 IND - 893	13.352.281	166.102	166.102	-	IBRD + 0,5%	1996 - 2016
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	75.431.470	938.367	110.600	827.767	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.675.969	232.329	-	232.329	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	58.013.178	721.684	-	721.684	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	4.090.084	50.881	-	50.881	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
IBRD - 8280 ID - 1256	-	-	-	-	LIBOR + Var Spread + 0,5%	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB - 1032 INO - 540	-	163.530	77.779	85.751	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB - 1092 INO - 580	-	59.725	29.862	29.863	ADB + 3,75%	1991 - 2016
US$						
ADB - 1397 INO - 878	13.796.135	171.624	171.624	-	ADB + 0,5%	1995 - 2015
ADB - 1982 INO - 1170	135.135.356	1.681.084	67.428	1.613.656	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	91.786.663	1.141.826	45.798	1.096.028	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	25.304.046	314.782	-	314.782	ADB + 0,6% - 0,4% + 0,5%	2010 - 2035
ADB - 3015 INO - 1255	18.186.123	226.235	-	226.235	ADB + 0,60% + 0,5%	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	6.491.647	98.239	16.373	81.866	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	5.999.845	90.798	45.399	45.399	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	8.243.831	124.756	35.645	89.111	4,86% + 0,5%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	5.496.154	68.372	27.349	41.023	4,75% + 0,5%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
Yen						
JBIC IP 512 - 1163	50.188.272.000	5.232.067	275.372	4.956.695	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	15.317.306.000	1.596.811	84.043	1.512.768	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	53.896.397.151	5.618.635	288.135	5.330.500	1,3% + 0,5%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	540.027.000	56.297	1.908	54.389	0,75% + 0,5%	2005 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	470.929	-	470.929	0,75% + 0,5%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	1.126.291.790	117.415	26.092	91.322	2,01% + 1,99% + 0,5%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	16.068.683.783	1.675.141	54.922	1.620.219	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	677.399.208	70.618	2.315	68.303	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9.620.205.639	1.002.895	-	1.002.895	1,80%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	998.253.477	104.067	-	104.067	1,25%	2006 - 2047
JBIC IP 537 - 1220	260.681.092	27.176	-	27.176	2%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	8.992.547.059	937.462	-	937.462	1,25%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	3.652.714.350	380.791	-	380.791	2%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	1.140.925.306	118.940	-	118.940	0,012%	2010 - 2039
JBIC IP - 1188	497.405.153	51.854	12.963	38.891	2,01% + 2,01% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC IP - 1192	6.483.466.965	675.894	193.113	482.781	1,96% + 2,51% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	5.585.863.524	582.320	110.027	472.293	3,96% + 0,5%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	1.853.289.104	193.203	49.375	143.828	3,45% + 0,5%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	817.403.547	85.213	16.988	68.225	3,96%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	2.576.183.100	268.564	54.808	213.756	3,79%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	4.343.992.318	452.856	76.071	376.785	3,53% + 0,5%	2008 - 2020
JBIC IP - 1243	1.643.426.200	171.326	36.279	135.047	1,82% + 1,04% + 0,5%	2012 - 2022
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank - 798	-	89.619	14.937	74.682	SBI + 1%	1995 - 2020
Midland Bank - 818	-	7.545	1.372	6.173	SBI + 1%	1995 - 2020
Banque Paribas						
GBP						
Banque Paribas - 1063	8.096.930	156.840	19.605	137.235	3,34% + 0,5%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	14.353.745	217.219	58.723	158.496	7,89% + 0,5%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	6.074.622	91.929	26.265	65.664	4,76% + 0,5%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	2.684.030	40.618	10.155	30.464	5,32% + 0,5%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	28.285.485	428.052	77.828	350.224	4,46% + 0,5%	2006 - 2020
Kerajaan Belgia/*Kingdom of Belgium*						
EUR						
Kerajaan Belgia - 1185	2.146.209	32.479	3.419	29.060	0,50%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia -1186	781.583	11.828	4.731	7.097	4,82% + 0,5%	2005 - 2017
Efic Australia - 1071 AUD	10.819.093	110.552	14.741	95.811	4%	1997 - 2022
China Exim Bank						
US$						
China Exim Bank 1181	74.299.758	924.289	231.072	693.217	3% + 0,5%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248	15.741.837	195.828	-	195.828	3% + 0,5%	2013 - 2033
MKB Hungaria 1180 - US$	2.194.864	27.304	7.801	19.503	4,81% + 0,5%	2005 - 2018
Agence Francaise De Developpement (AFD)						
US$						
AFD 101901F - 1237	24.157.672	300.521	-	300.521	AFD + 0,47% + 0,5%	2010 - 2025
AFD 102401B - 1254	18.059.547	224.661	-	224.661	LIBOR + 0,89% + 0,5%	2013 - 2028
		29.097.684	**2.644.611**	**26.453.073**		

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

23. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan)

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

***23. TWO-STEP LOANS** (continued)*

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the two-step loans.

Details of the two-step loans in foreign currencies are as follows:

	2015		2014		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	641.786.711	8.853.447	601.566.179	7.483.483	*US$*
JPY	188.308.922.095	21.565.928	190.798.089.873	19.890.472	*JPY*
EUR	56.768.573	855.480	75.060.997	1.135.918	*EUR*
Lain-lain **)	17.343.893	239.259	21.494.548	267.392	*Others **)*
Jumlah		**31.514.114**		**28.777.265**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date*

24. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN PEMERINTAH NON BANK

24. GOVERNMENT AND NON BANK GOVERNMENT FINANCIAL INSTITUTION LOANS

	2015	2014	
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	1.294.602	1.515.015	*Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001*
PT Sarana Multi Infrastruktur	7.193.884	-	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
Pusat Investasi Pemerintah	-	7.150.711	*Government Investment Center*
Jumlah	8.488.486	8.665.726	*Total*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	293.793	293.793	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**8.194.693**	**8.371.933**	***Long-term portion***

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001

Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001

	2015	2014	
Pokok pinjaman	1.468.963	1.762.756	*Principal*
Perbedaan nilai wajar	(174.361)	(247.741)	*Fair value difference*
Jumlah	**1.294.602**	**1.515.015**	***Total***

Pada tanggal 20 Juni 2001, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp 5.288.268 juta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 146.896 juta sampai dengan 30 Juli 2021.

On June 20, 2001, the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans amounting to Rp 5,288,268 million as stated in the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001. The loan is unsecured, has a period of 20 years and bears interest at 4% per annum. The loan will be paid in semi-annual installments of Rp 146,896 million until July 30, 2021.

24. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN PEMERINTAH NON BANK (lanjutan)

24. GOVERNMENT AND NON BANK GOVERNMENT FINANCIAL INSTITUTION LOANS *(continued)*

Pusat Investasi Pemerintah

Government Investment Center

	2015	2014	
Pokok pinjaman	-	7.500.000	*Principal*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	-	(33.542)	*Unamortized transaction cost*
Perbedaan nilai wajar	-	(315.747)	*Fair value difference*
Jumlah	**-**	**7.150.711**	***Total***

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 7.500.000 juta, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the Government Investment Center under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp 7,500,000 million, with an annual interest rate of 5.25% and a term of 15 years.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the installation of transmission and distribution equipment and also other capital expenditures.

PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur

	2015	2014	
Pokok pinjaman	7.500.000	-	*Principal*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(32.477)	-	*Unamortized transaction cost*
Perbedaan nilai wajar	(273.639)	-	*Fair value difference*
Jumlah	**7.193.884**	**-**	***Total***

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggung jawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") has signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibility in the Company's investment agreement.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 : 1. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company is required to maintain a ratio of EBITDA to interest expense at a minimum of 1.5 : 1. The group has complied with the covenants in the borrowing agreement.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Government and non bank Government Financial Institution Loans by installment schedules, at a nominal amount, are as follows:

	2015	2014	
Dibayarkan:			*Payable to:*
Dalam satu tahun	293.793	293.793	*Within one year*
Pada tahun kedua	1.043.793	293.793	*In the second year*
Pada tahun ketiga	1.043.793	1.043.793	*In the third year*
Pada tahun keempat	1.043.793	1.043.793	*In the fourth year*
Setelah lima tahun	5.543.791	6.587.584	*After five years*
Jumlah	**8.968.963**	**9.262.756**	***Total***

25. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini merupakan utang kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4 x 660 MW Tanjung Jati B Unit A, B, C dan D.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan FLA, Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

25. LEASE LIABILITIES

This account represents amounts payable to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C and D 4 x 660 MW power plants.

In relation to the Finance Lease Agreement, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. To fulfill the requirements of FLA, the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2015 and 2014 is as follows:

Berdasarkan jatuh tempo / ***By due date***

	2015	2014*)	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	5.843.507	5.319.213	*No later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	18.434.464	19.028.664	*Later than one year and no later than five years*
Lebih dari lima tahun	12.138.817	14.120.719	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	36.416.788	38.468.596	*Total minimum lease payments*
Dikurangi bunga	(11.414.565)	(12.835.054)	*Less interest*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	25.002.223	25.633.542	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi bagian lancar	3.445.604	2.874.581	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**21.556.619**	**22.758.961**	***Long-term portion***

Tingkat suku bunga liabilitas sewa pembiayaan adalah tetap sejak tanggal kontrak, yang berkisar antara 7,6% sampai dengan 11,0% per tahun.

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 3.751.902 juta dan Rp 3.380.839 juta.

The interest rates underlying these finance lease liabilities are fixed at respective contract dates ranging from 7.6% to 11.0% per annum.

Interest expense and financial charges related to finance leases in 2015 and 2014 amounted to Rp 3,751,902 million and Rp 3,380,839 million, respectively.

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

26. UTANG BANK / *26. BANK LOANS*

	2015	2014	
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Negara Indonesia	5.071.199	3.985.102	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI	3.513.394	2.154.570	*Bank DKI*
Bank Rakyat Indonesia	3.250.011	4.105.099	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	2.107.554	2.753.910	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**13.942.158**	**12.998.681**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
The Export-Import Bank of China	15.998.937	15.603.080	*The Export-Import Bank of China*
Bank of China Limited	11.446.352	11.980.540	*Bank of China Limited*
China Development Bank	10.320.351	10.492.729	*China Development Bank*
Bank Mega	2.224.463	3.000.601	*Bank Mega*
Bank Bukopin	1.845.283	2.154.535	*Bank Bukopin*
Bank Central Asia	963.855	1.261.476	*Bank Central Asia*
Jumlah pihak ketiga	**42.799.241**	**44.492.961**	***Total third parties***
Sub jumlah	**56.741.399**	**57.491.642**	***Sub total***
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Rakyat Indonesia	13.999.808	8.928.696	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia	6.500.000	1.112.884	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri	5.250.000	6.125.000	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**25.749.808**	**16.166.580**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank Central Asia	7.000.000	7.000.000	*Bank Central Asia*
Standard Chartered Bank	1.377.702	702.813	*Standard Chartered Bank*
Jumlah pihak ketiga	**8.377.702**	**7.702.813**	***Total third parties***
Sub jumlah	**34.127.510**	**23.869.393**	***Sub total***
Jumlah	**90.868.909**	**81.361.035**	***Total***
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1.287.581)	(1.433.188)	*Unamortized transaction cost*
Jumlah bersih	**89.581.328**	**79.927.847**	***Total net***

26. UTANG BANK (lanjutan) / *26. BANK LOANS (continued)*

	2015	2014	
Jumlah bersih (lanjutan)	**89.581.328**	**79.927.847**	***Total net** (continued)*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			*Less current maturities within one year*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia	2.068.708	857.402	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	1.521.356	1.521.356	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia	996.810	996.810	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI	676.000	676.000	*Bank DKI*
Jumlah pihak berelasi	5.262.874	4.051.568	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
The Export-Import Bank of China	1.795.655	1.248.524	*The Export-Import Bank of China*
Bank of China Limited	1.839.142	1.658.494	*Bank of China Limited*
China Development Bank	1.315.274	1.186.083	*China Development Bank*
Bank Mega	776.138	776.138	*Bank Mega*
Bank Bukopin	309.253	309.253	*Bank Bukopin*
Bank Central Asia	297.621	297.621	*Bank Central Asia*
Standard Chartered Bank	156.501	-	*Standard Chartered Bank*
Jumlah pihak ketiga	6.489.584	5.476.113	*Total third parties*
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	11.752.458	9.527.681	*Total current portion*
Bagian jangka panjang	**77.828.870**	**70.400.166**	***Long-term portion***

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2015 and 2014, details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2015		2014		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	**Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)***	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	
US$	2.737.632.476	37.765.640	3.060.799.804	38.076.349	*US$*
EUR	91.422.114	1.377.702	46.441.613	702.813	*EUR*
Jumlah		**39.143.342**		**38.779.162**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

26. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman terkait program percepatan

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

26. BANK LOANS (continued)

Loans related to fast track program

The Company obtained credit facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, which superseded PP No. 86 year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

As of December 31, 2015, details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$*)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2015 Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2014 Rp*)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi asuransi/ *Insurance Premium* US$*)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	592	-	734.816	644.390	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,785%	55	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	331	-	312.493	285.755	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,84%	32	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	391.614	391.614	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 0,825%	-	23 Juli 2018/ *July 23, 2018*
4	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	304.901	278.812	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,84%	27	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
5	China Development Bank and Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ *Central Java*	262	-	359.425	304.892	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,25%	-	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*
6	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Sumatera Barat/*West Sumatera* PLTU 2 Kalimantan Barat/*West Kalimantan* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/*North Maluku* PLTU Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi* PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 2 Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa tenggara* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	-	4.732.000	676.000	676.000	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	24 April 2019/ *April 24, 2019*
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	-	2.074.739	193.903	270.769	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	9.548.037	2.973.152	2.852.232		114	

*) Dalam jutaan/*In million*

26. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman terkait program percepatan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

26. BANK LOANS (continued)

***Loans related to fast track program** (continued)*

As of December 31, 2015, details of such loan facilities are as follows (continued):

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$*)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2015 Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2014 Rp*)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi asuransi/ *Insurance Premium* US$*)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	9.548.037	2.973.152	2.852.232		114	
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ *Central Java*	-	1.911.480	273.069	273.069	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,11%	-	23 Maret 2018/ *March 23, 2018*
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/ *West Java*	-	1.874.315	257.663	257.663	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	178.512	178.512	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 0,71%	-	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara/*North Sulawesi*, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara*, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	-	1.498.513	195.418	195.418	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	-	1.272.913	164.422	164.422	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,10%	-	23 Februari 2018/ *February 23, 2018*
13	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara/*North Sumatera*, Medan	-	1.240.661	115.154	115.154	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.077.578	151.086	151.086	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,12%	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
15	Pinjaman sindikasi dikordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	-	1.151.005	164.429	164.429	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
16	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/*East Java*	-	1.045.924	130.741	130.741	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 0,71%	-	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	-	735.387	122.303	122.303	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
18	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	-	600.636	85.600	85.600	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* +1,10%	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	23.563.061	4.811.549	4.690.629		114	

*) Dalam jutaan/*In million*

26. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman terkait program percepatan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

26. BANK LOANS (continued)

***Loans related to fast track program** (continued)*

As of December 31, 2015, details of such loan facilities are as follows (continued):

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$*)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2015 Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2014 Rp*)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi asuransi/ *Insurance Premium* US$*)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	23.563.061	4.811.549	4.690.629		114	
19	The Export-Import Bank of China/ PLTU NAD	124	-	139.247	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,8%	12	14 Januari 2025/ *January 14, 2025*
20	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482	-	310.789	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,8%	44	12 Pebruari 2025/ *February 12, 2025*
21	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	455	-	574.835	514.897	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,3%	46	4 Mei 2022/ *May 4, 2022*
22	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	-	1.155.352	165.050	165.050	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
23	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	-	326.037	146.240	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,8%	30	2 Juli 2025/ *July 2, 2025*
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatera Utara/*North Sumatera*	-	3.941.772	346.543	508.969	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	34	14 Oktober 2019/ *October 14, 2019*
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ Transmisi/*Transmission*	-	2.613.012	373.287	373.287	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
26	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ Transmisi/*Transmission*	-	327.195	46.742	46.742	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
27	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	-	763.421	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,85%	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
28	China Development Bank/ PLTU Sumbar	138	-	167.551	147.743	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,85%	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
29	Bank of China Limited/ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	-	483.295	428.013	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,30%	-	14 Desember 2022/ *December 14, 2022*
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	-	1.930.063	275.723	275.723	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,50%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU Riau dan/*and* PLTU Kalbar	-	1.080.598	99.793	140.727	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,50%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	-	1.067.684	150.292	152.526	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,05%	-	27 Desember 2020/ *December 27, 2020*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	3.958	35.678.737	9.034.154	7.590.546		280	

*) Dalam jutaan/*In million*

26. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman terkait program percepatan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

26. BANK LOANS *(continued)*

Loans related to fast track program *(continued)*

As of December 31, 2015, details of such loan facilities are as follows (continued):

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$*)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2015 Rp*)	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2014 Rp*)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi asuransi/ *Insurance Premium* US$*)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	3.958	35.678.737	9.034.154	7.590.546		280	
33	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Balikpapan Kalimantan Timur	-	2.449.963	-	-	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,20%	-	16 Desember 2025/ *December 16, 2025*
34	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	-	2.225.000	-	-	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	-	12 Nopember 2025/ *November 12, 2025*
	Jumlah/*Total*	**3.958**	**40.353.700**	**9.034.154**	**7.590.546**		**280**	

*) Dalam jutaan/*In million*

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp 7.000.000 juta, dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulan dari kreditur sindikasi + 3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 5.250.000 juta dan Rp 6.125.000 juta. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 875.000 juta untuk masing-masing tahun.

Bank Rakyat Indonesia

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 15.000.000 juta, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan + 1,65% dan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Terdapat sejumlah perubahan atas perjanjian awal kredit modal kerja sejak tahun 2011. Pada tanggal 20 Juni 2013, fasilitas kredit diubah menjadi Rp 13.000.000 juta dan tanggal jatuh tempo diubah menjadi 21 Juni 2014. Pada tanggal 21 Juli 2014, tingkat suku bunga pinjaman diubah menjadi tingkat suku bunga JIBOR tiga bulanan + 2,1% dan jatuh tempo fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 21 Juni 2015. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit dubah menjadi Rp 9.000.000 juta dengan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi + 2,02% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juli 2016. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 50.527.002 juta dan Rp 28.123.417 juta.

Loans not related to fast track program

Bank Mandiri

On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment loan facility coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp 7,000,000 million, with annual interest weighted average time deposit in Rupiah of three months of syndicated creditors + 3.42% and maturity on October 23, 2021. As of December 31, 2015 and 2014, the balance outstanding amounted to Rp 5,250,000 million and Rp 6,125,000 million, respectively. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp 875,000 million for each year.

Bank Rakyat Indonesia

Working Capital Loan 2011

On June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 15,000,000 million, with annual interest based on three months JIBOR + 1.65% and maturity on June 21, 2012. There have been a number of amendments to the original working capital loan facility since 2011. On June 20, 2013, the credit facility was changed to Rp 13,000,000 million and the maturity date was amended to June 21, 2014. On July 21, 2014, the interest rate of the facility was changed to three months JIBOR + 2.1% and the maturity date was extended to June 21, 2015. On July 8, 2015, the credit facility was changed to Rp 9,000,000 million with annual interest based on average time deposit in Rupiah three months of syndicated creditors + 2.02% and maturity date was extended to July 21, 2016. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp 50,527,002 million and Rp 28,123,417 million, respectively.

26. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)

Bank Rakyat Indonesia (lanjutan)

Kredit Modal Kerja 2011 (lanjutan)

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia untuk tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut:

26. BANK LOAN *(continued)*

Loans not related to fast track program *(continued)*

Bank Rakyat Indonesia (continued)

Working Capital Loan 2011 (continued)

Cash flows of withdrawal and payment of the Bank Rakyat Indonesia loan in 2015 and 2014 are as follows:

	2015	2014	
Penarikan	28.123.417	50.527.002	*Withdrawal*
Pembayaran	(28.123.417)	(50.527.002)	*Payment*
Bersih	-	-	***Net***

Pinjaman Perusahaan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 8.500.000 juta dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulan + 3,2% yang terutang setiap tiga bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 Nopember 2022. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp 8.500 juta. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Corporate Loan 2012

On December 21, 2012, the Company obtained investment credit facility coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 8,500,000 million, with annual interest rate of the average time deposit three months + 3.2%, which is due every three months. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. The balance as of December 31, 2015 and 2014, the balance outstanding amounted to Rp 8,500 million, respectively. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2014

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 2.000.000 juta dengan tingkat bunga pertahun menggunakan rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan Bank Rakyat Indonesia + 2,75% dan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp 2.000.000 juta dan Rp 428.696 juta. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Corporate Loan 2014

On December 17, 2014, the Company obtained a credit facility from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 2,000,000 million, with the annual interest rate based on Bank Rakyat Indonesia's average three months time deposit + 2.75% and maturity on December 17, 2024. As of December 31, 2015 and 2014 the balance outstanding amounted to Rp 2,000,000 million and Rp 428,696 million, respectively. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2015

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 12.000.000 juta dengan tingkat suku bunga pertahun menggunakan suku bunga BI + 2,3% pada tanggal tiga hari sebelum jangka waktu bunga. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp 3.499.807 juta dan Rp nihil. Jumlah pembayaran kembali di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Corporate Loan 2015

On December 17, 2015, the Company obtained a credit facility coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 12,000,000 million, with the annual interest rate based on Bank Indonesia's rate + 2.3% on three days before interest period. The maturity date of the principal is on December 17, 2025. As of December 31, 2015 and 2014 the balance outstanding amounted to Rp 3,499,807 million and Rp nil. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

26. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)

Bank Negara Indonesia

Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp 6.500.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Negara Indonesia, dengan tingkat suku bunga menggunakan rata - rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulan + 3 % per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 6.500.000 juta dan Rp 1.112.884 juta. Jumlah pembayaran di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Bank Central Asia

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Central Asia sebesar Rp 7.000.000 juta, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan + 2,4% yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 7.000.000 juta dan Rp 7.000.000 juta. Jumlah pembayaran di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Standard Chartered Bank

Fasilitas Arun

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Arun sebesar EUR 90.000.000 dengan tingkat suku sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakir pada tanggal 11 Desember 2025. Hingga pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing sebesar Rp 569.924 juta dan Rp nihil. Jumlah pembayaran di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Fasilitas Bangkanai

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR 70.850.000 dengan tingkat suku bunga yang digunakan untuk pinjaman tersebut sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2025. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 807.778 juta dan Rp 702.813 juta. Jumlah pembayaran di tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

***26. BANK LOANS** (continued)*

***Loans not related to fast track program** (continued)*

Bank Negara Indonesia

On December 18, 2014, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp 6,500,000 million coordinated by Bank Negara Indonesia, with annual interest rate based on three months weighted average time deposit + 3 % per annum. This credit facility will mature on December 18, 2024. As of December 31, 2015 and 2014 the balance outstanding amounted to Rp 6,500,000 million and Rp 1,112,884 million, respectively. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

Bank Central Asia

On December 23, 2013, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Central Asia amounting to Rp 7,000,000 million, with annual interest rate based on three months JIBOR + 2.4% and maturity on December 23, 2023. As of December 31, 2015 and 2014 the balance outstanding of this facility amounted to Rp 7,000,000 million and Rp 7,000,000 million, respectively. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

Standard Chartered Bank

Arun Facility

On December 11, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Arun Solar and Steam Power Plant amounting to EUR 90,000,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on December 11, 2025. As of December 31, 2015 and 2014, the balance outstanding of this facility amounted to Rp 569,924 million and Rp nil. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

Bangkanai Facility

On December 23, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Bangkanai Solar and Steam Power Plant amounting to EUR 70,850,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on December 23, 2025. As of December 31, 2015 and 2014 the balance outstanding of this facility amounted to Rp 807,778 million and Rp 702,813 million, respectively. Principal repayment in 2014 and 2015 amounted to Rp nil and Rp nil, respectively.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH / *27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH*

	2015	2014	
Obligasi Rupiah			*Rupiah Bonds*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	1.244.000	1.244.000	*Sustainable Bonds I PLN II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	429.000	429.000	*Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	879.000	879.000	*Sustainable Bonds I PLN I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	121.000	*Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1.855.000	2.500.000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340.000	500.000	*Sukuk Ijarah PLN V Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	2.703.000	2.703.000	*PLN XI Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	297.000	297.000	*Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	2.700.000	2.700.000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	300.000	*Sukuk Ijarah PLN II Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	2.200.100	2.200.100	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	200.000	200.000	*Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006*
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$			*Global Medium Term Notes - US$*
Penerbitan tahun 2012	13.795.000	12.440.000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	13.795.000	12.440.000	*Issued in 2011*
Obligasi Terjamin - US$			*Guaranteed Notes - US$*
Penerbitan tahun 2009	27.590.000	24.880.000	*Issued in 2009*
Penerbitan tahun 2007	13.795.000	12.440.000	*Issued in 2007*
Penerbitan tahun 2006	7.587.250	6.842.000	*Issued in 2006*
Sub jumlah	89.830.350	83.115.100	*Sub total*
Biaya emisi belum diamortisasi	(664.662)	(637.544)	*Unamortized debt issuance cost*
Jumlah	**89.165.688**	**82.477.556**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			*Presented in consolidated statements of financial position as:*
Liabilitas jangka pendek	9.122.350	805.000	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	80.043.338	81.672.556	*Non-current liabilites*
Jumlah	**89.165.688**	**82.477.556**	***Total***

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Obligasi Rupiah

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Rupiah Bonds

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	Pokok/ *Principal*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				*Sustainable Bonds I PLN II Year 2013*
Seri A	593.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	9,00%	*Series A*
Seri B	651.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	9,60%	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				*Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013*
Seri A	321.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	-	*Series A*
Seri B	108.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	-	*Series B*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				*Sustainable Bonds I PLN I Year 2013*
Seri A	182.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	8,00%	*Series A*
Seri B	697.000	5 Juli 2023/*July 5, 2023*	8,25%	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	-	*Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010				*PLN XII Bonds Year 2010*
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	10,40%	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010				*Sukuk Ijarah PLN V Year 2010*
Seri B	340.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	-	*Series B*
Obligasi PLN XI Tahun 2010				*PLN XI Bonds Year 2010*
Seri A	920.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	11,95%	*Series A*
Seri B	1.783.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	12,55%	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010				*Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010*
Seri A	130.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	-	*Series A*
Seri B	167.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	-	*Series B*
Obligasi PLN IX Tahun 2007				*PLN IX Bonds Year 2007*
Seri A	1.500.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	10,40%	*Series A*
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022/*July 10, 2022*	10,90%	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	-	*Sukuk Ijarah PLN II Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006				*PLN VIII Bonds Year 2006*
Seri A	1.335.100	21 Juni 2016/*June 21, 2016*	13,60%	*Series A*
Seri B	865.000	21 Juni 2021/*June 21, 2021*	13,75%	*Series B*
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	200.000	21 Juni 2016/*June 21, 2016*	-	*Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006*
Jumlah	**13.268.100**			***Total***

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.244.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sustainable Bonds I PLN II Year 2013

On December 10, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value of Rp 1,244,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp 429.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 28.890 juta per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp 10.368 juta per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, with a nominal value of Rp 429,000 million consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 28,890 million for Series A Bonds and Rp 10,368 million for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Obligasi Rupiah (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 879.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp 121.000 juta dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 9.680 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi PLN XII tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A telah dibayar kembali di tahun 2015.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 15.520 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 35.360 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A telah dibayar kembali di tahun 2015.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Rupiah Bonds *(continued)*

Sustainable Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value of Rp 879,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the bonds.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013 with a nominal value of Rp 121,000 million with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 9,680 million is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

PLN XII Bonds Year 2010

On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,500,000 million consisting of Series A and and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A bonds has been repaid in the year 2015.

Sukuk Ijarah PLN V Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN V Year 2010 with a nominal value of Rp 500,000 million, consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 15,520 million for Series A bonds and Rp 35,360 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A bonds has been repaid in the year 2015.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Obligasi Rupiah (lanjutan)

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.703.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 297.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 15.535 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 20.958 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp 300.000 juta jangka waktu sepuluh tahun, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 31.200 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Rupiah Bonds *(continued)*

PLN XI Bonds Year 2010

On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,703,000 million, consisting of Series A and and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 with a nominal value of Rp 297,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 15,535 million for Series A bonds and Rp 20,958 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

PLN IX Bonds Year 2007

On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value of Rp 2,700,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

Concurrent with the issuance of PLN IX Bonds Year 2007, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with a nominal value of Rp 300,000 million with a term of ten years, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 31,200 million is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Obligasi Rupiah (lanjutan)

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.200.100 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN VIII Tahun 2006, Perusahaan juga menerbitkan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dengan nilai nominal Rp 200.000 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 6.800 juta per tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 35 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Rupiah Bonds *(continued)*

PLN VIII Bonds Year 2006

On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value of Rp 2,200,100 million with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bond holders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in Notarial Deed No. 34 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006

Concurrent with the issuance of PLN VIII Bonds Year 2006, the Company also issued Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 with a nominal value of Rp 200,000 million, with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The ijarah fee amounting to Rp 6,800 million is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, as documented in Notarial Deed No. 35 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that:

- *After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.*
- *The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.*

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Obligasi Rupiah (lanjutan)

- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada entitas anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

  Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) - EBITDA dengan beban bunga minimum 2 : 1, untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 minimum rasio adalah 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006, dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank) minimum 125% untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, dan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Rupiah Bonds *(continued)*

- *The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant a loan to another party; (d) perform any merger, consolidation or acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company's property, plant and equipment, or allow subsidiaries to grant a loan to another party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.*

  The Company is also required to maintain the following: (a) a ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) except for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, the ratio of EBITDA to interest expense at a minimum of 2 : 1, for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, the minimum ratio is 1.5 : 1 ; (c) a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government and non bank Government Financial Institution Loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, and a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bonds and Government and non bank Government Financial Institution Loans) at a minimum of 125% for the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Obligasi Rupiah (lanjutan)

- Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006, Perusahaan setuju untuk mengalihkan manfaat mesin pembangkit tenaga diesel dan perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perusahaan juga menerima kuasa dari Wali Amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait.

- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan investasi transmisi dan distribusi. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi PLN VII tahun 2004 digunakan untuk membiayai kembali proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap ("PLTGU") Muara Tawar. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi lainnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk pengadaan bahan bakar.

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, Obligasi PLN IX Tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 memperoleh peringkat "AAA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Rupiah Bonds *(continued)*

- *Related to Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, the Company has agreed to transfer benefits obtained from certain diesel power plants and transformers of the Company to the bondholders, and the bondholders have agreed to provide the Company with a power of attorney to enter into agreements with transformer users for the benefits of the bondholders. The Company also received a power of attorney from the Trustee to enter into agreements with the transformer users to collect the related receivables.*

- *The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.*

The proceeds from the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013, PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution of construction projects. The proceeds from the issuance of PLN VII Bonds Year 2004 were used to refinance the Gas and Steam Powered Power Plant ("PLTGU") Muara Tawar Project. The proceeds from the other bonds issued were used for working capital requirements which, among other items, includes the purchase of fuel.

The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bond obligations.

As of December 31, 2015, Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN Year 2013, the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 are rated as "AAA" by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin adalah sebagai berikut:

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes – US$

The details of Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ *Principal*)* US$	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	
Surat Utang Jangka Menengah Global					*Global Medium Term Notes*
Penerbitan tahun 2012					*Issued in 2012*
Jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,51%	24 Oktober 2042/ *October 24, 2042*	5,25%	*Due in 2042*
Penerbitan tahun 2011					*Issued in 2011*
Jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,05%	22 Nopember 2021/ *November 22, 2021*	5,50%	*Due in 2021*
Obligasi Terjamin					*Guaranteed Notes*
Penerbitan tahun 2009					*Issued in 2009*
Jatuh tempo 2020	1.250.000.000	99,15%	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	7,75%	*Due in 2020*
Jatuh tempo 2019	750.000.000	99,15%	7 Agustus 2019/ *August 7, 2019*	8,00%	*Due in 2019*
Sub jumlah	2.000.000.000				*Sub total*
Penerbitan tahun 2007					*Issued in 2007*
Jatuh tempo 2017	500.000.000	99,13%	28 Juni 2017/ *June 28, 2017*	7,25%	*Due in 2017*
Jatuh tempo 2037	500.000.000	98,59%	29 Juni 2037/ *June 29, 2037*	7,87%	*Due in 2037*
Sub jumlah	1.000.000.000				*Sub total*
Penerbitan tahun 2006					*Issued in 2006*
Jatuh tempo 2016	550.000.000	98,98%	17 Oktober 2016/ *October 17, 2016*	7,75%	*Due in 2016*
Sub jumlah	550.000.000				*Sub total*
Jumlah	**5.550.000.000**				***Total***

*) dalam jumlah penuh/*in full amount*

Surat Utang Jangka Menengah Global

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$ 1.000 juta dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 22 Nopember 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$ 1.000 juta dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Global Medium Term Notes

On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$ 1,000 million, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 24, 2013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$ 1,000 million, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$ (lanjutan)

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009

Pada tanggal 6 Nopember 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), Belanda, entitas anak, menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.250 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 750 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Pebruari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.000 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Penerbitan tahun 2006

Pada tanggal 16 Oktober 2006, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.000 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Pada tanggal 17 Oktober 2011, MH melunasi Obligasi Terjamin yang telah jatuh tempo dengan harga nominal sebesar US$ 450 juta.

Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan dan entitas anak, jika ada.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes – US$ *(continued)*

Guaranteed Notes

Issued in 2009

On November 6, 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), The Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary, issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1,250 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 750 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2007

On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1,000 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2006

On October 16, 2006, MH issued Guaranteed Notes amounting to a total of US$ 1,000 million with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually from April 17, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On October 17, 2011, MH paid the Guaranteed Notes which had matured at a nominal price of US$ 450 million.

These Guaranteed Notes are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company and its subsidiaries, if any.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$ (lanjutan)

Obligasi Terjamin (lanjutan)

Penerbitan tahun 2006 (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian", yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Surat Utang Jangka Menengah Global ini memperoleh peringkat "Baa3 stable" dari Moody's Investor Service, Inc., dan "BB" dari Standard and Poor's serta "BBB-" dari Fitch.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi Terjamin ini memperoleh peringkat "Baa3" dari Moody's Investor Service, Inc., dan "BB" dari Standard and Poor's serta "BBB-" dari Fitch.

27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH *(continued)*

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes – US$ *(continued)*

Guaranteed Notes (continued)

Issued in 2006 (continued)

The Indenture is governed that:

- *No later than 30 days following the occurrence of two separate events in which the Government of the Republic of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share, and an event in which a rating declines (Change of Control Triggering Event), MH may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of MH at a certain time in the event of certain changes affecting the taxes of the Netherlands or Indonesia.*
- *Certain covenants, including, among others, the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception", that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.*

The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

As of December 31, 2015, these Global Medium Term Notes are rated as "Baa3 stable" by Moody's Investors Service, Inc., and "BB" by Standard and Poor's and "BBB-" by Fitch.

As of December 31, 2015, these Guaranteed Notes are rated as "Baa3" by Moody's Investors Service, Inc., and "BB" by Standard and Poor's and "BBB-" by Fitch.

28. UTANG LISTRIK SWASTA

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	2015	2014*)	
PT Paiton Energy (US$ 536.746.497 tahun 2015 dan US$ 558.350.954 tahun 2014)	7.404.418	6.945.886	*PT Paiton Energy (US$ 536,746,497 in 2015 and US$ 558,350,954 in 2014)*
PT Jawa Power (US$ 55.509.334 tahun 2015 dan US$ 56.017.010 tahun 2014)	765.809	696.852	*PT Jawa Power (US$ 55,509,334 in 2015 and US$ 56,017,010 in 2014)*
Jumlah	8.170.227	7.642.738	*Total*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	321.164	299.229	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**7.849.063**	**7.343.509**	***Long-term portion***

*) Disajikan kembali - Catatan 56 — *As restated - Note 56 *)*

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok

	2015	2014	
Dibayarkan:			*Payable in:*
Dalam satu tahun	321.164	299.229	*Within one year*
Pada tahun kedua	338.179	289.566	*In the second year*
Pada tahun ketiga	356.348	304.961	*In the third year*
Pada tahun keempat	375.719	321.346	*In the fourth year*
Setelah lima tahun	6.778.817	6.427.636	*After five years*
Jumlah pembayaran	**8.170.227**	**7.642.738**	***Total payments***

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

29. UTANG PIHAK BERELASI

	2015	2014	
PT Mitra Energi Batam	2.196	5.434	*PT Mitra Energi Batam*
PT Dalle Energy Batam	370	1.897	*PT Dalle Energy Batam*
Jumlah	**2.566**	**7.331**	*Total*

PT Mitra Energi Batam (MEB) dan PT Dalle Energy Batam (DEB)

Utang kepada MEB dan DEB merupakan utang oleh PLN Batam masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan hutang atas setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam.

28. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLE

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with independent power producers with the following details:

a. By creditor

b. By installment schedule, at nominal amount

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, respectively and is payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

29. PAYABLE TO RELATED PARTIES

PT Mitra Energi Batam (MEB) and PT Dalle Energy Batam (DEB)

Payable to MEB and DEB are payable by PLN Batam for purchases of switchyard and historical subscription of shares that have not been fully paid by PLN Batam.

30. UTANG USAHA / *30. TRADE ACCOUNTS PAYABLE*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services, with the following details:

	2015	2014*)	
Pihak berelasi			*Related parties*
Pembelian tenaga listrik	1.215.639	536.281	*Purchases of electricity*
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	8.075.208	12.135.636	*Purchases of fuel, goods and services*
Sub jumlah	9.290.847	12.671.917	*Sub total*
Pihak ketiga			*Third parties*
Pembelian tenaga listrik	3.516.124	5.628.000	*Purchases of electricity*
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa			*Purchases of fuel, goods and services*
Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari sub jumlah)	16.197.581	10.040.180	*Others (each below 5% of sub total)*
Sub jumlah	19.713.705	15.668.180	*Sub total*
Jumlah utang usaha	**29.004.552**	**28.340.097**	***Total of trade account payable***

*) Disajikan kembali - Catatan 56 / *As restated - Note 56 *)*

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of trade accounts payable in foreign currencies are as follows:

	2015		2014		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	505.605.682	6.974.831	521.354.264	6.485.647	*US$*
EUR	1.747.171	26.329	13.307.109	201.380	*EUR*
Jumlah		**7.001.160**		**6.687.027**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

31. UTANG LAIN-LAIN / *31. OTHER PAYABLES*

	2015	2014	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			*Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress*
Rupiah	10.524.018	9.532.838	*Rupiah*
US$ 476.854.332 tahun 2015 dan US$ 322.188.702 tahun 2014)	6.578.206	4.008.027	*US$ 476,854,332 in 2015, and US$ 322,188,702 in 2014)*
EUR nihil tahun 2015 dan EUR 11.446.166 tahun 2014)	-	173.218	*EUR nil in 2015 and EUR 11,446,166 in 2014)*
CHF 22.829.603 tahun 2015 dan CHF 30.396.839 tahun 2014)	318.503	382.478	*CHF 22,829,603 in 2015 and CHF 30,396,839 in 2014)*
JPY 899.991.211 tahun 2015 dan JPY 644.740.431 tahun 2014)	103.071	67.213	*JPY 899,991,211 in 2015 and JPY 644,740,431 in 2014)*
Pemerintah daerah	1.720.213	1.654.096	*Regional government*
Uang muka penjualan tenaga listrik	542.772	420.318	*Advances received on sale of electricity*
Karyawan	24.671	19.278	*Employees*
Lain-lain	451.469	188.500	*Others*
Jumlah	**20.262.923**	**16.445.966**	***Total***
Dikurangi bagian jangka panjang	67.678	98.771	*Less long-term portion*
Bagian jangka pendek	**20.195.245**	**16.347.195**	***Current portion***

31. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Pemerintah daerah

Utang kepada pemerintah daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dan entitas anak dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada pemerintah daerah.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

31. OTHER PAYABLES (continued)

Regional government

The payable to regional government represents the amount collected by the Company and its subsidiaries from customers for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective regional government.

Advances received on sale of electricity

This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Employees

Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house installment.

32. UTANG PAJAK / *32. TAXES PAYABLE*

	2015	2014	
Perusahaan			*The Company*
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pasal 21	51.194	67.357	*Article 21*
Pasal 22	37.114	36.906	*Article 22*
Pasal 23	44.388	40.500	*Article 23*
Pasal 4(2), 15, 25 dan 26	525.764	143.964	*Article 4(2), 15, 25 and 26*
Pajak pertambahan nilai	388.708	445.747	*Value added tax*
Bea materai	10.871	15.872	*Stamp duty*
Pajak bumi dan bangunan	-	80	*Land rights and building taxes*
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	4.172.004	-	*Tax on revaluation increment on property, plant and equipment*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan badan	136.711	204.622	*Corporate income tax*
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pasal 21	50.893	50.705	*Article 21*
Pasal 22	23.710	-	*Article 22*
Pasal 23	18.671	16.509	*Article 23*
Pasal 4(2), 15, 25 dan 26	126.740	42.721	*Article 4(2), 15, 25 and 26*
Pajak pertambahan nilai	143.649	83.698	*Value added tax*
Pajak bumi dan bangunan	2.585	2.567	*Land rights and building taxes*
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	9.398.855	-	*Tax on revaluation increment on property, plant and equipment*
Jumlah	**15.131.857**	**1.151.248**	***Total***

33. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *33. ACCRUED EXPENSES*

	2015	2014*)	
Bunga dan beban keuangan			*Interest and financing charges*
Pihak berelasi			*Related parties*
Penalti atas pembelian BBM	18.572	18.572	*Penalties on purchases of fuel*
Utang bank	361.470	344.019	*Bank loans*
Utang penerusan pinjaman	219.259	227.981	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	114.460	30.163	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Jumlah pihak berelasi	**713.761**	**620.735**	***Total related parties***
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang bank	400.030	400.497	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.501.038	1.319.546	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang sewa pembiayaan	407.256	290.815	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	54.795	48.837	*Electricity purchase payable*
Jumlah pihak ketiga	**2.363.119**	**2.059.695**	***Total third parties***
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek			*Short-term employee benefits obligation*
Bonus dan insentif prestasi kerja	4.582.633	3.573.807	*Bonus and performance incentives*
Lain-lain	-	166.055	*Others*
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	**4.582.633**	**3.739.862**	***Total short-term employee benefits obligation***
Sub jumlah	**7.659.513**	**6.420.292**	***Sub total***
Biaya operasional	751.458	1.132.372	*Operational charges*
Jumlah	**8.410.971**	**7.552.664**	***Total***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2015		2014		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies **)*	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	**Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies **)***	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	
US$	118.702.027	1.637.494	115.996.481	1.442.996	*US$*
JPY	4.930.820.534	564.698	4.294.224.806	447.668	*JPY*
EUR	1.015.374	15.301	677.691	10.256	*EUR*
Lain-lain **)	172.667	2.382	227.936	2.836	*Others **)*
Jumlah		**2.219.875**		**1.903.756**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) *In full amount*
**) *Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.*

34. UANG JAMINAN LANGGANAN / *34. CUSTOMERS' SECURITY DEPOSITS*

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

35. UTANG BIAYA PROYEK

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material yang akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

35. PROJECT COST PAYABLE

This account represents payable to contractors arising from construction of property and equipment and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account when the Company receives the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

36. SALE OF ELECTRICITY

Sale of electricity by customers is as follows:

	2015			2014			
	Bruto/ *Gross*	Masa uji coba/ *Commissioning test*	Bersih/ *Net*	Bruto/ *Gross*	Masa uji coba/ *Commissioning test*	Bersih/ *Net*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Badan Usaha Milik Negara	5.428.312	(29.724)	5.398.588	5.108.161	(24.136)	5.084.025	*State-owned enterprises*
Pihak ketiga							*Third parties*
Umum	194.460.159	(1.138.812)	193.321.347	173.335.416	(818.309)	172.517.107	*Public*
Institusi Pemerintah lainnya	10.080.266	(49.702)	10.030.564	8.055.297	(38.292)	8.017.005	*Other Government Institution*
TNI dan Polri	1.100.897	(6.855)	1.094.042	1.020.696	(4.349)	1.016.347	*Indonesian Armed Forces*
Jumlah pihak ketiga	205.641.322	(1.195.369)	204.445.953	182.411.409	(860.950)	181.550.459	*Total of third parties*
Jumlah	211.069.634	(1.225.093)	209.844.541	187.519.570	(885.086)	186.634.484	*Total*

Testing dan komisioning (*commissioning test*) merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa komisioning dikapitalisasi ke Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) konstruksi dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi.

Penjualan tenaga listrik tahun 2015 dan 2014 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 09 Tahun 2014, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2014.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2015.

- Peraturan Walikota Batam No. 40 Tahun 2012, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 38 Tahun 2015 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

Testing and commissioning (commissioning test) is a series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are to be operated. The costs and revenues on the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalized into construction in progress because the electrical installation has not been commercially operated.

Sale of electricity for the year 2015 and 2014 is based on the basic electricity tariff determined by the Government as follows:

- *Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 09 Year 2014, regarding the tariff of electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, which has been amended by Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 19 Year 2014.*

- *Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 31 Year 2014, regarding the tariff of electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, which has been amended by Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 9 Year 2015.*

- *Regulation of the Mayor of Batam No. 40 Year 2012, regarding the price of electricity provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.*

- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 38 Year 2015, regarding the price of electricity provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.*

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK (lanjutan)

- Peraturan Walikota Tarakan No. 17 Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, tentang pemberlakuan penyesuaian tarif listrik berkala.

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

36. SALE OF ELECTRICITY *(continued)*

- *Regulation of the Mayor of Tarakan No. 17 Year 2014 dated August 17, 2014, regarding the enforcement of adjusted periodical tariff of electricity.*

The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sale of electricity.

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2015 dan 2014 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 Nopember 2013. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 73.149.237 juta, termasuk 7% margin diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi tanggal 30 September 2014, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp 103.816.319 juta, termasuk 7% *margin* diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

37. GOVERNMENT'S ELECTRICITY SUBSIDY

The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for the calculation and payment of electricity subsidy for the budget year 2015 and 2014 uses the regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 170/PMK.02/2013 dated November 28, 2013. The electricity subsidy is computed as the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff category less the cost of electricity supplies on the voltage for each tariff category multiplied by the electricity sales volume (kWh) of each tariff category. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA) revised, the electricity subsidy plafond for budget year 2015 amounted to Rp 73,149,237 million, which includes 7% margin above the costs of supplied electricity.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA) revised on September 30, 2014, the electricity subsidy plafond for budget year 2014 amounted to Rp 103,816,319 million, which includes 7% margin above the costs of supplied electricity.

The amount of the electricity subsidy in a budget year is based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

	2015	2014	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan	51.332.384	80.022.389	*Realization of subsidy from current year budget*
Piutang subsidi listrik	5.220.148	19.280.861	*Receivables on electricity subsidy*
Jumlah pendapatan subsidi listrik	**56.552.532**	**99.303.250**	***Total revenue from electricity subsidy***

38. PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN / *38. OTHER REVENUES*

	2015	2014	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	798.435	718.169	*Telecommunication network and service*
Sewa transformator	270.255	198.419	*Transformer rental*
Perubahan daya tersambung dan administrasi	1.272	45.529	*Upgrading of electricity power and administration fees*
Jasa-jasa dan lainnya	291.152	197.427	*Services and others*
Jumlah	**1.361.114**	**1.159.544**	***Total***

39. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / *39. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE*

	2015	2014*)	
Bahan Bakar Minyak			*Fuel*
Solar *High Speed Diesel*	30.425.933	63.735.457	*Solar High Speed Diesel*
Residu	4.599.605	7.709.641	*Fuel marine oil*
Solar *Industrial Diesel*	14.362	41.663	*Solar Industrial Diesel*
Lainnya	948.078	1.600.915	*Others*
Sub jumlah	35.987.978	73.087.676	*Sub total*
Bahan Bakar - Non Minyak			*Nonfuel*
Batubara	32.457.170	31.809.997	*Coal*
Gas alam	48.350.878	44.965.585	*Natural gas*
Panas bumi	3.263.410	2.757.365	*Geothermal*
Air	241.848	241.303	*Water*
Sub jumlah	84.313.306	79.774.250	*Sub total*
Minyak pelumas	286.026	275.008	*Lubricants*
Jumlah	**120.587.310**	**153.136.934**	***Total***

Jumlah pembelian Perusahaan dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp 45.924.873 juta dan Rp 60.747.294 juta di tahun 2015 dan 2014 dari PT Pertamina (Persero) (pihak berelasi).

Purchases from a single supplier exceeding 10% of the Company's total revenues were transacted with PT Pertamina (Persero) (a related party) which amounted to Rp 45,924,873 million and Rp 60,747,294 million in 2015 and 2014, respectively.

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

40. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK / *40. PURCHASED ELECTRICITY*

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa komisioning dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account includes purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, purchase of electricity during the commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2015	2014*)	
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Sumber Segara Primadaya	3.533.483	3.479.131	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Bajradaya Sentranusa	762.882	713.024	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Pertamina Geothermal Energy	655.979	582.062	*PT Pertamina Geothermal Energy*
PT Geo Dipa Energi	579.967	122.381	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energi Batam	543.307	526.550	*PT Dalle Energi Batam*
PT Bukit Pembangkit Innovative	181.894	-	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
Jumlah pihak berelasi	6.257.512	5.423.148	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Paiton Energy	12.400.690	11.470.605	*PT Paiton Energy*
PT Jawa Power	7.461.927	7.299.536	*PT Jawa Power*
PT Cirebon Electric Power	3.967.289	3.291.300	*PT Cirebon Electric Power*
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	21.603.449	18.567.788	*Others (each below 5% of total)*
Jumlah pihak ketiga	45.433.355	40.629.229	*Total third parties*
Jumlah	**51.690.867**	**46.052.377**	***Total***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

41. BEBAN SEWA

Akun ini merupakan biaya penyewaan pembangkit yang ditentukan sebagai sewa operasi.

41. LEASE EXPENSES

This account pertains to the rental of power plant which classified as operating leases.

42. BEBAN PEMELIHARAAN

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

42. MAINTENANCE EXPENSES

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	2015	2014*)	
Jasa borongan	11.855.309	11.538.366	*Contractor fees*
Pemakaian material	5.737.952	5.073.095	*Spare parts used*
Jumlah	**17.593.261**	**16.611.461**	***Total***

*) Disajikan kembali - Catatan 56 — *As restated - Note 56 *)*

43. BEBAN KEPEGAWAIAN

43. PERSONNEL EXPENSES

	2015	2014*)	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	5.763.554	4.384.027	*Bonus and performance incentives*
Imbalan kerja	5.335.698	4.833.138	*Employee benefits*
Gaji	4.075.165	3.522.228	*Salaries*
Tunjangan	2.121.034	1.396.134	*Allowances*
Lain-lain	3.025.686	2.510.270	*Others*
Jumlah	**20.321.137**	**16.645.797**	***Total***

*) Disajikan kembali - Catatan 56 — *As restated - Note 56 *)*

44. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

44. OTHER OPERATING EXPENSES

	2015	2014	
Honorarium	933.611	478.855	*Honorarium*
Baca meter	914.309	745.313	*Meter reading*
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	681.254	492.611	*Billing collection and orderliness of electricity used*
Pengelolaan pelanggan	672.357	847.251	*Customer maintenance*
Asuransi	607.718	350.512	*Insurance*
Perjalanan dinas	598.783	539.268	*Travel*
Teknologi informasi	527.592	458.605	*Technological information*
Listrik, gas dan air	285.952	278.690	*Electricity, gas and hydro*
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	1.868.501	1.297.512	*Others (each below 5% of total)*
Jumlah	**7.090.077**	**5.488.617**	***Total***

45. BEBAN KEUANGAN / *45. FINANCIAL COST*

	2015	2014*)	
Pihak berelasi			*Related parties*
Utang bank	2.803.534	3.143.305	*Bank loans*
Penerusan pinjaman	564.820	788.463	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	569.073	597.610	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang usaha atas pembelian BBM	17.133	18.514	*Trade accounts payable on purchase of fuel*
Jumlah pihak berelasi	3.954.560	4.547.892	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang sewa pembiayaan	3.751.902	3.380.839	*Lease liabilities*
Utang obligasi	7.321.872	6.671.859	*Bonds payable*
Utang bank	1.898.864	1.435.870	*Bank loans*
Utang listrik swasta	510.678	460.847	*Electricity purchase payable*
Lain-lain	98.472	142.346	*Others*
Jumlah pihak ketiga	13.581.788	12.091.761	*Total third parties*
Jumlah	**17.536.348**	**16.639.653**	***Total***

*) Disajikan kembali - Catatan 56 / *As restated - Note 56 *)*

46. PENGHASILAN LAIN-LAIN – BERSIH / *46. OTHERS INCOME - NET*

	2015	2014	
Penghasilan denda administrasi	1.533.497	1.702.851	*Administrative penalty income*
Penghasilan jasa dan klaim	102.212	73.418	*Claim and service income*
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	9.285	32.975	*Gain on sale of assets not used in operations*
Beban penelitian	(39.676)	(8.512)	*Research expenses*
Program pemberdayaan lingkungan	(159.883)	(72.707)	*Community development programs*
Kerugian percepatan beban penyusutan (Catatan 6)	(497.835)	(408.446)	*Loss on accelerated depreciation expenses (Note 6)*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	688.991	487.819	*Share in net income of associates and joint ventures*
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	800.475	2.349.620	*Others (each below 5% of total)*
Jumlah	**2.437.066**	**4.157.018**	***Total***

47. PAJAK PENGHASILAN / *47. INCOME TAX*

(Beban) manfaat pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax (expense) benefits of the Company and its subsidiaries consist of the following:

	2015	2014*)	
Pajak kini	(1.361.685)	(1.276.139)	*Current tax*
Pajak tangguhan	20.011.182	(3.667.316)	*Deferred tax*
Jumlah (beban) manfaat pajak	**18.649.497**	**(4.943.455)**	***Total tax (expense) benefits***

*) Disajikan kembali - Catatan 56 / *As restated - Note 56 *)*

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows:

	2015	2014*)	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya konsolidasian	(3.064.259)	18.947.532	*Income (loss) before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak entitas anak	(5.310.779)	(4.462.015)	*Income before tax attributable to subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	(8.375.038)	14.485.517	*Income (loss) before tax - the Company*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Sewa pembiayaan	773.109	(4.084.822)	*Lease*
Biaya penyambungan pelanggan	341.981	159.412	*Customer connection fees*
Penyusutan aset tetap	(9.160.736)	(7.822.000)	*Depreciation of fixed assets*
Liabilitas imbalan kerja	2.177.263	2.249.200	*Employee benefits obligations*
Amortisasi biaya emisi obligasi	9.692	(1.176)	*Amortization of bonds issuance costs*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Non-deductible expenses (non-taxable income):*
Penyisihan piutang tak tertagih	264.197	-	*Allowance for doubtful account*
Kesejahteraan karyawan	738.223	797.173	*Employee welfare*
Penyusutan rumah dinas	5.267	8.499	*Depreciation of guest house*
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(379.408)	(437.126)	*Interest income subjected to final tax*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	4.285.656	445.240	*Other non-deductible expenses*
Laba (rugi) kena pajak Perusahaan tahun berjalan			*The Company's taxable income (loss) for the year*
Rugi fiskal 2015	(9.319.794)	-	*Fiscal losses 2015*
Laba fiskal 2014	5.799.917	5.799.917	*Fiscal gain 2014*
Rugi fiskal 2013	(18.459.547)	(18.459.547)	*Fiscal losses 2013*
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	**(21.979.424)**	**(12.659.630)**	***Accumulated fiscal losses of the Company***

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed with the tax office.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang.

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that it is not probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses.

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

47. INCOME TAX *(continued)*

Current Tax *(continued)*

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2015	2014	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	1.361.685	1.276.139	*Subsidiaries*
Jumlah	1.361.685	1.276.139	*Total*
Pembayaran pajak dimuka			*Prepayment of taxes*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 22	228.651	137.047	*Article 22*
Pasal 23	25.111	10.946	*Article 23*
Pasal 25	2.070.035	-	*Article 25*
Jumlah	2.323.797	147.993	*Total*
Entitas anak	1.351.964	1.156.221	*Subsidiaries*
Jumlah	3.675.761	1.304.214	*Total*
Utang pajak kini setelah dikurangi pajak dibayar dimuka	(2.314.076)	(28.075)	*Current tax payable net of tax prepayments*
Terdiri dari			*Consist of*
Utang pajak kini			*Current tax payable*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	136.711	204.622	*Subsidiaries*
Jumlah hutang pajak kini	136.711	204.622	*Total current tax payable*
Pajak penghasilan lebih bayar			*Income tax overpayment*
Perusahaan	(2.323.797)	(147.993)	*The Company*
Entitas anak	(126.990)	(84.704)	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	(2.450.787)	(232.697)	*Total income tax overpayment*
Bersih	**(2.314.076)**	**(28.075)**	***Net***

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1, 2015*)*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for period*	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31, 2015*	
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	37.342	(21.310)	(1.905)	10.018.793	10.032.920	*Post employment benefits obligation*
Pendapatan ditangguhkan	-	-	-	382.635	382.635	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	-	-	-	(1.066.343)	(1.066.343)	*Lease*
Aset tetap	24.519	(16.598)	-	4.807.481	4.815.402	*Proprty, plant and equipment*
Bonus	-	-	-	130.298	130.298	*Bonus*
Persediaan	103	(14)	-	1.471	1.560	*Inventories*
Piutang usaha	4.784	(625)	-	6.525	10.684	*Trade accounts receivables*
Laba dari entitas asosiasi	-	-	-	(8.836)	(8.836)	*Income from associates*
Biaya ditangguhkan	-	2.182	-	-	2.182	*Deferred charges*
Aset pajak tangguhan - akhir tahun	66.748	(36.365)	(1.905)	14.272.024	14.300.502	*Deferred tax assets at the end of the year*
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	3.948.303	(3.947.600)	-	-	703	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	10.122.362	1.425.468	(1.528.246)	(10.018.793)	791	*Post employment benefits obligation*
Pendapatan ditangguhkan	289.230	93.405	-	(382.635)	-	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(1.191.776)	125.433	-	1.066.343	-	*Leases*
Aset tetap	(21.801.643)	22.222.216	4.380.238	(4.807.481)	(6.670)	*Property, plant and equipment*
Bonus	-	130.298	-	(130.298)	-	*Bonus*
Persediaan	1.471	-	-	(1.471)	-	*Inventories*
Piutang usaha	6.626	(101)	-	(6.525)	-	*Trade accounts receivables*
Laba dari entitas asosiasi	(4.871)	(3.965)	-	8.836	-	*Income from associates*
Amortisasi biaya emisi obligasi	(2.692)	2.393	-	-	(299)	*Amortization of bonds issuance cost*
Liabilitas pajak tangguhan - akhir tahun	(8.632.990)	20.047.547	2.851.992	(14.272.024)	(5.475)	*Deferred tax liabilities at the end of the year*
		20.011.182	2.850.087			

	1 Januari/ *January 1, 2014*)*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for period*	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31, 2014*)*	
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	7.876	26.924	2.542	-	37.342	*Post employment benefits obligation*
Aset tetap	21.000	3.519	-	-	24.519	*Property, plant and equipment*
Persediaan	117	(14)	-	-	103	*Inventories*
Piutang usaha	6.780	(1.996)	-	-	4.784	*Trade accounts receivables*
Aset pajak tangguhan - akhir tahun	35.773	28.433	2.542	-	66.748	*Deferred tax assets at the end of the year*
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	4.614.887	(666.584)	-	-	3.948.303	*Accumulated fiscal loss*
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	9.055.223	(148.294)	1.215.433	-	10.122.362	*Post employment benefits*
Pendapatan ditangguhkan	247.728	41.502	-	-	289.230	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(167.673)	(1.024.103)	-	-	(1.191.776)	*Lease*
Aset tetap	(19.909.678)	(1.891.965)	-	-	(21.801.643)	*Property, plant and equipment*
Persediaan	1.471	-	-	-	1.471	*Inventories*
Piutang usaha	7.762	(1.136)	-	-	6.626	*Trade accounts receivables*
Laba dari entitas asosiasi	-	(4.871)	-	-	(4.871)	*Income from associates*
Amortisasi biaya emisi obligasi	(2.394)	(298)	-	-	(2.692)	*Amortization of bonds issuance cost*
Liabilitas pajak tangguhan - akhir tahun	(6.152.674)	(3.695.749)	1.215.433	-	(8.632.990)	*Deferred tax liabilities at the end of the year*
		(3.667.316)	1.217.975			

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

***Deferred Tax** (continued)*

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	2015	2014	
Aset pajak tangguhan			*Deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	13.316.087	11.592.949	*Deferred tax assets to be recovered after 12 months*
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	2.061.088	2.841.791	*Deferred tax assets to be recovered within 12 months*
Liabilitas pajak tangguhan			*Deferred tax liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	(1.071.237)	(21.643.102)	*Deferred tax liabilities to be recovered after 12 months*
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	(10.911)	(1.357.880)	*Deferred tax liabilities to be recovered within 12 months*

Rekonsiliasi antara jumlah (manfaat)/beban pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax (benefit)/expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the loss before tax is as follows:

	2015	2014*)	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	(3.064.259)	18.947.533	*Consolidated profit/(loss) before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	(766.065)	4.736.883	*Tax calculated at applicable tax rate*
Pengaruh pajak atas:			*Tax effect on:*
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan yang dibalik	(18.925.024)	23.640	*Reversal of deferred tax assets/ (liabilities)*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Non-deductible expenses (non-taxable income)*
Kesejahteraan karyawan	256.911	255.052	*Employee welfare*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(183.230)	(168.099)	*Share in net income of associates and joint venture*
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(139.713)	(138.744)	*Interest income subjected to final tax*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	1.107.624	234.723	*Other non-deductible expenses*
(Manfaat)/beban pajak penghasilan konsolidasian	**(18.649.497)**	**4.943.455**	***Consolidated income tax (benefit)/expense***

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*As restated - Note 56 *)*

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Pada bulan April 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan ("PPh") Badan tahun 2014 sebesar Rp 140.937 juta dan menetapkan laba fiskal sebesar Rp 902.140 juta. Perusahaan dalam proses mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut.

Pada bulan April 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp 2.011.024 juta dan menetapkan rugi neto fiskal dari Rp 18.459.547 juta menjadi sebesar Rp 8.371.218 juta. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut pada bulan Juli 2015. Pada bulan Juli dan Nopember 2015, Perusahaan juga menerima beberapa SKPKB dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPh pasal 4(2) dan PPh pasal 26 tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8.612.648 juta. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB dan penghapusan sanksi serta pembatalan atas STP tersebut pada bulan Oktober 2015, Desember 2015 dan Januari 2016. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 192.065 juta, dicatat sebagai pajak dibayar dimuka dan pembayaran sebesar Rp 15.019 juta dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain. Pada bulan April 2016, Direktorat Jendral Pajak ("DJP") menolak permohonan penghapusan sanksi atas STP PPN tahun 2013 sebesar Rp 22.864 juta.

Pada bulan April 2014, Perusahaan menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2012 sebesar Rp 1.330.243 juta dan menetapkan laba fiskal sebesar Rp 4.540.925 juta. Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada bulan Juni 2014. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 182.496 juta, dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Keberatan tersebut ditolak DJP pada bulan Mei 2015. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Agustus 2015 dan sidang banding Pengadilan Pajak masih berlangsung.

Pada bulan September 2013, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2011 sebesar Rp 84.857 juta dan penetapan laba fiskal tahun 2011 dari Rp 8.099.968 juta menjadi sebesar Rp 11.506.614 juta. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Desember 2013 dan ditolak DJP pada bulan Nopember 2014. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Pebruari 2015 dan sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Pebruari 2016, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

***47. INCOME TAX** (continued)*

Tax Assessment Letters

The Company

In April 2016, the Company received a tax assessment letters for underpayment ("SKPKB") for corporate income tax for the fiscal year 2014 amounting to Rp 140,937 million and determined the taxable income of Rp 902,140 million. The Company in process of submitting objection letter for SKPKB.

In April 2015, the Company received a tax assessment letter for the overpayment ("SKPLB") of corporate income tax for the fiscal year 2013 amounting to Rp 2,011,024 million and determined fiscal net loss from Rp 18,459,547 million to Rp 8,371,218 million. The Company submitted an objection letter related to the assessment in July 2015. In July and November 2015, the Company also received SKPKB and tax collection letters ("STP") for income tax article 4(2) and article 26 for the fiscal year 2012 and Value Added Tax ("VAT") for the fiscal years 2012 and 2013 amounting to Rp 8,612,648 million. The Company has submitted an objection letter for SKPKB and administrative sanction abolition request on STP in October 2015, December 2015 and January 2016. The Company has paid the amount of Rp 192,065 million, and recorded it as prepaid taxes and payment amounting to Rp 15,019 million has been recorded by the Company as other expense. In April 2016, Directorate General of Taxes ("DGT") rejected administrative sanction abolition request on STP VAT fiscal year 2013 amounting to Rp 22,864 million.

In April 2014, the Company received a SKPKB of corporate income tax for the fiscal year 2012 amounting to Rp 1,330,243 million and determined taxable income of Rp 4,540,925 million. The Company has submitted an objection letter on the assessment in June 2014 and the Company has paid Rp 182,496 million, recorded as prepaid tax. The objection was rejected by DGT in May 2015. The Company filed an appeal against the rejection in August 2015 and appeal hearing on the Tax Court is still ongoing.

In September 2013, the Company received a SKPLB of corporate income tax for the fiscal year 2011 amounting to Rp 84,857 million and determined the taxable income for the year 2011 from Rp 8,099,968 million to Rp 11,506,614 million. The Company submitted an objection to the DGT in December 2013 and rejected by the DGT in November 2014. The Company filed an appeal against the rejection in February 2015 and hearing session on the Tax Court has been completed in February 2016, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan juga menerima SKPKB PPh pasal 4(2), 21, 23, 26 dan PPN tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 144.328 juta. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan 26 sebesar Rp 94.478 juta (nilai sengketa Rp 84.078 juta) pada bulan Desember 2013. Pada bulan Nopember 2014 DJP menolak keberatan tersebut dan Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Pebruari 2015. Sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Pebruari 2016, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

Pada bulan Desember 2012, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp 98.148 juta dan penetapan laba fiskal dari Rp 6.627.169 juta menjadi sebesar Rp 9.627.659 juta. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Januari 2013 dan ditolak DJP pada bulan Januari 2014. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan April 2014 dan sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Pebruari 2015, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

Perusahaan juga menerima SKPKB PPh pasal 4(2), pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 141.012 juta. SKPKB sebesar Rp 59.913 juta telah diterima dan dicatat oleh Perusahaan sebagai beban lain-lain pada bulan Desember 2012. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan 26 sebesar Rp 84.306 juta (nilai sengketa Rp 81.099 juta) pada bulan Januari 2013 dan telah melunasi kurang bayar tersebut pada bulan Desember 2012. Pada bulan Januari 2014, DJP menolak keberatan tersebut dan Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan April 2014. Sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Maret dan April 2015, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2009 sebesar Rp 95.625 juta dan penetapan laba fiskal dari Rp 5.936.754 juta menjadi sebesar Rp 8.132.406 juta. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Januari 2012 dan ditolak DJP pada bulan Oktober 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2012. Pada bulan Maret 2016 Pengadilan Pajak menyetujui banding yang diajukan Perusahaan.

***47. INCOME TAX** (continued)*

***Tax Assessment Letters** (continued)*

The Company (continued)

The Company also received a SKPKB of income tax article 4(2), 21, 23, 26 and VAT for the fiscal year 2011 with the total amount of Rp 144,328 million. The Company submitted an objection letter in December 2013 for income tax article 23 and 26 amounting to Rp 94,478 million (with dispute amount Rp 84,078 million). In November 2014, the DGT rejected the objection and the Company filed an appeal against the rejection in February 2015. Hearing session on the Tax Court has been completed in February 2016, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

In December 2012, the Company received a SKPLB of corporate income tax for the fiscal year 2010 amounting to Rp 98,148 million and determined the taxable income from Rp 6,627,169 million to Rp 9,627,659 million. The Company submitted an objection to the DGT in January 2013 and it was rejected by the DGT in January 2014. The Company filed an appeal against the rejection in April 2014 and hearing session on the Tax Court has been completed in February 2015, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

The Company also received a SKPKB of income tax article 4(2), article 21, article 23, article 26 and VAT for the fiscal year 2010 amounting to Rp 141,012 million. SKPKB amounting to Rp 59,913 million has been accepted and recorded by the Company as other expense in December 2012. The Company submitted an objection letter on the SKPKB of income tax article 23 and 26 amounting to Rp 84,306 million (with dispute amount Rp 81,099 million) in January 2013 and has paid the under payment in December 2012. In January 2014, the DGT rejected the objection and the Company filed an appeal against the rejection in April 2014. Hearing session on the Tax Court has been completed in March and April 2015, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

In October 2011, the Company received a SKPLB of corporate income tax for the fiscal year 2009 amounting to Rp 95,625 million and determined the taxable income from Rp 5,936,754 million to Rp 8,132,406 million. The Company submitted an objection to the DGT in January 2012 and it was rejected by the DGT in October 2012. The Company filed an appeal against the rejection in December 2012. In March 2016, Tax Court accepted the Company's appeal.

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan menerima SKPKB PPh 23 tahun 2009 sebesar Rp 252.348 juta. Atas jumlah tersebut Perusahaan telah menyetujui koreksi sejumlah Rp 5.058 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Januari 2012 dan ditolak DJP pada bulan September 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2012. Pada bulan Oktober 2014, Pengadilan Pajak menyetujui banding dan mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp 247.290 juta pada bulan Juli 2015. DJP mengajukan Peninjauan Kembali ("PK") untuk PPh 23 tahun 2009 di mana memori PK diterima Maret 2016. Perusahaan telah menjawab kontra memori PK pada bulan April 2016. Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan juga menerima SKPKB PPh 26 tahun 2009 sebesar Rp 643.601 juta. Atas jumlah tersebut Perusahaan telah menyetujui koreksi sejumlah Rp 5.452 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Desember 2011 dan ditolak DJP pada bulan Mei 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Agustus 2012. Pada bulan Maret 2015, banding ditolak Pengadilan Pajak dan Perusahaan mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada bulan Juni 2015.

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan menerima SKPKB PPh 23 tahun 2007 dan 2006 sejumlah Rp 181.908 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan September 2011 dan ditolak DJP pada bulan Juni 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan September 2012. Pada bulan Oktober 2013, Pengadilan Pajak menyetujui banding dan mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp 181.908 juta pada bulan Desember 2013. Pada bulan Januari 2014, DJP mengajukan PK untuk PPh 23 tahun 2006 dan Perusahaan telah menjawab kontra memori PK pada bulan Nopember 2014. Pada bulan Juni 2011 Perusahaan juga menerima SKPKB PPh 26 tahun 2007 sejumlah Rp 316.944 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan September 2011 dan ditolak DJP pada bulan Mei 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Agustus 2012. Pada bulan Maret 2015 banding ditolak Pengadilan Pajak. Perusahaan mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada bulan Juni 2015.

47. INCOME TAX *(continued)*

Tax Assessment Letters *(continued)*

The Company (continued)

In October 2011, the Company received a SKPKB income tax article 23 for the fiscal year 2009 with total amount of Rp 252,348 million. Correction amounting to Rp 5,058 million has been accepted by the Company. In January 2012 the Company submitted an objection letter and it was rejected by the DGT in September 2012. The Company filed an appeal against the rejection in December 2012. In October 2014, the Tax Court accepted the Company's appeal and refunded the tax overpayments of Rp 247,290 million in July 2015. The DGT filed Juridical Review ("PK") for income tax article 23 for the fiscal year 2009 and the Company received contra memory PK in March 2016. The Company has reply contra memory PK in April 2016. In October 2011, the Company also received a SKPKB income tax article 26 for the fiscal year 2009 amounting to Rp 643,601 million. Correction amounting to Rp 5,452 million has been accepted by the Company. The Company submitted objection letter in December 2011 and rejected by the DGT in May 2012. The Company filed an appeal against the rejection in August 2012. In March 2015, the Tax Court rejected the appeal and then the Company submitted PK to Supreme Court in June 2015.

In June 2011, the Company received SKPKB income tax article 23 for the fiscal years 2007 and 2006 amounting to Rp 181,908 million. The Company submitted an objection letter in September 2011 and it was rejected by the DGT in June 2012. The Company filed an appeal against the rejection in September 2012. In October 2013, the Tax Court accepted the Company's appeal and refunded the tax overpayment of Rp 181,908 million in December 2013. In January 2014, the DGT filed PK for income tax article 23 for the fiscal year 2006 and the Company has reply the contra memory PK in November 2014. In June 2011, the Company also received a SKPKB income tax article 26 for the fiscal year 2007 amounting to Rp 316,944 million. The Company submitted an objection letter in September 2011 and it was rejected by the DGT in May 2012. The Company filed an appeal against the rejection in August 2012. In March 2015 the Tax Court rejected the appeal. The Company submitted PK to Supreme Court in June 2015.

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Nopember 2010, Perusahaan menerima SKPKB PPh 23 tahun 2008 sebesar Rp 301.385 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Desember 2010 dan ditolak DJP pada bulan Oktober 2011. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2011. Pada bulan Oktober 2013, Pengadilan Pajak menyetujui banding dan mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp 93.061 juta pada bulan Desember 2013. Pada bulan Nopember 2010, Perusahaan juga menerima SKPKB atas PPh 26 tahun 2008 sebesar Rp 614.610 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Desember 2010 dan ditolak DJP pada bulan Oktober 2011. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2011. Pada bulan Maret 2015 banding ditolak Pengadilan Pajak dan Perusahaan mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada bulan Juni 2015.

Sehubungan dengan Perusahaan mengajukan surat keberatan dan banding, pembayaran yang telah dilakukan atas SKPKB tersebut sebesar Rp 2.109.238 juta dan Rp 2.164.451 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka (Catatan 18).

Entitas anak

Pada bulan Desember 2015, IP menerima STP PPN tahun pajak 2014 sebesar Rp 698.430 juta. IP telah mengajukan permohonan pembatalan atas STP pada bulan Januari 2016. Pada bulan Desember 2015, IP juga menerima SKPLB PPN tahun pajak 2014 sebesar Rp 72.832 juta.

Pada bulan Januari 2016, PJB menerima STP PPN tahun pajak 2014 sebesar Rp 488 milyar. PJB telah mengajukan permohonan pembatalan STP pada bulan Januari 2016. Pada bulan April 2016 PJB menerima surat No S-1802/WPJ.19/BD.05/2016 tentang permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka penyelesaian permohonan pembatalan STP tidak benar dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. PJB juga menerima SKPLB PPN tahun pajak 2014 sebesar Rp 36.022 juta.

47. INCOME TAX *(continued)*

Tax Assessment Letters *(continued)*

The Company (continued)

In November 2010, the Company received a SKPKB income tax article 23 for the fiscal year 2008 amounting to Rp 301,385 million. The Company submitted objection letter in December 2010 and it was rejected by the DGT in October 2011. The Company filed an appeal against the rejection in December 2011. In October 2013, the Tax Court accepted the Company's appeal and refunded the tax overpayments of Rp 93,061 million in December 2013. In November 2010, the Company also received SKPKB income tax article 26 fiscal year 2008 amounting to Rp 614,610 million. The Company submitted objection letter in December 2010 and it was rejected by the DGT in October 2011. The Company filed an appeal against the rejection in December 2011. In March 2015 the Tax Court rejected the appeal and the Company submitted PK to Supreme Court in June 2015.

Due to the objections and appeals filed by the Company against the SKPKBs, payments made by the Company for the SKPKBs amounting to Rp 2,109,238 million and Rp 2,164,451 million as of December 31, 2015 and 2014, respectively, were recorded as prepaid taxes (Note 18).

Subsidiaries

In December 2015, IP received an STP VAT for the fiscal year 2014 amounting to Rp 698,430 million. IP has issued a cancellation request for the STP in January 2016. In December 2015, IP also received a SKPLB VAT for the fiscal year 2014 amounting to Rp 72,832 million.

In January 2016, PJB received a STP VAT for the fiscal year 2014 amounting to Rp 488 billion. PJB has issued a cancellation request for the STP in January 2016. In April 2016, PJB received letter No S-1802/WPJ.19/BD.05/2016 regarding document, data or information request in order of completion cancelation request for STP from Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. PJB also receive SKPLB VAT for the fiscal year 2014 amounting to Rp 36,022 million.

48. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba bersih

Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 15.569.299 juta dan Rp 13.988.874 juta.

Jumlah saham

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah 46.197.380 saham tahun 2015 dan 2014.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

48. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Net income

Net income for the computation of basic earnings per share in 2015 and 2014 amounted to Rp 15,569,299 million and Rp 13,988,874 million, respectively.

Number of shares

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share was 46,197,380 shares in 2015 and 2014.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the diluted earnings per share.

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan

Program Pensiun Imbalan Pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan pascakerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-078/KM.12/2006 tanggal 29 Agustus 2006 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41%.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Post-employment Benefits Obligation

Defined Benefit Pension Plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This plan provides pension benefits based on the years of service and salaries of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-078/KM.12/2006 dated on August 29, 2006 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are respectively 6.00% and 13.41%.

Health Care Benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

Imbalan Pascakerja Lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

Other Post-Employment Benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

	2015	**2014** disajikan kembali/ *(restated)*	
Kewajiban posisi keuangan untuk:			*Financial position obligations for:*
Imbalan Pascakerja			*Post-Employment Benefits*
Program Pensiun	-	-	*Pension Plan*
Imbalan Pascakerja Lainnya	13.256.657	11.306.269	*Other Post-Employment benefits*
Imbalan Pemeliharaan Kesehatan	25.969.297	31.297.368	*Health care benefits*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	1.001.182	1.175.404	*Other long term benefits*
Jumlah	40.227.136	43.779.041	*Total*
Dibebankan pada laporan laba rugi:			*Profit or loss charge for:*
Imbalan Pascakerja			*Post-Employment Benefits*
Program Pensiun	79.544	33.706	*Pension Plan*
Pascakerja Lainnya	1.590.475	1.218.464	*Other Post-Employment benefits*
Pemeliharaan Kesehatan	3.480.029	3.086.093	*Health care benefits*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	185.650	494.875	*Other long term benefits*
Jumlah	5.335.698	4.833.138	*Total*
Pengukuran kembali untuk:			*Remeasurement for:*
Imbalan Pascakerja			*Post-Employment Benefits*
Program Pensiun	77.756	113.827	*Pension Plan*
Pascakerja Lainnya	1.936.004	2.690.054	*Other Post-Employment benefits*
Pemeliharaan Kesehatan	(8.134.368)	2.068.021	*Health care benefits*
Jumlah	(6.120.608)	4.871.902	*Total*

Asumsi Yang Digunakan dalam Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja

Assumption Used in the Calculations of Post-employment Benefits Obligation

Tabel mortalita CSO-58 *Mortality table*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculations of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long term benefits for the years ended December 31, 2015 and 2014 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

Asumsi Yang Digunakan dalam Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasian, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

(i) Program Pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

Assumption Used in the Calculations of Post-employment Benefits Obligation (continued)

In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that suits most with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries applies CSO-58 retrospectively.

(i) Pension Plan

The amounts recognized in the consolidated statement of financial position are determined as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Nilai kini kewajiban yang didanai	6.346.704	6.217.066	*Present value of funded obligations*
Aset program yang tidak diakui	683.763	994.763	*Plan asset not recognized*
Nilai wajar aset program	(7.030.467)	(7.211.829)	*Fair value of plan assets*
Defisit/(surplus) program yang didanai	-	-	*Deficit/(surplus) of funded plans*
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	-	-	*Present value of unfunded obligations*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	-	-	*Liability in the statement of financial position*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Pada awal tahun	6.217.066	5.349.439	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	133.887	95.873	*Current service cost*
Biaya bunga	532.079	479.823	*Interest expense*
	665.966	575.696	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	19	-	*Loss from change in demographic assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	150.736	292.351	*Loss from change in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(17.110)	11.278	*(Gain)/loss from combination of change in assumptions*
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(164.142)	513.434	*Experience (gains)/losses*
	6.852.535	6.742.198	
Pembayaran manfaat	(505.831)	(525.132)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	6.346.704	6.217.066	*At end of the year*

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

(i) Program Pensiun (lanjutan)

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

(i) Pension Plan *(continued)*

The movement in the fair value of plan assets of the year is as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Pada awal tahun	7.211.829	6.420.993	*At beginning of the year*
Imbal hasil atas aset program	516.042	463.071	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	157.300	147.534	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	70.380	78.919	*Employee's contributions*
Pembayaran benefit	(505.831)	(525.132)	*Benefit payments*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial pada aset program	(419.253)	626.444	*(Gain)/loss on plan assets*
Pada akhir tahun	7.030.467	7.211.829	*At the end of the year*

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2015				2014				
	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted price*	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted price*	Jumlah/ *Total*	%	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted price*	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted price*	Jumlah/ *Total*	%	
Instrumen Ekuitas									*Equity Instruments*
Surat Berharga Negara	948.755	-	948.755	13,49	1.208.393	-	1.208.393	16,75	*Government Securities*
Deposito *On Call*	-	59.750	59.750	0,85	-	60.600	60.600	0,84	*On Call Deposits*
Deposito Berjangka	-	547.266	547.266	7,78	-	1.023.850	1.023.850	14,20	*Time Deposits*
Saham	663.508	-	663.508	9,44	606.701	-	606.701	8,41	*Stocks*
Instrumen Utang									*Debt Instruments*
Obligasi	2.742.354	-	2.742.354	39,01	2.318.396	-	2.318.396	32,15	*Corporate Bonds*
Unit Penyertaan Reksa Dana	1.021.522	-	1.021.522	14,53	1.068.656	-	1.068.656	14,82	*Investment Units of Mutual Funds*
Penempatan Langsung	-	200.435	200.435	2,85	-	132.085	132.085	1,83	*Direct Placement*
Properti									*Property*
Tanah	-	63.984	63.984	0,91	-	67.040	67.040	0,93	*Land rights*
Bangunan	-	425.971	425.971	6,06	-	425.971	425.971	5,91	*Buildings*
Tanah dan Bangunan	-	290.429	290.429	4,13	-	287.175	287.175	3,98	*Land rights and Buildings*
Lain-lain	-	66.493	66.493	0,95	-	12.962	12.962	0,18	*Others*
Jumlah	**5.376.139**	**1.654.328**	**7.030.467**	**100,00**	**5.202.146**	**2.009.683**	**7.211.829**	**100,00**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Tingkat diskonto	9,16% - 9,20%	8,54%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,35% - 8,30%	6,80%	*Rate of salary increase per annum*

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah Rp 141.678 juta.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ending December 31, 2016 are Rp 141,678 million.

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

(i) Program Pensiun (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

(i) Pension Plan *(continued)*

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,42%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,75%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1,00%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,65%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,36%*	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,02%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,02%*	*Mortality rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analyses are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(ii) Other Post-Employment Benefits

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	2015	**2014** disajikan kembali/ *(restated)*	
Pada awal tahun	11.306.269	8.713.740	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	630.213	431.052	*Current service cost*
Biaya bunga	960.262	787.412	*Interest expense*
	1.590.475	1.218.464	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	283	-	*Loss from change in demographic assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	650.453	1.348.491	*Loss from change in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(109.319)	72.705	*(Gain)/loss from combination of change in assumptions*
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	1.394.587	1.268.858	*Experience losses*
	14.832.748	12.622.258	
Pembayaran manfaat	(1.576.091)	(1.315.989)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	13.256.657	11.306.269	*At end of the year*

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

(ii) Other Post-Employment Benefits *(continued)*

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Tingkat diskonto	9,10% - 9,19%	8,34%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,35% - 11,00%	6,80%	*Rate of salary increase per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 5,55%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 6,38%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1,00%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 6,18%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 5,48%*	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,01%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,01%*	*Mortality rate*

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan memiliki beberapa skema imbalan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iii) Health Care Benefits

The Company operates a number of post-employment medical benefit schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Pada awal tahun	31.297.368	26.668.563	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Profit or loss charge for:*
Biaya jasa kini	802.690	693.966	*Current service cost*
Biaya bunga	2.677.339	2.392.127	*Interest expense*
	3.480.029	3.086.093	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(15.389)	-	*Gain from change in demographic assumptions*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(13.878.086)	1.959.193	*(Gain)/loss from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	1.366.344	-	*Loss from combination of change in assumptions*
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	4.392.763	108.828	*Experience Losses*
	26.643.029	31.822.677	
Pembayaran manfaat	(673.732)	(525.309)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	25.969.297	31.297.368	*At end of the year*

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

(iii) Health Care Benefits *(continued)*

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Tingkat diskonto	9,09% - 9,20%	8,54%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,35% - 8,30%	6,80%	*Rate of salary increase per annum*

Sebagai tambahan asumsi yang ada diatas, asumsi utama adalah kenaikan biaya kesehatan jangka panjang sebesar 6,00% per tahun (2014: 9,00%).

In addition to the assumptions set out above, the main actuarial assumption is a long-term increase in health costs of 6.00% a year (2014: 9.00%).

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 10,40%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 12,61%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1,00%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 9,75%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 8,19%*	*Medical inflation rate*
Tingkat mortalitas	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,55 %*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,56 %*	*Mortality rate*

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

Other Long-term Benefits

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Pada awal tahun	1.175.404	985.792	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	265.396	230.563	*Current service cost*
Biaya bunga	98.339	88.425	*Interest expense*
	363.735	318.988	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	174	-	*Loss from change in demographic assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	8.431	97.413	*Loss from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	5.596	4.980	*Loss from combination of change in assumptions*
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(192.286)	73.494	*Experience (gains)/losses*
	1.361.054	1.480.667	
Pembayaran manfaat	(359.872)	(305.263)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	1.001.182	1.175.404	*At end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2015	2014 disajikan kembali/ *(restated)*	
Tingkat diskonto	9,10% - 9,19%	8,34%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,35% - 8,30%	6,80%	*Rate of salary increase per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,04%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,17%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1,00%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,06%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 1,97%*	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	1,00%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,00%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,00%*	*Mortality rate*

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja Karyawan (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

Perusahan terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Perusahan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 26,36 tahun.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Post-employment Benefits Obligation *(continued)*

Other Long-term Benefits *(continued)*

The Company is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Life expectancy

The majority of the plans' obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Company and its subsidiaries also invests in property, bonds, mutual funds and cash. The Group believes that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 26.36 years.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan Pascakerja					*Post-Employment Benefits*
Program Pensiun	594.314	1.404.092	2.397.786	4.396.192	*Pension Plan*
Imbalan Pascakerja lainnya	2.015.788	7.847.826	105.631.661	115.495.275	*Other Post-Employment Benefit*
Imbalan Pemeliharaan Kesehatan	723.317	1.651.898	1.330.752	3.705.967	*Health care benefits*
Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya	318.318	1.359.707	1.760.026	3.438.051	*Other long-term benefits*
Total	3.651.737	12.263.523	111.120.225	127.035.485	*Total*

50. TRANSAKSI NON-KAS / *50. NON-CASH TRANSACTIONS*

	2015	2014	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			*Non-cash investing and financing activities:*
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui:			*Additions to construction in progress through:*
Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	2.871.885	1.695.567	*Drawdown of loans and project cost payable*
Bantuan Pemerintah	1.678.761	2.595.489	*Government equity participation*
Kapitalisasi biaya pinjaman	1.390.684	997.479	*Capitalization of borrowing costs*
Kapitalisasi beban penyusutan	8.571	109.206	*Capitalization of depreciation expense*
Mutasi utang lain-lain	2.963.801	(2.047.945)	*Movement of other payables*
Pembayaran pajak revaluasi aset melalui subsidi listrik Pemerintah	3.000.000	-	*Tax payment on asset revaluation through Government's electricity subsidy*
Penambahan ventura bersama melalui reklasifikasi aset tidak lancar lain	20.403	-	*Addition of joint venture through reclassification from non-current assets*
Penambahan nilai aset dan properti investasi melalui hasil revaluasi	653.441.219	-	*Addition of value of assets and investment properties through revaluation*

51. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *51. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat Hubungan Berelasi / ***Nature of Related Parties***

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").

a. The Government is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Stockholder of the Company and State-Owned Enterprises ("SOE").

b. Perusahaan dan entitas anak mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan dan perusahaan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

b. The Company and its subsidiaries are related to other SOE owned by the Ministry of Finance and other companies owned by Regional Government.

c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).

c. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).

d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

d. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

51. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

51. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Nature of Related Parties *(continued)*

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
Bank Rakyat Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas dan investasi jangka pendek/*Restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalent and short-term investment*
Bank Mandiri	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas dan investasi jangka pendek/*Restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalent and short-term investment*
Bank Negara Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan kas dan setara kas/ *Restricted cash in bank and time deposit and and cash equivalent*
Bank DKI	BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi/*Regional enterprise owned by Provincial Government*	Kas dan setara kas/*cash and cash equivalent*
Bank Tabungan Negara	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Kas dan setara kas/*cash and cash equivalent*
PT Wijaya Karya - Navigat	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi sewa PLTD HSD Lirik/*Rent transaction of PLTD HSD Lirik*
PT Pertamina Geothermal Energi	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian tenaga listrik untuk PLTP Lahendong, Ulubelu dan Kamojang/ *Power purchase transaction for PLTP Lahendong, Ulubelu and Kamojang*
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transaction*
PT Pertamina	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/*Fuel and lubricants transaction*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/*Fuel and lubricants transaction*
PT Perusahaan Gas Negara	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/*Fuel and lubricants transaction*
PT Wijaya Karya	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transaction*
PT Transportasi Gas Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Hutang biaya transportasi gas untuk Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU)/ *Payable of gas transportation cost for Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU)*
PT Nusantara Regas	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian gas untuk IP dan PJB/ *Gas purchase transaction for IP and PJB*
PT Surveyor Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/*Engineering services survey and coal measurement*
PT Sucofindo	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/*Engineering service, survey and coal measurement*
PT Jakarta Lloyd	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi biaya transportasi bahan bakar dan batubara di KITSBU/*Fuel and coal transportation transactions in KITSBU*
PT Asuransi Jasa Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/*Insurance of buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels owned by the Company*
Perum Jasa Tirta	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
BUMN lainnya/*other SOE*	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *SOE owned by Ministry of Finance*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Geo Dipa Energi	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pinjaman yang diberikan untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan kontrak penyediaan tenaga listrik/*Power purchase transaction and a loan given to construct a geothermal power plant and power purchase contract*

51. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

51. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Nature of Related Parties (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Power purchase transactions*
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama/*Joint venture*	Pinjaman jangka panjang untuk membiayai proyek *compressed natural gas (CNG)* di PLTU Tambak Lorok, Semarang/*Long-term loan for the financing of the compressed natural gas (CNG) project in PLTU Tambak Lorok, Semarang*
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ *Post-employment benefit plan*	Pembayaran kontribusi Perusahaan dan entitas anak program iuran pasti/*Payment of contribution for the Group's defined contribution plan*

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Balances and Transactions with Related Parties

	Catatan/ *Notes*	2015 Rp	2015 % *)	2014 Rp	2014 % *)	
Piutang pihak berelasi	9					*Receivables from related parties*
Entitas asosiasi						*Associates*
PT Tanjung Kasam Power		23.935	0,00%	23.935	0,00%	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Mitra Energi Batam		683	0,00%	3.712	0,00%	*PT Mitra Energi Batam*
PT Geo Dipa Energi		-	-	76.500	0,01%	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energy Batam		-	-	960	0,00%	*PT Dalle Energy Batam*
Ventura bersama						*Joint ventures*
PT Perta Daya Gas		293.369	0,02%	249.072	0,05%	*PT Perta Daya Gas*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		22.329	0,00%	27.441	0,01%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
Sub jumlah		340.316	0,02%	381.620	0,07%	*Sub total*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10					*Restricted cash in banks and time deposits*
BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Mandiri		14.345	0,00%	6.733	0,00%	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia		777	0,00%	506	0,00%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia		-	-	450	0,00%	*Bank Rakyat Indonesia*
Sub jumlah		15.122	0,00%	7.689	0,00%	*Sub total*
Kas dan setara kas	12					*Cash and cash equivalents*
BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Rakyat Indonesia		9.632.824	0,78%	9.349.008	1,73%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		4.109.475	0,33%	5.559.268	1,03%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri		4.431.149	0,36%	4.375.766	0,81%	*Bank Mandiri*
Bank Tabungan Negara		2.898	0,00%	29.360	0,01%	*Bank Tabungan Negara*
BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi						*Regional enterprise owned by Provincial Government*
Bank DKI		968.905	0,08%	939.654	0,17%	*Bank DKI*
Sub jumlah		19.145.251	1,55%	20.253.056	3,75%	*Sub total*
Investasi jangka pendek	13					*Short-term investment*
BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Mandiri		66.150	0,01%	9.790	0,00%	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia		50.000	0,00%	84.100	0,02%	*Bank Rakyat Indonesia*
Sub jumlah		116.150	0,01%	93.890	0,02%	*Sub total*
Piutang usaha	14					*Trade accounts receivable*
Badan Usaha Milik Negara		571.894	0,05%	584.802	0,11%	*State-owned enterprises*
Piutang subsidi listrik	15	17.501.009	1,43%	19.280.861	3,57%	*Receivables on electricity subsidy*
Jumlah		**37.689.742**	**3,06%**	**40.601.918**	**7,52%**	***Total***

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/*Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses*

51. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

51. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Balances and Transactions with Related Parties (continued)

	Catatan/ *Notes*	2015 Rp	2015 % *)	2014 Rp	2014 % *)	
Penerusan pinjaman	23	31.710.583	8,36%	29.097.684	8,26%	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga keuangan Pemerintah non bank	24	8.488.486	2,24%	8.665.726	2,46%	*Government and non bank Goverment Financial Institution Loans*
Utang bank	26					*Bank loans*
BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Rakyat Indonesia		17.249.819	4,55%	13.033.795	3,70%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		11.571.199	3,05%	5.097.986	1,45%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri		7.357.554	1,94%	8.878.910	2,52%	*Bank Mandiri*
BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi						*Regional enterprise owned by Provincial Government*
Bank DKI		3.513.394	0,93%	2.154.570	0,61%	*Bank DKI*
Sub jumlah		39.691.966	10,47%	29.165.261	8,28%	*Sub total*
Utang pihak berelasi	29					*Payable to related parties*
Entitas asosiasi						*Associates*
PT Mitra Energi Batam		2.196	0,00%	5.434	0,00%	*PT Mitra Energi Batam*
PT Dalle Energy Batam		370	0,00%	1.897	0,00%	*PT Dalle Energy Batam*
Sub jumlah		2.566	0,00%	7.331	0,00%	*Sub total*
Utang usaha	30					*Trade accounts payable*
Entitas asosiasi						*Associates*
PT Sumber Segara Primadaya		623.641	0,16%	242.638	0,07%	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Tanjung Kasam Power		92.224	0,02%	50.400	0,01%	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Geo Dipa Energi		92.212	0,02%	-	0,00%	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energy Batam		55.233	0,01%	44.680	0,01%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Mitra Energi Batam		15.822	0,00%	41.897	0,01%	*PT Mitra Energi Batam*
Ventura bersama						*Joint venture*
PT Bajradaya Sentranusa		152.899	0,04%	104.664	0,03%	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		133.819	0,04%	75.919	0,02%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
PT Pertamina		6.414.466	1,69%	9.820.434	2,79%	*PT Pertamina*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk		663.328	0,17%	677.527	0,19%	*PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk*
PT Nusantara Regas		329.104	0,09%	536.370	0,15%	*PT Nusantara Regas*
PT Perusahaan Gas Negara		312.389	0,08%	802.366	0,23%	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Pertamina Geothermal Energy		275.832	0,07%	52.003	0,01%	*PT Pertamina Geothermal Energy*
Perum Jasa Tirta		74.266	0,02%	65.535	0,02%	*Perum Jasa Tirta*
PT Jakarta Lloyd		22.218	0,01%	3.098	0,00%	*PT Jakarta Lloyd*
PT Sucofindo		5.798	0,00%	5.708	0,00%	*PT Sucofindo*
PT Transportasi Gas Indonesia		4.857	0,00%	-	0,00%	*PT Transportasi Gas Indonesia*
PT Surveyor Indonesia		3.706	0,00%	6.370	0,00%	*PT Surveyor Indonesia*
PT Wijaya Karya		2.762	0,00%	59.006	0,02%	*PT Wijaya Karya*
Pihak berelasi lainnya						*Other related parties*
Lain-lain		16.271	0,00%	83.302	0,02%	*Others*
Sub jumlah		9.290.847	2,42%	12.671.917	3,58%	*Sub total*
Biaya masih harus dibayar	33					*Accrued expenses*
Bunga dan beban keuangan						Interest and financing charges
Penerusan pinjaman		219.259	0,06%	227.981	0,06%	*Two-step loans*
Utang bank BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*Bank loans from SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Mandiri		168.748	0,04%	162.195	0,05%	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia		138.365	0,04%	140.735	0,04%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		54.357	0,01%	41.089	0,01%	*Bank Negara Indonesia*
Penalti atas pembelian BBM dari BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan						*Penalties on purchase of fuel from SOE owned by Ministry of Finance*
PT Pertamina		18.572	0,00%	18.572	0,01%	*PT Pertamina*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga keuangan Pemerintah non bank		114.460	0,03%	30.163	0,01%	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Sub jumlah		713.761	0,18%	620.735	0,18%	*Sub total*
Jumlah		**89.898.209**	**23,68%**	**80.228.654**	**22,76%**	***Total***

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/*Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses*

51. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

51. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Balances and Transactions with Related Parties *(continued)*

	Catatan/ *Notes*	2015 Rp	2015 % *)	2014 Rp	2014 % *)	
Penjualan tenaga listrik	36					*Sale of electricity*
BUMN yang dimiliki Menteri Keuangan		5.398.588	2,57%	5.084.025	2,72%	*SOE owned by Ministry of Finance*
Subsidi listrik Pemerintah	37	56.552.532	100,00%	99.303.250	100,00%	*Government's electricity subsidy*
Beban bahan bakar dan pelumas	39					*Fuel and lubricants expense*
BUMN yang dimiliki Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
PT Pertamina		45.924.873	38,08%	60.747.294	39,67%	*PT Pertamina*
PT Perusahaan Gas Negara		13.747.818	11,40%	7.805.325	5,10%	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Nusantara Regas		10.656.308	8,84%	12.601.820	8,23%	*PT Nusantara Regas*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk		6.723.120	5,58%	1.700.791	1,11%	*PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk*
Jumlah		77.052.119	63,90%	82.855.230	54,11%	*Total*
Beban pemeliharaan	42					*Maintenance expenses*
Ventura bersama						*Joint venture*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		204.103	1,16%	574.025	3,46%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
Beban usaha lain-lain	44					*Other operating expenses*
BUMN yang dimiliki Menteri Keuangan						*SOE owned by Ministry of Finance*
PT Asuransi Jasa Indonesia		712.967	10,06%	342.468	6,24%	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
PT Surveyor Indonesia		49.636	0,70%	26.480	0,48%	*PT Surveyor Indonesia*
PT Sucofindo		9.715	0,14%	33.553	0,61%	*PT Sucofindo*
Jumlah		772.318	10,90%	402.501	7,33%	*Total*
Beban keuangan	45					*Financial cost*
Utang bank		2.803.534	15,99%	3.143.305	18,89%	*Bank loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank		569.073	3,25%	597.610	3,59%	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Penerusan pinjaman		564.820	3,22%	788.463	4,74%	*Two-step loans*
Utang usaha pembelian bahan bakar		17.133	0,10%	18.514	0,11%	*Trade accounts payable on purchase of fuel*
Jumlah		3.954.560	22,56%	4.547.892	27,33%	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/*Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses*

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan yang sudah dibayarkan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 16.303 juta Rp 12.866 juta.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners that has been paid in 2015 and 2014 amounted to Rp 16,303 million and Rp 12,866 million, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan yang sudah dibayarkan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 34.737 juta dan Rp 29.057 juta.

Total compensation of the Company's Directors that has been paid in 2015 and 2014 amounted to Rp 34,737 million and Rp 29,057 million, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 49.

Information about the contributions made by the Company and its subsidiaries to DP-PLN is disclosed in Note 49.

52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

At December 31, 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2015				
	JPY)*	*US$*)*	*EUR*)*	*Others **)*	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	-	20.999.242	-	-	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	71.257.878.838	44.444.701	-	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	645.274.365	177.856.702	18.823.038	472.008	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset moneter	71.903.153.203	243.300.645	18.823.038	472.008	*Total monetary assets*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	188.308.922.095	641.786.711	56.768.573	17.343.893	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	218.313.885.386	-	-	-	*Lease liability*
Utang bank	-	2.737.632.476	91.422.114	-	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	5.550.000.000	-	-	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	-	592.255.831	-	-	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	899.991.211	476.854.332	-	23.088.267	*Other payables*
Utang biaya proyek	392.338.505	61.394.118	7.915.591	-	*Project cost payable*
Utang usaha	-	505.605.682	1.747.171	-	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	4.930.820.534	118.702.027	1.015.374	172.667	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter	412.845.957.731	10.684.231.177	158.868.823	40.604.827	*Total monetary liabilities*
Liabilitas moneter bersih	(340.942.804.528)	(10.440.930.532)	(140.045.785)	(40.132.819)	*Net monetary liabilities*
Ekuivalen Rupiah	(39.046.202)	(144.032.637)	(2.110.445)	(553.632)	*Rupiah equivalent*
Jumlah dalam Rupiah - bersih	**(185.742.916)**				***Total in Rupiah - net***

	2014				
	JPY)*	*US$*)*	*EUR*)*	*Others **)*	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	-	18.191.532	-	-	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	52.494.647.420	40.903.457	-	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	1.823.340.554	291.919.659	53.106.807	472.085	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset moneter	54.317.987.974	351.014.648	53.106.807	472.085	*Total monetary assets*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	190.798.089.873	601.566.178	75.060.997	21.494.548	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	245.888.101.122	-	-	-	*Lease liability*
Utang bank	-	3.060.799.804	46.441.613	-	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	5.550.000.000	-	-	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	-	614.367.964	-	-	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	644.740.431	322.188.702	11.446.166	30.745.828	*Other payables*
Utang biaya proyek	1.836.781.529	29.233.124	4.989.618	-	*Project cost payable*
Utang usaha	-	521.354.264	13.307.109	-	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	4.294.224.806	115.996.481	677.691	227.936	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter	443.461.937.761	10.815.506.517	151.923.194	52.468.312	*Total monetary liabilities*
Liabilitas moneter bersih	(389.143.949.787)	(10.464.491.869)	(98.816.387)	(51.996.227)	*Net monetary liabilities*
Ekuivalen Rupiah	(40.567.790)	(130.178.279)	(1.495.414)	(646.833)	*Rupiah equivalent*
Jumlah dalam Rupiah - bersih	**(172.888.316)**				***Total in Rupiah - net***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2015 and 2014 are as follows:

Mata uang / *Currency*	2015 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	2014 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)
JPY	115	104
US$	13.795	12.440
EUR	15.070	15.133
AUD	10.064	10.218
CHF	13.951	12.583
GBP	20.451	19.370

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp 16.229.625 juta tahun 2015 dan laba kurs sebesar Rp 3.436.148 juta tahun 2014.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 28 Juni 2016, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan turun sebesar Rp 3.015.136 juta.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net loss on foreign exchange of Rp 16,229,625 million in 2015 and net gain amounting to Rp 3,436,148 million in 2014.

If assets and liabilities in foreign currencies as at December 31, 2015 had been translated using the closing rates as of June 28, 2016, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been decreased by Rp 3,015,136 million.

53. SEGMEN OPERASI

Informasi Wilayah Geografis

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara (”Sulnusra”), dan Maluku Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, rinciannya adalah sebagai berikut:

53. OPERATING SEGMENT

Geographical Information

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statement.

For management reporting purposes, in December 31, 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries were divided into Sumatera, Java-Bali, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara (“Sulnusra”), and Maluku Papua. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, with the following details:

53. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *53. OPERATING SEGMENT (continued)*

Informasi Wilayah Geografis (lanjutan) / *Geographical Information (continued)*

	2015						
	Sumatera	Jawa Bali/ *Java Bali*	Kalimantan	Sulnusra	Maluku Papua	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	31.596.345	164.731.030	8.447.066	10.260.822	2.311.727	217.346.990	*External revenue*
Hasil segmen	(11.262.043)	(47.554.980)	(8.386.428)	(9.540.035)	(3.723.832)	(80.467.318)	***Segment results***
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						51.552.022	*Unallocated income, net*
Rugi usaha sebelum pendapatan lain - lain						(28.915.296)	*Operating loss before other income*
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						25.851.037	*Unallocated income*
Manfaat pajak						18.649.497	*Tax benefit*
Laba tahun berjalan						15.585.238	*Income for the year*
Aset segmen	104.038.991	687.911.395	38.443.243	38.655.087	8.351.229	877.339.945	*Segment assets*
Aset tidak dapat dialokasikan						349.955.567	*Unallocated assets*
Jumlah aset konsolidasi						1.227.355.512	*Total consolidated assets*
Liabilitas segmen	15.514.993	70.193.374	5.368.863	5.470.728	1.880.500	98.428.458	*Segment liabilities*
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						280.707.983	*Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas konsolidasi						379.136.441	*Total consolidated liabilities*

	2014						
	Sumatera	Jawa Bali/ *Java Bali*	Kalimantan	Sulnusra	Maluku Papua	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	26.514.443	149.078.615	7.197.197	9.025.043	1.602.643	193.417.941	*External revenue*
Hasil segmen	(28.140.168)	5.294.362	(13.478.802)	(15.371.211)	(5.643.838)	(57.339.657)	***Segment results***
Beban tidak dapat dialokasikan, bersih						(14.553.634)	*Unallocated expenses, net*
Rugi usaha sebelum pendapatan lain-lain						(71.893.291)	*Operating loss before other income*
Laba usaha							*Operating income*
Pendapatan lain-lain tidak dapat dialokasikan						90.840.824	*Unallocated income*
Beban pajak						(4.943.455)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan						14.004.078	*Income for the year*
Aset segmen	93.552.216	178.346.178	34.842.161	35.034.161	7.568.947	349.343.663	*Segment assets*
Aset tidak dapat dialokasikan						190.177.527	*Unallocated assets*
Jumlah aset konsolidasi						539.521.190	*Total consolidated assets*
Liabilitas segmen	75.847.511	162.597.381	32.074.190	32.682.743	11.234.318	314.436.143	*Segment liabilities*
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						37.911.509	*Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas konsolidasi						352.347.652	*Total consolidated liabilities*

54. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian pengadaan energi primer

i. Gas

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2015, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

a. Primary energy supply agreements

i. Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* e)
Cilegon	a)	2006-2018	bbtu	356.300
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	101.400
Muara Karang - Priok	b)	2004-2017	bbtu	679.000
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2008-2016	bbtu	287.245
Muara Tawar. Payo Selincah. Rengat. Duri	c)	2009-2020	bbtu	182.585
Muara Tawar, Inderalaya, Borang	Medco E&P Lematang	2009-2017	bbtu	129.136
Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd	2010-2027	bbtu	368.700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018	bbtu	482.560
Gresik	Hess Ltd	2006-2026	mmscf	330.200
Gresik	PT Walinusa Energi	2010-2018	bbtu	44.160
Aceh	PT Medco E&P Malaka	2010-2027	bbtu	85.000
Belawan	PT Pertamina EP/TAC Pertamina Glagah Kambuna	2009-2017	mmscf	65.650
Pekanbaru	Kalila Bentu Ltd	2005-2020	bbtu	128.619
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	bbtu	27.735
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2018	bbtu	104.002
Tanjung Batu	PT Pertamina EP	2005-2016	bbtu	79.026
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2016	bbtu	2.558
Bontang	Total E&P Indonesie. INPEX Co	2009-2017	bbtu	681
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2019	bbtu	72.270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2016	bbtu	10.950
Grati	d) Lapangan Oyong	2009-2016	bbtu	116.070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	21.000
Sungai Gelam	PT Pertamina EP	2011-2017	mmscf	8.434
Bangkanai	Salamander Energy (Bangkanai) Ltd	2013-2023	bbtu	104.000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51.945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2010-2015*)	bbtu	61.281
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2010-2022	bbtu	219.000
Grati	d) Lapangan Wortel	2012-2018	bbtu	55.827
Grati	PT Parna Raya	2009-2020	mmscf	280.000
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280.100
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31.793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5.911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2012-2020	bbtu	8.340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	354.000
Melibur	Kondur Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
Nunukan	PT Pertamina EP	2012-2018	mmscf	4.200
Sungai Gelam	Pertamina EP (Own Operation UBEP Jambi)	2012-2017	mmscf	3.500
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Limited	2012-2019	mmscf	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	Juta Ton	11
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11.550
Bunyu Kaltim	PT Pertamina EP	2012-2016	mmscf	609
Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	2013-2017	bbtu	33.362
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2013-2016	bbtu	4.190
Sumatera	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2019	bbtu	9.250
Tarakan	But. Manhattan Kalimantan Investment Pte.Ltd	2012-2018	bbtu	10.500
Batam	Inti Daya Latu Prima	2012-2019	bbtu	11.685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2017	mmscf	39.898
Belawan. Muara Karang. Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2015-2033	kargo	406
Rawa Minyak, Riau	Petroselat Ltd.	2015-2020	bbtu	7.802
Tana Tidung	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris	2015-2020	mmscf	805

a) CNOOC SES Ltd.; PT Pertamina Hulu Energi Oses; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra BV.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd.; dan/*and* Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
b) Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd.; Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd.; dan/*and* Talisman Resources (North West Java) Ltd.
c) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd.; dan/*and* Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
d) Santos (Sampang) Pty Ltd.; Singapore Petroleum Sampang Ltd. (*formerly* Coastal Indonesia Sampang Ltd.); dan/*and* Cue Sampang Pty Ltd.
e) Dalam jumlah penuh/*In full amount*
*) Sedang dalam proses amandemen/*Still on amendment process*

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US$ 3,09 sampai dengan US$ 10,28 per *million British Thermal Units* (MMBTU) dan *Liquid Natural Gas* ("LNG") antara US$ 7,17 sampai dengan US$ 10,61 per MMBTU.

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US$ 3.09 to US$ 10.28 per million British Thermal Units (MMBTU) and the price of Liquid Natural Gas ("LNG") ranges from US$ 7.17 to US$ 10.61 per MMBTU.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

i. Gas (lanjutan)

Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengadakan perjanjian jual beli dan penyaluran gas untuk PLTGU Cilegon untuk jangka waktu 10 tahun yang dimulai sejak Maret 2009 sampai dengan Pebruari 2019. Penyaluran gas untuk periode bulan pertama adalah sebesar 36,36 *billion British Thermal Units* (BBTU) per hari, sedangkan untuk periode selanjutnya sampai dengan lima tahun sebesar 27,27 BBTU per hari. Untuk periode selanjutnya sampai berakhirnya perjanjian, pemakaian maksimum dan minimum gas akan disesuaikan dengan ketersediaan gas PGN. Pada tanggal 27 Oktober 2015, Perusahaan dan PGN menandatangani Kesepakatan Bersama pemakaian gas *interruptible* untuk PLTGU Cilegon sebesar maksimal 10 BBTU per hari.

Perusahaan memperoleh fasilitas *stand-by letter of credit* (SBLC) maksimum sebesar US$ 39,9 juta dari Bank Negara Indonesia, berjangka waktu 13 tahun sampai dengan 31 Desember 2016 untuk menjamin kewajiban pembayaran pembelian gas untuk Sektor Muara Karang - Priok.

PLN Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PGN untuk mengadakan gas alam. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun dengan jumlah volume gas sebesar 72.270 BBTU, sejak gas pertama disalurkan ke titik penyerahan, yaitu tanggal 7 Agustus 2004. Sesuai dengan perjanjian, PLN Batam harus menyerahkan jaminan pembayaran berupa SBLC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

PLN Batam juga telah menyerahkan jaminan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp 7.880 juta dan Rp 5.502 juta pada tahun 2015 dan 2014 (Catatan 10).

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

i. Gas (continued)

On September 25, 2008, the Company entered into an agreement with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), in relation to buying, selling and channeling of gas for PLTGU Cilegon with a term of 10 years, from March 2009 until February 2019. Gas channeling for the first month is 36.36 billion British Thermal Units (BBTU) per day, while for the succeeding periods until the fifth year the figure is 27.27 BBTU per day. For the remaining succeeding periods until the end of the agreement, the maximum and minimum use of gas will be in accordance with the gas availability of PGN. On October 27, 2015, the Company and PGN signed the Joint Deal of Interruptible gas usage for PLTGU Cilegon with the maximum amount of 10 BBTU per day.

The Company has a stand-by letters of credit (SBLC) facility from Bank Negara Indonesia with the maximum amount of US$ 39.9 million and a term of 13 years, due on December 31, 2016 to guarantee the payment obligations for the purchase of gas for Muara Karang – Priok Sector.

PLN Batam entered into an agreement with PGN for the supply of natural gas. The agreement is valid for 15 years with total gas volume of 72,270 BBTU, starting from the first time the gas is channeled to the point of delivery, which was on August 7, 2004. In accordance with the agreement, PLN Batam must provide a payment guarantee in the form of an SBLC issued by Bank Mandiri.

PLN Batam also has placed collateral time deposits amounting to Rp 7,880 million and Rp 5,502 million in 2015 and 2014, respectively (Note 10).

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

ii Batubara

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

ii. Coal

Pemasok/*Suppliers*	Jumlah metrik ton per tahun/ *Quantity per year in metric tons*)*	Periode/ *Period*
Rutin/*Regular*		
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	5.180.000	2013-2022
PT Kaltim Prima Coal	5.000.000	2007-2016
PT Berau Coal	2.500.000	2009-2018
PT Indominco Mandiri	2.100.000	2008-2017
PT Kideco Jaya Agung	1.700.000	2009-2018
PT Adaro Indonesia	1.595.969	2014-2023
PT Oktasan Baruna Persada	750.000	2006-2016
PT Natuna Energi Indonesia	480.000	2006-2017
PT Eksploitasi Energi Indonesia	480.000	2006-2015**)
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Arutmin Indonesia dan/*and* PT Darma Henwa	1.501.000	2007-2027
PT Oktasan Baruna Persada dan/*and* PT Insani Perkasa	540.000	2012-2015**)
PT Prima Multi Mineral dan/*and* PT Baratama	384.000	2012-2015**)
PT Kasih Industri Indonesia dan/*and* PT Senamas Energindo Mulia	378.000	2009-2028
Program Percepatan/*Fast Track Program*		
PT Titan Mining Energy	2.920.000	2007-2027
PT Dwi Guna Laksana	1.675.000	2009-2033
PT Hanson Energy	858.000	2012-2034
Kerjasama konsorsium/*Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan/*and* PT Darma Henwa	5.903.000	2007-2027
PT Kasih Industri Indonesia dan/*and* PT Senamas Energindo Mulia	2.860.000	2007-2027
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan/*and* PT Rizki Anugrah Pratama	1.185.328	2010-2016
CV Multi Bara Persada dan/*and* PT Eksploitasi Energi Indonesia	1.179.104	2011-2016
PT Oktasan Baruna Persada dan/*and* PT Baramega Citra Mulia Persada	1.026.000	2009-2032
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan/*and* PT Buana Eltra	576.000	2011-2016
PT Energi Batubara Lestari dan/*and* PT Batara Batari Sinergy Nusantara	220.500	2014-2032

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*
**) Sedang dalam proses amandemen/*Still on amendment process*

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp 341.867 dan Rp 763.993 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") dan *Hardgrove Grindability Index* ("HGI").

The price of coal purchases ranges from Rp 341,867 to Rp 763,993 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT") and Hardgrove Grindability Index ("HGI").

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

ii Batubara (lanjutan)

PLN Batubara mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

ii. Coal (continued)

PLN Batubara entered into Coal Mining Operation Cooperation Agreement with suppliers as follows:

Pemasok/*Suppliers*	Lokasi/ *Location*	Jumlah metrik ton/ *Quantity in metric ton*)*
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	43.396.322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat/*West Papua*	14.800.000
PT Mahakarya Abadi Prima	Sorolangun, Jambi	11.822.430
PT Bangun Persada Jambi Energi	Sorolangun, Jambi	5.000.000
PT Andhika Yoga Pratama	Sorolangun, Jambi	2.857.143
PT Bima Putra Abadi Citranusa	Lahat, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	1.000.000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	677.680

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diaddendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp 18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor.*

iii. Fuel

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina, and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp 18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak (lanjutan)

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 Nopember 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. HSD *(High Speed Diesel)*
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kiloliter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan di Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
2. Harga pembelian IDO *(Industrial Diesel Oil)* sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan di Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
3. Harga pembelian MFO *(Marine Fuel Oil)* sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.
4. Memperpanjang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak efektif sampai dengan tahun 2015.

Tahun 2013, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

iii. Fuel (continued)

Based on Amendment III of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company and Pertamina agreed in 2011 on the following:

1. HSD (High Speed Diesel)
   - *The price of HSD for the purchase of up to 2,537,161 kiloliters (kl) from 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.*
   - *The price of HSD for the purchase of up to 480,487 kl from supply points of Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS.*
   - *The price of HSD for the purchase of up to 2,978,360 kl from the supply points at Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS.*
   - *The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from suppy points other than the 21 supply points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.*
2. The price of IDO (Industrial Diesel Oil) for purchases of up to 3,933 kl from the supply point at Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from supply points other than supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.
3. The price of MFO (Marine Fuel Oil) for purchases of up to 1,193,166 kl from the supply point at Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from a supply point other than the supply point at Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.
4. The Fuel Sale and Purchase Agreement was amended to be effective until the year 2015.

In 2013, the Company and Pertamina agreed to use the 2011 price, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed yet.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak (lanjutan)

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara Perusahaan dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perusahaan antara lain:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;

b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, Perusahaan diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak ("BBM") (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perusahaan, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 9 Pebruari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

a. Harga transaksi HSD tahun 2015:
   - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS
   - Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS
b. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

iii. Fuel (continued)

Based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia's letter No. S-74/MK.02/2015 to Minister of Energy and Mineral Resources regarding its recommendation on the sale and purchase price of HSD and MFO between the Company and Pertamina for 2014 dated January 30, 2015, the terms of the agreement between Pertamina and the Company are:

a. The sales price for 2014 uses the price based on the review of the Board of Finance and Development Supervision as follows: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;
b. For the efficiency of purchase cost in 2015, the Company is allowed to acquire from other sources of fuel than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2014 based on those prices.

In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel ("BBM") (HSD and MFO) to the Company, has conducted discussions on selling price of fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company in 2015 in the Minister of State Owned Enterprises office, facilitated by a deputy in energy business logistics and tourism, to determine the selling price of fuel in 2015.

Based on the Sales and Purchase Price Agreement for Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company dated on February 9, 2016 the results are:

a. HSD transaction price for 2015:
   - *January until September 2015 is 107% from MOPS*
   - *October until December 2015 is 105% from MOPS*
b. MFO transaction price for 2015 is 109.5% from MOPS.

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2015 based on those prices.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, estimasi liabilitas bunga dan denda atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp 18.572 juta dan Rp 18.572 juta yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 33).

Pada tanggal 21 Pebruari 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 3 September 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 25 Oktober 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit di Bangka Belitung sebanyak 120.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 1 Nopember 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit di Tanjung Batu dan Loa Raya sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk untuk Lokasi Pembangkit Listrik Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

iii. Fuel (continued)

As of December 31, 2015 and 2014, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp 18,572 million and Rp 18,572 million, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 33).

On February 21, 2013, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On September 3, 2014, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On October 25, 2013, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Power Plant in Bangka Belitung for 120,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On November 1, 2013, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Power Plant in Tanjung Batu and Loa Raya for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On April 15, 2014, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk Power Plant Location in Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai and Semboja), and Ketapang (Sukaharja) for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan energi primer (lanjutan)

iv. Uap Panas Bumi

Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pertamina Geothermal Energy untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 25 tahun yang berakhir tahun 2037, dan untuk daerah Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030, serta untuk PLN Lahendong selama 30 tahun yang berakhir tahun 2038.

Pada tanggal 17 Pebruari 2010, Perusahaan dan entitas anak dan Pertamina mengadakan perjanjian untuk pengadaan uap panas bumi, untuk Ulubelu selama 30 tahun.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dan entitas anak dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Primary energy supply agreements *(continued)*

iv. Geothermal Heat

The Company has a geothermal heat procurement agreement with Pertamina Geothermal Energy for Kamojang area for 25 years until 2037, for Gunung Salak and Darajat area for 30 years until 2030 and for PLN Lahendong for 30 years until 2038.

On February 17, 2010, the Company and its subsidiaries and Pertamina entered into an geothermal heat procurement agreement for Ulubelu for 30 years.

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract

Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPA and ESC through a Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalization in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company and its subsidiaries may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

i. Sudah Beroperasi

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract *(continued)*

As of December 31, 2015, the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows:

i. In Operations

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF [b] *(%)*	Periode/ *Period* [a]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial operation date*
1.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Gas	315	85	1999-2022	1 Maret 1999/ *March 1, 1999* 16 Nopember 2008/ *November 16, 2008* 15 September 2013/ *September 15, 2013*
2.	Chevron Geothermal Salak Ltd. dan/*and* Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	165	90	2000-2040	1 Oktober 2000/ *October 1, 2000*
3.	PT Makassar Power	Pare-pare, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	MFO	62,2	80	1998-2016	1 Mei 1998/ *May 1, 1998*
4.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/*Coal*	1.230	85	2002-2040	1 Januari 2002/ *January 1, 2002*
5.	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/*Coal*	1.220	83	2001-2030	1 Januari 2001/ *January 1, 2001*
6.	Pertamina Geothermal Energy Chevron Darajat Ltd. Texaco Darajat Ltd. dan/*and* PT Darajat Geothermal Indonesia	Darajat, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	180	95	2000-2030	1 Pebruari 2000/ *February 1, 2000* 1 Agustus 2007/ *August 1, 2007*
7.	Pertamina dan/*and* Magma Nusantara Limited	Wayang Windu, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2000-2030	1 Juni 2000/ *June 1, 2000*
				110	90	2009-2039	1 Maret 2009/ *March 1, 2009*
8.	PT Asrigita Prasarana	Palembang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ *September 1, 2004*
9.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/*Central Java*	Batubara/*Coal*	562	80	2007-2037	1 Pebruari 2007/ *February 1, 2007*
10.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	85,5	90	2005-2025	1 Desember 2005/ *December 1, 2005*
11.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	55	84	2005-2034	29 Oktober 2004/ *October 29, 2004*
12.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	17,4	90	2005-2017	11 September 2005/ *September 11, 2005* 1 April 2006/ *April 1, 2006*
13.	PT Metaepsi Pejebe Power Generation	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	80	80	2007-2027	10 Nopember 2007/ *November 10, 2007*
14.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Batubara/*Coal*	27	80	2007-2032	1 Nopember 2007/ *November 1, 2007*
Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*				4.369,1			

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi (lanjutan)

i. Sudah Beroperasi (lanjutan)

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract *(continued)*

i. In Operations (continued)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF [b] *(%)*	Periode/ *Period* [a]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial operation date*
Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*				4.369,1			
15.	PT Pertamina Geothermal Energi	Kamojang, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/*Geothermal*	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ *January 26, 2008*
16.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Batubara/*Coal*	45	83	2008-2038	20 Desember 2008/ *December 20, 2008*
17.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/*Geothermal*	11,3	95	2008-2038	19 Desember 2008/ *December 19, 2008*
18.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/*Hydro*	180	90	2011-2040	18 Januari 2011/ *January 18, 2011*
19.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	3	80	2007-2027	31 Juli 2007/ *July 31, 2007*
20.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Luwu, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	2,4	-	2010-2035	1 Mei 2010/ *May 1, 2010*
21.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Sinjai, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	10	-	2011-2036	1 Pebruari 2011/ *February 1, 2011*
22.	PT GH EMM Indonesia	Muara Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	227	80	2011-2041	1 Agustus 2011/ *August 1, 2011* 1 Desember 2011/ *December 1, 2011*
23.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	Batubara/*Coal*	11	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ *October 14, 2011*
24.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/*Coal*	815	85	2012-2042	1 Maret 2012/ *March 1, 2012*
25.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/*West Java*	Batubara/*Coal*	660	80	2012-2042	3 Agustus 2012/ *August 3, 2012*
26.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/*Coal*	200	80	2012-2042	31 Oktober 2012/ *October 31, 2012*
27.	PT Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam/ *Batam Island*	Batubara/*Coal*	110	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012* 1 Nopember 2012/ *November 1, 2012*
28.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaraja, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/*Hydro*	5	65	2012-2037	10 Mei 2012/ *May 10, 2012*
29.	Joint Operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana	Pesanggaran, Bali	Diesel	50	85	2009-2017	1 Maret 2011/ *March 1, 2011*
30.	Konsorsium/*Consortium* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	67,17	80	2012-2019	29 Juni 2012/ *June 29, 2012*
31.	Konsorsium/*Consortium* PT Modaco Enersys, PT Elektrindo Perkasa Utama, Pratt & Whitney Ps. Inc., Renewable Energy Power International	Payo Selincah, Jambi	Gas	93,56	60	2012-2019	8 Juni 2012/ *June 8, 2012*
32.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Barat/*West Java*	Gas	118,8	90	2013-2032	5 Januari 2013/ *January 5, 2013*
33.	Konsorsium/*Consortium* PT PP (Persero) Tbk, PT Bangun Energy Resources, PT Navigat Energy, PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	56,6	60	2013-2019	11 Januari 2007/ *January 11, 2007*
34.	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	65	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012/ *December 30, 2012*
Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*				7.159,93			

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi (lanjutan)

i. Sudah Beroperasi (lanjutan)

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract *(continued)*

i. In Operations (continued)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF [b] *(%)*	Periode/ *Period* [a]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial operation date*
Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*				7.159,93			
35.	PT Cahaya Fajar kaltim	Ekspansi/*Expansion*	Batubara/*Coal*	50	87	2014-2039	14 Agustus 2014/ *August 14, 2014*
36.	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/*Geothermal*	55	95	2014-2044	22 September 2014/ *September 22, 2014*
37.	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara/*Coal*	21	80	2014-2039	13 September 2014/ *September 13, 2014*
38.	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Lampung	Batubara/*Coal*	12	80	2014-2039	2 Mei 2014/ *May 2, 2014*
39.	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Tenaga air/*Hydro*	20	80	2014-2039	18 Januari 2014/ *January 18, 2014*
40.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjarsari, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	200	80	2015-2045	30 Juni 2015/ *June 30, 2015*
41.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/*Coal*	380	85	2015-2045	23 September 2015/ *September 23, 2015*
42.	PT Harmoni Energy Indonesia	Sangia Wambulu, Buton, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/*Coal*	14	80	2015-2040	29 Oktober 2015/ *October 29, 2015*
43.	PT Kartanegara Energi Perkasa	Senipah, Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Gas	82	85	2015-2040	17 Maret 2015/ *March 17, 2015*
44.	PT Priamanaya Power Energi	Keban Agung, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	120	80	2015-2045	11 Nopember 2015/ *November 11, 2015*
45.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang V, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/*Geothermal*	30	90	2015-2045	29 Juni 2015/ *June 29, 2015*
46.	PT Dika Karya Lintas Nusa – PD Muara Energi – PT Kutilang Paksi Mas	Musi Rawas, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	8	80	2015-2040	8 Juni 2015/ *June 8, 2015*
47.	PT Cikarang Listrindo	Cikarang, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	300	72	1998-2018	29 Januari 1998/ *January 29, 1998*
48.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/*West Java*	Tenaga air/*Hydro*	187	50	2012-2016	2 Agustus 2004/ *August 2, 2004*
49.	PT Geo Dipa Energi	Dieng, Jawa Tengah/*Central Java*	Panas bumi/*Geothermal*	19	85	2002-2044	1 Oktober 2002/ *October 1, 2002*
Jumlah/*Total*				8.657,93			

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi. Berikut ini adalah komitmen sewa operasi:

In addition to the above power purchase agreements, the Company and its subsidiaries also entered into rental agreements that falls into the category of operating leases. The followings are commitments for operating leases:

	2015	2014	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	106.249	121.319	*No later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai dua tahun	-	97.720	*Later than one year and no later than two years*
Jumlah pembayaran minimum sewa	106.249	219.039	*Total minimum lease payments*

	2015	2014	
Rincian pembayaran sewa minimum berdasarkan lessor:			*Details of the minimum lease payment by lessor:*
Perum Jasa Tirta	97.720	192.594	*Perum Jasa Tirta*
PT Dalle Energy Batam	8.529	11.609	*PT Dalle Energy Batam*
PLTMG Jembo	-	14.836	*PLTMG Jembo*
Jumlah	106.249	219.039	*Total*

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi (lanjutan)

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract *(continued)*

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)

ii. Not Yet in Operation (Development Stage)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF [b] *(%)*	Periode/ *Period* [a]	Status/ *Status*
1.	PT Bhimasena Power Indonesia	Pemalang, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/*Coal*	1.900	86	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
2.	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumsel-8, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	1.200	80	2017-2042	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
3.	PT Lestari Banten Energi	Banten	Batubara/*Coal*	660	80	2017-2042	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
4.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jawa Tengah/*Central Java*	Batubara/*Coal*	600	85	2016-2036	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
5.	PT Pertamina Geothermal Energy and Sarulla Operations Ltd.	Sarulla, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	330	90	2017-2047	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
6.	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel-5, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	300	80	2015-2040	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
7.	PT Sorik Marapi Geothermal Energy	Mandailing Natal, Sumatera Utara/*North Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	240	90	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
8.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2016-2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
9.	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2016-2046	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
10.	PT Supreme Energy Muara Laboh	Muara Laboh, Sumatera Barat/ *West Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2016-2046	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
11.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Rantau Dedap, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2016-2046	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
12.	PT Sejahtera Alam Energy	Banyumas, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
13.	PT Graha Power Kaltim	Bontang, Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Batubara/*Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
14.	PT Tanjung Power Indonesia	Tabalong, Kalimantan Selatan/ *South Borneo*	Batubara/*Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
15.	PT Surya Kalimantan Sejati	Gunung Mas, Kalimantan Tengah/*Central Borneo*	Batubara/*Coal*	200	80	2020-2045	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
16.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu #3-4	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	90	2016-2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
17.	PT Medco Cahaya Geothermal	Ijen, Jawa Timur/*East Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	85	2020-2050	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
18.	PT Sintesa Banten Geothermal	Serang, Banten	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	90	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
19.	PT Tangkuban Parahu Geothermal Power	Subang, Jawa Barat/ *West Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	90	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
20.	PT Bakrie Darmakarya Energi	Ponorogo, Jawa Timur/ *East Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	165	90	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
21.	PT Tanggamus Electric Power	Lampung Tengah, Lampung	Tenaga air/*Hydro*	56	57	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
22.	PT Geo Dipa Energi	Dieng 2, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	95	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
23.	PT Geo Dipa Energi	Patuha 2, Jawa Barat/ *West Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	95	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
24.	PT Indo Ridlatama Power	Samboja, Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Batubara/*Coal*	55	80	2017-2045	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
25.	PT Giri Indah Sejahtera	Ungaran, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	90	2017-2047	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
26.	Spring Energi Sentosa	Tegal, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	90	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
27.	PT Rekind Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*	Batubara/*Coal*	50	80	2016-2046	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
28.	PT Lombok Energy Dynamics	Lombok, Nusa Tenggara Barat/ *West Nusa Tenggara*	Batubara/*Coal*	50	80	2016-2041	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
	Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*			7.966			

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi (lanjutan)

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan) (lanjutan)

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract *(continued)*

ii. Not Yet in Operation (Development Stage) (continued)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF [b] *(%)*	Periode/ *Period* [a]	Status/ *Status*
	Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*			7.966			
29.	PT Jabar Rekind Geothermal	Sukabumi, Jawa Barat/ *West Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	50	90	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
30.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	85	2019-2049	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
31.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/ *Geothermal*	80	90	2024-2054	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
32.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	85	2024-2055	Tahap Eksplorasi/ *Exploration Stage*
33.	PT Malea Energy	Malea, Tana Toraja, Sulawesi Selatan/*South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	90	60	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
34.	PT Bosowa Energy	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/*Coal*	250	80	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
35.	PT UPC Renewables	Samas, Bantul, Yogyakarta	Angin/*Wind*	50	27	2016-2046	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
36.	Consortium UPC Renewables Asia I Ltd. - UPC Renewable Asia III Ltd. - PT Binatek Energi Terbarukan - Sun Edison, Inc. (UPC Consortium)	Sidrap, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Angin/*Wind*	70	33	2016-2046	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
37.	PT Cirebon Energi Prasarana	Cirebon, Jawa Barat/*West Java*	Batubara/*Coal*	924	86	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
38.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi II, Jawa Tengah/*Central Java*	Batubara/*Coal*	945	80	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
39.	PT Tanjung Jati Power Company	Cirebon, Jawa Barat/*West Java*	Batubara/*Coal*	660	80	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
40.	PT Banyuasin Power Energy	Banyuasin, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	250	80	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
41.	PT North Sumatera Hydro Energy	Tapanuli, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Batubara/*Coal*	510	48	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
42.	PT Bhumi Jati Power	Jepara, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/*Coal*	2.000	86	2020-2045	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
43.	PT DSPP Power Kendari	Konawe, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	Batubara/*Coal*	100	80	2018-2043	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
44.	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Kampung Melayu, Bengkulu	Batubara/*Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
45.	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	Muara Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	600	80	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
46.	PT Muntok Listrik Utama	Bangka, Bangka Belitung	Gas	100	85	2017-2037	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
47.	Taicang Harbour Golden Concord Electric Power Generation Co., Ltd. & PT Putra Indotenaga	Singkawang	Batubara/*Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
48.	PT China Shenhua Energy Company Limited	Serang, Banten	Batubara/*Coal*	2.000	86	2020-2045	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
49.	Lainnya/*The Others* c)			1.124			
	Jumlah/*Total*			18.389			

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.

b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.

c) Meliputi kontrak dengan 126 IPP, terdiri dari 64 IPP dalam tahap pembangunan, 61 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 1 IPP dalam tahap eksplorasi, berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.

b) AF = Power supply factor which should be absorbed by the Company.

c) Represents contracts with 126 IPPs, consisting of 64 IPPs under construction, 61 IPPs in the financing stage, and 1 IPP in the exploration stage, which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with each power plant's capacity of less than 50 MW.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi (lanjutan)

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan) (lanjutan)

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract *(continued)*

ii. Not Yet in Operation (Development Stage) (continued)

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among others, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation, and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

c. Capital expenditures

As of December 31, 2015, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:

	Mata Uang/ *Currencies*	Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Program percepatan				*Fast track program*
Kontrak pembangkitan	US$	351.292.999	4.846.087	*Power plant contracts*
	JPY	450.424.400	51.584	
	Rupiah		4.293.896	
			9.191.567	
Kontrak transmisi	Rupiah		227.153	*Transmission contracts*
			227.153	
Kontrak konstruksi rutin	US$	459.281.226	6.335.785	*Regular construction contracts*
	EUR	27.629.137	416.360	
	JPY	26.075.850.283	2.986.316	
	Rupiah		16.750.335	
			26.488.796	

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran dimuka yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak.

The above amount excludes the remaining advance payments that has been paid by the Company and its subsidiaries in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Company and its subsidiaries.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.486 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$ 874,65 juta dan Rp 4.790.016 juta untuk 37 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Capital expenditures *(continued)*

Fast Track Program

Based on the President of the Republic of Indonesia's Regulation No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by the President of the Republic of Indonesia's Regulation No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired power plants (PLTU) at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

Power Plant Contracts

As of December 31, 2015, the Company signed 37 EPC contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,486 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Until December 31, 2015, the Company made a total down payment of US$ 874.65 million and Rp 4,790,016 million for 37 EPC contracts or approximately 15% of the total contract price, which is recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission Contracts

Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Desember 2015, PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah masing-masing sebesar Rp 2.915.117 juta.

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan

Penerusan pinjaman

Mata uang	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies* *)	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	*Currency*
US$	1.955.004.323	26.969.285	*US$*
JPY	100.545.437.412	11.514.886	*JPY*
EUR	16.299.910	245.633	*EUR*
Jumlah		**38.729.804**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp 24.205.431 juta dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,40% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp 14.524.373 juta tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2016 sampai dengan 2053.

Perjanjian pinjaman program percepatan

Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Capital expenditures *(continued)*

Regular Construction Contracts

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

As of December 31, 2015, PJB entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, with the Rupiah equivalent totaling Rp 2,915,117 million.

d. Unused loan facilities

Two-step loans

*) *In full amounts*

As of December 31, 2015 the unused facilities equivalent to Rp 24,205,431 million bear a provision charge of 0.10% - 0.40% per annum, while the remaining facilities of Rp 14,524,373 million do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2016 and 2053.

Loan agreements for fast track program

The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for the fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

Perjanjian pinjaman program percepatan (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

d. Unused loan facilities *(continued)*

Loan agreements for fast track program (continued)

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follows:

No	Kreditur dan pembayaran proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities*)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium*)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam US$/*US$ loan facilities*						
1	Asian Development Bank/ Program Penguatan Jaringan Listrik Sumatera/ *Electricity Grid Strengthening Sumatera Program*	575	575	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,60% - 0,10%	-	4 Desember 2015/ *December 4, 2015*	15
2	Asian Development Bank/ Program Penguatan Jaringan Listrik Sumatera/ *Electricity Grid Strengthening Sumatera Program*	25	25	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 1,40%	-	4 Desember 2015/ *December 4, 2015*	15
	Jumlah dalam US$/*Total in US$*	600	600		-		
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*						
1	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Sumatera Barat/*West Sumatera* PLTU 2 Kalimantan Barat/*West Kalimantan* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/*North Maluku* PLTU Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi* PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 2 Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	4.732.000	682.666	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	24 April 2009/ *April 24, 2009*	10
2	Bank DKI/ PLTU Riau - Tenayan	2.225.000	225.939	Average JIBOR 3 bulanan/ *3 month Average JIBOR* + 1,5%	-	12 Nopember 2015/ *November 12, 2015*	10
3	Bank Negara Indonesia/ PLTU Teluk Balikpapan Kalimantan	2.449.963	367.056	Average Time Deposit 3 bulanan/*3 month* + 1,2%	-	17 Desember 2015/ *December 17, 2015*	10
	Jumlah dalam Rupiah/*Total in Rupiah*	9.406.963	1.275.661		-		
	Fasilitas pinjaman dalam EUR$/*EUR loan facilities*						
1	Agence Francaise De Development/ *Transmission Jakarta*	100	100	EURIBOR 6 bulanan/ *6 month EURIBOR* + 0,2%	-	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	15
2	Agence Francaise De Development/ *Jakarta's grid law carbon master plan study*	1	1	0%	-	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	5
3	Kreditanstalt fur Wiederaulbau/ *Rehabilitation of unit 3x4 of Suralaya Power Plant*	175	175	2,2%	-	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	12
4	Kreditanstalt fur Wiederaulbau/ *1000 Islands Renewable Energy*	65	65	2,2%	-	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	15
5	Kreditanstalt fur Wiederaulbau/ *Rehabilitation of PLTG Kamojang*	60	60	1,7%	-	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	15
	Jumlah dalam US$/*Total in US$*	401	401		-		

*)Dalam jutaan mata uang asing sesuai masing-masing perjanjian /*In million of foreign currency in accordance with each agreements*

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

Perjanjian pinjaman program percepatan (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

d. Unused loan facilities *(continued)*

Loan agreements for fast track program (continued)

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follows:

No	Kreditur dan pembayaran proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities*)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Incurance premium*)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam EUR/*EUR loan facilities*						
1	Standard Chartered Bank/ PLTMG Arun	90	52	2,10%	6	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	14.5
2	Standard Chartered Bank/ PLTMG Bangkanai	71	17	2,10%	5	23 Desember 2013/ *December 23, 2013*	14.5
	Jumlah dalam EUR/*Total in EUR*	161	69		11		
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*						
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia Corporate loan KMK 2011	9.000.000	9.000.000	Rata-rata deposito berjangka 3 bulanan/ *3 month average time deposit* + 2,02%		8 Juli 2015/ *July 8, 2015*	1
2	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia Corporate loan 2015	12.000.000	8.500.192	Suku bunga Bank Indonesia/ *Bank Indonesia rate* + 2.3%	-	17 Desember 2015/ *December 17, 2015*	10
	Jumlah dalam Rupiah/*Total in Rupiah*	21.000.000	17.500.192		-		

*) Dalam jutaan mata uang asing sesuai masing-masing perjanjian /*In million of foreign currency in accordance with each agreements*

e. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada level tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkit/ *Power plant*	Kontraktor/ *Contractor*	Nilai kontrak/ *Contract amount* Setara Jutaan Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Periode/ *Period*
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	2.832.229	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/*consortium of* Fortum Service OY & PT Medco Energy	1.298.678	2005-2030
Jumlah/*Total*		**4.130.907**	

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Litigasi

(i) Pada tahun 2001, Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi atas tanah ahli waris yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama sebesar Rp 54 milyar di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia PT PLN (Persero) kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado, PT PLN (Persero) melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi (Derden Verzet) terhadap tanah tersebut mengingat PT PLN (Persero) merupakan bezitter yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonsea Lama selama lebih dari 50 tahun. Saat ini perkara Derden Verzet tersebut masih dalam proses di Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(ii) Pada tahun 2012, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Meta Epsi sehubungan dengan Penggugat meminta bank garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada Perusahaan. Nilai gugatan adalah sebesar Rp 83,3 milyar dan US$ 5 juta. Pada tanggal 14 Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2013, Perusahaan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Pada tanggal 27 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding Perusahaan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Litigation

(i) In 2001, Hendrik Nelwan and co-claimants filed claims for compensation for the heirs to the land rights that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonsealama, amounting to Rp 54 billion in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Reconsideration in the Supreme Court, PT PLN (Persero) lost. In the preparation of Execution by District Court of Manado, PT PLN (Persero) filed a Third Resistence of the Execution (Derden Verzet) of the land rights considering PT PLN (Persero) is a good bezitter that has been effectively controlling and operating PLTA Tonsea Lama for more than 50 years. Currently the Derden Verzet is still in the process of Reconsideration in the Supreme Court of The Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in progress in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(ii) In 2012, the Company faced unlawful acts from PT Meta Epsi in the District Court of South Jakarta relating to the plaintiff's claim to unwithdraw a bank guarantee account in Bank Niaga. The amount of the claim is Rp 83,3 billion and US$ 5 million. On March 14, 2013, the District Court of South Jakarta granted the plaintiff's claim. On March 19, 2013 the Company appealed to the High Court of South Jakarta. On October 27, 2014, the High Court of Jakarta granted the Company's appeal and cancelled the ruling of the Disctrict Court of South Jakarta. The Company won the case in the appeal process. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in appeal process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Litigasi (lanjutan)

(iii) Pada tanggal 26 Desember 2012 Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Modaco Enersys dan PT Angkasa Buana Cipta terkait Penggugat merasa dirugikan karena Perusahaan selaku tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang dirasa keliru sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp 62 milyar. Pada tanggal 19 Pebruari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan penggugat, dan selanjutnya penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(iv) Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perusahaan menghadapi gugatan di yang diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih sehubungan dengan sengketa tanah PLTGU Muara Tawar. Nilai gugatan sebesar Rp 59,2 milyar. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri dan penggugat mengajukan banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

(v) Pada tanggal 9 Mei 2012, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Didik Suprijadi selaku Ketua Aliansi Petugas Pencatat Meter Listrik (AP2ML) sehubungan dengan dasar penggajian masa kerja petugas pencatat meter dan menuntut pembatalan Keputusan Direksi tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap melanggar hukum. Nilai gugatan sebesar Rp 186 milyar. Perusahaan memenangkan perkara ini sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menunggu bukti putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Litigation *(continued)*

(iii) On December 26, 2012, the Company faced claims for unlawful acts from PT Modaco Enersys and PT Angkasa Buana Cipta relating to the plaintiff's claim that the Company as defendants gave an unsuitable design for PLTU 1 West Nusa Tenggara (2 x 10 MW) Bima. The amount of the claim is Rp 62 billion. On February 19, 2014, the District Court of South Jakarta refused the claim of plaintiff, and consequently, the Company submitted an appeal to High Court of the Jakarta on March 3, 2014. The Company won the case in the appeal process. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in appeal process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(iv) On August 21, 2014, the Company faced an unlawful act from Ny. Nesah binti Sadih relating to disputes regarding PLTGU Muara Tawar land rights. The amount of the claim was Rp 59.2 billion. The Company won the case in the State Court, subsequently the plaintiff submitted an appeal. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in appeal process in the High Court of Jakarta.

(v) On May 9, 2012, the Company faced unlawful acts from Didik Suprijadi as Chairman of the Electricity Meter Recorder Alliance (AP2ML) regarding the salary basis on the working period of meter recorder and cancellation of the Director Decision regarding procurement of materials and services that is considered a breach of law. The claim total is Rp 186 billion. The Company won the case in the appeal process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the Company is still waiting for a decision letter from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Litigasi (lanjutan)

(vi) Pada tanggal 5 April 2012, PLN Geothermal, entitas anak, menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Permata Drilling Internasional (PDI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan pekerjaan *Integrated Project Management* Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa PLN Geothermal dinyatakan harus membayar ganti rugi kepada PDI sebesar US$ 12,35 juta. Pada tanggal 18 Desember 2012, PLN Geothermal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, namun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 2013 menolak banding PLN Geothermal. Pada tanggal 10 Desember 2013, PLN Geothermal mengajukan kasasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 939K/PDT/2014 pada tanggal 1 Oktober 2015 menolak permohonan kasasi PLN Geothermal harus membayar kerugian material yang diderita PDI sebesar US$ 12,35 juta dan Rp 1 milyar.

Secara terpisah, pada tanggal 31 Agustus 2012 PLN Geothermal mengajukan permohonan arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) terhadap PDI atas permasalah yang sama, karena berdasarkan kontrak perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui BANI. Berdasarkan Putusan BANI tanggal 14 Maret 2013, permohonan PLN Geothermal tersebut dikabulkan BANI dan PDI harus membayar denda keterlambatan kepada PLN Geothermal sebesar US$ 348.279 ditambah biaya administrasi arbitrase sebesar US$ 31.560 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan mempertimbangkan bahwa adanya perbedaan putusan antara BANI dan Mahkamah Agung, sehingga PLN Geothermal mencatat provisi kerugian dalam laporan keuangan konsolidasian.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Litigation *(continued)*

(vi) On April 5, 2012, PLN Geothermal, a subsidiary, faced unlawful acts from PT Permata Drilling Internasional (PDI) in the District Court of South Jakarta relating to the work of the Integrated Project Management of Drilling Exploration Wells at PLTP Tulehu. Based on the verdict of the District Court of South Jakarta dated December 11, 2012, PLN Geothermal should pay compensation to PDI amounting to US$ 12.35 million. On December 18, 2012, PLN Geothermal appealed to the High Court of Jakarta, but the verdict of the High Court of Jakarta dated July 15, 2013, denied the appeal. On December 10, 2013, PLN Geothermal appealed to the Supreme Court of Republic of Indonesia. Supreme Court Verdict No. 939K/PDT/2014 dated October 1, 2015 rejected PLN Geothermal's cassation and PLN Geothermal is obliged to make a material loss payment to PDI amounting to US$ 12.35 million and Rp 1 billion.

Separately, on August 31, 2012, PLN Geothermal registered an arbitration case with BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) regarding the same case against PDI, because it was stated in the contract that any conflict arised should be settled through BANI. Based on the verdict of BANI dated March 14, 2013, PLN Geothermal's petition has been granted by BANI, and PDI is obligated to make late penalty payment to PLN Geothermal amounting to US$ 348,279 and arbitration administration fee of US$ 31,560 and it is final and binding.

The Company considers there are differences between the BANI and Supreme Court decisions, so PLN Geothermal recorded provision in the consolidated financial statements.

54. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Litigasi (lanjutan)

(vi) Pada tanggal 24 Pebruari 2016, Perusahaan dan PDI menandatangani Perjanjian Penyelesaian Sengketa pekerjaan pengeboran sumur eksplorasi di PLTP Tulehu. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dengan mengabaikan dua putusan di atas;
2. PLN Geothermal berkewajiban membayar denda dan ganti rugi sebesar AS$ 5.086.000.

(vii) Pada tanggal 28 Januari 2015, Perusahaan menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh Jaya Bin Jaiyan sebesar Rp 24,6 milyar dan gugatan immaterial sebesar Rp 50 milyar. Perusahaan memenangkan kasus ini di tingkat Pengadilan Negeri. Sampai dengan tangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi.

(viii) Pada tanggal 12 Pebruari 2016, PLN menghadapi gugatan dari Netti Pardosi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak terkait pembebasan lahan yang dilakukan Perusahaan atas tanah seluas 6,2 Ha untuk pembangunan PLTA Asahan III. Penggugat menuntut agar pembebasan lahan tersebut dibatalkan. Nilai gugatan ini sebesar Rp 55 milyar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Balige.

(ix) Perusahaan dan entitas anak juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi-litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Litigation *(continued)*

(vi) On February 24, 2016, the Company and PDI signed a Settlement Agreement for drilling exploratory wells in PLTP Tulehu. The contents of the agreement are as follows:

1. The Parties agree to make peace by ignoring the two decisions above;

2. PLN Geothermal is obliged to pay fines and damages amounting to US$ 5,086,000.

(vii) On January 28, 2015, the Company faced an unlawful act filed by Jaya Bin Jaiyan amounting to Rp 24.6 billion and immaterial claim amounting to Rp 50 billion. The Company won the case in the State Court. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in the appeal process in the High Court of Jakarta.

(viii) On February 12, 2016, PLN is facing a lawsuit from Netti Pardosi and Pandapotan Kasmin Simanjuntak related to land rights acquisition by the Company on an area of 6.2 Ha for PLTA Asahan III construction. Plaintiffs demanded that land rights acquisition was canceled. The lawsuit amounted to Rp 55 billion. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the case is still in process at the Balige District Court.

(ix) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, at several areas of the Company's transmission/distribution facilities, disputes with the Company's employees, and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigations are either still uncertain and there are no reliable estimate that can be made at this point, or the Company has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favour of the Company and subsidiaries, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi aset keuangan:

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

The following table discloses the details of the Company's and its subsidiaries' financial asset classifications:

	2015			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification* Aset Keuangan/*Financial Asset*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual/*Available-for-Sale*	Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Aset tidak lancar				***Non-current assets***
Piutang pihak berelasi	268.647	-	268.647	*Receivable from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunannya	8.796.977	-	8.796.977	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	68.993	-	68.993	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	-	1.687	1.687	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	9.134.617	1.687	9.136.304	*Total non-current assets*
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	23.596.339	-	23.596.339	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	120.059	-	120.059	*Short-term investments*
Piutang usaha	19.834.227	-	19.834.227	*Trade accounts receivable*
Piutang subsidi listrik	17.501.009	-	17.501.009	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang lain-lain	152.577	-	152.577	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	71.669	-	71.669	*Receivables from related parties*
Jumlah aset lancar	61.275.880	-	61.275.880	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**70.410.497**	**1.687**	**70.412.184**	***Total financial assets***

	2014			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification* Aset Keuangan/*Financial Asset*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual/*Available-for-Sale*	Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Aset tidak lancar				***Non-current assets***
Piutang pihak berelasi	98.829	-	98.829	*Receivable from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunannya	5.994.028	-	5.994.028	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	321.385	-	321.385	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	-	20.654	20.654	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	6.414.242	20.654	6.434.896	*Total non-current assets*
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	27.111.528	-	27.111.528	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	100.696	-	100.696	*Short-term investments*
Piutang usaha	19.494.867	-	19.494.867	*Trade accounts receivable*
Piutang subsidi listrik	19.280.861	-	19.280.861	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang lain-lain	245.366	-	245.366	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	282.791	-	282.791	*Receivables from related parties*
Jumlah aset lancar	66.516.109	-	66.516.109	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**72.930.351**	**20.654**	**72.951.005**	***Total financial assets***

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan milik Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Categories and classes of financial instruments *(continued)*

All of the Company's and subsidiaries' financial liabilities are classified as financial liabilities measure at amortized cost, details are as follows:

	2015	2014	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Liabilitas jangka panjang			***Non-current liabilities***
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			*Long-term liabilities - net of current maturities*
Penerusan pinjaman	29.205.236	26.453.073	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	8.194.693	8.371.933	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	21.556.619	22.758.961	*Lease liabilities*
Utang bank	77.828.870	70.400.166	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	80.043.338	81.672.556	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	7.849.063	7.343.509	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	2.566	7.331	*Payable to related parties*
Utang lain-lain	67.678	98.771	*Other payables*
Jumlah liabilitas jangka panjang	224.748.063	217.106.300	*Total non-current liabilities*
Liabilitas jangka pendek			***Current liabilities***
Utang usaha	29.004.552	28.340.097	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	3.828.338	3.812.802	*Accrued expense*
Uang jaminan langganan	11.324.898	10.828.518	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	1.113.825	857.728	*Project cost payable*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			*Current maturities of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	2.505.347	2.644.611	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	293.793	293.793	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	3.445.604	2.874.581	*Lease liabilities*
Utang bank	11.752.458	9.527.681	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.122.350	805.000	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	321.164	299.229	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	17.932.260	14.272.781	*Other payables*
Jumlah liabilitas jangka pendek	90.644.589	74.556.821	*Total current liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**315.392.652**	**291.663.121**	***Total financial liabilities***

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba (Catatan 20), dan tambahan modal disetor (Catatan 21).

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries' capital structure consists of debt (Notes 23, 24, 25, 26, 27 and 28) and equity shareholders of the holding that consists of capital stock, retained earnings (Note 20), and additional paid-in capital (Note 21).

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Manajemen risiko modal (lanjutan)

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko (Divisi MRO) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk menyusun profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. Divisi MRO bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

b. Capital risk management *(continued)*

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries' capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Company's loan covenants require among other things, the fullfilment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of debt in order to maximise their value. Therefore, in their financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Company and its subsidiaries' financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Company established a Risk Management Division (MRO Division) which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to formulate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries' management. The MRO Division is responsible to the Corporate Planning Director.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada level risikonya. Level risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Salah satu Badan Usaha Milik Negara, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset and liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ("FVTPL"). Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Group. Lihat Catatan 2 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dan Catatan 55 untuk klasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua transaksi kontrak derivatif telah diselesaikan sebelum tanggal pelaporan.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories: strategic risk, financial risk, operational risk, project risk, and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Related to financial risks, the Company has established management's policy related to hedging transactions. As an SOE, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealized gain or loss from derivative contracts. The Company and its subsidiaries' derivative contracts are classified as financial instruments measured in fair value through profit and loss ("FVTPL"). These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading, and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Company and its subsidiaries reporting period. Refer to Note 2 for the accounting policy of financial assets and liabilities, as well as Note 55 for the financial instruments classification. The Company and its subsidiaries do not apply hedge accounting on those transactions. As at December 31, 2015, all derivative contracts were settled prior to the reporting date.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahan kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 52.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there is exposures to exchange rate fluctuations.

The Company held regular discussions with Bank Indonesia (BI) to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Company then incorporated this outlook into its internal financial forecast and developed a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Company and its subsidiaries' foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 52.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company's and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

Analisa sensitifitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK 26, "Biaya Pinjaman".

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management *(continued)*

Foreign currency sensitivity *(continued)*

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalized as construction in progress assets in accordance with SFAS 26, "Borrowing Costs".

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* *)				
	2015				
	JPY		**USD**		
	10%	**-10%**	**10%**	**-10%**	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Piutang pihak berelasi	-	-	21.726	(21.726)	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	612.056	(612.056)	45.984	(45.984)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	5.542	(5.542)	184.015	(184.015)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	617.598	(617.598)	251.725	(251.725)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Penerusan pinjaman	(1.617.445)	1.617.445	(664.009)	664.009	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	(1.875.167)	1.875.167	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank	-	-	(2.832.423)	2.832.423	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	-	(5.742.169)	5.742.169	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	-	-	(612.763)	612.763	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	(7.730)	7.730	(493.365)	493.365	*Other payables*
Utang biaya proyek	(3.370)	3.370	(63.520)	63.520	*Project cost payable*
Utang usaha	-	-	(523.112)	523.112	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	(42.352)	42.352	(122.812)	122.812	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(3.546.064)	3.546.064	(11.054.173)	11.054.173	*Total financial liabilities*
Jumlah bersih	(2.928.466)	2.928.466	(10.802.448)	10.802.488	*Total - net*

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman/*Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management *(continued)*

Foreign currency sensitivity *(continued)*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)* 2015				
	EUR		Lain-lain/*Others **)*		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Kas dan setara kas	21.274	(21.274)	488	(488)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	21.274	(21.274)	488	(488)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Penerusan pinjaman	(64.161)	64.161	(17.944)	17.944	*Two-step loans*
Utang bank	(103.328)	103.328	-	-	*Bank loans*
Utang lain-lain	-	-	(23.888)	23.888	*Other payables*
Utang biaya proyek	(8.946)	8.946	-	-	*Project cost payable*
Utang usaha	(1.975)	1.975	-	-	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	(1.148)	1.148	(179)	179	*Accrued expenses*
Total liabilitas keuangan	(179.558)	179.558	(42.011)	42.011	*Total financial liabilities*
Jumlah bersih	(158.284)	158.284	(41.523)	41.523	*Total - net*

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*
**) *Other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rates prevailing at reporting the date*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)* 2014				
	JPY		USD		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Piutang pihak berelasi	-	-	16.973	(16.973)	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	410.438	(410.438)	38.163	(38.163)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	14.256	(14.256)	272.361	(272.361)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	424.694	(424.694)	327.497	(327.497)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Penerusan pinjaman	(1.491.785)	1.491.785	(561.261)	561.261	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	(1.922.515)	1.922.515	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank	-	-	(2.855.726)	2.855.726	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	-	(5.178.150)	5.178.150	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	-	-	(573.205)	573.205	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	(5.041)	5.041	(300.602)	300.602	*Other payables*
Utang biaya proyek	(14.361)	14.361	(27.275)	27.275	*Project cost payable*
Utang usaha	-	-	(486.424)	486.424	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	(33.575)	33.575	(108.225)	108.225	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(3.467.277)	3.467.277	(10.090.868)	10.090.868	*Total financial liabilities*
Jumlah bersih	**(3.042.583)**	**3.042.583**	**(9.763.371)**	**9.763.371**	***Total - net***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman/*Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management *(continued)*

Foreign currency sensitivity *(continued)*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)* 2014				
	EUR		Lain-lain/*Others **)*		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Kas dan setara kas	60.276	(60.276)	440	(440)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	60.276	(60.276)	440	(440)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Penerusan pinjaman	(85.194)	85.194	(20.054)	20.054	*Two-step loans*
Utang bank	(52.711)	52.711	-	-	*Bank loans*
Utang lain-lain	(12.991)	12.991	(28.686)	28.686	*Other payables*
Utang biaya proyek	(5.663)	5.663	-	-	*Project cost payable*
Utang usaha	(15.104)	15.104	-	-	*Trade accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	(769)	769	(213)	213	*Accrued expenses*
Total liabilitas keuangan	(172.432)	172.432	(48.953)	48.953	*Total financial liabilities*
Jumlah bersih	**(112.156)**	**112.156**	**(48.513)**	**48.513**	***Total - net***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*
**) *Other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rates prevailing at the reporting date*

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dan entitas anak dengan risiko suku bunga nilai wajar. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company and its subsidiaries to fair value interest risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

ii. Interest rate risk management *(continued)*

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Company's and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 basis points increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*)*		
	2015		
	+ 50 bp	**- 50 bp**	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	88.486	(88.486)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	436	(436)	*Short-term investments*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	32.989	(32.989)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Sub jumlah laba (rugi)	121.911	(121.911)	*Sub total income (loss)*
Liabilitas keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(29.086)	29.086	*Two-step loans*
Utang bank	(333.588)	333.588	*Bank loans*
Sub jumlah laba (rugi)	(362.674)	362.674	*Sub total income (loss)*
Jumlah laba (rugi)	**(240.763)**	**240.763**	***Total income (loss)***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman/*Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga (lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

ii. Interest rate risk management *(continued)*

Interest rate sensitivity *(continued)*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*)* 2014		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	101.668	(101.668)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	352	(352)	*Short-term investments*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	22.478	(22.478)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Sub jumlah laba (rugi)	124.498	(124.498)	*Sub total income (loss)*
Liabilitas keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(25.570)	25.570	*Two-step loans*
Utang bank	(307.896)	307.896	*Bank loans*
Sub jumlah laba (rugi)	(333.466)	333.466	*Sub total income (loss)*
Jumlah laba (rugi)	**(208.968)**	**208.968**	***Total income (loss)***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman/*Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 55.a untuk rinciannya.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Governement of the Republic of Indonesia, the Company and its subsidiaries are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries collect customers security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three months to minimise the Company's credit risk. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiaries maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's and its subsidiaries exposure to credit risk. See Note 55.a for details.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit piutang usaha

Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena piutang usaha Perusahaan tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai industri dan wilayah geografis. Perusahaan juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala. Lihat Catatan 14 untuk rincian umur piutang dan analisa cadangan penurunan nilai.

Kualitas kredit piutang subsidi listrik

Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang subsidi listrik dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

Kualitas kredit kas, deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya

Perusahaan menempatkan kas dan setara kas, deposito berjangka dan rekening deposito yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

Kualitas kredit piutang lainnya

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Perusahaan, oleh karena itu Perusahaan dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Perusahaan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management *(continued)*

Credit quality of trade accounts receivable

The Company believes there is no heightened risk of poor credit quality because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries and geographic areas. The Company also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its accounts receivable. See Note 14 for detailed information of the aging of receivables and impairment assessment of trade receivables.

Credit quality of electricity subsidy

Receivables on electricity subsidy can be fully recovered in time because it is to be collected from the Government of the Republic of Indonesia. The Company believes there is no risk of default by the Government.

Credit qualities of cash, term deposits and restricted cash

The Company placed cash and cash equivalents, term deposits and restricted cash with reputable counterparties that have good credit rating or bank standing. Consequently, the Company believes the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and other SOEs.

Credit quality of other receivables

Other receivables are to be collected from the Company's related parties and employees; as such, the Company can closely monitors the collectability of these receivables. The Company has a good historical collection rate of these financial assets.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2015. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2015. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

iv. Liquidity risk management (continued)

	2015					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan						***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	3.268.316	6.186.444	4.832.443	22.558.089	36.845.292	*Two-step loans*
Utang kepada pemerintah dan Lembaga keuangan Pemerintah non bank	750.872	2.903.581	2.697.016	5.278.641	11.630.110	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	5.843.507	11.687.014	6.747.450	12.138.817	36.416.788	*Lease liability*
Utang bank	17.513.626	35.774.915	31.128.580	38.055.597	122.472.718	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6.992.468	22.967.948	39.612.726	85.462.633	155.035.775	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	811.146	1.622.292	1.622.292	8.977.786	13.033.516	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	2.566	-	-	-	2.566	*Payable to related parties*
Utang usaha	29.004.552	-	-	-	29.004.552	*Trade accounts payable*
Utang jaminan langganan	11.324.898	-	-	-	11.324.898	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	1.113.825	-	-	-	1.113.825	*Project cost payable*
Biaya masih harus dibayar	3.828.338	-	-	-	3.828.338	*Accrued expense*
Utang lain-lain	17.932.260	67.678	-	-	17.999.938	*Other payables*
Jumlah	**98.386.374**	**81.209.872**	**86.640.507**	**172.471.563**	**438.708.316**	***Total***

	2014					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan						***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	3.402.946	5.778.914	4.718.086	20.160.403	34.060.349	*Two-step loans*
Utang kepada pemerintah dan Lembaga keuangan Pemerintah non bank	761.547	2.228.581	2.799.908	6.601.621	12.391.657	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	5.319.213	10.638.426	8.390.238	14.120.719	38.468.596	*Lease liability*
Utang bank	16.688.443	31.449.736	25.462.557	26.319.226	99.919.962	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	7.104.476	28.719.129	20.384.658	81.935.528	138.143.791	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	597.120	1.194.240	1.194.240	7.165.440	10.151.040	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	3.969	3.362	-	-	7.331	*Payable to related parties*
Utang usaha	28.340.097	-	-	-	28.340.097	*Trade accounts payable*
Utang jaminan langganan	10.828.518	-	-	-	10.828.518	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	857.728	-	-	-	857.728	*Project cost payable*
Biaya masih harus dibayar	3.812.802	-	-	-	3.812.802	*Accrued expense*
Utang lain-lain	14.272.781	98.771	-	-	14.371.552	*Other payables*
Jumlah	**91.989.640**	**80.111.159**	**62.949.687**	**156.302.937**	**391.353.423**	***Total***

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, because the instruments are fully collateralized or because they carry a market interest rate:

	2015		2014		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Pinjaman diberikan dan piutang					***Loans and receivables***
Piutang pihak berelasi	340.316	339.279	381.620	381.620	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	8.796.977	9.107.686	5.994.028	6.786.350	*Restricted cash in banks and time deposits*
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					***Liabilities at amortized cost***
Penerusan pinjaman	31.710.583	33.786.503	29.097.684	31.011.737	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non bank	8.488.486	7.644.779	8.665.726	8.284.824	*Government and non bank Government Financial Institution Loans*
Utang sewa pembiayaan	25.002.223	25.566.187	25.633.542	26.247.985	*Lease liabilities*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	89.165.688	91.994.400	82.477.556	89.549.382	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	8.170.227	9.429.477	7.642.738	7.810.637	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	2.566	2.566	7.331	7.331	*Payable to related parties*
Utang bank	89.581.328	89.580.913	79.927.847	81.361.035	*Bank loan*

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

d. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan diatas diklasifikasikan sebagai tingkat dua dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi diatas diklasifikasikan sebagai tingkat satu dalam hirarki nilai wajar.

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

d. Fair value of financial instruments *(continued)*

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level two of the fair value hierarchy.

The fair value of bonds payable is determined by quoted the closing ask price at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level one of the fair value hierarchy.

56. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menerbitkan PSAK No. 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan PSAK No. 66 (revisi 2015), "Pengaturan Bersama" yang disyaratkan untuk diaplikasikan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi standar ini sesuai dengan ketentuan transisi yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) dan PSAK No. 66 (revisi 2015) dengan berlaku surut. Lihat Catatan 2 untuk ringkasan penjelasan atas perubahan terkait.

Di tahun 2015, manajemen melakukan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa sesuai dengan ISAK 8.

Manajemen juga berpendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak yang menyajikan transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP bukan sebagai sewa, akan membuat laporan keuangan konsolidasian lebih informatif, mencerminkan fakta hukum, mencerminkan kinerja *real* perusahaan, dan lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pendapat manajemen untuk tidak menerapkan ISAK 8 tersebut telah mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris melalui surat No. 14/DK-PLN/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Dukungan Pengecualian Penerapan ISAK 8 dan PSAK 10 kepada PT PLN (Persero), Menteri BUMN melalui surat No. S-206/MBU/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Dukungan atas Pengecualian ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) dan Menteri Keuangan melalui surat No. S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Dukungan atas Pengecualian Penerapan ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero).

56. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Indonesian Financial Accounting Standards Board issued SFAS No. 24 (revised 2013), "Employee Benefits" and SFAS No. 66 (revised 2015), "Joint Arrangements" which is required to be applied for financial years beginning and or after January 1, 2015. The Company and its subsidiaries have adopted this standard in accordance with the provisions of SFAS No. 24 (revised 2013) and SFAS No. 66 (revised 2015) retrospectively. Please refer to Note 2 for a brief description of the changes.

In the year 2015, management reassessed the application of ISFAS 8 for power purchase agreements and management is of the opinion that power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8.

Management is also of the opinion that the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements which do not present the purchase of electricity from IPP as leases, will make the consolidated financial statement more informative, reflecting the legal form, reflecting real performance of the company and more useful to financial statement user. Management's opinion for not implementing ISFAS 8 has been supported by Board of Commissioners through its letter No. 14/DK-PLN/2016 dated January 27, 2016 about BOC Support on Exclusion of the application of ISFAS 8 and SFAS 10 to PT PLN (Persero), the MSOE through its letter No. S-206/MBU/03/2016 dated March 28, 2016 concerning the support on the exclusions of ISFAS 8 on PT PLN (Persero) Financial Statements and the Minister of Finance through its letter No. S-246/MK/2016 dated April 5, 2016 concerning the exclusions of application of ISFAS 8 on PT PLN (Persero) Financial Statements.

56. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Akun-akun laporan keuangan berikut ini disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari penerapan PSAK No. 24, PSAK No. 66, dan penyajian kembali ISAK 8:

56. RESTATEMENTS OF THE FINANCIAL STATEMENTS *(continued)*

The following financial statement line items were adjusted to reflect the implication of applying SFAS No. 24, SFAS No. 66, and restatement of ISFAS 8:

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2014	Penyesuaian/*Adjustment* PSAK 24/ *SFAS 24*	Penyesuaian/*Adjustment* Tanpa ISAK 8/ *Without ISFAS 8*[*1)]	Reklasifikasi karena PSAK 66/ *Reclassification due to SFAS 66*	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2014	
Laporan posisi keuangan konsolidasian						*Consolidated statements of financial position*
Aset tidak lancar						*Non-current assets*
Aset tetap	501.706.275	-	(61.304.901)	-	440.401.374	*Property, plant and equipment*
Investasi pada entitas asosiasi	2.318.945	-	-	(1.014.234)	1.304.711	*Investment in associates*
Investasi pada ventura bersama	253.648	-	-	1.014.234	1.267.882	*Investment in joint ventures*
Aset pajak tangguhan	2.899.848	3.789.133	(6.622.233)	-	66.748	*Deferred tax assets*
Liabilitas jangka panjang						*Non-current liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.752.797	-	4.880.193	-	8.632.990	*Deferred tax liabilities - net*
Utang sewa pembiayaan	128.096.528	-	(105.337.567)	-	22.758.961	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	6.654.142	-	689.367	-	7.343.509	*Electricity purchase payable*
Liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan	25.922.391	15.156.544	-	-	41.078.935	*Post-employment benefits obligation*
Liabilitas jangka pendek						*Current liabilities*
Utang usaha						*Trade accounts payables*
Pihak berelasi	12.654.991	-	16.926	-	12.671.917	*Related parties*
Pihak ketiga	13.629.164	-	2.039.016	-	15.668.180	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	9.403.153	-	(1.850.489)	-	7.552.664	*Accrued expense*
Utang sewa pembiayaan	5.116.369	-	(2.241.788)	-	2.874.581	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	291.744	-	7.485	-	299.229	*Electricity purchase payable*
Ekuitas						*Equity*
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	46.814.284	123.685	33.869.723	-	80.807.692	*Retained earnings - unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	-	(11.491.096)	-	-	(11.491.096)	*Other comprehensive income*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian						*Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Pendapatan usaha:						*Revenues:*
Subsidi listrik Pemerintah	99.303.250	-	-	(99.303.250)	-	*Government's electricity subsidy*
Beban usaha:						*Operating expenses:*
Bahan bakar dan pelumas	170.487.926	-	(17.350.992)	-	153.136.934	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	3.492.679	-	42.559.698	-	46.052.377	*Purchased electricity*
Sewa	7.866.347	-	(401.512)	-	7.464.835	*Lease*
Pemeliharaan	20.206.661	-	(3.595.200)	-	16.611.461	*Maintenance*
Kepegawaian	15.749.478	896.319	-	-	16.645.797	*Personnel*
Penyusutan	23.618.262	-	(3.707.051)	-	19.911.211	*Depreciation*
Laba/(rugi) usaha sebelum pendapatan lain-lain	45.811.221	(896.319)	(17.504.943)	(99.303.250)	(71.893.291)	*Operating income/(loss) before other income*
Pendapatan/(beban) lain-lain:						*Other income (charges):*
Subsidi listrik Pemerintah	-	-	-	99.303.250	99.303.250	*Government's electricity subsidy*
Beban keuangan	(35.971.211)	-	19.331.558	-	(16.639.653)	*Financial cost*
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih	1.319.299	-	2.116.849	-	3.436.148	*Gain on foreign exchange - net*
Laba sebelum pajak	15.900.388	(896.319)	3.943.464	-	18.947.533	*Income before tax*
Beban pajak	(4.158.778)	224.080	(1.008.757)	-	(4.943.455)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan	11.741.610	(672.239)	2.934.707	-	14.004.078	*Income for the year*

*1) Dampak dari perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan sewa menurut ISAK 8

**1) Impact of power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8*

56. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

56. RESTATEMENTS OF THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2014	Penyesuaian/*Adjustment* PSAK 24/ *SFAS 24*	Penyesuaian/*Adjustment* Tanpa ISAK 8/ *Without ISFAS 8*[*1)]	Reklasifikasi karena PSAK 66/ *Reclassification due to SFAS 66*	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2014	
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan						*Other comprehensive income for the period*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						*Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss*
Kerugian aktuaria	-	(4.871.902)	-	-	(4.871.902)	*Actuarial loss*
Manfaat pajak terkait	-	1.217.975	-	-	1.217.975	*Related income tax benefits*
Laba per saham dasar/dilusian (Dalam Rupiah Penuh)	253.833	(14.551)	63.525	-	302.807	*Basic/diluted earning per share (In Full Rupiah Amount)*

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2014	Penyesuaian/ *Adjustment*	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2014	
Laporan arus kas konsolidasian				*Consolidated statements of cash flows*
Arus kas dari aktivitas operasi				*Cash flows from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(207.506.332)	(20.367.870)	(227.874.202)	*Cash paid to suppliers*
Kas digunakan untuk aktivitas operasi	(26.061.511)	(20.367.870)	(46.429.381)	*Cash used in operations*
Pembayaran bunga	(35.381.682)	18.568.427	(16.813.255)	*Interest expense paid*
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	-	(169.085)	(169.085)	*Payments of financing related costs*
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	39.252.442	(1.968.528)	37.283.914	*Net Cash Provided by Operating Activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan				*Cash flows from financing activities*
Pembayaran utang listrik swasta	(244.719)	8.908	(235.811)	*Payments of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(4.858.116)	1.790.535	(3.067.581)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	(169.085)	169.085	-	*Payments of financing related costs*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(7.254.128)	1.968.528	(5.285.600)	*Net Cash Used in Financing Activities*

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2013	Penyesuaian/*Adjustment* PSAK 24/ *SFAS 24*	Penyesuaian/*Adjustment* Tanpa ISAK 8/ *Without ISFAS 8*[*1)]	Reklasifikasi karena PSAK 66/ *Reclassification due to SFAS 66*	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2013	
Laporan posisi keuangan konsolidasian						*Consolidated statements of financial position*
Aset tidak lancar						*Non-current assets*
Aset tetap	488.102.578	-	(60.669.793)	-	427.432.785	*Property, plant and equipment*
Investasi pada entitas asosiasi	1.836.859	-	-	(833.109)	1.003.750	*Investment in associates*
Investasi pada ventura bersama	192.207	-	-	833.109	1.025.316	*Investment in joint ventures*
Aset pajak tangguhan	5.932.474	2.347.082	(8.243.783)	-	35.773	*Deferred tax assets*
Liabilitas jangka panjang						*Non-current liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.902.785	-	2.249.889	-	6.152.674	*Deferred tax liabilities - net*
Utang sewa pembiayaan	129.718.551	-	(101.048.628)	-	28.669.923	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	6.784.275	-	681.837	-	7.466.112	*Electricity purchase payable*
Liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan	24.395.289	9.388.326	-	-	33.783.615	*Post employment benefits obligation*

*1) Dampak dari perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan sewa menurut ISAK 8

**1) Impact of power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8*

56. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

56. RESTATEMENTS OF THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2013	Penyesuaian/*Adjustment* PSAK 24/ *SFAS 24*	Tanpa ISAK 8/ *Without ISFAS 8*[*1)]	Reklasifikasi karena PSAK 66/ *Reclassification due to SFAS 66*	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2013	
Liabilitas jangka pendek						*Current liabilities*
Utang usaha						*Trade accounts payables*
Pihak berelasi	12.136.710	-	234.317	-	12.371.027	*Related parties*
Pihak ketiga	14.389.792	-	1.612.956	-	16.002.748	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	8.714.043	-	(1.656.593)	-	7.057.450	*Acrrued expense*
Utang sewa pembiayaan	4.901.469	-	(1.928.476)	-	2.972.993	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	272.454	-	6.107	-	278.561	*Electricity purchase payable*
Ekuitas						*Equity*
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	35.030.871	795.925	30.935.015	-	66.761.811	*Retained earnings - unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	-	(7.837.169)	-	-	(7.837.169)	*Other comprehensive income*

*1) Dampak dari perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan sewa menurut ISAK 8

**1) Impact of power purchase agreements are not agreements that contain lease in accordance with ISFAS 8*

57. DAMPAK DARI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK MENGANDUNG SEWA

Di tahun 2015, manajemen melakukan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa sesuai dengan ISAK 8 "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" sehingga PSAK 30, "Sewa" tidak perlu diterapkan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori sewa keuangan atau sewa operasi.

Manajemen juga berpendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak yang menyajikan transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP bukan sebagai sewa, akan membuat laporan keuangan konsolidasian lebih informatif, mencerminkan fakta hukum, mencerminkan kinerja *real* perusahaan, dan lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pendapat manajemen untuk tidak menerapkan ISAK 8 tersebut telah mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris melalui surat No. 14/DK-PLN/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Dukungan Pengecualian Penerapan ISAK 8 dan PSAK 10 kepada PT PLN (Persero), Menteri BUMN melalui surat No. S-206/MBU/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Dukungan atas Pengecualian ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) dan Menteri Keuangan melalui surat No. S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Dukungan atas Pengecualian Penerapan ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero).

Akun-akun laporan keuangan berikut ini disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan perjanjian yang seolah-olah mengandung sewa terhadap laporan keuangan konsolidasian:

57. IMPACT ON POWER PURCHASE AGREEMENT CONTAINING LEASE

In the year 2015, management reassessed the application of ISFAS 8 for power purchase agreements and management is of the opinion that power purchase agreements are not agreements that contain leases based on ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease", and hence it is not required to apply SFAS 30, "Leases" to determined whether such arrangements fall into the categories of finance lease or operating lease.

Management is also of the opinion that the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements which do not present the purchase of electricity from IPP as leases, will make the consolidated financial statement more informative, reflecting the legal form, reflecting real performance of the company and more useful to financial statement user. Management's opinion for not implementing ISFAS 8 has been supported by Board of Commissioners through its letter No. 14/DK-PLN/2016 dated January 27, 2016 about BOC Support on Exclusion of the application of ISFAS 8 and SFAS 10 to PT PLN (Persero), the MSOE through its letter No. S-206/MBU/03/2016 dated March 28, 2016 concerning the support on the exclusions of ISFAS 8 on PT PLN (Persero) Financial Statements and the Minister of Finance through its letter No. S-246/MK/2016 dated April 5, 2016 concerning the exclusions of application of ISFAS 8 on PT PLN (Persero) Financial Statements.

The following financial statement line items were adjusted to reflect the impact of the power purchase agreements are agreements that as if contain lease to the consolidated financial statements:

57. DAMPAK DARI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK MENGANDUNG SEWA (lanjutan)

57. IMPACT ON POWER PURCHASE AGREEMENT CONTAINING LEASE (continued)

	Perjanjian jual beli tenaga listrik tidak mengandung sewa/ *Power purchase Agreement not containing lease* 31 Desember/ *December 31,* 2015	Penyesuaian/ *Adjustment*	Perjanjian jual beli tenaga listrik mengandung sewa/ *Power purchase Agreement containing lease* 31 Desember/ *December 31,* 2015	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				*Consolidated statements of financial position*
Aset tidak lancar				*Non-current assets*
Aset tetap	1.115.651.990	72.227.600	1.187.879.590	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	14.300.502	14.787.769	29.088.271	*Deferred tax assets*
Liabilitas jangka panjang				*Non-current liabilities*
Utang sewa pembiayaan	21.556.619	128.065.144	149.621.763	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	7.849.063	(755.783)	7.093.280	*Electricity purchase payable*
Liabilitas jangka pendek				*Current liabilities*
Utang usaha				*Trade accounts payables*
Pihak berelasi	9.290.847	(380.409)	8.910.438	*Related parties*
Pihak ketiga	19.713.705	(1.998.142)	17.715.563	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	8.410.971	2.216.084	10.627.055	*Accrued expense*
Utang listrik swasta	321.164	(9.968)	311.196	*Electricity purchase payable*
Utang sewa pembiayaan	3.445.604	3.313.534	6.759.138	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	20.195.245	(6.637)	20.188.608	*Other payables*
Ekuitas				*Equity*
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	84.650.585	(43.428.454)	41.222.131	*Retained earnings-unappropriated*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian				*Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Beban usaha:				*Operating expense:*
Bahan bakar dan pelumas	120.587.310	17.821.005	138.408.315	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	51.690.867	(47.270.008)	4.420.859	*Purchase electricity*
Sewa	7.560.994	504.528	8.065.522	*Lease*
Pemeliharaan	17.593.261	4.268.049	21.861.310	*Maintenance*
Penyusutan	21.418.640	3.988.216	25.406.856	*Depreciation*
Rugi usaha sebelum pendapatan lain-lain	(28.915.296)	20.688.210	(8.227.086)	*Operating loss before other income*
Pendapatan (beban) lain-lain				*Other income (expense)*
Beban keuangan	(17.536.348)	(22.440.880)	(39.977.228)	*Financial cost*
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(16.229.625)	(11.096.506)	(27.326.131)	*Loss on foreign exchange - net*
Rugi sebelum pajak	(3.064.259)	(12.849.176)	(15.913.435)	*Loss before tax*
Manfaat pajak	18.649.497	3.290.445	21.939.942	*Tax benefit*
Laba tahun berjalan	15.585.238	(9.558.731)	6.026.507	*Income for the year*
Laba per saham dasar/dilusian (Dalam Rupiah Penuh)	337.017	(206.911)	130.106	*Basic/diluted earning per share (In Full Rupiah Amount)*
Laporan arus kas konsolidasian				*Consolidated statements of cash flows*
Arus kas dari aktivitas operasi				*Cash flows from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(200.977.911)	22.928.122	(178.049.789)	*Cash paid to suppliers*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	953.563	22.928.122	23.881.685	*Cash provided in operations*
Pembayaran bunga	(16.896.444)	(20.812.151)	(37.708.595)	*Interest expense paid*
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	35.173.112	2.115.971	37.289.083	*Net Cash Provided by Operating Activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan				*Cash flows from financing activities*
Pembayaran utang listrik swasta	(297.519)	6.721	(290.798)	*Payments of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.067.581)	(2.122.692)	(5.190.273)	*Payments of lease liabilities*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(753.589)	(2.115.971)	(2.869.560)	*Net Cash Used in Financing Activities*

58. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(i) Pada tanggal 25 Januari 2016, melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-82/MBU/01/2016, telah disetujui Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar 9.468.627 lembar saham dengan nilai Rp 9.468.627 juta, sehingga modal ditempatkan/disetor Perusahaan menjadi Rp 55.666.007 juta. Sejumlah 4.468.627 juta direklasifikasi dari tambahan modal disetor dan kas sejumlah Rp 5.000.000 juta telah diterima secara kas di tahun 2015.

(ii) Anggaran dasar Perusahaan diubah pada tanggal 22 Pebruari 2016 sesuai akta notaris No. 12 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar menjadi Rp 204.000.000 juta dan peningkatan sejumlah Rp 9.468.627 juta atas modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0029081 tanggal 7 Maret 2016.

(iii) Pada tanggal 21 Maret 2016, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung sehubungan dengan pemadaman listrik di Wilayah Lampung. Nilai tuntutan ganti rugi atau gugatan sebesar Rp 100.000 juta.

(iv) Pada tanggal 25 April 2016, Perusahaan menghadapi gugatan di yang diajukan oleh Ny. Halimah (binti Sairih) dkk. sehubungan dengan sengketa tanah PLTGU Muara Tawar seluas 21.160 m2. Nilai gugatan sebesar Rp 52,9 milyar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(v) Pada tanggal 24 Mei 2016, berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016, Hasan Bisri diangkat sebagai Pelaksana Tugas ("PLT") Komisaris Utama menggantikan Kuntoro Mangkusubroto.

(vi) Di tahun 2016, Perusahaan telah menandatangani beberapa perjanjian kredit dengan beberapa kreditur untuk pembiayaan pembangunan pembangkit listrik dan transmisi tertentu.

58. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

(i) Based on the Minister of State Owned Enterprises Letter No. S-82/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, the Minister of State Owned Enterprises approved the Company's additional Government's equity participation of 9,468,627 shares in the amount of Rp 9,468,627 million, increasing the Company's subscribed and paid-up capital to Rp 55,666,007 million. An amount of Rp 4,468,627 million was reclassified from additional paid-in capital and cash amounting to Rp 5.000.000 million has been received in 2015.

(ii) The articles of association of the Company were amended on February 22, 2016 by notarial deed No. 12 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, regarding the increase of the Company's authorized capital to Rp 204,000,000 million and increase of Rp 9,468,627 million of subscribed and paid up capital. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No. AHU-AH.01.03-0029081 dated March 7, 2016.

(iii) On March 21, 2016, the Company faced unlawful acts suit which categorized as Class Action suit in the District Court of Tanjung Karang, Lampung relating to the Power outage in Lampung. The amount of the claim is Rp 100,000 million.

(iv) On April 25, 2016, the Company faced unlawful act from Mrs. Halimah binti Sairih and co-claimants relating to disputes regarding 21,160 m2 PLTGU Muara Tawar land. The amount of the claim is Rp 52.9 billion. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the South Jakarta Court.

(v) On May 24, 2016, based on the Decision Letter of MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016, Hasan Bisri was appointed as Tasks Executor ("PLT") of President Commisioner to replace Kuntoro Mangkusubroto.

(vi) During the year 2016, the Company has signed several loan agreements with several lenders for the financing of construction of certain power plants and transmission lines.

59. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2016.

59. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on June 28, 2016.

****

REFERENSI KETENTUAN OJK
CROSS REFERENCE TO OJK RULE

hal. 723 - 738

REFERENSI PERATURAN OJK

CROSS REFERENCE TO OJK RULE

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
I	UMUM	GENERAL	
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	Written in good and correct Indonesian, it is recommended that the report is also presented in English	√
2	Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.	Printed on good quality paper using readable type and size of font	√
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Clearly identifies the company	√
4	Laporan Tahunan ditampilkan di website Perusahaan, minimal 4 tahun terakhir termasuk tahun pelaporan	The four most recent Annual Reports, including that of the reporting year, shall be posted on the Company's website.	√
II	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	FINANCIAL HIGHLIGHTS	
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya , mencakup: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba / rugi : a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.	Financial information in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. 1. Sales/Income 2. Income/Loss a. attributable to owners of the parent entity b. attributable to non controlling interest 3. Total comprehensive income (loss) a. attributable to owners of the parent entity b. attributable to non controlling interest 4. Income (loss) per share Note: If the company does not have any subsidiaries it shall present its total profit, loss and other comprehensive income	16 16 16 16
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, meliputi: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	Financial information in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years: 1. Total investments in associate companies; 2. Total assets 3. Total liability 4. Total equity	16 16 16 16
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Financial ratio in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	16
4	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Kapitalisasi pasar; 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 4. Volume perdagangan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).	Tables and graphs contain the following information: 1. Number of outstanding shares 2. Market Capitalization 3. Highest, lowest, and closing share price 4. Trading volume for each quarter in the previous two fiscal years (if any).	n.a 100% BUMN 100% SOE

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir , mencakup: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.	Information on total bonds, sukuk or convertible bonds outstanding in the last two financial years, encompassing: 1. Total bonds/sukuk/convertible bonds outstanding; 2. Interest rate / yield; 3. Due date; and 4. Bond / sukuk rating	 20-21 20-21 20-21 20-21
III	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	BOARD OF COMMISSIONERS' AND BOARD OF DIRECTOR REPORT	
1	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaian 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	Board of Commissioners' Report includes the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company 2. View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors 3. Assessment on Committees under the supervisions of the Board of Commissioners 4. Change in the composition of members of the Board of Commissioner and the reason of its change (if any)	 37-40 43-44 42-43 44
2	Laporan Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Analisis tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan 4. Penilaian atas kinerja Komite-komite Direksi (jika ada) 5. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	Board of Directors Report includes the following items: 1. The company's performance, encompassing among others strategic policies, comparison between achievement of results and targets and challenges faced by the company 2. Business prospects 3. Implementation of Good Corporate Governance by the company 4. Performance assessment of Directors' Committees (if any); 5. Changes in the composition of the Board of Directors(if any)	 48-61 66 67-68 63-64 64 66-67
3	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan,	Signatures of Board of Commissioners and Board of Directors members: 1. Signatures on a separate sheet of paper; 2. Statements that the Board of Commissioners and Board of Directors take full responsibility for the accuracy and veracity of the annual report contents; 3. Signed by every member of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating name and position; 4. A written explanation in a separate letter from any member of the Board of Commissioners or Board of Directors who does not sign the Annual Report.	 70-71 70-71 70-71 70-71
IV	PROFIL PERUSAHAAN	COMPANY'S PROFILE	
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Name and address	74
2	Riwayat singkat perusahaan Catatan: Apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	Brief history of the company Note: if the company has never changed its name, this must be stated.	75-77
3	Bidang usaha; 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	Line of Business: 1. The line of business as stated in the last Articles of Association 2. The line of business 3. Type of products and/or services produced	 78-79 78-79 74, 78-79

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
4	Struktur Organisasi : Nama pejabat Divisi	Organization Structure :	90-91
5	Visi dan Misi dan Budaya Perusahaan: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris. 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki	Vision and Mission and 1. Company's vision 2. Company's mission; and 3. Statement that vision and mission has been approved by the Board of Directors / Board of Commissioners 4. Statement regarding the company's corporate culture	 80 80 80 81 473-475
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili (Warga Negara) 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.	Identity and brief curriculum vitae of Board of Commissioners Members 1. Name 2. Position (including positions in other companies or institutions); 3. Age 4. Domicile (nationality) 5. Education (Field of Study and Educational Institution) 6. Work experience (position, institution, and length of employment); 7. History of appointment as a member of the Company's Board of Commissioners	 365, 512-516 365, 512-516 512-516 512-516 512-516 512-516 365, 512-516
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili (Warga Negara) 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.	Identity and brief curriculum vitae of Board of Directors members 1. Name 2. Position (including positions in other companies or institutions); 3. Age 4. Domicile (nationality) 5. Education (Field of Study and Educational Institution) 6. Work experience (position, institution, and length of employment); and 7. History of appointment as a member of the Company's Board of Directors	 393, 517-522 393, 517-522 517-522 517-522 517-522 393, 517-522
8	Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan): 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.	Total employees (two-year comparison) and description of potential development (e.g. education and training). 1. Number of employees for each organization level 2. Number of employees for each education level 3. Number of employees based on employment status 4. Description and competency development undertaken by employees to reflect equal opportunities at each level of the organization; and 5. Total costs incurred	 190, 196 197 197 192, 193-194 199

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
9	Komposisi Pemegang Saham: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	Shareholding composition 1. Names of 20 largest shareholders and their percentage ownership; 2. Details of shareholders and their percentage ownership to include: a. Name of Shareholders owning 5% or more ownership b. Directors and Commissioners owning shares c. Public Shareholders each owning less than 5% of their ownership	82 n.a 100% BUMN 100% SOE 100% BUMN 100% SOE 100% BUMN 100% SOE
10	Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham ; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	List of Subsidiaries and/or associated companies 1. Name of the Subsidiaries/associations 2. Percentage of share ownership 3. Information of the line of business of subsidiaries or associations 4. Information of Subsidiaries and associations operational status (has operated or has not operated yet).	82-83 82-83
11	Struktur grup perusahaan: Struktur grup perusahaan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup	Company Group Structure Structure describes the subsidiary, affiliates, joint ventures, special purpose vehicle (SPV) or statement of not owning any group	84-85
12	Kronologis pencatatan saham: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	Share listing chronology: 1. Share listing chronology 2. Corporate actions affecting total number of shares 3. Change in the total number of shares from initial listing to the end of the financial year 4. Name of exchange(s) where the shares are listed	n.a 100% BUMN 100% SOE n.a n.a
13	Kronologis pencatatan Efek lainnya, mencakup: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek.	Listing chronology of the other securities, covering: 1. Listing chronology of the other securities 2. Corporate actions affecting total number of other securities 3. Changes in the total number of other securities from initial listing to the end of the fiscal year 4. Name of exchange(s) where the other securities are listed 5. Securities rating	20-21 165-169 166-168 165-168 20-21 168-169
14	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	1. Name of the awards and / or certificates; 2. Year of Receiving 3. Grantor Agency of the awards and / or certificates; 4. Validity period	29-30 29-30 29-30 29-30

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
15	Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional, memuat: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	Awards and/or certifications received by company at national and international level Information includes, among other things: 1. Name of award and/or certification 2. Year awarded 3. Agency issuing the award and/or certification 4. Validity period (for certification)	29-30 29-30
16	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Halaman : apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.	Name and address of subsidiaries or branches or representative offices (if any 1. Name and address of subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office. Note: if the company does not have any subsidiaries/branches/representative offices, this must be disclosed.	530-536 530-536
17	Informasi pada Website Perusahaan: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.	Information on the Company Website: 1. Shareholder information down to the last individual shareholder; 2. Group structure (if applicable); 3. Financial performance analysis; 4. Annual financial statement (last 5 years); and 5. Profiles of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.	95-97 √ √ √ √
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	
1	Tinjauan operasi per segmen usaha: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	Review of business operations per business segment Contains information on: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, including: a. Production b. Increase/decrease of production capacity c. Sales/operating income d. Profitability	231-234 235-236
2	Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas.	Description of financial performance Comparative financial analysis of current and previous years (in narration and table), covering: 1. Current assets, non-current assets, total assets 2. Current liabilities, non-current liabilities, total liabilities 3. Equity 4. Total comprehensive profit (loss) net profit 5. Cash flow	247, 275-276 277-281 282, 283-284 285-286 287-288 290-302 302-303
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan : Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	Discussion and analysis of debt service ratio and turnover rate Explanation on: 1. Ratio solvability 2. Account receivable collectability ratio	303-305 304

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
4	Bahasan tentang struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy): 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas, dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.	Discussion of capital structure and capital structure policy Explanation on: 1. Details of capital structure, consisting of interest-bearing debt and equity; and 2. Capital structure policies	288 288-289
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko valas Catatan : apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Material commitment in capital expenditure Description of: 1. Purpose of commitment 2. Funding sources to honor commitment 3. Currency 4. Steps the company intends to take to protect against FX risk. Note: if the company has no commitments related to capital expenditure, this must be disclosed.	306 156-170, 307 307 160, 312
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	Material commitment in capital expenditure Description on: 1. Type of capital goods investment 2. The aim of capital goods investment; and 3. The value of capital goods investment incurred in the last financial year. Note: if there is no capital goods investment realization, state so	308 308 308
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang	Comparative information between targets in beginning of financial year and results achieved, also targets or projection for one year to come of revenue, profit, capital structure and others deemed important by company. Information includes, among other things: 1. Comparison between targets in beginning of financial year and results achieved 2. Targets or projections for one year to come	309 309
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan : Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan : apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	Material information and fact subsequent to date of accountant report Description of significant events subsequent to accountant report including the effects on company's future performance and business risk. Note: if there is no significant event subsequent to accountant report, state so	321
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Description of company business prospects	230
10	Uraian tentang aspek pemasaran, dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Description of the marketing associated with the general industry and economy, accompanied by quantitative supporting data from a trusted data source.	229-233, 238

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir : 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Untuk masing-masing tahun. Catatan : apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	Description of dividend policy, total cash dividend per share and total dividend per year declared and paid for the past two financial years Description includes: 1. Policy of dividend sharing 2. Total cash dividend 3. Total cash dividend per share 4. Payout ratio for each year 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. Note: if no dividend is paid, state the reason	310 310 310 310 310
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) : 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan : apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	Employee Stock Option (ESOP) and Management Stock Option (MSOP Information on the following: 1. Number of ESOP/MSOP stocks and the realization; 2. Tenure; 3. Requirement of rightful employee and/or management and 4. Exercise price. Note: if there is no such program, state so	n.a 100% BUMN 100% SOE 310
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana): 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	Application of public offering proceeds (if company is still required to make such report) Description of the following: 1. Total fund acquired 2. Proposed application of fund 3. Detail of fund application 4. Balance of fund 5. Date of GMS approval for revised fund application, if any	310-311 310-311 310-311 310-311 n.a
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan : apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	Information on material transaction involving conflict of interest and/or transaction with affiliated parties. Description of the following: 1. Name of party making transaction and nature of affiliation 2. Explanation on transaction fairness 3. Reason for making transaction 4. Realized transaction in current period 5. Company policy in relation to mechanism of transaction review 6. Compliance with related rules and regulations Note: if there is no such transaction, state so	319 319-320 319 319 320 319 319-320
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Description of changes in laws and regulations significantly affecting the company Describe changes in government policy and the effects on the company	321-323

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi Catatan : apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.	Description of changes in accounting policies Note: if there are no changes in accounting policies, state so	269-272
17	Informasi kelangsungan usaha, pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan : apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.	Business continuity information, disclose information regarding: 1. Matters that have the potential to significantly impact on the company's business continuity in the previous fiscal year; 2. The management's assessment of matters in point 1; and 3. Assumptions used by the management in making this assessment. Note: if there are no matters with the potential to significantly impact on business continuity in the previous fiscal year, the underlying assumptions on which the management has based this belief should be disclosed.	325 325 325
VI	GOOD CORPORATE GOVERNANCE GOOD CORPORATE GOVERNANCE		
1	Uraian Dewan Komisaris: Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris 3.Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)	Description of Board of Commissioners: This description must include, among other matters: 1. Board of Commissioners responsibility 2. Training program for enhancing Board of Commissioners' competence 3. Disclosure of Board Charter (work guidelines and procedures of Board of Commissioners)	367-368 385 361
2	Informasi mengenai Komisaris Independen: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	Description of Board of Directors Comprising, among others: 1. Criteria of selecting Independent Commissioner; and 2. Statement on each Independent Commissioner's independence	363-364 364
3	Uraian Direksi: Uraian memuat antara lain: 1.Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2.Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	Description of Board of Directors This description must include, among other matters: 1. Scope of duty and responsibility of each member of Board of Directors 2. Training program for enhancing Board of Directors' competence 3. Disclosure of Board Charter (work guidelines and procedures of Board of Directors)	387-388 394-397 407-408 386, 389
4	Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi : Mencakup antara lain: 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment	Assessment of members of Board of Commissioners and Board of Directors Description includes: 1. The implementation process to assess the performance of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors 2. The criteria used to assess the performance of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors 3. The party conducting the assessment	378, 405-406 378-380 406-407 378, 405

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris. 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 5. Pengungkapan indikator kinerja untuk mengukur performance dan Remunerasi Direksi	Description of remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors 1. Procedures of fixing remuneration of Board of Commissioners 2. Procedures of fixing remuneration of Board of Directors 3. Remuneration structure showing type and amount of short-term, long-term and post employment benefits for each member of Board of Commissioners 4. Remuneration structure showing type and amount of short-term, long-term and post employment benefits for each member of Board of Directors 5. Disclosure of performance indicators used to measure performance and for Directors' Remuneration	382-383 403 383-385 404-405 403, 405
6	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, memuat: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat.	Frequency and level of attendance at Board of Commissioners' Meetings, Board of Directors' Meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, including: 1. Meeting date; 2. Meeting attendees; and 3. Meeting agenda.	398-402
7	Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram.	Information on Principal Shareholders and Controlling Shareholders, either directly or not directly, through to individuals In the form of chart or diagram	82, 100% BUMN 100% SOE
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan : apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	Disclosure of affiliate relation between Board of Commissioners, Directors, and principal Shareholders and/or controlling Shareholders Information includes among other things: 1. Affiliate relation between Board of directors member and other Board of directors member 2. Affiliate relation between Board of directors member and Board of commissioners member 3. Affiliate relation between Board of directors member and Principal Shareholder and/or Controlling Shareholder 4. Affiliate relation between Board of commissioners member and other Board of commissioners member 5. Affiliate relation between Board of commissioners member and Principal Shareholder and/or Controlling Shareholder Note: if no such affiliate relation exists, state so	360 360 360 360 360
9	Komite Audit: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	Audit Committee Information includes: 1. Name and position of members 2. Qualification and experience of members 3. Independence of members 4. Duty and responsibility 5. Activity report 6. Audit Committee meeting frequency and attendance rate	411, 526-527 526, 527 410 409 413-416 411-412

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
10	Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	Nomination and Remuneration Committee Description includes: 1. Name, position, brief curriculum vitae of members 2. Independence of members 3. Duty and responsibility 4. Activity report 5. Meeting frequency and attendance rate 6. Statement regarding guidelines for nomination and/or remuneration committee/ function; and 7. Policy regarding director succession.	423, 528 423 423 424-425 423 425, 392
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain;	Other Committees under the Company's Board of Commissioners: 1. Name, position and brief biography for members of other committees; 2. Independence of other committees; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of other committees' activities 5. Meeting frequency and level of meeting attendance for other committees.	419, 524-525 418 417-418 420-422 422-423
12	Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.	Job and function of Corporate Secretary Description includes: 1. Name and brief curriculum vitae of Corporate Secretary 2. Activity report 3. Training Program in order to develop the Company's corporate secretary's competencies	429, 523 429-433 434
13	Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.	Information regarding the previous year's General Meeting of Shareholders (AGM): 1. Decisions taken by the previous year's AGM; 2. Implementation of decisions taken by the previous year's AGM in this fiscal year; and 3. Reason for any AGM decision not having been implemented.	350, 351-354 351-354 351-354
14	Uraian mengenai unit Audit Internal: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.	Internal Audit Unit Description of: 1. Name of head of internal audit unit 2. Total employees of internal audit unit 3. Professional internal audit qualification/ certification 4. Structure and position of internal audit unit 5. Activity report 6. Party appointing/terminating head of internal audit unit	451, 529 451 451 450 451-456 451

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
15	Akuntan Publik: 1. Jumlah periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan; 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	Accountant Information on: 1. Number of periods accountant has audited company's annual financial statements 2. Number of periods public accountant office has audited company's annual financial statements 3. Amount of audit fee and other attestation fees (if accountant provides attestation concurrently with audit) 4. Other accountant services besides financial audit Note: if no other service exists, state so	 456-457 456-457 456 456
16	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	Description of company's risk management Description includes: 1. Risk management system 2. Evaluation of effectiveness of risk management system 3. Risks facing the company 4. Efforts to manage such risks	 436 437 439-448 438, 439-448
17	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.	Description of internal control system Information includes: 1. Brief report on internal control system, including financial and operational control 2. Explanation on internal control system suitability with internationally acknowledged frameworks/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Evaluation of effectiveness of internal control system	 457 457 457
18	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	Description of corporate social responsibility related to environment Description includes information on: 1. Policy 2. program activities 3. Environmental certification owned by the Company	 481-482 483-489 489
19	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.	Description of corporate social responsibility related to employment, work safety and health Comprising information on, among others: 1. Policy set by the management; and 2. Activities carried out in terms of manpower, occupational health and safety practices such as gender equality and work opportunity, work facility and safety, employee turnover rate, occupational accident rate, and others.	 181-182 489-491 186-194, 198, 493-498

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
20	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; 3. Biaya yang dikeluarkan ; terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	Description of corporate social responsibility related to social and community development Information includes: 1. Policy 2. Activities Financial effect of these activities in relation to employment, work safety and health, gender equality and equal opportunity, working facilities, employee turnover, work-related accident rate, training, etc. 3. The costs incurred related to social and community development, such as utilization of local workers, development of community surrounding the company's premise, social facility and infrastructure improvement, other donations, etc.	498-499 499-505 500-501
21	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen; 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	Description of corporate social responsibility in relation to customer Information covers: 1. Policy 2. Activities Financial effect of these activities in relation to customer's safety and health, product information, means of handling customer complaints, total number of customer complaints settled, etc.	505 506-509
22	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan : 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	Description of significant cases faced by the company, subsidiaries, incumbent members of Board of Directors and Board of Commissioners Description includes: 1. Subject of cases/claims 2. Status of cases/claims settlement 3. Effects on company's financial condition 4. Administrative penalty imposed on subsidiary, members of Board of Directors and Board of Commissioners, by the related authority (capital market, bank, etc) in the last financial year Note: if there is no significant case, state sot	460-468 460-468 460-468 468
23	Akses informasi dan data perusahaan ; Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	Public access to corporate data and information A description of the availability of access to information and corporate data for the public, e.g. through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, etc.	95-98
24	Bahasan mengenai kode etik perusahan: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir ; Catatan : apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	Discussion of code of conduct Discussion includes: 1. Content of code of conduct 2. Statement that code of conduct is applicable to all organization levels 3. Dissemination of CoC 4. Types of sanctions for each CoC violation; and 5. Number of CoC violations and sanctions occurring in the previous fiscal year; Note: if there have been no violations of the CoC in the previous fiscal year, this must be disclosed.	468-469 470-472 469, 472 469 472-473 473

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
25	Pengungkapan mengenai whistleblowing system, memuat antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan : apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	Elaboration on Whistleblowing System Elaboration on whistle-blowing mechanism: 1. Method of reporting 2. Protection of whistle-blower 3. Handling of reports 4. Party that handles reports 5. Output of reports handled Note: if there have been no complaints in the previous fiscal year, this must be disclosed	 459-460 459-460 460 459 460
26	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi -> Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya	The diversity of composition of the Board of Commissioners and Board of Directors Description of the Company's policy on diversity composition of the Board Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. Note: if there is no defined policy, it must be revealed the reasons and considerations	392-393
VII	INFORMASI KEUANGAN FINANCE INFORMATION		
1	Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan	Statement of Board of Directors regarding its responsibility of financial statement	539
2	Opini Auditor Independen atas laporan keuangan	Independent auditor's opinion on financial statement	540-542
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini; memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	Description of independent auditor in opinion. Description contains: 1. Name and signature 2. Date of audited report 3. License number of Public Accountant office and license number of Public Accountant	542
4	Laporan keuangan yang lengkap; memuat: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	Full financial statement Contains all financial statement elements: 1. Balance sheet 2. Comprehensive income statement 3. Changes in equity report 4. Cash flow report 5. Notes to financial statement 6. Comparative information for the previous reporting period; and 7. Statement of financial position at the beginning of the previous period when an entity applied an accounting policy retrospectively or made a restatement of financial statement items, or when the entity reclassified items in its financial statements (if relevant).	 543-545 546-547 548 549 550-722 543-548 717-720

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
5	Perbandingan tingkat profitabilitas	Comparison of profitability ratio	546-547
6	Laporan Arus Kas; 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Presentation of cash flow report In compliance with the following: 1. Classification of activities in three categories: operating, investing and financing activities 2. Usage of direct method in reporting cash flow from operating activities 3. Separate presentation of cash income/ expense in current year in operating, investing and financing activities 4. Disclosure of non-cash activities in notes to financial statement	 549, 559 549, 559 549 549
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi; 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	Description of accounting policy Description contains at least: 1. Statement of compliance with SFAS 2. Basis of financial statement measurement and presentation 3. Income tax 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments	 559 559-560 584-585 583-584 564-569
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait, dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	Disclosure of related-party transactions Items to be disclosed include: 1. Name of related parties, nature of relationship to related parties 2. Value of transactions and percentage to relevant total income and expense 3. Transaction balance and percentage to total assets or liabilities	 563-564, 674-676 676-678 676-678
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan; 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian dst. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Disclosure of tax obligations Items to be disclosed include: 1. Relation between tax expense (income) and accounting profit 2. Reconciliation between fiscal and current tax assessment 3. Statement that reconciled taxable profit is the basis of making corporate annual income tax return 4. Breakdown of deferred tax assets and liabilities recognized in balance sheet for each period 5. Statement whether or not there is any tax dispute	 656-660 584-585, 657 657 659-660 661-664

	KETENTUAN OJK/KRITERIA ARA	OJK REGULATIONS/ARA CRITERIA	HALAMAN PAGE
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap. 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya. 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	Disclosure of Property, plant and equipment Items to be disclosed: 1. Depreciation method applied 2. Description of accounting policy adopted between fair value model and cost model 3. Significant method and assumption adopted in estimating fair value of Property, plant and equipment (revaluation model) or disclosure of fair value of Property, plant and equipment (cost model) 4. Reconciliation of recorded gross amount and cumulative depreciation of Property, plant and equipment at beginning and at end of period by showing addition, reduction and reclassification	 571 570-571 570-572, 595-604 593-594
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	Disclosure of operating segment-related matters Items to be disclosed include: 1. General information that comprises factors referred to for identifying the reported segments; 2. Information of profit and loss, assets and liability of reported segments; 3. Reconciliation of the total segment revenue, the reported segment profit and loss, segment assets, segment liabilities and material elements of other segments against the number of entities involved; and 4. Disclosure of entity level, comprising information on product and/or service, geographic area and main customers.	 680-681 681 324-325 592
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Disclosure of financial instruments 1. Details of financial instruments held by classification; 2. Fair value of each group of financial instruments 3. Risk management policy; 4. Explanation on risks related to financial instruments: market risks, credit risks and liquidity risks 5. Quantitative analysis on risks related to financial instruments	564-568, 704-705 704-705,716-717 706-707 708-715 708-715
13	Penerbitan laporan keuangan	Publication of financial statement	722

PT PLN (Persero)
Electricity for a Better Life

2015
LAPORAN TAHUNAN
Annual Report

PT PLN (PERSERO)
Jl. Trunojoyo Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. (62 21) 7251234, 7250550, 7261122
Fax. (62 21) 7221330

Website: www.pln.co.id